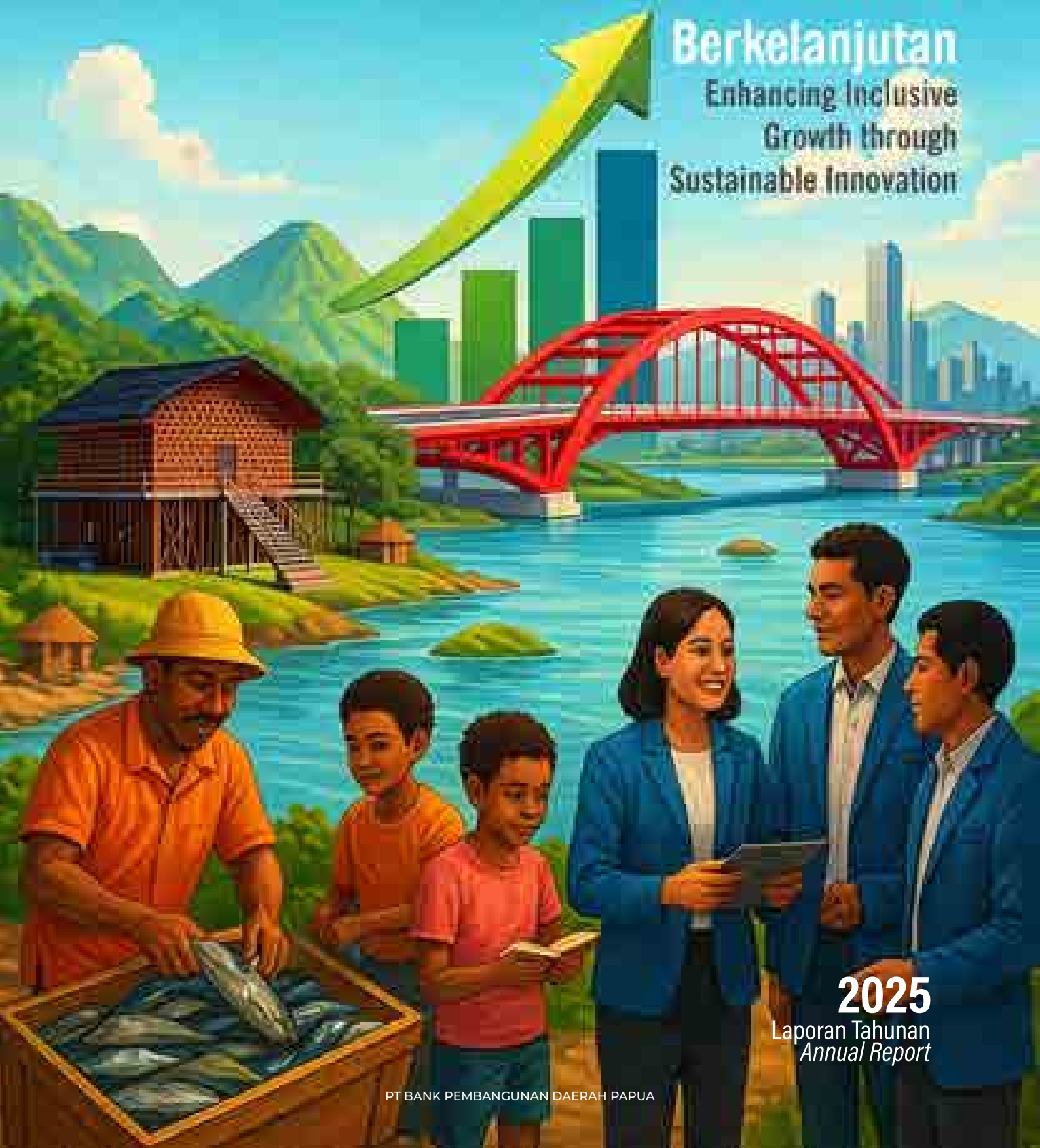


Memperkuat Pertumbuhan Inklusif melalui Inovasi Berkelanjutan

Enhancing Inclusive
Growth through
Sustainable Innovation



2025

Laporan Tahunan
Annual Report



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Memperkuat Pertumbuhan Inklusif melalui Inovasi Berkelanjutan

Enhancing Inclusive Growth through Sustainable Innovation

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Bank Papua untuk semakin mengukuhkan komitmen dalam menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan transformasi digital yang telah dijalankan, Bank Papua tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen UMKM, masyarakat pedesaan, dan komunitas adat. Inovasi produk dan layanan terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan yang beragam, mulai dari akses perbankan digital yang lebih mudah hingga pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha produktif.

Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap langkah strategis, Bank Papua hadir sebagai mitra terpercaya bagi masyarakat Papua dalam mencapai kesejahteraan bersama. Pertumbuhan bukan hanya tentang angka, melainkan tentang dampak nyata bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan, yang menjadi warisan bagi generasi mendatang.

The year 2025 is pivotal for Bank Papua as it seeks to enhance its commitment to fostering inclusive and sustainable growth. In alignment with its ongoing digital transformation, Bank Papua is dedicated not only to achieving robust financial performance but also to ensuring that the benefits of growth are distributed across all sectors of society, including micro, small, and medium enterprises (MSMEs), rural communities, and indigenous populations. The bank continuously develops innovative products and services to meet diverse needs, from facilitating access to digital banking to providing financing that supports the growth of productive businesses.

By embedding sustainability principles into every strategic initiative, Bank Papua positions itself as a trusted partner for the Papuan people in pursuing shared prosperity. Growth encompasses more than just financial metrics; it is about creating a tangible impact on individuals' lives and the environment, thereby establishing a legacy for future generations.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2021

Sinergi dan Inovasi di Era Normal Baru
Synergy and Innovation in the New normal



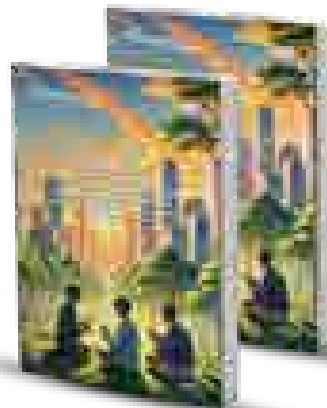
2022

Tumbuh Lebih Cepat dan Berkelanjutan
Grow Faster and Sustainably



2023

Menjaga Pertumbuhan,
Mempertahankan Kinerja
Maintaining Growth, Holding Performance



2024

Menjaga Pertumbuhan,
Mempertahankan Kinerja
Maintaining Growth, Holding Performance



Pendahuluan
Introduction



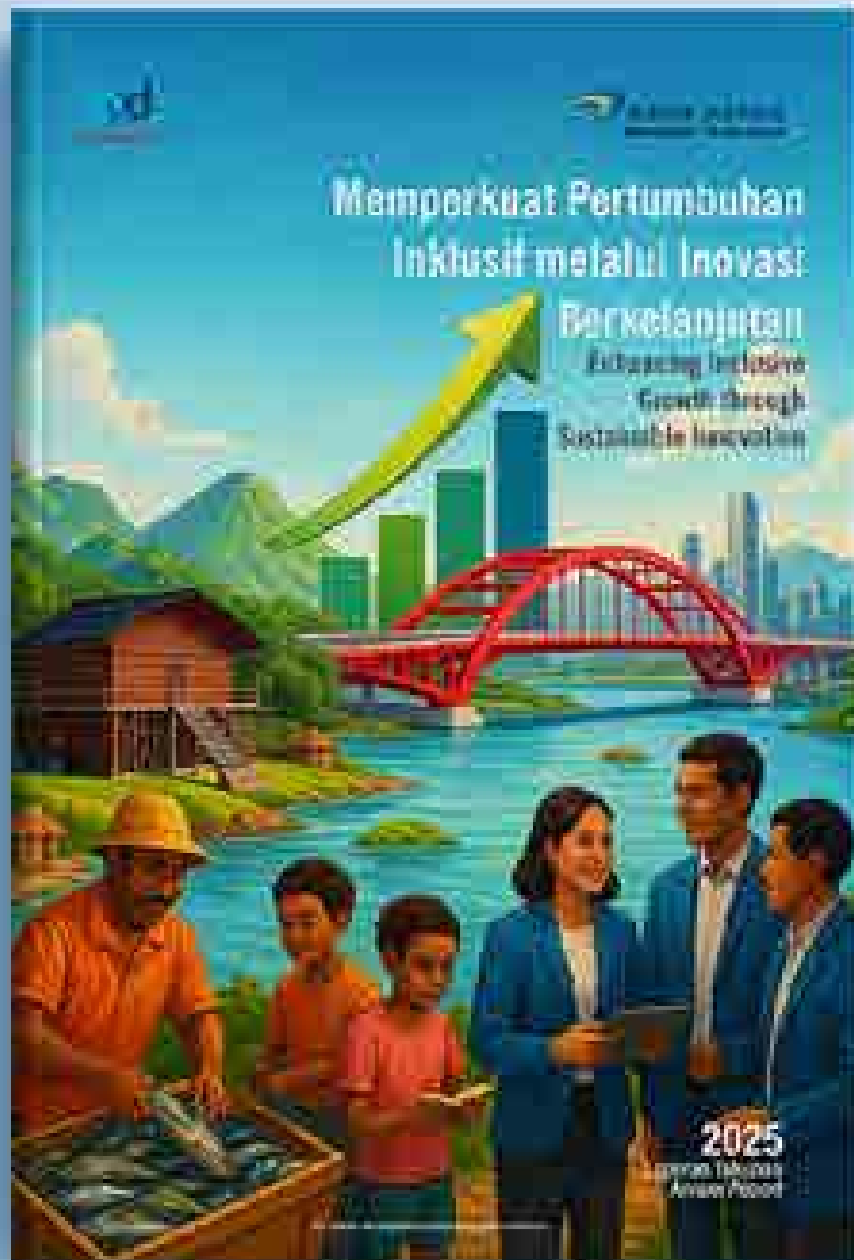
Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support



Sekilas Tentang Bank Papua

Bank Papua Highlight

TOTAL ASET
Total Assets

Rp34,34
Triliun - Trillion



Alamat Kantor Pusat
Head Office Address



Jalan Achmad Yani Nomor 5-7
Kota Jayapura 99111
Provinsi Papua

Segmen Usaha
Business Segment



- Mikro
- Ritel (UMKM & Konsumer)
- Korporasi
- Layanan Treasury
- Jasa Bisnis & Kelembagaan

- *Micro*
- *Retail (MSME & Consumer)*
- *Corporation*
- *Treasury Services*
- *Business & Institutional Services*

Jumlah Kantor
Office Networks



1
Kantor Pusat
Head Office

2.408
Jaringan Kantor
Office Network

Jumlah Pegawai
Number of Employees



2.526
Orang
People

Tanggal Pendirian
Establishment Date



13 April 1966

Produk & jasa
Products & Services



- Produk Simpanan
- Produk Pinjaman
- Jasa Perbankan

- *Savings Products*
- *Lending Products*
- *Banking Services*



Pendahuluan
Introduction



Keuangan & Manajemen
Financial & Management



Produk & Jasa
Products & Services



Pengawasan & Tata Kelola
Corporate Governance

Bidang Usaha
Business fields



Jasa
Perbankan
*Banking
Services*

Kepemilikan Saham
Shareholding



24,53%

Saham Seri A - *Series A Shares*
Pemerintah Provinsi Papua
Papua Provincial Government

15,12%

Pemerintah Provinsi Papua Barat
West Papua Provincial Government

58,11%

Pemerintah Kota dan Kabupaten se
Tanah Papua
*Municipal and Regency
Governments Across Papua*

2,25%

Saham Seri B *Series/ B Shares*
KSU Bank Papua Berdikari



Jejak Langkah

Milestones

1966 Bank Pembangunan Daerah Irian Barat didirikan pada tanggal 13 April 1966.

Bank Pembangunan Daerah Irian Barat was established on April 13, 1966

1970 Disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat No.1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada Lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No.42 Tahun 1970.

Ratified to Local Regulation of West Irian Province No. 1 the Year 1970 dated March 23, 1970, on Local Gazette of West Irian Province No. 43 the Year 1970

1992 Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp4juta.

According to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, No. Kep.283/DDK/II/1972 dated July 15, 1972, on licensing Bank Pembangunan Daerah Irian Barat, located in Jayapura, performs banking operations as other public/general banks with a first authorized capital of IDR4 million.

1996 Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) No.7 Tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp50 miliar.

According to Local Regulation (PERDA) No. 7, the year 1996, Bank Papua's authorized capital was changed to IDR50 billion.

2002 Berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi No.23 tahun 2002.

Amendment to Limited Company (Ltd) is then stated in the Local Regulation No. 2 2002, dated May 21, 2002, on PT Bank Pembangunan Daerah Papua. It was promulgated in the Local Province Gazzete No. 23 in 2002.

2008 RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No.07/SK/RUPS- BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp1 triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH tanggal 8 Agustus 2008 No.08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 20.000 lembar saham.

The GMS Resolutions of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. 07/SK/RUPS-BPD/V/2007, the authorized capital of the Bank Papua, is agreed to be IDR 1 trillion. According to Deeds of Notary and Land Deed Maker Official Heryeni Lilis, SH, dated August 8, 2008, No.08, the company's legal capital is divided into 200,000 shares, consisting of 180,000 series A shares and 20,000 series B shares.

2010 SK RUPS No.11/SK/RUPS-BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua menjadi Rp2 triliun, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-30935.AH.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

The GMS Resolutions No. 11/SK/RUPS-BPD/III/2010, dated March 29, 2010, on the amendment of the Bank Papua's authorized capital to IDR 2 trillion, then was decided by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-30935.AH.01.02. 2010 on Approval of Amendment of the Company's Articles of Association.

2013 RUPS tanggal 21 Agustus 2013 perubahan modal dasar menjadi Rp4 triliun yang telah disahkan dalam SK RUPS No.02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peningkatan Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

The GMS dated August 21, 2013, the legal capital of Bank Papua changes to IDR4 trillion was ratified in the GMS resolutions No.02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 dated August 21, 2013, concerning the legal capital of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

2014 RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No.4/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2014 pengambilan keputusan di luar RUPS (Circular Resolution) untuk pengesahan modal disetor oleh pemegang saham.

The GMS of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. 4/ SK/RUPS-LB/BPD/XI/2014 decision-making outside the GMS (Circular Resolution) for the ratification of Paid-in capital by shareholders.

2015 Pada tahun 2015 ini Bank Papua mengembangkan program greemen bank dan sparkasen melalui program mencetak 1.000 wirausaha asli Papua yang dapat menciptakan pioneer sebagai kader yang dapat menjadi motivator, trainer, wirausahawan yang menjadi sumber inspirasi masyarakat Papua dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah yaitu Papua BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA.

In 2015, Bank Papua developed the bank greemen and sparkasen program through a program of printing 1000 original Papuan entrepreneurs that can create a pioneer as a cadre that can be a motivator, trainers, and entrepreneurs who became a source of inspiration for Papuan people in realizing the vision of the Local Government that is Papua RISE, INDEPENDENT AND PROSPEROUS.

2016 Bank Papua sukseskan "Program 1000 Wirausaha Asli Papua".

Bank Papua succeeds "Program of 1000 Indigenous Papuan Entrepreneurs"

2017 Sesuai RUPS LB tahun 2017, tanggal 6 Maret 2017, manajemen baru Bank Papua resmi dilantik. Manajemen bertekad menjadikan Bank Papua sebagai Bank yang sehat dengan menitikberatkan kepada pengembangan Sumber Daya Manusia dan bekerja sesuai SOP serta bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dibentuk 2 (dua) Divisi baru yaitu Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Pembinaan Cabang.

According to the 2017 Extraordinary GMS dated March 6, 2017, the new management of Bank Papua was officially inaugurated. The administration is determined to make Bank Papua a soundness bank by focusing on human resource development, working as SOP, and being responsible for improving company performance. Formed 2 (two) new divisions: the Business Risk Division and the Branch Development Division.



2018

- Sesuai RUPS Sirkuler Bank Papua No.44 tanggal 25 April 2018, telah ditetapkan 4 (empat) orang Dewan komisaris baru Bank Papua.
- Perubahan Nomenklatur pada Struktur Organisasi Bank Papua.
- *According to circular GMS of Bank Papua No.44 dated April 25, 2018, 4 (four) new Board of Commissioners of Bank Papua have been appointed.*
- *Changes in the Nomenclature of Bank Papua Organizational Structure*

2019

Fokus pada 3 bidang utama yaitu 1) *Human Capital Management*, 2) *Corporate Culture* dan 3) *Risk Management & Asset Recovery* untuk menjadikan Bank Papua menjadi Bank Regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

Focus on 3 main areas, namely 1) Human Capital Management, 2) Corporate Culture, and 3) Risk Management & Asset Recovery, to make Bank Papua a Local bank that is strong, reliable, competitive, and supports economic development in the Land of Papua.

2020

Bank Papua ditetapkan sebagai Top 50 Bank 2020 dalam Top Bank Award 2020 oleh ICONOMICS. Tahun 2020 Bank Papua juga telah melakukan Migrasi sistem OLIB's menjadi versi 6 untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan persaingan dalam memasuki era digitalisasi.

Bank Papua is designated as the Top 50 Bank 2020 in Top Bank Award 2020 by ICONOMICS. In 2020 Bank Papua also migrated OLIB's system into version 6 to adapt to changes and competition in the digitalization era.

2021

- Bank Papua melaunching aplikasi M-Banking, QRIS dan Laku Pandai Bank Papua
- Bank Papua meraih penghargaan TOP BUMD 2021 dan TOP Digital Award
- *Bank Papua launched M-Banking, QRIS, and Branchless Banking Bank Papua applications.*
- *Bank Papua won the TOP BUMD 2021 award and the TOP Digital Award.*

2022

Bank Papua fokus pada penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis melalui rekrutmen ODP (Officer Development Program) dan tenaga PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) baik internal maupun eksternal serta pengembangan dan penyempurnaan Produk Digital.

Bank Papua focuses on providing quality Human Resources. It is adapted to business development through internal and external personnel recruitment through ODP (Officer Development Program) and PKWT (Specific Time Work Agreement) and the development and improvement of Digital Products.

2023

Budaya Perusahaan Bank Papua mengalami perubahan dengan dikeluarkannya SK Direksi Nomor:11/DIR-BPD/III/2023 tanggal 6 Maret 2023. Budaya Perusahaan "SA IKHLAS" didasarkan pada Semangat Asah, Asih, dan Asuh.

Bank Papua's corporate culture underwent a transformation following the issuance of Board of Directors Decree Number 11/DIR-BPD/III/2023, dated March 6, 2023. The corporate culture, termed "SA IKHLAS," is founded on the principles of honing, compassion, and nurturing.

2024

Bank Papua memperkuat fondasi bisnisnya melalui transformasi dan inovasi, memperluas pasar, serta berusaha menjadi pemain utama dalam bidang pembayaran dan transaksi di Papua.

Bank Papua strengthens its business foundations through transformation and innovation, expands its market presence, and aims to become a leading player in the payments and transactions sector in Papua.

2025

Bank Papua memperkuat transformasi digital dan keberlanjutan, mendorong pertumbuhan inklusif melalui inovasi layanan serta pembiayaan UMKM, pedesaan, dan komunitas adat untuk kesejahteraan berkelanjutan.

Bank Papua enhances its digital transformation and sustainability initiatives, promoting inclusive growth through innovative services and financing for MSMEs, rural areas, and indigenous communities, fostering sustainable prosperity.



Kontribusi Terbaik

Best Contribution

BANK PAPUA HADIR DI FESTIVAL PERLINDUNGAN UMKM 2025

BANK PAPUA PARTICIPATED IN THE 2025 MSME PROTECTION FESTIVAL



Jayapura, 12 November 2025 — Bank Papua hadir dalam Festival Perlindungan UMKM 2025 yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM RI, menegaskan komitmennya memperkuat daya saing pelaku usaha di Papua. Melalui pembinaan terhadap sekitar 1.000 UMKM di Jayapura, dan wilayah lain, Bank Papua terus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, dengan keyakinan bahwa kemajuan UMKM akan menggerakkan Papua menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Jayapura, November 12, 2025 — Bank Papua participated in the 2025 MSME Protection Festival, alongside the Indonesian Minister of Cooperatives and SMEs, reinforcing its commitment to enhancing the competitiveness of businesses in Papua. By mentoring approximately 1,000 MSMEs in Jayapura and surrounding areas, Bank Papua continues to foster economic growth, grounded in the belief that the advancement of MSMEs will lead Papua toward a more prosperous future.

PELUNCURAN SP2D ONLINE

LAUNCH OF SP2D ONLINE

Jayapura, 18 Juli 2025 — Bank Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua resmi meluncurkan Aplikasi SP2D Online sebagai wujud komitmen mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pj. Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui layanan yang modern, real-time, dan terintegrasi, Bank Papua siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang semakin responsif dan berstandar tinggi.

Jayapura, July 18, 2025 — Bank Papua, in collaboration with the Papua Provincial Government, officially launched the SP2D Online application, demonstrating its commitment to accelerating the digitalization of regional financial management. Acting Governor of Papua, Agus Fatoni, highlighted that this innovation represents a significant step toward achieving more effective, efficient, transparent, and accountable governance. Through modern, real-time, and integrated services, Bank Papua is positioned to be a strategic partner for the government in developing a regional financial ecosystem that is increasingly responsive and meets high standards.



BANK PAPUA TERIMA PENGHARGAAN DALAM PTBI 2025

BANK PAPUA RECEIVED AWARDS AT PTBI 2025



Jayapura, 3 Desember 2025 — Bank Papua kembali menegaskan perannya dalam mendukung transformasi sistem pembayaran nasional dengan meraih dua penghargaan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Papua (PTBI) 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Bank Papua dalam mendorong elektronifikasi transaksi daerah serta peningkatan layanan kas Rupiah di seluruh wilayah Papua. Capaian ini melengkapi berbagai inisiatif digital Bank Papua yang sejalan dengan program Bank Indonesia untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai dan memperkuat stabilitas layanan pembayaran di daerah.

Jayapura, December 3, 2025 — Bank Papua reaffirmed its role in supporting the transformation of the national payment system by receiving two awards at the 2025 Bank Indonesia Papua Annual Meeting (PTBI). These awards recognize Bank Papua's commitment to promoting the electrification of regional transactions and enhancing Rupiah cash services throughout Papua. This achievement complements Bank Papua's various digital initiatives, which are in alignment with Bank Indonesia's program to expand the use of cashless transactions and strengthen the stability of payment services in the region.

PENYERAHAN BANTUAN CSR BINA LINGKUNGAN KEAGAMAAN

DISTRIBUTION OF CSR ASSISTANCE FOR RELIGIOUS COMMUNITY DEVELOPMENT



Jayapura, 9 Desember 2025 — Bank Papua melalui program CSR Bina Lingkungan Keagamaan menyalurkan bantuan perlengkapan ibadah kepada GSJA Keluarga Allah Abepura sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan dan aktivitas kerohanian jemaat. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Departemen Humas & CSR Bank Papua dan diharapkan mampu memperkuat peran gereja dalam melayani masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Bank Papua yang secara konsisten mendukung pembangunan sosial-keagamaan di Papua, termasuk pemberdayaan komunitas lokal melalui program berkelanjutan yang telah dijalankan di berbagai wilayah.

Jayapura, December 9, 2025 — Bank Papua, through its CSR program for Religious Community Development, distributed prayer equipment to the GSJA Keluarga Allah Abepura to support the congregation's spiritual services and activities. The assistance was distributed by the Public Relations & CSR Department of Bank Papua and is intended to strengthen the church's role in community service. This initiative reflects Bank Papua's ongoing commitment to support socio-religious development in Papua, including the empowerment of local communities through sustained programs implemented across various regions.



Pencapaian Kinerja Penting 2025

Key Performance Achievements

6,94%

Total Aset Total Assets

2024: Rp32,11
2025: Rp34,34

Triliun-Trillion

Total aset meningkat didorong pertumbuhan kredit, penempatan dana, dan kas, meskipun penurunan giro pada Bank Indonesia menahan laju ekspansi aset secara keseluruhan.

Total assets increased, driven by growth in loans, placements, and cash. However, a decline in current accounts with Bank Indonesia limited the overall asset expansion.

-4,66%

Tabungan Savings

2024: Rp9,43
2025: Rp8,99

Triliun-Trillion

Penurunan tabungan dipengaruhi kontraksi tabungan Simpeda, Dana Desa, dan KPE, mencerminkan pergeseran dana ke instrumen berimbal hasil lebih tinggi serta penyesuaian likuiditas nasabah.

The reduction in savings resulted from declines in Simpeda, Village Fund, and KPE savings, reflecting a transition of funds to higher-yielding instruments and adjustments in customer liquidity.

6,01%

Dana Pihak Ketiga Third Party Funds

2024: Rp24,69
2025: Rp26,17

Triliun-Trillion

Dana Pihak Ketiga meningkat didorong peningkatan deposito yang signifikan, meskipun penurunan giro dan tabungan mencerminkan pergeseran preferensi nasabah ke instrumen berimbal hasil lebih tinggi.

Third party funds increased significantly due to a substantial rise in time deposits. Nonetheless, the decrease in current accounts and savings indicates a shift in customer preferences towards higher-yielding instruments.

76,31%

Deposito Time Deposits

2024: Rp4,67
2025: Rp8,24

Triliun-Trillion

Deposito meningkat signifikan didorong lonjakan tenor 3 bulan dan 12 bulan, mencerminkan preferensi nasabah terhadap instrumen berimbal hasil lebih tinggi dalam jangka pendek.

Deposits saw significant growth, driven by an increase in 3-month and 12-month tenors, indicating a preference for higher-yielding short-term instruments among customers.

-15,52%

Giro Demand Deposits

2024: Rp10,58
2025: Rp8,94

Triliun-Trillion

Penurunan giro terutama berasal dari penarikan dana pihak ketiga dan segmen swasta, meskipun peningkatan dana pihak berelasi membantu menahan kontraksi lebih dalam.

The decline in current accounts was primarily due to withdrawals of third-party funds and from the private sector. However, an increase in related party funds helped mitigate a more severe contraction.

4,17%

Laba Bersih Net Profit

2024: Rp452,68
2025: Rp471,57

Miliar-Billion

Laba bersih meningkat didorong pertumbuhan pendapatan operasional dan efisiensi beban, meskipun tekanan biaya bunga dan penurunan pendapatan bunga bersih masih membatasi peningkatan.

Net profit increased due to growth in operating income and improved expense efficiencies. However, pressure from interest expenses and a decline in net interest income limited overall growth.



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Summary of Key Financial Data

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

NERACA | BALANCE SHEET

dalam jutaan rupiah-in millions of rupiah

KETERANGAN	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025- 2024 (%)	CAGR 2021- 2025 (%)	Asset
ASET								ASSETS
Kas	2.227.857	1.463.869	1.529.561	1.380.956	1.503.245	52,19%	10,34%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.136.671	3.343.534	3.632.470	3.799.724	1.478.485	-66,00%	-6,36%	Demand De- posits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	85.304	61.529	74.987	38.240	48.125	38,64%	15,39%	Demand De- posits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.603.712	650.197	2.405.687	1.292.688	1.417.687	300,45%	16,41%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.881.207	3.858.393	3.681.050	1.805.675	1.625.316	26,51%	31,64%	Securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		901.000	100.818	-	-	-100%	0,00%	Securities sold under agreements to repurchase
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	737.935	901.000	1.284.732	3.377.196	2.616.190	0,00%	-27,12%	Securities pur- chased under agreements to resell
Pinjaman yang diberikan - bersih	22.081.768	21.162.746	18.973.598	17.519.703	16.890.254	4,34%	6,93%	Loans granted - net
Aset tetap - bersih	260.471	241.414	241.622	254.463	267.547	7,89%	-0,67%	Fixed assets - net
Aset Lain-lain	328.415	431.871	351.391	343.472	275.711	-23,96%	4,47%	Other Assets
Total Aset	34.343.340	32.114.553	32.275.916	29.812.117	26.122.560	6,94%	7,08%	Total Assets
LIABILITAS	-							
Liabilitas segera	422.928	954.246	1.114.211	719.338	679.229	-55,68%	-11,17%	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	26.170.639	24.686.089	25.604.648	24.130.480	20.784.616	6,01%	5,93%	Customer deposits
Simpanan dari bank lain	1.028.594	578.177	743.905	525.638	499.150	77,90%	19,81%	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	1.569.504	75.985	83.064	87.705	93.747	1965,55%	102,28%	Loans received
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	875.460	95.416	-	-	-100,00%	0,00%	Securities sold under agreement to repurchase
Liabilitas lain-lain	502.343	466.222	510.861	575.610	634.406	7,75%	-5,67%	Other liabilities
Total Liabilitas	29.694.008	27.636.179	28.152.105	26.038.771	22.691.148	7,45%	6,96%	Total Liabilities



KETERANGAN	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025- 2024 (%)	CAGR 2021- 2025 (%)	Asset
EKUITAS	-							EQUITY
Modal saham	2.848.205	2.770.850	2.705.130	2.659.920	2.552.095	2,79%	2,78%	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	32.269	68.751	55.661	36.581	97.566	-53,06%	-24,16%	Additional Paid-in Capital
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek obligasi setelah pajak	34.199	(2.544)	8.670	(2.646)	2.093	-1.444,39%	101,03%	Unrealized Gains on Bonds After Tax
Saldo Laba	-							Retained Earnings
Telah ditentukan penggunaannya	1.528.860	1.347.788	1.155.628	961.210	802.569	13,43%	17,48%	Appropriated
Belum ditentukan Penggunaannya	205.800	293.529	198.723	118.281	-22.912	-29,89%	0,00%	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	4.649.332	4.478.374	4.123.811	3.773.346	3.431.412	3,82%	7,89%	Total Equity
	-							
TOTAL LIABILITAS + EKUITAS	34.343.340	32.114.553	32.275.916	29.812.117	26.122.560	6,94%	7,08%	TOTAL LIABILITIES + EQUITY

LABA RUGI

INCOME AND LOSS

Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025-2024 (%)	CAGR 2021-2025 (%)	Profit Or Loss And Comprehensive Income
I. OPERASIONAL								I. OPERATIONS
Pendapatan Bunga	2.493.930	2.306.693	2.338.789	1.936.600	1.835.038	8,12%	7,97%	Operating Income Interest Income
Biaya Bunga	(670.405)	(312.448)	(446.529)	(355.397)	(381.717)	114,57%	15,12%	Operating Expense Interest Expense
Pendapatan Operasional Bunga Bersih	1.823.525	1.994.245	1.892.260	1.581.202	1.453.322	-8,56%	5,84%	Net Operating Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	529.874	365,031	326,292	365,729	382,041	45,16%	8,52%	Operating Income Other Than Interest
Beban Operasional Lainnya	(1,719,141)	(1,779,056)	(1,675,859)	(1,422,834)	(1,409,559)	-3,37%	5,09%	Operating Expense Other Than Interest
Beban Operasional Selain Bunga Bersih	(1.189.268)	(1.414.025)	1.349.567	1.057.105	1.027.519	-15,89%	3,72%	Net Operating Expense
LABA OPERASIONAL	634.258	580.220	544.118	523.458	427.147	9,31%	10,39%	OPERATING INCOME
II. NON OPERASIONAL								II. NON OPERATIONS
Pendapatan Non Operasional	4.867	3.518	2.241	6.116	20.860	38,33%	-30,50%	Non Operating Income
Beban Non Operasional	(33.866)	(672)	(753)	(23.755)	(714)	4939,53%	162,43%	Non Operating Expense
LABA NON OPERASIONAL	(28.999)	2.846	1.488	(17.639)	20.146	-1.118,94%	0,00%	NON OPERATIONAL INCOME



Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025-2024 (%)	CAGR 2021-2025 (%)	Profit Or Loss And Comprehensive Income
LABA TAHUN BERJALAN	605.259	583.067	545.607	505.819	447.294	3,81%	7,85%	CURRENT YEAR PROFIT
Pajak Kini	(123.085)	(142.932)	(121.723)	(121.968)	(102.183)	-13,89%	4,76%	Current Tax
Manfaat Pajak Tangguhan	(10.607)	12.545	3.139	4.986	7.424	-184,55%	0,00%	Deferred Tax Benefit
Beban Pajak	(133.692)	(130.387)	(118.584)	(116.982)	(94.759)	2,53%	8,99%	Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	471.567	452.681	427.023	388.836	352.535	4,17%	7,54%	CURRENT YEAR NET INCOME
Pendapatan (Beban) Penghasilan Komprehensif	(69.873)	57.936	53.571	100.151	54.100	-220,60%	0,00%	Comprehensive Income (Expense)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	401.693	510.616	480.594	488.987	406.634	-21,33%	-0,31%	Comprehensive Income (Loss) for the Year
Laba (Rugi) Per Saham** (Rupiah penuh)								Earnings (Loss) Per Share** (full Rupiah)
Laba (Rugi) Operasional per saham	1,113,434	1,047,008	1,005,716	983,973	836,855	6.34%	7.40%	Operational Income (Loss) per share
Laba (Rugi) Bersih per saham	827,831	816,861	789,284	730,918	690,675	1,43%	4.63%	Net Income (Loss) per share

ARUS KAS

CASH FLOW

Dana Pihak Ketiga	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025-2024 (%)	CAGR 2021-2025 (%)	Third-party funds
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.864.227)	59.176	194.777	2.381.397	766.363	-3.250,31%	0,00%	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.793.121)	(143.173)	(41.910)	(39.237)	(50.341)	1,152,42%	144,30%	Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2.238.248	(284.089)	(134.769)	(153.094)	(89.724)	-887,87%	0,00%	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.419.100)	(368.086)	18.098	2.189.065	626.298	285,53%	0,00%	Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.868.932	5.237.018	5.218.920	3.029.855	2.403.558	-7,03%	19,30%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	3.449.832	4.868.932	5.237.018	5.218.920	3.029.855	(29,15%)	3,30%	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year



RASIO KEUANGAN DAN KEPATUHAN

FINANCIAL RATIOS AND COMPLIANCE

URAIAN	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	CAGR	DESCRIPTION
						2025-2024 (%)	2021-2025 (%)	
Permodalan								Capitalization
KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum)	22,70%	22,73%	23,79%	23,53%	23,23%	-0,13%	-0,58%	KPMM (Minimum Capital Provision Obligation)
Aktiva Produktif Bermasalah	2,77%	2,27%	2,13%	2,51%	2,95%	22,03%	-1,56%	Problematic Productive Assets
PPAP terhadap Aktiva Produktif	2,45%	1,88%	1,74%	2,15%	2,57%	30,32%	-1,19%	PPAP on Productive Assets
CKPN terhadap Aset Produktif	1,55%	2,33%	2,18%	2,57%	3,05%	-33,48%	-15,57%	CKPN on Productive Assets
Debit to Asset Ratio (DAR)	86,46%	86,06%	85,88%	87,34%	86,86%	0,46%	-0,12%	Debit to Asset Ratio (DAR)
Debit to Equity Ratio (DER)	689,92%	632,85%	608,22%	690,07%	661,28%	9,02%	1,07%	Debit to Equity Ratio (DER)
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,36%	2,36%	2,41%	2,92%	3,41%	42,37%	-0,37%	Non Performing Loans (NPL) Gross
Non Performing Loan (NPL) Netto	1,76%	0,63%	0,67%	0,87%	1,07%	179,37%	13,25%	Non Performing Loan (NPL) Net
Rasio Rentabilitas								Profitability Ratio
Laba terhadap Asset (ROA)	1,81%	1,89%	1,62%	1,77%	1,76%	-4,23%	0,70%	Return on Assets (ROA)
Laba terhadap Modal (ROE)	10,71%	10,94%	11,08%	10,66%	10,74%	-2,10%	-0,07%	Return on Equity (ROE)
Pendapatan Bunga Bersih terhadap Aktiva Produktif (NIM)	5,87%	7,19%	6,43%	6,27%	6,26%	-18,36%	-1,60%	Net Interest Income to Earning Assets (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79,02%	78,28%	79,54%	77,21%	80,69%	0,95%	-0,52%	Operating Cost to Operating Income (BOPO)
Cost to Income Ratio (CIR)	73,05%	75,34%	71,75%	73,04%	76,67%	-3,04%	-1,20%	Cost to Income Ratio (CIR)
CASA	68,52%	81,07%	91,92%	85,30%	85,64%	-15,48%	-5,42%	CASA
Net Profil Margin (NPM)	15,60%	16,94%	16,06%	16,93%	15,93%	-7,91%	-0,52%	Net Profile Margin (NPM)
Gross Profit Margin (GPM)	20,02%	21,82%	20,51%	22,02%	20,22%	-8,25%	-0,25%	Gross Profit Margin (GPM)
Operating Profit Margin	20,98%	21,72%	20,19%	22,79%	19,31%	-3,41%	2,10%	Operating Profit Margin
Rasio Likuiditas								Liquidity Ratio
Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,18%	88,28%	76,51%	75,22%	84,67%	-2,38%	0,44%	Loan to Deposit Ratio (LDR)
PLM	4,00%	5,00%	5,00%	6,00%	23,85%	-20,00%	-36,01%	PLM
RIM	76,62%	88,01%	74,12%	75,06%	3,40%	-12,94%	117,88%	RIM
CR (Current Ratio)	122,20%	119,92%	122,29%	121,29%	123,78%	1,90%	-0,32%	CR (Current Ratio)
QR (Quick Ratio)	42,26%	39,20%	47,69%	47,44%	40,83%	7,81%	0,86%	QR (Quick Ratio)
Cash Ratio	21,94%	14,24%	21,17%	19,80%	21,07%	54,07%	1,02%	Cash Ratio
Rasio Kepatuhan								Compliance Ratio
Presentase Pelampauan BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Percentage of Exceeding BMPK
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Unrelated Parties
Giro Wajib Minimum (GWM)								Minimum Reserve Requirement (GWM)
GWM Utama Rupiah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Main GWM Rupiah
Harian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Daily
Rata-rata	4,29%	13,10%	10,98%	14,27%	6,49%	-67,25%	-9,83%	Average
GWM Valuta Asing	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Foreign Currency GWM
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Net Foreign Exchange Position (PDN) as a whole



IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

PENYALURAN DANA

LENDING

Penyaluran Dana	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025-2024 (%)	CAGR 2021-2025 (%)	Lending
Kredit Modal Kerja	2.135.666	2.174.836	1.913.711	2.206.307	2.467.600	-1,80%	-3,55%	Working Capital Loans
Kredit Investasi	813.046	884.646	940.671	945.364	971.957	-8,09%	-4,36%	Investment Loans
Kredit Konsumsi	12.264.039	10.632.427	9.200.329	8.486.558	8.276.470	15,35%	10,33%	Consumption Loans
Kredit Sindikasi	5.635.245	6.303.627	5.620.379	4.506.281	3.912.025	-10,60%	9,55%	Syndication Loans
Kredit Karyawan	708.409	691.152	690.320	663.954	576.793	2,50%	5,27%	Employee Loans
Kredit Program Pemerintah	996.803	1.107.247	1.224.432	1.343.394	1.393.537	-9,97%	-8,03%	Government Program Loans
Jumlah	22.553.209	21.793.935	19.589.842	18.151.858	17.598.382	3,48%	6,40%	Total

SIMPANAN NASABAH

CUSTOMER DEPOSITS

Dana Pihak Ketiga	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2025-2024 (%)	CAGR 2021-2025 (%)	Third-party funds
Giro	8.937.779	10.579.501	13.901.110	11.971.610	9.028.754	-15,52%	-0,25%	Giro
Tabungan	8.993.208	9.433.162	9.635.171	8.612.419	8.772.020	-4,66%	0,62%	Savings
Deposito	8.239.652	4.673.426	2.068.367	3.546.451	2.983.842	76,31%	28,91%	Deposits
Jumlah DPK	26.170.639	24.686.089	25.604.648	24.130.480	20.784.617	6,01%	5,93%	DPK Amount



INFORMASI SAHAM

Hingga akhir tahun 2025, Bank Papua belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Namun demikian, untuk informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Description
Modal saham - nilai nominal Rp5.000.000,- (nilai penuh) per saham Modal dasar 800.000 (nilai penuh) Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 569.641 saham	2,848,205,000,000	2,770,850,000,000	Share capital - nominal value of IDR 5,000,000 (full amount) per share Authorized capital: 800,000 (full amount) Issued and fully paid-up capital as of December 31, 2025: 569,641 shares:

AKSI KORPORASI

Pada tahun 2025, Bank Papua tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING)

Hingga 31 Desember 2025, Bank Papua belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Hingga 31 Desember 2025, Bank Papua belum menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi. Oleh karena itu, tidak ada informasi mengenai obligasi, sukuk, atau obligasi konversi.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Hingga 31 Desember 2025, Bank Papua tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

STOCK INFORMATION

As of the end of 2025, Bank Papua has not listed its shares on the stock exchange. Consequently, there is no available information regarding share price, market capitalization, or trading volume. However, the share capital for the past two years is detailed below:

CORPORATE ACTIONS

In 2025, Bank Papua did not engage in any corporate actions that would affect the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in share par value, issuance of convertible securities, or capital increases and decreases.

TEMPORARY SUSPENSION OF STOCK TRADING (SUSPENSION) AND/OR DELISTING OF SHARES

As of December 31, 2025, Bank Papua will not be a listed company on the stock exchange. Therefore, there will be no temporary suspension of stock trading or delisting of shares.

BOND, SUKUK, AND/OR CONVERTIBLE BOND INFORMATION

As of December 31, 2025, Bank Papua will not issue bonds, sukuk, or convertible bonds. Consequently, there is no information available regarding these instruments.

OTHER FUNDING INFORMATION

As of December 31, 2025, Bank Papua will not have any additional funding sources.



Peristiwa Penting

Significant Events

18 FEBRUARI 2025



Penandatanganan addendum kedua perjanjian kerjasama Layanan *Switching system* Bank Papua dan Artajasa tahun 202.

Signing of the second addendum to the cooperation agreement for the Bank Papua and Artajasa Switching System Services (202_)

24 FEBRUARI 2025



IHT Kepemimpinan Digital di perbankan yang dilaksanakan di Hotel Horizon Ultima, Entrop, Jayapura.

In-House Training (IHT) on Digital Leadership in Banking held at Hotel Horizon Ultima, Entrop, Jayapura

03 MARET 2025



Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri Bank Indonesia di Kantor Gubernur Provinsi Papua.

"Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri" program by Bank Indonesia at the Papua Governor's Office

03 MARET 2025



Direksi Bank Papua menghadiri serah terima jabatan dan lepas sambut walikota dan wakil walikota jayapura tahun 2025-2030.

Board of Directors of Bank Papua attended the handover ceremony and farewell event of the Mayor and Deputy Mayor of Jayapura for the 2025–2030 term

07 MARET 2025



Orientasi perbankan PKWT tahun 2024 Bank Papua bertempat di Hotel Grand Tabi Entrop Jayapura.

Banking orientation program for fixed-term employees (PKWT) 2024 at Hotel Grand Tabi, Entrop, Jayapura

08 MARET 2025



Ibadah pengucapan syukur HUT YPK di Tanah Papua ke 63 tahun

Thanksgiving service for the 63rd anniversary of YPK in Tanah Papua



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

12 MARET 2025



Buka puasa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori

Iftar gathering with the Regional Government of Supiori Regency

13 MARET 2025



Penyerahan bantuan CSR Program Sahabat Bank Papua di Kep. Aruri Kabupaten Supiori

Distribution of CSR assistance under the Bank Papua Sahabat Program in Aruri Islands, Supiori Regency

14 MARET 2025



Pertemuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Direksi Bank Papua.

Meeting between the Government of Biak Numfor Regency and the Board of Directors of Bank Papua

14 MARET 2025



Briefing bersama Kantor Cabang Biak bersama Direksi.

Briefing session with Biak Branch Office and the Board of Directors

13-Apr-25



Perayaan HUT Bank Papua ke 59 tahun di Kantor Pusat
59th Anniversary celebration of Bank Papua at Head Office

14-Apr-25



Penandatanganan PKS Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Bank Papua tentang RKUD, payroll gaji dan fasilitas kredit.

Signing of cooperation agreement (PKS) between Yahukimo Regency Government and Bank Papua on RKUD, payroll services, and credit facilities



29-APR-25



Pertemuan bersama perwakilan Polda Papua di kantor Pusat Bank Papua.

Meeting with representatives of Papua Regional Police (Polda Papua) at Bank Papua Head Office

06 MEI 2025



Festival UMKM kolaborasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua dengan Bank Papua

MSME Festival in collaboration between the Ministry of Religious Affairs of Papua Province and Bank Papua

09 MEI 2025



Direksi menghadiri rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPR Papua terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2024

Board of Directors attended plenary meeting for submission of DPR Papua recommendations on the 2024 Regional Head Accountability Report (LKPJ)

14 MEI 2025



Briefing bersama Kantor Cabang Fak-Fak bersama Direksi

Briefing session with Fak-Fak Branch Office and the Board of Directors

15 MEI 2025



Launching penerimaan setoran restribusi pala tomandin, komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak

Launching of retribution payment collection for nutmeg (pala tomandin), a leading commodity of Fak-Fak Regency

17 MEI 2025



Bazar UMKM Bank Papua dan senam bersama Kantor Cabang Utama Sorong

MSME Bazaar and joint exercise event at Main Branch Office Sorong



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

19 MEI 2025



Penyerahan plakat undian simpeda ke Gubernur Papua Barat Daya

Submission of Simpeda lottery plaque to the Governor of Southwest Papua

19 MEI 2025



Pembahasan kredit Pemda Kota Sorong

Discussion on credit facilities for Sorong City Government

06 JUNI 2025



Silahturahmi dan pembahasan Kredit Pemda Bank Papua dan Bupati Kabupaten Yalimo

Meeting and discussion on regional government credit between Bank Papua and the Regent of Yalimo Regency

10 JUNI 2025



KUNJUNGAN DAN SILAHTURAHMI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI III DPR PAPUA

VISIT AND FRIENDSHIP BETWEEN THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF COMMISSION III OF THE PAPUA DPR

12 JUNI 2025



Silahturhmi para otoritas adat dengan Forkopimda Provinsi Papua

Gathering with traditional authorities and regional leadership forum (Forkopimda) of Papua Province

13 JUNI 2025



Festival Cenderawasih Kedua Bank Indonesia

Second Cenderawasih Festival by Bank Indonesia



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Laporan Keuangan
Financial Statements



Indeks OJK
OJK Index

23 JUNI 2025



Bimbingan teknis SIPD RI Pemerintah Provinsi Papua bertempat di Sasana Krida Provinsi Papua

Technical guidance on SIPD RI for Papua Provincial Government at Sasana Krida, Papua Province

25 JUNI 2025



Rapat gabungan komisaris dan direksi serta anggota komite dan beberapa divisi.

Joint meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, committee members, and several divisions

09 JULI 2025



Penyerahan Surat Keputusan Mutasi Pejabat Bank Papua

Handover of official appointment decrees for Bank Papua personnel transfers

14 JULI 2025



Pertemuan dengan Pemda Kabupaten Nduga dalam membahas kredit Pemda Kabupaten Nduga

Meeting with Nduga Regency Government regarding regional government credit

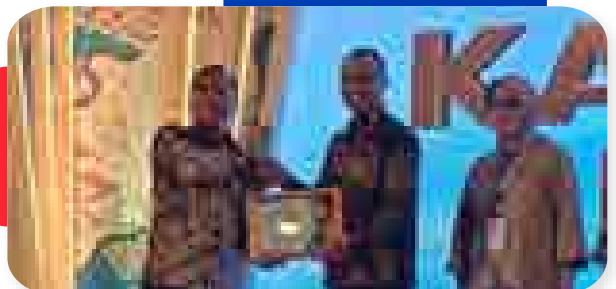
19 JUNI 2025



Exit meeting OJK dan Bank Papua bertempat di ruang rapat kantor OJK Papua.

Exit meeting between OJK and Bank Papua at OJK Papua Office meeting room

10 DESEMBER 2025



Bank Papua meraih predikat *Gold* pada GENTING Collaboration Summit 2025 sebagai bentuk pengakuan atas komitmen aktif dalam program orang tua asuh untuk percepatan penurunan stunting.

Bank Papua received a Gold award at the GENTING Collaboration Summit 2025 in recognition of its active commitment to the foster parent program aimed at accelerating stunting reduction.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support



Daftar Isi

Table of contents

1 Pendahuluan

Introduction



1	Penjelasan Tema	Theme Explanation
2	Kesinambungan Tema	Theme Continuity
4	Sekilas Tentang Bank Papua	Bank Papua Highlight
6	Jejak Langkah	Milestones
8	Kontribusi Terbaik	Best Contribution
10	Pencapaian Kinerja Penting 2025	Key Performance Achievements
12	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Summary of Key Financial Data
17	Informasi Saham	Stock Information
17	Informasi Obligasi, Sukuk, Dan/Atau Obligasi Konversi	Bond, Sukuk, And/Or Convertible Bond Information
17	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya	Other Funding Information
18	Peristiwa Penting	Important Events
24	Daftar Isi	Table of contents

28 Laporan Manajemen

Management Report



30	Laporan Direksi	Board of Director's Report
46	Laporan Dewan Komisaris	Board of Commissioners Report
58	Lembar Pertanggungjawaban	Accountability Statement

60 Profil Perusahaan

Company Profile



62	Identitas Perusahaan	Corporate Identity
64	Nama dan Alamat Kantor, Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi	Name and Address of Office, Subsidiaries, and Associated Entities
73	Brand Perusahaan	Company Brand
74	Riwayat Singkat Bank Papua	A Brief History of Bank Papua
77	Visi dan Misi Budaya Perusahaan	Vision and Mission Corporate Culture
83	Kegiatan Usaha	Business Activities
86	Produk dan Jasa	Product dan Services
92	Wilayah Operasional Perusahaan	Company Operational Area
96	Struktur Organisasi	Organizational Structure
100	Keanggotaan Asosiasi	Association Membership
102	Profil Direksi	Board of Directors Profile
114	Profil Dewan Komisaris	Board of Commissioners Profile
126	Profil Pemimpin Divisi	Division Leaders Profile
135	Profil Pegawai Perusahaan	Company Employee Profile
138	Informasi Pemegang Saham	Shareholder Information
143	Identitas Pemegang Saham	Shareholder Identity
148	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan	Main and Controlling Shareholders
148	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama	List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures Companies

149	Struktur Grup Perusahaan	Corporate Group Structure
149	Informasi Kelompok Usaha Bank	Bank Business Group Information
150	Kronologi Penerbitan Saham	Chronology of Share Issuance
150	Kronologi Penerbitan Obligasi dan/atau Pencatatan Efek Lainnya	Chronology of Bond Issuance and/or Listing of Other Securities
150	Aksi Korporasi	Corporate Action
151	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik	Information on the Use of Public Accountants
152	Daftar Nama dan Alamat Lembaga Profesi Penunjang	List of Names and Addresses of Supporting Professional Institutions
153	Penghargaan	Awards
157	Informasi Website	Website Information

159 Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview



160	Teknologi Informasi	Information Technology
195	Divisi Manajemen Modal Manusia	Human Capital Management Division

201 Analisis dan Pembahasan

Analysis and Discussion



214	Tinjauan Perkenomian	Economic Overview
216	Perekonomian Nasional	National Economy
219	Perekonomian Daerah	Regional Economy
224	Analisis Industri Perbankan	Banking Industry Analysis
228	Analisis Posisi Bank Papua dalam Analisis Perbankan Indonesia Tahun 2025	Analysis of Bank Papua's Position in the Indonesian Banking Industry in 2025
230	Strategi Perusahaan	Corporate Strategy
232	Aspek Pemasaran	Marketing Aspects
235	Pangsa Pasar	Market share
237	Tinjauan Operasional	Operational Review
260	Analisis Kinerja Keuangan	Financial Performance Analysis
279	Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	Analysis of Profit and Loss and Other Comprehensive Income
300	Laporan Arus Kas	Cashflow Statement
308	Analisis Kemampuan Membayar Kewajiban	Analysis of Ability to Meet Obligations
312	Analisis Tingkat Kolektibilitas Piutang	Analysis of Loan Collectibility Levels
316	Aset Produktif	Productive Assets
318	Struktur Modal	Capital Structure
321	Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	Risk Exposure and Capitalization Information
321	Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal	Material Commitments for Capital Expenditure Investment
322	Ikatan Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan	Realized Capital Expenditure Investment
324	Komitmen dan Kontinjensi	Commitments and Contingencies
324	Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	Significant Events after the Balance Sheet Date
325	Prospek Usaha	Business Prospects
333	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Realization of the Use of Proceeds from Public Offering
334	Pencapaian Target dan Target Kedepan	Achievement of Targets and Future Targets
339	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	Dividend Policy, Announcement and Payment



341	Informasi Material, Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/ Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, Dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang Terjadi pada Tahun Buku	<i>Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Conflict of Interest Transactions Occurring During the Financial Year</i>
351	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank	<i>Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Bank's Performance</i>
353	Informasi Kelangsungan Usaha	<i>Going Concern Information</i>
355	Perubahan Kebijakan Akuntansi	<i>Changes in Accounting Policy</i>
356	Tingkat Kesehatan Bank	<i>Bank Soundness Rating</i>
359	Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan	<i>Governance Framework, Management and Control of Tax Aspects</i>
363	Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter	<i>Response to Changes in Monetary Policy Direction</i>
365	Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif	<i>Spot Transactions and Derivative Transactions</i>

366 Laporan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



368	Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan	<i>Achievements in the Implementation of Corporate Governance</i>
370	Roadmap Tata Kelola Perseroan	<i>Corporate Governance Roadmap</i>
370	Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan	<i>Stages of Corporate Governance Implementation</i>
373	Dasar Penerapan Tata Kelola yang Baik	<i>Foundation for Good Corporate Governance Implementation</i>
377	Struktur Tata Kelola Perusahaan	<i>Corporate Governance Structure</i>
379	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	<i>Corporate Governance Mechanism</i>
381	Rapat Umum Pemegang Saham	<i>General Meeting of Shareholders (GMS)</i>
418	Direksi	<i>Board of Directors</i>
445	Dewan Komisaris	<i>Board of Commissioners</i>
456	Komisaris Independen	<i>Independent Commissioner</i>
470	Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	<i>Performance Evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners</i>
476	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	<i>Nomination and Remuneration of the Directors and the Board of Commissioners</i>
482	Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris	<i>Diversity Policy for the Board of Directors and Board of Commissioners</i>
484	Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi serta Pelaksananya	<i>Policy on the Disclosure of Information Regarding Share Ownership of the Board of Commissioners and Directors and Its Implementation</i>
488	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	<i>Organs and Committees under the Board of Commissioners</i>
521	Organ dan Komite di Bawah Direksi	<i>Organs and Committees under the Board of Directors</i>
528	Divisi Audit Internal	<i>Internal Audit Division</i>
541	Divisi Manajemen Risiko	<i>Risk Management Division</i>
548	Komite di Bawah Direksi	<i>Committees Under the Board of Directors</i>
576	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015	<i>Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks in accordance with POJK No. 45/POJK.03/2015</i>
584	Akuntan Publik	<i>Public Accountant</i>
586	Sistem Pengendalian Internal	<i>Internal Control System</i>
595	Sistem Manajemen Risiko	<i>Risk Management System</i>

622	Fungsi Kepatuhan	<i>Compliance Function</i>
638	Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	<i>Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program</i>
643	Perkara Hukum	<i>Legal Cases</i>
644	Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya	<i>Administrative Sanctions Imposed on Companies, Members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authority and Other Authorities</i>
645	Akses Informasi dan Data Perusahaan	<i>Access to Company Information and Data</i>
648	Kode Etik	<i>Code of Ethics</i>
657	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	<i>Performance-Based Long-Term Compensation Policy</i>
657	Sistem Pelaporan Pelanggaran	<i>Violation Reporting System</i>
666	Program Anti Korupsi	<i>Anti-Corruption Program</i>
672	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bank Papua	<i>Management of Bank Papua's State Officials' Wealth Reports (LHKPN)</i>
673	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan atau Politik	<i>Funding for Social and Political Activities</i>
674	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	<i>Provision of Funds to Related Parties and Allocation of Substantial Resources</i>
675	Rencana Strategis Bank	<i>Bank Strategic Plan</i>
677	Buyback Saham dan Buyback Obligasi	<i>Share Buybacks and Bond Buybacks</i>
678	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	<i>Transactions Involving Conflicts of Interest</i>
678	Perselisihan Internal	<i>Internal Dispute</i>
678	Kebijakan Insider Trading	<i>Insider Trading Policy</i>
679	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan	<i>Transparency of Financial and Non-Financial Conditions</i>
682	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	<i>Implementation of Sustainable Finance, Including Social and Environmental Responsibility</i>
682	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	<i>Implementation of Public Company Governance Guidelines</i>
682	Laporan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	<i>Integrated Governance Implementation Report</i>
683	Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i>	<i>Transparency in Governance Practices</i>
684	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i>
685	Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik	<i>Statement on the Implementation of Good Governance Principles</i>
686	Good Corporate Governance Assessment	<i>Good Corporate Governance Assessment</i>



689 Laporan Keuangan

Financial Statements



853 Indeks OJK

OJK Index

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Disussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Laporan Keuangan
Financial Statements



Indeks OJK
OJK Index

Laporan Direksi

Board of Directors' Report



Yuliana Dolfince Yembise, SH, MH
Direktur Utama
President Director



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Peace be upon us all,

Yang Terhormat,
 Para Pemegang Saham,
 Dewan Komisaris,
 serta seluruh Pemangku Kepentingan Bank Papua,

Dear Shareholders,
 Board of Commissioners,
 and all Stakeholders of Bank Papua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih, penyertaan, dan tuntunan-Nya, Bank Papua dapat melalui tahun buku 2025 dengan kinerja yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global, nasional, dan regional yang penuh tantangan.

We offer praise and gratitude to God Almighty, because with His love, presence, and guidance, Bank Papua has been able to navigate the 2025 financial year with maintained performance amidst the challenging dynamics of the global, national, and regional economy.

Tahun 2025 merupakan periode yang sarat dinamika sekaligus peluang. Ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, tekanan inflasi yang bergerak fluktuatif, penyesuaian kebijakan moneter global, serta masih tingginya tensi geopolitik membentuk lanskap baru yang menuntut ketahanan, adaptabilitas, dan ketepatan strategi dari industri perbankan. Dalam konteks tersebut, stabilitas dan kelincihan institusi keuangan menjadi faktor penentu dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan.

2025 is a period filled with both dynamics and opportunities. The uncertainty of global economic recovery, fluctuating inflationary pressures, adjustments to global monetary policy, and continued high geopolitical tensions have created a new landscape that demands resilience, adaptability, and strategic precision from the banking industry. In this context, the stability and agility of financial institutions are crucial factors in maintaining sustainable growth.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian nasional tetap menunjukkan resiliensi yang kuat, ditopang oleh konsumsi domestik yang terjaga, akselerasi transformasi digital, serta penguatan peran sektor keuangan dalam mendorong inklusi ekonomi. Kawasan Timur Indonesia, khususnya Tanah Papua, juga terus memperlihatkan potensi pertumbuhan yang signifikan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Amidst these conditions, the national economy continues to demonstrate strong resilience, supported by maintained domestic consumption, accelerated digital transformation, and the strengthening role of the financial sector in promoting economic inclusion. Eastern Indonesia, particularly Papua, continues to demonstrate significant growth potential through the development of leading sectors, infrastructure development, and increased economic activity based on local potential.

Sejalan dengan dinamika itu, Bank Papua sebagai Bank Pembangunan Daerah terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengusung tema “Memperkuat Pertumbuhan Inklusif melalui Inovasi Berkelanjutan”, Bank Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan bernilai tambah bagi masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM dan komunitas di wilayah terpencil. Komitmen ini selaras dengan visi Bank Papua untuk menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

In line with this dynamic, Bank Papua, as a Regional Development Bank, continues to strengthen its role in promoting inclusive and sustainable economic growth. With the theme “Strengthening Inclusive Growth through Sustainable Innovation,” Bank Papua affirms its commitment to providing adaptive, innovative, and value-added financial solutions for the wider community, including MSMEs and communities in remote areas. This commitment aligns with Bank Papua’s vision to become a strong, trusted, and competitive regional bank in supporting economic development in Papua.



AKTIVITAS UTAMA PERUSAHAAN

Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang berakar kuat di Tanah Papua, Bank Papua terus menghadirkan solusi keuangan yang inklusif dan adaptif melalui ragam produk dan layanan yang terintegrasi. Pada sisi penghimpunan dana, Bank menawarkan berbagai produk simpanan seperti Giro, Deposito Berjangka, serta Tabungan Simpeda yang menjadi salah satu produk unggulan BPD secara nasional. Produk lain seperti Tabungan Simanja, Tabunganku, dan Tabungan SIMPEL turut memperkuat budaya menabung sekaligus memperluas inklusi keuangan hingga ke segmen pelajar dan masyarakat luas.

Di sisi penyaluran dana, Bank Papua menghadirkan berbagai produk kredit yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi menjadi penggerak sektor produktif, sementara Kredit Konsumsi menjawab kebutuhan individu. Selain itu, Kredit Sindikasi memperluas pembiayaan berskala besar, dan Kredit Program Pemerintah seperti KUR memperkuat pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Papua.

Melengkapi ekosistem tersebut, Bank Papua terus mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti *Mobile Banking*, *Internet Banking*, ATM, hingga kanal pembayaran digital seperti EDC dan Samsat *Online*. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kemudahan transaksi, tetapi juga mempertegas komitmen Bank Papua dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern, efisien, dan berorientasi pada pengalaman nasabah.

Dengan aktivitas utama tersebut, Bank Papua terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi keuangan yang inovatif, pendukung perluasan inklusi keuangan, sekaligus penggerak pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

JARINGAN KANTOR

Penguatan jaringan distribusi menjadi salah satu fondasi utama Bank Papua dalam memperluas akses layanan keuangan di Tanah Papua. Hingga akhir tahun 2025, Bank Papua didukung oleh total 225 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 43 Kantor Cabang, 59 Kantor Cabang Pembantu, dan 122 Kantor Kas yang tersebar di seluruh wilayah operasional. Jaringan tersebut menjangkau Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga Papua Barat Daya, serta diperkuat oleh keberadaan kantor di luar Papua sebagai simpul konektivitas ekonomi regional.

CORPORATE ACTIVITIES

As a Regional Development Bank with deep roots in Papua, Bank Papua continues to provide inclusive and adaptive financial solutions through a variety of integrated products and services. In terms of fundraising, the Bank offers various savings products such as Demand Deposits, Time Deposits, and Simpeda Savings, which are among the leading products of Regional Development Banks (BPD) nationally. Other products such as Simanja Savings, My Savings, and SIMPEL Savings help strengthen the savings culture while expanding financial inclusion to students and the wider community.

In terms of funding distribution, Bank Papua offers various credit products designed to stimulate regional economic growth. Working Capital Loans and Investment Loans drive the productive sector, while Consumer Loans address individual needs. Furthermore, Syndicated Loans expand large-scale financing, and Government Program Loans, such as the People's Business Credit (KUR), strengthen the empowerment of MSMEs, the backbone of the Papuan economy.

Complementing this ecosystem, Bank Papua continues to develop technology-based services such as Mobile Banking, Internet Banking, ATMs, and digital payment channels like EDC and Samsat Online. These innovations not only enhance transaction convenience but also reinforce Bank Papua's commitment to providing modern, efficient, and customer-centric financial services.

With these core activities, Bank Papua continues to strengthen its role as a provider of innovative financial solutions, a supporter of expanding financial inclusion, and a driver of economic development in Papua.

OFFICE NETWORK

Strengthening the distribution network is one of Bank Papua's key pillars in expanding access to financial services in Papua. By the end of 2025, Bank Papua will be supported by a total network of 225 offices, consisting of 1 Head Office, 43 Branch Offices, 59 Sub-Branch Offices, and 122 Cash Offices spread across all operational areas. This network spans the provinces of Papua, West Papua, South Papua, Central Papua, Highland Papua, and Southwest Papua, and is strengthened by the presence of offices outside Papua as hubs of regional economic connectivity.



Seiring dengan perkembangan layanan, Bank Papua juga memperluas ekosistem *delivery channel* melalui 2.183 titik layanan digital dan elektronik, termasuk 390 ATM, 1.676 EDC, serta berbagai kanal layanan seperti Samsat *Online*, *Cash Management System* (CMS), dan *Kasda Online* yang terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Kehadiran CRM, *payment point*, hingga mobil kas keliling turut mempertegas komitmen Bank dalam menjangkau wilayah terpencil dan meningkatkan inklusi keuangan.

Didukung oleh kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai institusi pembayaran, Bank Papua terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem keuangan daerah yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan organisasi Bank Papua pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat efektivitas tata kelola, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, serta memastikan keselarasan struktur organisasi dengan strategi bisnis jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan komitmen Direksi dalam mengelola operasional Bank secara profesional, adaptif, dan berbasis prinsip kehati-hatian, serta fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan implementasi tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

Secara struktural, Bank melakukan penyempurnaan organisasi melalui penyesuaian fungsi, tugas, dan tanggung jawab berbasis pendekatan RASCI, penguatan *job profile* dan *job grading*, serta harmonisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) di seluruh unit kerja. Transformasi ini juga mencakup pembentukan fungsi-fungsi baru yang mendukung pengembangan bisnis devisa, penguatan manajemen risiko, kepatuhan internasional, serta peningkatan kapasitas audit dan pengendalian internal.

Pengembangan organisasi turut memperkuat implementasi *three lines of defense* melalui peningkatan peran fungsi audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan. Dari perspektif SDM, penguatan organisasi diiringi dengan pengembangan kompetensi, penataan talenta, serta peningkatan pemahaman SOP guna mendorong budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

In line with service development, Bank Papua is also expanding its delivery channel ecosystem through 2,183 digital and electronic service points, including 390 ATMs, 1,676 EDCs, and various service channels such as Samsat Online, Cash Management System (CMS), and Kasda Online, which are integrated with the needs of local governments and the community. The presence of CRM, payment points, and mobile cash vehicles further reinforces the Bank's commitment to reaching remote areas and increasing financial inclusion.

Supported by strategic partnerships with local governments, Bank Indonesia, and various payment institutions, Bank Papua continues to strengthen its role as a driver of an inclusive, connected, and sustainable regional financial ecosystem.

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Bank Papua's organizational development in 2025 is aimed at strengthening governance effectiveness, improving human resource quality, and ensuring alignment of the organizational structure with long-term business strategy. This step aligns with the Board of Directors' commitment to managing the Bank's operations professionally, adaptively, and based on prudent principles, as well as the Board of Commissioners' oversight function in ensuring effective and sustainable governance implementation.

Structurally, the Bank is improving its organization by adjusting functions, duties, and responsibilities based on the RASCI approach, strengthening job profiles and job grading, and harmonizing Standard Operating Procedures (SOPs) across all work units. This transformation also includes the establishment of new functions to support foreign exchange business development, strengthening risk management, international compliance, and enhancing audit and internal control capacity.

Organizational development also strengthens the implementation of the three lines of defense by enhancing the roles of internal audit, risk management, and compliance. From an HR perspective, organizational strengthening is accompanied by competency development, talent management, and increased understanding of SOPs to foster a professional, adaptive, and integrity-based work culture.



Dengan struktur organisasi yang semakin *agile* dan tata kelola yang semakin kokoh, Bank Papua optimistis mampu mempercepat transformasi bisnis, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong transformasi dan pertumbuhan berkelanjutan Bank Papua. Hingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 2.526 orang, dengan komposisi yang didominasi oleh pegawai tetap sebesar 88,40%, mencerminkan stabilitas organisasi serta komitmen Bank dalam membangun kapabilitas jangka panjang. Keberadaan pegawai kontrak dan tenaga magang turut melengkapi fleksibilitas organisasi dalam merespons dinamika bisnis.

Dari perspektif keberagaman, Bank Papua menunjukkan komposisi gender yang seimbang, dengan 50,24% pegawai laki-laki dan 49,76% pegawai perempuan. Keseimbangan ini mencerminkan praktik pengelolaan SDM yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam organisasi.

Sementara itu, dari sisi kualitas, struktur pendidikan pegawai didominasi oleh lulusan Sarjana sebesar 85,11%, disertai peningkatan jumlah pegawai dengan pendidikan pascasarjana. Kondisi ini selaras dengan arah strategis pengembangan SDM yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan menghadapi transformasi digital.

Melalui implementasi *talent management*, program pelatihan berkelanjutan, serta penyalarsan kompetensi dengan kebutuhan bisnis, Bank Papua terus membangun SDM yang adaptif, unggul, dan berintegritas sebagai penggerak utama penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

TEKNOLOGI INFORMASI

Transformasi teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama Bank Papua dalam memperkuat daya saing dan memperluas inklusi keuangan. Rencana strategis Teknologi Informasi tahun 2025 difokuskan pada penguatan kapabilitas digital melalui pengembangan *Core Banking System*, *data warehouse*, serta integrasi ekosistem layanan berbasis Open API untuk mendukung kebutuhan bisnis yang semakin dinamis. Arah ini juga sejalan dengan

With an increasingly agile organizational structure and stronger governance, Bank Papua is optimistic about accelerating business transformation, increasing competitiveness, and creating sustainable added value for all stakeholders.

HUMAN RESOURCES

Human resources are the primary foundation for driving Bank Papua's transformation and sustainable growth. By the end of 2025, the number of employees will reach 2,526, with permanent employees accounting for 88,40%, reflecting organizational stability and the Bank's commitment to building long-term capabilities. The presence of contract employees and interns enhances the organization's flexibility in responding to business dynamics.

From a diversity perspective, Bank Papua exhibits a balanced gender composition, with 50.24% male employees and 49.76% female employees. This balance reflects inclusive and equitable HR management practices, while strengthening collaboration within the organization.

Meanwhile, in terms of quality, the employee education structure is dominated by bachelor's degree graduates at 85.11%, accompanied by an increasing number of employees with postgraduate education. This situation aligns with the strategic direction of human resource development, which emphasizes improving competency, professionalism, and readiness for digital transformation.

Through the implementation of talent management, ongoing training programs, and aligning competencies with business needs, Bank Papua continues to develop adaptive, superior, and highly integrated human resources as the primary drivers of added value creation for all stakeholders.

INFORMATION TECHNOLOGY

Information technology transformation is one of Bank Papua's key pillars in strengthening competitiveness and expanding financial inclusion. The 2025 Information Technology strategic plan focuses on strengthening digital capabilities through the development of a Core Banking System, data warehouse, and the integration of an Open API-based service ecosystem to support increasingly dynamic business needs. This direction also aligns with



percepatan digitalisasi layanan pemerintah daerah melalui pengembangan CMS, SIPD, serta kanal pembayaran elektronik dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dari sisi pengembangan layanan, Bank Papua terus menghadirkan inovasi digital melalui peningkatan fitur *mobile banking*, *internet banking corporate*, QRIS, BI-FAST, hingga *digital lending*. Inisiatif seperti *customer onboarding Online*, *e-money co-branding*, serta pengembangan kanal Laku Pandai dan *e-wallet* semakin memperluas akses layanan keuangan yang cepat, mudah, dan inklusif. Penguatan infrastruktur seperti *data center*, *disaster recovery center* (DRC), serta implementasi *fraud detection system* menjadi fondasi penting dalam menjaga keandalan layanan.

Sementara itu, tata kelola teknologi informasi terus diperkuat melalui penerapan manajemen risiko TI, peningkatan ketahanan siber, serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem, infrastruktur, dan mitra penyedia layanan. Dengan dukungan tata kelola yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan, Bank Papua optimistis mampu menghadirkan layanan digital yang aman, andal, dan bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

ANALISIS KINERJA BANK

Kinerja Bank Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan resiliensi yang solid di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan strategi bisnis yang adaptif, Bank mampu menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, baik dari sisi penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun peningkatan kualitas aset.

KONDISI PEREKONOMIAN YANG SECARA LANGSUNG BERDAMPAK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DAN TARGET PASAR

Kinerja Bank Papua pada tahun 2025 tidak terlepas dari dinamika perekonomian global, nasional, hingga regional yang secara langsung mempengaruhi profil bisnis dan target pasar. Pada tingkat global, pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan moderasi di kisaran 3,0%-3,1%, dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, kebijakan moneter ketat, serta *volatilitas* harga komoditas. Kondisi ini berdampak pada perlambatan perdagangan global dan peningkatan risiko pasar keuangan.

Di tingkat nasional, perekonomian Indonesia tetap resilien

the acceleration of the digitalization of regional government services through the development of a CMS, SIPD, and electronic payment channels in support of the Regional Government Transaction Electronification (ETPD) program.

In terms of service development, Bank Papua continues to introduce digital innovations through enhanced mobile banking, corporate internet banking, QRIS, BI-FAST, and digital lending features. Initiatives such as online customer onboarding, e-money co-branding, and the development of Laku Pandai and e-wallet channels further expand access to fast, easy, and inclusive financial services. Strengthening infrastructure, such as data centers and disaster recovery centers (DRCs), and implementing fraud detection systems, are crucial foundations for maintaining service reliability.

Meanwhile, information technology governance continues to be strengthened through the implementation of IT risk management, increased cyber resilience, and ongoing evaluation of systems, infrastructure, and service provider partners. With the support of strong governance and continuous innovation, Bank Papua is optimistic about being able to provide secure, reliable, and value-added digital services to all stakeholders.

BANK PERFORMANCE ANALYSIS

Bank Papua's performance throughout 2025 demonstrated solid resilience amidst challenging economic dynamics. By prioritizing prudent principles and adaptive business strategies, the Bank was able to maintain sustainable growth, both in terms of fund raising, credit distribution, and improving asset quality.

ECONOMIC CONDITIONS THAT DIRECTLY IMPACT COMPANY PERFORMANCE AND TARGET MARKET

Bank Papua's organizational development in 2025 is aimed at strengthening governance effectiveness, improving human resource quality, and ensuring alignment of the organizational structure with long-term business strategy. This step aligns with the Board of Directors' commitment to managing the Bank's operations professionally, adaptively, and based on prudent principles, as well as the Board of Commissioners' oversight function in ensuring effective and sustainable governance implementation.

At the national level, the Indonesian economy remains



dengan pertumbuhan mencapai 5,39% (yoy), didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta penguatan sektor industri dan digital. Stabilitas makro ekonomi tersebut menjadi fondasi penting bagi peningkatan aktivitas intermediasi perbankan.

Sementara itu, perekonomian daerah menunjukkan dinamika yang beragam. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Provinsi Papua tumbuh sekitar 4,1% (yoy), didorong oleh kinerja sektor pertambangan, konstruksi, dan belanja pemerintah. Di sisi lain, Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 5,2% (yoy), seiring meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan investasi di kawasan strategis seperti Teluk Bintuni.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan peluang sekaligus tantangan bagi Bank Papua, khususnya dalam mendorong pembiayaan sektor produktif, memperkuat UMKM, serta memperluas inklusi keuangan di wilayah yang masih memiliki kesenjangan akses. Dalam konteks tersebut, Bank Papua terus mengarahkan strategi bisnis secara adaptif dan berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN

Total aset Bank Papua tahun 2025 meningkat 6,94% menjadi Rp34,34 triliun, didorong pertumbuhan kredit 4,34% serta optimalisasi penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang tumbuh signifikan sebagai strategi pengelolaan likuiditas. Penurunan giro pada Bank Indonesia mencerminkan realokasi aset yang lebih produktif, sementara kas dan giro pada bank lain meningkat untuk menjaga likuiditas. Portofolio efek tumbuh moderat sebagai upaya menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil. Manajemen terus mengedepankan strategi *prudent* melalui penguatan aset produktif, kualitas kredit, dan likuiditas guna memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Papua tahun 2025 tumbuh 6,01% menjadi Rp26,17 triliun, didorong peningkatan signifikan deposito sebesar 76,31% sebagai strategi memperkuat likuiditas di tengah dinamika suku bunga. Penurunan giro dan tabungan mencerminkan pergeseran preferensi nasabah ke instrumen berimbal hasil lebih kompetitif. Bank menerapkan kebijakan suku bunga yang adaptif—giro hingga 0,75%, tabungan hingga 2,50%, dan deposito 3,00%–3,50% guna menjaga daya saing. Melalui penguatan dana murah, digitalisasi layanan, dan inovasi produk, manajemen terus mengoptimalkan

resilient, growing 5.39% year-on-year, supported by domestic consumption, investment, and strengthening industrial and digital sectors. This macroeconomic stability provides a crucial foundation for increased banking intermediation activity.

Meanwhile, the regional economy exhibits diverse dynamics. Throughout 2025, the Papua Province economy grew by around 4.1% (yoy), driven by performance in the mining, construction, and government spending sectors. On the other hand, West Papua Province recorded higher growth of around 5.2% (yoy), due to increased manufacturing activity and investment in strategic areas such as Bintuni Bay.

This growth reflects both opportunities and challenges for Bank Papua, particularly in encouraging financing for productive sectors, strengthening MSMEs, and expanding financial inclusion in areas with disparities in access. In this context, Bank Papua continues to direct its business strategy adaptively and oriented towards inclusive and sustainable regional economic development.

OPERATIONAL AND FINANCIAL PERFORMANCE

Bank Papua's total assets increased by 6.94% to IDR 34.34 trillion in 2025, driven by 4.34% credit growth and optimization of placements with Bank Indonesia and other banks, which grew significantly as a liquidity management strategy. The decrease in Demand Deposits with Bank Indonesia reflected a reallocation to more productive assets, while cash and Demand Deposits with other banks increased to maintain liquidity. The securities portfolio grew moderately in an effort to maintain a balance between risk and return. Management continues to prioritize a prudent strategy by strengthening productive assets, credit quality, and liquidity to ensure healthy and sustainable growth.

Bank Papua's third-party funds grew 6.01% to IDR 26.17 trillion in 2025, driven by a significant 76.31% increase in deposits as a strategy to strengthen liquidity amidst interest rate dynamics. The decline in Demand Deposits and savings reflects a shift in customer preference toward instruments with more competitive returns. The bank implements an adaptive interest rate policy—Demand Deposits up to 0.75%, savings accounts up to 2.50%, and time deposits 3.00%–3.50%—to maintain competitiveness. Through strengthening low-cost funds, service digitalization, and



struktur pendanaan serta mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Penyaluran kredit Bank Papua pada tahun 2025 tetap menunjukkan pertumbuhan yang terjaga, tercermin dari peningkatan kredit yang diberikan sebesar 4,34% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi pada sektor produktif, khususnya UMKM, konsumsi, serta dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah. Dari sisi *pricing*, penyaluran kredit didukung oleh kebijakan suku bunga yang kompetitif dan disesuaikan dengan profil risiko serta segmen pasar, sebagaimana tercermin dalam tabel suku bunga kredit. Penetapan suku bunga yang terukur menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan kualitas aset di tengah dinamika suku bunga pasar.

Kinerja laba Bank Papua tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan laba bersih mencapai Rp471,57 miliar, meningkat 4,17% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp452,68 miliar. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 8,12% serta kenaikan pendapatan operasional lainnya sebesar 45,16%, yang mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan.

Di sisi lain, tekanan biaya bunga yang meningkat signifikan sebesar 114,57% berdampak pada penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 8,56%. Namun, beban operasional selain bunga berhasil ditekan sebesar 3,37%, sehingga mendorong peningkatan laba operasional sebesar 9,31%. Secara keseluruhan, manajemen mampu menjaga profitabilitas melalui pengendalian biaya, optimalisasi pendapatan non-bunga, serta pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif. Ke depan, Bank terus memperkuat efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan guna menjaga pertumbuhan laba yang berkelanjutan.

Dari sisi kinerja rasio keuangan Bank Papua tahun 2025 menunjukkan kondisi yang tetap sehat dan terkendali. Permodalan kuat dengan KPMM 22,70% mendukung ekspansi, sementara peningkatan NPL mencerminkan tekanan kualitas aset yang direspons melalui penguatan pencadangan. Dari sisi profitabilitas, penurunan ROA, ROE, dan NIM menunjukkan tekanan *margin* akibat kenaikan biaya dana, namun efisiensi tetap terjaga melalui pengendalian biaya operasional. Secara keseluruhan, rasio keuangan mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan dan manajemen risiko, dengan implikasi perlunya penguatan kualitas aset dan optimalisasi struktur

product innovation, management continues to optimize its funding structure and support sustainable business growth.

Bank Papua's credit distribution in 2025 continued to show maintained growth, reflected in a 4.34% increase in loans disbursed compared to 2024. This growth was driven by expansion in the productive sector, particularly MSMEs and consumption, as well as support for government programs focused on strengthening the regional economy. In terms of pricing, credit distribution is supported by a competitive interest rate policy tailored to risk profiles and market segments, as reflected in the credit interest rate table. Calculated interest rate setting is a crucial instrument in maintaining a balance between credit growth and asset quality amidst market interest rate dynamics.

Bank Papua's profit performance in 2025 showed positive growth, with net profit reaching IDR 471.57 billion, a 4.17% increase compared to IDR 452.68 billion in 2024. This increase was driven by an 8.12% increase in interest income and a 45.16% increase in other operating income, reflecting the diversification of revenue sources.

On the other hand, the significant increase in interest costs, which rose by 114.57%, resulted in an 8.56% decrease in net interest income. However, non-interest operating expenses were successfully reduced by 3.37%, driving a 9.31% increase in operating profit. Overall, management was able to maintain profitability through cost control, optimization of non-interest income, and effective asset and liability management. Going forward, the Bank will continue to strengthen operational efficiency and revenue diversification to maintain sustainable profit growth.

In terms of performance, Bank Papua's financial ratios for 2025 indicate a healthy and manageable condition. Strong capitalization with a CAR of 22.70% supports expansion, while the increase in NPLs reflects asset quality pressures, which are addressed through strengthening reserves. In terms of profitability, the decline in ROA, ROE, and NIM indicates margin pressure due to the rising cost of funds, while efficiency is maintained through controlled operating costs. Overall, the financial ratios reflect a balance between growth and risk management, implying the need to strengthen asset quality and optimize the funding structure



pendanaan untuk menjaga kinerja berkelanjutan.

Selain mencatatkan kinerja keuangan yang solid, Bank Papua juga menunjukkan pencapaian positif pada aspek non-keuangan melalui berbagai penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Bank dalam meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Adapun penghargaan yang diterima Bank Papua pada tahun 2025 antara lain:

1. *Top Digital Corporate Brand Award 2025.*
2. *The Most Innovative Future Finance Awards 2025 (Regional Bank).*
3. *The Best CEO in the Regional Bank 2025.*
4. *The Most Outstanding Women 2025 (2 penghargaan).*
5. *The Asian Post Best Regional Champion 2025 (Predikat Excellent).*
6. *Woman Empower Woman Award 2025.*
7. *Infobank Top 100 CEO 2025.*
8. Penghargaan Mitra Strategis Penerimaan Pajak.
9. Mitra Strategis Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
10. Bank Pendukung Distribusi dan Layanan Kas Uang Rupiah Terbaik.
11. Penghargaan CSR (SDGs).
12. Bank Daerah Pendukung Ekonomi Papua Barat.
13. Kontribusi Utama Penerimaan Pajak dan Edukasi Coretax.
14. *The Best Service Performance Excellence Nasional.*

Raihan penghargaan ini mencerminkan konsistensi Bank Papua dalam menjaga standar kinerja, inovasi, serta tata kelola yang unggul, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin kompleks, Bank Papua menetapkan arah strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan. Strategi utama difokuskan pada penguatan platform bisnis secara berkelanjutan serta akselerasi pertumbuhan melalui penguatan pemasaran dan penjualan pada sektor-sektor unggulan, khususnya

to maintain sustainable performance.

In addition to recording solid financial performance, Bank Papua also demonstrated positive achievements in non-financial aspects through various awards received throughout 2025. These awards recognize the Bank's commitment to improving service quality, governance, and contribution to regional development.

The awards received by Bank Papua in 2025 include:

1. *Top Digital Corporate Brand Award 2025.*
2. *The Most Innovative Future Finance Awards 2025 (Regional Bank).*
3. *The Best CEO in the Regional Bank 2025.*
4. *The Most Outstanding Women 2025 (2 awards).*
5. *The Asian Post Best Regional Champion 2025 (Excellent Predicate).*
6. *Woman Empower Woman Award 2025.*
7. *Infobank Top 100 CEO 2025.*
8. *Strategic Partner Award for Tax Revenue.*
9. *Strategic Partner for the Implementation of Regional Government Transaction Electronification.*
10. *Best Bank Supporting Rupiah Cash Distribution and Services.*
11. *CSR Award (SDGs).*
12. *Regional Bank Supporting the Economy of West Papua.*
13. *Main Contribution to Tax Revenue and Coretax Education.*
14. *The Best National Service Performance Excellence.*

This award reflects Bank Papua's consistency in maintaining superior performance, innovation, and governance standards, while strengthening its position as a strategic partner for economic development in Papua.

STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES IMPLEMENTED BY THE COMPANY

In facing the increasingly complex dynamics of the banking industry, Bank Papua has established an integrated strategic direction oriented towards creating sustainable added value. The main strategy focuses on strengthening its business platform sustainably and accelerating growth through enhanced marketing and sales in leading sectors,



UMKM dan segmen produktif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan dan produk berbasis kebutuhan nasabah, perluasan basis pelanggan di luar *captive market*, serta penguatan ekosistem pemerintah daerah. Di sisi lain, Bank juga memperkuat penerapan manajemen risiko dan kepatuhan melalui pendekatan *three lines of defense*, serta integrasi prinsip keuangan berkelanjutan dalam kebijakan bisnis.

Penguatan sumber daya manusia, budaya perusahaan, dan transformasi digital menjadi pilar penting dalam mendukung efektivitas organisasi. Didukung oleh pengendalian keuangan yang *prudent* serta peningkatan kualitas aset, Bank Papua optimistis mampu menjaga pertumbuhan yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Bank Papua guna memastikan keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang. Proses perumusan dilakukan secara komprehensif melalui analisis lingkungan eksternal dan internal, termasuk kondisi makroekonomi, dinamika industri perbankan, profil risiko, serta potensi pasar di wilayah operasional.

Direksi menetapkan arah strategis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dan *corporate plan*, dengan memastikan keselarasan antara target pertumbuhan, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian. Dalam prosesnya, Direksi juga melibatkan berbagai fungsi terkait, termasuk manajemen risiko, kepatuhan, dan unit bisnis, guna menghasilkan kebijakan yang terukur dan implementatif.

Selanjutnya, Direksi memastikan bahwa setiap strategi yang ditetapkan telah mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, keberlanjutan, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dengan peran yang proaktif dan visioner, Direksi mampu mengarahkan organisasi untuk tetap adaptif, kompetitif, dan resilien di tengah dinamika industri perbankan.

particularly MSMEs and the productive segment.

This strategy is implemented through the development of services and products based on customer needs, expanding the customer base beyond the captive market, and strengthening the local government ecosystem. Furthermore, the Bank is also strengthening the implementation of risk management and compliance through a three-lines-of-defense approach, as well as integrating sustainable finance principles into its business policies.

Strengthening human resources, corporate culture, and digital transformation are crucial pillars in supporting organizational effectiveness. Supported by prudent financial controls and improved asset quality, Bank Papua is optimistic about maintaining healthy growth, increasing competitiveness, and strengthening its role as a driving force for the regional economy.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES

The Board of Directors plays a central role in formulating Bank Papua's strategic strategies and policies to ensure business sustainability and long-term value creation. The formulation process is carried out comprehensively through an analysis of the external and internal environment, including macroeconomic conditions, banking industry dynamics, risk profiles, and market potential in operational areas.

The Board of Directors establishes the strategic direction outlined in the Bank's Business Plan and corporate plan, ensuring alignment between growth targets, risk management, and prudent principles. In this process, the Board of Directors also involves various related functions, including risk management, compliance, and business units, to produce measurable and implementable policies.

Furthermore, the Board of Directors ensures that each established strategy takes into account aspects of good governance, sustainability, and the interests of all stakeholders. With a proactive and visionary role, the Board of Directors is able to guide the organization to remain adaptive, competitive, and resilient amidst the dynamics of the banking industry.



PROSES YANG DILAKUKAN DALAM MEMASTIKAN PENERAPAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam memastikan implementasi strategi dan kebijakan berjalan efektif, Bank Papua menerapkan proses yang terintegrasi dan berlapis, dimulai dari perencanaan strategis hingga evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Direksi menetapkan arah kebijakan melalui Rencana Bisnis Bank yang diturunkan ke dalam program kerja dan *Key Performance Indicators* (KPI) pada seluruh unit kerja.

Pelaksanaan strategi dikawal melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi berkala, baik melalui rapat manajemen, komite-komite, maupun pelaporan kinerja yang terstruktur. Fungsi pengendalian diperkuat melalui penerapan *three lines of defense* yang melibatkan unit operasional, manajemen risiko dan kepatuhan, serta audit internal.

Selain itu, Bank melakukan penyesuaian strategi secara adaptif terhadap dinamika eksternal dan internal, didukung oleh sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Dengan proses yang disiplin dan tata kelola yang kuat, manajemen memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan.

PERBANDINGAN ANTARA KINERJA DENGAN TARGET RENCANA BISNIS BANK

Realisasi kinerja keuangan Bank Papua tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun terdapat beberapa deviasi terhadap target yang telah ditetapkan. Total aset terealisasi sebesar Rp34,34 triliun atau mencapai 101,75% dari target, mencerminkan pertumbuhan yang tetap terjaga meskipun belum sepenuhnya optimal.

Penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp22,55 triliun atau 97,63% dari target, menunjukkan ekspansi yang solid dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp26,17 triliun atau 99,90% dari target, terutama dipengaruhi oleh penurunan giro dan tabungan, meskipun deposito tumbuh signifikan.

Dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak melampaui

PROCESSES INVOLVED IN ENSURING STRATEGY AND POLICY IMPLEMENTATION

To ensure the effective implementation of strategies and policies, Bank Papua implements an integrated and multi-layered process, starting from strategic planning to ongoing performance evaluation. The Board of Directors establishes policy direction through the Bank's Business Plan, which is translated into work programs and Key Performance Indicators (KPIs) across all business units.

Strategy implementation is overseen through regular monitoring and evaluation mechanisms, including management meetings, committees, and structured performance reporting. The control function is strengthened through the implementation of three lines of defense involving operational units, risk management and compliance, and internal audit.

Furthermore, the Bank adapts its strategy to external and internal dynamics, supported by an integrated management information system. With disciplined processes and strong governance, management ensures that every policy is implemented consistently, measurably, and aligned with the company's long-term goals.

COMPARISON OF PERFORMANCE WITH BANK BUSINESS PLAN TARGETS

Bank Papua's financial performance in 2025 generally demonstrated satisfactory performance, despite some deviations from the established targets. Total realized assets amounted to IDR 34.34 trillion, or 101,75% of the target, reflecting sustained, albeit not yet fully optimal, growth.

Credit and financing disbursement reached IDR 22,55 trillion, or 97.63% of the target, demonstrating solid expansion while maintaining prudential principles. Meanwhile, third-party fund collection reached IDR 26.17 trillion, or 99.90% of the target, primarily driven by a decline in Demand Deposits and savings accounts, despite significant growth in time deposits.

In terms of profitability, profit before tax exceeded the target



target dengan capaian 100,35%, mencerminkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan efisiensi biaya. Kinerja kualitas aset tetap terjaga dengan rasio NPL Gross sebesar 3,36%, masih dalam batas toleransi industri, serta didukung oleh permodalan yang kuat dengan rasio KPMM yang tetap berada pada level memadai.

Ke depan, manajemen akan terus memperkuat strategi penghimpunan dana murah, menjaga kualitas kredit, serta mengoptimalkan permodalan guna meningkatkan pencapaian target secara lebih optimal dan berkelanjutan.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH BANK DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua menghadapi sejumlah tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi global, tekanan suku bunga yang relatif tinggi, serta *volatilitas* harga komoditas berdampak pada aktivitas ekonomi daerah dan daya bayar debitur. Kondisi ini turut memengaruhi pertumbuhan kredit serta meningkatkan risiko kualitas aset.

Di tingkat regional, tantangan geografis Papua yang luas dan tersebar, keterbatasan infrastruktur, serta tingkat literasi keuangan yang masih beragam menjadi kendala dalam memperluas akses layanan keuangan secara merata. Selain itu, persaingan industri yang semakin ketat, khususnya dari bank nasional dan *fintech*, mendorong Bank untuk terus berinovasi dalam layanan dan produk.

Dari sisi internal, tantangan utama meliputi kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem teknologi informasi, serta penyesuaian organisasi dalam menghadapi transformasi digital dan pengembangan bisnis ke depan, termasuk kesiapan menuju Bank Devisa.

Dalam merespon berbagai tantangan tersebut, Bank Papua menempuh langkah strategis melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas aset, optimalisasi penyaluran kredit secara selektif, serta peningkatan pencadangan. Di sisi pendanaan, Bank mendorong penguatan dana murah berbasis ekosistem Pemerintah Daerah dan digitalisasi layanan.

Selain itu, transformasi digital terus dipercepat melalui pengembangan *mobile banking*, QRIS, dan layanan

by 100.35%, reflecting effective revenue management and cost efficiency. Asset quality performance remained strong, with a gross non-performing loan (NPL) ratio of 3.36%, within industry tolerance, and supported by strong capitalization, with a CAR remaining at an adequate level.

Going forward, management will continue to strengthen its low-cost fund collection strategy, maintain credit quality, and optimize capitalization to achieve its targets more optimally and sustainably.

CHALLENGES FACED BY THE BANK AND STEPS TO RESOLVE THEM

Throughout 2025, Bank Papua faced a number of challenges influenced by both external and internal dynamics. Externally, global economic uncertainty, relatively high interest rate pressures, and commodity price volatility impacted regional economic activity and borrower repayment capacity. These conditions also impacted credit growth and increased asset quality risks.

Regionally, Papua's vast and dispersed geography, limited infrastructure, and varying levels of financial literacy hindered the expansion of equitable access to financial services. Furthermore, increasingly fierce industry competition, particularly from national banks and fintech, encouraged the Bank to continuously innovate in its services and products.

Internally, key challenges included the need to improve human resource quality, strengthen information technology systems, and adapt the organization to digital transformation and future business developments, including readiness to become a foreign exchange bank.

In response to these challenges, Bank Papua has taken strategic steps to strengthen risk management and asset quality, optimize selective lending, and increase reserves. On the funding side, the Bank is promoting the strengthening of low-cost funds based on the regional government ecosystem and the digitalization of services.

Furthermore, digital transformation continues to be accelerated through the development of mobile banking,



berbasis elektronik lainnya guna meningkatkan efisiensi dan pengalaman nasabah. Bank juga meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan serta memperkuat tata kelola dan kepatuhan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Papua optimistis mampu mengelola risiko secara efektif, menjaga stabilitas kinerja, serta memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

ANALISIS TENTANG PROSPEK USAHA

Memasuki tahun 2026, prospek usaha Bank Papua diperkirakan tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang moderat dan terkelola, sejalan dengan stabilitas perekonomian global, ketahanan ekonomi nasional, serta potensi ekonomi daerah di Tanah Papua. Secara global, pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dengan suku bunga yang masih relatif tinggi mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam ekspansi dan pengelolaan likuiditas. Namun demikian, stabilitas inflasi dan arah normalisasi kebijakan moneter memberikan ruang bagi pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap.

Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap solid di kisaran 5,0%–5,3% serta inflasi yang terjaga memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan intermediasi perbankan. Hal ini membuka peluang bagi Bank Papua untuk memperluas pembiayaan, khususnya pada sektor konsumsi, UMKM, dan proyek berbasis pemerintah, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, dari perspektif regional, perekonomian di Wilayah Tanah Papua masih ditopang oleh belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta sektor berbasis sumber daya alam. Kondisi ini memberikan peluang ekspansi kredit pada sektor produktif, perdagangan, dan UMKM, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan terhadap komoditas.

Dari sisi mikro, industri perbankan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan proyeksi peningkatan kredit dan Dana Pihak Ketiga, meskipun diiringi potensi tekanan biaya dana. Dalam konteks tersebut, Bank Papua mengarahkan strategi pada penguatan kualitas pertumbuhan kredit, peningkatan dana murah (CASA), serta optimalisasi *pricing* untuk menjaga *margin* intermediasi.

Dengan mengintegrasikan prospek makro dan mikro, serta

QRIS, and other electronic-based services to improve efficiency and customer experience. The Bank is also improving human resource competency through continuous training and strengthening governance and compliance.

With these measures, Bank Papua is optimistic about being able to manage risks effectively, maintain stable performance, and strengthen competitiveness amidst the ever-evolving dynamics of the banking industry.

BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

Entering 2026, Bank Papua's business prospects are expected to remain on a moderate and manageable growth path, in line with global economic stability, national economic resilience, and the economic potential of the Papua and West Papua regions. Globally, the trend of slowing economic growth, coupled with relatively high interest rates, is encouraging banks to be more selective in their expansion and liquidity management. However, stable inflation and the normalization of monetary policy provide room for a gradual recovery in economic activity.

Nationally, projected economic growth remains solid in the range of 5.0%–5.3%, along with controlled inflation, providing a strong foundation for increased banking intermediation. This opens up opportunities for Bank Papua to expand financing, particularly to the consumer sector, MSMEs, and government-based projects, which are the main drivers of regional economic growth.

Meanwhile, from a regional perspective, the economies of Papua and West Papua are still supported by government spending, infrastructure development, and natural resource-based sectors. This situation presents opportunities for credit expansion in the productive sector, trade, and MSMEs, despite continuing geographical challenges, limited infrastructure, and dependence on commodities.

From a micro perspective, the banking industry shows a positive growth trend with projected increases in credit and third-party funds, albeit accompanied by potential pressures on funding costs. In this context, Bank Papua is directing its strategy toward strengthening the quality of credit growth, increasing low-cost funds (CASA), and optimizing pricing to maintain intermediation margins.

By integrating macro and micro prospects, as well as



memperkuat manajemen risiko dan transformasi digital, Bank Papua optimistis mampu menjaga pertumbuhan yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekonomi daerah secara berkelanjutan.

PENERAPAN TATA KELOLA

Di tengah lanskap industri perbankan yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian, Bank Papua menempatkan tata kelola sebagai jangkar utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan nilai. Implementasi *Good Corporate Governance* tidak lagi dipandang sebagai kewajiban kepatuhan semata, melainkan sebagai *strategic compass* yang menuntun arah pertumbuhan Bank secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsistensi tersebut tercermin dari hasil *self-assessment* GCG dengan peringkat “Baik” (PK-2).

Manajemen risiko dijalankan sebagai bagian integral dari strategi bisnis, dengan fokus pada pengendalian kualitas aset dan likuiditas sebagai prioritas utama. Melalui kerangka *three lines of defense* dan penerapan *risk appetite* yang disiplin, Bank menjaga profil risiko pada level *Low to Moderate*, mencerminkan keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian.

Dalam ekosistem yang semakin diatur ketat, fungsi kepatuhan bertransformasi menjadi *trusted advisor* yang memastikan setiap inisiatif bisnis tetap sejalan dengan regulasi dan etika. Sementara itu, komitmen terhadap integritas diwujudkan melalui sistem *Whistleblowing* yang independen, aman, dan terpercaya sebagai bagian dari penguatan budaya transparansi dan *zero tolerance against fraud*.

Ketahanan Bank Papua juga tercermin dari penilaian tingkat kesehatan dengan predikat “Sehat (PK-2)”, yang didukung oleh fundamental keuangan yang kuat, kualitas aset yang terjaga, serta likuiditas yang memadai. Dengan fondasi tata kelola yang kokoh, disiplin risiko yang terjaga, dan komitmen terhadap integritas, Bank Papua tidak hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga membangun masa depan sebagai institusi keuangan yang resilien, kredibel, dan relevan bagi pembangunan ekonomi daerah.

strengthening risk management and digital transformation, Bank Papua is optimistic about maintaining healthy growth, enhancing competitiveness, and strengthening its role as a key driver of the regional economy in a sustainable manner.

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

Amidst an increasingly dynamic and uncertain banking industry landscape, Bank Papua places good governance as a key anchor in maintaining public trust and ensuring value sustainability. The implementation of Good Corporate Governance is no longer viewed solely as a compliance obligation, but rather as a strategic compass that guides the Bank's responsible and sustainable growth. This consistency is reflected in the GCG self-assessment results, which received a “Good” (PK-2) rating.

Risk management is implemented as an integral part of the business strategy, with a focus on asset quality and liquidity control as top priorities. Through a three-lines-of-defense framework and disciplined risk appetite implementation, the Bank maintains a low to moderate risk profile, reflecting a balance between expansion and prudence.

In an increasingly regulated ecosystem, the compliance function has transformed into a trusted advisor, ensuring that every business initiative remains in line with regulations and ethics. Meanwhile, the commitment to integrity is realized through an independent, secure, and trusted whistleblowing system as part of strengthening a culture of transparency and zero tolerance for fraud.

Bank Papua's resilience is also reflected in its health rating, which is “Healthy (PK-2),” supported by strong financial fundamentals, maintained asset quality, and adequate liquidity. With a solid governance foundation, maintained risk discipline, and a commitment to integrity, Bank Papua not only maintains trust but also builds a future as a resilient, credible, and relevant financial institution for regional economic development.



PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi Bank Papua berperan strategis dalam memastikan kualitas pengambilan keputusan serta efektivitas implementasi kebijakan dan strategi perusahaan. Melalui fungsi evaluasi, koordinasi, dan pemberian rekomendasi yang berbasis analisis, komite mendukung Direksi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kinerja komite menunjukkan peran yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika bisnis, khususnya dalam pengendalian kualitas aset, pengelolaan likuiditas, penyaluran kredit yang selektif, serta penguatan transformasi digital dan sumber daya manusia. Setiap rekomendasi yang dihasilkan juga telah selaras dengan *risk appetite* Bank dan mendukung pencapaian KPI yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan fungsi secara efektif, independen, dan profesional. Kontribusi tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas keputusan strategis, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja Bank Papua di tengah dinamika industri perbankan.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Papua merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan yang mengacu pada ketentuan OJK serta prinsip *Sustainability Reporting* berbasis GRI *Standards*. TJSL tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas sosial, tetapi sebagai pendekatan strategis dalam menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.

Sepanjang tahun 2025, implementasi TJSL difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata, meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dukungan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian lingkungan. Program-program tersebut dirancang berbasis materialitas dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta disinergikan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam pelaksanaannya, Bank Papua juga mengedepankan

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Committees under the Board of Directors of Bank Papua play a strategic role in ensuring the quality of decision-making and the effective implementation of company policies and strategies. Through evaluation, coordination, and analysis-based recommendations, the committees support the Board of Directors in maintaining a balance between business growth, risk management, and regulatory compliance.

The committee's performance demonstrates an increasingly adaptive and responsive role to business dynamics, particularly in asset quality control, liquidity management, selective lending, and strengthening digital transformation and human resources. Each recommendation is also aligned with the Bank's risk appetite and supports the achievement of established KPIs.

Overall, the committees under the Board of Directors have carried out their functions effectively, independently, and professionally. These contributions are crucial in strengthening corporate governance, improving the quality of strategic decisions, and maintaining the stability and sustainability of Bank Papua's performance amidst the dynamics of the banking industry.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Bank Papua's implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) is an integral part of the company's sustainability strategy, which adheres to OJK regulations and the principles of Sustainability Reporting based on GRI Standards. TJSL is positioned not merely as a social activity, but as a strategic approach to creating balanced economic, social, and environmental value.

Throughout 2025, TJSL implementation will focus on programs that deliver tangible impact, including improving financial literacy and inclusion, empowering MSMEs, supporting the education and health sectors, and preserving the environment. These programs are designed based on materiality and stakeholder needs, and are synergized with the Sustainable Finance Action Plan and the Sustainable Development Goals (SDGs).



prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengukuran dampak, termasuk evaluasi efektivitas program secara berkala. Hal ini memastikan bahwa TJSL tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi, Bank Papua memperkuat posisinya sebagai agen pembangunan yang bertanggung jawab, sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan di Tanah Papua.

KEPEMILIKAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM DALAM KELOMPOK USAHA BANK

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun manajemen senior Bank Papua yang memiliki saham di perusahaan. Kepemilikan saham sepenuhnya berada pada pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, 42 pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua, dan Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari.

PERUBAHAN YANG TERJADI DI BANK PAPUA DAN KELOMPOK USAHA

Bank Papua juga tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun *joint venture/special purpose vehicle*. Dengan demikian, Bank Papua tidak memiliki struktur grup usaha, sehingga tidak terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang perlu diungkapkan pada tahun buku 2025.

HAL-HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN AKAN TERJADI DI MASA MENDATANG

Ke depan, industri perbankan diperkirakan akan terus menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dipengaruhi oleh ketidakpastian global, arah suku bunga, serta *volatilitas* pasar keuangan yang berdampak pada likuiditas dan biaya dana. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi yang tetap solid membuka peluang ekspansi kredit, namun diiringi dengan meningkatnya persaingan penghimpunan dana dan tekanan terhadap *margin*.

In its implementation, Bank Papua also prioritizes the principles of accountability, transparency, and impact measurement, including regular evaluation of program effectiveness. This ensures that CSR not only provides short-term benefits but also contributes to inclusive and sustainable regional economic development.

With a structured and integrated approach, Bank Papua strengthens its position as a responsible development agent while creating long-term value for the people and environment in Tanah Papua.

OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHAREHOLDERS IN THE BANK BUSINESS GROUP

As of the end of 2025, no members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or senior management of Bank Papua will own shares in the company. Share ownership rests entirely with the shareholders, consisting of the Papua Provincial Government, the West Papua Provincial Government, 42 district/city governments in Tanah Papua, and the Bank Papua Berdikari Multipurpose Cooperative.

CHANGES OCCURRING AT BANK PAPUA AND THE BUSINESS GROUP

Bank Papua also does not have any subsidiaries, associates, or joint ventures/special purpose vehicles. Therefore, Bank Papua does not have a business group structure, and therefore, there are no changes to the business group structure that need to be disclosed in the 2025 financial year.

IMPORTANT THINGS THAT ARE EXPECTED TO HAPPEN IN THE FUTURE

Going forward, the banking industry is expected to continue to face increasingly complex dynamics, influenced by global uncertainty, interest rate trends, and financial market volatility, which impact liquidity and the cost of funds. At the national level, continued solid economic growth opens up opportunities for credit expansion, but is accompanied by increased competition for fundraising and pressure on margins.



Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan struktur industri melalui konsolidasi BPD, termasuk skema Kelompok Usaha Bank (KUB) yang didorong regulator. Kebijakan ini menuntut bank pembangunan daerah untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, baik melalui setoran modal maupun sinergi antarbank. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi industri perbankan daerah akan semakin mengarah pada konsolidasi, efisiensi, dan penguatan model bisnis.

Di sisi lain, persaingan juga semakin intensif dengan hadirnya bank digital dan *fintech* yang menawarkan layanan lebih cepat dan fleksibel. Hal ini menuntut percepatan transformasi digital, penguatan layanan, serta peningkatan pengalaman nasabah.

Dalam konteks regional, Tanah Papua masih memiliki peluang besar melalui sektor pemerintah, infrastruktur, dan sumber daya alam, namun tetap dihadapkan pada tantangan geografis dan literasi keuangan.

Menghadapi hal tersebut, Bank Papua akan terus memperkuat permodalan, meningkatkan kualitas aset dan likuiditas, serta mempercepat digitalisasi dan sinergi ekosistem daerah guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan kompetitif.

One strategic issue of concern is strengthening the industry structure through the consolidation of Regional Development Banks (BPD), including the Bank Business Group (KUB) scheme promoted by the regulator. This policy requires regional development banks to strengthen their capital and increase their competitiveness, both through capital injections and interbank synergy. This development indicates that the transformation of the regional banking industry will increasingly shift towards consolidation, efficiency, and strengthening business models.

Conversely, competition is also intensifying with the emergence of digital banks and fintech companies offering faster and more flexible services. This demands accelerated digital transformation, strengthened services, and enhanced customer experience.

Regionally, Papua and West Papua still hold significant opportunities through the government, infrastructure, and natural resource sectors, but continue to face challenges of geography and financial literacy.

In response, Bank Papua will continue to strengthen its capital, improve asset quality and liquidity, and accelerate digitalization and synergy within the regional ecosystem to maintain sustainable and competitive growth.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi direksi, dengan susunan sebagai berikut :

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, there will be no changes to the composition of the board of directors, with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Uji kepatutan dan kelayakan dari OJK Fit and proper test from OJK	Masa Jabatan Length of service	Periode Period
Yuliana Dolfince Yembise, SH., MH	Direktur Utama	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR-130/D.03/2023	2023– 2027	Pertama
Betty Juliaantje Parinussa, BSC., SE., MM	Direktur Kepatuhan	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/ III/2025 tanggal 20 Maret 2025	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP -86/D.03/2021.	2025 - 2029	Kedua
Ir. Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP -125/D.03/2016.	2021– 2025	Kedua



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Uji kepatutan dan kelayakan dari OJK Fit and proper test from OJK	Masa Jabatan Length of service	Periode Period
Isak Samuel Wopari, SE.MM	Direktur Operasional	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP -127/D.03/2016.	2021– 2025	Kedua
Ir. Pujiyanto, M.Si	Direktur Keuangan	SK RUPS Luar Biasa Nomor: 04/SK/RUPS-BPD/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEPR- 39/D.03/2024	2024-2028	Pertama

APRESIASI

Mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada Bank Papua.

Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh pegawai atas dedikasi, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan serta mendorong kinerja Bank yang berkelanjutan. Kepada para nasabah dan mitra kerja, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik.

Kami meyakini bahwa kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan, Bank Papua akan terus melangkah maju sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Tuhan memberkati langkah kita bersama.

APPRECIATION

In closing this report, we would like to express our sincere appreciation and gratitude to all shareholders, the Board of Commissioners, regulators, and all stakeholders for their continued trust and support of Bank Papua.

We also extend our deepest appreciation to all employees for their dedication, professionalism, and spirit of togetherness in facing various challenges and driving the Bank's sustainable performance. To our customers and partners, we express our gratitude for the trust and synergy we have established.

We believe that strong collaboration between all stakeholders is the primary foundation for building a better future. With a spirit of togetherness, innovation, and a commitment to sustainability, Bank Papua will continue to move forward as a strategic partner in driving economic growth and the well-being of the people of Papua.

God bless our shared journey.

Jayapura, April 2026

Atas nama Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua
On behalf of the Board of Directors of PT Bank Papua



Yuliana Dolfince Yembise, SH, MH
Direktur Utama
President Director



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Yorgemes Derek Hegemur, SH, MH
Komisaris Utama
President Commissioner



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Peace be upon us all,

Yang Terhormat,

Para Pemegang Saham,
 Direksi,
 serta seluruh Pemangku Kepentingan Bank Papua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, Bank Papua dapat melalui tahun 2025 dengan tetap menjaga kinerja dan stabilitas di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang penuh tantangan.

Tahun 2025 merupakan periode yang ditandai oleh ketidakpastian yang masih tinggi, dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, *volatilitas* pasar keuangan, serta arah kebijakan moneter yang cenderung ketat. Di tengah kondisi tersebut, sektor perbankan dituntut untuk semakin adaptif, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko, serta memperkuat tata kelola sebagai fondasi keberlanjutan.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja Bank Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Direksi dalam menjalankan strategi bisnis secara *prudent*, serta kemampuan Bank dalam menjaga kualitas aset, likuiditas, dan permodalan di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

Perekonomian nasional yang tetap tumbuh resilien, didukung oleh konsumsi domestik dan transformasi digital, turut memberikan ruang bagi sektor perbankan untuk tetap berkembang. Sementara itu, kawasan Tanah Papua terus menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan melalui pengembangan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang diambil tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dengan sinergi yang erat antara Dewan Komisaris dan

Dear Shareholders,

Board of Directors,
 and all Stakeholders of Bank Papua,

We offer praise and gratitude to God Almighty, because with His blessings and guidance, Bank Papua was able to navigate 2025 while maintaining its performance and stability amidst the challenging dynamics of the global and national economy.

2025 is a period marked by continued high levels of uncertainty, influenced by the global economic slowdown, financial market volatility, and a tighter monetary policy direction. Amidst these conditions, the banking sector is required to be more adaptive, maintain a balance between growth and risk, and strengthen governance as a foundation for sustainability.

In this context, the Board of Commissioners views Bank Papua's performance throughout 2025 as demonstrating strong resilience. This is inseparable from the Board of Directors' commitment to implementing prudent business strategies, as well as the Bank's ability to maintain asset quality, liquidity, and capital amidst increasingly competitive industry dynamics.

The national economy, which continues to grow resiliently, supported by domestic consumption and digital transformation, also provides room for the banking sector to thrive. Meanwhile, the Tanah Papua region continues to demonstrate promising growth potential through the development of leading sectors, infrastructure development, and increased economic activity based on local potential.

In line with these conditions, the Board of Commissioners actively carries out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, to ensure that every policy and strategy adopted remains within the framework of good governance, strong risk management, and compliance with applicable regulations.

With close synergy between the Board of Commissioners



Direksi, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Papua diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah yang berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara berkesinambungan melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Bank Papua sepanjang tahun 2025. Penilaian ini didasarkan pada pencapaian kinerja bisnis, efektivitas implementasi strategi, kualitas pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara profesional, *prudent*, dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Penilaian tersebut dikelompokkan dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

- **Tinjauan Makroekonomi**

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kemampuan yang solid dalam merespons dinamika makroekonomi sepanjang tahun 2025, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional, yang secara langsung mempengaruhi arah operasional dan kinerja Bank Papua.

Pada tataran global, perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian yang cukup tinggi, dipicu oleh perlambatan pertumbuhan di negara-negara maju, kebijakan moneter yang cenderung ketat, serta *volatilitas* pasar keuangan akibat tensi geopolitik. Kondisi suku bunga global yang relatif tinggi turut mendorong peningkatan biaya dana serta memengaruhi arus likuiditas di sektor keuangan. Dalam konteks ini, Direksi dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengendalian risiko, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penguatan struktur pendanaan.

Di tingkat nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat dengan pertumbuhan yang tetap solid, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta percepatan transformasi digital. Stabilitas makroekonomi yang terjaga memberikan

and the Board of Directors, and support from all stakeholders, Bank Papua is expected to continue strengthening its role as a regional development bank that contributes significantly to driving inclusive and sustainable economic growth in Tanah Papua.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN RELATING TO COMPANY MANAGEMENT

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners continuously assesses the Board of Directors' performance in managing Bank Papua throughout 2025. This assessment is based on business performance achievements, the effectiveness of strategy implementation, the quality of risk management, and compliance with the principles of good corporate governance. In general, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has carried out its corporate management functions professionally, prudently, and adaptively in facing the dynamics of the banking industry.

This assessment is grouped into several key aspects as follows:

- **Macroeconomic Review**

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated a solid ability to respond to macroeconomic dynamics throughout 2025, both at the global, national, and regional levels, which directly impact the operational direction and performance of Bank Papua.

At the global level, the world economy remains overshadowed by significant uncertainty, triggered by slowing growth in developed countries, tighter monetary policies, and financial market volatility due to geopolitical tensions. Relatively high global interest rates have contributed to an increase in the cost of funds and impacted liquidity flows in the financial sector. In this context, the Board of Directors is assessed as capable of maintaining a balance between business expansion and risk management, by prioritizing the principle of prudence and strengthening the funding structure.

At the national level, the Indonesian economy demonstrates strong resilience with continued solid growth, supported by domestic consumption, investment, and accelerated digital transformation. Maintained macroeconomic stability provides room



ruang bagi industri perbankan untuk tetap tumbuh, meskipun dihadapkan pada tekanan biaya dana dan meningkatnya persaingan penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Direksi dinilai mampu memanfaatkan momentum ini melalui strategi yang adaptif, khususnya dalam memperkuat intermediasi, menjaga kualitas aset, serta mengoptimalkan sumber pendapatan.

Sementara itu, pada tingkat regional, perekonomian Tanah Papua menunjukkan dinamika yang positif, ditopang oleh belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta sektor berbasis sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini memberikan peluang yang signifikan bagi Bank Papua untuk memperluas pembiayaan pada sektor produktif, termasuk UMKM dan sektor strategis lainnya. Namun demikian, tantangan struktural seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingkat literasi keuangan yang masih beragam tetap menjadi faktor yang perlu dikelola secara cermat.

Dalam menghadapi keseluruhan dinamika tersebut, Direksi dinilai mampu menerjemahkan arah makroekonomi ke dalam kebijakan yang terukur dan relevan, melalui penguatan pembiayaan sektor produktif, sinergi dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi layanan keuangan yang inklusif. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan Direksi dalam menjaga keseimbangan antara peluang pertumbuhan dan risiko, sekaligus memperkuat peran Bank Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.

• Kinerja Operasional dan Keuangan

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional dan keuangan Bank Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang terkendali dan berada dalam koridor strategi yang telah ditetapkan. Di tengah dinamika biaya dana dan persaingan likuiditas, Direksi dinilai mampu menjaga stabilitas struktur neraca melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang lebih adaptif.

Pertumbuhan aset dan kredit yang tetap terjaga mencerminkan ekspansi yang dilakukan secara selektif, dengan fokus pada kualitas portofolio dan mitigasi risiko. Sementara itu, dinamika pada Dana Pihak Ketiga, khususnya pergeseran komposisi dari dana murah ke dana berjangka, dipandang sebagai respons strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas, meskipun memberikan implikasi terhadap biaya dana.

for the banking industry to continue growing, despite facing pressures on funding costs and increased competition for third-party funds. The Board of Directors is considered capable of capitalizing on this momentum through adaptive strategies, particularly in strengthening intermediation, maintaining asset quality, and optimizing revenue sources.

Meanwhile, at the regional level, the economies of Papua and West Papua are showing positive dynamics, supported by government spending, infrastructure development, and natural resource-based sectors. Economic growth in this region presents significant opportunities for Bank Papua to expand financing to productive sectors, including MSMEs and other strategic sectors. However, structural challenges such as geographic conditions, limited infrastructure, and varying levels of financial literacy remain factors that require careful management.

In addressing these dynamics, the Board of Directors is considered capable of translating macroeconomic direction into measurable and relevant policies, through strengthening financing for productive sectors, synergizing with local governments, and optimizing inclusive financial services. This approach reflects the Board of Directors' ability to maintain a balance between growth opportunities and risks, while strengthening Bank Papua's role as a driver of a sustainable regional economy.

• Operational and Financial Performance

The Board of Commissioners assesses that Bank Papua's operational and financial performance throughout 2025 demonstrated controlled performance and fell within the established strategic corridor. Amidst the dynamic cost of funds and liquidity competition, the Board of Directors was deemed capable of maintaining balance sheet stability through more adaptive asset and liability management.

The sustained growth in assets and credit reflects selective expansion, with a focus on portfolio quality and risk mitigation. Meanwhile, the dynamics in Third Party Funds, particularly the shift in composition from low-cost funds to term funds, are seen as a strategic response to maintain adequate liquidity, despite the implications for the cost of funds.



Dari sisi profitabilitas, Dewan Komisaris melihat adanya upaya konsisten Direksi dalam menjaga kinerja melalui penguatan efisiensi operasional dan diversifikasi sumber pendapatan. Optimalisasi pendapatan non-bunga serta pengendalian beban operasional menjadi faktor penting dalam mempertahankan pertumbuhan laba di tengah tekanan *margin*.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian kinerja tersebut telah sejalan dengan arah Rencana Bisnis Bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, Direksi dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas aset, dan efisiensi, sehingga kinerja Bank tetap stabil dan resilien di tengah dinamika industri perbankan.

• **Tingkat Kesehatan Bank**

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berhasil menjaga tingkat kesehatan Bank pada kategori yang baik, tercermin dari kualitas aset yang tetap terjaga, profil risiko yang terkendali, serta permodalan yang kuat. Penerapan manajemen risiko yang disiplin, termasuk pengendalian rasio kredit bermasalah dan penguatan likuiditas, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas Bank. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik serta penguatan fungsi kepatuhan turut mendukung terciptanya operasional yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Direksi tidak hanya fokus pada pencapaian kinerja jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang efektif dan bertanggung jawab dalam mengelola Bank Papua sepanjang tahun 2025. Dengan strategi yang adaptif, pengelolaan risiko yang *prudent*, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik, Direksi mampu menjaga stabilitas kinerja sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI BANK

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Papua menempatkan peran strategis sebagai penjaga arah (*strategic guardian*) yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil Direksi selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap implementasi, tetapi juga

Regarding profitability, the Board of Commissioners observes the Board of Directors' consistent efforts to maintain performance by strengthening operational efficiency and diversifying revenue sources. Optimizing non-interest income and controlling operating expenses are crucial factors in maintaining profit growth amidst margin pressures.

Furthermore, the Board of Commissioners assesses that this performance achievement aligns with the Bank's Business Plan, while maintaining the principles of prudence and sustainability. Overall, the Board of Directors is considered successful in maintaining a balance between growth, asset quality, and efficiency, ensuring the Bank's performance remains stable and resilient amidst the dynamics of the banking industry.

• **Bank Soundness**

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has successfully maintained the Bank's soundness rating, as reflected in maintained asset quality, a manageable risk profile, and strong capitalization. Disciplined risk management, including controlling the non-performing loan ratio and strengthening liquidity, is a crucial factor in maintaining the Bank's stability. Furthermore, the implementation of good governance and strengthening the compliance function contribute to healthy and sustainable operations. This demonstrates that the Board of Directors is not solely focused on achieving short-term performance but also ensuring long-term business continuity.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated effective and responsible performance in managing Bank Papua throughout 2025. With an adaptive strategy, prudent risk management, and a commitment to good governance, the Board of Directors has been able to maintain stable performance while strengthening the foundation for sustainable growth in the future.

OVERSIGHT OF THE BANK'S STRATEGY IMPLEMENTATION

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners of Bank Papua plays a strategic role as a strategic guardian, ensuring that every policy and step taken by the Board of Directors aligns with the company's long-term goals. Oversight is carried out not only at the implementation stage but also throughout the strategy



sejak proses perumusan strategi, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan memiliki landasan yang kuat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis.

Dewan Komisaris secara aktif memberikan pandangan dan rekomendasi kepada Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank serta strategi korporasi, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, profil risiko, kapasitas permodalan, serta peluang dan tantangan di wilayah operasional Bank Papua. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

Pada tahap implementasi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui mekanisme yang terstruktur, antara lain melalui rapat berkala dengan Direksi, evaluasi kinerja, serta pemantauan terhadap pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) dan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui peran komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang melakukan kajian lebih mendalam terhadap aspek risiko, audit, serta remunerasi dan nominasi.

Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Direksi menjalankan strategi secara disiplin, konsisten, dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal. Dalam hal ini, Dewan Komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan arahan dan perspektif independen guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Bank Papua sebagaimana disusun oleh Direksi telah disusun secara komprehensif, realistis, dan berbasis pada analisis yang mendalam terhadap dinamika ekonomi global, nasional, maupun regional. Proyeksi tersebut tidak hanya mencerminkan optimisme yang terukur, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja Bank ke depan.

Dari perspektif makroekonomi, Direksi telah mempertimbangkan kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian, termasuk arah suku bunga, tekanan inflasi, serta *volatilitas* pasar keuangan. Sementara itu, pada tingkat nasional, stabilitas ekonomi yang relatif terjaga dan pertumbuhan yang tetap solid memberikan ruang bagi

formulation process, ensuring that the established policy direction has a strong, measurable foundation and is adaptive to the dynamics of the business environment.

The Board of Commissioners actively provides insights and recommendations to the Board of Directors in the preparation of the Bank's Business Plan and corporate strategy, taking into account macroeconomic conditions, risk profile, capital capacity, and opportunities and challenges in Bank Papua's operational areas. This approach ensures that the formulated strategy is not only growth-oriented but also considers aspects of sustainability and good governance.

During the implementation phase, the Board of Commissioners conducts oversight through structured mechanisms, including regular meetings with the Board of Directors, performance evaluations, and monitoring the achievement of established Key Performance Indicators (KPIs) and risk appetite. Furthermore, oversight is strengthened through the role of committees under the Board of Commissioners, which conduct in-depth reviews of risk, audit, and remuneration and nomination aspects.

The Board of Commissioners also ensures that the Board of Directors implements the strategy in a disciplined, consistent manner, and is responsive to changing external conditions. In this regard, the Board of Commissioners serves not only as a supervisory body but also as a strategic partner, providing direction and independent perspective to improve the quality of decision-making.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners believes that Bank Papua's business prospects, as prepared by the Board of Directors, are comprehensive and realistic, based on an in-depth analysis of global, national, and regional economic dynamics. These projections not only reflect measured optimism but also consider various risk factors that could potentially impact the Bank's future performance.

From a macroeconomic perspective, the Board of Directors has considered global conditions, which remain shrouded in uncertainty, including the direction of interest rates, inflationary pressures, and financial market volatility. Meanwhile, at the national level, relatively maintained economic stability and solid growth provide room for



peningkatan intermediasi perbankan. Di tingkat regional, potensi ekonomi Tanah Papua yang didorong oleh belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta sektor berbasis sumber daya alam menjadi peluang strategis yang relevan bagi pengembangan bisnis Bank Papua.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa proyeksi yang disusun Direksi telah mempertimbangkan dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif, termasuk meningkatnya persaingan dalam penghimpunan dana, tekanan terhadap *margin*, serta percepatan transformasi digital. Dalam konteks tersebut, arah strategi yang menitikberatkan pada penguatan kualitas kredit, peningkatan dana murah, optimalisasi pricing, serta akselerasi digitalisasi layanan dinilai sebagai langkah yang tepat dan relevan.

Selain itu, prospek usaha juga telah mempertimbangkan penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, serta penerapan manajemen risiko yang disiplin sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara orientasi pertumbuhan dan pengendalian risiko yang menjadi kunci dalam menghadapi dinamika industri ke depan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang disusun Direksi telah mencerminkan arah yang strategis dan adaptif, serta didukung oleh dasar pertimbangan yang kuat. Dengan implementasi yang konsisten dan tata kelola yang baik, Bank Papua diyakini memiliki kemampuan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah yang berkontribusi nyata bagi perekonomian di Tanah Papua.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan tata kelola di Bank Papua sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan yang konsisten dan semakin terintegrasi dengan arah strategi perusahaan. Tata kelola tidak lagi sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kualitas pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi.

increased banking intermediation. Regionally, the economic potential of Papua and West Papua, driven by government spending, infrastructure development, and the natural resource-based sector, presents a relevant strategic opportunity for Bank Papua's business development.

The Board of Commissioners also assesses that the projections prepared by the Board of Directors have taken into account the increasingly competitive dynamics of the banking industry, including increased competition in fundraising, pressure on margins, and the acceleration of digital transformation. In this context, a strategic direction emphasizing strengthening credit quality, increasing low-cost funds, optimizing pricing, and accelerating service digitalization is deemed appropriate and relevant.

Furthermore, the business outlook also considers strengthening the capital structure, improving governance quality, and implementing disciplined risk management as the primary foundation for maintaining business sustainability. This approach reflects the balance between growth orientation and risk control, which is key to facing future industry dynamics.

Overall, the Board of Commissioners is of the view that the business outlook formulated by the Board of Directors reflects a strategic and adaptive direction, supported by strong considerations. With consistent implementation and good governance, Bank Papua is believed to have the ability to maintain healthy growth, increase competitiveness, and strengthen its role as a regional development bank that makes a significant contribution to the economy in Papua.

PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners views that the implementation of good corporate governance at Bank Papua throughout 2025 has shown consistent progress and is increasingly integrated with the company's strategic direction. Governance is no longer merely about fulfilling compliance aspects, but has become a key foundation for maintaining business sustainability, strengthening stakeholder trust, and ensuring quality decision-making across all levels of the organization.



Dalam aspek manajemen risiko, Bank Papua dinilai telah mengimplementasikan pendekatan yang disiplin dan terintegrasi, dengan menempatkan pengendalian kualitas aset dan likuiditas sebagai prioritas utama. Penerapan *risk appetite* yang jelas, didukung oleh sistem pemantauan dan *early warning*, memungkinkan Bank mengelola risiko secara lebih proaktif dan terukur. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara dorongan pertumbuhan bisnis dan prinsip kehati-hatian.

Pada sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris menilai bahwa Bank telah memperkuat efektivitas mekanisme pengendalian melalui penerapan *three lines of defense*. Sinergi antara unit operasional, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, serta audit internal berjalan semakin solid, sehingga mampu memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dilaksanakan sesuai kebijakan, prosedur, dan prinsip tata kelola yang baik.

Sementara itu, *Whistleblowing System* telah diimplementasikan sebagai bagian penting dalam membangun budaya integritas dan transparansi. Dewan Komisaris melihat bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai kanal pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang memperkuat akuntabilitas serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik kecurangan.

Dalam konteks *sustainability governance*, Bank Papua menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Hal ini tercermin dari penyelarasan kebijakan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, penerapan prinsip ESG, serta penguatan peran Bank sebagai agen pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa tata kelola Bank Papua telah berkembang secara positif dan berada pada jalur yang tepat. Dengan penguatan yang berkelanjutan pada seluruh aspek tata kelola, Bank Papua diharapkan mampu menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In terms of risk management, Bank Papua is considered to have implemented a disciplined and integrated approach, prioritizing asset quality and liquidity control. The implementation of a clear risk appetite, supported by a monitoring and early warning system, enables the Bank to manage risk more proactively and measurably. This approach reflects a balance between driving business growth and the principle of prudence.

Regarding the internal control system, the Board of Commissioners assesses that the Bank has strengthened the effectiveness of its control mechanisms through the implementation of three lines of defense. Synergy between operational units, risk management and compliance functions, and internal audit has become increasingly solid, ensuring that all business activities are carried out in accordance with policies, procedures, and good governance principles.

Meanwhile, a Whistleblowing System has been implemented as a crucial part of building a culture of integrity and transparency. The Board of Commissioners views this system as not only a reporting channel but also a control instrument that strengthens accountability and encourages a work environment free from fraudulent practices.

In the context of sustainability governance, Bank Papua demonstrates a growing commitment to integrating sustainability principles into its business strategy. This is reflected in the alignment of policies with the Sustainable Finance Action Plan, the implementation of ESG principles, and the strengthening of the Bank's role as a regional development agent that focuses not only on financial performance but also on social and environmental impact.

Overall, the Board of Commissioners believes that Bank Papua's governance has developed positively and is on the right track. With continued strengthening of all aspects of governance, Bank Papua is expected to maintain stability, increase competitiveness, and create sustainable long-term value for all stakeholders.



PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta penguatan tata kelola perusahaan. Keberadaan komite tidak hanya menjadi perangkat pendukung, tetapi juga berfungsi sebagai *strategic advisory* yang memastikan setiap kebijakan dan proses bisnis berjalan dalam koridor prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi.

Komite Audit menunjukkan kinerja yang solid dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi yang intensif dengan auditor internal dan eksternal, Komite Audit mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan mitigasi risiko operasional. Peran ini menjadi krusial dalam menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Komite Remunerasi dan Nominasi dinilai telah menjalankan fungsi secara objektif dan transparan dalam memastikan pengelolaan Sumber Daya Manusia, khususnya pada tingkat Direksi dan Dewan Komisaris, berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan remunerasi yang disusun telah mempertimbangkan kinerja, risiko, serta praktik terbaik industri, sementara proses nominasi dilakukan secara selektif guna memastikan tersedianya kepemimpinan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif dan terintegrasi. Komite ini secara aktif mengevaluasi profil risiko Bank, memberikan masukan terkait kebijakan risiko, serta memastikan keselarasan antara *risk appetite* dan strategi bisnis. Kontribusi Komite Pemantau Risiko menjadi semakin penting dalam menjaga kualitas aset, stabilitas likuiditas, serta ketahanan Bank di tengah dinamika industri yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite telah berfungsi secara optimal, adaptif, dan memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan. Sinergi yang kuat antara Dewan Komisaris dan komite-komite di bawahnya menjadi fondasi penting

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners assesses that the committees under the Board of Commissioners have effectively carried out their functions and roles in supporting the implementation of supervisory duties and strengthening corporate governance. The committees serve not only as a supporting instrument but also as a strategic advisory body, ensuring that all business policies and processes operate within the principles of prudence, accountability, and transparency.

The Audit Committee demonstrated solid performance in ensuring the effectiveness of the internal control system, the quality of financial reporting, and compliance with applicable regulations. Through intensive coordination with internal and external auditors, the Audit Committee was able to provide constructive recommendations for improving the quality of oversight and mitigating operational risks. This role is crucial in maintaining the integrity of financial reporting and stakeholder trust.

The Remuneration and Nomination Committee is assessed as having performed its functions objectively and transparently in ensuring that human resource management, particularly at the Board of Directors and Board of Commissioners levels, is carried out in accordance with good governance principles. The remuneration policy formulated takes into account performance, risks, and industry best practices, while the nomination process is selective to ensure the availability of competent, professional, and high-integrity leadership.

Meanwhile, the Risk Oversight Committee plays a strategic role in ensuring the effective and integrated implementation of risk management. This committee actively evaluates the Bank's risk profile, provides input on risk policies, and ensures alignment between risk appetite and business strategy. The Risk Oversight Committee's contribution is increasingly crucial in maintaining asset quality, liquidity stability, and the Bank's resilience amidst increasingly complex industry dynamics.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the committees have functioned optimally, adaptively, and added value to the decision-making process. The strong synergy between the Board of Commissioners and its subordinate committees serves as a crucial foundation



dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pengawasan, serta menjaga keberlanjutan kinerja Bank Papua di masa mendatang.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai mitra strategis yang secara aktif memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi. Pemberian nasihat dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis pada dinamika bisnis yang dihadapi Bank Papua, sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara konsisten menyelenggarakan rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi sebagai forum utama dalam memberikan pandangan strategis. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan masukan terkait arah kebijakan, penguatan manajemen risiko, peningkatan kinerja, serta respons terhadap perkembangan ekonomi dan regulasi. Frekuensi pertemuan yang intensif mencerminkan komitmen Dewan Komisaris dalam memastikan pengawasan yang efektif sekaligus menjaga kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Selain melalui forum formal, pemberian nasihat juga dilakukan melalui komunikasi non-formal yang bersifat konsultatif dan responsif terhadap isu-isu strategis yang memerlukan perhatian segera. Pendekatan ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk memberikan arahan secara tepat waktu, sekaligus mendukung Direksi dalam mengambil keputusan yang cepat namun tetap terukur.

Dewan Komisaris juga memanfaatkan laporan berkala, hasil evaluasi komite, serta pemantauan indikator kinerja dan profil risiko sebagai dasar dalam memberikan nasihat yang konstruktif dan berbasis data. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat terhadap kondisi aktual Bank.

for strengthening governance, improving oversight, and ensuring the sustainability of Bank Papua's performance in the future.

FREQUENCY AND METHOD OF PROVIDING ADVICE TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners not only acts as a controller but also as a strategic partner, actively providing direction and advice to the Board of Directors. This advice is provided in a structured, continuous manner, and based on the business dynamics faced by Bank Papua, ensuring that every policy taken remains within the framework of good governance and prudent principles.

Throughout 2025, the Board of Commissioners consistently held internal meetings and joint meetings with the Board of Directors as the primary forum for providing strategic insights. In these forums, the Board of Commissioners provided input regarding policy direction, strengthening risk management, improving performance, and responding to economic and regulatory developments. The intensive frequency of these meetings reflects the Board of Commissioners' commitment to ensuring effective oversight while maintaining the quality of decision-making at the management level.

In addition to formal forums, advice is also provided through informal communication, which is consultative and responsive to strategic issues requiring immediate attention. This approach enables the Board of Commissioners to provide timely direction while supporting the Board of Directors in making swift yet measured decisions.

The Board of Commissioners also utilizes periodic reports, committee evaluation results, and monitoring of performance indicators and risk profiles as a basis for providing constructive, data-driven advice. Thus, each recommendation is not merely normative but also strongly relevant to the Bank's actual conditions.



PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Namun demikian, Bank Papua berduka atas wafatnya salah satu anggota Dewan Komisaris, Bapak Dortheis Sesa, SE, pada tanggal 15 Desember 2025.

Dewan Komisaris menyampaikan duka cita yang mendalam serta penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, integritas, dan pengabdian beliau selama menjalankan tugas. Jasa dan keteladanan beliau akan senantiasa menjadi bagian penting dalam perjalanan dan penguatan tata kelola Bank Papua.

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, there were no changes to the composition of the Board of Commissioners. However, Bank Papua mourns the passing of one of its Board of Commissioners members, Mr. Dortheis Sesa, SE, on December 15, 2025.

The Board of Commissioners expresses its deepest condolences and expresses its deepest appreciation and gratitude for his dedication, integrity, and devotion during his duties. His services and exemplary conduct will continue to be an important part of Bank Papua's journey and strengthening of its governance.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Uji kepatutan dan kelayakan dari OJK Fit and proper test from OJK	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Yorgemes Derek Hegemur, SH, MH	Komisaris Utama	Keputusan RUPS-LB Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR - 131/D.03/2023	2023-2027	Pertama
Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris Non Independen	Keputusan RUPS-LB Nomor :06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 169/D.03/2018.	2021-2025	Kedua
Dortheis Sesa, SE*	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB Nomor :04/SK/RUPSLB-BPD/III/2025	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 31/D.03/2018.	2025-2029	Ketiga
H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB Nomor :02/SK/RUPS-BPD/XII/2022 tanggal 28 Juni 2022	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 92/D.03/2022	2022-2026	Pertama
Victor Abraham Abaidata, SH	Komisaris Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor: 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: KEPR-41/D.03/2024.	2024-2028	Pertama

* Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

* Died on December 15, 2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

All members of the Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities in accordance with the Board of Commissioners' guidelines and work procedures.

PENUTUP

Mengakhiri laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, Direksi, regulator, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada Bank Papua.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank Papua yang telah bekerja dengan dedikasi, ketulusan, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun 2025. Kepada para nasabah dan mitra kerja, kami juga menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik.

CLOSING

In concluding this report, the Board of Commissioners expresses its highest appreciation and gratitude to all shareholders, the Board of Directors, regulators, local governments, and all stakeholders for their continued trust and support of Bank Papua.

We extend our special thanks to all levels of management and employees of Bank Papua who have worked with dedication, sincerity, and a spirit of togetherness in facing various challenges throughout 2025. We also extend our appreciation to our customers and partners for their trust and the well-established synergy.



Bagi kami, Bank Papua bukan sekadar institusi keuangan, tetapi bagian dari denyut kehidupan masyarakat Tanah Papua. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa persaudaraan yang hidup dalam budaya Papua menjadi kekuatan yang terus mengikat dan menggerakkan langkah kita bersama. Dalam filosofi hidup masyarakat Papua, kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan bersama.

Dengan semangat tersebut, Dewan Komisaris meyakini bahwa perjalanan Bank Papua ke depan akan semakin kuat, tidak hanya dalam kinerja, tetapi juga dalam memberikan makna dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kolaborasi yang terjalin hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah dan upaya kita dalam membangun Tanah Papua yang lebih maju dan sejahtera.

For us, Bank Papua is not simply a financial institution, but a vital part of the lifeblood of the Papuan people. The values of togetherness, mutual cooperation, and brotherhood that are entrenched in Papuan culture are the forces that continue to bind and drive us together. In the Papuan philosophy of life, progress is measured not only by growth, but by the extent of shared benefits.

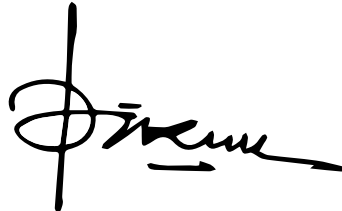
With this spirit, the Board of Commissioners believes that Bank Papua's future journey will be even stronger, not only in terms of performance, but also in providing meaningful and tangible contributions to society. The collaboration established today is the foundation for a more inclusive, sustainable, and equitable future.

May God Almighty continue to bless every step and effort we take in building a more advanced and prosperous Papua.

Jayapura, April 2026

Atas nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners



Yorgemes Derek Hegemur, SH, MH

Komisaris Utama

President Commissioner



Lembar Pertanggungjawaban

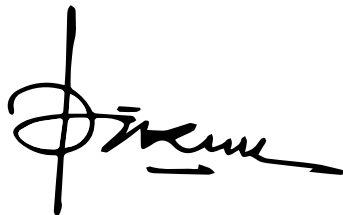
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan **PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jayapura, April 2026

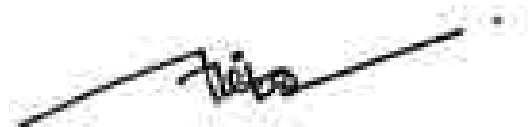
Dewan Komisaris
Board of Commissioner



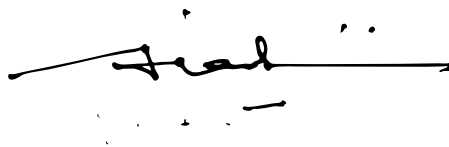
Yorgemes Derek Hegemur, SH, MH
Komisaris Utama
President Commissioner



H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Victor Abraham Abaidata, SH
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Drs. Ali Baham Temongmere, MTP
Komisaris Non Independen
Non Independent Commissioner



Accountability Statement

*Statement from the Board of Commissioners and Directors Regarding
Responsibility for the Annual Report of
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2025*

We, the undersigned, affirm that all information in the Annual Report of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the fiscal year 2025 is complete, and we take full responsibility for the accuracy of its contents.

This statement is made truthfully.

Jayapura, April, 2026

Direksi
Board of Director



Yuliana Dolfince Yembise, SH.,MH
Direktur Utama
President Director



Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Ir. Pujiyanto, M. Si
Direktur Keuangan
Finance Director



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Disussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Laporan Keuangan
Financial Statements



Indeks OJK
OJK Index

Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan - Company name
PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Nama Panggilan - Nickname
Bank Papua



Status Perusahaan - Company Status
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Regional Owned Enterprises (BUMD)



Tanggal Pendirian - Date of Establishment
13 April 1966 / April 13, 1966



Kepemilikan - Ownership

Saham Seri A

- Pemerintah Provinsi Papua : 24,53%
- Pemerintah Provinsi Papua Barat : 15,12%
- Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Tanah Papua : 58,11%

Saham Seri B

- KSU Bank Papua Berdikari : 2,25%



Bidang Usaha - Line of Business
Perbankan / Banking



Segmen Usaha - Business Segments
Perorangan Badan Usaha
Individual Business entity



Kegiatan Usaha - Business Activities

Perbankan - Banking

- Dana Pihak Ketiga.
- Pembiayaan/kredit.
- Layanan Jasa Bank Papua.
- Third Party Funds.
- Financing/lending.
- Bank Papua Services.



Modal Dasar - Authorized Capital
Rp4.000.000.000,000, -



Modal Disetor - Paid-up capital
Rp2.880.473.522.106,-



Jenis Saham - Share Types
SERI A dan SERI B
SERIES A and SERIES B

- Papua Provincial Government: 24,53%
- West Papua Provincial Government: 15,12%
- District and City Governments
- All of Tanah Papua: 58,11%

- Bank Papua Berdikari Multi-Business Cooperative: 2,25%



NPWP - Tax ID Number
01.135.393.5-952.000



NPWPD - Local Tax ID Number
R.2.0007813.01.001



Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Company Registration Certificate (TDP)
2608.1.64.020.27



**Alamat Kantor - Office Address**

Gedung Kantor Pusat Bank Papua Lt.4
Jalan Achmad Yani No.5-7 Jayapura
99111, Papua

**Situs Web - Website**

www.bankpapua.co.id

**Jumlah Karyawan - Total Employee**

2.526 orang/People

**Lokasi Operasi - Location of Operation**

Tanah Papua, Jakarta, Yogyakarta,
Surabaya dan Makassar.

**Kontak
Contact****Layanan Pelanggan - Customer Service**

Telepon : +62 967 532011
Email : divisi.SPR@bankpapua.co.id,
info@bankpapua.co.id
Halo Bank Papua : 1500-138
HP +62 813 4460 5555
Hunting +62 967 532011

**Sekretaris Perusahaan - Corporate Secretary**

Gedung Kantor Pusat Bank Papua Lt. 5
Jl. Achmad. Yani No.5-7 Jayapura 99111, Papua



Facebook
@bankpapua1966



Instagram
@bankpapua1966



bankpapua1966



Youtube
@bankpapua1966

halobankpapua@bankpapua.co.id

**Jaringan Usaha - Business Network**

Total Jaringan sebanyak 2.408 meliputi: total Jaringan Kantor 225 dan total Delivery channel sebanyak 2.183 yang terdiri dari 390 ATM (tergabung dengan Jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 79 bank dengan 7.500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 bank dengan jaringan 6.500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia), 1.676 Unit EDC, 19 Kasda Online, 25 Kantor Samsat Online, 23 Kartu Pegawai Elektronik (KPE), 19 Cash Management System, 24 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, dan 5 Kantor Kas Titipan Bank Indonesia.

The total network reached 2,408, consisting of 225 office networks and 2,183 delivery channels, comprising 390 ATMs (integrated with the ATM Bersama network with 79 participating banks and more than 7,500 ATMs, as well as the ATM Prima network with 29 banks and over 6,500 ATMs across Indonesia), 1,676 EDC units, 19 Online Regional Treasury (Kasda Online), 25 Online Samsat Offices, 23 Electronic Employee Cards (KPE), 19 Cash Management Systems, 24 Payment Points, 2 Mobile Cash Units, and 5 Cash Offices entrusted by Bank Indonesia.

**Pasar yang Dilayani - Business Network**

Perseroan telah hadir di Wilayah Tanah Papua serta di beberapa daerah di luar tanah Papua, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Bank Papua menawarkan produk dan layanan yang ditujukan kepada berbagai segmen masyarakat, seperti pegawai, rumah tangga, karyawan, pelajar, serta kalangan umum, termasuk dunia usaha dan UMKM.

The Company operates across the Papua region as well as in several locations outside Papua, including Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, and Makassar. Bank Papua offers products and services tailored to various segments of society, including civil servants, households, employees, students, and the general public, as well as business sectors and MSMEs.



Nama dan Alamat Kantor, Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi

Name and Address of Office, Subsidiaries and Associated Entities

DAFTAR ALAMAT KANTOR CABANG/ KANTOR PERWAKILAN

LIST OF BRANCH OFFICE / REPRESENTATIVE OFFICE ADDRESSES

No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpon No phone	Faksimili Facsimile
Kantor Cabang (KC)-Branch Office					
1	KCU Jayapura	Jl. Ahmad Yani 5-7 Kota Jayapura	99111	(0967) 522011,533608, 531944	(0967) 533019
2	KCU Manokwari	Jl. Yos Sudarso No. 57A Manokwari	98312	(0986) 231080, 215855, 213088, 211807, 211809	(0986)2210714
3	KCU Merauke	Jl. Raya Mandala Muli No. 350 Merauke	99614	(0971) 321850,321112, 321301	(0969) 31402
4	KCU Wamena	Jl. Yos Sudarso No. 4-5 Wamena	99511	(0969) 31167, 31168, 31011	(3984) 21556
5	KCU Nabire	Jl. Yos Sudarso No. 15 Nabire	98800	(0969) 31167, 31168, 31011	(0984) 21556
6	KCU Sorong	Jl. Ahmad Yani No.18 Sorong	98414	(0951) 326380, 326381, 326382,326383	(0951) 326384
7	KC Biak	Jl. Ahmad Yani No.1 Biak	99112	(0981) 23100	-
8	KC Serui	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepu- lauan Yapen	98212	(0983) 31763, 31482, 31483, 33193	(0983) 31793, 33364
9	KC Sentani	Jl. Raya Kemiri Sentani (Ex. Gedung Kantor Dinas Pertanian)	99352	(0967) 591483	(0967) 591017
10	KC Timika	Jl. Yos Sudarso No. 4 Timika	99910	(0901) 321051	-
11	KC Sarmi	Jl. Inpres Mararena Distrik Sarmi Kabu- paten Sarmi	99373	(0966) 31054	(0966) 31054
12	KC Arso	Jl. Raya Keerom Kelurahan Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom	99468	(TELP. VSAT) 47 - 10701	-
13	KC Mulia	Jl. Silas Papare, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya	98900	HP 081262912162	-
14	KC Enarotali	Jl. Frans Kaisepo Enarotali Kabupaten Paniai	98800	(V-SAT) 47 - 90101	-
15	KC Agats	Jl. Sultan Hasannudin Distrik Agats Kabupaten Asmat	99777	-	-
16	KC Keppi	Jl. Irian Distrik Obaa Kabupaten Mappi	99671	HP 082398914747	-
17	KC Karubaga	Jl. Kota Baru Distrik Karubaga Kabupa- ten Tolikara	-	(V-SAT) 47 - 70301	-
18	KC Waren	Jl. Inpres Waren, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen	98261	HP 082239119169	-
19	KC Oksibil	Jl. Mabilabol No. 1 Distrik Oksibil Kabu- paten Pegunungan Bintang	99573	-	-
20	KC Tanah Merah	Jl. Tans Papua, Kampung Persatuan Dis- trik Mandobo Kabupaten Bouven Digoel	99663	HP 082115820160	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpon No phone	Faksimili Facsimile
21	KC Kasonaweja	Distrik Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya	99367	HP 081314020838	-
22	KC Abepura	Jl. Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua	99321	HP 081340935633	(0967) 584488
23	KC Fak-Fak	Jl. Salasa Namudat Fak-Fak Selatan Kabupaten Fak-Fak	-	(0956) 23119, 22491, 23202	(0956) 22391
24	KC Kaimana	Jl. Trikora No. 1a Kaimana Kota	98654	(0967) 21641, 21642, 21643	-
25	KC Teminabuan	Jl. Soekarno Hatta No.1 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	98454	(0952) 31184	-
26	KC Bintuni	Jl. Raya Bintuni Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni	-	(0955) 31182, 31124	-
27	KC Waisai	Waisai Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat	98452	(V-SAT) 47 - 20201	-
28	KC Aimas	Jl. Nangka Km.19 Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong	98416	(0951) 3123435	-
29	KC Jakarta	Gedung Thamrin City Lt. Dasar Blok A 19 No. 11	-	(021) 31990940, 31990941	(021) 31990944
30	KC Makassar	Jl. A. P Petterani No. 45 A Samping Ditlantas Polda Sulsel Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar	-	(0411) 4662785	(0411) 4662693
31	KC Surabaya	Jl. Raya Darmo No.61 Kel. Keputeran Kec. Telagasari Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur	60265	(031) 5662280, 5662296	(031) 5662286
32	KC Yogyakarta	Ruko Raflesia Kevling J Dan K Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta	55281	(0274) 4332886, 4332730, 433906	(0274) 4332567
33	KC Waghete	Jl. Poros Waghete 1 Distrik Tigi Kabupaten Diyai	98784	HP 082198069991	-
34	KC Ilaga	Jl. Raya Ilaga Desa Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak	98972	-	-
35	KC Dekai	Kompleks Ruko Blok A No. 28- 30 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo	99571	HP 08124843079	(0969)31403
36	KC Wasior	Jl. Flanden Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama	98312	-	-
37	KC Ransiki	Jl. R.a Kartini, Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan	98355	-	-
38	KC Moanemani	Jl. Trans Papua Nabire - Ilaga, Km 200 Moanemani Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai	-	-	-
39	KC Tiom	Kelurahan Bokon Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya	-	-	-
40	KC Supiori	Komplek Pasar Sentral Supiori Kabupaten Supiori	98161	VSAT #*4722603	
41	KC Tamberauw	Jl. Iriawam No. 1 Distrik Fef Kabupaten Tamberauw			
42	KC Maybrat	Distrik Aifat Kabupaten Maybrat			
43	KC Elelim	Jl. Trans Wamena-Tengon KM 130 Yalimo, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo	99581		
Kantor Cabang Pembantu (KCP) -Sub Branch Office					
1	KCP Abepura	Jl. Raya Sentani Distrik Abepura Kota Jayapura	99221	(0967) 581039	(0967) 581027
2	KCP Waena	Jl. Raya Sentani Waena Kelurahan Waena Distrik Heram	99351	(0967) 572241	-
3	KCP Cigombong	Jl. Perhutut No.13 Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan	99225	(0967) 585051	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpn No phone	Faksimili Facsimile
4	KCP Pasar Youtefa	Kompleks Pertokoan Abepura Trade Center (Atc) Blok A-3 Jln. Baru Distrik Abepura	99221	(0967) 581982	-
5	KCP Muara Tami	Distrik Muata Tami Kota Jayapura	99351	-	-
6	KCP Hamadi	Jl. Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	-	-	-
7	KCP Tanah Hitam	Jl. Raya Abe Pantai Distrik Abepura Kota Jayapura	-	(0967) 589074	-
8	KCP DOK IX	Jl. Sulawesi Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura	-	-	-
9	KCP Ruko Pasifik Permai	Kompleks Ruko Pasifik Permai Blok F No.3 Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura	99112	-	-
10	KCP Entrop	Jl. Raya Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	-	(0967) 533485	-
11	KCP Kurik	Jl. Moh Hatta Distrik Kurik Kabupaten Merauke	99614	(0971) 324453	(0971) 532134
12	KCP Tanah Miring	Jl. Raya Tanah Miring Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke	99611	-	-
13	KCP Pasar Ampere	Jl. Tmp Polder Kabupaten Merauke	-	-	-
14	KCP Simpati Muting	Jl. Trans Papua Distrik Eligobel Kabupaten Merauke	99652	(0971) 321038	(0971) 532147
15	KCP Kobakma	Distrik Kobakma - Kabupaten Mamberamo Tengah	99558	-	-
16	KCP Kenyam	Distrik Kenyam Kabupaten Nduga	-	-	-
17	KCP Tembagapura	Sentra Niaga Mile 68, Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika	99967	-	-
18	KCP SP IV Timika	Jl. Poros Mapurujaya Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (Samping Kantor Lama)	99910	-	-
19	KCP Pasar Sentral Timika	Jl. Hasanudin No. 24 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	-	-	-
20	KCP SP II Timika	Jl. Cendrawasih SP Ii Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	99910	-	-
21	KCP Kampung Baru	Jl. Sorido Raya Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	-	-	-
22	KCP Numfor Timur	Jl. Raya Kornasoren Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor	98171	-	-
23	KCP Bosnik	Jl. Bosnik Raya Kampung Woniki Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	-	-	-
24	KCP Darfuar	Distrik Samofa Kaupaten Biak Numfor	-	-	-
25	KCP Korido	Distrik Korido Kabupaten Supiori	98161	-	-
26	KCP SP II Kalise-men	Jl. Bumi Raya Distrik Wanggar Kabupaten Nabire	98856	(0984) 22812	-
27	KCP Samabusa	Jl. Poros Nabire Legari - Samabusa, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire	-	-	-
28	KCP Sugapa	Jl. Padat Karya - Yokatapa, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya	98768	-	-
29	KCP Karang Tumaritis	Jl. Dr. A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire	98812	-	-
30	KCP RSUD Nabire	Jl. R.E. Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire	-	-	-
31	KCP Urfas	Jl. Inpres Urfas Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen	-	-	-
32	KCP Bade	Jl. Angkasa Bade, Distrik Edera Kabupaten Mappi	99853	-	-
33	KCP Assue	Jl. Garuda Distrik Assue Kabupaten Mappi	99874	-	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpn No phone	Faksimili Facsimile
34	KCP Doyo Baru	Jl. Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	-	-	-
35	KCP Nimbokrang	Desa Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	-	-	-
36	KCP Hawaii	Jl. Raya Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	-	-	-
37	KCP Menawi	Jl. Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen	98255	-	-
38	KCP Skanto	Distrik Skanto Kabupaten Keerom	-	-	-
39	KCP Prafi	Jl. Poros SP3 Aimas Distrik Prafi-Manokwari	98356	-	-
40	KCP Babo	Jl. Angkasa Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni	98364	-	-
41	KCP Tofoi	Jl. Raya Tofoi Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni	98363	-	-
42	KCP Klasaman	Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Kompleks Ruko Central	98417	(0951) 322456	-
43	KCP Sausapor	Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau	98473	-	-
44	KCP Pasar Remu	Jl Jenderal Sudirman Remu Selatan Kota Sorong (Depan Universitas Terbuka)	99451	-	-
45	KCP Boswezen	Jl. R.a. Kartini No. 25 Kelurahan Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong	-	-	-
46	KCP Jalan Baru	Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong	-	-	-
47	KCP Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong	-	-	-
48	KCP SP III Aimas	Jl. Poros Tengah Katapop SP Iii, Kelurahan Maksibun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong	-	-	-
49	KCP Ayamaru	Jl. Ayamaru Distrik Ayamaru Kabupaten Aybrat	98461	-	-
50	KCP Kantor Bupati Sesna	Kompleks Kantor Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	98454	-	-
51	KCP Danaweria	Jl. Warahmade, Kelurahan Danaweria, Fakfak Tengah, Provinsi Papua Barat	-	-	-
52	KCP Toraja	Jl. P. Diponegoro Kel. Penian Kec. Ran-tepao Kabupaten Toraja Utara	-	-	-
53	KCP Bonggo	SP I (Satu) Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi	-	-	-
54	KCP Atsy	Jl. Frans Kaisepo Distrik Atsy Kabupaten Asmat	99776	-	-
55	KCP Pasar Jibama	Jl. J.B Wenas No. 1 - 3 Wamena (Depan Pasar Jibama) Kabupaten Jayawijaya	-	-	-
56	KCP Kantor Gub. Papua Barat	Jl. Brigjen Marinir Purn. Abraham O. Atururi Arfai, Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari	-	-	-
57	KCP Anggi	Jl. Drs. Dominggus Mandacan Kelurahan Kampung Igimbai Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak	-	-	-
58	KCP Windesi	Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama	-	-	-
59	KCP Pasar Baru Krooy	Jalan Utarum Pasar Baru Krooy Distrik Kaimana	-	-	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpon No phone	Faksimili Facsimile
Kantor Kas - Cash Office					
1	Kantor Kas RSUD	Jl. Kesehatan Dok II Jayapura Kota Jayapura	-	-	-
2	Kantor Kas Vim	Jl. Raya Sentani Abepura Kantor Dinas Otonom Vim Kotaraja	-	-	-
3	Kantor Kas Dok II Kantor Gubernur	Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura Komp. Kantor Gubernur	-	-	-
4	Kantor Kas RSUD Abepura	Jl. Kesehatan No.1 Kelurahan Yobe Distrik Abepura - Kota Jayapura	-	-	-
5	Kantor Kas Kantor Walikota Jayapura	Kompleks Kantor Walikota Jalan Balai Kota Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	-	-	-
6	Kantor Kas Pemerintah Daerah Merauke	Jl. Re. Martadinata Kabupaten Merauke	-	-	-
7	Kantor Kas Wanam	Komp. Pt. Djarma Aru Wanam, Kec. Kaimaam Kabupaten Merauke	-	-	-
8	Kantor Kas Kimaam	Jl. Gotong Royong Kimaam Kabupaten Merauke	-	-	-
9	Kantor Kas Okaba	Jl. Bandara Okaba, Distrik Okaba Kabupaten Merauke	-	-	-
10	Kantor Kas Senggo	Tawanim Senggo Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi	-	-	-
11	Kantor Kas Moor	Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi	-	-	-
12	Kantor Kas Kilo 4	Jl. Irian Kilometer 4 Kepi	-	-	-
13	Kantor Kas Mindiptana	Jl. Trikora, Distrik Mindiptana Kabupaten Bouven Digul	-	-	-
14	Kantor Kas Asiki	Komp. Pt. Korindo Asiki, Distrik Jair Kabupaten Bouven Digul	-	-	-
15	Kantor Kas Pantai Kasuari	Jl. Konohari, Pantai Kasuari Distrik Kamur Kabupaten Asmat	-	-	-
16	Kantor Kas Sawa Erma	Jl. Wamap, Distrik Sawa Erma Kabupaten Asmat	-	-	-
17	Kantor Kas Oyehe	Jl. Yos Sudarso No. 60 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire	-	-	-
18	Kantor Kas Kalibobo	Jl. Ch. Martatihahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire	-	-	-
19	Kantor Kas Lagari	Jl. Marillephi Kelurahan Legari Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire	-	-	-
20	Kantor Kas Demta	Distrik Demta Kabupaten Jayapura	-	-	-
21	Kantor Kas Kantor Bupati Jayapura	Kompleks Kantor Bupati Jayapura, Jalan Gunung Merah Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	-	-	-
22	Kantor Kas Kuala Kencana	Jl. Raya Mandala Selatan Ob.3 Kuala Kencana, Gedung Shopping Center Kuala Kencana Kabupaten Mimika	-	-	-
23	Kantor Kas Kokonao	Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika	-	-	-
24	Kantor Kas Utikini Baru	Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika	-	-	-
25	Kantor Kas SP V Timika	Jl. Poros SP V Desa Limau Asri Distrik Mikika Baru	-	-	-
26	Kantor Kas Pemerintah Daerah Mimika	Jl. SP 3 (Pusat Pemerintahan Pemerintah Daerah Mimika), Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika	-	-	-
27	Kantor Kas Beoga	Jl. Bandara Beoga	-	-	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpn No phone	Faksimili Facsimile
28	Kantor Kas Bupati Yapen	Jl. Hasanudin Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen	-	-	-
29	Kantor Kas Dum (Doom)	Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong	-	-	-
30	Kantor Kas RSUD Sorong	Kompleks RSUD Jl. Yos Sudarso Kota Sorong	-	-	-
31	Kantor Kas Malanu	Jl. F. Kalasuat Rt 02/Rw Vi Kelurahan Klagele Distrik Sorong Utara Kota Sorong	-	-	-
32	Kantor Kas RSUD Sele Be Solu	Jl. Basuki Rachmad Km.12 Distrik Sorong Timur Kota Sorong	-	-	-
33	Kantor Kas Kalobo	Distrik Kalobo Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
34	Kantor Kas Kabare	Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
35	Kantor Kas Waigama	Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
36	Kantor Kas Yellu	Kampung Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
37	Kantor Kas Samate	Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
38	Kantor Kas Pasar Sanggeng	Jl. Yos Sudarso, Komp Pasar Sanggeng	-	-	-
39	Kantor Kas Oransbari	Jl. Merdeka, Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari	-	-	-
40	Kantor Kas Masni	Jl. Raya SP Vii, Distrik Masni Kabupaten Manokwari	-	-	-
41	Kantor Kas Unipa Amban	Kompleks Kampus Unipa Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari	-	-	-
42	Kantor Kas RSUD Manokwari	Jl. Bhayangkara No. 01 Manokwari	-	-	-
43	Kantor Kas Kokas	Jl. Abu Talib Heremba Kampung Masina Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat	-	-	-
44	Kantor Kas Bomboray	Jl. Nurdin Paus Paus SP 6 Distrik Bomboray	-	-	-
45	Kantor Kas Dulan Pok Pok	Pasar Sentral Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak	-	-	-
46	Kantor Kas RSUD Fakfak	Kompleks RSUD Fakfak Jalan Jenderal Sudirman Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak	-	-	-
47	Kantor Kas Teluk Pattipi	Distrik Teluk Pattipi Kabupaten Fakfak	-	-	-
48	Kantor Kas Karas	Distrik Karas Kabupaten Fakfak	-	-	-
49	Kantor Kas Teluk Arguni	Jl. Jaman San Bofuwer, Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana	-	-	-
50	Kantor Kas Avona	Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana	-	-	-
51	Kantor Kas Kajase	Kompleks Pasar Sentral Kajase, Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
52	Kantor Kas RSUD Schoolo Keyen	Jl. Teminabuan Kampung Keyen - Ayamaru Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
53	Kantor Kas Pasar Sentral Bintuni	Pasar Sentral Bintuni Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni	-	-	-
54	Kantor Kas Kantor Bupati Bintuni	Kompleks Kantor Bupati Bintuni, Kampung Bumi Saniari SP Iii Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni	-	-	-
55	Kantor Kas Klamono	Jalan Sorong Klamono, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong	-	-	-
56	Kantor Kas Katapop	Daerah Katapop Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong	-	-	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpon No phone	Faksimili Facsimile
57	Kantor Kas STKIP	Jl. Kh.a. Dahlan No.01 Mariyat Pantai Aimas Kabupaten Sorong	-	-	-
58	Kantor Kas RSUD Madi	Jl. Poros Madi	-	-	-
59	Kantor Kas Pasar Wouma	Jl. Achmad Yani, Kompleks Pasar Wouma	-	-	-
60	Kantor Kas Pasar Potikelek	Jl. Sd Percobaan, Kompleks Pasar Potikelek	-	-	-
61	Kantor Kas Sinak-ma	Jl. Yos Sudarso	-	-	-
62	Kantor Kas Kimbim	Jl. Raya Wamena Kimbim	-	-	-
63	Kantor Kas Kantor Bupati Kaimana	Kompleks Perkantoran Pemda Kaimana	-	-	-
64	Kantor Kas Arso I	Jl. Kusuma Wijaya Kelurahan Sanggaria Arso 1, Distrik Arso, Kabupaten Keerom	-	-	-
65	Kantor Kas Swakarsa	Jl. Bhayangkara, Kelurahan Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom	-	-	-
66	Kantor Kas Kantor Bupati Manokwari	Jl. Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari	-	-	-
67	Kantor Kas Ilu	Jl. Kaleb Kayame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya	-	-	-
68	Kantor Kas Korem	Jl. Korem, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor	-	-	-
69	Kantor Kas Sarmi Kota	Jl. Diponegoro, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi	-	-	-
70	Kantor Kas KPPT Kota Sorong	Jl. Pramuka Kantor Pelayanan Perijinan Terpapu (Kppt) Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong	-	-	-
71	Kantor Kas Thunburuni	Jl. Thunburuni, Komp. Plasa Thunburuni, Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak	-	-	-
72	Kantor Kas Wamanggu	Ruko Kompleks Pasar Wamanngu Blok B2, Jl. Papulus Nafi Kabupaten Merauke	-	-	-
73	Kantor Kas Jagebob	Jl. Poros Kampung Gurinda Jaya Distrik Jagebob Kabupaten Merauke	-	-	-
74	Kantor Kas Senggi	SP I Senggi Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom	-	-	-
75	Kantor Kas Dabra	Kampung Dabra Kabupaten Mamberamo Raya	-	-	-
76	Kantor Kas Tomu	Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni	-	-	-
77	Kantor Kas Kantor Bupati Jayawijaya	Jl. Yos Sudarso Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya	-	-	-
78	Kantor Kas Trimuris	Kampung Trimuris Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya	-	-	-
79	Kantor Kas Werba	Distrik Werba Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat	-	-	-
80	Kantor Kas Perum 100	Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat	-	-	-
81	Kantor Kas Dorekhar	Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat	-	-	-
82	Kantor Kas Depapre	Jl. Raya Depapre - Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua	-	-	-
83	Kantor Kas DIS-PENDA Biak	Jl. Jenderal Achmad Yani Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	-	-	-
84	Kantor Kas Yomdori	Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	-	-	-



No.	Jenis Kantor Office Type	Alamat Address	Kode Pos Postal code	No Telpn No phone	Faksimili Facsimile
85	Kantor Kas Haju	Jl. Mani Distrik Haju Kabupaten Mappi Provinsi Papua	-	-	-
86	Kantor Kas Gag	Kampung Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
87	Kantor Kas Arguni	Kampung Taver Distrik Arguni Kabupaten Fakfak	-	-	-
88	Kantor Kas Aitinyo	Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat	-	-	-
89	Kantor Kas Kam-pung Harapan	Jl. Raya Sentani Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura	-	-	-
90	Kantor Kas Suator	Distrik Suator Kabupaten Agats	-	-	-
91	Kantor Kas Sota	Distrik Sota Kabupaten Merauke	-	-	-
92	Kantor Kas Kiwirok	Jl. Polopakyol Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang	-	-	-
93	Kantor Kas Borme	Jl. Borfelum Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang	-	-	-
94	Kantor Kas Bomakia	Kompleks Bomakia li Distrik Bomakia Kabupaten Bouven Digoel	-	-	-
95	Kantor Kas Perum Pemerintah Daerah	Jl. Trans Papua Mindiptana Kilometer 03 Tanah Merah Kabupaten Bouven Digoel	-	-	-
96	Kantor Kas Okbibab	Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang	-	-	-
97	Kantor Kas Wapoga	Jl. Trans Wapoga Kampung Pirare Distrik Wapoga	-	-	-
98	Kantor Kas Masirei	Jl. Pendidikan Kampung Obutai Distrik Masirei	-	-	-
99	Kantor Kas Sinak	Distrik Sinak	-	-	-
100	Kantor Kas Kebar	Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw	-	-	-
101	Kantor Kas Kanggime	Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara	-	-	-
102	Kantor Kas Bokondini	Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara	-	-	-
103	Kantor Kas Fayid	Distrik Fayid Kabupaten Asmat	-	-	-
104	Kantor Kas Superblock	Superblock Mile 72 Tembagapura	-	-	-
105	Kantor Kas Kantor Bupati Wasior	Jl. Raya Wasior Rasiei, Kompleks Perkantoran Kantor Bupati Rasiei Kabupaten Teluk Wondama	-	-	-
106	Kantor Kas Esau Sesa/Sowi	Jl. Esau Sesa Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari	-	-	-
107	Kantor Kas Burmeso	Kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya	-	-	-
108	Kantor Kas Wami	Area Perkebunan Kelapa Sawit Pt Nabire Baru, Distrik Yaur, Km 54, Kabupaten Nabire	-	-	-
109	Kantor Kas Genyem	Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	-	-	-
110	Kantor Kas Inanwatan	Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
111	Kantor Kas Moswaren	Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
112	Kantor Kas Pasir Putih	Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari	-	-	-
113	Kantor Kas RSUD Provinsi Papua Barat	Jl. Angkasa Mulyono Kompleks Irman Jaya Manokwari	-	-	-
114	Kantor Kas Tomage	Distrik Tomage Kabupaten Fakfak	-	-	-
115	Kantor Kas Ansus Yapen Barat	Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen	-	-	-



No.	Jenis Kantor <i>Office Type</i>	Alamat <i>Address</i>	Kode Pos <i>Postal code</i>	No Telpon <i>No phone</i>	Faksimili <i>Facsimile</i>
116	Kantor Kas BP-PKAD Lanny Jaya	Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya	-	-	-
117	Kantor Kas Pirime	Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya	-	-	-
118	Kantor Kas Dabe	Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kabupaten Sarmi	-	-	-
119	Kantor Kas Rumberpon	Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama	-	-	-
120	Kantor Kas Abenaho	Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo	-	-	-
121	Kantor Kas Roon	Kampung Yende Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama	-	-	-
Kantor Kas Keliling - <i>Mobile Cash Office</i>					
1	Mobil Kas Keliling Biak	KC Biak			
2	Mobil Kas Keliling Jayapura	KC. Utama Jayapura/ Jayapura Main Branch Office			



Brand Perusahaan

Company Brand

MAKNA LOGO

LOGO MEANING



- Grafis merupakan bentuk dari Sayap dan Bulu Burung Cenderawasih, membentuk huruf/tulisan BPD yang memberikan kesan melesat ke atas melambangkan visi dan misi perusahaan dengan bisnis jasa keuangan yang kuat, terpercaya, dan berkinerja tinggi. Burung Cenderawasih merupakan burung khas dan kebanggaan masyarakat Papua sehingga bila menyebut Cenderawasih akan teringat atau identik dengan Papua.
- Grafis terdiri dari tiga (3) bagian yaitu dua (2) bulu dan sayap. Tiga bagian ini mencerminkan tiga pilar, yaitu:
 - Tiga (3) tungku pembangunan Papua, yaitu Agama, Pemerintah, dan Adat.
 - Tiga (3) Pemegang saham, yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Karyawan/Masyarakat/Pihak Ketiga.
 - Budaya kerja Bank Papua, yaitu: Berpikir, Bertindak secara Bisnis.
- Sayap membentuk huruf B melambangkan fleksibilitas, dinamis dalam mengikuti perkembangan dan kondisi lingkungan usaha perbankan yang semakin menggloabal. Warna biru melambangkan ketenangan, konsentrasi, kerja sama dan bersatu.
- Warna emas (*gold*) pada bulu membentuk huruf P menggambarkan Tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam (hasil bumi) dan juga mencerminkan bisnis inti Bank Papua pada usaha ritel yang sangat menjanjikan.
- Bulu membentuk huruf D merupakan cermin sebagai bank yang memiliki kepedulian sebagai pendorong untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, khususnya pembangunan di Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.
- Grafis membentuk gambaran yang kompak dan harmonis mencerminkan sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai etika dan hubungan harmonis antara pemilik dan pengurus bank serta nasabah.

- The graphic is a shape of Wing And Feather Of Cenderawasih, shaping letters/words of BPD, which gives a sense like it flies away up there. It symbolizes the company's vision and mission with financial service business which is strong, trusted and has high work activity. Cendrawasih bird is a typical and a pride bird of Papua so that when it's said about Cenderawasih, people will be remained to Papua*
- The graphic consisted of 3 parts which are 2 feathers and a wing. These three parts reflected three pillars, which are:*
 - 3 Papua's stove of development, which are Religion, Government and Culture.*
 - 3 Stakeholders which are Regional Province Government, Regency/Municipality, Employees/Society/Third Party.*
 - BPD Papua's culture of work, which are: thinking, acting in a business way.*
- The wing shapes a B letter, symbolized a flexible, dynamic in following the development and banking working environment condition which globalize more. The blue color symbolizes tranquility, concentration, cooperation, and unity.*
- (Gold) color at the feather shapes P letter, images the rich Papua's land with natural resources and also reflects the core business of the Regional Development Bank in very promising retail business.*
- The feather shapes D letter reflection of a bank having cares as a supporter to push forward national and regional economy growth, especially for development in Papua Province and West Papua Province.*
- The graphic shapes a compact and harmonic picture reflects the professional attitude and respect, ethics values and harmonic bond between the bank's owner, management, and customer.*



Riwayat Singkat Bank Papua

A Brief History of Bank Papua



PT Bank Pembangunan Daerah Papua, disebut juga sebagai “Bank Papua” atau “Bank” yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat No.37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat No.1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada Lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No.42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana bank umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp 4 juta.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, also known as “Bank Papua” or “Bank”, before becoming a Limited Liability Company, was named Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, was established on April 13, 1966, based on the Decree of the Governor of the Level I Regional Governor of West Irian No. 37/GIB/ 1966 and passed into Regional Regulation of West Irian Province No. 1 of 1970 dated March 23, 1970, in the Regional Gazette of West Irian Province No. 42 of 1970, then according to Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep. 283/DDK/ II/1972 dated July 15, 1972, concerning the Granting of Business Licenses for Bank Pembangunan Daerah Irian Barat, domiciled in Jayapura to carry out operations like other commercial banks with an initial authorized capital set at IDR 4 million.



Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1976 terjadi perubahan nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dan perubahan modal dasar Bank menjadi sebesar Rp 500 juta. Kemudian sesuai hasil Keputusan RUPS No.05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp 150 miliar.

Perubahan menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi No. 23 tahun 2002, Akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH No.1 tanggal 19 Juni 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No.C-13031 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 dan berita Negara RI No.61 tanggal 30 Juli 2002, dan telah mendapat persetujuan Deputy Gubernur Bank Indonesia melalui surat No.4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua No.03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004, komposisi modal dasar Bank Papua dari Rp150 miliar menjadi Rp 500 miliar, selanjutnya untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam hal Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (Capital Requirement) hingga tahun 2010, maka sesuai keputusan RUPS No.07/SK/RUPS-BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp 1 triliun.

Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH tanggal 8 Agustus 2008 No.08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 20.000 lembar saham. Pada Rapat Umum Pemegang Saham terjadi perubahan Modal Dasar Bank Papua, yaitu perubahan dari Rp1 triliun menjadi Rp 2 triliun yang kemudian disahkan dalam

Furthermore, according to Regional Regulation (PERDA) Number 7 of 1976, there was a change in the name to Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya and the Bank's authorized capital to Rp500 million. Then according to the resolution of the GMS No.05/SK/RUPS-BPD/XII/2000, it was decided to change the legal form of Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT). According to the General Meeting of Shareholders (GMS) held on 17 June 2001, it was agreed to change the authorized capital of Bank Papua to Rp 150 billion.

The change to a Limited Liability Company (PT) is then stated in Regional Regulation No. 2 of 2002, dated 21 May 2002, concerning PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. It has been promulgated in Provincial Gazette No. 23 of 2002, Deed to establish a Limited Liability Company before Notary Maryatie Simanjuntak, SH No. 1, dated June 19, 2002, and approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-13031 HT.01.01. TH.2002 dated July 16, 2002, and State Gazette RI No.61 dated 30 July 2002, and was approved by the Deputy Governor of Bank Indonesia through letter No. 4/147/KEP. Dp.6/2002 dated 11 September 2002.

Based on the Decree of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No. 03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 dated 22 June 2004, the composition of the authorized capital of Bank Papua from IDR 150 billion to IDR 500 billion, then to fulfill the policy Bank Indonesia concerning the Indonesian Banking Architecture (API) in terms of Capital Requirements for Banks until 2010, then according to the GM's decision, No. 07/SK/GMS-BPD/V/2007 the authorized capital of Bank Papua was agreed to be IDR 1 trillion.

According to Notarial Deed and Land Deed Making Officer Lilis Heryeni, SH, dated 8 August 2008 No. 08, the Company's authorized capital is divided into 200,000 shares consisting of 180,000 shares in series A and 20,000 shares in series B.

At the General Meeting of Shareholders, there was a change in the Authorized Capital of Bank Papua, namely a change from IDR 1 trillion to IDR 2 trillion, which was then ratified



Surat Keputusan RUPS No.11/SK/RUPS-BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar Bank Papua sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH, M.Si tanggal 20 April 2010 No.05, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-30935.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Di tanggal 21 Agustus 2013, sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa No.02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi Rp 4 triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Maryatie Simanjuntak, SH tanggal 21 Agustus 2013 No.17 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 800.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 728.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 72.000 lembar saham dan disahkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No.19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua No.2 Tahun 2002 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN NAMA

Berikut disampaikan secara ringkas terkait perubahan nama dan status hukum Bank Papua. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank Papua didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Irian Barat pada 13 April 1966 dan telah mengalami perubahan nama pada 30 Oktober 1976 menjadi Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dan kembali mengalami perubahan nama pada 21 Mei 2002 menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Papua hingga saat ini.

in the AGM Decree No. 11/SK/RUPS-BPD/III/2010 dated 29 March 2010 concerning Changes in Bank Authorized Capital Papua according to the Deed of Notary and Land Deed Making Officer Lilis Heryeni, SH, M.Sc dated 20 April 2010 No. 05, which was later decided by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-30935.AH.01.02.Tahun 2010 regarding the Approval of the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association.

On August 21, 2013, according to the Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree No. 02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013, the authorized capital of Bank Papua was agreed to be IDR 4 trillion. By the Deed of Notary and Land Deed Making Officer Maryatie Simanjuntak, SH, dated 21 August 2013 No. 17, the authorized capital of the Company is divided into 800,000 shares consisting of 728,000 shares of series A and 72,000 shares of series B and was ratified in the Regulation Region of Papua Province No.19 of 2013 concerning Amendment to Regional Regulation of Papua Province No. 2 of 2002 concerning PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, December 30, 2013.

INFORMATION ABOUT NAME CHANGE

The following is a brief presentation regarding the change in the name and legal status of Bank Papua. As previously explained, Bank Papua was established under Bank Pembangunan Daerah Irian Barat on April 13, 1966. It changed its name on October 30, 1976, to Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya and again on May 21, 2002, to PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.



Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

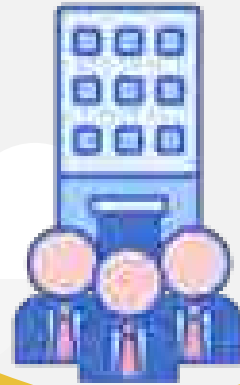
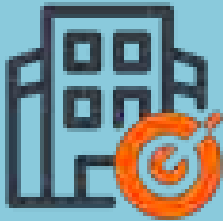
Vision, Mission and Corporate Culture

Visi

Vision

Menjadi Bank Regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

To Become a Regional Bank that is strong, trustworthy, competitive and supports economic development in the land of Papua.



Misi

Missions

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders.
2. Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat.
3. Menjalankan bisnis secara profesional.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Tanah Papua.

1. *Providing the best service to stakeholders.*
2. *Manage business through sound banking practices.*
3. *Professionally running a business*
4. *Encouraging economic growth and development in the Land of Papua.*



PENJELASAN ATAS VISI BANK PAPUA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

MENJADI BANK REGIONAL

Mencerminkan arah pengembangan Bank Papua dari Bank Komersial yang selama ini menjalankan bisnisnya di beberapa wilayah di Indonesia, untuk melakukan transformasi menjadi Bank Komersial yang fokus pada pengembangan bisnis dan pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

KUAT

Mencerminkan Bank Komersial yang sehat, berkinerja baik, memiliki daya tahan terhadap risiko bank yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, dengan rasio kecukupan modal yang selalu berada di atas batas minimum sesuai regulasi yang berlaku, serta menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya berdasarkan praktek terbaik dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, *Risk Management*, dan *Compliance* pada industri perbankan.

TERPERCAYA

Mencerminkan Bank yang selalu dipercaya oleh seluruh *stakeholder*, dengan karakter sebagai Bank milik Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, serta pengusaha dan masyarakat umum sebagai nasabah, dengan menyediakan produk-produk dan memberikan pelayanan terbaik, serta selalu menjaga kerahasiaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

BERDAYA SAING

Mencerminkan Bank Komersial yang mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, bisnisnya dapat tumbuh sehat secara berkelanjutan, dengan karakter sebagai Bank Komersial yang memiliki *brand image* sebagai Bank milik Pemerintah Daerah, memahami karakteristik dan potensi daerah di seluruh wilayah Tanah Papua, memiliki jaringan distribusi di wilayah-wilayah pengembangan ekonomi Tanah Papua, serta tetap terus menaikkan daya saingnya yang tinggi dengan meningkatkan kualitas produk, pelayanan, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia.

MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

Mencerminkan Bank yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Tanah Papua yang berkelanjutan, dengan karakter sebagai Bank yang

THE EXPLANATION OF THE VISION OF BANK PAPUA IS AS FOLLOWS:

BECOME A REGIONAL BANK

It reflects the development direction of Bank Papua from a Commercial Bank, which has been running its business in several regions in Indonesia to transform into a Commercial Bank that focuses on business development and economic development in the Land of Papua.

STRONG

Reflects a Commercial Bank that is Sound, performs well, has resilience against predictable and unpredictable bank risks, with a capital adequacy ratio that is always above the minimum limit according to applicable regulations, and carries out its business and operational activities based on the best practices of application of the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance to the banking industry.

TRUSTED

It reflects a Bank that is always trusted by all stakeholders, with the character of being a Bank owned by the Regional Government that can meet the needs and provide satisfaction to the Regional Government as shareholders, as well as entrepreneurs and the general public as customers, by delivering products and providing the best service, and always maintain customer confidentiality by applicable regulations.

COMPETITIVE

Reflecting a Commercial Bank that has a competitive advantage compared to competitors, its business can thrive sustainably with the character of a Commercial Bank that has a brand image as a Bank owned by the Regional Government, understands the characteristics and potential of the region throughout the Land of Papua, has a distribution network in the areas developing the economy of the Land of Papua, and continuing to increase its high competitiveness by improving the quality of products, services, technology, and competence of human resources.

SUPPORTING ECONOMIC DEVELOPMENT

Reflecting a Bank that contributes significantly to sustainable economic growth and equity in the Land of Papua, with the character as a Bank that always supports



selalu mendukung pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah terkait pembangunan ekonomi di Tanah Papua, melakukan pengembangan bisnis di wilayah remote, serta pengembangan teknologi perbankan digital yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan berbiaya rendah.

DI TANAH PAPUA

Mencerminkan seluruh wilayah yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat.

PENJELASAN ATAS MISI BANK PAPUA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1 Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Stakeholder

- Bank Papua berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus dalam memenuhi setiap kebutuhan nasabah melalui variasi produk, layanan dan jaringan yang menjangkau sampai ke kampung-kampung atau pedalaman di Tanah Papua.
- Bank Papua inovatif, kreatif, dan profesional dengan dukungan finansial teknologi yang handal serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang lebih baik.
- Bank Papua fokus dan lebih memahami karakteristik dan potensi daerah di seluruh tanah Papua agar dapat memberikan pelayanan terbaik.

2. Mengelola Bisnis Melalui Praktek Perbankan yang Sehat.

- Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian secara kontinu dan konsisten dalam pengelolaan bisnis agar bank senantiasa dalam kondisi sehat.
- Bank Papua senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagai pengelolaan bisnis.
- Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai selaras pertumbuhan Bank Papua.
- Bank Papua senantiasa menjaga pertumbuhan bisnis dengan perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan hasil yang optimal untuk menjaga pertumbuhan keuangan berkelanjutan.

the implementation of Regional Government projects related to economic development in the Land of Papua, conducts business development in remote areas, as well as the result of digital banking technology that allows expanding low-cost outreach service.

IN THE LAND OF PAPUA

It Reflects the entire region, which includes the provinces of Papua and West Papua.

THE EXPLANATION OF THE MISSION OF BANK PAPUA IS AS FOLLOWS:

1 Providing the Best Service to Stakeholders

- Bank Papua is committed to continuously improving service quality in meeting every customer need through a variety of products, services and networks that reach out to villages or interior areas in the Land of Papua.*
- Bank Papua is innovative, creative and professional with reliable technological financial support and better Human Resource competencies.*
- Bank Papua focuses on and better understands the characteristics and potential of regions throughout the land of Papua in order to be able to provide the best service.*

2 Providing the Best Service to Stakeholders

- Continuous and consistent application of risk management and prudential principles in business management so that the bank is always in good health.*
- Bank Papua always complies with the rules and regulations that apply in every implementation of activities as business management.*
- Increasing employee competence and welfare in line with the growth of Bank Papua.*
- Bank Papua always maintains business growth with careful planning so that it can provide optimal results to maintain sustainable financial growth.*



3. Menjalankan Bisnis Secara Profesional

- Bank Papua berkomitmen menjunjung prinsip transparansi, akuntabel, responsif, berintegritas, dan rasa berkeadilan dalam menjalankan bisnis.
- Bank Papua peduli lingkungan dan turut serta melestarikan kearifan dan budaya lokal dengan bersinergi dengan masyarakat dan adat lokal.
- Bank Papua berkomitmen menjalin hubungan kerja sama yang profesional dengan semua pihak (*stakeholder*) dengan prinsip saling memberi nilai tambah dan manfaat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Tanah Papua

- Sebagai Bank milik pemerintah daerah di Tanah Papua dan menjadi mitra dalam menjalankan bisnis, Bank Papua berkomitmen mendukung program-program pemerintah daerah melalui layanan perbankan yang ada dan memberikan hasil usaha berupa dividen.
- Bank Papua berkomitmen berkontribusi bagi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua dalam peran sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana nasabah dan menyalurkan pinjaman.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara periodik pencapaian visi dan misi dievaluasi dengan menggunakan mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Bank yang memuat pencapaian target, rencana strategis dan target kinerja 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi masih relevan untuk kondisi saat ini dan pencapaian visi dan misi sampai dengan tahun 2025 telah sesuai dengan arah dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah Bank, konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.

3. Running a Business Professionally

- Bank Papua is committed to upholding the principles of transparency, accountability, responsiveness, integrity and a sense of justice in doing business.
- Bank Papua cares about the environment and participates in preserving local wisdom and culture by synergizing with local communities and customs.
- Bank Papua is committed to establishing a professional cooperative relationship with all parties (*stakeholders*) with the principle of mutual added value and benefits in every activity implementation.

4. Encourage Economic Growth and Development in Papua

- As a regional government-owned bank in the Land of Papua and a partner in doing business, Bank Papua is committed to Supporting local government programs through existing banking services and providing business results in the form of dividends.
- Bank Papua is committed to contributing to regional development and economic growth in the Land of Papua in its role as an intermediary institution namely collecting customer funds and channeling loans.

VISION AND MISSION REVIEW BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Periodically, the achievement of the vision and mission is evaluated using the Bank's Business Plan preparation mechanism which contains the achievement of targets, strategic plans and performance targets for the next 1 (one) to 3 (three) years. The Board of Commissioners and Board of Directors assess that the vision and mission are still relevant to current conditions and the achievement of the vision and mission until 2025 is in accordance with the direction and stages set by the Bank. The Board of Directors and Board of Commissioners have ensured that the Bank's mission, vision, goals, targets, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by utilizing innovation and technology effectively.



BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Pada tahun 2023 telah terjadi perubahan Budaya Perusahaan Bank Papua sesuai dengan SK Direksi No/11/DIR-BPD/III/2023 menjadi “SA IKHLAS” yang didasarkan pada Semangat **Asah, Asih dan Asuh**.

Hal ini merupakan bentuk pelayanan yang tulus kepada setiap orang yang dilakukan dengan motivasi saling mendidik, saling mengasahi dan saling membina oleh setiap Insan Bank Papua secara terus menerus guna kepuasan semua pihak tanpa terkecuali, dengan 6 Nilai Perilaku Utama, yaitu ;

1. Integritas

Insan Bank Papua yang mampu berpikir, berkata dan bertindak terpuji sehingga dapat menjunjung nilai-nilai kejujuran, ketulusan serta berempati dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang berdampak pada efisiensi dan efektifitas perusahaan.

2. Konsisten

Insan Bank Papua yang bekerja dengan penuh disiplin, dilakukan secara terus menerus sehingga mampu memanipulasi risiko yang akan terjadi.

3. Harmonis

Insan Bank Papua yang berlandaskan kerjasama saling menghargai dan mempunyai rasa memiliki sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dilingkungan kerja.

4. Loyal

Insan Bank Papua yang memiliki sikap melayani dengan sepenuh hati serta peduli terhadap lingkungan guna menumbuhkan asas manfaat terhadap perusahaan.

5. Adaptif

Insan Bank Papua yang memiliki jiwa wirausaha yang mampu beradaptasi dan berorientasi pada nilai tambah dengan melakukan inovasi, proaktif, kreatif serta perbaikan secara terus menerus.

*In 2023, there has been a change in the Corporate Culture of Bank Papua in accordance with the Board of Directors' Decree No./11/DIR-BPD/III/2023 to “SA IKHLAS” which is based on the Spirit of **Asah, Asih and Asuh**.*

This is a form of sincere service to everyone that is carried out with the motivation of educating each other, loving each other and fostering each other by every Bank Papua Personnel continuously for the satisfaction of all parties without exception, with 6 Main Behavioral Values, namely;

1. Integrity

Bank Papua Personnel who are able to think, speak and act commendably so that they can uphold the values of honesty, sincerity and empathy in carrying out every task of responsibility that has an impact on the efficiency and effectiveness of the company.

2. Consistent

Bank Papua Personnel who work with full discipline, carried out continuously so that they are able to manipulate the risks that will occur.

3. Harmonious

Bank Papua Personnel who are based on cooperation, mutual respect and have a sense of belonging so that they can create a sense of security and comfort in the work environment.

4. Loyal

Bank Papua Personnel who have an attitude of serving wholeheartedly and caring about the environment in order to foster the principle of benefit to the company.

5. Adaptive

Bank Papua Personnel who have an entrepreneurial spirit who are able to adapt and are oriented towards added value by innovating, being proactive, creative and continuously improving.



6. Solusi

Insan Bank Papua responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan hasil terbaik.

Selain merupakan bentuk akronim dari Semangat Asah (Mendidik), Asih (Mengasahi), Asuh (Membina), kata “SA” pada akronim “SA IKHLAS” juga merupakan bentuk serapan bahasa komunikasi yang melekat dengan budaya Papua, sehingga harapannya melalui “SA IKHLAS”, Insan Bank Papua akan memiliki kesadaran untuk bekerja dengan memiliki nilai Integritas, Konsisten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan solusi.

Hasil dari penerapan Nilai-Nilai Perilaku Utama serta Panduan Perilaku Insan Bank Papua yang diharapkan adalah perubahan perilaku yang didapat dari Tahapan Awal (*Initial*), Intervensi (*Intervention*), dan Penerimaan (*Acceptance*), yang mendorong terciptanya lingkungan kerja kondusif untuk berkinerja tinggi memberikan kontribusi terhadap perusahaan dan selalu berperilaku positif.

Dampak dari penerapan Nilai-Nilai Perilaku Utama serta Panduan Perilaku Utama Insan Bank Papua yang diharapkan adalah perubahan budaya perusahaan yang tercermin pada peningkatan kinerja bisnis Bank Papua.

6. Solution

Bank Papua employees are responsive to customer needs and satisfaction by providing the best service and results.

In addition to being an acronym for Semangat Asah (Educating), Asih (Loving), Asuh (Fostering), the word “SA” in the acronym “SA IKHLAS” is also a form of absorption of communication language that is inherent in Papuan culture, so that it is hoped that through “SA IKHLAS”, Bank Papua employees will have the awareness to work with the values of Integrity, Consistency, Harmony, Loyalty, Adaptiveness and solution.

The results of the implementation of the Core Behavioral Values and the Behavioral Guidelines of Bank Papua employees are expected to change behavior obtained from the Initial Stage, Intervention, and Acceptance, which encourages the creation of a conducive work environment for high performance, contributing to the company and always behaving positively.

The impact of the implementation of the Core Behavioral Values and the Main Behavioral Guidelines of Bank Papua employees is expected to change the company’s culture which is reflected in the improvement of Bank Papua’s business performance.



Kegiatan Usaha

Business Activities

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank yang terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Sirkulasi, mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua di hadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., pada tanggal 12 Agustus 2014, tujuan Bank Papua adalah untuk beroperasi di bidang perbankan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Papua melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Bank's Articles of Association, last amended through the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders by Circular regarding the Amendment to the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Papua before Maryatie Simanjuntak, S.H., dated August 12, 2014, the objective of Bank Papua is to operate in the banking sector.

To achieve this objective, Bank Papua conducts banking business activities in accordance with applicable laws and regulations, as detailed below:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan	Has/Not Executed	Keterangan: Kegiatan yang Dijalankan	Description: Activities Executed
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu	<i>Collecting funds from the public in the form of savings in the form of: Current Accounts, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other equivalent forms</i>	Telah Dijalankan	<i>Executed</i>	Bank telah menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan giro, deposito, tabungan, dan lainnya.	<i>The Bank has carried out activities to collect public funds in the form of Current Accounts, time deposits, savings, and others.</i>
Menyalurkan kredit	<i>Distributing loan</i>	Telah Dijalankan	<i>Executed</i>	Bank telah menjalankan kegiatan penyaluran kredit ke masyarakat dalam berbagai produk kredit.	<i>The Bank has carried out lending activities to the public in various loan products.</i>
Menerbitkan Surat Pengakuan Utang	<i>Issuing a Debt Acknowledgment</i>	Belum Dijalankan	<i>Not Executed</i>	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	<i>Bank Papua has not carried out these activities</i>



Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan	Has/Not Executed	Keterangan: Kegiatan yang Dijalankan	Description: Activities Executed
Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; - Sertifikat Bank Indonesia; - Obligasi; - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; - Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.	<i>Buy, sell, or guarantee at your own risk or for interests and at the behest of its customers:</i> - <i>Bills of exchange, including money orders accepted by the Bank, whose validity period is no longer than the customary trade in such letters;</i> - <i>Letters of acknowledgment of debt and other trade papers whose validity period is no longer than the custom in trading the said papers;</i> - <i>State Treasury papers and government guarantee letters;</i> - <i>Bank Indonesia Certificates;</i> - <i>Bonds;</i> - <i>Trade letters with a maturity of up to 1 (one) year;</i> - <i>Other securities instruments with a maturity of up to 1 (one) year.</i>	Telah Dijalankan	Executed	Bank telah melakukan kegiatan jual beli SSB (surat-surat berharga) Pemerintah maupun Korporasi dan juga surat-surat berharga Bank Indonesia untuk tujuan investasi Bank	<i>Bank has carried out buying and selling activities of Government and Corporate SSB (securities) as well as Bank Indonesia securities for the purpose of Bank investment.</i>
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah	<i>Transferring money for both own interest and customer interest</i>	Telah Dijalankan	Executed	Sebagai anggota BI RTGS dan SKNBI, bank melayani pemindahbukuan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.	<i>As a member of the BI RTGS and SKNBI, the bank serves the book-entry of funds for both its own and customers' interests.</i>
Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya	<i>Placing funds in, lending funds from, or lending funds to other banks, either by using letters, telecommunications facilities or by money orders, checks or other means</i>	Telah Dijalankan	Executed	Bank Aktif dalam melakukan transaksi pasar uang antar Bank dengan Media Bloomberg, Reuters dan IPC di Dealing Room.	<i>Bank is active in conducting interbank money market transactions with Bloomberg Media, Reuters and IPC in the Dealing Room.</i>
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga	<i>Receive payments from bills on securities and perform calculations with or between third parties</i>	Telah Dijalankan	Executed	Bank Bekerja sama dengan money broker untuk tujuan transaksi surat-surat berharga.	<i>Bank Cooperating with money broker for securities transaction purposes.</i>



Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan	Has/Not Executed	Keterangan: Kegiatan yang Dijalankan	Description: Activities Executed
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga	Provide a place to store valuables and securities	Telah Dijalankan	Executed	Bank memiliki layanan Safe Deposit Box yang dapat dinikmati oleh nasabah	The bank has a Safe Deposit Box service that can be enjoyed by customers
Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Garansi)	Carry out fund custody activities for the benefit of other parties based on a contract (Guarantee)	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities
Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek	Place funds from customers to other customers in the form of securities that are not listed on the stock exchange	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities
Membeli agunan melalui badan lelang, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya	Purchasing collateral through an auction agency, in whole or in part, in the event that the debtor does not fulfill his obligations to Bank Papua, provided that the purchased collateral is disbursed as soon as possible	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities
Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang	Conducting equity participation in banks or other companies in the financial sector as well as leasing, venture capital, securities companies, insurance companies, as well as clearing, settlement and depository institutions by complying with the provisions stipulated by the authorities	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang	Carry out temporary capital participation activities to overcome the consequences of loan failure, provided that the participation must be withdrawn by fulfilling the provisions stipulated by the competent authority.	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities
Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku	Act as the founder of a pension fund in accordance with the provisions of the applicable pension fund regulations	Telah Dijalankan	Executed	Bank Papua mendirikan Dana Pensiun Bank Papua	Bank Papua establishes Bank Papua Pension Fund



Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan	Has/Not Executed	Keterangan: Kegiatan yang Dijalankan	Description: Activities Executed
Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Papua dan Papua Barat;	Assisting the Regional Government in fostering Rural Banks (BPR) owned by the Provincial Governments of the First Level Regions of Papua and West Papua and the Level II Regional Governments of Papua and West Papua;	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Carry out other activities that are commonly carried out by banks as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations	Belum Dijalankan	Not Executed	Bank Papua belum menjalankan kegiatan tersebut	Bank Papua has not carried out these activities

PRODUK DAN JASA

PRODUCTS AND SERVICES

Menurut Anggaran Dasar Bank Papua, bidang usaha Bank Papua adalah jasa keuangan perbankan. Produk-produk yang ditawarkan meliputi Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan/Kredit, dan Layanan Jasa Bank Papua.

According to the Articles of Association of Bank Papua, the Bank's line of business is banking financial services. The products offered include Third-Party Funds, Financing/Loans, and Banking Services of Bank Papua.

Untuk mencapai target perusahaan dan meningkatkan kepuasan nasabah, Bank Papua terus berupaya meningkatkan pelayanan. Bank ini berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan dengan menyediakan dan mengembangkan berbagai layanan, antara lain:

To achieve its corporate targets and enhance customer satisfaction, Bank Papua continuously strives to improve its services. The Bank is committed to meeting the community's needs for banking products and services by providing and developing various services, including:

A. Produk Dana-A. Fund Products

Giro Bank Papua	Adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah menggunakan Cek, Bilyet Giro atau Surat Perintah Pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.	It is a deposit that the customer can withdraw at any time using a Check, Bilyet Giro, or other Payment Order by applicable regulations.
Deposito Berjangka	Produk ini merupakan simpanan nasabah yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Bank Papua menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktunya dengan suku bunga bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.	The advantages of Time Deposits can be used as Loan guarantees. This product is a customer deposit whose withdrawal is based on a certain agreed period and is intended for individuals and business entities in the form of legal entities. Bank Papua offers several options according to the time with competitive interest rates, which can be extended automatically according to initial confirmation.

TABUNGAN SIMPEDA (SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH)

Tabungan SIMPEDA adalah produk tabungan nasional dari seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Produk ini menawarkan bunga yang menarik serta berbagai fasilitas untuk memudahkan transaksi.

SIMPEDA SAVINGS (REGIONAL DEVELOPMENT SAVINGS)

SIMPEDA Savings is a national savings product offered by all Regional Development Banks (BPD) in Indonesia. This product offers attractive interest rates and various features to facilitate transactions.



TABUNGAN SIMANJA (SIMPANAN AMAN DAN SEJAHTERA)

Tabungan Simanan Aman dan Sejahtera (SIMANJA) adalah produk tabungan khas Bank Papua, dirancang khusus sebagai pilihan investasi dengan suku bunga yang kompetitif.

SIMANJA SAVINGS (SECURE AND PROSPEROUS SAVINGS)

SIMANJA (Secure and Prosperous Savings) is a flagship savings product of Bank Papua, specifically designed as an investment option with competitive interest rates.

TABUNGANKU (TABUNGAN MASA DEPANKU)

Tabunganku Bank Papua adalah produk tabungan yang ditujukan untuk individu, diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TABUNGANKU (MY FUTURE SAVINGS)

Tabunganku of Bank Papua is a savings product for individuals, jointly issued by banks across Indonesia. Its primary objective is to promote a savings culture and improve public welfare.

TABUNGAN SIMPEL (SIMPANAN PELAJAR) BANK PAPUA

Tabungan SIMPEL adalah produk tabungan yang ditujukan untuk siswa, diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia. Produk ini menarik perhatian untuk mendukung edukasi dan inklusi keuangan, mendorong budaya menabung sejak dini. Tujuannya adalah agar para pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, menjadikan menabung sebagai kebutuhan atau gaya hidup, bukan hanya sebagai kewajiban.

SIMPEL SAVINGS (STUDENT SAVINGS) – BANK PAPUA

SIMPEL Savings is a savings product intended for students, issued nationally by banks in Indonesia. This product supports financial literacy and inclusion by encouraging saving habits from an early age. Its goal is for students, as the nation's future generation, to view saving not merely as an obligation but as a necessity and lifestyle.

B. Produk Pembiayaan/Kredit

Guna pembiayaan ekspansi bisnis yang prospektif atau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil, menengah dan besar, Bank Papua menawarkan berbagai kredit menurut jenis penggunaannya, antara lain:

B. Financing/Lending Products

To finance future business expansion or to improve people's welfare through small, medium, and large businesses, Bank Papua offers a variety of loans according to the type of use, including:

KREDIT MODAL KERJA

Kredit Modal Kerja adalah pinjaman yang diberikan kepada individu atau badan usaha untuk menambah modal dalam pengembangan usaha yang sudah berjalan. Biasanya, pinjaman ini digunakan dalam satu siklus usaha atau produksi, mencakup biaya seperti bahan baku, bahan pendukung, biaya operasional, dan biaya proyek lainnya. Bank Papua menawarkan berbagai jenis kredit modal kerja yang disesuaikan dengan tipe usaha calon debitur, termasuk usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Makro. Berikut adalah jenis-jenis produk kredit modal kerja yang tersedia:

- KMK Bank Papua Peduli
- KMK Kontrakting
- KMK R/C Perdagangan
- KMK Dana Sendiri
- KMK Dana Sendiri PRK
- KMK Pemerintah Daerah

WORKING CAPITAL LOANS

Working Capital Loans are financing facilities provided to individuals or business entities to support additional capital for ongoing business development. These loans are typically used within one business or production cycle, covering costs such as raw materials, supporting materials, operational expenses, and other project-related costs.

Bank Papua offers various types of working capital loans tailored to the needs of prospective debtors, including Micro, Small, Medium, and Corporate segments. The available products include:

- KMK Bank Papua Peduli
- Contracting KMK
- Trade R/C KMK
- Own Fund KMK
- Own Fund PRK KMK
- Regional Government KMK



- KMK Peduli Papua (Dijamin Pemerintah Daerah Provinsi)
- KMK Konstruksi dengan Penjaminan
- KUR
- KMK Peduli Papua (Dijamin Pemerintah Daerah Kota)
- Pinjaman Usaha Mikro (PUM)
- KMK Mikro
- KMK Kecil

KREDIT KONSUMTIF

Kredit Konsumtif adalah pinjaman yang diberikan kepada individu, termasuk pegawai, untuk keperluan barang konsumsi melalui pembelian, penyewaan, atau metode lainnya. Jenis kredit ini meliputi:

- KKs Griya Bhakti
- KKs Wira Bhakti
- KKs Purna Bhakti
- KKs Multi Guna
- KKs PUMP-KB Jamsostek
- KKs Kendaraan

KREDIT SINDIKASI

Kredit Sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh sekelompok bank kepada satu debitur ketika jumlah kredit terlalu besar untuk diberikan oleh satu bank saja. Jenis kredit ini terdiri dari:

- KS Investasi
- KS Modal Kerja
- KS KMK RC

KREDIT INVESTASI

Kredit Investasi adalah pinjaman jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada calon debitur untuk membeli investasi atau barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pendirian proyek baru. Jenis Kredit Investasi meliputi:

- KI Dana Sendiri
- KI Papua Peduli (Dijamin Pemerintah Daerah)
- KI Mikro
- KI Kecil
- KI Kendaraan Usaha

KREDIT PROGRAM PEMERINTAH

Kredit Program Pemerintah adalah skema kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong sektor UMKM. Jenis-jenis kredit ini meliputi:

- KPP Koperasi dan Anggota
- KPP Ketahanan Pangan
- KPP KMK

- *Papua Care KMK (Guaranteed by Provincial Government)*
- *Construction KMK with Guarantee*
- *KUR (People's Business Credit)*
- *Papua Care KMK (Guaranteed by City Government)*
- *Micro Business Loans (PUM)*
- *Micro KMK*
- *Small KMK*

CONSUMER LOANS

Consumer Loans are financing facilities provided to individuals, including employees, for the purchase or lease of consumer goods. The types include:

- *Griya Bhakti Loans*
- *Wira Bhakti Loans*
- *Purna Bhakti Loans*
- *Multi-Purpose Loans*
- *PUMP-KB Jamsostek Loans*
- *Vehicle Loans*

SYNDICATED LOANS

Syndicated Loans are financing facilities provided by a group of banks to a single debtor when the required loan amount is too large for one bank alone. These include:

- *Investment Syndicated Loans*
- *Working Capital Syndicated Loans*
- *R/C Working Capital Syndicated Loans*

INVESTMENT LOANS

Investment Loans are medium- to long-term financing provided for the purchase of capital goods or investments, including rehabilitation, modernization, expansion, or the establishment of new projects. The types include:

- *Own Fund Investment Loans*
- *Papua Care Investment Loans (Government Guaranteed)*
- *Micro Investment Loans*
- *Small Investment Loans*
- *Business Vehicle Investment Loans*

GOVERNMENT PROGRAM LOANS

Government Program Loans are financing schemes issued by the government to support MSME development. These include:

- *Cooperative and Member Financing Programs*
- *Food Security Financing Programs*
- *Working Capital KUR Programs*



- KUR
- KPP KI
- KUR
- KPP KMK KUR R/C
- Perdagangan
- KPP KMK KUR
- Konstruksi

- Investment KUR Programs
- Trade R/C KUR Programs
- Construction KUR Programs

KREDIT PEGAWAI DAN PENSUN

Kredit Pegawai dan Pensiun ditujukan bagi pegawai berpenghasilan tetap dan pensiunan, termasuk Pegawai Negeri Sipil Otonom, pegawai instansi vertikal BUMN/ BUMD, TNI/POLRI, anggota badan legislatif (DPR-RI, DPD, DPRD, DPRD, MRP), pegawai swasta/lembaga tertentu, CPNS, dan pensiunan profesional.

EMPLOYEE AND PENSION LOANS

Employee and Pension Loans are intended for salaried employees and retirees, including civil servants, employees of state-owned and regional enterprises, military/police personnel, legislative members, private sector employees, prospective civil servants, and professional retirees.

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKPE)

KKPE adalah fasilitas kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan kepada petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk mendukung pelaksanaan program Ketahanan Pangan dan Energi.

FOOD AND ENERGY SECURITY CREDIT (KKPE)

KKPE is an investment and/or working capital loan facility provided to farmers, plantation workers, livestock breeders, fishermen, and aquaculture operators to support food and energy security programs.

KUR (KREDIT USAHA RAKYAT)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pinjaman yang diberikan kepada UMKM, baik secara langsung maupun melalui lembaga *linkage*, yang memiliki kelayakan usaha dalam sektor ekonomi produktif namun belum *bankable* dalam bentuk kredit modal kerja atau investasi.

PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)

KUR is a financing facility provided to MSMEs, either directly or through linkage institutions, for productive business activities that are feasible but not yet bankable. It may be in the form of working capital or investment loans.

C. Jasa Perbankan Lainnya		C. Other Banking Services
Bank Papua Card	Sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh Bank Papua. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti transaksi pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa dibelanjakan adalah jumlah uang (saldo) yang ada di tabungan bank Papua.	An electronic-based payment card issued by Bank Papua. This card can function as a substitute for cash payment transactions. The amount of money that can be spent is the amount (balance) in the Papuan bank's savings.
	Dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM, CDM yang memberikan kemudahan 24 jam (7 hari dalam seminggu) serta dapat digunakan sebagai kartu debit dalam bertransaksi di EDC Merchant berlogo Bank Papua, Prima, dan GPN. Kartu ini dapat memberikan kemudahan bertransaksi, seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer dana, dan Payment Point.	It can be used to carry out banking transactions through ATMs and CDM, which provide convenience 24 hours (7 days a week) and can be used as a debit card for transactions at EDC Merchants bearing the logos of Bank Papua, Prima, and GPN. This card can provide convenience for transactions, such as cash withdrawals, balance checks, fund transfers, and Payment Points.
Transfer/Kliring/RTGS	Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dari Bank Papua sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan kepada bank lain atau pun sesama Bank Papua, untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer dan dapat dilakukan menggunakan media Elektronik Banking melalui Mesin ATM, EDC Mobile Banking, SMS Banking, maupun Teller Bank.	The transfer is a bank service activity to transfer a certain amount of funds from Bank Papua by order of the giver addressed to another bank or fellow Bank Papua for the benefit of someone appointed as the recipient of the transfer and can be carried out using Electronic Banking media through ATM Machines, EDC Mobile Banking, SMS Banking, and Bank Tellers.



C. Jasa Perbankan Lainnya		C. Other Banking Services
Kliring/RTGS	Kliring dan RTGS merupakan jenis transfer yang mengharuskan bank untuk melakukan proses pemindahbukuan maupun transfer antar bank. Sebelum melakukan transaksi, petugas Bank Papua terlebih dahulu mengecek apakah saldo mencukupi atau tidak. Perbedaan antara Kliring dan RTGS, yaitu terdapat pada biaya dan jumlah maksimal pengiriman yang diatur tersendiri di dalam ALCO Bank Papua.	<i>Clearing and RTGS are transfers requiring banks to carry out book-entry processes and transfers between banks. The difference between Clearing and RTGS is that there are fees and a maximum amount of remittances regulated separately in Bank Papua's ALCO. Before making a transaction, Bank Papua officers check whether the balance is sufficient.</i>
EDC (Electronic Data Capture)	<i>Electronic Data Capture</i> atau disingkat EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening Bank Papua. EDC merupakan salah satu layanan Bank Papua, khususnya bagi Merchant/instansi pemerintah dalam mendukung transaksi pembayaran/pembelian. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan Kartu ATM/Debit Bank Papua sehingga menjadikan transaksi menjadi lebih mudah dan aman dan tergabung dalam jaringan Bank Papua, jaringan Prima dan jaringan GPN di seluruh Indonesia.	<i>Electronic Data Capture or abbreviated as EDC, is a means of receiving payments that can link between Bank Papua accounts. EDC is one of Bank Papua's services, especially for Merchants/government agencies, Supporting payment/purchase transactions. Payments can be made using a Bank Papua ATM/Debit Card to make transactions more accessible and safer and incorporated into the Bank Papua, Prima, and GPN networks throughout Indonesia.</i>
CDM (Cash Deposit Machine)	<i>Cash Deposit Machine</i> (CDM) merupakan <i>Automatic Teller Machine</i> yang disediakan khusus untuk transaksi setoran tunai bebas biaya ke rekening sendiri tanpa melalui petugas teller.	<i>A Cash Deposit Machine (CDM) is an Automatic Teller Machine provided specifically for cash deposit transactions free of charge to your account without going through a teller.</i>
Samsat Online	Merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi jasa ketatausahaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pendapatan lain-lain secara <i>online</i> dan dapat dilakukan melalui Kantor Samsat, Samsat Corner, dan mesin ATM Bank Papua.	<i>It is an online payment service for Motorized Vehicle Tax (PKB), administrative service fees, Transfer Fees for Motorized Vehicles (BBNKB), and other income. It can be done through the Samsat Office, Samsat Corner, and Bank Papua ATMs.</i>
Layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Layanan kartu identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan fasilitas perbankan. Layanan ini berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, Kartu Taspen, Kartu Askes, Bapertarum dan sebagai Kartu ATM Bank Papua.	<i>Civil Servants (PNS) identity card services with banking facilities. This service functions as a PNS Identity Card, Taspen Card, Askes Card, Bapertarum, and a Bank Papua ATM Card.</i>
BPDNet Online	Kemudahan setoran tunai ke seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara <i>realtime</i> melalui <i>Teller</i> Bank Papua.	<i>Ease of cash deposits to all Regional Development Banks (BPD) in real-time through Bank Papua Tellers.</i>
Save Deposit Box (SDB)	<i>Safe Deposit Box</i> adalah Sarana khusus yang disediakan oleh bank untuk menyimpan surat-surat/barang-barang berharga lainnya dengan aman.	<i>Safe Deposit Box is a unique facility a bank provides to store documents/other valuables safely.</i>
Cash Management System (CMS) Kas Daerah	Merupakan suatu layanan pencairan SP2D melalui Aplikasi CMS Kasda yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Pemerintah Daerah. Fasilitas ini diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kebutuhan informasi transaksi SP2D dan rekening Giro secara <i>Online</i> .	<i>It is an SP2D disbursement service through the Kasda CMS Application, which is integrated with the Regional Government Financial System. This facility is provided to the Regional Government to provide online SP2D and Demand Deposit transaction information needs.</i>
Garansi Bank	Bank Garansi (Surat Dukungan Bank) adalah suatu surat pernyataan bank untuk membayar (sebesar jumlah pokok/prinsipal garansi yang dikeluarkan) kepada pihak lain (yang menerima garansi) apabila nasabah tidak/gagal membayar/memenuhi kewajibannya atau suatu jaminan bank yang diberikan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu proyek/tender atau dalam transaksi perdagangan.	<i>A Bank Guarantee (Letter of Bank Support) is a bank statement to pay (in the amount of principal/principal guarantee issued) to another party (who receives the guarantee) if the customer does not/fails to pay/fulfill its obligations or a bank guarantee is given to meet the requirements required in carrying out a project/tender or in trade transactions.</i>
Referensi Bank	yaitu surat keterangan sebagai nasabah bank atau biasa disebut referensi bank yang diberikan kepada nasabah sehubungan dengan adanya permintaan nasabah untuk melengkapi persyaratan suatu pekerjaan atau kepentingan lainnya yang isinya merupakan informasi tentang keberadaan nasabah sebagai pemegang rekening pada bank.	<i>Namely, a certificate as a bank customer or commonly called a bank reference given to a customer in connection with a customer's request to complete the requirements of a job or other interest, the contents of which are information about the whereabouts of the customer as an account holder at the bank.</i>



C. Jasa Perbankan Lainnya		C. Other Banking Services
Automatic Teller Machine (ATM) Bank Papua	Automated Teller Machine adalah sebuah mesin yang dikendalikan oleh komputer, yang mana mesin tersebut dapat membantu nasabah bank untuk melakukan beberapa macam transaksi secara terbatas tanpa bantuan teller. Keamanan transaksi menggunakan ATM adalah aman karena terlindungi oleh prosedur operasi ATM yang menggunakan kartu ATM. Dengan menggunakan kartu ATM, ATM dioperasikan secara sangat pribadi oleh para nasabah, dan transaksi langsung dicatat secara otomatis tanpa campur tangan manusia.	Transaction security using an ATM is safe because it is protected by ATM operating procedures that use an ATM card. Using an ATM card, customers operate ATMs very privately, and transactions are recorded automatically without human intervention. An Automated Teller Machine is a machine controlled by a computer, in which the device can help bank customers to make a limited number of transactions without the help of a teller.
Payment Point Telkomsel	Layanan pembayaran tagihan Telkomsel dan pembelian pulsa melalui mesin ATM, SMS Banking, Mobile Banking dan Teller Bank Papua.	Telkomsel bill payment services and loan purchases through ATMs, SMS Banking, Mobile Banking, and Bank Papua Tellers.
Payment Point Indosat	Layanan pembayaran tagihan Indosat dan pembelian pulsa melalui mesin ATM, SMS Banking, Mobile Banking dan Teller Bank Papua.	Indosat bill payment services and loan purchases through ATMs, SMS Banking, Mobile Banking, and Bank Papua Tellers.
Payment Point PLN	Layanan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran dan pembelian listrik PLN yang meliputi Pembayaran Tagihan, Pembelian Token, Pembayaran Lainnya. Transaksi dapat dilakukan melalui mesin ATM, SMS Banking, Mobile Banking dan Teller Bank Papua.	Services provided to customers to make payments and purchase PLN electricity include Bill Payments, Token Purchases, and Other Payments. Transactions can be made through ATMs, SMS Banking, Mobile Banking, and Bank Papua Tellers.
Layanan Airport Executive Lounge	Fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Papua berupa pemanfaatan ruangan Airport Executive Lounge di beberapa bandara di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank Papua. Fasilitas ini diberikan gratis bagi nasabah pemegang Platinum Card Bank Papua dan kartu ATM Platinum Crystal Card Bank Papua.	Service facilities provided to Bank Papua customers include using Airport Executive Lounge rooms at several airports throughout Indonesia that have collaborated with Bank Papua. This facility is free for customers holding Bank Papua Platinum Card and Platinum Crystal Card Bank Papua ATM cards.
SMS Banking Bank Papua	SMS Banking merupakan layanan yang disediakan Bank melalui sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan. SMS Banking pada dasarnya digunakan untuk mempermudah nasabah yang ingin melakukan transaksi tanpa melalui teller atau ATM. Nasabah bisa melakukan transaksi seperti cek saldo, membayar tagihan listrik, membeli pulsa, transfer, dan lainnya hanya dengan melalui SMS Banking. Berbagai fitur yang tersedia dalam SMS Banking ini memberikan kemudahan karena lebih mudah, cepat, dan praktis.	SMS Banking is a service the bank provides through the SMS facility to carry out financial transactions and request financial information. SMS Banking makes it easier for customers who want to transact without going through tellers or ATMs. Customers can make transactions such as checking balances, paying electricity bills, buying credit, transferring, and others by SMS Banking. The various features available in SMS Banking provide convenience because it is more accessible, faster, and more practical.
Papua Mobile	Papua Mobile adalah suatu layanan perbankan dengan menggunakan fasilitas handphone atau smartphone dengan aplikasi yang disediakan bank agar nasabah dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat. Mobile Banking Bank Papua dapat diinstal pada smartphone dengan operating system Android dan IOS dengan tampilan menu yang menarik dan mudah digunakan. Dengan Mobile Banking nasabah dapat melakukan transaksi Financial seperti transfer, pembayaran, pembelian, transaksi non-Financial seperti cek saldo, cek mutasi rekening, dan fitur-fitur lainnya yang ada pada aplikasi Mobile Banking.	Mobile Banking is a banking service using mobile phone facilities or a smartphone with an application the bank provides so customers can transact easily and quickly. With Mobile Banking, customers can carry out financial transactions such as transfers, payments, purchases, non-financial transactions such as checking balances, checking account mutations, and other features available in the Mobile Banking application. Bank Papua Mobile Banking can be installed on Android and IOS operating systems with an attractive and easy-to-use menu display.



Wilayah Operasional Perusahaan

Company Operational Area



KC. Yogyakarta

Branch Office Yogyakarta

Ruko Raflesia Kavling J Dan
K Sleman D.I. Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 4332886, 4332730, 4332906
Fax. (0411) 4332567
Email : cabang.yogyakarta@bankpapua.co.id

KC Jakarta

Branch Office Jakarta

Gedung Thamrin City Lt. Dasar Blok A 19 No. 11
Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 31990940, 31990941
Email : cabang.jakarta@bankpapua.co.id KC

KC Surabaya

Branch Office Surabaya

Jl. Raya Darmo No. 61 Kec. Tegalsari-
Kotamadya Surabaya, Jawa Timur 60265
Telp. (031)5662280, 5662296
Fax. (031) 5662286
Email : cabang.surabaya@bankpapua.co.id

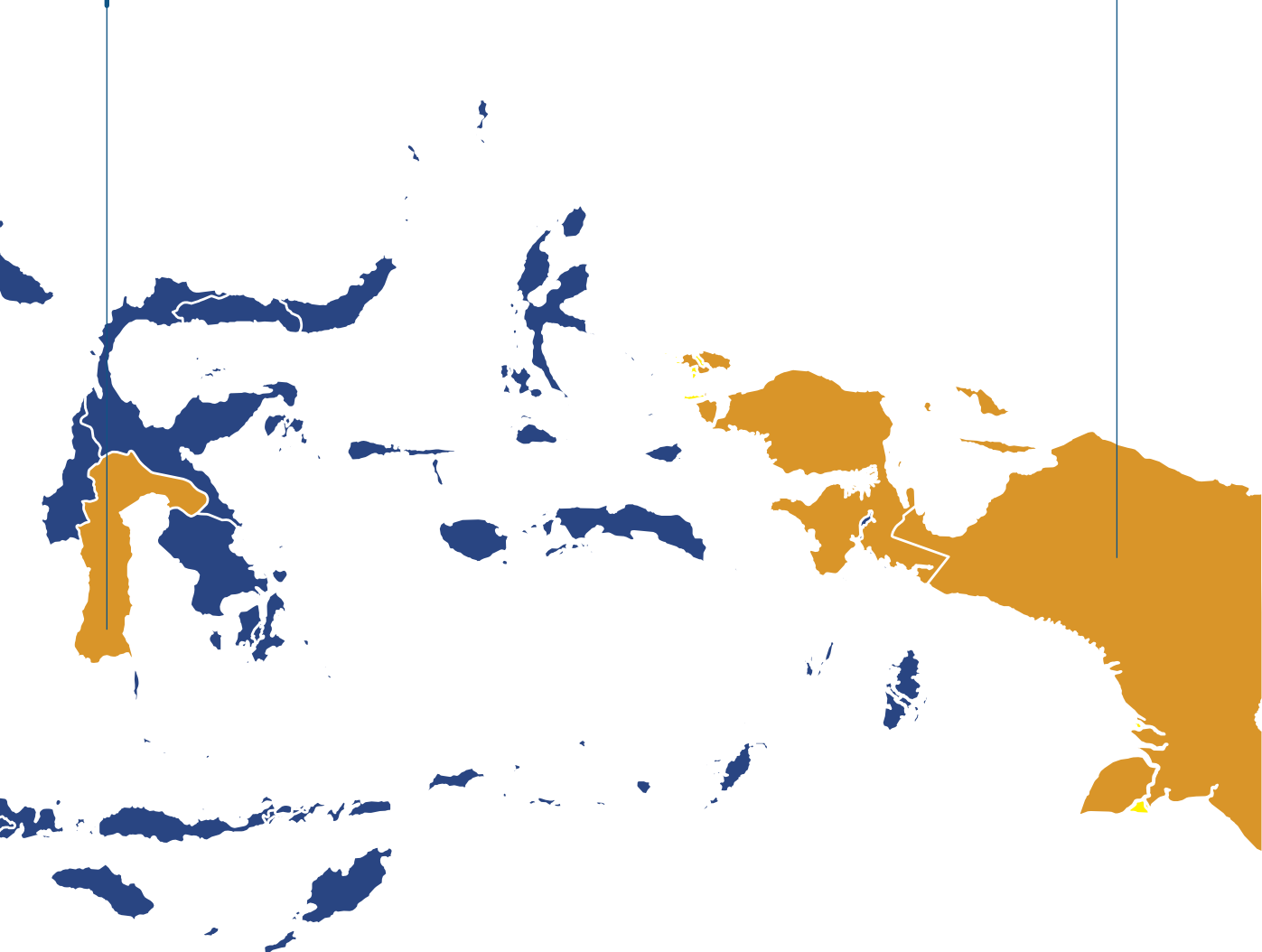


KC. Makassar*Branch Office Makassar*

Jalan Andi Pangeran Pettarani No.18 Blok A1-A2
Makassar Sulawesi Selatan,
Kota Makassar Telp. (0411)4662785
Fax. (0411)4662693
Email : cabang.makassar@bankpapua.co.id

Kantor Pusat*Head Office*

Jl. Ahmad Yani 5-7 Jayapura,
Provinsi Papua Telp. (0967)
532011, 531546 Fax. (0967)
533207, 531303



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Disussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Laporan Keuangan
Financial Statements



Indeks OJK
OJK Index

JARINGAN BANK PAPUA DAN PERKEMBANGANNYA

BANK PAPUA NETWORK AND ITS DEVELOPMENT

Kantor dan Delivery Channel	2025	2024	2023	2022	2021	Office and Delivery Channel
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Headquarters
Kantor Cabang	43	43	43	42	40	Branch office
Papua	10	10	10	26	26	- Papua
Papua Barat	6	6	6	12	10	- West Papua
Papua Selatan	4	4	4	0	0	South Papua
Papua Tengah	7	7	7	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	6	6	6	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	6	6	6	0	0	Southwest Papua
Luar Papua	4	4	4	4	4	- Outside Papua
Kantor Cabang Pembantu	59	59	58	59	59	Branch office
- Papua	22	22	22	42	42	- Papua
- Papua Barat	8	8	7	16	16	- West Papua
Papua Selatan	7	7	7	0	0	South Papua
Papua Tengah	9	9	9	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	3	3	3	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	9	9	9	0	0	Southwest Papua
- Luar Papua	1	1	1	1	1	- Outside Papua
Kantor Kas	122	121	122	119	119	Cash office
- Papua	25	25	25	70	69	- Papua
- Papua Barat	27	27	28	49	50	- West Papua
Papua Selatan	20	20	20	0	0	South Papua
Papua Tengah	14	14	14	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	13	13	13	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	23	22	28	0	0	Southwest Papua
- Luar Papua	0	0	0	0	0	- Outside Papua
Jumlah Jaringan Kantor	225	224	224	221	219	Total Office Network

Jaringan Delivery Channel	2025	2024	2023	2022	2021	Delivery Channel Network
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	390	390	337	331	334	Automated Teller Machine (ATM)
Papua	141	141	127	224	227	- Papua
Papua Barat	59	59	49	91	91	- West Papua
Papua Selatan	38	38	31	0	0	South Papua
Papua Tengah	58	58	49	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	22	22	19	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	54	54	46	0	0	Southwest Papua
Luar Papua	18	18	16	16	16	- Outside Papua
Cash Recycle Machine (CRM)	20	0	0	0	0	
Papua	4	0	0	0	0	
Papua Barat	3	0	0	0	0	
Papua Selatan	2	0	0	0	0	
Papua Tengah	4	0	0	0	0	
Papua Pegunungan	2	0	0	0	0	
Papua Barat Daya	4	0	0	0	0	
Luar Papua	1	0	0	0	0	
Electronic Data Capture (EDC)	1.676	1.515	1.362	1117	816	Electronic Data Capture (EDC)
Papua	681	659	629	0	0	- Papua
Papua Barat	243	186	163	0	0	- West Papua
Papua Selatan	200	179	154	0	0	South Papua

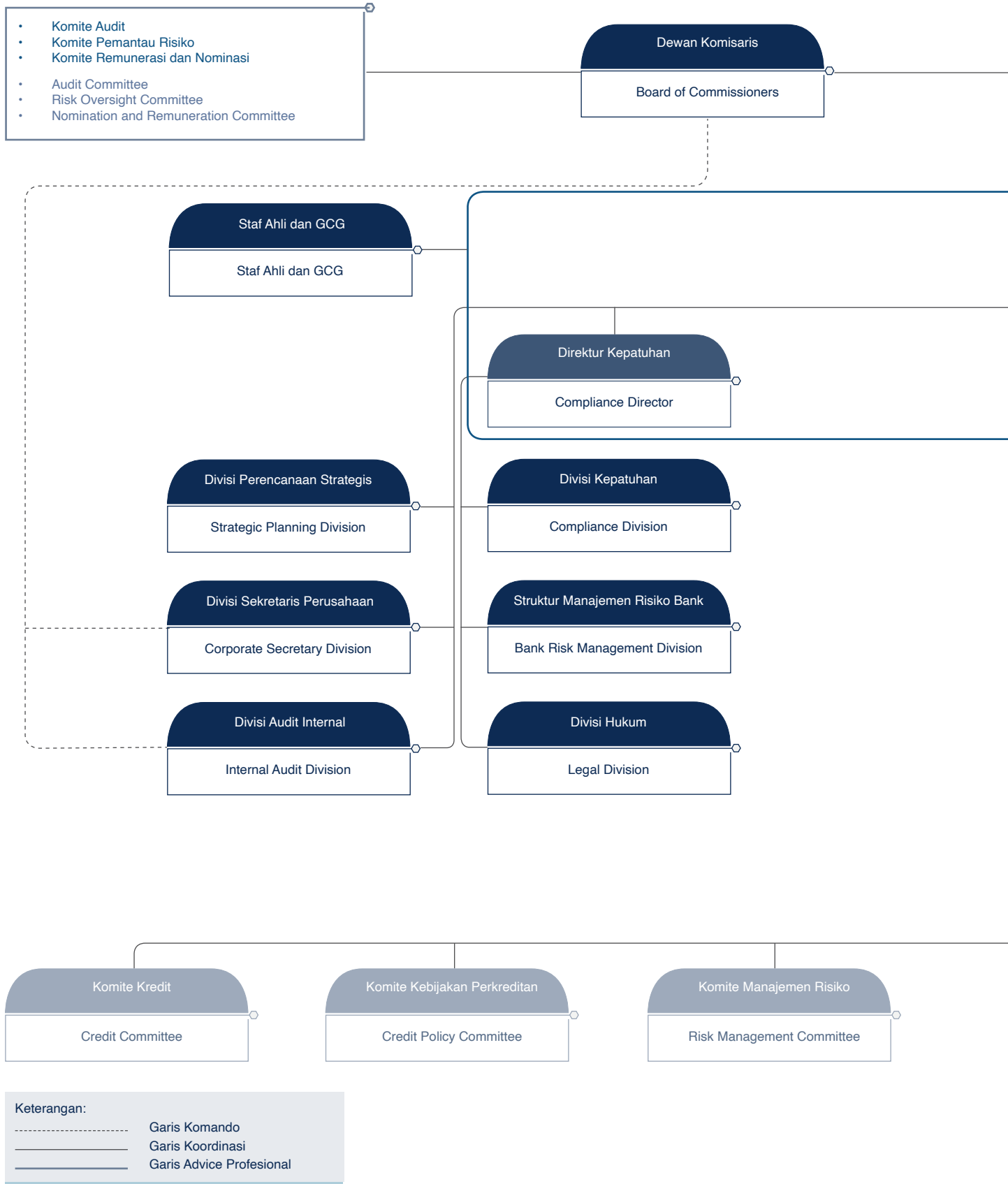


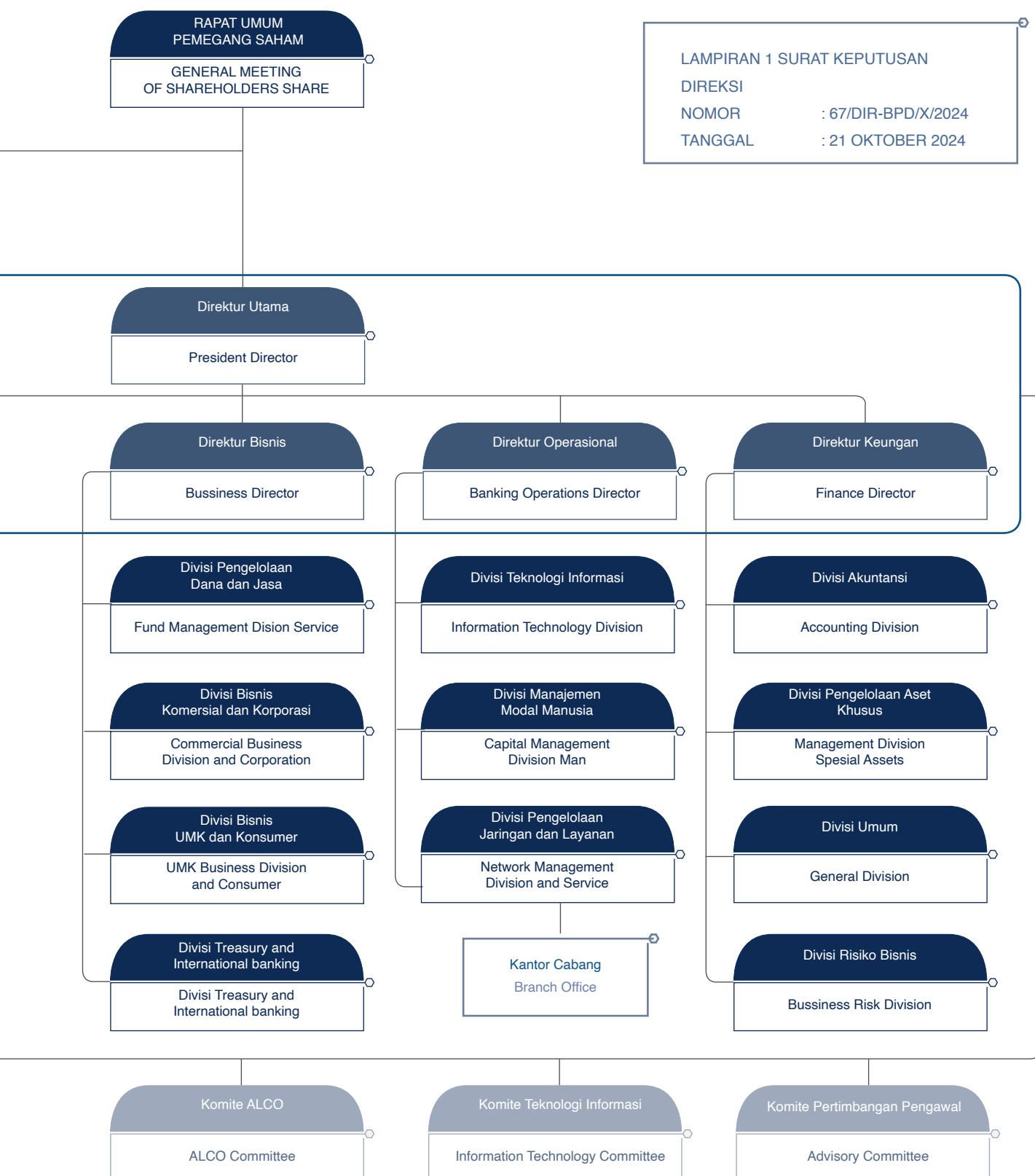
Jaringan <i>Delivery Channel</i>	2025	2024	2023	2022	2021	<i>Delivery Channel Network</i>
Papua Tengah	152	128	103	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	99	83	80	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	269	259	219	0	0	Southwest Papua
Luar Papua	32	21	14	0	0	- Outside Papua
Samsat <i>Online</i>	25	25	25	23	23	Samsat Online
- Papua	8	8	8	14	14	- Papua
- Papua Barat	6	6	6	9	9	- West Papua
Papua Selatan	3	3	3	0	0	South Papua
Papua Tengah	3	3	3	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	1	1	1	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	4	4	4	0	0	Southwest Papua
Kasda <i>Online</i>	19	19	19	19	19	Samsat Online
- Papua	12	12	12	12	12	- Papua
- Papua Barat	7	7	7	7	7	- West Papua
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	23	23	23	23	23	Electronic Employee Card (KPE)
- Papua	16	16	16	16	16	- Papua
- Papua Barat	7	7	7	7	7	- West Papua
Cash Management System (CMS)	19	19	18	21	21	Cash Management System (CMS)
Papua	1	1	7	17	17	- Papua
Papua Barat	2	2	5	4	4	- West Papua
Papua Selatan	2	2	4	0	0	South Papua
Papua Tengah	1	1	1	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	0	0	1	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	0	0	1	0	0	Southwest Papua
Payment point Bank Papua	24	24	23	51	51	Bank Papua payment point
- Papua	7	7	7	35	35	- Papua
- Papua Barat	7	7	6	16	16	- West Papua
Papua Selatan	2	2	2	0	0	South Papua
Papua Tengah	2	2	2	0	0	Central Papua
Papua Pegunungan	1	1	1	0	0	Papua Mountains
Papua Barat Daya	5	5	5	0	0	Southwest Papua
Kas Titipan Bank Indonesia	5	5	5	5	5	Bank Indonesia Cash Custody
- Papua	3	3	3	3	3	- Papua
- Papua Barat	2	2	2	2	2	- West Papua
Mobil Kas Keliling	2	2	2	2	2	Mobile Cash Car
- Papua	2	2	2	2	2	- Papua
- Papua Barat	0	0	0	0	0	- West Papua
Jumlah <i>Delivery Channel</i>	2.183	2.021	1.842	1.598	1.302	Number of Delivery Channels
Jumlah Jaringan	2.408	2.245	2.066	1.821	1.521	Number of Networks



Struktur Organisasi

Organizational Structure





DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Position
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	<i>President Commissioner</i>
Nataniel Dominggus Mandacan	Komisaris Non Independen	<i>Non Independent Commissioner</i>
Dortheis Sesa	Komisaris Independen	<i>Independent Commissioner</i>
Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	<i>Independent Commissioner</i>
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	<i>Independent Commissioner</i>

DIREKSI

Nama	Jabatan	Position
Yuliana Dolfince Yembise	Direktur Utama	<i>President Director</i>
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	<i>Business Director</i>
Pujianto	Direktur Keuangan	<i>Finance Director</i>
Isak Samuel Wopari	Direktur Operasional	<i>Banking Operation Director</i>
Betty Juliaantje Parinussa	Direktur Kepatuhan	<i>Compliance Director</i>

PEMIMPIN DIVISI

Nama	Unit Kerja	Position
Matheus A. Mual	Divisi Sekretaris Perusahaan	<i>Corporate Secretary Division</i>
Bang Yudi Poluan	Divisi Audit Internal	<i>Internal Audit Division</i>
Suleman Tarru' Padang	Divisi Manajemen Risiko Bank	<i>Bank Risk Management Division</i>
Meaky G. A. Bolang	Divisi Hukum	<i>Legal Division</i>
Erna M. Kapissa	Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa	<i>Fund Management, Services and E-Banking Division</i>
Alfriets M. A. K. Kawengian	Divisi Perencanaan Strategis	<i>Strategic Planning Division</i>
Richard F. Goszal	Divisi Risiko Bisnis	<i>Business Risk Division</i>
Andarias Baunik	Divisi Manajemen Modal Manusia	<i>Human Capital Management Division</i>
Victor Y.L. Numberi	Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan	<i>Network & Service Management Division</i>
Sukidi	Divisi Kepatuhan	<i>Compliance Division</i>
Simon Giyai	Divisi Pengelolaan Aset Khusus	<i>Special Asset Management Division</i>
Daniel Palullungan	Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	<i>Commercial and Corporate Business Division</i>
Arnold P. Heipon	Divisi Treasury dan Internasional Banking	<i>Treasury Division</i>
Petrus Agus Soleman	Divisi Akuntansi	<i>Accounting Division</i>
Bertha Affar	Divisi Umum	<i>General Division</i>
Andreas Didik Wijayanta	Divisi Teknologi Informasi	<i>Information Technology Division</i>
Jonathan Auparay	Divisi Bisnis UMK & Konsumer	<i>SME & Consumer Business Division</i>



KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

Nama	Jabatan	Position
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua Komite Audit	Chairman of the Audit Committee
Dortheis Sesa	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member
Victor Abraham Abaidata	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member
Yonathan Sesa	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member
Marthin Y. WArkar	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member
Ludia Kiding	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama	Jabatan	Position
Viktor Abraham Abaidata	Ketua Komite Pemantau Risiko	Chairman of Risk Oversight Committee
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Nataniel D. Mandacan	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Arobi Ahmad Aituarauw	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Dortheis Sesa	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Yohanes Mandang	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Anita Erari	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Daud Sitepu	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member
Yunus B. Toding Allo	Anggota Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee Member

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Jabatan	Position
Dortheis Sesa	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Chairman of Remuneration and Nomination Committee
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Remuneration and Nomination Committee Member
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Remuneration and Nomination Committee Member
Arobi Ahmad Aituarauw	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Remuneration and Nomination Committee Member
Victor Abraham Abaidata	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Remuneration and Nomination Committee Member
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Remuneration and Nomination Committee Member



Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Untuk memperkuat bisnisnya, Bank Papua telah bergabung dengan beberapa Asosiasi, antara lain:

To strengthen its business, Bank Papua has joined several associations, including:

Nama Asosiasi	Tingkat Asosiasi	Status Keanggotaan	Association Name
Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	Nasional	Anggota	Asbanda (Association of Regional Development Banks)
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Nasional	Anggota	Indonesian Payment System Association (ASPI)
Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	Nasional	Anggota	Debt Securities Traders Association (HIMDASUN)
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Nasional	Anggota	Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector (LAPS SJK)
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Nasional	Anggota	Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)
Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI)	Nasional	Anggota	Communication Forum of the Board of Commissioners/Supervisors of Regional Development Banks of Indonesia (FKDK BPDSI)
Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Nasional	Anggota	Regional Banking Consultative Body (BMPD)
Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)	Nasional	Anggota	Financial Services Industry Communication Forum (FKIJK)





Profil Direksi

Board of Directors Profile



Yuliana Dolfince Yembise, SH, MH

Direktur Utama
President Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jayapura, lahir di Biak pada tahun 1965. Usia 60 tahun pada Desember 2025.

Periode Jabatan

09 November 2023 - 08 November 2027

Riwayat Pendidikan

Pascasarjana (S2) Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2012)

Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Born in Biak in 1965. Age 60 as of December 2025.

Term of Office

November 9, 2023 – November 8, 2027

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Law from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2012).



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Sertifikasi

1. Penyetaraan, Penyesuaian & Resertifikasi Manajemen Risiko Direksi Jenjang 7 dari Indonesia *Risk Professional Association* (2025)
2. Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7 dari PT. Multi Talenta *Consulting* (2025)
3. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, PT. Mahesa Prima Solusindo (2021)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak keputusan RUPS Luar Biasa pada 9 November 2023, yang ditetapkan melalui SK RUPS No. 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023. beliau telah lulus Uji Kepatutan & Kelayakan dari OJK, yang dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-225/PB.02/2023 tertanggal 11 Oktober 2023. Keputusan ini mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atas pencalonan pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, serta salinan keputusan anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-130/D.03/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Cabang Timika 2005
- Kepala Divisi Perencanaan & Keuangan 2008
- Kepala Divisi *Treasury* & International 2009
- Senior Executive Specialis Auditor Umum 2012
- Kepala Divisi Audit Internal 2013
- Pemimpin Divisi Umum 2017
- Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia 2019
- Direktur Keuangan Bank Papua (2021-2023)

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. *Equalization, Adjustment & Recertification of Risk Management for Directors Level 7 from the Indonesia Risk Professional Association* (2025)
2. *Risk Management Certification Refresher Level 7 from PT Multi Talenta Consulting* (2025)
3. *Risk Management Certification Refresher from PT Mahesa Prima Solusindo* (2021)

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua since the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 9, 2023, as stipulated in GMS Decree No. 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023. He has passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stated in OJK Letter No. SR-225/PB.02/2023 dated October 11, 2023. This decision includes the assessment of the fit and proper test (PKK) for the nomination of the management of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, as well as a copy of the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEPR-130/D.03/2023 dated October 10, 2023.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

- *Head of Timika Branch Office* (2005)
- *Head of Planning & Finance Division* (2008)
- *Head of Treasury & International Division* (2009)
- *Senior Executive Specialist – General Auditor* (2012)
- *Head of Internal Audit Division* (2013)
- *Head of General Division* (2017)
- *Head of Human Capital Management Division* (2019)
- *Director of Finance, Bank Papua* (2021–2023)

Share Ownership in Bank Papua

None





Ir. Sadar Sebayang
Direktur Bisnis
Business Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jayapura, lahir di Medan pada tahun 1962. Usia 63 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Medan in 1962. Age 63 as of December 2025.

Periode Jabatan

- Periode Pertama:
06 Maret 2018 - 05 Maret 2021
- Periode Kedua:
06 Maret 2021 - 28 Maret 2026

Term of Office

- First Term:
March 6, 2018 – March 5, 2021
- Second Term:
March 6, 2021 – March 28, 2026

Riwayat Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen di Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta (1998),
- Sarjana (S1) Jurusan Agronomi (Budai Daya Pertanian) dari Institut Pertanian Bogor Jawa Barat (1986).

Educational Background

- Master's Degree (S2) in Management from Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia, Jakarta (1998)
- Bachelor's Degree (S1) in Agronomy (Agricultural Cultivation) from Institut Pertanian Bogor, West Java (1986)



Sertifikasi

1. Penyetaraan, Penyesuaian & Resertifikasi Manajemen Risiko Direksi Jenjang 7 dari Indonesia Risk Professional Association (2025),
2. Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7 dari PT. Multi Talenta Consulting (2025)
3. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat, PT. Mahesa Prima Solusindo tahun 2021
4. Refreshment Treasury Level Advance, ACI FMA Indonesia, tahun 2021

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

1. Menjabat sebagai Direktur sejak keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, dengan penetapan melalui Surat Keputusan RUPS No.04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017. Beliau telah lulus Uji Kepatutan & Kelayakan dari OJK, yang dinyatakan dalam Surat OJK No.SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016, mengenai Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Ini adalah periode pertama beliau menjabat, dan sebelumnya beliau belum pernah menjabat sebagai Direksi Bank Papua.
2. Masa jabatan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan RUPS LB No.05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020, mengenai Penetapan Pengangkatan Kembali Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2021 hingga 2025.
3. Masa jabatan Direktur Bisnis berdasarkan Surat Keputusan RUPS LB No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 mengenai Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode 2021 sampai dengan 2025.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

Berkarir di PT Bank Central Asia Tbk dengan jabatan terakhir Kepala Biro Corporate Credit Risk Management (2010-2017).

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. Equalization, Adjustment & Recertification of Risk Management for Directors Level 7 from the Indonesia Risk Professional Association (2025)
2. Risk Management Certification Refresher Level 7 from PT Multi Talenta Consulting (2025)
3. Risk Management Certification Refresher from PT Mahesa Prima Solusindo (2021)
4. Advanced Treasury Certification Refresher, ACI FMA Indonesia (2021)

Career History**Legal Basis for Appointment**

1. Appointed as Director based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in 2017, as stipulated in GMS Decree No. 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 dated March 6, 2017. He has passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stated in OJK Letter No. SR-131/PB.12/2016 dated December 30, 2016 regarding the submission of the decision on the nomination of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). This marked his first term, and he had not previously served as a Director of Bank Papua.
2. His term was extended based on EGMS Decree No. 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 dated November 26, 2020 regarding the reappointment of the Director of Business and Director of Operations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2021–2025 period.
3. The term of office as Director of Business was further extended based on EGMS Decree No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 dated March 20, 2025 regarding the Temporary Extension of the Term of Office of the Director of Business of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2021–2025 period.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

Previously worked at PT Bank Central Asia Tbk, with the last position as Head of Bureau of Corporate Credit Risk Management (2010–2017).

Share Ownership in Bank Papua

None





Isak Samuel Wopari, SE. MM.
Direktur Operasional
Banking Operation Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jayapura, lahir di Serui pada tahun 1974. Usia 51 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Serui in 1974. Age 51 as of December 2025.

Periode Jabatan

- Periode Pertama:
06 Maret 2018 – 05 Maret 2021
- Periode Kedua:
06 Maret 2021 – 28 Maret 2026

Term of Office

- First Term:
March 6, 2018 – March 5, 2021
- Second Term:
March 6, 2021 – March 28, 2026

Riwayat Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Cenderawasih Jayapura (2015),
- Sarjana (S1) jurusan Manajemen dari Universitas Cenderawasih Jayapura (2006).

Educational Background

- Master's Degree (S2) in Management from Cenderawasih University, Jayapura (2015)
- Bachelor's Degree (S1) in Management from Cenderawasih University, Jayapura (2006)



Sertifikasi

1. Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2024)
2. Penyetaraan & Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko BOD Level 5 ke Jenjang 7 dari Indonesia Risk Professional Associati (2024)
3. Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) bersama Indonesia Risk Profesional ASSociation (IRPA) (2025)
4. Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 4,5,6,7 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Menjabat sebagai Direktur sejak keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan RUPS No. 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017. Beliau juga telah lulus Uji Kepatutan & Kelayakan dari OJK, sebagaimana dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016, mengenai Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Ini adalah periode pertama beliau menjabat, dan sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Direksi Bank Papua.
2. Masa jabatan beliau diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan RUPS LB No. 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020, mengenai Penetapan Pengangkatan Kembali Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2021 hingga 2025.
3. Masa jabatan Direktur Operasional berdasarkan Surat Keputusan RUPS LB No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 mengenai Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

Berkarir di Bank Papua, dengan jabatan terakhir adalah Kepala Departemen Anti Fraud (2016).

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. Banking Risk Management Competency Certificate Level 7 from the National Professional Certification Agency (BNSP) (2024)
2. Equalization & Alignment of Risk Management Certification from BOD Level 5 to Level 7 from the Indonesia Risk Professional Association (2024)
3. Risk Management Recertification Level 7 from the Risk Management Certification Board (BSMR) in collaboration with the Indonesia Risk Professional Association (IRPA) (2025)
4. Risk Management Certification Levels 4, 5, 6, and 7 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025)

Career History

Legal Basis for Appointment

1. Appointed as Director based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in 2017, as stipulated in GMS Decree No. 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 dated March 6, 2017. He has also passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stated in OJK Letter No. SR-131/PB.12/2016 dated December 30, 2016 regarding the nomination of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). This marked his first term, and he had not previously served as a Director of Bank Papua.
2. His term of office was extended based on EGMS Decree No. 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 dated November 26, 2020 regarding the reappointment of the Director of Business and Director of Operations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2021–2025 period.
3. The term of office as Director of Operations was further extended based on EGMS Decree No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 dated March 20, 2025 regarding the Temporary Extension of the Term of Office of the Director of Operations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

Built a career at Bank Papua, with the last position as Head of Anti-Fraud Department (2016).

Share Ownership in Bank Papua

None



Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir di Sorong pada tahun 1953. Usia 72 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Sorong in 1953. Age 72 as of December 2025.

Periode Jabatan

Periode Pertama : 07 Desember 2021 - 06 Desember 2025
 Periode kedua : 07 Desember 2025- 06 Desember 2029

Term of Office

- *First Term: December 7, 2021 – December 6, 2025*
- *Second Term: December 7, 2025 – December 6, 2029*

Riwayat Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta (2000),
- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1996),
- Bachelor of Science (Bsc) (S1) Administrasi Niaga dari Universitas Cenderawasih Jayapura (1982).

Educational Background

- *Master's Degree (S2) in Financial Management from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta (2000)*
- *Bachelor's Degree (S1) in Economics, majoring in Business Management from Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1996)*
- *Bachelor of Science (BSc) in Business Administration from Cenderawasih University, Jayapura (1982)*



Sertifikasi

1. Penyetaraan, Penyelarasan & Resertifikasi Manajemen Risiko Direksi Jenjang 7 dari Indonesia *Risk Professional Associati* (2025)
2. Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7 dari PT Multi Talenta *Consulting* (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak keputusan RUPS Luar Biasa No. 04 tanggal 7 Desember 2021, yang ditetapkan melalui SK RUPS No. 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 pada tanggal yang sama. Ia juga telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, sesuai dengan Surat OJK No. SR-179/PB.12/2021 tanggal 2 Juli 2021, yang menyatakan keputusan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atas pengangkatan pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Selain itu, terdapat salinan keputusan anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-86/D.03/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang mencakup hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdri Betty Juliaantje Parinussa sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
2. Masa jabatan beliau diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan RUPS LB No. 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 mengenai Penetapan Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2025 hingga 2029.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

1. Pensiun dari Bank Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) pada 1 Desember 2009, dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Eksekutif dan Ketua Fokus Grup Pengaturan Bank-2/DPNP.
2. Menjabat di jajaran Direksi PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko (2014-2015), serta Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) (2010-2014) pada PT. Bank KEB Indonesia.
3. Menjabat Komisaris Independen PT Bank KEB Hana Indonesia. (2015-2018)
4. Menjabat Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua (2018-2021)

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. *Equalization, Alignment & Recertification of Risk Management for Directors Level 7 from the Indonesia Risk Professional Association (2025)*
2. *Risk Management Certification Refresher Level 7 from PT Multi Talenta Consulting (2025)*

Career History

Legal Basis for Appointment

1. *She has served as Director of Compliance since the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Resolution No. 04 dated December 7, 2021, as stipulated in the GMS Decree No. 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 on the same date. She has also passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as evidenced by OJK Letter No. SR-179/PB.12/2021 dated July 2, 2021, which confirms the fit and proper assessment decision for the appointment of the management of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. In addition, there is a copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-86/D.03/2021 dated July 30, 2021, which includes the results of the fit and proper assessment of Ms. Betty Juliaantje Parinussa as Director of Compliance of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.*
2. *Her term of office was extended based on EGMS Decree No. 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 dated March 20, 2025 regarding the reappointment of the Director of Compliance of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2025–2029 period.*

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

1. *Retired from Bank Indonesia, Directorate of Banking Research and Regulation (DPNP) on December 1, 2009, with the last position as Executive Researcher and Head of Banking Regulation Focus Group-2/DPNP.*
2. *Served on the Board of Directors of PT Bank KEB Hana Indonesia as Director of Compliance and Director of Risk Management (2014–2015), and as Director of Risk Management (Non-Operational) (2010–2014) at PT Bank KEB Indonesia.*
3. *Served as Independent Commissioner of PT Bank KEB Hana Indonesia (2015–2018).*
4. *Served as Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (2018-2021).*

Share Ownership in Bank Papua

None





Ir. Pujiyanto M.Si
Direktur Keuangan
Finance Director

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir di Surabaya pada tahun 1970. Usia 55 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Surabaya in 1970. Age 55 as of December 2025.

Periode Jabatan

08 Agustus 2024 – 07 Agustus 2028

Term of Office

August 8, 2024 – August 7, 2028

Riwayat Pendidikan

Pascasarjana, Manajemen Keuangan, Universitas Yapis Papua, Jayapura, 2017

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Financial Management from Yapis Papua University, Jayapura (2017)



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Sertifikasi

1. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh IRPA tahun 2025
2. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tahun 2025
3. Sertifikasi Pasar Modal oleh The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) tahun 2025
4. *Refreshment* Sertifikasi Dealer Treasury Jenjang 7 oleh ACI (2024)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 08 Agustus 2024. Pengangkatan ini ditetapkan melalui SK RUPS No. 04/SK/RUPS-BPD/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024. Sdr. Pujiyanto juga telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan oleh OJK, dengan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-39/D.03/2024 tertanggal 02 Juli 2024 sebagai bukti hasil penilaian kemampuan dan kepatutan beliau.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 1998
2. Kepala Departemen Pendukung Kredit 2014
3. Kepala Departemen Kredit Menengah & Korporasi 2015
4. Kepala Departemen Kredit Korporasi 2015
5. Kepala Divisi Kredit Khusus 2017
6. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus 2018
7. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis 2019

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. *Risk Management Certification Refresher Level 7 by IRPA (2025)*
2. *Procurement Certification from LKPP (National Public Procurement Agency) (2025)*
3. *Capital Market Certification from The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) (2025)*
4. *Refresher of Treasury Dealer Certification Level 7 by ACI (2024).*

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Director of Finance of PT Bank Pembangunan Daerah Papua based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on August 8, 2024, as stipulated in GMS Decree No. 04/SK/RUPS-BPD/VIII/2024 dated August 8, 2024. Mr. Pujiyanto has also passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as evidenced by the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEPR-39/D.03/2024 dated July 2, 2024.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

1. *Began career at Bank Papua as an employee (1998)*
2. *Head of Credit Support Department (2014)*
3. *Head of Medium & Corporate Credit Department (2015)*
4. *Head of Corporate Credit Department (2015)*
5. *Head of Special Credit Division (2017)*
6. *Head of Special Asset Management Division (2018)*
7. *Head of Business Risk Division (2019)*

Share Ownership in Bank Papua

None



HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

AFFILIATION RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Table of Directors' Affiliation Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan Management Relations	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Yuliana Dolfince Yembise, SH, MH	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ir. Sadar Sebayang	Direktur Bisnis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ir. Pujiyanto M.Si	Direktur Keuangan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Isak Samuel Wopari, SE, MM	Direktur Operasional		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Direktur Kepatuhan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI TAHUN 2025

EDUCATION AND TRAINING ATTENDED IN 2025

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Details of the education and/or training attended by the Board of Directors during the financial year are presented in the Corporate Governance chapter.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE REASONS THEREOF

Selama tahun 2025, Komposisi anggota Direksi Bank Papua tidak mengalami perubahan.

During 2025, there were no changes in the composition of the Board of Directors of Bank Papua.

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan / Perpanjangan Basis for Appointment / Extension	Masa Efektif Jabatan Effective Term of Office	Periode Jabatan Term of Office	Surat Persetujuan Approval letter
Yuliana Dolfince Yembise	Direktur Utama	Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.04 Tanggal 09 November 2023	09 November 2023 s/d 08 November 2027	Periode 1	Surat OJK Nomor : KEPR-130/D.03/2023 tanggal 10 Oktober 2023
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	- Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 45 Tanggal 26 November 2020 - Akta Risalah RUPS Tahunan No. 09 Tanggal 20 Maret 2025	- 5 Maret 2021 - 4 Maret 2025 - Perpanjangan sementara masa jabatan	Periode 2	Surat OJK No. KEP-125/D.03/2016 tanggal 30 Desember 2016
Isak Samuel Wopari	Direktur Operasional	- Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 45 Tanggal 26 November 2020 - Akta Risalah RUPS Tahunan No. 09 Tanggal 20 Maret 2025	- 5 Maret 2021 - 4 Maret 2025 - Perpanjangan sementara masa jabatan	Periode 2	Surat OJK No. KEP-127/D.03/2016 tanggal 30 Desember 2016
Betty Juliaantje Parinussa	Direktur Kepatuhan	Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 10 Tanggal 20 Maret 2025	7 Desember 2025- 6 Desember 2029	Periode 2	Surat OJK No. KEP-86/D.03/2021 tanggal 30 Juni 2021
Pujiyanto	Direktur Keuangan	Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. 04 Tanggal 08 Agustus 2024	08 Agustus 2024 - 07 Agustus 2028	Periode 1	Surat OJK Nomor: KEPR-39/D.03/2024





Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



YORGEMES DEREK HEGEMUR, SH, MH

Komisaris Utama

President Commissioner

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir pada tahun 1966. Usia 59 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Jayapura in 1966. Age 59 as of December 2025.

Periode Jabatan

09 November 2023 – 08 November 2027

Term of Office

November 9, 2023 – November 8, 2027

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Pasca Sarjana (S2) bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (2006)
2. Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2001)

Educational Background

1. *Postgraduate (Master's Degree) in Law from Airlangga University, Surabaya (2006)*
2. *Bachelor's Degree (S1) in Law from the Faculty of Law, Cenderawasih University, Jayapura (2001)*



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 6 Dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), 2024
2. Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 5 Dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), 2024
3. Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 4 dan 6 dari PT. Multi Talenta Consulting dan BSMR, (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak keputusan RUPS Luar Biasa pada 9 November 2023, yang ditetapkan melalui SK RUPS No. 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023. Ia telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK, yang dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-225/PB.02/2023 tanggal 11 Oktober 2023 mengenai Penyampaian Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) untuk Pencalonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, serta salinan keputusan anggota Dewan Komisaris OJK No. KEPR-131/D.03/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang mengukuhkan jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Rangkap Jabatan

Fungsional Ahli Utama Propinsi Papua

Pengalaman Kerja

- Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Papua (2000-2002)
- Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Papua (2002-2009)
- Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Provinsi Papua (2009-2011)
- Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi Papua (2011-2014)
- Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (2016)
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua (2014-2022)
- Analis kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Papua (2020)
- Plt. Asisten Bidang Umum SETDA Provinsi Papua (2021-2022)
- Asisten Bidang Umum SETDA Provinsi Papua (2022-sekarang)

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2024)
2. Risk Management Certification Level 5 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2024)
3. Refreshment of Risk Management Certification Level 4 and Level 6 from PT Multi Talenta Consulting and the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as President Commissioner since the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 9, 2023, as stipulated in GMS Decree No. 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023. He has passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stated in OJK Letter No. SR-225/PB.02/2023 dated October 11, 2023 regarding the Fit and Proper Test (PKK) for the nomination of the management of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. This is further supported by the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEPR-131/D.03/2023 dated October 10, 2023 confirming the appointment as President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Concurrent Positions

Senior Expert (Functional) at the Papua Provincial Government

Professional Experience

- Head of Legal Dispute Subdivision, Legal Bureau, Regional Secretariat of Papua Province (2000–2002)
- Head of Legal Review Subdivision, Legal Bureau, Regional Secretariat of Papua Province (2002–2009)
- Head of Regional Regulation Subdivision, Papua Province (2009–2011)
- Head of Regional Legal Products Division, Papua Province (2011–2014)
- Acting Regent of Mamberamo Raya Regency (2016)
- Head of Legal Bureau, Regional Secretariat of Papua Province (2014–2022)
- Senior Policy Analyst, Papua Provincial Government (2020)
- Acting Assistant for General Affairs, Regional Secretariat of Papua Province (2021–2022)
- Assistant for General Affairs, Regional Secretariat of Papua Province (2022–present)

Share Ownership in Bank Papua

None





DORTHEIS SESA, SE

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir di Wehali Teminabuan pada tahun 1961. Usia 64 tahun pada 14 Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Wehali, Teminabuan in 1961. Age 64 as of December 14, 2025.

Periode Jabatan

- Periode Pertama :
19 April 2018-18 April 2021
- Periode Ketiga:
19 April 2021-18 April 2025

Term of Office

- First Term:
April 19, 2018 – April 18, 2021
- Third Term:
April 19, 2021 – April 18, 2025

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Cenderawasih Jayapura (1989).

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Social and Political Sciences, majoring in Economics, from Cenderawasih University, Jayapura (1989).

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 6 Dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2024
2. Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 5 dari PT. Multi Talenta Consulting, 2024
3. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 4 dan 6 dari PT. Multi Talenta Consulting dan BSMR, (2025).

Certifications

1. Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2024)
2. Risk Management Certification Level 5 from PT Multi Talenta Consulting (2024)
3. *Refreshment of Risk Management Certification Level 4 and Level 6 from PT Multi Talenta Consulting and the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025).*



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.02/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018 tanggal 19 April 2018. Beliau telah lulus Uji Kepatutan & Kelayakan dari OJK melalui Surat OJK No.SR-31/PB.12/2018 tanggal 26 Februari 2018, yang menyampaikan salinan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) untuk pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Salinan keputusan anggota Dewan Komisaris OJK No.KEP-31/D.03/2018 tanggal 26 Februari 2018 juga mencakup hasil penilaian kemampuan dan kepatutan SDr. Dortheis Sesa sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Jabatan ini merupakan periode pertama bagi beliau, dan sebelumnya, beliau belum pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Bank Papua.
2. Masa jabatan beliau diperpanjang berdasarkan surat keputusan RUPS LB No.06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020, mengenai pengangkatan kembali Komisaris Utama, Komisaris Non-Independen, dan Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2021 hingga 2025.
3. Masa jabatan beliau diperpanjang berdasarkan surat keputusan RUPS LB No.04/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret, mengenai pengangkatan kembali Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2025 hingga 2028.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

- Kepala bagian Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari (1995-1998).
- Kepala bagian penyusunan dan pengendalian Program Setda Kabupaten Manokwari (1998-2001).
- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2001-2004).
- Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2005-2009).
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan (2009-2015).

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Career History

Legal Basis for Appointment

1. Appointed as Independent Commissioner based on the Shareholders' Circular Resolution No. 02/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018 dated April 19, 2018. He has passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stated in OJK Letter No. SR-31/PB.12/2018 dated February 26, 2018, regarding the submission of the decision on the fit and proper test (PKK) for the appointment of a member of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). This is further supported by the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEP-31/D.03/2018 dated February 26, 2018. This marked his first term, and he had not previously served as a member of the Board of Commissioners of Bank Papua.
2. His term of office was extended based on EGMS Decree No. 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 dated November 26, 2020 regarding the reappointment of the President Commissioner, Non-Independent Commissioner, and Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2021–2025 period.
3. His term of office was further extended based on EGMS Decree No. 04/SK/RUPS-BPD/III/2025 dated March 20, 2025 regarding the reappointment of the Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2025–2028 period.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

- Head of Development Division, Regional Secretariat of Manokwari Regency (1995–1998)
- Head of Program Planning and Control Division, Regional Secretariat of Manokwari Regency (1998–2001)
- Head of Regional Development Planning Agency (Bappeda), Manokwari Regency (2001–2004)
- Head of Regional Development Planning and Control Agency, Manokwari Regency (2005–2009)
- Regional Secretary of South Sorong Regency (2009–2015)

Share Ownership in Bank Papua

None





DR. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M. SI

Komisaris Non Independen

Non-Independent Commissioner

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir di Manokwari pada tahun 1962. Usia 63 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Manokwari in 1962. Age 63 as of December 2025.

Periode Jabatan

- Periode Pertama :
29 November 2018 – 28 November 2021
- Periode Kedua :
29 November 2021 – 28 November 2025

Term of Office

- *First Term: November 29, 2018 – November 28, 2021*
- *Second Term: November 29, 2021 – November 28, 2025*

Riwayat Pendidikan

- Doktor (S3) program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar
- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) bidang Kebijakan Publik MAP dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2004)
- Sarjana (S1) Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura (1987)

Educational Background

- *Doctoral Degree (S3) in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar*
- *Postgraduate (Master's Degree/S2) in Public Policy (MAP) from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2004)*
- *Bachelor's Degree (S1) in Social Sciences from the Faculty of Social and Political Sciences, Cenderawasih University, Jayapura (1987)*



Sertifikasi

Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 4 dan 6 dari PT. Multi Talenta Consulting dan BSMR, (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tanggal 29 November 2018, beliau telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK, sebagaimana tertera dalam salinan keputusan anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-169/D.03/2018 tanggal 2 Oktober 2018, mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr. Nataniel Dominggus Mandacan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
2. Ini adalah periode pertama beliau menjabat. Sebelumnya, beliau belum pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Bank Papua. Masa jabatan beliau diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan RUPS LB No.06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang mengangkat kembali Komisaris Utama, Komisaris Non-Independen, dan Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2021 hingga 2025.

Rangkap Jabatan

Pejabat Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Provinsi Papua Barat

Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten Manokwari (1994-2001)
- Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat (Irian Jaya Barat) (2003- 2008).
- Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura (2008-2010).
- Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (2011-2014).
- Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (2014).

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

Risk Management Certification Refresher (Level 4 and 6) PT Multi Talenta Consulting and BSMR (2025)

Career History**Legal Basis for Appointment**

1. *Appointed as Commissioner based on the Shareholders' Circular Resolution No. 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 dated November 29, 2018. He has passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as evidenced by the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEP-169/D.03/2018 dated October 2, 2018 regarding the fit and proper assessment for Mr. Nataniel Dominggus Mandacan as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.*
2. *This was his first term, and he had not previously served as a member of the Board of Commissioners of Bank Papua. His term was extended based on EGMS Decree No. 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 dated November 26, 2020 regarding the reappointment of the President Commissioner, Non-Independent Commissioner, and Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2021–2025 period.*

Concurrent Positions

Functional Supervisory Officer for the Implementation of Regional Government Affairs (PPUPD), West Papua Province

Professional Experience

- *Head of Personnel Division, Regional Secretariat of Manokwari Regency (1994–2001)*
- *Head of Personnel Bureau, Regional Secretariat of West Papua Province (Irian Jaya Barat) (2003–2008)*
- *Head of Regional Office IX of the National Civil Service Agency (BKN), Jayapura (2008–2010)*
- *Assistant for Economic Development and Social Welfare Affairs (2011–2014)*
- *Regional Secretary of West Papua Province (2014)*

Share Ownership in Bank Papua

None





H. AROBI AHMAD AITUARAUW, S.E., M.M

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir di Kaimana pada tahun 1956. Usia 69 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Kaimana in 1956. Age 69 as of December 2025.

Periode Jabatan

08 Desember 2022 – 07 Desember 2026

Term of Office

December 8, 2022 – December 7, 2026

Riwayat Pendidikan

- Strata Dua (MM) Manajemen Strategi/Internasional, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya-Jakarta (1994)
- Sarjana Ekonomi (SE) Fisip/Ekonomi Manajemen Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura (1986)
- Sarjana Muda (BA) FIHES/Tataniaga Universitass Cenderawasih (UNCEN) Jayapura (1982)

Educational Background

- *Master's Degree (MM) in Strategic/International Management from Prasetya Mulya School of Management, Jakarta (1994)*
- *Bachelor's Degree (SE) in Economics/Management from Cenderawasih University (UNCEN), Jayapura (1986)*
- *Associate Degree (BA) in Commerce from Cenderawasih University (UNCEN), Jayapura (1982)*



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I (satu) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2022)
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II (dua) Dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2023)
3. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2024
4. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 dan 6 dari PT. Multi Talenta Consulting dan BSMR, (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak keputusan RUPS Luar Biasa pada 8 Desember 2022, yang ditetapkan melalui SK RUPS No. 02/SK/RUPSLB-BPD/XII/2022. Ia juga telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK, serta memiliki salinan keputusan anggota Dewan Komisaris OJK No. KEPR-92/D.03/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang menyatakan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr. Arobi Ahmad Aituarauw sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

- Ketua PURT Majelis Rakyat Papua (MRP) (2005-2011)
- Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) (2005-2011)
- Ketua PURT, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
- Anggota Pokja Agama, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017)
- Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2022)
- Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2022)

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. *Risk Management Certification Level I from the Risk Management Certification Board (2022)*
2. *Risk Management Certification Level II from the Risk Management Certification Board (2023)*
3. *Risk Management Certification Level 6 from the Banking Professional Certification Institute (LSPP) (2024)*
4. *Risk Management Certification Refresher (Level 4 and 6) PT Multi Talenta Consulting and BSMR (2025)*

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Independent Commissioner since the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on December 8, 2022, as stipulated in GMS Decree No. 02/SK/RUPSLB-BPD/XII/2022. He has also passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as evidenced by the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEPR-92/D.03/2022 dated June 28, 2022, confirming the fit and proper assessment for Mr. Arobi Ahmad Aituarauw as Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

- *Chair of PURT, Papua People's Assembly (MRP) (2005–2011)*
- *Member of Religious Working Group, Papua People's Assembly (MRP) (2005–2011)*
- *Chair of PURT, Papua People's Assembly of West Papua Province*
- *Member of Religious Working Group, Papua People's Assembly of West Papua Province (2011–2017)*
- *Chair of Risk Monitoring Committee, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021–2022)*
- *Independent Commissioner, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021–2022)*

Share Ownership in Bank Papua

None




VICTOR ABRAHAM ABAIDATA, SH

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, lahir di Abepura pada tahun 1977. Usia 47 tahun pada Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, born in Abepura in 1977. Age 47 as of December 2025.

Periode Jabatan

08 Agustus 2024 - 07 Agustus 2028

Term of Office

August 8, 2024 – August 7, 2028

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura (2010)

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Law from Umel Mandiri College of Law, Jayapura (2010)



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2024
2. Penyetaraan Dan Penyelarasan Sertifikasi MR BOC L.1,2,3 ke J.6, Dari Bankers Association For Risk Management, 2024
3. Pemeliharaan (Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 5 Dari PT. Multi Talenta Consulting, 2024
4. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 4 dan 6 dari PT. Multi Talenta Consulting dan BSMR , (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPS LB Nomor 02/SK/RUPSLB-BPDNIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEPR-41/D.03/2024.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Pengalaman Kerja

1. Direktur CV. Grime Kratos (2006)
2. Staf Gubernur Papua, Pemerintah Provinsi Papua (2006-2011)
3. Analis Daerah Desk Otsus Papua/Pokja Polhukam, Kemenko Polhukham RI (2019)
4. Koordinator Staf Khusus Pj. Gubernur Papua Barat (2022)

Kepemilikan Saham Bank Papua

Tidak memiliki

Certifications

1. Risk Management Certification Level 6 from the Banking Professional Certification Institute (LSPP) (2024)
2. Equalization and Alignment of Risk Management Certification for Board of Commissioners Levels 1, 2, and 3 to Level 6 from the Bankers Association for Risk Management (2024)
3. Risk Management Certification Refresher Level 5 from PT Multi Talenta Consulting (2024)
4. Risk Management Certification Refresher (Level 4 and Level 6) from PT Multi Talenta Consulting and the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Independent Commissioner based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 02/SK/RUPSLB-BPD/III/2024 dated August 8, 2024 and the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEPR-41/D.03/2024.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Professional Experience

1. Director of CV. Grime Kratos (2006)
2. Staff to the Governor of Papua, Papua Provincial Government (2006–2011)
3. Regional Analyst, Papua Special Autonomy Desk/ Political, Legal, and Security Working Group, Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia (2019)
4. Coordinator of Special Staff to the Acting Governor of West Papua (2022)

Share Ownership in Bank Papua

None



HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

AFFILIATION RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Table of Commissioners' Affiliation Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan Management Relations	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Yorgemes Derek Hege- mur	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Dortheis Sesa	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Victor Abra- ham Abaidata	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI TAHUN 2025

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

EDUCATION AND TRAINING ATTENDED IN 2025

Details of the education and/or training attended by the Board of Commissioners during the financial year are presented in the Corporate Governance chapter.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE REASONS THEREOF

Komposisi Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Efektif Jabatan	Periode	Surat Persetujuan
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Keputusan RUPS-LB Nomor: 03/ SK/RUPS-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023	2023-2027	Pertama	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEPR - 131/D.03/2023
Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Inde- penden	Keputusan RUPS-LB Nomor: 06/ SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020	2021-2025	Kedua	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP - 169/D.03/20182.
Dortheis Sesa	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB Nomor: 06/ SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020	2021-2025	Kedua	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP - 31/D.03/2018.
Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB Nomor: 02/ SK/ RUPS-BPD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022	2022-2026	Pertama	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP - 92/D.03/2022
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB Nomor: 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024	2024-2028	Pertama	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEPR- 41/D.03/2024.





Profil Pemimpin Divisi

Division Leaders Profile



Matheus Althiberg Mual
Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary Division
 Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 53 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 53 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "Umel Mandiri", Jayapura (2011).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan SK Direksi No. 60/KEPEG/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 01 September 1995;
2. Pemimpin Kantor Cabang Makassar (2016-2019);
3. Pemimpin Departemen Bisnis Kredit Komersial dan Korporasi (2019-2021);
4. Pemimpin Kantor Cabang Sorong (2021-2023); dan
5. Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura (2023 - 2024).

Educational Background

Bachelor's Degree in Law from "Umel Mandiri" College of Law, Jayapura (2011).

Certifications

Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Corporate Secretary since August 20, 2024, based on Board of Directors Decree No. 60/KEPEG/VII/2024 dated July 8, 2024.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee on September 1, 1995;
2. Head of Makassar Branch Office (2016-2019);
3. Head of Commercial and Corporate Credit Business Department (2019-2021);
4. Head of Sorong Branch Office (2021-2023);
5. Head of Main Branch Office Jayapura (2023-2024).



Meaky G. A. Bolang
Pemimpin Divisi Hukum
Head of Legal Division
 Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 58 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 58 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sam Ratulangi, Manado (1992).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum sejak 16 September 2021 berdasarkan SK Direksi No. 06/4470/HCT/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 12 Februari 1996;
2. Kepala PPKD Dawai Kabupaten Yapen dan Kepala Kantor Kas Menawi (2003)
3. Kepala KCP Dekai Kab Yahukimo (2008)
4. Kepala Departemen Konsumer KC Nabire (2010)
5. Senior Spesialis Auditor Umum (2013);
6. Kepala Departemen Peraturan dan Perundang-undangan 2015-2017;
7. Kepala Departemen Litigasi (2017);
8. Kepala Departemen Non Litigasi 2018-2019;
9. Pemimpin Departemen Non Litigasi (2018);
10. Kepala Kantor Cabang Arso 2019-2021.

Educational Background

Bachelor's Degree in Law from Sam Ratulangi University, Manado (1992).

Certifications

Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Head of Legal Division since September 16, 2021, based on Board of Directors Decree No. 06/4470/HCT/2021 dated August 25, 2021.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee on February 12, 1996;
2. Head of PPKD Dawai, Yapen Regency and Head of Menawi Cash Office (2003);
3. Head of Sub-Branch Office (KCP) Dekai, Yahukimo Regency (2008);
4. Head of Consumer Department, Nabire Branch Office (2010);
5. Senior Specialist – General Auditor (2013);
6. Head of Regulation and Legislation Department (2015-2017);
7. Head of Litigation Department (2017);
8. Head of Non-Litigation Department (2018-2019);
9. Head of Non-Litigation Division (2018);
10. Head of Arso Branch Office (2019-2021).



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ilmu-Ilmu Sosial dari Universitas Cenderawasih, Jayapura (1999).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 6 (enam) dari PT. Multi Talenta Consulting (2024)
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (2025)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan sejak 12-03-2025 berdasarkan SK Direksi No. 33/KEPEG/III/2025.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 2002,
2. Kepala Cabang Sarmi (2016-2017)
3. Pemimpin Kantor Cabang Serui (2018-2019),
4. Pemimpin Kantor Cabang Jakarta (2019-2021),
5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (2021-2024)

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Social Sciences from Cenderawasih University, Jayapura (1999).

Certifications

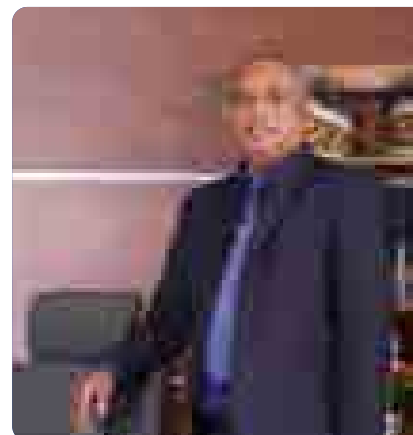
Risk Management Certification Level 6 from PT Multi Talenta Consulting (2024)
Risk Management Certification Level 7 (2025)

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Network and Service Management Division since March 12, 2025, based on Board of Directors Decree No. 33/KEPEG/III/2025.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee (2002);
2. Head of Sarmi Branch Office (2016–2017);
3. Head of Serui Branch Office (2018–2019);
4. Head of Jakarta Branch Office (2019–2021);
5. Head of Human Capital Management Division (2021–2024).

**Victor Y. L. Numberi**

**Pemimpin Divisi
Pengelolaan Jaringan dan
Layanan
Head of Network and
Service Management
Division**

Warga negara Indonesia.
Berdomisili di Jayapura. Usia
50 tahun Per Desember
2025.
Indonesian citizen. Domiciled
in Jayapura. Age 50 years old
as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Perikanan Universitas Sam Ratulangi, Manado (1994)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 6 (enam) dari BSMR (2025)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis sejak 16-06-2025 berdasarkan SK Direksi No. 59.1/KEPEG/VI/2025.

Pengalaman Kerja

1. Pemimpin Departemen APU-PPT (2015)
2. Pemimpin Departemen Manajemen Risiko (2017)
3. Pemimpin Departemen Credit Remedial (2018)
4. Pemimpin Departemen Risiko Bisnis Kredit (2020)
5. Pemimpin Kantor Cabang Arso (2021)
6. Koordinator Teknis Wil. III-IV (2023)
7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2025)

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Fisheries from Sam Ratulangi University, Manado (1994).

Certifications

Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025).

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Strategic Planning Division since June 16, 2025, based on Board of Directors Decree No. 59.1/KEPEG/VI/2025.

Professional Experience

1. Head of APU-PPT Department (2015)
2. Head of Risk Management Department (2017)
3. Head of Credit Remedial Department (2018)
4. Head of Credit Business Risk Department (2020)
5. Head of Arso Branch Office (2021)
6. Technical Coordinator Region III-IV (2023)
7. Head of Strategic Planning Division (2025)

**Alfriets M. A. K. Kawengian**

**Pemimpin Divisi
Perencanaan Strategis
Head of Strategic Planning
Division**

Warga negara Indonesia.
Berdomisili di Jayapura.
Usia 54 tahun Per Desember
2025.
Indonesian citizen. Domiciled
in Jayapura. Age 54 years old
as of December 2025.



**Richard F. Goszal**

Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
Head of Business Risk Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 57 tahun Per Desember 2025.

Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 57 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Agronomi Pertanian dari Universitas Cenderawasih, Manokwari (1992).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat V (lima) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).
- Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) dari Dewan Sertifikasi QIA (DS-QIA).
- Sertifikasi General Banking 3 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Bisnis sejak 02 September 2024 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu No. 13/PKP-PKWT/IX/2024 tanggal 02 September 2024.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 12 Februari 1996;
2. Kepala Cabang Nabire (2012-2013),
3. Koordinator Teknis Kelompok Auditor SKAI (2013-2017),
4. Quality Assurance SKAI (2017-2018),
5. Pemimpin Kantor Cabang Merauke (2018-2020).
6. Pemimpin Divisi Audit Internal (2020-2023), dan
7. Staf Ahli dan GCG (2023-2024).

Educational Background

Bachelor's Degree in Agronomy (Agriculture) from Cenderawasih University, Manokwari (1992).

Certifications

- Risk Management Certification Level V from the Risk Management Certification Board (BSMR)
- Qualified Internal Auditor (QIA) Certification from the QIA Certification Board (DS-QIA)
- General Banking Level 3 Certification from the Banking Professional Certification Institute (LSPP)

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Business Risk Division since September 2, 2024, based on Fixed-Term Employment Agreement No. 13/PKP-PKWT/IX/2024 dated September 2, 2024.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee on February 12, 1996;
2. Head of Nabire Branch Office (2012-2013);
3. Technical Coordinator, Internal Audit Group (SKAI) (2013-2017);
4. Quality Assurance, Internal Audit (SKAI) (2017-2018);
5. Head of Merauke Branch Office (2018-2020);
6. Head of Internal Audit Division (2020-2023);
7. Advisor and GCG Specialist (2023-2024).

**Simon Giyai**

Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
Head of Special Asset Management Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 47 tahun Per Desember 2025.

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura. Age 47 as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Pasca Sarjana Magister Manajemen dari STIE IBS (Indonesia Banking School), Jakarta (2025).

Sertifikasi

1. Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 (Enam) Dari PT. Multi Talenta Consulting, 2024
2. Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7 (Tujuh) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), 2025

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus sejak 12-03-2025 berdasarkan SK Direksi No. 33/KEPEG/III/2025.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 2006,
2. Kepala Cabang Pembantu Entrop (2013),
3. Kepala Departemen Layanan (2015),
4. Kepala Cabang Nabire (2016),
5. Pemimpin Kantor Cabang Timika (2018 - 2020),
6. Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura (2021), dan
7. Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan (2021-2023).
8. Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer (2023 - 2024)

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Management from STIE IBS (Indonesia Banking School), Jakarta (2025).

Certifications

1. Risk Management Certification Level 6 from PT Multi Talenta Consulting (2024)
2. Risk Management Certification Level 7 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025)

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Special Asset Management Division since March 12, 2025, based on Board of Directors Decree No. 33/KEPEG/III/2025.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee (2006);
2. Head of Sub-Branch Office (KCP) Entrop (2013);
3. Head of Service Department (2015);
4. Head of Nabire Branch Office (2016);
5. Head of Timika Branch Office (2018-2020);
6. Head of Main Branch Office Jayapura (2021);
7. Head of Network and Service Management Division (2021-2023);
8. Head of MSME and Consumer Business Division (2023-2024).



Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Pasca Sarjana Magister Manajemen Jurusan Konsentrasi Sumber Daya Manusia dari Universitas Surapati Jakarta (2011).

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari PT Multi Talenta Consulting (2023)
2. Sertifikasi Kepatuhan 2022

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sejak tanggal 24 Maret 2023, berdasarkan surat Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: 015/KEPEG/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023;

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sejak tanggal 10 Juli 1992;
2. Kepala KCP Assue, Kantor Cabang Keppi (2014 s/d 2015)
3. Kepala Kantor Cabang Agats (2015 s/d 2018)
4. Pemimpin Kantor Cabang Waisai (2018 s/d 2020)
5. Pemimpin Kantor Cabang Merauke (2020 s/d 2021)
6. Pemimpin Departemen Kebijakan Divisi Kepatuhan (2021 s/d 2023)
7. Pemimpin Divisi Kepatuhan (2023 - sekarang)

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Pasca Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Cenderawasih, Jayapura (2013).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (tujuh) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2025)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum sejak 04 Juni 2024 berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPEG/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 1996,
2. Pemimpin KC Timika 2012-2016.
3. Kepala Divisi Pemasaran (2016)
4. Senior Executive Spesialis Kebijakan dan Prosedur (2017),
5. Kepala KC. Manado (2017),
6. Kepala KC. Ilaga (2018),
7. Wakil Pimpinan KCU Manokwari (2018-2019),
8. Pemimpin KCU Manokwari (2019-2022),
9. Pemimpin Divisi Akuntansi (2022-2024)

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Management, specializing in Human Resources, from Surapati University, Jakarta (2011).

Certifications

1. Risk Management Certification Level 6 from PT Multi Talenta Consulting (2023)
2. Compliance Certification (2022)

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Compliance Division since March 24, 2023, based on Human Capital Division Letter No. 015/KEPEG/III/2023 dated March 13, 2023.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua on July 10, 1992;
2. Head of Sub-Branch Office (KCP) Assue, Keppi Branch Office (2014–2015);
3. Head of Agats Branch Office (2015–2018);
4. Head of Waisai Branch Office (2018–2020);
5. Head of Merauke Branch Office (2020–2021);
6. Head of Policy Department, Compliance Division (2021–2023);
7. Head of Compliance Division (2023–present).

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Economics and Management from Cenderawasih University, Jayapura (2013).

Certifications

Risk Management Certification Level 7 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025).

Career History**Legal Basis for Appointment**

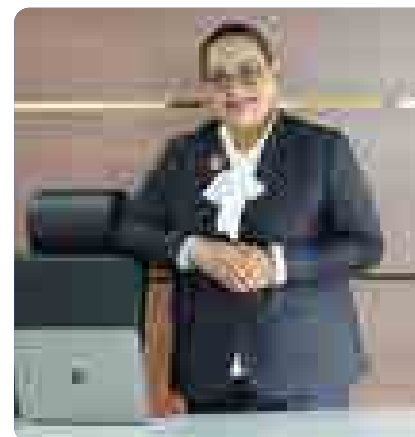
Serving as Head of General Affairs Division since June 4, 2024, based on Board of Directors Decree No. 19/KEPEG/III/2024 dated March 8, 2024.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee (1996);
2. Head of Timika Branch Office (2012–2016);
3. Head of Marketing Division (2016);
4. Senior Executive Specialist – Policy and Procedure (2017);
5. Head of Manado Branch Office (2017);
6. Head of Ilaga Branch Office (2018);
7. Deputy Head of Main Branch Office Manokwari (2018–2019);
8. Head of Main Branch Office Manokwari (2019–2022);
9. Head of Accounting Division (2022–2024).

**Sukidi****Pemimpin Divisi Kepatuhan
Head of Compliance Division**

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 55 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen, domiciled in Jayapura. Age 55 as of December 2025.

**Bertha Affar****Pemimpin Divisi Umum
Head of General Affairs Division**

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 52 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 52 years old as of December 2025.





Jonathan Auparay

Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer Head of MSME & Consumer Business Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 51 tahun Per Desember 2025.

Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 51 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Manajemen Perusahaan dari STIE Ottow & Geisler, Serui (2005).

Sertifikasi

Sertifikasi manajemen resiko terakhir jenjang 7(tujuh) dari BSMR (2025)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer sejak 04 Juni 2024 berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPEG/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 1996,
2. Pemimpin unit operasi Tahun (2008)
3. Kepala Departemen Konsumer (2009),
4. Kepala Cabang Waren (2013),
5. Kepala Cabang Bintuni (2015),
6. Pjs. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017),
7. Wakil Kepala Cabang Utama Jayapura (2018),
8. Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura (2019), dan
9. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus (2021).

Educational Background

Bachelor's Degree in Business Management from STIE Ottow & Geisler, Serui (2005).

Certifications

Risk Management Certification Level 7 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Head of MSME & Consumer Business Division since June 4, 2024, based on Board of Directors Decree No. 19/KEPEG/III/2024 dated March 8, 2024.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee (1996);
2. Head of Operations Unit (2008);
3. Head of Consumer Department (2009);
4. Head of Waren Branch Office (2013);
5. Head of Bintuni Branch Office (2015);
6. Acting Head of Human Resources Division (2017);
7. Deputy Head of Main Branch Office Jayapura (2018);
8. Head of Main Branch Office Jayapura (2019);
9. Head of Special Asset Management Division (2021).



Daniel Palullungan

Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi Head of Commercial & Corporate Business Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 56 tahun Per Desember 2025.

Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 56 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Pasca Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 2009.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari PT. Multi Talenta Consulting (2023)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi sejak 01 Oktober 2018 berdasarkan SK Direksi No.297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 1996,
2. Kepala KCP Waisai (2009),
3. Kepala Kantor Cabang Waisai (2010)
4. Kepala Kantor Cabang Sorong (2012),
5. Kepala Kantor Cabang Teminabuan (2015),
6. Senior Spesialis Kebijakan & Prosedur Divisi Kepatuhan (2015),
7. Kepala Departemen Pembinaan & Supervisi Kredit (2017),
8. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2017),
9. Kepala Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi (2018).

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Economics and Management from Cenderawasih University, Jayapura (2009).

Certifications

Risk Management Certification Level 6 from PT Multi Talenta Consulting (2023).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Head of Commercial and Corporate Business Division since October 1, 2018, based on Board of Directors Decree No. 297/KEPEG/X/2018 dated October 17, 2018.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee (1996);
2. Head of Sub-Branch Office (KCP) Waisai (2009);
3. Head of Waisai Branch Office (2010);
4. Head of Sorong Branch Office (2012);
5. Head of Teminabuan Branch Office (2015);
6. Senior Specialist – Policy & Procedure, Compliance Division (2015);
7. Head of Credit Development & Supervision Department (2017);
8. Head of Business Risk Division (2017);
9. Head of Commercial and Corporate Business Division (2018).



Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Pascasarjana Manajemen Keuangan Daerah dari Universitas Cendrawasih, Jayapura (2025)

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi *Treasury Dealer* Level Advance dari lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Tahun 2019
3. *Refreshment Treasury Dealer* Level Advance dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Tahun 2022

Riwayat Jabatan**1. Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Treasury* sejak 04 Februari 2022 berdasarkan SK Direksi No.06/140.1/HCT/2022 tanggal 04 Februari 2022.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 3 Maret 2008, dengan jabatan penting yang pernah diemban seperti:

1. Staf Dealer Capital Market (2010),
2. Kepala Officer 2 Dealer Surat Berharga 2012,
3. Pjs. Kepala Unit Settlement International 2012
4. Pjs. Kepala Departemen Dealing Room 2014
5. Pemimpin Departemen Dealing Room 2016, dan
6. Pjs. Pemimpin Divisi *Treasury* (2020-2022).

Educational Background

Postgraduate (Master's Degree) in Regional Financial Management from Cenderawasih University, Jayapura (2025).

Certifications

1. *Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR)*
2. *Treasury Dealer Certification – Advanced Level from the Banking Professional Certification Institute (LSPP) (2019)*
3. *Treasury Dealer Advanced Level Refresher from the Banking Professional Certification Institute (LSPP) (2022)*

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Treasury Division since February 4, 2022, based on Board of Directors Decree No. 06/140.1/HCT/2022 dated February 4, 2022.

Professional Experience

Began career at Bank Papua as an employee on March 3, 2008, with key positions including:

1. *Capital Market Dealer Staff (2010);*
2. *Head Officer 2 – Securities Dealer (2012);*
3. *Acting Head of International Settlement Unit (2012);*
4. *Acting Head of Dealing Room Department (2014);*
5. *Head of Dealing Room Department (2016);*
6. *Acting Head of Treasury Division (2020–2022).*

**Arnold Ponyman Heipon**

Pemimpin Divisi Treasury dan Internasional Banking Head of Treasury and International Banking Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 44 tahun Per Desember 2025.

Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 44 years old as of December 2025

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Cendrawasih, Jayapura (1994).

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (tujuh) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
2. Sertifikasi *Treasury* Jenjang 7 (tujuh)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Akuntansi sejak 04 Juni 2024 berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPEG/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai tahun 1996,
2. Kepala Departemen Diklat (2012),
3. Kepala Divisi Akuntansi (2015),
4. Pemimpin Divisi Akuntansi (2018)
5. Pemimpin Divisi *Treasury* (2019),
6. Pemimpin Divisi Akuntansi (2020)
7. Pemimpin Divisi Umum (2022).

Educational Background

Bachelor's Degree in Economics, majoring in Development Economics, from Cenderawasih University, Jayapura (1994).

Certifications

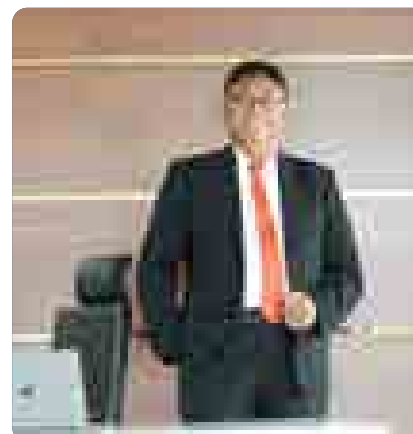
1. *Risk Management Certification Level 7 from the Risk Management Certification Board (BSMR)*
2. *Treasury Certification Level 7*

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Accounting Division since June 4, 2024, based on Board of Directors Decree No. 19/KEPEG/III/2024 dated March 8, 2024.

Professional Experience

1. *Began career at Bank Papua as an employee (1996);*
2. *Head of Training and Development Department (2012);*
3. *Head of Accounting Division (2015);*
4. *Head of Accounting Division (2018);*
5. *Head of Treasury Division (2019);*
6. *Head of Accounting Division (2020);*
7. *Head of General Affairs Division (2022).*

**Petrus Agus Soleman**

Pemimpin Divisi Akuntansi Head of Accounting Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 57 tahun Per Desember 2025.

Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 57 years old as of December 2025.





Andreas Didik Wijayanta
Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division
 Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 53 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 53 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Cenderawasih, Jayapura (2001).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
- Sertifikat Cobit Foundation (2023)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi sejak 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi No.32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 10 Agustus 1993
2. Spesialis Auditor TI-SKAI (2008-2010),
3. Spesialis Manajemen Risiko (2010-2011),
4. Quality Assurance (2011-2012),
5. Senior Spesialis TI Compliance, QA, Ususer Respentati (2012),
6. Senior Spesialis Non-Core Application & Switching (2012-2016) dan
7. Kepala Cabang Kaimana (2016-2017).

Educational Background

Bachelor's Degree in Management from Cenderawasih University, Jayapura (2001).

Certifications

- Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR)
- COBIT Foundation Certificate (2023)

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Head of Information Technology Division since February 27, 2017, based on Board of Directors Decree No. 32.1/KEPEG/I/2017 dated January 20, 2017.

Professional Experience

1. Began career at Bank Papua as an employee on August 10, 1993;
2. IT Auditor Specialist – Internal Audit (SKAI) (2008–2010);
3. Risk Management Specialist (2010–2011);
4. Quality Assurance (2011–2012);
5. Senior Specialist – IT Compliance, Quality Assurance, User Representative (2012);
6. Senior Specialist – Non-Core Applications & Switching (2012–2016);
7. Head of Kaimana Branch Office (2016–2017).



Erna M. Kapisa
Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa
Head of Fund Management and Services Division
 Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 50 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 50 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi Management Universitas Cenderawasih, Jayapura (2008)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (tujuh) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa sejak 03-11-2025 berdasarkan SK Direksi Nomor 124/KEPEG/XI/2025.

Pengalaman Kerja

1. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan 2019
2. Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura (2024)
3. Staf Ahli dan GCG (2025)
4. Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa (2025)

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Economics, majoring in Management, from Cenderawasih University, Jayapura (2008).

Certifications

Risk Management Certification Level 7 (seven) from the Risk Management Certification Board (BSMR).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Head of Fund Management and Services Division since November 3, 2025, based on Board of Directors Decree No. 124/KEPEG/XI/2025.

Professional Experience

1. Head of Corporate Secretary Division (2019);
2. Head of Main Branch Office Jayapura (2024);
3. Advisor and GCG Specialist (2025);
4. Head of Fund Management and Services Division (2025).



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Akuntansi STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (1996)
Pasca Sarjana (S2) STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (2019)

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Accounting from STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (1996)
Postgraduate (Master's Degree/S2) from STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (2019)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (lima) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2025)

Certifications

Risk Management Certification Level 5 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025)

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank sejak tanggal 16-06-2025 berdasarkan SK Direksi No. 59.1/KEPEG/VI/2025.

Career History**Legal Basis for Appointment**

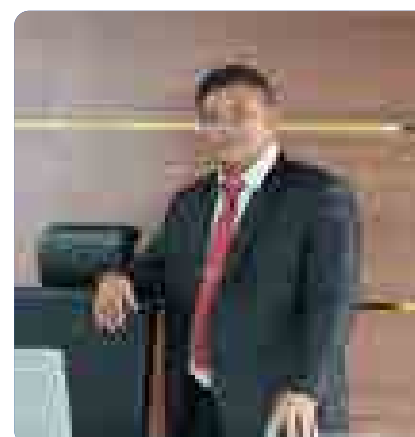
Serving as Head of Bank Risk Management Division since June 16, 2025, based on Board of Directors Decree No. 59.1/KEPEG/VI/2025.

Pengalaman Kerja

1. Pemimpin Unit Perencanaan Bisnis(2012)
2. Pemimpin Departemen Pendukung Cabang Sentani(2015)
3. Pemimpin Kredit Kantor Cabang Makassar (2016)
4. Pemimpin KCP Toraja 2018
5. Pemimpin Departemen Perencanaan Bisnis (2020)
6. Pemimpin Cabang Makassar (2022)
7. Pindep Kebijakan dan Pelaporan (2024)

Professional Experience

1. *Head of Business Planning Unit (2012)*
2. *Head of Branch Support Department, Sentani Branch Office (2015)*
3. *Head of Credit, Makassar Branch Office (2016)*
4. *Head of Sub-Branch Office (KCP) Toraja (2018)*
5. *Head of Business Planning Department (2020)*
6. *Head of Makassar Branch Office (2022)*
7. *Head of Policy and Reporting Division (2024)*

**Suleman Tarru' Padang**

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
Head of Bank Risk Management Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 55 tahun Per Desember 2025
Indonesian citizen, domiciled in Jayapura. Age 55 as of December 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Sarjana Ekonomi Universitas Cenderawasih, Jayapura (1995)

Educational Background

Bachelor's Degree in Economics from Cenderawasih University, Jayapura (1995).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Certifications

Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR).

Riwayat Jabatan**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal sejak tanggal 14 Juni 2023 Berdasarkan SK Direksi Nomor 061/KEPEG/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023

Career History**Legal Basis for Appointment**

Serving as Head of Internal Audit Division since June 14, 2023, based on Board of Directors Decree No. 061/KEPEG/VI/2023 dated June 8, 2023.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 12 Februari 1996;
2. Kepala Departemen Layanan dan Konsumer Kantor Cabang Timika (2011-2012),
3. Senior Executive Auditor Umum (SKAI) Kantor Pusat (2017),
4. Koordinator Teknis Divisi Audit Internal 2017
5. Wakil Kepala Cabang Utama Manokwari 2019
6. Quality Assurance Divisi Audit Internal 2020
7. Koordinator Teknis Divisi Audit Internal 2021

Professional Experience

1. *Began career at Bank Papua as an employee on February 12, 1996;*
2. *Head of Service and Consumer Department, Timika Branch Office (2011-2012);*
3. *Senior Executive – General Auditor (SKAI), Head Office (2017);*
4. *Technical Coordinator, Internal Audit Division (2017);*
5. *Deputy Head of Main Branch Office Manokwari (2019);*
6. *Quality Assurance, Internal Audit Division (2020);*
7. *Technical Coordinator, Internal Audit Division (2021).*

**Bang Yudi Poluan**

Pemimpin Divisi Audit Internal
Head of Internal Audit Division

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 55 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen. Domiciled in Jayapura. Age 55 years old as of December 2025.





Andarias Baunik
Pemimpin Divisi
Manajemen Modal Manusia
Head of Human Capital
Management Division

Warga negara Indonesia.
 Berdomisili di Jayapura.
 Usia 52 tahun Per Desember 2025.

*Indonesian citizen, domiciled
 in Jayapura. Age 52 as of
 December 2025.*

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi STIE Port Numbay, Jayapura (2009)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (lima) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia sejak 12-03-2025, berdasarkan SK Direksi No. 33/KEPEG/III/2025.

Pengalaman Kerja

1. Wakil Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura. Thn 2014
2. Pemimpin Cabang Abepura 2014
3. Pemimpin Cabang Bintuni (2016)
4. Pemimpin Cabang Nabire (2017)
5. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa (2016)
6. Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan. (2018)
7. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia. (2025)

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Economics from STIE Port Numbay, Jayapura (2009).

Certifications

Risk Management Certification Level 5 from the Risk Management Certification Board (BSMR).

Career History

Legal Basis for Appointment

Serving as Head of Human Capital Management Division since March 12, 2025, based on Board of Directors Decree No. 33/KEPEG/III/2025.

Professional Experience

1. Deputy Head of Main Branch Office Jayapura (2014);
2. Head of Abepura Branch Office (2014);
3. Head of Bintuni Branch Office (2016);
4. Head of Nabire Branch Office (2017);
5. Head of Fund and Services Division (2016);
6. Head of Network and Service Division (2018);
7. Head of Human Capital Management Division (2025).





Profil Pegawai Perusahaan

Company Employee Profile

STATUS KEPEGAWAIAN

EMPLOYMENT STATUS

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian Number and Composition of Employees Based on Employment Status									
Status Kepegawaian	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi 2025	Growth 2024 - 2025		Employment Status
							(Orang)	(%)	
Pegawai Tetap	2.214	2.149	2.181	2.242	2.257	87,65%	65	3,02%	Permanent employee
Professional Hire	0	1	2	2	0	0,00%	(1)	(100,00%)	Professional Hire
PKWT/Kontrak	152	158	187	32	42	6,02%	(6)	(3,80%)	PKWT/Contracts
HDP	0	0	0	0	27	0,00%	-	0,00%	HDP
Pegawai Cuti Luar Tanggungan	19	15	14	13	15	0,75%	4	26,67%	Employees on Unpaid Leave
Tenaga Magang	141	223	195	313	237	5,58%	(82)	(36,77%)	Apprentices
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	2.578	100,00%	(20)	(0,79%)	Total

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

BY GENDER

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Number and Composition of Employees Based on Gender									
Jenis Kelamin	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi	Growth 2024 - 2025		Gender
							(Orang)	(%)	
Laki-laki	1.269	1.273	1.287	1.293	1.325	50,24%	(4)	(0,31%)	Male
Perempuan	1.257	1.273	1.292	1.309	1.253	49,76%	(16)	(1,26%)	Female
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	2.578	100,00%	(20)	(0,79%)	Total

BERDASARKAN USIA

BY AGE

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia Number and Composition of Employees Based on Age Range									
Rentang Usia	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi	Growth 2024 - 2025		Age
							(Orang)	(%)	
> 50 tahun	107	112	114	108	104	4,24%	(5)	(4,46%)	> 50 year
46-50 tahun	111	112	111	120	128	4,39%	(1)	(0,89%)	46-50 year
41-45 tahun	460	364	263	196	154	18,21%	96	26,37%	41-45 year
36-40 tahun	895	827	751	664	894	35,43%	68	8,22%	36-40 year
31-35 tahun	505	687	846	951	1.019	19,99%	(182)	(26,49%)	31-35 year
26-30 tahun	308	296	336	367	413	12,19%	12	4,05%	26-30 year
18-25 tahun	140	148	158	196	166	5,54%	(8)	(5,41%)	18-25 year
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	2.578	100,00%	(20)	(0,79%)	Total

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

BY EDUCATION LEVEL

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Pendidikan Number and Composition of Employees Based on Education									
Tingkat Pendidikan	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi	Growth 2024 - 2025		Level of education
							(Orang)	(%)	
Doktor/Strata 3 (S3)	0	0	0	1	1	0,00%	-	0,00%	Doctoral



Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Pendidikan Number and Composition of Employees Based on Education									
Tingkat Pendidikan	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi	Growth 2024 - 2025		Level of education
							(Orang)	(%)	
Pasca Sarjana/Strata 2 (S2)	109	102	89	82	74	4,32%	7	6,86%	Magister
Sarjana/Strata 1 (S1)	2.150	2.112	2.123	2.058	2.019	85,11%	38	1,80%	Under Graduate
Diploma 4 (D4)	0	0	0	1	1	0,00%	-	0,00%	Bachelor (D4)
Diploma 3 (D3)	65	68	75	85	85	2,57%	(3)	(4,41%)	Diploma (D3)
Diploma (D1)	1	1	1	1	2	0,04%	-	0,00%	Diploma (D1)
SMA	198	260	288	368	390	7,84%	(62)	(23,85%)	Senior High School
SMP	3	3	3	3	3	0,12%	-	0,00%	Juior High School
SD	0	0	0	3	3	0,00%	-	0,00%	Elementary School
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	2.578	100,00%	(20)	(0,79%)	Total

BERDASARKAN LEVEL JABATAN

BY POSITION LEVEL

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenjang Jabatan Number and Composition of Employees by Position									
Jenjang Jabatan	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi	Growth 2024 - 2025		Position Level
							(Orang)	(%)	
Pemimpin Divisi	17	17	17	16	17	0,67%	-	0,00%	Division Leader
Kepala Cabang	43	42	42	42	40	1,70%	1	2,38%	Branch Manager
Wakil Kepala Cabang	6	6	2	2	2	0,24%	-	0,00%	Sub Branch Manager
Pimpinan Departemen	184	187	183	183	175	7,28%	(3)	(1,60%)	Department Head
Pimpinan Unit	92	78	79	82	87	3,64%	14	17,95%	Unit Leader
Pimpinan Cabang Pembantu	58	58	57	59	59	2,30%	-	0,00%	Sub Branch Office Manager
Pimpinan Kantor Kas	114	119	116	114	119	4,51%	(5)	(4,20%)	Payment Point Manager
Fungsional	24	36	41	30	35	0,95%	(12)	(33,33%)	Function
Pegawai Masa Persiapan Pensiun	5	9	6	5	5	0,20%	(4)	(44,44%)	Preparatory Period
Staf Ahli Direksi	1	0	1	0	0	0,04%	1	0,00%	Special Staff
Staf	1.681	1.607	1.642	1.712	1.718	66,55%	74	4,60%	Staff
Cuti Luar Tanggungan	19	15	14	13	15	0,75%	4	26,67%	Unpaid Leave
Profesional Hire (Pro Hire)	0	1	2	2	0	0,00%	(1)	(100,00%)	Professional Hire (Pro Hire)
PKWT	141	149	184	29	42	5,58%	(8)	(5,37%)	PKWT
Abdi Magang	141	223	195	313	237	5,58%	(82)	(36,77%)	Apprentice
Honor Diperbantukan (HDP)	0	0	0	0	27	0,00%	-	0,00%	Honor Contributed (HDP)
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	2.578	100,00%	(20)	(0,79%)	Total



BERDASARKAN GRADE

BY GRADE

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Jabatan (Grade) Number and Composition of Employee by Position (Grade)									
Tingkat Jabatan	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi	Growth 2024 - 2025		Position Level
							(%)	(Orang)	
16	3	2	1	2	1	0,12%	1	50,00%	16
15	6	6	6	8	7	0,24%	-	0,00%	15
14	2	7	11	10	13	0,08%	(5)	(71,43%)	14
13	35	28	25	28	21	1,39%	7	25,00%	13
12	42	48	41	42	45	1,66%	(6)	(12,50%)	12
11	48	53	67	65	64	1,90%	(5)	(9,43%)	11
10	54	54	49	56	63	2,14%	-	0,00%	10
9	112	105	87	78	73	4,43%	7	6,67%	9
8	258	239	153	118	102	10,21%	19	7,95%	8
7	310	305	329	354	348	12,27%	5	1,64%	7
6	445	482	439	355	292	17,62%	(37)	(7,68%)	6
5	660	654	705	706	712	26,13%	6	0,92%	5
4	240	155	243	378	427	9,50%	85	54,84%	4
3	13	17	29	44	80	0,51%	(4)	(23,53%)	3
2	5	9	10	10	8	0,20%	(4)	(44,44%)	2
1	0	0	0	1	1	0,00%	-	0,00%	1
0	293	382	384	347	306	11,60%	(89)	(23,30%)	0
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	1.243				Total

BERDASARKAN MASA KERJA

BY YEARS OF SERVICE

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Masa Kerja (orang) Number and Composition of Workers Based on Years of Service (persons)									
Rentang Masa Kerja	2025	2024	2023	2022	2021	Komposisi (%)	Growth 2024 - 2025		Working Time Range
							(Orang)	(%)	
> 30 tahun	12	25	17	17	3	0,48%	(13)	(52,00%)	> 30 years
26 - 30 tahun	55	47	44	43	59	2,18%	8	17,02%	26 - 30 years
21-25 tahun	62	89	114	102	91	2,45%	(27)	(30,34%)	21-25 years
16 - 20 tahun	186	129	13	44	96	7,36%	57	44,19%	16 - 20 years
11 - 15 tahun	922	963	843	499	218	36,50%	(41)	(4,26%)	11 - 15 years
6-10 tahun	701	752	904	1.201	1.061	27,75%	(51)	(6,78%)	6-10 years
0-5 tahun	588	541	644	696	1.159	23,28%	47	8,69%	0-5 years
Jumlah	2.526	2.546	2.579	2.602	2.687	100,00%	(20)	(0,79%)	Total





INFORMASI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER INFORMATION

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)	Name of Shareholder
Saham seri A/ Class A shares				
a. Provinsi Papua:				Province of Papua:
Pemerintah Daerah				Local Government
Provinsi Papua	139.721	24,53	698.605.000.000	Papua Province
Kota Jayapura	17.547	3,08	87.735.000.000	Jayapura Municipal
Kabupaten Sarmi	15.300	2,69	76.500.000.000	Sarmi Regency
Kabupaten Yapen	10.578	1,86	52.890.000.000	Yapen Regency
Kabupaten Jayapura	10.496	1,84	52.480.000.000	Jayapura Regency
Kabupaten Keerom	6.274	1,20	31.370.000.000	Keerom Regency
Kabupaten Waropen	6.110	1,07	30.550.000.000	Waropen Regency
Kabupaten Supiori	5.309	0,93	26.545.000.000	Supiori Regency
Kabupaten Biak Numfor	5.461	0,96	27.305.000.000	Biak Numfor Regency
Kabupaten Memberamo Raya	5.200	0,91	26.000.000.000	Memberamo Raya Regency
Sub Jumlah/ Total	221.996	38,97	1.109.980.000.000	
b. Provinsi Papua Selatan:				Province of South Papua:
Pemerintah Daerah				
Kabupaten Merauke	21.702	3,81	108.510.000.000	Merauke Regency
Kabupaten Asmat	8.800	1,54	44.000.000.000	Asmat Regency
Kabupaten Mappi	8.076	1,42	40.380.000.000	Mappi Regency
Kabupaten Boven Digul	6.822	1,10	34.110.000.000	Boven Digul Regency



Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)	Name of Shareholder
Sub Jumlah/ Total	45.400	7,97	227.000.000.000	
c. Provinsi Papua Tengah:				Province of Central Papua:
Pemerintah Daerah				
Kabupaten Mimika	17.346	3,05	86.730.000.000	Mimika Regency
Kabupaten Nabire	7.356	1,29	36.780.000.000	Nabire Regency
Kabupaten Dogiyai	5.538	0,97	27.690.000.000	Dogiyai Regency
Kabupaten Paniai	4.256	0,75	21.280.000.000	Paniai Regency
Kabupaten Puncak	4.000	0,70	20.000.000.000	Puncak Regency
Kabupaten Intan Jaya	3.147	0,55	15.735.000.000	Intan Jaya Regency
Kabupaten Deiyai	2.350	0,41	11.750.000.000	Deiyai Regency
Sub Jumlah/ Total	43.993	7,72	219.965.000.000	
d. Provinsi Papua Pegunungan:				Province of Mountain Papua:
Pemerintah Daerah				
Kabupaten Puncak Jaya	12.350	2,17	61.750.000.000	Puncak Jaya Regency
Kabupaten Pegunungan Bintang	12.444	2,18	62.220.000.000	Pegunungan Bintang Regency
Kabupaten Jayawijaya	8.763	1,54	43.815.000.000	Jayawijaya Regency
Kabupaten Tolikara	7.631	1,34	38.155.000.000	Tolikara Regency
Kabupaten Nduga	3.333	0,59	16.665.000.000	Nduga Regency
Kabupaten Yahukimo	2.591	0,45	12.955.000.000	Yahukimo Regency
Kabupaten Lanni Jaya	2.500	0,44	12.500.000.000	Lanni Jaya Regency
Kabupaten Yalimo	1.419	0,25	7.095.000.000	Yalimo Regency
Kabupaten Memberamo Tengah	1.036	0,18	5.180.000.000	Central Memberamo Regency
Sub Jumlah/ Total	52.067	9,14	260.335.000.000	
e. Provinsi Papua Barat:				Province of West Papua:
Pemerintah Daerah				
Provinsi Papua Barat	86.128	15,12	430.640.000.000	West Papua Province
Kabupaten Teluk Bintuni	15.168	2,66	75.840.000.000	Teluk Bintuni Regency
Kabupaten Fak-Fak	12.150	2,13	60.750.000.000	Fak-Fak Regency
Kabupaten Manokwari	11.142	1,96	55.710.000.000	Manokwari Regency
Kabupaten Kaimana	6.548	1,15	32.740.000.000	Kaimana Regency
Kabupaten Teluk Wondama	6.220	1,09	31.100.000.000	Teluk Wondama Regency
Kabupaten Pengunungan Arfak	4.905	0,86	24.525.000.000	Pengunungan Arfak Regency
Kabupaten Manokwari Selatan	4.148	0,73	20.740.000.000	South Manokwari Regency
Sub Jumlah/ Total	146.409	25,70	732.045.000.000	
f. Provinsi Papua Barat Daya:				Province of Southwest Papua:
Pemerintah Daerah				
Kabupaten Raja Ampat	13.638	2,39	68.190.000.000	Raja Ampat Regency
Kabupaten Sorong Selatan	12.004	2,11	60.020.000.000	South Sorong Regency
Kabupaten Sorong	7.955	1,40	39.775.000.000	Sorong Regency
Kabupaten Maybrat	5.015	0,88	25.075.000.000	Maybrat Regency
Kabupaten Tambrauw	4.602	0,81	23.010.000.000	Tambrauw Regency
Kota Sorong	3.769	0,66	18.845.000.000	Sorong Municipal
Sub Jumlah/ Total	46.983	8,25	234.915.000.000	
Jumlah Saham seri A	556.848	97,75	2.784.240.000.000	Total Class A shares
Saham seri B				Class B shares
g. Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari	12.793	2,25	63.965.000.000	Bank Papua Berdikari Multi Cooperative
Jumlah Saham seri B	12.793	2,25	63.965.000.000	Total Class B shares
Jumlahl Modal	569.641	100	2.848.205.000.000	Capital
Tambahan Modal Disetor	6.454	-	32.268.522.106	Additional Paid up Capital



Untuk komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2025.

The composition of shareholders as of December 31, 2025, remained unchanged from the composition as of January 1, 2025.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Papua belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS

As of December 31, 2025, Bank Papua has not been listed on the Stock Exchange. Therefore, there is no information regarding the composition of the 20 largest shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM 5% ATAU LEBIH

Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih pada tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dengan informasi sebagai berikut.

SHARE OWNERSHIP OF 5% OR MORE

The composition of shareholders owning 5% or more as of January 1, 2025 and December 31, 2025 remained unchanged, with details as follows.

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih Shareholder Composition Table 5% or more					
No.	Nama Pemegang Saham	Setoran Modal Paid-up capital	Lembar Saham Stock Sheet	Persentase % Percentage %	Shareholder Name
1	Provinsi Papua	698,605,000,000	139,721	24.53	Provinsi Papua
2	Provinsi Papua Barat	430,640,000,000	86,128	15.12	Provinsi Papua Barat

KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5%

Kelompok Pemegang Saham Kurang Dari 5% pada tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dengan informasi sebagai berikut.

SHARE OWNERSHIP OF LESS THAN 5%

The composition of shareholders holding less than 5% as of January 1, 2025 and December 31, 2025 remained unchanged, with details as follows.

Tabel Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5% Table of Community Shareholder Groups Less Than 5%				
No.	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Setoran Modal Paid-up capital	Lembar Saham Stock Sheet	Persentase % Percentage %
Saham Seri A				
1	Pemda Kabupaten Merauke	108,510,000,000	21,702	3.81
2	Pemda Kota Jayapura	87,735,000,000	17,547	3.08
3	Pemda Kabupaten Mimika	86,730,000,000	17,346	3.05
4	Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	75,840,000,000	15,168	2.66
5	Pemda Kabupaten Sarmi	76,500,000,000	15,300	2.69
6	Pemda Kabupaten Raja Ampat	68,190,000,000	13,638	2.39
7	Pemda Kabupaten Peg. Bintang	62,220,000,000	12,444	2.18
8	Pemda Kabupaten Puncak Jaya	61,750,000,000	12,350	2.17
9	Pemda Kabupaten Fak - Fak	60,750,000,000	12,150	2.13
10	Pemda Kabupaten Sorong Selatan	60,020,000,000	12,004	2.11
11	Pemda Kabupaten Manokwari	55,710,000,000	11,142	1.96
12	Pemda Kabupaten Yapen	52,890,000,000	10,578	1.86
13	Pemda Kabupaten Jayapura	52,480,000,000	10,496	1.84
14	Pemda Kabupaten Asmat	44,000,000,000	8,800	1.54
15	Pemda Kabupaten Jayawijaya	43,815,000,000	8,763	1.54
16	Pemda Kabupaten Mappi	40,380,000,000	8,076	1.42
17	Pemda Kabupaten Sorong	39,775,000,000	7,955	1.40



Tabel Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5%
Table of Community Shareholder Groups Less Than 5%

No.	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Setoran Modal Paid-up capital	Lembar Saham Stock Sheet	Persentase % Percentage %
18	Pemda Kabupaten Tolikara	38,155,000,000	7,631	1.34
19	Pemda Kabupaten Nabire	36,780,000,000	7,356	1.29
20	Pemda Kabupaten Boven Digoel	34,110,000,000	6,822	1.20
21	Pemda Kabupaten Kaimana	32,740,000,000	6,548	1.15
22	Pemda Kabupaten Keerom	31,370,000,000	6,274	1.10
23	Pemda Kabupaten Teluk Wondama	31,100,000,000	6,220	1.09
24	Pemda Kabupaten Waropen	30,550,000,000	6,110	1.07
25	Pemda Kabupaten Dogiyai	27,690,000,000	5,538	0.97
26	Pemda Kabupaten Biak Numfor	27,305,000,000	5,461	0.96
27	Pemda Kabupaten Supiori	26,545,000,000	5,309	0.93
28	Pemda Kabupaten Mamberamo Raya	26,000,000,000	5,200	0.91
29	Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak	24,525,000,000	4,905	0.86
30	Pemda Kabupaten Maybrat	25,075,000,000	5,015	0.88
31	Pemda Kabupaten Tambrauw	23,010,000,000	4,602	0.81
32	Pemda Kabupaten Paniai	21,280,000,000	4,256	0.75
33	Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	20,740,000,000	4,148	0.73
34	Pemda Kabupaten Puncak	20,000,000,000	4,000	0.70
35	Pemda Kota Sorong	18,845,000,000	3,769	0.66
36	Pemda Kabupaten Nduga	16,665,000,000	3,333	0.59
37	Pemda Kabupaten Intan Jaya	15,735,000,000	3,147	0.55
38	Pemda Kabupaten Yahukimo	12,955,000,000	2,591	0.45
39	Pemda Kabupaten Lanny Jaya	12,500,000,000	2,500	0.44
40	Pemda Kabupaten Deiyai	11,750,000,000	2,350	0.41
41	Pemda Kabupaten Yalimo	7,095,000,000	1,419	0.25
42	Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah	5,180,000,000	1,036	0.18
Saham Seri B				
43	KSU BPD Papua Berdikari	63.965.000.000	12.793	2,25

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN MANAJEMEN SENIOR

Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Senior tidak memiliki saham di Bank Papua.

SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND SENIOR MANAGEMENT

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners, Board of Directors, and Senior Management do not hold any shares in Bank Papua.

KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi adalah sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP BY CLASSIFICATION

As of December 31, 2025, the number of shareholders and the percentage of ownership at the end of the financial year based on classification are as follows:

Kepemilikan	Jumlah	Ownership
Institusi Lokal	45 Institusi	Local Institution
Institusi Asing	-	Foreign Institution
Individu Lokal	-	Local Individual
Individu Asing	-	Foreign Individual



Identitas Pemegang Saham

SHAREHOLDER IDENTITY



Provinsi Papua

Gubernur Papua terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Provinsi Papua, dapat dilihat pada tautan <http://www.papua.go.id>

The Governor of the Papua elected during his term of office automatically becomes the Controlling Shareholder of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Provincial Government of Papua can be seen at the link <http://www.papua.go.id>



Pemerintah Kota Jayapura

Walikota Jayapura terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kota Jayapura, dapat dilihat pada tautan <http://www.jayapurakota.go.id>

The Mayor of Jayapura, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the Jayapura City Government profile can be seen at the link <http://www.jayapurakota.go.id>



Pemerintah Kabupaten Jayapura

Bupati Jayapura terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Jayapura, dapat dilihat pada tautan <https://jayapurakab.go.id/>

The Jayapura Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Jayapura Regency Government can be seen on the link <https://jayapurakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Bupati Jayawijaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dapat dilihat pada tautan <https://www.jayawijayakab.go.id/>

The Jayawijaya Regent was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Jayawijaya Regency Government can be seen at the link <https://www.jayawijayakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya

Bupati Puncak Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dapat dilihat pada tautan <https://puncakjayakab.go.id/>

The Regent of Puncak Jaya was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Puncak Jaya Regency Government can be seen on the Puncak Jaya Regency link <https://puncakjayakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Merauke

Bupati Merauke terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Merauke, dapat dilihat pada tautan <https://merauke.go.id/>

The Regent of Merauke, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Merauke Regency Government can be seen at the link <https://merauke.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Bupati Biak Numfor terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dapat dilihat pada tautan <http://biak.go.id/>

The Biak Numfor Regent elected during his reign automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Biak Numfor Regency Government can be seen at the link <http://biak.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

Bupati Kepulauan Yapen terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, dapat dilihat pada tautan <https://kepyapenkab.go.id/>

The Regent of the Yapen Islands was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Yapen Islands Regency Government can be seen at the link <https://kepyapenkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Paniai

Bupati Paniai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Paniai, dapat dilihat pada tautan <http://paniaikab.go.id>

The Paniai Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Paniai Regency Government can be seen at the link <http://paniaikab.go.id>





Pemerintah Kabupaten Mimika

Bupati Mimika terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Mimika, dapat dilihat pada tautan <https://mimikakab.go.id>

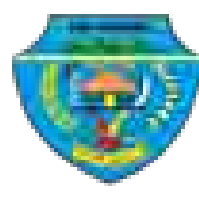
The Mimika Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Mimika Regency Government can be seen at the link <https://mimikakab.go.id>



Pemerintah Kabupaten Sarmi

Bupati Sarmi terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Sarmi, dapat dilihat pada tautan <https://www.sarmikab.go.id/>

Regent Sarmi was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Government of Sarmi Regency can be seen at the link <https://www.sarmikab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Tolikara

Bupati Tolikara terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Tolikara, dapat dilihat pada tautan <https://www.tolikarakab.go.id/>

The Regent of Tolikara, elected during his term of office, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Tolikara Regency Government can be seen at the link <https://www.tolikarakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Waropen

Bupati Waropen terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Waropen, dapat dilihat pada tautan <https://www.waropenkab.go.id/>

The Waropen Regent, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Waropen Regency Government can be seen at the link <https://www.waropenkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Bupati Yahukimo terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dapat dilihat pada tautan <http://www.yahukimokab.go.id/>

Yahukimo Regent was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Yahukimo Regency Government can be seen at the link <http://www.yahukimokab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Asmat

Bupati Asmat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Asmat, dapat dilihat pada tautan <https://www.asmatkab.go.id/>

The Asmat Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Asmat Regency Government can be seen at the link <https://www.asmatkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Keerom

Bupati Keerom terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Keerom, dapat dilihat pada tautan <http://www.keeromkab.go.id/>

The Keerom Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Keerom Regency Government can be seen at the link <http://www.keeromkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Bupati Pegunungan Bintang terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, dapat dilihat pada tautan <http://pegbintangkab.go.id/>

The Regent of Gunung Bintang, elected during his term of office, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Gunung Bintang Regency Government can be seen at the link <http://pegbintangkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Supiori

Bupati Supiori terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Supiori, dapat dilihat pada tautan <https://supiorikab.go.id/>

The Regent Supiori, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Supiori Regency Government can be seen at the link <https://supiorikab.go.id/>





Pemerintah Kabupaten Boven Digoel

Bupati Boven Digoel terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dapat dilihat pada tautan <https://bovendigoelkab.go.id/>

The Regent of Boven Digoel, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Government of Boven Digoel Regency can be seen at the link <https://bovendigoelkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Mappi

Bupati Mappi terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Mappi, dapat dilihat pada tautan <https://portal.mappikab.go.id>

The Mappi Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Mappi Regency Government can be seen at the link <https://portal.mappikab.go.id>



Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya

Bupati Lanny Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya

The Regent of Lanny Jaya was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Government of Lanny Jaya Regency



Pemerintah Kabupaten Yalimo

Bupati Yalimo terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Yalimo

The elected Regent of Yalimo, during their term of office, automatically becomes one of the shareholders of Bank Papua. Further information regarding the profile of the Yalimo Regency Government is provided as follows.



Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya

Bupati Memberamo Raya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya

The Regent of Memberamo Raya was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Memberamo Raya Regency Government



Pemerintah Kabupaten Nduga

Bupati Nduga terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Nduga

The Regent of Nduga elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Nduga Regency Government



Pemerintah Kabupaten Dogiyai

Bupati Dogiyai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Dogiyai

The Dogiyai Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Dogiyai Regency Government



Pemerintah Kabupaten Puncak

Bupati Puncak terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Puncak, dapat dilihat pada tautan <http://puncakkab.go.id/>

The Puncak Regent, elected during his reign, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Puncak Regency Government can be seen at the link <http://puncakkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah

Bupati Memberamo Tengah terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah, dapat dilihat pada tautan <http://mamberamotengahkab.go.id/v2/>

The Regent of Memberamo Tengah was elected during his reign and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Central Memberamo Regency Government can be seen at the link <http://mamberamotengahkab.go.id/v2/>





Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

Bupati Intan Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, dapat dilihat pada tautan <http://intanjayakab.go.id/>

The Regent of Intan Jaya, elected during his reign period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Government of Intan Jaya Regency can be seen at the link <http://intanjayakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Deiyai

Bupati Deiyai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Deiyai, dapat dilihat pada tautan <https://www.deiyaikab.go.id/>

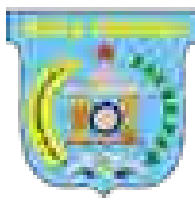
The Regent of Deiyai, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Deiyai Regency Government can be seen at the link <https://www.deiyaikab.go.id/>



Provinsi Papua Barat

Gubernur Papua Barat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat dilihat melalui tautan <https://papuabaratprov.go.id>

The Governor of West Papua elected during his term of office automatically becomes the Controlling Shareholder of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the West Papua Provincial Government can be seen via the link <https://papuabaratprov.go.id>



Pemerintah Kota Sorong

Walikota Sorong terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kota Sorong, dapat dilihat pada tautan <https://sorongkota.go.id/>

The Mayor of Sorong, elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the Sorong City Government profile can be seen at the link <https://sorongkota.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Manokwari

Bupati Manokwari terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Manokwari, dapat dilihat pada tautan <http://www.manokwarikab.go.id/>

The Regent of Manokwari, elected during his reign, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Government of Manokwari Regency can be seen at the link <http://www.manokwarikab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Sorong

Bupati Sorong terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Sorong, dapat dilihat pada tautan <https://sorongkab.go.id/>

The Regent of Sorong elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Sorong Regency Government can be seen at the link <https://sorongkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

Bupati Sorong Selatan terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dapat dilihat pada tautan <https://sorongselatankab.go.id/>

The Regent of South Sorong elected during his government period, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the South Sorong Regency Government can be seen at the link <https://sorongselatankab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Fak-Fak

Bupati Fak-Fak terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Fak-Fak, dapat dilihat pada tautan <https://fakfakkab.go.id/>

The Regent of Fak-Fak, elected during his term of office, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Fak-Fak Regency Government can be seen at the link <https://fakfakkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

Bupati Teluk Bintuni terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dapat dilihat pada tautan <http://www.telukbintunikab.go.id/>

The Teluk Bintuni Regent elected during his term of office automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Bintuni Bay Regency Government can be seen at the link <http://www.telukbintunikab.go.id/>





Pemerintah Kabupaten Kaimana

Bupati Kaimana terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Kaimana, dapat dilihat pada tautan <https://kaimanakab.go.id/>

The Kaimana Regent elected during his reign automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Kaimana Regency Government can be seen at the link <https://kaimanakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bupati Raja Ampat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dapat dilihat pada tautan <https://rajaampatkab.go.id>

The Raja Ampat Regent elected during his reign, automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Raja Ampat Regency Government can be seen at the link <https://rajaampatkab.go.id>



Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

Bupati Teluk Wondama terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dapat dilihat pada tautan <http://www.wondamakab.go.id/>

The Teluk Wondama Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Teluk Wondama Regency Government can be seen at the link <http://www.wondamakab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Tambrauw

Bupati Tambrauw terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dapat dilihat pada tautan <http://tambrauwkab.go.id/>

The Regent of Tambrauw elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Government of Tambrauw Regency can be seen at the link <http://tambrauwkab.go.id/>



Pemerintah Kabupaten Maybrat

Bupati Maybrat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Maybrat

The Maybrat Regent elected during his government period automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information about the profile of the Maybrat Regency Government



Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak

Bupati Pegunungan Arfak pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, dapat dilihat pada tautan <https://pegafkab.go.id/website/>

During his reign, the Regent of the Arfak Mountains automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. Complete information regarding the profile of the Arfak Mountains Regency Government can be seen at the link <https://pegafkab.go.id/website/>



Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

Bupati Manokwari Selatan terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Informasi lebih lengkap mengenai profil Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, dapat dilihat pada tautan <https://manselkab.go.id/>

During his reign, the South Manokwari Regent was elected and automatically became one of the Shareholders of Bank Papua. More complete information about the profile of the Manokwari Regency Government, can be seen at the link <https://manselkab.go.id/>



Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari

Ketua pengurus Koperasi Serba Usaha Bank Papua terpilih pada masa periode kepengurusan otomatis menjadi Pemegang Saham Bank Papua, dapat dilihat pada tautan <https://id-check.net/koperasi-serba-usaha-ksu-bank-papua-berdikari/306001.html>

The chairman of the management of the Bank Papua Multi-Business Cooperative elected during the management period automatically becomes a Shareholder of Bank Papua, can be seen at the link <https://id-check.net/koperasi-serba-usaha-ksu-bank-papua-berdikari/306001.html>



Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Main and Controlling Shareholders

Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki 24,53% dari saham mayoritas Bank Papua. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua berfungsi sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Papua. Selain itu, pemegang saham utama dan pengendali tidak memiliki kepemilikan saham secara tidak langsung.

The Papua Provincial Government holds 24.53% of the shares as the majority shareholder of Bank Papua. Therefore, the Papua Provincial Government serves as the Controlling and Main Shareholder of Bank Papua. Furthermore, the controlling and main shareholder does not have any indirect share ownership.

24,53%



Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Regional Government of Papua Province

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associates and Joint Venture Companies

Per 31 Desember 2025, Bank Papua tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, maupun perusahaan ventura bersama. Oleh karena itu, informasi berikut tidak tersedia: nama entitas anak, asosiasi, dan perusahaan ventura bersama; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha; serta status operasi entitas anak, entitas asosiasi, dan perusahaan ventura bersama (telah beroperasi atau belum).

As of December 31, 2025, Bank Papua does not have any Subsidiaries, Associates, or Joint Venture entities. Therefore, the following information is not available: names of subsidiaries, associates, and joint ventures; percentage of share ownership; description of business activities; and operational status of subsidiaries, associates, and joint ventures (operating or not yet operating).



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



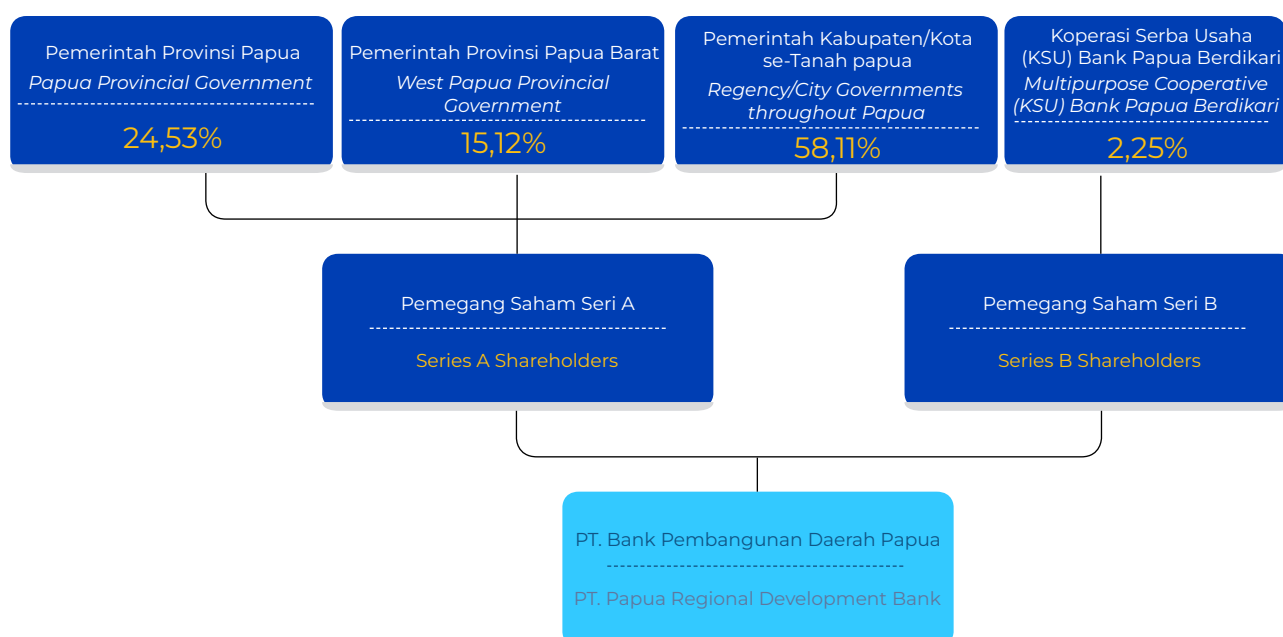
Pendukung Bisnis
Business Support

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Papua tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV).

As of December 31, 2025, Bank Papua does not have any Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, or Special Purpose Vehicles (SPVs).



Informasi Kelompok Usaha Bank

Bank Business Group Information

Per 31 Desember 2024, Bank Papua belum merupakan Kelompok Usaha Bank, sehingga tidak terdapat informasi struktur Kelompok Usaha Bank, struktur keterkaitan kepengurusan dalam Kelompok Usaha Bank dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

As of December 31, 2024, Bank Papua was not part of a Banking Business Group. Therefore, there is no information regarding the structure of the Banking Business Group, interlocking management structures within the group, or shareholders acting on behalf of other shareholders.



Kronologi Penerbitan Saham

Chronology of Share Issuance

Sampai dengan 31 Desember 2025 Bank Papua belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham Perseroan dicatatkan .

As of December 31, 2025, Bank Papua has not been listed on the Stock Exchange. Therefore, there is no information regarding corporate actions, offering prices for each corporate action, the number of listed shares after each corporate action, or the name of the stock exchange where the Company's shares are listed.

Kronologi Penerbitan Obligasi dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Bond Issuance and/or Listing of Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Papua belum menerbitkan obligasi serta efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi serta efek lainnya.

As of December 31, 2025, Bank Papua has not issued any bonds or other securities. Therefore, there is no information regarding the chronology of the issuance and/or listing of bonds and other securities.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Papua tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2025, Bank Papua has not issued any other securities in any form. Therefore, there is no information regarding the name of such securities, year of issuance, interest/profit-sharing rate, maturity date, offering value, the stock exchange where such securities are listed, or their credit rating.

Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing Tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*)

Accordingly, there is also no information regarding the year of share issuance, number of shares, par value per share, offering price for each corporate action, or the number of listed shares after each corporate action.



Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Information on the Use of Public Accountants

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Nama KAP	Hertanto Grace Karunawan
Jaringan Asosiasi	
No. Izin	929/KM.1/2014
Alamat KAP	Palma Tower Floor 18th, Lot F & G, Jl. RA Kartini Kav. 06 II-S, TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310 Telp : (021) 75930431/32/33 Faks : (021) 75930434 Email : info@hgkfirm.com Website : hgkfirm.com
Nama AP	Drs Hertanto M.S Ak, CPA, CPMA, CA
Periode Penugasan KAP	GA TB 2025
Periode Penugasan AP	
Jasa Audit	Konsultan Jasa Keuangan
Fee Audit	Rp1.300.000.000
Jasa Non Audit	-
Fee Non Audit	-



Daftar Nama dan Alamat Lembaga Profesi Penunjang

List of Names and Addresses of Supporting Professional Institutions

KONSULTAN HUKUM

LAW CONSULTANT

Daikh & Co (Advocates & Legal Consultant)

City Lofis Sudirman, 21st Floor, Suite 2108,
Jln. K.H. Mansyur, No. 121, Jakarta Pusat 10220

Telp/Fax : (021) 21263449
Email : daikhcolawfirm@gmail.com
Bentuk Jasa : Jasa bantuan Hukum Penanganan Perkara
Periode Penugasan : Putusan Tingkat Akhir
Biaya di Tahun 2025 : Rp. 250.000.000

PENILAI

APPRAISAL

KJPP Guntur EKI Andri dan Rekan

Jl. Sidosermo PDK V-A No.45, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60284

No. Izin : 2.13.0116
No. Telp : (031) 8470138 / 082232189991
Fax : (031) 99013093
Email : anrsurabaya@yahoo.com

NOTARIS

NOTARY

Maryatie Simanjuntak, SH

Komplek Ruko Abepura Mas Blok A No.2
Jl. Raya Abepura (samping Toko Sentral) Abepura

Telepon : 081248352214, 081344890532, 081344890533
Bentuk Jasa : Notaris Pembuatan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Periode Penugasan : 2024



Penghargaan

Awards



TOP DIGITAL CORPORATE BRAND AWARD 2025

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil menunjukkan kinerja positif dalam membangun merek digital yang kuat. Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi pemacu semangat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

This event serves as an appreciation for companies that have demonstrated strong performance in building a solid digital brand. It is expected that this award will motivate companies in Indonesia to continue growing and making meaningful contributions to national development.



THE BEST CEO IN THE REGIONAL BANK 2025 FOR MAINTAINING PROFITABILITY GROWTH AND INNOVATIVE DIGITAL SERVICES UNTUK KATEGORI REGIONAL BANK YANG DIBERIKAN KEPADA IBU YULIANA D. YEMBISE.

Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin yang mampu menjawab kompleksitas dunia keuangan modern dengan solusi yang kreatif, berbasis etika, dan berdampak nyata. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menginspirasi pemimpin lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga ketahanan institusi dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

This award is presented to leaders who are able to address the complexities of the modern financial landscape with creative, ethical, and impactful solutions. It is also expected to inspire other leaders to continuously enhance service quality, strengthen public trust, and maintain institutional resilience in facing an increasingly uncertain future.



THE MOST INNOVATIVE FUTURE FINANCE AWARDS 2025 FOR ENCOURAGING MSME DEVELOPMENT AND STRENGTHENING BUSINESS DEVELOPMENT AND ESPANSOIN UNTUK KATEGORI REGIONAL BANK

Penghargaan ini diberikan kepada lembaga keuangan untuk mengatasi hambatan dalam akses layanan keuangan, baik dari segi inklusivitas, regulasi, teknologi, maupun kesenjangan sosial ekonomi serta mendorong inovasi dan memastikan layanan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat guna membangun kepercayaan pelanggan melalui layanan yang bertanggung jawab serta mengedepankan keberlanjutan bisnis yang mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis sambil tetap menjaga kualitas layanan dan etika bisnis.

This award is presented to financial institutions that successfully address barriers to access to financial services—whether related to inclusivity, regulation, technology, or socio-economic disparities—while promoting innovation and ensuring that financial services are accessible to all segments of society. It also recognizes efforts to build customer trust through responsible services and to prioritize sustainable business practices that can adapt to dynamic market conditions while maintaining service quality and business ethics.





THE MOST OUTSTANDING WOMEN 2025 KEPADA YULIANA D. YEMBISE

Penghargaan ini diberikan kepada Para Wanita luar biasa yang sukses dalam karirnya dan berkiprah di sektor keuangan, BUMN, dan lembaga public. Menyimak kunci keberhasilan para pemimpin di sektor jasa keuangan, BUMN, dan lembaga publik serta bagaimana mereka mendorong kaum wanita Indonesia untuk berperan dalam perekonomian.

This award is presented to outstanding women who have achieved success in their careers and made significant contributions in the financial sector, state-owned enterprises (SOEs), and public institutions. It highlights the keys to success of leaders in these sectors and how they empower Indonesian women to actively participate in the economy.



THE MOST OUTSTANDING WOMEN 2025 KEPADA BETTY J. PARINUSSA

Penghargaan ini diberikan kepada Para Wanita luar biasa yang sukses dalam karirnya dan berkiprah di sektor keuangan, BUMN, dan lembaga public. Menyimak kunci keberhasilan para pemimpin di sektor jasa keuangan, BUMN, dan lembaga publik serta bagaimana mereka mendorong kaum wanita Indonesia untuk berperan dalam perekonomian.

This award is presented to outstanding women who have achieved success in their careers and made meaningful contributions across the financial sector, state-owned enterprises (SOEs), and public institutions. It also highlights the key success factors of leaders in these sectors and how they empower Indonesian women to play a more active role in the economy.



THE ASIAN POST BEST REGIONAL CHAMPION 2025, PREDIKAT EXCELLENT FOR THE FINANCIAL PERFORMANCE DURING 2023-2024

Penghargaan ini diberikan secara khusus untuk menilai kinerja bank milik pemerintah daerah seperti BPD, BPR, dan BPRS, berdasarkan laporan keuangan triwulan ketiga tahun 2024. Penilaian dilakukan terhadap lima aspek utama: permodalan, kualitas aset, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas.

This award is specifically granted to assess the performance of regionally owned banks such as BPDs, BPRs, and BPRS, based on their third-quarter 2024 financial statements. The evaluation covers five key aspects: capital, asset quality, liquidity, efficiency, and profitability.



WOMAN EMPOWER WOMAN AWARD 2025

Penghargaan ini diberikan kepada Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise dan Direktur Kepatuhan Bank Papua Betty J. Parinussa atas kepemimpinan dan kontribusi strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta penguatan tata kelola perusahaan.

This award is presented to the President Director of Bank Papua, Yuliana D. Yembise, and the Director of Compliance, Betty J. Parinussa, in recognition of their leadership and strategic contributions in advancing women's empowerment and strengthening corporate governance.





INFOBANK TOP 100 CEO 2025

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin perusahaan di Indonesia yang dinilai memiliki kepemimpinan visioner, adaptif, serta mampu membawa institusi yang dipimpinnya tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika dan tantangan industri keuangan yang semakin kompleks.

The award is presented as a form of recognition to corporate leaders in Indonesia who demonstrate visionary and adaptive leadership, and who are able to drive their institutions toward sustainable growth amid the increasingly complex dynamics and challenges of the financial industry.



PENGHARGAAN SEBAGAI MITRA STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2025

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KPP Pratama Sorong atas kontribusi Bank Papua KCU Sorong dalam memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak, khususnya dalam proses pembayaran dan penyetoran pajak melalui layanan perbankan.

This award is presented by KPP Pratama Sorong in recognition of the contribution of Bank Papua Main Branch Office (KCU) Sorong in delivering optimal services to taxpayers, particularly in facilitating tax payment and remittance processes through banking services.



MITRA STRATEGIS PENDUKUNG IMPLEMENTASI PERLUASAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Bank Papua juga dinobatkan sebagai Mitra Strategis berkat perannya dalam mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk dalam penguatan sistem pembayaran digital yang transparan, akuntabel, dan efisien. Upaya ini selaras dengan program nasional percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan.

Bank Papua was also recognized as a Strategic Partner for its role in accelerating and expanding the electrification of regional government transactions, including strengthening digital payment systems that are transparent, accountable, and efficient. This initiative is aligned with the national program to accelerate digital transformation in the public sector.



BANK PENDUKUNG DISTRIBUSI DAN LAYANAN KAS UANG RUPIAH TERBAIK

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Bank Papua dalam mendukung pelaksanaan tugas distribusi serta layanan kas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) di Tanah Papua. Melalui jaringan layanan yang diperkuat serta kolaborasi bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah, Bank Papua dinilai mampu menjaga ketersediaan uang Rupiah dan memastikan layanan kas tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

This award is presented in recognition of Bank Papua's contribution to supporting cash distribution and cash service operations, including in 3T (frontier, outermost, and underdeveloped) regions across Papua. Through its strengthened service network and collaboration with Bank Indonesia and regional governments, Bank Papua has been able to maintain the availability of Rupiah currency and ensure that cash services reach all segments of society.





PENGHARGAAN CSR

Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui berbagai program sosial yang berdampak nyata di Tanah Papua.

This award is presented in recognition of its contribution to supporting



PENGHARGAAN THE BEST SERVICE PERFORMANCE EXCELLENCE NASIONAL

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Bank Papua dalam menghadirkan layanan perbankan yang prima, inklusif, dan adaptif di tengah berbagai tantangan industri perbankan, khususnya pada era transformasi digital saat ini.

This award serves as tangible evidence of Bank Papua's commitment to delivering excellent, inclusive, and adaptive banking services amid various challenges in the banking industry, particularly in the current era of digital transformation.



PENGHARGAAN SEBAGAI BANK DAERAH PENDUKUNG EKONOMI PAPUA BARAT PADA PERINGATAN HUT KE-26 PROVINSI PAPUA BARAT

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Bank Papua dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk penyaluran kredit produktif bagi UMKM, pembiayaan sektor prioritas, layanan perbankan digital untuk masyarakat, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyentuh bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

This award represents recognition of Bank Papua's commitment to supporting regional economic development through various strategic initiatives, including the provision of productive loans to MSMEs, financing of priority sectors, delivery of digital banking services to the public, and implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs in the areas of education, healthcare, and community economic empowerment.



PENGHARGAAN SEBAGAI KONTRIBUSI UTAMA PENERIMA PAJAK TAHUN 2024 DAN EDUKASI CORETAX

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi dan dukungan terhadap program perpajakan yang dijalankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

This award is presented in recognition of the contribution and support provided to the tax programs implemented by the Jayapura Primary Tax Office.





Informasi Website Bank Papua

Bank Papua Website

Bank Papua memiliki *Website* resmi dengan alamat www.bankpapua.co.id yang merupakan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi bagi *stakeholders*, disamping sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Bank Papua has an official website with the address www.bankpapua.co.id, a means, and infrastructure to support the delivery of information to stakeholders and a form of public information disclosure.

Selain informasi yang bersifat umum, *Website* Bank Papua juga memberikan informasi yang lebih spesifik, diantaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

Apart from general information, the Bank Papua website also provides more specific information, including those related to the following:

1. Halaman Utama berisikan informasi: *Website* Perusahaan, Investor, Hubungi Kami, SBDK, Info Kurs, Produk-Produk Bank Papua
2. *Website* Perusahaan berisikan informasi:
 - a. Beranda berisikan informasi mengenai: Bunga Kredit, Jasa Giro, Bunga Tabungan, Bunga Deposito, SBDK, BI Rate, Info Kurs, Produk-Produk Bank Papua.
 - b. Produk & Layanan berisikan informasi mengenai semua produk dan layanan Bank Papua baik untuk Perorangan maupun Badan Usaha serta Layanan dan Jasa Perbankan Lainnya.
 - c. Jaringan berisikan informasi: Menampilkan seluruh jaringan kantor Bank Papua.
 - d. Tentang Kami berisikan informasi: Profil Perusahaan, Informasi Perusahaan, Manajemen, CSR.
 - e. Berita berisikan informasi tentang: Info & Berita, Pengumuman Lelang, Lowongan Pekerjaan, Pooling, Informasi Penjualan Agunan.
 - f. Investor berisikan informasi: Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Tata Kelola Perusahaan, RUPS, Kode Etik, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi & Kerja Komite serta Audit Internal.
 - g. LHKPN
 - h. Hubungi Kami

1. Main page contains information: Company Website, Investors, Contact Us, SBDK, Currency Info, Bank Papua Products
2. The Company's website contains information on the following:
 - a. The homepage contains information about Credit Interest, Demand Deposits, Savings Interest, Deposit Interest, SBDK, BI Rate, Exchange Rate Info, and Bank Papua Products.
 - b. Products & Services contains information about all products and services of Bank Papua, both for Individuals and Business Entities and Other Banking Services.
 - c. Network contains information: Displays the entire network of Bank Papua offices.
 - d. About Us contains information: Company Profile, Company Information, Management, CSR.
 - e. The news contains information: about Info & News, Auction Announcements, Job Vacancies, Pooling, and Information on Collateral Sales.
 - f. Investor contains information: Financial Statements, Annual Reports, Corporate Governance, GMS, Code of Conducts, Work Guidelines for the Board of Commissioners, Directors & Committee Work, and Internal Audit.
 - g. LHKPN
 - h. Contact us





PENDUKUNG BISNIS

Business Support



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Disussion and Analysis



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance



Laporan Keuangan
Financial Statements



Indeks OJK
OJK Index

Teknologi Informasi

Information Technology

Teknologi Informasi merupakan enabler strategis yang mendukung transformasi perbankan di era digital. Pemanfaatan TI memungkinkan penyediaan layanan yang cepat, aman, dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan memperluas inklusi keuangan. Selain itu, TI mendorong efisiensi operasional melalui otomatisasi proses serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi tata kelola, TI juga berperan penting dalam penguatan manajemen risiko dan keamanan informasi. Dengan pengelolaan yang andal dan adaptif, Teknologi Informasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis bank.

Information Technology (IT) serves as a strategic enabler supporting banking transformation in the digital era. The utilization of IT enables the delivery of fast, secure, and integrated services, thereby enhancing service quality and expanding financial inclusion. In addition, IT drives operational efficiency through process automation and supports data-driven decision-making.

From a governance perspective, IT also plays a critical role in strengthening risk management and information security. With reliable and adaptive management, Information Technology has become a key factor in maintaining the Bank's competitiveness and ensuring long-term business sustainability.

DASAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penyelenggaraan TI Bank didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Peraturan tersebut mencakup beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan TI pada Bank yang diuraikan sebagai berikut:

- 1 Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- 2 Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi, paling sedikit terkait dengan:
 - a Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
 - b Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama;
 - c Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI;
 - d Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;

BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank's IT implementation is based on Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks. The regulation includes several provisions related to IT implementation, as outlined below:

1. *The Bank is required to establish an Information Technology Steering Committee;*
2. *The Information Technology Steering Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors, at a minimum, on the following matters:*
 - a. *The IT strategic plan aligned with the Bank's business strategic plan;*
 - b. *The formulation of key IT policies, standards, and procedures;*
 - c. *The alignment between approved IT projects and the IT strategic plan;*
 - d. *The conformity of IT project implementation with the agreed project plan;*



- e Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen, serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
 - f Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
 - g Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
 - h Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; serta
 - i Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank;
- 3 Bank wajib memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penyelenggaraan TI secara konsisten dan berkesinambungan;
- 4 Kebijakan, standar, dan prosedur penyelenggaraan TI paling sedikit meliputi aspek:
- a Tata kelola TI Bank;
 - b Arsitektur TI;
 - c Penerapan manajemen risiko penyelenggaraan TI Bank;
 - d Ketahanan dan keamanan siber Bank;
 - e Penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI Bank;
 - f Penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi berbasis TI;
 - g Pengelolaan data dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan TI Bank;
 - h Penyediaan jasa TI oleh Bank;
 - i Pengendalian dan audit internal dalam penyelenggaraan TI Bank;
 - j Pelaporan; dan
 - k Penilaian tingkat maturitas digital Bank.
- e. *The alignment of IT with the requirements of management information systems and the Bank's business activities;*
 - f. *The effectiveness of measures to minimize risks associated with the Bank's investments in the IT sector to ensure contributions to the achievement of business objectives;*
 - g. *The monitoring of IT performance and initiatives to enhance IT performance;*
 - h. *The resolution of IT-related issues that cannot be effectively, efficiently, and timely resolved by user units and IT operating units; and*
 - i. *The adequacy and allocation of the Bank's resources;*
3. *The Bank is required to establish and consistently implement IT policies, standards, and procedures on a continuous basis;*
4. *The IT policies, standards, and procedures shall, at a minimum, cover the following aspects:*
- a. *IT governance of the Bank;*
 - b. *IT architecture;*
 - c. *Implementation of IT risk management;*
 - d. *Cyber resilience and security of the Bank;*
 - e. *Utilization of IT service providers in the Bank's IT operations;*
 - f. *Placement of electronic systems and IT-based transaction processing;*
 - g. *Data management and personal data protection in IT operations;*
 - h. *Provision of IT services by the Bank;*
 - i. *Internal control and audit in IT implementation;*
 - j. *Reporting; and*
 - k. *Assessment of the Bank's digital maturity level.*

ROADMAP PENGEMBANGAN TI BANK PAPUA

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Bank Papua mengacu kepada Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Regulasi dan ketentuan internal Bank Papua serta kebijakan lain yang mengatur (Sumber: Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2023-2027).

Adapun Roadmap TI Bank Papua saat ini mengacu kepada RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2023-2027 yang telah diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 38/DIR-BPD/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Tentang

IT DEVELOPMENT ROADMAP OF BANK PAPUA

The Information Technology Development Roadmap of Bank Papua refers to prevailing laws and regulations, including statutory laws, government regulations, presidential regulations, regulatory frameworks, and the Bank's internal policies, as well as other applicable provisions (Source: Information Technology Strategic Plan 2023–2027).

The current IT Roadmap of Bank Papua is based on the Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2023–2027, as stipulated in the Board of Directors Decree No. 38/DIR-BPD/VI/2023 dated 13 June 2023 regarding the IT Strategic



Buku Pedoman Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2023-2027.

Untuk mencapai Visi dan Misi TI, disusun inisiatif-inisiatif TI yang akan dijalankan selama tahun 2023 dan hingga 2027.

Berikut ini merupakan ringkasan jumlah inisiatif pada Rencana Strategis TI Tahun 2025 - 2027:

Plan (RSTI) Guidelines for 2023–2027.

To achieve the IT Vision and Mission, a set of IT initiatives has been established to be implemented from 2023 through 2027.

The following presents a summary of the number of initiatives under the IT Strategic Plan for 2025–2027:

Inisiatif Project Blueprint				
Tahun	Technology	People	Process	Total
2025	10	2	3	15

VISI, MISI, NILAI-NILAI TEKNOLOGI INFORMASI

Visi & Misi TI Bank Papua sebagai Panduan, Kapabilitas TI yang Dibangun akan Berdampak pada TI

INFORMATION TECHNOLOGY VISION, MISSION, AND VALUES

The IT Vision and Mission of Bank Papua serve as strategic guidelines, where the development of IT capabilities is expected to deliver a significant impact on the Bank's overall performance and transformation.

VISI TI

Mendukung pencapaian visi Bank Papua dengan kinerja terbaik

IT VISION

To support the achievement of Bank Papua's vision through best-in-class performance.

MISI TI

- Memperkuat tata kelola TI dan pengendalian internal.
- Mengintegrasikan trend TI dengan kebutuhan Nasabah, utamanya Pemerintah Daerah.
- Optimalisasi TI dalam Pengembangan Kemitraan dengan seluruh Ekosistem.
- Meningkatkan Kapabilitas sumber daya.

IT MISSION

- *To strengthen IT governance and internal control frameworks;*
- *To integrate emerging technology trends with customer needs, particularly those of Regional Governments;*
- *To optimize the utilization of IT in developing partnerships across the entire ecosystem;*
- *To enhance the capability of human capital.*

IT Capabilities	Adaptive	Digital Risk Culture	Customer Needed	Value Creation
	Reliable	Digital Awareness	Customer Protection	Risk Mitigation
	Cyber Security	Competency	Real Time & Convenience	Flexible
	IT Maturity	Integrity	Literacy	Market Conduct
IT Enabler	Digital GRC	Digital Leadership	Digital Mindset	

DAMPAK PADA TI

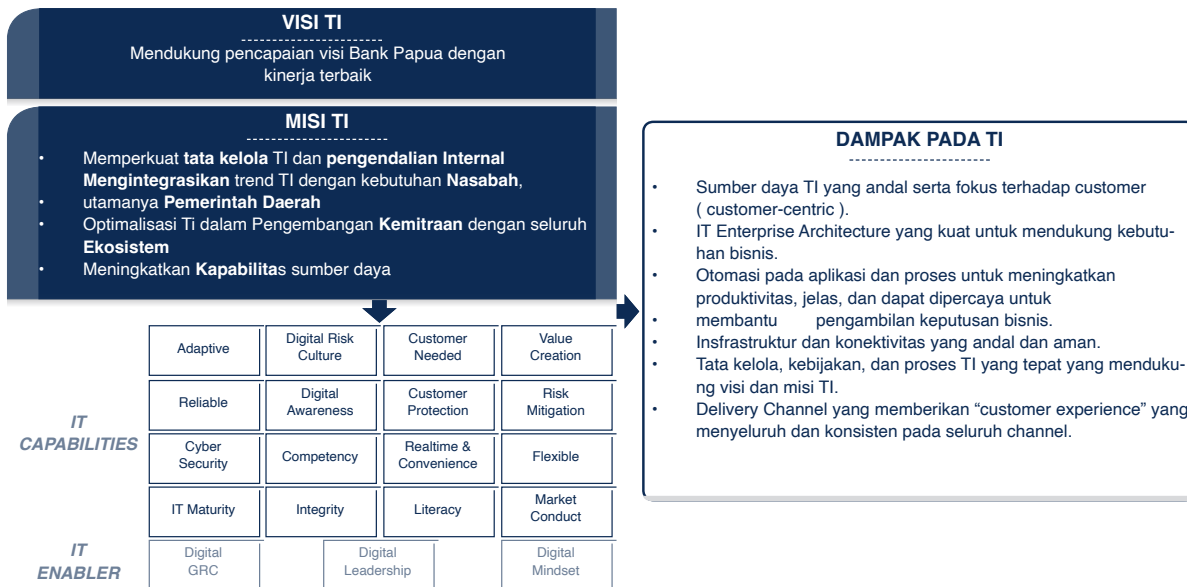
- Sumber daya TI yang andal serta fokus terhadap customer (customer-centric).
- IT Enterprise Architecture yang kuat untuk mendukung kebutuhan bisnis.
- Otomasi pada aplikasi dan proses untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

IT IMPACT

- *Reliable IT resources with a strong customer-centric focus;*
- *A robust IT Enterprise Architecture to support business requirements;*
- *Automation of applications and processes to enhance productivity and operational efficiency;*



- Data yang terintegrasi, jelas, dan dapat dipercaya untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.
- Infrastruktur dan konektivitas yang andal dan aman.
- Tata kelola, kebijakan, dan proses TI yang tepat yang mendukung visi dan misi TI.
- *Delivery channel* yang memberikan “customer experience” yang menyeluruh dan konsisten pada seluruh *channel*.



STRUKTUR PENGELOLAAN/ ORGANISASI DIVISI TI

Struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi Bank Papua dirancang secara terintegrasi untuk memastikan pengelolaan teknologi yang efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Divisi ini berada di bawah koordinasi Direktur Operasional, yang menunjukkan peran strategis fungsi TI dalam mendukung operasional dan transformasi digital Bank.

Secara struktural, Divisi Teknologi Informasi terbagi ke dalam lima departemen utama, yaitu IT Business Support, Digital Development, Governance Risk and Control, Operational, serta Technical Support and Infrastructure. Masing-masing departemen memiliki fungsi yang spesifik dan saling terintegrasi. Departemen IT Business Support berfokus pada pengelolaan layanan *e-Banking*, sentralisasi proses, serta implementasi di kantor cabang. Departemen Digital Development bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi inti dan non-inti, serta pengelolaan data warehouse dan big data.

IT DIVISION MANAGEMENT / ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The organizational structure of Bank Papua's Information Technology Division is designed in an integrated manner to ensure effective, adaptive, and business-aligned technology management. The Division operates under the coordination of the Director of Banking Operations, reflecting the strategic role of IT in supporting the Bank's operations and digital transformation initiatives.

Structurally, the Information Technology Division is organized into five main departments, namely IT Business Support, Digital Development, Governance Risk and Control, Operations, and Technical Support and Infrastructure. Each department performs specific yet interrelated functions. The IT Business Support Department focuses on the management of *e-banking* services, process centralization, and implementation across branch offices. The Digital Development Department is responsible for the development of core and non-core applications, as well as the management of data warehouse and big data initiatives.

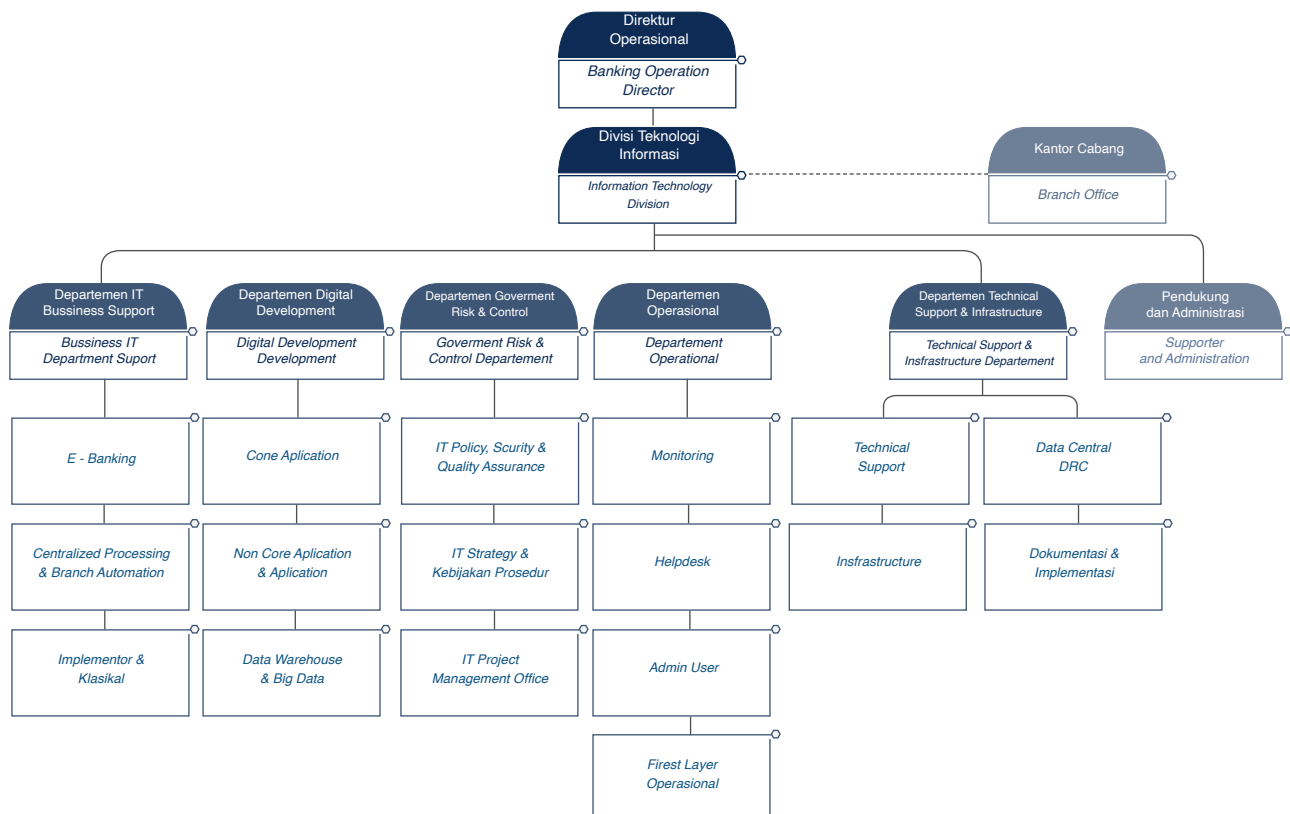


Sementara itu, Departemen *Governance Risk and Control* memastikan penerapan kebijakan TI, keamanan informasi, manajemen proyek, serta keselarasan strategi TI dengan arah bisnis Bank. Departemen *Operational* mendukung kelancaran operasional harian melalui fungsi monitoring, helpdesk, dan administrasi pengguna. Adapun Departemen *Technical Support and Infrastructure* bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur, dukungan teknis, serta keamanan data center dan disaster recovery center (DRC).

Struktur ini diperkuat dengan fungsi pendukung dan koordinasi dengan kantor cabang, sehingga memastikan implementasi teknologi berjalan optimal di seluruh jaringan operasional. Dengan struktur yang komprehensif ini, Divisi Teknologi Informasi mampu menjadi pilar utama dalam mendukung inovasi, efisiensi, serta keberlanjutan bisnis Bank Papua.

Meanwhile, the *Governance, Risk and Control Department* ensures the implementation of IT policies, information security, project management, and alignment between IT strategy and the Bank's business direction. The *Operations Department* supports day-to-day activities through monitoring, helpdesk services, and user administration functions. The *Technical Support and Infrastructure Department* is responsible for infrastructure management, technical support, and the security of the data center and disaster recovery center (DRC).

This structure is further strengthened by supporting functions and coordination with branch offices, ensuring optimal implementation of technology across the Bank's operational network. With this comprehensive structure, the *Information Technology Division* serves as a key pillar in driving innovation, operational efficiency, and the long-term sustainability of Bank Papua.



PROFIL PEMIMPIN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION PROFILE



ANDREAS DIDIK WIJAYANTA

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Information Technology Division
Leader

Kewarganegaraan
Citizenship
Indonesia

Domisili
Domicile
Jayapura, Papua, Indonesia.

Usia
Age
53 tahun

Riwayat Jabatan-Position History

Dasar Hukum Pengangkatan-Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi sejak 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi No.32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

He served as Information Technology Division Leader since February 27, 2017, based on Board of Directors Decree No.32.1/KEPEG/I/2017, dated January 20, 2017.

Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 10 Agustus 1993, dengan jabatan penting yang pernah diemban seperti
2. Spesialis Auditor TI-SKAI (2008-2010),
3. Spesialis Manajemen Risiko (2010-2011),
4. Quality Assurance (2011-2012),
5. Senior Spesialis TI Compliance, QA, User Respentati (2012),
6. Senior Spesialis Non-Core Application & Switching (2012-2016) dan
7. Kepala Cabang Kaimana (2016-2017).

Work Experience

1. *He started his career at Bank Papua as an employee on August 10, 1993, with essential positions held such as*
2. *TI-SKAI Auditor Specialist (2008-2010),*
3. *Risk Management Specialist (2010-2011),*
4. *Quality Assurance (2011-2012),*
5. *IT Senior Specialist Compliance, QA, User Respentati (2012),*
6. *Senior Specialist Non-Core Application & Switching (2012-2016) and*
7. *Head of Kaimana Branch (2016-2017).*

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Cendrawasih, Jayapura (2001).

History of Education

He holds a Bachelor of Management from Universitas Cendrawasih, Jayapura (2001)

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikat Cobit Foundation (2023)

Certification

1. *Level 6 Risk Management Certification from the Risk Management Certification Body*
2. *Cobit Foundation Certificate (2023)*



PROGRAM KERJA TI TAHUN 2025

Program kerja Divisi Teknologi Informasi Bank Papua tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat peran TI sebagai pilar strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan rencana bisnis Bank, serta menjawab dinamika kebutuhan industri perbankan digital. Penyusunan program kerja dilakukan melalui proses analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan hasil diskusi bersama pemangku kepentingan serta perkembangan tren teknologi yang semakin cepat dan disruptif.

Fokus utama program kerja tahun 2025 diwujudkan melalui penguatan 16 kapabilitas TI yang mencakup aspek adaptivitas, keandalan sistem, keamanan siber, hingga peningkatan kematangan TI (IT maturity). Divisi TI juga mendorong pengembangan budaya risiko digital (digital risk culture) dan peningkatan kesadaran digital (digital awareness) di seluruh lini organisasi, guna memastikan pengelolaan risiko yang lebih proaktif dan terintegrasi.

Di sisi layanan, program kerja difokuskan pada peningkatan pengalaman nasabah melalui penyediaan layanan yang real-time, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah (customer-centric). Hal ini diiringi dengan penguatan perlindungan nasabah (customer protection) serta penerapan prinsip integritas dan tata kelola yang baik.

Selain itu, Divisi TI terus meningkatkan kompetensi SDM, fleksibilitas sistem, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah (value creation) bagi bisnis Bank. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung efisiensi operasional, mitigasi risiko, serta menjaga keberlangsungan usaha Bank Papua secara berkelanjutan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

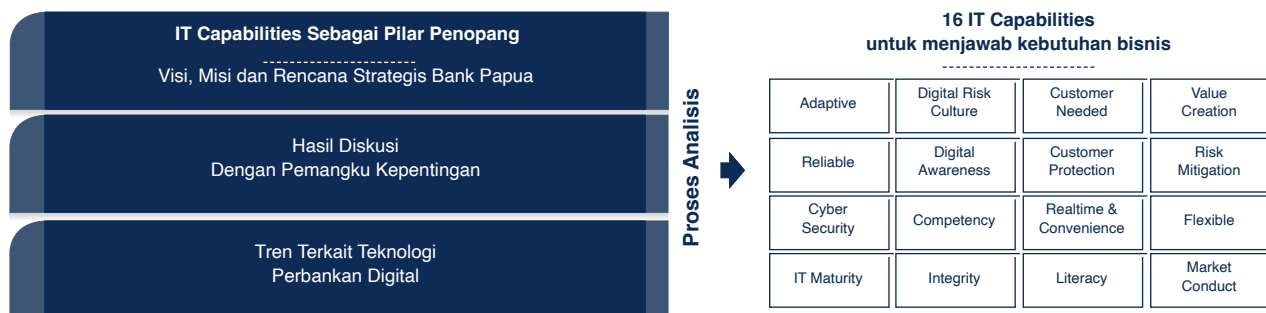
INFORMATION TECHNOLOGY WORK PROGRAM 2025

The 2025 work program of Bank Papua's Information Technology Division is directed toward strengthening the role of IT as a strategic pillar in supporting the achievement of the Bank's vision, mission, and business plan, while addressing the evolving dynamics of the digital banking industry. The work program is formulated through a comprehensive analytical process, taking into account inputs from stakeholders and the rapid and disruptive evolution of technology trends.

The primary focus of the 2025 work program is reflected in the enhancement of 16 IT capabilities, encompassing adaptability, system reliability, cybersecurity, and the improvement of IT maturity. The IT Division also promotes the development of a digital risk culture and the enhancement of digital awareness across all organizational levels, ensuring more proactive and integrated risk management.

From a service perspective, the work program emphasizes the enhancement of customer experience through the provision of real-time, accessible, and customer-centric services. This is complemented by strengthened customer protection and the implementation of sound governance and integrity principles.

In addition, the IT Division continues to enhance human capital competencies, system flexibility, and the ability to generate value creation for the Bank's business. All these initiatives are aimed at improving operational efficiency, strengthening risk mitigation, and ensuring the sustainable continuity of Bank Papua's business amid increasingly dynamic industry competition.



KOMPONEN IT *CAPABILITIES*

Adaptive	Memiliki kemampuan dalam penyesuaian terkait perkembangan teknologi.	<i>Possess the ability to adapt to technological developments.</i>
Reliable	Mampu menciptakan teknologi yang andal yang dapat memberikan manfaat terhadap seluruh <i>stakeholder</i> .	<i>Able to create reliable technology that benefits all stakeholders.</i>
Cyber Security	Memiliki sistem, kebijakan, prosedur, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset seluruh <i>stakeholder</i> dari berbagai ancaman.	<i>Have systems, policies, procedures, and security concepts that can be used to protect all stakeholders' assets from various threats.</i>
IT Maturity	Memiliki tingkat maturitas proses Tata Kelola TI yang baik berdasarkan standar yang ada.	<i>Have a strong maturity level of IT Governance processes based on existing standards.</i>
Digital Risk Culture	Menanamkan budaya risiko dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan.	<i>Instill a risk culture in every decision-making process.</i>
Digital Awareness	Memiliki kesadaran terhadap keterampilan, sikap, dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi informasi.	<i>Possess awareness of the skills, attitudes, and knowledge in the use of information technology.</i>
Competency	Memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap yang tepat dalam melaksanakan seluruh proses bisnis yang ada.	<i>Possess the appropriate abilities, skills, and attitudes in carrying out all existing business processes.</i>
Integrity	Memiliki konsistensi dan integritas dalam penggunaan teknologi informasi.	<i>Demonstrate consistency and integrity in the use of information technology.</i>
Customer Needed	Memahami kebutuhan <i>customer</i> baik dari segi fitur dan layanan yang mampu mempengaruhi keputusan nasabah untuk bertransaksi.	<i>Understand customer needs, both in terms of features and services that can influence customer transaction decisions.</i>
Customer Protection	Mengedepankan perlindungan terhadap data nasabah, sehingga nasabah merasa aman dalam menggunakan layanan teknologi informasi.	<i>Prioritize customer data protection, so customers feel secure when using information technology services.</i>
Real Time & Convenience	Teknologi Informasi yang dikembangkan dapat diakses secara mudah dan realtime sehingga dapat memudahkan bagi <i>stakeholder</i> .	<i>Developed information technology can be accessed easily and in real time, making it easier for stakeholders.</i>
Literacy	Memberikan kemudahan bagi organisasi dan nasabah untuk memahami digitalisasi yang diterapkan.	<i>Provide ease of understanding for the organization and customers in implementing digitalization.</i>
Value Creation	Mampu menciptakan nilai tambah dengan adanya digitalisasi didalam proses bisnis.	<i>Able to create added value through digitalization in business processes.</i>
Risk Mitigation	Berupaya untuk mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menemukan solusi untuk meminimalisasi terjadinya risiko.	<i>Strive to consider potential risks and find solutions to minimize them.</i>
Flexible	Memiliki kecakapan dan penyesuaian secara cepat dan tepat dalam melakukan pengembangan teknologi.	<i>Possess the ability to adapt quickly and accurately to technology development.</i>
Market Conduct	Menyusun alur pemberian layanan mulai dari mendesain produk/layanan, melakukan penawaran, hingga penanganan complain nasabah.	<i>Develop service delivery flows, from product/service design and through to offering and handling customer complaints.</i>



STRATEGI TI UNTUK PENCAPAIAN PROGRAM KERJA

1. Kerangka Rencana Strategis TI

1.1. Framework Elaborasi Corporate Plan Bank Papua ke dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi

Pengembangan RSTI 2023-2027 mengacu pada Corporate Plan Bank Papua 2023-2027 (selanjutnya disebut iCoreplan). Sasaran tahun 2023-2027 adalah penguatan fondasi, akselerasi pertumbuhan, dan kepemimpinan pasar. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bank Papua direncanakan akan mengalami tiga fase strategi perkembangan dengan tema tahunan yang sesuai dengan aktivitas prioritas pada masing-masing tahun.

Kebutuhan dalam Coreplan diterjemahkan menjadi kapabilitas fungsional untuk mengidentifikasi inisiatif bagi fungsi bisnis utama di Bank Papua. RSTI berfokus pada pengembangan IT Capabilities, di mana IT Capabilities adalah kapabilitas yang akan dikembangkan oleh Bank Papua untuk memenuhi solusi fungsional, dan IT Enablers merupakan fondasi yang harus ada untuk dapat diterapkan/diadopsi dalam membangun IT Capabilities. Inisiatif dalam membangun kapabilitas fungsional dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan implementasi TI, Enhancement sistem TI, serta pengelolaan kapasitas untuk mendukung inisiatif strategis.

IT STRATEGY FOR ACHIEVING THE WORK PROGRAM

1. IT Strategic Planning Framework

1.1 Framework for Translating Bank Papua's Corporate Plan into the Information Technology Strategic Plan

The development of the Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2023–2027 refers to Bank Papua's Corporate Plan 2023–2027 (hereinafter referred to as the "Corporate Plan"). The strategic objectives for the period 2023–2027 include strengthening the foundation, accelerating growth, and achieving market leadership. To achieve these objectives, Bank Papua is projected to undergo three phases of strategic development, each with annual themes aligned with the priority initiatives for each respective year.

The requirements outlined in the Corporate Plan are translated into functional capabilities to identify initiatives for the Bank's core business functions. The ITSP focuses on the development of IT Capabilities, where IT Capabilities represent the competencies to be developed by Bank Papua to fulfill functional solutions, while IT Enablers serve as the foundational elements required to support the implementation and adoption of such capabilities.

Initiatives to develop these functional capabilities are executed through IT development and implementation activities, system enhancements, and capacity management to support the Bank's strategic initiatives.

Penguatan Fondasi 2023 – 2024		Akselerasi Pertumbuhan 2025-2026		Pemimpin Pasar	
FASE I	Membangun proses pendukung (Governance, Risk, & Compliance) dan permodalan yang kuat, disertai kualitas SDM, budaya kerja, dan sistem informasi yang handal melalui sinergi Grup BPD sebagai dasar pertumbuhan di Fase II	FASE II	Bertumbuh lebih cepat dengan memperkuat proses bisnis inti, memasuki segmen kredit komersial, memperkuat pinjaman sindikasi, dan intensifikasi sinergi Grup BPD serta pementapan corporate culture.	FASE III	Membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi Grup BPD sehingga BPD berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah



FASE I: PENGUATAN FONDASI 2023 – 2024

Membangun proses pendukung (*Governance, Risk, & Compliance*) dan permodalan yang kuat, disertai kualitas SDM, budaya kerja, dan sistem informasi yang handal melalui sinergi Grup BPD sebagai dasar pertumbuhan di Fase II.

FASE II: AKSELERASI PERTUMBUHAN 2025-2026

Bertumbuh lebih cepat dengan memperkuat proses bisnis inti, memasuki segmen kredit komersial, memperkuat pinjaman sindikasi, dan intensifikasi sinergi Grup BPD serta pemantapan *corporate culture*.

FASE III: PEMIMPIN PASAR

Membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi Grup BPD sehingga BPD berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.

1. Akselerasi pertumbuhan kredit secara organik, *channeling/linkage* dan anorganik (*aset buy*, opsional) kredit UMKM di atau terkait langsung dengan Tanah Papua.
2. Pengembangan dan intensifikasi program penjualan produk dana (tabungan) dan kredit untuk akselerasi pertumbuhan kredit produktif UMKM, turunan/afiliasi *captive market* (Pemda dan ASN), non ASN, dan kredit UMB/ korporasi.
3. Penyempurnaan berkelanjutan *value proposition* produk dana dan kredit (termasuk *value proposition* berbasis *green financing*), termasuk perluasan ekosistem/kapabilitas layanan perbankan dengan *platform eCommerce* pihak ketiga.
4. Perluasan basis customer segmen purna karya, *consumer* non ASN, dan segmen produktif melalui pengembangan dan intensifikasi program pemasaran (*brand* dan *product marketing*).
5. Penguatan *competitive advantage* bisnis dengan basis ekosistem *captive market* (Pemda, ASN, dan turunan/afiliasinya melalui intensifikasi hubungan kelembagaan dan program *customer loyalty*).
6. Penguatan penerapan manajemen risiko (*3 lines of defence*) dan manajemen kepatuhan.
7. Penguatan penerapan *sustainable finance* pada kebijakan/ pedoman perusahaan bidang bisnis dan

PHASE I: STRENGTHENING THE FOUNDATION 2023 – 2024

Establishing strong supporting processes (Governance, Risk, and Compliance) and capital structure, supported by high-quality human capital, a robust corporate culture, and reliable information systems through BPD Group synergy, as the foundation for growth in Phase II.

PHASE II: GROWTH ACCELERATION 2025 – 2026

Accelerating growth by strengthening core business processes, entering the commercial lending segment, enhancing syndicated loans, intensifying BPD Group synergy, and reinforcing the corporate culture.

PHASE III: MARKET LEADERSHIP

Establishing a market leadership position supported by strong core and supporting capabilities through BPD Group transformation, enabling a significant contribution to regional economic development.

1. Acceleration of loan growth through organic expansion, *channeling/linkage* programs, and inorganic strategies (including *asset acquisition*, where applicable), particularly MSME financing in or directly related to Papua;
2. Development and intensification of funding (savings) and lending product sales programs to accelerate productive MSME loan growth, including *captive market segments* (Regional Governments and civil servants), non-civil servants, and corporate/commercial lending segments;
3. Continuous enhancement of the *value proposition* of funding and lending products (including *green financing-based value propositions*), as well as expansion of the banking service ecosystem and capabilities through third-party e-commerce platforms;
4. Expansion of the customer base across pensioners, non-civil servant consumers, and productive segments through the development and intensification of marketing programs (branding and product marketing);
5. Strengthening business competitive advantage through a *captive market ecosystem* (Regional Governments, civil servants, and their affiliates) via intensified institutional relationships and customer loyalty programs;
6. Strengthening the implementation of risk management (three lines of defense) and compliance management;
7. Strengthening the implementation of sustainable finance



pendukung.

8. Penguatan berkelanjutan *corporate culture* dan turunannya (*risk, compliance, credit, sales culture*).
9. Penguatan penerapan sistem manajemen kinerja unit dan personil.
10. Penguatan penerapan sistem remunerasi berbasis bisnis.
11. Peningkatan berkelanjutan kapabilitas personil bisnis kredit produktif, marketing, dan sales, audit dan *risk management*.
12. Penataan cabang sebagai sentra kredit dan peningkatan kapasitas *sales* (dana dan kredit UMKM).
13. Penyempurnaan organisasi untuk peningkatan efektifitas eksekusi inisiatif strategis.
14. Penguatan kapabilitas IT untuk perluasan bidang layanan digital bisnis lanjutan dan bidang operasional/pendukung.
15. Penguatan kapabilitas pengendalian keuangan.
16. Penguatan Kapabilitas dan intensifikasi pemulihan dan penyelesaian NPL dan kredit hapus buku.

1.2. Thematic Timeline Rencana Strategis Teknologi Informasi

Untuk memastikan seluruh objektif rencana strategis TI dapat tercapai, maka RSTI ini membagi sasaran strategis TI ke dalam 3 thematic timeline, sebagai berikut:

Untuk memastikan seluruh objektif rencana strategis TI

across business and supporting policies/guidelines;

8. *Continuous reinforcement of corporate culture and its derivatives (risk, compliance, credit, and sales culture);*
9. *Strengthening the implementation of performance management systems at both unit and personnel levels;*
10. *Strengthening the implementation of performance-based remuneration systems;*
11. *Continuous enhancement of personnel capabilities in productive lending, marketing and sales, audit, and risk management;*
12. *Optimization of branch offices as lending centers and enhancement of sales capacity (funding and MSME lending);*
13. *Organizational refinement to improve the effectiveness of strategic initiative execution;*
14. *Strengthening IT capabilities to expand advanced digital business services and operational/support functions;*
15. *Strengthening financial control capabilities;*
16. *Strengthening capabilities and intensifying the recovery and resolution of non-performing loans (NPL) and written-off loans.*

1.2 Thematic Timeline of the Information Technology Strategic Plan

To ensure that all objectives of the IT Strategic Plan are achieved, the ITSP divides its strategic targets into three thematic timelines, as follows:

To ensure all IT strategic plan objectives		
Base Strengthening	Growth Acceleration	Focus Experience
2023-2024	2025-2026	2027
Membangun fondasi untuk mendukung proses digitalisasi Bank Papua	Membangun dan melengkapi layanan TI untuk dapat melayani seluruh ekosistem	Nasabah harus merasa terikat dan senang saat menggunakan layanan digital Bank Papua

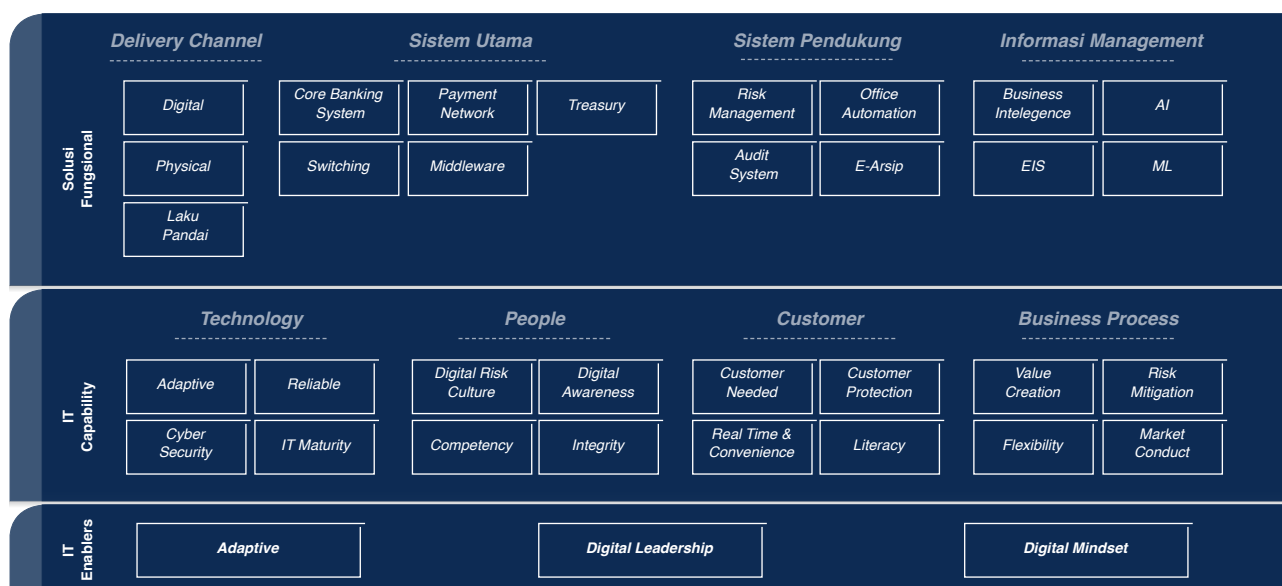


Base Strengthening 2023 – 2024	Growth Acceleration 2025-2026	Focus Experience 2027
Membangun fondasi untuk mendukung proses digitalisasi Bank Papua	Membangun dan melengkapi layanan TI untuk dapat melayani seluruh ekosistem	Nasabah harus merasa terikat dan senang saat menggunakan layanan digital Bank Papua



IT ENABLER SEBAGAI FONDASI UNTUK MEMBANGUN IT CAPABILITIES

IT CAPABILITIES & ENABLER



Solusi Fungsional			
Delivery Channel	Sistem Utama	Sistem Pendukung	Information Management
Digital Physical Laku Pandai	Core Banking System Payment Network Treasury Switching Middleware	Risk Management Office Automation Audit System E-Arsip	Information Management Business Intelligence AI EIS ML



IT Capabilities			
Technology	People	Customer	Business Process
1. Adaptive 2. Reliable 3. Cyber Security 4. IT Maturity	1. Digital Risk Culture 2. Digital Awareness 3. Competency 4. Integrity	1. Customer Needed 2. Customer Protection 3. Real Time & Convenience 4. Literacy	1. Value Creation 2. Risk Mitigation 3. Flexible Market 4. Conduct
IT Enablers			
Digital GRC	Digital Leadership	Digital Mindset	

1.2.1. Digital GRC

Dalam mendukung terciptanya transformasi digital Bank Papua, salah satunya adalah dengan menerapkan Digital GRC. Dalam penerapan Digital GRC, Bank Papua perlu mengimplementasikan *control* terkait IT GRC, Data Governance, dan Cyber Security.

Penerapan Digital GRC mengedepankan kontrol-kontrol yang harus didukung guna mencapai *framework* dan panduan implementasi *Governance, Risk, and Compliance* yang terintegrasi untuk mendukung inovasi dan perbaikan dalam upaya transformasi digital yang efektif dan efisien. Langkah penerapannya membutuhkan kolaborasi yang baik antara seluruh unit kerja maupun *stakeholder* yang terdapat di Bank Papua.

Manfaat Digital GRC

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penerapan tata kelola TI yang berfungsi sebagai faktor penentu keberhasilan perusahaan.

Memastikan bahwa setiap sumber daya manusia, proses bisnis, dan teknologi yang dimiliki oleh Bank dapat menghasilkan manfaat yang maksimal, mengoptimalkan pengendalian risiko, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bank.

GRC menjadi lebih mudah diterapkan dalam berbagai aspek.

Konsep Penerapan Digital GRC



1.2.2. Digital Leadership

Untuk mendukung terwujudnya transformasi digital di Bank Papua, salah satu fondasi yang perlu dimiliki yaitu dengan adanya SDM yang memiliki kemampuan mengenai *digital leadership*.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

1.2.1 Digital GRC

In supporting the realization of Bank Papua's digital transformation, one of the key initiatives is the implementation of Digital Governance, Risk, and Compliance (Digital GRC). Under this framework, the Bank is required to implement controls related to IT GRC, Data Governance, and Cybersecurity.

The implementation of Digital GRC emphasizes the establishment of integrated controls to achieve a comprehensive Governance, Risk, and Compliance framework and implementation guidelines. This integrated approach supports innovation and continuous improvement in driving an effective and efficient digital transformation. Its implementation requires strong collaboration among all business units and stakeholders across Bank Papua.

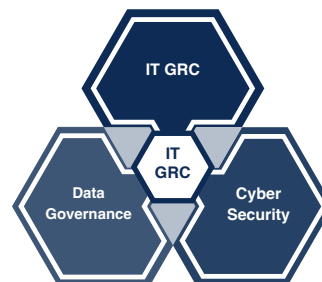
Benefits of Digital GRC

Enhances efficiency and effectiveness in IT governance implementation, which serves as a key success factor for the Bank;

Ensures that human capital, business processes, and technology resources deliver optimal value, while strengthening risk controls and resource optimization;

Facilitates the consistent and effective application of GRC across various operational aspects.

Concept of Digital GRC Implementation



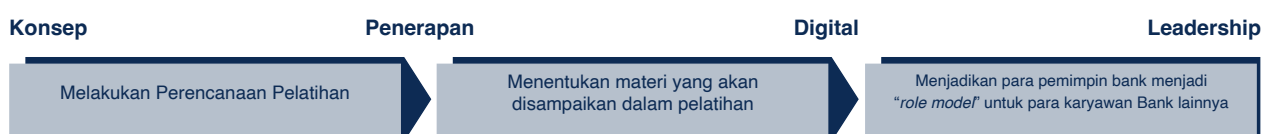
1.2.2 Digital Leadership

To support the realization of digital transformation at Bank Papua, one of the key foundations is the availability of human capital equipped with digital leadership capabilities.

Manfaat *Digital Leadership*

- Menumbuhkan *digital culture* bagi Bank yang memungkinkan seluruh karyawan dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal.
- Meningkatkan efektifitas dalam kegiatan operasional, karena didukung oleh pemimpin yang mampu menggerakkan karyawan untuk memanfaatkan teknologi.
- Meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan Bank dengan adanya efisiensi proses.

Konsep Penerapan *Digital Leadership*



1.2.3. *Digital Mindset*

Dalam mendukung terciptanya transformasi *digital* di Bank Papua, perlu adanya dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam perkembangan teknologi digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap informasi, serta efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Digital mindset dapat diartikan sebagai pola pikir untuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital, di mana seluruh insan Bank Papua berpartisipasi dalam penggunaan teknologi tersebut, bukan sekadar mengetahui keberadaannya. *Best practice* yang digunakan sebagai kajian adalah *Cobit 2019* dan *CCMI*. Keduanya umum digunakan untuk mengidentifikasi standar kriteria, metrik, dan parameter maturitas untuk *digital mindset*, sehingga Bank Papua dapat menentukan upaya yang harus ditempuh dalam membangun *digital mindset*.

Manfaat *Digital Mindset*

- Berkembangnya keahlian dan kemampuan *digital* pada setiap insan Bank Papua sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan.
- Memungkinkan terjadinya kolaborasi dan pengembangan *skill digital*.
- Meningkatkan otorisasi dan akuntabilitas *leader* yang membawahi transformasi *digital*.

Konsep Penerapan *Digital Mindset*

Dalam menerapkan *Digital Mindset* dan mencapai *economies of scale*, Bank Papua akan mengadopsi *improvement* dan *innovation* yang berpusat pada penerapan teknologi *digital*.

Benefits of *Digital Leadership*

- *Fosters a strong digital culture within the Bank, enabling employees to leverage technology optimally;*
- *Improves operational effectiveness through leadership that drives employees to adopt and utilize technology;*
- *Enhances customer satisfaction through more efficient processes and improved service delivery.*

Concept of *Digital Leadership Implementation*

1.2.3 *Digital Mindset*

To support the realization of digital transformation at Bank Papua, it is essential to have human capital equipped with the capabilities to keep pace with the advancement of digital technology. This is aimed at improving access to information, as well as enhancing efficiency and effectiveness in performing daily activities.

A digital mindset can be defined as a way of thinking that maximizes the utilization of digital technology, whereby all employees of Bank Papua actively participate in its use, rather than merely being aware of its existence. The best practices adopted as references include *COBIT 2019* and *CCMI*, both of which are widely used to identify standards, criteria, metrics, and maturity parameters for digital mindset. These frameworks enable Bank Papua to determine the appropriate initiatives required to develop a robust digital mindset.

Benefits of *Digital Mindset*

- *Enhances digital skills and capabilities of all Bank Papua employees, enabling them to adapt more effectively to change;*
- *Facilitates collaboration and the continuous development of digital competencies;*
- *Strengthens leadership accountability and authority in driving digital transformation initiatives.*

Concept of *Digital Mindset Implementation*

In implementing a Digital Mindset and achieving economies of scale, Bank Papua will adopt continuous improvement and innovation centered on the utilization of digital technology.



INISIATIF RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI (RSTI) TAHUN 2024

Berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Bank Papua di Tahun 2025 atas Rencana Strategis Tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang telah diterapkan tetap relevan dan efektif dalam mendukung visi dan misi Bank Papua, khususnya di era transformasi digital yang terus berkembang.

Maka didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC PLAN (ITSP) INITIATIVES 2024

Based on the evaluation of Bank Papua's Information Technology Strategic Plan (ITSP) conducted in 2025 on the prior year's strategic plan, which aims to ensure that the implemented strategies remain relevant and effective in supporting the Bank's vision and mission—particularly in the continuously evolving digital transformation landscape—

the following key observations have been identified:

	Sudah Terlaksana	Sedang dalam proses	Belum terlaksana	Total
Teknologi	6	1	3	10
People	1	1	0	2
Proses	3	0	0	3
Total	10	2	3	15
	67%	13%	20%	

Rincian Proyek Tahun 2025 : Sudah Terlaksana

Details of 2025 Projects: Completed

NO		PROGRAM	PROGRAM
1	Teknologi	Implementasi EIS (Executive Information System)	EIS (Executive Information System) Implementation
2	Teknologi	Implementasi Aplikasi Pengelolaan Data melalui BI Tools Analytic (Tableau)	Data Management Application Implementation through BI Analytic Tools (Tableau)
3	Teknologi	Pengembangan Produk e-channel Digital Banking Secara Optimal	Optimizing Digital Banking e-channel Product Development
4	Teknologi	Pengembangan dan Penyempurnaan Surrounding Transaksional dan QPAP	Development and Improvement of Transactional Surrounding and QPAP
5	Teknologi	Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Regulator	Development and Improvement of Regulatory Applications
6	Teknologi	Optimalisasi Security Operation Center	Security Operation Center Optimization
7	People	Pelaksanaan Workload Analysis (WLA) dan Training Need Analysis (TNA) untuk Personel TI	Workload Analysis (WLA) and Training Needs Analysis (TNA) for IT Personnel
8	Proses	Pelaksanaan Review Risk Register & Risk Profile TI	IT Risk Register & Risk Profile Review
9	Proses	Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kapabilitas	Capability Level Assessment Implementation Review
10	Proses	Review Pelaksanaan IT Strategic Plan 2023-2027	IT Strategic Plan 2023-2027 Implementation

Rincian Proyek Tahun 2025 : Sedang Dalam Proses

Details of 2025 Projects: In Progress

NO	PROGRAM	INISIATIF PROGRAM	Program Initiative
1	Teknologi	Penetration Testing Jaringan Aplikasi Bank Papua	Application Network Penetration Testing for Bank Papua
2	People	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM TI	Enhancement of IT Human Capital Quality and Capacity



Rincian Proyek Tahun 2025 : **Belum dilaksanakan****Details of 2025 Projects: Not Yet Implemented**

NO	PROGRAM	INISIATIF PROGRAM	Program Initiative
1	Teknologi	Implementasi Aplikasi e-Collateral	Implementation of e-Collateral Application
2	Teknologi	Implementasi Sistem Monitoring Penilaian Kualitas Kredit	Implementation of Credit Quality Monitoring System
3	Teknologi	Implementasi Analisa Kredit Digital	Implementation of Digital Credit Analysis

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan maka dengan ini kami sampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergi untuk menyelesaikan inisiatif project yang telah disusun dengan cepat dan akurat.
2. Alokasi project yang menumpuk dan terbawa ke tahun berikutnya terjadi karena ditemukan kompleksitas masalah proyek TI.
3. Minimnya pengetahuan perencanaan anggaran untuk inisiatif teknologi harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga yakin dapat dilaksanakan dengan anggaran yang telah disediakan.
4. Apabila terdapat project dengan kompleksitas tinggi perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi sebelum dilakukan inisiasi.
5. Perubahan prioritas strategis, apabila terdapat rencana diluar RSTI maka ini dapat menunda inisiatif yang telah direncanakan.
6. Hambatan dari vendor teknologi dalam pengembangan juga dinilai dapat menjadi penyebab pelaksanaan proyek.
7. Penggunaan tools manajemen project belum maksimal sehingga harus ditingkatkan lagi untuk semua unit kerja terkait yang terlibat dalam tim project guna monitoring project.
8. Kurangnya personil di unit tata kelola TI.

Key Findings from the IT Strategic Plan Evaluation

Based on the evaluation conducted, we hereby present the following key observations:

1. *Insufficient synergy in the timely and accurate execution of the established project initiatives;*
2. *The accumulation and carry-over of project allocations into subsequent years due to the identified complexity of IT projects;*
3. *Limited capability in budget planning for technology initiatives, which should be carefully developed to ensure alignment with the allocated budget and successful execution;*
4. *Projects with high complexity require more in-depth assessment prior to initiation;*
5. *Changes in strategic priorities, including initiatives outside the IT Strategic Plan (ITSP), may delay previously planned initiatives;*
6. *Constraints from technology vendors in the development process are also identified as contributing factors affecting project execution;*
7. *The utilization of project management tools has not been fully optimized and needs to be enhanced across all relevant units involved in project teams to support effective project monitoring;*
8. *Limited personnel within the IT governance unit.*

PRODUK DAN LAYANAN DIGITAL YANG DILUNCURKAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua terus memperkuat transformasi digital melalui peluncuran berbagai produk dan layanan berbasis teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan secara inklusif di seluruh wilayah operasional. Dengan mengedepankan prinsip customer-centric dan pemanfaatan teknologi terkini, pengembangan produk dan layanan digital menjadi langkah strategis Bank dalam menciptakan nilai tambah serta memperkuat daya saing di era perbankan digital.

DIGITAL PRODUCTS AND SERVICES LAUNCHED IN 2025

Throughout 2025, Bank Papua continued to strengthen its digital transformation through the launch of various innovative, technology-based products and services aligned with customer needs. These initiatives are aimed not only at enhancing the convenience, speed, and security of transactions, but also at expanding inclusive access to financial services across all operational areas.



No	Nama Aplikasi	Deskripsi
1.	Cash Recycling Machine (CRM)	Implementasi mesin <i>Cash Recycling Machine (CRM)</i> .
2.	Kartu Kredit Indonesia (KKI) <i>Card base</i> .	Implementasi Layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) <i>Card base</i> pada: - Provinsi Papua; - Pemerintah Kota Jayapura; - Pemerintah Kab. Manokwari.
3.	Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), termasuk: - SP2D <i>Online</i> pada: - Σ Pemerintah Provinsi Papua; - Σ Pemerintah Kota Jayapura; - Σ Pemerintah Kab. Mimika; - Σ Pemerintah Kab. Biak Numfor; - Σ Pemerintah Kab. Supiori; - Σ Pemerintah Kab. Sarmi. - <i>Payment</i> Pajak Retribusi Daerah 2025 : - Σ Pemerintah Kab. Raja Ampat; - Σ Pemerintah Kab. Paniai; - Σ Pemerintah Kab. Boven Digoel.
4.	SIRENA (Simanja Rencana)	

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN TI TAHUN 2026

Memasuki tahun 2026, Bank Papua menetapkan arah pengembangan Teknologi Informasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan bisnis serta nasabah. Program pengembangan TI difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan layanan digital yang inovatif dan andal.

IT DEVELOPMENT PROGRAM PLAN FOR 2026

Entering 2026, Bank Papua has established a more adaptive, integrated, and business- and customer-oriented direction for its Information Technology development. The IT development program is focused on strengthening infrastructure, enhancing cybersecurity, and advancing innovative and reliable digital services.

No	Nama Aplikasi / Infrastruktur Bank	Deskripsi	Jenis Pengembangan
1.	Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah	KKI QRIS Base, KKI Acquirer	Baru
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Integrasi SIPD	Upgrade
3.	Digital Lending Bank Papua	Pengembangan & Penambahan fitur	Upgrade
4.	Bank Devisa	Pengembangan Bank Devisa	Baru
5.	Pengembangan Fitur Kanal New Mobile Banking	Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Upgrade
6.	Aplikasi Paperless	Sistem aplikasi surat menyurat, Disposisi, arsip digital	Baru
7.	HCMS	Aplikasi sistem informasi Manajemen Modal Manusia	Baru
8.	E-Procurement	Aplikasi Pengadaan Divisi Umum	Baru
9.	Aplikasi Monitoring ATM, CRM, EDC	Pengadaan Sistem Aplikasi dan monitoring EDC	Baru
10.	Aplikasi Helpdesk TI	Pengadaan Sistem Aplikasi	Baru
11.	Pengembangan dan Implementasi New SMS Banking & USSD Banking & Sms Notifikasi	Pengembangan Delivery Channel	Baru
12.	Pengembangan Middleware Utama dan Management Open API SNAP, Enhanced <i>Switching</i>	Pengembangan API dan revamping <i>Switching</i> /ATM Controller	Upgrade
13.	Mini ATM Pada Mesin EDC	Pengembangan & Penambahan Fitur	Baru



No	Nama Aplikasi / Infrastruktur Bank	Deskripsi	Jenis Pengembangan
14	Customer Onboarding <i>Online</i> (pada New Mobile Banking)	peningkatan keamanan face recognition pada papua mobile	Baru
15	Pentest Jaringan dan Aplikasi Bank Papua	Pengembangan Pengamanan sistem TI	Baru
16	Konsultan Pengembangan DC dan DRC Bank Papua	Konsultan DC dan DRC Standar Tier Bank Papua	Baru
17	Aplikasi Quality Assurance	Pengadaan & Implementasi Sistem Aplikasi	Baru
18	Aplikasi Monitoring Insiden Siber	Pengadaan & Implementasi Sistem	Baru
19	FDS/FMS (Fraud Detection System/ Fraud Management System)	Enhancement Aplikasi/tools perangkat pemantauan Fraud	Baru
20	Aplikasi Etchical Hacker Bank Papua	Pengadaan & Implementasi Sistem	Baru
21	Active Directory Domain System (ADDS) Bank Papua	Active Directory Domain System (ADDS) adalah layanan direktori yang digunakan untuk mengelola identitas pengguna, perangkat, dan sumber daya jaringan secara terpusat dalam lingkungan domain.	Baru
22	Rencana Pemindahan DRC Abepura ke DC Serpong atau DRC Surabaya	Rencana Pemindahan Infrastruktur DRC Abepura	Baru
23	Pemutakhiran perangkat security pada DC dan DRC sesuai perkembangan Teknologi Informasi	"Pengamanan Infrastruktur TI (Web Application Firewall, Log analyzer, dan Firewall) untuk DC dan DRC	Upgrade
24	Darkweb Monitoring Service	Lisensi Tools Threat intelagent darkweb	Upgrade
25	Tools Log VPN	Aplikasi Tools memonitor VPN (PAM)	Upgrade
26	Upgrade router main Bank Papua	Peremajaan perangkat baru router utama Bank Papua	Baru
27	Data Leak Prevention Tools	Aplikasi yang mendeteksi, mencegah, dan mengelola kebocoran data	Baru
28	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	SDWAN dan Restricted Internet	Upgrade
29	Perpanjangan Lisensi Endpoint Security	Pengembangan Pengamanan Infrastruktur TI	Upgrade
30	Penggantian Perangkat/periperal PC Kerja Kantor Cabang	Penggantian perangkat PC Kerja / periperal di kantor cabang pendukung untuk mengakomodir penerapan instalasi antivirus, ADDS, dll	Baru
31	Upgrade Infrastruktur DC dan DRC Bank Papua	Pengembangan DC dan DRC Bank Papua	Upgrade
32	Penambahan atau Pembaharuan Lisensi Microsoft Corporate Bank Papua	Lisensi MicroSoft Office dan Operating System Windows untuk Personal Computer (naik ke win 11 or higher)	Upgrade
33	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Regulator (BI,OJK, PPATK, dll.)	Pengembangan Aplikasi Mengikuti ketentuan Regulator (BI,OJK, PPATK, dll.)	Upgrade
34	Pengembangan Datafarm Lanjutan	Pengembangan Datafarm Lanjutan dengan Machine Learning / AI	Upgrade
35	Resertifikasi ISO27001	Resertifikasi ISO27001	Baru
36	Pengembangan Paket Terbaik Telkomsel / OMNI Channel	Pengembangan Pada Mobile Banking Bank Papua	Baru
37	Pengembangan Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan	Enhancement Kanal Bayar BPJS Kesehatan	Baru



No	Nama Aplikasi / Infrastruktur Bank	Deskripsi	Jenis Pengembangan
38	Pengembangan Sistem Siskeudes	Sistem aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Baru

BIAYA INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua merealisasikan investasi Teknologi Informasi sebesar Rp175.253 juta, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp265.570 juta, namun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp162.130 juta. Penyesuaian ini mencerminkan strategi Bank dalam mengoptimalkan belanja TI secara lebih selektif dan berorientasi pada prioritas kebutuhan bisnis serta peningkatan efisiensi.

Tahun	Nilai Investasi (Rp. Juta)
2025	175.253
2024	265.570
2023	162.130

Investasi tersebut tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur, pengembangan layanan digital, serta peningkatan keamanan sistem untuk mendukung operasional yang andal dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan investasi yang lebih efektif, Bank Papua mampu menjaga momentum transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Bank Papua semakin siap menghadapi tantangan industri perbankan digital melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta penguatan manajemen risiko berbasis teknologi, sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing secara berkelanjutan.

PENINGKATAN KOMPETENSI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia pada Divisi Teknologi Informasi sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Peningkatan kompetensi difokuskan pada penguasaan teknologi terkini, keamanan siber, serta pengelolaan sistem yang andal dan terintegrasi. Melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapabilitas, Bank memastikan

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT EXPENDITURE

Throughout 2025, Bank Papua realized Information Technology investment of Rp175,253 million, representing a decrease compared to 2024 of Rp265,570 million, yet remaining higher than the 2023 level of Rp162,130 million. This adjustment reflects the Bank's strategy to optimize IT spending in a more selective manner, with a strong focus on business priorities and operational efficiency improvements.

The investment remained focused on strengthening infrastructure, developing digital services, and enhancing system security to support reliable and sustainable operations. Through more effective investment management, Bank Papua has been able to maintain the momentum of its digital transformation while upholding prudent principles.

Bank Papua is increasingly well-positioned to address the challenges of the digital banking industry through improvements in service quality, operational efficiency, and technology-based risk management, thereby creating added value and strengthening its long-term competitiveness.

ENHANCEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION COMPETENCIES IN 2025

Throughout 2025, Bank Papua continued to strengthen the competencies of its Information Technology Division as part of its commitment to supporting sustainable digital transformation. Competency development was focused on mastering emerging technologies, enhancing cybersecurity capabilities, and managing reliable and integrated systems. Through various training programs, certifications, and capability development initiatives, the Bank ensures



kesiapan SDM TI dalam menghadapi dinamika industri perbankan digital yang semakin kompleks, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional.

that its IT human capital is well-prepared to address the increasingly complex dynamics of the digital banking industry, while simultaneously improving service quality and operational effectiveness.

Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Andreas Didik Wijayanta	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Workshop "Kebijakan Dan Aspek Hukum Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Instansi Pemerintah, Badan Layanan Publik, Korporasi & Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022	"Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta"	Rab, 15 Jan 2025	Kam, 16 Jan 2025	Lembaga Informasi Peraturan Publik (Lipp)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Jacob Kafiar	Pemimpin Departemen It Business Support	Bimbingan Teknis Forum Siber Ctis (Cyber Threat Information Sharing)	Hotel Santika Bogor	Sen, 16 Jun 2025	Sel, 17 Jun 2025	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Daud Rumaropen	Pemimpin Departemen Governance Risk Dan Control	Kepemimpinan Digital Di Perbankan: Memimpin Dalam Era Transformasi Digital	"Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura"	Sen, 24 Feb 2025	Sen, 24 Feb 2025	Lembaga Edukasi Dan Akuntabilitas
		Ext - Audit Sistem Informasi Berbasis Cobit Batch 2	Ayaartta Hotel Malioboro Yogyakarta	Rab, 08 Okt 2025	Kam, 09 Okt 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Indra Wibhawa	Pemimpin Departemen Technical Support Dan Infrastruktur	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikasi Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Ext - Vmware Data Center Visualization	Gedung Informit Tm Bandung	Sen, 22 Sep 2025	Sel, 23 Sep 2025	Cv Informit Indonesia
Agus Purnama	Pemimpin Departemen Operasional	Ext - Public Training Audit Sistem Informasi Berbasis Cobit	Yogyakarta	Rab, 24 Sep 2025	Kam, 25 Sep 2025	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Agustinus Pamungkas Sumardjono	Pemimpin Departemen Digital Development	Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Kabul Agus Budiman	Manager Help Desk	Ext-Query Microsoft Sql Server	Kantor Inixindo Jogja	Rab, 06 Agu 2025	Kam, 07 Agu 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Minardi Pangapul Setiabudi Butarbutar	Manager Core Application	Ext - Implementasi Git Repository Pada Server On Permise	"Hotel Grand Picasso, Jakarta Pusat"	Rab, 06 Agu 2025	Kam, 07 Agu 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Sriyanto	E-Banking	Iht - Eksternal Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Kkpd) : Pengelolaan Kredit Apbd Yang Efektif Dalam Moderenisasi Keuangan	"Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura"	Sel, 08 Apr 2025	Rab, 09 Apr 2025	Infobank Institute
		Ext - Fraud Detection System (Fds) Menggunakan Metode Artifial Intelegence (Ai) & Machine Learning (MI)	Hotel El Royale Yogyakarta, "Arion Swissbell Hotel, Bandung"	Rab, 25 Jun 2025	Kam, 26 Jun 2025	Infobank Institute
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Agung Trinanda Priya Adi	Data Warehouse Dan Bigdata	Ext - Public Training Audit Sistem Informasi Berbasis Cobit	Yogyakarta	Rab, 24 Sep 2025	Kam, 25 Sep 2025	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Ade Indra Sukmawan	Data Center / Drc And Security	Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Ext - Vmware Data Center Visualization	Gedung Informit Tm Bandung	Sen, 22 Sep 2025	Sel, 23 Sep 2025	Cv Informit Indonesia
Noor Iriyanto	Manager Help Desk	Ext - Manajemen Layanan Ti Modern Peran Helpdesk, Automasi Dan Penanganan Insiden Kompleks	"Hotel Amaris, Jakarta Selatan"	Sel, 24 Jun 2025	Rab, 25 Jun 2025	Cv. Diorama Succes
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Firmansyah.	Centralized Processing Dan Branch Automation	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Eks - Business Analyst	"Hotel Grand Picasso, Jakarta Pusat"	Sel, 09 Des 2025	Rab, 10 Des 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Muhammad Sabir	Data Center / Drc	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Ext - Vmware Data Center Visualization	Gedung Informit Tm Bandung	Sen, 22 Sep 2025	Sel, 23 Sep 2025	Cv Informit Indonesia
Syamsul Syarif	Non Core Application Dan Middleware	Ext - Docker	Wu Hub Coworking Space Kuningan P5 Floor Annex Building	Rab, 27 Agu 2025	Kam, 28 Agu 2025	"PT Semua Mahir Teknologi, Coding Studio"
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Deddy Setyawan Muchin	Amgr Monitoring	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikasi Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Ext - Data Mining (Penambangan Data)	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta	Rab, 26 Nov 2025	Kam, 27 Nov 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Yasir Arafah B	Non Core Application & Middleware	Ext - Implementasi Git Repository Pada Server On Permise	"Hotel Grand Picasso, Jakarta Pusat"	Rab, 06 Agu 2025	Kam, 07 Agu 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Djaya Ariawan Syah	Infrastructure	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikasi Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Eks - Network Intrusion Detection With Machine Learning	Jakarta Selatan	Jum, 07 Nov 2025	Sab, 08 Nov 2025	One Point Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Bayu Gidion Ch. E Tepy	Infrastructure	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Eks - Network Intrusion Detection With Machine Learning	Jakarta Selatan	Jum, 07 Nov 2025	Sab, 08 Nov 2025	One Point Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Aclan Siswandy Sinaga	It Strategy & Kebijakan Prosedur	Iht - Sustainable Banking : Implementasi Esg (Enviromental, Social And Governance)	Hotel Fox Jayapura	Sel, 10 Jun 2025	Jum, 13 Jun 2025	PT Viv Superior Prosperous
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Ext - Audit Sistem Informasi Berbasis Cobit Batch 2	Ayaartta Hotel Malioboro Yogyakarta	Rab, 08 Okt 2025	Kam, 09 Okt 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Chatrine Feibe Wopari	Admin User	Ext-Query Micro-soft Sql Server	Kantor Inixindo Jogja	Rab, 06 Agu 2025	Kam, 07 Agu 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Anisentus Sigfrid Salombe	Non Core Application Dan Middleware	Ext - Fraud Detection System (Fds) Menggunakan Metode Artifial Intelegence (Ai) & Machine Learning (MI)	Hotel El Royale Yogyakarta, "Arion Swissbell Hotel, Bandung"	Rab, 25 Jun 2025	Kam, 26 Jun 2025	Infobank Institute
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Harpeni Baan	Amgr Help Desk	Ext-Query Micro-soft Sql Server	Kantor Inixindo Jogja	Rab, 06 Agu 2025	Kam, 07 Agu 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
Hendra Windu Putra	Technical Support	Ext - Troubleshooting & OPTimizing Server	Yogyakarta	Rab, 16 Jul 2025	Kam, 17 Jul 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Herlinda Rachman	It Project Management Office	Ext-Ict Project Management Bersertifikasi Bnsp	Loman Park Hotel Yogyakarta	Rab, 07 Mei 2025	Kam, 08 Mei 2025	Tiana Training & Learning
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikasi Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Irfan Lukman	Amgr Centralized Processing Dan Branch Automation	Eks - Business Analyst	"Hotel Grand Picasso, Jakarta Pusat"	Sel, 09 Des 2025	Rab, 10 Des 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Catur Taufik Yulianto	Help Desk	Ext - Helpdesk Profesional Di Era Digital Itil 4 Keamanan Siber Dan Remote Support	"Hotel Amaris La Codefin, Kemang, Jakarta Selatan"	Rab, 09 Jul 2025	Kam, 10 Jul 2025	Cv. Diorama Succes
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Gelora Agian Mendaun	Centralized Processing Dan Branch Automation	Ext - It Business Support	Gedung Informat Tm Bandung	Rab, 02 Jul 2025	Kam, 03 Jul 2025	Cv Informit Indonesia
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Yuliana Sem	It Project Management Office	Ext-Ict Project Management Bersertifikasi Bnsp	Loman Park Hotel Yogyakarta	Rab, 07 Mei 2025	Kam, 08 Mei 2025	Tiana Training & Learning
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Ofir Victor Soumokil	It Policy, Security & Quality Assurance	Iht - Sustainable Banking : Implementasi Esg (Environmental, Social And Governance)	Hotel Fox Jayapura	Sel, 10 Jun 2025	Jum, 13 Jun 2025	PT Viv Superior Prosperous
		Bimbingan Teknis Forum Siber Ctis (Cyber Threat Information Sharing)	Hotel Santika Bogor	Sen, 16 Jun 2025	Sel, 17 Jun 2025	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Piet Hein Wataha	Infrastructure	Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Eks - Network Intrusion Detection With Machine Learning	Jakarta Selatan	Jum, 07 Nov 2025	Sab, 08 Nov 2025	One Point Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Mardo Pelupessy	Data Center / Drc And Security	Ext - Security Operation Center (Soc)	Yogyakarta	Kam, 18 Sep 2025	Jum, 19 Sep 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elek-trindo, PT Aplikasi Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Sebastian Maria Philipus Meteray	Amgr Technical Support	Ext - Troubleshooting & OPTimizing Server	Yogyakarta	Rab, 16 Jul 2025	Kam, 17 Jul 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
Richardo Vonary Sanggenafa	Amgr Admin User	Iht - Database Administrator	"Hotel Ibis Kuta, Bali"	Rab, 08 Okt 2025	Kam, 09 Okt 2025	Cv. Diorama Succes
Rico Novels Tubalawony	Amgr Non Core Application Dan Middleware	Ext - Docker	Wu Hub Coworking Space Kuningan P5 Floor Annex Building	Rab, 27 Agu 2025	Kam, 28 Agu 2025	"PT Semua Mahir Teknologi, Coding Studio"
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Andre Lgon Pitna	Data Warehouse Dan Bigdata	Iht - Database Administrator	"Hotel Ibis Kuta, Bali"	Rab, 08 Okt 2025	Kam, 09 Okt 2025	Cv. Diorama Succes
Andy Sukma Anggara	Amgr Monitoring	Ext - Data Mining (Penambangan Data)	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta	Rab, 26 Nov 2025	Kam, 27 Nov 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
Angri Juwita Silitonga	Amgr Help Desk	Ext - Manajemen Layanan Ti Modern Peran Helpdesk, Automasi Dan Penanganan Insiden Kompleks	"Hotel Amaris, Jakarta Selatan"	Sel, 24 Jun 2025	Rab, 25 Jun 2025	Cv. Diorama Succes
Kaspar Hizkia	Amgr Admin User	Ext - Helpdesk Profesional Di Era Digital Itil 4 Kemaman Siber Dan Remote Support	"Hotel Amaris La Codefin, Kemang, Jakarta Selatan"	Rab, 09 Jul 2025	Kam, 10 Jul 2025	Cv. Diorama Succes



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Rosalina Kambu	Amgr Dokumentasi Dan Implementasi	Ext - Troubleshooting & Optimizing Server	Yogyakarta	Rab, 16 Jul 2025	Kam, 17 Jul 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
Ryan Achmad Rizaldi	Non Core Application Dan Middleware	Ext - Implementasi Git Repository Pada Server On Permise	"Hotel Grand Picasso, Jakarta Pusat"	Rab, 06 Agu 2025	Kam, 07 Agu 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
Stella Priscilia Caroline Risamasu	Amgr Implementor Dan Klerikal	Ext - It Business Support	Gedung Informit Tm Bandung	Rab, 02 Jul 2025	Kam, 03 Jul 2025	Cv Informit Indonesia
		Int - E-Channel, Atm Dan Cyber Security	"Swissbel Express Hotel, Jayapura"	Sen, 06 Okt 2025	Jum, 10 Okt 2025	PT Collega Inti Pratama, PT Infokom Elektrindo, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Insan Teknologi Semesta, PT Protergo Siber Sekuriti, PT Telekomunikasi Indonesia, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi.
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Theofilus Sakka Kurniaputra Parangan	Non Core Application Dan Middleware	Iht - Database Administrator	"Hotel Ibis Kuta, Bali"	Rab, 08 Okt 2025	Kam, 09 Okt 2025	Cv. Diorama Succes
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Penyelenggara
Yenny Yustien Sitanggang	Amgr Help Desk	Ext - Helpdesk Profesional Di Era Digital Itil 4 Kem- anan Siber Dan Remote Support	"Hotel Amaris La Codefin, Kemang, Jakarta Selatan"	Rab, 09 Jul 2025	Kam, 10 Jul 2025	Cv. Diorama Succes
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Zoom, "Hotel Mercure, Jayapura"	Rab, 26 Nov 2025	Jum, 19 Des 2025	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Zeth Eka Rumbrapuk	Data Center / Drc And Security	Ext - Security Operation Center (Soc)	Yogyakarta	Kam, 18 Sep 2025	Jum, 19 Sep 2025	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara

KEAMANAN DAN TATA KELOLA TI

PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah melakukan berbagai proses tatakelola terkait isu-isu di bidang Teknologi Informasi sesuai dengan aturan Perundang-Undangan, Regulasi dan Ketentuan lainnya yang berlaku serta perkembangan serta *best practice* Keamanan Teknologi Informasi, diantaranya adalah:

1. Gangguan (Disruption)

- Pembentukan Unit Departemen Deteksi Analisa Anomali Dan Fraud sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 76/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Deteksi Analisa Anomali Dan Fraud 24/7.
- Pembentukan Fungsi Ketahanan Dan Keamanan Siber (KKS) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 77/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Fungsi Ketahanan Dan Keamanan Siber.
- Menerapkan *Security Operation Center (SOC)* yang bertugas 1 x 24 jam pada Kantor Pusat Jayapura, *Data Center* dan *Data Recovery Center*.
- Menerapkan *Network Operation Center (NOC)* yang bertugas 1 x 24 jam untuk pemantauan seluruh infrastruktur Bank Papua.
- Penerapan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi di Kantor Pusat Jayapura, *Data Center* dan *Data Recovery Center* antara lain dengan penerapan *Firewall*.
- Penerapan Antivirus pada Server dan perangkat-perangkat komputer klien yang kritikal.

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY AND GOVERNANCE

PT Bank Pembangunan Daerah Papua has implemented various governance processes to address issues in the field of Information Technology in compliance with applicable laws and regulations, as well as prevailing standards and best practices in Information Technology Security. These include the following:

1. Disruption Management

- Establishment of the Anomaly Detection and Fraud Analysis Department Unit in accordance with the Board of Directors' Decree No. 76/DIR-BPD/XII/2025 dated 17 December 2025 regarding the Standard Operating Procedures (SOP) for 24/7 Anomaly Detection and Fraud Analysis;*
- Establishment of the Cyber Resilience and Security Function (CRSF) in accordance with the Board of Directors' Decree No. 77/DIR-BPD/XII/2025 dated 17 December 2025 regarding the Standard Operating Procedures (SOP) for Cyber Resilience and Security Functions;*
- Implementation of a Security Operations Center (SOC) operating on a 24/7 basis at the Head Office in Jayapura, Data Center, and Disaster Recovery Center (DRC);*
- Implementation of a Network Operations Center (NOC) operating on a 24/7 basis to monitor Bank Papua's entire infrastructure;*
- Implementation of IT infrastructure security measures at the Head Office in Jayapura, Data Center, and Disaster Recovery Center, including the deployment of firewall systems;*
- Implementation of antivirus protection on servers and critical client computing devices;*



- g. Penerapan *Tools Monitoring* Server dan Jaringan Komunikasi Data (JKD).
- h. Analisis kerentanan berupa *Vulnerability Assessment (VA)* periode TW I – IV Tahun 2025 dan Pengujian Keamanan (*Penetration Testing*) pada Tahun 2025.

g. *Implementation of server and data communication network monitoring tools;*

h. *Conducting vulnerability assessments (VA) for the period of Q1–Q4 2025 and security testing (penetration testing) in 2025.*

2. Cyber Security

- a. Terdaftar sebagai Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Nomor Tanda Registrasi 158/CSIRT.01.03/BSSN/04/2023 Tanggal 10 April 2023 atas nama Bank Papua - CSIRT.

2. Cybersecurity

a. *Registered as a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), under Registration Number 158/CSIRT.01.03/BSSN/04/2023 dated 10 April 2023, under the name Bank Papua – CSIRT.*



- b. Penilaian atas *Cyber Security Maturity (CSM)* oleh Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) sejak Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2022 dengan Indeks Kematangan: 4.14;
 - Tahun 2023 dengan Indeks Kematangan: 4.33; dan
 - Tahun 2024 dengan Indeks Kematangan: 4.41.

b. *Assessment of Cyber Security Maturity (CSM) conducted by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) from 2022 to 2024, with the following results:*

- *2022: Maturity Index of 4.14;*
- *2023: Maturity Index of 4.33; and*
- *2024: Maturity Index of 4.41.*





c. Sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker) untuk tim CSIRT.

c. Sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker) untuk tim CSIRT.

2. Disaster Recovery (Pusat Bencana)

- Pelaksanaan Pengujian *Disaster Recovery Plan (DRP)* dan Pengujian Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) Tahun 2025.
- Pelaksanaan Pengujian Pengujian *Disaster Recovery Plan (DRP)* Abepura Tahun 2025.

2. Disaster Recovery

- Implementation of *Disaster Recovery Plan (DRP)* testing and *Cyber Resilience and Security (CRS)* testing in 2025;
- Implementation of *Disaster Recovery Plan (DRP)* testing for the Abepura site in 2025.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi di Bank Papua dilaksanakan secara komprehensif guna memastikan keamanan, keandalan, dan keberlangsungan layanan digital. Sepanjang tahun 2025, Bank secara konsisten melakukan pengujian keamanan (penetration testing) terhadap layanan TI untuk mengidentifikasi potensi kerentanan serta memastikan efektivitas kontrol pengamanan yang telah diterapkan.

Selain itu, Bank Papua telah mengimplementasikan standar internasional SNI ISO/IEC 27001:2022 dengan memperoleh sertifikasi (Certificate ID23/00000367), yang menegaskan komitmen Bank dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan sesuai praktik terbaik global.

RISK MANAGEMENT IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY

The implementation of risk management in the use of Information Technology at Bank Papua is carried out in a comprehensive manner to ensure the security, reliability, and continuity of digital services. Throughout 2025, the Bank consistently conducted security testing (penetration testing) on its IT services to identify potential vulnerabilities and to ensure the effectiveness of the implemented security controls.

In addition, Bank Papua has implemented the international standard SNI ISO/IEC 27001:2022, as evidenced by the certification obtained (Certificate ID23/00000367), reaffirming the Bank's commitment to implementing a structured, measurable, and sustainable information security management system in line with global best practices.



Upaya penguatan manajemen risiko TI juga dilakukan melalui partisipasi aktif dalam Cyber Threat Intelligence (CTI) Forum yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). Melalui forum ini, Bank memperoleh akses terhadap informasi ancaman siber terkini serta meningkatkan kapasitas mitigasi risiko secara kolaboratif.

Dengan pendekatan tersebut, Bank Papua mampu memperkuat ketahanan siber, menjaga kepercayaan nasabah, serta mendukung operasional digital yang aman dan berkelanjutan.

Efforts to strengthen IT risk management are also carried out through active participation in the Cyber Threat Intelligence (CTI) Forum organized by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) in collaboration with the Regional Development Bank Association (ASBANDA). Through this forum, the Bank gains access to the latest cyber threat intelligence and enhances its risk mitigation capabilities through a collaborative approach.

Through this approach, Bank Papua is able to strengthen its cyber resilience, maintain customer trust, and support secure and sustainable digital operations.



Divisi Manajemen Modal Manusia

Human Capital Management Division



Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan Bank Papua di tengah transformasi industri perbankan yang semakin dinamis. Keunggulan Bank tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, tetapi terutama oleh kualitas insan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Penguatan SDM Bank Papua selaras dengan penerapan budaya perusahaan “**SAIKHLAS**”, yang menanamkan nilai Integritas, Konsisten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Solusi dalam setiap perilaku kerja. Nilai ini membentuk karakter pegawai yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki komitmen pelayanan yang tulus dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Dengan SDM yang unggul dan berkarakter, Bank Papua mampu memperkuat daya saing, mendorong inovasi, serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Human capital is a key factor in sustaining the performance and long-term viability of Bank Papua amid the increasingly dynamic transformation of the banking industry. The Bank's competitive advantage is determined not only by capital and technology, but primarily by the quality of its people—professional, adaptive, and possessing strong integrity.

The strengthening of Bank Papua's human capital is aligned with the implementation of the corporate culture “SA IKHLAS”, which instills the values of Integrity, Consistency, Harmony, Loyalty, Adaptability, and Solution-Oriented mindset in every aspect of work behavior. These values shape employees who are not only competent but also demonstrate sincere service commitment and a strong focus on stakeholder satisfaction. With high-quality and value-driven human capital, Bank Papua is able to enhance its competitiveness, drive innovation, and achieve sustainable growth.



STRUKTUR DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA

Divisi Manajemen Modal Manusia (HCT) Bank Papua berada di bawah Direktur Operasional dan bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Struktur ini terdiri dari tiga departemen utama: Departemen Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Modal Manusia, Departemen Administrasi Manajemen Modal Manusia, dan Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Setiap departemen memiliki fungsi strategis, seperti perencanaan SDM, administrasi dan kompensasi, pembinaan, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan. Dengan struktur ini, Bank Papua memastikan efektivitas pengelolaan SDM guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dalam membangun perbankan yang unggul.

STRUCTURE OF THE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT DIVISION

The Human Capital Management Division (HCM) of Bank Papua operates under the supervision of the Director of Banking Operations and is responsible for the management and development of human capital. The Division is structured into three main departments: the Human Capital Planning and Development Department, the Human Capital Administration Department, and the Education and Training Department.

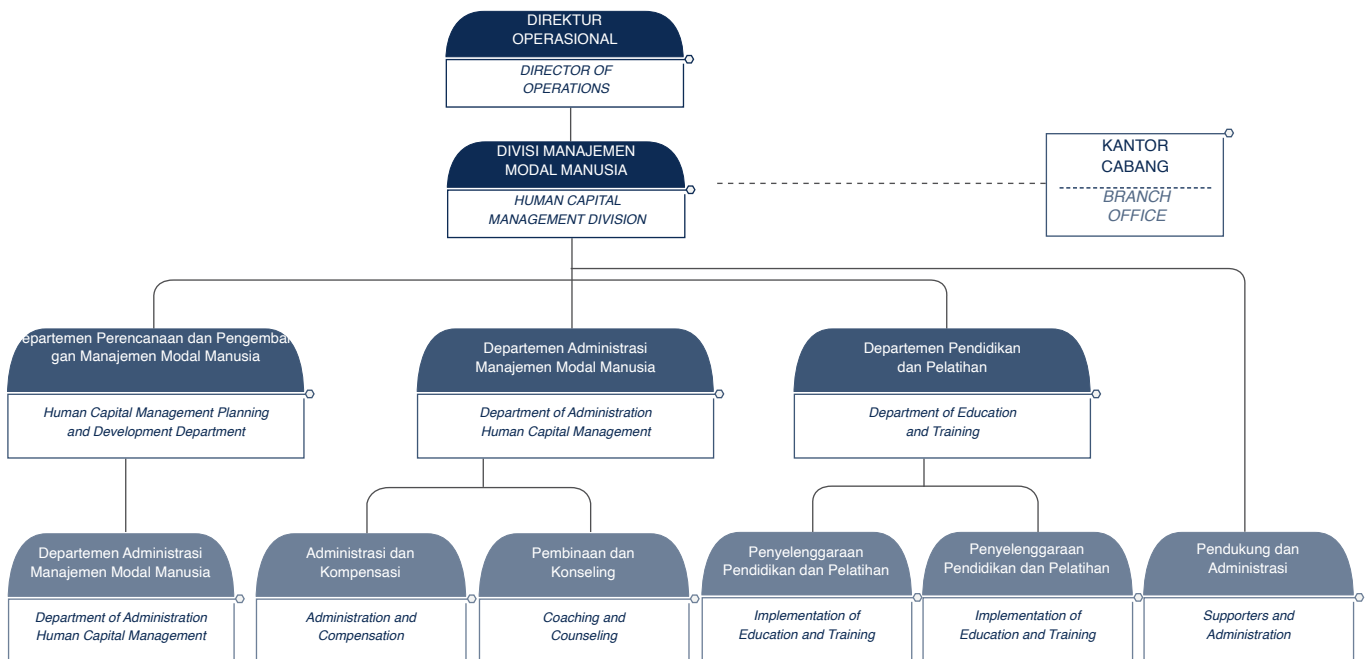
Each department carries strategic functions, including workforce planning, administration and compensation, employee development, as well as the management of education and training programs. Through this structure, Bank Papua ensures effective human capital management to support the achievement of its vision and mission in building a competitive and leading banking institution.

Divisi Manajemen Modal Usaha (HCT)

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 67/DIR-BPD/X/2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

Keterangan:

— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi



PROGRAM KERJA DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA TAHUN 2025

Dalam mendukung pencapaian strategi bisnis Bank Papua, Divisi Manajemen Modal Manusia menetapkan program kerja yang terarah dan terintegrasi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pengelolaan SDM berbasis teknologi melalui penyempurnaan Human Capital Management System (HCMS) dan dashboard monitoring guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data.
2. Melakukan identifikasi dan pengelolaan talenta secara sistematis untuk menyiapkan kader pemimpin masa depan serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan organisasi.
3. Melakukan asesmen kompetensi secara berkala untuk memetakan potensi pegawai berdasarkan kompetensi manajerial dan teknis sebagai dasar pengembangan karier dan organisasi.
4. Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup pengembangan kompetensi teknis, manajerial, serta sertifikasi profesi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
5. Mengoptimalkan Learning Management System (LMS) sebagai platform pembelajaran digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas proses pengembangan SDM.
6. Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan dan jalur karier terstruktur guna meningkatkan kesiapan pegawai dalam menduduki posisi strategis.
7. Menggunakan hasil asesmen sebagai dasar dalam menyusun kebutuhan pelatihan yang tepat sasaran dan mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Melalui implementasi program kerja tersebut, Divisi Manajemen Modal Manusia berkomitmen menciptakan SDM yang unggul, profesional, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan Bank Papua.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT DIVISION WORK PROGRAM 2025

In supporting the achievement of Bank Papua's business strategy, the Human Capital Management Division has established the following structured and integrated work programs:

1. *To develop a technology-based human capital management system through the enhancement of the Human Capital Management System (HCMS) and monitoring dashboards to support fast, accurate, and data-driven decision-making;*
2. *To conduct systematic talent identification and management to prepare future leadership pipelines and ensure leadership sustainability;*
3. *To carry out periodic competency assessments to map employee potential based on managerial and technical competencies as a basis for career and organizational development;*
4. *To implement continuous training programs covering technical and managerial competencies, as well as professional certifications aligned with the Bank's business needs;*
5. *To optimize the Learning Management System (LMS) as a digital learning platform to enhance the effectiveness, efficiency, and flexibility of human capital development;*
6. *To implement structured leadership development and career path programs to enhance employee readiness for strategic positions;*
7. *To utilize assessment results as the basis for designing targeted training programs that support organizational performance improvement.*

Through the implementation of these work programs, the Human Capital Management Division is committed to developing high-quality, professional, and adaptive human capital to support Bank Papua's sustainable growth.





PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA

ANDARIAS BAUNIK

Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jayapura. Usia 52 tahun Per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi STIE Port Numbay, Jayapura (2009)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (lima) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia sejak 12-03-2025, berdasarkan SK Direksi No. 33/KEPEG/III/2025.

Pengalaman Kerja

1. Kepala Cabang Bintuni (2017)
2. Kepala Cabang Nabire (2018)
3. Pemimpin Kantor Cabang Nabire (2018)
4. Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa (2022-2024)
5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (2025)

HEAD OF HUMAN CAPITAL DIVISION PROFILE

Head of Human Capital Management Division

An Indonesian citizen, domiciled in Jayapura. Age 52 as of December 2025.

Educational Background

Bachelor's Degree in Economics, STIE Port Numbay, Jayapura (2009).

Certifications

Level 5 Risk Management Certification from the Risk Management Professional Certification Body.

Position History

Legal Basis of Appointment

He has served as Head of the Human Capital Management Division since 12 March 2025, based on the Board of Directors' Decree No. 33/KEPEG/III/2025.

Work Experience

1. Head of Bintuni Branch (2017);
2. Head of Nabire Branch (2018);
3. Branch Manager of Nabire Branch (2018);
4. Head of Fund Management and Services Division (2022–2024);
5. Head of Human Capital Management Division (2025).



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL TAHUN 2025

Di era teknologi saat ini dengan persaingan yang begitu tinggi Bank perlu membangun keunggulan kompetitif (*Competitive Advantages*). Keunggulan kompetitif dapat dicapai apabila didukung oleh adanya SDM yang berkualitas sebagai aset terbesar dari perusahaan yang memiliki kecakapan, kemampuan serta loyalitas dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu membangun SDM yang profesional dengan metode pengelolaan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh SDM yang kompeten dan mampu berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi sekaligus sebagai sumber keunggulan dan pendukung daya saing perusahaan.

Divisi Manajemen Modal Manusia memiliki peranan dalam mempersiapkan SDM dan melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada pegawai, memperhatikan hubungan kerja mereka, memperhatikan kesehatan, keamanan dan juga masalah keadilan.

Berdasarkan *Corporate Plan 2023–2027*, langkah strategis Bank untuk meningkatkan ketahanan institusi sebagai Bank Pembangunan Daerah di Tanah Papua, penyelarasan proses bisnis dan layanan, akselerasi transformasi digital, pengembangan SDM yang profesional dan penyempurnaan tata kelola perusahaan, dengan roadmap eksekusi “Penguatan Berkelanjutan Platform Bisnis Dan Akselerasi Pertumbuhan Kredit Produktif Secara Sehat”.

Program strategis yang akan dilakukan di tahun 2025 yaitu membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan inisiatif strategis di antara 3 (tiga) departemen dengan uraian sebagai berikut:

I. DEPARTEMEN ADMINISTRASI

1. Struktur dan Skala Upah

Seiring dengan implementasi Manajemen SDM, maka telah dilakukan penyesuaian jabatan dan grade sesuai struktur organisasi yang baru. Dengan penempatan SDM yang tepat sesuai dengan persyaratan jabatan, kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan, maka akan disertai dengan kompensasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta beban kerja pegawai.

Komponen tunjangan yang ada dianggap belum

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT POLICY AND STRATEGY 2025

In today's technology-driven and highly competitive environment, the Bank must establish a strong competitive advantage. Such advantage can be achieved through high-quality human capital as the Company's most valuable asset—possessing competence, capability, loyalty, and the ability to create value for the organization.

Therefore, the Bank must develop professional human capital through effective and efficient management practices to ensure a competent workforce capable of contributing optimally to the achievement of organizational objectives, while serving as a source of competitive advantage and strengthening the Bank's overall competitiveness.

The Human Capital Management Division plays a key role in preparing and managing human capital, as well as conducting comprehensive evaluations covering recruitment, training, performance appraisal, compensation, employee relations, health, safety, and fairness.

Based on the Corporate Plan 2023–2027, the Bank's strategic initiatives include strengthening institutional resilience as a Regional Development Bank in Papua, aligning business processes and services, accelerating digital transformation, developing professional human capital, and enhancing corporate governance. These initiatives are supported by the execution roadmap titled “Sustainable Strengthening of Business Platforms and Acceleration of Healthy Productive Loan Growth.”

The strategic program for 2025 focuses on building an integrated human capital management system aligned with strategic initiatives across three departments, as outlined below:

I. ADMINISTRATION DEPARTMENT

1. Compensation Structure and Salary Scale

In line with the implementation of human capital management, adjustments have been made to job positions and grading in accordance with the new organizational structure. The proper placement of employees based on job requirements, quality, and required competencies is accompanied by compensation aligned with roles, responsibilities, and workload.

The current allowance components are considered not yet



mencerminkan kondisi yang ideal sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar lebih selaras dengan standar industri serta mendukung peningkatan motivasi dan kinerja pegawai.

tersebut dan masih berada dibawah standar penghasilan BPD khususnya dan perbankan pada umumnya, sehingga perlu dilakukan evaluasi/penyesuaian Beban Kerja dan Tunjangan berdasarkan Tingkat Jabatan/Grade, Jabatan dan masa kerja. Tahapan yang telah dilakukan untuk evaluasi Struktur dan Skala Upah adalah:

- a. Telah dilakukan *Benchmark* ke beberapa Bank Pembangunan Daerah (*Peer Group*) yaitu Sulselbar dan Bank Daerah Sumselbabel pada Triwulan I tahun 2025.
- b. Melakukan pembahasan dengan Divisi Perencanaan dan Strategis (Triwulan IV Tahun 2025) untuk menentukan formula yang tepat dalam pemberian beban kerja dan tunjangan antara lain:
 - *Mapping* data Penghasilan Pegawai (tingkatan Jabatan, Grade dan Masa Kerja) untuk menetapkan pemberian tunjangan bagi pegawai.
 - Menentukan formula yang tepat untuk digunakan dalam menentukan besaran tunjangan yang tepat.
 - Analisa *Cost* yang akan ditimbulkan.
- c. Menyusun Draft SK Komponen Penghasilan dan Tunjangan bagi pegawai yang terdiri dari:
 - Tunjangan Tetap/Tunjangan Grade
Tunjangan tetap atau disebut juga tunjangan grade karena tunjangan tersebut melekat pada Grade Pegawai.
 - Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan diberikan kepada Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tertentu.
 - Tunjangan Beban Kerja
Tunjangan beban kerja diberikan kepada pegawai didasarkan pada posisi/jabatan pada unit bisnis dan unit kerja yang memiliki beban kerja dan risiko yang relatif tinggi.
 - Tunjangan Perumahan
Tunjangan perumahan diberikan kepada pegawai dan pejabat yang tidak mendapat atau menempati rumah dinas, diberikan kompensasi rumah jabatan berupa tunjangan perumahan.

2. Penyempurnaan Kompensasi Lainnya

- a. Melakukan perubahan ketentuan yang akan difinalisasi pada Januari 2025 yaitu bekerjasama

fully reflective of optimal conditions; therefore, evaluation and adjustments are required to align them with industry standards and to enhance employee motivation and performance. Current remuneration levels are still below the standard of Regional Development Banks (BPDs) in particular, and the banking industry in general. Accordingly, evaluation and adjustment of workload allowances and benefits are required based on job level/grade, position, and tenure.

The steps undertaken in evaluating the compensation structure and salary scale include:

- a. *Benchmarking against peer Regional Development Banks, namely Bank Sulselbar and Bank Sumsel Babel, conducted in Q1 2025;*
- b. *Discussions with the Planning and Strategy Division (Q4 2025) to determine the appropriate compensation formula, including:*
 - *Mapping employee income data (position level, grade, and tenure) to determine allowance structures;*
 - *Establishing an appropriate formula for determining allowance amounts;*
 - *Cost impact analysis;*
- c. *Preparation of a draft Board of Directors' Decree on employee compensation components and benefits, consisting of:*
 - *Fixed Allowance / Grade Allowance: Attached to the employee's grade;*
 - *Position Allowance: Granted to structural and certain functional positions;*
 - *Workload Allowance: Granted based on positions within business and operational units with relatively high workload and risk exposure;*
 - *Housing Allowance: Provided to employees and officials who are not assigned official housing, as compensation for housing benefits.*

2. Enhancement of Other Compensation

- a. *Revision of provisions to be finalized in January 2025, including collaboration with hospitals to*



dengan rumah sakit untuk memberikan layanan pemeriksaan *General Check Up*.

- b. Peraturan Perjalanan Dinas PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah dilakukan penyempurnaan.
- c. Evaluasi Ketentuan:
 - a. Ketentuan Lembur Pegawai dan Ketentuan Pembayaran Bonus Pegawai
 - b. Ketentuan Batas Usia Pensiun Pegawai

3. Hubungan Industrial

Pengusaha dan pekerja dalam sebuah perusahaan keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, hubungan industrial yang kondusif antar pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.

Membina hubungan industrial yang kondusif dan harmonis dalam lingkungan kerja di Bank Papua, Divisi Manajemen Modal Manusia bersama dengan Divisi Hukum dan Serikat Pekerja memberikan pelayanan masalah kepegawaian secara profesional serta membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan industrial. Untuk mendukung hubungan industrial dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari, Divisi Manajemen Modal Manusia melakukan pembaharuan ketentuan.

Merancang dan mengusulkan pedoman (manual) dan template penanganan keluhan dan proses investigasi kasus-kasus terkait hubungan industrial, mengelola dan menyelesaikan setiap perselisihan pegawai dan keluhan pegawai dengan prosedur yang tepat waktu dan tepat guna, ikut bertanggung jawab dalam investigasi (memberi dukungan kepada pihak eksternal yang berwajib untuk menangani kasus-kasus pegawai jika ada) terhadap kasus-kasus hubungan industrial pegawai dan bersama-sama dengan Divisi Hukum mewakili perusahaan dan pegawai dalam menangani penyelesaian perselisihan (hubungan industrial) sampai di tingkat pengadilan.

4. Pembinaan & Konseling

- a. Untuk pegawai yang terkait masalah motivasi dan indiscipliner, Divisi Manajemen Modal Manusia menyusun jadwal untuk melakukan diskusi dengan pegawai bersangkutan dan jika perlu menghubungi pimpinan unit kerjanya serta memberikan pembinaan kepada pegawai terkait hal tersebut.
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap kedisiplinan pegawai baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang berdasarkan rekapan absensi.

provide General Check-Up services;

- b. *Improvement of the Business Travel Policy of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
- c. *Evaluation of the following policies:*
 - a. *Employee overtime policy and bonus payment provisions;*
 - b. *Employee retirement age policy.*

3. Industrial Relations

Employers and employees share a common interest in the success of the Company. A conducive industrial relations environment is a key factor in preventing employment termination disputes.

Fostering a conducive and harmonious industrial relations environment at Bank Papua, the Human Capital Management Division, in collaboration with the Legal Division and the Labor Union, provides professional employee relations services and assists in resolving issues related to industrial relations. To support effective industrial relations in daily operations, the Human Capital Management Division continuously updates relevant policies and regulations.

The Division also designs and proposes guidelines (manuals) and templates for handling employee grievances and conducting investigations related to industrial relations cases. It manages and resolves employee disputes and complaints in a timely and effective manner, and participates in investigations by providing support to external authorities when required. In collaboration with the Legal Division, the Human Capital Management Division also represents the Company and employees in resolving industrial relations disputes, including proceedings at the court level.

4. Coaching & Counseling

- a. *For employees facing motivation or disciplinary issues, the Human Capital Management Division conducts discussions and, if necessary, coordinates with respective unit heads to provide guidance;*
- b. *Enhancing monthly monitoring and evaluation of employee discipline at both Head Office and Branch Offices based on attendance records;*



- c. Memantau kinerja pegawai di lingkungan Bank Papua berkoordinasi dengan Departemen Perencanaan & Pengembangan Manajemen Modal Manusia serta Kantor Cabang untuk memberikan motivasi kepada pegawai yang berkinerja di bawah standar dan pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner.
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konseling pegawai sesuai dengan kebutuhan, serta mengawasi proses pembinaan dan konseling dan memantau pengelolaan administrasi dan dokumen yang terkait kegiatan pembinaan dan konseling.
- e. Memberikan sanksi yang tepat, cepat dan jelas (transparan) kepada pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner maupun pelanggaran kode etik.

II. DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Dengan meningkatnya pengembangan jaringan bisnis Bank Papua, maka kebutuhan akan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas tanpa mengabaikan kualitasnya sangat dibutuhkan. Upaya yang dilakukan guna memenuhi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Talent Management System

Mengimplementasikan *Talent Management System* melalui proses pengidentifikasian *talent* sehingga menghasilkan Kandidat Pemimpin masa depan Bank Papua dengan beberapa rangkaian kegiatan untuk mendeteksi potensi, minat, bakat, kekuatan dan area pengembangan kandidat dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur berdasarkan atas standar/kriteria yang telah ditetapkan Bank dengan menggunakan prinsip:

- a. **Objektif**
Keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi maupun orang lain dengan didukung fakta/data yang bisa diyakini keabsahannya.
- b. **Akuntabel**
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. **Independen**
Didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak (berdiri sendiri).

2. Asesmen

Program asesmen dilakukan secara berkala dan berkesinambungan guna memetakan kompetensi pegawai yang menduduki posisi jabatan tertentu. Asesmen dilakukan antara lain untuk pemetaan dan pengembangan pegawai

- c. *Monitoring employee performance in coordination with the Human Capital Planning and Development Department and Branch Offices to motivate underperforming employees and those involved in disciplinary violations;*
- d. *Conducting coaching and counseling activities as needed, while overseeing the process and administration of related documentation;*
- e. *Imposing appropriate, timely, and transparent sanctions on employees who violate disciplinary rules or the code of conduct.*

II. PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

With the expansion of Bank Papua's business network, the need for human capital—both in terms of quantity and quality—continues to increase. The following efforts are undertaken to meet these requirements:

1. Talent Management System

Implementation of a Talent Management System through structured talent identification processes to develop future leadership candidates for Bank Papua. This includes a series of activities aimed at identifying potential, interests, talents, strengths, and development areas, based on established standards and criteria, applying the following principles:

- a. **Objectivity**
Reflecting actual conditions without bias, supported by verifiable data and facts;
- b. **Accountability**
Fully accountable in accordance with applicable regulations;
- c. **Independence**
Demonstrating neutrality and impartiality.

2. Assessment

Assessment programs are conducted periodically and continuously to map employee competencies for specific positions. Assessments are used for employee mapping



berdasarkan jenis kompetensi sebagai berikut:

- Kompetensi manajerial (soft competency) – berhubungan dengan kemampuan mengelola pegawai dan berhubungan dengan orang lain. Misalnya, kemampuan memimpin, bekerja dalam tim dan memecahkan masalah.
- Kompetensi teknis (hard competency) – berhubungan secara spesifik dengan kapasitas fungsional perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, kemampuan dasar yang dimiliki oleh bagian pemasaran, akuntansi dan lain-lain.

3. Rekrutmen

Penyediaan SDM berkualitas mengikuti perkembangan bisnis akan dilakukan melalui rekrutmen pegawai yang dilakukan secara independen oleh Bank Papua maupun melalui kerja sama dengan pihak independen yang *credible*, dimana rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengembangan Jaringan Kantor.

Rekrutmen dilakukan pada level staf dengan jalur penerimaan pelatihan kerja atau magang dan jalur Pegawai Kontrak (PKWT) yang akan mengisi posisi *frontliner* dan pendukung di kantor cabang serta kantor pusat.

III. DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sesuai *Corporate Plan* Bank Papua 2023–2027 sebagai strategi untuk memperkuat fundamental bisnis Bank dan pengembangan bisnis perusahaan sesuai tuntutan perkembangan terkini di industri perbankan, perkembangan regulasi, perkembangan transformasi digital di industri perbankan, dan menyelaraskan Program Transformasi BPD.

Program Pengembangan *Human Capital* yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah:

- a. Pengembangan Learning Management System (LMS) sebagai sarana pembelajaran mandiri baik dari sisi kebijakan, SOP dan penyusunan modul pembelajaran secara ringkas, menarik dan mudah dipahami.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pada dasarnya pelatihan dan pengembangan karyawan dapat dilakukan secara digital. Melalui zoom, webinar, simulasi, video pelatihan, hingga pembelajaran mobile dapat menjadi alternatif untuk dilakukannya pembelajaran digital. Dengan adanya Sistem LMS Bank Papua sebagai langkah awal pembelajaran

and development based on the following competencies:

- *Managerial Competencies (Soft Competencies): Related to leadership, teamwork, and problem-solving abilities;*
- *Technical Competencies (Hard Competencies): Related to specific functional expertise, such as marketing, accounting, and other operational roles.*

3. Recruitment

The provision of qualified human capital in line with business development is carried out through recruitment processes conducted independently by Bank Papua or in collaboration with credible external parties. Recruitment aims to fulfill staffing requirements in accordance with the organizational structure and branch network expansion.

Recruitment is primarily conducted at the staff level through internship/training programs and fixed-term employment (PKWT), to fill frontliner and support positions at both branch offices and the Head Office.

III. EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT

In accordance with Bank Papua's Corporate Plan 2023–2027, as a strategy to strengthen the Bank's business fundamentals and support business development in line with the evolving dynamics of the banking industry, regulatory developments, and digital transformation, as well as alignment with the Regional Development Bank (BPD) Transformation Program.

Human Capital Development Programs for 2025

- a. *Development of Learning Management System (LMS)*
The development of the Learning Management System (LMS) is aimed at facilitating self-directed learning, covering policies, Standard Operating Procedures (SOPs), and the preparation of learning modules that are concise, engaging, and easy to understand.

In line with technological advancements, employee training and development can be conducted digitally through platforms such as video conferencing, webinars, simulations, training videos, and mobile learning. The implementation of Bank Papua's LMS as an initial step



mandiri dalam pengembangan SDM secara digital, maka perusahaan dapat jauh lebih efisien dalam pemanfaatan biaya investasi pelatihan maupun biaya perjalanan dinas.

Aplikasi *Learning Management System (LMS)* adalah salah satu *instrument* untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan pegawai melalui platform informasi digital secara *realtime* melalui *digital learning*, dengan modul-modul yang akan digunakan meliputi:

- **Learn Material** adalah pembelajaran dengan materi yang telah disediakan dari instruktur (materi bisa dikustomisasi sesuai aturan perusahaan).
- **Video On Demand** adalah materi berupa video dan animasi yang diakses oleh karyawan berupa evaluasi kinerja, ujian kompetensi, layanan produk .
- **Live Streaming** adalah untuk memungkinkan pegawai berinteraksi secara langsung dengan instruktur dalam bentuk video live.
- **Group Virtual** adalah kelas pembelajaran dan ujian pegawai yang dapat disesuaikan berdasarkan jabatan, departemen, *branches* atau *grading* di lingkungan Bank Papua.
- **Administrator System dan Content Creator**
- **Administrator System** adalah petugas yang mengelola aplikasi e-Learning dan Roll System yang menyangkut kewenangan, register pegawai, *subscribe*, pengelolaan website dan otorisasi sistem.
- **Content Creator** adalah petugas yang membuat dan membangun *content* aplikasi e-Learning baik konten halaman maupun *content* ujian yang meliputi pembuatan silabus materi, manajemen file, pembuat soal *test*, *quiz*, *feedback*, *activity* serta membuat animasi video dan *interface*.
- **Evaluation Test** adalah evaluasi penilaian pegawai yang terdiri dari *Pre Test*, *Post Test* dan *Final Test*. Juga dilengkapi dengan *Environment system* yang meliputi aplikasi e-Learning digital *Cloud Base (ecosystem)* berbasis Android dan IOS serta *report analytic*, dan *multi role system*.

b. Pengembangan kompetensi Pegawai baik Diklat teknis maupun Sertifikasi.

Program pendidikan maupun pelatihan yang diberikan kepada pegawai meliputi:

- Pendidikan manajemen berbasis kompetensi, yang harus dimiliki semua level pegawai dan dikembangkan terus-menerus.
- Diklat kepemimpinan karir, yang harus dimiliki oleh

toward digital self-learning enables the Bank to achieve greater efficiency in training investment and business travel costs.

The Learning Management System (LMS) serves as a key instrument to enhance employee competencies and knowledge through a real-time digital learning platform, supported by the following modules:

- **Learning Materials:** *Structured learning content provided by instructors, which can be customized in accordance with company policies;*
- **Video on Demand (VoD):** *Learning materials in the form of videos and animations, including performance evaluations, competency assessments, and product knowledge;*
- **Live Streaming:** *Interactive sessions enabling employees to engage directly with instructors through live video;*
- **Virtual Group:** *Learning classes and assessments tailored based on job position, department, branch, or grading within Bank Papua;*
- **System Administrator & Content Creator:**
- **System Administrator:** *Responsible for managing the e-learning platform, including user authorization, employee registration, subscriptions, website management, and system access control;*
- **Content Creator:** *Responsible for developing and managing e-learning content, including syllabus design, file management, test and quiz creation, feedback mechanisms, activities, as well as video animation and user interface design;*
- **Evaluation Test:** *Employee assessment consisting of pre-test, post-test, and final test, supported by a cloud-based digital e-learning ecosystem (Android and iOS), reporting analytics, and a multi-role system.*

b. *Employee Competency Development (Training & Certification)*

Employee education and training programs include:

- *Competency-based management education applicable across all employee levels and continuously developed;*
- *Leadership development programs tailored to job positions;*



pegawai disesuaikan dengan pekerjaan posisi/jabatan.

- Diklat teknis, yang harus dimiliki oleh pegawai disesuaikan dengan pekerjaan/fungsional.
- Diklat penyegaran, merupakan kompetensi umum yang harus dimiliki posisi/jabatan tertentu.
- Pemenuhan pendidikan dan sertifikasi sesuai kebutuhan kompetensi jabatan yaitu:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4, 5, 6 dan 7
 - Sertifikasi Brevet Kredit
 - Sertifikasi General *Banking* I, II dan III
 - Sertifikasi Kepatuhan I, II dan III
 - Sertifikasi Dealer Treasury I, II dan III
 - Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sertifikasi Auditor dan Anti Fraud
 - Sertifikasi SPPUR
 - Sertifikasi Genset
- Pendidikan kompetensi dasar, kepemimpinan karir, teknis dan penyegaran fokus pada bidang:
 - Perkreditan untuk *Credit Analyst (CA)*, *Relationship Manager (RM)*, Admin Kredit.
 - Bidang Pendanaan, pemasaran produk dana dan jasa untuk tenaga *Funding Officer (FO)*.
 - Bidang *Dealer* yaitu memberikan pendidikan khusus yang menyangkut penempatan dana di pasar uang dan modal.
 - Bidang Teknologi Informasi untuk *programmer*, analis teknologi informasi dan *networking*.
 - Bidang Auditor, Anti Fraud (Investigasi), Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum.
 - Bidang layanan untuk Teller dan *Customer Service* untuk meningkatkan layanan serta *service excellent*.
 - Bidang akuntansi, perencanaan keuangan, perpajakan dan pengadaan, *marketer* dan *planner*.

- c. Pengembangan leadership untuk Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Departemen, Pemimpin KCP dan Pemimpin Kantor Kas yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional bisnis yaitu:
- Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK)
 - Pendidikan Pimpinan Cabang (PINCAB)
 - Manager Development Program (Grade 7)
 - Pendidikan Officer Development Program (ODP)/SDP
 - NAOP (New Assistant Orientation Program)

- d. Pemantauan efektivitas pelaksanaan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

- *Technical training aligned with functional roles;*
- *Refresher training for general competencies required for specific positions;*

Fulfillment of education and certification requirements based on job competency needs, including:

- *Risk Management Certification Levels 4, 5, 6, and 7;*
- *Credit Certification (Brevet Kredit);*
- *General Banking Certification Levels I, II, and III;*
- *Compliance Certification Levels I, II, and III;*
- *Treasury Dealer Certification Levels I, II, and III;*
- *Procurement Certification (Goods and Services);*
- *Auditor and Anti-Fraud Certification;*
- *SPPUR Certification;*
- *Genset (Generator) Certification.*

Core competency development programs focus on the following areas:

- *Lending: Credit Analysts (CA), Relationship Managers (RM), and Credit Administration;*
- *Funding: Product marketing and funding services for Funding Officers (FO);*
- *Treasury/Dealer: Specialized training related to fund placement in money and capital markets;*
- *Information Technology: For programmers, IT analysts, and network specialists;*
- *Governance Functions: Auditors, Anti-Fraud (investigation), Risk Management, Compliance, and Legal;*
- *Customer Service: Teller and Customer Service training to enhance service quality and service excellence;*
- *Finance & Support Functions: Accounting, financial planning, taxation, procurement, marketing, and planning.*

- c. *Leadership Development*

Leadership development programs for Division Heads, Branch Managers, Department Heads, Sub-Branch Managers, and Cash Office Heads, aligned with business operational needs, include:

- *Bank Staff and Leadership School (SESPIBANK);*
- *Branch Leadership Program (PINCAB);*
- *Manager Development Program (Grade 7);*
- *Officer Development Program (ODP/SDP);*
- *New Assistant Orientation Program (NAOP).*

- d. *Continuous monitoring of training effectiveness and ongoing enhancement of education and training*



- e. Hasil asesmen pegawai akan digunakan untuk menyusun analisa kebutuhan pendidikan pegawai atau Training Needs Analysis (TNA) secara tepat sehingga tujuan peningkatan kompetensi pegawai dapat tercapai secara efektif.

KEBIJAKAN SERTA PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI

Pelaksanaan Rekrutmen dan Pengembangan Karir Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor: 57/DIR-BPD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 76/DIR-BPD/XI/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Manajemen Karir PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor: 85/DIR-BPD/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Manajemen Rekrutmen PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 79.3/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Program Pelatihan Kerja Abdi Bank Papua PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
4. Buku Pedoman Manajemen Talenta PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2025.
5. Buku Pedoman Analisa Beban Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2025.

Dengan meningkatnya pengembangan jaringan bisnis Bank Papua, maka kebutuhan akan sumber daya manusia dari sisi kuantitas tanpa mengabaikan kualitasnya sangat dibutuhkan, maka dilakukan upaya guna memenuhi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia melalui pengaplikasian Manajemen Talenta.

Pengelolaan talenta yang sistematis dan terintegrasi dapat mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, baik dalam hal pengembangan SDM maupun terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua melalui kontribusi talenta-talenta pilihan. Rekrutmen dan Seleksi serta Pengembangan Talenta merupakan bagian dari proses Manajemen Talenta yang dilaksanakan di Bank Papua.

REKRUTMEN DAN SELEKSI

Rekrutmen dan seleksi di Bank Papua bertujuan untuk mengidentifikasi, menarik, dan memilih pegawai berkualitas, baik dari internal maupun eksternal.

programs.

- e. Employee assessment results are utilized to develop a precise Training Needs Analysis (TNA), ensuring that competency development objectives are achieved effectively and in alignment with organizational needs.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE RECRUITMENT AND CAREER DEVELOPMENT

The implementation of recruitment and career development at PT Bank Pembangunan Daerah Papua is based on the following regulations:

1. Board of Directors' Decree No. 57/DIR-BPD/IX/2018 dated 12 September 2018 regarding the Amendment to Board of Directors' Decree No. 76/DIR-BPD/XI/2017 dated 29 December 2017 on Career Management;
2. Board of Directors' Decree No. 85/DIR-BPD/XII/2021 dated 29 December 2021 on Recruitment Management;
3. Board of Directors' Decree No. 79.3/DIR-BPD/XII/2024 dated 30 December 2024 on the Bank Papua Work Training Program;
4. Talent Management Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (2025);
5. Workload Analysis Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (2025).

With the expansion of Bank Papua's business network, the need for human capital—both in terms of quantity and quality—continues to increase. To address this, the Bank implements Talent Management practices to ensure both adequacy and quality of human capital.

Systematic and integrated talent management supports the achievement of the Company's strategic objectives, both in terms of human capital development and contribution to economic growth in Papua through high-quality talent. Recruitment, selection, and talent development are integral components of the Talent Management process implemented at Bank Papua.

RECRUITMENT AND SELECTION

Recruitment and selection at Bank Papua aim to identify, attract, and select high-quality candidates, both from



Perencanaan Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis organisasi. Setiap unit kerja bersama Divisi Manajemen Modal Manusia melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- Proyeksi bisnis: pertumbuhan bisnis dan ekspansi operasi.
- Analisis beban kerja: kebutuhan tambahan SDM atau penggantian posisi kunci.
- Peran strategis: posisi-posisi yang krusial untuk keberhasilan perusahaan.

Perencanaan ini mencakup identifikasi kebutuhan rekrutmen untuk beberapa jalur rekrutmen yaitu:

- a. Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Untuk pemenuhan pegawai pada jabatan dengan tingkatan *Entry Level/Staff*.
- b. ODP (Officer Development Program) dan Staff Development Program (SDP) serta Professional Hire
Untuk pemenuhan pegawai pada jabatan strategis atau posisi kunci dengan mengambil SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi dan potensi tinggi untuk ditempatkan dalam *talent pool*, baik dari internal maupun eksternal perusahaan guna memastikan ketersediaan SDM yang mampu mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

JALUR REKRUTMEN

- a. Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Rekrutmen pegawai kontrak bersumber dari eksternal Bank Papua dan terbuka untuk umum. Adapun tahapan seleksi yang dilakukan dalam rangkaian rekrutmen pegawai kontrak terdiri atas:
 - Seleksi Administrasi
 - Tes Potensi Akademik/Tes Pengetahuan Umum
 - Psikotes
 - Tes Wawancara
 - Tes Kesehatan
- b. ODP (Officer Development Program) dan Staff Development Program (SDP) serta Professional Hire
Untuk ODP jalur ini digunakan untuk mengisi posisi strategis atau posisi kunci dengan kandidat potensial yang berasal dari eksternal perusahaan. Bagi karyawan internal (staf), pengembangan karier dilakukan melalui jalur SDP (*Staff Development Program*) dengan uraian sebagai berikut:

internal and external sources.

Recruitment Planning

Recruitment planning is conducted by considering the organization's strategic needs. Each work unit, in coordination with the Human Capital Management Division, performs a needs analysis based on the following considerations:

- *Business projections: business growth and operational expansion;*
- *Workload analysis: additional human capital requirements or replacement of key positions;*
- *Strategic roles: positions that are critical to the Company's success.*

This planning includes the identification of recruitment needs through the following recruitment channels:

- a. *Fixed-Term Contract Employees (PKWT)*
To fulfill staffing needs for entry-level/staff positions.
- b. *Officer Development Program (ODP), Staff Development Program (SDP), and Professional Hire*
To fulfill strategic or key positions by recruiting high-quality individuals with strong competencies and high potential, who will be placed in the talent pool, either from internal or external sources, to ensure the availability of human capital capable of supporting the Company's strategic objectives.

RECRUITMENT CHANNELS

- a. *Fixed-Term Contract Employees (PKWT)*
Recruitment of contract employees is conducted externally and open to the public. The selection process includes:
 - *Administrative screening;*
 - *Academic potential test / general knowledge test;*
 - *Psychological assessment;*
 - *Interview;*
 - *Medical examination.*
- b. *Officer Development Program (ODP), Staff Development Program (SDP), and Professional Hire*
The ODP program is used to fill strategic or key positions with high-potential candidates sourced externally. For internal employees (staff), career development is conducted through the SDP (Staff Development Program), as follows:



Rekrutmen Internal:

- Diperuntukkan bagi pegawai Bank Papua yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke tingkat manajerial.
- Pegawai yang lolos proses seleksi internal akan mengikuti program pengembangan SDP (*Staff Development Program*).

Rekrutmen Eksternal:

- Dibuka bagi kandidat dari luar Bank Papua, dengan fokus pada *fresh graduate* yang memiliki potensi kepemimpinan dan keterampilan yang relevan.
- Kandidat yang diterima melalui jalur ini akan mengikuti program ODP intensif untuk mempersiapkan mereka menjadi *Assistant Manager*.

- c. Jalur Penerimaan Kontrak Khusus/Professional Hire:
Jalur ini difokuskan untuk mengisi posisi yang memerlukan keahlian, pengalaman, dan kompetensi khusus yang sulit ditemukan dari sumber internal.

• Rekrutmen Internal:

Dalam situasi tertentu, pegawai internal yang memiliki potensi untuk mengisi posisi tersebut akan diidentifikasi. Misalkan, pegawai pensiun yang dikaryakan kembali dan hanya untuk jabatan pemimpin cabang dan pemimpin divisi pada jabatan-jabatan yang memerlukan keahlian khusus.

• Rekrutmen Eksternal:

- Dibuka untuk kandidat dengan keahlian spesifik dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan posisi, seperti Manager, Assistant Vice President (AVC), atau Vice President (VP).
- Kandidat eksternal harus memiliki pengalaman yang signifikan di industri perbankan atau bidang terkait.

PROSES SELEKSI

Proses seleksi talenta untuk jalur ODP/SDP melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk menilai kemampuan, potensi, dan kesesuaian kandidat dengan kebutuhan strategis Bank Papua:

1. Seleksi Administratif
2. Asesmen Kompetensi dan Potensi
3. Wawancara Panel
4. Evaluasi Akhir dan Pengambilan Keputusan

Internal Recruitment:

- *Intended for Bank Papua employees with potential for managerial development;*
- *Employees who pass the internal selection process will participate in the SDP program.*

External Recruitment:

- *Open to candidates outside Bank Papua, primarily fresh graduates with leadership potential and relevant competencies;*
- *Selected candidates will participate in an intensive ODP program to prepare them for Assistant Manager roles.*

- c. *Special Contract / Professional Hire*

This recruitment channel is intended to fill positions requiring specialized expertise, experience, and competencies that are not readily available internally.

Internal Recruitment:

- *In specific cases, internal employees with relevant potential may be identified, including retired employees who are re-engaged for certain positions, particularly for branch and division leadership roles requiring specialized expertise.*

External Recruitment:

- *Open to candidates with specific expertise and relevant experience for positions such as Manager, Assistant Vice President (AVP), or Vice President (VP);*
- *Candidates must have significant experience in the banking industry or related fields.*

SELECTION PROCESS

The talent selection process for the ODP/SDP programs consists of several stages designed to assess candidates' capabilities, potential, and alignment with Bank Papua's strategic needs:

1. *Administrative screening;*
2. *Competency and potential assessment;*
3. *Panel interview;*
4. *Final evaluation and decision-making.*



PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI

Pengembangan karir pegawai merupakan salah satu komponen penting dalam program Manajemen Talenta di Bank Papua, dirancang untuk memastikan bahwa talenta yang telah teridentifikasi melalui proses rekrutmen dan seleksi dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman para talenta, yang nantinya akan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Langkah-langkah dalam Perencanaan Pengembangan Karir meliputi:

1. Identifikasi Jalur Karir dan Posisi Kunci:

- Menyusun jalur karir yang sesuai dengan aspirasi dan potensi talenta, yang mencakup rotasi kerja, penugasan proyek strategis, dan promosi ke peran yang lebih tinggi.
- Mengidentifikasi posisi-posisi kunci di organisasi yang menjadi target pengembangan karir talenta.

2. Penilaian Potensi dan Kinerja Talenta:

- Menggunakan hasil penilaian kinerja dan potensi sebagai dasar untuk menentukan kesiapan talenta untuk menempuh jalur karir yang telah direncanakan.
- Mengadakan diskusi antara talenta, atasan langsung, dan Divisi Manajemen Modal Manusia untuk merumuskan rencana pengembangan yang sesuai.

3. Program Pengembangan Kompetensi:

- Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan talenta dalam meningkatkan kompetensi teknis maupun kepemimpinan mereka.
- Menggunakan pendekatan *learning by doing*, *mentoring*, dan *coaching* untuk mempercepat pengembangan talenta sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Penugasan Proyek dan Pengayaan Pengalaman:

- Melibatkan talenta dalam proyek-proyek strategis yang memberikan tantangan baru dan meningkatkan pengalaman mereka di berbagai area bisnis.
- Menyusun program rotasi kerja yang memungkinkan talenta untuk memahami berbagai aspek operasional organisasi, sehingga mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan di masa depan.

EMPLOYEE CAREER DEVELOPMENT

Employee career development is a key component of the Talent Management program at Bank Papua, designed to ensure that talents identified through recruitment and selection processes are optimally developed in line with organizational needs. This program focuses on enhancing competencies, skills, and experience, which ultimately support the achievement of the Company's strategic objectives.

Career Development Planning Process

1. Identification of Career Paths and Key Positions

- Establishing career pathways aligned with the aspirations and potential of talents, including job rotation, strategic project assignments, and promotion to higher roles;*
- Identifying key positions within the organization as targets for talent development.*

2. Assessment of Talent Potential and Performance

- Utilizing performance and potential assessment results as the basis for determining talent readiness for the planned career path;*
- Conducting discussions among talents, direct supervisors, and the Human Capital Management Division to formulate appropriate development plans.*

3. Competency Development Programs

- Designing specific training and development programs to enhance both technical and leadership competencies;*
- Applying learning approaches such as learning by doing, mentoring, and coaching to accelerate talent development in line with organizational needs.*

4. Project Assignments and Experience Enrichment

- Involving talents in strategic projects that provide new challenges and broaden experience across business areas;*
- Implementing job rotation programs to enable talents to gain a comprehensive understanding of organizational operations and prepare them for future leadership roles.*



5. Pemantauan dan Penyesuaian Rencana

Pengembangan:

- Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan talenta dalam jalur pengembangan karir mereka.
- Menyusun penyesuaian rencana pengembangan jika diperlukan, berdasarkan umpan balik dari atasan langsung dan hasil penilaian kinerja.

PENILAIAN KERJA INDIVIDU

Unsur penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian atas target bisnis atau Rencana Kinerja Pegawai (RKP) yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian tersebut tertuang dalam penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang mencakup beberapa hal yaitu:

a. Aspek Kinerja

Aspek Kinerja menggunakan sistem *Balance Scorecard* yang terdiri atas Perspektif Finansial dan Non Finansial.

- Perspektif Finansial meliputi tolak ukur kinerja yang ditunjukkan secara langsung untuk meningkatkan profitabilitas bank, pencapaian pendapatan dan pengelolaan biaya.
- Perspektif Non Finansial terdiri atas Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Internal serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

b. Aspek Perilaku

Aspek Perilaku dinilai berdasarkan program tematik yang merupakan turunan dari Nilai-Nilai Perilaku Utama Budaya Perusahaan "SA IKHLAS" yang terdiri dari Integritas, Konsisten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Solusi dengan penerapan secara bertahap pada tahun 2023–2027.

Bentuk pengukuran penilaian implementasi perilaku tematik yaitu dengan penilaian individu menggunakan metode 360 derajat atau penilaian multi sumber yang terdiri atas penilaian dari Atasan, Bawahan, Rekan Kerja dan Penilaian Diri Sendiri dengan standar deviasi penilaian sebesar 25%.

Penilaian tersebut yang akan digunakan sebagai dasar Penilaian Kinerja Pegawai dalam aspek perilaku.

c. Aspek Pekerjaan Tambahan

Aspek ini menggambarkan aspek penilaian kepada pegawai dengan pemberian tugas khusus di luar *job profile* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Monitoring and Adjustment of Development Plans

- Conducting periodic evaluations of talent progress within their career development paths;
- Adjusting development plans as necessary based on feedback from direct supervisors and performance assessment results.

INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT

Performance evaluation is conducted based on the achievement of business targets or the Employee Performance Plan (RKP) established at the beginning of the period. The assessment is reflected in the Key Performance Indicators (KPI), which consist of the following components:

a. Performance Aspect

The performance aspect applies the Balanced Scorecard approach, comprising financial and non-financial perspectives:

- Financial Perspective: Measures performance directly related to improving the Bank's profitability, revenue achievement, and cost management;
- Non-Financial Perspective: Includes Customer Perspective, Internal Process Perspective, and Learning and Growth Perspective.

b. Behavioral Aspect

The behavioral aspect is assessed based on thematic programs derived from the Company's core values, "SA IKHLAS", which include Integrity, Consistency, Harmony, Loyalty, Adaptability, and Solution Orientation, implemented progressively during 2023–2027.

Behavioral assessment is conducted through a 360-degree evaluation (multi-source assessment), which includes input from supervisors, subordinates, peers, and self-assessment, with a standard deviation threshold of 25%.

The results of this assessment serve as the basis for evaluating employee performance in the behavioral aspect.

c. Additional Assignment Aspect

This aspect reflects the evaluation of employees assigned special duties beyond their standard job profile, in accordance with established policies.



d. Aspek Pengurang

Aspek pengurang mencakup penilaian tingkat kedisiplinan pegawai berkaitan dengan absensi serta Indeks Kepatuhan pegawai.

Penilaian KPI akan dilakukan oleh masing-masing pegawai (*self assessment*) berdasarkan realisasi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya dan kemudian akan dikomitekan oleh Komite Penilai yang terdiri atas seluruh level Pimpinan pada unit kerja pegawai tersebut.

Penilaian yang telah diputuskan oleh Komite Penilai selanjutnya akan diserahkan kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan (khusus penilaian Kantor Cabang) dan kemudian diteruskan ke Divisi Manajemen Modal Manusia. Untuk penilaian pegawai di Kantor Pusat akan disampaikan langsung kepada Divisi Manajemen Modal Manusia untuk diproses.

Seluruh nilai pegawai yang telah terkumpul, akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Direksi Khusus terkait KPI.

d. Deduction Aspect

This aspect includes the assessment of employee discipline, particularly attendance records and the employee compliance index.

KPI evaluation is initially conducted by each employee through self-assessment based on the realization of predetermined targets. The results are then reviewed and validated by the Performance Evaluation Committee, consisting of leaders at all levels within the respective work unit.

The final evaluation results determined by the Committee are submitted to the Network and Services Management Division (specifically for branch office assessments) and subsequently forwarded to the Human Capital Management Division. For Head Office employees, the assessment results are submitted directly to the Human Capital Management Division for processing.

All compiled employee performance scores are then reviewed and finalized in a Special Board of Directors Meeting related to KPI assessment.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support





Tinjauan Perkenomian

Economic Overview

PEREKONOMIAN GLOBAL

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global dihadapkan pada dinamika yang penuh ketidakpastian dengan kecenderungan pertumbuhan yang melambat. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan berada pada kisaran 3,1%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara maju yang belum sepenuhnya pulih serta meningkatnya fragmentasi ekonomi global. Meskipun tekanan inflasi global mulai mereda, tingkat inflasi masih relatif tinggi di beberapa negara akibat gangguan rantai pasok, kenaikan harga komoditas, serta kebijakan perdagangan yang bersifat protektif.

Tabel. 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia: Negara Maju dan Emerging Economies (% yoy)

	2023	2024	2025*	2026*	2027*	
Dunia	3,5	3,3	3,1	3,1	3,1	World
Negara Maju	1,7	1,8	1,7	1,6	1,8	Developed Countries
Amerika Serikat	2,9	2,8	2,0	2,0	2,1	United States
Kawasan Eropa	0,4	0,9	1,4	1,3	1,4	Europe
Jepang	1,2	0,1	1,0	0,5	0,5	Japan
Negara Berkembang	4,7	4,3	4,1	3,9	4,0	Developing Countries
Tiongkok	5,4	5,0	4,8	4,2	4,0	China
India	8,7	6,5	6,6	6,4	6,7	India
ASEAN-5	4,1	4,6	4,4	4,3	4,5	ASEAN-5
Amerika Latin	2,4	2,4	1,9	2,2	2,6	Latin America

GLOBAL ECONOMY

Throughout 2025, the global economy faced a highly uncertain environment with a tendency toward slower growth. Global economic growth is estimated at around 3.1%, lower than the previous year. This slowdown was mainly driven by the incomplete recovery of advanced economies and increasing global economic fragmentation. Although global inflationary pressures have started to ease, inflation levels remain relatively high in several countries due to supply chain disruptions, rising commodity prices, and protectionist trade policies.

Table 1. Global Economic Growth: Advanced Economies and Emerging Economies (% yoy)



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Dalam merespons kondisi tersebut, kebijakan moneter global pada umumnya tetap bersifat hati-hati. Bank sentral utama menunda penurunan suku bunga secara agresif guna menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan fiskal di berbagai negara semakin terbatas akibat tingginya defisit anggaran dan beban utang publik. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan stimulus dan mengarahkan kebijakan fiskal pada sektor-sektor prioritas.

Dari sisi risiko, perekonomian global masih dibayangi oleh ketegangan geopolitik yang berlanjut, baik di kawasan Eropa maupun Timur Tengah, serta meningkatnya rivalitas ekonomi antarnegara besar. Ketidakpastian tersebut berdampak pada *volatilitas* pasar keuangan dan arus modal global. Selain itu, perubahan iklim dan proses transisi energi turut menjadi tantangan struktural yang memerlukan penyesuaian kebijakan jangka menengah dan panjang.

Secara struktural, ekonomi global mengalami pergeseran menuju rantai pasok yang lebih berorientasi pada ketahanan. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi terus berkembang dan mendorong efisiensi serta produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Dari sisi demografi, penuaan penduduk di negara maju dan Tiongkok kontras dengan kondisi demografi yang lebih produktif di negara berkembang, termasuk di kawasan Asia.

Secara regional, perekonomian Amerika Serikat tumbuh melambat seiring kebijakan moneter yang ketat dan tekanan fiskal, meskipun sektor teknologi masih menjadi penopang utama. Tiongkok dan Asia Timur menghadapi perlambatan akibat lemahnya permintaan domestik dan tekanan eksternal. Sementara itu, negara-negara berkembang, khususnya di Asia, menunjukkan ketahanan yang relatif baik didukung oleh konsumsi domestik dan reformasi struktural.

Ke depan, prospek ekonomi global masih diwarnai oleh ketidakpastian. Dalam kondisi tersebut, stabilitas makroekonomi, pengelolaan risiko yang prudent, serta penguatan sumber-sumber pertumbuhan domestik menjadi kunci. Bagi Bank Pembangunan Daerah, dinamika ekonomi global ini menjadi landasan penting dalam memperkuat peran intermediasi, mendukung pembangunan daerah, serta menjaga kinerja dan ketahanan Bank secara berkelanjutan.

In response to these conditions, global monetary policy generally remained cautious. Major central banks delayed aggressive interest rate cuts to maintain price stability and financial system resilience. Meanwhile, fiscal policy space in many countries became increasingly constrained due to high budget deficits and public debt burdens. This situation has led governments to be more selective in providing stimulus and to focus fiscal policies on priority sectors.

From a risk perspective, the global economy continues to be overshadowed by ongoing geopolitical tensions, both in Europe and the Middle East, as well as increasing economic rivalry among major countries. This uncertainty has contributed to volatility in financial markets and global capital flows. In addition, climate change and the energy transition process pose structural challenges that require medium- to long-term policy adjustments.

Structurally, the global economy is shifting toward more resilient supply chains. Digitalization and the adoption of technology continue to expand, driving efficiency and productivity across various economic sectors. From a demographic perspective, aging populations in advanced economies and China contrast with the more productive demographic profiles of developing countries, particularly in Asia.

Regionally, the United States economy experienced slower growth amid tight monetary policy and fiscal pressures, although the technology sector remained a key support. China and East Asia faced a slowdown due to weak domestic demand and external pressures. Meanwhile, emerging economies, especially in Asia, demonstrated relatively strong resilience, supported by domestic consumption and structural reforms.

Looking ahead, the global economic outlook remains uncertain. In such conditions, maintaining macroeconomic stability, implementing prudent risk management, and strengthening domestic growth drivers are essential. For Regional Development Banks, these global economic dynamics serve as an important foundation for reinforcing their intermediation role, supporting regional development, and sustaining performance and resilience over the long term.



Perekonomian Nasional

National Economy

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11% (c-to-c), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dan daya tahan fundamental domestik yang kuat. Dari sisi nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083. Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga, ditopang oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta cadangan devisa yang memadai. Kinerja sektor eksternal pun tetap positif, ditandai dengan keberlanjutan surplus neraca perdagangan.

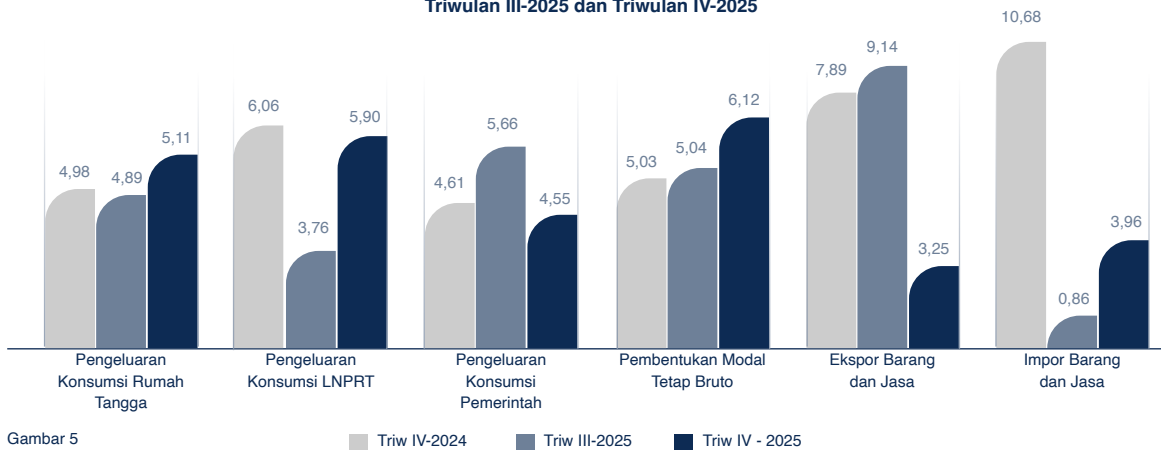
Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,39 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PMTB sebesar 6,12 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 5,90 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,11 persen; Komponen PK-P sebesar 4,55 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,25 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) tumbuh sebesar 3,96 persen.

Throughout 2025, Indonesia's economy demonstrated solid performance amid persistent global uncertainty. National economic growth reached 5.11% (c-to-c), higher than the previous year, reflecting sustained economic recovery and strong domestic fundamentals. In nominal terms, Gross Domestic Product (GDP) reached IDR 23,821.1 trillion, with GDP per capita of IDR 83.7 million or approximately USD 5,083. Macroeconomic stability remained well maintained, supported by controlled inflation, a relatively stable exchange rate, and adequate foreign exchange reserves. External sector performance also remained positive, as indicated by the continued trade surplus.

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2025 grew by 5.39% (y-on-y) compared to the fourth quarter of 2024. Growth was recorded across all expenditure components. The highest growth was achieved by Gross Fixed Capital Formation (GFCF) at 6.12%, followed by Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) consumption at 5.90%, household consumption at 5.11%, government consumption at 4.55%, and exports of goods and services at 3.25%. Imports of goods and services (a deductive component in GDP by expenditure) grew by 3.96%.



Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y)(persen), Triwulan IV-2024, Triwulan III-2025 dan Triwulan IV-2025



Gambar 5

Dari sisi struktural, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDB nasional. Namun demikian, geliat sektor jasa—seperti transportasi, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya—menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi, mencerminkan transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih modern dan berbasis layanan. Perbaikan juga tercermin pada indikator sosial, di mana tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi sekitar 4,85%, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47%, dan kemiskinan ekstrem semakin mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga semakin inklusif dan berkualitas.

Di balik capaian tersebut, kinerja ekonomi nasional ditopang oleh sejumlah faktor utama. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama dengan kontribusi lebih dari separuh PDB, didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga serta berbagai stimulus pemerintah. Investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta pertumbuhan ekspor juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspansi ekonomi. Meski demikian, tantangan tetap membayangi. Ketidakpastian global, *volatilitas* harga komoditas, serta tekanan geopolitik berpotensi memengaruhi arus perdagangan dan investasi. Di sisi domestik, tantangan struktural seperti peningkatan produktivitas, penguatan daya saing industri, serta pemerataan pembangunan antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah, terutama mengingat konsentrasi ekonomi yang masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi lebih dari 56% terhadap PDB nasional.

Structurally, Indonesia's economy continued to be supported by the manufacturing, trade, and agriculture sectors, which contributed significantly to national GDP. However, the services sector—such as transportation, information and communication, and other services—showed relatively strong growth, reflecting a shift toward a more modern, service-based economy. Improvements were also evident in social indicators, with the open unemployment rate declining to around 4.85%, the poverty rate decreasing to 8.47%, and extreme poverty approaching zero. This indicates that economic growth is not only quantitative but also increasingly inclusive and of higher quality.

Behind this performance, the national economy was driven by several key factors. Household consumption remained the primary growth engine, contributing more than half of GDP, supported by stable purchasing power and various government stimulus measures. Investment, as reflected in Gross Fixed Capital Formation (GFCF), along with export growth, also contributed significantly to economic expansion. Nevertheless, challenges persist. Global uncertainty, commodity price volatility, and geopolitical tensions may affect trade and investment flows. Domestically, structural challenges such as improving productivity, strengthening industrial competitiveness, and ensuring equitable regional development remain key priorities, especially given that economic activity is still concentrated on Java Island, which contributes more than 56% of national GDP.



Merespons dinamika tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjalankan bauran kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi melalui penyaluran bantuan sosial, subsidi, serta insentif bagi sektor prioritas dan UMKM. Di sisi moneter, Bank Indonesia menempuh kebijakan yang bersifat pre-emptive dan forward-looking untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan likuiditas yang memadai guna mendukung pertumbuhan kredit. Kebijakan makroprudensial juga dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor produktif dan inklusif. Sementara itu, OJK memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan melalui pengawasan berbasis risiko, penguatan regulasi, serta akselerasi transformasi digital dan keuangan berkelanjutan. Upaya ini dilengkapi dengan kebijakan struktural melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan ekosistem investasi.

Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap positif dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Konsumsi domestik, investasi, serta transformasi struktural ekonomi akan tetap menjadi pendorong utama. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor. Fokus ke depan diarahkan pada penguatan sektor produktif, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi hijau. Dalam saat yang sama, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama guna menjaga kepercayaan investor dan ketahanan ekonomi nasional.

In response to these dynamics, the Government, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority (OJK) implemented a coordinated and integrated policy mix. Fiscal policy was directed toward maintaining purchasing power and economic activity through social assistance, subsidies, and incentives for priority sectors and MSMEs. On the monetary side, Bank Indonesia adopted pre-emptive and forward-looking policies to maintain rupiah stability, control inflation, and ensure adequate liquidity to support credit growth. Macroprudential policies were also optimized to encourage financing to productive and inclusive sectors. Meanwhile, OJK strengthened the stability of the financial services sector through risk-based supervision, regulatory reinforcement, and acceleration of digital transformation and sustainable finance. These efforts were complemented by structural policies through deregulation, simplification of licensing, and strengthening the investment ecosystem.

Looking ahead, Indonesia's economic outlook remains positive, with stable and sustainable growth expected. Domestic consumption, investment, and structural economic transformation will continue to serve as key growth drivers. The Government also reaffirms its commitment to maintaining inclusive and competitive growth through strengthened cross-sector policy coordination. Future priorities include strengthening productive sectors, accelerating digital transformation, improving human capital quality, and advancing the green economy. At the same time, maintaining macroeconomic stability remains a top priority to sustain investor confidence and national economic resilience.



Perekonomian Daerah

Regional Economy

PROVINSI PAPUA

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Papua menunjukkan dinamika yang cukup moderat dengan karakteristik pertumbuhan yang masih bertumpu pada sektor ekstraktif. Pertumbuhan ekonomi Papua diperkirakan berada pada kisaran 4,0%–4,8%, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, khususnya tembaga dan emas. Struktur ekonomi Papua masih sangat terpusat pada sektor tersebut, meskipun sektor konstruksi, perdagangan, serta jasa pemerintahan mulai menunjukkan peningkatan peran seiring percepatan pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita Papua tergolong tinggi secara nominal akibat dominasi industri tambang berskala besar, namun kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah masih menjadi isu strategis. Di sisi lain, inflasi relatif terkendali pada kisaran 2,8%–3,5%, didukung oleh stabilitas pasokan bahan pokok dan penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

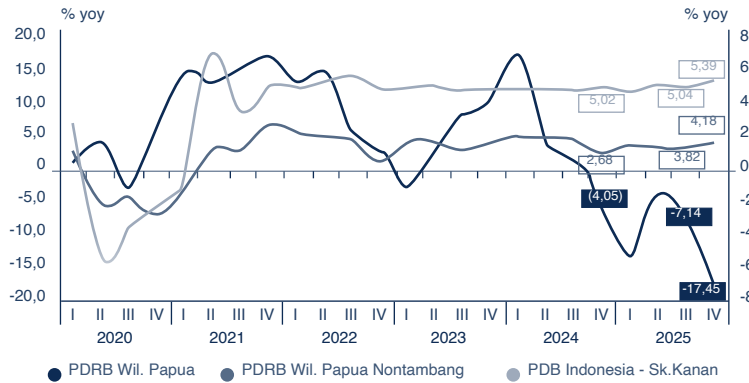
PAPUA PROVINCE

Throughout 2025, the economy of Papua Province demonstrated relatively moderate dynamics, with growth still largely driven by the extractive sector. Economic growth is estimated in the range of 4.0%–4.8%, with the primary contribution coming from mining and quarrying, particularly copper and gold. The economic structure remains highly concentrated in this sector, although construction, trade, and government services have begun to play a greater role alongside the acceleration of regional development.

In nominal terms, Papua's per capita income is relatively high due to the dominance of large-scale mining industries; however, income distribution disparities across regions remain a key issue. Inflation was relatively well controlled within the range of 2.8%–3.5%, supported by stable supply of essential goods and strengthened coordination of the Regional Inflation Control Team (TPID).



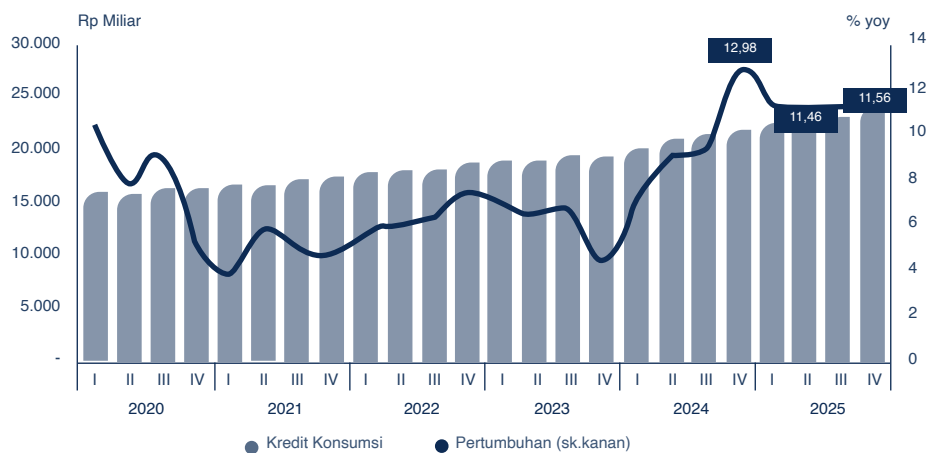
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Tambang



Dari sisi fundamental, kekuatan utama ekonomi Papua terletak pada kelimpahan sumber daya alam, yang menjadi magnet investasi nasional maupun global. Aktivitas investasi tetap berlanjut, terutama pada sektor pertambangan, energi, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah. Kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, termasuk otonomi khusus dan percepatan pembangunan Papua, turut memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Namun demikian, sejumlah faktor penghambat masih membayangi, antara lain keterbatasan infrastruktur di wilayah pedalaman, tingginya biaya logistik, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tambang juga meningkatkan risiko *volatilitas* terhadap fluktuasi harga komoditas global.

From a fundamental perspective, Papua's economic strength lies in its abundant natural resources, which attract both national and global investment. Investment activity continued, particularly in mining, energy, and basic infrastructure development such as roads, ports, and inter-regional connectivity. Local government policies aligned with national development agendas, including special autonomy and the acceleration of Papua development, have further supported economic activity. Nevertheless, several challenges persist, including limited infrastructure in remote areas, high logistics costs, and uneven human capital quality. Heavy dependence on the mining sector also increases vulnerability to global commodity price fluctuations.

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi



Ke depan, prospek ekonomi Papua tetap menjanjikan, terutama dengan peluang diversifikasi ekonomi menuju sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Proyeksi pertumbuhan diperkirakan tetap positif, seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Namun, tantangan utama terletak pada upaya mengurangi ketimpangan pembangunan, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah eksploitasi sumber daya alam. Dengan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Papua berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Looking ahead, Papua's economic prospects remain promising, particularly through opportunities for diversification into agriculture, fisheries, and tourism based on local wisdom. Growth is expected to remain positive, supported by continued infrastructure development and increased investment. However, key challenges include reducing regional disparities, improving human capital quality, and ensuring environmental sustainability amid natural resource exploitation. With inclusive and sustainable development strategies, Papua has the potential to become a new engine of growth in Eastern Indonesia.

PROVINSI PAPUA BARAT

Perekonomian Papua Barat pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 4,73% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan III 2025 yang kontraksi sebesar -0,13% (yoy). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada periode ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,39% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah dan total ekspor barang dan jasa yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 3,91% (yoy) dan 1,83% (yoy). Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat lebih lanjut masih tertahan karena melemahnya kinerja PMTB yang pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar -1,76% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 yang sebesar -1,10% (yoy). Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat triwulan IV 2025 masih ditopang oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan serta LU Pertambangan dan Penggalan yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 5,74% (yoy) dan 5,42% (yoy). Kinerja positif pada kedua sektor tersebut tidak terlepas dari tetap terjaganya aktivitas produksi LNG di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai kontributor utama yang pada periode laporan tercatat berlangsung stabil tanpa adanya penghentian sementara (maintenance). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menjaga volume produksi dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di Papua Barat pada periode laporan. Sementara itu, provinsi Papua Barat Daya tumbuh 4,09% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 4,03% (yoy) di triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan PMTB yang tumbuh masing-masing sebesar 2,98% (yoy) dan 2,13% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama pada sektor-sektor utama daerah. Selain itu, inflasi yang relatif terkendali turut mendorong terjaganya daya beli masyarakat.

WEST PAPUA PROVINCE

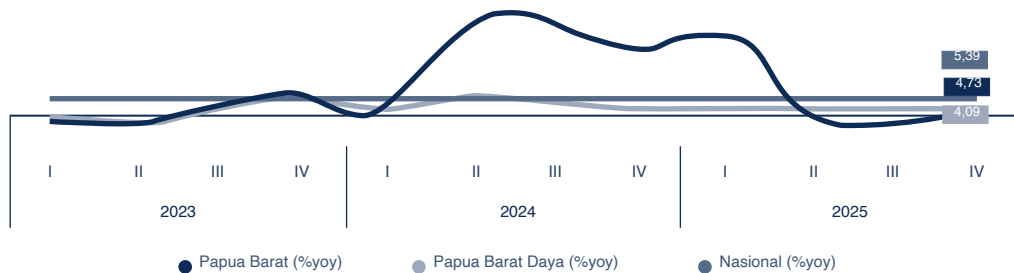
The economy of West Papua in the fourth quarter of 2025 grew by 4.73% (yoy), rebounding from a contraction of -0.13% (yoy) in the third quarter of 2025. However, this growth remained lower than the national growth rate of 5.39% (yoy). From the expenditure side, growth was primarily driven by government consumption and total exports of goods and services, which increased by 3.91% (yoy) and 1.83% (yoy), respectively. Further growth in West Papua was constrained by the weakening performance of Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which contracted by -1.76% (yoy) in the fourth quarter of 2025, deeper than the -1.10% contraction recorded in the third quarter of 2025. From a sectoral perspective, economic growth in West Papua during Q4 2025 was supported by the manufacturing sector and the mining and quarrying sector, which grew by 5.74% (yoy) and 5.42% (yoy), respectively. The positive performance of these sectors was largely supported by stable LNG production activities in Teluk Bintuni Regency, which continued without temporary shutdowns (maintenance) during the reporting period. This stability helped maintain production volumes and supported economic growth acceleration in West Papua. Meanwhile, Southwest Papua Province recorded economic growth of 4.09% (yoy) in the fourth quarter of 2025, an increase from 4.03% (yoy) in the previous quarter. This improvement was driven by accelerated household consumption and GFCF, which grew by 2.98% (yoy) and 2.13% (yoy), respectively. Household consumption growth was supported by improved income levels compared to the same period in the previous year, particularly in key regional sectors. In addition, relatively controlled inflation helped sustain household purchasing power.



Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan IV tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,73% (yoy). Sementara itu, pada periode yang sama Papua Barat Daya juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,09 % (yoy). Pertumbuhan di Papua Barat utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah dan total ekspor barang dan jasa. Di sisi lain, pertumbuhan Papua Barat Daya didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan PMTB

From a sectoral perspective, economic growth in West Papua in Q4 2025 was supported by the manufacturing sector and mining and quarrying, which grew by 5.74% (yoy) and 5.42% (yoy), respectively. This performance was supported by stable LNG production activities in Teluk Bintuni Regency, which continued without interruption during the reporting period, thereby maintaining production volume and supporting economic growth.

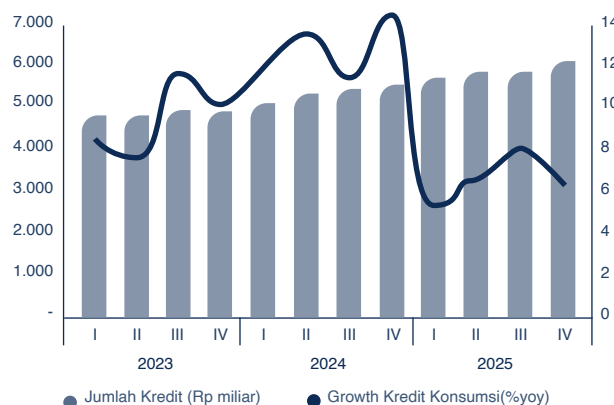
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya



Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan IV tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,73% (yoy). Sementara itu, pada periode yang sama Papua Barat Daya juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,09 % (yoy). Pertumbuhan di Papua Barat utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah dan total ekspor barang dan jasa. Di sisi lain, pertumbuhan Papua Barat Daya didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan PMTB.

Meanwhile, Southwest Papua Province recorded economic growth of 4.09% (yoy) in Q4 2025, slightly higher than 4.03% (yoy) in the previous quarter. This increase was driven by stronger household consumption and GFCF, which grew by 2.98% (yoy) and 2.13% (yoy), respectively. Household consumption growth was supported by improved income levels compared to the same period in the previous year, particularly in key regional sectors, along with controlled inflation that helped maintain purchasing power.

Grafik 1.3. Kredit Konsumsi Papua Barat



Ke depan, arah pembangunan ekonomi Papua Barat semakin mengarah pada transformasi yang lebih bernilai tambah. Peluang terbuka lebar melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, serta industri pengolahan non-migas sebagai upaya diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang inklusif melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat lokal. Meski prospeknya positif, tantangan tetap ada, khususnya dalam menekan ketimpangan antarwilayah, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Dengan orkestrasi kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, Papua Barat berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur.

Looking ahead, West Papua's economic development is increasingly oriented toward higher value-added transformation. Opportunities lie in the development of tourism, fisheries, and non-oil and gas processing industries as part of economic diversification efforts. Local governments continue to promote inclusive development through improvements in education, healthcare, and community-based economic strengthening. Despite positive prospects, challenges remain, particularly in reducing regional disparities, improving workforce competencies, and maintaining a balance between resource exploitation and environmental sustainability. With appropriate policy orchestration and cross-stakeholder collaboration, West Papua has the potential to strengthen its role as a key economic growth center in Eastern Indonesia.



Analisis Industri Perbankan

Banking Industry Analysis

Memasuki tahun 2025, industri perbankan Indonesia berada pada fase konsolidasi sekaligus transformasi, di mana stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah akselerasi digitalisasi dan tuntutan keberlanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan inovasi melalui kebijakan yang semakin adaptif dan forward-looking. Implementasi pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) terbukti efektif dalam mendorong konsolidasi industri dan memperkuat struktur perbankan nasional, di mana bank-bank besar menjadi motor inovasi dan ekspansi, sementara bank dengan modal lebih kecil diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada ceruk pasar tertentu. Kebijakan makroprudensial BI, termasuk Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), turut mendorong penyaluran kredit, khususnya ke sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di saat yang sama, penguatan regulasi bank digital dan pengembangan ekosistem keuangan syariah mencerminkan upaya regulator dalam memastikan inovasi berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Struktur industri perbankan masih menunjukkan konsentrasi yang relatif tinggi dengan dominasi bank-bank besar, namun lanskap persaingan semakin dinamis seiring hadirnya bank digital dan perusahaan financial technology (*fintech*) yang menawarkan layanan cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi. Disrupsi ini terutama terasa pada segmen ritel dan sistem pembayaran, tetapi juga membuka peluang baru, khususnya pada pembiayaan UMKM yang masih memiliki kesenjangan pembiayaan yang signifikan. Segmentasi pasar menjadi semakin terfragmentasi, di mana bank konvensional besar cenderung fokus pada segmen korporasi dan komersial, bank digital agresif menyasar generasi muda dan masyarakat unbanked, sementara perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil seiring meningkatnya preferensi terhadap layanan berbasis prinsip syariah. Produk-produk seperti tabungan digital, deposito berbasis aplikasi, serta kredit konsumsi dan produktif tetap menjadi pilihan utama masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan.

Entering 2025, Indonesia's banking industry is in a phase of consolidation and transformation, where financial system stability remains well maintained amid accelerating digitalization and increasing sustainability demands. The Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) play a central role in maintaining a balance between growth, stability, and innovation through increasingly adaptive and forward-looking policies. The implementation of bank classification based on core capital (KBMI) has proven effective in encouraging industry consolidation and strengthening the national banking structure, where large banks act as drivers of innovation and expansion, while smaller-capital banks are directed to improve efficiency and focus on niche markets. BI's macroprudential policies, including the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM), have also supported credit growth, particularly to MSMEs as the backbone of the national economy. At the same time, strengthened regulations for digital banks and the development of the Islamic finance ecosystem reflect regulators' efforts to ensure that innovation aligns with prudential principles and consumer protection.

The structure of the banking industry continues to show relatively high concentration, dominated by large banks; however, the competitive landscape is becoming increasingly dynamic with the emergence of digital banks and financial technology (fintech) companies offering fast, flexible, and technology-based services. This disruption is particularly evident in the retail and payment system segments, while also creating new opportunities, especially in MSME financing, which still faces a significant financing gap. Market segmentation is becoming more fragmented, where large conventional banks tend to focus on corporate and commercial segments, digital banks aggressively target younger generations and the unbanked population, while Islamic banking continues to demonstrate steady growth in line with increasing preference for Sharia-based services. Products such as digital savings accounts, app-based time deposits, and consumer and productive loans remain the primary choices for customers who increasingly prioritize convenience and speed of service.



Industri perbankan juga dihadapkan pada berbagai isu strategis yang membentuk arah masa depan sektor ini. Transformasi digital menjadi pendorong utama perubahan, ditandai dengan meningkatnya adopsi layanan *mobile Banking*, pemanfaatan *artificial intelligence*, serta pengembangan ekosistem *open Banking*. Namun, di balik peluang tersebut, risiko keamanan siber dan kebutuhan investasi teknologi yang besar menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, agenda keberlanjutan (ESG) semakin menguat sebagai bagian integral dari strategi bisnis perbankan, sejalan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan yang mendorong pembiayaan hijau, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta peningkatan transparansi pelaporan. Perubahan perilaku konsumen juga menjadi faktor kunci, di mana nasabah kini menginginkan layanan yang lebih cepat, personal, dan terintegrasi secara digital, sehingga mendorong bank untuk melakukan transformasi model bisnis dari berbasis cabang menjadi berbasis ekosistem digital.

BANK UMUM KONVENSIONAL

Sepanjang tahun 2025, industri Bank Umum Konvensional (BUK) Indonesia menunjukkan kondisi yang stabil dan resilien di tengah dinamika global serta persaingan domestik yang semakin intensif. Secara umum, indikator permodalan, kualitas aset, likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas berada dalam level yang sehat serta mencerminkan kapasitas industri dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Per Desember 2025, industri Bank Umum Konvensional (BUK) Indonesia menunjukkan fundamental yang kuat dengan total aset sebesar Rp13.646.417miliar, didukung oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp10.057.542 miliar dan kredit serta pembiayaan sebesar Rp8.693.971 miliar. Fungsi intermediasi tetap berjalan optimal dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,00%, berada dalam koridor Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

The banking industry is also facing various strategic issues that will shape its future direction. Digital transformation has become the main driver of change, marked by the increasing adoption of mobile banking services, the use of artificial intelligence, and the development of open banking ecosystems. However, alongside these opportunities, cybersecurity risks and the need for substantial technology investments present significant challenges that cannot be overlooked. In addition, the sustainability agenda (ESG) is gaining stronger traction as an integral part of banking business strategies, in line with sustainable finance policies that promote green financing, environmental and social risk management, and enhanced reporting transparency. Changes in consumer behavior are also a key factor, as customers increasingly demand faster, more personalized, and digitally integrated services. This trend is driving banks to transform their business models from branch-based operations to digital ecosystem-based platforms.

CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS

Throughout 2025, Indonesia's Conventional Commercial Banking (BUK) industry demonstrated stable and resilient performance amid global dynamics and increasingly intense domestic competition. Overall, key indicators—including capital adequacy, asset quality, liquidity, efficiency, and profitability—remained at sound levels, reflecting the industry's capacity to maintain stability while supporting national economic growth.

As of December 2025, the BUK industry showed strong fundamentals, with total assets reaching IDR 13,646,417 billion, supported by Third-Party Funds (DPK) of IDR 10,057,542 billion and loans and financing of IDR 8,693,971 billion. The intermediation function remained optimal, with a Loan to Deposit Ratio (LDR) of 84.00%, within the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) corridor.

Akun	KBMI 1	KBMI 2	KBMI 3	KBMI 4	Total
	(Rp Miliar)				
Aset	1.309.081,10	1.600.990,09	3.725.442,62	7.010.903,22	13.646.417,03
DPK	930.499,25	992.974,94	2.757.939,01	5.376.129,52	10.057.542,72
Kredit/Pembiayaan	757.558,60	862.683,49	2.390.426,52	4.683.303,01	8.693.971,62
Laba Bersih					262.183,46

Sumber : Portal OJK, diolah



Dari sisi profitabilitas, industri membukukan laba bersih sebesar Rp307.269 miliar dengan pendapatan bunga bersih Rp572.220 miliar. Kinerja tersebut menghasilkan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,51% dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,72%, mencerminkan kemampuan industri dalam menjaga *margin* di tengah dinamika biaya dana.

Permodalan industri tetap sangat kuat dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 26,05% dan Rasio Modal Inti terhadap ATMR sebesar 24,82%, jauh di atas ketentuan minimum regulator. Struktur permodalan ini memberikan ruang yang memadai untuk ekspansi usaha sekaligus menyerap potensi risiko.

Dari sisi efisiensi, rasio BOPO sebesar 73,10% menunjukkan operasional yang relatif terkendali dan efisien. Sementara itu, Rasio Aset Likuid sebesar 10,87% menegaskan likuiditas industri yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

From a profitability perspective, the industry recorded net income of IDR 307,269 billion, with net interest income of IDR 572,220 billion. This performance resulted in a Return on Assets (ROA) of 2.51% and a Net Interest Margin (NIM) of 4.72%, reflecting the industry's ability to maintain margins amid funding cost dynamics.

The industry's capital position remained very strong, with a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 26.05% and a Core Capital to Risk-Weighted Assets Ratio of 24.82%, both well above regulatory minimum requirements. This capital structure provides ample room for business expansion while absorbing potential risks.

In terms of efficiency, the Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio of 73.10% indicates relatively well-controlled and efficient operations. Meanwhile, the Liquid Assets Ratio of 10.87% confirms adequate liquidity to meet short-term obligations.

Akun	2025	Akun
Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%)	25,89	Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%)
Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)	24,63	Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)
<i>Return On Assets Ratio (%)</i>	2,53	<i>Return On Assets Ratio (%)</i>
Biaya Operasional thdp Pendapatan Operasional (%)	72,96	Biaya Operasional thdp Pendapatan Operasional (%)
Net Interest Margin Ratio (%)	4,72	Net Interest Margin Ratio (%)
Loan to Deposits Ratio (%)	85,37	Loan to Deposits Ratio (%)
Rasio Aset Likuid (%)	9,63	Rasio Aset Likuid (%)

Sumber : Portal OJK

Secara keseluruhan, kombinasi permodalan yang kuat, likuiditas yang sehat, intermediasi yang terjaga, serta profitabilitas yang solid menempatkan industri Bank Umum Konvensional Indonesia pada posisi yang stabil dan resilien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Overall, the combination of strong capital, sound liquidity, well-maintained intermediation, and solid profitability positions Indonesia's Conventional Commercial Banking industry in a stable and resilient position to support sustainable national economic growth.



IMPLIKASI INDUSTRI PERBANKAN TERHADAP STRATEGI BANK PAPUA

Dinamika industri perbankan nasional tahun 2025 yang ditandai oleh penguatan regulasi, meningkatnya persaingan, serta akselerasi transformasi digital memberikan implikasi strategis bagi Bank Papua dalam merumuskan arah bisnis yang lebih fokus dan adaptif. Menyikapi hal tersebut, Bank Papua mengarahkan strategi pada penguatan platform bisnis secara berkelanjutan serta akselerasi pemasaran dan penjualan pada sektor-sektor terpilih, khususnya kredit produktif UMKM yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi daerah.

Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, Bank Papua memperkuat keunggulan berbasis *Captive Market* melalui sinergi dengan pemerintah daerah, ASN, serta ekosistem terkait, sekaligus memperluas basis nasabah di luar captive melalui penguatan fungsi marketing dan sales. Di sisi lain, disrupsi digital mendorong Bank untuk meningkatkan kapabilitas teknologi informasi dan pengembangan layanan digital guna menjaga relevansi dan daya saing.

Implikasi terhadap manajemen risiko tercermin pada penguatan penerapan prinsip kehati-hatian melalui kerangka *three lines of defence* serta penetapan *risk appetite* yang konservatif, khususnya pada risiko kredit, likuiditas, dan permodalan. Hal ini memastikan bahwa strategi pertumbuhan tetap selaras dengan kapasitas permodalan, kualitas aset, dan stabilitas likuiditas Bank.

Selain itu, tren keuangan berkelanjutan mendorong Bank Papua untuk mulai mengintegrasikan prinsip sustainable finance dalam kebijakan bisnis, termasuk pengembangan value proposition produk berbasis *green financing*. Penguatan organisasi, budaya kerja, serta kapabilitas SDM juga menjadi bagian integral dalam memastikan efektivitas eksekusi strategi.

Secara keseluruhan, Bank Papua menempatkan strategi yang berimbang antara pertumbuhan, efisiensi, dan pengelolaan risiko, dengan memanfaatkan keunggulan sebagai Bank Pembangunan Daerah. Pendekatan ini memperkuat peran Bank sebagai agen pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

IMPLICATIONS OF THE BANKING INDUSTRY ON BANK PAPUA'S STRATEGY

The dynamics of Indonesia's banking industry in 2025—marked by strengthened regulation, intensifying competition, and accelerated digital transformation—have strategic implications for Bank Papua in shaping a more focused and adaptive business direction. In response, Bank Papua has directed its strategy toward strengthening its business platform sustainably and accelerating marketing and sales in selected sectors, particularly productive MSME lending, which is closely linked to the regional economy.

Amid increasingly intense competition, Bank Papua leverages its captive market advantage through synergies with regional governments, civil servants, and related ecosystems, while also expanding its customer base beyond the captive segment through strengthened marketing and sales functions. At the same time, digital disruption has driven the Bank to enhance its information technology capabilities and develop digital services to maintain relevance and competitiveness.

The implications for risk management are reflected in the strengthened implementation of prudential principles through the three lines of defense framework, along with the establishment of a conservative risk appetite, particularly in credit, liquidity, and capital risks. This ensures that growth strategies remain aligned with the Bank's capital capacity, asset quality, and liquidity stability.

In addition, the growing trend of sustainable finance encourages Bank Papua to begin integrating sustainability principles into its business policies, including the development of green financing-based product value propositions. Strengthening organizational structure, corporate culture, and human capital capabilities also forms an integral part of ensuring effective strategy execution.

Overall, Bank Papua adopts a balanced strategy between growth, efficiency, and risk management, leveraging its strengths as a Regional Development Bank. This approach reinforces the Bank's role as an agent of regional economic development while enhancing its competitiveness amid the evolving dynamics of the banking industry.



Analisis Posisi Bank Papua dalam Industri Perbankan Indonesia Tahun 2025

Analysis of Bank Papua's Position in the Indonesian Banking Industry in 2025

Di tengah lanskap industri perbankan Indonesia yang semakin kompetitif dan tersegmentasi, Bank Papua menempati posisi strategis sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Secara struktur industri, perbankan nasional masih didominasi oleh bank-bank besar (KBMI 3 dan 4) dengan pangsa aset dan dana pihak ketiga yang signifikan. Namun demikian, BPD seperti Bank Papua memiliki keunggulan komparatif pada kedekatan geografis, pemahaman karakteristik ekonomi lokal, serta hubungan kelembagaan yang kuat dengan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, posisi Bank Papua relatif solid dalam kelompok BPD, dengan peran utama sebagai pengelola kas daerah sekaligus penyalur pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya UMKM dan program-program pemerintah daerah. Fungsi ini menjadikan Bank Papua memiliki basis pendanaan yang stabil melalui dana giro pemerintah daerah, serta peluang ekspansi kredit yang selaras dengan agenda pembangunan daerah. Di sisi lain, kontribusi Bank Papua terhadap inklusi keuangan di wilayah Papua juga menjadi nilai strategis, mengingat tingkat akses keuangan di kawasan tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah barat Indonesia.

Total aset Bank Papua tercatat sebesar Rp34.343 miliar dengan pangsa pasar sebesar 0,23% terhadap industri perbankan nasional. Angka ini mencerminkan bahwa secara nasional Bank Papua masih berada pada kategori *niche player*, namun memiliki posisi yang cukup kuat di segmen BPD dengan kontribusi sekitar 3,23%.

Amid an increasingly competitive and segmented Indonesian banking industry, Bank Papua holds a strategic position as a Regional Development Bank (BPD) that plays a key role in supporting economic development in Eastern Indonesia. Structurally, the national banking industry remains dominated by large banks (KBMI 3 and 4) with significant shares of assets and third-party funds. However, BPDs such as Bank Papua possess comparative advantages in terms of geographical proximity, deep understanding of local economic characteristics, and strong institutional relationships with regional governments.

In 2025, Bank Papua maintained a relatively solid position within the BPD group, with its primary role as a regional treasury manager and a provider of financing to productive sectors, particularly MSMEs and regional government programs. This role enables the Bank to maintain a stable funding base through regional government demand deposits, while also providing opportunities for credit expansion aligned with regional development agendas. In addition, Bank Papua's contribution to financial inclusion in Papua represents a strategic value, given that financial access in the region remains relatively lower compared to Western Indonesia.

Bank Papua's total assets reached IDR 34,343 billion, representing a market share of 0.23% of the national banking industry. This figure indicates that, at the national level, Bank Papua remains a niche player; however, it holds a relatively strong position within the BPD segment, contributing approximately 3.23%.

Uraian	Bank Papua	KBMI 1	BPD	Industri Perbankan	Pangsa Pasar (%)		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)	KBMI 1	BPD	Industri Perbankan
Aset	34.343	1.307.875	1.063.581	14.687.643	2,63%	3,23%	0,23%
Kredit	22.553	757.559	671.964	8.693.971	2,98%	3,36%	0,26%
DPK	26.171	930.499	792.240	10.057.542	2,81%	3,30%	0,26%



Uraian	Bank Papua	KBMI 1	BPD	Industri Perbankan	Pangsa Pasar (%)		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)	KBMI 1	BPD	Industri Perbankan
Laba Bersih	472	13.743	13.531	262.183	3,43%	3,49%	0,18%

Sumber : Portal OJK dan Bank Papua, diolah

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Papua mencapai Rp22.553 miliar dengan pangsa pasar 0,26% terhadap industri dan 3,36% dalam kelompok BPD. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank Papua berjalan cukup efektif, khususnya dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp26.171 miliar dengan pangsa pasar 0,26% secara nasional dan 3,30% di kelompok BPD mengindikasikan struktur pendanaan yang relatif stabil, terutama didukung oleh dana pemerintah daerah sebagai *Captive Market*.

Dari perspektif profitabilitas, laba bersih Bank Papua sebesar Rp472 miliar mencerminkan pangsa sebesar 0,18% terhadap industri dan sekitar 3,49% dalam kelompok BPD. Meskipun secara nominal lebih kecil dibandingkan bank nasional, kinerja ini menunjukkan kemampuan Bank Papua dalam menghasilkan laba yang kompetitif di antara sesama BPD.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa posisi Bank Papua dalam industri perbankan dapat dikategorikan sebagai *strong regional player* dengan kekuatan utama pada pasar domestik wilayah operasionalnya. Pangsa pasar yang relatif lebih tinggi di kelompok BPD dibandingkan industri nasional menunjukkan bahwa strategi berbasis kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman ekonomi lokal masih menjadi keunggulan kompetitif utama.

Namun demikian, keterbatasan skala usaha dibandingkan industri perbankan nasional juga menjadi tantangan, khususnya dalam hal efisiensi, inovasi produk, dan daya saing digital. Oleh karena itu, ke depan Bank Papua perlu terus memperkuat strategi diferensiasi melalui pengembangan ekosistem daerah, peningkatan kualitas layanan digital, serta optimalisasi pembiayaan sektor produktif guna meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisinya secara berkelanjutan di industri perbankan nasional.

From an intermediation perspective, Bank Papua's loan portfolio reached IDR 22,553 billion, representing a market share of 0.26% of the national industry and 3.36% within the BPD group. This indicates that the Bank's intermediation function has been operating effectively, particularly in supporting regional economic financing. Meanwhile, Third-Party Funds (DPK) amounted to IDR 26,171 billion, with a market share of 0.26% nationally and 3.30% within the BPD group, reflecting a relatively stable funding structure, largely supported by regional government funds as a captive market.

From a profitability perspective, Bank Papua recorded a net income of IDR 472 billion, representing a market share of 0.18% of the national industry and approximately 3.49% within the BPD group. Although smaller in nominal terms compared to national banks, this performance demonstrates the Bank's ability to generate competitive earnings among its BPD peers.

Overall, this analysis confirms that Bank Papua's position within the banking industry can be categorized as a strong regional player, with its primary strength rooted in its domestic market within its operational regions. The relatively higher market share within the BPD group compared to the national industry indicates that a strategy based on close relationships with regional governments and a strong understanding of the local economy remains its key competitive advantage.

However, limitations in business scale compared to the national banking industry present challenges, particularly in terms of efficiency, product innovation, and digital competitiveness. Therefore, going forward, Bank Papua needs to strengthen its differentiation strategy through the development of regional ecosystems, enhancement of digital service quality, and optimization of financing in productive sectors to increase market share and sustainably reinforce its position within the national banking industry.





Strategi Perusahaan

Corporate Strategy

Memasuki periode transformasi bisnis yang semakin dinamis, Bank Papua menetapkan arah strategi yang terstruktur dan berorientasi pada penguatan nilai tambah jangka panjang. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penguatan fundamental kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta pengelolaan risiko yang *prudent*. Seluruh langkah strategis tersebut dirancang sejalan dengan corporate plan dan rencana bisnis Bank, dengan menempatkan penguatan platform bisnis sebagai fondasi utama dalam mendorong keberlanjutan kinerja.

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif dan transformasional, Bank Papua menetapkan langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur guna memastikan keberlanjutan kinerja serta penguatan peran sebagai Bank Pembangunan Daerah. Strategi ini dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek bisnis, operasional, teknologi, sumber daya manusia, serta tata kelola dan manajemen risiko, yaitu :

1. Penguatan Permodalan dan Sinergi Pemegang Saham
Bank Papua terus memperkuat struktur permodalan melalui optimalisasi komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemegang saham. Upaya ini dilakukan untuk mendukung ekspansi bisnis, meningkatkan kapasitas

Entering a period of increasingly dynamic business transformation, Bank Papua has established a structured strategic direction oriented toward strengthening long-term value creation. This strategy not only focuses on business growth but also on strengthening institutional fundamentals, improving service quality, and implementing prudent risk management. All strategic initiatives are aligned with the Bank's corporate plan and business plan, placing business platform strengthening as the main foundation for sustaining performance.

In addressing the increasingly competitive and transformational banking landscape, Bank Papua has formulated targeted and measurable strategic initiatives to ensure sustainable performance and reinforce its role as a Regional Development Bank. These strategies are designed comprehensively by integrating business, operations, technology, human capital, governance, and risk management aspects, as follows:

1. *Strengthening Capital and Shareholder Synergy*
Bank Papua continues to strengthen its capital structure through optimized communication and synergy with all shareholders. This effort supports business expansion, enhances intermediation capacity, and strengthens



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

intermediasi, serta memperkuat ketahanan Bank dalam menghadapi risiko. Peningkatan kinerja laba juga menjadi fokus guna memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

resilience against risks. Improving profitability is also a priority to contribute optimally to Regional Original Revenue (PAD).

2. Penguatan Ekosistem Pemerintah Daerah (*Captive Market*)

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Bank Papua mengembangkan berbagai layanan berbasis ekosistem, seperti *Cash Management System* (CMS), layanan transaksi non-tunai, payroll, serta digitalisasi layanan publik. Strategi ini tidak hanya memperkuat basis pendanaan, tetapi juga meningkatkan loyalitas nasabah institusi dan memperluas volume transaksi.

2. Strengthening Regional Government Ecosystem (*Captive Market*)

As a strategic partner of regional governments, Bank Papua develops ecosystem-based services such as Cash Management System (CMS), non-cash transaction services, payroll, and digitalization of public services. This strategy strengthens the funding base while increasing institutional customer loyalty and transaction volumes.

3. Akselerasi Kredit Produktif dan Penguatan UMKM

Bank Papua mengarahkan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor produktif, khususnya UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan fungsi pemasaran, perluasan jaringan bisnis, serta pengembangan pembiayaan berbasis rantai nilai (*value chain*) yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal.

3. Acceleration of Productive Lending and MSME Development

Bank Papua directs credit growth toward productive sectors, particularly MSMEs that play a vital role in the regional economy. This is implemented through strengthened marketing functions, business network expansion, and the development of value chain-based financing integrated with local economic potential.

4. Pengembangan Produk dan Layanan Berbasis Kebutuhan Nasabah

Bank secara berkelanjutan melakukan inovasi produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar. Penyempurnaan *value proposition*, termasuk pengembangan pembiayaan berbasis keberlanjutan (*green financing*), menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing dan relevansi produk Bank.

4. Customer-Centric Product and Service Development

The Bank continuously innovates its products and services in line with customer needs and market dynamics. Enhancing the value proposition, including the development of sustainable financing (green financing), is part of the strategy to improve competitiveness and product relevance.

5. Transformasi Digital dan Penguatan Teknologi Informasi

Transformasi digital menjadi pilar utama strategi Bank Papua, dengan fokus pada pengembangan layanan berbasis teknologi, peningkatan kanal digital, serta integrasi sistem pembayaran. Pengembangan produk seperti QRIS, *Internet Banking*, e-wallet, serta penguatan sistem informasi manajemen (MIS) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

5. Digital Transformation and Strengthening Information Technology

Digital transformation is a key pillar of Bank Papua's strategy, focusing on the development of technology-based services, expansion of digital channels, and integration of payment systems. The development of products such as QRIS, internet banking, e-wallets, and the strengthening of Management Information Systems (MIS) aims to improve operational efficiency and service quality.

6. Penguatan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development*)

Bank Papua menempatkan pengembangan SDM sebagai faktor kunci keberhasilan strategi. Melalui implementasi *talent management*, peningkatan kompetensi, serta penguatan budaya kerja berbasis

6. Human Capital Development

Bank Papua places human capital development as a critical success factor. Through talent management implementation, competency enhancement, and strengthening a performance-, risk-, and compliance-



kinerja, risiko, dan kepatuhan, Bank memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan industri.

7. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Bank Papua terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta manajemen risiko melalui pendekatan *three lines of defence*. Penguatan sistem pengendalian internal, pemantauan profil risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha.

8. Efisiensi Operasional dan Optimalisasi Kinerja

Dalam rangka meningkatkan daya saing, Bank Papua melakukan optimalisasi proses bisnis dan efisiensi operasional melalui digitalisasi, penguatan sistem penganggaran, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja unit kerja dan produk.

Langkah-langkah strategis tersebut mencerminkan komitmen Bank Papua untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi, dan pengelolaan risiko. Dengan strategi yang terintegrasi dan adaptif, Bank Papua optimistis mampu memperkuat posisinya di industri perbankan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

based work culture, the Bank ensures organizational readiness to face industry challenges.

7. Strengthening Governance and Risk Management

The Bank continues to enhance the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and risk management through the three lines of defense approach. Strengthening internal control systems, monitoring risk profiles, and ensuring compliance with regulatory requirements remain key priorities to maintain stability and business sustainability.

8. Operational Efficiency and Performance Optimization

To enhance competitiveness, Bank Papua optimizes business processes and operational efficiency through digitalization, strengthened budgeting systems, and continuous evaluation of unit and product performance.

These strategic initiatives reflect Bank Papua's commitment to maintaining a balance between business growth, efficiency, and risk management. With an integrated and adaptive strategy, Bank Papua is optimistic in strengthening its position in the banking industry while enhancing its contribution to economic development in Tanah Papua.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Dalam mendukung pencapaian sasaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2024–2026 Bank Papua menetapkan kebijakan pemasaran produk dan jasa yang terintegrasi dengan strategi penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat struktur pendanaan, mengoptimalkan penyaluran dana produktif, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap Bank Papua sebagai Bank Pembangunan Daerah di Tanah Papua.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, implementasi pemasaran produk dan jasa Bank Papua dilaksanakan melalui tiga pilar utama yang saling terintegrasi, yaitu kegiatan pendanaan, kegiatan penyaluran dana, serta peningkatan brand image dan upaya pendukung lainnya.

In supporting the achievement of the Bank Business Plan (RBB) targets for 2024–2026, Bank Papua has established marketing policies for its products and services that are integrated with strategies for strengthening institutional capacity, developing human capital, innovating products and services, leveraging information technology, and enhancing governance and risk management. This policy is directed toward strengthening the funding structure, optimizing productive financing, and improving service quality and public trust in Bank Papua as a Regional Development Bank in Tanah Papua.

In line with this strategic direction, the implementation of Bank Papua's product and service marketing is carried out through three integrated pillars: funding activities, lending activities, and brand image enhancement along with other supporting initiatives.



KEGIATAN PENDANAAN

Dalam melakukan kegiatan pendanaan, bank melakukan langkah sebagai berikut :

1. Bank Papua memfokuskan strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada peningkatan dana murah (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana dan stabilitas likuiditas Bank.
2. Optimalisasi dana giro pemerintah daerah tetap menjadi pilar utama melalui implementasi *Cash Management System* (CMS) Kas Daerah yang meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Di sisi dana ritel, Bank Papua mengembangkan program payroll Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan layanan perbankan digital, serta partisipasi dalam program Tabungan SIMPEDA Nasional.
4. Aktivitas pemasaran dana dilakukan secara selektif dan terukur dengan memperhatikan kualitas dana, struktur biaya, serta kesesuaian dengan strategi likuiditas dan profil risiko Bank.

KEGIATAN PENYALURAN DANA

Untuk kegiatan penyaluran dana dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Strategi penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya UMKM, kredit komersial terpilih, serta pembiayaan program pemerintah pusat dan daerah.
2. Bank Papua berperan aktif dalam penyaluran program strategis seperti BSPS, PIP, Dana BOS Provinsi, PISEW, serta Sanimas–SPALDS, yang memperkuat fungsi intermediasi sekaligus mendukung inklusi keuangan.
3. Kerja sama dengan Taspen, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan untuk memperluas basis nasabah dan meningkatkan aktivitas pembiayaan.
4. Penyaluran kredit dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko kredit, serta pengendalian kualitas aset.

FUNDING ACTIVITIES

In carrying out funding activities, the Bank undertakes the following measures:

1. Bank Papua focuses its Third-Party Funds (DPK) mobilization strategy on increasing low-cost funds (CASA) to maintain funding cost efficiency and liquidity stability.
2. Optimization of regional government demand deposits remains a key pillar through the implementation of the Regional Cash Management System (CMS), enhancing the effectiveness, transparency, and accountability of regional financial management.
3. On the retail funding side, Bank Papua develops payroll programs for civil servants (ASN), strengthens digital banking services, and participates in the National SIMPEDA Savings program.
4. Funding marketing activities are conducted in a selective and measured manner, taking into account fund quality, cost structure, and alignment with the Bank's liquidity strategy and risk profile.

LENDING ACTIVITIES

In carrying out lending activities, the Bank undertakes the following measures:

1. Lending strategies are directed toward productive sectors that support regional economic development, particularly MSMEs, selected commercial lending, as well as financing for central and regional government programs.
2. Bank Papua plays an active role in channeling strategic programs such as BSPS, PIP, Provincial BOS Funds, PISEW, and Sanimas–SPALDS, thereby strengthening its intermediation function while supporting financial inclusion.
3. Collaboration with Taspen, BPJS Kesehatan, and BPJS Ketenagakerjaan is leveraged to expand the customer base and increase financing activities.
4. Loan disbursement is conducted selectively by prioritizing prudential principles, sound credit risk management, and asset quality control.



PENINGKATAN BRAND IMAGE DAN UPAYA LAINNYA

Sedangkan untuk peningkatan brand image dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Bank Papua menerapkan strategi penetrasi pasar melalui penguatan layanan digital, baik dari sisi transaksi, fitur, maupun kapabilitas layanan, guna meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman nasabah.
2. Pengembangan produk dan layanan dilakukan secara berkelanjutan, baik konvensional maupun digital, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan arah kebijakan bisnis Bank.
3. Strategi pemasaran diperkuat melalui integrasi, sinergi, dan aliansi, baik internal maupun eksternal, termasuk pengembangan value chain antara prinsipal, distributor, dan pemasok dalam aktivitas pendanaan dan pembiayaan.
4. Kolaborasi antar divisi, seperti Perencanaan Strategis, Pengelolaan Dana dan Jasa, serta Teknologi Informasi, memastikan keselarasan antara strategi pemasaran dan kapabilitas operasional Bank.
5. Penguatan kualitas layanan dilakukan melalui implementasi budaya Cepat, Akurat, Mudah, Aman, dan Ramah (CAMAR), didukung oleh investasi teknologi dan peningkatan fitur layanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
6. Penguatan citra dan reputasi Bank Papua dilakukan melalui komunikasi pemasaran yang terintegrasi serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan guna membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi pemasaran produk dan jasa Bank Papua dilaksanakan secara terintegrasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko. Dengan memanfaatkan keunggulan sebagai Bank Pembangunan Daerah serta memperkuat layanan berbasis digital dan ekosistem, Bank Papua optimistis mampu meningkatkan daya saing dan memperluas kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.

BRAND IMAGE ENHANCEMENT AND OTHER INITIATIVES

To enhance its brand image, Bank Papua undertakes the following measures:

1. Bank Papua implements a market penetration strategy by strengthening digital services, both in terms of transactions, features, and service capabilities, to improve accessibility and customer experience.
2. Product and service development is carried out continuously, both conventional and digital, to align with market needs and the Bank's business direction.
3. Marketing strategies are strengthened through integration, synergy, and alliances, both internally and externally, including the development of value chains among principals, distributors, and suppliers in funding and financing activities.
4. Cross-divisional collaboration—such as Strategic Planning, Fund and Service Management, and Information Technology—ensures alignment between marketing strategies and the Bank's operational capabilities.
5. Service quality is enhanced through the implementation of the CAMAR culture (Fast, Accurate, Easy, Secure, and Friendly), supported by technology investments and service feature enhancements to improve customer satisfaction.
6. Strengthening the Bank's image and reputation is carried out through integrated marketing communications as well as financial literacy and inclusion programs to build public trust and customer loyalty.

Overall, Bank Papua's marketing strategy for products and services is implemented in an integrated manner to maintain a balance between business growth, operational efficiency, and risk management. By leveraging its strengths as a Regional Development Bank and enhancing digital and ecosystem-based services, Bank Papua is optimistic about improving its competitiveness and expanding its contribution to inclusive and sustainable economic growth in Tanah Papua.



Pangsa Pasar

Market Share

Di tengah dinamika ekonomi kawasan timur Indonesia, Bank Papua menunjukkan posisi yang kuat sebagai pemain utama dalam industri perbankan regional, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini tercermin dari pangsa pasar yang signifikan baik pada sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang menjadi indikator utama dominasi Bank dalam ekosistem keuangan daerah.

Amid the economic dynamics of Eastern Indonesia, Bank Papua demonstrates a strong position as a leading player in the regional banking industry, particularly in Papua and West Papua. This is reflected in its significant market share in both fund mobilization and loan disbursement, which serve as key indicators of the Bank's dominance within the regional financial ecosystem.

No	Indikator	Satuan	Total Penyaluran Papua & Papua Barat	Bank Papua	Pangsa Pasar	Indicators
1	Simpanan	Rp. Juta	67.847.088	26.170.639	38,57%	Savings
	- Giro	Rp. Juta	15.279.523	8.937.779	58,50%	- Demand Deposits
	- Tabungan	Rp. Juta	41.421.111	8.993.208	21,71%	- Savings
	- Simpanan Berjangka	Rp. Juta	11.146.454	8.239.652	73,92%	- Time Deposits
2	Pinjaman yang diberikan	Rp. Juta	77.603.754	22.553.209	29,06%	- Loans
	- Modal Kerja	Rp. Juta	20.327.967	3.132.469	15,41%	- Working Capital
	- Investasi	Rp. Juta	17.148.200	6.448.291	37,60%	- Investment
	- Konsumsi	Rp. Juta	40.127.588	12.972.448	32,33%	- Consumption

Pada sisi penghimpunan dana, Bank Papua berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 38,57% dari total simpanan di Papua dan Papua Barat yang mencapai Rp67,85 triliun, dengan kontribusi dana yang dihimpun sebesar Rp26,17 triliun. Dominasi ini semakin terlihat pada segmen tertentu, khususnya simpanan berjangka dengan pangsa pasar mencapai 73,92%, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat dan institusi terhadap Bank Papua dalam pengelolaan dana jangka menengah dan panjang. Selain itu, pada produk giro, Bank Papua menguasai pangsa sebesar 58,50%, mencerminkan kuatnya posisi Bank dalam pengelolaan dana institusional, terutama dari pemerintah daerah sebagai *Captive Market* utama. Namun demikian, pada segmen tabungan, pangsa pasar Bank Papua berada pada level 21,71%, yang mengindikasikan masih terbukanya ruang ekspansi pada segmen ritel dan individu.

On the funding side, Bank Papua commands a market share of 38.57% of total deposits in Papua and West Papua, which amount to IDR 67.85 trillion, with total funds mobilized reaching IDR 26.17 trillion. This dominance is particularly evident in specific segments, especially time deposits, where the Bank holds a market share of 73.92%, reflecting a high level of trust from both the public and institutions in managing medium- to long-term funds. In addition, for demand deposits, Bank Papua holds a market share of 58.50%, indicating its strong position in managing institutional funds, particularly from regional governments as its primary captive market. However, in the savings segment, Bank Papua's market share stands at 21.71%, indicating substantial room for expansion in the retail and individual segments.



Dari sisi penyaluran dana, Bank Papua mencatat pangsa pasar sebesar 29,06% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Papua Barat sebesar Rp77,60 triliun, dengan total penyaluran mencapai Rp22,55 triliun. Kinerja ini menegaskan peran Bank Papua sebagai salah satu motor penggerak pembiayaan ekonomi daerah. Secara lebih rinci, Bank Papua memiliki pangsa yang cukup kuat pada segmen kredit investasi sebesar 37,60%, menunjukkan peran aktif dalam mendukung pembangunan dan ekspansi usaha di wilayah tersebut. Pada segmen kredit konsumsi, pangsa pasar mencapai 32,33%, mencerminkan penetrasi yang baik pada pembiayaan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pada segmen kredit modal kerja, pangsa pasar berada pada 15,41%, yang menunjukkan adanya peluang peningkatan pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara keseluruhan, struktur pangsa pasar ini menggambarkan bahwa Bank Papua memiliki keunggulan kompetitif yang kuat pada segmen dana institusional dan pembiayaan investasi, namun masih memiliki ruang pengembangan pada segmen ritel dan pembiayaan modal kerja. Dengan memanfaatkan keunggulan sebagai Bank Pembangunan Daerah yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik ekonomi lokal, Bank Papua berada pada posisi strategis untuk terus memperluas pangsa pasar dan memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua dan Papua Barat.

From the lending side, Bank Papua recorded a market share of 29.06% of total loans disbursed in Papua and West Papua, which reached IDR 77.60 trillion, with total lending of IDR 22.55 trillion. This performance underscores the Bank's role as a key driver of regional economic financing. More specifically, Bank Papua holds a strong position in the investment loan segment with a market share of 37.60%, reflecting its active role in supporting business expansion and regional development. In the consumer loan segment, the Bank achieved a market share of 32.33%, indicating solid penetration in financing community needs. Meanwhile, in the working capital loan segment, its market share stands at 15.41%, highlighting opportunities to further enhance financing in productive sectors, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

Overall, this market share structure indicates that Bank Papua has strong competitive advantages in institutional funding and investment financing segments, while still having room for growth in retail funding and working capital financing. By leveraging its strengths as a Regional Development Bank, including close relationships with regional governments and a deep understanding of local economic characteristics, Bank Papua is well-positioned to expand its market share and strengthen its role in driving inclusive and sustainable economic growth in Papua and West Papua.





Tinjauan Operasional

Operational Review

Bank Papua adalah bank umum konvensional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, serta penyediaan jasa layanan perbankan lainnya. Sebagai bank umum daerah, Bank Papua terus berinovasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya dengan memberikan layanan yang terbaik. Hal ini mendukung visi Bank Papua untuk menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, khususnya di tanah Papua.

PENGHIMPUNAN DANA

Sepanjang tahun 2025, penghimpunan dana Bank Papua berasal dari pihak ketiga, baik dari bank maupun non-bank. Penghimpunan dana dari pihak ketiga bank disalurkan kepada bank lain dalam bentuk pinjaman ICM, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga non-bank berasal dari individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan masyarakat lainnya, dalam bentuk mata uang rupiah atau asing. Namun, saat ini Bank

Bank Papua is a conventional commercial bank that functions as a financial intermediary. Its business activities include fund mobilization, loan disbursement, and the provision of other banking services. As a regional commercial bank, Bank Papua continues to innovate to meet all customer needs by delivering the best services. This supports Bank Papua's vision to become a strong, reliable, and highly competitive regional bank that contributes to economic development, particularly in Tanah Papua.

FUNDING

Throughout 2025, Bank Papua's fund mobilization was sourced from third parties, both banks and non-bank entities. Funds from bank counterparties were placed with other banks in the form of Inter-Company Money (ICM) loans, demand deposits, savings, and time deposits.

Meanwhile, third-party funds from non-bank sources were derived from individuals, corporations, government institutions, households, cooperatives, foundations, and other community groups, in either rupiah or foreign currency. However, currently, Bank Papua does not maintain balances



Papua tidak memiliki saldo atau transaksi dalam bentuk mata uang asing. Penghimpunan dana pihak ketiga non-bank terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka.

DANA PIHAK KETIGA (DPK) NON BANK

Total DPK mencapai Rp26.170.639 juta, tumbuh Rp1.484.550 juta atau sebesar 6,01% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ditopang oleh lonjakan deposito yang mengimbangi penurunan CASA. Bank tetap menjaga keseimbangan struktur dana untuk mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Tabel Dana Pihak Ketiga Non Bank Tahun 2021 - 2025 (Rp Juta)

Dana Pihak Ketiga	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Third Party Funds
						+/-	%	
Giro	8.937.779	10.579.501	13.901.110	11.971.610	9.028.754	(1.641.722)	-15,52%	Demand Deposit
Tabungan	8.993.208	9.433.162	9.635.171	8.612.419	8.772.020	(439.954)	-4,66%	Savings
Deposito	8.239.652	4.673.426	2.068.367	3.546.451	2.983.843	3.566.226	76,31%	Time Deposits
Jumlah DPK	26.170.639	24.686.089	25.604.648	24.130.480	20.784.617	1.484.550	6,01%	Total TPF

Giro tahun 2025 sebesar Rp8.937.779 juta, turun Rp1.641.722 juta atau sebesar 15,52% dari tahun 2024. Penurunan dipengaruhi pergeseran dana ke instrumen berimbang hasil lebih tinggi serta dinamika likuiditas nasabah korporasi. Meski berkontraksi, giro tetap menopang struktur dana murah dan efisiensi biaya dana Bank.

Tabungan tercatat Rp8.993.208 juta, menurun Rp439.954 juta atau sebesar 4,66% dibandingkan 2024. Penurunan relatif moderat, mencerminkan basis ritel yang tetap stabil. Pergeseran ke deposito terjadi seiring kenaikan suku bunga, namun tabungan tetap menjadi sumber dana berkelanjutan yang didukung penguatan layanan digital.

Deposito meningkat signifikan menjadi Rp8.239.652 juta, tumbuh Rp3.566.226 juta (76,31%). Pertumbuhan didorong strategi suku bunga kompetitif dan preferensi nasabah terhadap instrumen berjangka. Kinerja ini memperkuat likuiditas, namun memerlukan pengelolaan cost of fund secara optimal.

or conduct transactions in foreign currency. Non-bank third-party funds consist of demand deposits, savings, and time deposits.

NON-BANK THIRD-PARTY FUNDS (DPK)

Total non-bank third-party funds reached IDR 26,170,639 million, growing by IDR 1,484,550 million or 6.01% compared to the previous year. This growth was driven by a significant increase in time deposits, which offset the decline in CASA. The Bank continues to maintain a balanced funding structure to support sustainable business expansion.

Table of Non-Bank Third-Party Funds (DPK) for 2021-2025 (IDR Million)

Demand Deposits in 2025 amounted to IDR 8,937,779 million, declining by IDR 1,641,722 million or 15.52% compared to 2024. The decrease was driven by a shift of funds to higher-yield instruments as well as liquidity dynamics among corporate customers. Despite the contraction, demand deposits continued to support the Bank's low-cost funding structure and funding cost efficiency.

Savings reached IDR 8,993,208 million, decreasing by IDR 439,954 million or 4.66% compared to 2024. The relatively moderate decline reflects a stable retail base. The shift toward time deposits occurred in line with rising interest rates; however, savings remain a sustainable funding source supported by strengthened digital services.

Time Deposits increased significantly to IDR 8,239,652 million, growing by IDR 3,566,226 million or 76.31%. This growth was driven by competitive interest rate strategies and customer preference for term-based instruments. This performance strengthens liquidity, although it requires optimal management of the cost of funds.



Tabel Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Non Bank Tahun 2021 - 2025 (Rp Juta)**Table: Number of Non-Bank Third-Party Fund Accounts, 2021–2025 (Rp Million)**

NOA DPK	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		NOA TPF
						+/-	%	
Giro	90.521	74.550	72.691	71.227	68.832	15.971	21,42%	Demand Deposit
Tabungan	2.469.399	1.883.341	1.744.894	1.619.059	1.524.615	586.058	31,12%	Saving
Deposito	5.102	5.320	4.892	4.930	5.168	(218)	-4,10%	Time Deposit
Jumlah	2.565.022	1.963.211	1.822.477	1.695.216	1.598.615	601.811	30,65%	Total

GIRO

Dana Pihak Ketiga pada Giro tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.937.779 juta, menurun Rp1.641.722 juta atau menurun sebesar 15,52% dibandingkan tahun 2024. Secara komposisi, giro dari pihak berelasi meningkat menjadi Rp2.966.600 juta atau tumbuh 46,13%, mencerminkan penguatan sinergi internal. Sebaliknya, giro dari pihak ketiga menurun menjadi Rp5.971.180 juta atau sebesar 30,16% seiring pergeseran dana ke instrumen berimbal hasil lebih tinggi. Giro Bank Papua hanya tersedia dalam Rupiah dan tidak mencakup denominasi valuta asing, sehingga eksposur risiko nilai tukar tetap terkendali.

DEMAND DEPOSITS

Third-Party Funds in Demand Deposits in 2025 amounted to IDR 8,937,779 million, decreasing by IDR 1,641,722 million or 15.52% compared to 2024. In terms of composition, demand deposits from related parties increased to IDR 2,966,600 million or grew by 46.13%, reflecting strengthened internal synergy. Conversely, demand deposits from third parties declined to IDR 5,971,180 million or 30.16%, in line with the shift of funds to higher-yield instruments. Bank Papua's demand deposits are denominated solely in Rupiah and do not include foreign currency denominations, thereby keeping foreign exchange risk exposure well controlled.

Tabel Giro Non Bank Tahun 2021 - 2025 (Rp Juta)**Table of Non-Bank Demand Deposits for 2021–2025 (IDR Million)**

Sumber Dana Pihak Ketiga dari Giro	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Source of Third Party Funds from Demand Deposit
						+/-	%	
Pihak Berelasi	2.966.600	2.030.118	6.697.619	6.486.557	4.240.482	936.482	46,13%	Related Parties
Pihak Ketiga	5.971.179	8.549.383	7.203.491	5.485.053	4.788.272	(2.578.204)	-30,16%	Third Party
Jumlah	8.937.779	10.579.501	13.901.110	11.971.610	9.028.754	(1.641.722)	-15,52%	Total

Dari sisi jenis giro, penurunan terjadi pada hampir seluruh segmen. Penurunan paling signifikan terjadi pada giro swasta, yang mengalami kontraksi sebesar 20,68%. Selanjutnya, penurunan diikuti oleh giro Pemerintah Kabupaten/Kota, giro Pemerintah Lainnya, giro Pemerintah Provinsi, dan giro Pemerintah Pusat, sementara penurunan terkecil terjadi pada giro lainnya. Sementara itu, giro pusat dan kategori lainnya juga mengalami kontraksi signifikan. Secara struktur, giro didominasi pihak ketiga, meskipun porsi pihak berelasi menunjukkan peningkatan. Berdasarkan jenis mata uang, giro mayoritas dalam Rupiah dengan eksposur valuta asing terbatas, sehingga risiko nilai tukar tetap terkendali di tengah dinamika likuiditas pasar.

In terms of demand deposit types, declines occurred across almost all segments. The most significant contraction was recorded in private sector demand deposits, which decreased by 20.68%. This was followed by declines in demand deposits from regency/municipal governments, other government entities, provincial governments, and the central government, while the smallest decrease was observed in other demand deposits. Meanwhile, head office demand deposits and other categories also experienced notable contractions. Structurally, demand deposits remain dominated by third parties, although the proportion of related-party deposits has increased. By currency type, demand deposits are predominantly denominated in Rupiah with limited foreign currency exposure, thereby keeping exchange rate risk well controlled amid market liquidity dynamics.



Tabel Jenis Giro Non Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Non-Bank Demand Deposits by Type for 2021–2025 (IDR Million).

Jenis Giro	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Type of Demand Deposit
						+/-	%	
Pemerintah Pusat	70.590	100.405	366.055	127.515	71.698	(29.815)	-29,69%	Central Government
Pemerintah Provinsi	2.477.458	2.556.605	2.851.348	1.888.140	1.938.156	(79.147)	-3,10%	Provincial Government
Pemerintah Kabupaten/Kota	2.445.819	2.871.822	3.846.271	4.594.633	2.302.326	(426.003)	-14,83%	Regency/ Municipal Government
Swasta	3.700.072	4.664.641	6.422.578	5.026.756	4.203.096	(964.569)	-20,68%	Private
Pemerintah Lainnya	239.054	373.465	411.781	326.482	509.496	(134.411)	-35,99%	Other Governments
Lainnya	4.786	12.563	3.077	8.084	3.982	(7.776)	-61,90%	Others
Jumlah	8.937.779	10.579.501	13.901.110	11.971.610	9.028.754	(1.641.722)	-15,52%	Total

Sedangkan jika dilihat dari tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Papua sepanjang tahun 2025, suku bunga tersebut berkisar antara 0,00% - 5,50%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, di mana suku bunga berkisar antara 0,00% - 7,00%. Rincian suku bunga berdasarkan jenis giro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Meanwhile, based on the interest rates offered by Bank Papua throughout 2025, the rates ranged from 0.00% to 5.50%. This reflects a decline compared to 2024, when the rates ranged from 0.00% to 7.00%. The detailed interest rates by type of Demand Deposit are presented in the following table:

Jenis Giro	Saldo	Suku Bunga	Demand Deposit Type
Giro Pemerintah Daerah	< 100.000.000	0,00%	Local Government Demand Deposit
	≥ 100.000.000 - 1.000.000.000	0,50%	
	> 1.000.000.000	0,75%	
Giro Umum	< 50.000.000	0,00%	General Demand Deposit
	≥ 50.000.000 - 500.000.000	0,50%	
	> 500.000.000 - 1.000.000.000	0,50%	
	> 1.000.000.000 - 50.000.000.000	0,50%	
	> 50.000.000.000	0,75%	
Giro TNP (Giro Instansi Pusat)	0	Mengikuti rate giro tertinggi yang berlaku	TNP Demand Deposit (Central Agency Demand Deposit)

TABUNGAN

Dana Pihak Ketiga pada tabungan tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.993.208 juta, menurun Rp439.954 juta atau sebanding dengan 4,66% dibandingkan 2024. Secara komposisi, tabungan dari pihak berelasi meningkat signifikan menjadi Rp54.327 juta atau tumbuh 150,39%, meskipun kontribusinya masih relatif kecil. Sebaliknya, tabungan dari pihak ketiga yang mendominasi mengalami penurunan sebesar 5,02% menjadi Rp8.938.881 juta, seiring pergeseran dana ke instrumen berimbal hasil lebih tinggi. Tabungan didominasi dalam mata uang Rupiah dengan mata uang asing memang tidak ada sejak awal sampai saat ini, sehingga risiko nilai tukar tetap terkendali.

SAVINGS

Third-Party Funds in savings accounts in 2025 were recorded at Rp8,993,208 million, decreasing by Rp439,954 million or 4.66% compared to 2024. In terms of composition, savings from related parties increased significantly to Rp54,327 million, growing by 150.39%, although their contribution remained relatively small. In contrast, savings from third parties, which dominate the portfolio, declined by 5.02% to Rp8,938,881 million, in line with the shift of funds to higher-yielding instruments.

Savings are predominantly denominated in Rupiah, with no foreign currency balances recorded since inception to date, thereby keeping foreign exchange risk well under control.



Tabel Tabungan Non Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Non-Bank Savings (2021–2025) (Rp million)

Sumber Dana Pihak Ketiga dari Tabungan	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Sources of Third Party Funds from Savings
						+/-	%	
Pihak Berelasi	54.327	21.697	504.108	4.021	5.926	32.630	150,39%	Related Parties
Pihak Ketiga	8.938.881	9.411.465	9.131.063	8.608.398	8.766.094	(472.584)	-5,02%	Third Party
Jumlah	8.993.208	9.433.162	9.635.171	8.612.419	8.772.020	(439.954)	-4,66%	Total

Produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Papua selama tahun 2025, dengan perkembangan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The savings products offered by Bank Papua throughout 2025, along with their developments, are presented in the table below:

Tabel Jenis Tabungan Non Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Non-Bank Savings by Product Type (2021–2025) (Rp million)

Jenis Tabungan	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Savings Customers
						+/-	%	
Simanja	4.318.819	4.315.158	4.377.721	4.022.973	3.881.145	3.661	0,08%	Simanja
Simpeda	2.973.005	3.200.047	3.414.142	3.104.932	3.152.796	(227.042)	-7,09%	Simpeda
Simpel	90.105	89.275	80.006	65.046	54.419	830	0,93%	Simple
TabunganKu	662.597	674.641	588.874	491.465	456.630	(12.044)	-1,79%	My Savings
Tabungan BSM	3.402	3.305	3.465	3.360	3.399	97	2,93%	BSM Savings
Tabungan Dana Desa	112.979	268.990	273.322	159.899	269.045	(156.011)	-58,00%	Village Fund Savings
Tabungan KPE	772.454	811.521	812.743	708.644	821.238	(39.067)	-4,81%	KPE Savings
Tabungan Gaji Jakarta	117	142	116	116	116	(25)	-17,61%	Jakarta Salary Savings
Tabungan Pemberdayaan Masyarakat	59.730	70.083	84.782	55.984	130.232	(10.353)	-14,77%	Community Empowerment Savings
Jumlah	8.993.208	9.433.162	9.635.171	8.612.419	8.722.020	(439.954)	-4,66%	Total

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Bank Papua menawarkan beragam produk tabungan yang bertujuan untuk mempermudah transaksi nasabah. Secara umum, produk Simanja relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 0,08% dan tetap menjadi kontributor utama, sementara Simpeda mengalami penurunan sebesar 7,09%. Beberapa produk menunjukkan pertumbuhan terbatas, seperti Simpel yang meningkat sebesar 0,93% dan Tabungan BSM sebesar 2,93%, namun kinerja tersebut tertekan oleh penurunan signifikan pada Tabungan Dana Desa sebesar 58,00% serta penurunan pada Tabungan KPE sebesar 4,81%. Dari sisi struktur, tabungan didominasi oleh dana pihak ketiga, dengan kontribusi pihak berelasi yang relatif kecil namun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data, seluruh produk tabungan Bank Papua hanya tersedia dalam Rupiah dan tidak mencakup denominasi valuta asing, sehingga resiko nilai tukar tetap terkendali. Tingkat suku bunga produk tabungan sepanjang tahun 2025 berkisar antara 0,00% hingga 2,50%. Rincian suku bunga berdasarkan jenis tabungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Based on the table above, it can be observed that Bank Papua offers a diverse range of savings products aimed at facilitating customer transactions. Overall, the Simanja product remained relatively stable with a growth of 0.08% and continued to be the main contributor, while Simpeda declined by 7.09%. Several products recorded limited growth, such as Simpel which increased by 0.93% and BSM Savings by 2.93%; however, this performance was offset by a significant decline in Village Fund Savings of 58.00% as well as a decrease in KPE Savings of 4.81%. From a structural perspective, savings are predominantly contributed by third parties, with related party contributions remaining relatively small but showing an increasing trend. Based on the data, all savings products of Bank Papua are denominated solely in Rupiah and do not include foreign currency denominations, thereby keeping foreign exchange risk under control.

The interest rates for savings products throughout 2025 ranged from 0.00% to 2.50%. The detailed interest rates by type of savings are presented in the following table:



Jenis Tabungan	Saldo	Suku Bunga	Savings Type
Simpeda	< 100.000	0,00%	Simpeda
	≥ 100.000 - 100.000.000	0,50%	
	> 100.000.000 - 500.000.000	0,75%	
	> 500.000.000 - 1.000.000.000	1,50%	
	> 1.000.000.000	2,00%	
Simanja & Tabungan KPE	< 100.000	0,00%	Simanja & KPE Saving
	≥ 100.000 - 100.000.000	0,75%	
	> 100.000.000 - 500.000.000	1,00%	
	> 500.000.000 - 1.000.000.000	2,00%	
	> 1.000.000.000	2,50%	
Tabunganku	< 500.000	0,00%	Tabunganku
	≥ 500.000 - 1.000.000	0,25%	
	> 1.000.000	1,00%	
Simanja Mahasiswa UNIPA	< 500.000	0,00%	Simanja UNIPA Students
	≥ 500.000 - 1.000.000	0,25%	
	> 1.000.000	0,75%	
Tabungan Pemberdayaan Masyarakat	> 0	0,00%	Community Empowerment Savings

DEPOSITO

Berdasarkan tabel di bawah, Dana Pihak Ketiga dalam bentuk deposito pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.239.652 juta, meningkat signifikan sebesar Rp3.566.226 juta dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan dana dari pihak ketiga yang mengalami kenaikan sebesar 80,73% menjadi Rp8.134.158 juta, yang mencerminkan tingginya minat nasabah terhadap instrumen berjangka dengan imbal hasil yang kompetitif. Sebaliknya, deposito dari pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 38,88% menjadi Rp105.494 juta, sehingga kontribusinya relatif kecil terhadap total deposito. Secara keseluruhan, pertumbuhan deposito menunjukkan keberhasilan strategi penghimpunan dana Bank dalam memperkuat likuiditas, meskipun perlu diimbangi dengan pengelolaan biaya dana secara optimal.

TIME DEPOSITS

Based on the table below, Third-Party Funds in the form of time deposits in 2025 were recorded at Rp8,239,652 million, representing a significant increase of Rp3,566,226 million compared to 2024. This growth was primarily driven by a substantial rise in funds from third parties, which increased by 80.73% to Rp8,134,158 million, reflecting strong customer interest in term-based instruments offering competitive returns.

In contrast, deposits from related parties declined by 38.88% to Rp105,494 million, resulting in a relatively small contribution to total time deposits. Overall, the growth in time deposits indicates the effectiveness of the Bank's funding strategy in strengthening liquidity, although it needs to be balanced with optimal cost of fund management.

Tabel Deposito Non Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Non-Bank Time Deposits (2021–2025) (Rp million)

Sumber Dana Pihak Ketiga dari Deposito	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Sources of Third Party Funds from Deposits
						+/-	%	
Pihak Berelasi	105.494	172.604	13.175	923.352	1.310.317	(67.110)	-38,88%	Related Parties
Pihak Ketiga	8.134.158	4.500.822	2.055.192	2.623.099	1.673.525	3.633.336	80,73%	Third Party
Jumlah	8.239.652	4.673.426	2.068.367	3.546.451	2.983.842	3.566.226	76,31%	Total

Adapun rincian deposito yang dimiliki oleh Bank Papua berdasarkan jangka waktu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The breakdown of time deposits held by Bank Papua based on maturity periods is presented in the table below:



Tabel Jenis Deposito Berdasarkan Jangka Waktu Tahun 2021-2025 (Rp Juta)**Table of Time Deposits by Maturity (2021–2025) (Rp million)**

Jangka Waktu Deposito	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Deposit Term
						+/-	%	
1 (satu) bulan	1.182.615	783.482	1.163.466	1.609.228	753.426	399.133	50,94%	1 (one) month
3 (tiga) bulan	5.592.286	327.720	339.171	804.421	1.624.072	5.264.566	1606,42%	3 (three) months
6 (enam) bulan	217.853	2.209.261	227.730	255.585	296.842	(1.991.408)	-90,14%	6 (six) months
12 (dua belas) bulan	1.182.476	1.284.699	266.171	811.404	247.705	(102.223)	-7,96%	12 (twelve) months
24 (dua puluh empat) bulan	64.422	68.264	71.829	65.813	61.797	(3.842)	-5,63%	24 (twenty four) months
Jumlah	8.239.652	4.673.426	2.068.367	3.546.451	2.983.842	3.566.226	76,31%	Total

Deposito berdasarkan jangka waktu pada tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran preferensi nasabah ke tenor yang lebih pendek. Deposito dengan tenor 3 bulan mencatat lonjakan signifikan menjadi Rp5.592.286 juta dengan pertumbuhan sebesar 1.606,42%, sehingga menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan deposito. Deposito dengan tenor 1 bulan juga mengalami peningkatan sebesar 50,94% menjadi Rp1.182.615 juta. Sebaliknya, deposito dengan tenor 6 bulan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 90,14% menjadi Rp217.853 juta. Penurunan juga terjadi pada tenor 12 bulan sebesar 7,96% menjadi Rp1.182.476 juta serta pada tenor 24 bulan sebesar 5,63% menjadi Rp64.422 juta. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan nasabah untuk memilih instrumen yang lebih fleksibel di tengah dinamika suku bunga. Secara keseluruhan, total deposito tumbuh sebesar 76,31% menjadi Rp8.239.652 juta

Time deposits by maturity in 2025 indicate a shift in customer preferences toward shorter tenors. Deposits with a 3-month tenor recorded a significant surge to Rp5,592,286 million, growing by 1,606.42%, thereby becoming the main contributor to overall deposit growth. Deposits with a 1-month tenor also increased by 50.94% to Rp1,182,615 million.

Conversely, deposits with a 6-month tenor declined sharply by 90.14% to Rp217,853 million. Decreases were also recorded in the 12-month tenor, which fell by 7.96% to Rp1,182,476 million, and the 24-month tenor, which declined by 5.63% to Rp64,422 million. This condition reflects customers' tendency to prefer more flexible instruments amid interest rate dynamics. Overall, total time deposits grew by 76.31% to Rp8,239,652 million.

Dari segi tingkat suku bunga, deposito Bank Papua pada tahun 2025 berada pada kisaran 0,00% - 3,50%. Rincian tingkat suku bunga tahunan per saldo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In terms of interest rates, Bank Papua's time deposits in 2025 ranged from 0.00% to 3.50%. The detailed annual interest rates by balance are presented in the table below:

Tabel Tingkat Suku Bunga Deposito Berdasarkan Jangka Waktu Tahun 2021-2025 (Rp Juta)**Table of Time Deposit Interest Rates by Maturity (2021–2025) (Rp million)**

Deposito	Suku Bunga / Interest Rate					Time Deposits
	Jangka Waktu / Tenor					
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	24 bulan	
Saldo Rp5 juta s/d Rp100 juta	3.00%	3.10%	3.20%	3.30%	3.40%	Balance Rp5 million to Rp100 million
Saldo > Rp100 juta s/d Rp250 juta	3.05%	3.15%	3.25%	3.35%	3.45%	Balance > Rp100 million to Rp250 million
Saldo > Rp250 juta s/d Rp500 juta	3.10%	3.20%	3.30%	3.40%	3.50%	Balance > Rp250 million to Rp500 million



Deposito	Suku Bunga / Interest Rate					Time Deposits
	Jangka Waktu / Tenor					
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	24 bulan	
Saldo > Rp500 juta s/d Rp1 miliar	3.25%	3.35%	3.45%	3.50%	3.50%	Balance > Rp500 million to Rp1 billion
Saldo > Rp1 miliar	3.40%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	Balance > Rp1 billion

DANA PIHAK KETIGA BANK

Secara keseluruhan, total DPK dari bank lain pada tahun 2025 mencapai Rp1.028.594 juta, meningkat Rp450.416 juta atau 77,90% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh kenaikan signifikan pada pos umum, yang mampu mengimbangi pergerakan pada pos lainnya. Hal ini mencerminkan strategi Bank dalam memperkuat likuiditas melalui diversifikasi sumber pendanaan antar bank secara optimal.

THIRD-PARTY FUNDS FROM BANKS

Overall, total Third-Party Funds from other banks in 2025 reached Rp1,028,594 million, increasing by Rp450,416 million or 77.90% compared to 2024. This growth was primarily driven by a significant increase in the general category, which was able to offset movements in other components. This reflects the Bank's strategy to strengthen liquidity through optimal diversification of interbank funding sources.

Tabel Dana Pihak Ketiga Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Sumber Dana Pihak Ketiga dari Bank Lain	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Sources of Third Party Funds from Other Banks
						+/-	%	
Pinjaman ICM Bank Umum	1.000.000	550.000	680.000	475.000	300.000	450.000	81,82%	Commercial Bank ICM Loans
Giro	17.128	15.986	19.036	38.815	58.409	1.142	7,14%	Demand Deposit
Tabungan	2.381	2.298	5.784	6.828	9.991	83	3,61%	Savings
Deposito Berjangka	9.085	9.894	39.085	4.995	130.750	(809)	-8,18%	Time Deposits
Jumlah	1.028.594	578.178	743.905	525.638	499.150	450.416	77,90%	Total

Table of Third-Party Funds from Banks (2021–2025) (Rp million)

Pinjaman ICM Bank Umum pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi Rp1.000.000 juta, tumbuh Rp450.000 juta atau 81,82% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi pengelolaan likuiditas melalui skema *Interbank Call Money* (ICM) antar bank umum, sekaligus menunjukkan meningkatnya kepercayaan antar institusi keuangan. Pos ini menjadi kontributor utama pertumbuhan DPK dari bank lain dan memperkuat fleksibilitas pendanaan jangka pendek Bank.

Interbank Call Money (ICM) borrowings from commercial banks in 2025 increased significantly to Rp1,000,000 million, up by Rp450,000 million or 81.82% compared to 2024. This increase reflects the optimization of liquidity management through interbank call money schemes, while also indicating stronger confidence among financial institutions. This component became the main contributor to the growth of Third-Party Funds from banks and enhanced the Bank's short-term funding flexibility.

Giro dari bank lain tercatat sebesar Rp17.128 juta, meningkat Rp1.142 juta atau 7,14% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh giro dari bank swasta lainnya yang naik signifikan 7,33% menjadi Rp16.921 juta dan menjadi kontributor utama. Giro dari bank pemerintah juga meningkat terbatas sebesar 4,86% menjadi Rp151 juta, mencerminkan stabilitas hubungan antar bank milik pemerintah. Sebaliknya, giro dari Bank BPD menurun 27,27% menjadi Rp56 juta. Secara keseluruhan, kinerja giro mencerminkan aktivitas transaksi antar bank yang tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ini relatif

Demand deposits from other banks were recorded at Rp17,128 million, increasing by Rp1,142 million or 7.14% compared to 2024. This growth was primarily supported by demand deposits from other private banks, which rose significantly by 7.33% to Rp16,921 million and became the main contributor. Demand deposits from state-owned banks also increased modestly by 4.86% to Rp151 million, reflecting stable interbank relationships among government-owned banks. In contrast, demand deposits from Regional Development Banks (BPD) declined by 27.27% to Rp56 million. Overall, the performance of demand deposits



moderat dan mencerminkan aktivitas transaksi antar bank yang tetap terjaga. Giro tetap berfungsi sebagai instrumen likuiditas harian yang mendukung kelancaran operasional dan settlement antar bank.

Tabel Giro - Dana Pihak Ketiga Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Jenis Giro dari Bank Lain	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Demand Deposit Customers From Other Banks
						+/-	%	
Giro Bank Pemerintah	151	144	203	4.311	3.784	7	4,86%	Government Bank
Giro Bank BPD	56	77	70	69	68	(21)	-27,27%	BPD Bank
Giro Bank Swasta Lainnya	16.921	15.765	18.763	34.435	54.557	1.156	7,33%	Other Private Banks
Jumlah	17.128	15.986	19.036	38.815	58.409	1.142	7,14%	Total

Tabungan dari bank lain meningkat menjadi Rp2.381 juta atau bertambah sebesar Rp83 juta, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,61% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan terbatas pada penempatan dana antarbank, meskipun kontribusinya terhadap total dana pihak ketiga dari bank lain masih relatif kecil. Pos ini tetap berperan sebagai pelengkap dalam diversifikasi sumber dana.

Deposito dari bank lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.085 juta, menurun sebesar Rp809 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 8,18% dibandingkan tahun 2024. Dari sisi komposisi, terjadi pergeseran signifikan pada struktur jangka waktu, di mana pada deposito dengan tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan tidak terdapat penempatan dana. Sebaliknya, deposito dengan tenor 24 bulan menjadi satu-satunya kontributor dengan nilai sebesar Rp9.085 juta. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi penempatan dana antarbank ke tenor yang lebih panjang, sejalan dengan kebutuhan stabilitas likuiditas jangka menengah.

Tabel Jangka Waktu Deposito Bank Lain Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Jangka Waktu Deposito Bank Lain	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Deposit Term
						+/-	%	
1 (satu) bulan	-	5.809	35.000	0	50.000	(5.809)	-100%	1 (one) month
3 (tiga) bulan	-	4.085	4.085	4.635	80.550	(4.085)	-100%	3 (three) months
6 (enam) bulan	-	0	0	200	200	-	0%	6 (six) months
12 (dua belas) bulan	-	0	0	0	0	-	0%	12 (twelve) months
24 (dua puluh empat) bulan	9.085	0	0	160	0	9.085	0%	24 (twenty four) months
Jumlah	9.085	9.894	39.085	4.995	130.750	(809)	-8,18%	Total

Suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Papua untuk deposito berjangka pihak ketiga pada tahun 2025 berada di rentang 0,00% - 6,43%. Tingkat suku bunga per tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024.

reflects well-maintained interbank transaction activities. The growth remains relatively moderate, indicating stable interbank transaction flows. Demand deposits continue to function as a daily liquidity instrument supporting operational activities and interbank settlements.

Table of Demand Deposits – Third-Party Funds from Banks (2021–2025) (Rp million)

Savings from other banks increased to Rp2,381 million, rising by Rp83 million or 3.61% compared to 2024. This increase reflects a modest growth in interbank fund placements, although its contribution to total Third-Party Funds from banks remains relatively small. This component continues to serve as a complementary source in diversifying funding.

Time deposits from other banks in 2025 were recorded at Rp9,085 million, decreasing by Rp809 million or 8.18% compared to 2024. In terms of composition, there was a significant shift in the maturity structure, with no placements in deposits with tenors of 1, 3, 6, and 12 months. Instead, deposits with a 24-month tenor became the sole contributor, amounting to Rp9,085 million. This change reflects an adjustment in interbank fund placement strategies toward longer tenors, in line with the need for medium-term liquidity stability.

Table of Time Deposits from Other Banks by Maturity (2021–2025) (Rp million)

The interest rates offered by Bank Papua for third-party time deposits in 2025 ranged from 0.00% to 6.43%. These annual interest rates increased compared to 2024.



Tabel Tingkat Suku Bunga Deposito Tahun 2023-2025

Table of Time Deposit Interest Rates (2023–2025)

Tingkat Suku Bunga	2025	2024	2023
Suku Bunga Simpanan Bank Lain	0.00% - 6.43%	0.00% - 6.52%	0.00% - 6.27%

PENYALURAN DANA

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk membantu peningkatan perekonomian, khususnya di Tanah Papua. Pada tahun 2025, produk penyaluran dana yang dimiliki oleh Bank Papua terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, kredit sindikasi, kredit karyawan, dan kredit program pemerintah. Produk-produk ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan di Tanah Papua.

Perkembangan penyaluran dana dalam bentuk kredit oleh Bank Papua selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada rincian tabel berikut ini:

Tabel Penyaluran Dana Bank Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Bank Lending (2021–2025) (Rp million)

Penyaluran Dana	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Fund Distribution
						+/-	%	
Kredit Modal Kerja	2.135.666	2.174.836	1.913.711	2.206.308	2.467.601	(39.170)	-1,80%	Working Capital Loans
Kredit Investasi	813.046	884.646	940.671	945.365	971.956	(71.600)	-8,09%	Investment Loans
Kredit Konsumsi	12.264.039	10.632.426	9.200.329	8.486.559	8.276.472	1.631.613	15,35%	Consumption Loans
Kredit Sindikasi	5.635.245	6.303.627	5.620.379	4.506.282	3.912.025	(668.382)	-10,60%	Syndication Loans
Kredit Karyawan	708.409	691.153	690.320	663.954	576.793	17.256	2,50%	Employee Loans
Kredit Program Pemerintah	996.804	1.107.245	1.224.432	1.343.394	1.393.536	(110.441)	-9,97%	Government Program Loans
Jumlah	22.553.209	21.793.933	19.589.842	18.151.862	17.598.383	759.276	3,48%	Total

Penyaluran dana pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp22.553.209 juta, meningkat sebesar Rp759.276 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,48% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp21.793.933 juta. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kredit konsumsi yang meningkat signifikan sebesar 15,35% menjadi Rp12.264.039 juta, mencerminkan kuatnya permintaan pada segmen ritel serta strategi Bank dalam mengoptimalkan portofolio dengan risiko relatif rendah dan imbal hasil yang kompetitif. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 1,80% menjadi Rp2.135.666 juta dan kredit investasi mengalami penurunan sebesar 8,09% menjadi

The Bank's function as a financial intermediary is to mobilize funds from the public and channel them back in the form of loans to support economic growth, particularly in the Papua region. In 2025, Bank Papua's lending portfolio comprised working capital loans, investment loans, consumer loans, syndicated loans, employee loans, and government program loans. These products are designed to support economic development and drive growth in Papua.

The development of lending by Bank Papua over the past five years is presented in the table below:

Lending in 2025 was recorded at Rp22,553,209 million, increasing by Rp759,276 million or 3.48% compared to 2024, which amounted to Rp21,793,933 million. This growth was primarily driven by consumer loans, which rose significantly by 15.35% to Rp12,264,039 million, reflecting strong demand in the retail segment as well as the Bank's strategy to optimize its portfolio with relatively low risk and competitive returns. Meanwhile, working capital loans declined by 1.80% to Rp2,135,666 million and investment loans decreased by 8.09% to Rp813,046 million, indicating



Rp813.046 juta, yang menunjukkan sikap selektif Bank dalam menjaga kualitas aset di tengah ketidakpastian ekonomi.

Penyaluran dana berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap terjaga, dengan total mencapai Rp22.553.209 juta, meningkat sebesar 3,48% dibandingkan tahun 2024. Hal ini mencerminkan peran Bank dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah secara inklusif. Pertumbuhan utama ditopang oleh sektor rumah tangga yang meningkat signifikan sebesar 12,64% menjadi Rp13.763.899 juta, sejalan dengan ekspansi kredit konsumsi. Kinerja positif juga terlihat pada sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 53,74%, jasa pendidikan sebesar 73,20%, serta aktivitas profesional dan teknis sebesar 111,90%, yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis jasa.

Sementara itu, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami penurunan sebesar 5,18%, industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 12,70%, serta aktivitas keuangan dan asuransi mengalami penurunan sebesar 35,62%, yang mencerminkan kehati-hatian Bank dalam pengelolaan risiko. Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada sektor pertanian sebesar 72,77% dan sektor pengelolaan limbah sebesar 52,92%, sejalan dengan penyesuaian portofolio. Secara keseluruhan, strategi penyaluran dana Bank diarahkan pada sektor yang memiliki daya tahan tinggi dan potensi pertumbuhan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kualitas aset serta prinsip kehati-hatian. Berikut disajikan rincian kredit yang disalurkan oleh Bank Papua pada tahun 2025 berdasarkan sektor ekonomi.

the Bank's selective approach in maintaining asset quality amid economic uncertainty.

Lending by economic sector in 2025 continued to show sustained growth, reaching Rp22,553,209 million, up by 3.48% compared to 2024. This reflects the Bank's role in supporting inclusive regional economic activities. The main growth driver was the household sector, which increased significantly by 12.64% to Rp13,763,899 million, in line with the expansion of consumer lending. Positive performance was also observed in the information and communication sector, which grew by 53.74%, the education services sector by 73.20%, and professional and technical activities by 111.90%, indicating increased service-based economic activities.

On the other hand, several sectors experienced contraction. The construction sector declined by 5.18%, manufacturing decreased by 12.70%, and financial and insurance activities fell by 35.62%, reflecting the Bank's prudent risk management approach. Significant declines were also recorded in the agriculture sector, which dropped by 72.77%, and the waste management sector, which decreased by 52.92%, in line with portfolio adjustments. Overall, the Bank's lending strategy is directed toward sectors with high resilience and sustainable growth potential, while maintaining asset quality and adhering to prudent banking principles.

Tabel Penyaluran Dana berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Lending by Economic Sector (2021–2025) (Rp million)

Sektor Ekonomi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Economic Sector
						+/-	%	
Rumah Tangga	13.763.899	12.219.554	10.914.220	10.298.924	10.111.343	1.544.345	12,64%	Household
Konstruksi	4.480.388	4.725.246	4.133.136	3.159.315	2.634.741	(244.858)	-5,18%	Construction
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	462.887	430.294	585.836	850.232	1.206.925	32.593	7,57%	Mandatory government administration, defense and social security
Hotel, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.094.088	1.149.207	1.197.922	1.182.951	1.082.581	(55.119)	-4,80%	Hotels, provision of accommodation and provision of food and drink
Perdagangan besar dan eceran	900.102	896.691	814.328	909.001	884.772	3.411	0,38%	Wholesale and retail



Sektor Ekonomi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Economic Sector
						+/-	%	
Listrik, gas dan air	209.806	278.094	338.393	401.786	519.093	(68.288)	-24,56%	Electricity, gas and water
Industri Pengolahan	321.257	367.990	399.190	440.094	364.975	(46.733)	-12,70%	Processing industry
Aktivitas Keuangan dan asuransi	328.837	510.754	578.190	587.815	287.712	(181.917)	-35,62%	Financial and insurance activities
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	20.828	22.479	26.356	38.944	135.241	(1.651)	-7,34%	real estate, leasing and corporate services
Pertanian, Perikanan dan kehutanan	63.356	232.654	249.954	83.922	6.274	(169.298)	-72,77%	Agriculture, Fishery, and forestry
Pengangkutan dan pergudangan	316.111	306.260	139.172	104.285	90.278	9.851	3,22%	Transport and warehousing
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	27.786	25.782	45.670	67.076	-	2.004	7,77%	Leasing and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support
Aktivitas jasa lainnya	2.399	2.747	3.047	4.129	-	(348)	-12,67	Other service activities
Informasi dan Komunikasi	2.918	1.898	143.393	4.174	-	1.020	53,72%	Information and communication
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi	2.609	2.834	2.894	5.744	5.611	(225)	-7,94	Household activities as employers; activities that produce goods and services by households
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	3.221	4.052	2.062	5.613	3.698	(831)	-20,51%	Human health activities and social activities
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-	-	Health services and social activities
Pertambangan dan penggalian	544.265	609.534	476	465	1.731	-65.269	-10,71%	Mining and excavation
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2.528	1.193	1.400	2.676	-	1.335	111,90%	Professional, scientific and technical activity
Jasa pendidikan	2.979	1.720	2.087	3	18	1.259	73,20%	Education services



Sektor Ekonomi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Economic Sector
						+/-	%	
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	2.272	4.826	11.831	3.721	-	(2.554)	52,92%	Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities
Bukan lapangan usaha	648	60	143	739	43	588	980,00	not a business
Kesenian, hiburan dan rekreasi	25	64	142	253	30.786	(39)	-60,94%	Arts, entertainment and recreation
Jumlah	22.553.209	21.793.933	19.589.842	18.151.862	17.598.383	759.276	3,48%	Amount
Cadangan kerugian penurunan nilai	(471.441)	-631.187	-616.244	-632.158	-708.129	159.746	-25,31%	Allowance for impairment losses
Kredit Bersih	22.081.768	21.162.746	18.973.598	17.519.704	16.890.254	919.022	4,34%	Net Loan

Penyaluran dana berdasarkan jenis penggunaan kredit pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang mencerminkan penyesuaian strategi portofolio Bank, dengan total kredit mencapai Rp22.553.209 juta atau tumbuh 3,48% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan didorong oleh kredit konsumtif yang meningkat signifikan sebesar 12,65% menjadi Rp13.763.718 juta dengan kontribusi 61,03%, mencerminkan kuatnya permintaan sektor ritel serta strategi Bank dalam mengoptimalkan segmen berisiko relatif rendah dan beryield stabil. Sebaliknya, kredit produktif mengalami penurunan 8,21% menjadi Rp8.789.491 juta dengan proporsi 38,97%, seiring penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sektor usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Pergeseran struktur ini menunjukkan fokus Bank dalam menjaga kualitas aset dan stabilitas pendapatan, sekaligus tetap membuka ruang ekspansi selektif pada sektor produktif yang prospektif.

Lending by type of use in 2025 reflects portfolio strategy adjustments, with total loans reaching Rp22,553,209 million or growing by 3.48% compared to 2024. Growth was driven by consumer loans, which increased significantly by 12.65% to Rp13,763,718 million, contributing 61.03%, reflecting strong demand in the retail segment and the Bank's strategy to optimize lower-risk segments with stable yields.

In contrast, productive loans declined by 8.21% to Rp8,789,491 million, accounting for 38.97% of the portfolio, in line with the Bank's prudent approach in lending to business sectors amid economic uncertainty. This shift in structure indicates the Bank's focus on maintaining asset quality and income stability, while still allowing selective expansion in prospective productive sectors.

Tabel Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Loans by Type of Use (2021–2025) (Rp million)

Kredit	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Proporsi	Loans
						+/-	%		
Kredit Konsumtif	13.763.718	12.217.851	9.890.650	9.150.513	8.853.265	1.545.867	12,65%	61,03%	Consumer Loan
Kredit Produktif	8.789.491	9.576.082	9.699.192	9.001.349	8.745.117	-786.591	-8,21%	38,97%	Productive Loans
Jumlah	22.553.209	21.793.933	19.589.842	18.151.862	17.598.383	759.276	3,48%		Total



KREDIT KONSUMSI

Kredit konsumsi pada tahun 2025 mencatat kinerja yang sangat kuat dengan total sebesar Rp12.264.039 juta, meningkat sebesar Rp1.631.613 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,35% dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan peran strategis segmen ritel sebagai motor pertumbuhan Bank. Peningkatan signifikan terutama didorong oleh ekspansi pada produk berbasis payroll dan kerja sama institusi, seperti KKs Multi Guna, KKr Kendaraan Flat, serta KKs PT Freeport, yang mencatat pertumbuhan sangat tinggi. Selain itu, KKs Pra Purna Bhakti juga mengalami pertumbuhan sebesar 48,47%, yang mencerminkan potensi pasar pada segmen pensiun. Di sisi lain, beberapa produk mengalami penurunan. KKs Griya Bhakti mengalami penurunan sebesar 25,56% dan KKs Pegawai Siaga mengalami penurunan sebesar 24,32%, seiring dengan penyesuaian kebijakan kredit. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan strategi Bank dalam memperkuat portofolio kredit konsumsi berbasis captive market dan payroll guna menjaga pertumbuhan yang berkualitas dengan risiko yang terkelola.

CONSUMER LOANS

Consumer loans in 2025 recorded a very strong performance, totaling Rp12,264,039 million, an increase of Rp1,631,613 million or 15.35% compared to 2024. This reflects the strategic role of the retail segment as the Bank's key growth driver. The significant increase was mainly driven by expansion in payroll-based products and institutional partnerships, such as Multi-Purpose Loans (KKs Multi Guna), Flat Vehicle Loans (KKr Kendaraan Flat), and loans to PT Freeport employees, all of which recorded substantial growth. In addition, Pre-Retirement Loans (KKs Pra Purna Bhakti) grew by 48.47%, highlighting strong potential in the pension segment. On the other hand, several products experienced declines, including Housing Loans (KKs Griya Bhakti), which decreased by 25.56%, and Standby Employee Loans (KKs Pegawai Siaga), which fell by 24.32%, in line with adjustments in credit policies. Overall, this performance reflects the Bank's strategy to strengthen its consumer loan portfolio through captive market and payroll-based lending, in order to maintain quality growth with well-managed risk.

Tabel Kredit Konsumsi Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Consumer Loans (2021–2025) (Rp million)

Kredit Konsumsi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Consumptive Loans
						+/-	%	
KKs Griya Bhakti	92.087	123.713	162.877	198.685	250.696	(31.626)	-25,56%	KKs Griya Bhakti
KKs Penyelamatan KPRS	5.628	6.045	3.910	490	-	(418)	-6,90	KKs Penyelamatan KPRS
KKs Wira Bhakti	11.709.490	10.183.385	8.821.881	8.210.162	7.980.266	1.526.105	14,99%	KKs Wira Bhakti
KKs Purna Bhakti	27.677	25.246	22.847	22.492	27.957	2.431	9,63%	KKs Purna Bhakti
KKs Multi Guna	176	135	226	368	897	41	30,37%	KKs Multi Guna
KKs Aset Buy Bank Lampung	-	-	-	-	15	-	-	KKs Aset Buy Bank Lampung
KKr Kendaraan Flat	799	1.448	2.404	3.273	3.068	(649)	-44,82%	KKr Kendaraan Flat
KKs Aset Buy BPD Sumsel Babel	23	77	137	197	267	(54)	-70,13%	KKs Aset Buy BPD Sumsel Babel
KKs PUMP-KB Jamsostek	24	37	43	55	62	13	-35,14%	KKs PUMP-KB Jamsostek
KKs Pegawai Siaga	6.048	7.992	9.272	9.990	7.915	(1.944)	-24,32%	KKs Pegawai Siaga
KKs PT. Freeport	109	123	156	1.177	2.539	(14)	-11,38	KKs PT. Freeport
KKs Pra Purna Bhakti	421.978	284.225	176.575	39.670	2.790	137.753	48,47%	KKs Pra Purna Bhakti
Jumlah	12.264.039	10.632.426	9.200.329	8.486.559	8.276.472	1.631.613	15,35%	Total



KREDIT KARYAWAN

Kredit karyawan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp708.409 juta, meningkat sebesar Rp17.257 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,50% dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang stabil pada segmen dengan risiko relatif rendah. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh KKr Abdi Bhakti yang meningkat sebesar 2,88% menjadi Rp692.484 juta, yang mencerminkan kekuatan basis captive market berbasis payroll.

Sementara itu, beberapa produk mengalami penurunan. KKr Griya Bhakti mengalami penurunan sebesar 18,35%, KKr Kendaraan mengalami penurunan sebesar 12,66%, dan KKr Purna Bhakti Interan mengalami penurunan sebesar 4,50%, seiring dengan penyesuaian permintaan dan kebijakan kredit yang lebih selektif. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan strategi Bank dalam memperkuat portofolio kredit karyawan yang berkualitas, menjaga stabilitas pendapatan, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui fokus pada segmen dengan profil risiko yang terkelola.

EMPLOYEE LOANS

Employee loans in 2025 were recorded at Rp708,409 million, increasing by Rp17,257 million or 2.50% compared to 2024. This indicates stable performance in a relatively low-risk segment. The growth was primarily supported by KKr Abdi Bhakti, which increased by 2.88% to Rp692,484 million, reflecting the strength of the payroll-based captive market.

Meanwhile, several products experienced declines. KKr Griya Bhakti decreased by 18.35%, vehicle loans declined by 12.66%, and KKr Purna Bhakti Internal fell by 4.50%, in line with adjustments in demand and more selective credit policies.

Overall, this performance reflects the Bank's strategy to strengthen a high-quality employee loan portfolio, maintain income stability, and uphold prudent principles by focusing on segments with well-managed risk profiles.

Tabel Kredit Karyawan Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Kredit Karyawan	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Employee Loans
						+/-	%	
Kkr Griya Bhakti	5.902	7.228	8.060	9.952	11.412	(1.326)	-18,35%	Kkr Griya Bhakti
Kkr Abdi Bhakti	692.484	673.116	672.125	643.715	554.664	19.367	2,88%	Kkr Abdi Bhakti
Kkr Kendaraan	3.193	3.656	4.428	4.647	5.079	(463)	-12,66%	Kkr Kendaraan
Kkr Purna Bhakti Internal	6.830	7.152	5.707	5.640	5.638	(322)	-4,50%	Kkr Purna Bhakti Internal
Total	708.409	691.152	690.320	663.954	576.793	17.257	2,50%	Total

Table of Employee Loans (2021–2025) (Rp million)

KREDIT MODAL KERJA

Kredit modal kerja pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.135.666 juta, menurun Rp39.170 juta atau 1,80% dibandingkan tahun 2024, mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan sektor produktif. Penurunan terutama terjadi pada segmen kontraktif yaitu sebesar 18,94%, konstruksi sebesar 14,02% hingga 19,80%, serta beberapa portofolio berbasis agunan dan mikro, seiring upaya pengendalian risiko di sektor yang sensitif terhadap siklus ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan terlihat pada KMK R/C Perdagangan sebesar 4,56%, KMK Pemerintah Daerah sebesar 7,78%, serta ekspansi signifikan pada skema dana sendiri dan produk berbasis fleksibilitas pembiayaan.

WORKING CAPITAL LOANS

Working capital loans in 2025 were recorded at Rp2,135,666 million, decreasing by Rp39,170 million or 1.80% compared to 2024, reflecting a more selective approach in financing productive sectors. The decline was mainly observed in the contracting segment, which fell by 18.94%, construction by approximately 14.02% to 19.80%, as well as several collateral-based and micro portfolios, in line with risk control efforts in sectors sensitive to economic cycles. Nevertheless, growth was recorded in certain segments, including trade revolving loans (KMK R/C Trade), which increased by 4.56%, regional government loans by 7.78%, as well as significant expansion in self-financing schemes and flexible financing products.



Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan strategi Bank dalam menjaga kualitas aset melalui penyaluran yang lebih *prudent*, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan selektif pada sektor yang memiliki prospek dan risiko yang terukur.

Overall, this performance reflects the Bank's strategy to maintain asset quality through more prudent lending, while still encouraging selective growth in sectors with measurable prospects and risks.

Tabel Kredit Modal Kerja Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Working Capital Loans (2021–2025) (Rp million)

Uraian Kredit Modal Kerja	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Working Capital Loan Description
						+/-	%	
KMK Kontrakting	258.823	319.284	262.120	226.276	253.489	(60.463)	-18,94%	Contracting WCL
KMK Konstruksi KPR	13.902	16.169	24.147	35.947	17.981	(2.267)	-14,02%	Construction WCL (KPR)
KMK R/C Perdagangan	540.109	516.547	457.841	514.263	551.228	23.562	4,56%	Trade WCL (KPR)
KMK Dana Sendiri	314.864	267.538	241.440	233.029	237.103	47.326	17,69%	Self-Funded WCL (KPR)
KMK Dana Sendiri (PRK)	452.859	539	583	782	983	(86)	-15,96%	Self-Funded WCL (KPR)
KMK R/C Kontrakting	250.171	261.027	100.317	104.597	3.527	(10.586)	-4,16%	Contracting WCL (KPR)
KMK Pemerintah Daerah	462.328	428.971	584.719	849.502	1.206.142	33.357	7,78%	Local Government WCL (KPR)
KMK Konstruksi Dengan Penjaminan	66.641	83.094	125.517	91.235	88.140	(16.453)	-19,80%	KMK Konstruksi Dengan Penjaminan
Pinjaman Usaha Mikro	8	71	84	331	750	-63	-88,73%	Micro Business Loans
KMK-Mikro > 15 Juta - 50 Juta	3.594	4.597	6.453	6.592	6.136	(1.003)	-21,82%	Micro Loans > 15 Million - 50 Million
KMK-Kecil > 50 Juta-500Juta	40.127	46.795	59.612	60.920	70.027	(6.668)	-14,25%	Small Loans > 50 Million - 500 Million
KMK Agunan Tunai	6.641	10.720	7.509	34.992	29.113	(-4.079)	38,05%	Cash-Collateralized WCL
KMK PRKAgunan Simpanan Tunai	26.022	35.912	43.368	47.842	2.982	(9.890)	-27,54%	PRA Collateralized WCL (KPR)
KMK Dana Sendiri Flat	13.041	2.632	-	-	-	10.409	395,48%	Cash-Saving Collateralized WCL
KMK-Kecil (FLAT)	11.655	1.853	-	-	-	9.802	528,98%	Flat Own Funded WCL (KPR)
KMK- Asset Buy	126.664	179.084	-	-	-	(52.420)	-29,27%	Asset Purchase WCL
KMK-Mikro (Flat)	558	-	-	-	-	558	0,00%	KMK-Mikro (Flat)
Fasilitas Pinjaman KKPD	65	1	1	-	-	64	6400,00%	Fasilitas Pinjaman KKPD
Total	2.135.666	2.174.836	1.913.711	2.206.308	2.467.601	39.170	-1,80%	Total

KREDIT INVESTASI

Kredit investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp813.046 juta, menurun sebesar Rp71.600 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 8,09% dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dalam pembiayaan jangka panjang. Penurunan terutama terjadi pada beberapa segmen. Segmen dana sendiri mengalami penurunan sebesar 8,23%, kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta mengalami penurunan sebesar 26,34%, serta kendaraan usaha mengalami penurunan sebesar 10,70%,

INVESTMENT LOANS

Investment loans in 2025 were recorded at Rp813,046 million, decreasing by Rp71,600 million or 8.09% compared to 2024. This condition reflects a more selective approach in long-term financing. The decline was mainly observed in several segments, including self-financing schemes, which decreased by 8.23%, small loans with a ceiling of more than Rp50 million up to Rp500 million, which fell by 26.34%, and business vehicle loans, which declined by 10.70%, in line



seiring dengan meningkatnya kehati-hatian Bank terhadap risiko investasi.

Namun demikian, pertumbuhan signifikan terlihat pada skema pembiayaan berbasis flat dan mikro. Dana sendiri dengan skema flat meningkat sebesar 390,93%, kredit kecil dengan skema flat meningkat sebesar 798,10%, serta kredit mikro meningkat sebesar 113,08%, yang menunjukkan adanya pergeseran strategi ke arah pembiayaan yang lebih terdiversifikasi dan fleksibel. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan fokus Bank dalam menjaga kualitas portofolio kredit investasi sekaligus mendorong ekspansi secara selektif pada segmen dengan risiko terukur dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

with the Bank's increased prudence toward investment risk.

However, significant growth was recorded in flat-rate and micro-based financing schemes. Self-financing with flat schemes surged by 390.93%, small loans under flat schemes increased by 798.10%, and micro loans grew by 113.08%, indicating a strategic shift toward more diversified and flexible financing.

Overall, this performance reflects the Bank's focus on maintaining the quality of its investment loan portfolio while encouraging selective expansion in segments with measurable risk and sustainable growth potential.

Tabel Kredit Investasi Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Investment Loans (2021–2025) (Rp million)

Kredit Investasi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Investment Loan
						+/-	%	
Dana Sendiri	793.351	864.493	917.725	920.365	940.356	(71.142)	-8,23%	Own Funds
Dana Sendiri Flat	2.219	452	-	-	-	1.767	390,93%	Flat Own Funds
Mikro > 15 Juta - 50 Juta	228	107	334	405	220	121	113,08%	Micro > 15 Million - 50 Million
Kecil > 50 Juta - 500 Juta	11.197	15.200	17.522	19.453	22.135	(4.003)	-26,34%	Small > 50 Million - 500 Million
Kendaraan Usaha	3.689	4.131	5.090	5.142	9.245	(442)	-10,70%	Business Vehicle
Kecil (Flat)	2.362	263	-	-	-	2.099	798,10%	Small (Flat)
Total	813.046	884.646	940.671	945.365	971.956	(71.600)	-8,09%	Total

KREDIT SINDIKASI

Kredit sindikasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp5.635.245 juta, menurun sebesar Rp668.382 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 10,60% dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi Bank dalam pengelolaan pembiayaan skala besar. Penurunan terutama terjadi pada kredit sindikasi investasi yang mengalami penurunan sebesar 6,97% menjadi Rp5.448.777 juta, serta kredit sindikasi modal kerja yang mengalami penurunan signifikan sebesar 65,05% menjadi Rp139.661 juta.

Sementara itu, kredit sindikasi modal kerja revolving credit relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 0,14% menjadi Rp46.807 juta. Kondisi ini menunjukkan langkah Bank dalam mengendalikan eksposur risiko pada pembiayaan berskala besar, sekaligus mengarahkan portofolio ke segmen yang lebih terukur dan berkelanjutan guna menjaga kualitas aset serta stabilitas kinerja.

SYNDICATED LOANS

Syndicated loans in 2025 were recorded at Rp5,635,245 million, decreasing by Rp668,382 million or 10.60% compared to 2024. This reflects an adjustment in the Bank's strategy in managing large-scale financing. The decline was primarily driven by a decrease in syndicated investment loans, which fell by 6.97% to Rp5,448,777 million, as well as a significant drop in syndicated working capital loans, which declined by 65.05% to Rp139,661 million.

Meanwhile, syndicated revolving working capital loans remained relatively stable, growing slightly by 0.14% to Rp46,807 million. This condition indicates the Bank's efforts to control risk exposure in large-scale financing, while gradually shifting the portfolio toward more measurable and sustainable segments to maintain asset quality and performance stability.



Tabel Kredit Sindikasi Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Syndicated Loans (2021–2025) (Rp million)

Kredit Sindikasi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Syndicated Loan
						+/-	%	
Kredit Sindikasi Investasi	5.448.777	5.857.310	4.632.006	3.586.605	3.510.657	(408.533)	-6,97%	Investment Syndicated Loan
Kredit Sindikasi Modal Kerja	139.661	399.577	988.373	919.677	401.368	(259.916)	-65,05%	Working Capital Syndicated Loan
Kredit Sindikasi Modal Kerja RC	46.807	46.740	-	-	-	67	0,14%	RC Working Capital Syndicated Loan
Total	5.635.245	6.303.627	5.620.379	4.506.282	3.912.025	(668.382)	-10,60%	Total

KREDIT PROGRAM PEMERINTAH

Kredit program pemerintah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp996.803 juta, menurun sebesar Rp110.441 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 9,97% dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan dinamika realisasi program serta penyesuaian kebijakan penyaluran. Penurunan terutama terjadi pada KKS KPR Sejahtera yang mengalami penurunan sebesar 11,52% serta KMK KUR Kecil yang mengalami penurunan sebesar 11,13%.

Sementara itu, beberapa program menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seperti KMK KUR Mikro, KI KUR Mikro, KI KUR Kecil, KI KUR Super Mikro yang mengalami peningkatan, yang mencerminkan fokus pada pembiayaan inklusif serta pemberdayaan ekonomi mikro. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan strategi Bank dalam mendukung program prioritas nasional secara selektif dengan fokus pada segmen mikro dan UMKM yang memiliki dampak ekonomi langsung, sekaligus tetap menjaga kualitas portofolio serta prinsip kehati-hatian.

GOVERNMENT PROGRAM LOANS

Government program loans in 2025 were recorded at Rp996,803 million, decreasing by Rp110,441 million or 9.97% compared to 2024. This reflects the dynamics of program realization as well as adjustments in disbursement policies. The decline was primarily driven by a decrease in KKS KPR Sejahtera, which fell by 11.52%, and KMK KUR Kecil, which declined by 11.13%.

Meanwhile, several programs recorded significant growth, including KMK KUR Mikro, KI KUR Mikro, KI KUR Kecil, and KI KUR Super Mikro, indicating a stronger focus on inclusive financing and microeconomic empowerment. Overall, this performance reflects the Bank's strategy to selectively support national priority programs, with a focus on micro and MSME segments that generate direct economic impact, while maintaining portfolio quality and adhering to prudent principles.

Tabel Kredit Program Pemerintah Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Government Program Loans (2021–2025) (Rp million)

Kredit Program Pemerintah (KPP)	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Government Program Loans (KPP)
						+/-	%	
KMK PUM Ma-ma-Mama (Pola Grameen)	-	-	45	50	70	-	-	KMK PUM Ma-ma-Mama (Pola Grameen)
KPP KMK KUMK SUP-005	-	-	-	2	2	-	-	KPP KMK KUMK SUP-005
KPP KMK R/C Perdagangan SUP-005	-	-	159	732	758	-	-	KPP KMK R/C Perdagangan SUP-005
PUM Ma-ma-Mama Papua	-	-	2	2	21	-	-	PUM Ma-ma-Mama Papua
KMK Mikro Papua Sejahtera	8	8	12	57	73	-	0.00%	KMK Mikro Papua Sejahtera
KMK Papeda	77	113	533	1.398	28	(36)	-31.86%	KMK Papeda
KPP KI KUMP SUP 005	-	-	-	-	185	-	-	KPP KI KUMP SUP 005



Kredit Program Pemerintah (KPP)	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Government Program Loans (KPP)
						+/-	%	
KI Mikro Papua Sejahtera	-	-	-	-	63	-	-	KI Mikro Papua Sejahtera
KI Papeda	-	-	-	5	-	-	-	KI Papeda
KKS KPR Sejahtera	791.270	894.273	1.024.077	1.149.150	1.258.127	(103.003)	-11,52%	KKS KPR Sejahtera
KPP KMK KUR	-	-	-	47	47	-	-	KPP KMK KUR
KMK KUR Mikro	80.529	75.524	61.185	45.454	23.751	5.006	6,63%	KMK KUR Mikro
KI KUR Mikro	1.919	1.906	1.777	1.672	597	14	0,73%	KI KUR Mikro
KMK KUR Kecil	105.611	118.843	117.712	123.390	90.367	(13.232)	-11,13%	KMK KUR Kecil
KI KUR Kecil	15.349	14.192	16.487	17.770	15.787	1.157	8,15%	KI KUR Kecil
KPP KKP E Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	KPP KKP E Peternakan
KI KUR Super Mikro	14	3	-	-	-	11	366,67%	KI KUR Super Mikro
KMK KUR Super Mikro	2.025	2.383	2.443	3.665	3.660	(358)	-15,02%	KMK KUR Super Mikro
Jumlah	996.804	1.107.245	1.224.432	1.343.394	1.393.536	(110.441)	-9,97%	Total

Jumlah rekening (number of accounts/NOA) pada tahun 2025 tercatat sebesar 100.000 rekening, meningkat sebesar 12.148 rekening yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,81% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 87.867 rekening. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan signifikan pada segmen kredit konsumsi yang meningkat sebesar 17,77%, yang mencerminkan ekspansi basis nasabah ritel serta optimalisasi produk berbasis payroll dan pembiayaan individu.

The number of accounts (NOA) in 2025 was recorded at 100,000 accounts, increasing by 12,148 accounts or 13.81% compared to 2024, which stood at 87,867 accounts. This increase was primarily driven by significant growth in the consumer loan segment, which rose by 17.77%, reflecting the expansion of the retail customer base as well as the optimization of payroll-based and individual financing products.

Sementara itu, beberapa segmen mengalami penurunan jumlah rekening. Segmen kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 7,71%, kredit investasi mengalami penurunan sebesar 9,73%, kredit sindikasi mengalami penurunan sebesar 6,02%, kredit karyawan mengalami penurunan sebesar 2,84%, serta kredit program pemerintah mengalami penurunan sebesar 3,11%, seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan selektivitas dalam penyaluran kredit. Dari sisi nominal, pertumbuhan dana dalam satuan rupiah tetap menunjukkan tren positif yang ditopang oleh ekspansi kredit konsumsi, meskipun terdapat penyesuaian pada segmen produktif. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan strategi Bank dalam memperluas inklusi keuangan melalui peningkatan jumlah nasabah ritel, sekaligus menjaga kualitas portofolio melalui pengelolaan risiko yang prudent.

Meanwhile, several segments experienced a decline in the number of accounts. Working capital loans decreased by 7.71%, investment loans declined by 9.73%, syndicated loans fell by 6.02%, employee loans decreased by 2.84%, and government program loans declined by 3.11%, in line with the implementation of prudent principles and selectivity in loan disbursement.

In terms of nominal value, lending growth in Rupiah continued to show a positive trend, supported by the expansion of consumer loans, despite adjustments in productive segments. Overall, this condition reflects the Bank's strategy to enhance financial inclusion through the expansion of the retail customer base, while maintaining portfolio quality through prudent risk management.

Tabel Jumlah Rekening Kredit Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Jenis Produk	NOA					YOY 2025-2024		Types Of Products
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Modal Kerja	1.449	1.570	1.705	1.747	1.979	-121	-7,71%	Working capital

Table of Loan Accounts (NOA) (2021–2025)



Jenis Produk	NOA					YOY 2025-2024		Types Of Products
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Investasi	297	329	363	426	520	(32)	-9,73%	Investment
Konsumsi	84.458	71.717	64.699	61.795	59.765	12.741	17,77%	Consumption
Sindikasi	78	83	69	43	30	(5)	-6,02%	Syndicate
Karyawan	2.191	2.255	2.312	2.366	2.387	(64)	-2,84%	Employee
Program Pemerintah	11.542	11.913	11.739	12.253	11.550	(371)	-3,11%	Government Programs
Jumlah	100.000	87.867	80.887	78.630	76.231	12.148	13,83%	Total

JASA DAN LAYANAN

Pendapatan dari jasa dan layanan Bank Papua pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp185.808 juta, meningkat sebesar Rp4.255 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,34% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp181.553 juta. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas transaksi berbasis layanan, khususnya dari layanan digital, transaksi perbankan, serta penguatan layanan jasa lainnya yang mendukung *fee based income*.

Pertumbuhan yang moderat ini menunjukkan bahwa strategi Bank dalam mendorong diversifikasi pendapatan nonbunga mulai memberikan kontribusi positif. Ke depan, Bank akan terus memperkuat layanan digital, meningkatkan volume transaksi, serta mengembangkan produk berbasis jasa untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

SERVICES AND FEES

Income from services and fees of Bank Papua in 2025 was recorded at Rp185,808 million, increasing by Rp4,255 million or 2.34% compared to 2024, which amounted to Rp181,553 million. This increase reflects higher service-based transaction activities, particularly from digital services, banking transactions, and the strengthening of other service offerings that support fee-based income.

This moderate growth indicates that the Bank's strategy to diversify non-interest income has started to contribute positively. Going forward, the Bank will continue to strengthen digital services, increase transaction volumes, and develop service-based products to optimize sustainable income sources.

Tabel Pendapatan Fee dan Komisi Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Fees and Commissions Income (2021–2025) (Rp million)

Jasa dan Layanan	2025	2024	2023	2022	2021	Growth		Services
						2025-2024		
						+/-	%	
Pendapatan dari fee dan komisi	185.808	181.553	157.736	135.231	136.305	4.255	2,34%	Income from fees and commissions

Adapun rincian produk fee dan komisi di Bank Papua selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The breakdown of fee and commission products at Bank Papua over the past five years is presented in the table below:

Produk Fee dan Komisi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Product Fees and Commissions
						+/-	%	
Dana kelolaan	107.139	103.682	92.681	79.145	75.137	3.457	3,33%	Managed funds
Pembiayaan	-	-	-	-	3	-	-	Financing
Penerbitan L/C	1.166	2.144	2.072	2.031	1.917	(978)	-45,62%	L/C Issuance
APMK	1.954	1.758	1.092	906	728	196	11,15%	APMK
Agen penjual	19.709	21.311	15.559	11.867	13.216	(1.602)	-7,52%	Sales agent
Transfer dan inkaso	1.110	1.258	1.234	1.225	1.151	(148)	-11,76%	Transfer and collection
Payment point	2.480	3.437	2.932	2.777	2.682	(957)	-27,84%	Payment point



Produk Fee dan Komisi	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Product Fees and Commissions
						+/-	%	
Premi point	-	-	-	-	-	-	-	Premi point
Lainnya	52.250	47.963	42.166	37.280	41.471	4.287	8,94%	Others
Total	185.808	181.553	157.736	135.231	136.305	4.255	2,34%	Total

Pendapatan fee dan komisi Bank Papua pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp185.808 juta, meningkat sebesar Rp4.255 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,34% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan pada dana kelolaan yang meningkat sebesar Rp3.457 juta dengan pertumbuhan sebesar 3,33%, serta pos lainnya yang meningkat sebesar Rp4.287 juta dengan pertumbuhan sebesar 8,94%. Selain itu, APMK juga mengalami peningkatan sebesar Rp196 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,15%, seiring dengan meningkatnya transaksi berbasis layanan.

Namun demikian, beberapa pos mengalami penurunan. Penerbitan L/C mengalami penurunan sebesar Rp978 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 45,62%, agen penjual mengalami penurunan sebesar Rp1.602 juta dengan penurunan sebesar 7,52%, serta payment point mengalami penurunan sebesar Rp957 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 27,84%. *Transfer* dan inkaso juga mengalami penurunan sebesar Rp148 juta dengan penurunan sebesar 11,76%. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran kontribusi fee ke arah layanan digital dan transaksi non-tunai, sejalan dengan strategi Bank dalam memperkuat fee based income yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah kinerja Bank Papua yang dilihat dari jumlah kartu yang beredar. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Divisi Pengelolaan Dana Jasa & *E-Banking* melalui Departemen *E-Banking* secara optimal memproduksi dan mendistribusikan semua permintaan Kartu ATM/Debit dari Kantor Cabang dengan tepat waktu. Rincian jumlah kartu yang beredar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Bank Papua's fee and commission income in 2025 was recorded at Rp185,808 million, increasing by Rp4,255 million or 2.34% compared to 2024. This growth was primarily driven by an increase in managed funds, which rose by Rp3,457 million or 3.33%, as well as other fee components that increased by Rp4,287 million or 8.94%. In addition, APMK (card-based payment instruments) recorded an increase of Rp196 million or 11.15%, in line with higher service-based transaction volumes.

However, several components experienced declines. L/C issuance decreased by Rp978 million or 45.62%, agency services declined by Rp1,602 million or 7.52%, and payment point services fell by Rp957 million or 27.84%. Transfers and collections also decreased by Rp148 million or 11.76%. Overall, this condition reflects a shift in fee contribution toward digital services and non-cash transactions, in line with the Bank's strategy to strengthen sustainable fee-based income.

In terms of business support, the number of cards in circulation reflects the Bank's service expansion. To support business growth, the Fund Management Services & E-Banking Division, through the E-Banking Department, has optimally produced and distributed all ATM/Debit card requests from branch offices in a timely manner. The details of the number of cards in circulation over the past five years are presented in the table below:

Jenis Kartu ATM	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		ATM Card Types
						+/-	%	
Blue Debit Card Chip	59.303	61.024	48.107	35.126	28.737	(1.721)	-2,82%	Blue Debit Card Chip
Gold Debit Card Chip	21.735	28.390	29.099	23.461	20.314	(6.655)	-23,44%	Gold Debit Card Chip
Silver Debit Card Chip	438.997	431.069	403.028	358.232	314.014	7.928	1,84%	Silver Debit Card Chip
Platinum Debit Card Chip	796	1.263	1.384	1.455	1.346	(467)	-36,98%	Platinum Debit Card Chip
Platinum Crystal External Chip	946	969	1.142	1.099	1.030	(23)	-2,37%	Platinum Crystal External Chip



Jenis Kartu ATM	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		ATM Card Types
						+/-	%	
Pensiun Card Chip		454	445	391	283	(454)	-100,00%	Pensiun Card Chip
Kartu TabunganKu Chip	107.960	93.951	81.899	65.769	51.782	14.009	14,91%	Kartu TabunganKu Chip
Platinum Crystal Internal Chip	161	134	113	142	142	27	20,15%	Platinum Crystal Internal Chip
Kartu Persipura Chip	0	0	1.893	2.027	1.800	-	-	Kartu Persipura Chip
Kartu ATM/Debit PON Chip Blue	10.282	10.795	11.587	12.544	12.591	(513)	-4,75%	Kartu ATM/Debit PON Chip Blue
Kartu ATM/Debit PON Chip Black	2.918	3.157	3.446	3.813	2.414	(239)	-7,57%	Kartu ATM/Debit PON Chip Black
Total	643.098	631.206	582.143	504.059	434.453	11.892	1,88%	Total

Dengan rincian hasil komisi yang berhasil dibukukan oleh Bank Papua selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The detailed commission income recorded by Bank Papua over the past five years is presented as follows:

Jenis Kartu ATM	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		ATM Card Types
						+/-	%	
Provisi Adm. Giro,Tab,Dpst	107.096	103.639	92.636	79.102	75.098	3.457	3,34%	Demand Deposit, Tab, Dpst Adm. Provision
Provisi Adm. S.D.B	43	43	45	43	39	-	0,00%	S.D.B Adm. Provision
Total	107.139	103.682	92.681	79.145	75.137	3.457	3,33%	Total

Pembiayaan	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Financing
						+/-	%	
Komisi Fasilitas Kredit Sindikasi		-	-	-	-	-	-	Syndicated Loan Facility Commission
Komisi BAF		-	-	-	3	-	-	BAF Commission
TOTAL		-	-	-	3	-	-	TOTAL

Penerbitan L/C	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		L/C Issuance
						+/-	%	
Provisi Referensi Bank	582	789	884	824	787	(207)	-26,24%	Bank Reference Provision
Provisi Jaminan Bank	584	1.355	1.188	1.207	1.130	(771)	-56,90%	Bank Guarantee Provision
TOTAL	1.166	2.144	2.072	2.031	1.917	(978)	-45,62%	TOTAL

APMK	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		APMK
						+/-	%	
Komisi GPN ATM Prima	1.370	1.309	1.046	900	723	61	4,66%	Komisi GPN ATM Prima
Komisi GPN ATM Bersama	156	101	44	6	5	55	54,46%	Komisi GPN ATM Bersama
Komisi GPN ATM Bank Papua (On Us)	424	333	2	-	-	91	27,33%	Komisi GPN ATM Bank Papua (On Us)
Rekening Pendapatan E-Money	4	15	-	-	-	(11)	-73,33%	Rekening Pendapatan E-Money
TOTAL	1.954	1.758	1.092	906	728	196	11,15%	TOTAL



Agen Penjual	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Sales Agent
						+/-	%	
Komisi Asuransi	19.709	21.041	15.017	11.398	12.698	(1.333)	-6,33%	Insurance Commission
Komisi PT.Askrida	-	270	542	469	518	(270)	-100,00%	PT. Askrida Commission
TOTAL	19.709	21.311	15.559	11.867	13.216	(1.602)	-7,52%	TOTAL

Transfer dan Inkaso	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Transfer and Collection
						+/-	%	
Provisi Transfer	-	0	1	2	2	0	0,00	Transfer Fee
Provisi Kliring	1.110	1.258	1.233	1.223	1.149	148	11,76%	Clearing Fee
TOTAL	1.110	1.258	1.234	1.225	1.151	(148)	11,76%	TOTAL

Payment Point	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Payment Point
						+/-	%	
Komisi Indosat	28	12	9	4	4	16	133,33%	Indosat Commission
Komisi PT.Telkom	-	-	-	-	-	-	-	PT.Telkom Commission
Komisi PDAM	4	5	6	6	6	(1)	-20,00%	PDAM Commission
Komisi Telkomsel	0	0	0	0	8	0	0,00	Telkomsel Commission
Komisi PLN	349	930	948	762	610	(581)	-62,47%	PLN Commission
Komisi Multibiller Finnet	23	37	44	47	51	(14)	-37,84%	Finnet Multibiller Commission
Pendapatan Administrasi Telkomsel	2.071	2.445	1.919	1.955	2.001	(374)	-15,30	Telkomsel Administration Income
Komisi XI	5	7	7	3	1	(2)	-28,57%	XI Commission
TOTAL	2.480	3.437	2.932	2.777	2.682	(957)	-27,84%	TOTAL

Lainnya	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Others
						+/-	%	
Provisi Administrasi Lainnya	4.953	9.481	10.490	6.823	7.764	(4.528)	-47,76%	Other Administrative Fees
Pendapatan BI Fast	1.049	3.350	1.749	583	-	(2.301)	-68,69%	BI Fast Revenue
Komisi ATM Bersama	36.714	26.691	23.074	23.209	27.258	10.023	37,55%	ATM Bersama Commission
Komisi ATM Prima	3.035	2.126	1.230	1.300	1.289	909	42,76%	ATM Prima Commission
Pendapatan Sms Mobile Banking	4.867	4.603	4.271	3.743	3.448	264	5,74%	SMS Mobile Banking Revenue
Komisi BPD-Net	-	-	-	-	-	-	0,00%	BPD-Net Commission
Komisi Bank Persepsi	985	1.081	979	839	857	(96)	-8,88%	Perception Bank Commission
Komisi Rumah Zakat	-	-	-	-	-	-	0,00%	Rumah Zakat Commission
Komisi Pactindo	269	96	-	-	-	173	180,21%	Pactindo Commission
Komisi Lainnya	18	127	285	775	853	(109)	-85,83%	Other Commissions
Komisi Samolnas Collection Agen	-	-	-	-	-	-	0,00%	Samolnas Collection Agent Commission
Komisi Aggregator Samolnas	-	-	-	-	-	-	0,00%	Samolnas Aggregator Commission
Komisi GoPay	-	-	-	-	-	-	0,00%	GoPay Commission
Komisi Laku Pandai	1	1	3	-	-	-	0,00%	Laku Pandai Commission
Provisi Penempatan	-	-	-	1	-	-	0,00%	Placement Provision
Komisi Multibiller Rintis	106	47	-	-	-	59	125,53%	Rintis Multibiller Commission
Pendapatan Qris GPN ATM Bersama	253	360	84	7	2	(107)	-29,72%	Qris GPN ATM Bersama Revenue
Pendapatan Qris GPN Prima	-	-	1	-	-	-	0,00%	Qris GPN Prima Revenue
TOTAL	52.250	47.963	42.166	37.280	41.471	4.287	8,94%	TOTAL



Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Analisis kinerja keuangan Bank Papua dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 oleh Akuntan Publik (KAP) Hertanto Grace Karunawan (HGK). Menurut opini yang diberikan oleh Akuntan Publik (KAP) HGK, laporan keuangan Bank Papua disajikan secara wajar dalam semua hal yang material terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada periode tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

The financial performance analysis of Bank Papua is based on the audited financial statements for the year ended 31 December 2025, which were audited by Public Accounting Firm KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK). According to the audit opinion issued by HGK, Bank Papua's financial statements are fairly presented, in all material respects, in relation to its financial position, financial performance, and cash flows for the year ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Melalui laporan posisi keuangan, kinerja keuangan dapat diukur untuk menilai kemampuan suatu bank dalam berkinerja dengan baik. Sepanjang tahun 2025, Bank Papua menunjukkan kinerja positif di tengah kondisi pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan ini mencerminkan komitmen penuh Bank Papua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia secara umum, dan Tanah Papua Khususnya.

Through the statement of financial position, financial performance can be assessed to evaluate a bank's ability to perform effectively. Throughout 2025, Bank Papua demonstrated positive performance amid the national economic recovery. This improvement reflects the Bank's strong commitment to delivering the best services to customers as a financial intermediary, contributing to the advancement of the Indonesian economy in general, and the Papua region in particular.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Table of Financial Position (2021–2025) (Rp million)

Posisi Keuangan	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Financial Position
						+/-	%	
Aset								Asset
Jumlah Aset	34.343.340	32.114.553	32.275.916	29.812.117	26.122.560	2.228.787	6,94%	Total assets
Liabilitas dan Ekuitas								Liabilities and Equity
Jumlah Liabilitas	29.694.008	27.636.179	28.152.105	26.038.771	22.691.148	2.057.829	7,45%	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	4.649.332	4.478.374	4.123.811	3.773.346	3.431.412	170.958	3,82%	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	34.343.340	32.114.553	32.275.916	29.812.117	26.122.560	2.228.787	6,94%	Total Liabilities and Equity



Posisi keuangan Bank pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid dengan total aset mencapai Rp34.343.340 juta, meningkat sebesar Rp2.228.787 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 6,94% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi penyaluran kredit serta pengelolaan aset produktif yang optimal. Sejalan dengan itu, total liabilitas meningkat sebesar Rp2.057.829 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,45% menjadi Rp29.694.008 juta, yang mencerminkan keberhasilan Bank dalam menghimpun dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan utama.

Sementara itu, ekuitas juga mengalami peningkatan sebesar Rp170.958 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,82% menjadi Rp4.649.332 juta, didorong oleh akumulasi laba serta penguatan struktur permodalan. Secara keseluruhan, pertumbuhan yang seimbang antara aset, liabilitas, dan ekuitas menunjukkan kondisi keuangan Bank yang sehat, dengan strategi yang terarah dalam menjaga likuiditas, memperkuat permodalan, serta mengoptimalkan ekspansi bisnis secara *prudent* dan berkelanjutan.

ASET

Jumlah aset Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp34.343.340 juta, meningkat sebesar Rp2.228.787 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 6,94% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp32.114.553 juta. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja intermediasi yang tetap solid, didukung oleh ekspansi penyaluran kredit serta peningkatan aset produktif lainnya yang dikelola secara optimal. Selain itu, penguatan penghimpunan dana pihak ketiga turut memberikan ruang bagi Bank untuk meningkatkan kapasitas penyaluran dana.

Dalam jangka panjang, aset Bank menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/ CAGR) sebesar 7,08% selama periode 2021–2025, yang mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi yang berkelanjutan dan terukur. Secara keseluruhan, pertumbuhan ini menegaskan kemampuan Bank dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

The Bank's financial position in 2025 reflects solid performance, with total assets reaching Rp34,343,340 million, increasing by Rp2,228,787 million or 6.94% compared to 2024. This growth was supported by the expansion of lending as well as optimal management of earning assets. In line with this, total liabilities increased by Rp2,057,829 million or 7.45% to Rp29,694,008 million, reflecting the Bank's success in mobilizing third-party funds as its primary funding source.

Meanwhile, equity also increased by Rp170,958 million or 3.82% to Rp4,649,332 million, driven by profit accumulation and the strengthening of the capital structure. Overall, the balanced growth in assets, liabilities, and equity indicates a sound financial condition, supported by a well-directed strategy in maintaining liquidity, strengthening capital, and optimizing business expansion in a prudent and sustainable manner.

ASSETS

Total assets in 2025 were recorded at Rp34,343,340 million, increasing by Rp2,228,787 million or 6.94% compared to Rp32,114,553 million in 2024. This growth reflects solid intermediation performance, supported by the expansion of lending and the increase in other earning assets managed optimally. In addition, stronger third-party fund mobilization has provided greater capacity for the Bank to expand its lending activities.

Over the long term, the Bank's assets show a consistent growth trend, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.08% during the 2021–2025 period, reflecting the success of a sustainable and well-measured expansion strategy. Overall, this growth underscores the Bank's ability to maintain a balance between business expansion and asset quality through the implementation of prudent banking principles.

Tabel Aset Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	CAGR	Description
						2024-2025 (%)	2021-2025 (%)	
Jumlah Aset	34.343.340	32.114.553	32.275.916	29.812.117	26.122.560	6,94%	7,08%	Total Assets

Table of Assets (2021–2025) (Rp million)



Aset Lancar

Jumlah aset lancar pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp33.754.455 juta, meningkat sebesar Rp2.313.186 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,36% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp31.441.268 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang meningkat sebesar Rp1.953.515 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 300,45% menjadi Rp2.603.712 juta, serta pertumbuhan kas yang meningkat sebesar Rp763.988 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 52,19% menjadi Rp2.227.857 juta, yang mencerminkan penguatan likuiditas Bank.

Selain itu, pinjaman yang diberikan juga mengalami peningkatan sebesar Rp919.022 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 4,34% menjadi Rp22.081.768 juta, yang turut menopang pertumbuhan aset lancar. Sementara itu, giro pada Bank Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp2.206.863 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 66,00% menjadi Rp1.136.671 juta, yang menunjukkan adanya pergeseran strategi penempatan likuiditas ke instrumen yang lebih optimal. Secara keseluruhan, pertumbuhan aset lancar ini mencerminkan pengelolaan likuiditas yang lebih dinamis dan terarah dalam mendukung ekspansi kredit serta menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas.

Current Assets

Total current assets in 2025 were recorded at Rp33,754,455 million, increasing by Rp2,313,186 million or 7.36% compared to 2024, which stood at Rp31,441,268 million. This increase was primarily driven by a significant rise in placements with Bank Indonesia and other banks, which grew by Rp1,953,515 million or 300.45% to Rp2,603,712 million, as well as growth in cash, which increased by Rp763,988 million or 52.19% to Rp2,227,857 million, reflecting strengthened liquidity.

In addition, loans increased by Rp919,022 million or 4.34% to Rp22,081,768 million, further supporting the growth of current assets. Meanwhile, demand deposits with Bank Indonesia declined by Rp2,206,863 million or 66.00% to Rp1,136,671 million, indicating a shift in liquidity placement strategies toward more optimal instruments.

Overall, the growth in current assets reflects more dynamic and well-directed liquidity management in supporting loan expansion while maintaining a balance between liquidity and profitability.

Tabel Aset Lancar Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Table of Current Assets (2021–2025) (Rp million)

Aset	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Asset
						+/-	%	
Kas	2.227.857	1.463.869	1.529.561	1.380.956	1.503.245	763.988	52,19%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.136.671	3.343.534	3.632.470	3.799.724	1.478.485	(2.206.863)	-66,00%	Demand Deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	85.304	61.529	74.987	38.240	48.125	23.775	38,64%	Demand Deposit with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.603.712	650.197	2.405.688	1.292.688	1.417.687	1.953.515	300,45%	Placement within Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek	4.881.207	4.759.393	3.681.050	1.805.675	1.625.316	1.022.814	26,51%	Marketable Securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	901.000	100.818	-	-	-901.000	-100,00%	Securities sold with a promise to repurchase
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	737.935	-	1.284.732	3.377.196	2.616.190	737.935	0,00%	Marketable Securities Repo
Pinjaman yang diberikan	22.081.768	21.162.747	18.973.598	17.519.704	16.890.254	919.022	4,34%	Loans
Jumlah Aset Lancar	33.754.454	31.441.269	31.682.904	29.214.183	25.579.302	2.313.186	7,36%	Total of Current Asset



a) Kas

Total kas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.227.857 juta, meningkat sebesar Rp763.988 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 52,19% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1.463.869 juta. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan kas besar dan kas kecil yang meningkat sebesar Rp533.733 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 43,44% menjadi Rp1.762.349 juta, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan operasional dan transaksi tunai.

Selain itu, kas pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp231.255 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 97,88% menjadi Rp465.508 juta. Kondisi ini mencerminkan peningkatan aktivitas transaksi nasabah serta penguatan layanan perbankan.

a) Cash

Total cash in 2025 was recorded at Rp2,227,857 million, increasing by Rp763,988 million or 52.19% compared to 2024, which amounted to Rp1,463,869 million. This increase was primarily driven by higher vault cash and petty cash, which rose by Rp533,733 million or 43.44% to Rp1,762,349 million, in line with growing operational needs and cash transactions.

In addition, cash in Automated Teller Machines (ATMs) also recorded a significant increase of Rp231,255 million or 97.88% to Rp465,508 million. This condition reflects increased customer transaction activity as well as the strengthening of banking services.

Tabel Kas Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)**Table of Cash (2021–2025) (Rp million)**

Kas	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Cash
						+/-	%	
Kas Besar dan Kas Kecil	1.762.349	1.228.616	1.243.758	1.072.994	1.210.927	533.733	43,44%	Large Cash and Small Cash
Kas pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	465.508	234.253	285.803	307.962	292.318	231.255	97,88%	Cash on Automatic Teller Machine (ATM)
Jumlah	2.227.857	1.463.869	1.529.561	1.380.956	1.503.245	763.988	52,19%	Total

b) Giro pada Bank Indonesia

Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam bentuk giro di Bank Indonesia. GWM dipersyaratkan dalam mata uang Rupiah bagi kegiatan bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022. Kesesuaian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

b) Demand Deposits with Bank Indonesia

The Bank is required to comply with regulations issued by Bank Indonesia regarding the Minimum Statutory Reserves (GWM), which must be maintained in the form of demand deposits with the central bank. The GWM requirement is mandated in Rupiah for conventional commercial banking activities.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's Minimum Statutory Reserves (GWM) have complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/4/PBI/2022 dated 1 March 2022 concerning Minimum Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency, as well as Board of Governors Regulation (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022. This compliance is presented in the table below:



Tabel Rasio GWM Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Konvensional**Table of Minimum Statutory Reserve (GWM) Ratios for Conventional Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency**

Giro Wajib Minimum:	2025	2024	2023	2022	2021	Statutory Reserve Requirement:
GWM Primer	3,90%	6,40%	6,80%	8,20%	3,50%	Primary GWM
Harian *)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Daily *)
Rata-rata *)	3,90%	6,40%	6,80%	8,20%	3,00%	Average *)
- PLM **)	4,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	- PLM **)

Untuk itu, posisi Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Papua pada tahun 2025 harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi pemenuhan GWM tersebut:

Accordingly, the Minimum Statutory Reserves (GWM) position of Bank Papua in 2025 must comply with the requirements set by Bank Indonesia. The following table presents the realization of GWM compliance:

Tabel Pemenuhan GWM Bank Indonesia Tahun 2021 – 2025**Table of Bank Indonesia GWM Compliance (2021–2025)**

Giro Wajib Minimum:	2025	2024	2023	2022	2021	Statutory Reserve Requirement:
GWM Primer	6,60%	7,38%	10,15%	11,24%	3,59%	Primary GWM
Harian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	Daily
Rata-rata	9,00%	7,38%	10,15%	11,24%	3,09%	Average
PLM	4,00%	5,00%	5,00%	6,00%	23,85%	PLM

Giro pada Bank Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.136.671 juta, menurun sebesar Rp2.206.863 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 66,00% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3.343.534 juta. Penurunan ini mencerminkan strategi optimalisasi pengelolaan likuiditas, di mana Bank mengalihkan sebagian dana ke instrumen yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif, seperti penempatan pada bank lain atau aset produktif.

Demand deposits with Bank Indonesia in 2025 were recorded at Rp1,136,671 million, decreasing by Rp2,206,863 million or 66.00% compared to 2024, which stood at Rp3,343,534 million. This decline reflects the Bank's strategy to optimize liquidity management by reallocating a portion of funds into instruments offering more competitive returns, such as placements with other banks or other earning assets.

Selain itu, penyesuaian ini juga sejalan dengan kebutuhan likuiditas operasional dan ekspansi kredit, sehingga dana tidak terkonsentrasi pada giro Bank Indonesia yang memiliki imbal hasil relatif rendah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan pengelolaan likuiditas yang lebih efisien dan dinamis. Perkembangan giro pada Bank Indonesia selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

This adjustment is also aligned with operational liquidity needs and loan expansion, ensuring that funds are not concentrated in demand deposits with Bank Indonesia, which generally yield lower returns. Overall, this condition indicates more efficient and dynamic liquidity management. The development of demand deposits with Bank Indonesia over the past five years is presented in the table below:

Tabel Giro pada Bank Indonesia Tahun 2021-2025 (Rp Juta)**Table of Demand Deposits with Bank Indonesia (2021–2025) (Rp million)**

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Description
						+/-	%	
Giro pada Bank Indonesia	1.136.671	3.343.534	3.632.470	3.799.724	1.478.485	(2.206.863)	-66,00%	Demand Deposit with Bank Indonesia



c) Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp85.304 juta, meningkat sebesar Rp23.775 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 38,64% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp61.529 juta. Peningkatan ini mencerminkan strategi Bank dalam mengoptimalkan pengelolaan likuiditas melalui diversifikasi penempatan dana antarbank.

Selain untuk mendukung kebutuhan transaksi dan penyelesaian (settlement), kenaikan ini juga menunjukkan peningkatan aktivitas operasional serta penguatan kerja sama antarbank. Secara keseluruhan, pertumbuhan giro pada bank lain memperkuat fleksibilitas likuiditas sekaligus mendukung efisiensi pengelolaan kas Bank. Perkembangan giro pada bank lain selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel Giro pada Bank Lain Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Description
						+/-	%	
Giro pada Bank Lain	85.304	61.529	74.987	38.240	48.125	23.775	38,64%	Demand Deposits with Other Banks

d) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada bank lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.603.712 juta, meningkat sebesar Rp1.953.515 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 300,45% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp650.197 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan penempatan pada instrumen promes yang mencapai Rp2.590.000 juta, meningkat sebesar Rp1.985.000 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 328,10%, sebagai bagian dari strategi optimalisasi likuiditas pada instrumen dengan imbal hasil yang kompetitif.

Sementara itu, deposito berjangka pada bank lain mengalami penurunan sebesar Rp29.835 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 60,71% menjadi Rp19.305 juta, yang mencerminkan adanya pergeseran preferensi instrumen. Di sisi lain, pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan pengelolaan likuiditas yang lebih agresif namun tetap terukur. Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan pada tabel berikut.

c) Demand Deposits with Other Banks

Demand deposits with other banks in 2025 were recorded at Rp85,304 million, increasing by Rp23,775 million or 38.64% compared to 2024, which amounted to Rp61,529 million. This increase reflects the Bank's strategy to optimize liquidity management through diversification of interbank fund placements.

In addition to supporting transaction and settlement needs, this growth also indicates increased operational activities and strengthened interbank relationships. Overall, the growth in demand deposits with other banks enhances liquidity flexibility while supporting efficient cash management.

The development of demand deposits with other banks over the past five years is presented in the table below:

Table of Demand Deposits with Other Banks (2021–2025) (Rp million)**d) Placements with Bank Indonesia and Other Banks**

Placements with other banks in 2025 were recorded at Rp2,603,712 million, increasing significantly by Rp1,953,515 million or 300.45% compared to 2024, which amounted to Rp650,197 million. This increase was primarily driven by a surge in placements in promissory note instruments, which reached Rp2,590,000 million, rising by Rp1,985,000 million or 328.10%, as part of the Bank's strategy to optimize liquidity through instruments offering competitive returns.

Meanwhile, time deposits with other banks declined by Rp29,835 million or 60.71% to Rp19,305 million, reflecting a shift in instrument preferences. On the other hand, the allowance for impairment losses also increased, indicating the application of prudent principles.

Overall, this performance reflects a more proactive yet measured liquidity management approach. The details of placements with Bank Indonesia and other banks are presented in the table below:



Tabel Penempatan pada Bank Indonesia Tahun 2021-2025 (Rp Juta)**Table of Placements with Bank Indonesia and Other Banks (2021–2025) (Rp million)**

Keterangan	Tahun					YOY 2024-2025		Description
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Penempatan Bank Indonesia		-	49.993	429.940	599.908	-	-	Bank Indonesia Placement
Promes	2.590.000	605.000	2.330.000	865.000	810.000	1.985.000	328,10%	Promissory Notes
Deposito On Call	-	-	-	-	-	-	-	On Call Deposits
Deposito Berjangka pada Bank Lain	19.305	49.140	29.440	-	9.922	(29.835)	-60,71%	Time Deposits in Other Banks
Jumlah	2.609.305	654.140	2.409.433	1.294.940	1.419.830	1.955.165	298,89%	Amount
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(5.593)	(3.943)	(3.745)	(2.252)	(2.143)	1.650	41,85%	Provision for Impairment Losses
Total	2.603.712	650.197	2.405.688	1.292.688	1.417.687	1.953.515	300,45%	Total

e) Surat Berharga yang Dimiliki

Surat berharga yang dimiliki pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4.881.313 juta, meningkat sebesar Rp1.022.798 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 26,51% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4.759.515 juta. Peningkatan ini menunjukkan optimalisasi penempatan dana pada instrumen pasar keuangan yang memberikan imbal hasil kompetitif serta mendukung pengelolaan likuiditas Bank.

Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga yang dimiliki tercatat sebesar Rp106 juta, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp122 juta, yang mencerminkan penurunan cadangan sebesar 13,11%. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas portofolio surat berharga. Dengan demikian, nilai bersih surat berharga yang dimiliki mencapai Rp4.881.207 juta, meningkat sebesar Rp1.022.814 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 26,51%. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan strategi Bank dalam mengelola portofolio investasi secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kualitas aset.

e) Marketable Securities

Marketable securities in 2025 were recorded at Rp4,881,313 million, increasing by Rp1,022,798 million or 26.51% compared to 2024, which amounted to Rp4,759,515 million. This increase reflects the optimization of fund placements in financial market instruments that offer competitive returns while supporting the Bank's liquidity management.

Meanwhile, the allowance for impairment losses on marketable securities was recorded at Rp106 million, improving from Rp122 million in the previous year, representing a decrease of 13.11%. This indicates an improvement in the quality of the securities portfolio. Accordingly, the net value of marketable securities reached Rp4,881,207 million, increasing by Rp1,022,814 million or 26.51%.

Overall, this performance reflects the Bank's strategy in optimally managing its investment portfolio while adhering to prudent principles and maintaining asset quality.

Tabel Surat Berharga yang Dimiliki Tahun 2021-2025 (Rp Juta)**Table of Marketable Securities (2021–2025) (Rp million)**

Keterangan	Tahun					YOY 2024-2025		Description
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Surat Berharga Yang Dimiliki	4.881.313	4.759.515	3.681.114	1.805.776	1.625.345	1.022.798	26,51%	Marketable Securities Owned
CPN Surat Berharga Yang Dimiliki	(106)	(122)	(64)	(101)	(29)	(16)	-13,11%	CPN Marketable Securities Owned
Surat Berharga Yang Di Miliki Bersih	4.881.207	4.759.393	3.681.050	1.805.675	1.625.316	1.022.814	26,51%	Marketable Securities Owned Net



f) Surat Berharga yang di Jual Dengan Janji Di Beli Kembali (REPO)

Pada tahun 2025 dan 2024, tidak terdapat surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) oleh Bank Papua.

g) Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo)

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp737.935 juta. Pos ini tidak tercatat pada tahun 2024, sehingga peningkatan sebesar Rp737.935 juta mencerminkan adanya kembali aktivitas penempatan pada instrumen reverse repo setelah tidak terdapat realisasi pada periode sebelumnya.

Tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai atas instrumen ini, sehingga nilai bruto dan bersih tercatat sama. Secara keseluruhan, penggunaan instrumen reverse repo pada tahun 2025 menunjukkan strategi Bank dalam mengoptimalkan pengelolaan likuiditas secara dinamis, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Tabel Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali 2021-2025 (Rp Juta)

Keterangan	Tahun					Growth 2024-2025		Description
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo)	737.935	-	1.284.732	3.377.196	2.616.190	737.935	-	Securities Purchased With Promise To Resell (Reverse Repo)
CPN Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	CPN Securities Purchased With Promise To Resell (Reverse Repo)
Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo) Bersih	737.935	-	1.284.732	3.377.196	2.616.190	737.935	-	Securities Purchased With Promise To Resell (Reverse Repo)

h) Pinjaman yang Diberikan

Nilai penyaluran kredit pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp22.081.768 juta, meningkat Rp919.022 juta atau 4,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.162.746 juta. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja intermediasi Bank yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi, didorong oleh ekspansi pada segmen kredit konsumsi serta penyaluran selektif pada sektor produktif. Kenaikan ini juga menunjukkan keberhasilan Bank dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Secara

f) Securities Sold Under Agreements to Repurchase (Repo)

In 2025 and 2024, there were no securities sold under agreements to repurchase (repo) by Bank Papua.

g) Securities Purchased Under Agreements to Resell (Reverse Repo)

Securities purchased under agreements to resell (reverse repo) in 2025 were recorded at Rp737,935 million. This position was not recorded in 2024; therefore, the increase of Rp737,935 million reflects the resumption of placements in reverse repo instruments after no realization in the previous period.

There was no allowance for impairment losses on this instrument, resulting in identical gross and net values. Overall, the use of reverse repo instruments in 2025 indicates the Bank's strategy to optimize liquidity management in a dynamic manner, while maintaining prudent principles and meeting short-term liquidity needs.

Table of Securities Purchased Under Agreements to Resell (2021–2025) (Rp million)

Keterangan	Tahun					Growth 2024-2025		Description
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo)	737.935	-	1.284.732	3.377.196	2.616.190	737.935	-	Securities Purchased With Promise To Resell (Reverse Repo)
CPN Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	CPN Securities Purchased With Promise To Resell (Reverse Repo)
Surat Berharga Yang Di Beli Dengan Janji Di Jual Kembali (Reverse Repo) Bersih	737.935	-	1.284.732	3.377.196	2.616.190	737.935	-	Securities Purchased With Promise To Resell (Reverse Repo)

h) Loans

Total loans disbursed in 2025 were recorded at Rp22,081,768 million, increasing by Rp919,022 million or 4.34% compared to 2024, which amounted to Rp21,162,746 million. This growth reflects the Bank's sustained intermediation performance amid economic dynamics, driven by expansion in the consumer loan segment as well as selective lending to productive sectors.

The increase also indicates the Bank's success in maintaining a balance between business growth and asset quality through the implementation of prudent principles.



keseluruhan, pertumbuhan kredit ini memperkuat peran Bank dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas kinerja keuangan.

Overall, this loan growth strengthens the Bank's role in supporting regional economic financing while maintaining financial performance stability.

Tabel Pinjaman yang Diberikan Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Loans (2021–2025) (Rp million)

Uraian	Tahun					Growth 2024-2025		Description
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Nilai Penyaluran Kredit	22.081.768	21.162.746	18.973.598	17.519.704	16.890.254	919.022	4,34%	Loan Distribution Value

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp588.886 juta, menurun sebesar Rp84.398 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 12,54% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp673.284 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya aset lain-lain yang menurun sebesar Rp103.455 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 23,96% menjadi Rp328.415 juta, yang mencerminkan adanya optimalisasi dan pembersihan portofolio aset nonproduktif.

Non-Current Assets

Non-current assets in 2025 were recorded at Rp588,886 million, decreasing by Rp84,398 million or 12.54% compared to 2024, which amounted to Rp673,284 million. This decline was mainly driven by a reduction in other assets, which decreased by Rp103,455 million or 23.96% to Rp328,415 million, reflecting optimization and clean-up of non-earning asset portfolios.

Di sisi lain, aset tetap bersih mengalami peningkatan sebesar Rp19.057 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,89% menjadi Rp260.471 juta, seiring dengan investasi pada sarana dan prasarana operasional. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan strategi Bank dalam meningkatkan efisiensi struktur aset dengan mengurangi aset non-earning serta memperkuat aset yang mendukung operasional.

On the other hand, net fixed assets increased by Rp19,057 million or 7.89% to Rp260,471 million, in line with investments in operational infrastructure. Overall, this change indicates the Bank's strategy to improve asset structure efficiency by reducing non-earning assets while strengthening assets that support operations.

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Table of Non-Current Assets (2021–2025) (Rp million)

ASET TIDAK LANCAR	Tahun					YOY 2024-2025		NON CURRENT ASSETS
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Aset tetap - bersih	260.471	241.414	241.622	254.463	267.547	19.057	7,89%	Fixed Assets-Net
Aset Lain-lain	328.415	431.870	351.390	343.471	275.711	(103.455)	-23,96%	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	588.886	673.284	593.012	597.934	543.258	(84.398)	-12,54%	Total of Non Current Assets

a) Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dan aset hak guna pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp260.471 juta, meningkat Rp19.057 juta atau 7,89% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp241.414 juta. Peningkatan ini mencerminkan investasi berkelanjutan Bank dalam penguatan infrastruktur operasional, termasuk pengembangan jaringan layanan, fasilitas kantor, serta pemanfaatan aset berbasis sewa (right of use assets) sesuai standar akuntansi. Kenaikan ini juga menunjukkan komitmen Bank dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. Secara

a) Fixed Assets and Right-of-Use Assets

Fixed assets and right-of-use assets in 2025 were recorded at Rp260,471 million, increasing by Rp19,057 million or 7.89% compared to 2024, which amounted to Rp241,414 million. This increase reflects the Bank's continued investment in strengthening operational infrastructure, including the development of service networks, office facilities, and the utilization of leased assets (right-of-use assets) in accordance with applicable accounting standards. The growth also indicates the Bank's commitment to supporting digital transformation and enhancing service



keseluruhan, pertumbuhan aset tetap dan hak guna mencerminkan strategi ekspansi yang terukur, dengan tetap menjaga efisiensi penggunaan aset dan optimalisasi produktivitas operasional.

quality for customers. Overall, the increase in fixed assets and right-of-use assets reflects a well-measured expansion strategy, while maintaining asset utilization efficiency and optimizing operational productivity.

Tabel Perkembangan Saldo Aset Tetap dan Aset Hak Guna Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Fixed Assets and Right-of-Use Assets (2021–2025) (Rp million)

Uraian	Tahun					YOY 2024-2025		Remark
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Aset Tetap dan Aset Hak Guna	260.471	241.414	241.622	254.463	267.547	19.057	7,89%	Fixed Assets and Right of Use Assets

Secara perincian pencatatan Aset tetap sebagai berikut :

The detailed breakdown of fixed asset recognition is presented as follows:

	Saldo Awal 1 Januari 2025 / Beginning Balance January 1, 2025	Penambahan/Additions	Pengurangan/Disposals	Reklasifikasi dan penyesuaian / Reclassification and adjustment	Saldo Akhir 31 Desember 2025/Ending Balance December 31, 2025
Biaya perolehan (Cost					
Tanah (Land)	38.786	-	-	-856	37.930
Bangunan Kantor (Buildings)	312.073	2.932	3.325	1.652	313.332
Perumahan Dinas (Houses)	25.515	489	512	-	(25.492)
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	9.815	603	2.467	-	7.952
Inventaris Kantor (Office Equipment)	256.141	19.177	12.658	3.013	265.673
Inventaris Rumah Dinas (House Equipment)	10.798	786	1.044	-	10.540
Inventaris Lainnya (Others)	18.377	1.318	452	-	19.243
Aset Hak Guna (Right of use of assets)	50.786	32.211	20.293	-	62.704
Inventaris Dalam Penyelesaian (Equipment In Progress)	4.293	5.125	-	(6.593)	2.825
Bangunan Dalam Penyelesaian (Building In Progress)	9.233	17.606	-	(1.931)	24.907
Total biaya perolehan (Total cost)	735.817	80.246	40.751	(4.715)	770.598
Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)					
Bangunan Kantor (Buildings)	201.343	12.810	3.325	399	211.227
Perumahan Dinas (Houses)	14.411	1.127	512	-	15.026
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	8.784	580	2.467	-	6.897
Inventaris Kantor (Office Equipment)	219.362	17.936	12.658	-	224.640
Inventaris Rumah Dinas (House Equipment)	8.746	1.108	1.044	-	8.810
Inventaris Lainnya (Others)	15.193	1.440	452	-	16.181
Aset Hak Guna (Right of use of assets)	26.564	20.834	20.293	240	27.345



	Saldo Awal 1 Januari 2025 / Beginning Balance January 1, 2025	Penambahan/Additions	Pengurangan/Disposals	Reklasifikasi dan penyesuaian / Reclassification and adjustment	Saldo Akhir 31 Desember 2025/Ending Balance December 31, 2025
Total akumulasi penyusutan (Total accumulated depreciation)	494.403	55.834	40.751	639	510.126
Nilai buku (Book value)	241.414	-	-	-	260.471

Dan untuk Aset Hak Guna sebagai berikut :

And for Right to Use Assets as follows:

Akumulasi Penyusutan (Accumulated Depreciation)					
Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi & Penyesuaian	Saldo Akhir 31 Des 2025
Bangunan Kantor	25.894	13.330	10.896	-	28.328
Rumah Dinas	1.842	387	1.346	-	884
Kendaraan Bermotor	10.509	5.103	6.798	-	8.814
Ruang ATM	2.548	1.048	1.253	-	2.343
Mesin ATM	9.992	12.343	-	-	22.336
Jumlah	50.786	32.211	20.293	-	62.704

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi & Penyesuaian	Saldo Akhir 31 Des 2025
Bangunan Kantor	14.770	8.596	10.896	79	12.550
Rumah Dinas	1.208	617	1.346	-	480
Kendaraan Bermotor	7.245	3.718	6.798	161	4.326
Ruang ATM	1.430	1.025	1.253	-	1.202
Mesin ATM	1.909	6.878	-	-	8.787
Jumlah	26.564	20.834	20.293	240	27.345
Nilai Buku Awal	24.222	-	-	-	35.359

b) Aset Lain-lain

Aset lain-lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp328.415 juta, menurun sebesar Rp103.455 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 23,96% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp431.870 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya uang muka lainnya yang menurun sebesar Rp110.313 juta menjadi Rp93.908 juta, serta penurunan pos lainnya dari Rp16.376 juta menjadi Rp3.630 juta, yang mencerminkan penyelesaian transaksi serta optimalisasi aset nonproduktif.

Di sisi lain, beberapa pos mengalami peningkatan. Aset pajak tangguhan meningkat sebesar Rp12.981 juta menjadi Rp93.724 juta dan piutang bunga pinjaman meningkat sebesar Rp2.913 juta menjadi Rp58.731 juta, yang menunjukkan adanya potensi manfaat ekonomi di masa depan. Secara keseluruhan, pergerakan ini mencerminkan

b) Other Assets

Other assets in 2025 were recorded at Rp328,415 million, decreasing by Rp103,455 million or 23.96% compared to 2024, which amounted to Rp431,870 million. This decline was mainly driven by a decrease in other advances, which fell by Rp110,313 million to Rp93,908 million, as well as a reduction in other items from Rp16,376 million to Rp3,630 million, reflecting the settlement of transactions and optimization of non-earning assets.

On the other hand, several components recorded increases. Deferred tax assets rose by Rp12,981 million to Rp93,724 million, and loan interest receivables increased by Rp2,913 million to Rp58,731 million, indicating potential future economic benefits. Overall, these movements reflect



strategi Bank dalam meningkatkan efisiensi neraca melalui pengurangan aset non-earning serta penguatan kualitas aset. Perkembangan aset lain-lain selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

the Bank's strategy to enhance balance sheet efficiency by reducing non-earning assets while strengthening asset quality. The development of other assets over the past five years is presented in the table below:

Tabel Aset Lain-lain Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Other Assets (2021–2025) (Rp million)

Uraian	Tahun					YOY 2024-2025		Remark
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Aset Lain-Lain	328.415	431.870	351.391	343.472	275.711	(103.455)	-23,96%	Other Assets

LIABILITAS

Total liabilitas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp29.694.008 juta, meningkat sebesar Rp2.057.829 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,45% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp27.636.179 juta. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan simpanan nasabah yang meningkat sebesar Rp1.484.550 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 6,01%, serta simpanan dari bank lain yang meningkat sebesar Rp450.417 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 77,90%, yang mencerminkan keberhasilan Bank dalam menghimpun dana.

Selain itu, pinjaman yang diterima juga mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp1.493.519 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 1.965,55% sebagai bagian dari strategi penguatan likuiditas. Di sisi lain, liabilitas segera mengalami penurunan sebesar Rp531.318 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 55,68%. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan struktur pendanaan Bank yang semakin kuat dan terdiversifikasi, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas likuiditas dan mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

LIABILITIES

Total liabilities in 2025 were recorded at Rp29,694,008 million, increasing by Rp2,057,829 million or 7.45% compared to 2024, which amounted to Rp27,636,179 million. This increase was primarily driven by growth in customer deposits, which rose by Rp1,484,550 million or 6.01%, as well as deposits from other banks, which increased significantly by Rp450,417 million or 77.90%, reflecting the Bank's success in mobilizing funds.

In addition, borrowings recorded a substantial increase of Rp1,493,519 million or 1,965.55%, as part of the Bank's strategy to strengthen liquidity. On the other hand, liabilities payable immediately declined by Rp531,318 million or 55.68%.

Overall, these developments indicate a stronger and more diversified funding structure, in line with the Bank's efforts to maintain liquidity stability and support sustainable business expansion.

Tabel Liabilitas Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Liabilities (2021–2025) (Rp million)

Liabilitas	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Liabilities
						+/-	%	
Liabilitas segera	422.928	954.246	1.114.211	719.338	679.229	(531.318)	-55,68%	Immediate liability
Simpanan nasabah	26.170.639	24.686.089	25.604.648	24.130.480	20.784.617	1.484.550	6,01%	Customer deposits
Simpanan dari bank lain	1.028.594	578.178	743.905	525.638	499.150	450.416	77,90%	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	1.569.504	75.985	83.064	87.705	93.747	1.493.519	1965,55%	Loans accepted
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	875.460	95.416	0	0	(875,460)	-100,00%	Securities sold under agreements to repurchase
Liabilitas lain-lain	502.343	466.221	510.861	575.610	634.406	36.122	7.75%	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	29.694.008	27.636.179	28.152.105	26.038.771	22.691.148	2.057.829	7,45%	Total Liabilities



Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Bank Papua merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan berperan penting dalam menjaga kelancaran aktivitas operasional serta stabilitas likuiditas Bank. Komponen utama liabilitas jangka pendek terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah (giro, tabungan, dan deposito berjangka), simpanan dari bank lain, serta utang pajak dan kewajiban operasional lainnya. Struktur kewajiban ini mencerminkan fungsi intermediasi Bank dalam menghimpun dana masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan transaksi nasabah. Pengelolaan liabilitas jangka pendek dilakukan secara *prudent* melalui penguatan manajemen likuiditas, pengendalian biaya dana, serta optimalisasi komposisi dana murah guna memastikan kesinambungan operasional dan kemampuan Bank dalam mendukung pertumbuhan kredit secara berkelanjutan.

a) Liabilitas Segera

Liabilitas segera pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp422.928 juta, menurun sebesar Rp531.318 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 55,68% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp954.246 juta. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya pengelolaan kewajiban jangka pendek yang lebih efisien, sejalan dengan upaya Bank dalam mengoptimalkan struktur liabilitas dan menjaga stabilitas likuiditas.

Secara keseluruhan, penurunan liabilitas segera mencerminkan strategi Bank dalam mengurangi tekanan kewajiban yang bersifat segera serta meningkatkan fleksibilitas pengelolaan arus kas untuk mendukung aktivitas operasional dan ekspansi bisnis.

Tabel Liabilitas Segera 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Remark
						+/-	%	
Liabilitas Segera	422.928	954.246	1.114.211	719.338	679.229	(531.318)	-55,68%	Immediate liability

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya rekening titipan yang menurun sebesar Rp345.739 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 51,24% menjadi Rp329.058 juta. Selain itu, kewajiban BI Fast juga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp204.703 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 98,44% menjadi Rp3.239 juta, yang mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan transaksi dan penyelesaian (settlement).

Short-Term Liabilities

Bank Papua's short-term liabilities represent obligations that must be settled within a maximum period of one year and play a crucial role in maintaining smooth operational activities and liquidity stability. The main components of short-term liabilities consist of liabilities payable immediately, customer deposits (demand deposits, savings, and time deposits), deposits from other banks, as well as tax payables and other operational liabilities.

This liability structure reflects the Bank's intermediation function in mobilizing public funds while supporting customers' transactional needs. The management of short-term liabilities is carried out prudently through strengthened liquidity management, cost of fund control, and optimization of low-cost fund composition to ensure business continuity and the Bank's ability to support sustainable lending growth.

a) Current Liabilities

Current liabilities in 2025 amounted to Rp422,928 million, representing a decrease of Rp531,318 million or 55.68% compared to Rp954,246 million in 2024. This significant decline indicates more efficient short-term liability management, in line with the Bank's efforts to optimize its liability structure and maintain liquidity stability.

Overall, the decrease in current liabilities reflects the Bank's strategy to reduce pressure from short-term obligations while enhancing cash flow flexibility to support operational activities and business expansion.

Table of Current Liabilities 2021-2025 (Rp Million)

This decrease was primarily driven by a reduction in escrow accounts, which declined by Rp345,739 million or 51.24% to Rp329,058 million. In addition, BI-FAST obligations also recorded a significant decrease of Rp204,703 million or 98.44% to Rp3,239 million, reflecting improved efficiency in transaction management and settlement processes.



Selanjutnya, liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara mengalami penurunan sebesar Rp45.176 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 64,71% menjadi Rp24.642 juta. Di sisi lain, terdapat peningkatan pada beberapa pos, antara lain pengembangan aplikasi yang meningkat sebesar Rp56.811 juta, serta utang bunga yang meningkat sebesar Rp4.866 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 523,79%, yang menunjukkan adanya peningkatan kewajiban operasional dan akrual. Selain itu, setoran jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah juga meningkat sebesar Rp2.623 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 348,67% menjadi Rp3.374 juta.

Secara keseluruhan, pergerakan ini mencerminkan pengelolaan kewajiban jangka pendek yang lebih efisien, dengan fokus pada penurunan kewajiban nonproduktif serta optimalisasi likuiditas Bank.

Furthermore, liabilities to the State Treasury and Cash Office decreased by Rp45,176 million, representing a decline of 64.71% to Rp24,642 million. On the other hand, several items recorded increases, including application development costs which rose by Rp56,811 million, as well as accrued interest payable which increased by Rp4,866 million or 523.79%, indicating higher operational obligations and accruals. In addition, matured security deposits that have not yet been claimed by customers increased by Rp2,623 million or 348.67% to Rp3,374 million.

Overall, these movements reflect more efficient short-term liability management, with a focus on reducing non-productive liabilities and optimizing the Bank's liquidity.

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Remark
						+/-	%	
Rekening titipan	329.058	674.797	977,105	463,628	497,303	(345.739)	-51,24%	Accounts not yet settled
Pengembangan aplikasi	56.820	9	1	-	-	56.811	631233,33%	Application development
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara	24.642	69.818	47,652	208,578	169,518	(45.176)	-64,71%	Liabilities to the State Treasury and Cash Office
Kewajiban BI Fast	3.239	207.941	80,745	24,770	-	(204.703)	-98,44%	Liabilities BI Fast
Utang Bunga	5.795	929	1,180	4,322	3,650	4.866	523,79%	Interest payable
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah	3.374	752	7,528	18,040	8,758	2.622	348,67%	Matured security deposits not yet collected by customers

b) Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp26.170.639 juta, meningkat sebesar Rp1.484.550 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 6,01% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp24.686.089 juta. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank serta keberhasilan strategi penghimpunan dana melalui penguatan produk dan layanan perbankan, termasuk optimalisasi kanal digital dan program loyalitas nasabah.

Kenaikan ini juga didorong oleh peningkatan dana berjangka yang menawarkan imbal hasil kompetitif di tengah dinamika suku bunga. Secara keseluruhan, pertumbuhan simpanan nasabah ini memperkuat struktur pendanaan Bank serta mendukung ekspansi kredit secara berkelanjutan. Rincian simpanan nasabah telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam laporan tahunan ini.

b) Customer Deposits

Customer deposits in 2025 amounted to Rp26,170,639 million, increasing by Rp1,484,550 million or 6.01% compared to Rp24,686,089 million in 2024. This growth reflects rising public trust in the Bank and the effectiveness of fund mobilization strategies through the enhancement of banking products and services, including the optimization of digital channels and customer loyalty programs.

The increase was also supported by growth in time deposits offering competitive returns amid interest rate dynamics. Overall, the growth in customer deposits strengthens the Bank's funding structure and supports sustainable loan expansion. Details of customer deposits are presented in the previous subsection of this Annual Report.



Tabel Simpanan Nasabah 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Remark
						+/-	%	
Simpanan nasabah	26.170.639	24.686.089	25.604.648	24.130.480	20.784.616	1.484.550	6,01%	Customer Deposits

Table of Customer Deposits 2021–2025 (Rp Million)

c) Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.028.594 juta, meningkat sebesar Rp450.416 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 77,90% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp578.178 juta. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi kerja sama antarbank dalam pengelolaan likuiditas serta meningkatnya kepercayaan institusi perbankan terhadap kinerja Bank.

Selain itu, kenaikan ini juga menunjukkan strategi Bank dalam memperkuat sumber pendanaan jangka pendek melalui diversifikasi dana antarbank. Secara keseluruhan, pertumbuhan simpanan dari bank lain memberikan fleksibilitas likuiditas yang lebih tinggi dalam mendukung kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis Bank. Rincian simpanan dari bank lain telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam laporan tahunan ini.

c) Deposits from Other Banks

Deposits from other banks in 2025 amounted to Rp1,028,594 million, increasing by Rp450,416 million or 77.90% compared to Rp578,178 million in 2024. This increase reflects the optimization of interbank cooperation in liquidity management as well as growing confidence from banking institutions in the Bank's performance.

In addition, this growth indicates the Bank's strategy to strengthen short-term funding sources through diversification of interbank funds. Overall, the increase in deposits from other banks provides greater liquidity flexibility to support the Bank's operational needs and business expansion. Details of deposits from other banks are presented in the previous subsection of this Annual Report.

Tabel Simpanan dari Bank Lain 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Remark
						+/-	%	
Simpanan dari bank lain	1.028.594	578.178	743.905	525.638	499.150	450.416	77,90%	Deposits from other banks

Table of Deposits from Other Banks 2021–2025 (Rp Million)

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun dan berfungsi sebagai sumber pendanaan yang mendukung stabilitas struktur keuangan serta ekspansi usaha secara berkelanjutan. Pos-pos yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang antara lain pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan atau institusi pembiayaan, liabilitas sewa yang timbul dari pengakuan hak guna aset sesuai PSAK 73, liabilitas imbalan kerja karyawan yang berkaitan dengan kewajiban pascakerja, serta liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer antara pencatatan akuntansi dan fiskal. Komposisi kewajiban tersebut mencerminkan strategi pendanaan jangka menengah dan panjang Bank dalam menjaga keseimbangan struktur pendanaan sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis.

Long-Term Liabilities

Long-term liabilities represent obligations with maturities exceeding one year and serve as a source of funding to support financial structure stability and sustainable business expansion. These liabilities include borrowings from financial institutions, lease liabilities arising from the recognition of right-of-use assets in accordance with PSAK 73, employee benefit liabilities related to post-employment obligations, and deferred tax liabilities resulting from temporary differences between accounting and fiscal records. The composition of these obligations reflects the Bank's medium- to long-term funding strategy in maintaining a balanced funding structure while supporting sustainable business growth.



a) Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.569.504 juta, meningkat signifikan sebesar Rp1.493.519 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 1.965,54% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp75.985 juta. Peningkatan yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya optimalisasi sumber pendanaan dari pinjaman sebagai bagian dari strategi penguatan likuiditas Bank.

Kondisi ini juga mencerminkan fleksibilitas Bank dalam memanfaatkan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung ekspansi bisnis dan menjaga stabilitas operasional. Secara keseluruhan, peningkatan pinjaman yang diterima memperkuat struktur pendanaan jangka pendek Bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kewajiban.

a) Borrowings

Borrowings in 2025 amounted to Rp1,569,504 million, representing a significant increase of Rp1,493,519 million or 1,965.54% compared to Rp75,985 million in 2024. This substantial increase indicates the optimization of funding sources through borrowings as part of the Bank's liquidity strengthening strategy.

This condition also reflects the Bank's flexibility in utilizing alternative funding sources to support business expansion and maintain operational stability. Overall, the increase in borrowings strengthens the Bank's funding structure, while still adhering to prudential principles in managing liabilities.

Tabel Pinjaman yang Diterima 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Remark
						+/-	%	
Pinjaman yang diterima	1.569.504	75.985	83.064	87.705	93.747	1.493.519	1965.54%	Borrowing Borrowing

Table of Borrowings 2021-2025 (Rp Million)

Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan sumber pendanaan baru melalui PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp1.500.000 juta, yang menunjukkan strategi Bank dalam memperkuat pembiayaan sektor perumahan dan meningkatkan kapasitas likuiditas jangka menengah.

The increase was primarily driven by the addition of a new funding source from PT Sarana Multigriya Financial amounting to Rp1,500,000 million, reflecting the Bank's strategy to strengthen housing sector financing and enhance its medium-term liquidity capacity.

Sementara itu, Program Dana FLPP mengalami penurunan sebesar Rp6.481 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 8,53% menjadi Rp69.504 juta, sejalan dengan dinamika realisasi program pemerintah. Secara keseluruhan, komposisi ini mencerminkan diversifikasi sumber pendanaan yang lebih strategis untuk mendukung ekspansi kredit.

Meanwhile, the FLPP Fund Program declined by Rp6,481 million or 8.53% to Rp69,504 million, in line with the dynamics of government program realization. Overall, this composition reflects a more strategic diversification of funding sources to support loan expansion.

Pinjaman yang diterima	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Borrowing
						+/-	%	
PT Sarana Multigriya Financial	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	PT Sarana Multigriya Financial
Program Dana FLPP	69.504	75.985	83.064	87.705	93.746	-6.481	-8,53%	FLPP Fund Program
Jumlah	1.569.504	75.985	83.064	87.705	93.746	1.493.519	1965,54%	Total

b) Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) pada tahun 2025 tercatat nihil, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp875.460 juta. Penurunan ini mencerminkan bahwa Bank tidak lagi menggunakan

b) Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreements

Marketable securities sold under repurchase agreements (repo) in 2025 were recorded at nil, decreasing from Rp875,460 million in 2024. This decline indicates that the



instrumen repo sebagai sumber pendanaan jangka pendek, seiring dengan membaiknya kondisi likuiditas serta meningkatnya penghimpunan dana dari sumber yang lebih stabil, seperti dana pihak ketiga dan pinjaman yang diterima.

Kebijakan ini mencerminkan strategi pengelolaan liabilitas yang lebih *prudent* dengan mengurangi ketergantungan pada pendanaan berbasis pasar uang. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan struktur likuiditas Bank yang semakin kuat dan stabil pada tahun 2025.

c) Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp502.343 juta, meningkat sebesar Rp36.122 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,75% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp466.222 juta. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan kewajiban operasional dan pos lainnya yang mendukung aktivitas bisnis Bank.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan pengelolaan liabilitas yang tetap terkendali, sejalan dengan pertumbuhan aktivitas operasional serta upaya Bank dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan stabilitas keuangan.

Bank no longer utilizes repo instruments as a source of short-term funding, in line with improved liquidity conditions and increased funding from more stable sources, such as customer deposits and borrowings.

This policy reflects a more prudent liability management strategy by reducing reliance on money market-based funding. Overall, this condition indicates a stronger and more stable liquidity structure for the Bank in 2025.

c) Other Liabilities

Other liabilities in 2025 amounted to Rp502,343 million, increasing by Rp36,122 million or 7.75% compared to Rp466,222 million in 2024. This increase reflects higher operational obligations and other liabilities supporting the Bank's business activities.

Overall, this development indicates that liability management remains well-controlled, in line with the growth of operational activities and the Bank's efforts to maintain a balance between business expansion and financial stability.

Tabel Liabilitas Lain-lain Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Liabilitas	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Liabilities
						+/-	%	
Liabilitas lain-lain	502.343	466.222	510.861	575.610	634.406	36.122	7,75%	Other Liabilities

Table of Other Liabilities 2021-2025 (Rp Million)

Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan liabilitas manfaat karyawan yang meningkat sebesar Rp148.993 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 75,63% menjadi Rp345.997 juta, serta kenaikan bunga dana pihak ketiga yang meningkat sebesar Rp12.627 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 196,46%, yang mencerminkan meningkatnya biaya dana seiring pertumbuhan penghimpunan dana. Selain itu, liabilitas sewa juga mengalami peningkatan sebesar Rp6.773 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 50,32%, sejalan dengan pemanfaatan aset berbasis sewa.

The increase was primarily driven by a rise in employee benefit liabilities, which grew by Rp148,993 million or 75.63% to Rp345,997 million, as well as an increase in interest on third-party funds amounting to Rp12,627 million or 196.46%, reflecting higher funding costs in line with the growth in fund mobilization. In addition, lease liabilities also increased by Rp6,773 million or 50.32%, in line with the utilization of leased assets.

Di sisi lain, beberapa pos mengalami penurunan. Jasa produksi dan tantiem menurun sebesar Rp74.675 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 45,02%, setoran jaminan menurun sebesar Rp43.878 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 78,03%, serta rekening titipan menurun sebesar Rp12.080 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 52,14%, yang mencerminkan efisiensi kewajiban operasional. Selain itu, biaya yang masih harus dibayar juga menurun sebesar Rp775 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 65,13%.

On the other hand, several items recorded declines. Production bonuses and tantiem decreased by Rp74,675 million or 45.02%, security deposits declined by Rp43,878 million or 78.03%, and escrow accounts decreased by Rp12,080 million or 52.14%, reflecting improved efficiency in operational liabilities. Furthermore, accrued expenses also declined by Rp775 million or 65.13%.



Secara keseluruhan, komposisi ini menunjukkan bahwa peningkatan liabilitas lain-lain lebih dipengaruhi oleh kewajiban berbasis manfaat dan biaya dana, namun tetap berada dalam pengelolaan yang terkendali dan mendukung stabilitas keuangan Bank.

Overall, this composition indicates that the increase in other liabilities was mainly driven by employee benefit obligations and funding costs, while remaining well-managed and supportive of the Bank's financial stability.

Liabilitas lain-lain	2025	2024	YOY 2024-2025		Other Liabilities
			+/-	%	
Liabilitas manfaat karyawan	345.997	197.004	148.993	75,63%	Post-employment benefit
Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris	91.178	165.853	(74.675)	-45,02%	Bonuses and tantiems for Board of Directors and Commissioners
Liabilitas Sewa	20.234	13.461	6.773	50,32%	Lease liabilities
Bunga dana pihak ketiga	19.054	6.427	12.627	196,46%	Interest of third party funds
Setoran jaminan	12.355	56.233	(43.878)	-78,03%	Security Deposit
Rekening titipan	11.088	23.168	(12.080)	-52,14%	Temporary account
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.106	2.181	(1.075)	-49,29%	Allowance for possible on commitments and contingencies
Biaya yang masih harus dibayar	415	1.190	(775)	-65,13%	Accrued expenses
Lainnya	916	704	212	30,11%	Others
Jumlah	502.343	466.221	36.121	7,75%	Total

EKUITAS

Ekuitas Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4.649.332 juta, meningkat sebesar Rp170.958 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,82% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4.478.374 juta. Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan Bank dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis.

Dalam jangka panjang, ekuitas menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/ CAGR) sebesar 7,89% selama periode 2021–2025, yang mencerminkan konsistensi pertumbuhan dan ketahanan keuangan Bank. Peningkatan ekuitas ini memberikan ruang yang lebih kuat bagi Bank dalam menjaga rasio permodalan, meningkatkan kapasitas penyaluran kredit, serta menyerap potensi risiko.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan fundamental keuangan Bank yang sehat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Tabel Ekuitas Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	CAGR	Remark
						2024-2025 (%)	2021-2025 (%)	
Ekuitas	4.649.332	4.478.374	4.123.811	3.773.346	3.431.412	3,82%	7,89%	Equity

EQUITY

The Bank's equity in 2025 amounted to Rp4,649,332 million, increasing by Rp170,958 million or 3.82% compared to Rp4,478,374 million in 2024. This growth reflects the Bank's ability to generate sustainable earnings and strengthen its capital structure to support business expansion.

Over the long term, equity has shown a positive growth trend with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.89% during the 2021–2025 period, indicating consistent growth and financial resilience. The increase in equity provides the Bank with greater capacity to maintain capital adequacy ratios, expand lending activities, and absorb potential risks.

Overall, this condition reflects the Bank's sound and sustainable financial fundamentals in 2025.

Table of Equity 2021–2025 (Rp Million)



Secara rinci pertumbuhan ekuitas pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

In detail, the growth in equity in 2025 can be explained as follows:

Ekuitas	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Equity
						+/-	%	
Modal Saham	2.848.205	2.770.850	2.705.130	2.659.920	2.552.095	77.355	2,79%	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	32.269	68.751	55.661	36.581	97.566	(36.482)	-53,06%	Additional Paid-in Capital
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui, setelah pajak	34.198	(2.544)	8.669	-2.646	2.904	36.742	-1444,26%	Unrealized Gains on Securities at Fair Value Through, Net of Tax
Saldo Laba						-		Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.528.860	1.347.788	1.155.628	961.210	802.569	181.072	13,43%	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	205.800	293.529	198.723	118.281	-22.912	(87.729)	-29,89%	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	4.649.332	4.478.374	4.123.811	3.773.346	3.431.412	170.958	3,82%	Total Equity

a) Modal Saham

Modal saham pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.848.205 juta, meningkat sebesar Rp77.355 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,79% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan penguatan struktur permodalan melalui dukungan pemegang saham dalam mendukung ekspansi bisnis Bank.

a) Share Capital

Share capital in 2025 amounted to Rp2,848,205 million, increasing by Rp77,355 million or 2.79% compared to 2024. This increase reflects the strengthening of the capital structure through shareholder support to finance the Bank's business expansion.

b) Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp32.269 juta, menurun sebesar Rp36.482 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 53,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan tidak adanya tambahan agio saham baru serta adanya penyesuaian struktur modal.

b) Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital in 2025 amounted to Rp32,269 million, decreasing by Rp36,482 million or 53.06% compared to the previous year. This decline indicates the absence of new share premium additions as well as adjustments in the capital structure.

c) Keuntungan yang Belum Direalisasi

Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar tercatat sebesar Rp34.198 juta, meningkat sebesar Rp36.742 juta dibandingkan tahun 2024 yang berada pada posisi negatif. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan nilai pasar portofolio surat berharga seiring kondisi pasar yang lebih kondusif.

c) Unrealized Gains

Unrealized gains on marketable securities measured at fair value amounted to Rp34,198 million, increasing by Rp36,742 million compared to a negative position in 2024. This improvement reflects a recovery in the market value of the securities portfolio amid more favorable market conditions.

d) Saldo Laba

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp1.528.860 juta, meningkat sebesar Rp181.072 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,43%. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan penetapan cadangan yang lebih kuat untuk mendukung ketahanan modal. Sementara itu, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp205.800 juta, menurun sebesar Rp87.729 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 29,89%, yang dipengaruhi oleh alokasi laba untuk cadangan dan distribusi lainnya.

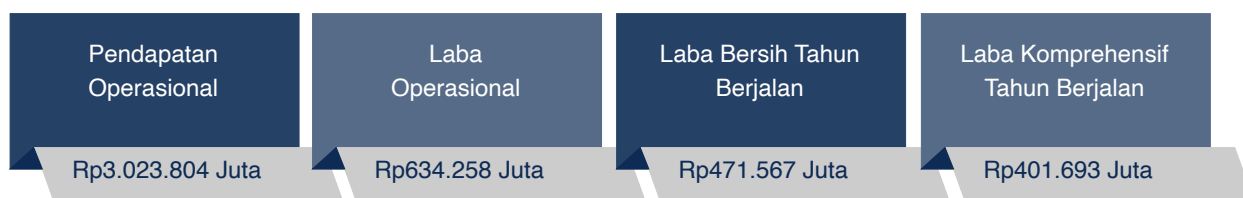
d) Retained Earnings

Appropriated retained earnings amounted to Rp1,528,860 million, increasing by Rp181,072 million or 13.43%, reflecting a stronger reserve policy to support capital resilience. Meanwhile, unappropriated retained earnings amounted to Rp205,800 million, decreasing by Rp87,729 million or 29.89%, primarily due to allocations for reserves and other distributions.



Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya



Kinerja laba dan penghasilan komprehensif Bank pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap solid di tengah dinamika biaya dana dan tekanan non-operasional. Pendapatan operasional Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.023.804 juta, meningkat sebesar Rp352.080 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.671.724 juta. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan bunga seiring ekspansi kredit, serta kenaikan pendapatan operasional lainnya yang mencerminkan keberhasilan strategi penguatan fee-based income dan layanan transaksi. Kinerja ini menunjukkan kemampuan Bank dalam mendiversifikasi sumber pendapatan sehingga mampu menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tekanan kenaikan biaya dana.

Laba operasional pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp634.258 juta, meningkat sebesar Rp54.038 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 9,31% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasional lainnya serta efisiensi beban operasional selain bunga yang menurun sebesar 3,37%. Kinerja ini mencerminkan kemampuan Bank dalam menjaga profitabilitas melalui pengendalian biaya dan optimalisasi sumber pendapatan non-bunga.

Laba bersih tahun berjalan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp605.259 juta, meningkat sebesar Rp22.192 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja operasional yang tetap solid meskipun terdapat tekanan dari kenaikan biaya dana dan peningkatan beban non-operasional. Selain itu, penurunan beban pajak sebesar 13,89% turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan laba.

The Bank's profit and comprehensive income performance in 2025 demonstrated solid growth amid funding cost pressures and non-operational challenges. The Bank's operating income in 2025 reached Rp3,023,804 million, an increase of Rp352,080 million or 13.18% compared to Rp2,671,724 million in 2024. This growth was driven by higher interest income in line with loan expansion, as well as increased other operating income, reflecting the success of strategies to strengthen fee-based income and transaction services. This performance highlights the Bank's ability to diversify its revenue streams and sustain growth despite rising funding costs.

Operating income in 2025 amounted to Rp634,258 million, an increase of Rp54,038 million or 9.31% compared to 2024. This improvement was supported by growth in other operating income and efficiency in operating expenses excluding interest, which declined by 3.37%. This reflects the Bank's ability to maintain profitability through cost control and optimization of non-interest income sources.

Net income for the year in 2025 reached Rp605,259 million, increasing by Rp22,192 million or 3.81% compared to the previous year. This growth indicates that operational performance remained solid despite pressures from rising funding costs and higher non-operational expenses. Additionally, a 13.89% reduction in tax expenses contributed positively to net income growth.



Sementara itu, laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp401.693 juta, menurun sebesar Rp108.923 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 21,33% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh perubahan pada komponen penghasilan komprehensif lain, khususnya terkait penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan. Meskipun demikian, kinerja laba inti tetap menunjukkan pertumbuhan, yang mencerminkan fundamental bisnis Bank yang kuat dan resilien.

Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan ketahanan Bank dalam menjaga pertumbuhan laba melalui diversifikasi pendapatan dan pengendalian biaya, meskipun menghadapi tekanan dari kenaikan biaya dana serta *volatilitas* pada komponen non-operasional.

Meanwhile, total comprehensive income for the year in 2025 stood at Rp401,693 million, decreasing by Rp108,923 million or 21.33% compared to 2024. This decline was mainly influenced by changes in other comprehensive income components, particularly fair value adjustments of financial instruments. Nevertheless, core earnings continued to grow, reflecting the Bank's strong and resilient business fundamentals.

Overall, this performance demonstrates the Bank's resilience in sustaining profit growth through revenue diversification and cost management, despite facing pressures from higher funding costs and volatility in non-operational components.

Tabel Laba Rugi Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Table of Profit and Loss for 2021–2025 (Rp Million)

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2025	2024	2023	2022	2021	GROWTH		PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME
						+/-	%	
I. OPERASIONAL								I. OPERATIONS
Pendapatan Operasional Bunga	2.493.930	2.306.693	2.368.910	1.931.147	1.830.501	187.237	8,12%	Interest Operating Income
Bunga Penempatan pada Bank Indonesia	19.833	20.342	23.605	37.901	38.289	(509)	-2,50%	Interest on Placements with Bank Indonesia
Bunga Penempatan Pada Bank Lain	83.050	92.798	100.218	17.080	19.086	(9.748)	-10,50%	Interest on Placements with Other Banks
Bunga Surat Berharga	371.565	345.223	513.606	290.492	230.168	26.342	7,63%	Interest on Securities
Bunga Kredit Yang Diberikan	2.019.482	1.848.330	1.731.481	1.585.674	1.542.958	171.152	9,26%	Interest on Loans
Bunga Lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%	Other Interest
Beban Operasional Bunga	670.405	312.448	475.225	350.584	375.836	357.957	114,57%	Interest Operating Expenses
Biaya Bunga Liabilitas pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	0,00%	Interest Expense on Liabilities with Bank Indonesia
Biaya Bunga DPK Bank Lain	13.439	12.012	2.515	4.854	4.145	1.427	11,88%	Interest Expense on Deposits from Other Banks
Biaya Bunga Dana Pihak Ketiga (DPK)_Selain Bank	448.320	296.090	394.526	341.686	367.591	152.230	51,41%	Interest Expense on Third Party Funds (TPF) - Other than Banks
Biaya Bunga Surat Berharga yang Diterbitkan	4.910	793	38.846	-	69	4.117	519,17%	Interest Expense on Securities Issued
Biaya Bunga Pinjaman yang diterima	79.374	3.553	3.790	4.044	4.031	75.821	2134,00%	Interest Expense on Loans Received
Biaya Bunga Lainnya	124.362	-	35.548	-	-	124.362	0,00%	Other Interest Expense



LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2025	2024	2023	2022	2021	GROWTH		PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME
						+/-	%	
Pendapatan Operasional Bunga Bersih	1.823.525	1.994.245	1.893.685	1.580.563	1.454.665	(170.720)	-8,56%	<i>Net Interest Operating Income</i>
Pendapatan Operasional Selain Bunga	529.874	365.031	326.292	365.729	382.041	164.843	45,16%	<i>Operating Income Other Than Interest</i>
Peningkatan nilai wajar aset keuangan	19.021	-	-	-	-	19.021	0,00%	<i>Increase in the fair value of financial assets</i>
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Decrease in the fair value of financial liabilities</i>
Keuntungan penjualan aset keuangan	4.751	3.564	4.645	2.981	10.217	1.187	33,31%	<i>Gain on sale of financial assets</i>
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Gain on spot and derivative transactions (realized)</i>
Dividen	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Dividends</i>
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Gain from equity method investments</i>
Komisi/provisi/fee dan administrasi	185.808	181.553	157.736	135.231	136.305	4.255	2,34%	<i>Commissions/provisions/fees and administration</i>
Penerimaan kredit yang dihapus buku	36.775	39.222	48.214	96.060	68.910	(2.447)	-6,24%	<i>Receipts from written-off loans</i>
keuntungan penjabaran transaksi valuta asing	25	-	-	-	-	25	0,00%	<i>Gain on translation of foreign exchange transactions Foreign</i>
Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	224.748	107.048	83.816	110.044	137.130	117.700	109,95%	<i>Correction to Allowance for Impairment Losses</i>
Pendapatan lainnya	58.746	33.644	31.881	21.413	29.479	25.102	74,61%	<i>Other Income</i>
Beban Operasional Selain Bunga	1.719.141	1.779.056	1.675.859	1.422.834	1.409.559	(59.915)	-3,37%	<i>Operating Expenses Other Than Interest</i>
Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Compensation Expense to Bank Indonesia</i>
Bonus Titipan Wadiah	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Wadiah Deposit Bonus</i>
Penurunan nilai wajar aset keuangan	18.103	983	-	-	234	17.120	1741,61%	<i>Decrease in the fair value of financial assets</i>
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-	-	-	0,00%	<i>Increase in the fair value of financial liabilities</i>
Kerugian penjualan aset keuangan	389	740	3.042	4.738	2.937	(351)	-47,43%	<i>Loss on sale of financial assets</i>



LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2025	2024	2023	2022	2021	GROWTH		PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME
						+/-	%	
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	-	-	-	-	0,00%	Loss on spot and derivative transactions (realized)
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	120.768	174.727	222.826	108.503	126.445	(53.959)	-30,88%	Impairment losses on financial assets (impairment)
Kerugian terkait risiko operasional	3.671	3.792	8.297	-	-	(121)	-3,19%	Losses related to operational risk
Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-	-	-	0,00%	Losses from equity method investments
Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.155	1.955	1.019	977	1.456	(800)	-40,92%	Commissions/provisions/fees and administration
Penyusutan/Amortisasi	56.436	56.671	47.426	47.841	46.126	(235)	-0,41%	Depreciation/Amortization
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	2.719	-	38.038	-	-	2.719	0,00%	Impairment losses on other assets (non-financial)
Beban tenaga kerja	852.289	930.390	788.723	759.144	749.445	(78.101)	-8,39%	Labor costs
Beban promosi	32.188	22.188	16.679	18.004	23.602	10.000	45,07%	Promotion costs
Beban lainnya	631.423	587.610	549.809	483.627	459.314	43.813	7,46%	Other expenses
Beban Operasional Selain Bunga Bersih	(1.189.267)	(1.414.025)	(1.349.567)	(1.057.105)	(1.027.518)	224.758	-15,89%	Net Operating Expenses Other Than Interest
LABA OPERASIONAL	634.258	580.220	544.118	523.458	427.147	54.038	9,31%	OPERATING PROFIT
II. NON OPERASIONAL						-	0,00%	II. NON-OPERATING
Pendapatan Non Operasional	4.867	3.518	2.241	6.116	20.860	1.349	38,35%	Non-OPERATIONAL INCOME
Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	95	15	196	1.013	4	80	533,33%	Gain on sale of fixed assets and inventory
Pendapatan non operasional lainnya	4.772	3.503	2.045	5.103	20.856	1.269	36,23%	Other non-operating income
Beban Non Operasional	33.866	672	752	23.755	714	33.194	4939,58%	Non-OPERATIONAL EXPENSES
Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	-	-	-	12	45	-	0,00%	Loss on sale of fixed assets and inventory
Beban Non Operasional Lainnya	33.866	672	752	23.743	669	33.194	4939,58%	Other non-operating expenses
LABA NON OPERASIONAL	(28.999)	2.846	1.489	(17.639)	20.146	(31.845)	-1118,94%	NON-OPERATING INCOME
LABA TAHUN BERJALAN	605.259	583.066	545.607	505.819	447.293	22.193	3,81%	CURRENT YEAR INCOME



LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2025	2024	2023	2022	2021	GROWTH		PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME
						+/-	%	
Pajak Kini	123.085	142.932	121.723	121.968	102.183	(19.847)	-13,89%	Current Tax
Manfaat Pajak Tangguhan	(10.607)	12.546	3.139	4.985	7.424	(23.153)	-184,54%	Deferred Tax Benefit
Beban Pajak	(133.692)	(130.386)	(118.584)	(116.983)	(94.759)	(3.306)	2,54%	Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	471.567	452.680	427.023	388.836	352.534	18.887	4,17%	NET INCOME FOR THE YEAR
Pendapatan (Beban) Penghasilan Komprehensif	(69.874)	57.936	53.571	100.150	53.510	(127.810)	-220,61%	Comprehensive Income (Expense)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	401.693	510.616	480.594	488.986	406.044	(108.923)	-21,33%	Comprehensive Income (Loss) for the Year
Laba (Rugi) Per Saham** (Rupiah penuh)						-	0,00%	Earnings (Loss) Per Share** (full Rupiah)
Laba (Rugi) Operasional per saham	1.113.434	1.047.008	1.005.716	983.973	836.855	66.426	6,34%	Operational Income (Loss) per share
Laba (Rugi) Bersih per saham	827.831	816.861	789.284	730.918	690.675	10.970	1,34%	Net Income (Loss) per share

PENDAPATAN OPERASIONAL BUNGA DAN PENDAPATAN OPERASIONAL SELAIN BUNGA

Pendapatan bunga Bank Papua pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.493.930 juta, meningkat Rp187.237 juta atau 8,12% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.306.693 juta. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp171.152 juta (9,26%), khususnya pada segmen kredit konsumsi yang meningkat signifikan Rp230.866 juta (21,44%) serta kredit program pemerintah yang tumbuh Rp10.442 juta (15,12%). Selain itu, kontribusi bunga surat berharga juga meningkat Rp26.343 juta (7,63%). Penurunan terjadi pada bunga kredit sindikasi sebesar Rp60.070 juta (13,10%) dan penempatan pada bank lain sebesar Rp9.748 juta (10,50%). Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan strategi Bank dalam mengoptimalkan portofolio kredit ritel dan program pemerintah yang memberikan yield lebih tinggi, sehingga mampu menjaga pertumbuhan pendapatan bunga secara berkelanjutan serta memperkuat kinerja intermediasi pada tahun 2025.

Di sisi lain, pendapatan operasional lainnya meningkat signifikan sebesar Rp164.843 juta atau 45,16% menjadi Rp529.874 juta, didorong oleh peningkatan *fee-based income* dan aktivitas transaksi. Secara keseluruhan, kinerja ini menunjukkan kondisi keuangan Bank yang semakin kuat dengan struktur pendapatan yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan.

INTEREST OPERATING INCOME AND NON-INTEREST OPERATING INCOME

Bank Papua's interest income in 2025 amounted to Rp2,493,930 million, an increase of Rp187,237 million or 8.12% compared to Rp2,306,693 million in 2024. This growth was primarily driven by an increase in interest from loans amounting to Rp171,152 million (9.26%), particularly from the consumer lending segment which rose significantly by Rp230,866 million (21.44%), as well as government program loans which grew by Rp10,442 million (15.12%). In addition, interest income from securities increased by Rp26,343 million (7.63%). Declines were recorded in interest income from syndicated loans, which decreased by Rp60,070 million (13.10%), and placements with other banks, which declined by Rp9,748 million (10.50%). Overall, this performance reflects the Bank's strategy to optimize its retail and government program loan portfolio, which generates higher yields, thereby sustaining interest income growth and strengthening intermediation performance in 2025.

Meanwhile, other operating income increased significantly by Rp164,843 million or 45.16% to Rp529,874 million, driven by growth in fee-based income and transaction activities. Overall, this performance indicates a stronger financial position, supported by a more diversified and sustainable income structure.



Tabel Pendapatan Bunga dan Operasional (Rp Juta)

Pendapatan Operasional Bunga dan Selain Bunga	2025		2024		2023		2022		2021		YOY 2024-2025		Operating Income from Interest and Other Than Interest
	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	+/-	%	
PENDAPATAN OPERASIONAL													OPERATING INCOME
I. Pendapatan Operasional Bunga	2.493.930	100%	2.306.693	100%	2.368.910	100%	1.931.147	100%	1.830.501	100%	187.237	8,12%	I. Operating Income from Interest
Bunga Penempatan pada Bank Indonesia	19.833	0,80%	20.342	0,88%	23.605	1,00%	37.901	1,96%	38.289	2,09%	(509)	-2,50%	Interest on Placements with Bank Indonesia
Bunga Penempatan Pada Bank Lain	83.050	3,33%	92.798	4,02%	100.218	4,23%	17.080	0,88%	19.086	1,04%	(9.748)	-10,50%	Interest on Placements with Other Banks
Bunga Surat Berharga	371.565	14,90%	345.223	14,97%	513.606	21,68%	290.492	15,04%	230.168	12,57%	26.342	7,63%	Interest on Securities
Bunga Kredit Yang Diberikan	2.019.482	80,98%	1.848.330	80,13%	1.731.481	73,09%	1.585.674	82,11%	1.542.958	84,29%	171.152	9,26%	Interest on Loans Given
Bunga Kredit Karyawan	28.719	1,42%	28.437	1,54%	27.646	1,60%	25.721	1,62%	24.442	1,58%	282	0,99%	Interest on Employee Loans
Bunga Kredit Konsumsi	1.328.664	65,79%	1.091.842	59,07%	1.007.605	58,19%	1.008.594	63,61%	1.006.171	65,21%	236.822	21,69%	Interest on Consumption Loans
Bunga Kredit Kredit Investasi	50.284	2,49%	57.741	3,12%	54.101	3,12%	22.695	1,43%	38.823	2,52%	(7.457)	-12,91%	Interest on Investment Loans
Bunga Kredit Modal Kerja	188.476	9,33%	182.028	9,85%	209.476	12,10%	173.182	10,92%	217.850	14,12%	6.448	3,54%	Interest on Working Capital Loans
Bunga Kredit Program Pemerintah	24.797	1,23%	29.678	1,61%	27.412	1,58%	19.939	1,26%	13.351	0,87%	(4.881)	-16,45%	Interest on Government Program Loans
Bunga Kredit Sindikasi	398.542	19,73%	458.604	24,81%	405.241	23,40%	335.543	21,16%	242.321	15,70%	(60.062)	-13,10%	Interest on Syndicated Loans
Bunga Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Other Interest
II. Pendapatan Operasional Selain Bunga	529.874	100%	365.031	100%	326.292	100%	365.729	100%	382.041	100%	164.843	0,00%	II. Operating Income Other Than Interest
Peningkatan nilai wajar aset keuangan	19.021	3,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.021	0,00%	Increase in fair value of financial assets



Pendapatan Operasional Bunga dan Selain Bunga	2025		2024		2023		2022		2021		YOY 2024-2025		Operating Income from Interest and Other Than Interest
	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	+/-	%	
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Decrease in fair value of financial liabilities
Keuntungan penjualan aset keuangan	4.751	0,90%	3.564	0,98%	4.645	1,42%	2.981	0,82%	10.217	2,67%	1.187	123,13%	Gain on sale of financial assets
Keuntungan Penjualan Surat Berharga Diperdagangkan	2.357	49,61%	964	27,05%	3.995	86,01%	1.061	35,59%	2.392	23,41%	1.393	53,58%	Trading Securities
Keuntungan Penjualan Surat Berharga Tersedia untuk Dijual	2.394	50,39%	2.600	72,95%	650	13,99%	1.920	64,41%	7.825	76,59%	(206)	0,00%	Available for Sale Securities
Keuntungan Penjualan Surat Berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Held Up to JT
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Gain on spot and derivative transactions (realized)
Dividen	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Dividends
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Gain from equity method participation
Komisi/provisi/fee dan administrasi	185.808	35,07%	181.552	49,74%	157.736	48,34%	135.231	36,98%	136.306	35,68%	4.256	4,10%	Commission/provision/fee and administration
Dana kelolaan	107.139	57,66%	103.682	57,11%	92.681	58,76%	79.145	58,53%	75.137	55,12%	3.457	0,00%	Managed funds
Pembiayaan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3	0,00%	-	0,00%	Financing
Penerbitan L/C	1.166	0,63%	2.144	1,18%	2.072	1,31%	2.031	1,50%	1.917	1,41%	(978)	-55,63%	Issuance of L/C
APMK	1.954	1,05%	1.758	0,97%	1.092	0,69%	906	0,67%	728	0,53%	196	0,92%	APMK
Agen penjual	19.709	10,61%	21.311	11,74%	15.559	9,86%	11.867	8,78%	13.216	9,70%	(1.602)	-127,34%	Selling agents
Transfer dan inkaso	1.110	0,60%	1.258	0,69%	1.234	0,78%	1.225	0,91%	1.151	0,84%	(148)	-4,31%	Transfer and collection
Payment point	2.480	1,33%	3.437	1,89%	2.932	1,86%	2.777	2,05%	2.682	1,97%	(957)	0,00%	Payment point
Premi point	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Premier point



Pendapatan Operasional Bunga dan Selain Bunga	2025		2024		2023		2022		2021		YOY 2024-2025		Operating Income from Interest and Other Than Interest
	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	+/-	%	
Lainnya	52.250	28,12%	47.962	26,42%	42.166	26,73%	37.280	27,57%	41.472	30,43%	4.288	10,93%	Others
Penerimaan kredit yang dihapus buku	36.775	6,94%	39.222	10,74%	48.214	14,78%	96.060	26,27%	68.910	18,04%	(2.447)	0,00%	Receipt of written-off Loans
keuntungan penjabaran transaksi valuta asing	25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25	0,02%	Gain on trans-lation of foreign exchange trans-actions
Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	224.748	42,42%	107.048	29,33%	83.816	25,69%	110.044	30,09%	137.130	35,89%	117.700	118,05%	Correction of Allowance for Im-pairment Losses
Pengembalian Cadangan Kredit	219.072	97,47%	99.707	93,14%	78.606	93,78%	100.074	90,94%	130.804	95,39%	119.365	0,00%	Return on Loan Reserves
Pengembalian Cadangan Giro Bank Lain	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Return on Re-serves for Other Banks' Demand Deposit
Pengembalian Cadangan Surat Berharga	122	0,05%	64	0,06%	101	0,12%	29	0,03%	245	0,18%	58	1,55%	Return on Reserves for Securities
Pengembalian Cadangan Penempatan Antar Bank	3.943	1,75%	3.745	3,50%	2.252	2,69%	2.143	1,95%	2.332	1,70%	198	6,89%	Return on Reserves for Interbank Place-ments
Pengembalian Cadangan Kelonggaran Tarik	1.161	0,52%	2.872	2,68%	2.355	2,81%	6.482	5,89%	3.153	2,30%	(1.711)	-259,24%	Return on Reserves for Allowance for Withdrawals
Pengembalian Cadangan Bank Garansi	450	0,20%	660	0,62%	502	0,60%	1.316	1,20%	596	0,43%	(210)	-0,62%	Return on Re-serves for Bank Guarantees
Pendapatan lainnya	58.746	11,09%	33.645	9,22%	31.881	9,77%	21.413	5,85%	29.478	7,72%	25.101	0,00%	Income others
Penggantian Biaya Telekomunikasi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Telecommunica-tion Cost Reim-bursement
Penggantian Biaya Meterai	3.970	6,76%	3.379	10,04%	2.993	9,39%	2.761	12,89%	2.667	9,05%	591	25,82%	Stamp Fee Re-imbursement
Penggantian Buku Cek & Bilyet Giro	2.338	3,98%	2.289	6,80%	2.368	7,43%	2.427	11,33%	1.818	6,17%	49	2,21%	Checkbook & Demand Depos-it Bill Reim-bursement



Pendapatan Operasional Bunga dan Selain Bunga	2025		2024		2023		2022		2021		YOY 2024-2025		Operating Income from Interest and Other Than Interest
	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	+/-	%	
Penggantian Administrasi Kredit	2.199	3,74%	2.217	6,59%	1.901	5,96%	2.084	9,73%	1.738	5,90%	(18)	0,00%	Loan Administration Reimbursement
Pendapatan Jual Beli Valas	-	0,00%	-	0,00%	9	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Foreign Exchange Sale and Purchase Income
Pendapatan Ganti Rugi Asuransi Kredit	-	0,00%	-	0,00%	2	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Loan Insurance Compensation Income
Potongan Pendidikan	-	0,00%	1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	(1)	-0,14%	Education Deductions
Penggantian Cetak Rek. Koran R/C	722	1,23%	739	2,20%	802	2,52%	655	3,06%	545	1,85%	(17)	-10,06%	Reimbursement for Printing R/C Statement Accounts
Pendapatan Sewa S.D.B	161	0,27%	169	0,50%	193	0,61%	168	0,78%	167	0,57%	(8)	0,00%	S.D.B Rental Income
Pendapatan Ganti Rugi Asuransi Aktiva Tetap	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	136	0,63%	-	0,00%	-	0,00%	Fixed Asset Insurance Compensation Reimbursement
Penggantian Biaya Supervisi Kredit	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Loan Supervision Cost Reimbursement
Penggantian Pembuatan Kode Billing Pajak	1	0,00%	71	0,21%	88	0,28%	150	0,70%	184	0,62%	(70)	-0,28%	Tax Billing Code Creation Reimbursement
Pendapatan Lainnya	49.355	84,01%	24.780	73,65%	23.525	73,79%	13.031	60,86%	22.359	75,85%	24.575	0,00%	Other Income



BEBAN OPERASIONAL BUNGA

Beban operasional bunga Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp670.405 juta, meningkat sebesar Rp357.957 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 114,57% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp312.448 juta. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan kenaikan biaya dana seiring dengan strategi penghimpunan dana dan penguatan struktur pendanaan Bank.

Kenaikan beban bunga terutama didorong oleh peningkatan biaya bunga dana pihak ketiga (DPK) selain bank yang meningkat sebesar Rp152.230 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 51,41% menjadi Rp448.320 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari deposito yang meningkat signifikan sebesar Rp161.352 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 137,46% menjadi Rp278.729 juta, seiring dengan meningkatnya preferensi nasabah terhadap instrumen berjangka dengan imbal hasil kompetitif. Di sisi lain, biaya bunga giro menurun sebesar Rp8.239 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 8,50% menjadi Rp88.693 juta, serta tabungan menurun sebesar Rp883 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 1,08% menjadi Rp80.898 juta.

Selain itu, biaya bunga pinjaman yang diterima mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar Rp75.821 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2.134,00% menjadi Rp79.374 juta, yang menunjukkan adanya penambahan sumber pendanaan eksternal untuk mendukung ekspansi bisnis dan likuiditas Bank.

Biaya bunga surat berharga yang diterbitkan juga meningkat sebesar Rp4.117 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 519,17% menjadi Rp4.910 juta, terutama berasal dari kewajiban kepada pihak bank. Sementara itu, biaya bunga DPK dari bank lain meningkat sebesar Rp1.427 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,88% menjadi Rp13.439 juta, yang didorong oleh kenaikan pada instrumen interbank call money sebesar Rp3.482 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 36,26% menjadi Rp13.084 juta. Di sisi lain, beberapa komponen mengalami penurunan, antara lain deposito yang menurun sebesar Rp1.983 juta serta giro dan tabungan yang masing-masing mengalami penurunan.

Selain komponen utama tersebut, terdapat pula biaya bunga lainnya yang tercatat sebesar Rp124.362 juta pada tahun 2025, memberikan kontribusi tambahan terhadap total beban bunga.

INTEREST OPERATING EXPENSES

The Bank's interest operating expenses in 2025 amounted to Rp670,405 million, an increase of Rp357,957 million or 114.57% compared to Rp312,448 million in 2024. This significant increase reflects higher funding costs in line with the Bank's strategy to strengthen its funding structure.

The increase was mainly driven by higher interest expenses on third-party funds (TPF) from non-bank customers, which rose by Rp152,230 million or 51.41% to Rp448,320 million. This growth was primarily attributed to time deposits, which increased significantly by Rp161,352 million or 137.46% to Rp278,729 million, reflecting customers' preference for higher-yield term instruments. Meanwhile, interest expenses on demand deposits decreased by Rp8,239 million or 8.50% to Rp88,693 million, and savings declined by Rp883 million or 1.08% to Rp80,898 million.

In addition, interest expenses on borrowings increased significantly by Rp75,821 million or 2,134.00% to Rp79,374 million, indicating additional external funding sources to support business expansion and liquidity.

Interest expenses on issued securities also increased by Rp4,117 million or 519.17% to Rp4,910 million, mainly related to obligations to banks. Furthermore, interest expenses on interbank funds increased by Rp1,427 million or 11.88% to Rp13,439 million, driven by growth in interbank call money of Rp3,482 million or 36.26% to Rp13,084 million. On the other hand, several components declined, including time deposits (down Rp1,983 million) as well as demand deposits and savings.

In addition, other interest expenses amounted to Rp124,362 million in 2025, contributing further to total interest expenses.



Secara keseluruhan, peningkatan beban operasional bunga pada tahun 2025 mencerminkan konsekuensi dari strategi Bank dalam memperkuat likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit, meskipun berdampak pada kenaikan biaya dana. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara ekspansi bisnis dan efisiensi biaya, yang tetap dikelola secara terukur dalam menjaga kinerja keuangan Bank.

Overall, the increase in interest operating expenses in 2025 reflects the Bank's strategy to strengthen liquidity and support loan growth, although it resulted in higher funding costs. This indicates a trade-off between business expansion and cost efficiency, which continues to be managed prudently to maintain financial performance.

Tabel Beban Operasional Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Table of Operating Expenses for 2021–2025 (Rp Million)

Beban Operasional Bunga	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Operating Expenses of Interest
						+/-	%	
Beban Operasional Bunga	670.405	312.448	475.225	350.584	375.836	357.957	114,57%	Operating Expenses Interest
Biaya Bunga Liabilitas pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	Interest Cost Liabilities to Bank Indonesia
Biaya Bunga DPK Bank Lain	13.439	12.012	2.514	4.853	4.145	1.427	11,88%	Interest Cost of Other Banks' DPK
Giro	99	121	140	193	345	(22)	-18,18%	Demand Deposit
Tabungan	28	78	111	148	164	(50)	-64,10%	Savings
Deposito	228	2.211	428	3.799	434	(1.983)	-89,69%	Deposits
Interbank Call Money	13.084	9.602	1.835	713	3.202	3.483	36,27%	Interbank Call Money
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	Others
Biaya Bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) _ Selain Bank	448.320	296.090	394.526	341.686	367.591	152.231	51,41%	Interest Cost of Customer Deposits _ Other than Banks
Giro	88.693	96.932	113.781	77.094	105.560	(8.239)	-8,50%	Demand Deposit
Tabungan	80.898	81.781	73.328	72.584	91.808	(883)	-1,08%	Savings
Deposito	278.729	117.377	207.417	192.008	170.224	161.353	137,47%	Deposits
Lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%	Others
Biaya Bunga Surat Berharga yang Diterbitkan	4.910	793	38.846	-	69	4.117	519,17%	Interest Cost of Securities Issued
Kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	0,00%	To Bank Indonesia
Kepada Bank	4.910	793	38.847	-	69	4.117	519,17%	To Banks
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	-	-	6.852	4.814	5.881	-	0,00%	To Third Parties Not Banks
Biaya Bunga Pinjaman yang diterima	79.374	3.553	3.790	4.044	4.031	75.821	2134,00%	Interest Cost of Loans Received
Kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	0,00%	To Bank Indonesia
Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	0,00%	To Banks
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	79.374	3.553	3.790	4.044	4.031	75.821	2134,00%	To Third Parties Not Banks
Biaya Bunga Lainnya	124.360	-	-	-	-	124.360	0,00%	Other Interest Costs

PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp120.781 juta, menurun sebesar Rp53.946 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 30,87% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp174.727 juta. Penurunan ini menunjukkan

ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES

The allowance for impairment losses (CKPN) in 2025 amounted to Rp120,781 million, a decrease of Rp53,946 million or 30.87% compared to Rp174,727 million in 2024.



perbaikan kualitas aset serta efektivitas pengelolaan risiko kredit Bank.

Penurunan pembentukan CKPN terutama berasal dari aset produktif yang menurun sebesar Rp53.959 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 30,88% menjadi Rp120.768 juta. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan profil risiko portofolio kredit, seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan proses manajemen risiko.

Sementara itu, pembentukan CKPN pada aset non-produktif relatif kecil, yaitu sebesar Rp13 juta pada tahun 2025, menunjukkan bahwa eksposur risiko pada aset non-produktif tetap terjaga pada level yang minimal.

Secara keseluruhan, penurunan pembentukan CKPN ini mencerminkan kualitas aset Bank yang semakin baik serta keberhasilan strategi dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan pengelolaan risiko yang *prudent*.

This decline indicates an improvement in asset quality and the effectiveness of the Bank's credit risk management.

The decrease in CKPN was primarily driven by lower provisions for earning assets, which declined by Rp53,959 million or 30.88% to Rp120,768 million. This condition reflects an improved risk profile of the loan portfolio, supported by the implementation of prudential principles and strengthened risk management processes.

Meanwhile, CKPN for non-earning assets remained minimal at Rp13 million in 2025, indicating that risk exposure from non-earning assets was maintained at a low level.

Overall, the reduction in CKPN reflects improving asset quality and the success of the Bank's strategy in balancing loan expansion with prudent risk management.

Tabel Pembentukan Cadangan Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Pembentukan Cadangan	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Reserve Formation
						+/-	%	
Aset produktif	120.768	174.727	222.826	108.503	126.445	(53.959)	-30,88%	Productive assets
Aset non produktif	13	-	38.038	-	-	13	-	Non-productive assets
Jumlah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	120.781	174.727	260.864	108.503	126.445	(53.956)	-30,87	Amount of reserve formation for impairment losses

Table of Allowance Formation for 2021–2025 (Rp Million)

BEBAN OPERASIONAL SELAIN BUNGA

Beban operasional selain bunga pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.719.141 juta, menurun sebesar Rp59.915 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 3,37% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.779.056 juta. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan Bank dalam melakukan efisiensi biaya operasional di tengah peningkatan aktivitas bisnis.

Penurunan beban terutama didorong oleh berkurangnya kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) sebesar Rp53.959 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 30,88% menjadi Rp120.768 juta, sejalan dengan perbaikan kualitas aset. Selain itu, beban tenaga kerja

NON-INTEREST OPERATING EXPENSES

Non-interest operating expenses in 2025 amounted to Rp1,719,141 million, a decrease of Rp59,915 million or 3.37% compared to Rp1,779,056 million in 2024. This decline reflects the Bank's success in improving cost efficiency amid increasing business activities.

The decrease was primarily driven by lower impairment losses on financial assets, which declined by Rp53,959 million or 30.88% to Rp120,768 million, in line with improving asset quality. In addition, personnel expenses decreased by



juga menurun sebesar Rp78.101 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 8,39% menjadi Rp852.289 juta, menunjukkan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia.

Komponen lain yang mengalami penurunan antara lain komisi, provisi, dan administrasi yang menurun sebesar Rp800 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 40,92% menjadi Rp1.155 juta, serta kerugian terkait risiko operasional yang menurun sebesar Rp121 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 3,19% menjadi Rp3.671 juta. Beban penyusutan dan amortisasi juga relatif stabil dengan penurunan tipis sebesar Rp235 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 0,41% menjadi Rp56.436 juta.

Di sisi lain, beberapa komponen mengalami peningkatan, antara lain kerugian dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan yang meningkat sebesar Rp16.769 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 973,24% menjadi Rp18.492 juta. Beban promosi juga meningkat sebesar Rp10.000 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 45,07% menjadi Rp32.188 juta, seiring dengan upaya Bank dalam meningkatkan aktivitas pemasaran dan akuisisi nasabah. Selain itu, beban lainnya meningkat sebesar Rp43.813 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,46% menjadi Rp631.423 juta.

Terdapat pula pembentukan kerugian penurunan nilai aset lainnya (non-keuangan) sebesar Rp2.719 juta pada tahun 2025, yang mencerminkan pencatatan konservatif terhadap potensi risiko pada aset non-keuangan.

Secara keseluruhan, penurunan beban operasional selain bunga mencerminkan efektivitas strategi efisiensi biaya yang dijalankan Bank, dengan tetap menjaga dukungan terhadap aktivitas bisnis dan pertumbuhan operasional yang berkelanjutan.

Rp78,101 million or 8.39% to Rp852,289 million, indicating optimization in human resource management.

Other components that declined included commissions, provisions, and administrative expenses, which decreased by Rp800 million or 40.92% to Rp1,155 million, as well as operational risk-related losses, which decreased by Rp121 million or 3.19% to Rp3,671 million. Depreciation and amortization expenses remained relatively stable, declining slightly by Rp235 million or 0.41% to Rp56,436 million.

On the other hand, several components increased, including losses from changes in fair value and the sale of financial instruments, which rose by Rp16,769 million or 973.24% to Rp18,492 million. Promotional expenses also increased by Rp10,000 million or 45.07% to Rp32,188 million, reflecting the Bank's efforts to enhance marketing activities and customer acquisition. Additionally, other expenses increased by Rp43,813 million or 7.46% to Rp631,423 million.

There was also an allowance for impairment losses on other (non-financial) assets amounting to Rp2,719 million in 2025, reflecting a prudent approach in recognizing potential risks related to non-financial assets.

Overall, the decrease in non-interest operating expenses demonstrates the effectiveness of the Bank's cost efficiency strategy while continuing to support business activities and sustainable operational growth.

Tabel Beban Operasional selain Bunga Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Beban Operasional Selain Bunga	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Operating Expenses Other Than Interest
						+/-	%	
Kerugian dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan	18.492	1.723	3.042	4.738	3.171	16.769	973,24%	Loss on sale of financial assets
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	120.768	174.727	222.826	108.503	126.445	(53.959)	-30,88%	Impairment loss on financial assets (impairment)

Table of Non-Interest Operating Expenses for 2021–2025 (Rp Million)



Beban Operasional Selain Bunga	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Operating Expenses Other Than Interest
						+/-	%	
Kerugian terkait risiko operasional	3.671	3.792	8.297	-	-	(121)	-3,19%	Losses related to operational risk
Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.155	1.955	1.019	977	1.456	(800)	-40,92%	Commission/provision/fee and administration
Penyusutan/Amortisasi	56.436	56.671	47.426	47.841	46.126	(235)	-0,41%	Depreciation/Amortization
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	2.719	-	38.038	-	-	2.719	-	Impairment loss on other assets (non-financial)
Beban tenaga kerja	852.289	930.390	788.723	759.144	749.445	(78.101)	-8,39%	Labor costs
Beban promosi	32.188	22.188	16.679	18.004	23.602	10.000	45,07%	Promotion costs
Beban lainnya	631.423	587.610	549.809	483.627	459.314	43.813	7,46%	Other expenses
Jumlah Beban Operasional Selain Bunga	1.719.141	1.779.056	1.675.859	1.422.834	1.409.559	(59.915)	-3,37%	Total Operating Expenses Other Than Interest

Berikut adalah rincian Beban Operasional selain bunga, yang mencakup beban lainnya. Rincian ini memberikan gambaran mengenai beban-beban yang dikeluarkan terkait dengan operasional bank, selain dari beban bunga.

The following presents the breakdown of non-interest operating expenses, including other expenses. This breakdown provides an overview of expenses incurred in relation to the Bank's operations, excluding interest expenses.

Tabel Beban Operasional selain Bunga Beban Lainnya Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Table of Other Non-Interest Operating Expenses for 2021–2025 (Rp Million)

Beban Operasional Selain Bunga Beban Lainnya	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Operating Expenses Other Than Interest Other Expenses
						+/-	%	
Premi Asuransi	75.843	74.829	76.522	64.459	62.824	1.014	1,36%	Insurance Premiums
Penyisihan Kerugian Risiko Operasional	-	-	-	-	-	-	0,00%	Provision for Operational Risk Losses
Penelitian dan pengembangan	24.389	21.052	18.864	12.133	7.371	3.337	15,85%	Research and development
Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	11.346	4.904	17.095	3.499	3.501	6.442	131,36%	Taxes (excluding income tax)
Pemeliharaan dan perbaikan	32.885	30.370	52.409	46.311	45.385	2.515	8,28%	Maintenance and repairs
Barang dan Jasa	233.971	222.388	144.776	152.249	156.760	11.583	5,21%	Goods and Services
Kerugian restrukturisasi kredit/pembiayaan	-	-	-	-	-	-	0,00%	Losses on Loan/financing restructuring
Sewa	36.289	38.946	44.442	41.329	36.142	(2.657)	-6,82%	Rent
Lainnya	216.700	195.121	195.701	163.647	147.331	21.759	11,06%	Others
Jumlah Beban Operasional Selain Bunga Beban Lainnya	631.423	587.610	549.809	483.627	459.314	43.813	7,46%	Total Operating Expenses Other Than Interest Other Expenses

Beban operasional selain bunga – beban lainnya pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp631.423 juta, meningkat sebesar Rp43.813 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,46% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp587.610 juta. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan aktivitas operasional Bank yang sejalan dengan ekspansi bisnis.

Other non-interest operating expenses in 2025 amounted to Rp631,423 million, an increase of Rp43,813 million or 7.46% compared to Rp587,610 million in 2024. This increase reflects higher operational activities in line with the Bank's business expansion.

Kenaikan beban terutama didorong oleh peningkatan pada

The increase was primarily driven by higher "other



pos lainnya sebesar Rp21.579 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,06% menjadi Rp216.700 juta, serta beban barang dan jasa yang meningkat sebesar Rp11.583 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 5,21% menjadi Rp233.971 juta, seiring dengan meningkatnya kebutuhan operasional dan layanan Bank.

Selain itu, beban pajak-pajak selain pajak penghasilan juga meningkat signifikan sebesar Rp6.442 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 131,36% menjadi Rp11.346 juta. Beban penelitian dan pengembangan turut meningkat sebesar Rp3.337 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,85% menjadi Rp24.389 juta, menunjukkan komitmen Bank dalam inovasi dan pengembangan layanan. Beban pemeliharaan dan perbaikan juga meningkat sebesar Rp2.515 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,28% menjadi Rp32.885 juta.

Di sisi lain, terdapat beberapa komponen yang mengalami penurunan, antara lain beban sewa yang menurun sebesar Rp2.657 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 6,82% menjadi Rp36.289 juta. Sementara itu, beban premi asuransi relatif stabil dengan peningkatan sebesar Rp1.014 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 1,36% menjadi Rp75.843 juta.

Beberapa pos lainnya tidak mengalami perubahan signifikan, seperti penyisihan kerugian risiko operasional dan kerugian restrukturisasi kredit/pembiayaan yang tidak tercatat pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, peningkatan beban operasional selain bunga pada komponen beban lainnya mencerminkan peningkatan aktivitas operasional dan investasi Bank dalam mendukung pertumbuhan bisnis, yang tetap diimbangi dengan pengelolaan biaya yang terukur dan terkendali.

expenses," which rose by Rp21,579 million or 11.06% to Rp216,700 million, as well as goods and services expenses, which increased by Rp11,583 million or 5.21% to Rp233,971 million, in line with growing operational and service requirements.

In addition, taxes other than income tax increased significantly by Rp6,442 million or 131.36% to Rp11,346 million. Research and development expenses also rose by Rp3,337 million or 15.85% to Rp24,389 million, reflecting the Bank's commitment to innovation and service development. Maintenance and repair expenses increased by Rp2,515 million or 8.28% to Rp32,885 million.

On the other hand, several components declined, including rental expenses, which decreased by Rp2,657 million or 6.82% to Rp36,289 million. Meanwhile, insurance premium expenses remained relatively stable, increasing slightly by Rp1,014 million or 1.36% to Rp75,843 million.

Other components showed no significant changes, such as provisions for operational risk losses and losses from loan/financing restructuring, which were not recorded in 2025.

Overall, the increase in other non-interest operating expenses reflects higher operational activities and the Bank's investments to support business growth, while maintaining prudent and controlled cost management.

Tabel Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Beban Tenaga kerja dan Tunjangan	2025	2024	2023	2022	2021	Growth 2024-2025		Labor Expenses and Benefits
						+/-	%	
Gaji Direksi	8.280	5.918	6.660	6.900	8.330	2.362	39,91%	Directors Salary
Gaji dan Upah Non-Direksi	499.095	579.744	521.751	502.101	444.894	(80.649)	-13,91%	Non-Director Salary and Wages
Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas	5.727	6.173	3.575	4.706	4.329	(446)	-7,23%	Board of Commissioners/ Supervisory Board Honorarium
Pendidikan dan pelatihan SDM	51.469	45.328	42.484	30.083	40.460	6.141	13,55%	HR Education and Training
Gaji Lainnya	287.719	293.227	214.252	215.353	251.432	(5.508)	-1,88%	Other Salaries
Jumlah	852.290	930.390	788.723	759.144	749.445	(78.100)	-8,39%	Total

Table of Personnel Expenses and Benefits for 2021–2025 (Rp Million)



Beban tenaga kerja dan tunjangan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp852.290 juta, menurun sebesar Rp78.100 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 8,39% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp930.390 juta. Penurunan ini menunjukkan upaya Bank dalam mengoptimalkan struktur biaya sumber daya manusia secara lebih efisien.

Penurunan terutama dipengaruhi oleh berkurangnya gaji dan upah non-direksi sebesar Rp80.649 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 13,91% menjadi Rp499.095 juta. Selain itu, honorarium komisaris/dewan pengawas juga menurun sebesar Rp446 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 7,23% menjadi Rp5.727 juta, serta gaji lainnya menurun sebesar Rp5.508 juta yang mencerminkan penurunan sebesar 1,88% menjadi Rp287.719 juta.

Di sisi lain, terdapat beberapa komponen yang mengalami peningkatan, antara lain gaji direksi yang meningkat sebesar Rp2.362 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 39,91% menjadi Rp8.280 juta. Selain itu, beban pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia juga meningkat sebesar Rp6.141 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,55% menjadi Rp51.469 juta, menunjukkan komitmen Bank dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM.

Secara keseluruhan, penurunan beban tenaga kerja dan tunjangan mencerminkan efektivitas strategi efisiensi biaya yang dilakukan Bank, dengan tetap menjaga investasi pada pengembangan sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan kinerja dan pertumbuhan bisnis.

Personnel expenses and benefits in 2025 amounted to Rp852,290 million, a decrease of Rp78,100 million or 8.39% compared to Rp930,390 million in 2024. This decline reflects the Bank's efforts to optimize its human resource cost structure more efficiently.

The decrease was primarily driven by lower non-Board of Directors salaries and wages, which declined by Rp80,649 million or 13.91% to Rp499,095 million. In addition, honorarium for the Board of Commissioners/Sharia Supervisory Board decreased by Rp446 million or 7.23% to Rp5,727 million, while other salaries declined by Rp5,508 million or 1.88% to Rp287,719 million.

On the other hand, several components increased, including salaries of the Board of Directors, which rose by Rp2,362 million or 39.91% to Rp8,280 million. Furthermore, education and training expenses for human resources increased by Rp6,141 million or 13.55% to Rp51,469 million, reflecting the Bank's commitment to enhancing employee competencies and capabilities.

Overall, the decrease in personnel expenses and benefits demonstrates the effectiveness of the Bank's cost efficiency strategy, while continuing to invest in human capital development to support sustainable performance and business growth.

LABA OPERASIONAL

Laba operasional Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp634.258 juta, meningkat sebesar Rp54.038 juta yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 9,31% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp580.220 juta. Peningkatan ini menunjukkan kinerja operasional Bank yang tetap solid di tengah dinamika biaya dana dan tekanan pada beberapa komponen non-operasional.

Pertumbuhan laba operasional didukung oleh peningkatan pendapatan operasional, khususnya dari pendapatan bunga dan pendapatan berbasis komisi, serta keberhasilan Bank dalam menjaga efisiensi beban operasional selain bunga. Meskipun terdapat tekanan dari kenaikan biaya bunga, Bank mampu mengelola struktur pendapatan

OPERATING INCOME

The Bank's operating income in 2025 amounted to Rp634,258 million, an increase of Rp54,038 million or 9.31% compared to Rp580,220 million in 2024. This growth reflects the Bank's solid operational performance amid rising funding costs and pressures on certain non-operational components.

The increase in operating income was supported by higher operating revenues, particularly from interest income and fee-based income, as well as the Bank's success in maintaining efficiency in non-interest operating expenses. Despite pressure from higher interest expenses, the Bank was able to manage its income and cost structure



dan biaya secara optimal sehingga tetap menghasilkan pertumbuhan laba yang positif.

Secara keseluruhan, kinerja laba operasional tahun 2025 menegaskan kemampuan Bank dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan pengendalian biaya, sehingga mendukung keberlanjutan kinerja keuangan yang sehat dan stabil.

PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL

Kinerja pendapatan (beban) bukan operasional Bank pada tahun 2025 menunjukkan tekanan yang cukup signifikan. Secara neto, pos ini tercatat mengalami rugi sebesar Rp28.999 juta, berbalik dari posisi laba Rp2.846 juta pada tahun 2024, atau turun sebesar Rp31.845 juta.

Pendapatan bukan operasional pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4.867 juta, meningkat Rp1.349 juta atau 38,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.518 juta. Namun demikian, peningkatan ini belum mampu mengimbangi lonjakan beban bukan operasional yang meningkat sangat signifikan menjadi Rp33.866 juta, naik Rp33.194 juta atau 4.939,58% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp672 juta.

Lonjakan beban bukan operasional ini menjadi faktor utama yang menyebabkan perubahan kinerja non-operasional dari posisi surplus menjadi defisit. Hal ini mengindikasikan adanya kejadian atau faktor non-rutin yang berdampak pada peningkatan beban di luar aktivitas utama Bank. Secara keseluruhan, kinerja ini menegaskan bahwa kontribusi aktivitas non-operasional terhadap profitabilitas Bank masih terbatas dan cenderung fluktuatif, sehingga fokus utama tetap pada penguatan kinerja operasional sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Tabel Pendapatan (Beban) Bukan Operasional Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional	2025	2024	2023	2022	2021	Growth 2024-2025		Non-Operating Income (Expenses)
						+/-	%	
Pendapatan bukan operasional	4.867	3.518	2.241	6.116	20.860	1.349	38,35%	Non-operating income
Beban bukan operasional	(33.866)	(672)	752	23.755	(714)	(33.194)	4939,58%	Non-operating expenses
Jumlah pendapatan (beban) bukan operasional	(28.999)	2.846	1.488	5.591	20.146	(31.845)	-1118,94%	Total non-operating income (expenses)

effectively, resulting in positive earnings growth.

Overall, the 2025 operating income performance highlights the Bank's ability to balance revenue growth and cost control, thereby supporting sustainable and stable financial performance.

NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)

The Bank's non-operating income (expenses) performance in 2025 experienced significant pressure. On a net basis, this item recorded a loss of Rp28,999 million, reversing from a profit of Rp2,846 million in 2024, representing a decline of Rp31,845 million.

Non-operating income in 2025 amounted to Rp4,867 million, increasing by Rp1,349 million or 38.35% compared to Rp3,518 million in 2024. However, this increase was insufficient to offset the sharp rise in non-operating expenses, which surged to Rp33,866 million, up by Rp33,194 million or 4,939.58% compared to Rp672 million in the previous year.

The significant increase in non-operating expenses was the main factor driving the shift from a surplus to a deficit in non-operational performance. This indicates the presence of non-recurring events or factors that led to higher expenses outside the Bank's core activities.

Overall, this performance underscores that the contribution of non-operating activities to the Bank's profitability remains limited and volatile. Therefore, the Bank continues to focus on strengthening operational performance as the primary source of sustainable income.

Table of Non-Operating Income (Expenses) for 2021–2025 (Rp Million)



BEBAN PAJAK

Beban pajak Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp133.692 juta, meningkat Rp3.306 juta atau 2,54% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp130.386 juta. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kewajiban perpajakan seiring dengan pertumbuhan kinerja laba Bank, meskipun relatif moderat.

Secara komposisi, pajak kini (current tax) mengalami penurunan sebesar Rp19.847 juta atau -13,89% menjadi Rp123.085 juta dari Rp142.932 juta pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam perencanaan pajak atau perubahan basis pengenaan pajak pada periode berjalan.

Di sisi lain, manfaat pajak tangguhan (deferred tax benefit) mengalami penurunan signifikan sebesar Rp23.153 juta atau -184,54%, dari sebelumnya mencatat manfaat sebesar Rp12.546 juta pada tahun 2024 menjadi beban sebesar Rp10.607 juta pada tahun 2025. Perubahan ini menunjukkan adanya pembalikan (reversal) aset pajak tangguhan atau perbedaan temporer yang berdampak pada peningkatan beban pajak secara keseluruhan.

Dinamika beban pajak pada tahun 2025 mencerminkan kombinasi antara penurunan pajak kini dan berkurangnya manfaat pajak tangguhan, dengan dampak akhir berupa kenaikan tipis beban pajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan pajak yang tetap terkendali namun dipengaruhi oleh faktor akuntansi perpajakan dan dinamika kinerja keuangan Bank.

Tabel Beban Pajak Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Beban Pajak	2025	2024	2023	2022	2021	Growth 2024-2025		Tax Burden
						+/-	%	
Pajak kini	123.085	142.932	121.723	121.968	102.183	(19.847)	-13,89%	Current taxes
Manfaat pajak tangguhan	(10.607)	12.545	3.139	4.986	7.424	(23.153)	-184,54%	Deferred tax benefits
Jumlah beban pajak	133.692	130.386	118.584	116.983	94.759	3.306	2,54%	Total tax burden

LABA TAHUN BERJALAN

Kinerja laba Bank pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif. Laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp605.259 juta, meningkat Rp22.193 juta atau 3,81% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp583.066 juta. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan Bank dalam menjaga kinerja operasional yang stabil di tengah dinamika biaya dana dan tekanan eksternal lainnya.

Sejalan dengan itu, laba bersih tahun berjalan tercatat

TAX EXPENSE

The Bank's tax expense in 2025 amounted to Rp133,692 million, an increase of Rp3,306 million or 2.54% compared to Rp130,386 million in 2024. This increase reflects higher tax obligations in line with the Bank's profit growth, although relatively moderate.

In terms of composition, current tax decreased by Rp19,847 million or 13.89% to Rp123,085 million from Rp142,932 million in the previous year. This decline indicates improved tax efficiency or changes in the taxable base during the period.

On the other hand, deferred tax benefit declined significantly by Rp23,153 million or 184.54%, shifting from a benefit of Rp12,546 million in 2024 to a deferred tax expense of Rp10,607 million in 2025. This change reflects a reversal of deferred tax assets or temporary differences that contributed to the increase in overall tax expense.

The dynamics of tax expense in 2025 reflect a combination of lower current tax and reduced deferred tax benefits, resulting in a slight overall increase in tax expense. This indicates that tax management remains well-controlled, although influenced by tax accounting factors and the Bank's financial performance dynamics.

Table of Tax Expense for 2021–2025 (Rp Million)

Income for the Year

The Bank's earnings performance in 2025 remained positive. Income for the year amounted to Rp605,259 million, an increase of Rp22,193 million or 3.81% compared to Rp583,066 million in 2024. This growth reflects the Bank's ability to maintain stable operational performance amid funding cost dynamics and external pressures.

In line with this, net income for the year was recorded at



sebesar Rp471.567 juta, meningkat Rp18.887 juta atau 4,17% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp452.680 juta.

Secara keseluruhan, kinerja laba tahun 2025 menegaskan kemampuan Bank dalam mempertahankan profitabilitas, meskipun dihadapkan pada dinamika perpajakan dan tekanan biaya, dengan tetap mencatatkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain Bank pada tahun 2025 tercatat mengalami defisit sebesar Rp69.874 juta, berbalik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat surplus Rp57.935 juta. Secara tahunan, terjadi penurunan sebesar Rp127.809 juta atau -220,61%, yang menunjukkan adanya tekanan pada komponen penghasilan komprehensif di luar laba rugi.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, khususnya dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang mencatat kerugian sebesar Rp136.687 juta, berbalik dari keuntungan Rp88.653 juta pada tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan dampak dari asumsi aktuarial, seperti perubahan tingkat diskonto, kenaikan gaji, maupun faktor demografis lainnya. Di sisi lain, terdapat manfaat pajak tangguhan sebesar Rp30.071 juta yang sedikit meredam dampak negatif dari kerugian tersebut.

Selain itu, pada pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, terjadi peningkatan nilai wajar surat berharga sebesar Rp43.226 juta, membaik dari posisi negatif Rp14.108 juta pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar atau kinerja portofolio investasi. Namun demikian, dampak positif ini sebagian terkompensasi oleh beban pajak tangguhan sebesar Rp6.484 juta.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Penghasilan komprehensif Lain	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Other comprehensive income
						+/-	%	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi								Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(136.687)	88.653	54.173	134.475	66.658	(225.340)	-254,18%	Remeasurement of employee benefit liabilities

Rp471,567 million, increasing by Rp18,887 million or 4.17% compared to Rp452,680 million in 2024.

Overall, the Bank's earnings performance in 2025 underscores its ability to sustain profitability despite tax dynamics and cost pressures, while continuing to deliver healthy and sustainable growth.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)

Other comprehensive income in 2025 recorded a deficit of Rp69,874 million, a significant reversal from a surplus of Rp57,935 million in 2024. On a year-on-year basis, this represents a decrease of Rp127,809 million or 220.61%, indicating pressure on components outside profit or loss.

This decline was primarily driven by items that will not be reclassified to profit or loss, particularly remeasurements of employee benefit liabilities, which recorded a loss of Rp136,687 million, reversing from a gain of Rp88,653 million in 2024. This reflects the impact of actuarial assumptions, including changes in discount rates, salary increases, and demographic factors. On the other hand, a deferred tax benefit of Rp30,071 million partially mitigated the negative impact.

In addition, items that will be reclassified to profit or loss showed an improvement, with gains from changes in the fair value of securities amounting to Rp43,226 million, improving from a loss of Rp14,108 million in the previous year. This reflects better market conditions or improved investment portfolio performance. However, this positive impact was partially offset by a deferred tax expense of Rp6,484 million.

Table of Other Comprehensive Income for 2021–2025 (Rp Million)



Penghasilan komprehensif Lain	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Other comprehensive income
						+/-	%	
Beban pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	30.071	(19.504)	(11.918)	(29.585)	(14.665)	49.575	-254,18%	Deferred tax expense on remeasurement of employee benefit liabilities
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi								Items that will be reclassified to profit or loss
Peningkatan/ (penurunan) nilai wajar atas surat berharga	43.226	(14.108)	14.508	(6.077)	2.701	57.334	-406,39	Increase/(decrease) in fair value of securities
Manfaat/ (beban) pajak tangguhan atas peningkatan/ (penurunan) nilai wajar surat berharga	(6.484)	2.894	(3.192)	1.337	(594)	(9.378)	-324,05%	Deferred tax benefit/ (expense) on increase/(decrease) in fair value of securities
Pendapatan (Beban) Penghasilan Komprehensif	(69.874)	57.935	53.571	100.150	54.100	(127.809)	-220,61	Comprehensive Income (Expense)

LABA PER SAHAM : LABA OPERASIONAL

Kinerja laba per saham operasional Bank pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejalan dengan pertumbuhan laba operasional. Laba operasional tercatat sebesar Rp634.258 juta, meningkat Rp54.038 juta atau 9,31% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp580.220 juta.

Di sisi lain, rata-rata tertimbang jumlah lembar saham meningkat menjadi 569.641 lembar dari 554.170 lembar pada tahun sebelumnya, atau naik sebesar 15.471 lembar (2,79%). Peningkatan jumlah saham ini mencerminkan adanya penyesuaian struktur permodalan yang turut mempengaruhi perhitungan laba per saham.

Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, laba operasional per saham pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.113.434 per lembar saham, meningkat Rp66.426 atau 6,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.047.008 per lembar saham. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa peningkatan laba operasional mampu mengimbangi dampak dilusi dari kenaikan jumlah saham beredar. Secara keseluruhan, kinerja laba per saham operasional yang terus meningkat menegaskan kemampuan Bank dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, didukung oleh pertumbuhan laba yang solid dan pengelolaan struktur permodalan yang optimal.

EARNINGS PER SHARE: OPERATING INCOME

The Bank's operating earnings per share (EPS) performance in 2025 showed a consistent upward trend in line with the growth in operating income. Operating income amounted to Rp634,258 million, increasing by Rp54,038 million or 9.31% compared to Rp580,220 million in 2024.

On the other hand, the weighted average number of shares outstanding increased to 569,641 shares from 554,170 shares in the previous year, representing an increase of 15,471 shares or 2.79%. This increase reflects adjustments in the Bank's capital structure, which also affected the EPS calculation.

Taking these factors into account, operating EPS in 2025 was recorded at Rp1,113.434 per share, an increase of Rp66.426 or 6.34% compared to Rp1,047.008 per share in 2024. This growth indicates that the increase in operating income was sufficient to offset the dilution effect from the higher number of shares outstanding.

Overall, the continued improvement in operating EPS underscores the Bank's ability to create added value for shareholders, supported by solid earnings growth and optimal capital structure management.



Tabel Laba per Saham : Laba Operasional Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Laba per Saham: Laba Operasional	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Earnings per Share: Operating Profit
						+/-	%	
Laba Operasional (Dalam Jutaan Rupiah)	634.258	580.220	544.118	523.458	427.147	54.038	9,31%	OPERATING PROFIT (In Million Rupiah)
Rata-rata tertimbang lembar saham (lembar saham)	569.641	554.170	541.026	531.984	510.419	15.471	2,79%	Weighted average shares (shares)
Laba (Rugi) Operasional per saham (Dalam satuan Rupiah Full)	1.113.434	1.047.008	1.005.716	983.973	836.855	66.426	6,34%	Operating Profit (Loss) per share (In Full Rupiah)

Table of Earnings per Share: Operating Income for 2021–2025 (Rp Million)**LABA PER SAHAM: LABA BERSIH**

Kinerja laba per saham berbasis laba bersih Bank pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang tetap positif, sejalan dengan pertumbuhan laba bersih yang dihasilkan. Laba bersih tercatat sebesar Rp471.567 juta, meningkat Rp18.887 juta atau 4,17% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp452.680 juta.

Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham juga mengalami peningkatan menjadi 569.641 lembar dari 554.170 lembar pada tahun sebelumnya, atau naik sebesar 15.471 lembar (2,79%). Kenaikan jumlah saham ini memberikan efek dilusi terhadap laba per saham, meskipun masih dalam batas yang terkendali.

Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, laba bersih per saham pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp827,831 per lembar saham, meningkat Rp10,970 atau 1,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp816,861 per lembar saham. Pertumbuhan yang relatif lebih moderat ini mencerminkan dampak kombinasi antara peningkatan laba bersih dan bertambahnya jumlah saham beredar.

Secara keseluruhan, kinerja laba bersih per saham pada tahun 2025 tetap menunjukkan peningkatan yang sehat, mencerminkan kemampuan Bank dalam menjaga profitabilitas serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham di tengah dinamika struktur permodalan.

EARNINGS PER SHARE: NET INCOME

The Bank's earnings per share (EPS) based on net income in 2025 continued to show positive growth, in line with the increase in net income. Net income amounted to Rp471,567 million, rising by Rp18,887 million or 4.17% compared to Rp452,680 million in 2024.

The weighted average number of shares outstanding also increased to 569,641 shares from 554,170 shares in the previous year, representing an increase of 15,471 shares or 2.79%. This increase resulted in a dilution effect on EPS, although it remained manageable.

Taking these factors into account, net income per share in 2025 was recorded at Rp827.831 per share, an increase of Rp10.970 or 1.34% compared to Rp816.861 per share in 2024. The relatively moderate growth reflects the combined effect of higher net income and the increase in the number of shares outstanding.

Overall, the Bank's net EPS performance in 2025 continued to show healthy growth, reflecting its ability to maintain profitability and deliver sustainable value to shareholders amid changes in capital structure.

Tabel Laba per Saham : Laba Bersih Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)

Laba per Saham: Laba Bersih	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Earnings per Share: Net Income
						+/-	%	
Laba Bersih (Dalam Jutaan Rupiah)	471.567	452.679	4.270.225	3.888.363	3.525.335	18.888	4,17%	Net Income (In Million Rupiah)
Rata-rata tertimbang lembar saham (lembar saham)	569.641	554.170	541.026	531.984	510.419	15.471	2,79%	Weighted average shares (shares)
Laba (Rugi) Bersih per saham (Dalam satuan Rupiah Full)	827.831	816.861	789.284	730.918	690.675	10.970	1,34%	Net Income (Loss) per share (In Full Rupiah)

Table of Earnings per Share: Net Income for 2021–2025 (Rp Million)

Laporan Arus Kas

Cashflow Statements

Kinerja arus kas Bank pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp1.419.100 juta, berbalik dari penurunan Rp368.086 juta pada tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan adanya tekanan likuiditas jangka pendek yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2025 tercatat negatif sebesar Rp1.864.227 juta, menurun tajam dibandingkan tahun 2024 yang masih mencatat arus kas positif sebesar Rp59.176 juta. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan kas untuk mendukung aktivitas operasional Bank, termasuk ekspansi kredit dan dinamika transaksi nasabah.

Di sisi lain, arus kas dari aktivitas investasi juga tercatat negatif sebesar Rp1.793.121 juta, meningkat signifikan dibandingkan arus keluar Rp143.173 juta pada tahun 2024. Kenaikan arus keluar ini menunjukkan adanya peningkatan penempatan dana pada instrumen investasi atau aset produktif sebagai bagian dari strategi optimalisasi portofolio.

Sementara itu, arus kas dari aktivitas pendanaan mencatat arus masuk sebesar Rp2.238.248 juta, berbalik dari arus keluar Rp284.089 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Bank dalam menghimpun sumber pendanaan baru, termasuk dari pinjaman yang diterima dan peningkatan dana pihak ketiga, guna menjaga likuiditas di tengah tingginya kebutuhan pendanaan.

Sebagai dampak dari keseluruhan aktivitas tersebut, posisi kas dan setara kas pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.449.832 juta, menurun Rp1.419.100 juta atau -29,15% dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar Rp4.868.932 juta. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, kas dan setara kas masih menunjukkan pertumbuhan dengan CAGR sebesar 3,30% selama periode 2021–2025.

Secara keseluruhan, kinerja arus kas tahun 2025 mencerminkan strategi Bank yang lebih ekspansif dalam penyaluran dana dan investasi, yang diimbangi dengan penguatan pada sisi pendanaan. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan likuiditas yang tetap terjaga, meskipun terdapat tekanan jangka pendek akibat peningkatan aktivitas bisnis.

The Bank's cash flow performance in 2025 showed significant dynamics, with a decrease in cash and cash equivalents of Rp1,419,100 million, compared to a decrease of Rp368,086 million in 2024. This change reflects short-term liquidity pressure influenced by operating, investing, and financing activities.

Cash flow from operating activities in 2025 recorded a negative Rp1,864,227 million, a sharp decline from a positive Rp59,176 million in 2024. This indicates increased cash requirements to support the Bank's operations, including loan expansion and customer transaction activities.

Cash flow from investing activities was also negative at Rp1,793,121 million, significantly higher than the outflow of Rp143,173 million in 2024. This increase reflects greater fund placements in investment instruments or earning assets as part of the Bank's portfolio optimization strategy.

Meanwhile, cash flow from financing activities recorded an inflow of Rp2,238,248 million, reversing from an outflow of Rp284,089 million in the previous year. This increase indicates the Bank's success in securing new funding sources, including borrowings and growth in third-party funds, to maintain liquidity amid higher funding needs.

As a result of these activities, cash and cash equivalents at the end of 2025 amounted to Rp3,449,832 million, decreasing by Rp1,419,100 million or 29.15% compared to Rp4,868,932 million at the end of 2024. However, over the longer term, cash and cash equivalents still showed growth with a CAGR of 3.30% during the 2021–2025 period.

Overall, the 2025 cash flow performance reflects the Bank's more expansionary strategy in lending and investment activities, supported by stronger funding. This indicates that liquidity management remains well-maintained despite short-term pressures from increased business activities.



Tabel Arus Kas dan Setara Kas Tahun 2021 – 2025 (Rp Juta)**Table of Cash Flow and Cash Equivalents for 2021–2025 (Rp Million)**

Arus Kas dan Setara Kas	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	CAGR	Cash Flow and Cash Equivalents
						2024-2025 (%)	2021-2025 (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.864.227)	59.176	194.777	2.381.397	766.363	(3250,31%)	-	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.793.121)	(143.173)	(41.910)	(39.237)	(50.341)	1152,42%	144,30%	Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2.238.248	(284.089)	(134.769)	(153.094)	(89.724)	(887,87%)	-	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.419.100)	(368.086)	18.098	2.189.065	626.298	285,53%	-	Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.868.932	5.237.018	5.218.920	3.029.855	2.403.558	(7,03%)	19,30%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	3.449.832	4.868.932	5.237.018	5.218.920	3.029.855	(29,15%)	3,30%	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi Bank pada tahun 2025 menunjukkan penurunan signifikan dengan posisi arus kas bersih negatif sebesar Rp1.864.227 juta, berbalik dari arus kas positif sebesar Rp59.176 juta pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tingginya kebutuhan kas untuk mendukung ekspansi bisnis, khususnya pada sisi penyaluran kredit dan pengelolaan aset likuid.

Dari sisi penerimaan operasional, penerimaan bunga, provisi, dan komisi tetap menunjukkan kinerja yang positif dengan nilai sebesar Rp2.606.109 juta, meningkat 4,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas intermediasi dan peningkatan pendapatan berbasis jasa. Selain itu, penerimaan operasional lainnya tercatat sebesar Rp52.968 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar 17,89%.

Namun demikian, peningkatan penerimaan tersebut diimbangi oleh kenaikan signifikan pada berbagai komponen pengeluaran. Pembayaran bunga, provisi, dan komisi meningkat tajam menjadi Rp733.107 juta atau naik 130,33%, sejalan dengan kenaikan biaya dana. Pembayaran kepada karyawan juga meningkat menjadi Rp863.188 juta (naik 1,88%), serta pembayaran beban umum dan administrasi meningkat menjadi Rp697.681 juta

NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash flow from the Bank's operating activities in 2025 declined significantly, recording a net cash outflow of Rp1,864,227 million, reversing from a net inflow of Rp59,176 million in 2024. This decline reflects higher cash requirements to support business expansion, particularly in loan disbursement and liquid asset management.

From the revenue side, receipts from interest, provisions, and commissions remained positive at Rp2,606,109 million, increasing by 4.72% compared to the previous year, reflecting growth in intermediation activities and fee-based income. Other operating receipts amounted to Rp52,968 million, although declining by 17.89%.

However, these increases were offset by significant growth in expenditures. Payments for interest, provisions, and commissions rose sharply to Rp733,107 million (up 130.33%), in line with higher funding costs. Payments to employees increased to Rp863,188 million (up 1.88%), while general and administrative expenses rose to



(naik 8,42%), yang mencerminkan peningkatan aktivitas operasional Bank.

Di sisi lain, penerimaan sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi tercatat sebesar Rp226.373 juta, turun signifikan 63,14% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp614.119 juta. Penurunan ini menunjukkan melemahnya arus kas operasional inti sebelum mempertimbangkan perubahan neraca.

Dari komponen perubahan aset operasi, terjadi peningkatan penempatan pada bank lain sebesar Rp1.955.166 juta (arus kas keluar), serta peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp813.130 juta, yang mencerminkan ekspansi intermediasi Bank. Selain itu, terdapat arus keluar pada aset lain-lain sebesar Rp123.119 juta. Secara keseluruhan, perubahan aset operasi menghasilkan arus kas keluar sebesar Rp2.562.751 juta.

Sementara itu, dari sisi liabilitas operasi, terdapat peningkatan simpanan sebesar Rp1.934.967 juta yang memberikan kontribusi positif terhadap likuiditas. Namun, hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan liabilitas segera sebesar Rp1.407.067 juta dan penurunan liabilitas lain-lain sebesar Rp55.748 juta. Secara neto, perubahan liabilitas operasi menghasilkan arus kas masuk sebesar Rp472.152 juta.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2025 menjadi negatif, yang terutama disebabkan oleh ekspansi agresif pada aset produktif, khususnya penyaluran kredit dan penempatan dana. Kondisi ini mencerminkan strategi pertumbuhan Bank yang tetap ekspansif, meskipun memberikan tekanan terhadap likuiditas jangka pendek.

Secara keseluruhan, kinerja arus kas operasional menunjukkan bahwa Bank berada dalam fase ekspansi, dengan fokus pada peningkatan aset produktif dan intermediasi. Meskipun demikian, pengelolaan likuiditas tetap perlu dijaga secara hati-hati agar keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan dapat terus terpelihara.

Rp697,681 million (up 8.42%), reflecting higher operational activity.

Cash receipts before changes in operating assets and liabilities amounted to Rp226,373 million, a sharp decline of 63.14% from Rp614,119 million in 2024, indicating weaker core operating cash flows before balance sheet movements.

From changes in operating assets, there was an increase in placements with other banks amounting to Rp1,955,166 million (cash outflow), along with loan disbursements of Rp813,130 million, reflecting expansion in intermediation. In addition, other assets generated an outflow of Rp123,119 million. Overall, changes in operating assets resulted in a net cash outflow of Rp2,562,751 million.

Meanwhile, changes in operating liabilities contributed positively, with an increase in deposits of Rp1,934,967 million. However, this was partially offset by a decrease in due immediately liabilities of Rp1,407,067 million and a decline in other liabilities of Rp55,748 million. In total, changes in operating liabilities resulted in a net cash inflow of Rp472,152 million.

Taking all components into account, net cash flow from operating activities in 2025 turned negative, primarily due to aggressive expansion in earning assets, particularly loans and placements. This reflects the Bank's expansionary growth strategy, although it exerted pressure on short-term liquidity.

Overall, operating cash flow performance indicates that the Bank is in an expansion phase, focusing on increasing earning assets and intermediation activities. Nevertheless, liquidity management must continue to be maintained prudently to ensure a balance between growth and financial stability.



**Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021-2025
(Rp Juta)****Table: Cash Flows from Operating Activities, 2021–2025 (Rp Million)**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	Cash Flows from Operating Activities
						2024-2025 (%)	
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi	2.606.109	2.488.678	2.520.598	2.072.582	1.971.808	4,72%	Receipts from interest, fees, and commissions
Pembayaran Bunga, Provisi, dan Komisi	(733.107)	(318.288)	(452.911)	(352.973)	(385.564)	130,33%	Payments from interest, fees, and commissions
Pembayaran Kepada Karyawan	(863.188)	(847.276)	(599.032)	(582.316)	(585.750)	1,88%	Payment of Employees Benefit
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(697.681)	(643.490)	(591)	(504.997)	(522.288)	8,42%	Payment of General and Administrative Expenses
Penerimaan Kredit Hapus Buku	36.775	-	48.214	96.060	68.910	-	Recoveries from Loan Written-off
Penerimaan Operasional Lainnya	52.968	64.508	28.059	10.601	29.809	-17,89%	Receipts from Operating Income
Penerimaan Bukan Operasional	(29.091)	2.831	1.293	(15.707)	19.866	-1127,41%	Receipts from Non Operating Income
Penerimaan (Pembayaran) Perpajakan	(146.413)	(132.844)	(129)	(88.744)	(90.047)	10,21%	Receipts (payments) of Taxation
Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	226.373	614.119	825	634.506	506.744	-63,14%	Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi							Decreasing (increasing) in operating assets
Penempatan pada Bank Lain	(1.955.166)	1.755.293	(1.114.493)	124.889	1.472.971	-211,39%	Placement with Other Banks
Surat Berharga	-	-	-	(186.509)	(334.829)	-	Marketable Securities
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	92.626	1.284.732	2.092.464	(761.006)	(83.930)	-92,79%	Reverse Repo
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	(10.200)	-	-	-	-	-	
Kredit yang Diberikan	(813.130)	(2.259.092)	(1.591.366)	(633.302)	(675.105)	-64,01%	Loans
Aset Lain-lain	123.119	(79.195)	(84.011)	(92.763)	14.841	-255,46%	Other Assets
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi	(2.562.751)	701.738	(697.406)	(1.548.691)	393.949	-465,20%	Total Decreasing (Increasing)
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi							Decreasing (increasing) in operating liabilities
Simpanan	1.934.967	(1.084.286)	1.692.435	3.371.935	(62.057)	-278,46%	Deposits
Liabilitas Segera	(1.407.067)	(174.892)	388.676	3.611	(23.858)	704,53%	Current Liabilities
Liabilitas Lain-lain	(55.748)	2.497	(148.007)	(79.964)	(48.414)	-2332,67%	Other Liabilities
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi	472.152	(1.256.681)	1.933.104	3.295.582	(134.330)	-137,57%	Total Decreasing (Increasing) in operating liabilities
Arus kas bersih yang (digunakan)/ diperoleh dari untuk aktivitas operasi	(1.864.227)	59.176	2.061.008	2.381.397	766.363	-3250,32%	Net Cash (Used in) Provided from Investing Activities



ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi Bank pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada arus kas keluar, dengan posisi bersih sebesar negatif Rp1.793.121 juta, meningkat tajam dibandingkan arus keluar Rp143.173 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan strategi Bank yang lebih agresif dalam pengelolaan portofolio investasi dan penempatan dana pada instrumen keuangan.

Dari sisi transaksi efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), penjualan efek relatif stabil sebesar Rp354.168 juta, sedikit menurun 0,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pembelian efek pada kategori yang sama menurun menjadi Rp222.953 juta atau turun 35,46%, menunjukkan adanya penyesuaian komposisi portofolio investasi.

Pada instrumen efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, terjadi dinamika yang lebih signifikan. Penjualan efek meningkat tajam menjadi Rp2.080.703 juta, berbalik dari posisi arus keluar pada tahun 2024. Namun, di sisi lain, pembelian efek pada kategori ini juga meningkat signifikan menjadi Rp3.266.561 juta, yang menjadi salah satu kontributor utama arus kas keluar investasi.

Selain itu, aktivitas repo (reverse repo) juga mulai terlihat pada tahun 2025, dengan penerimaan sebesar Rp74.257 juta dan pembayaran sebesar Rp737.935 juta, mencerminkan pemanfaatan instrumen pasar uang dalam pengelolaan likuiditas jangka pendek.

Dari sisi investasi pada aset tetap, pembelian aset tetap tercatat sebesar Rp74.892 juta, meningkat 33,04% dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan investasi pada sarana dan prasarana operasional. Sementara itu, penjualan aset tetap relatif kecil sebesar Rp92 juta, meskipun meningkat secara persentase.

Secara keseluruhan, peningkatan arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh tingginya pembelian efek pada biaya perolehan diamortisasi serta aktivitas pengelolaan portofolio yang lebih aktif. Hal ini mencerminkan strategi Bank dalam mengoptimalkan penempatan dana pada instrumen yang memberikan imbal hasil kompetitif, meskipun berdampak pada tekanan likuiditas dalam jangka pendek.

Dalam perspektif jangka panjang, arus kas investasi menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum

NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash flow from the Bank's investing activities in 2025 recorded a significant increase in cash outflows, with a net position of negative Rp1,793,121 million, sharply higher compared to an outflow of Rp143,173 million in 2024. This increase reflects the Bank's more aggressive strategy in managing its investment portfolio and placing funds in financial instruments.

In terms of securities measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI), sales remained relatively stable at Rp354,168 million, slightly decreasing by 0.42% compared to the previous year. Meanwhile, purchases of securities under the same category declined to Rp222,953 million or decreased by 35.46%, indicating adjustments in the investment portfolio composition.

For securities measured at amortized cost, more significant dynamics were observed. Sales increased sharply to Rp2,080,703 million, reversing from a net outflow position in 2024. However, purchases under this category also rose substantially to Rp3,266,561 million, becoming one of the main contributors to the investment cash outflows.

In addition, reverse repo transactions emerged in 2025, with inflows of Rp74,257 million and outflows of Rp737,935 million, reflecting the utilization of money market instruments for short-term liquidity management.

From the perspective of fixed asset investments, acquisitions amounted to Rp74,892 million, increasing by 33.04% compared to 2024, in line with investments in operational infrastructure. Meanwhile, disposals of fixed assets were relatively small at Rp92 million, although showing an increase in percentage terms.

Overall, the increase in cash outflows from investing activities in 2025 was mainly driven by higher purchases of securities measured at amortized cost and more active portfolio management. This reflects the Bank's strategy to optimize fund placement in instruments offering competitive yields, albeit resulting in short-term liquidity pressure.

From a long-term perspective, investing cash flows show a fluctuating trend, generally reflecting a more dynamic



mencerminkan pergeseran strategi investasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kondisi pasar.

Secara keseluruhan, aktivitas investasi Bank pada tahun 2025 menegaskan fokus pada optimalisasi yield dan diversifikasi portofolio, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara risiko, likuiditas, dan profitabilitas.

and adaptive investment strategy in response to market conditions.

Overall, the Bank's investing activities in 2025 highlight a focus on yield optimization and portfolio diversification, while maintaining a balance between risk, liquidity, and profitability.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Table of Cash Flows from Investing Activities for 2021-2025 (Rp Million)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	Cash Flows from Investing Activities
						2024-2025 (%)	
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	354.168	355.655	-	-	-	-0,42%	Disposal of Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	(222.953)	(345.439)	-	-	-	-35,46%	Acquisition of Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	2.080.703	(1.864.871)	-	-	-	-211,57%	Disposal of Financial Assets Measured at Amortised Cost
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	(3.266.561)	1.767.762	-	-	-	-284,79%	Acquisition of Financial Assets Measured at Amortised Cost
Penerimaan Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	74.257	-	-	-	-	-	Receipts from Securities Purchased under Resale Agreements
Pembayaran Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	(737.935)	-	-	-	-	-	Payments for Securities Purchased under Resale Agreements
Pembelian Aset Tetap	(74.892)	(56.295)	(42.106)	(40.250)	(57.310)	33,04%	Purchase of Fixed Assets
Penjualan Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	6.964	-	Sale of Foreclosed Assets
Penjualan Aset Tetap	92	15	196	1.013	4	513,33%	Sale of Fixed Assets
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.793.121)	(143.173)	(41.910)	(39.237)	(50.341)	1152,41%	Net cash flow (used)/ obtained from for investing activities



ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan Bank pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan mencatat arus kas masuk bersih sebesar Rp2.238.248 juta, berbalik signifikan dari arus kas keluar sebesar Rp284.089 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan strategi Bank dalam memperkuat struktur pendanaan untuk mendukung ekspansi bisnis.

Kontributor utama arus kas masuk berasal dari penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp1.572.893 juta, berbalik dari posisi negatif pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan sumber pendanaan baru, yang sejalan dengan kebutuhan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit dan aktivitas operasional.

Selain itu, penerimaan dari transaksi efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) juga meningkat menjadi Rp901.000 juta, naik 15,51% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, pembayaran atas transaksi repo menurun signifikan menjadi Rp4.910 juta dari Rp901.000 juta pada tahun sebelumnya, yang turut memperkuat posisi arus kas masuk dari aktivitas ini.

Di sisi permodalan, tambahan modal disetor tercatat sebesar Rp40.873 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar 48,14% dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan tetap adanya dukungan permodalan, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah.

Sementara itu, pembayaran dividen meningkat menjadi Rp271.608 juta, naik 15,65% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan komitmen Bank dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham di tengah kinerja laba yang tetap positif.

Secara keseluruhan, kinerja arus kas pendanaan pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan Bank dalam mengakses sumber pendanaan eksternal serta mengelola instrumen pasar uang secara efektif. Kondisi ini memberikan bantalan likuiditas yang penting untuk mengimbangi tingginya kebutuhan pendanaan dari aktivitas operasi dan investasi.

Dalam perspektif strategis, penguatan arus kas dari aktivitas pendanaan ini menegaskan fokus Bank pada diversifikasi sumber dana dan pengelolaan struktur liabilitas yang lebih optimal, guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan stabilitas likuiditas.

NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash flow from the Bank's financing activities in 2025 demonstrated very strong performance, recording a net cash inflow of Rp2,238,248 million, a significant reversal from a net outflow of Rp284,089 million in 2024. This increase reflects the Bank's strategy to strengthen its funding structure to support business expansion.

The main contributor to cash inflows was proceeds from borrowings amounting to Rp1,572,893 million, reversing from a negative position in the previous year. This increase indicates additional external funding sources in line with liquidity needs to support loan growth and operational activities.

In addition, proceeds from securities sold under repurchase agreements (repo) increased to Rp901,000 million, up 15.51% compared to 2024. Meanwhile, payments for repo transactions declined significantly to Rp4,910 million from Rp901,000 million in the previous year, further strengthening net cash inflows from this activity.

From a capital perspective, additional paid-in capital amounted to Rp40,873 million, although decreasing by 48.14% compared to 2024, indicating continued capital support albeit at a lower intensity.

Dividend payments increased to Rp271,608 million, up 15.65% compared to the previous year, reflecting the Bank's commitment to delivering value to shareholders amid positive earnings performance.

Overall, financing cash flow performance in 2025 reflects the Bank's success in accessing external funding sources and effectively managing money market instruments. This provides a strong liquidity buffer to offset the high funding requirements arising from operating and investing activities.

From a strategic perspective, the strengthening of financing cash flows underscores the Bank's focus on diversifying funding sources and optimizing its liability structure to maintain a balance between business growth and liquidity stability.



Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2021-2025 (Rp Juta)**Table of Cash Flows from Financing Activities for 2021–2025 (Rp Million)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2025	2024	2023	2022	2021	YoY	Cash Flows from Financing Activities
						2024-2025 (%)	
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	1.572.893	(7.079)	(4.641)	(6.041)	2.774	-22319,15%	Receiving (Settlement) of Borrowing
Penerimaan Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	901.000	780.043	-	-	-	15,51%	Receipt of Securities Sold Under Repurchase Agreements
Pembayaran Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	(4.910)	(901.000)	-	-	-	-99,46%	Payment for Securities Sold Under Repurchase Agreements
Penambahan Modal Disetor	40.873	78.810	64.290	46.840	97.550	-48,14%	Additional Paid up Capital
Pembayaran Dividen	(271.608)	(234.863)	(194.418)	(193.894)	(190.049)	15,65%	Payment of Dividend
Arus kas bersih yang (digunakan)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.238.248	(284.089)	(134.769)	(153.094)	(89.724)	887,87%	Net Cash (Used in) provided



Analisis Kemampuan Membayar Kewajiban

Analysis of Ability to Meet Obligations

Kemampuan Bank Papua untuk memenuhi kewajibannya pada tahun 2025 diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Rasio-rasio ini dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi tingkat risiko yang timbul dari kegiatan operasional bank. Adapun rasio yang digunakan meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas, yang disajikan dalam tabel berikut:

Bank Papua's ability to meet its obligations in 2025 is measured using several financial ratios. These ratios serve as key indicators in evaluating the level of risk arising from the Bank's operational activities. The ratios used include liquidity ratios, profitability ratios, and solvency ratios, as presented in the following table:

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024- 2025 %	Description
Rasio Solvabilitas							Solvency Ratio
KPMM	22,70%	22,73%	23,79%	23,53%	23,23%	-0,13%	CAR
Debt to Asset Ratio (DAR)	86,46%	86,06%	85,88%	87,34%	86,86%	0,46%	Debt to Asset Ratio (DAR)
Debt to Equity Ratio (DER)	689,92%	632,85%	608,22%	690,07%	661,28%	9,02%	Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio Rentabilitas							Profitability Ratio
Laba Terhadap Aset (ROA)	1,81%	1,89%	1,62%	1,77%	1,76%	-4,23%	Return on Assets (ROA)
Laba Terhadap Modal (ROE)	10,71%	10,94%	11,08%	10,66%	10,74%	-2,10%	Return on Capital (ROE)
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aset Produktif (NIM)	5,87%	7,19%	6,43%	6,27%	6,26%	-18,36%	Net Interest Income to Productive Assets (NIM)
BOPO	79,02%	78,28%	79,54%	77,21%	80,69%	0,95%	BOPO
Rasio Likuiditas							Liquidity Ratio
Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,18%	88,28%	76,51%	75,22%	84,67%	-2,38%	Loan to Deposit Ratio (LDR)
PLM	4,00%	5,00%	5,00%	6,00%	23,85%	-20,00%	PLM
RIM	76,62%	88,01%	74,12%	75,06%	3,40%	-12,94%	RIM

RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya serta tingkat kecukupan modal dalam menyerap risiko. Secara umum, rasio solvabilitas Bank pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang tetap kuat dan terjaga, meskipun terdapat beberapa penyesuaian struktural.

KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) pada tahun 2025 tercatat sebesar 22,70%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 22,73% (turun 0,13%).

SOLVENCY RATIOS

Solvency ratios reflect the Bank's ability to meet its long-term obligations and the adequacy of its capital to absorb risks. Overall, the Bank's solvency position in 2025 remained strong and well-maintained, despite some structural adjustments.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2025 stood at 22.70%, slightly decreasing from 22.73% in 2024 (down 0.13%). This level remains very strong and well above



Level ini masih sangat kuat dan jauh di atas ketentuan minimum regulator. Stabilitas CAR menunjukkan bahwa Bank memiliki buffer modal yang memadai untuk menyerap potensi risiko kredit, pasar, dan operasional. Penurunan tipis mencerminkan ekspansi aset tertimbang menurut risiko (ATMR), khususnya dari pertumbuhan kredit.

Rasio Debt to Asset Ratio (DAR) meningkat menjadi 86,46% dari 86,06% (naik 0,46%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset Bank masih didanai oleh liabilitas. Kenaikan ini relatif moderat dan masih dalam batas wajar untuk industri perbankan. Mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal, di mana dana pihak ketiga digunakan secara produktif.

Debt to Equity Ratio (DER) meningkat cukup signifikan menjadi 689,92% dari 632,85% (naik 9,02%). Kenaikan ini menunjukkan leverage Bank meningkat, seiring pertumbuhan liabilitas yang lebih cepat dibandingkan ekuitas. Dalam konteks perbankan, DER yang tinggi adalah hal yang umum, namun tetap perlu dikendalikan. Peningkatan ini mencerminkan strategi ekspansi berbasis dana eksternal, khususnya penghimpunan dana masyarakat dan pinjaman.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan leverage, kondisi solvabilitas Bank tetap berada pada level aman, terkendali, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

RASIO RENTABILITAS

Rasio rentabilitas mencerminkan kemampuan Bank dalam menghasilkan laba dari aset, modal, serta aktivitas operasionalnya. Pada tahun 2025, indikator rentabilitas menunjukkan kinerja yang masih solid, namun mengalami sedikit tekanan seiring meningkatnya biaya dana dan penyesuaian struktur pendapatan.

Return on Assets (ROA) pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,81%, menurun dari 1,89% pada tahun 2024 (turun 4,23%). Penurunan ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba sedikit melemah. Hal ini sejalan dengan peningkatan aset produktif yang belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan laba. Meskipun turun, ROA masih berada pada level yang relatif baik untuk industri perbankan.

Return on Equity (ROE) tercatat sebesar 10,71%, turun dari 10,94% (turun 2,10%). Penurunan ini mencerminkan laba bersih tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan

the regulatory minimum requirement. The stability of CAR indicates that the Bank has sufficient capital buffers to absorb potential credit, market, and operational risks. The slight decline reflects an increase in Risk-Weighted Assets (RWA), particularly driven by loan growth.

The Debt to Asset Ratio (DAR) increased to 86.46% from 86.06% (up 0.46%), indicating that the majority of the Bank's assets continue to be funded by liabilities. This increase is moderate and remains within a reasonable range for the banking industry, reflecting effective intermediation where third-party funds are utilized productively.

The Debt to Equity Ratio (DER) increased significantly to 689.92% from 632.85% (up 9.02%), indicating higher leverage as liabilities grew faster than equity. In the banking context, a high DER is common, but it still requires prudent management. This increase reflects the Bank's expansion strategy supported by external funding, particularly from deposits and borrowings.

Overall, despite the increase in leverage, the Bank's solvency position remains at a safe and controlled level, supporting sustainable business growth.

PROFITABILITY RATIOS

Profitability ratios reflect the Bank's ability to generate earnings from its assets, capital, and operational activities. In 2025, profitability indicators remained solid, although they experienced slight pressure due to rising funding costs and adjustments in the income structure.

Return on Assets (ROA) in 2025 was recorded at 1.81%, declining from 1.89% in 2024 (down 4.23%). This decrease indicates a slight weakening in the efficiency of asset utilization in generating profits, in line with the growth of earning assets that has not been fully matched by profit growth. Despite the decline, ROA remains at a relatively sound level for the banking industry.

Return on Equity (ROE) stood at 10.71%, decreasing from 10.94% (down 2.10%). This reflects net income growth that was slower than equity growth. It also indicates capital



ekuitas. Hal ini juga menunjukkan adanya penguatan permodalan, yang secara jangka panjang positif meskipun menekan rasio profitabilitas. ROE tetap berada pada level yang sehat dan mencerminkan kemampuan menghasilkan return bagi pemegang saham.

Net Interest Margin (NIM) mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 5,87% dari 7,19% (turun 18,36%). Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan pada margin bunga, terutama akibat Kenaikan biaya dana (cost of fund) dan Kompetisi suku bunga. Ini menjadi indikator utama bahwa profitabilitas inti dari intermediasi mengalami tekanan.

BOPO meningkat menjadi 79,02% dari 78,28% (naik 0,95%). Kenaikan BOPO menunjukkan efisiensi operasional sedikit menurun. Artinya, biaya operasional meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan operasional. Namun, level ini masih dalam kategori cukup efisien.

Secara keseluruhan, Rasio rentabilitas Bank pada tahun 2025 mencerminkan kondisi profitabilitas yang tetap sehat namun berada dalam fase normalisasi, terutama akibat tekanan biaya dana dan peningkatan biaya operasional. Meskipun demikian, kinerja ini masih menunjukkan bahwa Bank mampu menghasilkan laba secara berkelanjutan, dengan fundamental yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama penarikan dana nasabah dan kebutuhan likuiditas operasional. Pada tahun 2025, likuiditas Bank menunjukkan kondisi lebih longgar (longgar-terkendali) dibandingkan tahun sebelumnya.

Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2025 tercatat sebesar 86,18%, menurun dari 88,28% pada tahun 2024 (turun 2,38%). Penurunan LDR menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit, dan ekspansi kredit lebih moderat. Level ini mencerminkan likuiditas yang lebih aman, karena ruang penyaluran kredit masih tersedia. Secara umum, LDR di kisaran 80–90% masih dianggap optimal dan sehat.

Posisi Likuiditas Makro (PLM) tercatat sebesar 4,00%, turun dari 5,00% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pemanfaatan buffer likuiditas untuk mendukung aktivitas bisnis, atau penyesuaian struktur aset likuid.

strengthening, which is positive in the long term, although it exerts pressure on profitability ratios. ROE remains at a healthy level and reflects the Bank's ability to generate returns for shareholders.

Net Interest Margin (NIM) declined significantly to 5.87% from 7.19% (down 18.36%). This decrease indicates pressure on interest margins, mainly due to higher cost of funds and interest rate competition. This serves as a key indicator that core profitability from intermediation activities is under pressure.

The BOPO ratio increased to 79.02% from 78.28% (up 0.95%), indicating a slight decline in operational efficiency, where operating expenses grew faster than operating income. However, this level remains within a relatively efficient range.

Overall, the Bank's profitability ratios in 2025 reflect a healthy profitability condition, although in a normalization phase due to funding cost pressures and higher operating expenses. Nevertheless, the performance demonstrates the Bank's ability to generate sustainable earnings, supported by strong fundamentals for long-term growth.

LIQUIDITY RATIOS

Liquidity ratios reflect the Bank's ability to meet its short-term obligations, particularly customer withdrawals and operational liquidity needs. In 2025, the Bank's liquidity condition became more relaxed (loose but controlled) compared to the previous year.

The Loan to Deposit Ratio (LDR) in 2025 stood at 86.18%, decreasing from 88.28% in 2024 (down 2.38%). This decline indicates that the growth of third-party funds outpaced loan disbursement, reflecting more moderate credit expansion. This level suggests a safer liquidity position, as there remains sufficient room for further lending. Generally, an LDR in the range of 80–90% is considered optimal and sound.

The Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) was recorded at 4.00%, down from 5.00% in 2024. This decrease indicates the utilization of liquidity buffers to support business activities or adjustments in the composition of liquid assets.



Meskipun menurun, level ini masih menunjukkan bahwa Bank memiliki cadangan likuiditas yang memadai.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) tercatat sebesar 76,62%, menurun dari 88,01% (turun 12,94%). Penurunan signifikan ini mengindikasikan peningkatan dana dibandingkan penyaluran kredit, atau strategi konservatif dalam ekspansi pembiayaan. RIM yang lebih rendah mencerminkan likuiditas yang lebih longgar, namun juga menunjukkan fungsi intermediasi belum optimal maksimal.

Secara keseluruhan Rasio likuiditas Bank pada tahun 2025 mencerminkan kondisi yang sehat, longgar, dan terkelola dengan baik. Penurunan LDR dan RIM menunjukkan bahwa Bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk mengantisipasi risiko penarikan dana, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan ekspansi kredit secara selektif di periode mendatang.

Despite the decline, the level still reflects an adequate liquidity reserve.

The Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) was recorded at 76.62%, decreasing significantly from 88.01% (down 12.94%). This decline indicates stronger fund accumulation relative to credit disbursement or a more conservative lending strategy. A lower RIM reflects more relaxed liquidity conditions, although it may also suggest that the intermediation function has not yet been fully optimized.

Overall, the Bank's liquidity ratios in 2025 reflect a sound, well-managed, and relatively loose liquidity condition. The decline in LDR and RIM indicates that the Bank maintains sufficient liquidity buffers to anticipate withdrawal risks, while also providing flexibility to selectively expand lending in the coming periods.



Analisis Tingkat Kolektibilitas Piutang

Analysis of Loan Collectibility Levels

Fungsi utama bank sebagai lembaga *intermediary* adalah menghimpun dana simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kolektibilitas piutang menunjukkan kemampuan bank untuk menarik kembali dana yang dipinjamkan kepada nasabah kredit atau pembiayaan, yang harus dikembalikan pada waktu yang ditentukan.

Untuk mengevaluasi optimalisasi kinerja bank dalam menggunakan aset produktif, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio *Non-Performing Loan (NPL)*. NPL merupakan salah satu indikator kesehatan aset perbankan yang memberikan informasi mengenai kesehatan penyaluran kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Bank Papua terus berupaya mengendalikan risiko kredit agar tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan tetap terjaga. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui perbaikan kualitas aset secara bertahap, diversifikasi portofolio ke arah sektor yang lebih sehat, peningkatan infrastruktur dan proses bisnis, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bidang perkreditan, serta perbaikan *policy* dan *procedure*.

Kualitas kredit Bank pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit, tercermin dari kenaikan rasio *Non-Performing Loan (NPL)* baik secara *Gross* maupun *net*. Rasio NPL *Gross* meningkat dari 2,36% pada tahun 2024 menjadi 3,36% pada tahun 2025, atau naik 1,00 poin persentase (42,37%). Sementara itu, NPL *Net* mengalami peningkatan yang lebih signifikan, dari 0,63% menjadi 1,76%, atau naik 1,13 poin persentase (179,37%). Peningkatan yang lebih tajam pada NPL *Net* mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas kredit setelah memperhitungkan pencadangan (CKPN), serta menunjukkan adanya peningkatan eksposur risiko bersih terhadap portofolio kredit.

Meskipun demikian, kedua rasio tersebut masih berada di bawah ambang batas regulator sebesar 5%, sehingga secara umum kualitas aset masih dalam kategori terkendali (*manageable*). Secara keseluruhan, meskipun rasio NPL masih dalam batas aman, tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit berada dalam fase meningkat (*deteriorating trend*) dan memerlukan

The Bank's primary function as an intermediary institution is to collect funds from the public and channel them into loans. Loan collectibility reflects the Bank's ability to recover funds extended to borrowers within the agreed terms. To evaluate the effectiveness of the Bank in utilizing its earning assets, one key indicator is the Non-Performing Loan (NPL) ratio. NPL serves as an important measure of asset quality, providing insight into the soundness of the Bank's lending activities.

Bank Papua continues to manage credit risk to maintain the quality of its loan collectibility. Key initiatives include gradual improvement in asset quality, portfolio diversification toward healthier sectors, enhancement of infrastructure and business processes, strengthening human capital capabilities in lending, and refinement of policies and procedures.

In 2025, the Bank's credit quality indicated an increase in credit risk, as reflected by the rise in both Gross and Net NPL ratios. Gross NPL increased from 2.36% in 2024 to 3.36% in 2025, or up by 1.00 percentage point (42.37%). Meanwhile, Net NPL rose more significantly from 0.63% to 1.76%, or up by 1.13 percentage points (179.37%). The sharper increase in Net NPL indicates a decline in asset quality after provisioning (CKPN/ECL) and reflects higher net risk exposure within the loan portfolio.

Nevertheless, both ratios remain below the regulatory threshold of 5%, indicating that overall asset quality is still within a manageable level. Overall, although NPL ratios remain within a safe range, the upward trend signals a deteriorating phase in credit risk, requiring more prudent



pengelolaan yang lebih *prudent* untuk menjaga kualitas aset dan stabilitas kinerja ke depan.

risk management to maintain asset quality and ensure performance stability going forward.

Analisis kualitas aset produktif serta tingkat kolektibilitas kredit yang dimiliki Bank dalam kurun waktu tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Analysis of earning asset quality and loan collectibility levels for the 2021–2025 period is presented as follows:

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Remark
						+/-	%	
NPL-Gross	3,36%	2,36%	2,41%	2,92%	3,41%	1,00%	42,37%	NPL-Gross
NPL-Net	1,76%	0,63%	0,67%	0,87%	1,07%	1,13%	179,37%	NPL-Net

Kolektibilitas kredit Bank Papua pada tahun 2025 menunjukkan dinamika kualitas aset di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai Rp22.553.209 juta, meningkat sebesar Rp759.276 juta atau 3,48% dibandingkan tahun 2024. Kredit dengan kolektibilitas lancar tetap mendominasi sebesar Rp20.747.026 juta atau tumbuh 0,50%, yang mencerminkan bahwa kualitas portofolio secara umum masih terjaga.

Bank Papua's loan collectibility in 2025 reflects evolving asset quality amid continued credit growth, with total loans reaching Rp22,553,209 million, an increase of Rp759,276 million or 3.48% compared to 2024. Loans classified as current remained dominant at Rp20,747,026 million, growing slightly by 0.50%, indicating that the overall portfolio quality is still relatively well maintained.

Namun demikian, terjadi peningkatan pada kredit dalam perhatian khusus sebesar Rp412.691 juta atau 64,87%, serta kenaikan signifikan pada kredit dengan kolektibilitas kurang lancar sebesar Rp108.343 juta atau 255,62% dan kredit macet sebesar Rp142.736 juta atau 34,93%. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas kredit, seiring meningkatnya eksposur risiko pada portofolio pembiayaan.

However, there was a notable increase in special mention loans, which rose by Rp412,691 million or 64.87%. In addition, substandard loans increased significantly by Rp108,343 million or 255.62%, while loss (non-performing) loans rose by Rp142,736 million or 34.93%. These developments indicate growing pressure on asset quality, in line with higher risk exposure within the financing portfolio.

Di sisi lain, kredit dengan kolektibilitas diragukan mengalami penurunan sebesar Rp7.309 juta atau 11,69% menjadi Rp55.207 juta, yang menunjukkan adanya perbaikan pada sebagian portofolio, khususnya melalui upaya restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah.

On the other hand, doubtful loans declined by Rp7,309 million or 11.69% to Rp55,207 million, suggesting improvements in certain segments of the portfolio, particularly through restructuring efforts and enhanced management of non-performing loans.

Kolektibilitas	2025	2024	2023	2022	2021	Growth 2024-2025		NPL Categories
						+/-	%	
Lancar	20.747.026	20.644.211	18.674.304	17.272.135	16.709.995	102.815	0,50%	Current
Dalam Perhatian Khusus	1.048.904	636.213	442.535	348.878	288.625	412.691	64,87%	Special Mention
Kurang Lancar	150.728	42.385	36.726	16.772	27.238	108.343	255,62%	Substandard
Diragukan	55.207	62.516	44.401	33.053	29.335	(7.309)	-11,69%	Doubted
Macet	551.344	408.608	391.876	481.024	543.190	142.736	34,93%	Bad
Jumlah	22.553.209	21.793.933	19.589.842	18.151.862	17.598.383	759.276	3,48%	Total

Dalam merespons peningkatan kredit pada kolektibilitas 3, 4, dan 5, Bank menerapkan strategi penguatan manajemen risiko kredit secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan meliputi intensifikasi restrukturisasi kredit, penagihan aktif (collection acceleration), serta penguatan

In response to the increase in loans classified under collectibility categories 3, 4, and 5, the Bank has implemented a comprehensive and continuous credit risk management strengthening strategy. Key initiatives include intensifying loan restructuring, accelerating collection efforts, and enhancing the early warning system (EWS) to



early warning system (EWS) guna mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit secara lebih dini.

Selain itu, Bank juga meningkatkan kualitas analisis dan proses underwriting kredit, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*). Secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada peningkatan risiko kredit dan kebutuhan pencadangan, namun dengan strategi pengelolaan risiko yang lebih disiplin, Bank Papua tetap mampu menjaga stabilitas kinerja serta mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

PINJAMAN YANG DIBERIKAN DENGAN JANGKA PENDEK

Kredit jangka pendek dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.302.119 juta, menurun sebesar Rp330.886 juta atau 20,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.633.005 juta. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur portofolio kredit ke tenor yang lebih panjang, serta mencerminkan penyesuaian strategi penyaluran kredit jangka pendek yang dilakukan secara lebih selektif.

Di sisi lain, kondisi ini juga dapat mencerminkan peningkatan kehati-hatian Bank dalam mengelola risiko likuiditas dan kualitas kredit jangka pendek, yang cenderung lebih sensitif terhadap fluktuasi kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, pergeseran komposisi ini menunjukkan strategi Bank dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan pengelolaan risiko yang lebih *prudent*.

detect potential deterioration in credit quality at an earlier stage.

In addition, the Bank has strengthened credit analysis and underwriting processes, particularly in higher-risk sectors, as part of its prudential banking practices. Overall, while these conditions have led to higher credit risk exposure and provisioning requirements, the Bank's more disciplined risk management approach has enabled it to maintain performance stability and support sustainable loan growth.

SHORT-TERM LOANS

Short-term loans with maturities of up to one year in 2025 amounted to Rp1,302,119 million, decreasing by Rp330,886 million or 20.26% compared to Rp1,633,005 million in 2024. This decline indicates a shift in the loan portfolio structure toward longer tenors, as well as a more selective approach in short-term lending.

On the other hand, this condition may also reflect increased prudence in managing liquidity risk and short-term credit quality, which tend to be more sensitive to economic fluctuations. Overall, this shift in composition highlights the Bank's strategy to maintain a balance between loan growth and more prudent risk management.

Jangka Waktu	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Time Period
						+/-	%	
Sampai dengan 1 tahun	1.302.119	1.633.005	1.776.463	1.759.059	1.827.782	(330.886)	-20,26%	until 1 Year

PINJAMAN YANG DIBERIKAN DENGAN JANGKA PANJANG

Struktur kredit jangka panjang Bank Papua pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang solid, dengan total kredit mencapai Rp21.251.090 juta, meningkat Rp1.090.162 juta atau 5,41% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan terutama didorong oleh kredit tenor 2–5 tahun yang meningkat Rp412.752 juta (13,38%) serta kredit di atas 5 tahun yang naik Rp620.543 juta (3,67%) dan tetap menjadi kontributor terbesar portofolio. Selain itu, kredit tenor 1–2 tahun juga tumbuh signifikan sebesar Rp56.866

LONG-TERM LOANS

The Bank's long-term loan portfolio in 2025 demonstrated solid growth, with total loans reaching Rp21,251,090 million, an increase of Rp1,090,162 million or 5.41% compared to 2024. This growth was primarily driven by loans with tenors of 2–5 years, which increased by Rp412,752 million (13.38%), as well as loans with maturities of more than 5 years, which rose by Rp620,543 million (3.67%) and remained the largest contributor to the overall portfolio. In addition, loans with tenors of 1–2 years also recorded



juta atau 31,15%, yang mencerminkan peningkatan pembiayaan pada segmen menengah.

significant growth of Rp56,866 million or 31.15%, reflecting increased financing in the medium-term segment.

Jangka Waktu	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Time Period
						+/-	%	
1 - 2 tahun	239.433	182.567	342.267	339.777	367.928	56.866	31,15%	1 - 2 years
2 - 5 tahun	3.496.659	3.083.907	2.422.317	2.575.424	2.200.534	412.752	13,38%	2 - 5 tahun / years
di atas 5 tahun	17.514.998	16.894.454	15.048.795	13.477.602	13.202.063	620.543	3,67%	more than 5 years
Jumlah kredit yang diberikan	21.251.090	20.160.928	17.813.379	16.392.803	15.770.525	1.090.162	5,41%	Total Loans

Kondisi ini menunjukkan pergeseran strategi Bank yang lebih fokus pada pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk mendukung proyek investasi serta kebutuhan konsumsi jangka panjang yang memberikan yield lebih stabil. Namun demikian, peningkatan porsi kredit jangka panjang juga mengandung risiko likuiditas dan risiko kredit yang lebih tinggi, sehingga ke depan Bank akan memperkuat manajemen aset-liabilitas (ALMA), meningkatkan kualitas analisis kredit, serta mengoptimalkan monitoring portofolio melalui *early warning system*. Strategi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan kualitas aset secara berkelanjutan.

This condition reflects a strategic shift by the Bank toward greater focus on medium- and long-term financing to support investment projects and long-term consumption needs that offer more stable yields. However, the increasing proportion of long-term loans also carries higher liquidity and credit risks. Going forward, the Bank will strengthen Asset-Liability Management (ALMA), enhance the quality of credit analysis, and optimize portfolio monitoring through an effective early warning system. This strategy is expected to maintain a balanced approach between growth, profitability, and asset quality on a sustainable basis.



Aset Produktif

Earning Assets

Aset produktif merupakan komponen utama dalam menghasilkan pendapatan Bank dan menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menekankan pentingnya kualitas, kolektibilitas, serta pencadangan yang memadai. Dalam konteks tersebut, Bank Papua terus menjaga kualitas aset produktif melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan manajemen risiko kredit, serta pemantauan portofolio secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, kualitas dan komposisi aset produktif menunjukkan dinamika yang positif. Pinjaman yang diberikan meningkat sebesar Rp919.021 juta atau 4,34% menjadi Rp22.081.768 juta, mencerminkan ekspansi kredit yang tetap terjaga. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat signifikan sebesar Rp1.953.515 juta atau 300,45% menjadi Rp2.603.712 juta, sebagai bagian dari strategi penguatan likuiditas serta optimalisasi imbal hasil. Selain itu, efek-efek juga tumbuh sebesar Rp1.022.814 juta atau 25,51% menjadi Rp4.881.207 juta, yang menunjukkan adanya diversifikasi portofolio investasi. Di sisi lain, giro pada Bank Indonesia menurun sebesar Rp2.206.863 juta atau 66,00%, yang mencerminkan pergeseran penempatan dana ke instrumen yang lebih produktif. Sementara itu, giro pada bank lain meningkat sebesar Rp23.775 juta atau 38,64%, sejalan dengan optimalisasi pengelolaan likuiditas antarbank.

Earning assets are the primary component in generating the Bank's income and serve as a key focus in risk management, as regulated under POJK No. 40/POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks, which emphasizes the importance of asset quality, collectibility, and adequate provisioning. In this context, Bank Papua continues to maintain the quality of its earning assets through the application of prudential principles, strengthening credit risk management, and continuous portfolio monitoring.

In 2025, the quality and composition of earning assets showed positive dynamics. Loans increased by Rp919,021 million or 4.34% to Rp22,081,768 million, reflecting sustained credit expansion. Placements with Bank Indonesia and other banks rose significantly by Rp1,953,515 million or 300.45% to Rp2,603,712 million, as part of the Bank's strategy to strengthen liquidity and optimize returns. In addition, securities increased by Rp1,022,814 million or 25.51% to Rp4,881,207 million, indicating diversification of the investment portfolio.

On the other hand, demand deposits with Bank Indonesia declined by Rp2,206,863 million or 66.00%, reflecting a shift of funds into more productive instruments. Meanwhile, demand deposits with other banks increased by Rp23,775 million or 38.64%, in line with the optimization of interbank liquidity management.

Tabel Aset Produktif Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Description
						+/-	%	
Giro pada Bank Indonesia	1.136.671	3.343.534	3.632.470	3.799.724	1.478.485	(2.206.863)	-66,00%	Demand Deposit with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	85.304	61.529	74.987	38.240	48.125	23.775	38,64%	Demand Deposit with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.603.712	650.197	2.405.688	1.292.688	1.417.687	1.953.515	300,45%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.881.207	3.858.393	3.681.050	1.805.675	1.625.316	1.022.814	25,51%	Securities
Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	901.000	-	100.818	-	-	-901.000	-100,00	Securities Sold with Repurchase Agreements (Repo)

Table: Earning Assets, 2021-2025 (Rp Million)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2024-2025		Description
						+/-	%	
Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	737.935	-	1.284.732	3.377.196	2.616.190	737.935		Receivables on Securities Purchased with Resale Agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan - bersih	22.081.768	21.162.747	18.973.598	17.519.704	16.890.254	919.021	4,34%	Loans granted - net
Total Aset	31.526.597	29.977.400	30.1153.343	27.833.227	24.076.057	1.549.197	5,17%	Total Assets

Secara keseluruhan, total aset produktif Bank meningkat sebesar Rp1.549.197 juta atau 5,17% menjadi Rp31.526.597 juta, yang mencerminkan pertumbuhan yang agresif namun tetap terarah. Implikasi dari kondisi ini adalah meningkatnya potensi pendapatan, namun juga diiringi dengan peningkatan risiko kredit dan likuiditas yang perlu dikelola secara *prudent*. Ke depan, Bank Papua akan memperkuat strategi pengelolaan aset produktif melalui peningkatan kualitas underwriting, optimalisasi early warning system, serta penyeimbangan portofolio antara kredit, penempatan, dan surat berharga. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kualitas aset tetap sehat sesuai ketentuan regulator, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Overall, the Bank's total earning assets increased by Rp1,549,197 million or 5.17% to Rp31,526,597 million, reflecting growth that is both aggressive and well-directed. This condition implies higher income potential, accompanied by increased credit and liquidity risks that must be managed prudently. Going forward, Bank Papua will strengthen its earning asset management strategy by enhancing underwriting quality, optimizing the early warning system, and maintaining a balanced portfolio among loans, placements, and securities. These measures are expected to preserve asset quality in line with regulatory requirements while supporting sustainable business growth.



Struktur Modal

Capital Structure

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank Umum, Bank wajib menjaga kecukupan modal untuk menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, pasar, dan operasional. Struktur permodalan terdiri dari Modal Inti (*Tier 1*) sebagai komponen utama penyangga risiko, serta Modal Pelengkap (*Tier 2*) sebagai tambahan untuk memperkuat kapasitas permodalan.

Struktur permodalan Bank Papua pada tahun 2025 tetap menunjukkan kondisi yang solid meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Total modal tercatat sebesar Rp4.306.439 juta, menurun Rp-267.730 juta atau -5,85% dari tahun 2024 sebesar Rp4.574.169 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya Modal Inti (*Tier 1*) sebesar Rp-62.967 juta (-1,44%) menjadi Rp4.304.975 juta, seiring dengan dinamika laba ditahan dan penyesuaian komponen ekuitas lainnya. Sementara itu, Modal Pelengkap (*Tier 2*) juga mengalami penurunan sebesar Rp-204.763 juta (-98,81%) menjadi Rp2.464 juta, yang mencerminkan perubahan pada komponen cadangan atau instrumen permodalan tambahan.

Dengan demikian, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Papua tetap terjaga pada level 21,70%, jauh di atas ketentuan minimum OJK sebesar 9,00%. Kondisi ini menunjukkan tingkat solvabilitas yang sangat memadai serta kemampuan Bank dalam mendukung ekspansi kredit, menyerap risiko, dan menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 27 of 2022 concerning the Second Amendment to POJK No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Adequacy Requirements (KPMM) for Commercial Banks, banks are required to maintain sufficient capital to absorb potential losses arising from credit, market, and operational risks. The capital structure consists of Tier 1 Capital as the primary buffer, and Tier 2 Capital as a supplementary component to strengthen overall capital capacity.

Bank Papua's capital structure in 2025 remained solid, although it experienced a slight decline compared to the previous year. Total capital amounted to Rp4,306,439 million, decreasing by Rp267,730 million or 5.85% from Rp4,574,169 million in 2024. This decline was mainly driven by a reduction in Tier 1 Capital of Rp62,967 million (down 1.44%) to Rp4,304,975 million, in line with movements in retained earnings and other equity components. Meanwhile, Tier 2 Capital also decreased significantly by Rp204,763 million (down 98.81%) to Rp2,464 million, reflecting changes in reserves or supplementary capital instruments.

Despite this, the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) remained strong at 21.70%, well above the OJK minimum requirement of 9.00%. This indicates a very strong solvency position and the Bank's capacity to support loan expansion, absorb risks, and maintain financial stability on a sustainable basis, in line with prudential principles and good corporate governance.

Tabel Stuktur Modal Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Growth 2024-2025		Description
						+/-	%	
Modal Inti (Tier 1)	4.304.975	4.366.942	4.024.264	3.759.337	3.531.693	(-62.967)	-1,44	Core Capital (Tier 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	2.464	207.227	189.156	175.702	155.226	(-204.763)	-98,81	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal	4.306.439	4.574.169	4.213.420	3.935.039	3.686.919	-267.730	-5.85	Total Capital
ATMR Risiko Kredit	15.770.961	16.370.943	14.943.315	13.880.481	12.262.863	(599.982)	3,66%	Credit risk RWA
ATMR Risiko Pasar	230.370	163.985	86.462	51.801	31.578	66.385	40,48%	Market Risk RWA

Table of Capital Structure for 2021–2025 (Rp Million)



Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Growth 2024-2025		Description
						+/-	%	
ATMR Risiko Operasional	3.840.948	3.590.664	2.681.200	2.789.243	3.576.159	250.284	6,97%	Operational Risk RWA
Total ATMR	19.842.279	20.125.592	17.710.977	16.721.525	15.870.600	(283.313)	1,41%	Total ATMR
Modal Inti								Core Capital
Modal Inti terhadap ATMR tanpa memperhitungkan Risiko Pasar	19.611.909	19.961.607	17.624.515	16.669.724	15.839.022	(349.698)	1,75%	"Core Capital to ATMR without taking into account Market Risk"
Rasio	21,95%	21,88%	22,83%	22,55%	22,30%	0,001	0,46%	Ratio
Modal Inti terhadap ATMR tanpa memperhitungkan Risiko Operasional	16.001.331	16.534.928	15.029.777	13.932.282	12.294.441	(533.597)	3,23%	"Core Capital to RWA without taking into account Operational Risk"
Rasio	105,71%	26,41%	26,78%	26,98%	28,73%	0,005	1,89%	Ratio
Modal Inti terhadap ATMR tanpa memperhitungkan Risiko Kredit	4.071.318	3.754.649	2.767.662	2.841.044	3.607.737	316.669	8,43%	"Core Capital to ATMR without taking into account Credit risk"
Rasio	105,71%	116,31%	145,40%	132,32%	97,89%	(0,106)	-9,11%	Ratio
Total Modal								Total Capital
Tanpa Risiko Pasar	20.072.649	20.289.577	17.797.439	16.773.326	15.902.178	(216.928)	-1,07	Without Market Risk
Rasio	21,45%	22,54%	23,67%	23,46%	23,18%	(0,011)	-4,88%	Ratio
Tanpa Risiko Operasional	16.001.331	16.534.928	15.029.777	13.932.282	12.294.441	(533.597)	3,23%	Without Operational Risk
Rasio	26,91%	27,66%	28,03%	28,24%	29,99%	(0,008)	2,89%	Ratio
Tanpa Risiko Kredit	4.071.318	3.754.649	2.767.662	2.841.044	3.607.737	316.669	8,43%	Without Credit risk
Rasio	105,78%	121,83%	152,24%	138,51%	102,19%	(0,161)	-13,22%	Ratio
Rasio CAR	21,70%	22,73%	23,79%	23,53%	23,23%	(0,01)	-4,40%	CAR Ratio

Meskipun demikian, struktur permodalan Bank masih didominasi oleh Modal Inti yang memiliki kualitas tertinggi dalam menyerap risiko, sehingga mencerminkan fondasi permodalan yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks klasifikasi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI), posisi modal inti Bank Papua masih berada dalam kategori KBMI 1, dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Hal ini menuntut Bank untuk terus memperkuat permodalan guna meningkatkan kapasitas bisnis dan daya saing.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan moderat, struktur permodalan Bank Papua tetap berada pada level yang memadai untuk mendukung ekspansi usaha dan pengelolaan risiko. Ke depan, Bank akan terus mendorong penguatan modal melalui peningkatan profitabilitas, optimalisasi struktur permodalan, serta peluang penambahan modal, guna mendukung transformasi menuju skala usaha yang lebih besar dan berkelanjutan.

Nevertheless, the Bank's capital structure continues to be dominated by Tier 1 Capital, which represents the highest quality capital in absorbing risks, thereby reflecting a strong and sustainable capital foundation. Within the framework of Bank Classification Based on Core Capital (KBMI), Bank Papua remains categorized as KBMI 1, with core capital below Rp6 trillion. This condition requires the Bank to further strengthen its capital base to enhance business capacity and competitiveness.

Overall, despite the moderate decline, Bank Papua's capital structure remains adequate to support business expansion and risk management. Going forward, the Bank will continue to strengthen its capital through improved profitability, optimization of its capital structure, and potential capital injections, to support its transformation toward a larger and more sustainable business scale.



KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

Bank Papua menentukan kebijakan manajemen struktur modal berdasarkan :

1. Kepatuhan terhadap Regulasi OJK
Bank menetapkan kebijakan struktur modal dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah terakhir melalui POJK No. 27 Tahun 2022, serta SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016. Kebijakan ini memastikan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak hanya sesuai ketentuan minimum, tetapi juga mempertimbangkan profil risiko Bank secara menyeluruh.
2. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Capital*)
Penentuan kecukupan modal dilakukan berdasarkan profil risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pengukuran risiko menggunakan *Standardized Approach (Basel III Reforms)*, sehingga perhitungan ATMR mencerminkan eksposur risiko secara lebih akurat dan komprehensif.
3. Prioritas pada Kualitas Modal (*Tiering Structure*)
Struktur modal difokuskan pada dominasi Modal Inti (*Tier 1*) sebagai penyangga utama dalam menyerap kerugian, dengan dukungan Modal Pelengkap (*Tier 2*) sebagai *buffer* tambahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kualitas permodalan yang kuat dan berkelanjutan.
4. Penerapan *Capital Buffer*
Bank secara proaktif menjaga tambahan modal di atas ketentuan minimum (*buffer*), sebagai langkah mitigasi terhadap potensi krisis ekonomi maupun tekanan pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Dasar pemilihan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur modal Bank tetap kuat, resilien, dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sekaligus mendukung ekspansi usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, Bank mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap stabilitas dan kinerja keuangan Bank.

MANAGEMENT POLICY AND BASIS FOR CAPITAL STRUCTURE SELECTION

Bank Papua determines its capital structure management policy based on the following principles:

1. *Compliance with OJK Regulations*
The Bank establishes its capital structure policy in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2016, as most recently amended by POJK No. 27 of 2022, as well as SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016. This policy ensures that the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) is met not only at the minimum regulatory level but also in consideration of the Bank's overall risk profile.
Risk-Based Capital Approach
2. *Capital adequacy is determined based on the Bank's risk profile, including credit risk, market risk, and operational risk. Risk measurement adopts the Standardized Approach (Basel III Reforms), ensuring that Risk-Weighted Assets (RWA) calculations accurately and comprehensively reflect the Bank's risk exposure.*
3. *Focus on Capital Quality (Tiering Structure)*
The capital structure prioritizes Tier 1 Capital as the primary loss-absorbing buffer, supported by Tier 2 Capital as an additional buffer. This policy aims to maintain strong and sustainable capital quality.
Implementation of Capital Buffers
4. *The Bank proactively maintains capital above the minimum regulatory requirement (buffer) as a mitigation measure against potential economic downturns or market pressures that could impact financial system stability.*

The basis for selecting these policies is to ensure that the Bank's capital structure remains strong, resilient, and adaptive to changes in economic conditions, while supporting sustainable business expansion. Accordingly, the Bank is able to maintain a balance between business growth, risk management, and regulatory compliance, as well as strengthen stakeholder confidence in its financial stability and performance.



Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Risk Exposure and Capital Information

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada Corporate Governance dalam Laporan Tahunan ini.

In accordance with the complexity of its business activities, the Bank manages eight (8) types of risk, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputational risk, strategic risk, and compliance risk. However, this section focuses only on risk management practices related to credit risk, market risk, liquidity risk, and operational risk.

Further explanations regarding the other types of risks are presented in the Risk Profile and Its Management section under Corporate Governance in this Annual Report.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditure Investment

Selama tahun 2025 Bank Papua tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

During 2025, Bank Papua did not have any material commitments for capital expenditure investments. Therefore, there is no information regarding the parties involved in such commitments, the purpose of the commitments, the expected funding sources, the currency denomination, or the measures planned by the Bank to hedge foreign exchange risk related to such positions.



Investasi Barang Modal yang Direalisasikan

Realized Capital Expenditure Investments

Investasi barang modal merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas layanan Bank Papua. Melalui pengelolaan aset tetap dan aset hak guna yang optimal, Bank Papua memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik untuk operasional internal maupun pengembangan jaringan layanan kepada nasabah. Investasi ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, produktivitas, serta keselarasan dengan strategi transformasi digital dan penguatan bisnis jangka panjang.

Pada tahun 2025, realisasi investasi barang modal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Total biaya perolehan aset tercatat sebesar Rp770.598 juta, meningkat Rp34.781 juta dibandingkan saldo awal sebesar Rp735.817 juta, yang mencerminkan penambahan aset sebesar Rp80.246 juta diimbangi dengan pengurangan sebesar Rp40.751 juta. Penambahan terbesar berasal dari aset hak guna sebesar Rp32.211 juta serta inventaris kantor Rp19.177 juta, yang menunjukkan fokus pada penguatan infrastruktur operasional dan pemanfaatan aset berbasis sewa. Selain itu, pembangunan aset dalam penyelesaian seperti bangunan dan inventaris juga mengalami peningkatan, mencerminkan adanya proyek pengembangan yang sedang berjalan.

Capital expenditure investment is a key pillar in supporting the sustainability of operations and enhancing the quality of services at Bank Papua. Through optimal management of fixed assets and right-of-use assets, the Bank ensures the availability of adequate infrastructure, both for internal operations and for the development of its service network. These investments are carried out selectively, taking into account efficiency, productivity, and alignment with the Bank's digital transformation strategy and long-term business strengthening.

In 2025, realized capital expenditure investments showed a significant increase. The total acquisition cost of assets amounted to Rp770,598 million, increasing by Rp34,781 million compared to the beginning balance of Rp735,817 million. This reflects asset additions of Rp80,246 million, partially offset by disposals of Rp40,751 million. The largest additions came from right-of-use assets amounting to Rp32,211 million and office equipment amounting to Rp19,177 million, indicating a focus on strengthening operational infrastructure and the utilization of lease-based assets. In addition, assets under construction, such as buildings and equipment, also increased, reflecting ongoing development projects.

Tabel Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Tahun 2025 (Rp Juta)

Biaya Perolehan	Saldo Awal 1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi & Penyesuaian	Saldo Akhir 31 Des 2025	Cost
Tanah	38.786	-	-	(856)	37.930	Land
Bangunan Kantor	312.073	2.932	3.325	1.652	313.332	Buildings
Perumahan Dinas	25.515	489	512	-	25.492	Houses
Kendaraan Bermotor	9.815	603	2.467	-	7.952	Vehicles
Inventaris Kantor	256.141	19.177	12.658	3.013	265.673	Office Equipment
Inventaris Rumah Dinas	10.798	786	1.044	-	10.540	House Equipment
Inventaris Lainnya	18.377	1.318	452	-	19.243	Others
Aset Hak Guna	50.786	32.211	20.293	-	62.704	Right of use of assets
Inventaris Dalam Penyelesaian	4.293	5.125	-	(6.593)	2.825	Equipment in Progress
Bangunan Dalam Penyelesaian	9.233	17.606	-	(1.931)	24.907	Building in Progress
Total biaya perolehan	735.817	80.246	40.751	(4.715)	770.598	Total

Table of Realized Capital Expenditure Investments for 2025 (Rp Million)

Biaya Perolehan	Saldo Awal 1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi & Penyesuaian	Saldo Akhir 31 Des 2025	Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan Kantor	201.343	12.810	3.325	399	211.227	Buildings
Perumahan Dinas	14.411	1.127	512	-	15.026	Houses
Kendaraan Bermotor	8.784	580	2.467	-	6.897	Vehicles
Inventaris Kantor	219.362	17.936	12.658	-	224.640	Office Equipment
Inventaris Rumah Dinas	8.746	1.108	1.044	-	8.810	House Equipment
Inventaris Lainnya	15.193	1.440	452	-	16.181	Others
Aset Hak Guna	26.564	20.834	20.293	240	27.345	Right of use of assets
Total akumulasi penyusutan	494.403	55.834	40.751	639	510.126	Total
Nilai Buku	241.414	-	-	-	260.471	Fiscal Year

Di sisi lain, Bank Papua tetap melakukan rasionalisasi aset melalui pengurangan pada beberapa pos seperti kendaraan bermotor dan inventaris rumah dinas, sebagai bagian dari upaya efisiensi. Secara keseluruhan, nilai buku aset tetap meningkat menjadi Rp260.471 juta dari Rp241.414 juta pada tahun sebelumnya.

Peningkatan investasi ini akan berdampak pada kenaikan beban penyusutan di masa mendatang, namun diimbangi dengan potensi peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Dari sisi strategi, langkah ini memperkuat kapasitas Bank Papua dalam mendukung ekspansi bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi digital. Ke depan, Bank Papua akan terus menjaga keseimbangan antara investasi dan efisiensi, memastikan setiap penambahan aset memberikan nilai tambah optimal terhadap kinerja keuangan dan daya saing Bank secara berkelanjutan.

On the other hand, Bank Papua continued to rationalize its assets by reducing certain components such as motor vehicles and official residence inventory, as part of its efficiency efforts. Overall, the carrying value of fixed assets increased to Rp260,471 million from Rp241,414 million in the previous year.

This increase in investment will lead to higher depreciation expenses in the future; however, it is expected to be offset by improvements in productivity and operational efficiency. From a strategic perspective, this initiative strengthens Bank Papua's capacity to support business expansion, enhance service quality, and accelerate digital transformation. Going forward, the Bank will continue to maintain a balance between investment and efficiency, ensuring that each addition of assets delivers optimal value to financial performance and sustains the Bank's long-term competitiveness.



Komitmen dan Kontinjensi

Commitments and Contingencies

Komitmen dan kontinjensi Bank Papua pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan strategi pengelolaan eksposur *off-balance sheet* yang lebih selektif. Total komitmen dan kontinjensi tercatat sebesar Rp1.228.150 juta, menurun Rp667.995 juta atau 35,23% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.633.144 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar Rp498.640 juta (-30,53%) menjadi Rp1.134.504 juta, yang mencerminkan optimalisasi penyaluran kredit menjadi realisasi pembiayaan atau pengetatan komitmen kredit baru. Selain itu, bank garansi yang diterbitkan juga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp169.355 juta (-64,39%) menjadi Rp93.646 juta, yang mengindikasikan penurunan aktivitas proyek atau pendekatan yang lebih selektif dalam pemberian jaminan guna mengendalikan risiko kontinjensi.

Bank Papua's commitments and contingencies in 2025 declined compared to the previous year, in line with a more selective strategy in managing off-balance sheet exposures. Total commitments and contingencies amounted to Rp1,228,150 million, decreasing by Rp667,995 million or 35.23% from Rp1,633,144 million in 2024.

This decline was primarily driven by a reduction in undrawn loan commitments of Rp498,640 million (down 30.53%) to Rp1,134,504 million, reflecting the conversion of committed facilities into actual disbursements or tighter new credit commitments. In addition, issued bank guarantees decreased significantly by Rp169,355 million (down 64.39%) to Rp93,646 million, indicating lower project activity or a more selective approach in issuing guarantees to manage contingent risks.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi Tahun 2023-2025 (Rp Juta)

Table of Commitments and Contingencies for 2023-2025 (Rp Million)

Uraian	2025	2024	2023	YOY 2024-2025		Remark
				+/-	%	
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	1.134.504	1.633.144	2.229.123	(498.640)	-30,53%	Credit facilities granted that have not been used
Bank Garansi yang diterbitkan	93.646	263.001	296.919	(169.355)	-64,39%	Bank Guarantees issued
Jumlah	1.228.150	1.896.145	2.526.042	(667.995)	-35,23%	Total

Secara keseluruhan, penurunan komitmen dan kontinjensi ini berdampak positif terhadap profil risiko Bank karena mengurangi potensi kewajiban di masa depan. Ke depan, Bank Papua akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengendalian risiko dengan memperkuat analisis kredit, meningkatkan kualitas nasabah, serta memastikan setiap komitmen yang diberikan memiliki profil risiko yang terukur dan terkendali.

Overall, the decline in commitments and contingencies has a positive impact on the Bank's risk profile, as it reduces potential future obligations. Going forward, Bank Papua will continue to maintain a balance between business growth and risk control by strengthening credit analysis, improving customer quality, and ensuring that every commitment undertaken carries a measurable and well-managed risk profile.

Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Significant Events after the Balance Sheet Date

Nomor 47 tanggal 28 Maret 2026, Bank menunjuk Drs. Ali Baham Temongmere, MTP sebagai Komisaris Non Independen. Selain itu, masa jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional telah berakhir. Perubahan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan kepemimpinan, serta tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan Bank.

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 47 dated March 28, 2026, the Bank appointed Drs. Ali Baham Temongmere, MTP as Non-Independent Commissioner. In addition, the terms of office of the Director of Business and the Director of Operations have expired. These changes are part of strengthening governance and leadership continuity and do not have a material impact on the Bank's financial condition.



Prospek Usaha

Business Prospect

PROSPEK USAHA TAHUN 2026

Memasuki tahun 2026, Manajemen Bank Papua memandang prospek usaha perbankan masih berada dalam jalur pertumbuhan yang terkendali, sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi nasional serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026, Bank Papua menetapkan target pertumbuhan usaha yang realistis dan berimbang, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang efektif.

Dari sisi peluang, prospek pertumbuhan ekonomi daerah Papua dan Papua Barat diperkirakan tetap ditopang oleh belanja pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi sektor UMKM dan perdagangan. Kondisi tersebut sejalan dengan arah RBB 2026 yang menempatkan penguatan fungsi intermediasi pada sektor produktif dan inklusif sebagai salah satu sasaran utama. Bank Papua memproyeksikan pertumbuhan kredit yang difokuskan pada segmen UMKM, kredit komersial terpilih, serta pembiayaan yang mendukung program pemerintah daerah, dengan tetap menjaga kualitas aset sesuai *risk appetite* Bank.

Dalam menetapkan strategi ke depan, Manajemen secara konsisten mengaitkan target pertumbuhan dengan profil risiko Bank Papua. Target penyaluran kredit tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan kapasitas permodalan, struktur pendanaan, serta kemampuan Bank dalam mengelola risiko kredit. Pengendalian rasio kredit bermasalah (NPL) dan Loan at Risk tetap menjadi prioritas, sejalan dengan target RBB untuk menjaga kualitas aset dan stabilitas kinerja keuangan. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan kredit diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laba tanpa meningkatkan eksposur risiko secara berlebihan.

Di sisi pendanaan, strategi tahun 2026 diarahkan pada penguatan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya dana murah (CASA), guna menjaga likuiditas dan efisiensi biaya dana. Target pendanaan dalam RBB diselaraskan dengan proyeksi pertumbuhan kredit dan profil risiko likuiditas, sehingga keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran dana tetap terjaga. Optimalisasi dana giro

BUSINESS OUTLOOK FOR 2026

Entering 2026, Bank Papua's Management views the banking industry outlook as remaining on a controlled growth path, in line with national macroeconomic policies as well as the monetary and macroprudential policy mix implemented by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). In the Bank's 2026 Business Plan (RBB), Bank Papua has set realistic and balanced growth targets, while continuing to prioritize prudential principles and effective risk management.

From an opportunity perspective, economic growth in the Papua and West Papua regions is expected to remain supported by regional government spending, infrastructure development, and economic activities in the MSME and trade sectors. This outlook aligns with the Bank's 2026 RBB, which emphasizes strengthening its intermediation function in productive and inclusive sectors. The Bank projects credit growth focused on MSMEs, selected commercial segments, and financing that supports regional government programs, while maintaining asset quality in accordance with the Bank's risk appetite.

In formulating its forward strategy, Management consistently aligns growth targets with the Bank's risk profile. Credit disbursement targets for 2026 are determined by considering capital capacity, funding structure, and the Bank's ability to manage credit risk. Controlling Non-Performing Loans (NPL) and Loan at Risk (LaR) remains a priority, in line with the RBB's objective to maintain asset quality and financial stability. With this approach, credit growth is expected to contribute positively to earnings without significantly increasing risk exposure.

On the funding side, the 2026 strategy focuses on strengthening Third-Party Funds (DPK), particularly low-cost funds (CASA), to maintain liquidity and funding efficiency. Funding targets in the RBB are aligned with projected credit growth and liquidity risk profiles, ensuring a balanced relationship between sources and uses of funds. Optimization of regional government demand deposits and



pemerintah daerah dan pengembangan dana ritel berbasis payroll serta transaksi digital menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko likuiditas.

Selain itu, Bank Papua terus mencermati risiko operasional, risiko teknologi informasi, dan risiko kepatuhan yang meningkat seiring percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, strategi ke depan juga diarahkan pada penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko terintegrasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sebagaimana tercantum dalam RBB 2026 dan peta jalan penguatan tata kelola Bank.

Dengan mengaitkan secara erat prospek usaha, target RBB 2026, dan profil risiko Bank, Manajemen meyakini bahwa strategi yang diterapkan akan mampu menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Ke depan, Bank Papua optimistis dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas dan ketahanan Bank di tengah dinamika industri perbankan nasional.

STRATEGI DAN LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH

Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan modal guna memperkuat ketahanan kelembagaan.
 - a. Mengawal komitmen setoran modal Rp 4 Trilyun dengan memastikan terjalannya komunikasi yang baik antara manajemen (Komisaris dan Direksi) dengan semua Pemegang Saham Bank Papua baik langsung maupun tidak langsung/pasif.
 - b. Secara aktif bersama dengan semua kantor cabang Bank Papua berkomunikasi dengan tim anggaran masing-masing pemerintah daerah.
 - c. Mensinergikan program Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Tanah Papua dengan Bank Papua, antara lain dengan mensosialisasikan berbagai produk yang dimiliki oleh Bank Papua yang dapat dilakukan dengan kerjasama seperti CMS Kasda, CMS Corporate, Layanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Online, payroll gaji, KPE, alat perekaman pajak hotel, restoran dan hiburan dan lain-lain.
 - d. Program CSR Bank Papua yang benar-benar menyentuh masyarakat luas sejalan dengan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disinergikan dengan program Pemerintah Daerah dengan kriteria yang terukur dan sesuai dengan

the development of retail funding through payroll-based and digital transaction channels form part of the Bank's liquidity risk mitigation strategy.

In addition, Bank Papua continues to monitor operational, information technology, and compliance risks, which are increasing in line with the acceleration of digital transformation. Accordingly, future strategies are also directed toward strengthening internal control systems, integrated risk management, and enhancing human capital competencies, as outlined in the 2026 RBB and the Bank's governance strengthening roadmap.

By closely aligning business outlook, 2026 RBB targets, and the Bank's risk profile, Management believes that the strategies implemented will sustain healthy and sustainable growth. Going forward, Bank Papua remains optimistic about enhancing its contribution to regional economic development while maintaining stability and resilience amid the dynamics of the national banking industry.

STRATEGIES AND ACTION PLANS

The key strategic initiatives to be undertaken are as follows:

1. *Capital Strengthening Strategy to Enhance Institutional Resilience*
 - a. *Safeguarding the Rp4 trillion capital injection commitment by ensuring effective communication between Management (Board of Commissioners and Board of Directors) and all shareholders of Bank Papua, both active and passive.*
 - b. *Actively coordinating with all Bank Papua branches to engage with regional government budgeting teams.*
 - c. *Strengthening synergy with Provincial and Regency/ Municipal Governments across Papua by promoting Bank Papua's products and services, including Regional Cash Management System (CMS Kasda), Corporate CMS, National Digital Samsat Service (SIGNAL), Online Samsat, payroll services, Electronic Payment Cards (KPE), and tax recording tools for hotels, restaurants, and entertainment sectors.*
 - d. *Implementing CSR programs that directly benefit the broader community, aligned with the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), and integrated with regional government programs under measurable criteria and in accordance with the Bank's capacity,*



kemampuan Bank Papua baik Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Berupaya memperoleh laba bersih yang terus meningkat sehingga mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- f. Selalu berinovasi terhadap layanan kepada Pemerintah Daerah dengan mempersiapkan layanan berbasis *digital banking* guna menunjang program pemerintah daerah untuk layanan Transaksi Non Tunai sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- g. Ikut serta dalam program pengembangan produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat seperti pengembangan produksi kopi, rumput laut, pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan lainnya.
- h. Melaksanakan Program Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk menciptakan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan bagi masyarakat.
- i. Pelaksanaan PSAK 71 dan PSAK 73.
- j. Promosi produk-produk unggulan Bank Papua melalui media elektronik dan media cetak dan media sosial (instagram, *website*, dan facebook Bank Papua).

2. Human Capital Development

Human capital development memegang peran penting dalam pengembangan bisnis Bank Papua. Divisi Manajemen Modal Manusia memiliki peranan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada pegawai, memperhatikan hubungan kerja mereka, memperhatikan kesehatan, keamanan dan juga masalah keadilan, sehingga diperlukan metode pengelolaan SDM secara efektif dan efisien dalam organisasi maupun bisnis agar mampu berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kesiapan SDM yang matang dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja Bank Papua. Divisi Manajemen Modal Manusia (*Human Capital Management*) membuat kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Penyediaan SDM berkualitas disesuaikan mengikuti perkembangan bisnis dilakukan melalui sistem rekrutmen didasarkan pada jumlah kebutuhan untuk

including Partnership and Community Development Programs.

- e. *Striving to continuously increase net income to contribute to Regional Original Revenue (PAD).*
- f. *Continuously innovating in services for regional governments by developing digital banking-based solutions to support non-cash transaction programs in line with applicable regulations.*
- g. *Participating in the development of products that support regional economic growth, such as coffee production, seaweed cultivation, and sustainable forest management.*
- h. *Implementing the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) to promote environmentally sustainable initiatives that enhance community welfare.*
- i. *Implementing PSAK 71 and PSAK 73 standards.*
- j. *Promoting Bank Papua's flagship products through electronic media, print media, and social media platforms (Instagram, website, and Facebook).*

2. Human Capital Development

Human capital development plays a critical role in supporting Bank Papua's business growth. The Human Capital Management Division is responsible for preparing and managing human resources comprehensively, covering recruitment, training, performance evaluation, compensation, employee relations, as well as health, safety, and fairness aspects. Therefore, effective and efficient human capital management is essential to ensure optimal contribution toward achieving organizational objectives.

A well-prepared workforce with strong educational backgrounds will enhance employee performance and positively impact the Bank's overall performance. To support this, the Human Capital Management Division has established the following policies and strategies:

- a. *Provision of qualified human resources aligned with business development through a recruitment system based on organizational needs.*



memenuhi pengembangan struktur organisasi.

- b. Implementasi *Talent Management*.
- c. Program asesmen secara berkala dan berkesinambungan untuk memetakan kompetensi pegawai yang akan menduduki posisi jabatan tertentu.
- d. Program terkait kesejahteraan pegawai.
- e. Implementasi sistem manajemen modal manusia.
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan evaluasi secara bertahap.

3. Product and Service Development

Pengembangan produk dan layanan juga sangat penting dalam mendukung kesuksesan operasional Bank Papua, karena itu dalam implemetasinya akan dikoordinir oleh beberapa Divisi yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan strategi ini.

- a. Meningkatkan/mempertahankan kecepatan layanan serta kondisi kenyamanan bagi nasabah guna membangun emosional loyalitas terhadap Bank Papua.
- b. Mengembangkan produk dan servis perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didasari pada riset terpadu yang dilakukan oleh Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, Perencanaan Strategis, Divisi Pengelolaan Dana & Jasa dan divisi lainnya.
- c. Meningkatkan *Fee Based Income* dari produk dan jasa melalui pengembangan sistem Teknologi Informasi, mengembangkan fitur produk dan layanan digital.
- d. Membangun komunikasi yang baik dan aliansi strategis dengan Institusi Pemerintah dan Swasta guna membangun ekosistem dan peningkatan bisnis Perusahaan melalui pengembangan dan penyediaan produk dan layanan digital.
- e. Melakukan tinjauan *Pricing* produk secara berkala dengan memperhatikan kondisi competitive advantage dengan bank lain.
- f. Mensosialisasikan produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat dalam bentuk program edukasi secara konsisten.
- g. Menambah jumlah jaringan *delivery channel* baik berupa penambahan mesin ATM, EDC, CDM, Laku Pandai yang akan dikoordinir oleh Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa, serta Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.
- h. Evaluasi dan monitoring terhadap Produk dan Layanan Bank secara berkala bersama divisi terkait dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan serta

b. *Implementation of Talent Management.*

c. *Periodic and continuous assessment programs to map employee competencies for specific positions.*

d. *Employee welfare programs.*

e. *Implementation of a human capital management system.*

f. *Enhancement of human resource quality through structured education and training programs with gradual evaluation.*

3. Product and Service Development

Product and service development is essential in supporting Bank Papua's operational success and is coordinated across several divisions directly involved in policy and strategic implementation. The key initiatives include:

- a. *Enhancing and maintaining service speed and customer comfort to build emotional loyalty toward Bank Papua.*
- b. *Developing banking products and services aligned with community needs, based on integrated research conducted by the MSME & Consumer Business Division, Strategic Planning Division, Fund & Services Management Division, and other related divisions.*
- c. *Increasing fee-based income through the development of information technology systems and enhancement of digital product and service features.*
- d. *Building strong communication and strategic alliances with government and private institutions to develop business ecosystems and expand digital products and services.*
- e. *Conducting periodic product pricing reviews while considering competitive positioning against other banks.*
- f. *Consistently promoting banking products and services through public education programs.*
- g. *Expanding delivery channels, including additional ATMs, EDCs, CDMs, and Laku Pandai agents, coordinated by the Strategic Planning Division, Information Technology Division, Fund & Services Management Division, and Network & Service Management Division.*
- h. *Conducting regular evaluation and monitoring of products and services in collaboration with relevant divisions to improve and enhance performance,*



peningkatan performance produk dan layanan digital bank papua.

- i. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara Bank Papua dan PEMDA sebagai nasabah prima dan mitra strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan pengelolaan rekening kas umum daerah dalam bentuk program *government engagement* dan penyediaan kanal-kanal pembayaran digital dalam mendukung Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada seluruh PEMDA di Tanah Papua.

4. Teknologi Informasi dan *Management Information System* (MIS)

Peranan Teknologi Informasi ini sangat penting dalam rangka pengembangan operasional bank, karena itu dalam melayani kebutuhan nasabah harus disesuaikan dengan perilaku nasabah saat ini, karena itu dalam mengklasifikasikan nasabah perlu dilakukan pemetaan antara kebutuhan yang diminta unit bisnis dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh Bank Papua, yang meliputi :

- a. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah seperti Pengembangan dan memperluas cakupan *Biller Lokal Daerah (paymet point)*, pengembangan *Cash Management System (CMS)* pengeluaran dan *Cash Management System (CMS)* pendapatan, *Cash Management System (CMS) Corporate*, Layanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat *online*, pajak dan retribusi pada Provinsi serta Kabupaten/Kota.
- b. Pengembangan Aplikasi *Human Capital Management System (HCMS)*.
- c. Penyempurnaan sistem *Payment Point*.
- d. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan perusahaan korporasi, menengah dan kecil.
- e. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan nasabah/debitur umum yang meliputi nasabah/debitur kelas atas, menengah dan bawah.
- f. Penyempurnaan kebutuhan internal Bank Papua akan *Management Information System (MIS)* yang mampu menelaah perkembangan pencapaian kinerja, pengukuran risiko, serta audit yang berbasis resiko yaitu dalam bentuk *visualisasi* laporan keuangan di Datafarm Bank Papua.
- g. Mengoptimalkan layanan *helpdesk* yang memberikan informasi dengan cepat atas keluhan nasabah.
- h. Fokus terhadap pengembangan Produk Baru yakni, *Internet Banking Corporate*, *QRIS Acquirer*

particularly for digital banking services.

- i. *Strengthening relationships and communication with Regional Governments (PEMDA) as key customers and strategic partners, particularly in managing regional treasury accounts, through government engagement programs and the provision of digital payment channels to support the Regional Government Transaction Electronification Program (ETPD) across Papua.*

4. *Information Technology and Management Information System (MIS)*

Information Technology plays a critical role in supporting the Bank's operational development. In meeting customer needs, IT capabilities must align with evolving customer behavior. Accordingly, Bank Papua maps business unit requirements with its IT capabilities, which include:

- a. *Provision of IT solutions for Regional Government needs, including development and expansion of local biller coverage (payment points), enhancement of Cash Management System (CMS) for disbursement and revenue, Corporate CMS, National Digital Samsat Service (SIGNAL), online Samsat, as well as tax and retribution systems at provincial and regency/municipal levels.*
- b. *Development of the Human Capital Management System (HCMS).*
- c. *Enhancement of the payment point system.*
- d. *Provision of IT solutions for corporate, medium, and small enterprise segments.*
- e. *Provision of IT solutions for general customers/debtors across all segments (upper, middle, and lower).*
- f. *Enhancement of internal Management Information Systems (MIS) to support performance monitoring, risk measurement, and risk-based auditing through financial report visualization within Bank Papua's data farm.*
- g. *Optimization of helpdesk services to ensure prompt response to customer complaints.*
- h. *Focus on developing new products such as Corporate Internet Banking, QRIS Acquirer Laku*



Lakupandai, CMS Corporate, Laku Pandai (Branchless Banking), Digitalisasi di Bidang Kredit dan E-Wallet.

- i. Pemenuhan teknologi informasi guna ikut serta dalam program pemerintah terkait Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

5. Tata Kelola dan *Risk Management*

Penyelenggaraan operasional bisnis Bank Papua perlu diimbangi dengan implementasi Tata Kelola, *Risk Management* dan Kepatuhan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Bank Papua terus tumbuh dan berkembang, namun tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku, dengan menyelenggarakan :

- a. Memastikan Penerapan Tata Kelola kepada seluruh insan Bank Papua guna peningkatan pemahaman dan penerapan Tata Kelola bagi setiap Insan Bank Papua.
- b. Melakukan Analisis dan Kajian Manajemen Risiko Melalui Proses Identifikasi, Pengukuran, Mitigasi, Monitoring Risiko dan Sistem Informasi yakni :
 - Melaksanakan kajian-kajian pada seluruh aktifitas fungsional Bank secara keseluruhan terkait risiko-risiko yang ada di kantor pusat dan kantor cabang;
 - Mengkaji Kebijakan yang bersifat Umum dan Strategi;
 - Merekomendasikan pengendalian risiko dalam rangka perbaikan/ pemulihan dari hal-hal yang merugikan bank;
 - Monitoring hasil Kajian Manajemen Risiko, menyampaikan kepada direksi dan unit terkait.
 - Monitoring Kredit dan *Non Performance Loan* (NPL).
- c. Mengoptimalkan fungsi dan monitoring laporan Profil Risiko Cabang (PRC) dan *Loss Event Database* (LED).
- d. Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh Kantor Cabang.
- e. Implementasi *Risk Based Approach* sesuai kelompok nasabah (*Low, Moderate dan High*) dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- f. Penyajian Pelaporan Manajemen Risiko berupa Tingkat Kesehatan Bank (TKB), Profil Risiko, KPMM dan ATMR, Pelaporan PRC, LED dan ICAAP serta *Risk Appetite* yang lebih komprehensif kepada pihak manajemen maupun pihak eksternal terkait, sebagai bahan dalam menentukan kebijakan perusahaan (8 risiko).
- g. Pemantauan terhadap Rasio-Rasio Keuangan Bank.

Pandai, Corporate CMS, Laku Pandai (branchless banking), digitalization in lending, and e-wallet services.

- i. *Provision of IT capabilities to support government programs, including the National Non-Cash Movement (GNNT) and Regional Government Transaction Electronification (ETPD).*

5. Governance and Risk Management

The Bank's business operations are supported by strong implementation of Governance, Risk Management, and Compliance to ensure sustainable growth within the regulatory framework. Key initiatives include:

- a. *Ensuring the implementation of Good Corporate Governance across all employees to enhance understanding and application of governance principles.*
- b. *Conducting risk management analysis and assessments through identification, measurement, mitigation, and monitoring processes supported by information systems, including:*
 - *Performing comprehensive risk assessments across all functional activities at both head office and branch levels;*
 - *Reviewing general and strategic policies;*
 - *Recommending risk controls for improvement and recovery from potential losses;*
 - *Monitoring risk management assessment results and reporting to the Board of Directors and relevant units;*
 - *Monitoring loans and Non-Performing Loans (NPL).*
- c. *Optimizing the function and monitoring of Branch Risk Profile (PRC) reports and the Loss Event Database (LED).*
- d. *Conducting risk management socialization and training programs for all branches.*
- e. *Implementing a Risk-Based Approach based on customer segmentation (Low, Moderate, High) supported by IT systems.*
- f. *Providing comprehensive risk management reporting, including Bank Soundness Level (TKB), Risk Profile, Capital Adequacy (KPMM) and Risk-Weighted Assets (RWA), PRC, LED, ICAAP, and Risk Appetite, to both management and relevant external parties as a basis for decision-making (covering the eight types of risk).*
- g. *Monitoring key financial ratios of the Bank.*



DATA PENDUKUNG PROSPEK USAHA

ASUMSI MAKRO EKONOMI INDONESIA 2025–2027

SUPPORTING DATA FOR BUSINESS OUTLOOK

INDONESIA MACROECONOMIC ASSUMPTIONS 2025–2027

Indikator Ekonomi Makro	Satuan	2025	2026	2027	Tren Outlook	Sumber Asumsi
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)	%	5,0	5,2	5,3	Meningkat Moderat	Bank Indonesia, Kemenkeu
Inflasi	%	2,5	2,5	2,6	Stabil	Bank Indonesia
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	Rp/US\$	15.800	16.000	16.200	Stabil dengan Volatilitas Terkendali	BI, Outlook Pasar
Yield SUN Tenor 10 Tahun	%	6,8	6,9	7,0	Stabil	BI, Kemenkeu
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	US\$/Barel	82	80	78	Menurun Bertahap	Kemenkeu
Lifting Minyak Bumi	Ribu Barel/Hari	635	640	645	Meningkat	Kemenkeu, SKK Migas
Lifting Gas	Ribu BOEPD	1.033	1.040	1.050	Meningkat	Kemenkeu, SKK Migas

INTERPRETASI STRATEGIS BAGI INDUSTRI PERBANKAN

Asumsi makroekonomi periode 2025–2027 menunjukkan prospek yang relatif kondusif bagi industri perbankan, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat moderat dari 5,0% menjadi 5,3%, inflasi yang stabil di kisaran 2,5%–2,6%, serta nilai tukar yang terjaga meskipun tetap berpotensi mengalami *volatilitas* terkendali. Di sisi lain, tren kenaikan yield SUN serta penurunan harga minyak mentah mencerminkan dinamika likuiditas dan tekanan biaya dana, sementara peningkatan lifting minyak dan gas mengindikasikan potensi penguatan sektor riil, khususnya di wilayah berbasis sumber daya alam seperti Papua.

Bagi Bank Papua, kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan strategis. Pertumbuhan ekonomi yang stabil membuka ruang ekspansi kredit, khususnya pada sektor konsumsi, UMKM, serta proyek berbasis pemerintah dan infrastruktur. Stabilitas inflasi mendukung daya beli masyarakat, sehingga memperkuat portofolio kredit ritel. Namun demikian, kenaikan yield SUN berpotensi meningkatkan cost of fund, sehingga Bank perlu mengoptimalkan strategi penghimpunan dana murah (CASA) dan menjaga efisiensi struktur pendanaan.

Selain itu, *volatilitas* nilai tukar mengharuskan Bank memperkuat manajemen risiko pasar, khususnya pada eksposur valas. Sementara itu, peningkatan sektor energi melalui lifting migas menjadi peluang bagi Bank Papua untuk memperluas pembiayaan pada sektor strategis daerah. Ke depan, Bank Papua akan mengarahkan strategi pada penguatan portofolio kredit yang berkualitas, diversifikasi sumber pendapatan berbasis fee, serta optimalisasi

STRATEGIC INTERPRETATION FOR THE BANKING INDUSTRY

Macroeconomic assumptions for the 2025–2027 period indicate a relatively favorable outlook for the banking industry, with economic growth projected to increase moderately from 5.0% to 5.3%, stable inflation in the range of 2.5%–2.6%, and an exchange rate that remains stable despite potential controlled volatility. On the other hand, the upward trend in government bond (SUN) yields and the decline in crude oil prices reflect liquidity dynamics and funding cost pressures, while increased oil and gas lifting signals potential strengthening of the real sector, particularly in resource-based regions such as Papua.

For Bank Papua, these conditions present both opportunities and strategic challenges. Stable economic growth provides room for credit expansion, particularly in consumer, MSME, and government and infrastructure-related projects. Stable inflation supports purchasing power, thereby strengthening the retail loan portfolio. However, rising SUN yields may increase the cost of funds, requiring the Bank to optimize its low-cost funding (CASA) strategy and maintain funding efficiency.

In addition, exchange rate volatility necessitates strengthening market risk management, particularly in foreign currency exposures. Meanwhile, growth in the energy sector through increased oil and gas lifting offers opportunities for Bank Papua to expand financing in strategic regional sectors. Going forward, Bank Papua will focus its strategy on strengthening high-quality loan portfolios, diversifying fee-based income sources, and



digitalisasi layanan, guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi global.

optimizing service digitalization to sustain growth and enhance competitiveness amid global economic dynamics.

ASUMSI MIKRO 2025–2027

MICROECONOMIC ASSUMPTIONS 2025–2027

Indikator Mikro Perbankan	Satuan	2025	2026	2027	Tren	Implikasi Strategis bagi Bank
Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan	%	9,0	10,0	10,5		Peluang ekspansi pembiayaan sektor produktif dan UMKM meningkat
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)	%	9,5	10,0	10,5		Penguatan strategi penghimpunan dana ritel dan institusi
Tingkat Imbalan Dana Pihak Ketiga	%	4,3	4,4	4,5		Optimalisasi struktur biaya dana dan penguatan CASA
Tingkat Imbalan Pembiayaan / Kredit	%	10,4	10,5	10,6		Pengelolaan margin intermediasi dan pricing kredit yang kompetitif

ANALISIS OUTLOOK INDUSTRI PERBANKAN

Outlook industri perbankan periode 2025–2027 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, ditandai dengan proyeksi pertumbuhan kredit yang meningkat dari 9,0% menjadi 10,5% serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sejalan dari 9,5% menjadi 10,5%. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas intermediasi perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Di sisi lain, tingkat imbalan dana pihak ketiga diproyeksikan meningkat dari 4,3% menjadi 4,5%, yang mengindikasikan potensi tekanan terhadap biaya dana, sementara tingkat imbalan kredit juga meningkat secara moderat dari 10,4% menjadi 10,6%, memberikan ruang bagi perbankan untuk menjaga *margin*.

Bagi Bank Papua, kondisi ini menghadirkan peluang ekspansi kredit, khususnya pada sektor produktif dan UMKM yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Pertumbuhan DPK yang positif mendorong Bank untuk memperkuat strategi penghimpunan dana, baik dari segmen ritel maupun institusi, dengan fokus pada peningkatan dana murah (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana. Selain itu, kenaikan suku bunga menuntut Bank untuk mengelola *margin* intermediasi secara lebih optimal melalui strategi pricing kredit yang kompetitif dan selektif.

Ke depan, Bank Papua akan mengarahkan strategi pada penguatan kualitas pertumbuhan kredit, peningkatan basis dana murah, serta optimalisasi digitalisasi layanan untuk memperluas akses nasabah. Dengan pendekatan ini, Bank diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan manajemen risiko di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif.

BANKING INDUSTRY OUTLOOK ANALYSIS

The banking industry outlook for the 2025–2027 period indicates a positive and sustainable growth trend, reflected in projected credit growth increasing from 9.0% to 10.5% and Third-Party Funds (DPK) growth rising in tandem from 9.5% to 10.5%. This condition signals stronger intermediation activities and sustained public confidence in the banking sector. On the other hand, the cost of funds is expected to face upward pressure, as deposit rates are projected to increase from 4.3% to 4.5%, while lending rates are also projected to rise moderately from 10.4% to 10.6%, providing room for banks to maintain margins.

For Bank Papua, this environment presents opportunities for credit expansion, particularly in productive sectors and MSMEs, which are key drivers of the regional economy. The positive growth in DPK encourages the Bank to strengthen its funding strategy across both retail and institutional segments, with a focus on increasing low-cost funds (CASA) to maintain funding efficiency. In addition, rising interest rates require the Bank to manage intermediation margins more effectively through competitive and selective loan pricing strategies.

Going forward, Bank Papua will focus its strategy on strengthening the quality of credit growth, expanding its low-cost funding base, and optimizing service digitalization to broaden customer access. Through this approach, the Bank is expected to maintain a balance between growth, profitability, and risk management amid an increasingly competitive banking industry.



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

Pada tahun 2025, Bank Papua tidak mengalami realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sehingga informasi tidak disajikan.

In 2025, Bank Papua did not realize any utilization of proceeds from a public offering; therefore, no information is presented.



Pencapaian Target dan Target Kedepan

Achievement of Targets and Future Targets

PENCAPAIAN TARGET

Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, struktur modal, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

Perbandingan target dan realisasi keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut

Kinerja Keuangan (Rp-juta)	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Pencapaian Target Tahun 2025 (%)	Financial Performance (Rp Million)
Jumlah Aset	33.752.396	34.343.340	101,75%	Total Assets
Penyaluran Kredit	23.101.864	22.553.209	97,63%	Credit Distribution
Penghimpunan Dana (Dana Pihak Ketiga)	26.196.181	26.170.639	99,90%	Fund Collection (Third Party Funds)
Giro	11.368.043	8.937.779	78,62%	Demand Deposits
Tabungan	9.440.891	8.993.208	95,26%	Savings Accounts
Deposito	5.387.247	8.239.652	152,95%	Deposits
Pendapatan Bunga dan Operasional	3.922.455	3.023.804	77,09%	Interest and Operational Income
Laba setelah pajak	470.443	471.567	100,24%	Profit After Tax
Rasio-Rasio Keuangan				Financial Ratios
KPMM	24,03%	22,70%	94,47%	KPMM
ROA	1,85%	1,81%	97,84%	ROA
ROE	10,24%	10,71%	104,59%	ROE
BOPO	85,23%	79,02%	92,71%	BOPO
LDR	88,25%	86,18%	97,65%	LDR
NIM	6,42%	5,87%	91,43%	NIM
NPL Gross	2,21%	3,36%	152,04%	Gross NPL
NPL Nett	0,61%	1,76%	288,52%	Net NPL

Kinerja Bank Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang tetap solid di tengah dinamika industri perbankan. Dari sisi total aset, realisasi mencapai Rp34,34 triliun atau 101,75% dari target Rp33,75 triliun. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan yang terjaga, meskipun terdapat penyesuaian strategi ekspansi yang lebih selektif untuk menjaga kualitas aset.

Pada aspek penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), realisasi tercatat sebesar Rp26,17 triliun atau 99,90% dari target Rp26,20 triliun. Capaian ini dipengaruhi oleh penurunan dana murah, khususnya giro, di tengah persaingan suku bunga yang semakin ketat. Namun demikian, pertumbuhan deposito yang melampaui target menunjukkan keberhasilan Bank dalam menjaga likuiditas melalui strategi pricing yang kompetitif.

Sementara itu, dari sisi profitabilitas, laba setelah pajak berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar

ACHIEVEMENT OF TARGETS

A comparison between targets and realizations in terms of financial performance, capital structure, marketing, and human capital development is presented as follows.

COMPARISON OF FINANCIAL TARGETS AND REALIZATION

The comparison of financial targets and actual results for 2025 is as follows:

Bank Papua's performance throughout 2025 remained solid amid the dynamics of the banking industry. In terms of total assets, realization reached Rp34.34 trillion or 101.75% of the target of Rp33.75 trillion. This achievement reflects sustained growth, despite a more selective expansion strategy to maintain asset quality.

On the funding side, Third-Party Funds (DPK) realization amounted to Rp26.17 trillion or 99.90% of the Rp26.20 trillion target. This was influenced by a decline in low-cost funds, particularly demand deposits, amid intensifying interest rate competition. Nevertheless, deposit growth exceeding the target indicates the Bank's success in maintaining liquidity through competitive pricing strategies.

In terms of profitability, net income exceeded the target, reaching Rp471.57 billion or 100.24% of the Rp470.44



Rp471,57 miliar atau 100,24% dari target Rp470.44 miliar Setelah pajak. Kinerja ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan efisiensi biaya di tengah tekanan cost of fund.

billion target. This performance reflects effective income management and cost efficiency despite pressures from rising cost of funds.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Realisasi struktur modal Bank Papua tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup solid meskipun belum sepenuhnya memenuhi target. Modal inti (CET 1) tercatat sebesar Rp4.304.975 juta atau 93,66% dari target, sementara modal pelengkap (Tier 2) mencapai Rp2.464 juta atau 1,24%. Secara keseluruhan, total modal terealisasi sebesar Rp4.306.439 juta atau 89,83% dari target. Capaian ini mencerminkan permodalan yang tetap kuat dalam mendukung ekspansi usaha dan pengelolaan risiko.

COMPARISON OF CAPITAL STRUCTURE TARGETS AND REALIZATION

The Bank's capital structure realization in 2025 remained solid, although it did not fully meet the target. Core Capital (CET 1) amounted to Rp4,304,975 million or 93.66% of the target, while Supplementary Capital (Tier 2) reached Rp2,464 million or 1.24%. Overall, total capital realization stood at Rp4,306,439 million or 89.83% of the target. This reflects a capital position that remains strong in supporting business expansion and risk management.

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	% Pencapaian	Indicator
Modal Inti Utama (CET 1)	4.595.303	4.304.975	93,66%	Core Capital tier (CET 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	198.539	2.464	1,24	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal Inti dan Pelengkap	4.793.842	4.306.439	89,83	Total Capital

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF MARKETING TARGETS AND REALIZATION

The comparison between marketing targets and realization is presented as follows.

Uraian Target	Realisasi Pemasaran	Tujuan Program	Dampak terhadap Bisnis
Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Program Semarak Undian Tabungan Berhadiah (2 periode 2025–2026)	Meningkatkan penempatan DPK dan loyalitas nasabah	Peningkatan dana murah (CASA), stabilitas likuiditas
Penguatan penghimpunan dana ritel & institusi	Program SIMANJA, SIMPEDA, cashback, reward cabang, e-channel	Meningkatkan volume dana dan engagement nasabah	Peningkatan basis nasabah dan pertumbuhan DPK berkelanjutan
Ekspansi kredit produktif & UMKM	Penyaluran kredit UMK, KUR, PAPEDA, sektor potensial	Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan portofolio kredit	Peningkatan pendapatan bunga dan kualitas aset
Penguatan captive market Pemda & ASN	Implementasi CMS, transaksi non-tunai Pemda, kerja sama institusi	Menjaga dominasi pasar dan ekosistem keuangan daerah	Peningkatan dana pemerintah dan value chain bisnis
Digitalisasi pemasaran dan layanan	Digital marketing, WA blast, SMS blast, e-channel	Meningkatkan jangkauan pemasaran dan efisiensi biaya	Peningkatan akuisisi nasabah dan efisiensi operasional
Peningkatan kualitas SDM pemasaran	Pelatihan RM, funding officer, capacity building sektor unggulan	Meningkatkan kompetensi pemasaran dan analisis kredit	Peningkatan kualitas penyaluran kredit dan penjualan produk
Penguatan brand dan komunikasi pemasaran	Promosi ATL & BTL (media digital, event, booth, advertising)	Meningkatkan awareness dan penetrasi pasar	Peningkatan customer base dan daya saing
Strategi jemput bola & cross-selling	Aktivitas RM lapangan, komunitas bisnis, cross-selling produk	Memperluas basis nasabah dan meningkatkan penetrasi produk	Peningkatan fee based income dan loyalitas nasabah
Pengembangan ekosistem bisnis	Kerjasama dengan Pemda, BPJS, Taspen, Kementerian, UMKM	Menciptakan ekosistem transaksi terintegrasi	Peningkatan transaksi, DPK, dan kredit berkelanjutan
Efisiensi biaya pemasaran	Smart promotion, digital campaign, optimalisasi media	Menekan biaya promosi tanpa mengurangi efektivitas	Efisiensi biaya dan peningkatan profitabilitas



PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM

Uraian perbandingan target dan realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan sebagai berikut.

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	% Pencapaian	Description
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Rp Juta)	Rp33.653	Rp50.641	Rp33.653	Training & Education Expenses

COMPARISON OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TARGETS AND REALIZATION

The comparison between targets and realization of Human Capital Development is presented as follows.

TARGET KEDEPAN (PROYEKSI)

Manajemen Bank Papua telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2026, baik dari segi makro maupun mikro.

FUTURE TARGETS (PROJECTIONS)

Bank Papua's Management has prepared the Bank's Business Plan for 2026 by taking into account current economic conditions as well as economic projections for 2026, both from macroeconomic and microeconomic perspectives.

Indikator	2026		Indicator
	RAPBN	APBN	
Pertumbuhan Ekonomi (%):	5,2 – 5,8	5,4%	Economic Growth (%):
Laju Inflasi (%):	1,5 – 3,5	2,5%	Inflation Rate (%):
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$):	16.500 – 16.900	16.500	Rupiah Exchange Rate (Rp/US\$):
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%):	6,6 – 7,2	6,9	10-Year Government Bond Interest Rate (%)
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	60 – 80	70	Indonesian Crude Oil Price (US\$/Barrel)
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	605 – 620	610	Oil Lifting (thousand barrels per day)
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	953 – 1.017	984	Natural Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)

PROYEKSI KEUANGAN

Uraian proyeksi keuangan di tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

FINANCIAL PROJECTIONS

The financial projections for 2026 are presented as follows:

Kinerja Keuangan (Rp-juta)	Proyeksi 2026	Realisasi 2025 Terhadap Proyeksi 2026 (%)	Financial Performance (Rp-million)
Jumlah Aset	34.811.687	98,65%	Total Assets
Penyaluran Kredit	22.891.507	98,52%	Credit Distribution
Penghimpunan Dana Dana Pihak Ketiga (DPK)	26.586.063	98,44%	Third Party Funds (DPK)
· Giro	9.169.294	97,48%	· Demand Deposits
· Tabungan	9.085.545	98,98%	· Savings
· Deposito	8.331.224	98,90%	· Deposits
Pendapatan Bunga dan Operasional	1.070.817	282,38%	Interest and Operational Income
Laba sebelum pajak	484.156	97,40%	Profit Before Tax
Rasio-rasio Keuangan (%)			Financial Ratios (%)
KPMM	23,54%	96,43%	KPMM
ROA	1,76%	102,84%	ROA
ROE	10,45%	102,49%	ROE
BOPO	87,86%	89,94%	BOPO
LDR	86,25%	99,92%	LDR
NIM	6,18%	94,98%	NIM
NPL Gross	2,19%	153,42%	Gross NPL
NPL Netto	0,60%	293,33%	Net NPL



PROYEKSI STRUKTUR MODAL

Uraian proyeksi Struktur Modal di tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Proyeksi 2026 (Rp Juta)	Description
Modal Inti Utama (CET 1)	4.595.303	Common equity tier (CET 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	198.539	Supplementary capital (Tier 2)
Total Modal Inti dan Pelengkap	4.793.842	Total Capital

CAPITAL STRUCTURE PROJECTIONS

The projected capital structure for 2026 is presented as follows:

PROYEKSI KEBIJAKAN DEVIDEN

Uraian proyeksi kebijakan dividen tahun buku 2025 yang akan dibagikan di tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Proyeksi 2026	Description
Estimasi Laba Bersih Tahun 2025 (Rp Juta)	471.567	Estimated Net Profit for 2025 (Rp Million)
Estimasi Jumlah Dividen yang dibagi (Rp Juta)	306.518	Estimated Dividends Distributed (Rp Million)
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi Papua (Rp Juta)	74.891	Estimated Dividends Received by the Papua Provincial Government (Rp Million)
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi Papua Barat (Rp Juta)	46.165	Estimated Dividends Received by the West Papua Provincial Government (Rp Million)
Dividend Payout Ratio (%)	65%	Dividend Payout Ratio (%)

DIVIDEND POLICY PROJECTIONS

The projected dividend policy for the 2025 financial year, to be distributed in 2026, is presented as follows:

PROYEKSI PEMASARAN

Rencana pemasaran tahun 2026 sebagai berikut :

MARKETING PROJECTIONS

The marketing plan for 2026 is as follows:

Uraian Program	Strategi Pelaksanaan	Tujuan Program	Dampak terhadap Bisnis
Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Optimalisasi Funding Officer, pengelolaan pipeline cabang, program insentif kinerja	Meningkatkan DPK dan CASA	Penguatan likuiditas dan penurunan cost of fund
Program Loyalitas Nasabah	Semarak Undian Tabungan, Tabungan Rencana, reward & cashback	Meningkatkan retensi dan engagement nasabah	Stabilitas dana dan peningkatan saldo rata-rata
Penguatan Captive Market Pemda	Implementasi CMS, transaksi non-tunai, pengelolaan kas daerah	Mempertahankan dana pemerintah	Penciptaan recurring income dan value chain
Digitalisasi Pemasaran	WA blast, SMS blast, e-channel, omnichannel system	Memperluas jangkauan pasar dan efisiensi promosi	Peningkatan akuisisi nasabah dan efisiensi biaya
Ekspansi Kredit UMKM & Produktif	Integrasi KUR, PAPEDA, sektor unggulan, pendekatan pentahelix	Meningkatkan portofolio kredit produktif	Peningkatan pendapatan bunga dan kualitas kredit
Program Pembiayaan Strategis Nasional	KPR FLPP, makan bergizi gratis, sektor pertanian/perkebunan	Mendukung program pemerintah dan ekonomi daerah	Pertumbuhan kredit dan positioning strategis Bank
Pengembangan Ekosistem Bisnis	Kerjasama dengan Pemda, BUMN, BPJS, komunitas dan institusi	Menciptakan ekosistem transaksi terintegrasi	Peningkatan volume transaksi dan DPK
Peningkatan Customer Base	Segmentasi mass, affluent, dan prioritas	Memperluas basis nasabah	Peningkatan market share dan diversifikasi dana
Evaluasi & Repackage Produk	Penyempurnaan fitur produk dan redesign layanan	Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar	Peningkatan daya saing produk
Penguatan Infrastruktur Layanan	Pengembangan CMS, Contact Center, ATM, kartu chip	Meningkatkan kualitas layanan	Peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah



PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan SDM Bank Papua tahun 2026 difokuskan pada manajemen *talenta* terintegrasi, peningkatan kompetensi, dan digitalisasi pembelajaran melalui LMS. Program ini mencakup pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, serta penguatan leadership pipeline. Didukung manajemen kinerja berbasis KPI dan asesmen berkelanjutan, Bank memastikan SDM yang agile dan produktif. Strategi ini meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROJECTIONS

Bank Papua's human capital development in 2026 will focus on integrated talent management, competency enhancement, and digital learning through a Learning Management System (LMS). The program includes competency-based training, professional certifications, and strengthening the leadership pipeline. Supported by KPI-based performance management and continuous assessment, the Bank aims to ensure an agile and productive workforce. This strategy is expected to improve efficiency, enhance service quality, and strengthen organizational readiness in responding to digital transformation and sustainable business growth.

Uraian Program	Strategi Pelaksanaan	Tujuan Program	Dampak terhadap Organisasi
Manajemen Talenta Terintegrasi	Implementasi talent management mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan hingga retensi	Menyediakan SDM unggul dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas SDM dan kesiapan organisasi
Analisa Beban Kerja (Workforce Planning)	Perhitungan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja dan struktur organisasi	Optimalisasi jumlah dan distribusi pegawai	Efisiensi organisasi dan peningkatan produktivitas
Rekrutmen & Seleksi SDM	Rekrutmen melalui ODP, PKWT, magang, dan kerja sama pihak independen	Mendapatkan talenta berkualitas sesuai kebutuhan bisnis	Penguatan kompetensi dan regenerasi SDM
Program Asesmen Kompetensi	Pemetaan kompetensi (manajerial & teknis) secara berkala	Mengetahui gap kompetensi pegawai	Penempatan SDM lebih tepat dan efektif
Manajemen Kinerja Berbasis KPI	Penilaian kinerja berbasis KPI, perilaku, dan disiplin kerja	Meningkatkan kinerja individu dan organisasi	Budaya kinerja dan akuntabilitas meningkat
Pengembangan <i>Learning Management System</i> (LMS)	Implementasi pembelajaran digital (<i>e-Learning</i> , video, live training)	Meningkatkan akses dan efisiensi pelatihan	Efisiensi biaya dan peningkatan kompetensi digital
Program Pendidikan & Sertifikasi	Sertifikasi (risk management, kredit, treasury, compliance, auditor)	Meningkatkan kompetensi profesional pegawai	Peningkatan kualitas pengambilan keputusan
Pengembangan Kompetensi Teknis & Fungsional	Pelatihan bidang kredit, pemasaran, IT, audit, layanan	Meningkatkan skill sesuai fungsi kerja	Peningkatan produktivitas dan kualitas layanan
Program Leadership Development	SESPIBANK, PINCAB, MDP, ODP, NAOP	Meningkatkan kualitas kepemimpinan	Penguatan manajemen dan daya saing organisasi
Training Needs Analysis (TNA)	Penyusunan kebutuhan pelatihan berbasis hasil asesmen	Menjamin pelatihan tepat sasaran	Efektivitas program pengembangan SDM
Digital <i>Learning</i> & Knowledge Sharing	Webinar, simulasi, mobile <i>Learning</i> , knowledge transfer	Mempercepat transfer knowledge	Organisasi lebih adaptif terhadap perubahan
Penguatan Budaya Kinerja	Sosialisasi KPI, budaya perusahaan, dan disiplin kerja	Meningkatkan engagement dan kinerja pegawai	Peningkatan produktivitas dan budaya kerja

Sedangkan untuk biaya pelatihan dan pendidikan dianggarkan sebagai berikut :

Meanwhile, the budget allocation for training and education is as follows:

Uraian	Target 2026	Description
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	Rp 30.157 Juta	Training & Education Expenses



Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Dividend Policy, Announcement, and Payment

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Bank Papua mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 70 sampai dengan Pasal 73, yang mengatur mengenai penggunaan laba bersih, pembentukan cadangan wajib, serta mekanisme pembagian dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan ketentuan tersebut, laba bersih Perseroan terlebih dahulu dialokasikan untuk pembentukan cadangan wajib sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor, sebelum dilakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Penetapan besaran dividen dilakukan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan, kecukupan permodalan, rencana ekspansi usaha, serta kondisi perekonomian dan industri perbankan. Selain itu, kebijakan dividen juga memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan usaha Bank.

Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen dengan memperhatikan:

- Pencapaian kinerja keuangan Bank.
- Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang membutuhkan permodalan secara signifikan, tidak kurang dari ketentuan rasio yang ditetapkan oleh Bank dan/ atau ketentuan regulator dari waktu ke waktu.
- Tingkat Kesehatan Bank.
- Kondisi keuangan Bank.
- Ekspektasi pertumbuhan laba;
- Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank di masa depan.
- Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank.
- Keberlanjutan usaha Bank.
- Kondisi pasar.
- Kepentingan Pemegang Saham.
- Ketaatan pada peraturan yang terkait dan berlaku.
- Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah

DIVIDEND POLICY

Bank Papua's dividend policy refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, particularly Articles 70 to 73, which regulate the use of net income, the establishment of statutory reserves, and the mechanism for dividend distribution through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). Based on these provisions, the Company's net income is first allocated to statutory reserves of at least 20% of issued and paid-up capital before any dividend distribution to shareholders.

The determination of dividend amounts is decided at the AGMS by considering the Company's financial performance, capital adequacy, business expansion plans, as well as macroeconomic and banking industry conditions. In addition, the dividend policy takes into account the Company's Articles of Association and adheres to prudential principles to ensure the Bank's soundness and sustainability.

The Bank may distribute dividends by considering the following factors:

- The Bank's financial performance.
- The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) after dividend distribution and other capital-intensive investment projects, ensuring it remains above regulatory and internal thresholds.
- The Bank's soundness level.
- The Bank's financial condition.
- Earnings growth expectations.
- Future capital requirements.
- The Bank's development and growth strategy.
- Business sustainability.
- Market conditions.
- Shareholders' interests.
- Compliance with applicable laws and regulations.
- The Bank may only distribute dividends if it has positive retained earnings after fulfilling statutory reserve



memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas. Dalam hal Bank mengalami kendala sebagaimana dijelaskan pada poin tersebut di atas dan/atau mengalami kondisi kinerja keuangan yang membutuhkan perlakuan khusus maka Bank dimungkinkan:

- Mengusulkan kepada RUPS untuk menunda melakukan pembayaran dividen;
- Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui;
- Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/atau
- Menarik kembali pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal Bank mengalami permasalahan kinerja keuangan.

requirements as stipulated by the Company Law.

In the event that the Bank faces constraints as described above and/or experiences financial performance conditions requiring special treatment, the Bank may:

- Propose to the AGMS to postpone dividend payments;*
- Suspend approved dividend payments;*
- Suspend installment-based or phased dividend payments; and/or*
- Recall dividend payments from controlling shareholders if the Bank faces financial performance issues.*

PENGUMUMAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan Keputusan RUPST Bank Papua melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Tahun Pembagian Year of Distribution	Tahun Buku Dividen Dividend Financial Year	Tanggal Surat ke Pemegang Saham Date of Letter to Shareholders	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Dividend Distribution (IDR)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Ratio (%)	Jumlah saham yang berhak atas dividen (lembar) Number of shares entitled to dividends (shares)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (IDR/share)
2025	2024	20 Maret 2025	16 April 2025	271.607.864.055	60%	568.155	478.052
2024	2023	4 Maret 2024	25 Maret 2024	234.862.620.077	55%	552.155	425.356
2023	2022	2 Maret 2023	15 Maret 2023	194.418.231.542	50%	539.297	360.503

DIVIDEND ANNOUNCEMENT AND DISTRIBUTION

Based on the AGMS resolution, Bank Papua announces and distributes dividends as presented in the following table.

Table of Dividend Announcement and Distribution

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2025

Penggunaan laba tahun buku 2025 ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 27 Maret 2026 yang dibuat oleh John Michael Loi, SH, M.Kn mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

DIVIDEND ANNOUNCEMENT AND DISTRIBUTION FOR FINANCIAL YEAR 2025

The appropriation of net income for the 2025 financial year was determined based on Notarial Deed No. 46 dated March 27, 2026, drawn up by John Michael Loi, S.H., M.Kn., regarding the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN TAHUN BUKU TAHUN 2024

Penggunaan laba tahun buku 2024 ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Maryatie Simanuntak, S.H., mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

DIVIDEND ANNOUNCEMENT AND DISTRIBUTION FOR FINANCIAL YEAR 2024

The allocation of net income for financial year 2024 was determined based on Notarial Deed No. 09 dated March 20, 2025, drawn up by Maryatie Simanuntak, S.H., concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders.



Informasi Material, Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/ Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, Dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang Terjadi pada Tahun Buku

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Conflict of Interest Transactions Occurring During the Financial Year

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

INVESTASI

Pada tahun 2025, Bank Papua tidak melakukan kegiatan investasi, sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan ekspansi tidak disajikan oleh Bank Papua.

INVESTMENT

In 2025, Bank Papua did not undertake any investment activities. Therefore, information regarding the objectives, transaction value, and funding sources for such activities is not presented.

PENGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA

Pada tahun 2025, Bank Papua tidak melakukan kegiatan penggabungan/ peleburan usaha, sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan tidak disajikan oleh Bank Papua.

MERGER/CONSOLIDATION

In 2025, Bank Papua did not conduct any merger or consolidation activities. Accordingly, information regarding the objectives, transaction value, and funding sources is not presented.

EKSPANSI

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, pada tahun 2025 Bank melakukan ekspansi jaringan operasional melalui penambahan 1 kantor kas di provinsi Papua Barat Daya.

EXPANSION

In order to expand service coverage and enhance public access to banking services, in 2025 the Bank carried out operational network expansion by opening one (1) cash office in the Southwest Papua Province.



AKUISISI

Pada tahun 2025, Bank Papua tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi tidak disajikan.

DIVESTASI

Pada tahun 2025, Bank Papua tidak melakukan kegiatan divestasi sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan divestasi tidak disajikan.

RESTRUKTURISASI UTANG DAN MODAL

Pada tahun 2025, tidak terdapat kegiatan restrukturisasi utang maupun modal. Oleh karena itu, Bank Papua tidak menyajikan informasi terkait kegiatan restrukturisasi dalam hal tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan restrukturisasi.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Bank Papua melaksanakan setiap transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan maupun transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Dalam pelaksanaannya, Bank memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara wajar dengan mengikuti prinsip *arm's length*, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.

Setiap transaksi yang memenuhi kriteria sebagai transaksi material atau yang mengandung benturan kepentingan akan melalui proses evaluasi dan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini termasuk pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengungkapan yang transparan kepada pemegang saham. Jika diharuskan oleh ketentuan regulator, transaksi tersebut juga akan memerlukan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Papua menerapkan kebijakan ketat dalam pengelolaan transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, berdasarkan POJK Nomor : 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi

ACQUISITION

In 2025, Bank Papua did not undertake any acquisition activities. Therefore, information regarding the objectives, transaction value, and funding sources of such activities is not presented.

DIVESTMENT

In 2025, Bank Papua did not conduct any divestment activities. Accordingly, information regarding the objectives, transaction value, and funding sources is not presented.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

In 2025, there were no debt or capital restructuring activities. Therefore, the Bank does not present information related to restructuring activities in terms of objectives, transaction value, and funding sources.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Bank Papua conducts all transactions that may involve conflicts of interest or affiliated parties in accordance with POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. In its implementation, the Bank ensures that all transactions are carried out fairly, in accordance with the arm's length principle, transparency, and protection of shareholders' interests.

Any transaction that meets the criteria as a material transaction or involves a conflict of interest is subject to evaluation and approval processes in accordance with applicable regulations. This includes oversight by the Board of Commissioners and transparent disclosure to shareholders. Where required by regulatory provisions, such transactions must also obtain approval through the General Meeting of Shareholders (GMS).

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

Bank Papua implements strict policies in managing transactions that may give rise to conflicts of interest, in accordance with POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning



Benturan Kepentingan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pihak terafiliasi atau pihak dengan potensi benturan kepentingan dilaksanakan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan akan melalui proses evaluasi internal untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta tidak merugikan Perseroan atau pemegang saham. Selain itu, mekanisme pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan unit pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK tersebut. Bank tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi dengan pihak terafiliasi demi melindungi kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

Bank Papua melaksanakan setiap transaksi dengan pihak terafiliasi dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan menjelaskan bahwa afiliasi mencakup:

- Hubungan keluarga melalui perkawinan dan keturunan hingga derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara dua perusahaan yang memiliki satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dan pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Dengan demikian, transaksi afiliasi merujuk pada setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan yang dikendalikan dengan pihak terafiliasi, termasuk pihak terafiliasi dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. This policy aims to ensure that all transactions involving affiliated parties or potential conflicts of interest are conducted transparently, fairly, and in line with Good Corporate Governance (GCG) principles.

In practice, any transaction with potential conflicts of interest undergoes an internal evaluation process to ensure that it is conducted based on fairness and normal business practices (arm's length principle) and does not harm the Company or its shareholders. In addition, supervision is carried out by the Board of Commissioners and internal control units to ensure compliance with applicable regulations.

Throughout 2025, Bank Papua did not engage in any transactions involving conflicts of interest as defined under the relevant POJK regulations. The Bank remains committed to maintaining transparency and accountability in all transactions with affiliated parties to protect the interests of shareholders and all stakeholders.

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED OR RELATED PARTIES

Bank Papua conducts all transactions with affiliated parties in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. Under this regulation, affiliation includes:

- Family relationships through marriage or lineage up to the second degree, both horizontally and vertically;*
- Relationships between a party and its employees, directors, or commissioners;*
- Relationships between two companies that share one or more members of the Board of Directors or Board of Commissioners;*
- Relationships between a company and a party that directly or indirectly controls or is controlled by the company;*
- Relationships between two companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or*
- Relationships between a company and its major shareholders.*

Accordingly, affiliated transactions refer to any activities and/or transactions conducted by the Company or its controlled entities with affiliated parties, including affiliates of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, or controlling parties.



TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAI KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN DALAM RANGKA MENGHASILKAN PENDAPATAN USAHA DAN DIJALANKAN SECARA RUTIN, BERULANG, DAN/ATAU BERKELANJUTAN

Bank Papua selalu menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini terutama merujuk pada Pasal 8 dan Pasal 9, yang mengatur bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghasilkan pendapatan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dapat dikecualikan dari kewajiban prosedur tertentu, asalkan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.

KEWAJARAN TRANSAKSI DAN PEMENUHAN KETENTUAN TERKAIT

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank Papua telah dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Bank memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung sesuai dengan praktik bisnis yang umum serta memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Transaksi yang melibatkan pihak afiliasi maupun pihak berelasi dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis Bank, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat merugikan Perseroan maupun pemegang saham. Mekanisme pengendalian internal dan pengawasan oleh organ tata kelola diterapkan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, tidak ada transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, jika di masa mendatang terdapat transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi yang memerlukan persetujuan pemegang saham, keputusan tersebut akan diambil melalui mekanisme RUPS dengan persetujuan pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan atas transaksi tersebut, sesuai dengan ketentuan regulator.

AFFILIATED TRANSACTIONS AS ROUTINE BUSINESS ACTIVITIES

Bank Papua conducts its business activities in compliance with POJK No. 42/POJK.04/2020, particularly Articles 8 and 9, which stipulate that affiliated transactions carried out to generate revenue on a routine, recurring, and/or continuous basis may be exempted from certain procedural requirements, provided they are conducted in accordance with normal business practices.

FAIRNESS OF TRANSACTIONS AND REGULATORY COMPLIANCE

All transactions undertaken by Bank Papua are carried out in compliance with POJK No. 42/POJK.04/2020. The Bank ensures that each transaction adheres to prevailing business practices and meets the arm's length principle.

Transactions involving affiliated or related parties are conducted based on the Bank's business needs, while upholding principles of transparency, accountability, and the absence of conflicts of interest that could harm the Company or its shareholders. Internal control mechanisms and governance oversight are implemented to ensure that all transactions are conducted professionally and in accordance with applicable regulations.

Throughout 2025, there were no affiliated or related party transactions requiring approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). However, should such transactions arise in the future, any required approvals will be obtained through the GMS, with voting rights exercised only by shareholders without a conflict of interest, in accordance with regulatory provisions.



PERNYATAAN DIREKSI TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI

Direksi Bank Papua menyatakan bahwa setiap transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan melalui prosedur internal yang memadai dan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Direksi memastikan bahwa seluruh transaksi tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan praktik bisnis yang umum, dengan tetap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI

Dewan Komisaris Bank Papua bertugas mengawasi pelaksanaan transaksi afiliasi untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi yang bersifat material atau signifikan harus terlebih dahulu ditelaah oleh Komite Pemantau Risiko. Mekanisme ini merupakan bagian dari penerapan sistem pengendalian internal serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam proses tersebut, setiap transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan analisis kelayakan yang memadai dan melalui mekanisme tinjauan sesuai dengan jenis serta karakteristik transaksi. Dewan Komisaris bersama komite terkait memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan atau potensi kerugian bagi Bank. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Papua dalam menjaga integritas proses bisnis serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON AFFILIATED TRANSACTIONS

The Board of Directors of Bank Papua affirms that all affiliated and related party transactions have been conducted through adequate internal procedures and control mechanisms in compliance with applicable regulations. In their implementation, the Board ensures that such transactions are carried out transparently, accountably, and in accordance with prevailing business practices, while adhering to the arm's length principle.

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES IN AFFILIATED TRANSACTIONS

The Board of Commissioners of Bank Papua is responsible for overseeing the implementation of affiliated transactions to ensure they are conducted transparently, fairly, and in compliance with applicable regulations. Prior to obtaining approval from the Board of Commissioners, material or significant transactions with affiliated or related parties must first be reviewed by the Risk Oversight Committee. This mechanism forms part of the Bank's internal control system and Good Corporate Governance implementation.

In this process, each affiliated transaction is supported by adequate feasibility analysis and undergoes a review mechanism based on the nature and characteristics of the transaction. The Board of Commissioners, together with the relevant committees, ensures that such transactions are conducted in accordance with normal business practices and the arm's length principle, thereby preventing conflicts of interest or potential losses to the Bank. This approach reflects Bank Papua's commitment to maintaining the integrity of its business processes and ensuring compliance with POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.



TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas pelapor berdasarkan kriteria berikut:

1. Seorang individu atau anggota keluarga terdekat dianggap berelasi dengan entitas pelapor jika:
 - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. merupakan personil manajemen kunci dari entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Sebuah entitas dianggap berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. Entitas tersebut dan entitas pelapor merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama, termasuk entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya;
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain, atau merupakan anggota suatu kelompok usaha;
 - c. Kedua entitas tersebut merupakan ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga, sementara entitas lainnya merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin 1;
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam poin 1 (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas, termasuk entitas induknya; atau
 - h. Entitas atau anggota kelompok yang mana entitas tersebut menjadi bagian, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

NAMA PIHAK YANG BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

RELATED PARTY TRANSACTIONS

In conducting its business activities, the Bank enters into transactions with related parties as defined under PSAK 224 on "Related Party Disclosures." A related party is an individual or entity that has a relationship with the reporting entity based on the following criteria:

1. *An individual or close family member is considered related to the reporting entity if he/she:*
 - a. has control or joint control over the reporting entity;*
 - b. has significant influence over the reporting entity; or*
 - c. is a member of key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
2. *An entity is considered related to the reporting entity if it meets one of the following criteria:*
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group, including parent, subsidiary, and fellow subsidiary entities;*
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity, or both are members of the same group;*
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - d. One entity is a joint venture of a third entity, while the other entity is an associate of the same third entity;*
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or a related entity;*
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point 1;*
 - g. A person identified in point 1(a) has significant influence over the entity or is a member of key management personnel of the entity (or its parent); or*
 - h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

NAMES OF RELATED PARTIES AND NATURE OF RELATIONSHIPS

In the course of its business activities, the Bank conducts transactions with related parties. These transactions are carried out under terms and conditions that are comparable to those applied in transactions with third parties. The transactions are as follows:



Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi	Tujuan Transaksi
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Tanah Papua	Pemegang saham	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Beban Bunga	Penempatan dana pada Bank Papua
Karyawan Kunci	Direksi, Komisaris, Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Wakil Pemimpin Cabang Utama, dan Pemimpin Cabang	a. Pinjaman Kredit b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan c. Pendapatan bunga, dan d. Beban bunga	Penempatan dana di Bank Papua dan pemberian kredit oleh Bank Papua

REALISASI TRANSAKSI BERELASI

Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak berelasi bertujuan untuk memperlancar kegiatan bisnis. Berikut ini uraian realisasi transaksi Bank Papua dengan pihak berelasi dalam tiga tahun terakhir.

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

Bank Papua conducts transactions with related parties to support and facilitate its business activities. The following presents the realization of related party transactions carried out by Bank Papua over the past three years.

Saldo Pihak Berelasi dalam Kredit/Pinjaman yang Diberikan	TAHUN					YOY 2025-2024		Related Party Balance in Loans
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Kredit Karyawan Kunci	21.649	21.491	23.119	22.076	10.806	158	0,74%	Key Employee Loan
Kredit Pemegang Saham	462.933	429.338	584.719	849.502	1.206.142	33.595	7,82%	Shareholder Loan
Total Kredit Dari Pihak-Pihak Berelasi	484.582	450.829	607.838	871.578	1.216.948	33.753	7,49%	Total Loan From Related Parties
Total Kredit/ Pinjaman Yang Diberikan	22.553.209	21.793.933	19.589.842	18.151.862	17.598.383	759.276	3,48%	Total Loan/Loans Given
Presentase Dari Total Kredit	2,15%	2,07%	3,10%	4,80%	6,92%			Percentage of Total Loan

Saldo Pihak Berelasi dalam piutang bunga	TAHUN					YOY 2025-2024		Balance of Related Parties in Accounts Receivable
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Piutang Bunga Karyawan Kunci	7	4	4	4	3	3	75,00%	Key Employees Receivables
Piutang Bunga Pemegang saham	210	127	1.555	655	1.502	83	65,35%	Shareholders Interest Receivables
Total Piutang Bunga dari Pihak Berelasi	217	131	1.559	660	1.505	86	65,65%	Total Receivables from Related Parties
Total Piutang Bunga	58.731	55.818	49.328	38.711	39.637	2.913	5,22%	Total Interest Receivables
Presentase dari Total Piutang Bunga	0,37%	0,23%	3,16%	1,70%	3,80%			Percentage of Total Receivables



Saldo Pihak Berelasi dalam Simpanan dari Nasabah	TAHUN					YOY 2025-2024		Balance of Related Parties in
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Simpanan karyawan kunci	29.809	25.347	13.184	8.171	33.764	4.462	17,60%	Key employee deposits
Simpanan pemegang saham	885.155	2.199.072	7.201.718	7.487.666	5.528.887	(1.313.917)	-59,75%	Shareholder deposits
Total Simpanan Nasabah dari Pihak-pihak Berelasi	914.964	2.224.419	7.214.902	7.495.837	5.562.651	(1.309.455)	-58,87%	Total Customer Deposits from Related Parties
Total Simpanan	26.170.639	24.686.089	25.604.648	24.130.480	20.784.617	1.484.550	6,01%	Total deposits from customer
Persentase dari total simpanan	3,50%	9,01%	28,18%	31,06%	26,76%			Percentage of total deposits

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Bunga	TAHUN					YOY 2025-2024		Related Party Transactions in Interest Income
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Pendapatan bunga karyawan kunci	1.133	1.163	83	684	967	(30)	-2,58%	Key employee interest income
Pendapatan bunga pemegang saham	30.769	39.068	56.532	73.783	99.316	(8.299)	-21,24%	Shareholder interest income
Total Pendapatan Bunga dari Pihak-pihak Berelasi	31.902	40.231	56.615	74.467	100.283	(8.329)	-20,70%	Total Interest Income from Related Parties
Total Pendapatan Bunga	2.493.930	2.306.693	2.368.910	1.931.147	1.830.501	187.237	8,12%	Total Interest Incomes
Persentase dari total pendapatan bunga	1,28%	1,74%	2,39%	3,86%	5,48%			Percentage of total interest income

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Bunga	TAHUN					YOY 2025-2024		Related Party Transactions in Interest Expense
	2025	2024	2023	2022	2021	+/-	%	
Beban bunga karyawan kunci	564	504	17	4.026	67	60	11,90%	Key employee interest expense
Beban bunga pemegang saham	19.294	24.395	100.569	61.204	76.791	(5.101)	-20,91%	Shareholder interest expense
Total Beban Bunga dari Pihak-pihak Berelasi	19.858	24.899	100.586	65.230	76.858	(5.041)	-20,25%	Total Interest Expense from Related Parties
Total Beban Bunga	670.405	312.448	475.225	350.584	375.836	357.957	114,57%	Total Interest Expense
Persentase dari total beban bunga	2,96%	7,97%	21,17%	18,61%	20,45%			Percentage of total interest expense

RUJUKAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan 38 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam

REFERENCE FOR DISCLOSURE IN THE FINANCIAL STATEMENTS

Details of related parties and the realization (value) of related party transactions are disclosed in Note 38 to the Financial Statements, as included in this Annual Report. These related party transactions represent business activities conducted to generate operating income and are



rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang muncul dari hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan persyaratan yang disepakati bersama, serta tetap mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Transaksi ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Bank Papua.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi di Bank Papua dilakukan dengan syarat dan kondisi yang setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Setiap transaksi telah melalui mekanisme penelaahan yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, termasuk analisis kelayakan dan pengawasan melalui sistem pengendalian internal Bank. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi, serta tidak ada transaksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika di masa mendatang ada transaksi yang memerlukan persetujuan pemegang saham, persetujuan tersebut akan diberikan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan atas transaksi tersebut.

PERNYATAAN DIREKSI TERKAIT TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Direksi Bank Papua menyatakan bahwa semua transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi telah melalui prosedur internal yang memadai serta mekanisme pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang umum dan memenuhi prinsip kewajaran serta kelaziman usaha (*arm's length principle*).

carried out on a routine, recurring, and/or continuous basis.

FAIRNESS AND RATIONALE OF TRANSACTIONS

In the normal course of business, Bank Papua engages in transactions with related parties arising from ownership and/or management relationships. All related party transactions are conducted based on mutually agreed policies and terms, while adhering to the arm's length principle. These transactions are intended to support the Bank's operational needs and business development.

COMPLIANCE WITH APPLICABLE REGULATIONS

Transactions with affiliated and/or related parties at Bank Papua are conducted under terms and conditions comparable to those applied in transactions with third parties. All such transactions comply with POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and are carried out in accordance with the arm's length principle.

Each transaction undergoes a review process appropriate to its nature, including feasibility analysis and oversight through the Bank's internal control system. Throughout 2025, there were no violations of laws and regulations related to affiliated and/or related party transactions, and no transactions required approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). Should such transactions arise in the future, approval will be obtained from shareholders who do not have a conflict of interest in the transaction.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Board of Directors of Bank Papua confirms that all transactions with affiliated and/or related parties have been conducted through adequate internal procedures and control mechanisms in accordance with applicable regulations. The Board also ensures that each transaction is carried out based on prevailing business practices and complies with the arm's length principle.



PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE TERKAIT TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dewan Komisaris Bank Papua bertugas mengawasi pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau pihak berelasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, setiap transaksi yang bersifat material atau signifikan terlebih dahulu diperiksa oleh Komite Pemantau Risiko.

Mekanisme ini memastikan bahwa setiap transaksi telah melalui proses review yang sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksi tersebut. Proses ini mencakup analisis kelayakan transaksi serta evaluasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, seluruh transaksi dilaksanakan secara objektif dan menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bank Papua menerapkan kebijakan pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengikuti ketentuan regulator dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti prinsip kewajaran serta kelaziman usaha (*arm's length principle*), sehingga tidak ada perlakuan istimewa dibandingkan dengan nasabah lainnya.

Proses persetujuan pinjaman untuk Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme rekomendasi berjenjang bertujuan untuk memastikan objektivitas pengambilan keputusan. Dewan Komisaris menerima rekomendasi dari Komisaris Utama, sementara Komisaris Utama memperoleh rekomendasi dari Komisaris lainnya atau Komisaris Independen. Untuk jajaran Direksi, Direktur Utama mendapatkan rekomendasi dari Komisaris, sedangkan Direktur Bidang menerima rekomendasi dari Direktur Utama. Mekanisme ini memastikan adanya pengawasan dan pengendalian internal yang memadai dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait.

Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh debitur, antara lain surat kuasa untuk melakukan penodebetan seluruh pendapatan yang

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES IN RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Board of Commissioners of Bank Papua is responsible for overseeing transactions with affiliated and/or related parties to ensure they are conducted transparently, fairly, and in compliance with applicable regulations. Prior to obtaining approval from the Board of Commissioners, any material or significant transaction must first be reviewed by the Risk Oversight Committee.

This mechanism ensures that each transaction undergoes a review process appropriate to its nature and characteristics. The process includes transaction feasibility analysis and evaluation of potential risks. Accordingly, all transactions are conducted objectively and in a manner that avoids conflicts of interest that could be detrimental to the Bank.

POLICY ON LENDING TO THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Bank Papua implements a policy on lending to members of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with regulatory requirements and prudential credit risk management principles. The provision of financing facilities to related parties is carried out in compliance with applicable regulations and adheres to the arm's length principle, ensuring that no preferential treatment is given compared to other customers.

The loan approval process for the Board of Commissioners and Board of Directors follows a tiered recommendation mechanism to ensure objectivity in decision-making. Members of the Board of Commissioners receive recommendations from the President Commissioner, while the President Commissioner obtains recommendations from other Commissioners or Independent Commissioners. For the Board of Directors, the President Director receives recommendations from the Commissioners, while Directors receive recommendations from the President Director. This mechanism ensures adequate oversight and internal control in the lending process to related parties.

In addition, there are specific requirements that must be fulfilled by borrowers, including granting authorization for the deduction of all future income for loan repayment and/



akan diterima (*future benefit*) guna pelunasan dan/atau angsuran kredit, terutama jika debitur mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau mengalami pemutusan hubungan kerja karena alasan tertentu, seperti tindakan indisipliner atau kecurangan (*fraud*). Debitur juga diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit (PAAK) atau bendahara yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan, seperti pesangon, dana pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), dan pendapatan lainnya yang menjadi hak debitur, akan disetorkan.

Dengan kebijakan ini, Bank Papua memastikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta ketentuan regulator yang berlaku.

or installments, particularly in cases where the borrower resigns voluntarily or is subject to termination due to disciplinary actions or fraud. Borrowers are also required to provide a statement from the Credit Administration and Installment Management Unit (PAAK) or the treasurer confirming that all entitlements—such as severance pay, pension funds, old-age benefits (THT), and other income—will be allocated toward loan settlement.

Through this policy, Bank Papua ensures that lending to the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted in a transparent and accountable manner, in line with Good Corporate Governance (GCG) principles and applicable regulatory requirements.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank

Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Bank's Performance

Sepanjang tahun 2025 Bank Papua melakukan kajian terhadap berbagai ketentuan yang diterbitkan regulator dan pemerintah, mempelajari dan menganalisa dampak yang mungkin ditimbulkan terkait dari perubahan ketentuan tersebut. Selama tahun 2025 terjadi beberapa peraturan perundangan yang mempengaruhi operasional perusahaan sebagai berikut:

Throughout 2025, Bank Papua reviewed various regulations issued by regulators and the government, while assessing and analyzing the potential impacts arising from such regulatory changes. During 2025, several laws and regulations affected the Company's operations, as follows:

Perubahan Aturan	Dampak	Impact
31/SEOJK.03/2025 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	SEOJK 31/2025 mempertegas tata cara pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan OJK dengan standar data yang ketat, digitalisasi penuh, dan kontrol pelaporan yang lebih terstruktur. Dampaknya, bank harus memperkuat sistem TI, meningkatkan kualitas data, memperjelas governance pelaporan, dan bersiap menghadapi pengawasan berbasis data yang lebih intensif, termasuk sanksi apabila tidak patuh.	<i>SEOJK 31/2025 strengthens reporting procedures for Conventional Commercial Banks through the OJK Reporting System, emphasizing strict data standards, full digitalization, and more structured reporting controls. As a result, banks are required to enhance IT systems, improve data quality, strengthen reporting governance, and prepare for more intensive data-driven supervision, including potential sanctions for non-compliance.</i>
26/SEOJK.03/2025 tentang Proses Asesmen Kecukupan Likuiditas Secara Internal (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) Bagi Bank Umum	SEOJK 26/2025 memperkuat penerapan ILAAP dengan menetapkan tata cara, kerangka kerja, dan kewajiban asesmen likuiditas secara internal yang komprehensif. Bank harus mampu menilai kecukupan likuiditas dalam kondisi normal maupun stress, menyusun CFP, melakukan stress testing, serta memastikan governance likuiditas yang kuat. Dampaknya, bank perlu meningkatkan sistem ALM, memperkuat fungsi risiko dan treasury, serta memastikan akuntabilitas manajemen dalam menjaga ketahanan likuiditas.	<i>SEOJK 26/2025 reinforces the implementation of the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) by establishing comprehensive procedures, frameworks, and internal liquidity assessment requirements. Banks are required to assess liquidity adequacy under both normal and stress conditions, develop Contingency Funding Plans (CFP), conduct stress testing, and ensure strong liquidity governance. The impact requires banks to strengthen Asset and Liability Management (ALM) systems, enhance risk and treasury functions, and ensure management accountability in maintaining liquidity resilience.</i>



Perubahan Aturan	Dampak	Impact
24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum	POJK 24 Tahun 2025 memperbarui dan memperketat tata cara pembukaan, pengelolaan, dan penutupan rekening di Bank Umum untuk memastikan kehati-hatian, keamanan dana, dan perlindungan konsumen. Bank harus memperkuat KYC, AML-CFT, sistem TI, kontrol internal, serta pemantauan rekening, termasuk rekening digital. Dampaknya, bank menghadapi peningkatan beban kepatuhan, kebutuhan investasi teknologi, dan kontrol yang lebih kuat, namun juga memperoleh efisiensi dan kualitas tata kelola rekening yang lebih baik dalam jangka panjang.	<i>POJK No. 24 of 2025 updates and tightens regulations on account opening, management, and closure in Commercial Banks to ensure prudence, fund security, and consumer protection. Banks must strengthen KYC, AML-CFT frameworks, IT systems, internal controls, and account monitoring, including digital accounts. The impact includes increased compliance burden, higher technology investment needs, and stronger controls, while also improving efficiency and account governance quality in the long term.</i>
19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	POJK 19 Tahun 2025 mewajibkan bank memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM melalui kebijakan yang lebih inklusif, skema pembiayaan yang fleksibel, digitalisasi proses kredit, dan penetapan biaya yang wajar. Regulasi ini mempercepat proses bisnis pembiayaan UMKM, mendorong kolaborasi dengan fintech dan penjaminan, serta memperkuat literasi UMKM. Dampaknya, bank harus memperkuat governance, risk management, digital scoring, kapasitas organisasi, dan integrasi teknologi, sekaligus menghadapi peluang ekspansi besar di segmen UMKM.	<i>POJK No. 19 of 2025 requires banks to enhance access to financing for MSMEs through more inclusive policies, flexible financing schemes, digitalization of credit processes, and reasonable pricing. This regulation accelerates MSME financing processes, encourages collaboration with fintech and guarantee institutions, and strengthens MSME literacy. As a result, banks must improve governance, risk management, digital scoring capabilities, organizational capacity, and technology integration, while also capturing significant growth opportunities in the MSME segment.</i>
22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	POJK 22/2025 mengharuskan bank melakukan seluruh pelaporan secara digital, terstandar, dan tepat waktu melalui Sistem Pelaporan OJK. Simplifikasi laporan, penunjukan PIC, validasi otomatis, dan standar kualitas data membuat pelaporan menjadi lebih akurat dan efisien. Dampaknya, bank harus memperkuat sistem TI, governance data, kapasitas kepatuhan, serta menghadapi pengawasan yang lebih intensif—namun dalam jangka panjang pelaporan menjadi lebih efektif dan mendukung tata kelola yang lebih baik.	<i>POJK No. 22 of 2025 mandates fully digital, standardized, and timely reporting through the OJK Reporting System. Report simplification, designation of responsible officers (PIC), automated validation, and data quality standards enhance reporting accuracy and efficiency. Consequently, banks must strengthen IT systems, data governance, and compliance capacity, while facing more intensive supervision. In the long term, this supports more effective reporting and stronger governance.</i>
14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	SEOJK 14/2025 menetapkan standar GCG modern berbasis efektivitas dengan 16 pilar tata kelola, memperkuat peran Direksi/Komisaris, memastikan integrasi risiko—ESG—strategi, serta menyediakan pedoman self-assessment yang terukur dan ketat. Bank harus melakukan transformasi governance secara menyeluruh, meningkatkan kapasitas board & komite, memperkuat risk & compliance, menyesuaikan RBB, memperkuat ESG governance, dan bersiap menghadapi risiko sanksi bila tidak patuh.	<i>SEOJK 14/2025 establishes modern GCG standards based on effectiveness through 16 governance pillars, strengthening the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners, ensuring integration of risk, ESG, and strategy, and providing measurable and stringent self-assessment guidelines.</i>
7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian	POJK 7 Tahun 2025 mewajibkan Bank Umum yang menjadi Kustodian untuk menyampaikan laporan bulanan, tahunan, dan insidental secara digital melalui Sistem Pelaporan OJK. Regulasi ini memperketat akurasi, ketepatan waktu, dan kualitas data, sekaligus mengganti berbagai aturan lama agar pelaporan kustodian lebih terintegrasi dan efektif. Dampaknya, bank harus memperkuat governance pelaporan, meningkatkan sistem TI, memperkuat kontrol internal, serta siap menghadapi sanksi yang lebih tegas apabila tidak patuh.	<i>Banks are required to undertake comprehensive governance transformation, enhance board and committee capacity, strengthen risk and compliance functions, align the Business Plan (RBB), reinforce ESG governance, and prepare for potential regulatory sanctions in case of non-compliance.</i>



Informasi Kelangsungan Usaha

Going Concern Information

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Kelangsungan usaha Bank Papua dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal dan internal yang terus berkembang, sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat berbasis prinsip prudence. Dari sisi eksternal, perkembangan ekonomi global dan nasional, arah kebijakan moneter, *volatilitas* pasar keuangan, serta perubahan regulasi sektor jasa keuangan berpotensi memengaruhi stabilitas industri perbankan. Selain itu, percepatan transformasi digital, disrupsi teknologi finansial, peningkatan intensitas kompetisi antar lembaga keuangan, serta perubahan preferensi nasabah menuju layanan berbasis digital turut membentuk lanskap industri yang semakin kompleks dan kompetitif.

Dari sisi internal, faktor yang berpotensi memengaruhi kesinambungan usaha meliputi kecukupan permodalan (*Capital adequacy*), kualitas aset produktif, efektivitas pengelolaan likuiditas, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi bisnis. Risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, serta risiko teknologi informasi dan keamanan siber menjadi area yang terus dimonitor secara berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank Papua secara konsisten memperkuat ketahanan organisasi (*resilience*) melalui pengelolaan portofolio kredit yang *prudent*, diversifikasi sumber pendanaan, penguatan struktur permodalan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan usaha.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen secara berkala melakukan penilaian komprehensif terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha melalui penerapan kerangka *risk Governance* yang terintegrasi serta

FACTORS POTENTIALLY AFFECTING GOING CONCERN

The going concern of Bank Papua is influenced by evolving external and internal dynamics, requiring prudent and disciplined management. From an external perspective, global and domestic economic developments, monetary policy direction, financial market volatility, and changes in financial sector regulations may affect banking industry stability. In addition, accelerated digital transformation, fintech disruption, intensifying competition among financial institutions, and shifting customer preferences toward digital-based services continue to reshape an increasingly complex and competitive landscape.

From an internal perspective, factors that may affect business sustainability include capital adequacy, asset quality, liquidity management effectiveness, and the readiness of technology infrastructure and human capital to support business transformation. Credit risk, operational risk, liquidity risk, as well as information technology and cybersecurity risks remain key areas under continuous monitoring. In addressing these challenges, Bank Papua consistently strengthens its organizational resilience through prudent credit portfolio management, diversification of funding sources, capital strengthening, and enhancement of governance and risk management as key foundations to maintain stability and business continuity.

MANAGEMENT'S ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING GOING CONCERN

Management periodically conducts comprehensive assessments of factors that may affect going concern through the implementation of an integrated risk governance framework and strengthened Good Corporate Governance



penguatan *Good Corporate Governance* (GCG). Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, perkembangan industri perbankan, serta kinerja operasional dan keuangan Bank secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi selama periode pelaporan, manajemen menilai bahwa fundamental Bank Papua tetap berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki tingkat ketahanan yang baik. Hal ini tercermin dari struktur permodalan yang kuat dengan tingkat *Capital adequacy* yang memadai, kualitas aset yang terjaga melalui pengendalian NPL yang *prudent*, serta pengelolaan likuiditas yang disiplin dan terukur. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis, penguatan fungsi pengawasan oleh organ tata kelola, serta implementasi manajemen risiko yang efektif memastikan bahwa potensi risiko dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan dikendalikan secara tepat waktu. Didukung oleh akselerasi transformasi digital, inovasi produk dan layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Bank Papua memiliki kapasitas yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Dalam melakukan penilaian kelangsungan usaha, manajemen menggunakan sejumlah asumsi utama yang didasarkan pada proyeksi kondisi makroekonomi, arah kebijakan regulator, serta strategi bisnis Bank dalam jangka menengah. Stabilitas perekonomian nasional diperkirakan tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2%–5,8%, inflasi 1,5%–3,5%, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. Di sisi pasar keuangan, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,6%–7,2%, sementara harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US\$60–US\$80 per barel.

Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit nasional diperkirakan berada pada kisaran 8%–11% dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sekitar 7,5%, yang mencerminkan masih terbukanya ruang ekspansi intermediasi perbankan. Dengan mengacu pada asumsi tersebut serta penerapan prinsip *prudence*, penguatan *Capital adequacy*, dan kerangka *risk Governance* yang disiplin, manajemen meyakini bahwa Bank Papua memiliki tingkat *resilience* yang memadai untuk menjaga kesinambungan usaha serta menciptakan *sustainable growth* bagi seluruh pemangku kepentingan.

(GCG). This assessment considers macroeconomic conditions, banking industry developments, and the Bank's overall operational and financial performance.

Based on the evaluation during the reporting period, management concludes that Bank Papua's fundamentals remain sound and demonstrate strong resilience. This is reflected in a solid capital structure with adequate capital adequacy, maintained asset quality through prudent NPL management, and disciplined liquidity management. Furthermore, the application of prudential principles in all business activities, strengthened oversight by governance organs, and effective risk management ensure that potential risks are identified, mitigated, and controlled in a timely manner. Supported by accelerated digital transformation, product and service innovation, and enhanced human capital capabilities, Bank Papua possesses sufficient capacity to sustain its business continuity while driving sustainable growth.

KEY ASSUMPTIONS USED IN MANAGEMENT'S ASSESSMENT

In assessing going concern, management applies key assumptions based on macroeconomic projections, regulatory policy direction, and the Bank's medium-term business strategy. The national economy is expected to remain stable, with economic growth projected in the range of 5.2%–5.8%, inflation at 1.5%–3.5%, and the rupiah exchange rate at approximately Rp16,500–Rp16,900 per US dollar.

In financial markets, the yield on 10-year government bonds is projected to range between 6.6%–7.2%, while Indonesia's crude oil price is expected to be between US\$60–US\$80 per barrel.

In the banking sector, national credit growth is projected at 8%–11%, with Third-Party Funds (DPK) growth around 7.5%, indicating continued opportunities for banking intermediation expansion. Based on these assumptions, along with the application of prudential principles, strengthened capital adequacy, and disciplined risk governance, management believes that Bank Papua has sufficient resilience to maintain business continuity and deliver sustainable growth for all stakeholders.



Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku, Bank Papua senantiasa memantau penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Standar akuntansi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan Bank guna memastikan bahwa penyajian laporan keuangan dilakukan secara transparan, andal, serta sesuai dengan praktik pelaporan keuangan yang berlaku.

Beberapa standar akuntansi baru yang relevan bagi industri perbankan telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025. Standar tersebut antara lain :

- amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan serta amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan – Pengungkapan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan yang akan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2026.
- Selain itu, PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan, yang akan menggantikan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan, direncanakan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2027.

Sehubungan dengan penerapan standar akuntansi tersebut, Bank Papua saat ini masih melakukan evaluasi secara komprehensif untuk menilai potensi dampak terhadap kebijakan akuntansi, penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan informasi keuangan Bank. Hingga saat ini, manajemen belum menetapkan dampak material dari penerapan standar tersebut terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan Bank. Bank berkomitmen untuk memastikan bahwa penerapan standar akuntansi baru akan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

In maintaining alignment with the development of applicable financial accounting standards, Bank Papua continuously monitors the issuance of Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI). These standards serve as the basis for the preparation of the Bank's financial statements to ensure transparency, reliability, and compliance with prevailing financial reporting practices.

Several new accounting standards relevant to the banking industry have been issued but are not yet effective for the financial statements as of December 31, 2025. These include:

- *Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments – Disclosures, particularly related to the classification and measurement of financial instruments, which will become effective on or after January 1, 2026.*
- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements, which will replace PSAK 201: Presentation of Financial Statements, and is planned to become effective on or after January 1, 2027.*

In relation to the implementation of these accounting standards, Bank Papua is currently conducting a comprehensive evaluation to assess their potential impact on accounting policies, financial statement presentation, and financial disclosures. As of now, management has not identified any material impact from the adoption of these standards on the Bank's financial position or financial performance. The Bank remains committed to ensuring timely adoption in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.



Tingkat Kesehatan Bank

Bank Soundness Rating

KETENTUAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) merupakan hasil penilaian kondisi Bank berdasarkan pendekatan *risk based bank rating* yang menilai risiko dan kinerja Bank secara komprehensif. Penilaian tingkat kesehatan ini menjadi sarana bagi Bank Papua untuk melakukan identifikasi dini atas potensi permasalahan, menyusun dan melaksanakan langkah perbaikan (*corrective action*), serta menetapkan strategi bisnis yang tepat dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Bank Papua melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank terhadap risiko dan kinerja Bank dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tersebut dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada regulator setiap semester pada periode Juni dan Desember.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan empat faktor utama, yaitu:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian profil risiko dilakukan dengan menilai tingkat risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko Bank terhadap **8 (delapan) jenis risiko**, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

2. Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Penilaian tata kelola perusahaan merupakan evaluasi terhadap kualitas manajemen Bank Papua dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan Bank.

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja profitabilitas Bank, sumber-sumber pendapatan yang mendukung rentabilitas, kesinambungan perolehan laba, serta efektivitas manajemen dalam mengelola tingkat keuntungan Bank.

REGULATORY FRAMEWORK FOR BANK SOUNDNESS RATING

The Bank Soundness Rating (BSR) represents an assessment of the Bank's condition based on the Risk-Based Bank Rating (RBBR) approach, which evaluates risks and performance in a comprehensive manner. This assessment serves as a tool for Bank Papua to identify potential issues at an early stage, formulate and implement corrective actions, and determine appropriate business strategies to support business sustainability.

Bank Papua conducts a self-assessment of its Bank Soundness Rating by referring to the Financial Services Authority (OJK) regulations, namely POJK No. 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness dated January 27, 2016, and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness. The assessment is carried out periodically and reported to the regulator on a semi-annual basis, covering the June and December periods.

The Bank Soundness Rating is assessed based on four key factors:

1. Risk Profile

The risk profile assessment evaluates the level of inherent risk and the quality of risk management implementation across eight (8) types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, strategic risk, and compliance risk.

2. Good Corporate Governance (GCG)

The governance assessment evaluates the quality of Bank Papua's management in implementing GCG principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in managing the Bank.

3. Earnings

The earnings assessment evaluates the Bank's profitability performance, sources of income supporting earnings, sustainability of profit generation, and management effectiveness in maintaining profitability levels.



4. Permodalan (Capital)

Penilaian faktor permodalan mencakup evaluasi terhadap kecukupan modal Bank dalam mendukung kegiatan usaha serta kemampuan modal dalam menyerap potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis Bank.

Hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan Bank tercermin dalam Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan mempertimbangkan tingkat materialitas serta signifikansi masing-masing faktor penilaian. Peringkat komposit tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- Peringkat Komposit 1 (PK-1)** mencerminkan kondisi Bank yang secara umum **Sangat Sehat**.
- Peringkat Komposit 2 (PK-2)** mencerminkan kondisi Bank yang secara umum **Sehat**.
- Peringkat Komposit 3 (PK-3)** mencerminkan kondisi Bank yang secara umum **Cukup Sehat**.
- Peringkat Komposit 4 (PK-4)** mencerminkan kondisi Bank yang secara umum **Kurang Sehat**.
- Peringkat Komposit 5 (PK-5)** mencerminkan kondisi Bank yang secara umum **Tidak Sehat**.

Melalui penerapan kerangka penilaian tersebut, Bank Papua berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas kinerja, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan guna mempertahankan tingkat kesehatan Bank yang optimal dan berkelanjutan.

TINGKAT KESEHATAN BANK PAPUA

Penilaian profil risiko tahun 2025 sebagai berikut:

No	Faktor	Peringkat / Rating	
		Juni	Desember
1	Risk Profile	3	2
2	GCG – Tata Kelola	2	2
3	Capital – Permodalan	2	2
4	Earnings – Rentabilitas	2	1
Nilai Komposit		2 - Sehat	2 - Sehat

Berdasarkan hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Papua per Desember 2025 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

1. Profil Risiko (Risk Profile)

Penilaian terhadap profil risiko Bank Papua menunjukkan peringkat **2 (Low to Moderate)**. Hasil ini mencerminkan

4. Capital

The capital assessment evaluates the adequacy of the Bank's capital in supporting business activities and its capacity to absorb potential risks arising from business operations.

The final result of the Bank Soundness Rating is reflected in the Composite Rating (CR), determined through a comprehensive and structured analysis by considering the materiality and significance of each assessment factor. The composite ratings are classified as follows:

- Composite Rating 1 (CR-1):** Reflects a "Very Sound" condition.
- Composite Rating 2 (CR-2):** Reflects a "Sound" condition.
- Composite Rating 3 (CR-3):** Reflects a "Fairly Sound" condition.
- Composite Rating 4 (CR-4):** Reflects a "Less Sound" condition.
- Composite Rating 5 (CR-5):** Reflects an "Unsound" condition.

Through the implementation of this assessment framework, Bank Papua is committed to maintaining performance stability, strengthening risk management, and enhancing corporate governance quality to sustain an optimal and sustainable Bank Soundness Rating.

BANK PAPUA'S SOUNDNESS RATING

The 2025 risk profile assessment is as follows:

Based on the self-assessment results of Bank Papua's soundness level as of December 2025, conducted in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations using the Risk-Based Bank Rating (RBBR) approach, the assessment results are as follows:

1. Risk Profile

The assessment of Bank Papua's risk profile resulted in a rating of **2 (Low to Moderate)**. This indicates that



bahwa tingkat risiko inheren yang dihadapi Bank berada pada kategori rendah hingga moderat dan didukung oleh penerapan manajemen risiko yang memadai. Bank mampu mengelola berbagai jenis risiko utama secara efektif melalui penerapan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi serta penguatan fungsi pengendalian internal.

2. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Penilaian atas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada akhir tahun 2025 memperoleh peringkat 2 (Baik). Peringkat ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah dijalankan secara konsisten dalam seluruh aktivitas usaha Bank Papua.

3. Permodalan (Capital)

Penilaian terhadap faktor permodalan memperoleh peringkat 2 (Memadai) yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal Bank berada pada level yang kuat untuk mendukung kegiatan usaha serta mampu menyerap potensi risiko yang timbul dari aktivitas operasional Bank.

4. Rentabilitas (Earnings)

Faktor rentabilitas memperoleh peringkat 1 (Sangat sehat) yang mencerminkan bahwa Bank Papua memiliki kinerja profitabilitas yang sangat sehat. Kondisi ini menunjukkan kemampuan Bank dalam menghasilkan laba secara optimal, didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga dan non-bunga yang kuat, serta pengelolaan biaya yang efisien. Rasio-rasio utama seperti ROA, NIM, dan BOPO berada pada level yang sangat baik dan mampu menopang keberlanjutan kinerja keuangan.

the inherent risks faced by the Bank are within a low to moderate category and are supported by adequate risk management implementation. The Bank is able to effectively manage key risk types through the application of integrated risk management policies and the strengthening of internal control functions.

2. Good Corporate Governance (GCG)

The assessment of GCG implementation at the end of 2025 resulted in a rating of 2 (Good). This rating reflects the consistent application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness across all business activities of Bank Papua.

3. Capital

The capital factor was rated 2 (Adequate), indicating that the Bank's capital adequacy is at a strong level to support its business activities and is sufficient to absorb potential risks arising from its operations.

4. Earnings

The earnings factor achieved a rating of 1 (Very Sound), reflecting that Bank Papua demonstrates very strong profitability performance. This condition indicates the Bank's ability to generate optimal profits, supported by solid growth in both interest and non-interest income, as well as efficient cost management. Key ratios such as ROA, NIM, and BOPO are at very strong levels and support the sustainability of financial performance.

Berdasarkan hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Papua per Desember 2025, Bank memperoleh Peringkat Komposit 2 (Sehat). Peringkat ini mencerminkan bahwa secara umum kondisi Bank berada dalam kategori sehat, didukung oleh profil risiko yang terkendali, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, tingkat rentabilitas yang memadai, serta kecukupan permodalan yang kuat. Dengan kondisi tersebut, Bank Papua dinilai memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi dinamika perubahan kondisi bisnis dan potensi risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Bank juga dinilai mampu menjaga kesinambungan kinerja operasional serta mempertahankan stabilitas keuangan secara berkelanjutan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Based on the overall self-assessment results as of December 2025, Bank Papua obtained a Composite Rating of 2 (Sound). This rating indicates that, in general, the Bank is in a sound condition, supported by a well-controlled risk profile, good corporate governance implementation, adequate profitability, and strong capital adequacy. With these conditions, Bank Papua is considered to have sufficient capacity to withstand changes in business conditions and potential risks arising from its operations. The Bank is also deemed capable of maintaining operational performance continuity and sustaining financial stability through effective risk management practices and sound corporate governance.



Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Governance Framework, Management, and Control of Taxation Aspects

PENDEKATAN TERHADAP PAJAK

Bank Papua memandang pajak sebagai bagian integral dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sebagai lembaga keuangan yang berperan strategis dalam pembangunan regional, Bank berkomitmen untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan perpajakan Bank dilandaskan pada prinsip kepatuhan (compliance), kehati-hatian (prudence), serta transparansi dalam setiap aktivitas bisnis yang memiliki implikasi perpajakan. Seluruh kewajiban perpajakan dihitung, disetorkan, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta regulasi pelaksana lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam implementasinya, kebijakan perpajakan Bank Papua juga diselaraskan dengan strategi bisnis dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Bank memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan implikasi perpajakan secara wajar dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Melalui pendekatan tersebut, Bank tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat reputasi sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

TATA KELOLA, PENGENDALIAN, DAN MANAJEMEN RISIKO PERPAJAKAN

Pengelolaan aspek perpajakan di Bank Papua dilaksanakan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian internal. Struktur pengelolaan ini memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan Bank dikelola secara

TAX APPROACH

Bank Papua views taxation as an integral part of its contribution to national and regional economic development. As a financial institution with a strategic role in regional development, the Bank is committed to fulfilling its tax obligations in a transparent, accountable manner and in compliance with applicable laws and regulations in Indonesia.

The Bank's tax approach is based on the principles of compliance, prudence, and transparency in all business activities with tax implications. All tax obligations are calculated, paid, and reported in accordance with prevailing regulations, including the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP), Income Tax Law (PPh), Value Added Tax Law (VAT), and other implementing regulations issued by the Directorate General of Taxes.

In its implementation, Bank Papua's tax policy is aligned with its business strategy and Good Corporate Governance (GCG) principles. The Bank ensures that all business decisions consider tax implications appropriately and refrains from engaging in aggressive tax avoidance practices. Through this approach, the Bank not only ensures regulatory compliance but also strengthens its reputation as a responsible and trustworthy financial institution.

TAX GOVERNANCE, CONTROL, AND RISK MANAGEMENT

The management of taxation aspects at Bank Papua is carried out within a governance framework integrated with risk management, compliance, and internal control systems. This structure ensures that all tax obligations are



efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara organisasi, pengelolaan kewajiban perpajakan berada pada fungsi keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab atas proses perhitungan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban perpajakan Bank. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan unit kerja manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas perpajakan berada dalam koridor regulasi yang berlaku.

Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan implementasi kebijakan perpajakan Bank berjalan secara efektif, sementara Dewan Komisaris melalui fungsi pengawasan serta dukungan Komite Audit melakukan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal, termasuk kepatuhan Bank terhadap ketentuan perpajakan.

Dalam kerangka manajemen risiko, potensi risiko perpajakan diklasifikasikan sebagai bagian dari risiko kepatuhan (*compliance risk*). Oleh karena itu, Bank menerapkan berbagai mekanisme pengendalian untuk memitigasi potensi risiko tersebut, antara lain melalui penerapan prosedur operasional standar perpajakan, proses review internal atas kewajiban perpajakan, pemantauan perubahan regulasi perpajakan, serta evaluasi berkala oleh fungsi audit internal. Melalui mekanisme ini, Bank memastikan bahwa pengelolaan kewajiban perpajakan dilaksanakan secara *prudent*, akurat, dan tepat waktu.

managed effectively, measurably, and in accordance with applicable regulations.

Organizationally, tax management is handled by the finance and accounting functions, which are responsible for calculating, remitting, and reporting the Bank's tax obligations. These functions are performed in coordination with the risk management and compliance units to ensure that all tax-related activities remain within the regulatory framework.

The Board of Directors holds primary responsibility for ensuring the effective implementation of the Bank's tax policies, while the Board of Commissioners, through its oversight function and supported by the Audit Committee, monitors the effectiveness of internal controls, including compliance with tax regulations.

Within the risk management framework, tax risk is classified as part of compliance risk. Accordingly, the Bank implements various control mechanisms to mitigate such risks, including the application of standard operating procedures for taxation, internal reviews of tax obligations, monitoring of regulatory changes, and periodic evaluations by the internal audit function. Through these measures, the Bank ensures that tax obligations are managed prudently, accurately, and in a timely manner.



KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGELOLAAN ISU PERPAJAKAN

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Bank Papua menjalin hubungan yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya otoritas perpajakan, regulator sektor jasa keuangan, auditor eksternal, serta pemegang saham. Hubungan tersebut dilaksanakan dalam kerangka transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

Bank secara aktif memantau perkembangan kebijakan dan regulasi perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak. Setiap perubahan ketentuan perpajakan yang relevan segera ditindaklanjuti melalui penyesuaian kebijakan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani fungsi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Bank senantiasa berada dalam posisi yang patuh terhadap regulasi serta mampu mengelola potensi risiko perpajakan secara efektif.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Bank Papua juga mengungkapkan informasi perpajakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit serta dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Pengungkapan ini mencerminkan kontribusi Bank terhadap penerimaan negara sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung terciptanya sistem perpajakan yang transparan dan berkelanjutan.

Melalui penerapan kerangka governansi perpajakan yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko dan kepatuhan, Bank Papua memastikan bahwa pengelolaan kewajiban perpajakan tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND TAX ISSUE MANAGEMENT

In fulfilling its tax obligations, Bank Papua maintains constructive relationships with various stakeholders, particularly tax authorities, financial services regulators, external auditors, and shareholders. These relationships are conducted within a framework of transparency, regulatory compliance, and a commitment to maintaining the integrity of the taxation system.

The Bank actively monitors developments in tax policies and regulations issued by the government and the Directorate General of Taxes. Any relevant changes are promptly followed up through adjustments to internal policies and the enhancement of human capital capabilities responsible for tax functions. This ensures that the Bank remains compliant with regulations and is able to effectively manage potential tax risks.

As part of its commitment to transparency and accountability, Bank Papua discloses tax-related information in its audited financial statements, as well as in its annual and sustainability reports in accordance with applicable reporting standards. This disclosure reflects the Bank's contribution to state revenue and demonstrates its commitment to supporting a transparent and sustainable tax system.

Through the implementation of a tax governance framework integrated with risk management and compliance systems, Bank Papua ensures that tax obligations are not only fulfilled in accordance with applicable laws and regulations but also contribute to business sustainability and long-term value creation for all stakeholders.



KONTRIBUSI PAJAK BANK PAPUA TERHADAP NEGARA

Sebagai lembaga keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, Bank Papua berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan tersebut mencerminkan kontribusi nyata Bank terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan daerah.

Kewajiban perpajakan yang dipenuhi oleh Bank Papua meliputi berbagai jenis pajak yang timbul dari aktivitas operasional Bank, antara lain Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berbagai kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BANK PAPUA'S TAX CONTRIBUTION TO THE STATE

As a regional financial institution with a strategic role in supporting economic development, Bank Papua is committed to fulfilling its tax obligations in an orderly, transparent manner and in compliance with applicable laws and regulations. Such tax compliance reflects the Bank's tangible contribution to state revenue and supports national and regional development financing.

The Bank's tax obligations include various types of taxes arising from its operational activities, including Corporate Income Tax (CIT), Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4(2), Value Added Tax (VAT), as well as other withholding and collection obligations in accordance with prevailing regulations.

Tabel Kewajiban Pajak Bank Papua Tahun 2023 - 2025 (Rp Juta)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	YOY 2025-2024		Remark
						+/-	%	
Utang Pajak								Tax Payable
PPH 29	-	14.992	9.384	36.723	15.637	(14.992)	-100,00%	PPH 29
PPN Keluaran	19	151	225	217	3.301	(132)	-87,42%	VAT Output
PPH pasal 21	5	157	10.917	3.411	3.166	(152)	-96,82%	PPH article 21
PPH lainnya	10.011	1.911	3.300	7.386	4.006	8.100	423,86%	Other PPH
Jumlah	10.035	17.211	23.826	47.737	26.110	(7.176)	-41,69%	Total
Beban Pajak Penghasilan - Bersih								Income Tax Expense - Net
Pajak kini	(123.085)	(142.932)	(121.723)	(121.968)	(102.183)	19.847	-13,89%	Current taxes
Pajak tangguhan	(10.607)	12.546	3.139	4.985	7.424	(23.153)	-184,55%	Deferred taxes
Jumlah	(133.692)	(130.386)	(118.584)	(116.983)	(94.759)	(3.306)	2,54%	Total

Table of Bank Papua's Tax Obligations for 2023–2025 (in million Rupiah)



Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Response to Changes in Monetary Policy Direction

Perkembangan kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi dinamika industri perbankan nasional. Kebijakan moneter yang adaptif tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Stabilitas makroekonomi tersebut memberikan fondasi penting bagi sektor perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

Sepanjang tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026, kebijakan moneter Bank Indonesia cenderung bersifat akomodatif namun tetap berhati-hati, dengan mempertimbangkan stabilitas inflasi dan kondisi perekonomian global. Tingkat suku bunga kebijakan BI7DRR berada pada kisaran 4,75%, sementara inflasi nasional tetap terjaga dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Kondisi ini memberikan ruang bagi sektor perbankan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan kredit sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Response to Changes in Monetary Policy Direction

Monetary policy developments implemented by Bank Indonesia through the management of the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) represent a key external factor influencing the dynamics of the national banking industry. This adaptive monetary policy is aimed at maintaining exchange rate stability, controlling inflation, and supporting sustainable economic growth. Such macroeconomic stability provides a strong foundation for the banking sector to perform its intermediation function optimally.

Throughout 2025 and entering 2026, Bank Indonesia's monetary policy has tended to be accommodative yet prudent, taking into account inflation stability and global economic conditions. The BI7DRR policy rate remained around 4.75%, while national inflation stayed within Bank Indonesia's target range of $2.5\% \pm 1\%$. This environment provides room for the banking sector to sustain credit growth momentum while maintaining financial system stability.

INDIKATOR MAKROEKONOMI UTAMA

KEY MACROECONOMIC INDICATORS

Indikator Makro	2025	2026 (Proyeksi)	Indikator Makro
BI 7-Day Reverse Repo Rate	4,75%	4,75% – 5,00%	BI 7-Day Reverse Repo Rate
Inflasi Nasional	$\pm 2,5\%$	$\pm 2,6\%$	National Inflation
Pertumbuhan Kredit Perbankan	8% – 11%	9% – 11%	Banking Credit Growth
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	4,6% – 5,4%	5,2% – 5,8%	Indonesia's Economic Growth
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	± 16.000	16.500	Rupiah Exchange Rate (Rp/USD)

Dinamika indikator makro tersebut menjadi landasan penting bagi Bank Papua dalam merumuskan strategi bisnis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026. Dalam merespons perubahan arah kebijakan moneter, Bank Papua menempuh sejumlah langkah strategis yang berfokus pada penguatan struktur pendanaan, optimalisasi fungsi intermediasi, serta pengelolaan risiko yang *prudent*.

Response to Changes in Monetary Policy Direction The dynamics of these macroeconomic indicators serve as a key foundation for Bank Papua in formulating its business strategy as outlined in the 2026 Bank Business Plan (RBB). In responding to changes in monetary policy direction, Bank Papua has implemented several strategic measures focusing on strengthening its funding structure, optimizing its intermediation function, and maintaining prudent risk management.



Dari sisi penghimpunan dana, Bank Papua menempatkan penguatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai prioritas strategis, khususnya melalui peningkatan porsi dana murah atau Demand Deposit Saving Account (CASA). Optimalisasi penghimpunan dana dilakukan melalui pengembangan produk simpanan yang kompetitif, penguatan ekosistem layanan digital *Banking*, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan institusi strategis lainnya. Strategi ini bertujuan menjaga efisiensi biaya dana sekaligus memperkuat stabilitas likuiditas Bank di tengah dinamika pergerakan suku bunga pasar.

Pada sisi penyaluran kredit, Bank Papua menerapkan strategi pertumbuhan yang selektif dan berkualitas, dengan tetap mendukung sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Penyaluran kredit difokuskan pada sektor UMKM, perdagangan, konsumsi produktif, serta pembiayaan yang mendukung pembangunan daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, kualitas aset, serta stabilitas kinerja keuangan Bank.

Untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan, Bank Papua juga memperkuat implementasi *Asset and Liability Management* (ALMA) dalam mengelola struktur aset dan liabilitas secara optimal.

STRATEGI ALMA BANK PAPUA

Penguatan pengelolaan ALMA dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pengelolaan Struktur Pendanaan

Meningkatkan porsi dana murah (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana dan memperkuat stabilitas likuiditas Bank.

2. Pengelolaan Risiko Suku Bunga

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pergerakan suku bunga pasar guna menjaga stabilitas *margin* bunga bersih (*Net Interest Margin* / NIM).

3. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Memastikan kecukupan likuiditas melalui pengelolaan portofolio aset likuid serta penguatan manajemen gap likuiditas.

4. Optimalisasi Struktur Aset Produktif

Mengarahkan penyaluran kredit pada sektor produktif dan sektor unggulan daerah guna meningkatkan kualitas aset dan profitabilitas Bank.

On the funding side, Bank Papua prioritizes the strengthening of Third-Party Funds (DPK), particularly by increasing the proportion of low-cost funds or Demand Deposit Savings Account (CASA). This is achieved through the development of competitive deposit products, enhancement of digital banking ecosystems, and strengthened synergy with regional governments, regionally owned enterprises (BUMD), and other strategic institutions. This strategy aims to maintain cost of funds efficiency while reinforcing liquidity stability amid interest rate fluctuations.

On the lending side, Bank Papua adopts a selective and quality-driven growth strategy, while continuing to support productive sectors that significantly contribute to regional economic development. Lending is focused on MSMEs, trade, productive consumption, and financing that supports regional development. This approach ensures a balance between credit growth, asset quality, and financial performance stability.

To maintain financial stability, Bank Papua also strengthens the implementation of Asset and Liability Management (ALMA) in managing its asset and liability structure effectively.

BANK PAPUA'S ALMA STRATEGY

The strengthening of ALMA management is carried out through several strategic initiatives, including:

1. Funding Structure Management

Increasing the proportion of low-cost funds (CASA) to maintain cost efficiency and strengthen liquidity stability.

2. Interest Rate Risk Management

Conducting regular monitoring of market interest rate movements to maintain the stability of Net Interest Margin (NIM).

3. Liquidity Risk Management

Ensuring adequate liquidity through effective management of liquid asset portfolios and strengthening liquidity gap management.

4. Optimization of Earning Asset Structure

Directing lending toward productive and priority regional sectors to enhance asset quality and profitability.



Selain itu, Bank Papua juga memperkuat kerangka Manajemen Risiko untuk mengantisipasi potensi risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan moneter, termasuk risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Koordinasi yang erat antara Direksi, Komite Manajemen Risiko, serta unit kerja terkait memastikan bahwa setiap kebijakan strategis tetap berada dalam koridor *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Bank Papua optimistis mampu menjaga stabilitas kinerja keuangan, memperkuat resiliensi permodalan dan likuiditas, serta mempertahankan daya saing di tengah dinamika kebijakan moneter dan perkembangan ekonomi nasional. Komitmen ini sekaligus menegaskan peran Bank Papua sebagai Bank Pembangunan Daerah yang adaptif, tangguh, dan berkontribusi aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

In addition, Bank Papua continues to strengthen its risk management framework to anticipate potential risks arising from changes in monetary policy, including interest rate risk, liquidity risk, and market risk. Close coordination between the Board of Directors, Risk Management Committee, and relevant units ensures that all strategic policies remain within the established risk appetite.

Through these strategic initiatives, Bank Papua remains confident in its ability to maintain financial performance stability, strengthen capital and liquidity resilience, and sustain competitiveness amid evolving monetary policy and economic conditions. This commitment reaffirms Bank Papua's role as a Regional Development Bank that is adaptive, resilient, and actively contributes to sustainable regional economic growth.

Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Spot Transactions and Derivative Transactions

Selama tahun 2025 tidak terdapat transaksi spot dan transaksi derivatif, hal ini dikarenakan bank Papua belum berstatus sebagai bank Devisa.

During 2025, there were no spot or derivative transactions, as Bank Papua has not yet obtained foreign exchange bank (Devisa Bank) status.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support



Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Achievements in the Implementation of Corporate Governance



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Keberlanjutan
Sustainability



Mendukung Bank
Supporting Bank

Pada tahun 2025, Bank Papua berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*), yang secara langsung mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keselarasan antara Perseroan dan para pemangku kepentingan menciptakan kepercayaan serta lingkungan kerja yang kondusif, yang mendorong budaya kerja yang unggul dan profesionalisme di seluruh lapisan organisasi.

Keberhasilan implementasi GCG sepanjang tahun 2025 tercermin dari capaian strategis Bank Papua dalam memperkuat tata kelola yang sehat dan berintegritas. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Bank Papua berhasil memperkuat efektivitas fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan regulasi. Sinergi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran organisasi juga semakin solid, mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja berkelanjutan dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pencapaian ini diperkuat oleh hasil operasional yang memuaskan dan pengakuan dalam bentuk berbagai penghargaan bergengsi, baik di tingkat nasional maupun regional. Dengan pencapaian ini, Bank Papua semakin mengukuhkan posisinya di tengah persaingan global dan membuka peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut di masa mendatang. Implementasi GCG yang konsisten menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

In 2025, Bank Papua demonstrated a robust commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG), which directly contributed to the enhancement of the company's overall performance. The alignment between the organization and its stakeholders fostered trust and created a conducive work environment, nurturing a culture of excellence and professionalism at all levels.

The effective execution of GCG throughout 2025 was evident in Bank Papua's strategic accomplishments in reinforcing sound governance grounded in integrity. The principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness were consistently upheld across the organization. Bank Papua successfully enhanced the effectiveness of its supervisory functions, improved the quality of risk management, and ensured compliance with all regulatory requirements. The synergy among the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all organizational levels was strengthened, promoting a work culture focused on sustainable performance and value creation for all stakeholders.

This achievement was further validated by favorable operational results and recognition through various prestigious awards at both national and regional levels. With these accomplishments, Bank Papua has solidified its competitive position on a global scale and opened up avenues for future growth. The consistent implementation of GCG serves as a strong foundation for the sustainability of the company's business.



Roadmap Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance Roadmap

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang Baik adalah strategi utama dan tonggak pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tujuan *Roadmap* ini adalah untuk mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan melalui integrasi aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahapan dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang Baik adalah sebagai berikut:

Bank Papua's Good Corporate Governance Roadmap serves as the principal strategy and milestone for the implementation of Good Corporate Governance. The objective of this roadmap is to achieve sustainable corporate governance through the integration of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility.

The stages outlined in Bank Papua's Good Corporate Governance Roadmap are as follows:



Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Stages of Corporate Governance Implementation

Bank Papua telah memulai tahapan implementasi tata kelola perusahaan yang meliputi Strategi Implementasi, Kesadaran Tata Kelola Perusahaan, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Pemantauan, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, serta Pelaporan dan Pengungkapan.

Tahapan implementasi tata kelola perusahaan di Bank Papua dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bank Papua has commenced the implementation phase of its corporate governance framework, which encompasses the following components: Implementation Strategy, Corporate Governance Awareness, Corporate Governance Implementation, Monitoring, Corporate Governance Assessment, and Reporting and Disclosure.

The stages of corporate governance implementation at Bank Papua are outlined as follows:

Tahapan Implementasi	Uraian	Description
Strategi Implementasi	Perlindungan terhadap hak pemegang saham. • Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite. • Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal. • Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan nasabah. • Peningkatan fungsi kepatuhan.	Protection of shareholders' rights: • Optimization of the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors, and Committee Members • Enhancement of risk management and internal control functions • Improved effectiveness in handling customer complaints • Strengthening of compliance functions



Tahapan Implementasi	Uraian	Description
Awareness	<i>Awareness</i> bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman awal tentang pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan bagi karyawan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam menerapkan tata kelola bank yang berkelanjutan. Kegiatan <i>awareness</i> dilaksanakan mulai dari karyawan baru melalui Pendidikan Dasar Perbankan hingga karyawan lama. Pelaksanaan program <i>awareness</i> Tata Kelola Perusahaan Bank Papua tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti kegiatan <i>assessment</i> Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dan penyusunan Laporan Tahunan.	The awareness program aims to introduce and provide initial understanding to employees about the importance of Good Corporate Governance (GCG) implementation, fostering collective commitment to sustainable banking governance practices. Activities are conducted for both new employees through Basic Banking Education and existing staff. The implementation of Bank Papua's GCG awareness program is formally documented as evidence for GCG Assessment activities and Annual Report preparation.
Implementasi	Kegiatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua tersebut berupa: - Menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan serta prosedur pengelolaan bank, mencakup bidang dana, kredit, dan pengendalian internal. - Menata struktur organisasi yang sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja bank, dengan membentuk satu unit setingkat Sub Divisi, yaitu Tim Anti <i>Fraud</i>. - Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tujuan memperkuat sistem pengendalian internal bank, yang dalam penerapannya mencakup sistem pengendalian <i>Fraud</i>, serta memisahkan fungsi kesekretariatan dan humas pada Divisi Sekretaris Perusahaan menjadi Departemen Humas dan CSR, Biro Direksi dan Dewan Komisaris, dan Pendukung dan Administrasi.	Bank Papua GCG implementation activities include: - Developing and refining various bank management policies and procedures covering funds, credit, and internal controls - Organizing an organizational structure aligned with corporate governance best practices to improve bank performance, including establishing a Sub-Division level unit: the Anti-Fraud Team - This unit is directly responsible to the President Director with the aim of strengthening the bank's internal control system, which in its implementation includes a fraud control system, as well as separating the secretarial and public relations functions in the Corporate Secretary Division into the Public Relations and CSR Department, the Bureau of Directors and Board of Commissioners, and Support and Administration.
	Menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, termasuk menyusun dan memperbarui secara berkala Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>). - Bank Papua telah merancang kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran. - Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi <i>Self-Assessment</i> Tata Kelola Perusahaan Bank Papua serta evaluasi tindak lanjut rekomendasi <i>Self-Assessment</i> sebelumnya. - Mensosialisasikan budaya kepatuhan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua di seluruh karyawan dan pemangku kepentingan, serta mengkomunikasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan terkait Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. - Membangun sosialisasi Tata Kelola Perusahaan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. - Pelaksanaan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya diperlukan dalam kegiatan <i>Assessment</i> Tata Kelola Perusahaan Bank Papua serta penyusunan Laporan Tahunan.	Creating and building an ethical and responsible work culture, including periodically preparing and updating Statements of Independence for Directors and Commissioners, and coordinating the signing of Compliance Statements for the Corporate Code of Conduct - Bank Papua has designed a fraud control system policy, including whistleblower protection - Following up on recommendations from Bank Papua's GCG Self-Assessment and evaluating previous Self-Assessment recommendation follow-ups - Socializing compliance culture for GCG implementation across all employees and stakeholders, and communicating various GCG-related policies, programs, and activities - Conducting GCG socialization through various print and electronic media - The implementation of Bank Papua's GCG socialization is formally documented as evidence



Tahapan Implementasi	Uraian	Description
Monitoring	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua oleh Direksi melalui Komite Audit. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan dan memonitor pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, mulai dari tahap sosialisasi hingga pelaporan. Proses pemantauan implementasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan pemantauan terhadap Tata Kelola Perusahaan Bank Papua didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti kegiatan Penilaian Tata Kelola Perusahaan Bank Papua serta untuk penyusunan Laporan Tahunan.	<i>The Board of Commissioners oversees the effectiveness of Bank Papua's GCG implementation by the Directors through the Audit Committee. The Directors are responsible for ensuring and monitoring GCG implementation according to the established strategy, from the socialization stage to reporting.</i> <i>The monitoring process is conducted to ensure successful implementation through coordination with relevant stakeholders. The monitoring of Bank Papua's GCG implementation is formally documented as evidence for GCG Assessment activities and Annual Report preparation.</i>
Assesment	Pihak Eksternal (Pihak Independen) Hingga tahun 2025, Bank Papua belum melibatkan pihak eksternal untuk menilai penerapan Tata Kelola yang Baik di perusahaan. Bank Papua secara berkala melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan melalui metode <i>Self Assessment</i>, sesuai dengan periode laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu dua kali setahun. Selain itu, Bank Papua juga melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	<i>External Parties (Independent Parties)</i> <i>As of 2025, Bank Papua has not involved external parties to assess Good Corporate Governance implementation in the company.</i> <i>Bank Papua periodically conducts GCG implementation assessments using the Self Assessment method, aligned with the Bank Health Assessment reporting period of twice annually. Additionally, Bank Papua conducts GCG implementation assessments based on Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016, OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding GCG Implementation for Commercial Banks, and OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks</i>



Dasar Penerapan Tata Kelola yang Baik

Foundation for Good Corporate Governance Implementation

Peraturan penerapan Tata Kelola yang Baik di Bank Papua berlandaskan pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, peraturan ini juga mengacu pada pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang diterbitkan oleh institusi nasional dan internasional. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penerapan GCG di Bank Papua:

The regulations governing the implementation of Good Governance at Bank Papua are founded on a variety of pertinent provisions, regulations, and laws. Additionally, these regulations are aligned with the Good Corporate Governance (GCG) guidelines established by both national and international institutions. Below are some of the legal bases utilized in the implementation of GCG at Bank Papua:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tanggal 25 Maret 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 12 Januari 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 16 Agustus 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622)
1. Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992, dated March 25, 1992, concerning Banking (State Gazette of the Republic of Indonesia 1992, Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3472), as amended multiple times, with the most recent amendment being Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023, dated January 12, 2023, concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023, Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845).
2. Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999, dated August 16, 1999, concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia 1999, Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874), has been partially revoked by Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023, dated January 2, 2023, concerning the Criminal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023, Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842).
3. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007, dated August 16, 2007, concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia 2007, Number 136, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4622).



2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 05 November 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438)
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 01 Juli 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798)
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5811)
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824)
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840)
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran

2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756), as amended multiple times, most recently by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023, dated March 31, 2023, concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 regarding Job Creation to Become Law (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856).

4. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019, dated November 5, 2019, regarding the Reporting of Gratification (State Gazette of the Republic of Indonesia 2019, Number 1438).
5. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 07 of 2016, dated July 1, 2016, concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of the Assets of State Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 985 of 2016), has been amended multiple times, with the most recent amendment being Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024, dated October 31, 2024, concerning the Second Amendment to Regulation Number 07 of 2016 on the Procedures for Registration, Announcement, and Examination of the Assets of State Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 798 of 2024).
6. Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015, dated December 28, 2015, regarding the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015, No. 371, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5811)
7. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015, dated December 29, 2015, regarding the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015, No. 406, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5824).
8. Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016, dated January 27, 2016, concerning the Assessment of the Health Level of Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia 2016, No. 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5840)
9. Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016, dated January 27, 2016, concerning Bank Business Plans (State Gazette of the Republic of Indonesia 2016, No. 17, Supplement to the State



Negara Republik Indonesia Nomor 5841)

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tanggal 02 Februari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26/OJK)
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 22 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861)
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098)
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095)
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308)
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.03/2019 Tanggal 20 Desember 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441)
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan

Gazette of the Republic of Indonesia No. 5841)

10. *Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016, dated February 2, 2016, regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 25, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5848), has been amended multiple times, with the most recent amendment being Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2022, dated December 28, 2022, which pertains to the Second Amendment of Regulation Number 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2022 Number 35/OJK, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 26/OJK).*
11. *Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016, dated March 22, 2016, regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia, 2016, Number 53; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia, Number 5861)*
12. *Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016, dated July 27, 2016, regarding the Fit and Proper Assessment for Key Parties of Financial Services Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia 2016 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5098).*
13. *Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017, dated July 12, 2017, regarding the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia 2017 Number 152, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6095).*
14. *Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 1/POJK.03/2019, dated January 29, 2019, regarding the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia 2019 Number 20, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6308).*
15. *Regulation Number 37/POJK.03/2019 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, dated December 20, 2019, regarding Transparency and Publication of Bank Reports (State Gazette of the Republic of Indonesia 2019 Number 248, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6441).*
16. *Regulation Number 8 of 2023 issued by the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia on June 14, 2023, concerns the implementation of anti-money*



Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36/OJK)

17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK)
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tanggal 13 September 2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, Bank Papua juga mengadopsi standar tata kelola yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu Pedoman GCG Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia.

laundering measures, the prevention of terrorism financing, and the prevention of financing for the proliferation of weapons of mass destruction within the financial services sector. This regulation is published in the State Gazette of the Republic of Indonesia 2023, Number 11/OJK, and is included as a supplement in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 36/OJK.

- 17. Regulation Number 17 of 2023 issued by the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023, Number 30/OJK, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 53/OJK).*
- 18. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 39/SEOJK.03/2016, dated September 13, 2016, regarding the Fit and Proper Assessment for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective Members of the Board of Commissioners of Banks.*
- 19. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13/SEOJK.03/2017, dated March 17, 2017, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- 20. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 14/SEOJK.03/2017, dated March 17, 2017, regarding the Assessment of the Health Level of Commercial Banks.*

In addition to the aforementioned laws and regulations, Bank Papua adheres to governance standards established by the National Committee for Governance Policy (KNKG), specifically the Indonesian Good Corporate Governance (GCG) Guidelines and the Indonesian Banking Good Corporate Governance Guidelines.



Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan struktur Tata Kelola Bank yang berada di tingkat teratas dan menjadi bagian strategis dari 3 (tiga) pilar utama dalam Tata Kelola Bank, yaitu pilar Direksi dan pilar Dewan Komisaris.

2. Pengurus Bank

Pengurus Bank adalah Organ Bank yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tata Kelola Bank.

3. Fungsi dan Penerapan Faktor-Faktor Tata Kelola Bank

Penerapan Tata Kelola Bank yang Baik menjadi tanggung jawab Organ Bank dan Jajaran Bank dalam kegiatan usaha. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam Buku Pedoman Perusahaan, mulai dari Buku II hingga Buku VIII.

1. General Meeting of Shareholders (GMS)

The GMS is the Bank's Governance structure at the highest level and is a strategic part of the 3 (three) main pillars in Bank Governance, namely the Board of Directors pillar and the Board of Commissioners pillar.

2. Bank Management

Bank Management consists of the Board of Directors and the Board of Commissioners and is responsible for the execution of Bank Governance.

3. Functions and Implementation of Bank Governance

The responsibility for implementing Good Bank Governance lies with the Bank's governing bodies and management throughout all business activities. This is further detailed in the Company's Guidelines, specifically in Books II to VIII.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Papua juga telah mengembangkan Struktur *Soft Governance* berupa ketentuan-ketentuan yang dirancang oleh Direksi untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di seluruh tingkat organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Papua telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman sebagai landasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yang dikenal sebagai infrastruktur tata kelola Bank.

Infrastruktur tata kelola ini bertujuan untuk mendukung penerapan tata kelola yang efektif, menciptakan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan seluruh aktivitas Bank Papua berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Infrastruktur ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang selaras dengan prinsip GCG dan mendukung pencapaian tujuan strategis Bank.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In addition to its corporate structure, Bank Papua has developed a robust governance framework, which includes provisions established by the Board of Directors to ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles throughout the organization. To facilitate this, Bank Papua has instituted various policies and guidelines that serve as the foundation for its operational functions and duties, collectively referred to as the Bank's governance infrastructure.

This governance infrastructure is designed to support effective governance, promote regulatory compliance, and ensure that all activities of Bank Papua are conducted in alignment with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This framework is a critical pillar in fostering a work environment that adheres to GCG principles and supports the achievement of the Bank's strategic objectives.

No.	Piagam dan Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan	Charters & Guidelines
1	Anggaran Dasar Perusahaan / Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Papua	• Nomor 1 • Pengesahan KepMenkumHam C-13031.HT.01.01.TH.2002	• 19 Juni 2002 • 16 Juli 2002	Articles of Association of the Company / Deed of Establishment of PT Bank Pembangunan Daerah Papua
2.	Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua	• Nomor 20 • Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0096261	21 Agustus 2024	Amendment of the Articles of Association PT Bank Pembangunan Daerah Papua
3.	Peraturan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Nomor KEP.4/HI.00.00/ 00.0000. 220815003/B/XII/2024	09 Desember 2024	Company Regulations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua



No.	Piagam dan Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan	Charters & Guidelines
4.	Pedoman Kerja Dewan Komisaris	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Board of Commissioners' Working Guidelines
5.	Pedoman Kerja Direksi	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Board of Directors' Working Guidelines
6.	Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Board Committees Implementation Guidelines
7.	Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Conflict of Interest Implementation Guidelines
8.	Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Compliance Implementation Guidelines
9.	Pedoman Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah	SK Direksi Nomor 49/DIR-BPD/VII/2024	08 Juli 2024	Customer Complaint Protection and Resolution Guidelines
11.	Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	SK Direksi Nomor 49/DIR-BPD/VII/2024	08 Juli 2024	Strategic Plan and Bank Business Plan Preparation Guidelines
12.	Pedoman Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud	SK Direksi Nomor 49/DIR-BPD/VII/2022	14 Juli 2022	Anti-Fraud Strategy Implementation Guidelines
13.	Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	SK Direksi Nomor 67/DIR-BPD/XI/2023	20 November 2023	Social and Environmental Responsibility Guidelines
14.	Komite Direksi	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Board Committees
15.	Perubahan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Selection and Replacement of Board Members SOP
16.	SOP Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Independent Board Committee Members Selection SOP
17.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Aktivitas Audit Internal	SK Direksi Nomor 49/DIR-BPD/VII/2022	14 Juli 2022	Internal Audit Activities SOP
18.	Petunjuk Teknis <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Bank	SEOJK Nomor 13/SE OJK.03/2017	17 Maret 2024	Bank Governance Self Assessment Technical Guide
19.	Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Establishment of Risk Management Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Papua
20.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor 69/DIR-BPD/X/2018	17 Oktober 2018	Guidelines for Gratification Control in PT Bank Pembangunan Daerah Papua
21.	Penerapan Rahasia Bank di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor 38/DIR-BPD/VI/2020	11 Juni 2020	Implementation of Bank Secrecy in PT Bank Pembangunan Daerah Papua
22.	Mekanisme Pembentukan Peraturan di PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor 01/DIR-BPD/II/2022	03 Januari 2022	Mechanism for Establishing Regulations in PT Bank Pembangunan Daerah Papua
23.	Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor 03/DIR-BPD/II/2022	10 Januari 2022	Risk Management Policy of PT Bank Pembangunan Daerah Papua
24.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2022	14 Juli 2022	Standard Operating Procedure (SOP) of Organizational Structure in PT Bank Pembangunan Daerah Papua
25.	Komite Pengarah Teknologi Informasi (<i>Information Technology Steering Committee</i>) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Information Technology Steering Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Papua
26.	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	SK NO Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024	31 Desember 2024	Company Manual (BPP) Code of Ethics of PT Bank Pembangunan Daerah Papua



Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Mechanism

PEMEGANG SAHAM

Dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham diwajibkan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah terdaftar sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan. Sebagai pemilik modal, mereka melaksanakan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kewajaran (*Fairness*), sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Papua menerbitkan dua jenis saham untuk mendukung operasional dan pengelolaan perusahaan, sejalan dengan peraturan yang berlaku serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki Hak sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan 1 (satu) suara;
2. Memiliki kesempatan untuk mengusulkan agenda RUPS serta kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Memiliki kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain jika pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS;
4. Berhak memperoleh dan mempelajari materi RUPS sebelum pelaksanaannya, sehingga pemegang saham dapat memberikan suara pada saat usulan putusan agenda RUPS;
5. Memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai setiap pembahasan dan keputusan agenda RUPS;
6. Memiliki kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan keputusan agenda RUPS;
7. Berhak menerima dividen;
8. Berhak menerima sisa hasil kekayaan dari likuidasi.

SHAREHOLDERS

In making decisions at the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders are expected to consider the interests of all stakeholders to uphold the principles of Good Corporate Governance. Shareholders may be individuals or legal entities that are duly registered in the Company's Shareholder Register. As owners of capital, they exercise their rights and responsibilities based on the principle of fairness (Kewajaran), in accordance with the Articles of Association and relevant laws and regulations.

As a Regional Development Bank (BPD), Bank Papua issues two types of shares to support its operations and management in compliance with applicable regulations and to contribute to economic development in Papua.

SHAREHOLDER RIGHTS

Shareholders are entitled to the following rights:

1. *Attend the General Meeting of Shareholders (GMS) and cast one vote.*
2. *Propose items for the GMS agenda and nominate candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors, with such proposals being reviewed by the Remuneration and Nomination Committee.*
3. *Authorize another party to attend the GMS on their behalf if they are unable to attend.*
4. *Access and review GMS materials prior to the meeting to facilitate informed voting on proposed resolutions.*
5. *Pose questions regarding each discussion and resolution on the GMS agenda.*
6. *Vote in favor of, against, or abstain from each proposed resolution on the GMS agenda.*
7. *Receive dividends.*
8. *Claim any remaining assets from liquidation.*



Pemegang Saham Seri A memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memiliki Hak Suara khusus dalam mengajukan usulan pencalonan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
3. Dapat menukarkan saham dengan saham seri B
4. Menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan dari pada pemegang saham Seri B

Pemegang Saham Seri B memiliki hak sebagai berikut:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Series A shareholders possess the following authorities:

1. *The right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders.*
2. *Special voting rights for proposing nominations for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*
3. *The option to exchange Series A shares for Series B shares.*
4. *Priority in receiving dividends and any remaining assets resulting from liquidation, ahead of Series B shareholders.*

Series B Shareholders are entitled to the following rights:

1. *The right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders.*
2. *The right to receive dividends and any residual assets resulting from liquidation.*



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan elemen penting dalam struktur Tata Kelola Perusahaan, dengan hak dan kewenangan yang melampaui Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan informasi terkait Bank secara wajar dan transparan demi kepentingan Bank.

Bank Papua menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) setiap tahun, serta RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan tertentu. RUPST dan RUPSLB memiliki posisi sebagai organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Bank dan berfungsi sebagai sarana komunikasi penting antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Dalam forum ini, tanggung jawab manajemen perusahaan dipaparkan dari berbagai aspek, mencerminkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun, dengan jadwal paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membahas dan mengambil keputusan terkait mata acara rapat yang mendesak.

TATA TERTIB RUPS

Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua dirancang untuk memastikan pelaksanaan rapat yang tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Aturan ini bertujuan memberikan panduan kepada para pemegang saham dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya selama rapat berlangsung, serta menciptakan suasana diskusi yang kondusif dan terarah. Dalam tata tertib ini, diatur penyampaian:

1. Tata tertib RUPS disampaikan kepada pemegang saham yang hadir pada saat pelaksanaan RUPS.
2. Sebelum rapat dimulai, mata acara RUPS diumumkan dan dibacakan kepada para peserta.
3. Pada pembukaan RUPS, pimpinan rapat memberikan

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a vital component of the corporate governance framework, endowed with rights and authorities that surpass those of the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the constraints established by law and/or the Articles of Association. The GMS functions as a platform for shareholders to make decisions, articulate opinions, and acquire information pertinent to the Bank in a fair and transparent manner, ultimately benefiting the institution.

Bank Papua conducts an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) each year, in addition to an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which may be convened at any time based on specific requirements. Both the AGMS and EGMS occupy the highest tier within the Bank's governance structure and serve as critical communication channels between stakeholders and the organization. These forums delineate the responsibilities of company management across various dimensions, reflecting the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The General Meeting of Shareholders at Bank Papua comprises both the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The AGMS is held annually, scheduled no later than six months following the conclusion of the company's fiscal year. Conversely, the EGMS may be convened at any time as necessary to address and resolve urgent agenda items.

GMS RULES OF PROCEDURE

The rules of procedure for the Bank Papua General Meeting of Shareholders (GMS) are established to ensure the orderly, transparent, and accountable conduct of the meeting, in alignment with the principles of Good Corporate Governance (GCG). These rules serve to guide shareholders in exercising their rights and responsibilities during the meeting and to foster a conducive and focused discussion environment. The rules of procedure encompass the following provisions:

1. *The GMS Rules of Procedure will be communicated to shareholders in attendance at the GMS.*
2. *Prior to the commencement of the meeting, the GMS agenda will be announced and presented to participants.*
3. *At the opening of the GMS, the meeting chair will*



penjelasan kepada pemegang saham, yang mencakup:

- Gambaran umum kondisi Bank secara singkat.
- Penjelasan mengenai mata acara rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk mata acara rapat melalui metode *voting*.
- Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEWENANGAN RUPS

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mencakup berbagai hal penting, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua.
- Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, serta menetapkan penggunaan laba apabila Bank Papua memiliki saldo laba yang positif.
- Menetapkan gaji, fasilitas, dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memutuskan tindakan hukum terkait transaksi material dan transaksi benturan kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Memutuskan tindakan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Bank Papua, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi terkait, dalam jangka waktu satu (1) tahun buku atau lebih, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Menyetujui pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengubah Anggaran Dasar Bank Papua.
- Memberikan persetujuan atas penerbitan Efek Bersifat Ekuitas, perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor, serta penyeteroran saham.
- Memberikan persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau permohonan agar Bank Papua dinyatakan pailit dan dibubarkan.
- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik, disertai penjelasan mengenai alasan pemberian kuasa tersebut serta kriteria atau batasan Akuntan Publik.

Kewenangan ini mencerminkan peran strategis RUPS dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung keberlanjutan Bank Papua.

provide an overview to shareholders, which includes:

- A brief assessment of the Bank's current condition.*
- An explanation of the items on the meeting agenda.*
- The decision-making process for agenda items, which will occur through voting.*
- Procedures for shareholders to exercise their right to pose questions and/or express opinions.*

AUTHORITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The authority of the General Meeting of Shareholders (GMS) encompasses several significant matters, including, but not limited to:

- Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors of Bank Papua.*
- Approving the Annual Report and Financial Statements, and determining the allocation of profits if Bank Papua has positive retained earnings.*
- Establishing the salaries, benefits, and allowances for members of the Board of Commissioners and Directors.*
- Deciding on legal actions related to material transactions and specific conflict-of-interest transactions as mandated by applicable laws and regulations.*
- Authorizing legal actions to transfer or encumber assets as collateral for debts exceeding 50% of Bank Papua's net assets, whether in a single transaction or multiple related transactions, within a fiscal year or longer, in accordance with the Articles of Association.*
- Approving the resignation of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- Amending the Articles of Association of Bank Papua.*
- Approving the issuance of equity securities, changes to issued and paid-up capital, and share payments.*
- Approving mergers, amalgamations, acquisitions, separations, or petitions for Bank Papua to be declared bankrupt and dissolved.*
- Appointing a Public Accountant and/or delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant, along with providing an explanation for such authorization and the criteria or limitations applicable to the Public Accountant.*

This authority underscores the strategic role of the GMS in ensuring robust corporate governance and promoting the sustainability of Bank Papua.



PROSES PENYELENGGARAAN RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dilaksanakan setiap tahun paling lambat enam (6) bulan setelah berakhirnya tahun buku Bank Papua. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank Papua, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.

TEMPAT PENYELENGGARAAN RUPS

RUPS harus dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan dapat dilaksanakan di:

1. Kantor pusat Bank Papua.
2. Lokasi di mana Bank Papua menjalankan kegiatan usaha utama.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Bank Papua berada.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS

Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, tidak termasuk tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Bank Papua melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Bank Papua juga menyediakan dokumen mata acara rapat untuk Pemegang Saham mulai dari tanggal pemanggilan hingga pelaksanaan RUPS.

RUPS juga dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah saham yang memiliki hak suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GMS PROCESS

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) is conducted annually, no later than six (6) months following the conclusion of Bank Papua's fiscal year. Additionally, an Extraordinary GMS may be convened at any time as deemed necessary by Bank Papua, in accordance with applicable laws, regulations, and the Articles of Association.

VENUE FOR HOLDING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The GMS shall be conducted within the territory of the Republic of Indonesia and may take place at any of the following locations:

1. *The head office of Bank Papua.*
2. *The site where Bank Papua engages in its primary business activities.*
3. *The provincial capital in which Bank Papua is registered or where its principal business activities are situated.*

ANNOUNCEMENT AND INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The announcement of the GMS will be made at least 14 (fourteen) days prior to the issuance of the notice for the GMS, excluding the dates of both the announcement and the notice. Bank Papua will distribute the notice of the GMS to Shareholders no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS, excluding the dates of the notice and the GMS.

Additionally, Bank Papua will provide meeting agenda documents to Shareholders from the date of the notice until the GMS is convened.

A GMS may also be convened upon the request of one or more Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights, in accordance with applicable regulations.



PIMPINAN DAN TATA TERTIB

RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau posisinya kosong, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau posisinya kosong, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi tidak hadir atau posisinya kosong, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dan ditunjuk secara langsung oleh peserta rapat.

Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk memiliki benturan kepentingan terhadap hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Jika anggota Direksi yang ditunjuk memiliki benturan kepentingan terhadap hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi memiliki benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.

Selama pelaksanaan RUPS, tata tertib harus disampaikan kepada Pemegang Saham yang hadir. Pada pembukaan rapat, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham setidaknya mengenai:

1. Kondisi umum Bank Papua secara singkat.
2. Agenda Rapat.
3. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KUORUM DALAM RUPS

RUPS dapat diselenggarakan apabila:

1. Dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian

LEADERSHIP AND RULES OF PROCEDURE

The General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by the President Commissioner. In the absence of the President Commissioner or if the position is vacant, the GMS will be chaired by a member of the Board of Commissioners designated by the Board of Commissioners during a meeting. If all members of the Board of Commissioners are absent or the position is vacant, a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors will chair the GMS.

Should all members of the Board of Directors also be absent or if that position is vacant, the GMS will be chaired by a Shareholder present at the meeting, who is appointed by the participants.

In the event that an appointed member of the Board of Commissioners has a conflict of interest concerning a matter to be decided at the GMS, the meeting will be chaired by another member of the Board of Commissioners without such a conflict, as appointed by the Board of Commissioners.

If all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, a member of the Board of Directors will take the chair, as appointed by the Board of Directors. Similarly, if an appointed member of the Board of Directors has a conflict of interest regarding a matter under discussion, the GMS will be chaired by another Board of Directors member without a conflict. If all members of the Board of Directors have a conflict of interest, a non-controlling Shareholder will chair the GMS, appointed by a majority of the Shareholders present.

During the GMS, the rules of procedure will be communicated to the attending shareholders. At the commencement of the meeting, the chairperson must provide an explanation to the shareholders covering at least the following points:

1. A brief overview of the general condition of Bank Papua.
2. The Meeting Agenda.
3. Procedures for exercising shareholders' rights to raise questions and/or submit opinions.

QUORUM FOR A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

A GMS may proceed under the following conditions:

1. The meeting is attended by shareholders or their authorized proxies representing more than one-half



dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Bank Papua.
4. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan atas permohonan Bank Papua dan ditetapkan oleh OJK. Dalam pemanggilan RUPS ketiga, harus dinyatakan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(1/2) of the total shares with valid voting rights, and any resolution is approved by more than one-half (1/2) of the total shares with valid voting rights present at the GMS, unless otherwise specified by applicable laws and regulations.

2. A second meeting is valid and may adopt binding resolutions if attended by shareholders or their authorized proxies representing at least one-third (1/3) of the total shares with valid voting rights, and any resolution is approved by more than one-half (1/2) of the total shares with valid voting rights present at the GMS, unless otherwise specified in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
3. If the attendance quorum for the second GMS is not met, a third GMS may be convened, provided that it is valid and entitled to make decisions if attended by shareholders representing the attendance quorum and the decision quorum as determined by the OJK at the request of Bank Papua.
4. The notice for the third GMS shall be issued at the request of Bank Papua and determined by the OJK. The notice must indicate that the second GMS has occurred and that the attendance quorum was not achieved.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUPS

Semua keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. Setiap Pemegang Saham tunduk kepada Anggaran Dasar Bank Papua dan semua keputusan yang sah yang diambil dalam RUPS, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISALAH RUPS

Bank Papua wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS harus dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari peserta RUPS. Risalah RUPS disusun dalam bentuk akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh notaris.

DECISION-MAKING AT THE GMS

All decisions at the GMS are made through deliberation to achieve consensus. If consensus is not reached, decisions will be made by affirmative vote as outlined in the Articles of Association. Each shareholder is bound by Bank Papua's Articles of Association and all valid decisions made at the GMS, in accordance with applicable laws and regulations.

GMS MINUTES

Bank Papua is required to prepare the General Meeting of Shareholders (GMS) minutes along with a summary of those minutes. The GMS minutes must be drafted and signed by the meeting chair and at least one designated shareholder from among the GMS participants. These minutes are to be documented in the form of a notarial deed. Additionally, the GMS minutes must be submitted to the Financial Services Authority (OJK) within thirty (30) days following the GMS.



Selanjutnya, risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dilaksanakan. Dalam risalah rapat dijelaskan mengenai dinamika yang terjadi, termasuk pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk bertanya dan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

The minutes should detail the dynamics of the meeting, including the opportunities for shareholders to pose questions and the responses provided to those inquiries.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2025 DAN REALISASINYA

IMPLEMENTATION AND REALIZATION OF THE 2025 ANNUAL GMS

Pemberitahuan <i>Announcement</i>	Pemanggilan <i>Summons</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>Results of the GMS</i>
Pemberitahuan Pemanggilan RUPS yang dimuat di 3 (tiga) media cetak: <i>Harian Pagi Tabura Pos</i> , <i>Papua Pos Nabire</i> , <i>Harian Cenderawasih Pos</i> dan <i>Website Bank Papua</i> yang terbit pada tanggal 6 Maret 2025	Membuat undangan kepada 45 pemegang saham Bank Papua dengan Nomor undangan yang berbeda-beda.	Dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua	Akta Risalah RUPS Nomor 09 tanggal 20 Maret 2025
<i>Notice of Invitation to the GMS published in three print media: the Tabura Pos Morning Daily, the Papua Pos Nabire Daily, the Cenderawasih Pos Daily, and the Bank Papua Website, published on March 6, 2025.</i>	<i>Sending invitations to 45 Bank Papua shareholders with different invitation numbers.</i>	<i>Held on March 20, 2025, in the 9th-floor hall of the Papua Province Governor's Office.</i>	<i>Deed of Minutes of the GMS Number 09 Dated March 20, 2025</i>

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Hingga 31 Desember 2025, Bank Papua belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, sehingga belum memerlukan pihak independen untuk menghitung suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pihak independen yang bertugas sebagai pembuat Akta RUPS adalah Maryatie Simanjuntak, SH.

INDEPENDENT VOTE COUNTING PARTY

As of December 31, 2025, Bank Papua has not listed its shares on the Stock Exchange; therefore, it does not require an independent party for vote counting at the General Meeting of Shareholders (GMS). The independent party responsible for drafting the GMS Deed is Maryatie Simanjuntak, SH.

REKAP KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TAHUN 2025

ATTENDANCE RECAP AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

The following members of the Board of Commissioners and Directors of Bank Papua were present at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Hadir
2.	Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	Hadir
3.	Dortheis Sesa	Komisaris Independen	Hadir
4.	Arobi Ahmad	Komisaris Independen	Hadir
5.	Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Hadir
6.	Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Hadir
7.	Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Hadir



No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
8.	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Hadir
9.	Pujianto	Direktur Keuangan	Hadir
10.	Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Hadir

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TAHUN 2025

DECISIONS AND IMPLEMENTATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MANAGEMENT STRATEGY

Mata Acara Rapat Pertama	Status	First Meeting Agenda
Mengenai Persetujuan tentang pemindahan tempat dan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Telah Terealisasi	Approval regarding the change of venue and date of implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2025 (two thousand twenty-five).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		There were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui pemindahan lokasi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) di Jayapura pada tanggal 20-03-2024 (dua puluh maret dua ribu dua puluh empat).		Approval of the relocation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for Financial Year 2024 (two thousand twenty-four) to Jayapura on March 20, 2024 (twentieth of March, two thousand twenty-four).

Mata Acara Rapat Kedua	Status	Second Meeting Agenda
Mengenai Peraturan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 20-03-2025 (dua puluh maret dua ribu dua puluh lima).	Telah Terealisasi	Approval of the Rules of Procedure for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua dated March 20, 2025 (twentieth of March, two thousand twenty-five).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		There were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui Peraturan dimaksud menjadi Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 20-03-2025 (dua puluh maret dua ribu dua puluh lima).		Approval of the aforementioned Rules as the Rules of Procedure for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua dated March 20, 2025 (twentieth of March, two thousand twenty-five).

Mata Acara Rapat Ketiga	Status	Third Meeting Agenda
Mengenai Laporan pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).	Telah Terealisasi	Presentation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the financial year 2024 (two thousand twenty-four).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		There were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui Laporan pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).		Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the financial year 2024 (two thousand twenty-four).



Mata Acara Rapat Keempat	Status	Fourth Meeting Agenda
Mengenai Permintaan pengesahan keputusan bersama Penjabat Gubernur Papua selaku pemegang saham pengendali dan mayoritas dan Gubernur Papua Barat selaku pemegang saham pengendali.	Telah Terealisasi	<i>Request for approval of the joint decision of the Acting Governor of Papua, as the controlling and majority shareholder, and the Governor of West Papua, as the controlling shareholder.</i>
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		<i>There were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions.</i>
Menyetujui Permintaan pengesahan keputusan bersama Penjabat Gubernur Papua selaku pemegang saham pengendali dan mayoritas dan Gubernur Papua Barat selaku pemegang saham pengendali untuk melakukan perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional terhitung mulai tanggal 05-03-2025 (lima maret dua ribu dua puluh lima) sampai dengan terpilihnya Direktur Bisnis dan Direktur Operasional Definitif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).		<i>Approval of the request for ratification of the joint decision of the Acting Governor of Papua, as the controlling and majority shareholder, and the Governor of West Papua, as the controlling shareholder, to implement a temporary extension of the terms of office of the Director of Business and the Director of Operations, effective from March 5, 2025 (fifth of March, two thousand twenty-five) until the appointment of definitive Director of Business and Director of Operations following the successful completion of the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK).</i>

Mata Acara Rapat Kelima	Status	Fifth Meeting Agenda
Mengenai Permintaan persetujuan keputusan RUPS tentang perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Telah Terealisasi	<i>Approval of the GMS resolution regarding the temporary extension of the terms of office of the Director of Business and the Director of Operations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the period 2021 (two thousand twenty-one) to 2025 (two thousand twenty-five).</i>
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		<i>There were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions.</i>
- Menyetujui untuk memperpanjang sementara masa jabatan Tuan SADAR SEBAYANG sebagai Direktur Bisnis dan Tuan ISAK SAMUEL WOPARI sebagai Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua terhitung mulai tanggal 05-03-2025 (lima maret dua ribu dua puluh lima). - Perpanjangan sementara masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka satu diatas, akan berakhir setelah diterbitkannya hasil Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap Calon Direktur Bisnis dan Direktur Operasional terpilih periode tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh Sembilan) dan ditetapkan secara definitif serta diangkat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). - Selama Direksi sebagaimana angka satu tersebut di atas melaksanakan jabatan perpanjangan sementara, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya yang diterima dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua.		<i>Approval to temporarily extend the terms of office of Mr. Sadar Sebayang as Director of Business and Mr. Isak Samuel Wopari as Director of Operations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, effective from March 5, 2025 (fifth of March, two thousand twenty-five).</i> <i>The temporary extension of the terms of office as referred to in point 1 above shall end upon the issuance of the results of the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK) for the elected candidates for Director of Business and Director of Operations for the period 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine), and upon their definitive appointment and inauguration through the GMS (General Meeting of Shareholders).</i> <i>During the period in which the Directors as referred to in point 1 above serve under the temporary extension, all remuneration and other benefits received shall be charged to the budget of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>

Mata Acara Rapat Keenam	Status	Sixth Meeting Agenda
Mengenai Permintaan persetujuan keputusan RUPS tentang perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Telah Terealisasi	<i>Approval of the GMS resolution regarding the temporary extension of the term of office of the Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the period 2021 (two thousand twenty-one) to 2025 (two thousand twenty-five).</i>



Mata Acara Rapat Keenam	Status	Sixth Meeting Agenda
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		<i>There were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions.</i>
Menyetujui untuk memperpanjang sementara masa jabatan TUN DORTHEIS SESA, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Perpanjangan sementara masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka satu diatas, akan berakhir setelah adanya penetapan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) terkait jabatan Komisaris Independen periode tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Selama Komisaris Independen sebagaimana angka satu tersebut di atas melaksanakan jabatan perpanjangan sementara, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya yang diterima dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua		<i>Approved to extend the term of office of Mr. Dortheis Sesa, Bachelor of Economics, as Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. The temporary extension of the term of office, as referred to in point one above, will end upon the determination of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) regarding the position of Independent Commissioner for the period of 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine). During the period of the Independent Commissioner as referred to in point one above, all income and other benefits received will be charged to the budget of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>

Mata Acara Rapat Ketujuh	Status	Seventh Meeting Agenda
Mengenai Permintaan persetujuan keputusan RUPS tentang pelaksanaan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.		<i>Regarding the request for approval of the GMS resolution regarding the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		<i>No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.</i>
Menyetujui untuk dilakukan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Papua setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ditutup. Menyetujui untuk dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua berikutnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) diselenggarakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.	Telah Terealisasi	<i>Approved the holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua after the closing of this Annual General Meeting of Shareholders. Approved the holding of the next Annual General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2025 (two thousand twenty-five) Financial Year in Wamena, Jayawijaya Regency, Papua Highlands Province.</i>



Mata Acara Rapat Kedelapan	Status	Eighth Meeting Agenda
Mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Telah Terealisasi	Regarding the amendment to the Articles of Association of PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or provided opinions.
Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagai berikut: A. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1, sehingga untuk selanjutnya Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut : 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diadakan di Wilayah kedudukan Perseroan/Kantor Pusat atau pada Kantor-Kantor Cabang Perseroan melakukan kegiatan usahanya di Wilayah Tanah Papua. 2. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diadakan. 4. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atas kuasa dari Pemegang Saham. 5. Jika RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus dipimpin oleh Direktur Utama, namun Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. 6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 7. Jika RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus dipimpin oleh Komisaris Utama, namun Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. 9. Jika semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat.		Approved the amendments to the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, as follows: A. Amend the provisions of Article 10 paragraph 1, so that Article 10 of the Company's Articles of Association reads as follows: 1. The GMS (General Meeting of Shareholders) shall be held at the Company's domicile/Head Office or at the Company's Branch Offices conducting its business activities in the Papua Region. 2. A GMS (General Meeting of Shareholders) is held by first issuing a summons to shareholders by registered mail and/or by advertisement in a newspaper. 3. The summons must be issued no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS (General Meeting of Shareholders), excluding the date of the summons and the date of the GMS (General Meeting of Shareholders). 4. The GMS (General Meeting of Shareholders) is chaired by the President Director or the President Commissioner, upon authorization from the Shareholders. 5. If the GMS (General Meeting of Shareholders) is to be chaired by the President Director, but the President Director is absent or unable to attend for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS (General Meeting of Shareholders) is chaired by a Director appointed by the President Director. 6. If all Directors are absent or unable to attend for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS (General Meeting of Shareholders) is chaired by a member of the Board of Commissioners. 7. If the GMS (General Meeting of Shareholders) is to be chaired by the President Commissioner, but the President Commissioner is absent or prevented from attending for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS (General Meeting of Shareholders) is chaired by one of the Commissioners appointed by the President Commissioner. 8. If all members of the Board of Commissioners are absent or prevented from attending for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS (General Meeting of Shareholders) is chaired by one of the members of the Board of Directors. 9. If all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are absent or prevented from attending for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS (General Meeting of Shareholders) is chaired by a person selected by and from among those present at the meeting.



Mata Acara Rapat Kedelapan	Status	Eighth Meeting Agenda
B. Mengubah dan Menambah ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3, sehingga untuk selanjutnya Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi a. Persyaratan Umum. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah. 3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan. 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan. b. Persyaratan Khusus. Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). c. Persyaratan lainnya. 1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 3a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tidak mengurangi hak RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. 3b. Kepada Direksi yang akan habis masa jabatannya, maka perlu dipersiapkan calon-calonnya paling lama 1 (satu) tahun sebelum jatuh tempo masa jabatan, dikecualikan dari ketentuan pasal 12 ayat 9. 3c. Kepada Direksi yang telah habis masa jabatan dan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi tersebut tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).		B. Amend and add provisions in Article 12 paragraph 3, so that Article 12 of the Company's Articles of Association reads as follows: Article 12 1. The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 4 (four) Directors, one of whom is appointed as President Director. 2. Requirements for appointment as a member of the Board of Directors a. General Requirements. An individual, an Indonesian citizen who: 1. Is devout to God Almighty. 2. Is loyal and obedient to the State and Government. 3. Is not directly or indirectly involved in activities that betray the State. 4. Is physically and mentally healthy. 5. Has never engaged in activities detrimental to the State or reprehensible acts in the banking sector. 6. Has not had his/her voting rights revoked by a Court Decision. b. Special Requirements. Members of the Board of Directors who will be appointed must meet specific requirements, the details of which will be outlined in the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS). c. Other Requirements. 1. Pass the Fit and Proper Test in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK). 2. Members of the Board of Directors are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 3a. Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of four years and may be reappointed for a second term after considering the provisions of the Financial Services Authority (OJK), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders (GMS) to dismiss them at any time, stating the reasons. 3b. For Directors whose terms of office are expiring, candidates must be prepared no later than one year before the expiration of their term, except for the provisions of Article 12 paragraph 9. 3c. For Directors whose term of office has expired and whose replacement has not been appointed by the GMS (General Meeting of Shareholders), the Directors may continue to exercise the same authority until the relevant replacement is appointed by the GMS (General Meeting of Shareholders).



Mata Acara Rapat Kedelapan	Status	Eighth Meeting Agenda
3d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3c tersebut diatas, hanya berlaku sampai dengan diselenggarakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) berikutnya terkait pengangkatan anggota Direksi definitif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 4. Tata cara pengangkatan. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 5. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan wewenang RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar. 7. Jika suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. 8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: - Mengundurkan diri; - Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang Undangan; - Meninggal Dunia; - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). C. Mengubah dan Menambah ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 - Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. - Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang perbankan dan keuangan serta bersifat independen dan dapat bekerja menjalankan tugasnya dengan menyediakan waktu yang cukup. - Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris a. Persyaratan Umum.		3d. The provisions referred to in paragraph 3c above are only valid until the next GMS (General Meeting of Shareholders) or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is held regarding the appointment of definitive members of the Board of Directors after passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK). 4. Appointment Procedures. The detailed procedures for appointing members of the Board of Directors will be outlined in a GMS (General Meeting of Shareholders) Resolution. 5. Members of the Board of Directors will be paid a salary, along with facilities and/or allowances. The provisions regarding the amount of the salary, facilities, and/or allowances for members of the Board of Directors are determined based on a resolution of the GMS (General Meeting of Shareholders). The authority of the GMS (General Meeting of Shareholders) may be delegated to the Board of Commissioners. 6. If, for any reason, the position of one or more or all members of the Board of Directors becomes vacant, a GMS must be held within 30 (thirty) days of the vacancy, taking into account the provisions of laws and regulations and the Articles of Association. 7. If for any reason all positions of members of the Board of Directors become vacant, the Company will be temporarily managed by members of the Board of Commissioners appointed by a Board of Commissioners meeting. 8. Members of the Board of Directors may resign from their positions by notifying the Company in writing at least 30 (thirty) days prior to the date of their resignation. 9. The term of office of a member of the Board of Directors ends if: - Resigns; - No longer meets the requirements of the laws and regulations; - Dies; - Dismissed based on a resolution of the GMS (General Meeting of Shareholders). C. Amend and add the provisions in Article 15 paragraph 4, so that Article 15 of the Company's Articles of Association reads as follows: Article 15 - The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members and a maximum of equal number of members of the Board of Directors, one of whom shall be appointed as President Commissioner, and at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners shall be independent commissioners. - Members of the Board of Commissioners may be external parties who possess competence and professionalism in the banking and financial sector, are independent, and can carry out their duties with sufficient time. - Requirements for appointment as a member of the Board of Commissioners a. General Requirements.



Mata Acara Rapat Kedelapan	Status	Eighth Meeting Agenda
Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah. 3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan. 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan. b. Persyaratan Khusus: Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat, harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). c. Persyaratan lainnya : 1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. 4a. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya. Apabila RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memutuskan lain, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah memperhatikan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan tidak mengurangi hak RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebut alasannya. 4b. Kepada Komisaris yang akan habis masa jabatannya, maka perlu dipersiapkan calon-calonnya paling lama 1 (satu) tahun sebelum jatuh tempo masa jabatan, dikecualikan dari ketentuan pasal 15 ayat 9.		An individual, an Indonesian citizen who: 1. Believes in God Almighty. 2. Is faithful and obedient to the State and Government. 3. Is not directly or indirectly involved in activities that betray the State. 4. Is physically and mentally healthy. 5. Has never engaged in activities detrimental to the State or committed reprehensible acts in the banking sector. 6. Has not had his/her voting rights revoked by a Court Decision. b. Special Requirements: Members of the Board of Commissioners who will be appointed must meet special requirements, the details of which will be outlined in the GMS (General Meeting of Shareholders). c. Other Requirements: 1. Passes the Fit and Proper Test in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK). 2. Members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors. 4a. The Board of Commissioners is appointed by the GMS (General Meeting of Shareholders) for a term of four years and may be reappointed for a second term. If the GMS (General Meeting of Shareholders) decides otherwise, members of the Board of Commissioners may be reappointed for a subsequent term after considering the provisions of the Financial Services Authority (OJK), without prejudice to the right of the GMS (General Meeting of Shareholders) to dismiss them at any time, stating the reasons. 4b. For Commissioners whose term of office is about to expire, candidates must be prepared no later than one year before the expiration of their term, except for the provisions of Article 15 paragraph 9.
4c. Kepada Komisaris yang telah habis masa jabatan dan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris tersebut tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 4d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4c tersebut diatas hanya berlaku sampai dengan diselenggarakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) berikutnya terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris definitif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 5. Tata cara pengangkatan. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris, secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).		4c. Commissioners whose term of office has expired and whose replacement has not been appointed by the GMS (General Meeting of Shareholders) may continue to exercise their same authority until a replacement is appointed by the GMS (General Meeting of Shareholders). 4d. The provisions referred to in paragraph 4c above apply only until the next GMS (General Meeting of Shareholders) or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is held regarding the appointment of definitive members of the Board of Commissioners after passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK). 5. Appointment Procedures. The detailed procedures for appointing members of the Board of Commissioners will be outlined in a GMS (General Meeting of Shareholders) resolution.



Mata Acara Rapat Kedelapan	Status	Eighth Meeting Agenda
6. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus ada diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar. 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika : a. Mengundurkan diri ; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan ; c. Meninggal Dunia; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).		6. Members of the Board of Commissioners are paid a salary, along with facilities and/or allowances, the amount of which is determined by a resolution of the GMS (General Meeting of Shareholders). 7. If, for any reason, the position of one or more or all members of the Board of Commissioners becomes vacant, a General Meeting of Shareholders (GMS) must be held within 30 (thirty) days of the vacancy to fill the vacancy, taking into account statutory regulations and the Articles of Association. 8. A member of the Board of Commissioners may resign from his/her position by notifying the Company in writing of his/her intention at least 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. 9. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall end if: a. Resigns; b. No longer meets the requirements of the statutory regulations; c. Dies; d. Dismissed based on a resolution of the GMS (General Meeting of Shareholders).

Mata Acara Rapat Kesembilan	Status	Ninth Meeting Agenda
Mengenai Pengesahan laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Menyetujui dan menerima serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sepanjang tindakan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku perseroan.	Telah Terealisasi	Regarding the Ratification of the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024 (two thousand and twenty-four) financial year. No Shareholders raised questions and/or expressed opinions. Approved, accepted, and ratified the Annual Financial Statements, consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the 2024 (two thousand and twenty-four) financial year, audited by the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, and Karunawan. The Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua were granted full release and discharge from all responsibilities for their management and supervisory actions during the financial year ending December 31, 2024 (thirty-first of December, two thousand and twenty-four), provided that such actions comply with applicable regulations and are reflected in the company's books.

Mata Acara Rapat Kespuluh	Status	Tenth Meeting Agenda
Mengenai Pembagian dan Pengesahan Penggunaan Laba Bersih (Cadangan Umum dan Deviden). Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebesar Rp. 452.679.773.426,- (empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang pembagiannya sebagai sebagai berikut :	Telah Terealisasi	Regarding the Distribution and Approval of the Use of Net Profit (General Reserves and Dividends). No Shareholders raised questions and/or provided opinions. 1. Approving the Use of Net Profit of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024 (two thousand twenty four) Financial Year, amounting to Rp. 452,679,773,426,- (four hundred fifty-two billion six hundred seventy-nine million seven hundred seventy-three thousand four hundred twenty-six rupiah) which is distributed as follows:



Mata Acara Rapat Kesepuluh	Status	Tenth Meeting Agenda
- Deviden sebesar 60% (enam puluh persen) dengan nilai nominal sebesar Rp. 271.607.864.056,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). - Cadangan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai nominal sebesar Rp.181.071.909.370,- (seratus delapan puluh satu miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).		- Dividends of 60% (sixty percent) with a nominal value of Rp. 271,607,864,056 (two hundred seventy-one billion six hundred seven million eight hundred sixty-four thousand fifty-six rupiah). - Reserves of 40% (forty percent) with a nominal value of Rp. 181,071,909,370 (one hundred eighty-one billion seventy-one million nine hundred nine thousand three hundred seventy rupiah).

Mata Acara Rapat Kesebelas	Status	Eleventh Meeting Agenda
Mengenai pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua		Regarding the payment of bonuses to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
- Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua bersumber dari cadangan yang dipisahkan dari laba bersih sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 24 (dua puluh empat). Jumlah Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang sudah dicadangkan dan akan dibayarkan adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). - Bahwa Tantiem yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersumber dari Cadangan yang dipisahkan dari Laba Bersih dalam Tahun Buku 2024 (dua puluh empat) sesuai PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 24 (dua puluh empat) adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 22.633.988.671,- (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan standar tahun sebelumnya berdasarkan laporan keuangan <i>audited</i>, dengan ketentuan Pajak penghasilan ditanggung masing-masing penerima.	Telah Terealisasi	- The payment of bonuses for the Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua is sourced from reserves separated from net profit in accordance with PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) 24 (twenty-four). The amount of bonuses for the Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua that has been reserved and will be paid is 5% (five percent) of the net profit for the 2024 (two thousand and twenty-four) Financial Year. - That the bonuses paid to the Directors and Board of Commissioners of the Company as referred to in paragraph 1 (one) are sourced from reserves separated from net profit in the 2024 (twenty-four) Financial Year in accordance with PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) 24 (twenty-four) is 5% (five percent) of net profit or Rp. 22,633,988,671 (twenty two billion six hundred thirty three million nine hundred eighty eight thousand six hundred seventy one rupiah) in accordance with the previous year's standards based on audited financial reports, with the provision that income tax is borne by each recipient.

Mata Acara Rapat Kedua belas	Status	Agenda of the Twelfth Meeting
Mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Telah Terealisasi	Regarding the Company's 2025 (two thousand and twenty-five) Bank Business Plan (RBB).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or provided opinions.



Mata Acara Rapat Kedua belas	Status	Agenda of the Twelfth Meeting
Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang memuat antara lain : Rencana Pertumbuhan dari posisi per 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat) adalah : • Asset di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp. 34.056.000.000.000,- (tiga puluh empat triliun lima puluh enam miliar rupiah) atau tumbuh 6.05% (enam koma nol lima persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp.32.115.000.000.000,- (tiga puluh dua triliun seratus lima belas miliar rupiah). • Kredit di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp.23.537.000.000.000,- (dua puluh tiga triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) atau tumbuh 8% (delapan persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 21.794.000.000.000,- (dua puluh satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar rupiah). • Dana Pihak Ketiga di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp.26.690.000.000.000,- (dua puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh miliar rupiah) atau tumbuh 8% (delapan persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 24.714.000.000.000,- (dua puluh empat triliun tujuh ratus empat belas miliar rupiah). • Total Pendapatan di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp.3.160.000.000.000,- (tiga triliun seratus enam puluh miliar rupiah) atau tumbuh 18,12% (delapan belas koma dua belas persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 2.675.000.000.000,- (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). • Biaya di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp.2.557.000.000.000,- (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar rupiah) atau tumbuh 22.21% (dua puluh dua koma dua puluh satu persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp.2.092.000.000.000,- (dua triliun sembilan puluh dua miliar rupiah). • Laba/Rugi di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp.603.000.000.000,- (enam ratus tiga miliar rupiah) atau tumbuh 3.45% (tiga koma empat puluh lima persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp.583.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar rupiah). Sedangkan Posisi Rasio-Rasio Penting yaitu : • CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) 26.23% (dua puluh enam koma dua puluh tiga persen). • ROA (<i>Return On Asset</i>) 1.82% (satu koma delapan puluh dua persen). • ROE (<i>Return On Equity</i>) 10.10% (sepuluh koma sepuluh persen). • BOPO (Biaya Operasional Penerimaan Operasional) 86.25% (delapan puluh enam koma dua puluh lima persen). • LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>) 88.29% (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen). • NIM (Net Interest Margin) 6.72% (enam koma tujuh puluh dua persen). • NPL (<i>Non Performing Loan</i>) Gross 2.21 % (dua koma dua puluh satu persen). • NPL (<i>Non Performing Loan</i>) Nett 0.64% (nol koma enam puluh empat persen).		Approving the Company's 2025 (two thousand twenty-five) Bank Business Plan (RBB), which includes, among other things: The Growth Plan as of December 31, 2024 (thirty-first of December, two thousand twenty-four) is: • Assets in 2025 (two thousand twenty-five) amounting to Rp. 34,056,000,000,000 (thirty-four trillion fifty-six billion rupiah), representing a growth of 6.05% (six point zero five percent) from Rp. 32,115,000,000,000 (thirty-two trillion one hundred and fifteen billion rupiah) in 2024 (two thousand twenty-four). • Credit in 2025 (two thousand twenty-five) amounted to Rp. 23,537,000,000,000 (twenty-three trillion five hundred thirty-seven billion rupiah) or grew by 8% (eight percent) from 2024 (two thousand twenty-four) amounting to Rp. 21,794,000,000,000 (twenty-one trillion seven hundred ninety-four billion rupiah). • Third Party Funds in 2025 (two thousand twenty-five) amounted to Rp. 26,690,000,000,000 (twenty-six trillion six hundred ninety billion rupiah) or grew by 8% (eight percent) from 2024 (two thousand twenty-four) amounting to Rp. 24,714,000,000,000 (twenty-four trillion seven hundred fourteen billion rupiah). • Total Revenue in 2025 (two thousand twenty five) amounted to Rp.3,160,000,000,000,- (three trillion one hundred sixty billion rupiah) or grew by 18.12% (eighteen point twelve percent) from 2024 (two thousand twenty four) amounting to Rp.2,675,000,000,000,- (two trillion six hundred seventy five billion rupiah). • Costs in 2025 (two thousand twenty five) amounted to Rp.2,557,000,000,000,- (two trillion five hundred fifty seven billion rupiah) or grew by 22.21% (twenty two point twenty one percent) from 2024 (two thousand twenty four) amounting to Rp.2,092,000,000,000,- (two trillion ninety two billion rupiah). • Profit/Loss in 2025 (two thousand twenty-five) amounted to Rp. 603,000,000,000 (six hundred and three billion rupiah), representing a 3.45% (three point forty-five percent) increase from Rp. 583,000,000,000 (five hundred and eighty-three billion rupiah) in 2024 (two thousand twenty-four). Key Ratios include: • Capital Adequacy Ratio (CAR) 26.23% (twenty-six point twenty-three percent). • Return on Assets (ROA) 1.82% (one point eighty-two percent). • Return on Equity (ROE) 10.10% (ten point ten percent). • BOPO (Operating Costs to Operating Income) 86.25% (eighty-six point twenty-five percent). • LDR (Loan to Deposit Ratio) 88.29% (eighty-eight point twenty-nine percent). • NIM (Net Interest Margin) 6.72% (six point seventy-two percent). • NPL (Non-Performing Loan) Gross 2.21% (two point twenty-one percent). • NPL (Non-Performing Loan) Net 0.64% (zero point sixty-four percent).



Mata Acara Rapat Ketiga belas	Status	Thirteenth Meeting Agenda
Mengenai Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan BANK	Telah Terealisasi	Regarding Approval of the Bank's Recovery Action Plan
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan BANK yang sudah dilaporkan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada akhir bulan November 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dalam periode tersebut belum memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).		Approved the Bank's Recovery Action Plan, which was reported to the Financial Services Authority (OJK) by the end of November 2024 (two thousand and twenty-four), but which had not yet received approval from the General Meeting of Shareholders (GMS).

Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
Mengenai Pengesahan setoran modal yang belum didukung RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebesar Rp.71.025.000.000,- (tujuh puluh satu miliar dua puluh lima juta rupiah).	Telah Terealisasi	Regarding the ratification of the capital injection, which has not been approved by the General Meeting of Shareholders (GMS), amounting to Rp. 71,025,000,000 (seventy-one billion twenty-five million rupiah).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No shareholders raised questions and/or provided opinions.
Menyetujui dan mengesahkan setoran modal sebesar Rp.77.355.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 15.471 (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh satu) lembar saham, sehingga dengan pengesahan ini maka jumlah saham yang disetor oleh para pemegang saham menjadi Rp.2.848.205.000.000,- (dua triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima juta rupiah) atau 569.641 (lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu) lembar saham.	Telah Terealisasi	Approved and ratified the capital injection of Rp. 77,355,000,000 (seventy-seven billion three hundred fifty-five million rupiah) or 15,471 (fifteen thousand four hundred seventy-one) shares, so that with this ratification, the total number of shares paid by shareholders is Rp. 2,848,205,000,000 (two trillion eight hundred forty-eight billion two hundred five million rupiah) or 569,641 (five hundred sixty-nine thousand six hundred forty-one) shares.
Rincian Penyetoran Modal yang disahkan dalam Rapat ini adalah ;		Details of the Capital Injection approved in this Meeting are:
1. PROVINSI PAPUA sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) atau 8.000 (delapan ribu) lembar Saham Seri A.	Telah Terealisasi	1. PAPUA PROVINCE: Rp. 40,000,000,000 (forty billion rupiah) or 8,000 (eight thousand) Series A shares.
2. KOTA JAYAPURA sebesar Rp.1.835.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) lembar Saham Seri A.		2. JAYAPURA CITY: Rp. 1,835,000,000 (one billion eight hundred thirty-five million rupiah) or 367 (three hundred sixty-seven) Series A shares.
3. KABUPATEN JAYAPURA sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) atau 220 (dua ratus dua puluh) lembar Saham Seri A		3. JAYAPURA REGENCY: Rp. 1,100,000,000 (one billion one hundred million rupiah) or 220 (two hundred twenty) Series A shares.
4. KABUPATEN SARMI sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) atau 800 (delapan ratus) lembar Saham Seri A.		4. SARMI REGENCY: Rp. 4,000,000,000 (four billion rupiah) or 800 (eight hundred) Series A shares.
5. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN sebesar Rp.2.210.000.000, (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau 442 (empat ratus empat puluh dua lembar) Saham Seri A.		5. YAPEN ISLANDS REGENCY: Rp. 2,210,000,000 (two billion two hundred and ten million rupiah) or 442 (four hundred and forty-two) Series A shares.
6. KABUPATEN BIAK NUMFOR sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau 114 (seratus empat belas) Saham Seri A.		6. BIAK NUMFOR REGENCY Rp. 570,000,000 (five hundred and seventy million rupiah) or 114 (one hundred and fourteen) Series A shares.
7. KABUPATEN TELUK BINTUNI sebesar Rp.3.170.000.000,- (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) atau 634 (enam ratus tiga puluh empat) lembar Saham Seri A.		7. TELUK BINTUNI REGENCY Rp. 3,170,000,000 (three billion one hundred and seventy million rupiah) or 634 (six hundred and thirty-four) Series A shares.
8. KABUPATEN MERAUKE sebesar Rp.2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 445 (empat ratus empat puluh lima) lembar Saham Seri A		8. MERAUKE REGENCY Rp. 2,225,000,000 (two billion two hundred and twenty-five million rupiah) or 445 (four hundred and forty-five) Series A shares.



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
9. KABUPATEN FAK FAK sebesar Rp.2.325.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 465 (empat ratus enam puluh lima) lembar Saham Seri A		9. FAK REGENCY: Rp2,325,000,000 (two billion three hundred twenty-five million rupiah) or 465 (four hundred sixty-five) Series A shares
10. KABUPATEN MANOKWARI sebesar Rp.1.190.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) atau 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar Saham Seri A		10. MANOKWARI REGENCY: Rp1,190,000,000 (one billion one hundred ninety million rupiah) or 238 (two hundred thirty-eight) Series A shares
11. KABUPATEN KAIMANA sebesar Rp.685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau 137 (seratus tiga puluh tujuh) lembar Saham Seri A		11. KAIMANA REGENCY: Rp685,000,000 (six hundred eighty-five million rupiah) or 137 (one hundred thirty-seven) Series A shares
12. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK sebesar Rp.525.000.000, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 105 (seratus lima) lembar Saham Seri A		12. PEGUUNGAN ARFAK REGENCY: Rp525,000,000 (five hundred twenty-five million rupiah) or 105 (one hundred five) Series A shares
13. KABUPATEN MIMIKA sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau 1.000 (seribu) lembar Saham Seri A		13. MIMIKA REGENCY amounting to Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah) or 1,000 (one thousand) Series A shares
14. KABUPATEN DOGIYAI sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) atau 116 (seratus enam belas) lembar Saham Seri A		14. DOGIYAI REGENCY: Rp. 580,000,000 (five hundred eighty million rupiah) or 116 (one hundred sixteen) Series A shares
15. KABUPATEN PANIAI sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) atau 89 (delapan puluh sembilan) lembar Saham Seri A		15. PANIAI REGENCY: Rp. 445,000,000 (four hundred forty-five million rupiah) or 89 (eighty nine) Series A shares
16. KABUPATEN PUNCAK sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau 200 (dua ratus) lembar Saham Seri A		16. PUNCAK REGENCY: Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) or 200 (two hundred) Series A shares
17. KABUPATEN INTAN JAYA sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau 600 (enam ratus) lembar Saham Seri A		17. INTAN JAYA REGENCY: Rp. 3,000,000,000 (three billion rupiah) or 600 (six hundred) Series A shares
18. KABUPATEN MAPPI sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar Saham Seri A		18. MAPPI REGENCY: Rp. 845,000,000 (eight hundred forty-five million rupiah) or 89 (eighty nine) Series A shares five million rupiah) or 169 (one hundred and sixty-nine) Series A shares
19. KABUPATEN SORONG SELATAN sebesar Rp.1.255.000.000, (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 251 (dua ratus lima puluh satu) lembar Saham Seri A		19. SORONG SELATAN REGENCY Rp. 1,255,000,000 (one billion two hundred and fifty-five million rupiah) or 251 (two hundred and fifty-one) Series A shares
20. KABUPATEN SORONG sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 200 (dua ratus) lembar Saham Seri A		20. SORONG REGENCY Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) or 200 (two hundred) Series A shares
21. KABUPATEN MAYBRAT sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau 400 (empat ratus) lembar Saham Seri A		21. MAYBRAT REGENCY Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah) or 400 (four hundred) Series A shares
22. KOTA SORONG sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Saham Seri A		22. SORONG CITY Rp. 395,000,000 (three hundred and ninety-five million rupiah) or 79 (seventy-nine) Series A shares
23. KSU BPD PAPUA BERDIKARI sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau 400 (empat ratus) lembar Saham Seri B		23. KSU BPD PAPUA BERDIKARI Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah) or 400 (four hundred) Series B shares.

In connection with the aforementioned decision, the meeting hereby amends Article 4, paragraph 2 of the Articles of Association, and Article 4 hereafter reads as follows:

Berhubung dengan hasil keputusan tersebut, maka rapat dengan ini mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dan untuk selanjutnya pasal 4 berbunyi sebagai berikut:



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
MODAL Pasal 4 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah), terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) lembar saham, yang terdiri dari : a. Saham Seri A sebanyak 91 % (sembilan puluh satu persen) atau 728.000 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.640.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus empat puluh miliar rupiah) yang akan disetor oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota setanah Papua, dengan pembagian sebagai berikut : • Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dari Saham Seri A tersebut diatas atau 371.280 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh) lembar, dengan nilai nominal sebesar Rp.1.856.400.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian : - Pemerintah Provinsi Papua sebesar 278.460 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh) Saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.392.300.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), atau 75 % (tujuh puluh lima persen). - Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 92.820 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) Saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp. 464.100.000.000,- (empat ratus enam puluh empat miliar seratus juta rupiah), atau 25 % (dua puluh lima persen). • Pemerintah Kota dan Kabupaten setanah Papua sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) dari Saham Seri A tersebut diatas atau sebesar 356.720 (tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) Saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.783.600.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), b. Saham Seri B sebanyak 9 % (sembilan persen) atau 72.000 (tujuh puluh dua ribu) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) yang akan disetor oleh Pihak Ketiga dan Pegawai Bank Papua melalui Badan Hukum Koperasi Serba Usaha "BANK PAPUA BERDIKARI" (KSU "BP BERDIKARI"). Masing-masing saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).		CAPITAL Article 4 1. The Company's authorized capital is IDR 4,000,000,000,000 (four trillion rupiah), divided into 800,000 (eight hundred thousand) shares, consisting of: a. Series A shares, 91% (ninety-one percent) or 728,000 (seven hundred twenty-eight thousand) shares, with a total nominal value of IDR 4,000,000,000,000. 3,640,000,000,000 (three trillion six hundred and forty billion rupiah) to be paid by the Provincial and Regency/City Governments throughout Papua, with the following distribution: • The Provincial Governments of Papua and West Papua Province, 51% (fifty-one percent) of the aforementioned Series A Shares, or 371,280 (three hundred and seventy-one thousand two hundred and eighty) shares, with a nominal value of Rp. 1,856,400,000,000 (one trillion eight hundred and fifty-six billion four hundred million rupiah), with the following details: - The Provincial Government of Papua, 278,460 (two hundred and seventy-eight thousand four hundred and sixty) Series A Shares with a nominal value of Rp. 1,392,300,000,000 (one trillion three hundred and ninety-two billion three hundred million rupiah), or 75% (seventy-five percent). - The West Papua Provincial Government, 92,820 (ninety-two thousand eight hundred twenty) Series A shares with a nominal value of Rp. 464,100,000,000 (four hundred sixty-four billion one hundred million rupiah), or 25% (twenty-five percent). • The City and Regency Governments throughout Papua, 49% (forty-nine percent) of the aforementioned Series A shares, or 356,720 (three hundred fifty-six thousand seven hundred twenty) Series A shares with a nominal value of Rp. 1,783,600,000,000 (one trillion seven hundred eighty-three billion six hundred million rupiah). b. 9% (nine percent) or 72,000 (seventy-two thousand) Series B shares with a total nominal value of Rp. 360,000,000,000 (three hundred and sixty billion rupiah) will be paid by third parties and Bank Papua employees through the Multipurpose Cooperative Legal Entity "BANK PAPUA BERDIKARI" (KSU "BP BERDIKARI"). Each share has a nominal value of Rp. 5,000,000 (five million rupiah).



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sebanyak 569.641 (lima ratus enam puluh sembilan ratus enam ratus empat puluh satu) lembar saham, yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 556.848 (lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) dan Saham Seri B sebanyak 12.793 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.848.205.000.000, (dua triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima juta rupiah). 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. 4. Setoran modal yang disetorkan oleh pemilik / pemegang saham, secara otomatis akan dicatat sebagai modal yang disetor dalam perseroan. Perubahan Modal Dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai nominal saham yang diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham yang disebut dalam pasal 4 ayat 2 diatas adalah sebagai berikut : 1. PROVINSI PAPUA sebanyak 139.721 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu) lembar saham Seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.698.605.000.000, (enam ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima juta rupiah). 2. KOTA JAYAPURA, sebanyak 17.547 (tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 87.735.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).		2. From the Authorized Capital, 569,641 (five hundred sixty nine hundred six hundred and forty one) shares have been placed and fully paid in cash through the company's cash, consisting of 556,848 (five hundred fifty six thousand eight hundred and forty eight) Series A Shares and 12,793 (twelve thousand seven hundred and ninety three) Series B Shares with a total nominal value of Rp. 2,848,205,000,000 (two trillion eight hundred and forty eight billion two hundred and five million rupiah). 3. Shares still in reserve will be issued by the company according to the Company's capital requirements, with the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS). Shareholders whose names are registered in the Shareholder Register have the preemptive right to subscribe for the shares to be issued within 14 (fourteen) days from the date of the offering. Each shareholder has the right to subscribe in proportion to the number of shares they own (proportional), both for the shares they own and for any remaining shares not subscribed by other shareholders. If, after the 14 (fourteen) day offering period, there are still remaining shares that have not been subscribed, the Board of Directors has the right to offer these remaining shares to a third party. 4. Capital contributions paid by owners/shareholders will automatically be recorded as paid-up capital in the company. Changes to the Authorized Capital will be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) as needed, taking into account applicable laws and regulations. The details of the shareholders, the number of shares, and the nominal value of the shares subscribed and paid by the shareholders referred to in Article 4 paragraph 2 above are as follows: 1. PAPUA PROVINCE, 139,721 (one hundred thirty-nine thousand seven hundred twenty-one) Series A shares with a nominal value of Rp. 698,605,000,000 (six hundred ninety-eight billion six hundred and five million rupiah). 2. JAYAPURA CITY, 17,547 (seventeen thousand five hundred and forty-seven) Series A shares with a nominal value of Rp. 87,735,000,000 (eighty-seven billion seven hundred and thirty-five million rupiah).



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
3. KABUPATEN JAYAPURA sebanyak 10.496 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.52.480.000.000, - (lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).		3. JAYAPURA REGENCY, 10,496 (ten thousand four hundred ninety-six) series A shares with a nominal value of Rp. 52,480,000,000 (fifty-two billion four hundred and eighty million rupiah).
4. KABUPATEN SARMI, sebanyak 15.300 (lima belas ribu tiga ratus ratus) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 76.500.000.000, (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).		4. SARMI REGENCY, 15,300 (fifteen thousand three hundred) series A shares with a nominal value of Rp. 76,500,000,000 (seventy-six billion five hundred million rupiah).
5. KABUPATEN KEEROM, sebanyak 6.274 (enam ribu dua ratus tujuh puluh empat) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 31.370.000.000, - (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).		5. KEEROM REGENCY, 6,274 (six thousand two hundred and seventy-four) series A shares with a nominal value of Rp. 31,370,000,000 (thirty-one billion three hundred and seventy million rupiah).
6. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, sebanyak 10.578 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 52.890. 000. 000, - (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).		6. YAPEN ISLANDS REGENCY, 10,578 (ten thousand five hundred seventy-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 52,890,000,000 (thirty-two billion eight hundred and ninety million rupiah).
7. KABUPATEN WAROPEN, sebanyak 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 30.550.000.000, - (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).		7. WAROPEN REGENCY, 6,110 (six thousand one hundred and ten) series A shares with a nominal value of Rp. 30,550,000,000 (thirty billion five hundred and fifty million rupiah).
8. KABUPATEN BIAK NUMFOR, sebanyak 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 27.305.000.000, (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah).		8. BIAK NUMFOR REGENCY, 5,461 (five thousand four hundred and sixty-one) series A shares with a nominal value of Rp. 27,305,000,000 (twenty-seven billion two hundred and three hundred and five million rupiah).
9. KABUPATEN SUPIORI, sebanyak 5.309 (lima ribu tiga ratus sembilan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 26.545.000.000,(dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).		9. SUPIORI REGENCY, 5,309 (five thousand three hundred and nine) series A shares with a nominal value of Rp. 26,545,000,000 (twenty-six billion one hundred and forty-five million rupiah).
10. KABUPATEN MAMBERAMO RAYA, sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 26.000.000.000, (dua puluh enam miliar rupiah).		10. MAMBE RAMO RAYA REGENCY, 5,200 (five thousand two hundred) series A shares with a nominal value of Rp. 26,000,000,000 (twenty-six billion rupiah).
11. PROVINSI PAPUA BARAT, sebanyak 86.128 (delapan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.430.640.000.000, (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).		11. WEST PAPUA PROVINCE, 86,128 (eighty-six thousand one hundred and twenty-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 430,640,000,000 (four hundred thirty billion six hundred and forty million rupiah).
12. KABUPATEN TELUK BINTUNI, sebanyak 15.168 (lima belas ribu seratus enam puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.75.840.000.000, (tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).		12. TELUK BINTUNI REGENCY, 15,168 (fifteen thousand one hundred sixty-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 75,840,000,000 (seventy-five billion eight hundred and forty million rupiah).
13. KABUPATEN FAK-FAK, sebanyak 12.150 (dua belas ribu seratus lima puluh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 60.750.000.000, (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		13. FAK-F AK REGENCY, 12,150 (twelve thousand one hundred and fifty) series A shares with a nominal value of Rp. 60,750,000,000 (sixty billion seven hundred and fifty million rupiah).



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
14. KABUPATEN MANOKWARI, sebanyak 11.142 (sebelas ribu seratus empat puluh dua) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 55.710.000.000, (lima puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).		14. MANOKWARI REGENCY, 11,142 (eleven thousand one hundred and forty-two) series A shares with a nominal value of Rp. 55,710,000,000 (fifty-five billion seven hundred and ten million rupiah).
15. KABUPATEN KAIMANA, sebanyak 6.548 (enam ribu lima ratus empat puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.32.740.000.000, (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).		15. KAIMANA REGENCY, 6,548 (six thousand five hundred and forty-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 32,740,000,000 (thirty-two billion seven hundred and forty million rupiah).
16. KABUPATEN TELUK WONDAMA, sebanyak 6.220 (enam ribu dua ratus dua puluh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 31.100.000.000, (tiga puluh satu miliar seratus juta rupiah).		16. TELUK WONDAMA REGENCY, 6,220 (six thousand two hundred and twenty) series A shares with a nominal value of Rp. 31,100,000,000 (thirty-one billion one hundred million rupiah).
17. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, sebanyak 4.905 (empat ribu sembilan ratus lima) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.24.525.000.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).		17. PEGUNNUNGAN ARFAK REGENCY, 4,905 (four thousand nine hundred and five) series A shares with a nominal value of Rp. 24,525,000,000 (twenty-four billion five hundred and twenty-five million rupiah).
18. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, sebanyak 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.20.740.000.000, (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).		18. SOUTH MANOKWARI REGENCY, 4,148 (four thousand one hundred and forty-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 20,740,000,000 (twenty billion seven hundred and forty million rupiah).
19. KABUPATEN MIMIKA, sebanyak 17.346 (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh enam) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.86.730.000.000,-(delapan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).		19. MIMIKA REGENCY, 17,346 (seventeen thousand three hundred and forty-six) series A shares with a nominal value of Rp. 86,730,000,000 (eighty-six billion seven hundred and thirty million rupiah).
20. KABUPATEN PUNCAK JAYA, sebanyak 12.350 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		20. PUNCAK JAYA REGENCY, 12,350 (twelve thousand three hundred and fifty) series A shares with a nominal value of Rp. 61,750,000,000 (sixty-one billion seven hundred and fifty million rupiah).
21. KABUPATEN NABIRE, sebanyak 7.356 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 36.780.000.000, (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).		21. NABIRE REGENCY, 7,356 (seven thousand three hundred and fifty-six) series A shares with a nominal value of Rp. 36,780,000,000 (thirty-six billion seven hundred and eighty million rupiah).
22. KABUPATEN DOGIYAI, sebanyak 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 27.690.000.000, (dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).		22. DOGIYAI REGENCY, 5,538 (five thousand five hundred and thirty-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 27,690,000,000 (twenty-seven billion six hundred and ninety million rupiah).
23. KABUPATEN PANIAI, sebanyak 4.256 (empat ribu dua ratus lima puluh enam) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 21.280.000.000, (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).		23. PANIAI REGENCY, as many as 4,256 (four thousand two hundred and fifty six) series A shares with a nominal value of Rp. 21,280,000,000 (twenty one billion two hundred and eighty million rupiah).



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
24. KABUPATEN PUNCAK, sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah).		24. PUNCAK REGENCY, 4,000 (four thousand) series A shares with a nominal value of Rp. 20,000,000,000 (twenty billion rupiah).
25. KABUPATEN INTAN JAYA, sebanyak 3.147 (tiga ribu seratus empat puluh tujuh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.15.735.000.000, (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).		25. INTAN JAYA REGENCY, 3,147 (three thousand one hundred and forty-seven) series A shares with a nominal value of Rp. 15,735,000,000 (fifteen billion seven hundred and thirty-five million rupiah).
26. KABUPATEN DEIYAI, sebanyak 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 11.750.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)		26. DEIYAI REGENCY, 2,350 (two thousand three hundred and fifty) series A shares with a nominal value of Rp. 11.750,000,000 (eleven billion seven hundred and fifty million rupiah)
27. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, sebanyak 12.444 (dua belas ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 62.220.000.000, (enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).		27. PEGUNDAM BINTANG REGENCY, 12,444 (twelve thousand four hundred and forty-four) Series A shares with a nominal value of Rp. 62,220,000,000 (sixty-two billion two hundred and twenty million rupiah).
28. KABUPATEN JAYAWIJAYA, sebanyak 8.763 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 43.815.000.000, (empat puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).		28. JAYAWIJAYA REGENCY, 8,763 (eight thousand seven hundred and sixty-three) Series A shares with a nominal value of Rp. 43,815,000,000 (forty-three billion eight hundred and fifteen million rupiah).
29. KABUPATEN TOLIKARA, sebanyak 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 38.155.000.000, - (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).		29. TOLIKARA REGENCY, 7,631 (seven thousand six hundred and thirty-one) Series A shares with a nominal value of Rp. 38,155,000,000,- (thirty-eight billion one hundred fifty-five million rupiah).
30. KABUPATEN NDUGA, sebanyak 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 16.665.000.000,- (enam belas miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).		30. NDUGA REGENCY, 3,333 (three thousand three hundred thirty-three) series A shares with a nominal value of Rp. 16,665,000,000,- (sixteen billion six hundred sixty-five million rupiah).
31. KABUPATEN YAHUKIMO, sebanyak 2.591 (dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 12.955.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).		31. YAHUKIMO REGENCY, 2,591 (two thousand five hundred ninety-one) series A shares with a nominal value of Rp. 12,955,000,000,- (twelve billion nine hundred fifty-five million rupiah).
32. KABUPATEN LANNY JAYA, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).		32. LANNY JAYA REGENCY, 2,500 (two thousand five hundred) series A shares with a nominal value of Rp. 12,500,000,000,- (twelve billion five hundred million rupiah).
33. KABUPATEN YALIMO, sebanyak 1.419 (seribu empat ratus sembilan belas) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 7.095.000.000, (tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah).		33. YALIMO REGENCY, 1,419 (one thousand four hundred and nineteen) series A shares with a nominal value of Rp. 7,095,000,000 (seven billion ninety-five million rupiah).
34. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH, sebanyak 1.036 (seribu tiga puluh enam) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 5.180.000.000, (lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah).		34. CENTRAL MAMBERAMO REGENCY, 1,036 (one thousand thirty-six) series A shares with a nominal value of Rp. 5,180,000,000 (five billion one hundred and eighty million rupiah).



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
35. KABUPATEN MERAUKE, sebanyak 21.702 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 108.510.000.000,- (seratus delapan miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).		35. MERAUKE REGENCY, 21,702 (twenty-one thousand seven hundred and two) series A shares with a nominal value of Rp. 108,510,000,000 (one hundred and eight billion five hundred and ten million rupiah).
36. KABUPATEN ASMAT, sebanyak 8.800 (delapan ribu delapan ratus) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 44. 000. 000. 000, - (empat puluh empat miliar rupiah).		36. ASMAT REGENCY, 8,800 (eight thousand eight hundred) series A shares with a nominal value of Rp. 44,000,000,000 (forty-four billion rupiah).
37. KABUPATEN MAPPI, sebanyak 8.076 (delapan ribu tujuh puluh enam) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 40.380.000.000, (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).		37. MAPPI REGENCY, 8,076 (eight thousand seventy-six) series A shares with a nominal value of Rp. 40,380,000,000 (forty billion five hundred and three hundred and eighty million rupiah).
38. KABUPATEN BOVEN DIGOEL, sebanyak 6.822 (enam ribu delapan ratus dua puluh dua) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.34.110.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus sepuluh juta rupiah).		38. BOVEN DIGOEL REGENCY, 6,822 (six thousand eight hundred twenty-two) series A shares with a nominal value of Rp. 34,110,000,000 (thirty-four billion one hundred and ten million rupiah).
39. KABUPATEN RAJA AMPAT, sebanyak 13.638 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh delapan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp.68.190.000.000, - (enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).		39. RAJA AMPAT REGENCY, 13,638 (thirteen thousand six hundred and thirty-eight) series A shares with a nominal value of Rp. 68,190,000,000 (sixty-eight billion one hundred and ninety million rupiah).
40. KABUPATEN SORONG SELATAN, sebanyak 12.004 (dua belas ribu empat) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 60.020.000.000, - (enam puluh miliar dua puluh juta rupiah).		40. SOUTH SORONG REGENCY, 12,004 (twelve thousand four) series A shares with a nominal value of Rp. 60,020,000,000 (sixty billion twenty million rupiah).
41. KABUPATEN SORONG, sebanyak 7.955 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 39. 775.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).		41. SORONG REGENCY, 7,955 (seven thousand nine hundred fifty-five) series A shares with a nominal value of Rp. 39,775,000,000 (thirty-nine billion seven hundred seventy-five million rupiah).
42. KABUPATEN MAYBRAT, sebanyak 5.015 (lima ribu lima belas) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 25.075.000.000, (dua puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah).		42. MAYBRAT REGENCY, 5,015 (five thousand fifteen) series A shares with a nominal value of Rp. 25,075,000,000 (twenty-five billion seventy-five million rupiah).
43. KABUPATEN TAMBRAUW, sebanyak 4.602 (empat ribu enam ratus dua) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 23.010.000.000,- (dua puluh tiga miliar sepuluh juta rupiah).		43. TAMBRAUW REGENCY, 4,602 (four thousand six hundred and two) series A shares with a nominal value of Rp. 23,010,000,000 (twenty-three billion ten million rupiah).
44. KOTA SORONG, sebanyak 3.769 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) lembar saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 18.845.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).		44. SORONG CITY, 3,769 (three thousand seven hundred sixty-nine) series A shares with a nominal value of Rp. 18,845,000,000 (eighteen billion eight hundred forty-five million rupiah).



Mata Acara Rapat Keempat belas	Status	Agenda of the Fourteenth Meeting
45. KOPERASI SERBA USAHA BANK PAPUA BERDIKARI" KSU "BP-BERDIKARI") sebanyak 12.793 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) lembar saham seri B dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 63.965.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 569.641 (lima ratus enam puluh sembilan enam ratus empat puluh satu) lembar saham, yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 556.848 (lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) lembar saham dan Saham Seri B sebanyak 12.793 lembar dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.848.205.000.000,- (dua triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima juta rupiah).		45. PAPUA BERDIKARI BANK MULTI-PURPOSE COOPERATIVE (KSU "BP-BERDIKARI") as many as 12,793 (twelve thousand seven hundred and ninety-three) series B shares with a nominal value of Rp. 63,965,000,000,- (sixty-three billion nine hundred and sixty-five million rupiah). So that the total is 569,641 (five hundred sixty nine six hundred and forty one) shares, consisting of Series A Shares totaling 556,848 (five hundred fifty six thousand eight hundred and forty eight) shares and Series B Shares totaling 12,793 shares (twelve thousand seven hundred and ninety three) shares with a total nominal value of Rp. 2,848,205,000,000,- (two trillion eight hundred and forty eight billion two hundred and five million rupiah).

Mata Acara Rapat Kelima belas	Status	Fifteenth Meeting Agenda
Tentang Realisasi dan Komitmen Setoran Modal Tahun 2021 - 2026 (dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh enam) PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan komunikasi secara langsung dengan para pemegang saham.	Telah Terealisasi	Concerning the Realization and Commitment of Capital Deposits for 2021-2026 (two thousand twenty-one to two thousand twenty-six) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No Shareholders raised questions and/or expressed opinions. The Board of Directors and the Board of Commissioners are to communicate directly with the shareholders.

Mata Acara Rapat Keenam belas	Status	Sixteenth Meeting Agenda
Tentang pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 1. Menyetujui Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa dan atau melakukan audit Laporan KEUANGAN PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). 2. Laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana tersebut di atas disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Telah Terealisasi	Concerning the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2025 (two thousand twenty-five) financial year. No Shareholders raised questions and/or provided opinions. 1. Approved the Granting of Authority to the Board of Commissioners to appoint and determine a Public Accounting Firm that will examine and/or audit the FINANCIAL Report of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2025 (two thousand twenty-five) Financial Year. 2. The Public Accountant's audit report as mentioned above shall be submitted in writing to the General Meeting of Shareholders (GMS)..

Mata Acara Rapat Ketujuh belas	Status	Agenda of the Seventeenth Meeting
Mengenai Usulan tentang cuti Dewan Komisaris dan Direksi untuk perjalanan rohani (disamakan dengan peraturan perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang Cuti Wisata Rohani dan Usulan Tentang <i>Medical Checkup</i> Dewan Komisaris dan Direksi yang semula 4 (empat) hari kerja menjadi 7 (tujuh) hari kerja termasuk waktu perjalanan pergi dan pulang selama 2 (dua) hari kerja. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.	Telah Terealisasi	Regarding the Proposal regarding leave for the Board of Commissioners and Directors for religious travel (equalized with the company regulations of PT Bank Pembangunan Daerah Papua regarding Spiritual Travel Leave and the Proposal Regarding Medical Checkups for the Board of Commissioners and Directors which were originally 4 (four) working days to 7 (seven) working days including travel time there and back for 2 (two) working days. No Shareholders raised questions and/or provided opinions.



Mata Acara Rapat Ketujuh belas	Status	Agenda of the Seventeenth Meeting
Menyetujui <i>Medical Checkup</i> dan Wisata Rohani Dewan Komisaris dan Direksi serta menyetujui perubahan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 12/ SK/RUPS-BPD/V/2014 tanggal 14-05-2014 (empat belas Mei dua ribu empat belas) tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikan Manfaat Pensiun Bagi Pegawai Pensiunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagai berikut : - Pasal 4 Ayat (2) angka 2.4 diubah sehingga berbunyi : <i>Medical Checkup</i> diberikan kepada Direksi 1 (satu) tahun sekali, dengan fasilitas : - Penggantian seluruh biaya <i>Medical Checkup</i> - Biaya Perjalanan Dinas selama 7 (tujuh) hari kerja termasuk waktu perjalanan pergi dan pulang selama 2 (dua) hari kerja. - Pasal 7 Ayat (2) angka 2.3 diubah sehingga berbunyi : <i>Medical Checkup</i> diberikan kepada Komisaris 1 (satu) tahun sekali, dengan fasilitas : - Penggantian seluruh biaya <i>Medical Checkup</i>. Biaya Perjalanan Dinas selama 7 (tujuh) hari kerja termasuk - waktu perjalanan pergi dan pulang selama 2 (dua) hari kerja. - Menambahkan 1 (satu) Ayat pada Pasal 4 yaitu Pasal 4 Ayat 13, berbunyi : 13 Memberikan kesempatan pada Direksi untuk melaksanakan cuti wisata rohani 1 (satu) kali selama menjabat sebagai Direksi dan untuk pelaksanaan wisata rohani bagi Direksi dengan mempertimbangkan kewajaran waktu pelaksanaannya. - Menambahkan 1 (satu) Ayat pada Pasal 7 yaitu Pasal 7 Ayat 11, berbunyi : 11 Memberikan kesempatan pada Dewan Komisaris untuk melaksanakan cuti wisata rohani 1 (satu) kali selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan untuk pelaksanaan wisata rohani bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kewajaran waktu pelaksanaannya.		<i>Approving the medical checkup and Spiritual Tour of the Board of Commissioners and Directors and approving the amendment to the Decree of the General Meeting of Shareholders Number 12/ SK/RUPS-BPD/V/2014 dated 14-05-2014 (fourteenth of May two thousand and fourteen) concerning the Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners and the Increase in Pension Benefits for Retired Employees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, as follows:</i> <i>Article 4 Paragraph (2) number 2.4 is amended to read:</i> <i>Medical checkups are provided to Directors once a year, with the following benefits:</i> <i>Reimbursement of all medical checkup costs</i> <i>Travel expenses for 7 (seven) working days, including 2 (two) working days of travel time.</i> <i>Article 7 Paragraph (2) number 2.3 is amended to read:</i> <i>Medical checkups are provided to Commissioners once a year, with the following benefits:</i> <i>Reimbursement of all medical checkup costs. Travel expenses for 7 (seven) working days, including</i> <i>Travel time for 2 (two) working days.</i> <i>One paragraph is added to Article 4, namely Article 4 Paragraph 13, which reads:</i> <i>Provides Directors with the opportunity to take one religious leave during their term as Directors and to undertake religious leave for Directors, taking into account the reasonableness of the timeframe.</i> <i>Adding one paragraph to Article 7, namely Article 7 Paragraph 11, which reads:</i> <i>Provides the Board of Commissioners with the opportunity to take one religious leave during their term as Board of Commissioners, and the Board of Commissioners must consider the reasonableness of the timeframe for such leave.</i>

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2025 DAN REALISASINYA

IMPLEMENTATION OF THE 2025 EXTRAORDINARY GMS AND ITS REALIZATION

Pemberitahuan	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan Pemanggilan RUPS yang dimuat di 3 (tiga) media cetak: <i>Harian Pagi Tabura Pos</i> , <i>Papua Pos Nabire</i> , <i>Harian Cenderawasih Pos</i> dan <i>Website Bank Papua</i> yang terbit pada tanggal 6 Maret 2025	Membuat undangan kepada 45 pemegang saham Bank Papua dengan Nomor undangan yang berbeda-beda.	Dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua	Akta Risalah RUPS Nomor 10 tanggal 20 Maret 2025



PIHAKE INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Hingga 31 Desember 2025, Bank Papua belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, sehingga belum memerlukan pihak independen untuk menghitung suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Pihak independen yang ditunjuk untuk menyusun Akta RUPS LB adalah Maryatie Simanjuntak, SH.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA TAHUN 2025

Berikut adalah daftar Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2025.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Hadir
2.	Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	Hadir
3.	Dortheis Sesa	Komisaris Independen	Hadir
4.	Arobi Ahmad	Komisaris Independen	Hadir
5.	Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Hadir
6.	Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Hadir
7.	Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Hadir
8.	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Hadir
9.	Pujianto	Direktur Keuangan	Hadir
10.	Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Hadir

INDEPENDENT VOTE COUNTING PARTY

As of December 31, 2025, Bank Papua has not listed its shares on the Stock Exchange; therefore, it does not require an independent party to count votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The independent party appointed to prepare the Deed of the EGMS is Maryatie Simanjuntak, SH.

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The following is a list of the Board of Commissioners and Directors of Bank Papua who attended the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.



KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS LUAR BIASA TAHUN 2025

RESOLUTIONS AND REALIZATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) 2025

Mata Acara Rapat Pertama	Status	First Meeting Agenda
Tentang Peraturan Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 20-03-2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima). Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		Concerning the Rules of Procedure for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua dated March 20, 2025 (the twentieth of March, two thousand and twenty-five). No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui Peraturan dimaksud menjadi Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 20-03-2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima) dengan beberapa catatan : 1. Pasal 3 ayat 1 dirubah menjadi : Pemimpin rapat adalah Pemegang Saham Pengendali dan Mayoritas Provinsi Papua, Pemegang Saham Pengendali (Provinsi Papua Barat). 2. pasal 4 ayat 2 dan 3 dihilangkan. 3. Pasal 5 ayat 4 dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Penyampaian Laporan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) tentang Rekomendasi Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). 4. Pasal 5 ayat 5 dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Pembahasan dan Penetapan Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua. 5. Pasal 9 ayat 1 dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Pemimpin rapat dan seluruh pemegang saham melakukan pembahasan dan pemilihan Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen Perseroan untuk periode tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh Sembilan). 6. Pasal 10 ayat 6 dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : pemegang saham hanya dapat memilih 1 (satu) Calon Direktur Bisnis, 1 (satu) Calon Direktur Operasional, 1 (satu) Calon Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Calon Komisaris Independen dan 1 (satu) Calon Komisaris Non Independen Perseroan dari calon-calon yang diusulkan. 7. Pasal 10 ayat 9 dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : kepada Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen Perseroan terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).	Telah Terealisasi	Approving the Regulations referred to as the Rules of Procedure for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated 20-03-2025 (the twentieth of March two thousand and twenty five) with several notes: 1. Article 3 paragraph 1 is amended to read: The meeting chair is the Controlling and Majority Shareholder of Papua Province, and the Controlling Shareholder (West Papua Province). 2. Article 4 paragraphs 2 and 3 are removed. 3. Article 5 paragraph 4 is amended to read as follows: Submission of the Report of the Chair of the Remuneration and Nomination Committee (KRN) regarding Recommendations for Candidates for Business Director, Candidates for Operational Director, Candidates for Compliance Director, Candidates for Independent Commissioner, and Candidates for Non-Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, which will mature in 2025 (two thousand twenty-five). 4. Article 5 paragraph 5 is amended to read as follows: Discussion and Determination of Candidates for Business Director, Candidates for Operational Director, Candidates for Compliance Director, Candidates for Independent Commissioner, and Candidates for Non-Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. 5. Article 9 paragraph 1 is amended to read as follows: The meeting leader and all shareholders will discuss and elect the candidates for Business Director, Operational Director, Compliance Director, Independent Commissioner, and Non-Independent Commissioner of the Company for the period of 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine). 6. Article 10 paragraph 6 is amended to read as follows: Shareholders may only elect 1 (one) candidate for Business Director, 1 (one) candidate for Operational Director, 1 (one) candidate for Compliance Director, 1 (one) candidate for Independent Commissioner, and 1 (one) candidate for Non-Independent Commissioner of the Company from the proposed candidates. 7. Article 10 paragraph 9 is amended to read as follows: the candidates for Business Director, Operational Director, Compliance Director, Independent Commissioner and Non-Independent Commissioner of the Company are elected by a Decision Letter of the EGMS (Extraordinary General Meeting of Shareholders).



Mata Acara Rapat Kedua	Status	First Meeting Agenda
Tentang Penetapan Calon Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Komisaris Independen dan Komisaris non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. A. 1. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai bakal Calon Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Komisaris Independen dan Komisaris non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), sebagai berikut: a. Bakal Calon Direktur Bisnis : - JONATHAN AUPARAY; - PETRUS AGUS SOLEMAN MALITALLO ; b. Bakal Calon Direktur Operasional : - ERNA M. KAPISA; - SIMON GIAY ; - ANDARIAS BAUNIK; - BERTHA AFFAR. c. Bakal Calon Direktur Kepatuhan : - BETTY JULIAANTJE PARINUSSA; - USMANN SADIARAJA SARAGIH ; - MEAKY GA. BOLANG. d. Bakal Calon Komisaris Independen: - M. RIDWAN RUMASUKUN; - DORTHEIS SESA. e. Bakal Calon Komisaris non Independen : - ALI BAHAM TEMONGMERE; - ABIA ULLU. 2. Untuk pemilihan Calon Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Komisaris Independen dan Komisaris non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), atas musyawarah untuk mufakat dari peserta RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dilakukan dengan voting. - Kecuali untuk Bakal Calon Direktur Kepatuhan dan Bakal Calon Komisaris Independen yang sekarang ini masih aktif, dimana apabila masa jabatan mereka telah berakhir masih dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen, maka atas musyawarah untuk mufakat dari peserta RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), apabila voting suara terbanyak dari pemilihan calon tersebut jatuh kepada mereka, langsung ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan pertimbangan berdasarkan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dalam periode sebelumnya, apabila diperpanjang/diangkat kembali dalam periode berikutnya maka tidak perlu mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kembali.	Telah Terealisasi	Regarding the Appointment of Candidates for Business Director, Operational Director, Compliance Director, Independent Commissioner, and Non-Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the Period of 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine). No Shareholders raised questions and/or provided opinions. A. 1. To appoint the following names as prospective candidates for the positions of Business Director, Operations Director, Compliance Director, Independent Commissioner, and Non-Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the period of 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine), as follows: a. Prospective Candidates for Business Director: - JONATHAN AUPARAY; - PETRUS AGUS SOLEMAN MALITALLO; b. Prospective Candidates for Operations Director: - ERNA M. KAPISA; - SIMON GIAY; - ANDARIAS BAUNIK; - BERTHA AFFAR. c. Prospective Candidates for Compliance Director: - BETTY JULIAANTJE PARINUSSA; - USMANN SADIARAJA SARAGIH; - MEAKY GA. BOLANG. d. Prospective Independent Commissioner Candidates: - M. RIDWAN RUMASUKUN; - DORTHEIS SESA. e. Prospective Non-Independent Commissioner Candidates: - ALI BAHAM TEMONGMERE; - ABIA ULLU. 2. For the election of the Candidates for Business Director, Operational Director, Compliance Director, Independent Commissioner, and Non-Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the period of 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine), the election will be conducted by voting based on deliberation for consensus among the participants of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). - Except for the Prospective Compliance Director and Prospective Independent Commissioner who are currently active, where upon the expiration of their term of office they may still be reappointed for another term as Compliance Director and Independent Commissioner, respectively, the election will be based on deliberation for consensus among the participants. EGMS (Extraordinary General Meeting of Shareholders), if the majority of votes from the election of the candidate falls to them, they will be immediately appointed as Compliance Director and Independent Commissioner for the period of 2025 (two thousand twenty five) to 2029 (two thousand twenty nine), with consideration based on the regulations of the OJK (Financial Services Authority) regarding the <i>Fit and Proper Test</i> for Members of the Board of Directors and/ or Members of the Board of Commissioners who have passed the <i>Fit and Proper Test</i> in the previous period, if extended/reappointed in the following period, there is no need to take the <i>Fit and Proper Test</i> by the OJK (Financial Services Authority) again.



Mata Acara Rapat Kedua	Status	First Meeting Agenda
B. Dari hasil pemilihan Calon Direktur Bisnis, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan, telah terpilih : - Calon Direktur Bisnis Periode 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh Sembilan). - Nama: JONATHAN AUPARAY. Pekerjaan: Karyawan BUMD. - Nama : PETRUS AGUS SOLEMAN MALITALLO. Pekerjaan: Karyawan BUMD. - Calon Direktur Operasional Periode 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh Sembilan). - Nama : BERTHA AFFAR. Pekerjaan: Karyawan BUMD. - Nama : ANDARIAS BAUNIK. Pekerjaan : Karyawan BUMD. - Direktur Kepatuhan Terpilih Periode 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) diangkat kembali terhitung mulai tanggal 08-12-2025 (delapan Desember dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 07-12-2029 (tujuh Desember dua ribu dua puluh sembilan). - Nama: BETTY JULIAANTJE PARINUSSA. Pekerjaan: Karyawan BUMD. - Dewan Komisaris agar melakukan proses administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap Calon Direktur Bisnis dan Calon Direktur Operasional. - Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi beban PT Bank Pembangunan Daerah Papua C. Dari hasil pemilihan Calon Komisaris Independen dan Komisaris non Independen, telah terpilih :		B. Based on the election results for the candidates for Business Director, Operations Director, and Compliance Director, the following have been elected: - Candidate for Business Director for the period 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine). - Name: JONATHAN AUPARAY. Occupation: Regional-Owned Enterprise (BUMD) Employee. - Name: PETRUS AGUS SOLEMAN MALITALLO. Occupation: Regional-Owned Enterprise (BUMD) Employee. - Candidate for Operational Director for the period 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine). - Name: BERTHA AFFAR. Occupation: Regional-Owned Enterprise Employee. - Name: ANDARIAS BAUNIK. Occupation: Regional-Owned Enterprise Employee. - The elected Director of Compliance for the period of 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine) is reappointed effective December 8, 2025 (eighth of December, two thousand twenty-five) to December 7, 2029 (seventh of December, two thousand twenty-nine). - Name: BETTY JULIAANTJE PARINUSSA. Occupation: Regional-Owned Enterprise (BUMD) Employee. Address: Jalan Jati Luhur Raya DB No. 2, Neighborhood Association (Rukun Tetangga) 002, Community Association (Rukun Warga) 012, Jaka Sampurna Village, West Bekasi District, West Java Province. NIK: 3275024111530010. - The Board of Commissioners shall carry out the administrative process in accordance with applicable laws and regulations for the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK) for the prospective Business Director and Operational Director. - All costs incurred in conducting the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK) shall be borne by PT Bank Pembangunan Daerah Papua. C. Based on the results of the selection of the Independent Commissioner and Non-Independent Commissioner Candidates, the following have been elected:



Mata Acara Rapat Kedua	Status	First Meeting Agenda
- Komisaris Independen Terpilih Periode 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) diangkat kembali terhitung mulai tanggal 19-04-2025 (Sembilan belas April dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 18-04-2029 (delapan belas April dua ribu dua puluh sembilan) - Nama : DORTHEIS SESA. - Pekerjaan: Pensiunan. - Calon Komisaris Non Independen Periode 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). - Nama : ALI BAHAM TEMONGMERE. - Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil. - Dewan Komisaris agar melakukan proses administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap Calon Komisaris Non Independen. - Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi beban PT Bank Pembangunan Daerah Papua.		<i>The elected Independent Commissioner for the period 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine) will be reappointed effective April 19, 2025 (the nineteenth of April, two thousand twenty-five) to April 18, 2029 (the eighteenth of April, two thousand twenty-nine).</i> <i>Name: DORTHEIS SESA.</i> <i>Occupation: Retired.</i> <i>Candidate for Non-Independent Commissioner for the period 2025 (two thousand twenty-five) to 2029 (two thousand twenty-nine).</i> <i>Name: ALI BAHAM TEMONGMERE.</i> <i>Occupation: Civil Servant.</i> <i>The Board of Commissioners is to carry out the administrative process in accordance with applicable laws and regulations for the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK) for Non-Independent Commissioner Candidates.</i> <i>All costs incurred in conducting the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK) shall be borne by PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2024 DAN REALISASINYA

IMPLEMENTATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) 2024 AND ITS REALIZATION

Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan Pemanggilan RUPS yang dimuat di 3 (tiga) media cetak: Harian Pagi Tabura Pos, Papua Pos Nabire, Harian Cenderawasih Pos dan Website Bank Papua yang terbit pada tanggal 16 Februari 2024	Dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2024 bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari	Laporan atas Resume RUPST (notaril) dan Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST, dicatat di Akta No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris Lience, S.H., M.Kn., di Kota Manokwari pada tanggal 04 Maret 2024 dan telah disampaikan ke OJK

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Hingga 31 Desember 2024, Bank Papua belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, sehingga pihak independen tidak diperlukan untuk melakukan perhitungan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pihak independen yang bertanggung jawab sebagai pembuat Akta RUPS adalah Lience, S.H., M.Kn.

INDEPENDENT VOTE COUNTING PARTY

As of December 31, 2024, Bank Papua has not listed its shares on the Stock Exchange; therefore, an independent party is not required to count the votes at the General Meeting of Shareholders (GMS). The independent party responsible for drafting the GMS Deed is Lience, S.H., M.Kn.



REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut.

SUMMARY OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024

The Board of Commissioners and Directors of Bank Papua in attendance at the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 were as follows.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Position	Attendance
1.	Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Hadir	President Commissioner	Attendance
2.	Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	Hadir	Non-Independent Commissioner	Attendance
3.	Dortheis Sesa	Komisaris Independen	Hadir	Independent Commissioner	Attendance
4.	Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	Hadir	Independent Commissioner	Attendance
5.	Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Hadir	President Director	Attendance
6.	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Hadir	Business Director	Attendance
7.	Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Hadir	Operational Director	Attendance
8.	Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Hadir	Compliance Director	Attendance

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

DECISIONS AND IMPLEMENTATION OF THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MANAGEMENT SUMMIT

Mata Acara Rapat Pertama	Status	First Meeting Agenda
Mengenai pembahasan peraturan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 4-3-2024.	Telah Terealisasi	Regarding the discussion of the rules of procedure for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated August 8, 2024.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		There were no shareholders who raised questions and/or provided opinions.
Menyetujui dan mengesahkan Peraturan dimaksud menjadi Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 4-3-2024.		Approved the aforementioned regulation as the Rules of Procedure for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated August 8, 2024.
Mata Acara Rapat Kedua	Status	Second Meeting Agenda
Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2023.	Telah Terealisasi	Regarding the election of an Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, which has been approved by OJK (Financial Services Authority).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		There were no shareholders who raised questions and/or provided opinions.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2023. yang telah dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini.		Appointed the Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the term of 2024 to 2028, namely: Mr. Victor Abraham Abaidata, Bachelor of Law.



Mata Acara Rapat Ketiga	Status	Third Meeting Agenda
Mengenai Pengesahan Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31-12-2023.	Telah Terealisasi	Regarding the Ratification of the Financial Statements and Utilization of Profits of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2023 Financial Year ending December 31, 2023.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui dan menerima serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi, Perseroan untuk tahun Buku 2023 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 sepanjang tindakan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku perseroan.		Approved, accepted, and ratified the Annual Financial Statements, consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the 2023 Financial Year, audited by the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, and Karunawan. The Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua were fully released from responsibility for their management and supervisory actions during the Financial Year ending December 31, 2023, provided that their actions complied with applicable regulations and were reflected in the Company's books.

Mata Acara Rapat Keempat	Status	Fourth Meeting Agenda
Mengenai Pembagian dan Pengesahan Penggunaan Laba Bersih (Cadangan umum dan Deviden) dan Penetapan Pembayaran Tantiem Pengurus Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) Tahun Buku 2023.	Telah Terealisasi	Regarding the Distribution and Approval of Net Profit Utilization (General Reserves and Dividends) and Determination of Bonus Payments for the Company's Management (Board of Directors and Board of Commissioners) for the 2023 Financial Year.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2023, sebesar Rp.427.022.945.595,00. Menyetujui Pembayaran Tantiem Pengurus Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) Tahun Buku 2023.		Approved and ratified the use of PT Bank Pembangunan Daerah Papua's net profit for the 2023 financial year, amounting to Rp427,022,945,595.00. Approved the payment of bonuses to the Company's management (Board of Directors and Board of Commissioners) for the 2023 financial year.

Mata Acara Rapat Kelima	Status	Fifth Meeting Agenda
Mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).	Telah Terealisasi	Concerning the Bank Business Plan (RBB) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for 2024 (two thousand and twenty-four).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or offered opinions.
Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua).		Approved and ratified the Bank Business Plan (RBB) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Mata Acara Rapat Keenam	Status	Sixth Meeting Agenda
Mengenai Pengesahan setoran modal yang belum didukung oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	Telah Terealisasi	Regarding the ratification of capital injections not yet supported by the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui dan mengesahkan setoran modal dari para pemegang saham yang belum didukung oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp.65.720.000.000,00 atau sebanyak 13.144 lembar saham.		Approved and ratified the capital injections from shareholders not yet supported by the General Meeting of Shareholders (GMS) amounting to Rp65,720,000,000.00, or 13,144 shares.



Mata Acara Rapat Ketujuh	Status	Seventh Meeting Agenda
Mengenai Rencana dan Realisasi Setoran Modal Tahun 2021-2026.	Telah Terealisasi	Regarding the Capital Deposit Plan and Realization for 2021-2026.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui rencana setoran kekurangan Modal sebesar Rp.1.229.260.000.000,00 dari yang telah ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 yang seharusnya selesai disetor pada Tahun 2019 diperpanjang menjadi 6 (enam) Tahun sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2026, yang dapat disetor sekaligus dan/atau bertahap sesuai yang telah ditetapkan.		Approved the planned capital deposit of Rp1,229,260,000,000.00, the shortfall in the capital deposit amounting to Rp4,000,000,000,000.00 set at the 2014 General Meeting of Shareholders (GMS). The deposit period, originally scheduled for 2019, has been extended to six years, from 2021 to 2026. The deposit can be made in one lump sum or in installments as determined.

Mata Acara Rapat Kedelapan	Status	Eighth Meeting Agenda
Mengenai Komitmen Setoran Modal Tahun 2024 sampai dengan 2026 Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) selaku calon pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	Telah Terealisasi	Regarding the 2024-2026 Capital Contribution Commitment of the New Autonomous Region (DOB) Government as a prospective shareholder of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Mengesahkan calon Pemegang saham Baru PT Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Masing-masing Pemerintah Provinsi sebagaimana disebutkan diatas berkomitmen melakukan setoran modal setiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau sebanyak 2.000 lembar saham seri A yang nilai nominalnya sebesar Rp.5.000.000,00 per lembar saham. Bahwa Penetapan Calon Pemegang Saham sebagai Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua dilakukan setelah masing-masing calon pemegang saham menyetorkan modalnya ke PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan dilakukan pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		To ratify the following prospective new shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua: The Provincial Government of the Mountainous Papua Province. The Provincial Government of Central Papua Province. The Provincial Government of South Papua Province. The Provincial Government of Southwest Papua Province. Each of the Provincial Governments mentioned above has committed to making an annual capital contribution of Rp10,000,000,000.00, or 2,000 Series A shares with a nominal value of Rp5,000,000.00 per share. The appointment of prospective shareholders as shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua is carried out after each prospective shareholder has deposited their capital to PT Bank Pembangunan Daerah Papua and is ratified through a General Meeting of Shareholders (GMS).

Mata Acara Rapat Kesembilan	Status	Ninth Meeting Agenda
Mengenai Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024.	Telah Terealisasi	Regarding the Granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024 Financial Year.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa dan/atau melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024. Laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana tersebut diatas, disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025.		Granting authority to the Board of Commissioners to appoint and determine a Public Accounting Firm to audit and/or audit the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024 Financial Year. The Public Accountant's audit report, as mentioned above, shall be submitted in writing to the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2025 Financial Year.

Mata Acara Rapat Kesepuluh	Status	Tenth Meeting Agenda
Mengenai Persetujuan perubahan status PT Bank Pembangunan Daerah Papua menjadi Bank Umum Devisa.	Telah Terealisasi	Regarding the approval of the change in status of PT Bank Pembangunan Daerah Papua to a Foreign Exchange Commercial Bank.



Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Menyetujui operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa. Agar dapat melakukan pengurusan persyaratan dan persetujuan kegiatan usaha dalam valuta asing dan/atau bank umum devisa ke regulator. Mencantumkan dalam rencana bisnis bank (RBB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2024.

No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.

Approved the operational transformation of PT Bank Pembangunan Daerah Papua from a Commercial Bank to a Foreign Exchange Commercial Bank. To facilitate the processing of requirements and approvals for foreign currency and/or foreign exchange commercial banking activities with regulators. Included in PT Bank Pembangunan Daerah Papua's 2024 bank business plan (RBB).

Mata Acara Rapat Kesebelas	Status	Eleventh Meeting Agenda
Mengenai pembahasan Dewan Komisaris.	Telah Terealisasi	Regarding the Board of Commissioners' discussion.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Mengusulkan agar dapat dilakukan penyesuaian kinerja Dewan Komisaris terhadap perubahan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai Bank Umum Devisa dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan dibahas dalam RUPS tahunan dan/atau Luar Biasa berikutnya.		Proposed that the Board of Commissioners' performance be adjusted to reflect the change in PT Bank Pembangunan Daerah Papua's status as a Foreign Exchange Commercial Bank, taking into account applicable laws and regulations. This will be discussed at the next Annual and/or Extraordinary General Meeting of Shareholders.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2024 DAN REALISASINYA

IMPLEMENTATION OF THE 2024 EXTRAORDINARY GMS AND ITS REALIZATION

Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS	Invitation	Implementation	GMS Results
Membuat undangan kepada 45 pemegang saham Bank Papua dengan Nomor undangan yang berbeda-beda.	Dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2024 bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari	Akta Risalah RUPS Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2024	Invitations were sent to 45 shareholders of Bank Papua with different invitation numbers.	Held on August 8, 2024, at the Aston Niu Hotel Manokwari	GMS Minutes Deed Number 04 dated August 8, 2024

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Hingga 31 Desember 2024, Bank Papua belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, sehingga hingga saat ini belum memerlukan pihak independen untuk menghitung suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Pihak independen yang ditunjuk sebagai pembuat Akta RUPS LB adalah Maryatie Simanjuntak, S.H.

INDEPENDENT VOTE COUNTING PARTY

As of December 31, 2024, Bank Papua has not listed its shares on the Stock Exchange, therefore, no independent party is required to count the votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The independent party appointed to draft the Deed of the EGMS is Maryatie Simanjuntak, S.H.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA TAHUN 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

ATTENDANCE SUMMARY AT THE 2024 EXTRAORDINARY GMS

The Board of Commissioners and Directors of Bank Papua present at the 2024 Extraordinary GMS are as follows.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Position
1.	Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Hadir	President Commissioner
2.	Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	Hadir	Non-Independent Commissioner
3.	Dortheis Sesa	Komisaris Independen	Hadir	Independent Commissioner



No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Position
4.	Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	Hadir	Independent Commissioner
5.	Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Hadir	Independent Commissioner
6.	Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Hadir	President Director
7.	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Hadir	Business Director
8.	Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Hadir	Operational Director
9.	Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Hadir	Compliance Director
10.	Pujianto	Direktur Keuangan	Hadir	Finance Director

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS LUAR BIASA TAHUN 2024

DECISIONS AND REALIZATION OF THE 2024 EXTRAORDINARY GMS

Mata Acara Rapat Pertama	Status	First Meeting Agenda
Mengenai pembahasan peraturan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 08-08-2024.	Telah Terealisasi	Regarding the discussion of the rules of procedure for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated August 8, 2024.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Menyetujui Peraturan dimaksud menjadi Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 08-08-2024.		Approved that the said rules become the Rules of Procedure for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated August 8, 2024.

Mata Acara Rapat Kedua	Status	Second Meeting Agenda
Mengenai Pemilihan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).	Telah Terealisasi	Regarding the Election of Independent Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, which has been approved by the Financial Services Authority (OJK).
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Memilih Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028, yaitu: Tuan Victor Abraham Abaidata, Sarjana Hukum.		Elected Independent Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024 to 2028 period: Mr. Victor Abraham Abaidata, Bachelor of Law.

Mata Acara Rapat Ketiga	Status	Mata Acara Rapat Ketiga
Mengenai Pengangkatan dan Pengukuhan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028.	Telah Terealisasi	Mengenai Pengangkatan dan Pengukuhan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Mengangkat dan Mengukuhkan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan Tahun 2028.		Mengangkat dan Mengukuhkan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan Tahun 2028.

Mata Acara Rapat Keempat	Status	Fourth Meeting Agenda
Mengenai Pemberhentian dengan hormat Plt (Pelaksana tugas) Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	Telah Terealisasi	Regarding the honorable dismissal of the Acting Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Memberhentikan dengan hormat Nyonya YULIANA D. YEMBISE Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan ucapan terima kasih atas kerjasamanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas.		Honorably dismissed Mrs. YULIANA D. YEMBISE, Bachelor of Laws and Master of Laws, as Acting Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, with gratitude for her cooperation in carrying out her duties and responsibilities as acting Director.



Mata Acara Rapat Kelima	Status	Fifth Meeting Agenda
Mengangkat dan Mengukuhkan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 yaitu : Tuan Insinyur PUJIANTO, Magister Sains	Telah Terealisasi	Appointment and Confirmation of the Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024-2028 period, namely: Mr. Engineer Pujiyanto, Master of Science
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		No Shareholders raised questions and/or expressed opinions.
Mengangkat dan Mengukuhkan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 yaitu : Tuan Insinyur Pujiyanto, Magister Sains		Appointment and Confirmation of the Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2024-2028 period, namely: Mr. Engineer Pujiyanto, Master of Science

Mata Acara Rapat Keenam	Status	Fifth Meeting Agenda
Mengenai Penetapan Calon Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.	Ditunda	Regarding the Determination of Candidates for Non-Independent Commissioners and Independent Commissioners of PT. PAPUA REGIONAL DEVELOPMENT BANK for the Period 2025 to 2029.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.		There are no Shareholders who ask questions and/or provide opinions.
Untuk dilakukan penundaan. Berdasarkan hasil keputusan Rapat pada point III, IV, dan V tersebut diatas, untuk selanjutnya, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Papua menjadi sebagai berikut: DIREKSI • Direktur Utama: YULIANA DOLFINCE YEMBISE • Direktur Bisnis: SADAR SEBAYANG • Direktur Operasional: ISAK SAMUEL WOPARI • Direktur Keuangan: PUJIANTO • Direktur Kepatuhan: BETTY JULIAANTJE PARINUSSA DEWAN KOMISARIS • Komisaris Utama: YORGEMES DEREK HEGEMUR • Komisaris Non Independen: NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN • Komisaris Independen: DORTHEIS SESA • Komisaris Independen: H. AROBI AHMAD AITUARAUW • Komisaris Independen: VICTOR ABRAHAM ABAIDATA		To be postponed. Based on the decisions of the Meeting in points III, IV, and V above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua Limited Liability Company is as follows: BOARD OF DIRECTORS • President Director: YULIANA DOLFINCE YEMBISE • Business Director: SADAR SEBAYANG • Operations Director: ISAK SAMUEL WOPARI • Finance Director: PUJIANTO • Compliance Director: BETTY JULIAANTJE PARINUSSA BOARD OF COMMISSIONERS • Komisaris Utama: YORGEMES DEREK HEGEMUR • Komisaris Non Independen: Doktor NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN • Komisaris Independen: DORTHEIS SESA • Komisaris Independen: H. AROBI AHMAD AITUARAUW • Komisaris Independen: VICTOR ABRAHAM ABAIDATA

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Seluruh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Tahun 2025 telah diimplementasikan pada tahun yang sama, dan keputusan RUPS untuk Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada tahun 2024. Oleh karena itu, tidak ada keputusan RUPS untuk Tahun Buku 2024 yang belum terealisasi pada tahun 2025.

GMS RESOLUTIONS FOR THE FISCAL YEAR AND THE PREVIOUS FISCAL YEAR IMPLEMENTED IN THE CURRENT FISCAL YEAR

All resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the fiscal year 2025 were executed within the same year. Additionally, GMS resolutions for the fiscal year 2024 were implemented in 2024. Consequently, there are no GMS resolutions from the fiscal year 2024 that remain unimplemented in 2025.



Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organisasi tata kelola yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas struktur pengendalian internal Perusahaan, penerapan manajemen risiko, serta praktik akuntansi dan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga mengawasi pelaksanaan audit internal dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

The Board of Directors serves as the governing authority with comprehensive responsibility for the management of the Bank, as outlined in the Company's Articles of Association. It is accountable for establishing the Company's internal control framework, implementing risk management strategies, and ensuring compliance with accounting and bookkeeping practices in accordance with applicable regulations. Additionally, the Board of Directors supervises the execution of internal audits and undertakes necessary follow-up actions in alignment with the directives of the Board of Commissioners.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola Bank dengan memastikan pencapaian target dan tujuan secara efisien dan efektif. Hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) *Good Corporate Governance (GCG)* yang tercantum dalam SK Direksi Nomor: 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 [FP1]. Dalam pedoman tersebut, diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai kepentingan, tujuan, peraturan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Melaksanakan tugas dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.
3. Tidak memberikan kuasa umum yang mengalihkan fungsi Direksi kepada pihak lain.
4. Mewakili Bank sesuai peraturan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
5. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.
6. Membentuk satuan kerja tambahan sesuai peraturan OJK.
7. Menindaklanjuti temuan audit dan hasil pengawasan dari internal dan eksternal.
8. Mengungkapkan kebijakan strategis kepegawaian kepada pegawai.
9. Mempertanggungjawabkan tugas melalui RUPS.
10. Memberikan wewenang kepada Direktur Utama

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is fully accountable for the management of the Bank, ensuring the efficient and effective achievement of its targets and objectives. This responsibility is in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) Implementation Guidelines (BPP) as outlined in Board of Directors Decree Number 80/DIR-BPD/XII/2025, dated December 31, 2025. The guidelines specify the following responsibilities:

1. Manage the Bank in alignment with its interests, objectives, applicable regulations, Articles of Association, and decisions made at the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Execute duties with integrity and due diligence.
3. Refrain from granting general powers of attorney that would delegate the functions of the Board of Directors to third parties.
4. Represent the Bank in accordance with regulations, the Articles of Association, and GMS decisions.
5. Establish Internal Audit, Risk Management, and Compliance Work Units.
6. Create additional work units in accordance with OJK regulations.
7. Address audit findings and outcomes from internal and external monitoring.
8. Communicate strategic personnel policies to employees.
9. Report on responsibilities at the GMS.
10. Authorize the President Director to act on behalf of the



bertindak atas nama Direksi.

11. Mengatur penggantian Direktur Utama bila berhalangan.
12. Mengambil keputusan berdasarkan bidang masing-masing Direktur.
13. Mengatur persetujuan rangkap jabatan Pejabat Eksekutif.
14. Mengelola Bank dengan tanggung jawab penuh, menetapkan organisasi, membentuk komite wajib, mewakili Bank, dan berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan.
15. Menyusun Rencana Bisnis tahunan realistis, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
16. Menyusun dan menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan komprehensif.
17. Menetapkan kebijakan dan mengawasi penggunaan Teknologi Informasi.
18. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan, laporan kepatuhan, dan menjaga integritas laporan keuangan.
19. Menerapkan Tata Kelola Bank yang Baik, melakukan *Self-Assessment* dan melaporkannya.
20. Memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai ketentuan OJK.
21. Menyelenggarakan RUPS tahunan, memberi keterangan kepada Pemegang Saham, dan mempertanggungjawabkan tugas.
22. Menjaga dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) melalui *Risk Based Bank Rating* dan menyampaikan *action plan* ke OJK.
23. Memastikan kecukupan sumber daya dan pengendalian Divisi Audit Internal, serta melaporkan hasil audit ke OJK.
24. Membuat, memelihara, dan menyimpan administrasi dan dokumentasi Bank serta melaporkan perubahan ke Kementerian Hukum dan OJK.
25. Menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM, membentuk unit khusus, mengawasi kepatuhan, dan melaporkan ke OJK.
26. Menyusun, mengawasi, mengevaluasi, dan mengungkapkan kebijakan Remunerasi dengan prinsip kehati-hatian.
27. Bertanggung jawab atas kerugian Bank akibat kesalahan/kelalaian, kecuali dapat membuktikan tidak bersalah.
28. Bertanggung jawab atas kewajiban Bank dalam kepailitan akibat kesalahan/kelalaian, termasuk tanggung jawab mantan Direksi 5 tahun sebelum pailit.

Board of Directors.

11. *Ensure the succession of the President Director in case of absence.*
12. *Make decisions based on the defined areas of responsibility for each Director.*
13. *Approve concurrent positions held by Executive Officers.*
14. *Manage the Bank with full accountability, establish the organization, form mandatory committees, represent the Bank, and coordinate with financial service institutions.*
15. *Develop a realistic annual Business Plan, adhering to principles of prudence and risk management.*
16. *Effectively and comprehensively implement Risk Management.*
17. *Establish policies and supervise the use of Information Technology.*
18. *Prepare and submit Annual Reports, compliance reports, and maintain the integrity of financial statements.*
19. *Implement Good Bank Governance, conduct self-assessments, and report findings.*
20. *Ensure compliance with the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) as per OJK regulations.*
21. *Conduct the annual GMS, provide information to Shareholders, and account for responsibilities.*
22. *Maintain and enhance the Bank's Soundness Level (TKB) through Risk-Based Bank Ratings and submit action plans to OJK.*
23. *Ensure adequacy of resources and controls within the Internal Audit Division, and report audit results to OJK.*
24. *Create, maintain, and store the Bank's administrative documentation, reporting any changes to the Ministry of Law and OJK.*
25. *Implement the AML, PPT, and PPPSPM Programs, establish a dedicated unit, monitor compliance, and report to OJK.*
26. *Develop, supervise, evaluate, and disclose the Remuneration Policy based on prudent principles.*
27. *Assume responsibility for the Bank's losses resulting from errors or negligence, unless proven otherwise.*
28. *Bear responsibility for the Bank's obligations in the event of bankruptcy due to errors or negligence, including the liabilities of former Directors for the five years preceding bankruptcy.*



29. Tugas tambahan: mendaftarkan Bank sebagai Perseroan Publik bila memenuhi kriteria, menyusun rencana penggabungan, bertindak sebagai likuidator jika Bank dibubarkan, menjaga integritas hukum, dan menangani isu cyber crime, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, serta inklusi keuangan.

29. Additional responsibilities include registering the Bank as a Public Company if it meets the criteria, preparing a merger plan, acting as liquidator if the Bank is dissolved, maintaining legal integrity, and addressing issues related to cybercrime, personal data protection, consumer protection, and financial inclusion.

MASA JABATAN DIREKSI

1. Masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode terhitung sejak pengangkatannya dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan Bank yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Sebelum pengangkatan sampai dengan pemberhentian Anggota Direksi wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Apabila seorang anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh seorang anggota Direksi baru, maka masa jabatannya menyesuaikan dengan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS;
4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Berakhirnya masa tugas/jabatan;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - g. Meninggal dunia.
5. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
6. Masa jabatan Direksi adalah sejak tanggal RUPS dimana Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada Penutupan RUPS di akhir periode setelah Direktur tersebut memegang jabatan sebagai anggota Direksi.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The term of office for a member of the Board of Directors shall be a maximum of five (5) years, commencing on the date of appointment. Upon expiration of this term, members may be reappointed, contingent upon demonstrated good performance as evidenced by the financial soundness of the Bank, in accordance with applicable regulations. This is without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders (GMS) to dismiss any member at any time.
2. Prior to appointment and until dismissal, members of the Board of Directors are required to report their assets through the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK).
3. Should a member of the Board of Directors be replaced by a new member before the completion of their term, the new member's term of office shall be adjusted in accordance with the Articles of Association or the GMS Resolution.
4. The term of office of a member of the Board of Directors shall conclude under the following circumstances:
 - a. Loss of Indonesian citizenship;
 - b. Completion of their term of office;
 - c. Voluntary resignation;
 - d. Declaration of bankruptcy or placement under guardianship by a court decision;
 - e. Failure to meet the requirements set forth by applicable laws and regulations;
 - f. Dismissal by a resolution of the GMS;
 - g. Death.
5. A member of the Board of Directors may resign from their position by providing written notice to the Bank at least thirty (30) days prior to the intended resignation date.
6. The term of office for the Board of Directors commences on the date of the GMS in which the Director is appointed and concludes at the closing of the GMS at the end of the term following their appointment as a member of the Board of Directors.



PERSYARATAN DIREKSI

1. Persyaratan Umum

- 1.1. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 1.2. Memiliki keahlian di bidang perbankan serta sehat jasmani dan rohani.
- 1.3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang Perbankan atau negara.
- 1.4. Tidak dicabut hak pilihnya dan tidak terlibat dalam pengkhianatan terhadap negara.
- 1.5. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia/OJK sebagai Pemegang Saham/Pengurus Bank.
- 1.6. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan Direksi/Dewan Komisaris lainnya, kecuali ada izin RUPS.
- 1.7. Cakap hukum, tidak pernah pailit, tidak pernah menjadi pengurus Bank pailit, dan tidak pernah dihukum dalam pidana keuangan negara/keuangan sektor.
- 1.8. Memenuhi persyaratan persetujuan OJK untuk menjabat sebagai Direksi.
- 1.9. Selama menjabat, harus memiliki:
 - Integritas (moral baik, patuh hukum, dukung OJK, pengembangan usaha sehat, tidak masuk daftar tidak lulus, cakap hukum).
 - Kompetensi (pengetahuan/keahlian memadai, kepemimpinan visioner, etis, adaptif, mampu mengelola strategi bisnis Bank, menerapkan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal).
 - Reputasi baik (tidak macet kredit, tidak pailit, tidak pernah dihukum tindak pidana keuangan, reputasi pengelolaan Bank yang sehat).

2. Larangan Rangkap Jabatan

2.1. Dilarang merangkap jabatan sebagai:

- Direksi/Dewan Komisaris/Pejabat Eksekutif di perusahaan/lembaga lain.
- Pejabat fungsional di Lembaga Keuangan Bank atau Bukan Bank.
- Jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
- Jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

REQUIREMENTS FOR DIRECTORS

1. General Requirements

- 1.1. *Must be an Indonesian citizen and a devout follower of God Almighty.*
- 1.2. *Must possess expertise in banking and be in good physical and mental health.*
- 1.3. *Must not have committed any reprehensible acts in the financial or state sectors.*
- 1.4. *Must not have had voting rights revoked or been involved in acts of treason against the state.*
- 1.5. *Must not be blacklisted by Bank Indonesia or OJK as a Shareholder or Manager of the Bank.*
- 1.6. *Must not have any familial relationships (by blood or marriage) up to the second degree with other Directors or members of the Board of Commissioners, unless authorized by the General Meeting of Shareholders (GMS).*
- 1.7. *Must be legally competent, have never been declared bankrupt, have never served as a manager of a bankrupt bank, and have never been convicted of a financial crime.*
- 1.8. *Must meet the approval requirements set by OJK to serve as a Director.*
- 1.9. *During their tenure, Directors must demonstrate:*
 - *Integrity (adherence to good morals and laws, support for the Financial Services Authority (OJK), commitment to healthy business practices, and legal competency).*
 - *Competence (sufficient knowledge/expertise, visionary outlook, ethical standards, adaptive leadership, and capability in managing the Bank's business strategy, including Risk Management and Internal Control Systems).*
 - *A good reputation (no history of credit defaults, bankruptcies, or convictions for financial crimes, and a reputation for sound Bank management).*

2. Prohibition on Concurrent Positions

2.1. Holding concurrent positions is prohibited in the following roles:

- o *Directors, Board of Commissioners, or Executive Officers in other companies or institutions.*
- o *Functional officials in either Bank or Non-Bank Financial Institutions.*
- o *Any other positions that could create a conflict of interest.*
- o *Other positions prohibited by applicable laws and regulations.*



- 2.2. Pengecualian rangkap jabatan diperbolehkan jika:
- Mengawasi perusahaan anak atau dana pensiun milik Bank.
 - Menjadi Direktur Pengganti.
 - Menjabat di organisasi/lembaga nirlaba.(dengan syarat tidak mengabaikan tugas Direksi dan mendapatkan persetujuan/atau dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris).

- 2.3. Calon Direksi yang rangkap jabatan wajib membuat pernyataan:
- Menjaga integritas.
 - Menghindari benturan kepentingan.
 - Menghindari tindakan yang merugikan Bank atau melanggar prinsip kehati-hatian.

3. Persyaratan Khusus

- 3.1. Memenuhi kompetensi dan ketentuan lain sesuai kebutuhan Bank.
- 3.2. Termasuk bagian dari sistem nominasi dan seleksi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk disahkan dalam RUPS.
- 3.3. Harus lulus penilaian kompetensi dan integritas sesuai ketentuan *Fit and Proper Test* OJK.

4. Persyaratan Lainnya

- 4.1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.
- 4.2. Direksi dapat berasal dari pihak eksternal yang profesional, kompeten di bidang perbankan dan keuangan, bersifat independen, serta mampu melaksanakan tugas dengan waktu yang cukup.

- 2.2. *Exceptions to the prohibition on concurrent positions are permitted in the following circumstances:*
- o *Supervising a subsidiary or pension fund owned by the Bank.*
 - o *Serving as an Alternate Director.*
 - o *Serving in a non-profit organization or institution (provided that the duties of the Board of Directors are not neglected and that Board of Commissioners' approval is obtained and/or reported at the Board of Commissioners Meeting).*

- 2.3. *Prospective Directors holding concurrent positions are required to provide a statement affirming:*

- o *Their commitment to maintaining integrity.*
- o *Their intention to avoid conflicts of interest.*
- o *Their commitment to refraining from actions detrimental to the Bank or that violate prudential principles.*

3. Special Requirements

- 3.1. *Must meet competency and other requirements as specified by the Bank.*
- 3.2. *Must be included in the nomination and selection process conducted by the Remuneration and Nomination Committee for approval at the GMS.*
- 3.3. *Must successfully pass a competency and integrity assessment in accordance with the OJK Fit and Proper Test.*

4. Other Requirements

- 4.1. *Must pass the OJK Fit and Proper Test.*
- 4.2. *Directors may be external parties who are professional, competent in banking and finance, independent, and capable of fulfilling their duties within a reasonable timeframe.*

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja (*Board Charter*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 [FP1]. Pedoman ini mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan tercantum dalam Buku II tentang Tata Kerja Direksi.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Board of Directors operates under a formal Board Charter, established by Decree Number 80/DIR-BPD/XII/2025, dated December 31, 2024 [FP1]. This charter is aligned with the Good Corporate Governance Implementation Guidelines (BPP) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua and is included in Book II, which details the Work Procedures of the Board of Directors. It mandates that each member of the Board of Directors manage the Company in a manner that is efficient, effective, transparent, independent, and accountable.



Pedoman dan tata tertib kerja ini mengikat setiap anggota Direksi untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel. Penyusunan pedoman tata tertib kerja ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan lainnya.

Berikut adalah isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Buku I : Kebijakan Tata Kelola Bank
- Buku II : Pedoman Kerja Direksi
- Buku III : Pedoman Kerja Dewan Komisaris
- Buku IV : Pedoman Kerja Komite Direksi
- Buku V : Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris
- Buku VI : Pedoman Fungsi dan Penerapan Faktor-Faktor Tata Kelola
- Buku VII : Pedoman Penilaian Tata Kelola Bank
- Buku VIII : Pedoman Etika Berperilaku (*Code of Conduct*)

The development of this charter is informed by the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, regulations set forth by the Financial Services Authority (OJK) regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company's Articles of Association, and other relevant regulations.

The contents of the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors encompass the following:

- *Book I: Bank Governance Policy*
- *Book II: Board of Directors Work Guidelines*
- *Book III: Board of Commissioners Work Guidelines*
- *Book IV: Board of Directors Committee Work Guidelines*
- *Book V: Board of Commissioners Committee Work Guidelines*
- *Book VI: Guidelines for the Functions and Implementation of Governance Factors*
- *Book VII: Guidelines for Bank Governance Assessment*
- *Book VIII: Code of Conduct*

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang tercantum dalam Buku II mengenai Tata Kerja Direksi, berikut adalah pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi:

Yuliana D. Yembise - Direktur Utama

- 1 Menandatangani bukti pemilikan saham Bank berupa Surat Saham untuk pemilikan 1 (satu) saham, Surat Kolektif Saham untuk pemilikan 2 (dua) saham atau lebih, serta Surat Saham Pengganti bersama Komisaris Utama Bank.
- 2 Merencanakan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan umum Perseroan berdasarkan prinsip kehematan, efektif, dan efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan.
- 3 Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan Perseroan secara menyeluruh.
- 4 Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan.
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with Board of Directors Decree Number 80/DIR-BPD/XII/2024, dated December 31, 2025, regarding the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (BPP) for PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, as detailed in Book II concerning the Work Procedures of the Board of Directors, the following outlines the division of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors:

Yuliana D. Yembise - President Director

1. *Sign proof of ownership of the Bank's shares in the form of a Share Certificate for ownership of one (1) share, a Collective Share Certificate for ownership of two (2) or more shares, and a Replacement Share Certificate, in conjunction with the Bank's President Commissioner.*
2. *Plan, develop, and establish general Company policies based on the principles of economy, effectiveness, and efficiency, aligned with the Company's vision, mission, and objectives.*
3. *Direct, develop, and establish the Company's overall management strategy.*
4. *Oversee and evaluate all Company activities.*
5. *Coordinate the activities and implementation of duties among all Directors.*



- 6 Menyiapkan Rencana Jangka Panjang.
 - 7 Menyampaikan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - 8 Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
 - 9 Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
 - 10 Memimpin kegiatan strategis dalam pengembangan Perseroan.
 - 11 Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS.
 - 12 Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala hal yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Divisi Audit Internal (DAI), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
 - 13 Memastikan kegiatan pengelolaan pemeriksaan (audit) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku.
 - 14 Menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Internal yang efektif, serta memastikan bahwa sistem tersebut dilaksanakan dengan aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian internal yang ditetapkan Bank.
 - 15 Menandatangani laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Fungsi Audit Internal, yaitu:
 - a Laporan pengangkatan atau pemberhentian Pimpinan Divisi Audit Internal (DAI) yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian.
 - b Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Internal, termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
 - c Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - d. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
 - 16 Memastikan terpenuhinya SDM yang profesional dan berintegritas tinggi melalui kebijakan sistem manajemen dan strategi pengelolaan SDM yang terarah, transparan, dan komprehensif.
 - 17 Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, melalui
6. *Prepare a Long-Term Plan.*
 7. *Present the Long-Term Plan, co-signed with the Board of Commissioners, to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.*
 8. *Prepare an Annual Work and Budget Plan, which elaborates on the Long-Term Plan.*
 9. *Submit an Annual Report to the GMS for approval within six (6) months following the conclusion of the Company's fiscal year.*
 10. *Lead strategic initiatives for the Company's development.*
 11. *Perform additional duties as designated by the GMS.*
 12. *Address and take prompt action on all matters highlighted in audit reports prepared by the Internal Audit Division (DAI), External Auditor, OJK supervision results, and/or findings from other regulatory bodies.*
 13. *Ensure that audit management activities are conducted in accordance with applicable policies, systems, and procedures.*
 14. *Establish and maintain an effective Internal Control System, ensuring its implementation aligns with the Bank's established internal control objectives.*
 15. *Sign a report to the Financial Services Authority concerning the implementation of the Internal Audit Function, including:*
 - a. *A report on the appointment or dismissal of the Head of the Internal Audit Division (DAI), detailing considerations and reasons for the decision.*
 - b. *A report on the execution and key outcomes of the Internal Audit, including confidential audit information.*
 - c. *A special report on any Internal Audit findings that may threaten the Bank's business continuity.*
 - d. *A report on external review results, containing opinions on the efficacy of the Internal Audit Division and its compliance with the Bank's Internal Audit Function Implementation Standards, along with recommended improvements.*
 16. *Ensure the availability of professional and high-integrity human resources through a focused, transparent, and comprehensive HR management system policy and strategy.*
 17. *Promote the enhancement of HR competencies related to Risk Management through ongoing education and*



penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko.

- 18 Menyusun dan memastikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif. Ini termasuk menetapkan limit Risiko secara keseluruhan serta per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sesuai dengan kondisi Bank, serta mempertimbangkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan.
- 19 Memastikan pengelolaan manajemen kesekretariatan dilakukan secara efektif dan efisien.
- 20 Menyusun *Corporate Plan*, Rencana Bisnis Bank (RBB), dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang selaras dengan Visi, Misi, dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, serta didukung dengan Struktur Organisasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan bisnis.
- 21 Memberikan persetujuan terhadap *action plan* pelaksanaan Program APU-PPT bersama dengan Direktur Kepatuhan.
- 22 Melaksanakan pembinaan terhadap operasional dan bisnis Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu berdasarkan usulan dari Satuan Kerja yang membidangi pembinaan Cabang.

Sadar Sebayang - Direktur Bisnis

- 1 Melakukan supervisi terhadap Grup sesuai dengan Keputusan Direksi mengenai Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank beserta perubahannya.
- 2 Memastikan pengelolaan portofolio Kredit dilakukan dengan sehat.
- 3 Memastikan pemasaran Kredit, penghimpunan dana Koorporasi, Consumer & Retailjasa (*fee-based income*), serta pengembangan bisnis Bank terkoordinasi dengan baik.
- 4 Memastikan pengelolaan hubungan bisnis dengan lembaga, instansi, dan mitra bisnis dilaksanakan secara efektif.
- 5 Memastikan pengelolaan Kredit dan jasa perbankan yang menguntungkan dilakukan dengan dukungan sarana teknologi yang handal dan sistem yang profesional, berdasarkan kebijakan dalam perencanaan strategis yang terarah dan konsisten.
- 6 Melaksanakan pembinaan terhadap operasional dan bisnis Cabang serta Cabang Pembantu berdasarkan usulan dari Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam pembinaan Cabang.
- 7 Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta

training programs, particularly those pertaining to Risk Management systems and processes.

18. *Develop and ensure the implementation of comprehensive written Risk Management policies, strategies, and frameworks. This includes establishing overall risk limits and specific limits per type, considering the level of risk to be undertaken, risk tolerance in accordance with the Bank's conditions, and the impact of risk on capital adequacy.*
19. *Ensure effective and efficient secretarial management.*
20. *Prepare a Corporate Plan, Bank Business Plan (RBB), and other strategic policies that align with the Company's Vision, Mission, and Cultural Values, supported by an effective organizational structure that meets business needs and developments.*
21. *Approve the action plan for the AML-CFT Program in collaboration with the Compliance Director.*
22. *Provide guidance on the operations and business of Branch Offices and Sub-Branch Offices based on recommendations from the Work Unit responsible for Branch Development.*

Sadar Sebayang - Business Director

1. *Supervise the Group in alignment with the Board of Directors' Decree regarding the Bank's Head Office Organizational Structure and any subsequent amendments.*
2. *Ensure effective management of the credit portfolio.*
3. *Oversee the coordination of credit marketing, corporate fundraising, consumer and retail services (fee-based income), and the Bank's business development initiatives.*
4. *Cultivate and maintain strong business relationships with institutions, agencies, and partners.*
5. *Ensure the management of profitable credit and banking services is supported by reliable technology and professional systems, adhering to established policies and consistent strategic planning.*
6. *Provide guidance on branch and sub-branch operations based on recommendations from the responsible Work Unit for branch development.*
7. *Lead and direct the formulation and implementation of*



pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang *Commercial, Consumer & Retail Banking*.

- 8 Memimpin dan mengarahkan penyusunan Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk bidang *Commercial, Consumer & Retail Banking*.
- 9 Mendukung Direksi dalam mengarahkan dan membina Kantor Cabang.
- 10 Mendukung Direksi dalam mengarahkan dan membina Kantor Cabang untuk mencapai serta meningkatkan target volume bisnis (dana dan kredit) yang telah ditetapkan.
- 11 Memimpin dan mengkoordinasi implementasi kebijakan serta strategi terkait kegiatan operasional *Commercial, Consumer & Retail Banking* untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara komprehensif.
- 12 Mengarahkan dan mensupervisi unit kerja di bawah tanggung jawabnya secara berkelanjutan agar sejalan dengan kebijakan Perseroan serta menangani persaingan pasar di bidang *Commercial, Consumer & Retail Banking*.
- 13 Memimpin dan mengarahkan proses perubahan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pasar di bidang *Commercial, Consumer & Retail Banking*.
- 14 Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk *Commercial, Consumer & Retail Banking* yang berkualitas tinggi dan berdaya saing.
- 15 Memimpin dan mengkoordinasi pengaturan produk *Commercial, Consumer & Retail Banking* secara agresif, dengan memperhatikan kebijakan Perseroan dan prinsip kehati-hatian:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasi promosi produk Bank secara efektif,
 - b. Memimpin dan mengarahkan sumber daya penjual,
 - c. Memimpin dan mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi bidang *Commercial, Consumer & Retail Banking*.
- 16 Memastikan bisnis ritel dan pengelolaan *e-Banking* serta jasa perbankan yang menguntungkan dilakukan dengan dukungan sarana dan teknologi yang handal, serta sistem yang profesional berdasarkan kebijakan dalam perencanaan strategis yang terarah dan konsisten.
- 17 Melaksanakan pengendalian terhadap Cabang dan Cabang Pembantu.
- 18 Melaksanakan supervisi dan pembinaan terhadap operasional dan bisnis Cabang serta Cabang Pembantu berdasarkan usulan dari Satuan Kerja yang membidangi pembinaan Cabang.

policies and strategies in Commercial, Consumer, and Retail Banking.

8. *Guide the development of short-term, medium-term, and long-term business plans for Commercial, Consumer, and Retail Banking.*
9. *Assist the Board of Directors in the oversight and development of Branch Offices.*
10. *Support the Board of Directors in achieving and increasing established business volume targets (funds and credit) within Branch Offices.*
11. *Lead and coordinate the implementation of policies and strategies pertaining to the operational activities of Commercial, Consumer, and Retail Banking in a holistic manner across short, medium, and long-term frameworks.*
12. *Directly supervise work units under their purview on an ongoing basis to ensure alignment with Company policies and effectively respond to market competition in Commercial, Consumer, and Retail Banking.*
13. *Spearhead the necessary change processes to address market challenges within Commercial, Consumer, and Retail Banking.*
14. *Lead, direct, and coordinate the development and delivery of high-quality, competitive products in Commercial, Consumer, and Retail Banking.*
15. *Oversee the proactive management of Commercial, Consumer, and Retail Banking products while adhering to Company policies and prudent principles:*
 - a. *Effectively lead and coordinate the Bank's product promotions,*
 - b. *Direct sales resources,*
 - c. *Oversee Human Resources (HR) policies in collaboration with the Commercial, Consumer, and Retail Banking division.*
16. *Ensure that profitable retail business and e-Banking management, as well as banking services, are supported by reliable facilities and technology, as well as a professional system based on focused and consistent strategic planning.*
17. *Implement control measures over Branches and Sub-Branches.*
18. *Supervise and provide guidance on Branch and Sub-Branch operations based on recommendations from the responsible Work Unit for Branch development.*



Isak S. Wopari - Direktur Operasional

- 1 Melakukan supervisi terhadap Grup sesuai dengan Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank beserta perubahannya.
- 2 Memastikan bahwa kegiatan operasional Bank berjalan dengan baik, sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3 Memastikan pengelolaan logistik dan perlengkapan Kantor dilakukan secara efektif dan efisien.
- 4 Memastikan kelancaran pelayanan teknologi yang mendukung operasional Bank secara keseluruhan.
- 5 Memastikan tersedianya sarana dan penggunaan teknologi informasi yang modern, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 6 Melaksanakan pembinaan terhadap Operasional dan bisnis Cabang serta Cabang Pembantu berdasarkan usulan dari Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam pembinaan Cabang.
- 7 Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, pemutakhiran, dan sosialisasi kebijakan di bidang Teknologi & Operasi.
- 8 Memimpin dan mengarahkan penyusunan Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang Teknologi & Operasi agar sejalan dengan kebijakan Perseroan.
- 9 Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dan strategi layanan Bank.
- 10 Mendukung Direksi dalam mengarahkan dan membina Divisi serta Kantor Cabang untuk melakukan transformasi jaringan distribusi dan optimalisasi bisnis.
- 11 Mendukung Direksi dalam mengarahkan dan membina Kantor Cabang untuk mencapai dan meningkatkan target volume bisnis, dana, dan kredit yang telah ditetapkan.
- 12 Memimpin dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kegiatan operasional secara komprehensif untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 13 Mengarahkan dan mensupervisi unit kerja di bawahnya secara berkesinambungan agar tetap pada jalur strategi jangka panjang Bank dan strategi Teknologi & Operasi.
- 14 Mengembangkan Teknologi Informasi di seluruh unit kerja organisasi Bank.
- 15 Memastikan bahwa Perseroan memiliki solusi teknologi yang paling tepat untuk situasi saat ini dan kebutuhan bisnis di masa mendatang.
- 16 Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan strategi pelayanan Bank, serta konsolidasi komunikasi dan program-program untuk peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Isak S. Wopari - Director of Operations

1. Supervise the Group in accordance with the Board of Directors' Decree regarding the Organizational Structure of the Bank's Head Office and any amendments.
2. Ensure the smooth operation of the Bank's activities in compliance with applicable systems and procedures.
3. Manage logistics and office equipment effectively and efficiently.
4. Oversee the seamless operation of technology services that support the Bank's overall functions.
5. Ensure the availability and utilization of modern, effective, and efficient information technology resources aligned with the Bank's business needs, while adhering to relevant regulations.
6. Provide guidance to Branch and Sub-Branch Operations and Business based on recommendations from the responsible Work Unit for Branch development.
7. Lead and direct the formulation and dissemination of policies and strategies in the field of Technology & Operations.
8. Oversee the preparation of short-term, medium-term, and long-term Business Plans in Technology & Operations to ensure alignment with Company policies.
9. Lead and guide the development and implementation of the Bank's service policies and strategies.
10. Assist the Board of Directors in directing and coaching Divisions and Branch Offices to transform their distribution networks and optimize business operations.
11. Support the Board of Directors in guiding Branch Offices to achieve and enhance established business volume, funding, and credit objectives.
12. Lead and coordinate the comprehensive implementation of policies and strategies related to operational activities for the short, medium, and long term.
13. Continuously direct and supervise subordinate work units to ensure alignment with the Bank's long-term strategy and Technology & Operations objectives.
14. Promote the development of Information Technology across all work units within the Bank's organization.
15. Ensure the Company adopts the most suitable technology solutions for current and future business needs.
16. Coordinate and direct the development of the Bank's service strategy, consolidating communications and programs to enhance customer service quality.



- 17 Mengkoordinasikan dan mengarahkan optimalisasi penggunaan data nasabah untuk mendukung aktivitas bisnis Bank.
- 18 Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan serta pengelolaan prosedur penanganan pengaduan dan sengketa nasabah.
- 19 Memimpin dan mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM).

Betty J. Parinussa - Direktur Kepatuhan

1. Melakukan supervisi terhadap Grup sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank beserta perubahannya. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi:
 - a. Bisnis dan operasional,
 - b. Manajemen risiko kredit,
 - c. *Treasury*,
 - d. Keuangan dan akuntansi,
 - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa,
 - f. Teknologi informasi, dan
 - g. Audit intern.
- 2 Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 3 Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- 4 Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- 5 Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- 7 Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan, dan aturan internal yang berlaku.
- 8 Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, serta memberikan fungsi konsultatif untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
- 9 Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau dengan frekuensi yang lebih tinggi jika terdapat perubahan faktor-faktor yang

17. *Coordinate and direct the optimization of customer data usage to support the Bank's business activities.*
18. *Coordinate and direct the development and management of procedures for handling customer complaints and disputes.*
19. *Lead and direct Human Resources (HR) policies.*

Betty J. Parinussa - Compliance Director

1. *Supervise the Group as outlined in the Board of Directors' Decree regarding the Organizational Structure of the Bank's Head Office and its amendments, excluding the following functions:*
 - a. *Business and Operations*
 - b. *Credit Risk Management*
 - c. *Treasury*
 - d. *Finance and Accounting*
 - e. *Logistics and Procurement of Goods/Services*
 - f. *Information Technology*
 - g. *Internal Audit*
2. *Develop strategies to enhance the Bank's Compliance Culture.*
3. *Recommend compliance policies or principles for establishment by the Board of Directors.*
4. *Establish compliance systems and procedures for developing the Bank's internal regulations and guidelines.*
5. *Ensure that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as the Bank's business activities, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.*
6. *Mitigate the Bank's Compliance Risk.*
7. *Implement preventive measures to ensure that policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors adhere to the provisions of the Financial Services Authority, applicable laws and regulations, and internal regulations.*
8. *Perform additional duties related to the Compliance Function, including monitoring and maintaining the Bank's compliance with commitments to the Financial Services Authority and other authorized supervisory authorities, as well as providing consultative support on compliance issues to both internal and external parties.*
9. *Develop Compliance Risk Management policies and strategies at least annually, or more frequently if significant changes affect the Bank's business activities.*



- mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- 10 Memastikan terkoordinasinya penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan pihak internal dan eksternal.
 - 11 Memberikan persetujuan terhadap Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 12 Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan Program APU-PPT, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurangnya:
 - a Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU-PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
 - b Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT.
 - c Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) serta Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL).
 - d Menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Pejabat senior.

Pujianto - Direktur Keuangan

- 1 Melakukan supervisi terhadap Grup sesuai dengan Keputusan Direksi mengenai Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank dan perubahannya.
- 2 Memastikan terlaksananya pengelolaan bisnis *Treasury*, pengumpulan dana korporasi, dan jasa perbankan yang menguntungkan, dengan dukungan sarana dan teknologi yang handal, serta sistem yang profesional berdasarkan kebijakan perencanaan strategis yang terarah dan konsisten.
- 3 Memastikan terciptanya sistem informasi akuntansi dan pengendalian keuangan yang dapat menjamin kinerja keuangan Bank yang sehat, berkembang, dan menguntungkan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 4 Memastikan koordinasi dalam pengelolaan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah serta hapus buku.
- 5 Melaksanakan pembinaan terhadap operasional dan bisnis Cabang serta Cabang Pembantu berdasarkan usulan dari Satuan Kerja yang membidangi pembinaan Cabang.

10. *Ensure coordinated resolution of legal issues involving internal and external parties.*
11. *Approve the Data Update Activity Realization Report submitted to the Financial Services Authority.*
12. *In fulfilling the Board of Directors' oversight regarding the implementation of the AML-CFT Program, the Compliance Director is responsible for:*
 - a. *Determining necessary actions to ensure the Bank's compliance with the Financial Services Authority's provisions on AML-CFT and related laws and regulations.*
 - b. *Monitoring the responsibilities of the Special Task Force and/or Bank officials assigned to implement the AML-CFT Program.*
 - c. *Submitting Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) and Cash Financial Transaction Reports (LTKT) as well as Financial Transaction Reports from and to Abroad (LTKL).*
 - d. *Determining and evaluating transactions that require approval from senior officers.*

Pujianto - Finance Director

1. *Supervise the Group in alignment with the Board of Directors' Decree regarding the Bank's Head Office Organizational Structure and its amendments.*
2. *Ensure the effective implementation of profitable Treasury operations, corporate fundraising, and banking services management, supported by reliable facilities and technology, along with a professional system grounded in focused and consistent strategic planning.*
3. *Oversee the establishment of an accounting information system and financial controls that ensure the Bank's healthy, sustainable, and profitable financial performance while complying with applicable regulations.*
4. *Facilitate coordination in the management of problem loan resolutions and write-offs.*
5. *Provide guidance on Branch and Sub-Branch operations and business, based on recommendations from the Work Unit responsible for Branch development.*

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN

BOARD OF DIRECTORS' DUAL



DIREKSI

- 1 Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
 - b Dalam bidang tugas fungsional di lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri.
 - c Pada jabatan lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.
 - d Pada jabatan lain yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pengecualian dari larangan merangkap jabatan sebagaimana disebutkan pada angka (1) berlaku bagi anggota Direksi yang:
 - a Bertanggung jawab atas pengawasan penyertaan Bank di perusahaan anak, serta menjalankan tugas fungsional sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak non-bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b Bertanggung jawab atas pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
 - c Melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti Bank; dan/atau
 - d Menduduki jabatan di organisasi atau lembaga nirlaba, selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- 3 Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

POSITION POLICY

1. *Members of the Board of Directors are prohibited from holding dual positions in the following capacities:*
 - a. *As a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, or as an Executive Officer at a bank, company, and/or other institution.*
 - b. *In functional roles at a banking financial institution and/or non-bank financial institution operating domestically or internationally.*
 - c. *In positions that may present a conflict of interest in the execution of their responsibilities as a member of the Board of Directors.*
 - d. *In other positions governed by relevant laws and regulations.*
2. *Exceptions to the prohibition on dual positions, as outlined in point (1), apply to members of the Board of Directors who:*
 - a. *Are tasked with overseeing the Bank's investments in subsidiaries and serve as a member of the Board of Commissioners in a non-bank subsidiary controlled by the Bank.*
 - b. *Are responsible for supervising pension funds or serve on the supervisory board of pension funds owned by the Bank.*
 - c. *Serve as an alternate director of the Bank.*
 - d. *Hold a position in a non-profit organization or institution, provided such role does not impede their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.*
3. *A majority of members of the Board of Directors are prohibited from having familial relationships up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

Tabel Rangkap Jabatan Direksi - Table of Concurrent Positions of Directors

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain	Positions
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	President Director
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Tidak Ada	Tidak Ada	Business Director
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Operations Director
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Compliance Director
Pujianto	Direktur Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Finance Director



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, kecuali remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin 2, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.

Bank Papua telah menetapkan kebijakan benturan kepentingan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola potensi benturan kepentingan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. Kebijakan ini dituangkan dalam aturan yang berlaku.

INDEPENDENSI DIREKSI

1. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS;
2. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud di atas, OJK melakukan penilaian terhadap kemampuan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
3. Sebagai bahan penilaian oleh OJK, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:
 - a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
 - b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Penyampaian permohonan kepada OJK tersebut

MANAGING CONFLICTS OF INTEREST FOR THE BOARD OF DIRECTORS

1. *Members of the Board of Directors are prohibited from utilizing their position to advance personal, familial, or external interests that may compromise the Bank's profitability or integrity.*
2. *Members of the Board of Directors are not permitted to accept or receive personal benefits from the Bank, aside from remuneration and other benefits as specified by a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).*
3. *Members of the Board of Directors are required to disclose any remuneration and additional benefits as outlined in point 2, in compliance with the Financial Services Authority Regulation regarding governance in remuneration practices for commercial banks.*

Bank Papua has implemented a conflict of interest policy designed to identify, mitigate, and manage potential conflicts that may arise from business activities. This policy is detailed in accordance with applicable regulations.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

1. *The dismissal or replacement of the President Director and/or the Director responsible for the Compliance Function prior to the conclusion of their term must receive prior approval from the Financial Services Authority (OJK) before being deliberated at the General Meeting of Shareholders (GMS).*
2. *In granting the aforementioned approval, the OJK will evaluate the appropriateness of the proposed dismissal or replacement of the President Director and/or the Director responsible for the Compliance Function.*
3. *To facilitate the OJK's assessment, the Bank shall submit an application containing the following information:*
 - a. *The rationale or considerations for the dismissal or replacement of the President Director and/or the Director responsible for the Compliance Function; and*
 - b. *A profile of a potential replacement who meets the criteria for a Fit and Proper Test.*
4. *The Bank must submit this application to the OJK no*



disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;

5. Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak layak, maka:
 - a. Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dimaksud tidak disetujui OJK; dan
 - b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam RUPS.
6. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud;
7. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari butir di atas. Akumulasi kepemilikan saham anggota Direksi akibat pemberian bonus dan/atau tantiem dibuktikan dengan keputusan RUPS dan/atau dokumen lain yang menetapkan hal tersebut;
8. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pengendali Terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap Pemegang Saham Pengendali, sepanjang:
 - a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pengendali Terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
 - b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
 - c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan walaupun memiliki saham Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pengendali Terakhir Bank.
9. Kepemilikan saham yang berasal dari pemberian bonus,

later than one (1) month prior to the scheduled GMS that includes the agenda for the dismissal or replacement of the President Director and/or the Director responsible for the Compliance Function.

5. *If the OJK considers the plan to dismiss or replace the President Director and/or the Director responsible for the Compliance Function to be inappropriate:*
 - a. *The OJK will not approve the plan; and*
 - b. *The Bank is prohibited from incorporating the agenda for the dismissal or replacement of the President Director and/or the Director responsible for the Compliance Function in the GMS.*
6. *Individual or collective share ownership by members of the Board of Directors in another company must not exceed 25% (twenty-five percent) of that company's paid-up capital.*
7. *Share ownership by members of the Board of Directors, individually or collectively, resulting from the receipt of bonuses and/or share-based incentives, which leads to ownership of 25% (twenty-five percent) or more, is exempt from the above stipulation. Such accumulation of shares due to bonuses must be evidenced by a GMS resolution and/or other supporting documents.*
8. *Share ownership by the President Director or the Director responsible for the Compliance Function, derived from bonuses, share incentives, management share ownership programs, and/or employee share ownership programs at companies identified as Controlling Shareholders and/or Ultimate Controlling Shareholders of the Bank, shall not be factored into the assessment of the Controlling Shareholder's independence, provided that:*
 - a. *The share ownership is a policy of the Controlling Shareholder and/or Ultimate Controlling Shareholder of the Bank and not initiated by the President Director or the Director responsible for the Compliance Function;*
 - b. *The share ownership is not intended for trading; and*
 - c. *The individual submits a written statement affirming their commitment to act independently while serving as President Director or Director responsible for the Compliance Function, despite their share ownership in the Controlling Shareholder and/or Ultimate Controlling Shareholder of the Bank.*
9. *Share ownership resulting from bonuses, share*



tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen/management *share ownership* program, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan/employee *share ownership* program dibuktikan dengan keputusan RUPS dan/atau dokumen lain yang menetapkan hal tersebut.

incentives, management share ownership programs, and/or employee share ownership programs must be substantiated by a GMS resolution and/or other relevant documentation.

RAPAT DIREKSI

1. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Direksi
 - a. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih Direksi lainnya atau permintaan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
 - b. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank atau di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
 - c. Peserta rapat adalah seluruh anggota Direksi dan *Corporate Secretary*, serta bila diperlukan Pimpinan Divisi/Pimpinan Cabang atau Pihak lain dapat disertakan dalam Rapat Direksi;
 - d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan mengacu pada Ketentuan Perundang-undangan dan Ketentuan Internal yang berlaku. Dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Bank/Perseroan;
 - e. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - f. Risalah/Notulen Rapat Direksi
 - 1 Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dituangkan dalam Risalah/Notulen Rapat Direksi;
 - 2 Risalah / Notulen Rapat Direksi harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan seluruh Anggota Direksi yang hadir;
 - 3 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

1. Provisions for Holding Board of Directors Meetings
 - a. Board of Directors Meetings are convened periodically, at least once a month, and may also be called at any time deemed necessary by the President Director, one or more other Directors, or upon written request from the Board of Commissioners or Shareholders collectively representing at least one-tenth (1/10) of the total shares, specifying the matters for discussion.
 - b. Meetings are held at the Bank's domicile or place of business, or at another location within the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented, advance notice is not required, and the meeting may take place anywhere within the Republic of Indonesia, with valid and binding decisions made during the meeting.
 - c. Participants in the meeting include all members of the Board of Directors and the Corporate Secretary. Division Heads, Branch Managers, or other relevant parties may be invited to participate as necessary.
 - d. All policies and strategic decisions must be made during a Board of Directors Meeting, in compliance with applicable laws and regulations as well as internal guidelines. The implementation of these decisions will be tailored to the needs of the Bank/Company.
 - e. Decisions during Board of Directors Meetings are reached through deliberation and consensus. If consensus cannot be achieved, decisions will be made by a majority vote.
 - f. Minutes of Board of Directors Meetings
 1. All discussions and decisions made during a Board of Directors Meeting must be documented in the Minutes.
 2. The Minutes must be signed by the meeting chair and all attending members of the Board of Directors.
 3. Any dissenting opinions must be recorded in



terjadi dalam Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah/Notulen Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;

- 4 Risalah/Notulen Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi;
- 5 Bertindak sebagai Notulis pada Rapat Direksi adalah Kepala Sekretaris Perusahaan/unit yang ditunjuk;
- 6 Kumpulan Risalah/Notulen Rapat Direksi didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Perusahaan.

2. Tata Cara Pelaksanaan Rapat Direksi

- a. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi atau Sekretaris Perusahaan/Unit yang berhak yang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- b. Panggilan Rapat Direksi secara tertulis harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- c. Rapat Direksi diadakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dan dipersiapkan bahan rapat yang meliputi paling kurang:
 - 1 Permasalahan utama yang akan dibahas,
 - 2 Alternatif keputusan yang diharapkan, dan
 - 3 Pihak-pihak yang diharapkan akan menindak lanjuti keputusan Direksi.
- d. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;
- e. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi pengganti atau Direktur lainnya berdasarkan Surat Kuasa;
- f. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
- g. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- h. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan keputusannya;
- i. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

the Minutes, along with the rationale for such dissent.

4. *The Minutes serve as valid evidence of the decisions taken during the meeting.*
5. *The Head of the Corporate Secretary or designated unit will act as the notary for the Board of Directors Meeting.*
6. *The Corporate Secretary is responsible for the proper documentation of the Minutes.*

2. Procedures for Implementing Board of Directors Meetings

- a. *A member of the Board of Directors or the authorized Corporate Secretary/Unit will issue the summons for a Board of Directors Meeting.*
- b. *The written notice for the meeting must include the agenda, date, time, and venue.*
- c. *A Board of Directors Meeting will be conducted according to a predetermined agenda, with necessary materials prepared, including at least:*
 1. *The main issues for discussion;*
 2. *Anticipated alternative decisions;*
 3. *The parties responsible for following up on the decisions made by the Board of Directors.*
- d. *The President Director will chair the meeting. If the President Director is absent or unavailable without needing to provide justification to a third party, the meeting will be chaired by another member of the Board of Directors present.*
- e. *A Board of Directors member may be represented at the meeting only by another member of the Board or another Director, based on a Power of Attorney.*
- f. *A Board of Directors Meeting is valid and authorized to make binding decisions if more than half (1/2) of the total number of Board members are present or represented.*
- g. *Decisions at the meeting are made through deliberation to achieve consensus. If consensus is unachievable, the decision will be made by majority vote, requiring more than half (1/2) of the total votes cast.*
- h. *In the event of a tie between votes for and against, the chairperson of the meeting will cast the deciding vote.*
- i. *Each member present has the right to cast one vote and one additional vote for each member of the Board of Directors they represent.*



AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Berikut adalah agenda, tanggal, dan peserta rapat Direksi untuk tahun 2025.

BOARD OF DIRECTORS MEETING AGENDA, DATE, AND PARTICIPANTS

The Board of Directors meeting was conducted in accordance with relevant policies. Below are the agenda, date, and participants for the 2025 Board of Directors meeting.

No.	Tanggal	Nomor RD	Agenda	Peserta Rapat	Agenda
1	07-Jan-25	01/RD-BP-D/I/2025	Usulan kegiatan GCG, Panitia Pelaksana undian SIMPEDA, KUPVA, persiapan RUPS 2025, usulan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Direksi Lengkap	Proposal for GCG activities, SIMPEDA prize draw panel, RUPS 2025 preparation, and proposals for findings that cannot be followed up
2	20-Jan-25	02/RD-BP-D/I/2025	Laporan progres tindak lanjut temuan KAP, penyesuaian RBB tahun 2025, persiapan Business Meeting tahun 2025	Direksi Lengkap	Report on progress of follow-up actions on KAP findings, adjustment of the 2025 RBB, and preparation of the 2025 Business Plan (BM)
3	17-03-25	04/RD-BPD/III/2025	Usulan pemberian dana talangan atas SP2D mitra kerja pemda Prov Papua Barat Daya yang belum terdibet dari rkud (Divisi JAL)	Direksi Lengkap	Proposal for provision of contingency funds for SP2D of West Papua Daya Province partner penalties not yet covered by iKud (JAL Division)
4	14-Apr-25	05/RD-BPD/IV/2025	Informasi penting RUPS Tahunan & Luar Biasa	Direksi Lengkap	Important information regarding the Annual and Extraordinary GMS (RUPS)
5	15-Apr-25	06/RD-BPD/IV/2025	Penetapan bunga teknis, hasil pengembangan usaha selama tahun 2024, revisi rencana kerja & anggaran tahun 2025, pagar tanah di Aimas Sorong	Direksi Lengkap	Determination of technical interest rates, results of business development during 2024, revision of the 2025 work plan and budget, and land fencing at Aimas Sorong
6	05-Juni-25	07/RD-BPD/VII/2025	Surat Keputusan perjalanan dinas, Surat Keputusan pemakaian seragam	Direksi Lengkap	Board Decree (SK) on official travel and uniform usage policy
7	22-Juli-25	08/RD-BPD/VII/2025	Pembelian gedung kantor KC. Abepura, review Business Meeting tahun 2025	Direksi Lengkap	Proposal for procurement of KC Abepura office building and review of 2025 business meeting
8	14-Sept-25	09/RD-BPD/IX/2025	Pemberian sponsorship mobil pemadam kebakaran kepada Pemerintah Kota Jayapura	Direksi Lengkap	Provision of sponsorship for a fire truck to Jayapura City Government (JPR)
9	16-Sept-25	10/RD-BPD/IX/2025	Semarak undian tabungan Bank Papua periode I tahun 2025, kalender Bank Papua tahun 2025, pembiayaan Damkar	Direksi Lengkap	Savings prize draw event of Bank Papua Period I 2025, Bank Papua 2025 calendar, and fire department financing
10	11-Nov-25	11/RD-BPD/XI/2025	Usulan pembelian gedung KC Abepura, pembahasan CSR mobil siaga Kabupaten Supiori, usulan sponsorship Persipura dan PSBS Biak, usulan nomenklatur untuk KK yang naik status menjadi KCP, usulan pembayaran gedung kantor dan relokasi sementara KC agats	Direksi Lengkap	Proposal for procurement of KC Abepura office building, discussion of CSR standby vehicle for Supiori Regency, Persipura and PSBS Biak sponsorship proposals, nomenclature proposal for units upgraded to KCP, office building payment proposal, and temporary relocation of KC Agats
11	16-Des-25	12/RD-BPD/XII/2025	Usulan lokasi dan relokasi KC Teminabuan, usulan lokasi dan relokasi KC Agats, usulan pembahasan tindak lanjut temuan OJK nomenklatur KCP, usulan lokasi dan relokasi KC Aimas	Direksi Lengkap	Proposal for location and relocation of KC Teminabuan, proposal for location and relocation of KC Agats, follow-up actions on OJK findings regarding KCP nomenclature, and proposal for location and relocation of KC Aimas



No.	Tanggal	Nomor RD	Agenda	Peserta Rapat	Agenda
12	31-Des-25	13/RD-BPD/XII/2025	Pembayaran sewa gedung kantor Bank Papua kantor cabang Tiom dan penetapan <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> dan <i>risk limit</i> tahun 2026	Direksi Lengkap	<i>Payment of office building rent for Bank Papua Tiom Branch and determination of risk appetite, risk tolerance, and risk limits for 2026</i>

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE PROTOCOL

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama		12	100%		6	100%		2	100%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis		12	100%		6	100%		2	100%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	12	12	100%	6	6	100%	2	2	100%
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan		12	100%		6	100%		2	100%
Pujianto	Direktur Keuangan		12	100%		6	100%		2	100%

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Bank Papua memiliki kebijakan yang mendorong Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka, terutama mengenai perkembangan industri perbankan dan dunia usaha secara umum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan dampak positif pada operasional Bank Papua, salah satunya melalui program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja, dilakukan peningkatan kapabilitas melalui seminar dan pelatihan. Ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik bagi Bank Umum, yang mencakup kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus belajar guna meningkatkan pengetahuan tentang perbankan serta perkembangan terkini dalam

TRAINING AND COMPETENCY ENHANCEMENT FOR BOARD MEMBERS

Bank Papua maintains a policy that promotes the continuous development of knowledge and insights among the Board of Directors, particularly concerning advancements in the banking sector and the broader business landscape. The aim of this policy is to positively influence the operations of Bank Papua through educational and training initiatives designed to enhance competency. To improve performance effectiveness, capability enhancement is facilitated through seminars and training sessions. This aligns with the principles of good governance for Commercial Banks, which stipulates that:

1. Board members must possess adequate and relevant competencies for their positions, enabling them to fulfill their duties and responsibilities effectively.
2. Board members should demonstrate a commitment to ongoing learning to deepen their understanding of banking and stay informed about the latest



bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Selama tahun 2025, Direksi telah berpartisipasi dalam berbagai seminar dan program peningkatan kompetensi, baik secara langsung maupun melalui video konferensi atau Zoom Meeting. Anggota Direksi berkomitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan mereka dalam bidang perbankan dan keuangan, serta bidang lain yang mendukung tugas dan tanggung jawab mereka.

KEBIJAKAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Perusahaan secara rutin menyelenggarakan program orientasi untuk anggota Direksi yang baru diangkat, agar mereka dapat saling mengenal dan bekerja sama sebagai tim yang solid dan efektif. Program orientasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang kondisi umum perusahaan.

Program pengenalan Direksi mencakup:

- 1 Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di perusahaan.
- 2 Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, serta larangan-larangan yang perlu diperhatikan.
- 3 Gambaran umum tentang perusahaan, yang mencakup tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal, dan isu-isu strategis lainnya.
- 4 Penjelasan mengenai kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, serta Komite Audit.

KEBIJAKAN PELATIHAN/ PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI TAHUN 2025

Program pengembangan kompetensi Direksi bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pengelolaan Bank yang efektif. Bank Papua memfasilitasi pengembangan kompetensi anggota melalui program pelatihan bagi Direksi, sejalan dengan perkembangan industri dan Tata Kelola yang terus berubah.

developments in finance or other relevant fields that support their roles.

Throughout 2025, the Board of Directors engaged in various seminars and competency enhancement programs, utilizing both in-person attendance and virtual platforms such as video conferencing and Zoom Meetings. Board members are dedicated to the continuous development of their knowledge, expertise, and skills in banking and finance, as well as in other areas pertinent to their duties and responsibilities.

ORIENTATION PROGRAM POLICY FOR NEW DIRECTORS

The Company conducts a formal orientation program for newly appointed members of the Board of Directors to facilitate relationship-building and promote effective collaboration within the team. This program is designed to provide a comprehensive understanding of the company's operational landscape.

The Board of Directors induction program encompasses the following key components:

1. Implementation of the principles of *Good Corporate Governance* and *Business Ethics* within the organization.
2. Clarification of the roles and responsibilities of both the Board of Commissioners and the Board of Directors, including any relevant prohibitions.
3. A thorough overview of the company, covering its objectives, nature and scope of activities, financial performance, strategic direction, short-term and long-term plans, risk management, internal controls, and other critical strategic issues.
4. An explanation of delegated authority, as well as insights into internal and external audits, internal control systems and policies, and the functions of the Audit Committee.

2025 BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT POLICY

The Board of Directors' competency development program is designed to enhance the execution of their responsibilities and promote sustainable growth and effective management of the Bank. Bank Papua is committed to facilitating the professional development of its Board members through targeted training programs that align with the evolving industry and governance landscape.



Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang akan diikuti oleh Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

The following training and competency improvement initiatives are scheduled for the Board of Directors in 2025:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	<i>Workshop</i> "kebijakan dan aspek hukum penerapan perlindungan data pribadi di instansi pemerintah, badan layanan publik, korporasi & perbankan berdasarkan undang-undang No. 27 tahun 2022	15 Januari 2025 Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta	Lembaga Informasi Peraturan Publik
		<i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan & Penyusunan SOP Terkait Laporan Keuangan Bank Sesuai POJK No 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank	29 April 2025 Ashley Tanah Abang, Jakarta	<i>Learning Banking Center</i>
		Ext - <i>Event Inaugurasi Certified Risk Management (CRM) BSMR Seminar Nasional</i>	18 Juni 2025 Swiss-Belhotel Harbour Bay - Batam	Indonesian Risk Professional Association
		Eks - KUHP 2023 : Peta Pasal Yang Relevan Terhadap Bank	22 - 23 Desember 2025 Ashley Wahid Hasyim - Jakarta	PT. Rintisan <i>Management</i> Gagas
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Treasury Jenjang	17 Januari 2025 hotel Ayana, Jimbaran - Bali	ACI Financial Market Indonesia
		<i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan & Penyusunan SOP Terkait Laporan Keuangan Bank Sesuai POJK No 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank	29 April 2025 Ashley Tanah Abang, Jakarta	<i>Learning Banking Center</i>
		Ext - <i>Event Inaugurasi Certified Risk Management (CRM) BSMR Seminar Nasional</i>	18 Juni 2025 Swiss-Belhotel Harbour Bay - Batam	Indonesian Risk Professional Association
		Ext - <i>Fraud Detection System (FDS) Menggunakan Metode Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML)</i>	25 - 26 Juni 2025 Hotel El Royale Yogyakarta	Infobank Institute
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	<i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan & Penyusunan SOP Terkait Laporan Keuangan Bank Sesuai POJK No 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank	29 April 2025 Ashley Tanah Abang, Jakarta	<i>Learning Banking Center</i>
		Ext - <i>Refreshment</i> Jenjang 7	03 Juli 2025 Aone Hotel, Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
		Ext - <i>Event Inaugurasi Certified Risk Management (CRM)</i>	02 September 2025 Hotel Fairmont - Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	<i>Workshop</i> "kebijakan dan aspek hukum penerapan perlindungan data pribadi di instansi pemerintah, badan layanan publik, korporasi & perbankan berdasarkan undang-undang No. 27 tahun 2022	15 Januari 2025 Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta	Lembaga Informasi Peraturan Publik (LIPP)



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Pujianto	Direktur Keuangan	<i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan & Penyusunan SOP Terkait Laporan Keuangan Bank Sesuai POJK No 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank	29 April 2025 Ashley Tanah Abang, Jakarta	<i>Learning Banking Center</i>
		Analisis Kerawanan Bank Umum dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	15 Mei 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (LPKMI), Lembaga Pusat Pengembangan Kajian Indonesia (LP2K)
		Ext - Event Inaugurasi Certified Risk Management (CRM) BSMR Seminar Nasional	18 Juni 2025 Swiss-Belhotel Harbour Bay - Batam	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional dan Syariah (SE OJK 14/SEO-JK,03/2025)	27 - 28 Agustus 2025 Jw Marriot Hotel - Jakarta	Risk Mangement Guard
		Eks - KUHP 2023 : Peta Pasal Yang Relevan Terhadap Bank	22 - 23 Desember 2025 Ashley Wahid Hasyim - Jakarta	PT. Rintisan Management Gagasan
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (SE OJK 14/SEO-JK,03/2025)	27 Agustus 2025 JW. Marriot Hotel, Jakarta	Risk Managemen Guard (RMG)
		EKS - KUHP 2023 : Peta Pasal Yang Relevan Terhadap Bank	22 Desember 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	PT. Rintisan Manajemen Gagasan
		<i>Workshop</i> "kebijakan dan aspek hukum penerapan perlindungan data pribadi di instansi pemerintah, badan layanan publik, korporasi & perbankan berdasarkan undang-undang No. 27 tahun 2022	15 Januari 2025 Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta	Lembaga Informasi Peraturan Publik (LIPP)
		Analisis Kerawanan Bank Umum dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	15 Mei 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (LPKMI), Lembaga Pusat Pengembangan Kajian Indonesia (LP2K)
		Ext - Sertifikasi Kompetensi : Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Batch 1	12 Juni 2025 Golden Boutique Hotel Kemayoran	Lembaga Pengembangan Dan Konsultasi Nasional (LPKN)
		Ext - <i>Refreshment</i> Jenjang 7	17 Januari 2025 Hotel Ayana, Jimbaran - Bali	ACI Finacial Market Indonesia
		Ext - <i>Event Inaugurasi Certified Risk Management (CRM)</i>	02 September 2025 Hotel Fairmont - Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

PENILAIAN KINERJA DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mendapatkan dukungan dari beberapa Komite. Komite-komite pendukung ini meliputi Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Produk, Komite Manajemen Kinerja, Komite Kepegawaian, dan Komite ALCO.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING COMMITTEES

In fulfilling its responsibilities, the Board of Directors is supported by several committees, including the Risk Management Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, Information Technology Steering Committee, Product Committee, Performance Management Committee, Personnel Committee, and ALCO Committee.



Penilaian kinerja Komite Direksi didasarkan pada tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite, serta hasil *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite menjadi salah satu dasar bagi Direksi dalam mengambil keputusan mengenai pemberhentian atau pengangkatan kembali anggota Komite tersebut. Hasil evaluasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai dan meningkatkan efektivitas Komite.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

Setiap Komite Direksi diwajibkan memiliki pedoman untuk melaksanakan tugasnya. Penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara individu maupun kolektif setiap satu tahun berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Komite. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan oleh Direksi.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Kriteria penilaian kinerja Komite Direksi mencakup:

1. Jumlah rapat yang dilaksanakan selama satu tahun.
2. Efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite selama satu tahun.
3. Efektivitas pelaksanaan hasil rapat Komite-komite Direksi; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi menilai bahwa selama tahun 2025, komite dan organ pendukung Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan optimal. Penilaian ini didasarkan pada laporan berkala yang disampaikan, realisasi pemenuhan tugas masing-masing komite sesuai dengan Piagam Komite, serta kompetensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat.

- **Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)**
ALCO merupakan komite yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan terkait aset dan liabilitas demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengurangi dan mengeliminasi risiko dalam perbankan, terutama terkait Risiko Likuiditas, Suku Bunga, dan Nilai Tukar, diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif

The performance assessment of these committees is grounded in the duties and responsibilities delineated in the Committee Charter, the Committee Work Program, and the findings from Bank Papua's Corporate Governance Self-Assessment.

The evaluation results for each committee member inform the Board of Directors' decisions regarding the dismissal or reappointment of members. Additionally, these results serve as a tool for assessing and enhancing the overall effectiveness of the committees.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES

Each committee of the Board of Directors is required to establish guidelines for executing its responsibilities. Performance assessments of the committees are conducted both individually and collectively on an annual basis, utilizing reports on the implementation of each committee's duties. This evaluation process is overseen by the Board of Directors.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The performance assessment criteria for the Board of Directors Committee include:

1. *The number of meetings held throughout the year.*
2. *The effectiveness of the implementation of the Committee's functions during the year.*
3. *The effectiveness of the execution of the outcomes from the Board of Directors Committee meetings.*
4. *The fulfillment of additional responsibilities in accordance with applicable regulations.*

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES AND SUPPORTING ORGANS

The Board of Directors evaluates that during 2025, the committees and supporting organs have executed their duties and responsibilities with effectiveness and efficiency. This assessment is grounded in the analysis of submitted periodic reports, the adherence to each committee's duties as outlined in the Committee Charter, and the competency and attendance of committee members at meetings.

- **Asset and Liability Committee (ALCO)**
The Asset and Liability Committee (ALCO) is tasked with making strategic decisions regarding the management of assets and liabilities to meet established objectives. To effectively mitigate and eliminate risks associated with banking, particularly those related to liquidity, interest rates, and exchange rates, collaboration and active



dari berbagai pengambil keputusan, baik dari sisi aset maupun liabilitas. Kerja sama ini akan berhasil jika setiap pengambil keputusan memahami perannya dan dampak keputusan tersebut terhadap keuntungan usaha secara keseluruhan. Pada tahun 2025, ALCO telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat.

- **Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk mempertahankan eksposur risiko pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali dan menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat

- **Komite Pertimbangan Pegawai**

Komite Pertimbangan Pegawai dibentuk untuk mencapai hasil optimal dalam pengambilan keputusan terkait hal-hal kritis di bidang *Human Capital*, baik dalam aspek strategi, kebijakan, maupun sistem pengelolaan *Human Capital* yang sejalan dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2025, Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

- **Komite Teknologi Informasi**

Komite Teknologi Informasi merupakan bagian dari tata kelola TI yang memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi guna meminimalisasi risiko yang terkait dengan penggunaan TI serta melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai wujud tata kelola TI, Komite IT Steering dibentuk untuk mencerminkan komitmen Direksi dan manajemen Bank Papua dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sesuai dengan yang diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan TI. Selama tahun 2025, Komite TI telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

- **Komite Kebijakan Perkreditan**

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk oleh Direksi untuk mengelola kebijakan perkreditan yang bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dengan mengedepankan pengendalian internal mulai dari tahap awal proses perkreditan hingga pemantauan kredit, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- **Komite Kredit**

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan mengenai kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi, dengan

participation from key decision-makers on both the asset and liability sides are essential. This collaborative effort will be successful only if each decision-maker comprehends their role and the implications of their decisions on overall business profitability. In 2025, ALCO convened 12 (twelve) meetings.

- **Risk Management Committee**

The Risk Management Committee was established to ensure that risk exposure remains within acceptable and profitable limits, thereby maintaining control over the bank's business activities and conducting operations in accordance with prudent principles. During 2025, the Risk Management Committee held 4 (four) meetings.

- **Employee Advisory Committee**

The Employee Advisory Committee was established to enhance decision-making on critical Human Capital issues, including strategy, policy, and Human Capital management systems, in alignment with the Bank's Business Plan. In 2025, the Employee Management Committee conducted 2 (two) meetings.

- **Information Technology Committee**

The Information Technology Committee is an integral component of IT governance, tasked with providing recommendations that prioritize efficiency to mitigate risks associated with IT usage and safeguard the interests of the Bank and its customers. To reinforce this governance framework, the IT Steering Committee was established, reflecting the commitment of the Board of Directors and management of Bank Papua to actively oversee IT management. In alignment with the OJK Regulation on the Implementation of MRTI (Information Technology and Transactions) and the Financial Services Authority (POJK MRTI), the IT Steering Committee assists the Board of Directors in formulating the Information Technology Strategic Plan and policies related to IT utilization. In 2025, the IT Committee convened 3 (three) meetings.

- **Credit Policy Committee**

The Credit Policy Committee was established by the Board of Directors to oversee credit policies that promote responsible credit provision. The Committee emphasizes internal controls throughout the credit process, from initial assessment to ongoing monitoring, while adhering to the principle of prudence.

- **Credit Committee**

The Credit Committee is an operational committee established by the Board of Directors to evaluate and make decisions regarding credit, including the amount and type of credit as determined by the Board. The



mempertimbangkan pengembangan bisnis, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Selama tahun 2025, Komite Kredit telah melaksanakan 94 (sembilan puluh empat) kali rapat.

committee considers business development while adhering to prudent principles, particularly in matters related to credit restructuring and settlement. During 2025, the Credit Committee held 94 (ninety-four) meetings.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi meliputi:

1. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank. Pemberhentian anggota Direksi termasuk pemberhentian sementara anggota Direksi. Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
 - b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank. Penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi;
 - c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
3. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir;
4. Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dapat disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis.

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF DIRECTORS

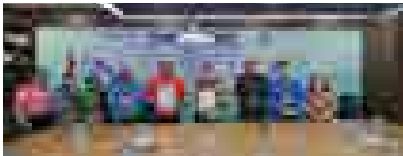
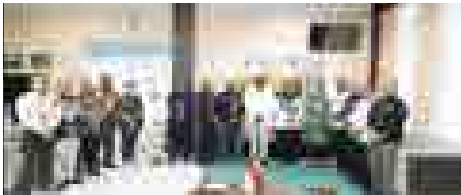
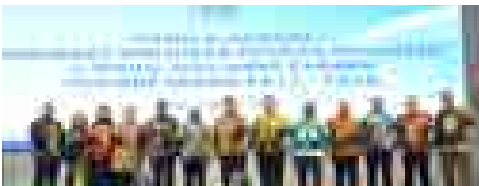
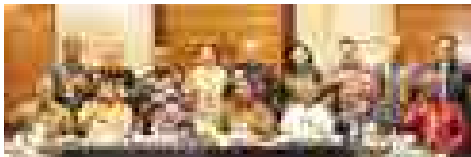
The mechanism for the resignation and dismissal of Directors includes the following provisions:

1. *The dismissal or replacement of members of the Board of Directors must prioritize the primary interests of the Bank. This includes both permanent and temporary dismissals of Board members. Restrictions on the authority of members who are temporarily dismissed shall be implemented in accordance with statutory provisions.*
2. *Any dismissal or replacement of Board members prior to the completion of their term must consider at least the following criteria:*
 - a. *The member is deemed incapable of fulfilling their duties and responsibilities in managing and executing sound Bank strategies.*
 - b. *The decision to dismiss or replace a member is based on objective assessments related to the management of the Bank rather than subjective evaluations by shareholders. Such assessments should encompass performance, integrity, financial reputation, and/or competence.*
 - c. *The process for dismissal or replacement must adhere to applicable planning and mechanisms, which should include assessments from the Committee responsible for the Nomination Function and be scheduled for the General Meeting of Shareholders (GMS).*
 - d. *The dismissal or replacement must not disrupt the organization and business activities of the Bank.*
 - e. *Good communication practices among all relevant parties must be prioritized during the dismissal or replacement process.*
 - f. *The process must emphasize the implementation of Good Governance principles and the principle of prudence.*
3. *The Financial Services Authority (OJK) holds the authority to evaluate decisions regarding the dismissal or replacement of Board members made before the expiration of their term.*
4. *The OJK's authority to take corrective action and evaluate the appointment, dismissal, replacement, and/or resignation of Board members may be communicated through a written order, in accordance with the OJK Regulation on written orders.*

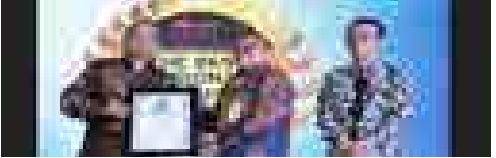
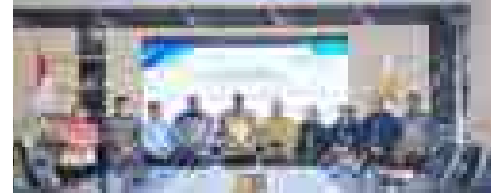
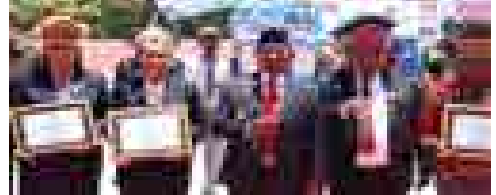


KEGIATAN DIREKSI DAN KOMISARIS TAHUN 2025

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

Tanggal	Kegiatan	Activities	
13 Januari 2025	Launching Money Changer Bank Papua dihadiri Komisaris, Direksi, dan pimpinan divisi sebagai penguatan layanan valuta asing.	Launch of Bank Papua's Money Changer service attended by Commissioners, Board of Directors, and Division Heads as part of strengthening foreign exchange services.	
06 Februari 2025	PKB sosialisasi UU ASN bagi pekerja Pemda Papua Barat dihadiri Direktur Bisnis, pimpinan divisi, serta jajaran Komisaris dan Direksi.	PKB socialization on the State Civil Apparatus (ASN) Law for Papua Barat Regional Government employees, attended by the Director of Business, Division Heads, and members of the Board of Commissioners and Directors.	
20 Februari 2025	Ramah tamah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dihadiri Komisaris, Direksi, dan pimpinan divisi untuk penguatan sinergi daerah.	Courtesy meeting with the Governor and Deputy Governor of Central Papua attended by Commissioners, Board of Directors, and Division Heads to strengthen regional synergy.	
05 Maret 2025	Pertemuan bersama Gubernur Papua Selatan dihadiri Komisaris, Direksi, dan pimpinan divisi guna memperkuat kolaborasi pembangunan daerah.	Meeting with the Governor of South Papua attended by Commissioners, Board of Directors, and Division Heads to enhance collaboration in regional development.	
05 Maret 2025	Pertemuan bersama Bupati Merauke dihadiri Komisaris, Direksi, dan pimpinan divisi untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.	Meeting with the Regent of Merauke attended by Commissioners, Board of Directors, and Division Heads to support regional economic development.	
06 Maret 2025	Pisah sambut PJ Gubernur Papua Barat Daya dihadiri Komisaris, Direksi, pimpinan divisi, dan wilayah sebagai bentuk dukungan kelembagaan.	Farewell and welcome ceremony for the Acting Governor of Southwest Papua attended by Commissioners, Board of Directors, Division Heads, and regional management as a form of institutional support.	
06 Maret 2025	Pisah sambut PJ Walikota Sorong dihadiri Komisaris, Direksi, pimpinan divisi, dan wilayah dalam memperkuat relasi pemerintah daerah.	Farewell and welcome ceremony for the Acting Mayor of Sorong attended by Commissioners, Board of Directors, Division Heads, and regional management to strengthen relations with local government.	
14 Maret 2025	Pertemuan bersama Gubernur se-Tanah Papua dihadiri Komisaris, Direksi, dan pimpinan wilayah untuk memperkuat koordinasi pembangunan regional.	A meeting with Governors from across Papua was attended by Commissioners, Directors, and regional leaders to strengthen regional development coordination.	



Tanggal	Kegiatan	Activities	
17 April 2025	Peluncuran SP2D Online pada SPBDI dihadiri Direktur Utama dan Direktur Operasional sebagai dukungan digitalisasi keuangan daerah.	The launch of the SP2D Online at the SPBDI was attended by the President Director and the Director of Operations as a support for regional financial digitalization.	
16 Mei 2025	Penerimaan penghargaan The Asian Post The Best Regional Champion 2025 dihadiri Komisaris dan Direktur Utama.	The Asian Post Best Regional Champion 2025 award was received by the Commissioners and President Directors.	
24 Juni 2025	Penandatanganan Kerjasama pemanfaatan kredit konstruksi dihadiri Direktur Bisnis dan manajemen sebagai dukungan sektor infrastruktur.	The signing of the Cooperation Agreement for the utilization of construction credit was attended by the Business Director and management as a support for the infrastructure sector.	
25 Agustus 2025	PKB pelaksanaan SP2D Online melalui SIPD dihadiri Direktur Bisnis, pimpinan divisi, dan pimpinan cabang Timika.	The PKB for the implementation of SP2D Online through SIPD was attended by the Business Director, division heads, and the Timika branch manager.	
13 Oktober 2025	Penerimaan penghargaan Bank Daerah Pendukung Ekonomi Terbaik dihadiri Direktur Utama dan Direktur Operasional.	The Best Regional Bank Supporting the Economy award was received by the President Director and the Director of Operations.	
20 Oktober 2025	Dukungan ASN Papua Barat melalui payroll, kredit, dan pembayaran pajak digital dihadiri Direktur Bisnis.	The Business Director attended the support of West Papua ASN through digital payroll, credit, and tax payments.	
15 Desember 2025	Peresmian Kantor Kas Yabri wilayah distrik dihadiri Komisaris Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Bisnis sebagai ekspansi layanan.	The inauguration of the Yabri Cash Office in the district area was attended by the President Commissioner, Director of Operations, and Director of Business as a service expansion.	



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris Bank Papua memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai pengawas strategis, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan pengurusan Bank dan memberikan arahan serta nasihat kepada Direksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bank beroperasi dengan sehat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terwujud dalam dua tingkatan, yaitu:

- 1 *Level Performance*, di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan nasihat kepada Direksi serta masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2 *Level Conformance*, yang mencakup pelaksanaan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa nasihat yang diberikan telah diimplementasikan serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank telah dipenuhi.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 1 Kriteria Jabatan Komisaris Independen
Calon Komisaris Independen yang akan diangkat menjadi Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - 1 Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - 2 Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 Pengetahuan di bidang perbankan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank. Pihak yang mempunyai hubungan dengan

The Board of Commissioners of Bank Papua plays a pivotal role in ensuring business sustainability and the effective implementation of corporate governance principles. Acting as a strategic overseer, the Board of Commissioners is tasked with supervising the Bank's management policies and offering guidance and counsel to the Board of Directors. Its objective is to ensure that the Bank operates in a sound, transparent manner and in compliance with relevant regulations.

The oversight function of the Board of Commissioners is exercised at two levels:

1. *Performance Level: In this capacity, the Board of Commissioners offers direction and guidance to the Board of Directors, as well as input to the General Meeting of Shareholders (GMS).*
2. *Conformance Level: This level encompasses additional oversight to ensure the implementation of the provided advice and compliance with all applicable laws, regulations, and the Bank's articles of association.*

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. *Criteria for the Position of Independent Commissioner Candidates for Independent Commissioner appointments must meet the following criteria:*
 - a. *Independent Commissioner candidates must possess:*
 1. *Sufficient banking knowledge relevant to the role of Independent Commissioner; and*
 2. *Experience in banking and/or finance. Such knowledge and experience must comply with the Financial Services Authority (OJK) Regulations regarding the Fit and Proper Test for Financial Services Institutions.*
 - b. *Former members of the Board of Directors or Executive Officers, as well as individuals with relationships with the Bank that may impair their ability to act independently, must observe a waiting period of at least one (1) year prior to being appointed as Independent Commissioners at the Bank. Relationships that could affect independence include contractual engagements with the Bank,*



Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen merupakan pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan Bank, sehingga masa tunggu dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual.

Masa tunggu atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank;

c. Masa tunggu (*cooling off*) bagi:

- 1 Mantan Direktur Utama pada Bank; dan
- 2 Mantan anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan Fungsi Pengawasan pada Bank,

Paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.

Anggota Direksi yang membawahkan mayoritas Fungsi Pengawasan adalah Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan atau Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko. Pejabat Eksekutif yang melakukan Fungsi Pengawasan adalah Pejabat Eksekutif atau Kepala Satuan Kerja yang membidangi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko;

d. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*)

e. Dalam hal berdasarkan penilaian OJK terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari Calon Komisaris Independen atau Calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, OJK berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

Tindakan pengawasan yang ditetapkan OJK, antara lain:

- 1 Menetapkan masa tunggu lebih lama dari 6 (enam) bulan terhadap calon Komisaris Independen;
- 2 Menetapkan masa tunggu terhadap calon Komisaris Non Independen; dan/atau

and the waiting period commences upon the termination of said contractual relationship. The cooling-off period refers to the duration between the effective termination of the individual's term as a member of the Board of Directors or an Executive Officer, or any other relationship with the Bank, and their subsequent appointment as an Independent Commissioner at the Bank. Consequently, the cooling-off period is conducted outside the Bank.

c. *The cooling-off period for:*

1. *Former Presidents Directors of the Bank; and*
2. *Former members of the Board of Directors who oversee the Supervisory Function or Executive Officers performing Supervisory Functions at the Bank,*

must be at least six (6) months prior to their appointment as Independent Commissioners at the Bank. The member of the Board of Directors overseeing the majority of the Supervisory Functions is the Director responsible for Compliance or Risk Management. The Executive Officer performing the Supervisory Function is the Executive Officer or Head of the Work Unit overseeing Internal Audit, Compliance, and Risk Management.

d. *In cases of conflict of interest or potential conflict of interest regarding a prospective Independent Commissioner or Non-Independent Commissioner related to the Bank, the candidate must disclose any such conflicts during the Fit and Proper Test.*

e. *Should the OJK assessment indicate a conflict of interest or potential conflict of interest for a prospective Independent Commissioner or Non-Independent Commissioner in relation to their nomination, the OJK reserves the authority to determine necessary supervisory measures. These measures may include:*

1. *Imposing a waiting period exceeding six (6) months for prospective Independent Commissioners;*
2. *Establishing a waiting period for prospective Non-Independent Commissioners; and/or*



- 3 Tidak menyetujui atau membatalkan pengangkatan Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non Independen yang tidak mengungkapkan benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
- 2 Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Disapproving or revoking the appointment of an Independent Commissioner and/or Non-Independent Commissioner who fails to disclose a conflict of interest or potential conflict of interest during the Fit and Proper Test.

2. Candidates must have no financial, management, shareholding, or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or controlling shareholders, nor any relationship with the Bank that may compromise their ability to act independently.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Tata Kerja yang dimiliki oleh Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris;
- 2 Sebelum pengangkatan sampai dengan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3 Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut;
- 4 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen;
- 5 Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- 6 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- 7 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office for the Board of Commissioners is governed by the Bank's Work Procedure Guidelines, which include the following provisions:

1. The Bank's Articles of Association stipulate that the term of office for members of the Board of Commissioners shall not exceed five (5) years for each term, commencing from the effective date of appointment by the General Meeting of Shareholders (GMS). Additionally, the Articles outline further conditions for fulfilling the responsibilities of Board members.
2. Prior to their appointment and throughout their term, members of the Board of Commissioners are required to report their assets via the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission.
3. Independent Commissioners serve for a defined term and may be reappointed, subject to GMS approval, for a maximum of two (2) consecutive terms.
4. Independent Commissioners who have completed two (2) consecutive terms may be eligible for reappointment for an additional term as Independent Commissioners.
5. In the event that one or more positions on the Board of Commissioners become vacant for any reason, a GMS must be convened within thirty (30) days of the vacancy to address the situation, in accordance with applicable laws and the Articles of Association.
6. A member of the Board of Commissioners may resign by submitting written notice to the company at least thirty (30) days prior to the intended resignation date.
7. The term of office for a member of the Board of Commissioners concludes under the following



- a. Mengundurkan diri;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS, KEWAJIBAN, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris, yang mencakup hal-hal berikut:

- 1 Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris berkaitan dengan:
 - a. Pengawasan dan Pemberian Nasihat
 - 1) Cakupan pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris:
 - Meliputi segala hal yang terkait dengan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank;
 - Meminta agar Direksi melakukan tindakan-tindakan tertentu sepanjang untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Pemberian nasehat ini tidak mengikat untuk dijalankan oleh Direksi, namun Dewan Komisaris berhak meminta dan memperoleh alasan tidak dijalkannya nasehat tersebut oleh Direksi;
 - Pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi tersebut dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - 2) Melakukan pencegahan terhadap kebijakan dan tindakan Direksi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - 3) Menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang wajib dilakukan Bank dan termasuk pemberhentian sementara anggota Direksi, dengan tetap mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
 - 5) Wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

circumstances:

- a. *Resignation;*
- b. *Failure to meet statutory requirements;*
- c. *Death;*
- d. *Dismissal by resolution of the GMS.*

DUTIES, OBLIGATIONS, RIGHTS, AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties, obligations, rights, and responsibilities of the Board of Commissioners are regulated in the Board of Commissioners' Code of Conduct, which covers the following:

1. *Duties and Obligations of the Board of Commissioners relate to:*
 - a. *Supervision and Advice*
 - 1) *The scope of supervision and advice provided by the Board of Commissioners:*
 - *Covers all matters related to management policies and the general management of the Bank, both regarding the Bank and the Bank's business;*
 - *Requests the Board of Directors to take certain actions as long as they are in the interest of the Bank and in accordance with the Bank's purposes and objectives. This advice is not binding on the Board of Directors, but the Board of Commissioners has the right to request and obtain reasons for not implementing such advice;*
 - *Supervision and advice provided to the Board of Directors are carried out in the interest of the Bank and in accordance with the Bank's purposes and objectives.*
 - 2) *Preventing policies and actions of the Board of Directors that could harm or reduce the Bank's profits;*
 - 3) *Communicate corrective measures that the Bank must take, including the temporary dismissal of members of the Board of Directors, while still referring to applicable laws and regulations;*
 - 4) *Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies;*
 - 5) *Required to establish an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, and a Remuneration and Nomination Committee, each of which must have one or more members of the Board of Commissioners.*



b. Penetapan Kebijakan Bank

- 1) Menetapkan kebijaksanaan umum Bank berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menilai kecukupan materi *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern) secara periodik bersama Direktur Utama agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal;
- 3) Menyetujui kebijakan-kebijakan Bank yang diwajibkan oleh peraturan.

c. Tindakan Kepengurusan Bank

- 1) Melakukan pengurusan sementara Bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara, terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak Ketiga;
- 2) Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan dan terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak Ketiga.

d. Rencana Bisnis Bank

- 1) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank yang dibuat oleh Direksi;
- 2) Menyetujui perubahan Rencana Bisnis Bank, dalam hal terjadi perubahan harus dikemukakan alasannya dan wajib disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal dilakukannya perubahan;
- 3) Memberikan pendapat tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap Realisasi Rencana Bisnis.

e. Tata Kelola Perusahaan

- 1) Memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa mencampuri atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Pejabat atau tim yang telah mendapat pelimpahan wewenang memutuskan untuk hal-hal tertentu dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Direksi;
- 2) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil

b. Determination of Bank Policies

- 1) Establishing general Bank policies based on applicable laws and regulations;
- 2) Periodically assessing the adequacy of the Internal Audit Charter with the President Director to ensure that Internal Audit implementation remains at an optimal level;
- 3) Approving Bank policies required by regulations.

c. Bank Management Actions

- 1) Temporary managing the Bank if all members of the Board of Directors are temporarily dismissed. All provisions regarding the rights, authorities, and obligations of the Board of Directors towards the Company and third parties shall apply to them;
- 2) If the positions of all members of the Board of Directors become vacant for any reason, the Board of Commissioners shall take managerial action for a specified period, and all provisions regarding the rights, authorities, and obligations of the Board of Directors towards the Company and third parties shall apply to them.

d. Bank Business Plan

- 1) Evaluate and approve the Bank Business Plan prepared by the Board of Directors;
- 2) Approve changes to the Bank Business Plan. In the event of changes, the reasons must be stated and submitted to the Financial Services Authority (OJK) no later than one month after the date of the changes;
- 3) Provide an opinion on the implementation of the Bank Business Plan, including an assessment of both quantitative and qualitative aspects of the Business Plan's implementation.

e. Corporate Governance

- 1) Provide complete freedom without interfering with or influencing decisions made by officials or teams delegated decision-making authority for certain matters, within the limits established by the Board of Directors;
- 2) Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings, recommendations from the Bank's Internal Audit Unit, External Auditors, OJK supervision results, and/or other authorities' supervision results;
- 3) Disclosing remuneration and other facilities determined by the GMS in the Bank's Governance implementation report;20.



pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;

- 3) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS pada laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank;
- 4) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 5) Mengungkapkan saham yang dimilikinya apabila mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri;
- 6) Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank;
- 7) Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Bank atas penetapan pengadilan dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan tentang Kerahasiaan Bank.

f. RUPS

- 1) Berhak melakukan pemanggilan untuk menyelenggarakan RUPS jika Direksi tidak melakukannya dalam 15 hari;
- 2) Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan Komisaris dalam hal Dewan Komisaris menerima pelimpahan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tersebut dari RUPS;
- 3) Memberhentikan sementara anggota Direksi untuk kepentingan Bank yang tidak dapat ditunda;
- 4) Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank;
- 5) Dapat meminta kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan lainnya untuk kepentingan Bank;
- 6) Mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Informing the Financial Services Authority (OJK) within five days upon discovery of:

- 3) *Disclose remuneration and other facilities determined by the GMS in the Bank's Good Corporate Governance Implementation Report;*
- 4) *Notify the Financial Services Authority (OJK) no later than 5 (five) days after discovering:*
 - *Violations of laws and regulations in the financial and banking sector; and*
 - *Circumstances or anticipated circumstances that could jeopardize the Bank's business continuity.*
- 5) *Disclose shares held if they reach 5% (five percent) or more in a Bank or other company, whether domiciled domestically or internationally;*
- 6) *Disclose financial and family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders of the Bank in the Bank's Good Corporate Governance Implementation Report;*
- 7) *Provide all information necessary for the Bank's examination of court orders, taking into account the provisions of the Bank Secrecy Law.*

f. GMS

- 1) *Has the right to summon a GMS if the Board of Directors fails to do so within 15 days;*
- 2) *Determine the salary and allowances of members of the Board of Directors through a resolution of the Board of Commissioners meeting if the Board of Commissioners receives a delegation of authority to determine such provisions from the GMS;*
- 3) *Temporarily suspend members of the Board of Directors for the Bank's interests, which cannot be postponed;*
- 4) *Examine all books, letters, and other evidence, review and verify the cash and other items, and have the right to know all actions taken by the Board of Directors, either jointly or individually, at any time during Bank office hours;*
- 5) *May request the Board of Directors by registered letter, including the reasons, to hold another annual GMS for the Bank's interests;*
- 6) *Submit a proposal to dissolve the company to the GMS.*



2. Hak Dewan Komisaris

- Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris dan atau Pelaksana Tugas Dewan Komisaris yang diangkat oleh Direksi atas beban Bank;
- Menerima gaji, honorarium, dan tunjangan yang ditentukan RUPS;
- Mengundurkan diri dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya;
- Mendapatkan sarana dan fasilitas Bank sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank.

3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Bertanggung jawab atas pengawasan Bank dengan itikad baik.
- Tanggung renteng atas kerugian Bank akibat kelalaian.
- Tidak bertanggung jawab atas kerugian jika telah menjalankan tugas dengan baik dan tanpa kepentingan pribadi.
- Bertanggung jawab atas kepailitan jika terjadi akibat kelalaian.
- Dapat digugat oleh Pemegang Saham jika melakukan tindakan di luar kewenangan.

2. Rights of the Board of Commissioners

- The division of labor and membership of committees among the members of the Board of Commissioners are determined by the members of the Board of Commissioners themselves, and to ensure the smooth implementation of its duties, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary and/or Acting Commissioner appointed by the Board of Directors at the Bank's expense;
- Receive the salary, honorarium, and allowances determined by the GMS;
- Resign with 30 days' notice;
- Receive Bank facilities and services in accordance with the resolutions of the GMS, the provision of which is adjusted to the Bank's financial condition.

3. Responsibilities of the Board of Commissioners

- Responsible for good faith supervision of the Bank.
- Jointly and severally liable for Bank losses due to negligence.
- Not liable for losses if duties have been performed properly and without personal interest.
- Responsible for bankruptcy if it occurs due to negligence.
- May be sued by Shareholders if they take actions beyond their authority.

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISARIS UTAMA

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban anggota Dewan Komisaris secara umum, Komisaris Utama memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Memimpin RUPS dan atau RUPS Luar Biasa;
- Memimpin Rapat Dewan Komisaris, yang dalam hal ini, sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris;
- Menandatangani laporan keuangan, surat-surat, dokumen-dokumen yang menurut ketentuan yang berlaku wajib ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris;
- Bersama dengan Dewan Komisaris lainnya didalam mengurus Bank dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan hingga terpilih dan diangkatnya anggota Direksi yang definitif;
- Menandatangani surat penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK dan pengkiniannya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER

In addition to fulfilling the general duties and responsibilities of Board of Commissioners members, the President Commissioner is tasked with the following specific duties:

- Presiding over the General Meeting of Shareholders (GMS) and/or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS);
- Leading Board of Commissioners meetings and serving as primus inter pares, thereby coordinating the activities of the Board of Commissioners;
- Signing financial reports, letters, and documents that, in accordance with applicable regulations, require signatures from both the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Collaborating with other Board of Commissioners members to manage the Bank in the event that all Board of Directors members are dismissed, until new members are elected and appointed;
- Signing the letter to submit the Recovery Action Plan to the Financial Services Authority (OJK) and overseeing its updates.



JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang diambil oleh Direksi dan memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

- 1 Melepaskan, menjual, atau menghapuskan aset tetap milik perusahaan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rapat Komisaris;
- 2 Mengeluarkan Obligasi;
- 3 Menetapkan struktur organisasi perusahaan dan perubahan yang diperlukan;
- 4 Mendirikan atau menghapuskan unit usaha;
- 5 Menggadaikan barang milik perusahaan.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Papua memiliki Pedoman atau Piagam (*Charter*) yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Piagam ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Bank Papua.

Pedoman ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan. Dokumen ini mencakup aturan mengenai fungsi, etika jabatan, hak, kewajiban, dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, termasuk pelaksanaan rapat dan hubungan dengan Direksi. Isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan:

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum

Bab II: Dewan Komisaris:

1. Jumlah Dewan Komisaris
2. Komposisi Dewan Komisaris
3. Kriteria Dewan Komisaris
4. Persyaratan Dewan Komisaris
5. Keanggotaan Dewan Komisaris
6. Ketentuan Mengenai Jabatan Dewan Komisaris

TYPES OF DECISIONS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Decisions made by the Board of Directors that necessitate written approval from the Board of Commissioners are governed by the Company's Articles of Association as follows:

1. *The release, sale, or disposal of company fixed assets valued above a threshold established during a Board of Commissioners meeting.*
2. *The issuance of bonds.*
3. *The determination of the company's organizational structure and any necessary modifications.*
4. *The establishment or dissolution of business units.*
5. *The pledging of company property.*

BOARD OF COMMISSIONERS WORK PROCEDURE GUIDELINES

The Board of Commissioners of Bank Papua operates under a Charter that serves as a foundational reference for fulfilling its supervisory responsibilities and ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG). This Charter was established to provide clear direction regarding the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners, thereby supporting the achievement of Bank Papua's vision and mission.

These guidelines are articulated in Board of Directors Decree Number 80/DIR-BPD/XII/2024, dated December 31, 2024, concerning the Corporate Governance Implementation Guidelines (BPP). This document encompasses regulations pertaining to the functions, ethical standards, rights, obligations, and operational mechanisms of the Board of Commissioners, including meeting protocols and interactions with the Board of Directors.

The Work Procedure Guidelines for the Board of Commissioners address the following areas:

Chapter I: Introduction

1. Background
2. Legal Basis

Chapter II: Board of Commissioners

1. Number of Commissioners
2. Composition of the Board of Commissioners
3. Criteria for the Board of Commissioners
4. Requirements for the Board of Commissioners
5. Membership of the Board of Commissioners
6. Provisions Concerning the Position of the Board of Commissioners



7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Independensi Dewan Komisaris
9. Komisaris Independen
10. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Dewan Komisaris
11. Pembagian Tugas Komisaris
12. Kewajiban Dewan Komisaris
13. Wewenang Hak Dewan Komisaris
14. Etika Jabatan
15. Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi
16. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
17. Rapat Dewan Komisaris
18. Aspek Transparansi
19. Komite – Komite Dewan Komisaris
20. Sekretaris Dewan Komisaris
21. Sanksi
22. Hal–hal Lain Yang Diatur Terkait Dewan Komisaris

Dengan adanya Piagam Dewan Komisaris, Bank Papua memastikan bahwa semua keputusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*Fairness*) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi perbankan dan standar GCG yang berlaku.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank Papua dirancang untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab khusus yang mencakup fungsi strategis seperti pengawasan risiko, audit, remunerasi, dan nominasi. Dengan struktur yang jelas, Dewan Komisaris berperan aktif dalam memberikan arahan, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja perusahaan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian tujuan strategis. Pembidangan tugas ini juga mendukung efektivitas pengawasan serta pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel di Bank Papua.

7. *Orientation and Capability Development Program*
8. *Independence of the Board of Commissioners*
9. *Independent Commissioners*
10. *Duties, Responsibilities, and Obligations of the Board of Commissioners*
11. *Division of Commissioners' Duties*
12. *Obligations of the Board of Commissioners*
13. *Authority and Rights of the Board of Commissioners*
14. *Ethical Standards*
15. *Working Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors*
16. *Performance Evaluation of the Board of Commissioners*
17. *Meetings of the Board of Commissioners*
18. *Transparency Aspects*
19. *Committees of the Board of Commissioners*
20. *Secretary of the Board of Commissioners*
21. *Sanctions*
22. *Other Matters Regulated Related to the Board of Commissioners*

With the establishment of the Board of Commissioners Charter, Bank Papua ensures that all decisions and supervisory actions undertaken by the Board of Commissioners are grounded in the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as mandated by banking regulations and applicable GCG standards.

DELINEATION OF SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The delineation of supervisory duties for the Board of Commissioners of Bank Papua is established to ensure the implementation of good corporate governance (GCG) in alignment with applicable regulations and the articles of association. Each member of the Board of Commissioners is assigned specific responsibilities that encompass strategic functions, including risk oversight, audit, remuneration, and nomination. With a well-defined structure, the Board of Commissioners actively contributes to the direction, evaluation, and monitoring of the company's performance, thereby ensuring regulatory compliance and the realization of strategic objectives. This delineation of duties further facilitates effective oversight and promotes transparent and accountable decision-making at Bank Papua.



Nama	Jabatan	Pembidangan Tugas	Scope of Duties
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Memimpin Dewan Komisaris- Memberikan arahan strategis Memastikan fungsi pengawasan sesuai peraturan dan anggaran dasar	<i>Leads the Board of Commissioners and provides strategic direction. Ensures that the supervisory function is carried out in accordance with applicable regulations and the Articles of Association.</i>
Nataniel Dominggus Mandacan	Komisaris Non Independen	Pengawasan bidang risiko, audit, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dengan menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko- Anggota Komite Audit- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	<i>Oversees risk management, audit, and remuneration and nomination policies by serving as a Member of the Risk Monitoring Committee, Member of the Audit Committee, and Member of the Remuneration and Nomination Committee.</i>
Dortheis Sesa*	Komisaris Independen	Berfokus pada pengawasan risiko, kebijakan remunerasi, nominasi, serta proses audit internal Bank dengan menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi- Ketua Komite Pemantau Risiko- Anggota Komite Audit	<i>Focuses on oversight of risk management, remuneration and nomination policies, as well as the Bank's internal audit process by serving as Chair of the Remuneration and Nomination Committee, Chair of the Risk Monitoring Committee, and Member of the Audit Committee.</i>
H. Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	Pengawasan audit internal, kebijakan remunerasi, dan pemantauan risiko dengan menjadi Ketua Komite Audit- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi- Anggota Komite Pemantau Risiko.	<i>Oversees internal audit, remuneration policies, and risk monitoring by serving as Chair of the Audit Committee, Member of the Remuneration and Nomination Committee, and Member of the Risk Monitoring Committee.</i>
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan perundangan dan anggaran dasar Berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik tanpa tanggung jawab komite	<i>Performs supervisory duties in accordance with prevailing laws and regulations and the Articles of Association. Focuses on the implementation of good corporate governance without committee assignments.</i>

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

**Passed away on December 15, 2025*

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

- 1 Menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif di lembaga atau perusahaan keuangan lainnya, baik bank maupun non-bank.
- 2 Menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif di lebih dari satu lembaga atau perusahaan non-keuangan, baik domestik maupun internasional.
- 3 Memiliki peran fungsional di lembaga keuangan bank maupun non-bank di dalam atau luar negeri.
- 4 Memegang jabatan lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 5 Memegang jabatan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, menurut Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, rangkap jabatan diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti:

- 1 Menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank berbadan hukum, dengan batasan hanya untuk pengawasan.

CONCURRENT POSITION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- 1 Serve as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or executive officer in other financial institutions or companies, both banks and non-banks.
- 2 Served as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or executive officer in more than one non-financial institution or company, both domestic and international.
3. Having functional roles in financial institutions, both banking and non-banking, domestically or abroad.
4. Holding other positions that may create a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Commissioners.
5. Holding other positions that are prohibited under applicable laws and regulations.

However, based on the Board of Commissioners Working Guidelines, concurrent positions are permitted under certain conditions, such as:

1. Performing functional duties on behalf of the Bank's legal owner, limited to supervisory roles.



- 2 Merangkap jabatan di organisasi nirlaba, asalkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di Bank Papua.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris tetap fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan cara yang profesional dan akuntabel.

2. *Holding positions in non-profit organizations, provided that such roles do not interfere with the duties of the Board of Commissioners at Bank Papua.*

This policy aims to ensure that the Board of Commissioners remains focused in carrying out its responsibilities in a professional and accountable manner.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Fungsional Ahli Utama	Pemerintah Provinsi Papua
Nataniel Dominggus Mandacan	Komisaris Non Independen	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)	Pemerintah Provinsi Papua Barat
Dortheis Sesa	Komisaris Independen	-	-
H. Arobi Ahmad Aitu-arauw	Komisaris Independen	-	-
Victor Abraham Abai-data	Komisaris Independen	-	-

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun buku 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank. Dewan Komisaris berkomitmen untuk mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan dan selalu menjaga agar tidak terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris. Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa:

- Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Bank maupun perusahaan lain;
- Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Bank;
- Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
- Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengan hal tersebut.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the 2025 financial year, all members of the Board of Commissioners had no conflicts of interest nor potential conflicts of interest with the Bank. The Board of Commissioners is committed to preventing any potential conflicts of interest and consistently ensures that its members are not involved in situations that may give rise to such conflicts, in accordance with the provisions set forth in the Board of Commissioners Charter.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that may harm or reduce the benefits of the Bank and are required to disclose such potential conflicts in every decision-making process. Therefore, members of the Board of Commissioners shall consistently:

- Avoid conflicts of interest;*
- Maintain a Special Register containing information on their share ownership and/or that of their family in the Bank and other companies;*
- Refrain from using their position for personal interests or for the interests of related parties that conflict with the Bank's interests;*
- Avoid any activities that may affect their independence in performing their duties;*
- Disclose any conflict of interest and refrain from participating in the Bank's decision-making process related to such matters.*



Komisaris Independen

Independent Commissioner

Bank Papua mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait keberadaan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen di Bank harus sekurang-kurangnya 50% dari total anggota Dewan Komisaris. Saat ini, Bank Papua memiliki 3 Komisaris Independen dari total 5 anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen di Bank Papua melebihi batas minimum 50% yang ditetapkan.

Bank Papua complies with regulations set by the relevant authorities regarding the existence of Independent Commissioners. The number of Independent Commissioners must be at least 50% of the total members of the Board of Commissioners. Currently, Bank Papua has 3 Independent Commissioners out of a total of 5 members of the Board of Commissioners. Therefore, the composition of Independent Commissioners at Bank Papua exceeds the minimum requirement of 50%.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris Independen Bank harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan oleh Dewan Komisaris yang efektif, tepat dan cepat. Agar tujuan Bank tersebut tercapai, maka diperlukan anggota Komisaris Independen;
2. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen
 - a. Komite yang menjalankan fungsi nominasi mengajukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon Komisaris Independen;
 - b. Dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan, antara lain dalam bentuk hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya;
 - c. Mekanisme pencalonan dilakukan dengan cara pengumuman di media massa lengkap dengan agenda pada saat pengumuman RUPS;
 - d. Calon yang diajukan harus lebih dari satu, dimana calon yang dinominasikan harus lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

CRITERIA FOR THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

1. *Independent Commissioners must enable the Board of Commissioners to make effective, timely, and appropriate decisions. To achieve this objective, the presence of Independent Commissioners is essential;*
2. *Nomination Procedure for Independent Commissioners*
 - a. *The committee performing the nomination function proposes candidates for Independent Commissioners;*
 - b. *In the nomination process, the views of minority shareholders must be considered, including granting minority shareholders the right to propose candidates for Independent Commissioners as a form of protection for minority shareholders and other stakeholders;*
 - c. *The nomination mechanism is carried out through announcements in the mass media, including the agenda at the time of the General Meeting of Shareholders (GMS) announcement;*
 - d. *More than one candidate must be proposed, and all nominated candidates must pass the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (OJK) before being submitted to the GMS for approval.*

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI Masing-masing KOMISARIS INDEPENDEN

Setiap Komisaris Independen telah menyusun Surat Pernyataan Independen yang menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF EACH INDEPENDENT COMMISSIONER

Each Independent Commissioner has prepared a Statement of Independence confirming that they have no financial, management, share ownership, or family relationships with



kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Mereka juga tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen. Berikut ini adalah Surat Pernyataan Independen yang dimaksud:

other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders. They also do not have any other relationships that may affect their ability to act independently.

The Statement of Independence is presented as follows:

Pernyataan	Komisaris Independen			Statement
	Dortheis Sesa	Arobi Ahmad Aituaraaw	Victor Abraham Abaidata	
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, serta tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen terhadap Bank.	✓	✓	✓	<i>Has no financial, management, share ownership or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders, and has no relationships that could affect his/her ability to act independently towards the Bank.</i>
Tidak pernah bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali jika diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode berikutnya.	✓	✓	✓	<i>Never worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, unless reappointed as an Independent Commissioner for the following period.</i>
Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Perusahaan tersebut.	✓	✓	✓	<i>Does not own shares, either directly or indirectly, in the Company.</i>
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama di Perusahaan tersebut.	✓	✓	✓	<i>Has no affiliated relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders in the Company.</i>
Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.	✓	✓	✓	<i>Does not have any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.</i>

Jika di kemudian hari terungkap bahwa salah satu Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen, maka yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen dan siap untuk diganti. Pernyataan ini akan disampaikan kepada OJK.

If, at any time in the future, it is revealed that an Independent Commissioner has financial, management, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder, or has any relationship with the Bank that may affect their ability to act independently, the concerned individual agrees to resign from the position of Independent Commissioner and be replaced. This statement shall be submitted to the Financial Services Authority (OJK).

KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Kebijakan Umum
 - a. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
 - c. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING POLICY

1. General Policy
 - a. A Board of Commissioners meeting is a meeting organized by the Board of Commissioners;
 - b. Board of Commissioners meetings consist of Internal Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors;
 - c. Meetings are held at the Bank's domicile or business



- kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank;
- d. Rapat Internal Dewan Komisaris adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris;
 - e. Rapat Internal Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - f. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat bersama Direksi adalah rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi antara lain dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan atau arahan kepada Direksi;
 - g. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris. Mayoritas yang dimaksud adalah lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - h. Rapat Internal Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - i. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui media video konferensi atau sarana media tatap muka elektronik lain;
 - j. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat internal di luar jadwal yang telah ditentukan atas permintaan:
 - 1) Komisaris Utama;
 - 2) Permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
 - 3) Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi;
 - 4) Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah Rapat Intern Dewan Komisaris ini dapat dihadiri oleh Direksi dan atau pejabat Bank terkait jika diundang oleh Dewan Komisaris.
 - k. Komisaris Utama atau Dewan Komisaris lainnya menyampaikan undangan dan agenda Rapat Internal Dewan Komisaris kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dengan sarana apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak;
 - l. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam locations;
 - d. *Internal Meetings are attended only by members of the Board of Commissioners;*
 - e. *Internal Meetings are held periodically at least once every 2 (two) months;*
 - f. *The Board of Commissioners must hold joint meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months to exercise oversight and provide direction;*
 - g. *Meetings are valid if attended by the majority (>50%) of members;*
 - h. *Internal Meetings must be physically attended by all members at least 2 (two) times a year;*
 - i. *Non-Independent Commissioners who are unable to attend meetings in person may attend Board of Commissioners meetings face-to-face using information technology. This may include video conferencing or other electronic face-to-face media.*
 - j. *Additional meetings may be held upon request from:*
 - 1) *President Commissioner;*
 - 2) *Request from one or more members of the Board of Commissioners;*
 - 3) *Written request from one or more members of the Board of Directors;*
 - 4) *Written request from one or more shareholders who collectively own at least 1/10 (one-tenth) of all shares issued by the Bank with valid voting rights. This Internal Meeting of the Board of Commissioners may be attended by the Board of Directors and/or relevant Bank officials if invited by the Board of Commissioners.*
 - k. *The President Commissioner or other members of the Board of Commissioners shall convey the invitation and agenda for the Internal Meeting of the Board of Commissioners to other members of the Board of Commissioners by any means within 3 (three) calendar days prior to the meeting, or within a shorter period in urgent circumstances;*
 - l. *The meeting notice is not required if all members of the Board of Commissioners are present at the*



rapat;

- m. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- n. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Materi rapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan;
- o. Sebelum rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlebih dahulu mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Dewan Komisaris mengenai agenda tersebut. Masukan tersebut dapat berupa penambahan/pengurangan atau penajaman agenda rapat;
- p. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda rapat yang akan dilaksanakan;
- q. Para Anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk tidak setuju walaupun secara keseluruhan jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini maka keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

2. Prosedur Rapat Dewan Komisaris

- a. Sekretaris Dewan Komisaris menerima bahan-bahan/dokumen/laporan manajemen dari unit-unit terkait. Bahan-bahan/dokumen/laporan manajemen tersebut akan digunakan sebagai bahan rapat Dewan Komisaris. Bahan-bahan tersebut antara lain: Laporan Bulanan Perusahaan, Laporan Triwulanan Perusahaan, Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan dari Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris;
- b. Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan bahan-bahan/laporan/ dokumen yang diterima sesuai prosedur administrasi surat yang ada;
- c. Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan bahan-bahan/dokumen/ laporan tersebut kepada Komisaris Utama;
- d. Komisaris Utama mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikan arahan kepada Sekretaris Komisaris untuk ditindaklanjuti;
- e. Jika arahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan rapat, Sekretaris Dewan Komisaris segera menyusun agenda rapat;
- f. Sekretaris Dewan Komisaris mengedarkan agenda rapat beserta bahan-bahan/dokumen/laporan yang akan dirapatkan kepada para Anggota Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan-masukan atas agenda tersebut;

meeting;

- m. *The meeting notice must include the agenda, date, time, and venue;*
- n. *The meeting materials are prepared by the Secretary of the Board of Commissioners. The meeting materials shall be delivered simultaneously with the invitation;*
- o. *Before the meeting takes place, the Secretary of the Board of Commissioners shall first circulate the meeting agenda to obtain input from the members of the Board of Commissioners regarding the agenda. This input may include additions/reductions or refinements to the meeting agenda;*
- p. *Each member of the Board of Commissioners has the right to propose an agenda for the meeting to be held;*
- q. *Members of the Board of Commissioners are permitted to disagree even if the overall number of votes in favor is greater. In such cases, the dissenting vote must be recorded in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.*

2. Board of Commissioners Meeting Procedures

- a. *The Secretary of the Board of Commissioners receives materials/documents/management reports from relevant units. These materials/documents/ management reports will be used as materials for Board of Commissioners meetings. These materials include: the Company's Monthly Report, the Company's Quarterly Report, the Company's Annual Report, and reports from Committees under the Board of Commissioners;*
- b. *The Secretary of the Board of Commissioners documents the materials/reports/documents received in accordance with existing administrative procedures;*
- c. *The Secretary of the Board of Commissioners submits the materials/documents/reports to the President Commissioner;*
- d. *The President Commissioner reviews the materials and provides direction to the Secretary of the Board of Commissioners for follow-up;*
- e. *If the direction requires a meeting, the Secretary of the Board of Commissioners shall immediately prepare the meeting agenda;*
- f. *The Secretary of the Board of Commissioners shall circulate the meeting agenda, along with the materials/documents/reports to be discussed, to the members of the Board of Commissioners to obtain input on the agenda.*



- g. Anggota Dewan Komisaris menerima, membaca dan mempelajari agenda rapat beserta bahan-bahannya. Setelah selesai, agenda tersebut dikirimkan kembali kepada Sekretaris Dewan Komisaris beserta masukan-masukan dari Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan membubuhkan paraf sebagai tanda menyetujui agenda rapat tersebut;
 - h. Sekretaris Dewan Komisaris membuat surat undangan rapat setelah menerima semua masukan yang ada dari Anggota Dewan Komisaris;
 - i. Dalam surat undangan tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris menyusun butir-butir masalah yang akan dibicarakan dalam rapat;
 - j. Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan kepada pihak yang dimaksud;
 - k. Peserta rapat menerima undangan dan bahan-bahan rapat.
3. Prosedur Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama bersama Sekretaris Perusahaan dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, bertanggung jawab untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
 - b. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir;
 - c. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir;
 - d. Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
 - e. Risalah Rapat tersebut harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan;
- g. *Members of the Board of Commissioners receive, read, and study the meeting agenda and materials. Upon completion, the agenda is returned to the Secretary of the Board of Commissioners along with input from the relevant Member of the Board of Commissioners and initialed as a sign of approval of the meeting agenda.*
 - h. *The Secretary of the Board of Commissioners prepares a meeting invitation after receiving all input from the Members of the Board of Commissioners;*
 - i. *In the invitation letter, the Secretary of the Board of Commissioners outlines the issues to be discussed at the meeting;*
 - j. *If the meeting invites other parties, the Secretary of the Board of Commissioners is responsible for preparing the invitation letters to those parties;*
 - k. *Meeting participants receive the invitations and meeting materials.*
3. *Procedures for Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
 - a. *The Secretary of the Board of Commissioners or another official appointed by the President Commissioner, together with the Corporate Secretary and/or an official appointed by the President Director, is responsible for preparing, administering, and distributing the Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
 - b. *If the Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors is attended only by Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the minutes of the meeting are prepared by one of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors appointed from among those present;*
 - c. *Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting must be signed by the Chairperson of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting and by the President Director or a Director appointed by and from among those present;*
 - d. *Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors is entitled to receive a copy of the Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, even if the person concerned was not present at the meeting;*
 - e. *The Minutes of the Meeting must be delivered to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors no later than 7 (seven) days after the meeting is held;*



- f. Perbaikan risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman;
- g. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau yang diwakili serta Direksi yang hadir harus menyampaikan keberatannya dan atau usul perbaikannya, bila ada, atas Risalah Rapat tersebut;
- h. Jika keberatan atau usul perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan atau perbaikan atau keberatan dan perbaikan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan;
- i. Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana layaknya dokumen Bank oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan salinannya oleh Sekretaris Perusahaan atau unit kerja yang membawahi kesekretariatan perusahaan. Risalah Rapat tersebut harus selalu tersedia bila diperlukan.

- f. Amendments to the Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting may be made within 14 (fourteen) days from the date of delivery;
- g. Each member of the Board of Commissioners present or represented, and any member of the Board of Directors present, must submit their objections and/or proposed improvements, if any, to the Minutes of the Meeting;
- h. If objections or proposed improvements are not received within the said time period, it shall be concluded that there were no objections or improvements, or objections and proposed improvements to the Minutes of the Meeting in question;
- i. The original minutes of the meeting must be properly administered and retained as a bank document by the Secretary of the Board of Commissioners, and a copy by the Corporate Secretary or the work unit responsible for the company secretariat. These minutes must be readily available when needed.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Rapat Internal Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Materi rapat telah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat. Untuk tahun 2025, agenda, tanggal, dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Meeting Agenda
1.	23 Januari 2025	Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris & Lain-lain	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituaraaw Vitor A. Abaidata	Discussion of the Board of Commissioners' Work Program & Other Matters
2.	10 Februari 2025	Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS LB & Lain-lain	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituaraaw Vitor A. Abaidata	Discussion of Preparations for the Extraordinary General Meeting of Shareholders & Other Matters
3.	14 April 2025	1. Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris Trw II Tahun 2025 2. Pembahasan Materi Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituaraaw Vitor A. Abaidata	1. Discussion of the Board of Commissioners' Activity Schedule for Quarter II of 2025 2. Discussion of Materials for the Joint Meeting of the Board of Directors and Commissioners
4.	19 Mei 2025	Tentang insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi Menggunakan Kanal QRIS	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituaraaw Vitor A. Abaidata	Regarding the Incident of Fraud Transaction Anomalies Using the QRIS Channel

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Internal Meeting of the Board of Commissioners was held in accordance with applicable policies. Meeting materials were submitted no later than 5 (five) days prior to the meeting. For 2025, the agenda, date, and participants for the Board of Commissioners Meeting are as follows.



No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Meeting Agenda
5.	19 Juni 2025	1. Pembahasan Pengumuman Lelang Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025 2. Pembahasan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank PT. BPD Papua Tahun 2025-2027 3. Lain-lain.	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	1. Discussion of the Public Accounting Firm Services Procurement Tender Announcement for the 2025 Fiscal Year 2. Discussion of Adjustments to the 2025-2027 Bank PT. BPD Papua Business Plan 3. Miscellaneous.
6.	25 Juni 2025	Pembahasan Tentang Penyesuaian RBB dan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw	Discussion of Adjustments to the Bank's Business Plan (RBB) and the Board of Commissioners' Schedule
7.	1 Juli 2025	Pembahasan Hasil temuan OJK Tahun 2025	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	Discussion of OJK Findings for 2025

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Materi rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2025, rincian mengenai agenda, tanggal, dan peserta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were conducted in accordance with applicable policies. Meeting materials were distributed no later than 5 (five) days prior to the meeting.

Throughout 2025, the details of the agenda, dates, and participants of the joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Participants of the Board of Commissioners Meeting	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
1.	21 Januari 2025	Evaluasi Kinerja Bisnis Bank Tahun 2024, & Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 & Lain-lain	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	Yuliana D. Yembise Sadar Sebayang Isak S. Wopari Betty J. Parinussa Pujianto
2.	10 Februari 2025	Persiapan Pelaksanaan RUPS Bank Papua (Undangan Dirut) Pembahasan Materi RUPS dan Lokasi Pelaksanaan RUPS Tahunan.	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	Yuliana D. Yembise Sadar Sebayang Isak S. Wopari Betty J. Parinussa Pujianto
3.	15 April 2025	1. Laporan Kinerja Keuangan Trw I Tahun 2025 2. Laporan Singkat Progress persiapan Asbando Tahun 2025 3. Penyesuaian Jadwal Kegiatan Direksi dan Komisaris Tahun 2025 4. Lain-lain	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	Yuliana D. Yembise Sadar Sebayang Isak S. Wopari Betty J. Parinussa Pujianto
4.	25 Juni 2025	1. Pemaparan Singkat Corporate Plan Bank Papua tahun 2023 - 2025 2. Pembahasan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 3. Perkembangan Terkini Tindakanlanjutan Insiden TI 2025 4. Lain - Lain	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw	Yuliana D. Yembise Isak S. Wopari Pujianto
5.	30 Oktober 2025	Penyusunan Laporan Keuangan Bank Papua dan Isu Terkini terkait Permasalahan Hukum	Y. Derek Hegemur Dortheis Sesa Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	Yuliana D. Yembise Sadar Sebayang Isak S. Wopari Betty J. Parinussa Pujianto



No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Participants of the Board of Commissioners Meeting	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
6.	27 November 2025	Pembahasan Rancangan RBB Tahun 2025 dan Perkembangan isu terkini insiden syber TI dan Lain-lain	Y. Derek Hegemur Nataniel D. Mandacan Aroby Aituarauw Vitor A. Abaidata	Yuliana D. Yembise Sadar Sebayang Isak S. Wopari Betty J. Parinussa Pujiyanto

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 7 (tujuh) kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 6 (enam) kali. Frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

During 2025, the Board of Commissioners held seven internal meetings and six joint meetings with the Board of Directors. The frequency and attendance of each member of the Board of Commissioners at these meetings are shown in the table below.

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama		7	100%		6	100%		2	100%
Dortheis Sesa	Komisaris Independen		7	100%		6	100%		2	100%
Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	7	7	100%	6	6	100%	2	2	100%
Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen		7	100%		6	100%		2	100%
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen		7	100%		6	100%		2	100%



KEBIJAKAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, TERMASUK PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG BARU DIANGKAT

PROGRAM ORIENTASI KOMISARIS BARU

Bank Papua telah merancang program orientasi khusus untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini bertujuan memastikan bahwa para Komisaris memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bank Papua. Hal ini sangat penting mengingat anggota Dewan Komisaris sering kali berasal dari latar belakang yang beragam dan belum pernah bekerja sama dalam satu tim sebelumnya.

Orientasi ini mencakup berbagai aktivitas, seperti presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Bank, dan pengenalan dengan pemimpin divisi serta unit kerja. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Gambaran umum tentang Bank Papua, termasuk visi, misi, kinerja, risiko, dan strategi jangka pendek serta jangka panjang.
2. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Papua.
3. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.
4. Penjelasan tentang kewenangan yang didelegasikan, sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternal, serta peran komite-komite pendukung Dewan Komisaris.
5. Kegiatan membangun kekompakan (team building) antar anggota Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PELATIHAN/PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan Bank yang efektif. Bank Papua memfasilitasi pengembangan kompetensi anggota melalui program pelatihan yang sesuai dengan perkembangan industri dan tata kelola.

Dewan Komisaris menetapkan bahwa setiap anggotanya wajib mengikuti program pendidikan atau pelatihan minimal dua kali dalam satu tahun. Berikut adalah pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025.

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT POLICY FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS, INCLUDING AN ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED MEMBERS

NEW COMMISSIONER ORIENTATION PROGRAM

Bank Papua has designed a special orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners. This program aims to ensure that Commissioners understand their duties and responsibilities and have a deep understanding of Bank Papua. This is especially important given that Board of Commissioners members often come from diverse backgrounds and have never worked together as a team before.

This orientation includes various activities, such as presentations, meetings, visits to Bank facilities, and introductions to division and work unit leaders. The materials presented include:

1. An overview of Bank Papua, including its vision, mission, performance, risks, and short- and long-term strategies.
2. The implementation of good corporate governance at Bank Papua.
3. The legal responsibilities of members of the Board of Commissioners.
4. An explanation of delegated authority, the internal control system, internal and external audits, and the role of the Board of Commissioners' supporting committees.
5. Team-building activities among members of the Board of Commissioners.

2025 BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING/COMPETENCY IMPROVEMENT POLICY

The Board of Commissioners' competency development program aims to support the implementation of its duties and achieve sustainable growth and effective Bank management. Bank Papua facilitates member competency development through training programs aligned with industry developments and governance.

The Board of Commissioners stipulates that each member is required to participate in education or training programs at least twice a year. The following is a summary of the training and/or competency improvement programs attended by the Board of Commissioners during 2025.



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Dan 6 Bagi Komisaris	08 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan Bsmr
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		Ext - Implementasi POJK No.15 Tahun 2024 Dalam Mengelola Bisnis Bank	19 Juni 2025 Hotel Artotel Thamrin Jakarta	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Eks - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) Dan Kantor Akuntan Publik Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No.09 Tahun 2023	27 Agustus 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Learning Media Indonesia (Lmi)
		Ext - <i>Workshop</i> Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratik	09 Oktober 2025 Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
Dortheis Sesa	Komisaris Non Independen	<i>Workshop</i> "Kebijakan Dan Aspek Hukum Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Instansi Pemerintah, Badan Layanan Publik, Korporasi & Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022	15 Januari 2025 Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta	Lembaga Informasi Peraturan Publik (LIPP)
		Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Dan 6 Bagi Komisaris	08 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan Bsmr
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		Ext - Implementasi POJK No.15 Tahun 2024 Dalam Mengelola Bisnis Bank	19 Juni 2025 Hotel Artotel Thamrin Jakarta	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Eks - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) Dan Kantor Akuntan Publik Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No.09 Tahun 2023	27 Agustus 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Learning Media Indonesia (LMI)
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (SE OJK 14/SEOJK.03/2025)	09 Oktober 2025 Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
		Ext - <i>Workshop</i> Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratik	08 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan BSMR



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Nataniel D. Mandacan	Komisaris Independen	<i>Workshop</i> "Kebijakan Dan Aspek Hukum Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Instansi Pemerintah, Badan Layanan Publik, Korporasi & Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022	15 Januari 2025 Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta	Lembaga Informasi Peraturan Publik (LIPP)
		Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Dan 6 Bagi Komisaris	08 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan Bsmr
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Bagi Komisaris	22 Mei 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta", "Aloft Hotel Wahid Hasyim, Jakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan BSMR
		Pembekalan Dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	10 Juli 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	PT. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Eks - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (Ap) Dan Kantor Akuntan Publik Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No.09 Tahun 2023	27 Agustus 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Learning Media Indonesia (LMI)
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEOJK.03/2025)	27 Agustus 2025 Jw. Marriot Hotel, Jakarta	Risk Managemen Guard (RMG)
Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	Ext - <i>Workshop</i> Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratik	09 Oktober 2025 Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
		Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Dan 6 Bagi Komisaris	08 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan BSMR
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		Ext - Implementasi POJK No.15 Tahun 2024 Dalam Mengelola Bisnis Bank	19 Jun 2025 Hotel Artotel Thamrin Jakarta	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Eks - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (Ap) Dan Kantor Akuntan Publik Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No.09 Tahun 2023	27 Agustus 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Learning Media Indonesia (LMI)
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (SE OJK 14/SEOJK.03/2025)	27 Agustus 2025 Jw. Marriot Hotel, Jakarta	Risk Managemen Guard (Rmg)
		Ext - <i>Workshop</i> Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratik	09 Oktober 2025 Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
		Eks - <i>Workshop</i> POJK 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Umkm	18 Desember 2025 Hotel Artotel Thamrin Jakarta	Multi Talenta Consulting



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Dan 6 Bagi Komisaris	08 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	PT. Multi Talenta Consulting Dan BSMR
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		Analisis Kerawanan Bank Umum Dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	15 Mei 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (LPKMI), Lembaga Pusat Pengembangan Kajian Indonesia (LP2K)
		Ext - Implementasi POJK No.15 Tahun 2024 Dalam Mengelola Bisnis Bank	19 Juni 2025 Hotel Artotel Thamrin Jakarta	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Eks - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (Ap) Dan Kantor Akuntan Publik Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No.09 Tahun 2023	27 Agustus 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	Learning Media Indonesia (Lmi)
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025)	27 Agustus 2025 Jw. Marriot Hotel, Jakarta	Risk Managemen Guard (Rmg)
		Ext - <i>Workshop</i> Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratik	09 Oktober 2025 Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
		Eks - Kuhp 2023 : Peta Pasa Yang Relevan Terhadap Bank	22 Desember 2025 Ashley Wahid Hasyim, Jakarta	PT. Rintisan Manajemen Gagasan
		Eks - <i>Workshop</i> POJK 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Umkm	18 Desember 2025 Hotel Artotel Thamrin Jakarta	Multi Talenta Consulting

TATA CARA DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi, baik secara formal maupun informal, sebagai bagian dari perannya untuk memastikan pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Nasihat ini disampaikan melalui berbagai sarana, termasuk surat tertulis dan rapat terstruktur.

TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT

- 1 Nasihat diberikan untuk semua aspek kebijakan pengurusan dan operasional Bank secara umum.
- 2 Dewan Komisaris dapat meminta Direksi mengambil tindakan tertentu demi kepentingan Bank. Meski nasihat ini tidak bersifat mengikat, Direksi wajib memberikan alasan jika tidak menjalankannya.
- 3 Pemberian nasihat bertujuan memastikan kegiatan Bank sesuai dengan visi, misi, serta tujuan perusahaan.
- 4 Dewan Komisaris bertindak untuk mencegah kebijakan atau tindakan Direksi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

PROCEDURES AND FREQUENCY OF PROVIDING ADVICE

The Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors, both formally and informally, as part of its role in ensuring that the Bank's management is conducted in accordance with good governance principles. This advice is provided through various channels, including written letters and structured meetings.

PROCEDURES FOR PROVIDING ADVICE

1. Advice is provided on all aspects of the Bank's management and operational policies in general.
2. The Board of Commissioners may request the Board of Directors to take specific actions in the Bank's best interest. Although this advice is not binding, the Board of Directors is required to provide reasons for failure to implement it.
3. The purpose of providing advice is to ensure that the Bank's activities align with the company's vision, mission, and objectives.
4. The Board of Commissioners acts to prevent policies or actions by the Board of Directors that could harm or reduce the Bank's profits.



- 5 Dewan Komisaris memberikan arahan terkait langkah perbaikan, termasuk pemberhentian sementara anggota Direksi jika diperlukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank demi tercapainya tujuan perusahaan.
- 7 Untuk mendukung pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris membentuk dan mengadakan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT

Pemberian nasihat dilakukan secara berkala melalui dua jenis rapat utama:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris
Rapat ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis dan langkah pengawasan tanpa kehadiran Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
Rapat ini diadakan untuk menyampaikan nasihat langsung kepada Direksi, memastikan adanya diskusi dan tindak lanjut terkait kebijakan dan langkah strategis Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat koordinasi dengan komite-komite di bawah pengawasannya, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Rapat-rapat ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diajukan oleh Direksi.

Dengan tata cara dan frekuensi pemberian nasihat yang terorganisir ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan Bank berjalan efektif, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

REKOMENDASI, PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS, SERTA PENGAWASAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memainkan peran kunci dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan bahwa arah strategis Perseroan selaras dengan tujuan dan visi Bank Papua. Rekomendasi ini mencakup masukan

5. The Board of Commissioners provides direction regarding corrective measures, including the temporary dismissal of members of the Board of Directors if necessary, in accordance with applicable laws.
6. The Board of Commissioners directs, monitors, and evaluates the Bank's strategic policies to achieve the company's objectives.
7. To support its oversight and advisory provision, the Board of Commissioners establishes and coordinates with the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee.

FREQUENCY OF ADVICE PROVISION

Advice provision is conducted periodically through two main types of meetings:

1. Internal Board of Commissioners Meetings
These meetings aim to discuss strategic issues and supervisory measures without the presence of the Board of Directors.
2. Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors
These meetings are held to provide advice directly to the Board of Directors, ensuring discussion and follow-up regarding the Bank's policies and strategic initiatives.

In addition, the Board of Commissioners also holds coordination meetings with committees under its supervision, such as the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. These meetings serve as an important forum for evaluating and providing input on policies proposed by the Board of Directors.

With this organized procedure and frequency of advisory provision, the Board of Commissioners ensures that the Bank's management is effective, in accordance with the principles of prudence and good governance.

RECOMMENDATIONS, IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES, AND OVERSIGHT OF THE COMPANY'S STRATEGY IMPLEMENTATION

BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATIONS

The Board of Commissioners plays a key role in providing recommendations to the Board of Directors to ensure that the Company's strategic direction aligns with Bank Papua's goals and vision. These recommendations include input



mengenai kebijakan strategis, peningkatan efisiensi operasional, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebagai contoh, rekomendasi tersebut mencakup pengelolaan kredit pemerintah daerah, evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pengembangan program sponsorship untuk mendukung program kerja pemerintah daerah.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris mengikuti agenda kerja tahunan dan triwulanan. Pada tahun 2025, beberapa agenda utama yang akan dibahas meliputi:

1. Memastikan semua temuan diaudit dan diselesaikan tepat waktu.
2. Mendengarkan dan mengevaluasi usulan penunjukan KAP/AP dari Komite Komisaris.
3. Penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas Dewan Komisaris.
4. Evaluasi atas hasil pemeriksaan OJK dan implementasi rencana tindak lanjut.
5. Persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Fit and Proper Test serta pembahasan dokumen strategis lain seperti Standar Tata Operasional (STO) dan Job Profile.

PENGAWASAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan dilakukan melalui mekanisme rapat gabungan dengan Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, serta evaluasi laporan berkala. Fokus pengawasan mencakup:

1. Pelaksanaan kebijakan strategis sesuai rencana bisnis bank.
2. Peningkatan kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Dukungan terhadap program kerja pemerintah daerah.

Dewan Komisaris juga memastikan adanya tindak lanjut terhadap temuan dari OJK dan Divisi Audit Internal, serta memantau tingkat kesehatan Bank agar tetap dalam kategori baik. Melalui berbagai langkah ini, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan Bank Papua secara berkelanjutan.

on strategic policies, improving operational efficiency, and implementing good corporate governance (GCG). For example, these recommendations cover local government credit management, evaluating Public Accounting Firms (KAP), and developing sponsorship programs to support local government work programs.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

In carrying out its duties, the Board of Commissioners follows an annual and quarterly work agenda. In 2025, several key agenda items to be discussed include:

1. Ensuring all audit findings are audited and resolved in a timely manner.
2. Hearing and evaluating proposals for the appointment of KAP/AP from the Commissioners Committee.
3. Preparing an activity plan to improve the competence and effectiveness of the Board of Commissioners.
4. Evaluating the results of OJK audits and implementing follow-up plans.
5. Preparation for the implementation and follow-up of the Fit and Proper Test results, as well as discussion of other strategic documents such as the Standard Operating Procedures (STO) and Job Profiles.

OVERSIGHT OF THE COMPANY'S STRATEGY IMPLEMENTATION

Oversight of the Company's strategy implementation is carried out through joint meetings with the Board of Directors, committees under the Board of Commissioners, and evaluation of periodic reports. The focus of supervision includes:

1. Implementation of strategic policies in accordance with the bank's business plan.
2. Improvement of financial performance and regulatory compliance.
3. Support for regional government work programs.

The Board of Commissioners also ensures follow-up on findings from the Financial Services Authority (OJK) and the Internal Audit Division, while continuously monitoring the Bank's soundness level to remain within a sound category. Through these efforts, the Board of Commissioners is committed to maintaining the stability and sustainable growth of Bank Papua.



Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Performance Evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) merupakan forum bagi Direksi untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada para pemegang saham. Proses ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja manajemen dan mencakup evaluasi kinerja Direksi secara kolektif maupun individu. Evaluasi juga melibatkan kinerja masing-masing Komite yang berfungsi sebagai organ penunjang Direksi.

Kebijakan umum terkait penilaian kinerja Direksi berlandaskan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, dengan fokus pada pencapaian target yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan, Kebijakan Umum Direksi, Tingkat Kesehatan Bank, Tata Kelola Perusahaan, serta indikator rentabilitas dan permodalan Bank.

Prosedur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Direksi

Untuk mengukur pencapaian kinerja Direksi, penilaian dilakukan secara kolektif dan individu oleh Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian ini dilaksanakan secara berkala, dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada RUPS tahun buku 2025, Pemegang Saham menyetujui laporan tahunan perusahaan, mengakui hasil yang telah dicapai, serta memberikan pembebasan sepenuhnya tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas pelaksanaan operasional Bank selama tahun tersebut.

Penilaian individu terhadap Direksi dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Penilaian ini didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disepakati di awal tahun sesuai bidang tugas masing-masing. Proses penilaian juga mencakup laporan *Self Assessment* Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 13/

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) serves as the forum for the Board of Directors to account for the Bank's performance to shareholders. This process is conducted based on management performance contracts and includes both collective and individual performance evaluations of the Board of Directors. The evaluation also covers the performance of Committees that function as supporting organs of the Board of Directors.

The general policy for evaluating the performance of the Board of Directors is based on the Board of Directors' Guidelines and Code of Conduct. The assessment is carried out using predetermined parameters, focusing on the achievement of targets outlined in the annual Bank Business Plan (RBB), the Board of Directors' General Policies, the Bank Soundness level, Good Corporate Governance implementation, as well as profitability and capital indicators.

Procedures and Mechanism for Evaluating the Performance of the Board of Directors

To measure the performance of the Board of Directors, evaluations are conducted both collectively and individually by the Board of Commissioners, with support from the Nomination and Remuneration Committee. This evaluation is carried out periodically, and the results are reported to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

*At the 2025 financial year AGMS, shareholders approved the Company's Annual Report, acknowledged the achievements attained, and granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors for the management of the Bank's operations during the year.*

Individual performance assessments of the Board of Directors are conducted annually to evaluate the effectiveness of each member's duties and responsibilities. These assessments are based on Key Performance Indicators (KPIs) agreed upon at the beginning of the year, in accordance with each Director's area of responsibility. The evaluation process also includes the Good Corporate Governance Self-Assessment report submitted periodically



SEOJK.03/2017. *Self Assessment* ini mengacu pada tiga aspek tata kelola utama, yaitu *Governance structure*, *Governance process*, dan *Governance outcome*.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan melalui RUPS serta penilaian sendiri oleh Direksi sesuai periode dan kebutuhan Bank, diantaranya sebagai berikut:

1. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi, dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta mematuhi peraturan Perundang-undangan dan standar yang berlaku;
2. Evaluasi atas proses pengadaan barang dan/atau jasa antara lain proses perencanaan, verifikasi, dokumentasi, seleksi, pemberian penjelasan (*aanwijzing*), penawaran, negosiasi, penetapan pemenang, pelaksanaan kontrak, serah terima barang dan/atau jasa, dan pembayaran;
3. Evaluasi atas pengkinian terhadap prosedur internal agar memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan;
4. Evaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
5. Evaluasi atas tanggung jawab Direksi atas kewajiban Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
6. Evaluasi atas pelaksanaan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank;
7. Evaluasi untuk memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk*;
8. Evaluasi terhadap strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi;
9. Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala;
10. Evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank.

to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017. This self-assessment refers to three key governance aspects: governance structure, governance process, and governance outcome.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

The evaluation of the Board of Directors' performance is conducted by the Board of Commissioners, through the General Meeting of Shareholders (GMS), and through self-assessment by the Board of Directors in accordance with the Bank's needs and applicable periods, including the following:

1. Evaluation of the implementation of the Bank's strategic policies in accordance with regulations, aimed at ensuring sound bank development, effective and efficient risk management, and internal control systems, as well as compliance with applicable laws and standards;
2. Evaluation of the procurement process for goods and/or services, including planning, verification, documentation, selection, clarification (*aanwijzing*), bidding, negotiation, determination of winners, contract implementation, handover of goods and/or services, and payment;
3. Evaluation of updates to internal procedures to ensure compliance with prevailing laws and regulations;
4. Evaluation of the implementation of integrated governance, risk management, and compliance, as well as the Bank's strategic policies, in accordance with applicable regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions;
5. Evaluation of the Board of Directors' responsibility to assess the performance of committees at least at the end of each financial year;
6. Evaluation of the implementation of periodic stress testing, conducted at least once a year or based on certain conditions that may significantly affect the Bank;
7. Evaluation to ensure adequate internal controls and periodic reviews of country risk and transfer risk;
8. Evaluation of strategies and policies related to country risk and transfer risk established by the Board of Directors;
9. Evaluation of the accountability of the Board of Directors and provision of recommendations for improvements in the implementation of policies related to country risk and transfer risk on a regular basis;
10. Evaluation of the results of the self-assessment on the implementation of Good Corporate Governance (GCG).



Melalui prosedur penilaian yang objektif dan sistematis, Bank memastikan bahwa Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, mendukung pencapaian visi perusahaan, dan menjaga keberlanjutan operasional.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Direksi itu sendiri melalui *Self Assessment*. Hasil penilaian tersebut kemudian dievaluasi oleh Dewan Komisaris dalam rapat, berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hingga akhir Desember 2025, seluruh anggota Direksi tidak menerima sanksi atau penilaian buruk. Nilai-nilai yang diperoleh mencerminkan bahwa manajemen Bank telah menerapkan Tata Kelola yang baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola. Jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola di Bank Papua, kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan secara umum, namun memerlukan perhatian cukup dari manajemen Bank. Kelemahan-kelemahan ini dapat memengaruhi peran aktif pengawasan Bank serta Rencana Bisnis Bank pada tahun 2025.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian pemegang saham menunjukkan bahwa mereka telah menerima laporan tahunan perusahaan untuk tahun buku 2025 mengenai keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, pemegang saham menyatakan memberikan pembebasan sepenuhnya pertanggungjawaban (*acquit et de charge*) kepada Direksi Bank untuk operasional selama tahun 2025. Pembebasan pertanggungjawaban (*acquit et de charge*) juga diberikan kepada Direksi yang telah tidak menjabat lagi sebelum berakhirnya tahun buku 2025.

Dari penilaian yang dilakukan pada Semester II tahun 2025, untuk kriteria Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, diperoleh penilaian yang sangat baik untuk komponen *Governance Structure*, *Process*, dan *Outcome*.

Through objective and systematic assessment procedures, the Bank ensures that the Board of Directors can carry out its duties optimally, support the achievement of the company's vision, and maintain operational sustainability.

Parties Conducting Assessments

The Board of Directors' performance is assessed by the Board of Directors themselves through a Self-Assessment. The results of this assessment are then evaluated by the Board of Commissioners in a meeting, based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

As of the end of December 2025, all members of the Board of Directors have not received any sanctions or negative ratings. The scores obtained reflect that the Bank's management has implemented good corporate governance. This is evident in the adequate compliance with corporate governance principles. If there are weaknesses in the implementation of corporate governance principles at Bank Papua, these weaknesses do not have a significant impact overall, but require significant attention from Bank management. These weaknesses may impact the Bank's active supervisory role and the Bank's Business Plan for 2025.

Board of Directors Performance Assessment Results

*The shareholder assessment results indicate that they have received the company's annual report for the 2025 financial year regarding the company's operations and results achieved. Furthermore, the shareholders declared that they granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Bank's Board of Directors for operations during 2025. This release and discharge (*acquit et de charge*) was also granted to Directors who resigned before the end of the 2025 financial year.*

From the assessment conducted in Semester II of 2025, for the criteria of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors, a very good rating was obtained for the Governance Structure, Process, and Outcome components.



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Proses penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh pemegang saham yang memenuhi syarat kuorum dan diadakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili 1/10 dari total saham dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Selain itu, Dewan Komisaris memiliki mekanisme penilaian yang mengacu pada POJK dan Tata Tertib Pedoman Kerja sebagai berikut:

1. Penilaian *Self Assessment* sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015, di mana Dewan Komisaris telah merumuskan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan tiga aspek: pengawasan dan pengarahannya, pelaporan, serta aspek dinamis (lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris);
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.17 tahun 2023.

Tujuan penilaian ini adalah untuk mengevaluasi anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria berikut:

1. Kecukupan jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris.
2. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.
4. Kecukupan pengungkapan kepemilikan saham dan hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
5. Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Commissioners Performance Assessment Implementation Procedure

The Board of Commissioners' performance assessment process is reported to shareholders through a General Meeting of Shareholders (GMS). A GMS is a meeting attended by shareholders who meet the quorum requirements and is held by the Board of Directors at the request of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners, or shareholders representing 1/10 of the total shares, may make decisions on matters not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners.

In addition, the Board of Commissioners has an assessment mechanism that refers to the POJK and the Work Guidelines, as follows:

1. *Self-Assessment in accordance with SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, in which the Board of Commissioners has formulated Key Performance Indicators (KPIs) based on three aspects: supervision and direction, reporting, and dynamic aspects (other aspects related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners);*
2. *The performance assessment of the Board of Commissioners is also conducted through a GCG Self-Assessment mechanism in accordance with the provisions of POJK No. 17 of 2023.*

The purpose of this assessment is to evaluate the members of the Board of Commissioners based on the following criteria:

1. *The adequacy of the number, composition, integrity, and competence of the Board of Commissioners members compared to the size and complexity of the Bank's business, as well as the minimum criteria and level of independence of the Board of Commissioners members.*
2. *The effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities.*
3. *The effectiveness of the holding of Board of Commissioners meetings.*
4. *The adequacy of disclosure of share ownership and relationships of Board of Commissioners members with other Board of Commissioners members, Board of Directors members, and/or Controlling Shareholders of the Bank.*
5. *Compliance of Board of Commissioners members with prohibitions stipulated in applicable laws and regulations.*



Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Proses ini memastikan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Bank. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta panduan tata kelola perusahaan yang baik.

Penilaian dilakukan secara kolegal dan individu oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Dalam forum ini, laporan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku disampaikan dan RUPS memutuskan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan. Hasil penilaian juga menjadi dasar untuk pemberian insentif dan kompensasi, serta pertimbangan untuk memberhentikan atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, Bank Papua juga menerapkan metode *Self-Assessment* yang dilakukan secara independen, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Salah satu kriteria penting yang dievaluasi adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi operasional dan tata kelola perusahaan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta melalui audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS Tahunan, bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan Bank. Dalam forum ini, Pemegang Saham mengevaluasi laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang telah berlalu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, RUPS memberikan pembebasan penuh tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The performance assessment of the Board of Commissioners aims to evaluate the effectiveness of its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors. This process ensures that the Board of Commissioners' supervisory function supports the achievement of the Bank's vision, mission, and strategic objectives. The assessment is conducted in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as well as guidelines for good corporate governance.

*The assessment is conducted collegially and individually by shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). At this forum, the Board of Commissioners' supervisory report for the fiscal year is submitted, and the GMS resolves to fully discharge (*acquit et de charge*) the supervisory actions taken. The assessment results also form the basis for awarding incentives and compensation, as well as consideration for dismissing or reappointing members of the Board of Commissioners.*

In addition, Bank Papua also implements an independent self-assessment method, in accordance with the criteria stipulated in OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. One of the important criteria evaluated is the Board of Commissioners' implementation of its duties in overseeing corporate operations and governance.

Parties Conducting Assessments

The parties conducting assessments of the Board of Commissioners' performance are Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) and through audits conducted by the Financial Services Authority (OJK).

Results of the Board of Commissioners' Performance Assessment

*The Board of Commissioners' performance assessment is conducted at the Annual GMS, concurrently with the submission of the Bank's annual report. In this forum, Shareholders evaluate the Board of Commissioners' supervisory report for the preceding fiscal year. Based on the evaluation results, the GMS grants the Board of Commissioners a full release and discharge (*acquit et de charge*) for their supervisory actions.*



Selain itu, penilaian kinerja Dewan Komisaris, baik secara kolegal maupun individu, merupakan elemen penting dalam skema kompensasi dan pemberian insentif. Hasil penilaian ini juga menjadi dasar bagi Pemegang Saham untuk mempertimbangkan pengangkatan kembali atau pemberhentian Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan tata kelola yang efektif dan kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan.

Berdasarkan penilaian *Self Assessment* yang dilakukan pada Semester II tahun 2023, kriteria Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris memperoleh penilaian sangat baik untuk komponen *Governance Structure, Process, dan Outcome*.

Uraian lebih lengkap mengenai hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dilihat pada Sub-Bab Penilaian Tata Kelola Perusahaan.

• Hasil Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung Komisaris

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Dewan Komisaris dalam memutuskan pemberhentian dan/atau penunjukan kembali anggota Komite yang bersangkutan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menilai dan meningkatkan efektivitas Komite.

Berdasarkan penilaian *Self Assessment* yang dilakukan pada Semester II tahun 2025, kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite menunjukkan bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris mendapatkan predikat sangat baik untuk komponen *Governance Structure, Process, dan Outcome*. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun buku 2025, Komite-komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Furthermore, the Board of Commissioners' performance assessment, both collegially and individually, is a crucial element in the compensation and incentive scheme. The results of this assessment also serve as the basis for Shareholders' consideration of reappointment or dismissal of the Board of Commissioners, with the aim of ensuring continued effective governance and maximum contribution to the company.

Based on the Self-Assessment conducted in the second semester of 2023, the criteria for the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners received a very good rating for the Governance Structure, Process, and Outcome components.

A more complete description of the Board of Commissioners' performance assessment results can be found in the Corporate Governance Assessment Sub-Chapter.

• Performance Assessment Results of Committees and Supporting Organs of the Board of Commissioners

The performance evaluation results of each Committee Member are an important consideration for the Board of Commissioners in deciding whether to dismiss and/or reappoint the relevant Committee members. This evaluation serves as a tool to assess and improve the Committee's effectiveness.

Based on the Self-Assessment conducted in the second semester of 2025, the criteria for Completeness and Implementation of Committee Duties indicated that the committees under the Board of Commissioners received excellent ratings for the Governance Structure, Process, and Outcome components. The Board of Commissioners assesses that during the 2025 fiscal year, the Committees carried out their duties and responsibilities quite effectively.



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

• Kebijakan Nominasi

Kebijakan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua dirancang untuk memastikan pemilihan kandidat yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Kebijakan ini mengacu pada Anggaran Dasar Bank Papua, Standar Prosedur Tata Kelola Perusahaan, dan **Piagam** Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses nominasi bertujuan untuk mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebutuhan strategis perusahaan.

• Proses Nominasi

Proses nominasi dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan transparan, sebagai berikut:

1. Identifikasi Calon

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas mengidentifikasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini mencakup integritas, kompetensi, dan relevansi pengalaman dengan kebutuhan strategis Bank Papua.

2. Usulan dari Komite

Berdasarkan hasil identifikasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris kemudian menyampaikan usulan calon tersebut kepada Pemegang Saham melalui forum RUPS.

3. Pelaksanaan Seleksi

Seleksi calon dilakukan sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi berakhir, atau apabila terdapat permintaan dari Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan. Dalam proses ini, pemilihan dapat melibatkan pihak ketiga independen untuk memastikan objektivitas.

4. Persetujuan dan Penetapan

NOMINATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

• Nomination Policy

The nomination policy for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Papua is designed to ensure the selection of candidates in accordance with the principles of Good Corporate Governance. This policy refers to Bank Papua's Articles of Association, Corporate Governance Standard Procedures, and the Remuneration and Nomination Committee Charter. The nomination process aims to identify candidates who meet the criteria determined by applicable laws and regulations, as well as the company's strategic needs.

• Nomination Process

The nomination process is carried out through a systematic and transparent procedure, as follows:

1. Candidate Identification

The Remuneration and Nomination Committee is tasked with identifying candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors who meet the established criteria. These criteria include integrity, competence, and relevance of experience to Bank Papua's strategic needs.

2. Committee Recommendations

Based on the identification results, the Remuneration and Nomination Committee recommends candidates to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners then submits the proposed candidates to Shareholders through the GMS.

3. Selection Implementation

Candidate selection is conducted before the term of office of a member of the Board of Commissioners or Board of Directors ends, or upon a request from the Board of Commissioners to fill a vacant position. This selection process may involve an independent third party to ensure objectivity.

4. Approval and Determination



Calon yang telah direkomendasikan oleh Komite dan Dewan Komisaris diusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Papua dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seleksi dilakukan dengan memastikan bahwa kandidat memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Evaluasi dan Pengawasan

Prosedur nominasi yang dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan Bank Papua. Evaluasi ini bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan proses nominasi demi mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Saat ini, Bank menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan tanggung jawab serta kinerja masing-masing. Besaran remunerasi ditentukan untuk memastikan mekanisme *check and balance* antara kedua organ Perusahaan tetap terjaga. Berikut adalah prosedur penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua:

1. Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian remunerasi dan nominasi untuk melakukan kajian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Candidates recommended by the Committee and the Board of Commissioners are proposed to Shareholders at the GMS for approval and determination.

Prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors must meet all requirements in accordance with Bank Papua's Articles of Association and applicable regulations, including regulations of the Financial Services Authority (OJK). Selection is carried out by ensuring that candidates have the ability to carry out their responsibilities in accordance with applicable regulations.

• Evaluation and Supervision

The nomination procedure implemented by the Remuneration and Nomination Committee is periodically evaluated to ensure its effectiveness and suitability to Bank Papua's needs. This evaluation aims to maintain transparency, accountability, and sustainability of the nomination process to support the achievement of the company's vision and mission.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

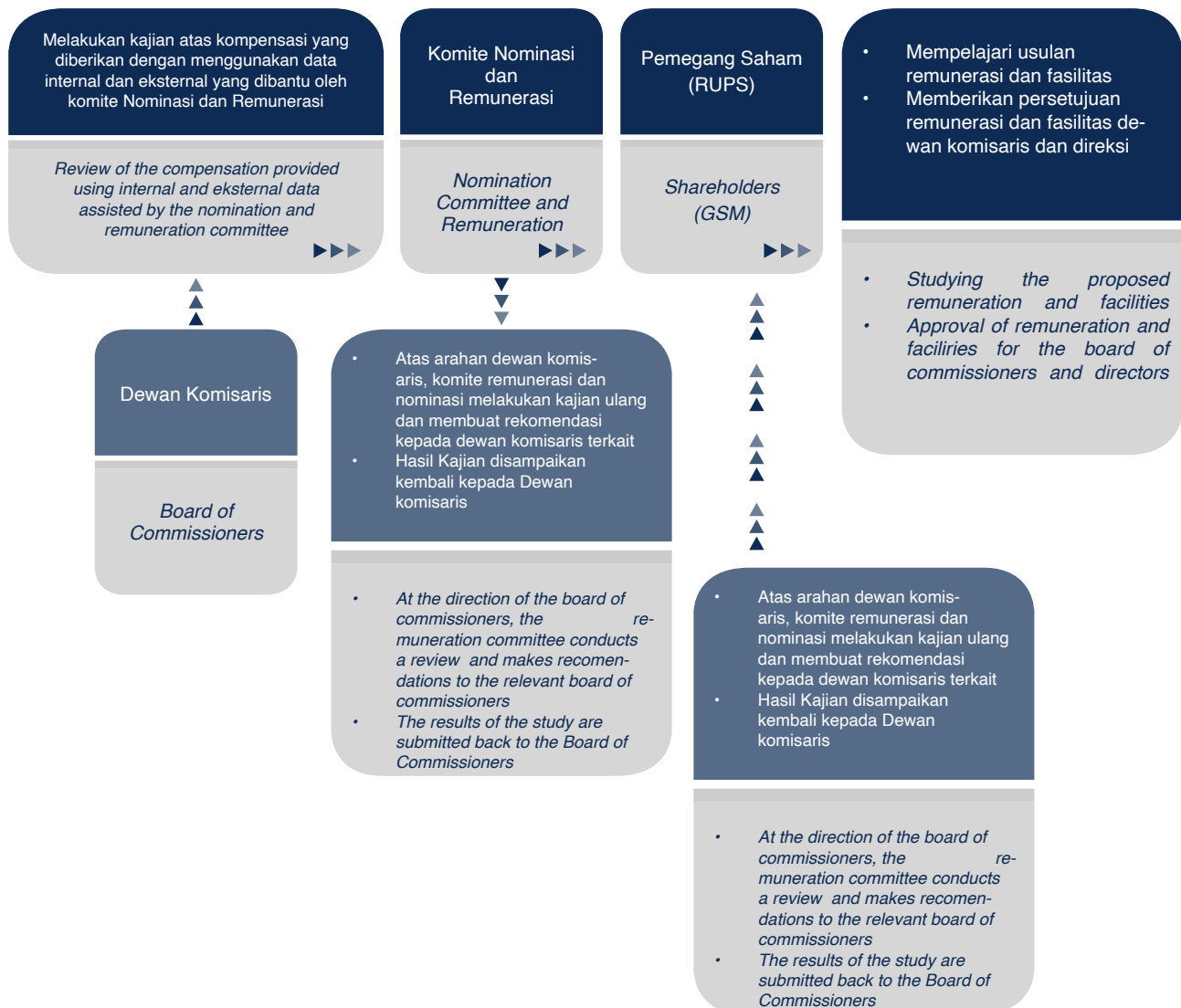
Currently, the Bank determines remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors by considering their respective responsibilities and performance. The amount of remuneration is determined to ensure the checks and balances between the two Company organs are maintained. The following is the procedure for determining remuneration for the Board of Commissioners and Directors of Bank Papua:

1. *The Board of Commissioners requests the Remuneration and Nomination Committee to conduct a remuneration and nomination review.*
2. *The Remuneration and Nomination Committee prepares recommendations for the remuneration of the Board of Commissioners and Directors.*
3. *The Remuneration and Nomination Committee proposes remuneration to the Board of Commissioners and Directors.*
4. *The Board of Commissioners discusses the Remuneration and Nomination Committee's proposal.*
5. *The Board of Commissioners proposes remuneration for the Board of Commissioners and Directors to the GMS.*
6. *The GMS determines the remuneration for the Board of Commissioners and Directors.*



Mekanisme penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

The mechanism for determining remuneration for the Board of Commissioners and Directors is shown in the chart below:



• Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi di Bank Papua dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) serta regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Indikator utama dalam penetapan remunerasi mencakup aspek kinerja, tingkat risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pegawai.

• Remuneration Determination Indicators

The remuneration structure at Bank Papua is established by evaluating various indicators that adhere to the principles of good corporate governance (GCG) and relevant regulations, including those set forth by the Financial Services Authority (OJK). The primary indicators utilized in determining remuneration encompass performance, risk level, regulatory compliance, and the equilibrium between shareholder



Berikut adalah beberapa indikator utama dalam penetapan remunerasi:

- 1 Remunerasi ditentukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI), baik secara individu maupun perusahaan secara keseluruhan, termasuk pencapaian target finansial dan operasional.
- 2 Penetapan remunerasi memperhitungkan profil risiko perusahaan, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, untuk memastikan tidak adanya insentif yang mendorong perilaku pengambilan risiko berlebihan.
- 3 Remunerasi harus selaras dengan kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia, termasuk batasan dan persyaratan yang berlaku bagi institusi keuangan.
- 4 Sistem remunerasi harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pegawai, dengan memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kontribusi kinerja.
- 5 Evaluasi dilakukan dengan membandingkan remunerasi di Bank Papua dengan standar industri perbankan, untuk memastikan daya saing dan retensi tenaga kerja berkualitas.
- 6 Remunerasi dirancang untuk mendorong kinerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, dengan mempertimbangkan insentif jangka panjang seperti tunjangan dan bonus berbasis kinerja.

Dengan indikator-indikator ini, sistem remunerasi Bank Papua bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat, meningkatkan kinerja pegawai, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan.

• Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 yang diterbitkan pada 14 Mei 2014 mengenai Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Pegawai Pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Pemegang Saham No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan ke-III atas Surat Keputusan Pemegang Saham No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014, struktur dan komponen remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

and employee interests. The main indicators in the remuneration determination process are as follows:

1. Remuneration is established based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs), assessed both individually and at the organizational level, which include the attainment of financial and operational targets.
2. The company's risk profile, encompassing credit, market, liquidity, and operational risks, is taken into account to ensure that remuneration does not incentivize excessive risk-taking behavior.
3. Remuneration must comply with banking policies set by the OJK and Bank Indonesia, including relevant limits and requirements for financial institutions.
4. The remuneration system must reflect a balance between the interests of shareholders, customers, and employees, ensuring that compensation is commensurate with performance contributions.
5. An evaluation is conducted by benchmarking remuneration at Bank Papua against industry standards to ensure competitiveness and the retention of a high-quality workforce.
6. The design of the remuneration structure aims to promote sustainable performance and long-term growth, incorporating long-term incentives such as performance-based benefits and bonuses.

Through these indicators, Bank Papua's remuneration system seeks to facilitate healthy growth, enhance employee performance, and ensure adherence to prudent banking principles.

• Structure and Components of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

In accordance with Shareholder Decree No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014, issued on May 14, 2014, regarding the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the enhancement of pension benefits for retired employees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, and subsequently updated by Shareholder Decree No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019 dated March 29, 2019, concerning the third amendment to Shareholder Decree No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014, the remuneration structure and components for the Board of Commissioners and Directors are outlined as follows.



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Remuneration Structure of the Board of Commissioners
- Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama. - Perhitungan honorarium Komisaris lainnya sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.	- The honorarium of the President Commissioner is set at 60% of the salary of the President Director. - The honorarium of other Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.
Hak dan Fasilitas Dewan Komisaris	Rights and Facilities of the Board of Commissioners
- Cuti - Perawatan Kesehatan - Perumahan Dinas - Pakaian Dinas - Kendaraan Dinas - Uang Penggantian Pulsa Telepon dan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas. - THR (Tunjangan Hari Raya) - Penggantian Biaya Listrik dan Air - Uang Duka - Honor Rapat - Pendampingan Isteri/Suami	- Leave Entitlement - Healthcare Benefits - Official Residence - Official Attire - Official Vehicle - Allowance for Telephone Credit and Fuel Expenses for Official Vehicles - Religious Holiday Allowance (THR) - Reimbursement of Electricity and Water Expenses - Bereavement Allowance - Meeting Honorarium - Spouse Assistance/Companion Support
Ketentuan dan besaran masing-masing hak dan fasilitas yang diterima Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Pemegang Saham.	The provisions and amount of each right and facility received by the Board of Commissioners are stipulated in the Shareholders' Resolution.
Penghargaan Akhir Masa Jabatan	End-of-Term Benefits
Adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya, yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank. Ketentuan Penghargaan Akhir Masa Jabatan diatur dalam Surat Keputusan Pemegang Saham.	End-of-term benefits are granted to members of the Board of Commissioners who have completed their term of office, adjusted to the Bank's financial capability. The provisions regarding end-of-term benefits are stipulated in the Shareholders' Resolution.
Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris	Tantiem / Performance Incentives of the Board of Commissioners
- Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang diputuskan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. - Perhitungan Tantiem bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: - Perhitungan Tantiem Komisaris Utama sebesar 61% dari Tantiem Direktur Utama. - Perhitungan Tantiem Komisaris lainnya sebesar 53% dari Tantiem Direktur Utama.	- Bonus, which is an award given to members of the Board of Commissioners, as decided by the Shareholders through a GMS. - The bonus calculation for the Board of Commissioners is as follows: - The bonus for the President Commissioner is 61% of the bonus for the President Director. - The bonus for other Commissioners is 53% of the bonus for the President Director.
Tidak ada komponen lainnya seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll	There are no other components such as non-performance bonus-es, stock options, etc.

Struktur Remunerasi Direksi	Remuneration Structure of the Board of Directors
- Gaji Direktur Utama sebesar Rp150 juta. - Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 90% dari gaji Direktur Utama. - Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama yang waktunya melebihi 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan yang diterima Direktur Utama. - Pajak penghasilan menjadi beban Bank.	- The salary of the President Director is set at IDR 150 million. - The salary of other Directors is set at 90% of the salary of the President Director. - Members of the Board of Directors appointed as Acting President Director for a period exceeding 3 (three) months shall receive remuneration equivalent to that of the President Director. - All remuneration expenses are borne by the Bank.
Hak dan Fasilitas Direksi	Rights and Facilities of the Board of Directors
- Cuti - Perawatan Kesehatan - Perumahan Dinas - Pakaian Dinas - Kendaraan Dinas - Uang Penggantian Pulsa Telepon dan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas. - THR (Tunjangan Hari Raya) - Jaminan Hari Tua (JHT) - Penggantian Biaya Listrik dan Air - Uang Duka - Uang Makan - Honor Rapat - Pensiun Direksi	- Leave Entitlement - Healthcare Benefits - Official Residence - Official Attire - Official Vehicle - Allowance for Telephone Credit and Fuel Expenses for Official Vehicles - Religious Holiday Allowance (THR) - Old Age Security (JHT – Jaminan Hari Tua) - Reimbursement of Electricity and Water Expenses - Bereavement Allowance - Meal Allowance - Meeting Honorarium - Directors' Pension



Struktur Remunerasi Direksi	Remuneration Structure of the Board of Directors
Ketentuan dan besaran masing-masing hak dan fasilitas yang diterima Direksi diatur dalam Surat Keputusan Pemegang Saham.	<i>The provisions and amount of each right and facility received by the Board of Directors are stipulated in the Shareholders' Resolution.</i>
Penghargaan Akhir Masa Jabatan	End-of-Term Benefits
Adalah penghargaan yang diberikan kepada Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya, yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank. Ketentuan Penghargaan Akhir	<i>End-of-term benefits are granted to members of the Board of Directors who have completed their term of office, in accordance with the Bank's financial capability. The provisions regarding end-of-term benefits are stipulated in the Shareholders' Resolution.</i>
Tantiem/Insentif Kinerja Direksi	Tantiem / Performance Incentives of the Board of Directors
• Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi yang diputuskan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. • Perhitungan Tantiem bagi Direksi adalah sebagai berikut: • Tantiem Direktur Utama sebesar 100% dan menjadi acuan bagi perhitungan Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. • Perhitungan Tantiem Direktur lainnya sebesar 90% dari Tantiem Direktur Utama.	• Bonus, which is an award given to members of the Board of Directors, as decided by Shareholders through a GMS. • The bonus calculation for Directors is as follows: • The President Director's bonus is 100% and serves as the reference for calculating the bonuses for the Board of Commissioners and other Directors. • The bonus calculation for other Directors is 90% of the President Director's bonus.
Tidak ada komponen lainnya seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll	<i>There are no other components such as non-performance bonuses, stock options, etc.</i>
Perhitungan Besaran Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai dengan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019)	<i>Calculation of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors (Pursuant to Shareholder Decree No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019)</i>

Jabatan / Position		Honorarium/Gaji Honorarium/Salary		Tantiem	
Direktur Utama	President director	100%	100%	100%	100%
Direktur Lainnya	Other Directors	Sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama	90% of the President Director's salary	Sebesar 90% dari Tantiem Direktur Utama	90% of the President Director's Tantiem
Komisaris Utama	President Commissioner	Sebesar 60% dari Gaji Direktur Utama	60% of the President Director's salary	Sebesar 61% dari Tantiem Direktur Utama	61% of the President Director's Tantiem
Komisaris Lainnya	Other Commissioners	Sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama	90% of the President Commissioner's Honorarium	Sebesar 53% dari Tantiem Direktur Utama	53% of the President Director's Tantiem



Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Diversity Policy for the Board of Directors and Board of Commissioners

Keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Regulasi ini mencakup aspek keberagaman di antara para direksi dan komisaris. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pengalaman, pemahaman terhadap industri perbankan, integritas, serta dedikasi masing-masing individu.

Komposisi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank Papua akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Bank untuk terus tumbuh dan berkembang.

Faktor-faktor keberagaman dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris: Terdapat paling sedikit:
 - a.1 (satu) anggota yang memiliki keahlian atau pengalaman kerja di bidang ekonomi, bisnis, atau keuangan; dan/atau
 - b.1 (satu) anggota yang memiliki keahlian atau pengalaman kerja di industri perbankan; dan
 - c.1 (satu) anggota yang memiliki keahlian atau pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan: Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin: Saat ini, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Papua adalah pria. Terdapat 3 (tiga) anggota Direksi yang berjenis kelamin pria, dan 2 (dua) anggota Direksi yang berjenis kelamin wanita.
4. Usia: Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman dalam jenjang usia.
5. Independensi Dewan Komisaris:
 - a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen.
 - b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is governed by OJK Regulation Number 17 of 2023, which outlines the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. This regulation addresses the importance of diversity within the boards.

In appointing members to the Board of Commissioners and Board of Directors, it is essential to consider each individual's experience, understanding of the banking industry, integrity, and commitment. A well-balanced composition that aligns with Bank Papua's requirements will enhance the effective execution of the boards' duties and responsibilities, thereby contributing to the achievement of the Bank's vision and mission for sustained growth and development.

Key factors influencing diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors include:

1. Expertise/Experience of the Board of Commissioners:

There must be at least:

 - a. 1 (one) member with expertise or work experience in economics, business, or finance; and/or
 - b. 1 (one) member with expertise or work experience in the banking industry; and
 - c. 1 (one) member with expertise or work experience in risk management.
2. Nationality: *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors must be Indonesian citizens.*
3. Gender: *Currently, all members of Bank Papua's Board of Commissioners are male. There are 3 (three) male members of the Board of Directors and 2 (two) female members of the Board of Directors.*
4. Age: *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are diverse in age.*
5. Independence of the Board of Commissioners:
 - a. *A minimum of 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners.*
 - b. *The term of office of an Independent Commissioner is a maximum of 4 (four) years, and they may be reappointed subject to applicable regulations.*



Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Experience Work	Jenis Kelamin	Usia Age	Keahlian Skill
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Pascasarjana (S2) Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2012)	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Wanita	60	Keuangan Perbankan
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Pascasarjana (S2) (Magister Manajemen) Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia, Jakarta Indonesia	Kepala Biro Corporate Credit Risk Management, di Bank BCA sejak 1 Desember 2010	Pria	63	Keuangan Perbankan
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Pascasarjana (S2) (Magister Manajemen) Universitas Cenderawasih	Ketua Departemen Anti Fraud (SKAF) Bank Papua sejak tahun 2016	Pria	51	Keuangan Perbankan
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Pascasarjana (S2) Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta (2000)	Komisaris Independen di PT Bank KEB Hana Indonesia sejak 15 Juni 2015	Wanita	72	Keuangan Perbankan
Pujianto	Direktur Keuangan	Pascasarjana (S2) Manajemen Keuangan Perbankan Universitas Yapis Papua	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Pria	55	Keuangan Perbankan

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Experience Work	Jenis Kelamin	Usia Age	Keahlian Skill
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Pendidikan Pascasarjana (S2) bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (2006)	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Pria	59	Hukum
Nataniel Dominggus Mandacan	Komisaris Non-Independen	Pascasarjana (S2) Bidang Kebijakan Publik MAP Universitas Gadjah Mada Master	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Pria	63	Manajemen
Dortheis Sesa*	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih	Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan	Pria	64	Manajemen Risiko
H. Arobi Ahmad Aituarau	Komisaris Independen	Magister Management	Ketua Komite Pemantau Risiko PT. BPR Irian Sentosa	Pria	69	Manajemen Risiko
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Sarjana Hukum	Staf Khusus Pj. Gubernur Papua Barat	Pria	48	Manajemen

* Wafat tanggal 15 Desember 2025



Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi serta Pelaksanaannya

Policy on the Disclosure of Information Regarding Share Ownership of the Board of Commissioners and Directors and Its Implementation

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI

Hingga 31 Desember 2025, tidak ada anggota Direksi Bank Papua yang memiliki saham Bank Papua sebanyak 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, baik di bank lain maupun di perusahaan lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2025, no member of the Board of Directors of Bank Papua holds shares amounting to 5% (five percent) or more of the paid-up capital in any bank or company, whether domestic or foreign.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership Table

Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)				Position
		Bank Papua	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain	
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	President Director
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Business Director
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Operations Director
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Compliance Director
Pujianto	Direktur Keuangan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Finance Director

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih, baik di bank yang bersangkutan maupun di bank dan perusahaan lain, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

SHARE OWNERSHIP DISCLOSURE BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners has disclosed ownership of shares amounting to 5% (five percent) or more, either in the bank in question or in other banks and companies, both domestically and internationally. Additionally, they have reported any financial or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholders of the Bank.



Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Board of Commissioners Share Ownership Table						
Dewan Komisaris	Jabatan	Kepemilikan Saham				Position
		Bank Papua	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain	
Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	President Commisioner
Nataniel Dominggus Mandacan	Komisaris Non Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Non-Independent Commissioner
Dortheis Sesa*	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Independent Commissioner
H. Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Independent Commissioner
Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Independent Commissioner

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025



Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Entities and Committees under the Board of Commissioners

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Komisaris yang biayanya ditanggung oleh Perseroan. Sekretaris Komisaris bertanggung jawab atas tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan semua kegiatan Dewan Komisaris. Personalia Sekretariat Dewan Komisaris diutamakan berasal dari karyawan dalam Perseroan atau dari luar Perseroan, dengan mempertimbangkan hasil pertimbangan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menetapkan kriteria untuk pemilihan personalia Sekretariat Dewan Komisaris.

TUGAS INTERNAL

1. Berkoordinasi dengan Direksi terkait pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
2. Menjaga hubungan baik dengan pihak internal demi kelancaran tugas Dewan Komisaris, staf ahli, dan komite.
3. Berkoordinasi dengan Divisi Umum dalam penyediaan sarana dan prasarana Dewan Komisaris.
4. Mengelola kegiatan protokoler dan fasilitas perjalanan Dewan Komisaris serta organ pendukungnya.
5. Mengatur kebutuhan kerumah-tanggaaan untuk rapat dan jamuan Dewan Komisaris bersama unit kerja terkait.
6. Menyelaraskan kegiatan Dewan Komisaris dengan pihak eksternal melalui koordinasi unit kerja terkait.
7. Berkoordinasi dengan *Corporate Secretary* untuk kegiatan eksternal Dewan Komisaris (CSR, kerja sama, dll).
8. Mengelola penyelenggaraan rapat/pertemuan/seminar/lokakarya Dewan Komisaris bersama lembaga/unit kerja terkait.
9. Menyiapkan laporan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dengan dukungan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi jabatan Sekretaris Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARIAT

To facilitate the effective execution of its responsibilities, the Board of Commissioners is entitled to the support of a Commissioner's Secretary, with associated expenses covered by the Company. The Commissioner's Secretary is tasked with administrative and secretarial functions pertaining to all activities of the Board of Commissioners. Personnel within the Board of Commissioners Secretariat may be sourced from both internal and external candidates, in alignment with the Board of Commissioners' discussions. Additionally, the Board of Commissioners will establish criteria for the selection of personnel within the Secretariat.

INTERNAL DUTIES

1. *Coordinate with the Board of Directors to facilitate the implementation of the Board of Commissioners' responsibilities.*
2. *Foster and maintain positive relationships with internal stakeholders to ensure the effective operation of the Board of Commissioners, expert staff, and committees.*
3. *Collaborate with the General Affairs Division to provide necessary facilities and infrastructure for the Board of Commissioners.*
4. *Oversee protocol activities and travel arrangements for the Board of Commissioners and its support teams.*
5. *Organize logistical needs for meetings and meals conducted by the Board of Commissioners in conjunction with relevant work units.*
6. *Ensure alignment of the Board of Commissioners' activities with external stakeholders through collaboration with pertinent work units.*
7. *Liaise with the Corporate Secretary regarding the Board of Commissioners' external engagements, including CSR initiatives and partnerships.*
8. *Organize meetings, seminars, and workshops hosted by the Board of Commissioners in collaboration with relevant institutions and work units.*
9. *Prepare reports for which the Board of Commissioners is accountable, with assistance from related work units.*
10. *Undertake additional duties as required to support the functions of the Secretary of the Board of Commissioners.*



KEGIATAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT

1. Menyediakan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan.
2. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mempersiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Tahunan, Laporan Audit internal dan eksternal, serta laporan kepada OJK/BI.
3. Menyusun bahan yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris terkait kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
4. Mengatur agenda dan undangan rapat serta konfirmasi kehadiran, lokasi, dan hal teknis lainnya.
5. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Komite, maupun rapat dengan Direksi dan pihak lain.
6. Membuat dan mendistribusikan notulen rapat Dewan Komisaris dan Komite.
7. Menyampaikan notulen rapat kepada pihak-pihak terkait.
8. Menyiapkan pertimbangan, pendapat, dan saran Dewan Komisaris untuk Pemegang Saham, Direksi, dan pihak terkait.
9. Menindaklanjuti keputusan Dewan Komisaris dengan:
 - a. Mencatat keputusan dan penanggung jawabnya,
 - b. Memantau pelaksanaan keputusan,
 - c. Mendorong tindak lanjut keputusan kepada pihak terkait.
10. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan administrasi sekretariat Dewan Komisaris.
11. Mengelola korespondensi internal dan eksternal Dewan Komisaris.
12. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data, dokumen, dan keputusan Dewan Komisaris.
13. Menyusun konsep pidato dan materi seminar Dewan Komisaris/Komite serta materi RUPS.
14. Menangani administrasi keuangan dan pengendalian biaya terkait fasilitas Dewan Komisaris.
15. Menyusun anggaran tahunan untuk kegiatan Dewan Komisaris.
16. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi Dewan Komisaris.
17. Mengelola surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, staf ahli, dan Komite.
18. Mengelola agenda dan jadwal kegiatan Dewan Komisaris serta organnya.
19. Mengelola aset dan persediaan ATK di lingkungan Dewan Komisaris.
20. Menjalankan administrasi lain yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris.

SECRETARIAT ADMINISTRATIVE ACTIVITIES

1. Provide the Board of Commissioners with the necessary information for informed decision-making.
2. Coordinate with relevant departments to prepare materials for the Company's Work Plan and Budget, Annual Report, Internal and External Audit Reports, and submissions to the Financial Services Authority (OJK)/ Bank Indonesia (BI).
3. Prepare materials requiring the Board of Commissioners' approval regarding the management of the Company by the Board of Directors.
4. Organize meeting agendas and invitations, and confirm attendance, location, and other logistical details.
5. Facilitate meetings of the Board of Commissioners, Committees, and sessions with the Board of Directors and other stakeholders.
6. Draft and distribute minutes for Board of Commissioners and Committee meetings.
7. Circulate meeting minutes to relevant parties.
8. Prepare considerations, opinions, and recommendations from the Board of Commissioners for Shareholders, the Board of Directors, and other stakeholders.
9. Follow up on decisions made by the Board of Commissioners by:
 - a. Documenting decisions and responsible parties,
 - b. Monitoring the implementation of decisions,
 - c. Encouraging relevant parties to act on decisions.
10. Organize and coordinate the administrative functions of the Board of Commissioners' secretariat.
11. Manage internal and external correspondence for the Board of Commissioners.
12. Ensure the security and confidentiality of data, documents, and decisions of the Board of Commissioners.
13. Draft speeches and seminar materials for the Board of Commissioners/Committees, as well as materials for the General Meeting of Shareholders.
14. Oversee financial administration and cost control related to Board of Commissioners facilities.
15. Prepare an annual budget for Board of Commissioners activities.
16. Develop administrative systems and procedures for the Board of Commissioners.
17. Manage incoming and outgoing correspondence related to the duties of the Board of Commissioners, expert staff, and Committees.
18. Oversee the agenda and schedule of activities for the Board of Commissioners and its committees.
19. Manage stationery assets and supplies for the Board of Commissioners.
20. Perform additional administrative tasks related to the functions and activities of the Board of Commissioners.



PROFIL SEKRETARIS

1. Lidya Margareth Kambuaya



Sekretaris 1 Dewan Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Jayapura
Usia 41 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Jayapura.

Riwayat Pendidikan

Sarjana / S1 Manajemen, Sarjana Ekonomi/
S1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Cenderawasih

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 297/
KEPEG/X/2018

Periode Menjabat

2018-sampai sekarang

Riwayat Jabatan

- 1 Staf Pemasar Produk Dana (2012)
- 2 Officer 1 Sekretaris Dewan Komisaris (2012)
- 3 Kepala Unit Pemasaran Produk (2016)

Secretary 1 of the Board of Commissioners

Indonesian citizen, born in Jayapura.
Age 41 as of December 2024.
Domiciled in Jayapura.

Educational Background

Bachelor's Degree (S1) in Management, Bachelor
of Economics (S1) majoring in Management,
Faculty of Economics, Cenderawasih University.

Legal Basis for Appointment

Board of Directors' Decree Number 297/
KEPEG/X/2018

Term of Office

2018-2018-Present

Job History

1. Fund Product Marketing Staff (2012)
2. Officer 1 Secretary to the Board of
Commissioners (2012)
3. Head of Product Marketing Unit (2016)



2. Yohan Fonataba

Sekretaris 2 Dewan Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Jayapura
Usia 38 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Jayapura.

Riwayat Pendidikan

D3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Cenderawasih
tahun 2010

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 097/KEPEG/
VI/2021

Periode Menjabat

2021-sampai sekarang

Riwayat Jabatan

Asisten Protokoler (2020)

Secretary 2 of the Board of Commissioners

Indonesian citizen, born in Jayapura
Age 38 as of December 2025.
Domiciled in Jayapura.

Educational Background

Diploma (D3) in Government Studies,
Cenderawasih University (2010).

Legal Basis for Appointment

Board of Directors Decree Number 097/KEPEG/
VI/2021

Term of Office

2021-Present

Job History

Protocol Assistant (2020)



PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

The following competency development programs were undertaken by the Secretary of the Board of Commissioners in 2025:

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Kota	Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggara
1	Lydia M. Kambuaya	Sekretaris Dewan Komisaris	Sekretariat	22 - 23 Oktober 2025	Ashley Hotel Wahid Hasyim - Jakarta	Corporate Secretary Excellence	The Millennials Intitute
2	Yohan Fonataba	Sekretaris Dewan Komisaris	Sekretariat	22 - 23 Oktober 2025	Ashley Hotel Wahid Hasyim - Jakarta	Corporate Secretary Excellence	The Millennials Intitute

KOMITE AUDIT

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
2. POJK No. 55/POJK .04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
3. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
4. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan Pasal 71 POJK No. 17 Tahun 2023, Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi:

1. Perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
2. Pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan dan pemberhentian Auditor Eksternal.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang disebutkan pada poin 1, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi setidaknya terhadap hal-hal berikut:

AUDIT COMMITTEE

BASIS FOR ESTABLISHING THE AUDIT COMMITTEE

The establishment of the Audit Committee is founded on the following regulations:

1. POJK 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, dated September 14, 2023.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, dated December 23, 2015.
3. POJK No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, dated July 12, 2017.
4. POJK No. 39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks, dated December 19, 2019.
5. The Company's Articles of Association.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In accordance with Article 71 of POJK No. 17 of 2023, the Audit Committee is tasked with the responsibility of monitoring and evaluating the following areas:

1. Audit planning and implementation.
2. Monitoring the follow-up actions taken in response to audit results to assess the adequacy of internal controls, including the effectiveness of the financial reporting process.
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the External Auditor.

In fulfilling the responsibilities outlined in point 1, the Audit Committee is required to monitor and evaluate at least the following aspects:



1. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal;
2. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan dari otoritas dan lembaga lain.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam upaya menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Komite Audit mengikuti pedoman kerja yang tercantum dalam SK Direksi No.: 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang mengatur tentang:

1. Tujuan pembentukan komite;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
3. Struktur dan keanggotaan komite;
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
5. Masa tugas anggota komite dari pihak independen;
6. Mekanisme evaluasi kinerja; dan
7. Periode Review pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Bank wajib melakukan tinjauan terhadap pedoman dan tata tertib kerja untuk setiap komite Direksi dan komite Dewan Komisaris secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mencari Informasi yang diperlukan dari Pihak – pihak Bank (termasuk Pegawai Bank) dan Pihak – pihak eksternal;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya;
3. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk

1. The performance of the Internal Audit Division.
2. The compliance of financial statements with applicable accounting standards.
3. The Board of Directors' follow-up on findings from the Bank's Internal Audit Division, external auditors, as well as the results of supervision by the Financial Services Authority and/or other relevant authorities and institutions.

The outcomes of this monitoring and evaluation will inform the recommendations provided to the Board of Commissioners. The Audit Committee is committed to executing its duties in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding the use of public accountants and public accounting firms in financial services activities.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In pursuit of implementing the principles of effective governance, the Audit Committee adheres to the guidelines established in Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024, dated December 31, 2024. This decree outlines the following:

1. The purpose of establishing the committee;
2. The duties, responsibilities, and authorities of the committee;
3. The structure and membership of the committee;
4. The procedures for committee meetings, quorum requirements, and decision-making processes;
5. The term of office for independent committee members;
6. The performance evaluation mechanism; and
7. The periodic review of the committee's guidelines and operational procedures.

The Bank is required to periodically review the guidelines and work procedures for each committee of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at a minimum of once every three years.

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

In fulfilling its responsibilities, the Audit Committee is vested with the following authorities:

1. To seek essential information from Bank personnel, including employees and external parties.
2. To obtain input or advice from external professionals relevant to its responsibilities.
3. To access necessary Bank documents, data, and information pertaining to the company's employees, funds, assets, and resources.
4. To communicate directly with employees, including



Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

- 5 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 6 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa tugas Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, dan anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Struktur, keanggotaan, dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Keterangan
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua	Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Dortheis Sesa*	Anggota	Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Victor Abraham Abaidata	Anggota	Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Yonathan Sesa	Anggota	Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen
Marthin Y. Warikar	Anggota	Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen
Ludia Kiding	Anggota	Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

members of the Board of Directors and individuals involved in internal auditing, risk management, and accounting functions, regarding the Audit Committee's duties and responsibilities.

5. To engage independent parties, beyond Audit Committee members, as needed to assist in the execution of its responsibilities.
6. To exercise any additional authorities granted by the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE TERM OF OFFICE

The term of office for the Audit Committee shall not exceed that of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association. Members of the Audit Committee may be re-elected for one additional term only.

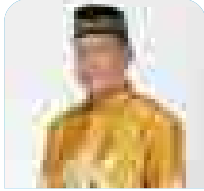
AUDIT COMMITTEE STRUCTURE, MEMBERSHIP, AND EXPERTISE

The structure, membership, and expertise of the Audit Committee are detailed in the table below.

Composition and Expertise Structure of the Audit Committee Period: January 1, 2025 – December 31, 2025

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.



Arobi Ahmad Aituarauw

Ketua Komite Audit

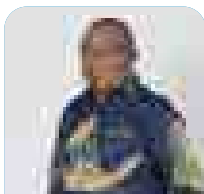
Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

As of December 31, 2025, the composition of the Audit Committee is as follows:

Chairman of the Audit Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



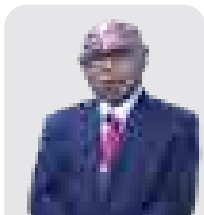
Yorgemes Derek Hegemur

Anggota Komite Audit

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Audit Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



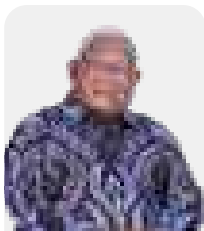
Nataniel Dominggus Mandacan

Anggota Komite Audit

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Audit Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



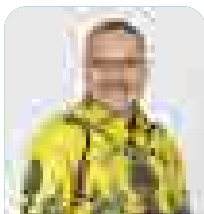
Dortheis Sesa

Anggota Komite Audit

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Audit Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



Victor Abraham Abaidata

Anggota Komite Audit

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Audit Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.

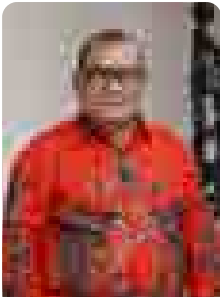


**Yonathan Sesa****Anggota Komite Audit (Pihak Independen)**

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Tator, 25 Desember 1960 / Berusia 65 tahun per Desember 2024
- Riwayat Pendidikan : Sarjana (S1) Ekonomi Universitas Hasanuddin (1987)
- Pengalaman Kerja : Anggota Komite Dewan Komisaris (2017-sekarang)
- Sertifikasi: Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari BSMR (2011)
- Dasar Hukum Pengangkatan : Surat Keputusan Direksi No.12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Periode Jabatan : Periode II
- Masa Jabatan : Periode 2024-2028
- Jabatan Rangkap: Tidak Ada

Audit Committee Member (Independent Party)

- Nationality: Indonesian Citizen
- Domicile: Jayapura
- Place and Date of Birth/Age: Tator, December 25, 1960 / 65 years old as of December 2024
- Educational Background: Bachelor's Degree (S1) in Economics from Hasanuddin University (1987)
- Work Experience: Member of the Board of Commissioners' Committee (2017–present)
- Certification: Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2011)
- Legal Basis for Appointment: Board of Directors Decree No. 12.1/DIR-BPD/III/2025 dated March 3, 2025, regarding the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Committees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua
- Term of Office: Second Term
- Tenure Period: 2024–2028
- Concurrent Positions: None

**Marthin Y. Warikar****Anggota Komite Audit (Pihak Independen)**

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Biak, 03 Maret 1960 / Berusia 65 tahun per Desember 2024
- Riwayat Pendidikan: Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Papua (1999)
- Pengalaman Kerja : Anggota Komite Dewan Komisaris (2017-sekarang)
- Sertifikasi: Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II dari LSPP (2021)
- Dasar Hukum Pengangkatan : Surat Keputusan Direksi No.12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Periode Jabatan : Periode II
- Masa Jabatan : Periode 2024-2028
- Jabatan Rangkap: Tidak Ada

Audit Committee Member (Independent Party)

- Nationality: Indonesian Citizen
- Domicile: Jayapura
- Date of Birth/Age: March 3, 1960 / 65 years old as of December 2024
- Educational Background: Bachelor's Degree in Management Economics, Faculty of Economics, Cenderawasih University, Papua (1999)
- Work Experience: Member of the Board of Commissioners' Committee (2017–present)
- Certification: Level II Risk Management Certification from LSPP (2021)
- Legal Basis for Appointment: Board of Directors Decree No. 12.1/DIR-BPD/III/2025 dated March 3, 2025, regarding the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Committees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Term of Office: Term II (2024-2028)
- Concurrent Positions: None

**Ludia Kiding****Anggota Komite Audit**

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Toraja, 12 Desember 1964 Berusia 61 tahun per Desember 2025
- Riwayat Pendidikan: Pasca Sarjana/S2 Ekonomi Manajemen Universitas Cenderawasih, Papua (2005)
- Sertifikasi: Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari BSMR (2025)
- Dasar Hukum Pengangkatan : Surat Keputusan Direksi No.12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Audit Committee Member

- Nationality: Indonesian Citizen
- Domicile: Jayapura
- Place and Date of Birth/Age: Toraja, December 12, 1964 / 61 years old as of December 2025
- Educational Background: Postgraduate (S2) in Economics and Management from Cenderawasih University, Papua (2005)
- Certification: Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Board (BSMR) (2025)
- Legal Basis for Appointment: Board of Directors Decree No. 12.1/DIR-BPD/III/2025 dated March 3, 2025, regarding the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Committees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit <i>Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Audit Committee</i>			
Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua	- Pascasarjana (S2) (MM) Manajemen Strtaegi/Internasional, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya-Jakarta - Sarjana Ekonomi (SE) Fisip/ Ekonomi Manajemen Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura - Sarjana Muda (BA) FIHES/Tataniaga Universitass Cenderawasih (UNCEN) Jayapura	- Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024) - Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024) - Anggota Pokja Agama, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017) - Ketua PURT, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017)
Dortheis Sesa*	Anggota	Sarjana Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Cenderawasih Jayapura	- Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan (2009-2015). - Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2005-2009). - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2001-2004). - Kepala bagian penyusunan dan pengendalian Program Setda Kabupaten Manokwari (1998-2001). - Kepala bagian Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari (1995-1998).
Victor Abraham Abaidata	Anggota	Sarjana (S1) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura	- Staf Gubernur Papua (2006 - 2011) - Analisis Daerah Desk Otsus Papua atau Pokja Polhukam Kemenkopolhukan Republik Indonesia (2019 - 2023) - Staf Khusus Pj. Gubemur Papua Barat (2022 - 2023) - Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (2024 - 2028)
Yonathan Sesa	Anggota	Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin	Anggota Komite Dewan Komisaris (2017-sekarang)
Marthin Y. Warikar	Anggota	Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Papua	Anggota Komite Dewan Komisaris (2017-sekarang)
Ludia Kiding	Anggota	Pasca Sarjana/S2 Ekonomi Manajemen Universitas Cenderawasih, Papua (2005)	Koordinator Teknis (Kortek), Divisi Audit Intern, PT Bank Pembangunan Daerah Papua (2019)

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025



INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Audit Committee							
Aspek Independensi	Arobi Ahmad Aituarauw	Dortheis Sesa	Victor Abraham Abaidata	Yonathan Sesa	Ludia Kiding	Marthin Y. Warikar	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	Does not have any management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	Does not have any share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	Not serving as a political party administrator, official or government official

RAPAT KOMITE AUDIT

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Senior sebagai Pimpinan Rapat; apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

AUDIT COMMITTEE

MEETING POLICY

The procedures for Audit Committee meetings are outlined as follows:

1. Meetings are convened at least once a month, as required by the Bank.
2. A quorum is established with the presence of at least 51% of committee members, which must include one Independent Commissioner and an Independent Party.
3. The meeting is chaired by the Chair of the Audit Committee or a Senior Committee Member as Chair of the Meeting; if the Chair of the Audit Committee is unable to attend.
4. Decisions made during committee meetings are based on consensus. In the absence of consensus, decisions will be determined by a majority vote.



- 5 Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 6 Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media digital yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

5. *Minutes of the meetings will be recorded, documenting all decisions, dissenting opinions, and the rationale behind those differences. The minutes will be signed by all present members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.*
6. *Meetings may be conducted in person or via digital platforms that facilitate participation by all members of the Audit Committee.*

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, berikut adalah tanggal pelaksanaan, agenda rapat, dan peserta rapat Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

The following outlines the dates, meeting agendas, and participants for Audit Committee meetings throughout 2025.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit - Audit Committee Meeting Agenda Table

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Meeting Agenda
1.	24 Januari 2025	1. Evaluasi Pelaksanaan PKAT Tahun 2024 2. Laporan Tindaklanjuti Temuan Trw IV 2024 3. Lain-lain	Ketua dan anggota komite	1. Evaluasi Pelaksanaan PKAT Tahun 2024 2. Laporan Tindaklanjuti Temuan Trw IV 2024 3. Lain-lain
2	5 Maret 2025	1. Evaluasi Hasil Temuan KAP s.d. 2023 & Rencana 2. Tindaklanjuti Manajemen Letter KAP / 2024 dan Pembahasan 3. Lain-lain	Ketua dan anggota komite	1. Evaluasi Hasil Temuan KAP s.d. 2023 & Rencana 2. Tindaklanjuti Manajemen Letter KAP / 2024 dan Pembahasan 3. Lain-lain
3.	31 Juli 2025	Pembahasan Pemimpin Divisi Audit Internal	Ketua dan anggota komite	<i>Discussion with the Head of the Internal Audit Division</i>
4	12 Agustus 2025	Verifikasi Dokumen Administratif KAP / AP Tahun buku 2025	Ketua dan anggota komite	<i>Verification of Public Accountant Firm Administrative Documents for Fiscal Year 2025</i>
5	23 Agustus 2025	Finalisasi Verifikasi Dokumen Calon AP/KAP & Lain-Lain	Ketua dan anggota komite	<i>Finalization of Document Verification for Public Accountant Firm Candidates & Other Discussions</i>
6	25 Agustus 2025	Presentasi Proposal, Jadwal Tanya Jawab dan diskusi	Ketua dan anggota komite	<i>Proposal Presentation, Q&A Schedule, and Discussion</i>
7	26 Agustus 2025	Verifikasi Faktual Calon AP / KAP Paul Hadiwinata, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF Indonesia) terdiri dari Presentasi Proposal, tanya Jawab dan diskusi.	Ketua dan anggota komite	<i>Factual Verification of Public Accountant Firm Candidates for Paul Hadiwinata, Arsono, Retno, Palilingan and Partners (PKF Indonesia) consisting of Proposal Presentation, Q&A, and discussion.</i>
8	04 September 2025	Kompilasi Risalah Rapat Tanggal, 23, 25 dan 26 Agustus 2025.	Ketua dan anggota komite	<i>Compilation of Minutes of Meeting on August 23, 25, and 26, 2025.</i>
9	26 November 2025	1. Progress Penyelesaian Temuan KAP tahun 2025 2. Evaluasi PKAT 3. Usulan PKAT 4. Lain-Lain	Ketua dan anggota komite	1. Progress Penyelesaian Temuan KAP tahun 2025 2. Evaluasi PKAT 3. Usulan PKAT 4. Lain-Lain

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025, Komite Audit telah mengadakan 9 (sembilan) kali rapat. Berikut adalah frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat tersebut.

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During 2025, the Audit Committee held nine meetings. The following is a breakdown of the frequency and attendance of each Audit Committee member at these meetings.



Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	
		Jumlah Kehadiran	Presentase
Arobi Ahmad Aituarauw	9	9	100%
Dortheis Sesa*		9	100%
Victor Abraham Abaidata		9	100%
Yonathan Sesa		9	100%
Marthin Y. Warikar		9	100%
Ludia Kiding		9	100%

* Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2025

TRAINING AND COMPETENCY ENHANCEMENT FOR THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua	Pelatihan yang diikuti selama tahun 2025 dapat dilihat pada sub bab Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini		
Dortheis Sesa	Anggota			
Victor Abraham Abaidata	Anggota			
Yonathan Sesa	Anggota	Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Jumat, 09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		POJK 15 Tahun 2024 dalam Menjaga Tata Kelola Bisnis Bank	Senin, 28 Jul 2025, Ashley Wahid Hasyim, Jakarta"	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Workshop Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi OJK Dan Panduan Pratik	Kamis, 09 Okt 2025, Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
Marthin Y. Warikar	Anggota	Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Jumat, 09 Mei 2025 Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		Workshop Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi OJK Dan Panduan Pratik	Kamis, 09 Okt 2025, Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
		Pembinaan Kredit, Ext - Workshop POJK 19 Tahun 2025 kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM	18-12-2025	PT. Multi Talenta Consulting
Ludia Kiding	Anggota	Business Process, Ext-Workshop RBB Pendekatan Teoritik, Regulasi OJK Dan Panduan Pratik	09-10-2025	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm)
		Manajemen Resiko Level IV , Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang	23-08-2025	BSMR
		Manajemen Resiko Level IV, Ext-Pembekalan Uji Kompetensi sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	21-08-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Perencanaan Dan Anggaran Keuangan, Ext - POJK 15 Tahun 2024 Dalam Menjaga Tata Kelola Bisnis Bank	28-07-2025	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Kepatuhan, Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09-05-2025	PT. Multi Talenta Consulting



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas menelaah laporan keuangan untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko, serta mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal termasuk independensi KAP. Komite Audit juga memantau tindak lanjut temuan audit, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menelaah pengaduan dan potensi benturan kepentingan. Seluruh hasil pengawasan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan guna memperkuat tata kelola dan menjaga kinerja Bank yang sehat dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KOMITE AUDIT ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank Papua dinilai telah berjalan dengan efektif dan memadai. Hal ini tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, yang mencakup audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta kontrol finansial dan operasional.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman Kerja yang diatur dalam SK Direksi No: 80/DIR-BPD/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024, yang mencakup hal-hal berikut:

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Audit Committee reviewed financial statements to ensure fairness and compliance with accounting standards, evaluated the effectiveness of internal controls and risk management, and oversaw the implementation of internal and external audits, including the independence of the Public Accounting Firm (KAP). The Audit Committee also monitored follow-up actions on audit findings, ensured regulatory compliance, and reviewed complaints and potential conflicts of interest. All supervisory results were submitted to the Board of Commissioners as a basis for decision-making to strengthen governance and maintain the Bank's healthy and sustainable performance.

AUDIT COMMITTEE STATEMENT ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT SYSTEM

The internal control system implemented by Bank Papua is considered effective and adequate. This is reflected in the effective implementation of internal control functions, which include internal audit, risk management, compliance, and financial and operational controls.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

BASIS FOR ESTABLISHING THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Members of the Remuneration and Nomination Committee are based on the following regulations:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination & Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
3. Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners and its amendments.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The Remuneration and Nomination Committee has Work Guidelines stipulated in Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024, dated December 31, 2024, which cover the following:



1. Tujuan pembentukan komite;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
3. Struktur dan keanggotaan komite;
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
5. Masa tugas anggota komite dari pihak independen;
6. Mekanisme evaluasi kinerja; dan
7. Periode Review pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Bank wajib melakukan tinjauan terhadap pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite Direksi dan komite Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi
Melakukan evaluasi terhadap penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar memenuhi kelayakan, kepatutan, dan tolok ukur yang wajar, yang didasarkan pada:
 - a) Pertimbangan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel;
 - b) Target kinerja dan/atau kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank serta risiko,
 - c) Kewajaran dengan peer group,
 - d) Sasaran/tujuan, dan pencapaian kinerja/strategi jangka pendek atau jangka panjang Bank yang sesuai dengan kebutuhan Bank,
 - e) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas) dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;
 - f) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (2) Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
 - (3) Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi Anggota Komite Dewan Komisaris.
 - g) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. Purpose of establishing the committee;
2. Duties, responsibilities, and authorities of the committee;
3. Committee structure and membership;
4. Committee meetings, quorum, and decision-making;
5. Term of office for independent committee members;
6. Performance evaluation mechanism; and
7. Periodic review of the committee's guidelines and work procedures.

The Bank is required to review the guidelines and work procedures for each committee of the Board of Directors and committee of the Board of Commissioners periodically, at least once every 3 (three) years.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

1. Related to the Remuneration Function
Evaluate the remuneration structure, policies, and amounts, and provide recommendations to the Board of Commissioners to ensure they meet eligibility, propriety, and reasonable benchmarks, based on:
 - a) Prudential considerations, balancing fixed and variable remuneration;
 - b) Performance targets and/or performance, duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, linked to the achievement of the Bank's objectives, performance, and risks;
 - c) Fairness with the peer group;
 - d) Targets/objectives, and achievement of short-term and long-term performance/strategies of the Bank in accordance with the Bank's needs;
 - e) Financial performance and provision of reserves (as stipulated in the Law on Limited Liability Companies) and the Bank's future revenue potential;
 - f) Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - (1) The structure, policies, and amounts of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS;
 - (2) The overall remuneration structure, policy, and amount for Executive Officers and Employees, to be submitted to the Board of Directors; and
 - (3) The remuneration structure, policy, and amount for Members of the Board of Commissioners Committee.
 - g) Ensure that the remuneration policy complies with applicable regulations;
 - h) Conduct periodic evaluations of the implementation of the Remuneration Policy;



- h) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi;
- i) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- j) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel (khusus untuk Dewan Komisaris tidak menerima insentif untuk menghindari adanya benturan kepentingan); dan
- k) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Terkait dengan fungsi Nominasi

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris.
 - (4) Sistem serta prosedur pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (5) Calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (6) Calon yang memenuhi syarat sebagai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris.
- b) Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas penilaian kinerja anggota Direksi, dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan;
- c) Komite menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan untuk diimplementasikan dalam proses mengidentifikasi nominasi para Calon, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
- d) Menelaah dan mengusulkan Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang dalam prosesnya menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - (1) Dewan Komisaris wajib mematuhi Peraturan, Perundang-undangan serta prinsip-prinsip lainnya yang berlaku sesuai dengan Ketentuan regulator terkait; dan

- i) *Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors in ensuring the appropriateness of the remuneration received by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
- j) *Develop a remuneration structure consisting of fixed and variable salaries, honorariums, incentives, and allowances (specifically, the Board of Commissioners does not receive incentives to avoid conflicts of interest); and*
- k) *The remuneration structure, policy, and amount must be evaluated by the Committee at least once a year.*

2. Related to the Nomination Function

- a) *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - (1) *The composition of positions for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;*
 - (2) *Policies and criteria required in the Nomination process;*
 - (3) *Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
 - (4) *System and procedures for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS;*
 - (5) *Candidates who meet the requirements for members of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS;*
 - (6) *Candidates who meet the requirements for independent parties to become members of the Board of Commissioners Committee.*
- b) *Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on established benchmarks for consideration;*
- c) *The Committee develops the policies and criteria required for implementation in the process of identifying nominations for candidates, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners;*
- d) *Review and propose qualified candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS, implementing the following principles:*
 - (1) *The Board of Commissioners is obliged to comply with applicable regulations, laws, and other principles in accordance with relevant regulatory provisions; and*



- (2) Komite harus merasa yakin bahwa setiap Calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan Calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat Calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.
- (3) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

- (2) *The Committee must be confident that each Candidate is capable and suitable for the position or position in question and is the best and most qualified Candidate for the position or position, taking into account the Candidate's track record, age, experience, abilities and other relevant factors.*

- (3) *Developing a competency development program for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi (apabila diperlukan);
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Komite lainnya serta unit-unit kerja yang ada relevansinya;
4. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank;
5. Berkoordinasi dengan Bank untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi;
6. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, dan pihak yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi internal.

AUTHORITIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Board of Commissioners authorizes the Remuneration and Nomination Committee to carry out its responsibilities:

- 1. Provide full, free, and unrestricted access to Bank records related to the implementation of the Remuneration and Nomination Committee's duties;*
- 2. Obtain input or advice from professionals outside the Bank related to the Remuneration and Nomination Committee's duties (if necessary);*
- 3. In carrying out its duties, the Remuneration and Nomination Committee may collaborate with other Committees and relevant work units;*
- 4. Request necessary information from various parties, both internal and external to the Bank;*
- 5. Coordinate with the Bank to conduct surveys as needed by the Remuneration and Nomination Committee;*
- 6. Communicate directly with the Board of Directors and parties carrying out internal remuneration and nomination functions.*



MASA JABATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Komite ini hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Keterangan
Dortheis Sesa*	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Utama
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris
Arobi Ahmad Aituarauw	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Victor Abraham Abaidata	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pemimpin Divisi MMM

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

TERM OF OFFICE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The term of office of the Remuneration and Nomination Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association. This Committee may only be re-elected for one subsequent term.

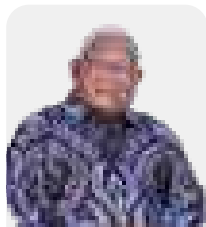
STRUCTURE, MEMBERSHIP, AND EXPERTISE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Structure, Membership, and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee: January 1, 2025 – December 31, 2025



PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

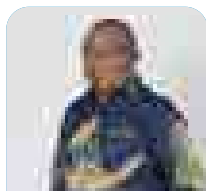
Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.



Dorteis Sesa

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

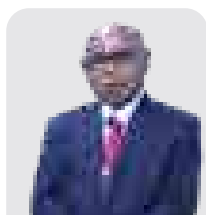
Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Yorgemes Derek Hegemur

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

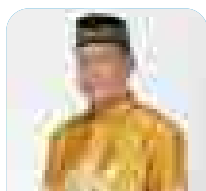
Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Nataniel Dominggus Mandacan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

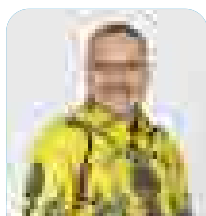
Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Arobi Ahmad Aituarauw

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

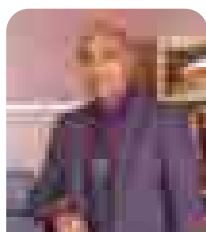
Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Victor Abraham Abaidata

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Andarias Baunik

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Pemimpin Divisi dalam Laporan Tahunan ini.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE PROFILE

As of December 31, 2025, the members of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

Chairman of the Remuneration and Nomination Committee

Profile available in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profile available in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profile available in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profile available in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profile available in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report..

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profile available in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND PROFESSIONAL EXPERIENCE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Education	Work experience
Dortheis Sesa*	Ketua	Sarjana Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Cenderawasih Jayapura	- Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan (2009-2015). - Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2005-2009). - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2001-2004). - Kepala bagian penyusunan dan pengendalian Program Setda Kabupaten Manokwari (1998-2001). - Kepala bagian Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari (1995-1998).	<i>Bachelor of Social and Political Sciences majoring in Economics from Cenderawasih University Jayapura</i>	<i>Regional Secretary of South Sorong Regency (2009-2015).</i> <i>Head of the Regional Development Planning and Control Agency of Manokwari Regency (2005-2009).</i> <i>Head of the Regional Planning and Development Agency of Manokwari Regency (2001-2004).</i> <i>Head of the Program Preparation and Control Section of the Manokwari Regency Secretariat (1998-2001).</i> <i>Head of Development Section, Manokwari Regency Secretariat (1995-1998).</i>
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota	- Pasca Sarjana bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya - Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura	- Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (2016) - Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua (2014-2022) - Analisis kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Papua (2020) - Plt. Asisten Bidang Umum SETDA Provinsi Papua (2021-2022) - Asisten Bidang Umum SETDA Provinsi Papua (2022-sekarang)	<i>Postgraduate in Law from Airlangga University Surabaya</i> <i>Bachelor of Laws, Faculty of Law, Cenderawasih University, Jayapura</i>	<i>Acting Regent of Mamberamo Raya Regency (2016)</i> <i>Head of Legal Bureau of Papua Province Secretariat (2014-2022)</i> <i>Policy Analyst, Senior Expert, Papua Provincial Government (2020)</i> <i>Acting Assistant for General Affairs of the Papua Province Secretariat (2021-2022)</i> <i>Assistant for General Affairs of the Papua Province Secretariat (2022-present)</i>
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota	- Doktor program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar - Pasca Sarjana (S2) bidang Kebijakan Publik MAP dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta - Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura	- Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (2014-sekarang). - Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (2011-2014). - Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura (2008-2010). - Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat (Irian Jaya Barat) (2003-2008). - Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten Manokwari (1994-2001).	<i>Doctoral Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar</i> <i>Postgraduate (S2) in Public Policy MAP from Gadjah Mada University Yogyakarta</i> <i>Bachelor of Social Sciences from the Faculty of Social and Political Sciences, Cenderawasih University, Jayapura</i>	<i>Regional Secretary of West Papua Province (2014-present).</i> <i>Assistant for Economic Development and Social Welfare (2011-2014).</i> <i>Head of Regional Office IX BKN Jayapura (2008-2010).</i> <i>Head of the Bureau of Personnel, Regional Secretariat of West Papua Province (West Irian Jaya) (2003-2008).</i> <i>Head of Personnel Section, Manokwari Regency Secretariat (1994-2001).</i>



Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Education	Work experience
Arobi Ahmad Aituarauw	Anggota	• Strata Dua (MM) Manajemen Strtaegi/ Internasional, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya-Jakarta • Sarjana Ekonomi (SE) Fisip/Ekonomi Manajemen Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura • Sarjana Muda (BA) FIHES/ Tataniaga Universitass Cenderawasih (UNCEN) Jayapura	• Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024) • Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024) • Anggota Pokja Agama, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017) • Ketua PURT, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017)	• <i>Masters (MM) in Strategic/ International Management, Prasetya Mulya School of Management-Jakarta</i> • <i>Bachelor of Economics (SE) Faculty of Social and Political Sciences/ Management Economics, Cenderawasih University (UNCEN) Jayapura</i> • <i>Bachelor of Arts (BA) in Economics/ Commerce at Cenderawasih University (UNCEN) Jayapura</i>	• <i>Independent Commissioner of PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024)</i> • <i>Chairman of the Risk Oversight Committee of PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024)</i> • <i>Member of the Religious Affairs Working Group, Papuan People's Assembly, West Papua Province (2011-2017)</i> • <i>Chairman of PURT, Papuan People's Assembly, West Papua Province (2011-2017)</i>
Victor Abraham Abaidata	Anggota	Sarjana Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura	• Staf Gubernur Papua (2006 - 2011) • Analis Daerah Desk Otsus Papua atau Pokja Polhukam Kemenkopolhukan Republik Indonesia (2019 - 2023) • Staf Khusus Pj. Gubemur Papua Barat (2022 - 2023) • Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (2024 - 2028)	<i>Bachelor of Law</i>	• <i>Papua Governor's Staff (2006 - 2011)</i> • <i>Regional Analyst for the Papua Special Autonomy Desk or the Political, Legal and Security Working Group of the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia (2019 - 2023)</i> • <i>Special Staff to the Acting Governor of West Papua (2022 - 2023)</i> • <i>Independent Commissioner of PT. Tanah Papuaal Development Bank (2024 - 2028)</i>
Andarias Baunik	Anggota	Sarjana (S1) Ekonomi, STIE Port Numbay, Jayapura, (2009)	1. Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan (2024) 2. Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa (2022) 3. Pemimpin Cabang Nabire (2018)	<i>Bachelor's Degree (S1) in Accounting, STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (1996)</i>	• <i>Head of Makassar Branch Office (2022)</i> • <i>Head of Policy and Reporting Department (2024–2025)</i> • <i>Head of Bank Risk Management Division (2025)</i>

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025



INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara mandiri, menjunjung tinggi kepentingan bank, serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini tercermin dari mayoritas komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, yang merupakan Komisaris Independen.

INDEPENDENCE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee performs its duties, responsibilities, and authorities with professionalism and independence, free from interference that contradicts applicable laws and regulations. All members of the Remuneration and Nomination Committee meet the established independence criteria, enabling them to execute their responsibilities autonomously while safeguarding the interests of the bank. This independence is underscored by the fact that the majority of commissioners on the committee are Independent Commissioners.

Aspek Independensi	Dortheis Sesa	Yorgemes Derek Hegemur	Nataniel Dominggus Mandacan	Arobi Ahmad Aituarauw	Victor Abraham Abaidata	Andarias Baunik	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Does not have any management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Does not have any share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/ or fellow members of the Audit Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	X	✓	✓	✓	✓	Not serving as a political party administrator, official or government official

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat ini hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, serta salah satu Komisaris Independen dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) perwakilan Pegawai Bank. "Mayoritas" yang dimaksud adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING AGENDA

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING POLICY

The meetings of the Remuneration and Nomination Committee are conducted periodically, with a minimum frequency of once every three months. These meetings require the attendance of a majority of the committee members, which is defined as more than 50%. Additionally, the presence of one Independent Commissioner and either one Executive Officer responsible for human resources or one representative from the Bank's employee group is mandatory.



AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMITE MEETING AGENDA

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table Remuneration and Nomination Committee Meeting Attendance Rate

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Meeting Agenda
1	22 Januari 2025	Pembahasan Rekomendasi Calon Direksi dan Komisaris Independen & Pembahasan Mekanisme dan Progress Persyaratan Rekrutmen Anggota Komite	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Discussion on the recommendation of candidates for the Board of Directors and Independent Commissioners, as well as the mechanism and progress of recruitment requirements for Committee members;
2	17 Februari 2025	Progress Rekrutmen Calon Anggota Komite & Lain-Lain	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Progress of recruitment for prospective Committee members and other related matters;
3	27 Februari 2025	Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap usulan Komite Remunerasi dan Nominasi atas hasil penjarangan / asesmen anggota Komite Dewan Komisaris & lain-lain	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Approval by the Board of Commissioners of the proposal from the Remuneration and Nomination Committee (RNC) regarding the results of the screening/assessment of Board Committee members and other related matters;
4	28 Februari 2025	1. Progres Rekrutmen Calon Anggota Komite Dewan Komisaris, 2. Lain-Lain	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	1. Progress of Recruitment of Prospective Members of the Board of Commissioners Committee, 2. Other
5	21 Maret 2025	Tambahan Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang jatuh tempo di bawah 1 (satu) Tahun	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Additional candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners whose terms will expire within less than one year;
6	19 Mei 2025	Penelitian / <i>Assesment</i> Dokumen Pencalonan Komisaris Non Independen, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional.	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Review and assessment of nomination documents for Non-Independent Commissioners, Director of Business, and Director of Operations;
7	26 Juni 2025	Pembahasan Kebijakan Perjalanan Dinas PT. PBD Papua. & Lain-lain.	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Discussion on the Business Travel Policy of PT Bank Pembangunan Daerah Papua and other related matters;
8	1 Juli 2025	Pembahasan Remunerasi Pengurus Bank Papua Tentang Rencana Pemberian Tunjangan Pendidikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Discussion on the remuneration of Bank Papua's Board members, including the proposed education allowance for the Board of Commissioners and Board of Directors;
9	18 September 2025	Penjelasan Tentang Penerapan Manajemen Karir, PT BPD Papua, Progress Pelaksanaan STO dan Job Profile, Perkembangan Rekrutmen Pegawai Baru dan Rencana Rekrutmen Tahun, Pemenuhan Staf Tenaga Auditor sesuai pembagian <i>cluster</i> dan pemenuhan SDM dan Progress dan Rencana revisi Anggaran Dasar BPD Papua dan Lain-lain	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Presentation and discussion on the implementation of career management at PT Bank Pembangunan Daerah Papua, including progress on organizational structuring (STO) and job profiling, developments in employee recruitment and future recruitment plans, fulfillment of audit personnel based on cluster allocation, human capital adequacy, and progress and plans for amendments to the Articles of Association of Bank Papua, as well as other related matters;
10	24 November 2025	Pembahasan Masa Akhir Jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan Dewan Komisaris	Seluruh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Discussion on the end of tenure of the Board of Commissioners and Committee members who are not members of the Board of Commissioners.



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETINGS

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Table Remuneration and Nomination Committee Meeting Attendance Rate				
Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran		Remuneration & Nomination Committee
		Jumlah Kehadiran	Presentase	
Arobi Ahmad Aituarauw	10	10	100%	Arobi Ahmad Aituarauw
Yorgemes Derek Hegemur		10	100%	Yorgemes Derek Hegemur
Nataniel Dominggus Mandacan		10	100%	Nataniel Dominggus Mandacan
Dortheis Sesa*		10	100%	Dortheis Sesa*
Victor Abraham Abaidata		10	100%	Victor Abraham Abaidata
Andarias Baunik		10	100%	Simon Giayi/Andarias Baunik

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE COMPETENCY ENHANCEMENT PROGRAM

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Dortheis Sesa*	Ketua	Pelatihan yang diikuti selama tahun 2025 dapat dilihat pada sub bab Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini Pelatihan yang diikuti selama tahun 2025 dapat dilihat pada sub bab Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini		
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota			
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota			
Arobi Ahmad Aituarauw	Anggota			
Victor Abraham Abaidata	Anggota			
Andarias Baunik	Anggota	Pembekalan Sertifikasi Manajemen-risiko Jenjang 7	05-05-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risikojenjang Kualifikasi 7	09-05-2025	BSMR
		IHT EKS - Executive Overview Perbankan Untuk Calon Direksi (Pembekalan Fit And Proper Test)	27-05-2025	LPPI Jakarta

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI TAHUN 2025

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi yang adil, kompetitif, dan berbasis kinerja serta selaras dengan profil risiko Bank. Komite juga melakukan proses nominasi, termasuk seleksi, penilaian, dan rekomendasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengevaluasi kinerja dan efektivitas organ perusahaan. Selain itu, Komite memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan SDM, suksesi kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator guna mendukung keberlanjutan dan kinerja Bank.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam program suksesi Direksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan suksesi Direksi ini disajikan pada Subjudul Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris serta Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi dan jajarannya) dalam penerapan manajemen risiko di seluruh aktivitas dan produk Bank. Komite ini memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai diterapkan dan sistem kepatuhan berjalan secara efektif. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap isu-isu manajemen risiko, sistem pengawasan internal, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko.

IMPLEMENTATION OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

The Remuneration and Nomination Committee has developed and evaluated a fair, competitive, and performance-based remuneration policy aligned with the Bank's risk profile. The Committee also conducts the nomination process, including the selection, assessment, and recommendation of prospective members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and evaluates the performance and effectiveness of corporate organs. Furthermore, the Committee ensures the implementation of good governance in human resource management, leadership succession, and compliance with regulatory requirements to support the Bank's sustainability and performance.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The Remuneration and Nomination Committee has assisted the Board of Commissioners in its Directors succession program in accordance with applicable policies. This Directors succession policy is presented under the "Nomination and Remuneration for the Board of Commissioners and Directors" subheading in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee is tasked with supporting the Board of Commissioners' supervisory and coaching functions for executives (the Board of Directors and their staff) in implementing risk management across all Bank activities and products. This Committee ensures that an adequate internal control system is implemented and that the compliance system is operating effectively. This task includes supervision of risk management issues, internal control systems, and anticipatory steps taken by the Board of Directors in implementing policies and risk management.



DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan berikut:

- 1 POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
- 2 Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3 Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam yang diatur dalam SK Direksi No: 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Piagam tersebut mengatur mengenai:

- 1 Tujuan pembentukan komite;
- 2 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
- 3 Struktur dan keanggotaan komite;
- 4 Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
- 5 Masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;
- 6 Mekanisme evaluasi kinerja; dan
- 7 Periode Review pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Bank wajib melakukan tinjauan terhadap pedoman dan tata tertib kerja untuk setiap komite Direksi dan komite Dewan Komisaris secara berkala, setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank. Selain itu, Komite juga menilai pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris demi memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko dengan memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

- 1 Melakukan pemantauan dan telaah terhadap kecukupan pengendalian intern Bank secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

LEGAL BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The establishment of the Risk Oversight Committee is based on the following regulations:

1. *POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, dated September 14, 2023.*
2. *OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.*
3. *The Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners and its amendments.*

RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee refers to a Charter stipulated in Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024. The Charter regulates:

1. *The objectives of establishing the Committee;*
2. *Duties, responsibilities, and authorities of the Committee;*
3. *Structure and membership of the Committee;*
4. *Committee meetings, quorum, and decision-making processes;*
5. *Term of office of independent members;*
6. *Performance evaluation mechanisms; and*
7. *Periodic review of the Committee's guidelines and code of conduct.*

The Bank is required to review the guidelines and code of conduct for each Board of Directors Committee and Board of Commissioners Committee periodically, at least once every 3 (three) years.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee is responsible for monitoring and evaluating the alignment between risk management policies and their implementation within the Bank. The Committee also assesses the execution of work plans and duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit (SKMR). The purpose of this evaluation is to provide recommendations to the Board of Commissioners to ensure that the Bank manages risks adequately.

1. *Conduct comprehensive monitoring and review of the adequacy of the Bank's internal controls, including compliance with Good Corporate Governance policies.*



- 2 Melakukan pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan sekurangngnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3 Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen risiko.
 - 4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - 5 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nilai komposit dan predikat hasil *self assessment* kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.
 - 6 Menyampaikan revisi hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang baik Bank secara lengkap kepada regulator.
 - 7 Melakukan telaah atas informasi keuangan dan non keuangan mengenai Bank, rencana bisnis atau rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya terkait manajemen risiko.
 - 8 Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup penugasan Komite, dan melaporkan serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 9 Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali, dan membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.
2. Monitor and prepare reports on the implementation of Good Corporate Governance, with content and scope that at least comply with applicable regulations.
 3. Monitor and evaluate the Bank's compliance with the Articles of Association and laws and regulations related to risk management.
 4. Monitor and evaluate reports on the implementation of Good Corporate Governance that reflect the Bank's actual condition or are in accordance with the Bank's self-assessment results.
 5. Monitor and evaluate the composite score and predicate of the self-assessment results to the public through the Publicized Financial Report for the nearest period.
 6. Submit a complete revision of the Bank's Good Corporate Governance self-assessment results to regulators.
 7. Review financial and non-financial information regarding the Bank, the Bank's business plan or work plan and budget, management reports, and other information related to risk management.
 8. Conduct regular meetings with relevant work units to discuss matters within the Committee's scope of assignment, and report and provide input on matters requiring the attention of the Board of Commissioners.
 9. Develop guidelines and work procedures for the Committee (*charter*) and conduct reviews as needed at least once every 3 (three) years, and conduct self-assessments regarding the effectiveness of the Risk Monitoring Committee's activities.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

- 1 Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
- 2 Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- 3 Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite.
- 4 Bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) serta unit kerja lain terkait tugas Komite.

AUTHORITY OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee is granted the following authorities by the Board of Commissioners:

1. Full, unrestricted access to the Bank's records related to the Committee's duties.
2. The ability to communicate with Heads of Work Units and other parties within the Bank to obtain information, clarification, and necessary documents and reports.
3. The ability to obtain input or advice from external professionals relevant to the Committee's duties.
4. The authority to collaborate with the Risk Management Committee, Risk Management Work Unit (SKMR), Compliance Unit (SKK), Legal Unit (SKL), Information Technology Unit (SKTI), and other relevant work units.



MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Masa tugas Komite Pemantau Risiko tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dan anggota Komite hanya dapat dipilih kembali untuk satu (1) periode berikutnya.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025

TERM OF OFFICE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The term of office of the Risk Oversight Committee shall not exceed the term of the Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the Articles of Association. Committee members may only be reappointed for one (1) additional term.

STRUCTURE, MEMBERSHIP, AND EXPERTISE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Structure, Membership, and Expertise of the Risk Oversight Committee Period: January 1, 2025 – December 31, 2025

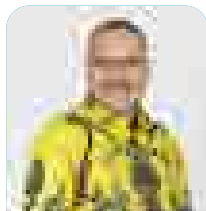
Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Keterangan
Victor Abraham Abai-data	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Utama
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Dortheis Sesa*	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Komisaris Independen
Yohanes Mandang	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen
Anita Erari	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen
Daud Sitepu	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen
Yunus B. Toding Allo	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pihak Independen

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025



PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.



Victor Abraham Abaidata

Ketua Komite Pemantau Risiko

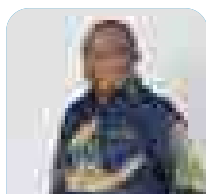
Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

PROFILE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The profile of the Risk Oversight Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Chairman of the Risk Monitoring Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



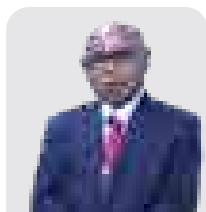
Yorgemes Derek Hegemur

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Risk Monitoring Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



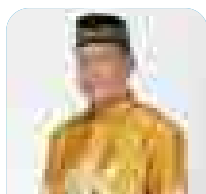
Nataniel Dominggus Mandacan

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Risk Monitoring Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



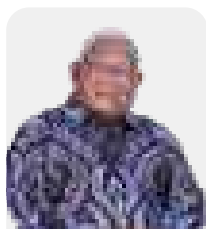
Arobi Ahmad Aituarauw

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Risk Monitoring Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.



Dorthesis Sesa

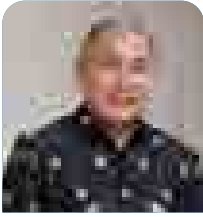
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Member of the Risk Monitoring Committee

His profile can be found in the Board of Commissioners Profiles section of this Annual Report.





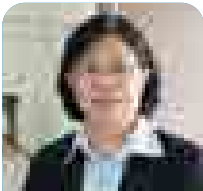
Yohanes Mandang

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Soa Siu, 18 Januari 1964 / Berusia 61 tahun per Desember 2024
- Riwayat Pendidikan : Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Papua (1988)
- Pengalaman Kerja : Anggota Komite Dewan Komisaris (2021-sekarang)
- Sertifikasi: Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV (empat) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017)
- Dasar Hukum Pengangkatan :
Surat Keputusan Direksi No.12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Periode Jabatan : Periode II
- Masa Jabatan : Periode 2024-2028
- Jabatan Rangkap: Tidak Ada

Member of the Risk Oversight Committee (Independent Party)

- Nationality: Indonesian Citizen
- Domicile: Jayapura
- Place and Date of Birth/Age: Soa Siu, January 18, 1964 / 61 years old as of December 2024
- Educational Background: Bachelor's Degree (S1) in Management Economics, Faculty of Economics, Cenderawasih University, Papua (1988)
- Professional Experience: Member of the Board of Commissioners Committee (2021–present)
- Certification: Risk Management Certification Level IV from the Risk Management Certification Agency (2017)
- Legal Basis of Appointment:
Board of Directors Decree No. 12.1/DIR-BPD/III/2025 dated March 3, 2025, regarding the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Committees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Term of Office: Second Term
- Tenure Period: 2024–2028
- Concurrent Positions: None



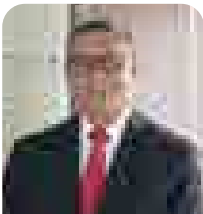
Anita Erari

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Kaonda, 14 Juni 1968 / Berusia 57 tahun Per Desember 2025
- Pendidikan : Doktor (S3) Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, (2013)
- Sertifikasi : Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari BSMR (2025)
- Dasar Hukum Pengkatan :
Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Periode Jabatan : Periode I
- Jabatan Rangkap: Tidak Ada

Member of the Risk Oversight Committee (Independent Party)

- Citizenship: Indonesian Citizen
- Domicile: Jayapura
- Place and Date of Birth/Age: Kaonda, June 14, 1968 / 57 years old as of December 2025
- Education: Doctorate (S3) in Economics, Brawijaya University, Malang, (2013)
- Certification: Level 6 Risk Management Certification from BSMR (2025)
- Legal Basis for Appointment:
Board of Directors Decree Number: 12.1/DIR-BPD/III/2025 dated March 3, 2025 concerning the Appointment of the Chairperson and Members of the Board of Commissioners Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Term of Office: Term I
- Concurrent Positions: None



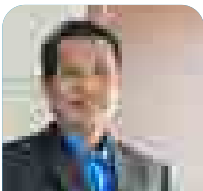
Daud Sukanalu Sitepu

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia • Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Sukatendel, 10 Februari 1968 / Berusia 57 Tahun Per Desember 2025
- Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) Manajemen Pemasaran, Universitas Yapis Papua, Jayapura, 2010
- Sertifikasi : Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari BSMR (2025)
- Dasar Hukum Pengkatan :
Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Periode Jabatan : Periode I
- Jabatan Rangkap: Tidak Ada

Member of the Risk Oversight Committee (Independent Party)

- Citizenship: Indonesian Citizen • Domicile: Jayapura
- Place and Date of Birth/Age: Sukatendel, February 10, 1968 / 57 Years Old as of December 2025
- Education: Master's Degree (S2) in Marketing Management, Yapis University of Papua, Jayapura, 2010
- Certification: Level 6 Risk Management Certification from BSMR (2025)
- Legal Basis for Appointment:
Board of Directors' Decree Number: 12.1/DIR-BPD/III/2025, dated March 3, 2025, concerning the Appointment of the Chairperson and Members of the Board of Commissioners Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Term of Office: Period I
- Concurrent Positions: None



Yunus Bunga Todingallo

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia • Domisili : Jayapura
- Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Labo Toraja, 06 Juli 1963 / Berusia 62 Tahun Per Desember 2025
- Pendidikan : Sarjana (S1) Sosial Politik, Universitas Cenderawasih, Manokwari (1987)
- Sertifikasi : Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, BSMR (2025)
- Dasar Hukum Pengkatan :
Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Periode Jabatan : Periode I
- Jabatan Rangkap: Tidak Ada

Member of the Risk Oversight Committee (Independent Party)

- Citizenship: Indonesian Citizen • Domicile: Jayapura
- Place and Date of Birth/Age: Labo Toraja, July 6, 1963 / 62 Years Old as of December 2025
- Education: Bachelor's Degree (S1) in Social and Political Sciences, Cenderawasih University, Manokwari (1987)
- Certification: Level 6 Risk Management Certification, BSMR (2025)
- Legal Basis for Appointment:
Board of Directors Decree Number: 12.1/DIR-BPD/III/2025, dated March 3, 2025, concerning the Appointment of the Chairperson and Members of the Board of Commissioners Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Term of Office: Term I
- Concurrent Positions: None



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Victor Abraham Abaidata	Ketua	Sarjana Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura	- Staf Gubernur Papua (2006 - 2011) - Analisis Daerah Desk Otsus Papua atau Pokja Polhukam Kemenkopolhukam Republik Indonesia (2019 - 2023) - Staf Khusus Pj. Gubernur Papua Barat (2022 - 2023) - Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (2024 - 2028)
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota	- Pasca Sarjana bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya - Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura	- Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (2016) - Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua (2014-2022) - Analisis kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Papua (2020) - Plt. Asisten Bidang Umum SETDA Provinsi Papua (2021-2022) - Asisten Bidang Umum SETDA Provinsi Papua (2022-sekarang)
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota	- Doktor program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar - Pasca Sarjana (S2) bidang Kebijakan Publik MAP dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta - Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura	- Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (2014-sekarang). - Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (2011-2014). - Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura (2008-2010). - Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat (Irian Jaya Barat) (2003- 2008). - Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten Manokwari (1994-2001).
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua	- Strata Dua (MM) Manajemen Strata II/Internasional, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya-Jakarta - Sarjana Ekonomi (SE) Fisip/ Ekonomi Manajemen Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura - Sarjana Muda (BA) FIHES/ Tataniaga Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura	- Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024) - Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa (2021-2024) - Anggota Pokja Agama, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017) - Ketua PURT, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017)
Dortheis Sesa*	Anggota	Sarjana Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Cenderawasih Jayapura	- Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan (2009-2015). - Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2005-2009). - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (2001-2004). - Kepala bagian penyusunan dan pengendalian Program Setda Kabupaten Manokwari (1998-2001). - Kepala bagian Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari (1995-1998).
Anita Erari	Anggota	Doktor (S3) Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, (2013)	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura (1996 - sekarang)
Daud Sukanalu Sitepu	Anggota	Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) Manajemen Pemasaran, Universitas Yapis Papua, Jayapura, 2010	Pemimpin Departemen Pengembangan Non Core Banking System, Divisi Pengelola Dana dan Jasa, PT Bank Pembangunan Daerah Papua (2023)
Yunus Bunga Todingallo	Anggota	Sarjana (S1) Sosial Politik, Universitas Cenderawasih, Manokwari (1987)	Direktur Keuangan Dana Pensiun Bank Papua (2020)

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Risk Oversight Committee

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Yohanes Mandang	Anggota	• Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Papua	• Anggota Komite Dewan Komisaris (2021-sekarang)

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya dengan mempertahankan kepentingan Bank, tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Hal ini tercermin dari struktur keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) anggota non-Komisaris dari pihak independen.

INDEPENDENCE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee performs its duties, responsibilities, and authorities in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations. All members of the Risk Oversight Committee have fulfilled the independence criteria and are able to carry out their duties while upholding the interests of the Bank, free from undue influence.

This is reflected in its composition, which consists of 1 (one) Chairperson who is an Independent Commissioner, 2 (two) members who are Commissioners, and 2 (two) non-Commissioner members from independent parties.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee Independence Table										
Aspek Independensi	Victor Abraham Abaidata	Yorgemes Derek Hegemur	Nataniel Dominggus Mandacan	Arobi Ahmad Aituarauw	Dortheis Sesa	Yohanes Mandang	Anita Erari	Daud Sukanalu Sitepu	Yunus Bunga To-dingallo	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Does not have any management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Does not have any share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Not serving as a political party administrator, official or government official



RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
 - sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
 - dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
 - dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta unit kerja lain dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
- Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
 - musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda, dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

RISK MONITORING COMMITTEE MEETING POLICY

The implementation and procedures of Risk Monitoring Committee meetings are as follows:

- Committee meetings are held as follows:
 - according to the Bank's needs and/or at least once every 3 (three) months;
 - may only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the Committee members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party who is not a Commissioner;
 - chaired by the Committee Chair or a Committee member from the Independent Commissioners if the Committee Chair is unable to attend; and
 - may invite SKMR, SKK, SKL, SKTI, other work units, and other parties as needed as resource persons.
- Decisions at Committee Meetings are made based on:
 - deliberation and consensus, and in the event that deliberation and consensus cannot be reached, decisions are made by majority vote;
 - In the event that decisions are made by voting and there is an equal number of votes, the decision is made by a majority vote; and
 - Any dissenting opinions arising from Committee Meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting, along with the reasons for the dissenting opinions.
- Committee Meetings are documented in Minutes of Meeting, which are signed by all Committee members present and submitted to the Board of Commissioners.
- Attendance by Committee members at meetings is reported in the Committee's quarterly and annual reports in the Annual Report on Corporate Governance.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2025, the dates, agendas, and participants of Risk Monitoring Committee meetings are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko-Risk Oversight Committee Meeting Agenda Table

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Meeting Agenda
1	23 Januari 2025	Reviu Tingkat Kesehatan Bank Semester 2	Ketua dan anggota komite	Review of Bank Soundness Level – Semester II



Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko-Risk Oversight Committee Meeting Agenda Table

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Meeting Agenda
2	24 Februari 2025	1. Evaluasi & Realisasi Pemberian Kredit Triwulan IV Tahun 2024 2. Program dan Rencana Realisasi Kredit Trw I Tahun 2025. 3. Evaluasi penagihan kredit hapus buku, 4. Laporan Perkembangan Asset Ayda	Ketua dan anggota komite	1. Evaluation and Realization of Credit Disbursement for the Fourth Quarter of 2024 2. Credit Realization Program and Plan for the First Quarter of 2025. 3. Evaluation of written-off credit collections, 4. Ayda Asset Development Report
3	24 Februari 2025	1. Laporan APU-PPT Semester II Tahun 2024 Laporan Kepatuhan Semester II dan Perkembangan Pengkinian Kebijakan Bank Tahun 2025 2. lain-lain	Ketua dan anggota komite	1. Laporan APU-PPT Semester II Tahun 2024 Laporan Kepatuhan Semester II dan Perkembangan Pengkinian Kebijakan Bank Tahun 2025 2. lain-lain
4	14 Mei 2025	Tindaklanjuti Penanganan Insiden Fraud Anomali Transaksi Menggunakan Kanal QRIS	Ketua dan anggota komite	Follow-up on Fraud Incident Handling related to Anomalous Transactions via QRIS Channel
5	23 Mei 2025	Tentang insiden Fraud Anomali Transaksi Menggunakan Kanal QRIS	Ketua dan anggota komite	Discussion on Fraud Incident involving Anomalous Transactions via QRIS Channel
6	24 Juli 2025	Pembahasan tentang Laporan APU - PPT dan PPPSPM Semester I (Petama) Tahun 2025	Ketua dan anggota komite	Discussion on AML-CFT (APU-PPT) and PPPSPM Report for Semester I 2025
7	24 Juli 2025	Dampak Fraud Transaksi Anomali M-Banking QRIS Terhadap Penghimpunan DPK Bank Papua	Ketua dan anggota komite	Impact of Anomalous QRIS Mobile Banking Fraud Transactions on Third-Party Funds (DPK) Mobilization
8	11 Agustus 2025	Realisasi Rencana Bisnis Bank Papua Semester I Tahun 2025	Ketua dan anggota komite	Realization of Bank Papua Business Plan for Semester I 2025
9	13 Agustus 2025	1. Laporan Perkembangan Perkreditan Semester I Tahun 2025, 2. Isu-isu terkini terkait penyaluran Kredit UMK, 3. Penyiapan Kebijakan Intern Format Analisis Kredit UMK, 4. Pembagian tugas Antara AO Produktif dan Konsumer, 5. Kajian atas Penyusunan Kebijakan Intern Penerapan CKPN Individu. 6. Target Pertumbuhan Kredit pada 6 Provinsi di Tanah Papua	Ketua dan anggota komite	1. Credit Development Report for the First Half of 2025, 2. Current Issues Related to MSE Credit Distribution, 3. Preparation of Internal Policies for the MSE Credit Analysis Format, 4. Division of Duties Between Productive and Consumer AOs, 5. Review of the Preparation of Internal Policies for the Implementation of Individual Allowance for Implementation of Credit Losses. 6. Credit Growth Targets in 6 Provinces in Papua
10	30 September 2025	Kasus Fraud Penyaluran Dana Desa Kabupaten Lanny Jaya	Ketua dan anggota komite	Fraud Case in Village Fund Disbursement in Lanny Jaya Regency
11	30 Oktober 2025	Kasus Fraud Penyaluran Dana Desa Kabupaten Lanny Jaya	Ketua dan anggota komite	Fraud Case in Village Fund Disbursement in Lanny Jaya Regency
12	30 Oktober 2025	1. Laporan Progress Tindaklanjuti Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) , dan Tata Kelola Security System TI Bank Papua, 2. Laporan Progress Tindaklanjuti Anomali Transaksi QRIS/ MBANKING, 3. Laporan Perkembangan Penerapan Risiko syber, TI, Risiko Iklim dan Risiko Outsourshing	Ketua dan anggota komite	1. Progress Report on Follow-up on Cyber Resilience and Security (KKS) and IT Security System Governance at Bank Papua. 2. Progress Report on Follow-up on QRIS/MBankING Transaction Anomalies. 3. Progress Report on Implementation of Cyber, IT, Climate, and Outsourcing Risks.
13	24 November 2025	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Ketua dan anggota komite	Sustainable Finance Action Plan
14	Kamis 11 Desember 2025	1. Evaluasi Kerjasama Bank Papua dengan PT Jojonomi 2. Evaluasi Rencana Kerja dan Progres Penerapan Aplikasi Human Capital Manajemen Sistem	Ketua dan anggota komite	1. Evaluation of Bank Papua's Cooperation with PT Jojonomi 2. Evaluation of the Work Plan and Progress of the Implementation of the Human Capital Management System Application



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Frequency and Attendance Rate of Risk Oversight Committee Meetings

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee conducted 14 (fourteen) meetings. The attendance rate of each member of the Risk Oversight Committee is as follows:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko			
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	
		Jumlah Kehadiran	Presentase
Victor Abraham Abaidata	14	14	100%
Yorgemes Derek Hegemur		14	100%
Nataniel Dominggus Mandacan		14	100%
Arobi Ahmad Aituarauw		14	100%
Dortheis Sesa*		14	100%
Yohanes Mandang		14	100%

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Victor Abraham Abaidata	Ketua	Pelatihan yang diikuti selama tahun 2025 dapat dilihat pada sub bab Dewan Komisaris pada laporan tahunan		
Yorgemes Derek Hegemur	Anggota			
Nataniel Dominggus Mandacan	Anggota			
Arobi Ahmad Aituarauw	Ketua			
Dortheis Sesa*	Anggota			
Yohanes Mandang	Anggota	Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Jum, 09 Mei 2025, Eastparc Hotel Yogyakarta	Multi Talenta Consulting
		POJK 15 Tahun 2024 Dalam Menjaga Tata Kelola Bisnis Bank	Sen, 28 Jul 2025, Ashley Wahid Hasyim, Jakarta"	Pt. Sinergi Indonesia Pintar
		Workshop Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teoritik, Regulasi OJK Dan Panduan Pratik	Kam, 09 Okt 2025, Four Points By Sheraton Jakarta, Bali	Pt. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm) & LSPP
		Workshop Pojk 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Umkm	Kam, 18 Des 2025, Hotel Artotel Thamrin Jakarta	Multi Talenta Consulting



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Daud Sukanalu Sitepu	Anggota	Ext - Workshop Pojk 19 Tahun 2025kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM	18-12-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ext-Workshop Rbb Pendekatan Teoritikal, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratikal	09-10-2025	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm)
		Ujian Sertifikasi Manajemen RisikoJenjang 6	23-08-2025	BSMR
		Ext-Pembekalan Uji KompetensiSertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	21-08-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ext - Pojk 15 Tahun 2024 Dalam Menjaga Tata Kelola Bisnis Bank	28-07-2025	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09-05-2025	PT. Multi Talenta Consulting
Yunus Bunga Todingallo	Anggota	Ext - Workshop Pojk 19 Tahun 2025kemudahan Akses Pembiayaan Kepadaumkm	18-12-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ext-Workshop RBB Pendekatan Teoritikal, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratikal	09-10-2025	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm)
		Ujian Sertifikasi Manajemen RisikoJenjang 6	23-08-2025	BSMR
		Ext-Pembekalan Uji KompetensiSertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	21-08-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ext - Pojk 15 Tahun 2024 Dalam Menjaga Tata Kelola Bisnis Bank	28-07-2025	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09-05-2025	PT. Multi Talenta Consulting
Anita Erari		Ext-Workshop Rbb Pendekatan Teoritikal, Regulasi Ojk Dan Panduan Pratikal	09-10-2025	PT. Farash Inarah Radhika Mahaprana (Firm)
		Ujian Sertifikasi Manajemen RisikoJenjang 6	23-08-2025	BSMR
		Ext-Pembekalan Uji KompetensiSertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	21-08-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ext - Pojk 15 Tahun 2024 Dalam Menjaga Tata Kelola Bisnis Bank	28-07-2025	PT. Sinergi Indonesia Pintar
		Ujian Sertifikasi Manajemen RisikoJenjang 5	26-07-2025	BSMR
		Ext-Pembekalan Sertifikasi Manajemenrisiko Jenjang 5	24-07-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Ujian Sertifikasi Manajemen RisikoJenjang 4	21-06-2025	BSMR
		IHT - Pembekalan Sertifikasi Manajemenrisiko Jenjang 4	19-06-2025	PT. Multi Talenta Consulting
		Sistematika Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	09-05-2025	PT. Multi Talenta Consulting

*Wafat pada tanggal 15 Desember 2025

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Komite Pemantau Risiko bertugas mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan strategi bisnis dan profil risiko Bank, serta memantau efektivitas penerapannya. Komite menelaah laporan profil risiko, memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring atas seluruh jenis risiko.

Selain itu, Komite mengawasi kepatuhan terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta memantau tindak lanjut atas temuan terkait risiko. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai dasar penguatan tata kelola dan ketahanan risiko Bank.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE IN 2025

The Risk Oversight Committee is responsible for evaluating the alignment between risk management policies and the Bank's business strategy and risk profile, as well as monitoring the effectiveness of their implementation. The Committee reviews risk profile reports and ensures the adequacy of processes for identifying, measuring, mitigating, and monitoring all types of risks. In addition, the Committee oversees compliance with the Bank's risk appetite and risk tolerance and monitors follow-up actions on risk-related findings. The results of these evaluations are reported to the Board of Commissioners as a basis for strengthening governance and enhancing the Bank's risk resilience.



Organ dan Komite di Bawah Direksi

Organs and Committees Under the Board of Directors

Sekretaris Perusahaan adalah organ Direksi yang memiliki peran penting dalam memastikan komunikasi yang lancar antara Bank dan para pemangku kepentingan. Peran ini mencakup penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan berkontribusi dalam menciptakan citra positif perusahaan yang konsisten melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif.

Efisiensi komunikasi antara Bank dan pemangku kepentingan sangat penting untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik. Fungsi komunikasi adalah salah satu aspek utama dari peran Sekretaris Perusahaan. Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan terkait dengan kondisi Bank dan memberikan akses terhadap informasi relevan lainnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga mengingatkan Direksi tentang tanggung jawab mereka dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Divisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab atas akuntabilitas serta tanggung jawab Direksi terkait Kesekretariatan, Kehumasan, dan Protokoler di Bank Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perbankan dan kegiatan sosial perusahaan. Laporan pelaksanaan tugas Divisi Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/KEPEG/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, struktur organisasi di unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary is an organ of the Board of Directors that plays a vital role in ensuring effective communication between the Bank and its stakeholders. This role includes the timely and accurate dissemination of information to all stakeholders. The Corporate Secretary contributes to building a consistent and positive corporate image through the management of effective communication programs.

Efficient communication between the Bank and its stakeholders is essential for the implementation of Good Corporate Governance. Communication functions constitute a key aspect of the Corporate Secretary's role. The primary responsibility of the Corporate Secretary is to provide information services required by stakeholders regarding the Bank's condition and to facilitate access to other relevant information. In addition, the Corporate Secretary also reminds the Board of Directors of their responsibilities in implementing Good Corporate Governance.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE CORPORATE SECRETARY

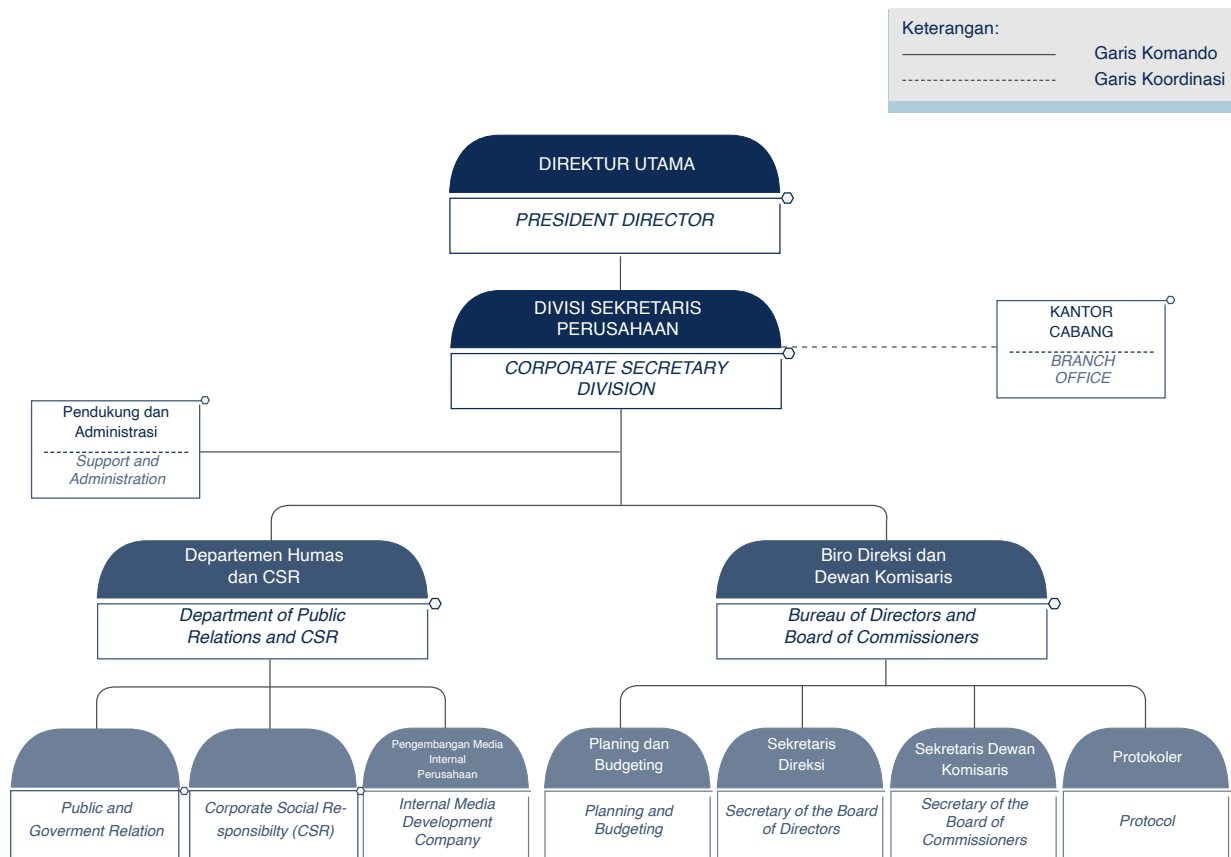
The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary Division is under the President Director and is responsible for supporting the accountability and responsibilities of the Board of Directors in the areas of corporate secretariat, public relations, and protocol functions at Bank Papua, in accordance with applicable laws and regulations, particularly in the banking sector and corporate social activities. Reports on the implementation of the Corporate Secretary Division's duties are submitted to the Board of Commissioners.

Based on the Board of Directors Decree No. 60/KEPEG/VII/2024 dated July 8, 2024, regarding the Organizational Structure and Job Descriptions of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, the organizational structure of the Corporate Secretary Division is as follows:





FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Hubungan Pemegang Saham/*Government Relation*
 - Melakukan pengkinian Daftar Pemegang Saham dan kepemilikan sahamnya di Bank Papua;
 - Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan acara RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik;
 - Menetapkan agenda dan materi terkait penyelenggaraan RUPS untuk memastikan kesesuaian materi dengan peraturan yang berlaku.
2. Membangun Citra dan Reputasi Perusahaan
 - Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi program *Corporate Communication* untuk publik/umum dan media massa agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik di mata pemangku kepentingan.

FUNCTIONS, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The functions, duties, and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. *Shareholder Relations / Government Relations*
 - Updating the Shareholder Register and share ownership records of Bank Papua;
 - Organizing the General Meeting of Shareholders (GMS);
 - Overseeing all aspects of the GMS implementation to ensure smooth execution;
 - Determining the agenda and materials for the GMS to ensure compliance with applicable regulations.
2. *Building Corporate Image and Reputation*
 - Establishing and implementing Corporate Communication strategies and programs for the public and mass media to maintain the Company's reputation among stakeholders.



3. Membangun Komunikasi Eksternal

- Sebagai mediator atau perwakilan antara Bank dengan lembaga atau institusi eksternal;
- Menetapkan strategi dan implementasi publikasi untuk publik, investor dan masyarakat agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik;
- Menetapkan strategi dan implementasi iklan di media massa agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik;
- Mengelola isi situs *Website* Bank Papua untuk memastikan ketersediaan data secara lengkap serta kemudahan akses bagi publik, investor dan masyarakat.

4. Membangun Komunikasi Internal

- Sebagai mediator antara manajemen kepada pegawai, dan Direksi kepada komisaris;
- Mengelola media komunikasi internal (majalah dan *Internet/portal*) untuk berkontribusi dalam penciptaan iklim kerja yang baik;
- Mengarahkan event internal perusahaan untuk terlaksananya event dengan baik;
- Mengarahkan dokumentasi perusahaan untuk memastikan ketersediaan data base dokumentasi perusahaan.

5. Pengelolaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

6. Administrasi Kesekretariatan Perusahaan

- Penanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kesekretariatan di Dewan Komisaris;
- Penanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kesekretariatan di Direksi;
- Mengarahkan administrasi kesekretariatan perusahaan untuk memastikan ketersediaan dokumen secara lengkap termasuk penyampaian materi rapat Direksi maupun Dewan Komisaris;

7. Protokoler

- Penanggungjawab atas kegiatan Protokoler berkaitan dengan jadwal kegiatan Direksi, mengkoordinir acara-acara yang berhubungan dengan Direksi dan pihak internal/eksternal/*stakeholder*.

3. *Managing External Communication*

- *Acting as a liaison or representative between the Bank and external institutions;*
- *Developing and implementing publication strategies for the public, investors, and society to maintain the Company's reputation;*
- *Developing and implementing advertising strategies in mass media;*
- *Managing the content of Bank Papua's website to ensure complete data availability and ease of access for the public and investors.*

4. *Managing Internal Communication*

- *Acting as a liaison between management and employees, and between the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
- *Managing internal communication media (magazines and intranet/portal) to support a conducive working environment;*
- *Overseeing internal corporate events to ensure proper execution;*
- *Managing corporate documentation to ensure the availability of a comprehensive documentation database.*

5. *Management of Corporate Social Responsibility (CSR) Programs*6. *Corporate Secretariat Administration*

- *Responsible for secretariat management activities of the Board of Commissioners;*
- *Responsible for secretariat management activities of the Board of Directors;*
- *Overseeing corporate secretariat administration to ensure the completeness of documents, including the delivery of materials for Board of Directors and Board of Commissioners meetings.*

7. *Protocol Functions*

- *Responsible for protocol activities related to the scheduling of Board of Directors' activities and coordinating events involving the Board of Directors with internal and external stakeholders.*



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY

MATHEUS ALTHIBERG MUAL

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary Division



Warga negara Indonesia, berdomisili di Jayapura, dengan usia 53 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih Gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "Umel Mandiri", Jayapura (2011).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Riwayat Jabatan

1. Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan SK Direksi No. 60/KEPEG/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.

2. Pengalaman Kerja

1. Memulai karir di Bank Papua sebagai pegawai sejak 01 September 1995;
2. Pemimpin Kantor Cabang Makassar (2016-2019);
3. Pemimpin Departemen Bisnis Kredit Korporasi (2019-2021);
4. Pemimpin Kantor Cabang Sorong (2021-2023); dan
5. Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura (2023-2024).

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, aged 53 as of December 2025.

Educational Background

Obtained a Bachelor of Law degree from "Umel Mandiri" School of Law, Jayapura (2011).

Certification

Risk Management Certification Level 6 from the Risk Management Certification Agency.

Career History

1. Legal Basis of Appointment

Serving as Corporate Secretary since August 20, 2024, based on Board of Directors Decree No. 60/KEPEG/VII/2024 dated July 8, 2024.

2. Professional Experience

1. Started career at Bank Papua as an employee on September 1, 1995;
2. Branch Manager of Makassar Branch (2016-2019);
3. Head of Corporate Credit Business Department (2019-2021);
4. Branch Manager of Sorong Branch (2021-2023); and
5. Branch Manager of Jayapura Main Branch (2023-2024).

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI CORPORATE SECRETARY

Sepanjang tahun 2025, *Corporate Secretary* Bank Papua telah berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan kompetensi, termasuk pelatihan, workshop, konferensi, dan seminar. Rincian program-program tersebut disajikan dalam tabel berikut:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Throughout 2025, the *Corporate Secretary* of Bank Papua participated in various competency development programs, including training, workshops, conferences, and seminars. The details of these programs are presented in the following table:

Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Implementation	Penyelenggara Organizer
External Training	Continuous of CSR Based on ISO 26000	03 - 04 Juni 2025 Erian Hotel - Jakarta	PT. Calamus Rotana Cattail
External Training	Corporate Secretary Excellence	'22 - 23 Oktober 2025 Ashley Hotel Wahid Hasyim - Jakarta	The Millennials Intitute
External Training	Personal & Interpersonal Leadership, Strategic Planning & Budgeting for Corporate Secretary	'21 - 22 Mei 2025 Dafam Enkadeli Hotel - Jakarta	The Millennials Intitute
External Training	PR & Government Relation Dalam Industri Perbankan	'23 -24 Juli 2025, Jakarta	PT. Expert Mitra Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi yang diemban, yaitu sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2025

In 2025, the *Corporate Secretary* carried out the following duties and responsibilities in accordance with his/her assigned functions:



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

1. Departemen Sekretaris dan Protokoler (Pendukung dan Administrasi)
 - Mendokumentasikan ketentuan / SK, SE, PKS dan Surat Kuasa Khusus Direksi, Resume Rapat Direksi, Arahan Direksi (Briefing pagi bersama) dan surat keluar Direksi dalam bentuk file elektronik.
 - Upload Soft copy ketentuan-ketentuan (SK, SE, POJK, PBI, PERMEN, PERDA, dll) Arahan Briefing Direksi dan Kegiatan Penting Direksi ke dalam sistem PORTAL Bank Papua.
 - Mempersiapkan Rapat Direksi.
 - Membuat jadwal perjalanan Komisaris/ Direksi secara periodik, sebanyak minimal 12 kali (Menyesuaikan).
 - Melakukan *morning briefing*.
 2. Departemen Humas, *Public & Government Relation*, Pengembangan Media Internal Perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR)
 - Mempersiapkan dan mengelola *Business Meeting* sebanyak 1 kali.
 - Membantu dan mempersiapkan RUPS Tahunan/LB minimal 2 Kali.
 - Membantu mempersiapkan acara penting (PKS, MoU, Serah Terima Jabatan Pimpinan, dan lain-lain) yang dilakukan oleh Divisi.
 - Menanggapi Pengaduan di Koran Maupun *Website*.
 - Mengadakan *Pers Release/* Konferensi Pers.
 - Melaksanakan Media Monitoring.
 - Membuat program pelaksanaan CSR Kemitraan dan CSR Bina Lingkungan dari Total Anggaran RBB 2024.
 - Mengupdate *content* portal & *Website* Bank Papua (SBDK, ALCO, berita seputar Bank Papua, berita ekonomi dan bisnis, suku bunga BI, company profile, GCG).
 - Memuat publikasi kegiatan perusahaan, Direksi, dan ucapan Iklan kemitraan di media.
 - Mengagendakan kunjungan kerja Komisaris/ Direksi ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Tanah Papua dalam setahun,
 - Monitoring / Koordinasi secara terus menerus dengan semua Kantor Cabang Bank Papua terkait penyertaan dan pemenuhan Setoran Modal.
 3. Kelompok Sekretaris Dewan Komisaris
 - Mempersiapkan RUPS Tahunan/LB minimal 2 Kali,
 - Mempersiapkan Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris,
 - Mempersiapkan Jadwal Perjalanan Dinas Komisaris dan Komite Komisaris,
 - Rapat Komite yang berkoordinasi dengan Divisi Terkait,
1. *Secretary and Protocol Department (Support and Administration)*
 - *Documented provisions/SKs, SEs, PKS (Partnership Agreements), Special Power of Attorney for the Board of Directors, Directors' Meeting Resumes, Directors' Directives (Joint Morning Briefings), and outgoing letters from the Board of Directors in electronic form.*
 - *Uploaded soft copies of provisions (SKs, SEs, POJK, PBI, PERMEN, PERDA, etc.), Directors' Briefing Directives, and Important Directors' Activities into the Bank Papua PORTAL system.*
 - *Prepared for Board of Directors Meetings.*
 - *Created periodic travel schedules for Commissioners/ Directors, a minimum of 12 times (adjustable).*
 - *Conducted morning briefings.*
 2. *Public Relations, Public & Government Relations, Internal Company Media Development, and Corporate Social Responsibility (CSR) Department*
 - *Prepared and managed one Business Meeting.*
 - *Assisted in preparing for at least two Annual/ Extraordinary General Meetings of Shareholders (AGMS).*
 - *Assisted in preparing important events (PKS, MoU, Leadership Handover Ceremony, etc.) held by the Division.*
 - *Responded to Complaints in Newspapers and on the Website.*
 - *Conducted Press Releases/Press Conferences.*
 - *Conducted Media Monitoring.*
 - *Developed CSR Partnership and Community Development programs from the 2024 Total Business Plan Budget (RBB).*
 - *Updated Bank Papua's portal and website content (SBDK, ALCO, news about Bank Papua, economic and business news, BI interest rates, company profile, GCG).*
 - *Published company activities, the Board of Directors, and partnership advertisements in the media.*
 - *Scheduling annual working visits by Commissioners/ Directors to Provincial, Regency/City Governments in Papua.*
 - *Continuous monitoring/coordination with all Bank Papua Branch Offices regarding capital participation and fulfillment.*
 3. *Board of Commissioners Secretary Group*
 - *Preparing at least two Annual/Extraordinary General Meetings of Shareholders.*
 - *Preparing Joint Meetings of Directors and Commissioners.*
 - *Preparing Travel Schedules for Commissioners and Commissioners Committees.*
 - *Coordinating Committee Meetings with Relevant Divisions.*



Divisi Audit Internal

Internal Audit Division

PERAN DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan bagian integral dari struktur pengendalian internal Bank Papua yang berfungsi sebagai *Third Line of Defense* dalam kerangka pengelolaan risiko. Sebagai unit kerja independen di bawah Direksi, Divisi Audit Internal (DAI) bertugas melaksanakan kegiatan *Assurance* dan *Consulting* secara objektif untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan efektivitas operasional, dan memastikan keberlanjutan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal Bank Papua mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Direksi dan manajemen bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik, risiko dikelola secara efektif, dan kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

DASAR HUKUM AUDIT INTERNAL BANK PAPUA

Kedudukan Divisi Audit Internal (DAI) Bank Papua telah ditetapkan secara jelas dalam struktur organisasi, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan fungsi audit yang efektif, independen, dan transparan. Dasar hukum yang mengatur keberadaan dan operasional DAI meliputi peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan pengendalian internal dalam mendukung pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Papua No.58/DIR-BPD/IX/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Piagam Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Papua No. 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Matriks Perubahan Struktur Organisasi dan Job Profile PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

ROLE AND FUNCTION OF INTERNAL AUDIT

Internal Audit is an integral part of Bank Papua's internal control structure, functioning as the Third Line of Defense within the risk management framework. As an independent unit under the Board of Directors, the Internal Audit Division (IAD) is responsible for conducting objective assurance and consulting activities to provide added value, enhance operational effectiveness, and ensure the sustainability of Good Corporate Governance (GCG).

The scope of Internal Audit at Bank Papua includes the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of internal control systems, risk management, and corporate governance. Its objective is to provide assurance to the Board of Directors and management that internal controls are functioning effectively, risks are properly managed, and operations are conducted in accordance with established policies and applicable regulations.

LEGAL BASIS OF INTERNAL AUDIT AT BANK PAPUA

The position of the Internal Audit Division (IAD) within Bank Papua's organizational structure has been clearly defined to ensure the effective, independent, and transparent implementation of the audit function. The legal basis governing the existence and operations of the IAD includes the following regulations:

1. *Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019, concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, which serves as the primary reference for executing internal audit functions in line with Good Corporate Governance principles.*
2. *Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2023 dated September 14, 2023, concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, emphasizing the importance of supervision and internal control in supporting risk management and corporate governance.*
3. *Board of Directors Decree of Bank Papua No. 58/DIR-BPD/IX/2022 dated September 6, 2022 concerning the Establishment of the Internal Audit Charter of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.*
4. *Board of Directors Decree of Bank Papua No. 67/DIR-BPD/X/2024 dated October 21, 2024, concerning the Organizational Structure Change Matrix and Job Profile of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.*



PROFIL PEMIMPIN DIVISI AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT DIVISION LEADER PROFILE

BANG YUDI POLUAN

Pemimpin Divisi Audit Internal-Head of Internal Audit Division



Kewarganegaraan:

Indonesia

Domisili:

Jayapura, Papua, Indonesia

Usia:

54 tahun

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan:

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal sejak 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/KEPEG/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Mutasi Pegawai.

Rangkap Jabatan:

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Nationality:

Indonesian

Domicile:

Jayapura, Papua, Indonesia

Age:

54 years

Career History

Legal Basis of Appointment:

Serving as Head of the Internal Audit Division since June 14, 2023, based on Board of Directors Decree No. 061/KEPEG/VI/2023 dated June 8, 2023, concerning Employee Transfer.

Concurrent Positions:

Does not hold any concurrent positions in other companies or institutions.

Pengalaman Kerja:

Memulai karir di Bank Papua sebagai Pegawai sejak 12 Februari 1996, dengan jabatan penting yang pernah diemban sebagai berikut:

- Kepala Departemen Pendukung Operasi Kantor Cabang Biak (2006-2008)
- Kepala Departemen Layanan & Konsumer Kantor Cabang Biak (2009)
- Kepala Departemen Pendukung Operasi Kantor Cabang Timika (2009-2011)
- Kepala Departemen Layanan dan Konsumer Kantor Cabang Timika (2011-2012)
- Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat & Komersial Kantor Cabang Utama Manokwari (2012-2013)
- Kepala Cabang Pembantu Supiori Kantor Cabang Biak (2013-2016)
- Senior Executive Auditor Umum (SKAI) Kantor Pusat (2017)
- Koordinator Teknis Divisi Audit Internal (2017-2019)
- Wakil Kepala Cabang Utama Manokwari (2019-2020)
- Quality Assurance Divisi Audit Internal (2020-2021)
- Koordinator Teknis Divisi Audit Internal (2021-2023)
- Pemimpin Divisi Audit Internal (2023 sampai dengan sekarang)

Riwayat Pendidikan:

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen dari Universitas Cendrawasih Jayapura pada tahun 1995. Tidak ada pernyataan independensi mengingat belum menjabat lebih dari 2 periode.

Sertifikasi:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari P3M
3. Sertifikasi Internal Audit dari YPIA
4. Sertifikasi QIA Lanjutan
5. Sertifikasi SQIA (Qualified Internal Auditor) yang berlaku hingga 19 Oktober 2024
6. Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 per tanggal 11 Juni 2024

Professional Experience:

Started his career at Bank Papua as an employee on February 12, 1996, and has held several key positions as follows:

- Head of Operations Support Department, Biak Branch Office (2006–2008)
- Head of Services & Consumer Department, Biak Branch Office (2009)
- Head of Operations Support Department, Timika Branch Office (2009–2011)
- Head of Services & Consumer Department, Timika Branch Office (2011–2012)
- Head of People's Economic Development & Commercial Department, Manokwari Main Branch Office (2012–2013)
- Head of Sub-Branch Office (Supiori), Biak Branch Office (2013–2016)
- Senior Executive Auditor, Internal Audit Work Unit (SKAI), Head Office (2017)
- Technical Coordinator, Internal Audit Division (2017–2019)
- Deputy Head of Manokwari Main Branch Office (2019–2020)
- Quality Assurance, Internal Audit Division (2020–2021)
- Technical Coordinator, Internal Audit Division (2021–2023)
- Head of Internal Audit Division (2023–present)

Educational Background:

Completed his Bachelor of Economics degree in Management from Cendrawasih University, Jayapura, in 1995. No declaration of independence has been made, as he has not served more than two terms.

Certification:

1. Level 6 Risk Management Certification from the Risk Management Certification Agency
2. Government Procurement Certification from P3M
3. Internal Audit Certification from YPIA
4. Advanced QIA Certification
5. SQIA (Qualified Internal Auditor) Certification valid until October 19, 2024
6. Banking Risk Management Certification Level 6 as of June 11, 2024



STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DIVISI AUDIT INTERNAL

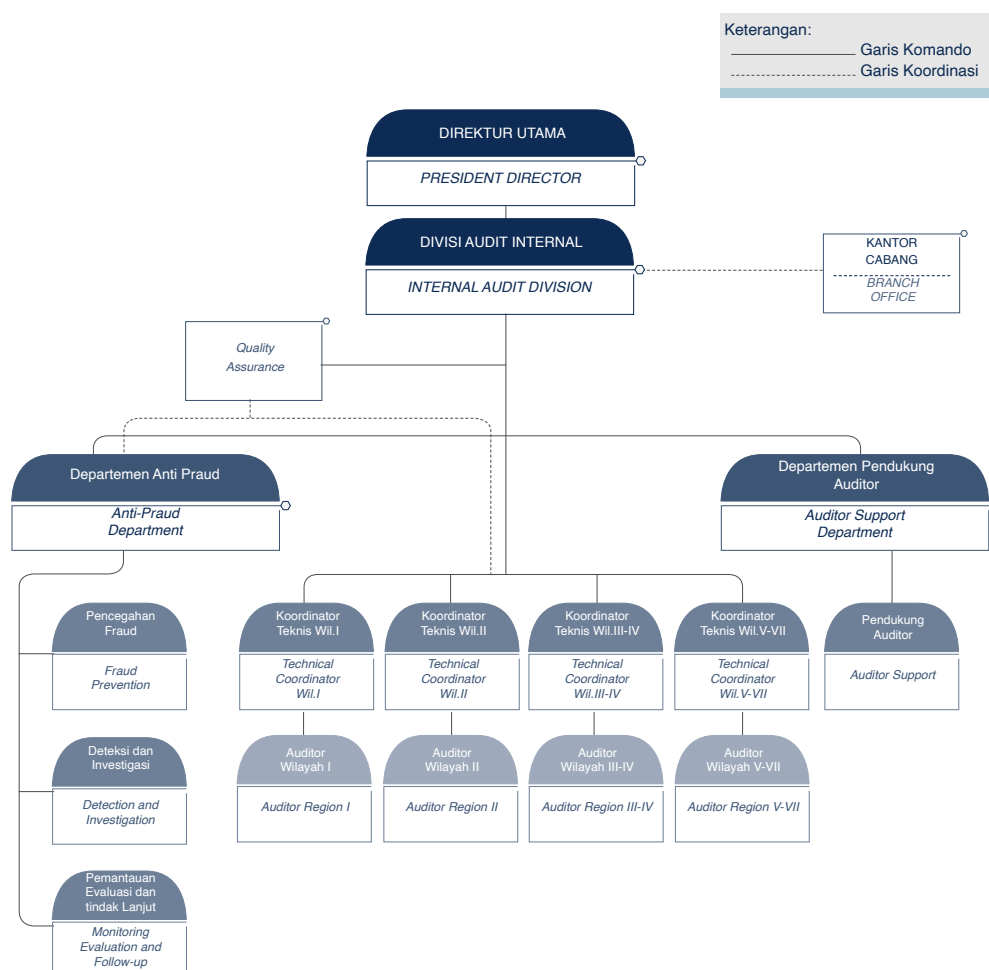
Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua berada langsung di bawah supervisi Direktur Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Divisi Audit Internal harus dipimpin oleh seorang yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin Fungsi Audit Internal yang independen dan objektif.
2. Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai pertimbangan dan alasan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian.
4. Pemimpin Divisi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris.

STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

The Internal Audit Division within the organizational structure of PT Bank Pembangunan Daerah Papua is positioned directly under the supervision of the President Director, with the following provisions:

1. The Internal Audit Division must be led by an individual who possesses adequate competence and capability to lead an independent and objective Internal Audit Function.
2. The Head of the Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee.
3. Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Division is reported to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with applicable regulations, along with the rationale and considerations for such actions.
4. The Head of the Internal Audit Division is directly accountable to the President Director and functionally accountable to the Board of Commissioners.



Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan audit internal, DAI Bank Papua telah melakukan perubahan pada struktur organisasi serta penyesuaian profil pekerjaan.

1. Departemen Anti *Fraud*:

Sebelumnya, Departemen Anti *Fraud* hanya membawahi dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok Pencegahan *Fraud*.
- b. Kelompok Deteksi dan Investigasi.

Setelah perubahan, ditambahkan satu kelompok baru, sehingga Departemen Anti *Fraud* kini terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok Pencegahan *Fraud*.
- b. Kelompok Deteksi dan Investigasi.
- c. Kelompok Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

2. Kelompok Auditor Wilayah I:

Sebelumnya, fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bawah Koordinasi Teknis Wilayah I hanya mencakup Auditor Umum.

Setelah perubahan, fungsi dan tugas baru telah ditambahkan, sehingga Kelompok Auditor Wilayah I kini mencakup:

- a. Auditor Teknologi Informasi.
- b. Auditor Treasury and International Banking.

Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat peran Divisi Audit Internal dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Fokus utama perubahan ini adalah pada pengawasan yang lebih mendalam terhadap pencegahan dan penanganan *Fraud*, serta pengawasan di sektor teknologi informasi dan perbankan internasional. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan risiko dan pengendalian internal Bank secara keseluruhan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEMIMPIN DIVISI AUDIT INTERNAL

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit, yang selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam proses pengangkatan, Pemimpin Divisi Audit Internal harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk memimpin fungsi Audit Internal secara independen dan objektif sesuai dengan POJK NO. 1/POJK.03/2019.

To enhance the effectiveness of supervision and internal audit functions, the Internal Audit Division (IAD) of Bank Papua has implemented changes to its organizational structure and job profiles.

1. Anti-Fraud Work Unit Department:

Previously, the Anti-Fraud Work Unit Department consisted of two groups:

- a. Fraud Prevention Group*
- b. Detection and Investigation Group*

Following the restructuring, an additional group has been established, and the department now consists of three groups:

- a. Fraud Prevention Group*
- b. Detection and Investigation Group*
- c. Monitoring, Evaluation, and Follow-up Group*

2. Regional Auditor Group I:

Previously, the functions, duties, and responsibilities under Regional Technical Coordination I only covered General Auditors.

After the restructuring, additional functions and responsibilities have been incorporated, and the Regional Auditor Group I now includes:

- a. Information Technology Auditor*
- b. Treasury and International Banking Auditor*

These changes were implemented to strengthen the role of the Internal Audit Division in supporting Good Corporate Governance. The primary focus of these enhancements is to reinforce oversight in fraud prevention and handling, as well as supervision in the areas of information technology and international banking. It is expected that these measures will add value to the Bank's overall risk management and internal control framework.

AUTHORITY FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT DIVISION

The Head of the Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and the Audit Committee, and such actions are subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK). In the appointment process, the Head of the Internal Audit Division must possess adequate competence and capability to lead the Internal Audit function independently and objectively, in accordance with POJK No. 1/POJK.03/2019.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan fungsi audit internal, Divisi Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau *Fraud* apabila diperlukan; dan
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara periodik.

Tugas, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemimpin Divisi Audit Internal:

- Memastikan pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Intern;
- Menentukan strategi pelaksanaan Divisi Audit Internal dan merumuskan prinsip-prinsip audit yang mencakup metodologi dan pengendalian mutu audit internal;
- Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal;
- Memastikan anggota Divisi Audit Internal mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
- Menyusun Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta memastikan realisasi pelaksanaan audit sesuai dengan rencana audit internal;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

In carrying out the internal audit function, the Internal Audit Division has the following duties and responsibilities:

- Assisting the President Director and the Board of Commissioners in performing oversight by operationalizing audit planning, execution, and monitoring of audit results;*
- Conducting analysis and assessments in the areas of finance, accounting, operations, and other activities through audits;*
- Identifying opportunities to improve and enhance the efficiency of resource and fund utilization;*
- Providing recommendations for improvement and objective information on audited activities at all levels of management;*
- Conducting special or in-depth audits upon request of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, or as a follow-up to general audit findings on specific objects or events suspected of containing indications of violations and/or fraud, if necessary; and*
- Monitoring the follow-up of audit findings and submitting Follow-up Audit Reports to the President Director and the Board of Commissioners, with copies to the Audit Committee and the Director overseeing the compliance function on a periodic basis.*

Duties, Responsibilities, and Accountability of the Head of Internal Audit Division

- Ensure that the Internal Audit Division performs its functions in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and the Code of Ethics for Internal Auditors.*
- Determine the implementation strategy of the Internal Audit Division and formulate audit principles, including internal audit methodology and quality assurance controls;*
- Selecting competent human resources in accordance with the needs of the Internal Audit Division;*
- Ensuring that members of the Internal Audit Division participate in continuous professional development and other training in line with the increasing complexity of the Bank's business activities;*
- Prepare an Annual Audit Plan and budget allocation approved by the President Director and the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee, and ensuring the implementation of the audit in accordance with the internal audit plan;*



- f. Memastikan dalam penggunaan jasa pihak eksternal terhadap aktivitas audit internal hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Divisi Audit Internal, serta telah sesuai dengan Piagam Audit Internal Bank Papua;
- g. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Divisi Audit Internal;
- h. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Internal secara periodik;
- i. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
- j. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; dan
- k. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Direksi bertanggung jawab:

- a. Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
- b. Memastikan Divisi Audit Internal memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
- c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Divisi Audit Internal; dan
- d. Memastikan Pemimpin Divisi Audit Internal memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab:

- a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Internal yang memadai, efektif dan efisien;
- b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. Menunjuk pengendali mutu independen dari Pihak Eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

- f. Ensuring that the use of external parties for internal audit activities is only temporary, does not impair the independence and objectivity of the Internal Audit Division, and is in accordance with the Bank Papua Internal Audit Charter;
- g. Continuously developing audit methodologies to enhance the efficiency and effectiveness of the Internal Audit Division's performance;
- h. Preparing and periodically reviewing the Internal Audit Charter;
- i. Reporting significant findings to the Board of Directors for prompt corrective action;
- j. Monitoring corrective actions taken on significant findings; and
- k. Submitting copies of the reports referred to in point (i) to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Director overseeing the compliance function.

Responsibilities of the Board of Directors in the Implementation of the Internal Audit Function

- a. Developing an internal control framework to identify, measure, monitor, and control all risks faced by the Bank;
- b. Ensuring that the Internal Audit Division obtains information on developments, initiatives, projects, products, operational changes, and identified risks;
- c. Ensuring that timely and appropriate corrective actions are taken on all findings and recommendations of the Internal Audit Division; and
- d. Ensuring that the Head of the Internal Audit Division is provided with adequate resources and budget to carry out duties in accordance with the annual audit plan.

Responsibilities of the Board of Commissioners in the Implementation of the Internal Audit Function

- a. Ensuring that the Board of Directors establishes and maintains an adequate, effective, and efficient internal control system;
- b. Reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Audit Division at least once a year; and
- c. Appointing an independent external quality reviewer to assess the performance of the Internal Audit Division, taking into account the recommendations of the Audit Committee.



Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:

- a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
- b. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- c. Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal;
- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara tepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *Fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
- h. Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Wewenang Divisi Audit Internal :

Agar tugas dan tanggung jawab dapat berjalan dengan hasil yang optimal, maka Divisi Audit Internal diberikan wewenang sebagai berikut:

- a. Memiliki akses tidak terbatas pada semua fungsi, dokumen, pegawai dan properti fisik yang relevan dengan pelaksanaan audit tanpa campur tangan dari pihak manapun;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat yang sifatnya berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
- d. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan peran sebagai observer dan tanpa hak suara;
- e. Mengalokasikan semua sumber daya, menentukan jadwal audit, memilih objek yang akan diaudit, menyusun jadwal audit (dengan atau tanpa pemberitahuan kepada auditee), menetapkan frekuensi audit, dan ruang lingkup audit;
- f. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun dan memiliki kewenangan dalam menentukan metodologi, teknik, dan pendekatan audit;

Responsibilities of the Audit Committee in the Implementation of the Internal Audit Function

- a. *Monitoring and reviewing the effectiveness of the Bank's internal audit implementation;*
- b. *Evaluating the performance of the Internal Audit Division;*
- c. *Ensuring that the Internal Audit Division maintains communication with the Board of Directors, the Board of Commissioners, External Auditors, and the Financial Services Authority (OJK);*
- d. *Ensuring that the Internal Audit Division operates independently;*
- e. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of the Internal Audit Division;*
- f. *Reviewing audit reports and ensuring that the Board of Directors takes appropriate corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit Division;*
- g. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the overall annual remuneration and performance rewards of the Internal Audit Division; and*
- h. *Ensuring that the Internal Audit Division upholds integrity in carrying out its duties.*

Authority of the Internal Audit Division:

To ensure the optimal execution of its duties and responsibilities, the Internal Audit Division is granted the following authorities:

- a. *Unrestricted access to all functions, documents, personnel, and physical assets relevant to audit activities, without interference from any party;*
- b. *Direct communication with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee;*
- c. *Conducting periodic and ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee;*
- d. *Attending strategic meetings in the capacity of an observer without voting rights;*
- e. *Allocating resources, determining audit schedules, selecting audit objects, preparing audit timelines (with or without prior notice to auditees), and defining audit frequency and scope;*
- f. *Operating independently, free from interference or pressure, with full authority to determine audit methodologies, techniques, and approaches;*



- g. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan kegiatan Auditor Eksternal;
 - h. Meminta keterangan kepada pegawai dan pihak-pihak yang terkait, terafiliasi, nasabah bank dan pihak lainnya bilamana dianggap perlu dapat melakukan penyegelan terhadap dokumen, warkat-warkat, dan benda yang dianggap berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
 - i. Melakukan inspeksi setempat terhadap Nasabah (on-site inspection) dalam rangka memastikan kebenaran data yang diaudit atau untuk memverifikasi data temuan audit;
 - j. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan strategis dengan unit/fungsi penyelenggara Assurance lainnya (Compliance unit dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal; dan
 - k. Dapat meminta pendapat dari tenaga ahli (profesional) dari dalam maupun luar Bank jika diperlukan).
- g. Coordinating audit activities with External Auditors;
 - h. Requesting information from employees, related and affiliated parties, customers, and other relevant parties, and, if necessary, securing documents, records, and items related to the audit;
 - i. Conducting on-site inspections of customers to verify audited data or audit findings;
 - j. Coordinating and establishing strategic relationships with other assurance functions (Compliance Unit and Risk Management) to ensure comprehensive and optimal audit outcomes; and
 - k. Seeking opinions from internal or external experts (professionals), if required.

PERNYATAAN TENTANG KEPEMILIKAN PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) UNIT AUDIT INTERNAL

Bank Papua telah menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang menjadi dasar formal untuk pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan bank. *Internal Audit Charter* ini dirancang sesuai dengan Standar Profesional Internal Audit No. 1000, yang mensyaratkan bahwa tujuan, wewenang, tugas, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam dokumen charter dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris serta Pimpinan Bank.

Piagam Audit Internal Bank Papua disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 73.1/DIR-BPD/XII/2025, yang merupakan revisi dari Surat Keputusan sebelumnya. Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan resmi dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK terkait pelaksanaan fungsi audit internal pada bank umum.

Isi dari Internal Audit Charter mencakup:

1. Pendahuluan
2. Penjabaran visi dan misi.
3. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal.
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Divisi Audit Internal.

STATEMENT ON THE OWNERSHIP OF INTERNAL AUDIT CHARTER

Bank Papua has established an Internal Audit Charter as the formal foundation for the implementation of the internal audit function within the Bank. This Charter is designed in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing No. 1000, which require that the purpose, authority, duties, and responsibilities of the internal audit function be formally documented and approved by the Board of Commissioners and the Bank's Management.

The Internal Audit Charter of Bank Papua is stipulated under Board of Directors Decree No. 73.1/DIR-BPD/XII/2025, which is a revision of the previous decree. This document has received formal approval from the Board of Commissioners and has been reported to the Financial Services Authority (OJK), in accordance with applicable regulations governing the implementation of the internal audit function in commercial banks.

The Internal Audit Charter includes:

1. Introduction
2. Explanation of the vision and mission.
3. Structure and Position of the Internal Audit Division.
4. Objectives and Scope of Activities of the Internal Audit Division.



KOMPOSISI PERSONIL DIVISI AUDIT INTERNAL

Hingga akhir tahun 2025, jumlah karyawan di Divisi Audit Internal akan mencapai 45 (empat puluh lima) orang. Karyawan di divisi ini memiliki beragam latar belakang, termasuk jenjang jabatan, pengalaman, pendidikan, usia, serta kualifikasi atau sertifikasi. Komposisi karyawan Divisi Audit Internal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jabatan	Jumlah	Position
Pemimpin Divisi Audit Internal	1	Internal Audit Division Leader
Quality Assurance	1	Quality Assurance
Koordinator Teknis	4	Technical Coordinator
Pemimpin Dept. Pendukung Auditor	1	Auditor Support Department Leader
Auditor	35	Auditor
Staf Pendukung, AMGR, Asisten Pendukung & Pelaporan Auditor	3	Support Staff, AMGR, Auditor Support & Reporting Assistant
Staf Pelaksana Pendukung dan Administrasi	0	Support and Administrative Executive Staff
Jumlah	45	Number

COMPOSITION OF INTERNAL AUDIT DIVISION PERSONNEL

As of the end of 2025, the number of employees in the Internal Audit Division reached 45 (forty five) personnel. Employees in this division come from diverse backgrounds, including various job levels, experience, education, age, as well as professional qualifications and certifications. The composition of the Internal Audit Division personnel is presented in the following table:

SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL DIVISI AUDIT INTERNAL

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor per 31 Desember 2025, antara lain:

PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT DIVISION PERSONNEL

The certifications held by Internal Auditors as of December 31, 2025, include the following:

No	Sertifikasi	Jenjang	Jumlah (orang)	Certification
1	Sertifikasi Management Risiko	7	0	Risk Management Certification
2	Sertifikasi Management Risiko	6	5	Risk Management Certification
3	Sertifikasi Management Risiko	5	20	Risk Management Certification
4	Sertifikasi Management Risiko	4	19	Risk Management Certification
Jumlah			44	Total

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DIVISI AUDIT INTERNAL

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

No.	Nama Pelatihan/Pendidikan/Workshop Name of Training/Education/Workshop	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Pelaksanaan Place & Date of Implementation
1	IHT - KUPVA (Identifikasi Banknotes)	PT Bank Central Asia TBK	Bank Papua Kantor Pusat 13 - 14 Maret 2025
2	IHT Online Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V - VI Batch 1	PT. Multi Talenta Consulting dan LPS BSMR	Via Zoom, 10 April 2025
3	Pelatihan Audit Forensik/Bimbingan Persiapan Ujian dan Ujian Kompetensi CFA	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	Dafam Enkadeli Thamrin Jakarta Syariah - Jakarta, 28 - 30 April 2025
4	IHT Microsoft Excel for Business	PT Eksekutif Persada Citra Jaya	Hotel SIP Azana - Jayapura, 05 - 07 Mei 2025
5	Kunjungan Tim Settlement Bank Papua ke kantor PT Artajasa Pembayaran Elektronik	Divisi Akuntansi Bank Papua dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik	Jakarta, 05 - 09 Mei 2025



No.	Nama Pelatihan/Pendidikan/Workshop Name of Training/Education/Workshop	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Pelaksanaan Place & Date of Implementation
6	Analisis Kerawanan Bank Umum dan Strategis Anti <i>Fraud</i>		Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, 15 - 16 Mei 2025
7	Tata Cara Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Perbankan		Tebu Hotel Bandung, 02 - 04 Juni 2025
8	IHT <i>Online</i> Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)	- Via Zoom, 02 - 16 Juni 2025 (Batch 1) - Via Zoom, 16 - 30 Juni 2025 (Batch 2)
9	IHT Eksternal - Business Acumen Improvement	Human Resources (PT Hasil Rembuk Cendekia)	- Hotel Best Western Sagita Jayapura, 03 Juni 2025 (Batch 1) - Hotel Best Western Sagita Jayapura, 04 Juni 2025 (Batch 2)
10	IHT Eksternal - Sustainable Banking : Implementasi ESG (Environtmental, Social and Governance) Principles in Practtice		- Hotel Fox Jayapura, 10 - 11 Juni 2025 (Batch 1) - Hotel Fox Jayapura, 12 - 13 Juni 2025 (Batch 2)
11	<i>Fraud</i> Detection System (FDS) Menggunakan Metode Artificial Intellegence (AI) dan Machine <i>Learning</i> (ML)		Royal Malioboro by Aston - Yogyakarta, 25 - 26 Juni 2025
12	Basic Treasury for Banking		Aone Hotel Jakarta. 09 - 10 Juli 2025
13	IHT Eksternal - Manajemen Kearsipan	PT Manajemen Arsip Profesional	SIP Azana Hotel Jayapura, 23 - 24 Juli 2025
14	Via Zoom - Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)	Via Zoom, 18 - 30 Agustus 2025
15	Proyeksi Bisnis Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkapalan	Sinergi Indonesia Pintar (Sindopi)	Le Meridien Hotel Jakarta, 11 - 12 September 2025
16	Audit Kredit Bank Berbasis Manajemen Risiko dan Pemeriksaan Atas Kualitas Data serta Keandalan Sistem Pengolahan Data Single Customer View (SCV)		Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, 16 - 17 September 2025
17	Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) based on POJK No. 15 Tahun 2024		Kampus LPPI Jakarta, 18 - 19 September 2025
18	Audit Sistem Informasi Berbasis Cobit	PT. Gendhis Prima Sentosa	Yogyakarta, 24 - 25 September 2025
19	Diklat IHT - Global APU PPT PPPSPM		ZIP Azana Hotel Jayapura, 24 - 25 September 2025
20	Transformasi Generative AI : Peluang Generative Engine Optimization (GEO) Dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)		Ruang kerja masing-masing, 25 September 2025
21	Anti Korupsi Tematik Investigatif bagi BUMD Klaster Bank Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025		<i>Learning</i> Center Bank DKI Jakarta, 23 - 26 September 2026
22	Usulan Seminar dari Div. Hukum (gandeng Div. Hukum dan Div. Kepatuhan) tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)		Yogyakarta, 13 - 14 Oktober 2025
23	Psikologi dan Komunikasi Dalam Audit		Hotel Fortuna Grande Seturan Yogyakarta, 15 - 16 Oktober 2025
24	Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan		Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, 21 - 22 Oktober 2025
25	Audit Kepatuhan Terhadap ketentuan Anti <i>Fraud</i> , Whistleblowing System dan Etika Bisnis Perbankan		Dafam Enkadeli Thamrin Jakarta, 29 - 30 Oktober 2025
26	Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Audit Internal	Calamus Rotana Cattail	The Rich Hotel Yogyakarta, 29 - 30 Oktober 2025



No.	Nama Pelatihan/Pendidikan/Workshop <i>Name of Training/Education/Workshop</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Tempat & Tanggal Pelaksanaan <i>Place & Date of Implementation</i>
27	Audit Kredit Terintegrasi : Strategi Penguatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah		Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, 05 - 06 November 2025
28	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	PT Multi Talenta Consulting	Online, 20 November 2025
29	Audit Keuangan dan Operasional		Yogyakarta, 27 - 27 November 2025
30	Ujian Kompetensi CFA	Lembaga Pengembangan <i>Fraud Auditing</i> (LPFA)	Leme'os Hotel Jakarta, 24 - 25 November 2025
31	Pembekalan dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4, 5, 6, 7	LPPI	- Ruang kerja masing-masing, 27 - 28 November 2025 (Pembekalan Materi Sertifikasi) - Hotel Mercure Jayapura, 10 - 19 Desember 2025 (Ujian Sertifikasi)

KODE ETIK AUDITOR

Auditor Divisi Audit Internal harus menerapkan dan mengedepankan Kode Etik yang terdiri dari prinsip-prinsip berikut:

1) Integritas

- Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
- Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan profesinya;
- Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan yang merusak kredibilitas Divisi Audit Internal dan profesi audit intern; dan
- Mendukung tujuan Bank dan Divisi Audit Internal.

2) Objektivitas

- Tidak terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan yang akan menimbulkan benturan kepentingan;
- Tidak menerima dalam bentuk apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap profesionalisme judgement;
- Senantiasa menggunakan professional judgement dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun; dan
- Mengungkapkan semua fakta yang diketahui.

3) Kerahasiaan

- Auditor Internal harus menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
- Menggunakan informasi hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas audit; dan
- Tidak menyalahgunakan atau menyebarkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan

CODE OF ETHICS FOR AUDITORS

Internal Audit Division auditors must implement and uphold the Code of Ethics, which consists of the following principles:

1) Integrity

- Perform their duties honestly, diligently, and responsibly;*
- Comply with the law and make disclosures in accordance with laws and regulations and their profession;*
- Not intentionally/knowingly engage in prohibited/illegal activities, or take actions that damage the credibility of the Internal Audit Division and the internal audit profession; and*
- Support the objectives of the Bank and the Internal Audit Division.*

2) Objectivity

- Not engage in activities or have relationships that could give rise to a conflict of interest;*
- Not accept any form of compensation that impacts or is suspected of impacting professional judgment;*
- Always use professional judgment in carrying out their duties under all conditions and circumstances; and*
- Disclose all known facts.*

3) Confidentiality

- Internal auditors must maintain the security and confidentiality of information obtained in the course of their duties;*
- Use information solely for the purposes of carrying out audit duties; and*
- Not misuse or disseminate such information for*



hukum dan ketentuan Bank.

4) Kompetensi

- Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki;
- Melaksanakan audit sesuai dengan penerapan Fungsi Audit Intern dan atau standar audit lain yang berlaku; dan
- Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan.

5) Skeptisisme Profesional

- Auditor Internal harus mempertahankan sikap skeptis profesional dalam seluruh tahapan penugasan audit;
- Menunjukkan rasa ingin tahu dan kewaspadaan terhadap informasi dan bukti audit;
- Menilai secara kritis keandalan dan konsistensi informasi yang diperoleh;
- Bersikap lugas serta berani menyampaikan pertanyaan dan perhatian ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian; dan
- Mencari bukti tambahan apabila ditemukan informasi yang tidak lengkap, tidak konsisten, meragukan, atau dapat menyesatkan.

personal gain or for the benefit of other parties in violation of legal provisions and Bank regulations.

4) Competence

- Perform duties in accordance with their knowledge, skills, and experience;*
- Conduct audits in accordance with the application of the Internal Audit Function and/or other applicable audit standards; and*
- Continuously improve their competence.*

5) Professional Skepticism

- Internal auditors must maintain an attitude of professional skepticism throughout all stages of the audit assignment;*
- Demonstrate curiosity and vigilance regarding audit information and evidence;*
- Critically assess the reliability and consistency of the information obtained;*
- Be straightforward and courageous in raising questions and concerns when there are indications of nonconformity; and*
- Seek additional evidence if information is found to be incomplete, inconsistent, questionable, or potentially misleading.*

Kode etik ini menjamin bahwa auditor Divisi Audit Internal Bank Papua bekerja dengan profesionalisme, independensi, dan tanggung jawab dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

This Code of Ethics ensures that Internal Audit Division auditors at Bank Papua operate with professionalism, independence, and accountability in supporting the implementation of Good Corporate Governance.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2025

STANDAR PELAKSANAAN

Kegiatan Divisi Audit Internal Bank Papua berlandaskan pada *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada 15 Desember 2025. Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal (DAI) dan kepatuhannya dievaluasi oleh Standar Profesional Audit Intern, serta pihak eksternal independen, setidaknya sekali dalam tiga tahun.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Cakupan audit mencakup seluruh aktivitas operasional perbankan yang memiliki potensi risiko, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi kepentingan Bank Papua dan masyarakat. Risiko yang diperhatikan meliputi risiko kredit, operasional, strategis, reputasi, hukum, dan risiko lainnya.

SUMMARY REPORT OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2025

IMPLEMENTATION STANDARDS

The activities of the Internal Audit Division (IAD) of Bank Papua are based on the Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners on December 15, 2025. The effectiveness and compliance of the IAD are evaluated in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, as well as by independent external parties, at least once every three years.

SCOPE OF IMPLEMENTATION

The audit scope covers all banking operational activities that carry potential risks, both direct and indirect, which may affect the interests of Bank Papua and the public. Risks considered include credit risk, operational risk, strategic risk, reputational risk, legal risk, and other relevant risks.



Kegiatan audit internal meliputi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, dan unit kerja lain di Kantor Pusat. Fokus audit adalah pada pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian target, dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Audit Internal berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas audit internal (*Assurance dan Consulting*) serta kegiatan investigasi.

1. Assurance

Melakukan pengujian secara obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas *internal Control*, penerapan *Risk Management*, dan proses *Governance* dalam organisasi

2. Consulting

Memberikan jasa advisory yang terkait dengan aktivitas Auditee/unit kerja, dimana sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan Auditee/unit kerja dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki *internal Control*, penerapan *Risk Management*, dan proses *Governance*, tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional.

3. Investigasi

Aktivitas pengumpulan bukti-bukti dengan menggunakan teknik investigasi atas hasil analisa awal terhadap indikasi dan/atau *fraud* yang terjadi. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Investigasi mencakup perolehan bukti dan pernyataan, penulisan laporan, pemberian kesaksian atas temuan serta Monitoring tindak lanjut yang diperlukan.

METODE AUDIT

Divisi Audit Internal melakukan audit dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Audit*), yang mencakup pemahaman yang lebih mendalam mengenai kuantitas manajemen, karakteristik bisnis, dan risiko yang dihadapi oleh bank. Hal ini juga memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah diidentifikasi dengan tepat. Metode ini berfokus pada proses bisnis dan dalam penilaian serta pelaksanaan audit, diarahkan pada area-area yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis objek audit. Tujuan dari penerapan audit berbasis risiko adalah:

1. Meningkatkan nilai (*value*) yang diberikan kepada obyek audit, karena metodologi ini mencakup risiko bisnis utama
2. Menghemat waktu pelaksanaan audit pada area-area yang berisiko rendah yang berdampak pada efisiensi

Internal audit activities encompass Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices, Payment Points, and other work units at the Head Office. The audit focus is on the effective utilization of resources to achieve established objectives, including efficiency in resource use, effectiveness in achieving targets, and enhanced compliance with applicable internal and external regulations. Internal Audit contributes to achieving organizational objectives through assurance and consulting activities, as well as investigative activities.

1. Assurance

Conducting objective testing of evidence to provide independent assessments of internal control, risk management implementation, and governance processes within the organization.

2. Consulting

Providing advisory services related to auditee/work unit activities, where the nature and scope are agreed upon with the auditee, aimed at adding value and improving internal control, risk management, and governance processes, without assuming operational responsibilities.

3. Investigation

Activities involving the collection of evidence using investigative techniques based on preliminary analysis of indications and/or occurrences of fraud. Investigations aim to uncover modus operandi, root causes, potential losses, perpetrators, and other involved parties. This includes evidence gathering, obtaining statements, report preparation, providing testimony on findings, and monitoring necessary follow-up actions.

AUDIT METHODOLOGY

The Internal Audit Division applies a Risk-Based Audit approach, which involves a comprehensive understanding of management quality, business characteristics, and the risks faced by the Bank. This approach ensures that such risks are properly identified. It focuses on business processes and directs audit assessment and execution toward areas that significantly impact the success of the audited entity.

The objectives of implementing a risk-based audit approach are:

1. *To enhance the value delivered to the auditee, as the methodology covers key business risks;*
2. *To improve efficiency by reducing audit time in low-risk areas;*



bisnis utama

3. Melakukan penilaian serta penelaahan terhadap risiko yang ada secara lebih menyeluruh dalam menjaga serta mengurangi risiko bank
4. Menilai apakah temuan serta rekomendasi akan sejalan dengan tujuan utama bank (Corporate Objectives)
5. Memberikan kesempatan lebih besar dalam melakukan kaji banding (benchmarking) dan menggunakan praktik terbaik (best practices)
6. Memposisikan Divisi Audit Internal sebagai agen perubahan bagi bank (Corporate Change Agent)
7. Menjadikan Divisi Audit Internal sebagai tempat pelatihan terbaik bagi pejabat Bank
8. Menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan/overlap antara Auditor Internal & Auditor Eksternal yang disebabkan kurangnya koordinasi dan berbedanya metodologi audit yang digunakan antara keduanya.

3. To conduct a more comprehensive assessment and review of risks in order to safeguard and mitigate the Bank's risk exposure;
4. To ensure that audit findings and recommendations align with the Bank's corporate objectives;
5. To provide greater opportunities for benchmarking and the adoption of best practices;
6. To position the Internal Audit Division as a corporate change agent;
7. To establish the Internal Audit Division as a center for leadership development within the Bank;
8. To avoid duplication or overlap between Internal and External Auditors due to lack of coordination or differences in audit methodologies.

KEGIATAN AUDIT TAHUN 2025

Kegiatan audit Bank Papua pada tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang mencakup berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Divisi Audit Internal (DAI) berfungsi sebagai pengendali internal yang bertugas memberikan jaminan atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Bank. Audit dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan bahwa proses bisnis Bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

AUDIT ACTIVITIES IN 2025

The audit activities of Bank Papua in 2025 were carried out in accordance with the annual audit plan, covering various operational and strategic aspects of the Bank. The Internal Audit Division (IAD) functions as an internal control unit responsible for providing assurance on the effectiveness of governance, risk management, and internal control systems. Audits were conducted using a risk-based approach to ensure that the Bank's business processes operate in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

No	Auditee	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Kantor Cabang Sarmi	3 – 15 Februari 2025	Terlaksana
2	Kantor Cabang Aimas	10 – 23 Februari 2025	Terlaksana
3	Kantor Cabang Biak	13 – 26 Februari 2025	Terlaksana
4	Kantor Cabang Tambrau	12 – 25 Maret 2025	Terlaksana
5	Kantor Cabang Kaimana	13 – 26 Maret 2025	Terlaksana
6	Kantor Cabang Wasior	14 – 29 Maret 2025	Terlaksana
7	Kantor Cabang Jakarta	14 – 29 Maret 2025	Terlaksana
8	Kantor Cabang Arso	08 – 17 Mei 2025	Terlaksana
9	Kantor Cabang Agats	11 – 24 Mei 2025	Terlaksana
10	Kantor Cabang Kasonaweja	14 – 17 Mei 2025	Terlaksana
11	Kantor Cabang Serui	14 – 26 Juli 2025	Terlaksana
12	Kantor Cabang Tiom	15 – 26 Juli 2025	Terlaksana
13	Kantor Cabang Waren	22 Juli – 04 Agustus 2025	Terlaksana
14	Kantor Cabang Karubaga	24 Agustus – 05 Sept 2025	Terlaksana
15	Kantor Cabang Waghete	24 Agustus – 04 Sept 2025	Terlaksana
16	Kantor Cabang Bintuni	17 – 30 September 2025	Terlaksana
17	Kantor Cabang Utama Nabire	21 Sept – 04 Oktober 2025	Terlaksana
18	Kantor Cabang Yogyakarta	19 – 26 September 2025	Terlaksana
19	Divisi Sekretaris Perusahaan	11 – 26 Juni 2025	Terlaksana
20	Divisi Pengelolaan Dana & Jasa	11 – 26 Juni 2025	Terlaksana
21	Divisi Treasury & International Banking	29 Sept – 14 Oktober 2025	Terlaksana



No	Auditee	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
22	Divisi Umum	29 Okt – 13 November 2025	Terlaksana
23	Divisi Akuntansi	29 Okt – 13 November 2025	Terlaksana
24	Divisi Manajemen Modal Manusia	03 – 20 November 2025	Terlaksana
25	Divisi Bisnis Komersial & Korporasi	10 – 28 November 2025	Terlaksana
26	Divisi Risiko Bisnis	10 – 28 November 2025	Terlaksana
27	Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	10 – 28 November 2025	Terlaksana
28	Divisi Teknologi Informasi	01 – 22 Desember 2025	Terlaksana

Dengan jumlah temuan oleh Divisi Audit Internal sebagai berikut:

The number of findings identified by the Internal Audit Division is as follows:

No	Auditee	Tahun Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Progres Tindak Lanjut Temuan		
				STL	DTL	TDTL
				Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	General Audit Cabang	2024	1109	1052	57	0
2	General Audit Divisi	2024	135	128	7	0
	Sub Total		1244	1180	64	0
3	General Audit Cabang	2025	1180	996	184	0
4	General Audit Divisi	2025	53	38	15	0
	Sub Total		1233	1034	199	0
	Total Keseluruhan		2477	2214	263	0

Keterangan :

STL : Sudah Tindak Lanjut TDTL : Tidak Dapat di Tindak Lanjut
DTL : Dalam Tindak Lanjut

PELAKSANAAN RAPAT DENGAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN/ ATAU KOMITE AUDIT

Pada tahun 2025, Divisi audit internal senantiasa menghadiri rapat yang diadakan oleh komite audit. Jumlah rapat bersama komite audit dapat dilihat di sub Organ dibawah Dewan Komisaris sub Komite Audit.

MEETINGS WITH THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND/OR AUDIT COMMITTEE

In 2025, the Internal Audit Division consistently attended meetings held by the Audit Committee. The number of meetings with the Audit Committee is presented in the subsection "Organs under the Board of Commissioners – Audit Committee."

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Sepanjang tahun 2025, Divisi Audit Internal (DAI) Bank Papua telah melaksanakan serangkaian kegiatan audit di berbagai unit kerja dan kantor cabang untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, tata kelola perusahaan, dan regulasi yang berlaku. Hasil audit tersebut mengungkapkan temuan-temuan yang mencakup aspek operasional, kepatuhan, dan manajemen risiko. Setiap temuan telah dikategorikan berdasarkan tingkat signifikansi dan urgensi untuk ditindaklanjuti.

AUDIT FINDINGS AND FOLLOW-UP ACTIONS

Throughout 2025, the Internal Audit Division (IAD) of Bank Papua conducted a series of audit activities across various work units and branch offices to ensure compliance with internal policies, corporate governance standards, and applicable regulations. The audit results identified findings covering operational, compliance, and risk management aspects. Each finding was categorized based on its level of significance and urgency for follow-up actions.

Progres tindak lanjut terhadap temuan audit mencerminkan komitmen manajemen dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Hingga 31 Desember 2025, persentase temuan yang telah ditindaklanjuti mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi di seluruh Divisi dan beberapa kantor cabang. Meskipun demikian, beberapa cabang masih menunjukkan

The progress of follow-up actions reflects management's commitment to addressing identified weaknesses. As of December 31, 2025, the percentage of findings that have been followed up indicates a high level of compliance across divisions and several branch offices. Nevertheless, certain branches still require improvement in completing



kebutuhan untuk peningkatan dalam penyelesaian tindak lanjut, terutama dalam kategori tindak lanjut lanjutan (DTL).

Proses tindak lanjut hasil audit dilakukan melalui koordinasi intensif antara Divisi Audit Internal dengan unit terkait. Setiap rekomendasi audit yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mitigasi risiko, dan kualitas operasional Bank Papua secara keseluruhan. Selain itu, temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti terus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi audit dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hasil audit menunjukkan bahwa Bank Papua secara keseluruhan telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dengan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Keberhasilan ini mendukung keberlanjutan pertumbuhan Bank serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas tata kelola Bank Papua.

follow-up actions, particularly in the category of extended follow-up (DTL).

The follow-up process is carried out through intensive coordination between the Internal Audit Division and the relevant units. Each audit recommendation aims to enhance the effectiveness of internal controls, risk mitigation, and the overall operational quality of Bank Papua. In addition, outstanding findings continue to be monitored periodically to ensure that all audit recommendations are implemented in accordance with the established timeline.

Overall, the audit results indicate that Bank Papua has conducted its operations in accordance with applicable policies, with certain recommendations for further improvement. This achievement supports the Bank's sustainable growth and strengthens stakeholder confidence in the quality of Bank Papua's governance.

Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division

Divisi Manajemen Risiko, yang dikenal sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), memiliki peran strategis dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh di Bank Papua. Sebagai Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*), Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank, baik risiko kredit, operasional, pasar, maupun likuiditas, dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikelola dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Risk Management Division, also known as the Risk Management Work Unit (SKMR), plays a strategic role in the comprehensive management of risks at Bank Papua. As the Second Line of Defense, the Division is responsible for ensuring that risks faced by the Bank—whether credit, operational, market, or liquidity risks—are properly identified, measured, monitored, and managed in accordance with applicable regulations.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SKMR memiliki fungsi utama, antara lain:

1. Mengidentifikasi Risiko: Melakukan analisis mendalam terhadap potensi risiko yang timbul dari aktivitas operasional dan strategi bisnis bank.
2. Pengendalian Risiko: Menyusun kebijakan dan prosedur mitigasi risiko yang terintegrasi, mencakup penilaian terhadap portofolio kredit, penilaian risiko pasar, dan pengendalian operasional.
3. Pemantauan Risiko: Menyediakan sistem pelaporan risiko yang komprehensif kepada manajemen, termasuk laporan profil risiko yang rutin dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Peningkatan Budaya Risiko: Membantu seluruh unit

Referring to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2023 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks, the SKMR has the following key functions:

1. *Risk Identification: Conducting in-depth analysis of potential risks arising from operational activities and business strategies.*
2. *Risk Control: Establishing integrated risk mitigation policies and procedures, including credit portfolio assessment, market risk evaluation, and operational controls.*
3. *Risk Monitoring: Providing comprehensive risk reporting systems to management, including regular risk profile reports submitted to the Financial Services Authority (OJK).*
4. *Enhancing Risk Culture: Supporting all work units in*



kerja dalam mengembangkan budaya manajemen risiko melalui pelatihan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan risiko.

SKMR berfungsi sebagai mitra strategis bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan. Sinergi yang kuat antara SKMR dan Divisi terkait memungkinkan Bank Papua untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam operasionalnya, Divisi Manajemen Risiko juga bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diatur dalam POJK No. 17/POJK.03/2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan risiko untuk memastikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dikelola oleh Bank.

Dengan demikian, Satuan Kerja Manajemen Risiko tidak hanya berfungsi sebagai pelindung stabilitas keuangan Bank Papua, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis bank melalui pengelolaan risiko yang efektif dan efisien sesuai dengan standar perbankan nasional dan internasional.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan
7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk

developing a strong risk management culture through training and supervision of policy implementation.

The SKMR acts as a strategic partner to the Board of Directors and the Board of Commissioners in decision-making processes. Strong synergy between the SKMR and other divisions enables Bank Papua to achieve a balance between sustainable business growth and acceptable risk levels.

In its operations, the Risk Management Division also adheres to Good Corporate Governance (GCG) principles as stipulated in POJK No. 17/POJK.03/2023, emphasizing transparency, accountability, and integrity in risk management to safeguard public funds entrusted to the Bank.

Thus, the Risk Management Work Unit not only safeguards the financial stability of Bank Papua but also ensures business sustainability through effective and efficient risk management aligned with national and international banking standards.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

The duties and responsibilities of the Risk Management Division are as follows:

1. Providing input to the Board of Directors in formulating risk management strategies and policies;
2. Developing procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control;
3. Designing and implementing tools required for effective risk management implementation;
4. Monitoring the implementation of risk management policies, strategies, and frameworks recommended by the Risk Management Committee and approved by the Board of Directors;
5. Monitoring overall risk positions or exposures, including compliance with established risk tolerance and limits;
6. Conducting stress testing to assess the impact of risk management policies and strategies on the Bank's portfolio and overall performance;
7. Reviewing proposals for new products and/or activities, including the adequacy of systems and procedures, as



kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.

8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking* unit dan/ atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.
12. Independen dari *risk taking* unit dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.

well as their impact on the Bank's overall risk exposure;

8. *Providing recommendations to risk-taking units and/ or the Risk Management Committee regarding risk management implementation;*
9. *Evaluating the accuracy and validity of data used for risk measurement, particularly for internal models;*
10. *Preparing and submitting reports on the Bank's Soundness Level, Risk Profile, and Capital Adequacy (KPMM) in line with the risk profile to the President Director and the Director overseeing risk management;*
11. *Conducting periodic reviews of the risk management implementation process; and*
12. *Maintaining independence from risk-taking units in performing risk management oversight functions, ensuring that risks and the Bank's portfolio are properly managed through established risk parameters and limits.*

PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK

RISK MANAGEMENT DIVISION LEADER PROFILE



Suleman Tarru' Padang

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank sejak tanggal 16-06-2025 berdasarkan SK Direksi No. 59.1/KEPEG/VI/2025.

Rangkap Jabatan

Tidak ada.

Pengalaman Kerja

1. Pemimpin Unit Perencanaan Bisnis(2012)
2. Pemimpin Departemen Pendukung Cabang Sentani(2015)
3. Pemimpin Kredit Kantor Cabang Makassar (2016)
4. Pemimpin KCP Toraja 2018
5. Pemimpin Departemen Perencanaan Bisnis (2020)
6. Pemimpin Cabang Makassar (2022)
7. Pindep Kebijakan dan Pelaporan (2024)

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Akuntansi STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (1996)
Pasca Sarjana (S2) STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (2019)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (lima) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2025)

Legal Basis for Appointment

Served as Head of the Bank's Risk Management Division since June 16, 2025 based on Board of Directors Decree No. 59.1/KEPEG/VI/2025.

Dual Position

There isn't any.

Work experience

1. *Business Planning Unit Leader (2012)*
2. *Support Department Leader, Sentani Branch (2015)*
3. *Credit Manager, Makassar Branch (2016)*
4. *Branch Manager, Toraja Branch (2018)*
5. *Business Planning Department Leader (2020)*
6. *Makassar Branch Manager (2022)*
7. *Policy and Reporting Department Head (2024)*

Educational background

*Bachelor's Degree (S1) in Accounting, Ujung Pandang Education Foundation College, Makassar (1996)
Postgraduate Degree (S2) from Ujung Pandang Education Foundation College, Makassar (2019)*

Certification

Level 5 (five) Risk Management Certification from the Risk Management Certification Agency (2025)



PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development programs attended by employees of the Risk Management Division during 2025 are as follows:

No	Jenis Pelatihan	Waktu	Penyelenggara	Training Type	Organizer
1	Identifikasi Dampak Tiga Regulasi Sistemik: Uu 27/2022, POJK 12/2024, POJK 28/2024 Interkoneksi Pelindungan Data Pribadi,	05 Maret 2025	Risk Manajemen Guard (Rmg)	Identification of the Impact of Three Systemic Regulations: Law 27/2022, POJK 12/2024, POJK 28/2024 on Interconnected Personal Data Protection	Risk Manajemen Guard (Rmg)
2	Iht - Perhitungan Dan Pembiayaan Kredit Sektoral: Analisa Bisnis Kredit Sindikasi Dan Strategi Loan Structuring Dalam Melakukan Take Over Kredit	10 April 2025	Infobank Institute	IHT - Sectoral Credit Calculation and Financing: Syndicated Credit Business Analysis and Loan Structuring Strategy in Credit Takeovers	Infobank Institute
3	Workshop Penerapan Kebijakan & Penyusunan Sop Terkait Laporan Keuangan Bank Sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank	29 April 2025	Learning Banking Center	Workshop on Policy Implementation & SOP Development Related to Bank Financial Reports in Accordance with POJK No. 15 of 2024 Concerning the Integrity of Bank Financial Reports	Learning Banking Center
4	Microsoft Excel For Business	05 Mei 2025	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)	Microsoft Excel for Business	PT. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
5	Analisa Manajemen Risiko Kredit	07 Mei 2025	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan	Credit Risk Management Analysis	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan
6	Analisis Kerawanan Bank Umum Dan Strategi Anti Fraud	15 Mei 2025	Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (Lpkmi), Lembaga Pusat Pengembangan Kajian	Commercial Bank Vulnerability Analysis and Anti-Fraud Strategy	Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (Lpkmi), Lembaga Pusat Pengembangan Kajian
7	Best Practice Stress Testing On Banking	26 Mei 2025	One Point Indonesia	Best Practice Stress Testing on Banking	One Point Indonesia
8	Iht - Sustainable Banking : Implementasi Esg (Environmental Social And Governance)	10 Juni 2025	PT Viv Superior Prosperous	IHT - Sustainable Banking: Implementation of ESG (Environmental, Social, and Governance)	PT Viv Superior Prosperous
9	Ext - Fraud Detection System (Fds) Menggunakan Metode Artifial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML)	25 Juni 2025	Infobank Institute	Ext - Fraud Detection System (FDS) Using Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) Methods	Infobank Institute
10	Iht - Manajemen Kearsipan	23 Juli 2025	PT. Manajemen Arsip Profesional	IHT - Archives Management	PT. Manajemen Arsip Profesional
11	Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEOJK,03/2025)	27 Agustus 2025	Risk Manajemen Guard (Rmg)	Ext - Implementation of Governance for Conventional and Sharia Commercial Banks (SEOJK 14/SEOJK, 03/2025)	Risk Manajemen Guard (Rmg)
12	Iht- Global Apu PPT Pppspm	24 SePTember 2025	Yayasan Trade Academy	IHT - Global APU PPT PPPSPM	Yayasan Trade Academy



No	Jenis Pelatihan	Waktu	Penyelenggara	Training Type	Organizer
13	Iht - Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 2 Implementasi Dan Pelaporan	27 Oktober 2025	PT. Rintisan Manajemen Gagas	IHT - Indonesian Sustainable Finance Taxonomy Version 2: Implementation and Reporting	PT. Rintisan Manajemen Gagas
14	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sesuai POJK No.4/2016 & SEOJK No.14/2017	26 November 2025	The Millennials Institute	Assessment of Bank Soundness Level According to POJK No. 4/2016 & SEOJK No. 14/2017	The Millennials Institute

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Jabatan	Jenjang 4	Jenjang 5	Jenjang 6	Jenjang 7	Position
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank		Ya			Head of Bank Risk Management Division
Pemimpin Departemen Manajemen Risiko Bank			Ya		Head of Bank Risk Management Department
Pemimpin Departemen Kebijakan dan Pelaporan		Ya			Head of Policy and Reporting Department
Manager Risiko Operasional dan Risiko Lainnya		Ya			Operational Risk and Other Risk Manager
Manager Kebijakan dan Prosedur		Ya			Policy and Procedure Manager
Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Pelaporan		Ya			AMRG Credit Risk
AMRG Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar		Ya			AMRG Liquidity Risk and Market Risk
Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Pelaporan		Ya			Bank Health Level Analyst
Analisis Risiko Kredit	Ya	Ya			

PELAKSANAAN TUGAS DIVISI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Selaras dengan kebijakan rule making rule, Divisi Manajemen Risiko berupaya memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku melalui penyusunan dan review kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
2. Menyusun Kajian Risiko Produk/Aktivitas Baru maupun Existing.
3. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko.
4. Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Pihak Regulator.
5. Menyusun Stress Test.
6. Mereview metodologi dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
7. Melakukan Pemantauan Aktivitas Manajemen Risiko.
8. Melakukan review dan pengkinian Limit Risiko.
9. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
10. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT DIVISION DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Risk Management Division carried out various duties and responsibilities, including:

1. In line with the rule-making framework, the Division ensured compliance with applicable regulations through the preparation and review of risk management policies, including core policies, *Standard Operating Procedures (SOP)*, and *Technical Guidelines*;
2. Preparing risk assessments for new and existing products/activities;
3. Conducting Risk Management Committee meetings;
4. Preparing and submitting risk management reports to regulators;
5. Conducting stress testing;
6. Reviewing methodologies for assessing the Bank's Soundness Level;
7. Monitoring risk management activities;
8. Reviewing and updating risk limits;
9. Developing Risk Management Information Systems;
10. Monitoring the achievement of the Bank's business plan



bisnis bank dengan mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank.

11. Pemenuhan ketentuan regulasi terkait perubahan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional serta melaksanakan Uji Coba Perhitungan ATMR untuk risiko Pasar dengan menggunakan metode *standardized approach*.
12. Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik Public Training maupun *In House Training* serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
13. Melaksanakan program penguatan budaya risiko dalam rangka meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko yang dihadapi di masing-masing unit kerjanya.
14. Melaksanakan evaluasi hasil pengujian sistem pengendalian internal operasional cabang oleh *Quality Assurance Operations*.

and implementing continuous improvement measures based on the results of the Bank Soundness Self-Assessment;

11. *Ensuring compliance with regulatory requirements related to changes in Risk-Weighted Assets (RWA) calculations for credit and operational risks, and conducting pilot testing for market risk RWA calculations using the standardized approach;*
12. *Enhancing human capital quality through training programs, including public training, in-house training, and risk management certification;*
13. *Implementing risk culture strengthening programs to increase employee awareness of risks within their respective work units; and*
14. *Evaluating the results of internal control system testing at branch operations conducted by Quality Assurance Operations.*

Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

Komite yang berada di bawah Direksi merupakan organ pendukung yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite ini memiliki tanggung jawab khusus berdasarkan mandat yang diberikan oleh Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi strategis Bank.

Committees under the Board of Directors are supporting organs established to assist the Board in carrying out management and oversight functions in accordance with Good Corporate Governance principles. These committees have specific responsibilities based on mandates granted by the Board of Directors to support the execution of the Bank's strategic functions.

Pendirian dan operasional komite-komite di bawah Direksi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mewajibkan adanya struktur yang jelas dan terorganisasi untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan dan pengendalian risiko.

The establishment and operation of committees under the Board of Directors refer to Financial Services Authority (OJK) regulations, including POJK No. 17/POJK.03/2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, which requires a clear and structured framework to ensure effective decision-making and risk control.

Komite Direksi Bank Papua tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko.
2. Komite Kredit.
3. Komite Kebijakan Perkreditan.
4. Komite ALCO.
5. Komite Teknologi Informasi.
6. Komite Pertimbangan Pegawai.

The Board of Directors' Committees of Bank Papua in 2025 are as follows:

1. *Risk Management Committee*
2. *Credit Committee*
3. *Credit Policy Committee*
4. *Asset and Liability Committee (ALCO)*
5. *Information Technology Committee*
6. *Employee Consideration Committee*

Penilaian kinerja Komite Direksi dilakukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite, serta hasil *Self Assessment*

The performance evaluation of the Board of Directors' Committees is based on the duties and responsibilities outlined in the Committee Charters, Committee Work



Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite menjadi pertimbangan penting bagi Direksi dalam proses pemberhentian atau penunjukan kembali anggota Komite yang bersangkutan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menilai dan meningkatkan efektivitas kinerja Komite.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berperan dalam mendukung Direksi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aktiva dan pasiva yang terkait dengan kegiatan perbankan yang memiliki tingkat risiko tertentu. Tugas utama komite ini meliputi identifikasi risiko yang muncul dari aktivitas bisnis di berbagai unit Bank, serta merumuskan kebijakan dan strategi manajemen risiko

yang efektif. Selain itu, komite juga menetapkan kebijakan pengendalian risiko dan secara berkala memantau dampak dari implementasi kebijakan serta strategi tersebut terhadap parameter risiko yang telah ditentukan.

PROFIL DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE

- Dasar Hukum Penunjukan
Surat Keputusan Direksi Nomor: 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Susunan keanggotaan Komite Kredit

Programs, and the results of the Bank Papua Good Corporate Governance Self-Assessment. The evaluation results of each Committee member serve as an important consideration for the Board of Directors in decisions regarding dismissal or reappointment. This evaluation also functions as a tool to assess and enhance the effectiveness of Committee performance.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee plays a role in supporting the Board of Directors in formulating policies related to asset and liability management in banking activities that involve certain levels of risk. The Committee's primary duties include identifying risks arising from business activities across various units of the Bank and formulating effective risk management policies and strategies.

In addition, the Committee establishes risk control policies and periodically monitors the impact of the implementation of such policies and strategies on predetermined risk parameters.

PROFILE AND MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE COMMITTEE

- Legal Basis of Appointment:
Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024
- Composition of the Credit Committee:

Jabatan-Position			
Anggota Tetap	Ketua	: Direktur Utama;	President Director;
	Wakil Ketua	: Direktur Kepatuhan;	Compliance Director;
	Sekretaris	: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Head of Bank Risk Management Division
	Wakil Sekretaris	: Pemimpin Divisi Kepatuhan	Head of Compliance Division
Anggota	Anggota Tetap	: Direktur Bisnis	Business Director
	Anggota Tetap	: Direktur Keuangan	Compliance Director
	Anggota Tetap	: Direktur Operasional	Director of Operations
	Anggota Tetap	: Pemimpin Divisi Hukum	Legal Division Head
	Anggota Tetap	: Pemimpin Divisi Audit Internal	Internal Audit Division Head
Anggota Tidak Tetap	Bidang Risiko kredit	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi;	Head of the Commercial and Corporate Business Division;
		Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer;	Head of the MSME and Consumer Business Division;
	Bidang Risiko Pasar dan Likuiditas	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis;	Head of the Business Risk Division;
		Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus.	Head of the Special Asset Management Division.
		Pemimpin Divisi Treasury dan International Banking;	Head of the Treasury and International Banking Division;
		Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa;	Head of the Fund Management and Services Division;
		Pemimpin Divisi Akuntansi.	Head of the Accounting Division.



Jabatan-Position

Bidang Risiko Operasional dan Risiko Lainnya :	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia;	Head of the Human Capital Management Division;
	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi;	Head of the Information Technology Division;
	Pemimpin Divisi Umum;	Head of the General Affairs Division;
	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan;	Head of the Network and Service Management Division;
	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan;	Head of the Corporate Secretary Division;
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis;	Head of the Strategic Planning Division;
	Pemimpin Departemen Anti Fraud.	Head of the Anti-Fraud Department.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Profil Anggota Komite Manajemen Risiko, silakan merujuk pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PROFILE OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

For further information regarding the profiles of the Risk Management Committee members, please refer to the Board of Directors Profile and Executive Officers Profile sections in the Company Profile chapter of this Annual Report.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi prinsip independensi. Komite ini beroperasi secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun, baik internal maupun eksternal. Anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari luar Bank diwajibkan untuk tidak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan Bank Papua.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee performs its duties and responsibilities by upholding the principle of independence. The Committee operates independently, free from interference by any party, whether internal or external. Members of the Risk Management Committee from outside the Bank are required not to have any personal interests or relationships that may give rise to conflicts of interest with Bank Papua.

Kriteria Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko:

1. Anggota tidak boleh memiliki hubungan keluarga, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota lain dalam Komite Manajemen Risiko.
2. Anggota tidak diperkenankan memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.
3. Anggota tidak boleh terlibat dalam kepemimpinan di Bank Papua maupun di perusahaan afiliasi Bank Papua.
4. Anggota tidak boleh memiliki kepemilikan saham di Bank Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Independence Criteria for Members of the Risk Management Committee:

1. Members must not have family relationships, either vertically or horizontally, with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other members of the Risk Management Committee;
2. Members must not have any financial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties that may affect their independence in decision-making;
3. Members must not hold management positions within Bank Papua or its affiliated companies;
4. Members must not have share ownership in Bank Papua, either directly or indirectly;



5. Anggota tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengurus partai politik atau sebagai pejabat di pemerintahan daerah yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Dengan menerapkan kriteria independensi ini, Komite Manajemen Risiko berkomitmen untuk memastikan bahwa semua aktivitasnya dilaksanakan dengan profesionalisme, transparansi, dan objektivitas. Tujuan dari komitmen ini adalah untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta mencapai tujuan strategis Bank Papua.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Bank Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan Komite Manajemen Risiko melalui pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan setidaknya satu kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Informasi lebih lanjut mengenai program pendidikan dan pelatihan tersebut dapat ditemukan dalam Bab Tatakelola (sub bab Pelatihan Direksi) dan Profil Perusahaan (sub bab pejabat eksekutif).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan secara rutin untuk membahas isu-isu terkait manajemen risiko.
2. Memantau besaran eksposur risiko yang harus dipelihara, sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Mengkaji laporan profil risiko yang disampaikan setiap triwulan dan laporan kesehatan bank yang disampaikan setiap semester oleh Divisi Manajemen Risiko, serta mengambil tindakan yang diperlukan.
4. Menanggapi laporan tentang pelanggaran limit yang diajukan oleh unit pengambil risiko melalui Divisi Manajemen Risiko, dan mengambil tindakan yang diperlukan.
5. Merekomendasikan metode dan parameter untuk pengukuran risiko yang akan digunakan oleh Bank.
6. Menyusun rekomendasi laporan untuk Direktur Utama terkait analisis eksposur risiko Bank dan dampaknya.
7. Menentukan parameter risiko dan menetapkan *capital at risk*.

5. *Members must not hold positions as political party officials or as officials in regional government that could affect their objectivity.*

By implementing these independence criteria, the Risk Management Committee is committed to ensuring that all its activities are carried out with professionalism, transparency, and objectivity, in support of Good Corporate Governance and the achievement of Bank Papua's strategic objectives.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Bank Papua is committed to continuously enhancing the competencies and capabilities of the Risk Management Committee through training and development programs conducted at least once a year. Throughout 2025, the Committee participated in various training and competency development programs. Further details can be found in the Governance chapter (subsection on Directors' Training) and the Company Profile chapter (subsection on Executive Officers).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Conducting regular meetings to discuss risk management issues;*
2. *Monitoring the level of risk exposure to be maintained in line with the Bank's established risk tolerance;*
3. *Reviewing quarterly risk profile reports and semi-annual bank soundness reports submitted by the Risk Management Division, and taking necessary actions;*
4. *Responding to reports of limit breaches submitted by risk-taking units through the Risk Management Division and taking appropriate actions;*
5. *Recommending methods and parameters for risk measurement to be used by the Bank;*
6. *Preparing recommendations for the President Director regarding analysis of the Bank's risk exposure and its impact;*
7. *Determining risk parameters and setting capital at risk; and*



8. Mengevaluasi penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi.
9. Memastikan bahwa strategi usaha jangka panjang sejalan dengan kebijakan risiko yang ada.
10. Mengkaji konsentrasi risiko secara keseluruhan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
11. Menilai kelayakan kredit dari seluruh *counterparties bank*.
12. Membahas penetapan limit, alokasi modal, serta pengawasan terhadap kepatuhan dan pelanggaran yang terjadi.
13. Mengkaji berbagai kebijakan risiko dan metodologi yang digunakan untuk pengukuran risiko.
14. Menganalisis hasil *Stress Testing* terkait risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional.
15. Mendokumentasikan semua keputusan yang diambil oleh komite.

8. *Evaluating the implementation of risk management across the organization.*
9. *Ensuring that long-term business strategies are aligned with established risk policies;*
10. *Reviewing overall risk concentrations and reporting to the President Director;*
11. *Assessing the creditworthiness of all bank counterparties;*
12. *Discussing the determination of limits, capital allocation, and monitoring compliance and any violations;*
13. *Reviewing various risk policies and methodologies used for risk measurement;*
14. *Analyzing the results of stress testing related to liquidity risk, market risk, credit risk, and operational risk; and*
15. *Documenting all decisions made by the Committee.*

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2024, yang diterbitkan pada 31 Desember 2024. Surat keputusan ini mengatur pembentukan Komite Manajemen Risiko di PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan menjelaskan tugas serta tanggung jawab komite tersebut.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

The Risk Management Committee operates in accordance with the charter stipulated in Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024, dated December 31, 2024. This decree governs the establishment of the Risk Management Committee at PT Bank Pembangunan Daerah Papua and outlines its duties and responsibilities.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI SERTA TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT

Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko merencanakan untuk mengadakan rapat minimal sekali setiap tiga bulan (setiap triwulan) atau sesuai kebutuhan. Tempat, waktu, dan tanggal rapat akan ditentukan sebelumnya agar semua anggota dapat mengatur jadwal untuk hadir.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

In 2025, the Risk Management Committee plans to convene meetings at least once every quarter or as required. The venue, time, and date of meetings are determined in advance to ensure all members can arrange their attendance.

Kebijakan mengenai rapat Komite Manajemen Risiko mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Komite di bawah Direksi. Untuk tahun 2025, frekuensi rapat akan ditetapkan sebagai berikut:

The policy regarding Risk Management Committee meetings follows the provisions set out in the Committee Charter under the Board of Directors. For 2025, the meeting frequency is determined as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting	Kehadiran Attendance	
			Total	%
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	4	4	100%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis		4	100%
Pujianto	Direktur Keuangan		4	100%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional		4	100%
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan		4	100%



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko Bank Papua telah melaksanakan rapat rutin sepanjang tahun 2025 untuk membahas pengelolaan risiko strategis, evaluasi profil risiko, dan pemantauan implementasi kebijakan. Hasil rekomendasi dari rapat ini disampaikan kepada Direksi sebagai bentuk akuntabilitas dalam mendukung tata kelola risiko yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah kegiatan Komite Manajemen Risiko selama tahun 2025.

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee of Bank Papua conducted regular meetings throughout 2025 to discuss strategic risk management, evaluate the Bank's risk profile, and monitor the implementation of policies. The recommendations resulting from these meetings were submitted to the Board of Directors as part of accountability in supporting effective and sustainable risk governance.

The following outlines the activities of the Risk Management Committee during 2025.

Hari/Tanggal	Agenda Rapat	Meeting agenda
24 Januari 2025	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2024	Discussion of Bank Soundness Rating – December 2024
23 April 2025	Pembahasan Profil Risiko Bank Papua Periode Maret 2025	Discussion of Bank Papua Risk Profile – March 2025
25 Juli 2025	Pembahasan Profil Risiko Bank Papua Periode Juni 2025	Discussion of Bank Papua Risk Profile – June 2025
17 Oktober 2025	Pembahasan Profil Risiko Bank Papua Periode September 2025	Discussion of Bank Papua Risk Profile – September 2025

PROFIL DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE

- Dasar Hukum Penunjukan
Komite Kredit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Susunan keanggotaan Komite Kredit

COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE AND STRUCTURE

- Legal Basis for Appointment
The Credit Committee was established based on Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024.
- Membership Composition of the Credit Committee

Jabatan-Position			
Susunan keanggotaan	Ketua	: Direktur Utama;	President Director;
	Wakil Ketua	: Tidak ada (jika diperlukan maka dapat ditunjuk Direktur Bisnis);	None (if necessary, a Business Director may be appointed);
	Sekretaris	: Kepala Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi.	Head of the Commercial and Corporate Business Division.
	Wakil Sekretaris	: Pemimpin Divisi Kepatuhan	Head of the Compliance Division
		: Direktur Kepatuhan;	Compliance Director;
		: Direktur Bisnis;	Business Director;
		: Direktur Keuangan;	Finance Director;
		: Direktur Operasional;	Operations Director;
	Anggota	: Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer;	Head of the MSME and Consumer Business Division;
		: Pemimpin Divisi Risiko Bisnis;	Head of the Business Risk Division;
		: Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan;	Head of the Network and Service Management Division;
		: Pemimpin Divisi Hukum;	Head of the Legal Division;
		: Pemimpin Divisi Kepatuhan;	Head of the Compliance Division;
		: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank;	Head of the Bank Risk Management Division;
		: Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus.	Head of the Special Asset Management Division.



PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Profil Anggota Komite Kredit, silakan merujuk pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Komite Kredit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh independensi, tanpa dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun, baik dari dalam maupun luar organisasi. Anggota Komite Kredit yang berasal dari luar Bank diwajibkan untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Bank Papua.

Kriteria Independensi Anggota Komite Kredit:

1. Anggota tidak memiliki hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota lain dalam Komite Kredit.
2. Anggota tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.
3. Anggota tidak terlibat dalam kepengurusan di Bank Papua atau perusahaan afiliasinya.
4. Anggota tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Papua, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
5. Anggota tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau pejabat pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

PROGRAM PELATIHAN ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE KREDIT

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Bank Papua secara berkesinambungan mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi komite yang berada di bawah Direksi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota komite memiliki keahlian yang relevan dan dapat mendukung praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Rincian mengenai program pelatihan dapat dilihat pada Bab Tatakelola (sub bab Pelatihan Direksi) dan Profil Perusahaan (sub bab pejabat eksekutif).

PROFILE OF CREDIT COMMITTEE MEMBERS

For further information regarding the profiles of the Credit Committee members, please refer to the Board of Directors Profile and Executive Officers Profile sections in the Company Profile chapter of this Annual Report.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee performs its duties and responsibilities with full independence, free from influence or intervention by any party, whether internal or external. Members of the Credit Committee from outside the Bank are required to ensure that they do not have any personal interests or relationships that may give rise to conflicts of interest with Bank Papua.

Independence Criteria for Members of the Credit Committee:

1. Members must not have family relationships, either directly or indirectly, with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other members of the Credit Committee;
2. Members must not have any financial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties that may affect their independence in decision-making;
3. Members must not hold management positions within Bank Papua or its affiliated companies;
4. Members must not have share ownership in Bank Papua, either directly or indirectly;
5. Members must not hold positions as political party officials or regional government officials that may affect their objectivity.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE CREDIT COMMITTEE

To support the effective execution of its duties, Bank Papua continuously organizes training and competency development programs for committees under the Board of Directors. These programs aim to ensure that each committee member possesses relevant expertise and supports sound corporate governance practices. Further details of these programs are available in the Governance chapter (subsection on Directors' Training) and the Company Profile chapter (subsection on Executive Officers).



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Tugas utama komite ini adalah meninjau, menganalisis, dan memberikan rekomendasi terkait berbagai pengajuan kredit. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai kredit sesuai dengan manajemen risiko dan kondisi likuiditas Bank. Dengan menjalankan fungsinya secara objektif dan profesional, Komite Kredit berkontribusi pada pemeliharaan kualitas portofolio kredit serta stabilitas keuangan Bank. Berikut ini adalah rincian tugas dan tanggung jawab utama Komite Kredit:

1. Memberikan rekomendasi mengenai persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan permohonan kredit, termasuk perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, dan penghapusan kredit, sesuai dengan wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan oleh komite.
2. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan mematuhi kebijakan perkreditan Bank, Pedoman Pelaksanaan Kredit, serta prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, dengan mempertimbangkan kondisi dan aspek likuiditas Bank.
3. Melaksanakan tugas utama dalam memberikan rekomendasi persetujuan kredit berdasarkan keahlian profesional, dengan cara yang jujur, objektif, cermat, konsisten, dan berkesinambungan.
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit agar tidak memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

PEDOMAN KERJA KOMITE KREDIT

Komite Kredit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman Kerja yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. Pedoman ini merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 yang diterbitkan pada 31 Desember 2024, mengenai Komite dan Keputusan Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI SERTA TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT

Kebijakan mengenai rapat Komite Manajemen Risiko Kredit mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Komite di bawah Direksi. Untuk tahun 2025, frekuensi rapat sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CREDIT COMMITTEE

The primary responsibility of the Credit Committee is to review, analyze, and provide recommendations on various credit applications. This process aims to ensure that all credit decisions are aligned with the Bank's risk management framework and liquidity conditions. By performing its functions objectively and professionally, the Credit Committee contributes to maintaining the quality of the loan portfolio and the Bank's financial stability.

The main duties and responsibilities of the Credit Committee include:

1. *Providing recommendations on the approval or rejection of credit applications, including extensions, restructuring, relief measures, and write-offs, in accordance with the authority and type of credit determined by the Committee;*
2. *Ensuring that all granted loans comply with the Bank's credit policies, Credit Implementation Guidelines, and prudent lending principles, while considering the Bank's liquidity condition;*
3. *Carrying out its responsibilities in providing credit approval recommendations based on professional expertise, in an honest, objective, prudent, consistent, and sustainable manner;*
4. *Rejecting requests and/or influence from interested parties that may lead to merely formal or non-substantive credit approvals.*

CREDIT COMMITTEE CHARTER

The Credit Committee performs its duties and responsibilities in accordance with the Credit Policy and Procedure Guidelines, as stipulated in Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024, concerning Committees and Credit Decisions of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

The policy regarding meetings of the Credit Risk Management Committee follows the provisions set out in the Committee Charter under the Board of Directors. For 2025, the meeting frequency is as follows:



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting	Kehadiran Attendance	
			Total	%
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	94	25	27%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis		89	95%
Pujianto	Direktur Keuangan		88	94%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional		36	38%
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan		27	29%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE KREDIT

Komite Kredit Bank Papua telah melaksanakan rapat rutin sepanjang tahun 2025 untuk membahas pengelolaan risiko strategis, evaluasi profil risiko, dan pemantauan implementasi kebijakan.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CREDIT COMMITTEE ACTIVITIES

Throughout 2025, the Credit Committee of Bank Papua conducted regular meetings to discuss strategic risk management, evaluate the Bank's risk profile, and monitor the implementation of policies.

No Komite	Tanggal Komite	Nama Debitur	Direksi
01/KEP.KOM/DIR-BPD/I/2025	08 Januari 2025	Budi Santoso (Kc Arso)	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
02/KEP.KOM/DIR-BPD/I/2025	10 Januari 2025	CV Dwi Putri Ribidang (Tagor Hutapea)	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
03/KEP.KOM/DIR-BPD/I/2025	13 Januari 2025	Pemda Kab Jayapura	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
04/KEP.KOM/DIR-BPD/I/2025	23 Januari 2025	PT Fajar Irian Jaya Company	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
05/KEP.KOM/DIR-BPD/I/2025	23 Januari 2025	Rondong Sadara	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
06/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	04 Maret 2025	PT Paradiso Pakarindo	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
07/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	04 Maret 2025	Ronaldo Ang	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
08/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	04 Maret 2025	Bintang Timur CV	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
09/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	04 Maret 2025	Anugrah Roli	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
10/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	Tala Chayadi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional
11/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	Giok Mien	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
12/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	Simon Abraham	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
13/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	Maslan	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
14/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	PT Papr	Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
15/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	Pemda Manokwari	Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
16/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	24 Maret 2025	Bpkd, Bapeda, Inspektorat	Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
17/KEP.KOM/DIR-BPD/III/2025	25 Maret 2025	Pemda Biak	Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
18/KEP.KOM/DIR-BPD/IV/2025	30 April 2025	PT Smp	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
19/KEP.KOM/DIR-BPD/IV/2025	25 April 2025	PT Tunas Jaya Irja	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
20/KEP.KOM/DIR-BPD/IV/2025	28 April 2025	CV Rahadityani Sentora	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
21/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	06 Mei 2025	PT Andriyani Jaya Abadi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
22/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	14 Mei 2025	PT Tunas Digul Indah Permai	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
23/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	14 Mei 2025	Wiro Thie	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
24/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	14 Mei 2025	PT Indomarind	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan



No Komite	Tanggal Komite	Nama Debitur	Direksi
25/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	21 Mei 2025	Sabar Datu Linggi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
26/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	28 Mei 2025	PT Nesata Makeradi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
27/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	28 Mei 2025	CV Halijaya	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
28/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	28 Mei 2025	PT Fajar Irian Jaya Company	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
29/KEP.KOM/DIR-BPD/V/2025	28 Mei 2025	PT Papua Mekar Abadi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
30/KEP.KOM/DIR-BPD/VI/2025	05 Juni 2025	PT Bumi Jaya Utama	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
31/KEP.KOM/DIR-BPD/VI/2025	20 Juni 2025	PT Sagita Hotelindo Papua	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
32/KEP.KOM/DIR-BPD/VI/2025	20 Juni 2025	CV Agro Surya	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
33/KEP.KOM/DIR-BPD/VI/2025	20 Juni 2025	PT Puncak Sejahtera Abadi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
34/KEP.KOM/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	CV Toko Bintang Kartika	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
35/KEP.KOM/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	PT Sinar Matahari Indah Permai	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
36/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	08 Juli 2025	Itutkian (Kc Sarmi)	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
37/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	08 Juli 2025	PT Bina Karya	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
38/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	08 Juli 2025	Arief Rendra Tjahyadi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
39/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	08 Juli 2025	Maslan	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
40/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	08 Juli 2025	CV Brilian Karya Sentosa	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
41/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	22 Juli 2025	Kkpd Kabupaten Manokwari	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
42/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	30 Juli 2025	Bg CV Dwi Putri Ribiday	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
43/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	30 Juli 2025	PT Graha Mulia Sentosa	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
44/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	30 Juli 2025	PT Cenderawasih Mas Indonesia	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
45/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	30 Juli 2025	Emi Theresia	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
46/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	30 Juli 2025	PT Arohata Meridien	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
47/KEP.KOM/DIR-BPD/VII/2025	30 Juli 2025	PT Alam Indah	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
48/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	01 Agustus 2025	PT Oki Pulp & Paper Mills Bank Dki	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
49/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	01 Agustus 2025	PT Oki Pulp & Paper Mills Bank Dca	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
50/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	01 Agustus 2025	PT Sahid Pum Dinamika	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
51/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	01 Agustus 2025	PT Hotel Sahid Jaya International	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
52/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	15 Agustus 2025		Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
53/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	25 Agustus 2025	PT Rajawali Perkasa Raya	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
54/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	25 Agustus 2025	CV Habiasaran Group	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
55/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	25 Agustus 2025	CV Dwi Putri Ribidang (Tagor Hutapea)	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
56/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	25 Agustus 2025	PT Tunas Jaya Irja & PT Tunas Digul Indah Perpai	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
57/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	26 Agustus 2025	PT Anugerah Asmat	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
58/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	29 Agustus 2025	PT Bumi Jaya Utama	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan



No Komite	Tanggal Komite	Nama Debitur	Direksi
59/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	29 Agustus 2025	Pemda Pegaf	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
60/KEP.KOM/DIR-BPD/VIII/2025	29 Agustus 2025	PT Cimanggis Cibitung	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
61/KEP.KOM/DIR-BPD/IX/2025	12 September 2025	Pemda	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
62/KEP.KOM/DIR-BPD/IX/2025	12 September 2025	CV Cahaya Gemilang	Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
63/KEP.KOM/DIR-BPD/IX/2025	22 September 2025	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
64/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	02 Oktober 2025	CV Lima Delapan Electronic	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
65/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	02 Oktober 2025	PT Anugerah Benet Perkasa	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
66/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	02 Oktober 2025	PT Bintang Timur Berjaya	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
67/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	03 Oktober 2025	Pemda Kab Sorong Selatan	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
68/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	03 Oktober 2025	Pemda Kab Jayapura	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
69/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	03 Oktober 2025	Pemda Kab Mansel	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
70/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	20 Oktober 2025	CV Lima Delapan Electronic	Direktur Utama
71/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	23 Oktober 2025	PT Menara Grand Papua	Direktur Bisnis, , Direktur Keuangan, Direktur Operasional
72/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	23 Oktober 2025	PT Adikarya Tanrisau	Direktur Bisnis, Direktur Operasional
73/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	30 Oktober 2025	Iwan Liandry	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
74/KEP.KOM/DIR-BPD/X/2025	31 Oktober 2025	PT Auto Samudera	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
75/KEP.KOM/DIR-BPD/XI/2025	07 November 2025	Kab Nduga	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
76/KEP.KOM/DIR-BPD/XI/2025	20 November 2025	PT Bumi Sarana B	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan DIROPS
77/KEP.KOM/DIR-BPD/XI/2025	21 November 2025	PT Anugerah Benet Perkasa	
78/KEP.KOM/DIR-BPD/XI/2025	27 November 2025	PT Lian Abadi	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
79/KEP.KOM/DIR-BPD/XI/2025	28 November 2025	CV Bintang Mas	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
80/KEP.KOM/DIR-BPD/XI/2025	03 Desember 2025	Pemda Kab Biak Numfor	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
81/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	03 Desember 2025	PT Waskita Bumi Wira	
82/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	08 Desember 2025	CV Dwi Putri Ribidang (Tagor Hutapea)	Direktur Bisnis, Direktur Operasional
83/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	11 Desember 2025	PT Bumi Karsa	DIRBIS DIROPS DIRKEU DIRPAT
84/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Pemda Kab Yahukimo	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
85/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	CV Mandala Utama	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
86/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Pemda Nabire	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
87/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	PT Sriwijaya Samabusa	
88/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	22 Desember 2025	Pemda Kepulauan Yapen	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
89/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	29 Desember 2025	Pemda Manokwari	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan



No Komite	Tanggal Komite	Nama Debitur	Direksi
90/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	29 Desember 2025	PT Bomberai Indah	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
91/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	30 Desember 2025	Pemda Biak	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan
92/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	30 Desember 2025	CV Wondama Sentosa	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
93/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	30 Desember 2025	PT Akam	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan
94/KEP.KOM/DIR-BPD/XII/2025	31 Desember 2025	PT Cahaya Mitra Hospitalisasi Hotel Horizon Entrop	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan DIROPS

SERTIFIKASI PROFESI KOMITE KREDIT

Keanggotaan Komite Kredit Bank Papua tidak mensyaratkan sertifikasi khusus. Namun, setiap ketua dan anggota komite memiliki sertifikasi serta kompetensi yang relevan dengan tugasnya. Informasi mengenai sertifikasi dan kualifikasi masing-masing anggota dapat ditemukan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini, khususnya dalam profil Direksi dan Pimpinan Divisi.

PROFESSIONAL CERTIFICATION OF THE CREDIT COMMITTEE

Membership in the Credit Committee of Bank Papua does not require specific certification. However, each Chairperson and member possesses certifications and competencies relevant to their respective roles. Information regarding the certifications and qualifications of each member can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report, particularly in the profiles of the Board of Directors and Division Heads.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan berfungsi untuk membantu Direksi Bank Papua dalam merumuskan kebijakan kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tugas komite ini mencakup memastikan kebijakan perkreditan dijalankan secara efektif, mengawasi implementasi kebijakan, serta memantau kualitas dan perkembangan portofolio kredit secara menyeluruh. Selain itu, komite ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kredit dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan kredit yang sehat, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kepentingan bisnis bank.

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee functions to assist the Board of Directors of Bank Papua in formulating credit policies in line with the prudential banking principle. The Committee's duties include ensuring the effective implementation of credit policies, overseeing their execution, and monitoring the overall quality and development of the credit portfolio. In addition, the Committee provides strategic recommendations to enhance the effectiveness of credit risk management and to ensure sustainable and healthy credit growth, in accordance with applicable regulations and the Bank's business interests.

PROFIL DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE

- Dasar Hukum Penunjukan
Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 31 Desember 2024.

PROFILE AND MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE COMMITTEE

- Legal Basis of Appointment:
Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 concerning the Corporate Governance Implementation Guidelines (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated December 31, 2024.



• Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

• Composition of the Credit Policy Committee:

Jabatan	Position
Direktur Utama	Ketua <i>President director</i>
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Sekretaris <i>Head of Commercial and Corporate Business Division</i>
Direktur Kepatuhan	Anggota <i>Director of Compliance</i>
Direktur Bisnis	Anggota <i>Business Director</i>
Direktur Keuangan	Anggota <i>Director of Finance</i>
Direktur Operasional	Anggota <i>director of Operations</i>
Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	Anggota <i>Head of UMK and Consumer Business Division</i>
Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Anggota <i>Head of Special Asset Management Division</i>
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Anggota <i>Business Risk Division Leader</i>
Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	Anggota <i>Network and Service Management Division Leader</i>
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota <i>Head of Legal Division</i>
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota <i>Compliance Division Leader</i>
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Anggota <i>Head of Bank Risk Management Division</i>

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Untuk informasi lebih lanjut tentang Profil Anggota Komite Kebijakan Kredit, silakan lihat bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PROFILE OF CREDIT POLICY COMMITTEE MEMBERS

For further information regarding the profiles of the Credit Policy Committee members, please refer to the Board of Directors Profile and Executive Officers Profile sections in the Company Profile chapter of this Annual Report.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan beroperasi secara independen, tanpa campur tangan dari pihak internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas kebijakan kredit. Setiap keputusan yang diambil oleh Komite ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku.

Kriteria Independensi Anggota Komite Kebijakan Perkreditan:

1. Anggota tidak memiliki hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota lain dalam Komite Kredit.
2. Anggota tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.
3. Anggota tidak terlibat dalam kepengurusan di Bank Papua atau perusahaan afiliasinya.
4. Anggota tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Papua, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
5. Anggota tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau pejabat pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee operates independently, without interference from internal or external parties that may affect the objectivity and integrity of credit policies. All decisions made by the Committee are based on prudential principles, Good Corporate Governance, and compliance with applicable banking regulations.

Independence Criteria for Members of the Credit Policy Committee:

1. Members must not have family relationships, either directly or indirectly, with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other members of the Credit Committee;
2. Members must not have any financial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties that may affect their independence in decision-making;
3. Members must not hold management positions within Bank Papua or its affiliated companies;
4. Members must not have share ownership in Bank Papua, either directly or indirectly;
5. Members must not hold positions as political party officials or regional government officials that may affect their objectivity.



PROGRAM PELATIHAN ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Bank Papua secara berkesinambungan mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi komite di bawah Direksi. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota komite memiliki keahlian yang relevan serta mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik. Rincian program pelatihan dapat dilihat pada subbab terkait dalam Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan.

TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

Tugas utama KKP mencakup memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, KKP bertanggung jawab untuk memantau kualitas portofolio kredit dan menangani kredit bermasalah. Berikut adalah rincian tugas dan tanggung jawab utama KKP dalam mendukung pengelolaan perkreditan yang sehat dan berkelanjutan:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), dengan fokus pada perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi pelaksanaan KPB agar berjalan secara konsisten dan konsekuen, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam penerapannya.
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi jika diperlukan perubahan atau penambahan pada KPB.
4. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas keseluruhan portofolio perkreditan.
 - b. Pelaksanaan kewenangan dalam pengambilan keputusan kredit.
 - c. Proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank serta debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan yang terdapat dalam KPB.
 - g. Upaya Bank untuk memastikan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

To support the effective execution of its duties, Bank Papua continuously organizes training and competency development programs for committees under the Board of Directors. These programs aim to ensure that each committee member possesses relevant expertise and supports sound corporate governance practices. Details of these programs can be found in the relevant subsection of the Corporate Governance Report chapter.

DUTIES OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE (KKP)

The primary duties of the Credit Policy Committee include providing input in the formulation of credit policies, overseeing their implementation, and conducting periodic evaluations to ensure effectiveness and compliance with regulations. In addition, the Committee is responsible for monitoring the quality of the credit portfolio and handling non-performing loans.

The detailed duties and responsibilities of the KKP include:

1. Providing input to the Board of Directors in the formulation of the Bank's Credit Policy (KPB), with a focus on prudential lending principles;
2. Overseeing the implementation of the KPB to ensure consistency and effectiveness, and formulating solutions to address any obstacles or challenges;
3. Conducting periodic reviews of the KPB and providing recommendations to the Board of Directors for any necessary revisions or enhancements;
4. Monitoring and evaluating:
 - a. The overall development and quality of the credit portfolio;
 - b. The exercise of authority in credit decision-making;
 - c. The process of credit granting, development, and quality of loans extended to related parties and certain large debtors;
 - d. Compliance with the Legal Lending Limit (LLL/ BMPK);
 - e. Adherence to applicable laws and regulations in credit activities;
 - f. The resolution of non-performing loans in accordance with the KPB;
 - g. The Bank's efforts to ensure the adequacy of loan loss provisions.



PEDOMAN KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja yang diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. Pedoman ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2024 mengenai Komite dan Keputusan Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

KOMITE ALCO (ASSET AND LIABILITY COMMITTEE)

Komite ALCO memiliki peran penting dalam membantu Direksi memberikan arahan terkait pengelolaan aset dan kewajiban Bank. Dalam melaksanakan tugasnya, komite ini mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi, dan risiko likuiditas, sambil memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, Komite ALCO juga mendukung pelaksanaan fungsi Manajemen Aset dan Kewajiban (ALMA). Tugas ini mencakup pengelolaan likuiditas, manajemen kesenjangan, manajemen valuta asing, serta pengelolaan pendapatan dan investasi. Komite ini secara rutin mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya terhadap posisi Bank Papua. Mereka juga bertanggung jawab untuk menghitung biaya dana, menetapkan suku bunga untuk giro, tabungan, dan deposito, serta menentukan harga *transfer* internal untuk dana.

PROFIL DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE

- Dasar Hukum Penunjukan
Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 31 Desember 2024.
- Susunan keanggotaan Komite Kebijakan ALCO

CREDIT POLICY COMMITTEE CHARTER

The Credit Policy Committee performs its duties in accordance with the Credit Policy and Procedure Guidelines, based on Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated January 2, 2024, concerning Committees and Credit Decisions of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

The ALCO plays a key role in assisting the Board of Directors in providing direction on the management of the Bank's assets and liabilities. In performing its duties, the Committee considers various risks, including interest rate risk, foreign exchange risk, position risk, and liquidity risk, while ensuring compliance with regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK).

In addition, ALCO supports the implementation of Asset and Liability Management (ALMA), which includes liquidity management, gap management, foreign exchange management, and income and investment management. The Committee regularly evaluates economic indicators and their outlook, as well as their impact on Bank Papua's position. It is also responsible for calculating the cost of funds, determining interest rates for demand deposits, savings, and time deposits, and setting internal fund transfer pricing.

PROFILE AND MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE COMMITTEE

- Legal Basis of Appointment:
Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 concerning the Corporate Governance Implementation Guidelines (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated December 31, 2024.
- Composition of the ALCO Committee:



	Jabatan	Position
	Ketua I : Direktur Utama	Head I: President Director
	Ketua II : Direktur Bisnis	Head II: Business Director
	Ketua III : Direktur Keuangan	Head III: Finance Director
	Sekretaris : Pemimpin Divisi <i>Treasury</i>	Secretary: Treasury Division Head
Anggota Non Voting Member	Direktur Kepatuhan	Compliance Director
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Bank Risk Management Division Head
	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Compliance Division Head
	Pemimpin Divisi Audit Internal	Internal Audit Division Head
Anggota-Member	Direktur Operasional	Director of Operations
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Strategic Planning Division Head
	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Commercial and Corporate Business Division Head
	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Special Asset Management Division Head
	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Business Risk Division Head
	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Information Technology Division Head
	Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	MSME and Consumer Business Division Head
	Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana Jasa dan <i>E-Banking</i>	Fund Management and E-Banking Division Head
	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	Network and Service Management Division Head
	Pemimpin Divisi Akuntansi	Accounting Division Head
	Pemimpin Cabang Utama Jayapura	Jayapura Main Branch Manager

PROFIL ANGGOTA KOMITE ALCO

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Profil Anggota Komite ALCO, silakan lihat bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Komite ALCO menjalankan tugasnya dengan penuh independensi, tanpa adanya campur tangan dari pihak internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas kebijakan kredit. Setiap keputusan yang diambil oleh Komite ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku.

Kriteria Independensi Anggota Komite ALCO:

1. Anggota tidak memiliki hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota lain dalam Komite Kredit.
2. Anggota tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.

PROFILE OF ALCO COMMITTEE MEMBERS

For further information regarding the profiles of ALCO Committee members, please refer to the Board of Directors Profile and Executive Officers Profile sections in the Company Profile chapter of this Annual Report.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF ALCO COMMITTEE MEMBERS

The ALCO Committee performs its duties with full independence, free from interference by internal or external parties that may affect the objectivity and integrity of its policies. All decisions are based on prudential principles, Good Corporate Governance, and compliance with applicable banking regulations.

Independence Criteria for ALCO Committee Members:

1. Members must not have family relationships, either directly or indirectly, with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other committee members;
2. Members must not have any financial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties that may affect independence in decision-making;



3. Anggota tidak terlibat dalam kepengurusan di Bank Papua atau perusahaan afiliasinya.
4. Anggota tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Papua, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
5. Anggota tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau pejabat pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

PROGRAM PELATIHAN ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE ALCO

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Bank Papua secara berkesinambungan mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi komite di bawah Direksi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota komite memiliki keahlian yang relevan dan mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik. Rincian mengenai program pelatihan dapat dilihat pada subbab terkait dalam Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALCO

Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban keuangan Bank agar tetap optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko. Tanggung jawab komite ini mencakup perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, evaluasi struktur neraca, dan penetapan strategi yang mendukung pencapaian tujuan bisnis Bank. Selain itu, ALCO bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan selaras dengan kondisi ekonomi, regulasi perbankan, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab utama ALCO dalam mendukung stabilitas keuangan Bank:

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA),
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan,
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposur Asset/Liability Management,
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan,
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :

3. *Members must not hold management positions within Bank Papua or its affiliated entities;*
4. *Members must not have share ownership in Bank Papua, either directly or indirectly;*
5. *Members must not hold positions as political party officials or regional government officials that may affect objectivity.*

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE ALCO COMMITTEE

To support effective performance, Bank Papua continuously conducts training and competency development programs for committees under the Board of Directors. These programs aim to ensure that each member possesses relevant expertise and supports sound corporate governance practices. Details are available in the relevant subsection of the Corporate Governance chapter.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO

The Asset and Liability Committee (ALCO) plays a key role in maintaining an optimal and sustainable balance between the Bank's assets and liabilities in line with risk management principles. Its responsibilities include formulating financial management policies, evaluating balance sheet structure, and setting strategies to support the Bank's business objectives.

The main duties and responsibilities of ALCO include:

1. *Establishing overall Bank objectives, strategies, and policies for Asset and Liability Management (ALMA);*
2. *Reviewing whether guidelines and policies are consistently aligned with ALMA objectives and banking developments;*
3. *Reviewing balance sheet structure and assessing Asset/Liability Management risks and exposures;*
4. *Evaluating economic forecasts, interest rates, and exchange rate projections to guide policy decisions;*
5. *Establishing limits and guidelines for risk management, including:*



- a. Risiko Likuiditas (Liquidity Management)
- b. Risiko Suku Bunga (Gap Management)
- c. Risiko Portofolio (Earning & Investment Management)
6. Mereview dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga dana.
7. Menetapkan batas (Limit) Primary Reserves (GWM, Nostro, dan Kas).
8. Menetapkan batas (Umit) Secondary Reserve serta instrumennya.
9. Menetapkan batas (Limit) gap serta instrumennya.
10. Menetapkan batas (Limit) kredit serta penyebarannya.
11. Menetapkan batas KPMM (CAR) untuk risiko pa&:ar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar).
12. Menetapkan harga *transfer* dana internal (Internal Funds *Transfer* Rate) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
13. Mereview dan menetapkan limit-limit kepemilikan surat berharga.
14. Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
15. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank.

Tanggung jawab ALCO meliputi penetapan tujuan ALMA, pengambilan keputusan terkait ALMA, pemantauan kegiatan, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan ALMA.

PEDOMAN KERJA ALCO

ALCO melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) mengenai Manajemen Aset dan Liabilitas, serta Standar Likuiditas yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 46/DIR-BPD/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021. Surat keputusan ini berkaitan dengan pembentukan Asset and Liability Committee (ALCO) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Selain itu, pedoman ini juga disesuaikan dengan peraturan dan regulasi perbankan terbaru, yang mencakup pengaturan lebih mendetail mengenai Tata Tertib Kerja, Etika Kerja, serta waktu dan tata cara rapat yang belum diatur secara rinci dalam BPP Buku III mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) Direksi.

- a. Liquidity Risk (Liquidity Management)
- b. Interest Rate Risk (Gap Management)
- c. Portfolio Risk (Earnings & Investment Management)
6. Reviewing and determining lending and funding interest rates;
7. Setting limits for Primary Reserves (Statutory Reserves/ GWM, Nostro accounts, and cash);
8. Setting limits for Secondary Reserves and their instruments;
9. Setting gap limits and related instruments;
10. Setting credit limits and their distribution;
11. Establishing Capital Adequacy (CAR/KPMM) limits for market risk (interest rate and exchange rate risks);
12. Determining Internal Funds Transfer Pricing (FTP) to improve branch efficiency;
13. Reviewing and setting limits on securities holdings;
14. Reviewing the performance and position of the Bank's assets and liabilities to assess the impact of ALCO decisions on business objectives and regulatory compliance;
15. Adjusting strategies, limits, guidelines, and policies to achieve ALCO and Bank objectives.

ALCO's responsibilities include setting ALMA objectives, making ALMA-related decisions, monitoring activities, and evaluating the implementation outcomes of ALMA policies.

ALCO CHARTER

ALCO performs its duties based on the Company Policy Manual (BPP) on Asset and Liability Management and Liquidity Standards, as stipulated in Board of Directors Decree No. 46/DIR-BPD/VII/2021 dated July 28, 2021, concerning the establishment of the Asset and Liability Committee (ALCO) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. This guideline is also aligned with the latest banking regulations, including detailed provisions on working procedures, code of conduct, and meeting arrangements not fully covered in the BPP Book III on Good Corporate Governance (GCG) of the Board of Directors.



PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA ALCO

DIVISION OF DUTIES AMONG ALCO MEMBERS

Jabatan dalam ALCO	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and responsibilities
ALCO	Mendiskusikan/menetapkan/meninjau kembali kebijakan	Discuss/set/review policies
Sekretaris ALCO	Menganalisa/melaporkan/mengusulkan langkah kebijakan	Analyze/report/propose policy steps
SSG-ALCO	Menganalisa/mengumpulkan informasi	Analyze/collect information
Cabang/Divisi Terkait	Melaksanakan kebijakan	Implementing policies

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT KOMITE ALCO

Bank Papua menyelenggarakan rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCO) secara berkala. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pengganti dan dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota. Rapat ini diadakan setiap bulan, setidaknya sekali dalam satu bulan. Keputusan yang diambil dalam rapat ALCO merupakan keputusan tertinggi dalam kebijakan operasional Bank.

POLICY AND FREQUENCY OF DIRECTORS' ATTENDANCE AT ALCO COMMITTEE MEETINGS

Bank Papua holds regular Asset and Liability Committee (ALCO) meetings. ALCO meetings are chaired by the Chair or Alternate Chair and may be held if attended by more than 50% of members. These meetings are held monthly, at least once a month. Decisions made at ALCO meetings are the highest level of the Bank's operational policy.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting	Kehadiran Attendance	
			Total	%
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	12	10	83%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis		12	100%
Pujianto	Direktur Keuangan		11	92%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional		10	83%
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan		8	67%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE ALCO

Sepanjang tahun 2025, Komite ALCO telah mengadakan 12 (dua belas) rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF ALCO COMMITTEE ACTIVITIES

Throughout 2025, the ALCO Committee held 12 (twelve) meetings with the following discussion agendas:

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat/	Meeting agenda
1	27 Desember 2024	- Portofolio Asset dan Liability. - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Januari 2026 - Strategi Pendanaan dan Pelayanan Kredit Triwulan I tahun 2026 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) to be used for the calculation of Inter-Office Interest (BAK) for January 2026; - Funding Strategy and Loan Services for Q1 2026; - Others.



No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat/	Meeting agenda
2	24 Januari 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Februari 2025 - Strategi Pendanaan dan pelayanan kredit Triwulan I tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for February 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q1 2025; - Others.
3	24 Februari 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Maret 2025 - Strategi Pendanaan dan pelayanan kredit Triwulan I tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for March 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q1 2025; - Others.
4	24 Maret 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan April 2025 - Strategi Pendanaan dan pelayanan kredit Triwulan II tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for April 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q2 2025; - Others.
5	28 April 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Mei 2025 - Strategi Pendanaan dan pelayanan kredit Triwulan II tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for May 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q2 2025; - Others.
6	27 Mei 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Juni 2025 - Strategi Pendanaan dan pelayanan kredit Triwulan II tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for June 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q2 2025; - Others.
7	30 Juni 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Juli 2025 - Strategi Pendanaan dan pelayanan kredit Triwulan III tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for July 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q3 2025; - Others.



No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat/	Meeting agenda
8	29 Juli 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro), Tabungan, Deposito dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Agustus 2025 - Strategi Pendanaan dan Pelayanan Kredit Triwulan III tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for August 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q3 2025; - Others.
9	29 Agustus 2025	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan September 2025. - Strategi Pendanaan dan pelayanan Kredit Triwulan III tahun 2025 - Lain - lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for September 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q3 2025; - Others.
10	29-Sep-25	- Portofolio Asset dan Liability. - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Oktober 2025 - Strategi Pendanaan dan Pelayanan Kredit Triwulan IV tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for October 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q4 2025; - Others.
11	28 Oktober 2025	- Portofolio Asset dan Liability. - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan November 2025 - Strategi Pendanaan dan Pelayanan Kredit Triwulan IV tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for November 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q4 2025; - Others.
12	25 November 2025	- Portofolio Asset dan Liability. - Evaluasi suku bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit - Penetapan Cost Of Fund (COF) dan Prime Rate (PR) yang akan dipergunakan untuk perhitungan Bunga Antar Kantor (BAK) bulan Desember 2025 - Strategi Pendanaan dan Pelayanan Kredit Triwulan IV tahun 2025 - Lain-lain	- Asset and Liability Portfolio; - Evaluation of interest rates on Third-Party Funds (Demand Deposits, Savings, and Time Deposits) and Loans; - Determination of Cost of Fund (COF) and Prime Rate (PR) for Inter-Office Interest (BAK) calculation for December 2025; - Funding Strategy and Loan Services for Q4 2025; - Others.

SERTIFIKASI PROFESI

Keanggotaan Komite ALCO tidak diharuskan memiliki sertifikasi tertentu. Namun, sertifikasi yang dimiliki oleh setiap ketua dan anggota komite dapat ditemukan dalam profil Direksi dan Pemimpin Divisi pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

PROFESSIONAL CERTIFICATION

Membership in the ALCO Committee does not require specific certification. However, the certifications held by each Chairperson and member can be found in the profiles of the Board of Directors and Division Heads in the Company Profile chapter of this Annual Report.



KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional yang terkait dengan teknologi (risiko teknologi). Tugas ini dilakukan dengan cara mengembangkan dan menetapkan kebijakan serta strategi, serta mengelola sistem teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan unit-unit dan menyesuaikan dengan tuntutan kepuasan nasabah dan pasar.

PROFIL DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE

- Dasar Hukum Penunjukan
Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 31 Desember 2024.
- Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Teknologi Informasi

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The Information Technology Committee is responsible for managing operational risks related to technology (technology risk). This responsibility is carried out through the development and establishment of policies and strategies, as well as the management of information technology systems. The objective is to meet the needs of business units while aligning with customer satisfaction and market demands.

PROFILE AND MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE COMMITTEE

- Legal Basis of Appointment:
Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 concerning the Corporate Governance Implementation Guidelines (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dated December 31, 2024.
- Composition of the Information Technology Committee:

	Jabatan	Position
Anggota	Ketua : Direktur Utama	Chairman: President Director
	Wakil Ketua : Direktur Operasional	Deputy Chairman: Operational Director
	: Direktur Bisnis	: Business Director
	: Direktur Kepatuhan	: Compliance Director
	: Direktur Keuangan	: Finance Director
	Sekretaris : Divisi Teknologi Informasi	Secretary: Information Technology Division
	: Divisi Akuntansi	: Accounting Division
	: Divisi Audit Internal	: Internal Audit Division
	: Divisi Bisnis Komersial & Korporasi	: Commercial & Corporate Business Division
	: Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	: MSME and Consumer Business Division
	: Divisi Hukum	: Legal Division
	: Divisi Kepatuhan	: Compliance Division
	: Divisi Manajemen Risiko Bank	: Bank Risk Management Division
	: Divisi Pengelolaan Aset Khusus	: Special Asset Management Division
	: Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan E-Banking	: Fund Management, Services, and E-Banking Division
	: Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	: Network and Service Management Division
	: Divisi Perencanaan Strategis	: Strategic Planning Division
	: Divisi Risiko Bisnis	: Business Risk Division
	: Divisi Treasury	: Treasury Division
	: Divisi Umum	: General Division
	: KCU Jayapura	: Jayapura Branch Office

PROFIL ANGGOTA KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Profil Anggota Komite Teknologi Informasi, silakan lihat bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PROFILE OF INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE MEMBERS

For further information regarding the profiles of the Information Technology Committee members, please refer to the Board of Directors Profile and Executive Officers Profile sections in the Company Profile chapter of this Annual Report.



PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi menjalankan tugasnya dengan penuh independensi, tanpa adanya campur tangan dari pihak internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas kebijakan kredit. Setiap keputusan yang diambil oleh Komite ini berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku.

Kriteria Independensi Anggota Komite Kebijakan Kredit:

1. Anggota tidak memiliki hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota lain dalam Komite Kredit.
2. Anggota tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.
3. Anggota tidak terlibat dalam kepengurusan di Bank Papua atau perusahaan afiliasinya.
4. Anggota tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Papua, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
5. Anggota tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau pejabat pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

PROGRAM PELATIHAN ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Bank Papua secara berkesinambungan mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi komite di bawah Direksi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota komite memiliki keahlian yang relevan dan mendukung praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Rincian program pelatihan dapat dilihat pada subbab terkait dalam Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan teknologi informasi di Bank, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut selaras dengan visi bisnis dan mendukung efisiensi operasional. Tanggung jawab utama komite ini mencakup perumusan kebijakan, pengawasan implementasi proyek teknologi, serta pengelolaan risiko TI secara efektif. Dengan struktur tugas dan tanggung jawab yang jelas,

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The Information Technology Committee performs its duties with full independence, without interference from internal or external parties that may affect the objectivity and integrity of its policies. All decisions are based on prudential principles, Good Corporate Governance, and compliance with applicable banking regulations.

Independence Criteria for Members of the Information Technology Committee:

1. *Members must not have family relationships, either directly or indirectly, with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other committee members;*
2. *Members must not have any financial relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties that may affect independence in decision-making;*
3. *Members must not hold management positions within Bank Papua or its affiliated companies;*
4. *Members must not have share ownership in Bank Papua, either directly or indirectly;*
5. *Members must not hold positions as political party officials or regional government officials that may affect their objectivity.*

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

To support effective performance, Bank Papua continuously conducts training and competency development programs for committees under the Board of Directors. These programs aim to ensure that each member possesses relevant expertise and supports sound corporate governance practices. Details of these programs can be found in the relevant subsection of the Corporate Governance chapter.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The Information Technology Committee plays a crucial role in the Bank's information technology management, ensuring that it aligns with the business vision and supports operational efficiency. Its primary responsibilities include policy formulation, oversight of technology project implementation, and effective IT risk management. With a clearly defined structure of duties and responsibilities, the Information Technology Committee contributes to the



Komite Teknologi Informasi berkontribusi terhadap optimalisasi sistem informasi dan peningkatan daya saing Bank melalui inovasi teknologi. Berikut adalah rincian tugas dan tanggung jawab utama Komite Teknologi Informasi:

1. Menyusun rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Merumuskan kebijakan, standar, dan prosedur utama dalam bidang teknologi informasi.
3. Memastikan kesesuaian antara proyek teknologi informasi yang disetujui dan rencana strategis teknologi informasi.
4. Menilai kesesuaian pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang telah disepakati (Project Charter).
5. Memastikan kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah untuk meminimalkan risiko investasi Bank di sektor teknologi informasi, sehingga kontribusi investasi tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis.
7. Memantau kinerja teknologi informasi serta melakukan upaya peningkatan kinerja di bidang ini.
8. Menyelesaikan berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat ditangani secara efektif, efisien, dan tepat waktu oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
9. Menilai kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Bank.

PEDOMAN KERJA KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan pedoman dari BPP Komite Teknologi Informasi. Pedoman ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu: (a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite serta Kewenangan Komite; (b) Rapat Komite; dan (c) Struktur Organisasi Komite. Untuk memastikan pedoman ini tetap relevan dengan kebutuhan terkini dan peraturan yang berlaku, BPP Komite Teknologi Informasi akan meninjau ulang pedoman ini minimal setiap dua tahun. Proses kaji ulang telah dilakukan, dan pedoman tersebut telah mengalami perubahan agar lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Bank Papua saat ini.

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI

Bank Papua menyelenggarakan rapat Komite Teknologi Informasi secara berkala. Rapat Komite TI dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pengganti dan dapat dilaksanakan jika

optimization of information systems and the enhancement of the Bank's competitiveness through technological innovation. The following details the key duties and responsibilities of the Information Technology Committee:

1. *Formulating the Information Technology Strategic Plan aligned with the Bank's business strategy;*
2. *Establishing policies, standards, and procedures in the IT domain;*
3. *Ensuring alignment between approved IT projects and the IT Strategic Plan;*
4. *Assessing the implementation of IT projects against agreed Project Charters;*
5. *Ensuring IT supports management information systems and business operations effectively;*
6. *Evaluating the effectiveness of measures to minimize risks associated with IT investments, ensuring such investments contribute to business objectives;*
7. *Monitoring IT performance and implementing continuous improvements;*
8. *Resolving IT-related issues that cannot be effectively addressed by user units or IT operating units;*
9. *Assessing the adequacy and allocation of the Bank's IT resources.*

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE CHARTER

The Information Technology Committee performs its duties in accordance with the Corporate Policy Manual (BPP) for the IT Committee, which governs: (a) duties, responsibilities, and authority; (b) committee meetings; and (c) organizational structure.

To ensure continued relevance with current needs and regulatory requirements, the charter is reviewed at least once every two years. A review has been conducted, and updates have been made to better align with the current conditions faced by Bank Papua.

MEETING POLICY AND ATTENDANCE

Bank Papua conducts Information Technology Committee meetings on a regular basis. These meetings are chaired by the Chairperson or an appointed Deputy Chairperson



dihadiri oleh lebih dari 50% anggota

and may be held if attended by more than 50% of the Committee members.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting	Kehadiran Attendance	
			Total	%
Yuliana D. Yembise	Direktur Utama	3	3	100%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis		3	100%
Pujianto	Direktur Keuangan		3	100%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional		3	100%
Betty J. Parinussa	Direktur Kepatuhan		3	100%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, Komite Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut:

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE'S ACTIVITIES

Throughout 2025, the Information Technology Committee held three meetings with the following agenda:

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	24 Juni 2025	- Pembentukan Unit Kerja Khusus Keamanan dan Ketahanan Siber (UKK KKS) serta Unit Anti <i>Fraud</i>; - Relokasi Data Center (DC) dan Data Recovery Center (DRC) serta Pelaksanaan Uji Disaster Recovery Plan (DRP) Tahun 2025; - Implementasi Software-Defined Wide Area Network (SDWAN); - Implementasi Active Directory Domain System (ADDS); - Implementasi Solusi Backup Server Hyper Converged Infrastructure (HCI) Bank Papua; - Implementasi Firewall; - Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2025, dan - Implementasi PAM Security.	- Establishment of the Cyber Security and Resilience Special Work Unit (UKK KKS) and Anti-Fraud Unit; - Relocation of the Data Center (DC) and Data Recovery Center (DRC) and implementation of the Disaster Recovery Plan (DRP) testing for 2025; - Implementation of Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN); - Implementation of Active Directory Domain Services (ADDS); - Implementation of Hyper-Converged Infrastructure (HCI) Backup Server Solution at Bank Papua; - Firewall implementation; - Evaluation of the 2025 Information Technology Strategic Plan (ITSP/RSTI); - Implementation of Privileged Access Management (PAM) Security.
2	02 Juli 2025	- Pembentukan Unit Kerja Khusus Keamanan dan Ketahanan Siber (UKK KKS) serta Unit Anti <i>Fraud</i>; - Relokasi Data Center (DC) dan Data Recovery Center (DRC) serta Pelaksanaan Uji Disaster Recovery Plan (DRP) Tahun 2025; - Implementasi Software-Defined Wide Area Network (SDWAN); - Implementasi Active Directory Domain System (ADDS); - Implementasi Solusi Backup Server Hyper Converged Infrastructure (HCI) Bank Papua; - Implementasi Firewall; - Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2025, dan - Implementasi PAM Security.	- Establishment of the Cyber Security and Resilience Special Work Unit (UKK KKS) and Anti-Fraud Unit; - Relocation of the Data Center (DC) and Data Recovery Center (DRC) and implementation of the Disaster Recovery Plan (DRP) testing for 2025; - Implementation of Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN); - Implementation of Active Directory Domain Services (ADDS); - Implementation of Hyper-Converged Infrastructure (HCI) Backup Server Solution at Bank Papua; - Firewall implementation; - Evaluation of the 2025 Information Technology Strategic Plan (ITSP/RSTI); - Implementation of Privileged Access Management (PAM) Security.
3	02 Desember 2025	- Penetapan Unit KKS dan BPP/SOP. - Update Progres Perbaikan Layanan. - Internet Banking; <i>Fraud</i> Detection System (FDS); - BI-Fast; - Papua Mobile - QRIS; - Laporan Rencana Pengembangan TI (Produk dan Layanan) Tahun 2026 dan RBB TI.	- Establishment of the Cyber Security and Resilience Unit (UKK KKS) and Policy/Procedure Framework (BPP/SOP); - Progress update on service improvements: - Internet Banking; <i>Fraud</i> Detection System (FDS); - BI-FAST; - Papua Mobile – QRIS; - Report on the 2026 IT Development Plan (Products and Services) and IT Business Plan (IT RBB).



SERTIFIKASI PROFESI

Keanggotaan Komite Teknologi Informasi tidak memiliki kewajiban untuk memiliki sertifikasi tertentu. Namun, sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing ketua dan anggota komite dapat ditemukan dalam profil Direksi dan Pimpinan Divisi di Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PROFESSIONAL CERTIFICATION

Membership in the Information Technology Committee does not require specific certifications. However, certifications held by each Chair and member of the Committee can be found in the profiles of the Board of Directors and Division Heads in the Company Profile section of this Annual Report.

KOMITE PERTIMBANGAN PEGAWAI

Komite Pertimbangan Pegawai adalah komite di bawah Direksi yang bertugas memberikan rekomendasi terkait manajemen sumber daya manusia di Bank Papua. Komite ini berperan dalam meninjau dan memberikan pertimbangan mengenai pemberian sanksi, promosi, mutasi, serta rehabilitasi pegawai, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan yang diambil oleh komite didasarkan pada persyaratan kompetensi, kepatuhan terhadap kebijakan internal, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pegawai.

EMPLOYEE CONSIDERATION COMMITTEE

The Employee Consideration Committee is a committee under the Board of Directors tasked with providing recommendations related to human resource management at Bank Papua. The Committee plays a role in reviewing and providing considerations regarding sanctions, promotions, transfers, and employee rehabilitation, in accordance with good governance principles and regulations of the Financial Services Authority (OJK). Decisions made by the Committee are based on competency requirements, compliance with internal policies, as well as principles of fairness and transparency in employee management.

PROFIL DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE

- Dasar Hukum Penunjukan
Surat Keputusan Direksi Nomor : 87/DIR-BPD/XII/2023 Tentang Komite Pertimbangan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tanggal 29 Desember 2023.
- Susunan keanggotaan Komite Pertimbangan Pegawai

PROFILE AND MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE COMMITTEE

- Legal Basis for Appointment
Board of Directors Decree No. 87/DIR-BPD/XII/2023 concerning the Employee Consideration Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Papua dated December 29, 2023.
- Composition of the Employee Consideration Committee

	Jabatan	Position
Ketua	: Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (merangkap Anggota)	: Head of the Human Capital Management Division (also serving as a Member)
Ketua Pengganti :	: Pemimpin Divisi Audit Internal (merangkap Anggota)	: Head of the Internal Audit Division (also serving as a Member)
Sekretaris	: a. Pemimpin Departemen Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Modal Manusia (Mutasi, Rotasi, Promosi & Demosi) b. Pemimpin Departemen Administrasi Manajemen Modal Manusia (untuk Indisipliner pegawai) c. Pemimpin Departemen Anti Fraud (untuk kasus hasil audit)	: a. Head of the Human Capital Management Planning and Development Department (Transfers, Rotations, Promotions & Demotions) b. Head of the Human Capital Management Administration Department (for employee disciplinary matters) c. Head of the Anti-Fraud Department (for audit cases)
Anggota	: a. Pemimpin Divisi Hukum b. Pemimpin Divisi Kepatuhan c. Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan (Khusus pegawai pada Kantor Cabang)	: a. Legal Division Head b. Compliance Division Head c. Network and Service Management Division Head (Branch Office employees only)



PROFIL ANGGOTA KOMITE PERTIMBANGAN PEGAWAI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Profil Anggota Komite Pertimbangan Pegawai, silakan merujuk pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PERTIMBANGAN PEGAWAI

Komite Pertimbangan Pegawai beroperasi dengan penuh independensi, tanpa adanya campur tangan dari pihak internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas kebijakan kredit. Setiap keputusan yang diambil oleh Komite ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku.

Kriteria Independensi Anggota Komite Pertimbangan Pegawai:

1. Anggota tidak memiliki hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota lain dalam Komite Pertimbangan Pegawai.
2. Anggota tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.
3. Anggota tidak terlibat dalam manajemen di Bank Papua atau perusahaan afiliasinya.
4. Anggota tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Papua, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
5. Anggota tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau pejabat pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

PROGRAM PELATIHAN ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Bank Papua secara berkesinambungan mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi komite di bawah Direksi. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota komite memiliki keahlian yang relevan dan mendukung praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Rincian program pelatihan dapat dilihat pada subbab terkait dalam Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan.

PROFILE OF THE EMPLOYEE CONSIDERATION COMMITTEE MEMBERS

For further information regarding the profiles of the Employee Consideration Committee members, please refer to the Profiles of the Board of Directors and Executive Officers in the Company Profile section of this Annual Report.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE EMPLOYEE CONSIDERATION COMMITTEE

The Employee Consideration Committee operates with full independence, free from any internal or external interference that may affect the objectivity and integrity of its decisions. All decisions are made based on prudential principles, good corporate governance, and compliance with applicable banking regulations.

Independence Criteria of Committee Members:

1. *Members have no family relationships, either direct or indirect, with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or other Committee members.*
2. *Members have no financial relationships in any form with the Board of Commissioners, Board of Directors, or other parties that may affect independence.*
3. *Members are not involved in management roles within Bank Papua or its affiliated companies.*
4. *Members do not hold shares in Bank Papua, either directly or indirectly.*
5. *Members do not serve as officials in political parties or regional government positions that may affect objectivity.*

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS

To support effective execution of duties, Bank Papua continuously conducts training and competency development programs for committees under the Board of Directors. These programs aim to ensure that each committee member possesses relevant expertise and supports sound corporate governance practices. Details of training programs are presented in the relevant subchapter of the Corporate Governance Report.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PERTIMBANGAN PEGAWAI

Komite Pertimbangan Pegawai memiliki peran krusial dalam mendukung kebijakan manajemen sumber daya manusia di Bank Papua. Tugas utama komite ini adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi terkait pengelolaan pegawai, yang mencakup aspek kepatuhan, evaluasi kinerja, serta pengembangan karier pegawai. Berikut adalah rincian tugas dan tanggung jawab Komite Pertimbangan Pegawai:

Tugas dan tanggungjawab Komite Pertimbangan Pegawai

1. Komite pertimbangan Pegawai yang berkaitan dengan mutasi, rotasi, promosi, demosi yakni memeriksa dan memberikan atau menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai :
 - a. Usulan nama-nama pegawai yang akan dimutasi (rotasi, promosi dan demosi) berdasarkan persyaratan, rekam jejak dan kompetensi jabatan secara objektif.
 - b. Monitoring dan review manajemen terkait efektivitas, efisiensi, kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam kesesuaian *grade*, tingkatan jabatan, hak dan tanggungjawab pada setiap tingkatan jabatan serta kelayakan dalam manajemen talenta dan manajemen suksesi (kaderisasi).
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi kepada pihak manapun terkait seluruh pembahasan yang dibahas dalam komite tersebut.
2. Komite Pertimbangan Pegawai yang berkaitan dengan limit Kewenangan Memutus Kredit yakni memeriksa dan memberikan atau menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai :
 - a. Limit Kewenangan memutus dan menandatangani perjanjian kredit bagi pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, Pejabat yang baru, Pejabat Pengganti semetara;
 - b. Limit Kewenangan memutus kredit bagi pejabat definitive dan Pejabat Pengganti sementara (Pgs) berdasarkan tool atau indikator yang menerangkan histori pegawai selama menjabat di unit kredit, mengenai NPL, dan memutus kredit.
3. Komite Pertimbangan Pegawai yang berkaitan dengan indisipliner yakni memeriksa dan memberikan atau menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai :
 - a. Evaluasi pelanggaran Disiplin (indisipliner) yang membuktikan secara langsung sesuai laporan dari unit terkait berdasarkan absen (finger scan);
 - b. Tindakan lanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE EMPLOYEE CONSIDERATION COMMITTEE

The Employee Consideration Committee plays a crucial role in supporting human resource management policies at Bank Papua. Its primary function is to provide advice and recommendations to the Board of Directors regarding employee management, including compliance, performance evaluation, and career development.

Detailed Duties and Responsibilities:

1. *Related to Transfers, Rotations, Promotions, and Demotions:*
 - a. *Review and provide recommendations to the Board of Directors regarding proposed employee movements based on objective criteria, track records, and competency requirements;*
 - b. *Monitor and review management effectiveness, efficiency, gaps, and challenges related to job grading, position levels, roles, responsibilities, as well as talent and succession management;*
 - c. *Maintain confidentiality of all information discussed within the Committee.*
2. *The Employee Consideration Committee relating to the Credit Decision Authority Limit, namely examining and providing or conveying suggestions and considerations to the Board of Directors regarding:*
 - a. *Review and provide recommendations regarding authority limits for approving and signing loan agreements for Division Heads, Main Branch Managers, Branch Managers, Sub-Branch Managers, newly appointed officials, and acting officials;*
 - b. *Assess credit approval limits based on indicators such as employee track record, including NPL performance and lending decisions.*
3. *The Employee Consideration Committee relating to indiscipline, namely examining and providing or conveying suggestions and considerations to the Board of Directors regarding:*
 - a. *Evaluate disciplinary violations based on reports from relevant units, including attendance records (finger scan);*
 - b. *Recommend follow-up actions and sanctions for employees who violate policies;*



- c. Keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya
 - d. Rehabilitasi sanksi bagi pegawai terkait bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa bukti baru itu tidak ada pada saat pemeriksaan atau pengambilan keterangan
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi kepada pihak manapun terkait seluruh pembahasan yang dibahas dalam komite tersebut.
4. Komite Pertimbangan Pegawai yang berkaitan dengan pembahasan saksi hasil Audit Khusus yakni memeriksa dan memberikan atau menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai :
- a. Melaksanakan penelitian terhadap hasil temuan auditor baik intern maupun ekstern yang memerlukan tindak lanjut dalam penerapan sanksi.
 - b. Kebenaran dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya.
 - c. Rehabilitasi sanksi bagi pegawai terkait bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa bukti baru itu tidak ada pada saat pemeriksaan atau pengambilan keterangan
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi kepada pihak manapun terkait seluruh pembahasan yang dibahas dalam komite tersebut.

- c. *Review objections and/or appeals submitted by employees regarding imposed sanctions;*
- d. *Recommend rehabilitation of sanctions based on new evidence not available during initial review;*
- e. *Maintain confidentiality of all deliberations.*

4. *The Employee Consideration Committee is related to the discussion of witnesses on the results of the Special Audit, namely examining and providing or conveying suggestions and considerations to the Board of Directors regarding:*
- a. *Conducting research on internal and external auditor findings that require follow-up in the application of sanctions.*
 - b. *Verifying and/or reviewing any sanctions imposed by employees.*
 - c. *Rehabilitating sanctions for employees related to new evidence that strongly suggests that the new evidence was not available during the examination or information gathering process.*
 - d. *Maintaining the confidentiality of information from any party regarding all discussions within the committee.*

PEDOMAN KERJA KOMITE

Komite Pertimbangan Pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja yang diatur dalam Pedoman Kebijakan Pertimbangan Pegawai, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Komite dan Keputusan Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sepanjang tahun 2025, Komite Pertimbangan Pegawai telah mengadakan rapat dengan agenda pembahasan tentang kasus indisipliner, pelanggaran kode etik pegawai, serta alih tugas pegawai.

COMMITTEE WORK GUIDELINES

The Employee Consideration Committee performs its duties based on established Work Guidelines as stipulated in the Employee Consideration Policy, pursuant to Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024 concerning Committees and Credit Decisions of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

REPORT ON ACTIVITIES IMPLEMENTATION

Throughout 2025, the Employee Consideration Committee conducted meetings with agendas covering disciplinary cases, violations of the employee code of ethics, and employee transfers.



Hari/Tanggal	Agenda Rapat/ Meeting agenda	Peserta Rapat/	Meeting participants
13 JUNI 2025	PEMBAHASAN 13 (Tiga belas) kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Bank Papua	• Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia • -Pemimpin Divisi Audit Internal • Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Departemen Administrasi Divisi MMM • Manager Administrasi dan Kompensasi MMM • AMGR Pembinaan & KOnseling Divisi MMM	• Human Capital Management Division Leader • Internal Audit Division Leader • Network & Service Management Division Leader • Compliance Division Leader • MMM Division Administration Department Leader • MMM Administration and Compensation Manager • MMM Division Coaching & Counseling AMGR
13 JUNI 2025	Pembahasan Kandidat Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	• Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia • -Pemimpin Divisi Audit Internal • Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Departemen Perencanaan dan Pengembangan Divisi MMM • Staf Perencanaan & Pengembangan Divisi MMM	• Human Capital Management Division Leader • Internal Audit Division Leader • Network & Service Management Division Leader • Compliance Division Leader • Planning & Development Department Leader, MMM Division • Planning & Development Staff, MMM Division

SERTIFIKASI PROFESI

Keanggotaan Komite Kebijakan Pertimbangan Pegawai tidak memerlukan sertifikasi tertentu. Namun, sertifikasi yang dimiliki oleh setiap ketua dan anggota komite dapat dilihat pada profil Direksi dan Pemimpin Divisi yang terdapat dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

PROFESSIONAL CERTIFICATION

Membership in the Employee Consideration Policy Committee does not require specific certifications. However, certifications held by each Chair and member of the Committee can be found in the profiles of the Board of Directors and Division Heads in the Company Profile section of this Annual Report.



Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks in accordance with POJK No. 45/POJK.03/2015

ACUAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank memiliki kebijakan remunerasi yang ditetapkan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang terdiri dari imbalan tetap maupun variabel, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Kebijakan ini didasarkan pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan dari kebijakan remunerasi ini adalah untuk mendorong penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, termasuk kompensasi dan manfaat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Formulasi remunerasi mengacu pada kebijakan internal Bank Papua, peraturan eksternal yang berlaku, perbandingan dengan industri, serta mempertimbangkan kinerja Bank Papua itu sendiri. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
5. Surat Keputusan Pemegang Saham No.07/SK/RUPS-BPD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan ke-III Surat Keputusan Pemegang Saham No.12/SK/RUPS-BPD/V/2014 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikan Manfaat Pensiun Bagi Pegawai Pensiunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

REMUNERATION POLICY FRAMEWORK

The Bank has established a remuneration policy for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, consisting of both fixed and variable compensation, in cash and non-cash forms. This policy is based on the duties, authority, and responsibilities of each member. Its objective is to promote the implementation of Good Corporate Governance (GCG) through strategic mechanisms, including compensation and benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The remuneration formulation refers to Bank Papua's internal policies, applicable external regulations, industry benchmarks, and the Bank's own performance. The Nomination and Remuneration Committee provides recommendations to the Board of Commissioners, which are then submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.

Basis for Determination of Remuneration

1. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks;
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks;
4. Financial Services Authority Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 concerning Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks;
5. Shareholders' Resolution No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019 dated March 29, 2019 concerning the Third Amendment to Shareholders' Resolution No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 regarding remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as pension benefit adjustments for retirees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan dalam Sub Judul Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Bank telah membentuk komite tersebut dengan susunan keanggotaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CAKUPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN IMPLEMENTASINYA

Sejalan dengan diterapkannya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum, Bank Papua telah menetapkan kebijakan remunerasi untuk Pengurus Perseroan. Kebijakan ini disahkan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019 yang dikeluarkan pada 29 Maret 2019. Surat keputusan tersebut merupakan perubahan ketiga dari Surat Keputusan Pemegang Saham No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 yang mengatur tentang remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta kenaikan manfaat pensiun bagi pegawai pensiunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Kebijakan remunerasi ini merupakan bagian integral dari strategi Bank Papua untuk memberikan imbalan yang kompetitif kepada pegawai, sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan finansial perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk menanggapi perubahan demografi pegawai, mengelola biaya tenaga kerja secara efisien, serta mendorong pencapaian tujuan bisnis. Dengan adanya sistem remunerasi yang jelas dan terstruktur, Bank Papua berupaya untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai agar dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan.

Bank menetapkan dua jenis remunerasi sebagai berikut:

1. Remunerasi Tetap

Remunerasi tetap terdiri dari beberapa komponen yang ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain skala usaha, kompleksitas usaha, kelompok sebanding (peer group), inflasi, kondisi keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen-komponen dari remunerasi tetap ini mencakup gaji/honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan hari raya, tunjangan cuti, fasilitas/biaya kesehatan, serta tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank. Perlu dicatat bahwa remunerasi tetap ini tidak terkait dengan kinerja individu.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is described in detail under the relevant section in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. The Bank has established this committee in accordance with prevailing regulations.

SCOPE OF REMUNERATION POLICY AND ITS IMPLEMENTATION

In line with the implementation of OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the implementation of governance in providing remuneration for commercial banks, Bank Papua has established a remuneration policy for the Company's Management. This policy was ratified through Shareholder Decree No. 07/SK/RUPS-BPD/III/2019 issued on March 29, 2019. This decree is the third amendment to Shareholder Decree No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 which regulates the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the increase in pension benefits for retired employees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

This remuneration policy is an integral part of Bank Papua's strategy to provide competitive rewards to employees, while maintaining a balance between the company's financial capabilities and compliance with applicable regulations. Furthermore, this policy is designed to address changing employee demographics, efficiently manage labor costs, and encourage the achievement of business objectives. With a clear and structured remuneration system, Bank Papua strives to attract, retain, and motivate employees to make the best possible contribution to supporting the achievement of the company's vision, mission, and strategy.

Types of Remuneration

1. Fixed Remuneration

Fixed remuneration includes salary/honorarium and allowances such as housing, communication, holiday allowance, leave allowance, healthcare benefits, and other benefits determined by the Bank. It is not linked to individual performance and is determined based on business scale, complexity, peer group comparison, inflation, financial condition, and applicable regulations.



2. Remunerasi Variabel

Remunerasi variabel adalah kompensasi yang berkaitan dengan kinerja dan risiko. Komponen ini mencakup tantiem serta tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan pencapaian kinerja. Tantiem dapat diberikan dalam bentuk tunai, dan juga bisa berupa saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh bank.

PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN REMUNERASI

Bank Papua menerapkan sistem remunerasi berbasis kompetensi yang menghubungkan pengukuran kinerja pegawai dengan kompensasi yang diterima. Sistem ini mencakup tinjauan kebijakan remunerasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja serta metode untuk mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja keseluruhan Bank Papua. Penilaian kinerja dilakukan menggunakan Key Performance Indicator (KPI), yang mencakup evaluasi kinerja individu dan kinerja masing-masing unit kerja.

Strategi remunerasi yang diterapkan mempertimbangkan kinerja setiap pegawai secara individu dan kinerja unit kerja, sambil tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perusahaan. Secara umum, Bank Papua memberikan remunerasi kepada pegawai dalam bentuk gaji bulanan, tunjangan lembur, tunjangan uang makan, kenaikan gaji berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), uang cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan komunikasi, tunjangan struktural, insentif, bonus kinerja, dan jasa produksi. Selain itu, Bank Papua juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya, termasuk perawatan inap, perawatan jalan, persalinan, pemeriksaan kesehatan umum, penggantian kacamata, serta program bantuan perawatan jalan untuk pensiunan Bank Papua.

PENYESUAIAN REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN KINERJA DAN RISIKO

Bank menetapkan metode pengukuran kinerja serta jenis risiko yang digunakan dalam menentukan pemberian remunerasi variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Bank berdasarkan:

1. Kinerja, yang mencakup:

- Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai.
- Kinerja Unit Bisnis.
- Kinerja Bank.

2. Risiko

Merupakan pengukuran kinerja dan risiko dalam penetapan besaran remunerasi yang diberikan.

2. Variable Remuneration

Variable remuneration is performance- and risk-based compensation, including tantiem and other incentives determined based on performance achievement. It may be granted in cash or in the form of shares or share-based instruments issued by the Bank.

PERFORMANCE MEASUREMENT LINKED TO REMUNERATION

Bank Papua implements a competency-based remuneration system that links employee performance measurements to compensation received. This system includes a review of remuneration policies related to performance assessments and a method for linking individual remuneration to Bank Papua's overall performance. Performance assessments are conducted using Key Performance Indicators (KPIs), which encompass both individual and individual performance evaluations of each work unit.

The remuneration strategy considers individual and unit performance while maintaining alignment with the Bank's financial capacity. Compensation includes salary, overtime pay, meal allowance, periodic salary increases, holiday allowance (THR), leave benefits, communication allowance, structural allowance, incentives, bonuses, and production bonuses. Additionally, the Bank provides healthcare benefits for employees and their families, including inpatient and outpatient care, maternity services, general check-ups, eyeglass reimbursement, and outpatient assistance programs for retirees.

ADJUSTMENT OF REMUNERATION BASED ON PERFORMANCE AND RISK

The Bank establishes performance measurement methods and the types of risks used in determining variable remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Bank Employees based on:

1. Performance, which includes:

- Performance of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees.*
- Business Unit Performance.*
- Bank Performance.*

2. Risk:

Risk assessment is incorporated into determining remuneration levels, as further regulated in the Bank's



Pengaturan remunerasi diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Remunerasi Bank.

Kebijakan remunerasi, baik yang bersifat tetap maupun variabel, untuk Dewan Komisaris dan Direksi diajukan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan mengenai remunerasi didasarkan pada pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial, hasil penilaian kinerja, serta kesetaraan dengan bank sejenis. Selain itu, hal ini juga mempertimbangkan strategi dan sasaran jangka panjang Bank.

Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai pada level tertentu kemudian ditetapkan sebagai Material Risk Taker (MRT). Penetapan MRT dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank Papua berkomitmen untuk menyusun kebijakan remunerasi yang mendukung visi dan misi perusahaan, sekaligus memastikan kinerja yang berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk:

1. Menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik yang akan mendorong pencapaian tujuan strategis Bank.
2. Memberikan penghargaan yang adil dan kompetitif sesuai dengan kontribusi karyawan terhadap kinerja Bank.
3. Menjaga keseimbangan antara kinerja individu, unit kerja, dan kinerja keseluruhan Bank.
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti POJK No. 45/POJK.03/2015, serta memastikan pengelolaan risiko yang efektif.

Proses penyusunan kebijakan remunerasi di Bank Papua dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip tata kelola yang baik, serta melalui langkah-langkah berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRNN) menganalisis kebutuhan remunerasi berdasarkan struktur organisasi, tuntutan bisnis, dan dinamika lingkungan eksternal.
2. Melakukan kajian perbandingan terhadap kebijakan remunerasi di industri perbankan untuk memastikan daya saing serta kesesuaian dengan praktik terbaik yang ada.
3. Analisis risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi tidak mendorong perilaku berisiko tinggi yang dapat membahayakan stabilitas keuangan Bank.

Remuneration Standard Procedures.

The remuneration policy, both fixed and variable, for the Board of Commissioners and Board of Directors is proposed and determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

Remuneration decisions are based on risk and performance considerations, alignment with financial performance, performance assessment results, and equality with similar banks. Furthermore, the Bank's long-term strategy and objectives are taken into account.

The Board of Commissioners, Board of Directors, and employees at certain levels are then designated as Material Risk Takers (MRT). MRT determination is carried out using qualitative and quantitative approaches.

REMUNERATION POLICY DEVELOPMENT PROCESS

Bank Papua develops its remuneration policy to support its vision and mission while ensuring sustainable performance, with the following objectives:

1. *Attract, retain, and motivate top talent;*
2. *Provide fair and competitive rewards aligned with contributions;*
3. *Maintain balance between individual, unit, and overall performance;*
4. *Ensure regulatory compliance and effective risk management.*

The remuneration policy development process at Bank Papua is carried out with a focus on good governance principles and through the following steps:

1. *The Remuneration and Nomination Committee (RNO) analyzes remuneration needs based on the organizational structure, business demands, and external environmental dynamics.*
2. *A comparative study of remuneration policies in the banking industry is conducted to ensure competitiveness and alignment with existing best practices.*
3. *A risk analysis is conducted to ensure that the remuneration policy does not encourage high-risk behavior that could jeopardize the Bank's financial stability.*



4. Kebijakan remunerasi disusun berdasarkan prinsip keadilan, daya saing, dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan aspek-aspek risiko. Kebijakan ini mencakup remunerasi tetap dan variabel, termasuk ketentuan khusus untuk pegawai yang tergolong Material Risk Taker (MRT).
5. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, kebijakan remunerasi akan diajukan untuk disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan menjalani proses ini, Bank Papua memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang dihasilkan dapat mendukung keseimbangan antara kinerja, risiko, dan kepatuhan, serta memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis dan kepuasan semua pemangku kepentingan.

NAMA KONSULTAN EKSTERN DAN TUGAS KONSULTAN TERKAIT KEBIJAKAN REMUNERASI

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank Papua tidak melibatkan konsultan eksternal.

PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS YANG DITERIMA OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bank Papua memiliki kebijakan paket remunerasi dan fasilitas yang dirancang untuk meningkatkan kinerja serta menjaga motivasi dan loyalitas Dewan Komisaris dan Direksi. Paket ini disusun berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan kebutuhan strategis perusahaan. Berikut adalah komponen utamanya:

1. Remunerasi Non-Natura: Ini mencakup elemen-elemen seperti Gaji, Tunjangan (Benefit), Tantiem, dan Penghasilan Tetap Lainnya.
2. Fasilitas Lain: Terdiri dari fasilitas dalam bentuk Natura dan Non-Natura, termasuk Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan, serta Fasilitas Lainnya.

4. The remuneration policy is formulated based on the principles of fairness, competitiveness, and performance, taking risk into account. This policy covers fixed and variable remuneration, including special provisions for employees classified as Material Risk Takers (MRT).
5. The Remuneration and Nomination Committee provides recommendations to the Board of Commissioners. After obtaining approval from the Board of Commissioners, the remuneration policy will be submitted for ratification at the General Meeting of Shareholders (GMS).

By undergoing this process, Bank Papua ensures that the resulting remuneration policy supports a balance between performance, risk, and compliance, while positively contributing to business sustainability and the satisfaction of all stakeholders.

NAME OF EXTERNAL CONSULTANT AND RESPONSIBILITIES RELATED TO REMUNERATION POLICY

Bank Papua does not involve external consultants in determining its remuneration policy.

REMUNERATION PACKAGE AND BENEFITS RECEIVED BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Bank Papua has a remuneration package and benefits policy designed to improve performance and maintain the motivation and loyalty of the Board of Commissioners and Board of Directors. This package is structured based on the principles of good corporate governance (GCG) and the company's strategic needs. Its main components are as follows:

1. In-kind Remuneration: This includes elements such as salary, benefits, bonuses, and other fixed income.
2. Other Benefits: Consists of in-kind and non-in-kind benefits, including housing, transportation, health insurance, and other benefits.

Jenis Penerimaan	Komisaris BOC		Direksi BOD		Acceptance Type
	Jumlah (org)	Nominal (Rp)	Jumlah (Org)	Nominal (Rp)	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	5	25.786.258.048	5	40.653.557.146	Remuneration (salary, bonuses, regular allowances, bonuses, other fixed income, and other facilities in the form of in-kind



Jenis Penerimaan	Komisaris BOC		Direksi BOD		Acceptance Type
	Jumlah (org)	Nominal (Rp)	Jumlah (Org)	Nominal (Rp)	
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	4	753.145.917	5	1.831.385.474	Other facilities in the form of Natura (housing, transportation, health care, etc.)
Jumlah Penerimaan	9	25.786.258.048	10	40.653.557.146	Number of Receipts

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi pada tahun 2025, yang dikelompokkan berdasarkan kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

The number of members of the Board of Directors who received remuneration packages in 2025, categorized by income brackets, is presented in the table below:

Jumlah Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris BOC	Jumlah Direksi BOD	Amount of Remuneration in 1 year
Diatas Rp2 miliar	5	5	Above IDR 2 billion
Diatas Rp1 miliar s.d 2 miliar	0	0	Above Rp. 1 billion to 2 billion
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	0	0	Above IDR 500 million to IDR 1 billion
Rp500 juta ke bawah	0	0	IDR 500 million and below
Jumlah	5	5	Amount

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

Bank memberikan remunerasi variabel sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pegawai dalam periode tertentu. Bonus diberikan secara tunai dengan tetap mempertimbangkan strategi bisnis dan kemampuan Bank.

VARIABLE REMUNERATION

The Bank provides variable remuneration as a reward for employee performance achievements over a specific period. Bonuses are awarded in cash, taking into account the Bank's business strategy and capabilities.

JUMLAH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEGAWAI YANG MENERIMA REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL SELAMA 1 (SATU) TAHUN

NUMBER OF DIRECTORS, COMMISSIONERS, AND EMPLOYEES RECEIVING VARIABLE REMUNERATION DURING ONE YEAR

Jabatan	Jumlah	Nominal	Position
Dewan Komisaris (Tantiem)	5	8.436.089.404,-	Board of Commissioners (Tantiem)
Direksi (Tantiem)	5	14.197.899.267	Directors (Tantiem)
Pegawai (Bonus)	2.342	108.000.000.000	Employee (Bonus)
Pegawai (Penghargaan Masa Kerja)	199	3.287.604.532	Employee (Long Service Award)

JABATAN DAN JUMLAH PIHAK YANG MENJADI MATERIAL RISK TAKERS

Material Risk Takers (MRT) adalah individu-individu dalam organisasi yang memainkan peran penting dalam memengaruhi profil risiko Bank Papua melalui posisi atau aktivitas mereka. Penetapan MRT dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan keputusan yang dapat berdampak pada risiko keuangan, operasional, dan strategis Bank.

POSITIONS AND NUMBER OF MATERIAL RISK TAKERS

Material Risk Takers (MRT) are individuals within the organization who play a significant role in influencing Bank Papua's risk profile through their positions or activities. The designation of MRT is carried out in accordance with applicable regulations, including Financial Services Authority (OJK) regulations, by considering responsibilities and decision-making authority that may impact the Bank's financial, operational, and strategic risks.



Di Bank Papua, jabatan yang termasuk dalam kategori MRT meliputi Komisaris, Direksi, anggota manajemen senior, serta beberapa pemimpin divisi yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting seperti manajemen risiko, kredit, treasury, dan pengawasan internal. Jumlah individu yang ditetapkan sebagai MRT disesuaikan dengan struktur organisasi, kebutuhan strategis, serta tingkat kompleksitas dan risiko bisnis yang dihadapi oleh Bank.

Setiap MRT diharuskan memiliki kompetensi yang relevan dan terbukti dalam pengelolaan risiko, serta harus mematuhi kebijakan remunerasi berbasis risiko yang transparan. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong perilaku yang mendukung pengelolaan risiko secara bijaksana, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan keberlanjutan usaha Bank Papua. Jumlah MRT dan kebijakan terkait dievaluasi dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan kebutuhan Bank.

At Bank Papua, positions classified as MRT include Commissioners, Directors, senior management members, as well as certain Division Heads responsible for key functions such as risk management, lending, treasury, and internal oversight. The number of individuals designated as MRT is aligned with the organizational structure, strategic needs, and the level of business complexity and risk faced by the Bank.

Each MRT is required to possess relevant and proven competencies in risk management and must comply with a transparent risk-based remuneration policy. This policy is designed to promote prudent risk-taking behavior in line with good governance principles and the Bank's sustainability objectives. The number of MRTs and related policies are periodically reviewed and adjusted to ensure their effectiveness and relevance to the Bank's needs.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Uraian	Rasio	Description
Gaji karyawan tertinggi dan terendah	8.29	Highest and lowest employee salaries
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.11	Highest and lowest directors' salaries
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.14	Commissioner Salary highest and lowest
Gaji Direksi tertinggi dan karyawan Tertinggi	4.09	Highest Director and Highest Employee Salary

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

JUMLAH PENERIMA DAN JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DIJAMIN TANPA SYARAT

Selama tahun 2025, tidak ada jumlah penerima atau total remunerasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

NUMBER OF RECIPIENTS AND TOTAL AMOUNT OF GUARANTEED VARIABLE REMUNERATION

During 2025, there were no recipients nor total amounts of variable remuneration guaranteed without conditions.

JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN

Menurut penjelasan Pasal 28 huruf O POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan yang terjadi bukan berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris, atau Pegawai yang bersangkutan, tetapi disebabkan oleh kebijakan Perusahaan, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, atau perampingan struktur organisasi. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan atau *fraud* tidak termasuk dalam pengertian ini.

NUMBER OF EMPLOYEES SUBJECT TO TERMINATION AND TOTAL SEVERANCE PAID

According to the elucidation of Article 28 letter O of POJK No. 45/POJK.03/2015 concerning Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, termination of employment refers to termination that occurs not at the request of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the employees concerned, but due to Company policies such as mergers, consolidations, acquisitions, or organizational restructuring. Termination of employment resulting from violations of regulations or fraud is excluded from this definition.



Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Karyawan Number of employees			Nominal Amount of Severance Pay Paid per Person in 1 (one) Year
	2025	2024	2023	
Di atas Rp1 miliar	28	18	15	Above IDR 1 billion
Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	8	1	7	IDR 500 million to IDR 1 billion
Dibawah Rp500 juta	34	2	0	Under IDR 500 million

JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN

TOTAL AMOUNT OF DEFERRED VARIABLE REMUNERATION

Tidak terdapat remunerasi variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan pada tahun 2025

No deferred variable remuneration was paid in 2025.

JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN YANG DIBAYARKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN

TOTAL AMOUNT OF DEFERRED VARIABLE REMUNERATION PAID DURING 1 (ONE) YEAR

Tidak terdapat remunerasi variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan pada tahun 2025.

No deferred variable remuneration was paid in 2025.

JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM SATU TAHUN

TOTAL REMUNERATION PAID IN ONE YEAR

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap		
Tunai	Rp	Cash
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	Shares/Share-based instruments issued by the Bank
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel		
Tunai	Rp	Cash
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	Shares/Share-based instruments issued by the Bank

INFORMASI KUANTITATIF

QUANTITATIVE INFORMATION

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Variable Types of Remuneration*)
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	
Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-	Cash (in millions) rupiah)
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-	Shares/Share-based instruments issued by the Bank (in share certificates and nominal millions of rupiah which is the conversion of the share certificates)
Jumlah	-	-	-	-	Amount



Akuntan Publik

Public Accountant

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 yang mengubah Peraturan Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit Laporan Keuangan Bank Papua untuk tahun buku 2025 telah dilaksanakan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif. Proses audit ini sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan standar dan perjanjian kerja, serta selesai dalam waktu yang ditentukan, Bank Papua secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu penting yang signifikan. Bank Papua berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit, dan manajemen, guna meminimalkan kendala yang mungkin muncul selama proses audit.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017, serta sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Nomor 09/SK/RUPS-BPD/I11/2025 tanggal 20 Maret 2025 Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang ditunjuk harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Pada tahun penunjukan, KAP dan AP tidak boleh memberikan jasa lain kepada Bank Papua untuk menghindari potensi benturan kepentingan.
- KAP yang ditunjuk adalah HERTANTO GRACE KARUNAWAN sebagai auditor untuk laporan keuangan Bank Papua yang berakhir pada 31 Desember 2025.

EXTERNAL AUDIT FUNCTION

Based on Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019, which amends Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, the audit of Bank Papua's Financial Statements for the 2025 financial year was conducted by an independent, competent, professional, and objective public accountant. This audit process complies with the Public Accountant Professional Standards and the established work agreement and audit scope.

To ensure that the audit process is conducted in accordance with the standards and work agreement, and is completed within the specified timeframe, Bank Papua regularly holds meetings to discuss significant issues. Bank Papua is committed to improving communication between the Public Accountant, the Audit Committee, and management to minimize any challenges that may arise during the audit process.

The appointment of the Public Accounting Firm and audit fees were conducted in accordance with POJK No. 13/POJK.03/2017 and SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017, and in accordance with the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) Resolution No. 09/SK/RUPS-BPD/I11/2025 dated March 20, 2025, the Public Accounting Firm and the Public Accountant in charge are registered with the Financial Services Authority.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The appointment process for the Public Accounting Firm (KAP) and Public Accountant (AP) is carried out in accordance with applicable regulations, taking into account the following:

- The appointed Public Accounting Firm and Public Accountant (partner-in-charge) must be registered with the Financial Services Authority.*
- In the year of appointment, the KAP and AP may not provide other services to Bank Papua to avoid potential conflicts of interest.*
- The appointed KAP is HERTANTO GRACE KARUNAWAN as the auditor for Bank Papua's financial statements for the year ended December 31, 2025.*



- d. Dalam melaksanakan fungsi audit eksternal, KAP dan AP harus mampu bekerja secara independen, mematuhi standar profesional akuntan publik, serta mengikuti perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Independensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- e. Hubungan antara Bank Papua, KAP, AP, dan Otoritas Jasa Keuangan harus terjalin baik, sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lancar dan laporan auditor dapat disampaikan tepat waktu.

- d. In carrying out the external audit function, Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP) must be able to work independently, adhere to public accounting professional standards, and adhere to the established work agreement and audit scope. Auditor independence in auditing financial statements must comply with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Accountants.
- e. A good relationship must be maintained between Bank Papua, KAP, AP, and the Financial Services Authority (OJK) to ensure the audit runs smoothly and the auditor's report is submitted on time.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE JASA AUDIT

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM, ACCOUNTANT NAME, AND AUDIT FEE

Table: Public Accounting Firm, Accountant Name, and Audit Fee.

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Opini Audit	Fee Audit (Rp)
2025	Drs Hertanto M.S Ak, CPA,CPMA, CA No. Izin Ap 0138	Hertanto, Grace dan Karunawan Izin No 929/KM.1/2014	Wajar Tanpa Pengecualian	1.300.000.000,-
2024	Drs Hertanto M.S Ak, CPA,CPMA, CA No. Izin Ap 0138	Hertanto, Grace dan Karunawan Izin No 929/KM.1/2014	Wajar Tanpa Pengecualian	1.281.800.000, -
2023	Drs Hertanto M.S Ak, CPA,CPMA, CA No. Izin Ap 0138	Hertanto, Grace dan Karunawan Izin No 929/KM.1/2014	Wajar Tanpa Pengecualian	1.091.000.000
2022	Drs Hertanto M.S Ak, CPA,CPMA, CA No. Izin Ap 0138	Hertanto, Grace dan Karunawan Izin No 929/KM.1/2014	Wajar Tanpa Pengecualian	1.133.744150
2021	Drs Hertanto M.S Ak, CPA,CPMA, CA No. Izin Ap 0138	Hertanto, Grace dan Karunawan Izin No 929/KM.1/2014	Wajar Tanpa Pengecualian	1.137.004.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Selama tahun 2025, akuntan tidak memberikan jasa lain.

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE ACCOUNTANT

During 2025, the accountant did not provide any other services.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Bank Papua adalah mekanisme pengawasan berkelanjutan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Bank berlangsung dengan efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. SPI yang efektif merupakan fondasi penting dalam pengelolaan risiko, mendukung pencapaian tujuan strategis, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Melalui SPI, Direksi dan Dewan Komisaris dapat melindungi aset Bank, menjamin keandalan laporan keuangan dan manajerial, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan risiko kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Keberhasilan pelaksanaan SPI yang handal menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus dan pejabat Bank Papua, didukung oleh seluruh karyawan di setiap level organisasi.

Bank Papua menerapkan SPI berdasarkan Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 mengenai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, yang terdiri dari lima komponen utama:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian – Menyertakan kepemimpinan aktif dan penguatan budaya pengendalian di semua tingkatan organisasi.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko – Memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara sistematis.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi – Menerapkan prinsip pemisahan fungsi untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian.
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi – Menyediakan sistem informasi yang andal dan transparan guna mendukung pengambilan keputusan yang akurat.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi – Melakukan evaluasi berkala terhadap kelemahan sistem dan menerapkan tindakan korektif untuk perbaikan berkelanjutan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTED BY THE COMPANY

The Internal Control System (ICS) of Bank Papua is a continuous oversight mechanism designed to ensure that all operational activities are conducted efficiently, securely, and in accordance with prudential principles. An effective ICS serves as a critical foundation for risk management, supports the achievement of strategic objectives, and maintains stakeholder trust.

Through the ICS, the Board of Directors and the Board of Commissioners are able to safeguard the Bank's assets, ensure the reliability of financial and management reporting, enhance regulatory compliance, and minimize risks of loss, irregularities, and violations. The successful implementation of a robust ICS is a shared responsibility among management, officers, and all employees across all organizational levels.

Bank Papua implements its ICS in accordance with OJK Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017 regarding Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks, which consists of five key components:

1. *Management Oversight and Control Culture – Active leadership and a strong control culture across all organizational levels;*
2. *Risk Identification and Assessment – Systematic identification, evaluation, and management of risks;*
3. *Control Activities and Segregation of Duties – Implementation of segregation of duties to reduce conflicts of interest and enhance control effectiveness;*
4. *Accounting, Information, and Communication Systems – Reliable and transparent information systems to support accurate decision-making;*
5. *Monitoring Activities and Corrective Actions – Regular evaluations and corrective actions for continuous improvement.*



Selain itu, Bank Papua berkomitmen untuk membangun budaya risiko yang kuat, sehingga kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal terintegrasi dalam setiap aspek organisasi. Dengan sistem pengendalian yang menyeluruh, Bank Papua memastikan operasional yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BANK PAPUA

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Bank Papua dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan Bank berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penerapan SPI yang efektif mendukung tata kelola yang baik serta membantu Bank mencapai tujuan strategisnya. Berikut adalah tujuan utama penerapan SPI di Bank Papua:

1. Tujuan Kepatuhan

Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan dan prosedur internal Bank. Dengan demikian, kepatuhan menjadi landasan utama dalam menjaga integritas dan reputasi Bank.

2. Tujuan Informasi

SPI menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan data yang andal.

3. Tujuan Operasional

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset dan sumber daya Bank, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Pengendalian yang efektif juga memastikan optimalisasi operasional Bank untuk mendukung keberlanjutan usaha.

4. Tujuan Budaya Risiko

Penerapan SPI bertujuan untuk memperkuat budaya risiko di seluruh organisasi Bank. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan sejak dini, Bank dapat mengevaluasi kewajaran kebijakan dan prosedur secara berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa kesadaran akan risiko menjadi bagian integral dari seluruh proses bisnis Bank.

In addition, Bank Papua is committed to fostering a strong risk culture, ensuring that awareness of risk management and internal control is embedded across all aspects of the organization.

OBJECTIVES OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Bank Papua's Internal Control System (ISC) is designed to ensure that the Bank's management is sound, secure, and prudent. Effective ISC implementation supports good governance and helps the Bank achieve its strategic objectives. The following are the main objectives of ISC implementation at Bank Papua:

1. Compliance Objective

Ensuring that all business activities comply with applicable laws and regulations, including those issued by the government, OJK, and internal policies, thereby safeguarding the Bank's integrity and reputation.

2. Information Objective

Ensuring the availability of complete, accurate, relevant, and timely information to support effective and accountable decision-making.

3. Operational Objective

Enhancing efficiency and effectiveness in the use of assets and resources, minimizing risks of loss, and optimizing operations to support business sustainability.

4. Risk Culture Objective

The implementation of SPI aims to strengthen the risk culture throughout the Bank's organization. By identifying weaknesses and assessing deviations early, the Bank can continuously evaluate the appropriateness of policies and procedures. This ensures that risk awareness is an integral part of all the Bank's business processes.



Melalui keempat tujuan ini, Sistem Pengendalian Internal Bank Papua tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mencapai kinerja yang optimal dan memastikan keberlanjutan Bank dalam menghadapi tantangan di industri perbankan.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Papua menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang komprehensif untuk memastikan pengelolaan aspek keuangan dan operasional Bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini bertujuan untuk melindungi aset Bank, mengurangi risiko operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan.

1. Sistem Pengendalian Internal Terkait Pengendalian Keuangan

Pengendalian keuangan di Bank Papua bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang akurat, andal, dan transparan, serta efektivitas dalam manajemen keuangan. Langkah-langkah yang diterapkan meliputi:

- Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi dan Regulasi OJK**
Bank memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pengawasan dan Evaluasi Berkala**
Audit internal dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas sistem pengendalian keuangan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi.
- Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties)**
Untuk mengurangi risiko penipuan dan kesalahan pencatatan, Bank menerapkan pemisahan tugas antara pihak yang mengotorisasi transaksi, mencatat, dan mengawasi pelaksanaan keuangan.
- Penggunaan Teknologi dalam Pengendalian Keuangan**
Bank Papua memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi untuk mengotomatisasi proses keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Through these four objectives, Bank Papua's Internal Control System not only functions as a supervisory tool, but also as an important pillar in achieving optimal performance and ensuring the Bank's sustainability in facing challenges in the banking industry.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL AND COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

Bank Papua implements a comprehensive Internal Control System (SPI) to ensure that the management of the Bank's financial and operational aspects is carried out with the principles of prudence, transparency, and compliance with applicable regulations. This system aims to protect the Bank's assets, mitigate operational risk, and ensure compliance with relevant laws and regulations.

1. Internal Control System Related to Financial Control

Financial control at Bank Papua aims to ensure accurate, reliable, and transparent financial reporting, as well as effective financial management. The implemented measures include:

- Compliance with Accounting Standards and OJK Regulations**
The Bank ensures that financial statements are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia and the provisions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
- Periodic Monitoring and Evaluation**
Internal audits are conducted periodically to assess the effectiveness of the financial control system and identify potential irregularities or errors in transaction recording.
- Segregation of Duties**
To reduce the risk of fraud and recording errors, the Bank implements a separation of duties between those authorizing transactions, recording transactions, and overseeing financial implementation.
- Using Technology in Financial Control**
Bank Papua utilizes technology-based information systems to automate financial processes, increase efficiency, and reduce the risk of human error.



2. Sistem Pengendalian Internal Terkait Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Bank berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan internal serta peraturan eksternal. Beberapa aspek penting dalam pengendalian operasional meliputi:

a. Manajemen Risiko Operasional

Bank Papua menerapkan sistem manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat muncul dalam kegiatan operasional.

b. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedures - SOP)

Setiap unit kerja di Bank Papua diwajibkan mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan menghindari risiko kesalahan atau penyimpangan.

c. Pengendalian Sistem Teknologi Informasi

Untuk menjaga keamanan data dan kelancaran operasional, Bank Papua menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat, termasuk perlindungan terhadap ancaman siber dan pemantauan infrastruktur IT.

d. Audit Operasional Berkala

Proses operasional diawasi secara berkala oleh Divisi Audit Internal untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan.

2. Internal Control System Related to Operational Control

Operational control aims to ensure that the Bank's operational activities are effective, efficient, and in accordance with internal policies and external regulations. Several important aspects of operational control include:

a. Operational Risk Management

Bank Papua implements an operational risk management system to identify, assess, and control risks that may arise in operational activities.

b. Standard Operating Procedures (SOPs)

Every work unit at Bank Papua is required to comply with established SOPs to ensure consistency in task execution and avoid the risk of errors or irregularities.

c. Information Technology System Control

To maintain data security and smooth operations, Bank Papua implements a robust information security system, including protection against cyber threats and monitoring of IT infrastructure.

d. Periodic Operational Audits

Operational processes are periodically monitored by the Internal Audit Division to identify weaknesses in the control system and provide recommendations for improvement.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selain pengendalian keuangan dan operasional, Bank Papua berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tata kelola bank dan manajemen risiko.
- Standar Bank Indonesia dalam pengelolaan likuiditas dan sistem pembayaran.
- Regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- Undang-Undang Perbankan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan berkomitmen pada kepatuhan regulasi, Bank Papua berupaya memastikan stabilitas dan pertumbuhan bisnis, serta memberikan layanan perbankan yang aman dan andal bagi para pemangku kepentingan.

COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

In addition to financial and operational controls, Bank Papua is committed to complying with applicable laws and regulations, including:

- *Financial Services Authority (OJK) regulations regarding bank governance and risk management.*
- *Bank Indonesia standards on liquidity management and payment systems.*
- *Anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations.*
- *Banking Law and applicable tax regulations in Indonesia.*

By implementing an effective internal control system and committing to regulatory compliance, Bank Papua strives to ensure business stability and growth, while providing safe and reliable banking services to stakeholders.



KESESUAIAN DENGAN COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan oleh Bank Papua mengacu pada kerangka pengendalian internal yang diakui secara internasional, yaitu COSO Internal Control Framework. Kerangka kerja ini terdiri dari lima komponen utama yang saling terintegrasi, bertujuan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal. Hal ini mendukung pencapaian tujuan Bank, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko yang optimal.

COMPLIANCE WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Bank Papua's Internal Control System (ISC) adheres to the internationally recognized COSO Internal Control Framework. This framework consists of five main, integrated components aimed at ensuring the effectiveness of internal controls. This supports the achievement of the Bank's objectives, regulatory compliance, and optimal risk management.

Unsur Pengendalian Internal sesuai COSO	Penerapan SPI di Bank Papua	COSO Internal Control Components	Implementation of ICS at Bank Papua
Lingkungan Pengendalian Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya manajemen, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	Bank Papua telah melakukan : 1. Pembentukan struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan manajemen modal manusia mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan dan pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja. 3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam Budaya Perusahaan dan Kode Etik Bank Papua. 4. Membuat <i>Board Charter</i> Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Control Environment</i> The control environment encompasses factors such as integrity, ethical values, and the competence of personnel; management's philosophy and operating style; the delegation of authority and responsibility; organizational structure; and the oversight provided by the Board of Commissioners.	<i>Bank Papua Implementation:</i> 1. Established an adequate organizational structure with clearly defined roles and responsibilities in compliance with prevailing regulations. 2. Implemented policies and procedures for human capital management, covering workforce planning, recruitment, development and training, remuneration, and performance management. 3. Embedded integrity and ethical values in the Bank Papua Corporate Culture and Code of Ethics. 4. Adopted Board Charters for Directors and Commissioners, consistently upholding Good Corporate Governance (GCG) principles.
Penilaian Risiko Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.	Bank Papua secara rutin melakukan evaluasi terhadap profil risiko sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan.	<i>Risk Assessment</i> A systematic process undertaken by the Board of Directors to identify, analyze, and assess risks faced by the Bank in achieving its strategic objectives.	Bank Papua regularly conducts evaluations of its risk profile as mitigation against risks that may harm the company.
Kegiatan Pengendalian Penetapan kebijakan, prosedur dan praktik pengendalian, serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.	Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksidan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi Kaji Ulang Manajemen, Kaji Ulang Kinerja Operasional, Pengendalian Sistem Informasi, Pengendalian Aset Fisik, dan dokumentasi.	<i>Control Activities</i> Establishment of policies, procedures and control practices, as well as early verification processes to ensure consistent compliance with these policies and procedures, which are integral activities to each of the Bank's daily functions or operations.	The Compliance Unit submits periodic compliance reports to the Board of Commissioners, Directors, and Regulators. Bank officials periodically review the existence and effectiveness of controls, implement adequate segregation of duties, conduct routine verification of data accuracy, and maintain and test emergency response plans. Control activities according to organizational functions include Management Review, Operational Performance Review, Information System Controls, Physical Asset Controls, and documentation.



Unsur Pengendalian Internal sesuai COSO	Penerapan SPI di Bank Papua	COSO Internal Control Components	Implementation of ICS at Bank Papua
Ketersediaan Informasi Internal dan Saluran Komunikasi Ketersediaan informasi internal dan saluran komunikasi yang efektif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta agar seluruh pejabat dan karyawan Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.	<i>Availability of Internal Information and data collection and information C o m m u n i c a t i o n Channels</i> <i>Availability of internal information and effective communication channels needed for proper and accountable decision making, and to ensure all Bank officials and employees fully understand and comply with applicable policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities.</i>	<i>Procedures are available regarding data collection and information technology that can produce reports on business activities, financial conditions, risk management implementation, and regulatory compliance to support the duties of the Board of Directors and Commissioners. Internal and external communications are also conducted periodically to support the company's internal control functioning properly.</i>
Kegiatan Pemantauan Proses penilaian/evaluasi atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian internal dan kinerja manajemen dengan memastikan bahwa pelaksanaannya telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.	Monitoring SPI dilakukan melalui Three line of defence, yaitu: 1st line of defense selaku risk owner yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi. 2nd line of defense yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional. 3rd line of defense yaitu Unit Kerja yang melakukan Assurance. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas Monitoring SPI.	<i>Monitoring Activities</i> <i>The process of assessing/evaluating monitoring activities on the effectiveness of the design and operation of the internal control structure and management performance by ensuring its implementation has been improved according to conditions.</i>	<i>ICS monitoring is conducted through Three Lines of Defense, namely:</i> <i>1st line of defense as risk owners, namely Business Units that conduct business and operational activities and manage the risks faced.</i> <i>2nd line of defense, namely Functional Units that conduct functional oversight.</i> <i>3rd line of defense, namely Assurance Units. SKAI is part of the Internal Control System that performs oversight functions for ICS monitoring.</i>

Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan COSO Internal Control Framework, Bank Papua memastikan bahwa seluruh proses operasional dan manajemen risiko berjalan secara optimal, mendukung prinsip tata kelola yang baik, serta meningkatkan perlindungan terhadap aset dan kepentingan para pemangku kepentingan.

By implementing an internal control system in accordance with the COSO Internal Control Framework, Bank Papua ensures that all operational and risk management processes run optimally, support the principles of good governance, and enhance the protection of assets and stakeholder interests.

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank Papua secara berkala melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa semua aspek pengendalian yang diterapkan berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejalan dengan praktik terbaik internasional, seperti COSO Internal Control Framework.

1. Mekanisme Tinjauan Efektivitas SPI

Tinjauan efektivitas SPI dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

a. Evaluasi Rutin oleh Manajemen:

Direksi dan unit kerja terkait secara berkala menilai

REVIEW OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

Bank Papua periodically reviews and evaluates the effectiveness of its Internal Control System (ISC). The purpose of this process is to ensure that all aspects of implemented controls are operating effectively, comply with Financial Services Authority (OJK) regulations, and align with international best practices, such as the COSO Internal Control Framework.

1. ISC Effectiveness Review Mechanism

ISC effectiveness reviews are conducted through several mechanisms, including:

a. Routine Evaluation by Management:

The Board of Directors and relevant work units



kebijakan dan implementasi SPI dalam operasional Bank.

- b. Audit Internal oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI):
SKAI bertugas melaksanakan audit berbasis risiko guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal.
- c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit:
Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, memantau pelaksanaan SPI dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- d. Evaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
OJK mengawasi implementasi SPI di Bank Papua untuk memastikan kepatuhan terhadap Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 yang mengatur Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

2. Indikator Efektivitas SPI

Efektivitas SPI dievaluasi berdasarkan beberapa indikator utama, antara lain:

- a. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Tata Kelola:
Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK, Bank Indonesia (BI), dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Keamanan Aset dan Mitigasi Risiko Keuangan:
Kemampuan pengendalian dalam melindungi aset Bank dan mencegah risiko kredit, operasional, serta kepatuhan.
- c. Keandalan Laporan Keuangan dan Operasional:
Akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- d. Kesiapan dalam Mengelola Risiko *Fraud* dan Kejahatan Keuangan:
Penerapan sistem anti-*Fraud* serta mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi indikasi pelanggaran dan kecurangan.

3. Hasil Tinjauan Efektivitas SPI Tahun 2025

Berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilakukan sepanjang tahun 2025, SPI Bank Papua dinilai efektif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Namun, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh unit pengawas, antara lain:

periodically assess ISC policies and implementation in the Bank's operations.

- b. *Internal Audit by the Internal Audit Unit (SKAI):*
The SKAI is tasked with conducting risk-based audits to ensure compliance with regulations and internal policies.
- c. *Oversight by the Board of Commissioners and Audit Committee:*
The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors the implementation of the ISC and provides recommendations for improvements, if necessary.
- d. *Evaluation by the Financial Services Authority (OJK):*
The OJK oversees the implementation of Internal Control Systems (SPI) at Bank Papua to ensure compliance with OJK Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017, which regulates the Internal Control System Standard Guidelines for Commercial Banks.

2. Internal Control System Effectiveness Indicators

The effectiveness of the SPI is evaluated based on several key indicators, including:

- a. *Compliance with Regulations and Governance Standards:*
The Bank's level of compliance with the provisions of the OJK, Bank Indonesia (BI), and other laws and regulations.
- b. *Asset Security and Financial Risk Mitigation:*
The ability of controls to protect the Bank's assets and prevent credit, operational, and compliance risks.
- c. *Reliability of Financial and Operational Reports:*
The accuracy and timeliness of presentation of financial reports and other operational reports.
- d. *Readiness in Managing the Risk of Fraud and Financial Crime:*
Implementation of an anti-fraud system and early detection mechanisms to identify indications of violations and fraud.

3. Results of the 2025 Internal Control System Effectiveness Review

Based on the results of internal and external audits conducted throughout 2025, Bank Papua's Internal Control System was deemed effective and in accordance with prudent banking principles. However, the supervisory unit provided several recommendations for improvement, including:



- a. Peningkatan efektivitas monitoring risiko operasional, terutama dalam penerapan teknologi informasi dan keamanan siber.
- b. Penguatan pengendalian terhadap risiko kredit, termasuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan persetujuan dan mitigasi risiko pembiayaan.
- c. Penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*) untuk memastikan semua karyawan memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya tinjauan efektivitas yang berkelanjutan, Bank Papua berkomitmen untuk menjaga agar sistem pengendalian internal tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan regulasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan Bank dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua berkomitmen untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berfungsi secara efektif dan memadai, mendukung operasional Bank, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk memperkuat pengendalian internal, secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna mengevaluasi hasil audit dari Divisi Audit Internal (DAI) dan membahas tantangan operasional yang dapat mempengaruhi kinerja Bank.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan dan pengendalian, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan tinjauan terhadap hasil audit internal untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko telah diterapkan dengan baik.

Diskusi dalam rapat koordinasi mencakup:

1. Pembahasan hasil temuan Audit Internal, yang mencakup aspek operasional, kepatuhan, dan manajemen risiko.
2. Identifikasi dan mitigasi kendala operasional yang dapat menghambat pencapaian kinerja Bank.
3. Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Divisi Audit Internal untuk memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal.

- a. Increasing the effectiveness of operational risk monitoring, particularly in the application of information technology and cybersecurity.
- b. Strengthening credit risk controls, including ensuring compliance with financing risk approval and mitigation policies.
- c. Strengthening a compliance culture to ensure all employees understand and implement applicable regulations.

With ongoing effectiveness reviews, Bank Papua is committed to maintaining its internal control system relevant, adaptive, and responsive to changes in the business and regulatory environment. This aims to maintain the Bank's financial stability and enhance stakeholder confidence.

STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)

The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Papua are committed to ensuring that the Internal Control System (ISC) functions effectively and adequately, supports the Bank's operations, and complies with applicable regulations. To strengthen internal control, coordination meetings are regularly held to evaluate audit results from the Internal Audit Division (DAI) and discuss operational challenges that could impact the Bank's performance.

As part of their supervisory and control responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors review internal audit results to identify areas for improvement and ensure that risk mitigation measures have been properly implemented.

Discussions in these coordination meetings include:

1. Discussion of Internal Audit findings, covering operational, compliance, and risk management aspects.
2. Identification and mitigation of operational obstacles that could hinder the Bank's performance.
3. Follow-up on recommendations from the Internal Audit Division to address weaknesses in internal control.



Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa SPI yang diterapkan di Bank Papua telah berfungsi secara efektif dan memadai, memberikan perlindungan optimal terhadap berbagai risiko, termasuk risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan, dan risiko strategis. Meskipun demikian, Bank Papua terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan merujuk pada praktik terbaik perbankan dan regulasi yang berlaku, termasuk Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 mengenai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Selain itu, Bank Papua berkomitmen menjaga integritas, keandalan, dan transparansi laporan keuangan melalui penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) yang komprehensif. Sejalan dengan POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank telah mengimplementasikan ketentuan tersebut dengan menyusun Kebijakan Pengendalian Internal dan ketentuan mengenai Penerapan Integritas Pelaporan Keuangan Bank Papua sebagai pedoman utama dalam memastikan kualitas laporan keuangan. Bank telah menunjuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang menjalankan fungsi ICOFR, termasuk dalam pencegahan manipulasi, deteksi dini risiko kesalahan saji, serta penguatan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan.

Penerapan ICOFR mencakup pengendalian atas pencatatan transaksi, otorisasi berjenjang, pemeliharaan dokumentasi, serta mekanisme pencegahan dan deteksi transaksi tidak sah, yang didukung oleh sistem informasi keuangan yang andal dan penerapan prinsip segregasi tugas. Direksi bertanggung jawab atas efektivitas ICOFR melalui evaluasi berkala, sementara Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan regulator. Melalui penerapan ini, Bank Papua terus memperkuat tata kelola serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan kualitas laporan keuangan Bank.

The Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the Internal Control System (ICS) implemented at Bank Papua has functioned effectively and adequately, providing optimal protection against various risks, including operational, financial, compliance, and strategic risks. Nevertheless, Bank Papua continues to enhance the quality of its internal controls by referring to banking best practices and applicable regulations, including OJK Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks.

In addition, Bank Papua is committed to maintaining the integrity, reliability, and transparency of its financial statements through the implementation of a comprehensive Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) framework. In line with POJK No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting, the Bank has implemented these provisions by establishing an Internal Control Policy and guidelines on the Implementation of Financial Reporting Integrity of Bank Papua as the primary framework to ensure the quality of financial reporting. The Bank has also appointed a Special Work Unit (UKK) to carry out the ICOFR function, including the prevention of manipulation, early detection of misstatement risks, and strengthening internal controls within the financial reporting process.

The implementation of ICOFR includes controls over transaction recording, multi-level authorization, documentation maintenance, as well as mechanisms for the prevention and detection of unauthorized transactions, supported by reliable financial information systems and the application of segregation of duties principles. The Board of Directors is responsible for ensuring the effectiveness of ICOFR through periodic evaluations, while the Board of Commissioners, through the Audit Committee, performs oversight and monitoring to ensure compliance with financial accounting standards and regulatory requirements. Through this implementation, Bank Papua continues to strengthen its governance practices and enhance stakeholder confidence in the transparency and quality of its financial reporting.



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Penerapan manajemen Risiko di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) didasarkan pada berbagai faktor yang memerlukan pengelolaan Risiko secara komprehensif, antara lain:

1. Meningkatnya kompleksitas Risiko perbankan yang memerlukan perhatian khusus dari Manajemen Bank.
2. Pendekatan reaktif dalam manajemen Risiko diubah menjadi proaktif dan berorientasi ke depan.
3. Pengelolaan Risiko diperlukan untuk memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama dalam menegakkan praktik bisnis yang sehat dan memberikan nilai tambah sesuai harapan pemangku kepentingan.
4. Tuntutan perbankan internasional melalui Bank for International Settlement (BIS) untuk menerapkan "25 Basel Core Principles" mendorong Bank Papua untuk segera mengintegrasikan manajemen Risiko dalam operasionalnya.
5. Kebutuhan publik akan transparansi dan sensitivitas terhadap Risiko mengharuskan Bank Papua menerapkan manajemen Risiko berbasis prinsip kehati-hatian, guna meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap Bank.

The implementation of risk management at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) is based on various factors that require comprehensive risk management, including:

1. *The increasing complexity of banking risks, which requires special attention from bank management.*
2. *The reactive approach to risk management is being transformed into a proactive and forward-looking one.*
3. *Risk management is needed to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, particularly in upholding sound business practices and providing added value in line with stakeholder expectations.*
4. *The demand from international banks, through the Bank for International Settlements (BIS), to implement the "25 Basel Core Principles," has prompted Bank Papua to immediately integrate risk management into its operations.*
5. *The public's need for transparency and sensitivity to risk requires Bank Papua to implement prudent risk management to enhance the bank's image and public trust.*

TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

1. Meningkatkan kesadaran Risiko: Semua individu dan unit kerja harus memahami bahwa pencapaian target perusahaan mengandung Risiko, sehingga setiap pihak wajib mengelola Risiko sesuai tanggung jawabnya sebagai bagian dari manajemen Risiko terintegrasi.
2. Pedoman penerapan manajemen Risiko: Memberikan arahan strategis bagi penerapan manajemen Risiko di tingkat perusahaan dan unit kerja, melalui kebijakan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pengelolaan Risiko secara strategis.
3. Kepatuhan terhadap regulasi: Memastikan seluruh kebijakan dan implementasi manajemen Risiko mematuhi regulasi perbankan yang berlaku.
4. Optimalisasi Risiko dan return: Mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan Risiko usaha potensial melalui pengelolaan portofolio bisnis yang terukur.
5. Pengendalian Risiko: Mengendalikan aktivitas usaha

GOALS AND OBJECTIVES OF RISK MANAGEMENT POLICY

1. *Increasing risk awareness: All individuals and work units must understand that achieving company targets involves risk. Therefore, each party is obliged to manage risk according to their responsibilities as part of integrated risk management.*
2. *Risk Management Implementation Guidelines: Provide strategic direction for the implementation of Risk Management at the company and work unit levels, through systematically developed policies to support strategic Risk Management.*
3. *Regulatory Compliance: Ensure all Risk Management policies and implementation comply with applicable banking regulations.*
4. *Risk and Return Optimization: Achieve a balance between profitability and potential business Risk through measurable business portfolio management.*
5. *Risk Control: Control business activities with a*



dengan tingkat Risiko yang wajar, melalui pendekatan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan penerapan sistem manajemen Risiko yang efektif, Bank Papua berkomitmen untuk menjaga stabilitas usaha dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

1. Kebijakan ini berfungsi sebagai umbrella policy yang berlaku untuk seluruh unit kerja di Bank Papua, menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi dan proses manajemen Risiko.
2. Kebijakan ini mengatur dan mendefinisikan peran serta tanggung jawab setiap organ organisasi yang terlibat dalam proses manajemen Risiko.
3. Bank Papua mengelola delapan jenis Risiko utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu:
 - a. Risiko Kredit, terkait kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
 - b. Risiko Pasar, akibat fluktuasi pasar yang memengaruhi aset dan kewajiban Bank.
 - c. Risiko Likuiditas, terkait kemampuan Bank memenuhi kewajiban jangka pendek.
 - d. Risiko Operasional, akibat kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau faktor eksternal.
 - e. Risiko Hukum, terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan atau tuntutan hukum.
 - f. Risiko Strategik, terkait ketidaksesuaian strategi bisnis dengan kondisi pasar.
 - g. Risiko Kepatuhan, terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal.
 - h. Risiko Reputasi, terkait persepsi negatif dari pemangku kepentingan terhadap Bank.

FALSAFAH MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan manajemen Risiko, Bank Papua berpegang pada falsafah berikut untuk memastikan pengelolaan Risiko yang efektif dan berkelanjutan:

1. **Going Concern**

Risiko dikelola dengan prinsip bahwa Bank Papua terus beroperasi secara berkelanjutan dan berfokus pada pencapaian keuntungan.

2. **Professional**

Pengelolaan Risiko dilakukan secara profesional demi kepentingan dan keberlanjutan usaha Bank.

reasonable level of Risk, through a targeted, integrated, and sustainable approach.

By implementing an effective Risk Management system, Bank Papua is committed to maintaining business stability and meeting stakeholder needs sustainably.

SCOPE OF RISK MANAGEMENT

1. *This policy serves as an umbrella policy applicable to all work units at Bank Papua, serving as the basis for the implementation of Risk Management functions and processes.*
2. *This policy regulates and defines the roles and responsibilities of each organizational organ involved in the Risk Management process.*
3. *Bank Papua manages eight main types of Risk in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, namely:*
 - a. *Credit Risk, related to the debtor's ability to meet payment obligations.*
 - b. *Market Risk, due to market fluctuations that affect the Bank's assets and liabilities.*
 - c. *Liquidity Risk, related to the Bank's ability to meet short-term obligations.*
 - d. *Operational Risk, due to failures in internal processes, people, systems, or external factors.*
 - e. *Legal Risk, related to non-compliance with regulations or lawsuits.*
 - f. *Strategic Risk, related to the misalignment of business strategy with market conditions.*
 - g. *Compliance Risk, related to non-compliance with regulations and internal policies.*
 - h. *Reputation Risk, related to negative perceptions of the Bank by stakeholders.*

RISK MANAGEMENT PHILOSOPHY

In implementing risk management, Bank Papua adheres to the following philosophy to ensure effective and sustainable risk management:

1. **Going Concern**

Risk is managed based on the principle that Bank Papua continues to operate sustainably and focuses on achieving profits.

2. **Professionalism**

Risk management is carried out professionally for the benefit and sustainability of the Bank's business.



3. Tanggung Jawab

Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memahami, mengelola, dan mengambil peran aktif dalam manajemen Risiko sesuai fungsi masing-masing, serta mempertanggungjawabkan dengan benar.

4. Risk & Return

Setiap keputusan investasi dan transaksi didasarkan pada keseimbangan antara Risiko yang diambil dan hasil yang diharapkan (prinsip *risk & return*).

5. Four Eyes Principle

Setiap keputusan transaksi penting melibatkan lebih dari satu pihak, dengan menerapkan prinsip pengawasan dan mekanisme check & balances.

6. Integritas dan Disiplin

Bank mengutamakan pegawai yang kompeten, berintegritas, dan berdisiplin tinggi, menciptakan budaya Risiko yang kondusif.

7. Komitmen

Dukungan penuh dari seluruh pegawai hingga manajemen puncak sangat penting untuk penerapan manajemen Risiko yang efektif.

8. Transparansi/Keterbukaan

Manajemen Risiko didukung oleh prinsip keterbukaan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bank.

9. Citra

Risiko yang memengaruhi citra Bank sama pentingnya dengan Risiko finansial. Pengelolaan Risiko yang tidak tepat dapat berdampak signifikan pada reputasi Bank.

Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pegawai dan manajemen Bank Papua harus memperhatikan falsafah ini untuk mendukung penerapan manajemen Risiko yang menyeluruh.

3. Responsibility

Every employee is responsible for understanding, managing, and taking an active role in risk management according to their respective functions, and for properly accounting for them.

4. Risk & Return

Every investment and transaction decision is based on a balance between the risk taken and the expected return (the principle of risk & return).

5. Four Eyes Principle

Every important transaction decision involves more than one party, implementing the principle of oversight and a checks & balances mechanism.

6. Integrity and Discipline

The Bank prioritizes competent, highly disciplined employees, creating a conducive risk culture.

7. Commitment

Full support from all employees, including top management, is essential for the effective implementation of risk management.

8. Transparency/Openness

Risk management is supported by the principle of openness to ensure effective oversight and enhance public trust in the Bank.

9. Image

Risks affecting the Bank's image are as important as financial risks. Inappropriate risk management can significantly impact the Bank's reputation.

Every policy or decision made by Bank Papua employees and management must adhere to this philosophy to support the implementation of comprehensive risk management.

PENERAPAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO TERPADU

Bank Papua menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang terdiri dari empat pilar utama dalam penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai penentu arah dan pengendali Risiko.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur, termasuk penetapan limit Risiko yang jelas.
3. Proses manajemen Risiko yang terukur, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian

IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Bank Papua implements a Risk Management Framework that refers to POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, which consists of four main pillars in implementing risk management:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and Directors as the direction and controller of risk.
2. Adequate policies and procedures, including the establishment of clear risk limits.
3. A measurable risk management process, encompassing identification, measurement, monitoring, and control



Risiko, serta dukungan sistem informasi yang andal.

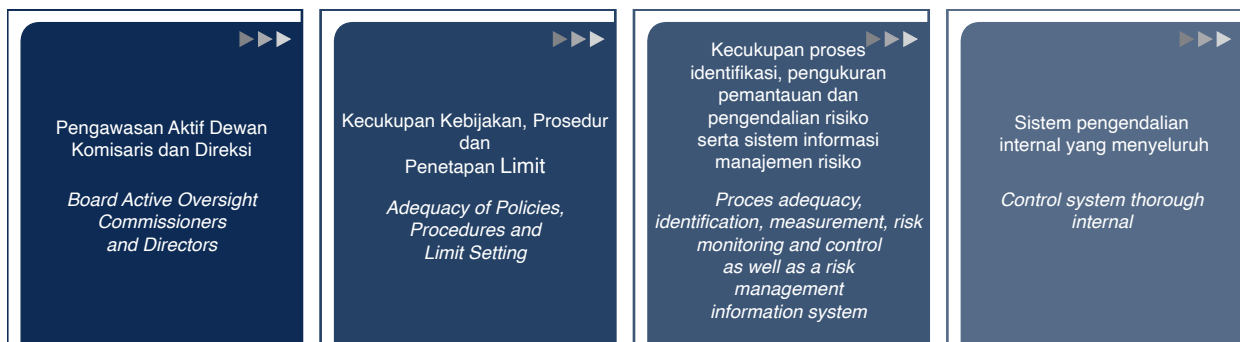
4. Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif untuk memastikan Risiko terkendali di semua lini operasional Bank.

Dengan falsafah dan kerangka kerja ini, Bank Papua berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan Risiko yang efektif guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

of risk, as well as the support of a reliable information system.

4. A comprehensive internal control system to ensure risk is controlled across all aspects of the Bank's operations.

With this philosophy and framework, Bank Papua is committed to creating effective risk management to support sustainable business growth and maintain stakeholder trust.



PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang efektif, pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris di Bank Papua merujuk pada ketentuan BAB III Pasal 6 dan 7 Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan ini menetapkan wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk penetapan dan persetujuan limit Risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
- b. Melaksanakan Manajemen Risiko bagi Bank Umum secara efektif berdasarkan POJK dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan

ACTIVE SUPERVISION BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

As part of the effective implementation of risk management, active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners at Bank Papua refers to the provisions of Chapter III, Articles 6 and 7 of OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. This regulation establishes the following authorities and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners:

AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on Board of Directors Decree No. 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024, the Board of Directors has the following authorities and responsibilities:

- a. Developing written and comprehensive Risk Management policies and strategies, including establishing and approving overall Risk limits, per risk type, and per functional activity (Bank business activities).
- b. Implementing Risk Management for Commercial Banks effectively in accordance with OJK Regulation and applicable laws.
- c. Develop and establish written and comprehensive Risk Management policies, strategies, and frameworks,



komprehensif, termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sesuai kondisi Bank, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

- d. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui prosedur serta alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko.
- e. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melebihi limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- f. Mengevaluasi dan/atau memperbarui kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam setahun atau lebih sering jika terdapat perubahan signifikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko.
- g. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas di setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk laporan mengenai Profil Risiko.
- i. Memastikan bahwa seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- j. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Pengawas Bank.
- k. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko, termasuk kesadaran Risiko di seluruh jenjang organisasi.
- l. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
- m. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko diterapkan secara independen, tercermin antara lain dari pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan Satuan Kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- n. Melaksanakan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil

including overall Risk limits and per type of Risk, taking into account the level of Risk to be taken and Risk tolerance according to the Bank's conditions, and taking into account the impact of Risk on capital adequacy after obtaining approval from the Board of Commissioners.

- d. *Develop, establish, and update procedures and tools to identify, measure, monitor, and control Risk.*
- e. *Develop and establish transaction approval mechanisms, including those exceeding limits and authority for each position level.*
- f. *Evaluate and/or update Risk Management policies, strategies, and frameworks at least once a year or more frequently if there are significant changes in factors affecting the Bank's business activities, Risk exposure, and/or Risk profile.*
- g. *Establish an organizational structure, including clear authorities and responsibilities at each position level related to the implementation of Risk Management.*
- h. *Be responsible for the implementation of Risk Management policies, strategies, and frameworks approved by the Board of Commissioners and evaluate and provide direction based on reports submitted by the Risk Management Work Unit, including reports on the Risk Profile.*
- i. *Ensure that all material risks and their impacts have been followed up and submit accountability reports to the Board of Commissioners on a regular basis.*
- j. *Ensure the implementation of corrective measures for problems or irregularities in the Bank's business activities identified by the Internal Audit Unit and Bank Supervisory Agency.*
- k. *Develop a Risk Management culture, including Risk awareness at all levels of the organization.*
- l. *Ensure adequate financial support and infrastructure to manage and control Risk.*
- m. *Ensure that the Risk Management function is implemented independently, reflected, among other things, in the separation of functions between the Risk Management Unit that identifies, measures, monitors, and controls Risk and the Unit that executes and settles transactions.*
- n. *Implement Risk Management in the use of Information Technology by Commercial Banks in accordance with applicable laws and regulations.*
- o. *Be responsible for the implementation of Risk Management policies and the Risk exposures taken*



oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.

- p. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan OJK, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dengan pengawasan aktif ini, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Papua berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan manajemen Risiko diimplementasikan secara menyeluruh, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Tujuan dari komitmen ini adalah untuk menjaga stabilitas usaha Bank Papua dan memitigasi potensi Risiko yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.

KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Untuk memastikan pengendalian Risiko yang efektif, Bank Papua menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen Risiko yang komprehensif. Kebijakan ini disusun berdasarkan strategi manajemen Risiko Bank dan mencakup toleransi Risiko serta penetapan limit Risiko yang jelas. Penetapan toleransi dan limit Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan profil Risiko yang dapat diterima serta strategi bisnis Bank secara keseluruhan.

Proses penetapan limit Risiko dimulai dari unit kerja operasional yang bertanggung jawab menyusun usulan limit Risiko. Usulan ini kemudian disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko Bank atau Manajemen Risiko Terintegrasi untuk dievaluasi secara menyeluruh. Setelah evaluasi, rekomendasi tersebut diajukan kepada Komite Manajemen Risiko untuk mendapatkan pertimbangan

by the Bank as a whole, including evaluating and providing direction on Risk Management strategies based on reports submitted by the Risk Management Unit and submitting accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis.

- p. *The Board of Directors together with the Board of Commissioners are responsible for the effectiveness of the implementation of Risk Management for Liquidity Risk.*

AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on Article 7 of the OJK Regulation, the Board of Commissioners has the following responsibilities:

1. *Approving and evaluating the Risk Management policy developed by the Board of Directors.*
2. *Evaluating the Board of Directors' accountability for the implementation of the Risk Management policy.*
3. *Evaluating and deciding on requests from the Board of Directors regarding transactions requiring the Board of Commissioners' approval.*

With this active oversight, the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank Papua are committed to ensuring that all Risk Management policies are implemented comprehensively, accountably, and in accordance with the principles of good corporate governance (GCG). The purpose of this commitment is to maintain Bank Papua's business stability and mitigate potential risks that could impact the company's operations.

ADEQUACY OF POLICIES, PROCEDURES, AND LIMIT SETTING

To ensure effective Risk control, Bank Papua has established comprehensive Risk Management policies and procedures. These policies are based on the Bank's Risk Management strategy and include clear Risk Tolerance and Risk Limit settings. The determination of Risk Tolerance and Limits is carried out by considering the acceptable Risk profile and the Bank's overall business strategy.

The risk limit setting process begins with the operational work unit responsible for preparing the proposed risk limits. These proposals are then submitted to the Bank's Risk Management Division or Integrated Risk Management for comprehensive evaluation. After evaluation, the recommendations are submitted to the Risk Management Committee for further consideration. The Risk Management



lebih lanjut. Komite Manajemen Risiko kemudian merekomendasikan usulan tersebut kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan resmi, dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.

Kebijakan ini memastikan bahwa semua limit Risiko yang ditetapkan telah mempertimbangkan tingkat Risiko yang akan diambil Bank serta sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan. Dengan pendekatan ini, Bank Papua dapat menjaga stabilitas operasional, meminimalkan potensi kerugian, dan mengoptimalkan pengelolaan Risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku.

PROSES MANAJEMEN RISIKO YANG TERUKUR

Bank Papua menerapkan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pelaporan secara berkala kepada otoritas berwenang dan manajemen. Sistem ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang berbasis Risiko. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab menyusun laporan profil Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite Manajemen Risiko dan Pemantau Risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan komponen kunci dalam sistem manajemen Risiko Bank Papua. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. IDENTIFIKASI RISIKO

Bank Papua secara proaktif melakukan proses identifikasi Risiko untuk mengelola berbagai Risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional dan bisnis. Proses ini mencakup pemetaan Risiko, pengumpulan data, serta analisis potensi dampak Risiko terhadap kinerja dan stabilitas Bank. Identifikasi Risiko yang baik merupakan fondasi utama bagi keberhasilan manajemen Risiko.

Tujuan Identifikasi Risiko

1. Menganalisa sumber, sifat, jenis, dan kemungkinan timbulnya Risiko dari aktivitas operasional dan bisnis Bank.
2. Mengidentifikasi Risiko pada seluruh jenis aktivitas dan fungsi operasional yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap Bank.
3. Menentukan strategi pengelolaan Risiko yang tepat dengan menggunakan metodologi pengukuran yang sesuai.

Committee then recommends the proposals to the President Director for formal approval, with the approval of the Board of Commissioners.

This policy ensures that all established risk limits take into account the level of risk the Bank will take and align with the company's long-term strategy. With this approach, Bank Papua can maintain operational stability, minimize potential losses, and optimize risk management in accordance with prudent principles and applicable regulations.

MEASURABLE RISK MANAGEMENT PROCESS

Bank Papua implements a Risk Management Information System designed to support regular reporting to the relevant authorities and management. This system serves as the basis for risk-based strategic decision-making. The Risk Management Division is responsible for preparing periodic risk profile reports for submission to the Financial Services Authority (OJK), the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Risk Management and Risk Monitoring Committees.

The process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks is a key component of Bank Papua's risk management system. These stages include:

1. RISK IDENTIFICATION

Bank Papua proactively conducts a risk identification process to manage the various risks inherent in every operational and business activity. This process includes risk mapping, data collection, and analysis of the potential impact of risks on the Bank's performance and stability. Sound risk identification is the foundation for successful risk management.

Risk Identification Objectives

1. Analyze the sources, nature, types, and likelihood of risks arising from the Bank's operational and business activities.
2. Identify risks across all types of operational activities and functions that have the potential to negatively impact the Bank.
3. Determine appropriate risk management strategies using appropriate measurement methodologies.



Proses Identifikasi Risiko

1. Identifikasi Risiko dilakukan secara proaktif, mencakup semua aktivitas bisnis Bank untuk menganalisa sumber dan kemungkinan Risiko serta dampaknya terhadap Bank.
2. Proses ini bertujuan untuk memahami jenis, lingkup, bentuk, dan tingkat Risiko, sehingga dapat membantu langkah pengukuran dan pengendalian Risiko secara lebih terarah.
3. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko melibatkan analisis mendalam terhadap:
 - a. Karakteristik Risiko yang melekat pada Bank.
 - b. Risiko yang muncul dari produk dan aktivitas usaha Bank.

Fokus Identifikasi Risiko

Dalam menerapkan identifikasi Risiko, Bank Papua memperhatikan beberapa prinsip utama:

1. Bersifat proaktif (anticipative), tidak menunggu Risiko muncul (reaktif).
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional dan operasional tanpa terkecuali.
3. Menggabungkan dan menganalisis informasi Risiko dari berbagai sumber yang tersedia.
4. Menganalisis kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari Risiko yang dapat terjadi.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis, proses identifikasi Risiko di Bank Papua membantu menciptakan kerangka kerja manajemen Risiko yang efektif, mendukung stabilitas bisnis, dan meminimalkan potensi kerugian. Proses ini juga memastikan bahwa Risiko yang dihadapi dapat dikelola secara efisien sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. PENGUKURAN RISIKO

Pengukuran Risiko adalah langkah kritis dalam manajemen Risiko untuk memastikan Bank memiliki pemahaman mendalam terhadap eksposur Risiko yang dihadapi. Proses ini menggunakan metode sesuai standar perbankan, seperti *Value at Risk* (VaR) untuk Risiko pasar dan *Stress Testing* untuk Risiko kredit. Pengukuran Risiko memberikan gambaran jelas tentang efektivitas penerapan manajemen Risiko dalam menjaga stabilitas profitabilitas dan permodalan Bank.

Tujuan Pengukuran Risiko

1. Mengukur profil Risiko Bank guna mengetahui besaran Risiko yang melekat pada produk, aktivitas, atau

Risk Identification Process

1. Risk identification is conducted proactively, encompassing all Bank business activities to analyze the sources and likelihood of risks, as well as their impact on the Bank.
2. This process aims to understand the types, scope, forms, and levels of risks, thus facilitating more targeted risk measurement and control measures.
3. Implementation of the risk identification process involves an in-depth analysis of:
 - a. Characteristics of risks inherent in the Bank.
 - b. Risks arising from the Bank's products and business activities.

Risk Identification Focus

In implementing risk identification, Bank Papua adheres to several key principles:

1. Be proactive (anticipatory), not waiting for risks to emerge (reactive).
2. Cover all functional and operational activities without exception.
3. Combine and analyze risk information from various available sources.
4. Analyze the likelihood (probability) and impact of potential risks.

With a comprehensive and systematic approach, Bank Papua's risk identification process helps create an effective risk management framework, supports business stability, and minimizes potential losses. This process also ensures that risks are managed efficiently in accordance with prudent principles.

2. RISK MEASUREMENT

Risk measurement is a critical step in risk management, ensuring the bank has a thorough understanding of its risk exposures. This process uses methods in accordance with banking standards, such as *Value at Risk* (VaR) for market risk and *Stress Testing* for credit risk. Risk measurement provides a clear picture of the effectiveness of risk management implementation in maintaining the stability of the bank's profitability and capital.

Risk Measurement Objectives

1. To measure the Bank's risk profile to determine the magnitude of risk inherent in a particular product, activity,



portofolio tertentu serta dampaknya terhadap kinerja dan modal Bank.

2. Menyediakan dasar untuk pengendalian Risiko melalui pemahaman eksposur Risiko secara berkala.
3. Menilai sensitivitas dan dampak dari faktor Risiko terhadap kinerja Bank, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

Proses dan Sistem Pengukuran Risiko

1. Sistem Pengukuran Risiko:

- a. Digunakan untuk mengevaluasi eksposur Risiko pada produk, aktivitas, atau portofolio Bank.
- b. Sistem ini harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan asumsi, data, dan prosedur yang digunakan tetap relevan dan akurat.

2. Stress Testing:

- a. Dilakukan untuk melengkapi pengukuran Risiko dengan mengestimasi potensi kerugian dalam kondisi pasar yang tidak normal.
- b. *Stress Testing* membantu mengidentifikasi sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko yang signifikan serta dampaknya pada portofolio dan permodalan.

3. Metodologi dan Alat Pengukuran:

- a. Risiko Pasar dan Likuiditas: *Value at Risk* (VaR), Historical Statistical Model, dan Early Warning Indicators.
- b. Risiko Operasional: *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA), Key Risk Indicators (KRI), dan Loss Event Management (LEM).
- c. Risiko Kredit: Credit Scoring dan Risk Acceptance Criteria (RAC).
- d. Alat pengukuran Risiko ini dirancang untuk mengukur:
 - Σ Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor Risiko.
 - Σ Tren perubahan faktor Risiko berdasarkan fluktuasi historis dan korelasinya.
 - Σ Risiko individu (*risk factors*) dan eksposur Risiko secara keseluruhan (aggregate).

Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Pengukuran

1. Bank wajib melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan.
2. Sistem pengukuran Risiko harus disesuaikan apabila terdapat perubahan material pada kegiatan usaha, produk, atau faktor Risiko Bank.

or portfolio and its impact on the Bank's performance and capital.

2. To provide a basis for risk control by periodically understanding risk exposure.
3. To assess the sensitivity and impact of risk factors on the Bank's performance, both under normal and abnormal conditions.

Risk Measurement Process and System

1. Risk Measurement System:

- a. Used to evaluate risk exposure across the Bank's products, activities, or portfolios.
- b. This system must be periodically evaluated and refined to ensure the assumptions, data, and procedures used remain relevant and accurate.

2. Stress Testing:

- a. Conducted to complement risk measurement by estimating potential losses under abnormal market conditions.
- b. Stress testing helps identify the sensitivity of the Bank's performance to significant changes in risk factors and their impact on the portfolio and capital.

3. Measurement Methodology and Tools:

- a. Market and Liquidity Risk: Value at Risk (VaR), Historical Statistical Model, and Early Warning Indicators.
- b. Operational Risk: Risk and Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI), and Loss Event Management (LEM).
- c. Credit Risk: Credit Scoring and Risk Acceptance Criteria (RAC).
- d. This risk measurement tool is designed to measure:
 - Σ Product/activity sensitivity to changes in risk factors.
 - Σ Risk factor change trends based on historical fluctuations and their correlations.
 - Σ Individual risks (risk factors) and aggregate risk exposure.

Evaluation and Improvement of the Measurement System

1. Banks are required to conduct periodic evaluations to ensure the appropriateness of the assumptions, data, and procedures used.
2. The risk measurement system must be adjusted if there are material changes in the bank's business activities, products, or risk factors.



Dengan pendekatan ini, Bank Papua dapat menjaga stabilitas keuangan, memastikan pemenuhan permodalan yang sehat, dan memitigasi Risiko yang berpotensi mengganggu operasional Bank. Hal ini juga memungkinkan Bank untuk mengantisipasi skenario terburuk melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang selaras dengan praktik terbaik di industri perbankan.

3. PEMANTAUAN RISIKO

Pemantauan Risiko merupakan langkah penting dalam manajemen Risiko untuk memastikan bahwa eksposur Risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berkala dengan bantuan teknologi dan sistem informasi yang mendukung analisis data secara real-time.

Tujuan Pemantauan Risiko

1. Mengevaluasi eksposur Risiko secara berkesinambungan dan memastikan kepatuhan terhadap batas toleransi Risiko.
2. Melakukan penyesuaian terhadap proses pelaporan jika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi, atau teknologi informasi Bank.

Prosedur Pemantauan Risiko

1. **Pemantauan Eksposur Risiko:** Mengawasi besarnya eksposur Risiko yang dihadapi, toleransi Risiko, serta kepatuhan terhadap batasan internal.
2. **Evaluasi Konsistensi:** Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. **Stress Testing:** Mengawasi hasil *Stress Testing* untuk mengidentifikasi dampak dari skenario Risiko yang ekstrem.
4. **Analisis Hasil Pemantauan:** Hasil dari pemantauan Risiko digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi pengelolaan Risiko yang lebih efektif di masa depan.

Kebutuhan Pemantauan Risiko

1. Semua aktivitas atau peristiwa yang berisiko harus dipantau secara teliti untuk memastikan bahwa tindakan pemulihan dapat dilakukan dengan cepat jika terjadi masalah.
2. Pemantauan juga bertujuan untuk mendeteksi perubahan material pada variabel atau asumsi yang terkait dengan produk atau aktivitas tertentu.

With this approach, Bank Papua can maintain financial stability, ensure healthy capital requirements, and mitigate risks that could potentially disrupt the Bank's operations. This also enables the Bank to anticipate worst-case scenarios through qualitative and quantitative approaches aligned with best practices in the banking industry.

3. RISK MONITORING

Risk Monitoring is a critical step in risk management to ensure that identified and measured risk exposures remain within established tolerance limits. This process is conducted periodically with the aid of technology and information systems that support real-time data analysis.

Risk Monitoring Objectives

1. Continuously evaluate risk exposures and ensure compliance with risk tolerance limits.
2. Adjust reporting processes if significant changes occur in the Bank's business activities, products, transactions, or information technology.

Risk Monitoring Procedures

1. **Risk Exposure Monitoring:** Monitoring the magnitude of risk exposures, risk tolerances, and compliance with internal limits.
2. **Consistency Evaluation:** Ensuring that business activities comply with established policies and procedures.
3. **Stress Testing:** Monitoring stress testing results to identify the impact of extreme risk scenarios.
4. **Monitoring Result Analysis:** Risk monitoring results are used as a basis for determining more effective risk management strategies in the future.

Risk Monitoring Needs

1. All risky activities or events must be closely monitored to ensure that remedial actions can be implemented quickly if problems arise.
2. Monitoring also aims to detect material changes in variables or assumptions related to specific products or activities.



Sarana Pendukung Pemantauan Risiko

Proses pemantauan Risiko memerlukan sistem pelaporan dan sistem informasi yang memadai untuk:

1. Menyediakan data yang akurat dan relevan secara tepat waktu.
2. Mendukung analisis Risiko yang komprehensif.
3. Mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian terhadap strategi atau kebijakan manajemen Risiko.

Dengan pendekatan ini, Bank Papua memastikan bahwa setiap Risiko yang dihadapi dapat dipantau dengan efektif, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat. Hal ini mendukung stabilitas operasional Bank serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.

4. PENGENDALIAN RISIKO

Pengendalian Risiko di Bank Papua merupakan langkah penting untuk memitigasi dampak dari Risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Proses ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang ketat, prosedur kerja yang efektif, serta mekanisme pengawasan yang berlapis. Tujuan utamanya adalah menjaga operasional Bank tetap stabil dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tujuan dan Pendekatan Pengendalian Risiko

1. Mitigasi Risiko:

Pengendalian Risiko bertujuan untuk menekan potensi kerugian melalui langkah-langkah seperti:

- a. Menghindari Risiko.
- b. Mengurangi dampak Risiko.
- c. Mengalihkan Risiko (hedging atau asuransi).
- d. Menerima Risiko dalam batas toleransi yang telah ditentukan.

2. Disesuaikan dengan Profil Risiko:

Proses pengendalian Risiko harus menyesuaikan dengan tingkat eksposur dan toleransi Risiko Bank. Langkah mitigasi dapat mencakup mekanisme lindung nilai (hedging), penerbitan garansi, sekuritisasi aset, penggunaan credit derivatives, serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Perangkat dan Sistem Pengendalian Risiko

1. Kebijakan dan Prosedur:

Bank menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai perangkat pencegahan Risiko yang dirancang untuk melindungi kepentingan Bank.

Risk Monitoring Support Tools

The risk monitoring process requires adequate reporting and information systems to:

1. Provide accurate and relevant data in a timely manner.
2. Support comprehensive risk analysis.
3. Identify the need for adjustments to risk management strategies or policies.

With this approach, Bank Papua ensures that every risk faced can be effectively monitored, allowing mitigation measures to be implemented quickly and appropriately. This supports the bank's operational stability and encourages accurate, data-driven decision-making.

4. RISK CONTROL

Risk control at Bank Papua is a crucial step in mitigating the impact of identified and measured risks. This process is carried out through the implementation of strict policies, effective work procedures, and multi-layered supervisory mechanisms. The primary objective is to maintain the stability of the Bank's operations and adherence to prudent principles.

Risk Control Objectives and Approaches

1. Risk Mitigation:

Risk control aims to minimize potential losses through measures such as:

- a. Avoiding Risk.
- b. Reducing the impact of Risk.
- c. Transferring Risk (hedging or insurance).
- d. Accepting Risk within a predetermined tolerance limit.

2. Adapted to Risk Profile:

The risk control process must be tailored to the Bank's risk exposure level and tolerance. Mitigation measures may include hedging mechanisms, issuing guarantees, asset securitization, the use of credit derivatives, and increasing capital to absorb potential losses.

Risk Control Tools and Systems

1. Policies and Procedures:

The Bank establishes policies and procedures as risk prevention tools designed to protect the Bank's interests.



2. Sistem Pendukung:

Sistem yang andal diperlukan untuk memastikan jalannya aktivitas Bank tetap dalam koridor yang aman dan terkendali.

3. Peran Divisi Audit Internal (DAI):

- DAI memastikan kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- DAI menilai efektivitas pengendalian di unit kerja (*Risk Taking Unit*) dan memberikan laporan kepada Divisi Manajemen Risiko.

Strategi Pengendalian Risiko

Bank Papua menerapkan berbagai strategi pengendalian Risiko, termasuk:

- Penetapan limit Risiko untuk mengontrol eksposur Risiko.
- Melakukan *Stress Testing* untuk memahami dampak skenario Risiko ekstrem.
- Menggunakan mekanisme mitigasi Risiko seperti hedging dan asuransi.
- Mengintegrasikan prinsip *risk and return* dalam semua keputusan manajemen Risiko.

Hasil dan Efektivitas Pengendalian Risiko

Dengan penerapan perangkat pengendalian yang komprehensif, Bank Papua dapat mengarahkan operasionalnya dalam koridor yang aman dan terkendali. Proses pengendalian risiko yang efektif membantu Bank mengelola eksposur risiko secara proaktif, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis. Ini menjadi fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG KOMPREHENSIF

Bank Papua menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif untuk memastikan risiko terkendali di seluruh lini operasional. Sistem ini dirancang untuk mengelola risiko secara proaktif, mendukung pencapaian tujuan strategis Bank, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

- Pengelolaan Risiko:** Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank.
- Efisiensi Operasional:** Menjamin bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

2. Support Systems:

A reliable system is needed to ensure that the Bank's activities remain within a safe and controlled framework.

3. Role of the Internal Audit Division (DAI):

- The DAI ensures compliance with applicable policies and procedures by work units.*
- The DAI assesses the effectiveness of controls within the work unit (Risk Taking Unit) and reports to the Risk Management Division.*

Risk Control Strategy

Bank Papua implements various risk control strategies, including:

- Establishing risk limits to control risk exposure.*
- Conducting stress testing to understand the impact of extreme risk scenarios.*
- Using risk mitigation mechanisms such as hedging and insurance.*
- Integrating the principle of risk and return into all risk management decisions.*

Risk Control Results and Effectiveness

By implementing comprehensive control tools, Bank Papua can guide its operations within a safe and controlled framework. An effective risk control process helps the Bank proactively manage risk exposure, maintain regulatory compliance, and improve efficiency in strategic decision-making. This serves as a key foundation for supporting business sustainability and strengthening stakeholder trust.

COMPREHENSIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Bank Papua implements a comprehensive internal control system to ensure risk is controlled across all operational lines. This system is designed to proactively manage risk, support the achievement of the Bank's strategic objectives, and maintain compliance with applicable regulations.

Objectives of the Internal Control System

- Risk Management:** *Identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks inherent in all Bank activities.*
- Operational Efficiency:** *Ensuring that business processes operate in accordance with established standards with high efficiency and effectiveness.*



3. Kepatuhan Regulasi: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

1. Kebijakan dan Prosedur: Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis, mencakup seluruh aspek operasional dan pengelolaan risiko. Kebijakan ini diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.
2. Struktur Organisasi yang Jelas: Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Internal bertanggung jawab memantau dan menilai efektivitas pengendalian internal.
3. Pengawasan Berlapis: Pengendalian dilakukan melalui sistem three lines of defense, yaitu:
 - Unit kerja operasional (*Risk Taking Unit*).
 - Divisi Manajemen Risiko.
 - Divisi Audit Internal sebagai pengawas independen.
4. Sistem Informasi Manajemen: Sistem informasi yang andal mendukung analisis risiko secara real-time, memastikan data yang tersedia akurat, relevan, dan tepat waktu.
5. Evaluasi dan Audit: Pengendalian internal dievaluasi secara berkala melalui audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.

KEUNGGULAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BANK PAPUA

Dengan pengendalian internal yang komprehensif, Bank Papua dapat:

1. Meminimalkan potensi kerugian akibat kegagalan operasional, penipuan, atau ketidakpatuhan.
2. Menjamin bahwa eksposur risiko tetap dalam batas toleransi yang telah ditetapkan.
3. Mendukung terciptanya budaya risiko yang kondusif, di mana setiap pegawai memiliki peran aktif dalam mengelola risiko.

Sistem pengendalian internal yang kuat menjadi landasan bagi Bank Papua untuk menjaga stabilitas operasional, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Sistem ini juga memastikan Bank tetap kompetitif dalam menghadapi tantangan di industri perbankan yang dinamis.

3. *Regulatory Compliance: Ensuring compliance with regulations set by the Financial Services Authority (OJK) and other regulators.*
4. *Transparency and Accountability: Supporting a decision-making process based on accurate and accountable data.*

Main Components of the Internal Control System

1. *Policies and Procedures: The Bank has written policies and procedures covering all aspects of operations and risk management. These policies are updated regularly to ensure relevance to changing internal and external conditions.*
2. *Clear Organizational Structure: The Risk Management Division and the Internal Audit Division are responsible for monitoring and assessing the effectiveness of internal controls.*
3. *Multi-Layered Supervision: Control is implemented through a three-lines-of-defense system, namely:*
 - *Operational work units (Risk Taking Unit).*
 - *Risk Management Division.*
 - *Internal Audit Division as an independent supervisor.*
4. *Management Information System: A reliable information system supports real-time risk analysis, ensuring available data is accurate, relevant, and timely.*
5. *Evaluation and Audit: Internal controls are periodically evaluated through internal and external audits to ensure that all risks have been identified and managed appropriately.*

BENEFITS OF BANK PAPUA'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

With comprehensive internal controls, Bank Papua can:

1. *Minimize potential losses due to operational failures, fraud, or non-compliance.*
2. *Ensure that risk exposure remains within established tolerance limits.*
3. *Support the creation of a conducive risk culture, where every employee plays an active role in managing risk.*

A strong internal control system is the foundation for Bank Papua to maintain operational stability, improve efficiency, and strengthen stakeholder trust. This system also ensures that the Bank remains competitive in facing challenges in the dynamic banking industry.



PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Papua sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah delapan risiko, yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank. Dalam rangka mengelola Risiko Kredit secara efektif, Bank Papua menerapkan prinsip four eyes principle, yaitu pemisahan fungsi untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian internal, khususnya dalam penerapan manajemen risiko.

Upaya Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai tindak lanjut penerapan standar internasional dalam dokumen Basel III: Finalising Post-Crisis Reform, Bank Papua mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Surat edaran ini merupakan pembaruan atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016.

Bank secara teratur melakukan langkah-langkah berikut untuk mengelola Risiko Kredit:

1. Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan:
 - a. Memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Meninjau dan menyempurnakan Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi pasar dan regulasi terkini.
2. Pemantauan Eksposur Risiko Kredit:
 - a. Risiko kredit dipantau secara terus-menerus sejak proses pemberian kredit hingga jatuh tempo.
 - b. Melakukan evaluasi eksposur risiko terhadap limit risiko kredit untuk memastikan kepatuhan terhadap toleransi risiko yang telah ditetapkan.
3. Implementasi Sistem yang Andal:

Bank memastikan bahwa setiap proses pengelolaan risiko kredit didukung oleh sistem yang memadai untuk meminimalkan potensi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam penanganannya.

RISK PROFILE AND MANAGEMENT

According to the Financial Services Authority (OJK), Bank Papua's business risks are eight types of risks: Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk. Each risk is explained as follows:

1. Credit Risk

Credit Risk is the potential loss arising from the failure of debtors or other parties to fulfill their obligations to the Bank. To effectively manage Credit Risk, Bank Papua applies the "four eyes" principle, which involves the separation of functions to improve the reliability of the internal control system, particularly in the implementation of risk management.

Credit Risk Management Efforts

As a follow-up to the implementation of international standards in the Basel III: Finalizing Post-Crisis Reform document, Bank Papua adheres to the provisions stipulated in OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2021 concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk Using the Standardized Approach. This circular letter updates OJK Circular Letter No. 42/SEOJK.03/2016.

The Bank regularly takes the following steps to manage Credit Risk:

1. Policy Review and Update:
 - a. Update the Risk Management Policy Guidelines.
 - b. Review and refine the Credit and Financing Policy Guidelines to ensure compliance with current market conditions and regulations.
2. Credit Risk Exposure Monitoring:
 - a. Continuously monitor credit risk from the loan disbursement process until maturity.
 - b. Evaluate risk exposure against credit risk limits to ensure compliance with established risk tolerances.
3. Implementation of a Reliable System:

The Bank ensures that every credit risk management process is supported by an adequate system to minimize potential risks and increase efficiency in handling them. Through this approach, Bank Papua is committed to maintaining the quality of its credit portfolio, reducing



Melalui pendekatan ini, Bank Papua berkomitmen untuk menjaga kualitas portofolio kredit, mengurangi potensi kerugian, dan memastikan pertumbuhan kredit yang sehat serta berkelanjutan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang timbul dari posisi neraca, rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, termasuk fluktuasi harga opsi. Untuk mengukur risiko pasar, Bank Papua menggunakan metode standar sesuai regulasi guna menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Risiko nilai tukar dikelola melalui pengendalian Posisi Devisa Neto sesuai peraturan Bank Indonesia/OJK.

Upaya Pengelolaan Risiko Pasar

1. Tujuan Pengelolaan:
Pengelolaan risiko pasar bertujuan meminimalkan dampak negatif dari perubahan pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Fokus utama adalah pengelolaan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, yang sebagian besar berasal dari posisi *Banking book* dengan porsi kecil dari posisi *trading book*.
2. Peran Komite ALCO:
Bank memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO) yang secara berkala membahas pengelolaan risiko pasar, khususnya yang terkait dengan posisi suku bunga dan nilai tukar.
3. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pasar:
 - a. Identifikasi Risiko: Dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru yang berpotensi memengaruhi risiko pasar.
 - b. Pengukuran Risiko:
 - i. Menggunakan metode standar untuk menghitung KPMM risiko pasar, mencakup portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga, serta *trading book* dan *Banking book* untuk risiko nilai tukar.
 - ii. Analisis Sensitivitas:
 - β Risiko Suku Bunga: Mengukur dampak perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas Bank, dengan asumsi perubahan paralel pada kurva imbal hasil.
 - β Risiko Nilai Tukar: Mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Bank.

potential losses, and ensuring healthy and sustainable credit growth in accordance with prudential principles and applicable regulations.

2. Market Risk

Market risk is the potential loss arising from balance sheet positions, off-balance sheet accounts, including derivative transactions, due to changes in overall market conditions, including fluctuations in option prices. To measure market risk, Bank Papua uses standard methods in accordance with regulations to calculate the Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR). Exchange rate risk is managed through Net Open Position control in accordance with Bank Indonesia/OJK regulations.

Market Risk Management Efforts

1. Management Objectives:
Market risk management aims to minimize the negative impact of market changes on the Bank's assets and capital. The primary focus is the management of interest rate risk and exchange rate risk, which primarily originate from banking book positions, with a small portion from trading book positions.
2. Role of the ALCO Committee:
The Bank has an Asset and Liability Management Committee (ALCO) that periodically discusses market risk management, particularly those related to interest rate and exchange rate positions.
3. Market Risk Identification and Measurement:
 - a. Risk Identification: *Conducted for each new product or activity that has the potential to impact market risk.*
 - b. Risk Measurement:
 - i. *Using standard methods to calculate market risk CAR, covering the trading book portfolio for interest rate risk, as well as the trading book and banking book for exchange rate risk.*
 - ii. Sensitivity Analysis:
 - β *Interest Rate Risk: Measures the impact of changes in market interest rates on the Bank's profit (loss) and equity, assuming parallel changes in the yield curve.*
 - β *Exchange Rate Risk: Measures the impact of changes in exchange rates on the Bank's profit (loss).*



- c. *Stress Testing*: Dilakukan untuk menilai ketahanan Bank terhadap perubahan signifikan pada pasar.
4. *Pengendalian Risiko Pasar*:
- Penetapan kebijakan, prosedur, dan limit risiko untuk membatasi eksposur risiko pasar.
 - Implementasi sistem informasi manajemen yang komprehensif guna memastikan pemantauan risiko berjalan efektif.

Dengan langkah-langkah pengelolaan yang terintegrasi ini, Bank Papua dapat menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi *volatilitas* pasar. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung kinerja yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah potensi ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, seperti arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan stabilitas keuangan. Risiko ini dapat muncul karena:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif atau melalui penjualan aset, termasuk aset likuid.
- Kesulitan dalam memperoleh arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antarbank, atau pinjaman yang diterima.

Upaya Pengelolaan Risiko Likuiditas

- Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO): Bank Papua memiliki Komite ALCO yang secara berkala mengevaluasi pengelolaan Risiko Likuiditas, termasuk tren kebutuhan likuiditas dan sumber pendanaan yang tersedia.
- Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas:
 - Bank Papua telah menyusun Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas sebagai bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank.
 - Pedoman ini mencakup:
 - Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Proses manajemen Risiko Likuiditas.
 - Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Likuiditas.
- Proses Manajemen Risiko Likuiditas:
 - Identifikasi Risiko: Bertujuan untuk mengetahui kebutuhan likuiditas dan potensi sumber

- c. *Stress Testing*: Conducted to assess the Bank's resilience to significant market changes.

4. Market Risk Control:

- Establishing policies, procedures, and risk limits to limit market risk exposure.
- Implementing a comprehensive management information system to ensure effective risk monitoring.

With these integrated management measures, Bank Papua can maintain financial stability in the face of market volatility. This approach not only ensures regulatory compliance but also supports sustainable performance amidst global economic dynamics.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the potential inability of a Bank to meet maturing obligations from funding sources, such as cash flow or high-quality liquid assets that can be pledged as collateral, without disrupting its financial activities and stability. This risk can arise due to:

- Inability to generate cash flow from productive assets or through the sale of assets, including liquid assets.
- Difficulty in obtaining cash flow from fundraising, interbank transactions, or loans received.

Liquidity Risk Management Efforts

- Asset and Liability Management Committee (ALCO): Bank Papua has an ALCO Committee that periodically evaluates Liquidity Risk management, including trends in liquidity needs and available funding sources.
- Liquidity Risk Management Policy Guidelines:
 - Bank Papua has developed Liquidity Risk Management Policy Guidelines as part of the Bank's Risk Management Policy Guidelines.
 - These guidelines include:
 - Active oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors.
 - Liquidity Risk management process.
 - Liquidity Risk Policies, Procedures, and Limit Setting.
- Liquidity Risk Management Process:
 - Risk Identification: Aims to identify liquidity needs and the potential funding sources available to meet



- pendanaan yang tersedia untuk memenuhinya.
- o Pengukuran Risiko: Memastikan Bank memiliki alat pengukuran untuk memantau eksposur Risiko Likuiditas secara akurat.
- o Pemantauan Risiko: Dilakukan secara berkala oleh Divisi Treasury, memastikan bahwa kebutuhan likuiditas terpenuhi tanpa mengganggu aktivitas operasional Bank.
- 4. Optimalisasi Pengelolaan *Treasury*:
Bank Papua menjaga likuiditas dengan menempatkan dana pada instrumen keuangan yang likuid. Langkah ini memastikan Bank mampu menghadapi fluktuasi kebutuhan pendanaan dengan efisien dan efektif.

Dengan langkah-langkah ini, Bank Papua memastikan pengelolaan Risiko Likuiditas yang optimal, meminimalkan potensi gangguan operasional akibat kekurangan dana, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga memperkuat posisi Bank dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan mendukung stabilitas keuangan jangka panjang.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang memengaruhi kelancaran operasional Bank. Untuk memenuhi kebutuhan modal minimum terhadap Risiko ini, Bank Papua mengadopsi standar internasional sesuai dokumen Basel III: Finalising Post-Crisis Reform. Bank menerapkan pendekatan standar dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020.

Upaya Pengelolaan Risiko Operasional

1. Mitigasi Risiko Operasional di Seluruh Satuan Kerja: Setiap unit kerja di Bank Papua bertanggung jawab dalam mitigasi Risiko Operasional melalui kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Peran Divisi Manajemen Risiko:
 - o Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko yang memadai untuk melaksanakan aktivitas operasional dengan akurat, efisien, dan tepat waktu.
 - o Mengawasi kecukupan modal untuk menutupi Risiko Operasional sesuai dengan regulasi Bank Indonesia dan OJK.

them.

- o Risk Measurement: Ensures the Bank has measurement tools to accurately monitor Liquidity Risk exposure.
- o Risk Monitoring: Conducted periodically by the Treasury Division, ensuring that liquidity needs are met without disrupting the Bank's operational activities.
- 4. Optimizing Treasury Management:
Bank Papua maintains liquidity by placing funds in liquid financial instruments. This step ensures the Bank's ability to efficiently and effectively address fluctuating funding needs.

With these steps, Bank Papua ensures optimal Liquidity Risk management, minimizes potential operational disruptions due to funding shortages, and enhances stakeholder confidence. This approach also strengthens the Bank's position in meeting obligations in a timely manner and supporting long-term financial stability.

4. Operational Risk

Operational Risk is the potential loss arising from inadequate or malfunctioning internal processes, human error, system failures, or external events that impact the Bank's operational continuity. To meet the minimum capital requirements for this risk, Bank Papua has adopted international standards in accordance with the Basel III: Finalizing Post-Crisis Reform document. The Bank applies a standardized approach to calculating Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk, as stipulated in OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020.

Operational Risk Management Efforts

1. Mitigating Operational Risk Across All Units
Work: Each work unit at Bank Papua is responsible for mitigating Operational Risk through compliance with established policies and procedures.
2. Role of the Risk Management Division:
 - o Ensuring the Bank has adequate risk management policies and procedures to carry out operational activities accurately, efficiently, and timely.
 - o Monitoring capital adequacy to cover Operational Risk in accordance with Bank Indonesia and OJK regulations.



3. Perhitungan dan Peningkatan Manajemen Risiko Operasional:

- o Menggunakan metode pendekatan standar untuk menghitung kecukupan modal Risiko Operasional, sesuai dengan regulasi terbaru.
- o Melakukan review berkala terhadap Business Continuity Plan (BCP) untuk memastikan kelancaran operasional Bank meskipun terjadi gangguan atau kejadian luar biasa.

4. Penggunaan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan

Risiko: Sesuai dengan POJK No. 38/POJK.03/2016, Bank Papua mengintegrasikan manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi potensi kegagalan sistem. Kebijakan ini juga memperbarui pedoman sebelumnya yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP.

Dengan penerapan pengelolaan Risiko Operasional yang komprehensif, Bank Papua dapat:

- β Meminimalkan potensi kerugian akibat kegagalan operasional.
- β Menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- β Menyediakan modal yang cukup untuk menutupi risiko.
- β Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menjalankan proses operasional.

Langkah-langkah ini memperkuat stabilitas operasional Bank Papua, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung keberlanjutan bisnis di tengah tantangan yang terus berkembang.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek yuridis, yang dapat berasal dari perikatan yang dilakukan oleh Bank. Risiko ini mencakup berbagai faktor, seperti tuntutan hukum dan kelemahan dalam dokumen atau proses hukum yang berpotensi merugikan Bank.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Hukum

1. Identifikasi Risiko Hukum:

- o Dilakukan berdasarkan analisis terhadap tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis dalam setiap perikatan yang dibuat oleh Bank.
- o Fokus pada kewajiban kontinjensi yang muncul akibat tuntutan hukum.

3. Calculating and Improving Operational Risk Management:

- o Using a standardized approach to calculate capital adequacy for Operational Risk, in accordance with the latest regulations.
- o Conducting regular reviews of the Business Continuity Plan (BCP) to ensure the smooth operation of the Bank despite disruptions or extraordinary events.

4. Use of Information Technology for Risk Management

In accordance with POJK No. 38/POJK.03/2016, Bank Papua integrates risk management into the use of information technology to reduce the potential for system failures. This policy also updates the previous guidelines stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 9/30/DPNP.

By implementing comprehensive Operational Risk management, Bank Papua can:

- β Minimize potential losses due to operational failures.
- β Ensure compliance with applicable regulations.
- β Provide sufficient capital to cover risks.
- β Improve efficiency and accuracy in carrying out operational processes.

These steps strengthen Bank Papua's operational stability, maintain stakeholder trust, and support business sustainability amidst evolving challenges.

5. Legal Risk

Legal risk is the potential loss that may arise from lawsuits or legal weaknesses, which may arise from obligations entered into by the Bank. This risk encompasses various factors, such as lawsuits and weaknesses in legal documents or processes that could potentially harm the Bank.

Legal Risk Identification and Measurement

1. Legal Risk Identification:

- o Conducted based on an analysis of legal claims and legal weaknesses in each agreement entered into by the Bank.
- o Focuses on contingent liabilities arising from legal claims.



2. Pengukuran Risiko Hukum:

- o Dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama Divisi Hukum.
- o Berdasarkan evaluasi kasus hukum secara individual untuk memahami dampak potensial terhadap Bank.

Upaya Pengelolaan Risiko Hukum

1. Pemantauan Risiko Hukum:

- o Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, regulasi hukum, dan ketentuan limit yang berlaku.
- o Mengawasi efektivitas implementasi kebijakan dan prosedur hukum.

2. Pengendalian Risiko Hukum:

- o Masukan Hukum dan Rekomendasi: Divisi Hukum memberikan masukan dan rekomendasi kepada seluruh divisi dan satuan kerja terkait langkah-langkah mitigasi risiko hukum.
- o Review Kontrak dan Perjanjian: Secara berkala, kontrak dan perjanjian antara Bank dan pihak lain diperiksa ulang untuk memastikan objektivitas dan validitasnya.
- o Tujuannya adalah memastikan hubungan kontraktual tetap sesuai dengan kepentingan hukum Bank dan terhindar dari potensi risiko.

Dengan langkah-langkah di atas, Bank Papua dapat:

- β Minimalkan potensi kerugian akibat kelemahan dalam aspek hukum.
- β Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal.
- β Memastikan dokumen hukum, kontrak, dan perjanjian mendukung operasional Bank dengan baik.

Pengelolaan risiko hukum yang efektif tidak hanya melindungi Bank dari tuntutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan akuntabilitas Bank.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis, serta ketidakmampuan Bank dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini dapat memengaruhi keberhasilan Bank dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

2. Legal Risk Measurement:

- o Conducted by the Risk Management Division in conjunction with the Legal Division.
- o Based on an evaluation of individual legal cases to understand the potential impact on the Bank.

Legal Risk Management Efforts

1. Legal Risk Monitoring:

- o Monitoring is conducted periodically to ensure compliance with internal policies, legal regulations, and applicable limit provisions.
- o Oversee the effective implementation of legal policies and procedures.

2. Legal Risk Control:

- o Legal Input and Recommendations: The Legal Division provides input and recommendations to all divisions and work units regarding legal risk mitigation measures.
- o Contract and Agreement Review: Contracts and agreements between the Bank and other parties are periodically reviewed to ensure their objectivity and validity.
- o The goal is to ensure that contractual relationships remain in accordance with the Bank's legal interests and avoid potential risks.

With the steps above, Bank Papua can:

- β Minimize potential losses due to legal weaknesses.
- β Improve compliance with regulations and internal policies.
- β Ensure legal documents, contracts, and agreements support the Bank's operations effectively.

Effective legal risk management not only protects the Bank from lawsuits but also increases stakeholder confidence in the Bank's integrity and accountability.

6. Strategic Risk

Strategic risk is the potential loss arising from inaccuracies in making or implementing strategic decisions, as well as the Bank's inability to respond to changes in the business environment. This risk can impact the Bank's success in achieving its long-term goals.



Proses identifikasi risiko strategik dilakukan dengan memetakan faktor risiko pada aktivitas fungsional utama, seperti:

1. **Perkreditan:** Risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio kredit.
2. **Treasury dan Investasi:** Risiko terkait manajemen aset dan kewajiban serta investasi Bank.
3. **Operasional dan Jasa:** Risiko yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas operasional serta kualitas layanan.

Identifikasi ini mengacu pada rencana bisnis yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Sedangkan pengukuran risiko dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja aktual terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis. Proses ini memberikan gambaran sejauh mana Bank berhasil menjalankan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuannya.

Upaya Pengelolaan Risiko Strategik

1. **Penyusunan Rencana Bisnis yang Realistik:**
Rencana bisnis yang komprehensif disusun untuk mengakomodasi dinamika pasar dan mencerminkan kebijakan strategis Bank.
2. **Pemantauan Kinerja secara Berkala:**
Bank melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja dibandingkan target, guna mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
3. **Penyesuaian Strategi:**
Dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, Bank menyesuaikan strategi secara proaktif untuk mengurangi potensi dampak risiko strategik.
4. **Penguatan Kapasitas Analitik:**

Bank mengembangkan kemampuan analisis data untuk memprediksi tren pasar dan mengantisipasi perubahan eksternal yang signifikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Papua mampu:

- Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
- Menjaga konsistensi antara strategi yang diambil dan tujuan bisnis.
- Memastikan keberlanjutan usaha melalui respons yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Penerapan manajemen risiko strategik yang efektif memastikan Bank tetap kompetitif dan tangguh di tengah dinamika industri perbankan.

The strategic risk identification process is carried out by mapping risk factors across key functional activities, such as:

1. *Credit: Risks arising from credit portfolio management.*
2. *Treasury and Investment: Risks related to asset and liability management, as well as the Bank's investments.*
3. *Operations and Services: Risks related to operational efficiency and effectiveness, and service quality.*

This identification refers to the business plan prepared by the Strategic Planning Division as an elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD).

Meanwhile, risk measurement is conducted by comparing actual performance achievements against the targets set in the business plan. This process provides an overview of the extent to which the Bank has successfully implemented the strategies designed to achieve its objectives.

Strategic Risk Management Efforts

1. **Preparation of a Realistic Business Plan:**
A comprehensive business plan is developed to accommodate market dynamics and reflect the Bank's strategic policies.
2. **Regular Performance Monitoring:**
The Bank monitors performance achievements against targets to identify potential deviations early.
3. **Strategy Adjustment:**
In the face of changes in the business environment, the Bank proactively adjusts its strategy to mitigate the potential impact of strategic risks.
4. **Strengthening Analytical Capacity:**
The Bank develops data analysis capabilities to predict market trends and anticipate significant external changes.

With these steps, Bank Papua is able to:

- *Reduce uncertainty in decision-making.*
- *Maintain consistency between its strategy and business objectives.*
- *Ensure business sustainability through adaptive responses to environmental changes.*

The effective implementation of strategic risk management ensures the Bank remains competitive and resilient amidst the dynamics of the banking industry.



7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah potensi kerugian yang muncul akibat ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan, hukum, atau ketentuan eksternal yang berlaku. Untuk memitigasi risiko ini, Bank Papua mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kepatuhan seluruh unit kerja terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulator lainnya.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Kepatuhan

1. Identifikasi Risiko Kepatuhan:

- Divisi Kepatuhan menyusun daftar peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk semua satuan kerja.
- Memastikan setiap kebijakan Bank selaras dengan regulasi eksternal, termasuk undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan *Know Your Customer (KYC)*.
- Meninjau transaksi mencurigakan atau tidak wajar.

2. Pengukuran Risiko Kepatuhan:

- Mengestimasi potensi kerugian berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi peraturan di masa lalu dan masa depan.
- Menganalisis penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima sebagai bahan evaluasi risiko.

Upaya Pengelolaan Risiko Kepatuhan

1. Pemantauan dan Evaluasi:

- Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan secara berkala meninjau aspek kepatuhan Bank.
- Memantau seluruh kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

2. Pengendalian dan Mitigasi:

- Review Kebijakan dan Prosedur: Semua kebijakan internal diperiksa ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
- Penanganan Keluhan Nasabah: Keluhan nasabah dievaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.
- Pelaporan Transaksi: Memastikan kepatuhan terhadap pelaporan wajib, seperti transaksi mencurigakan.

3. Penguatan Budaya Kepatuhan:

- Mendorong seluruh pegawai untuk mematuhi

7. Compliance Risk

Compliance risk is the potential loss arising from the Bank's non-compliance with applicable regulations, laws, or external provisions. To mitigate this risk, Bank Papua identifies and evaluates the level of compliance of all work units with the provisions set by Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and other regulators.

Compliance Risk Identification and Measurement

1. Compliance Risk Identification:

- *The Compliance Division compiles a list of rules and regulations applicable to all work units.*
- *Ensures that all Bank policies align with external regulations, including anti-money laundering laws and Know Your Customer (KYC) policies.*
- *Reviews suspicious or unusual transactions.*

2. Compliance Risk Measurement:

- *Estimates potential losses based on the Bank's past and future regulatory compliance.*
- *Analyzes penalties, litigation, and customer complaints as a basis for risk evaluation.*

Compliance Risk Management Efforts

1. Monitoring and Evaluation:

- *The Compliance Director and the Compliance Division periodically review the Bank's compliance aspects.*
- *Monitors all operational activities that have the potential to create compliance risks.*

2. Control and Mitigation:

- *Policy and Procedure Review: All internal policies are reviewed to ensure compliance with applicable regulations.*
- *Customer Complaint Handling: Customer complaints are evaluated as part of compliance improvement efforts.*
- *Transaction Reporting: Ensure compliance with mandatory reporting, such as suspicious transactions.*

3. Strengthening Compliance Culture:

- *Encourage all employees to comply with internal*



kebijakan internal dan regulasi eksternal melalui pelatihan dan sosialisasi.

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam menjaga reputasi Bank.

Dengan pengelolaan yang efektif, Bank Papua dapat:

- Mengurangi potensi penalti dan litigasi.
- Memastikan operasional berjalan sesuai dengan regulasi.
- Meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

Langkah-langkah strategis ini memastikan Bank Papua mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, menjaga stabilitas operasional, dan meningkatkan kepercayaan publik.

policies and external regulations through training and outreach.

- *Raise awareness of the importance of compliance in maintaining the Bank's reputation.*

With effective management, Bank Papua can:

- *Reduce the potential for penalties and litigation.*
- *Ensure operations comply with regulations.*
- *Increase customer and stakeholder trust.*

These strategic steps ensure Bank Papua complies with all applicable regulations, maintain operational stability, and enhance public confidence.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah potensi kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Bank. Risiko ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, kelemahan tata kelola perusahaan, atau budaya dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar. Risiko reputasi dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan bisnis, sehingga pengelolaannya menjadi prioritas penting bagi Bank Papua.

Upaya Pengelolaan Risiko Reputasi

1. Identifikasi Risiko Reputasi:

- Memetakan faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, seperti:
- Keterbukaan Informasi (Disclosure Requirement): Memastikan informasi material disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
- Keluhan Nasabah: Menangani keluhan secara proaktif untuk meningkatkan kepuasan.
- Perilaku Karyawan: Mengawasi etika dan profesionalisme karyawan dalam melayani nasabah.
- Sistem Komunikasi Bank: Memastikan saluran komunikasi Bank memenuhi standar transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Pengukuran Risiko Reputasi:

- Melakukan assessment berkala terhadap faktor-faktor yang memengaruhi reputasi Bank, termasuk evaluasi terhadap keluhan nasabah dan pemberitaan di media.
- Menilai dampak potensial dari setiap kejadian terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

8. Reputational Risk

Reputational risk is the potential loss resulting from a decline in stakeholder trust in the bank. This risk can arise from various sources, such as negative media coverage, violations of business ethics, customer complaints, weaknesses in corporate governance, or substandard business culture and practices. Reputational risk can have a significant impact on business sustainability, making its management a critical priority for Bank Papua.

Reputational Risk Management Efforts

1. Reputational Risk Identification:

- *Map the risk factors inherent in the bank's functional activities, such as:*
- *Disclosure Requirements: Ensure material information is communicated accurately and timely.*
- *Customer Complaints: Proactively handle complaints to increase customer satisfaction.*
- *Employee Behavior: Monitor employee ethics and professionalism in serving customers.*
- *Bank Communication System: Ensure the Bank's communication channels meet transparency standards and regulatory compliance.*

2. Reputational Risk Measurement:

- *Conduct regular assessments of factors affecting the Bank's reputation, including evaluation of customer complaints and media coverage.*
- *Assess the potential impact of each incident on the Bank's image and public trust.*



3. Pengendalian Risiko Reputasi:

- Menjaga kepuasan nasabah dengan memastikan tingkat layanan yang optimal melalui penilaian rutin terhadap kinerja frontliner di setiap kantor cabang.
- Mengembangkan budaya perusahaan yang berorientasi pada pelayanan prima dan kepatuhan terhadap etika bisnis.
- Membangun hubungan yang kuat dengan media untuk memastikan pemberitaan yang seimbang dan positif.

4. Strategi Komunikasi Proaktif:

- Mengelola krisis dengan cepat melalui tim komunikasi yang responsif dan profesional.
- Memberikan klarifikasi terhadap isu-isu negatif secara transparan dan segera.

Dengan pengelolaan risiko reputasi yang efektif, Bank Papua dapat:

- Meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.
- Meminimalkan dampak negatif dari isu-isu yang berpotensi merusak citra Bank.
- Memperkuat posisi Bank sebagai lembaga keuangan yang andal dan berintegritas.

Langkah-langkah ini memastikan reputasi Bank Papua tetap terjaga, mendukung keberlanjutan bisnis, dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

3. Reputational Risk Management:

- Maintain customer satisfaction by ensuring optimal service levels through regular assessments of frontline employee performance at each branch.
- Develop a corporate culture oriented toward excellent service and adherence to business ethics.
- Build strong relationships with the media to ensure balanced and positive coverage.

4. Proactive Communication Strategy:

- Manage crises quickly through a responsive and professional communications team.
- Provide clarification on negative issues transparently and promptly.

With effective reputational risk management, Bank Papua can:

- Increase customer and stakeholder trust.
- Minimize the negative impact of issues that could potentially damage the Bank's image.
- Strengthen the Bank's position as a reliable and integrity-based financial institution.

These steps ensure Bank Papua's reputation is maintained, support business sustainability, and maintain harmonious relationships with all stakeholders.

LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RESIKO

Selama tahun 2025, Divisi manajemen risiko telah melaksanakan program kerja sebagai berikut :

1. Melaksanakan kajian-kajian pada seluruh aktifitas fungsional terkait risiko-risiko yang ada di kantor Cabang dan Kantor Pusat melalui Divisi terkait
2. Pendidikan dan pelatihan terkait risiko-risiko yang dikelola
3. Melakukan pemantauan terhadap Manajemen, perencanaan, pengembangan dan pengadaan, operasional teknologi informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, business continuity plan, and user computing, elektronik *Banking* serta penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
4. Membuat Unit Khusus yang meneng
5. Melakukan pemantauan terhadap pengujian ketahanan cyber yang dilakukan Divisi terkait

RISK MANAGEMENT ACTIVITY REPORT

During 2025, the Risk Management Division implemented the following work programs:

1. Conducting studies on all functional activities related to risks at Branch Offices and Head Office through relevant Divisions.
2. Providing education and training related to managed risks.
3. Monitoring management, planning, development and procurement, information technology operations, communication networks, information security, business continuity plans, and user computing, electronic banking, and the use of information technology service providers.
4. Establishing a Special Unit.
5. Monitoring cyber resilience testing conducted by relevant Divisions.



6. Mengumpulkan data, menganalisa, dan melaporkan market to market harian (guava)
7. Melakukan *Self Assessment* terkait tingkat kesehatan Bank
8. Melakukan *Self Assessment* terkait profil risiko Bank
9. Melakukan sosialisasi optimalisasi aplikasi Loss Event Database dan Profil Risiko Cabang
10. Melakukan *Self Assessment* terkait Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)
11. Melakukan *Self Assessment* terkait KPMM
12. Melakukan Pelaporan Ketahanan dan Keamanan Siber yang disampaikan kepada OJK dan BI

6. *Collecting data, analyzing it, and reporting daily market-to-market (GUAVA).*
7. *Conducting self-assessments regarding the Bank's health level.*
8. *Conducting self-assessments regarding the Bank's risk profile.*
9. *Disseminating information on the optimization of the Loss Event Database and Branch Risk Profile applications.*
10. *Conducting self-assessments regarding the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).*
11. *Conducting self-assessments regarding the Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM).*
12. *Reporting on Cyber Resilience and Security, which is submitted to the Bank. OJK and BI*

RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, dimana disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

RECOVERY PLAN

The Financial Services Authority (OJK), as the banking regulator in Indonesia, has issued Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Problem Handling for Commercial Banks. This mandates that banks must prepare and submit a Recovery Action Plan to the OJK.

PENILAIAN RISIKO

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, pasal 23 mengatur kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan).

RISK ASSESSMENT

In accordance with OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Article 23 stipulates that banks are required to submit a Bank Risk Profile Report to the OJK quarterly.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*), dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*), dan 5 (*unsatisfactory*).

Based on OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, the risk ratings for conventional commercial banks are categorized into five levels: 1 (low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high), and 5 (high) for inherent risk. Meanwhile, the quality rating of risk management implementation is categorized into five levels, namely 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal), and 5 (unsatisfactory).

No	Jenis Risiko	POSISI Sekarang (Desember - 2025) <i>Self Assessment</i>		Komposit	POSISI Sebelumnya (Juni - 2025) <i>Adjustment OJK</i>		Komposit
		<i>Inherent Risk</i>	KPMR		<i>Inherent Risk</i>	KPMR	
		Predikat	Predikat		Predikat	Predikat	
1	Risiko Kredit	<i>Low Mod</i>	<i>Satisfactory</i>	PK-2	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	PK-3
2	Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	PK-1	<i>Low Mod</i>	<i>Satisfactory</i>	PK-2
3	Risiko Likuiditas	<i>Low Mod</i>	<i>Satisfactory</i>	PK-2	<i>Low Mod</i>	<i>Satisfactory</i>	PK-2



No	Jenis Resiko	POSISI Sekarang (Desember - 2025) Self Assessment		Komposit	POSISI Sebelumnya (Juni - 2025) Adjustment OJK		Komposit
		Inherent Risk	KPMR		Inherent Risk	KPMR	
		Predikat	Predikat		Predikat	Predikat	
4	Risiko Operasional	Low Mod	Satisfactory	PK-2	Moderate	Fair	PK-3
5	Risiko Hukum	Low	Satisfactory	PK-1	Low Mod	Satisfactory	PK-2
6	Risiko Strategik	Low	Satisfactory	PK-1	Low Mod	Satisfactory	PK-2
7	Risiko Kepatuhan	Low	Satisfactory	PK-1	Low Mod	Satisfactory	PK-2
8	Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	PK-1	Low Mod	Satisfactory	PK-2
Nilai Komposit		Low to Moderate	Satisfactory	PK-2	Moderate	Fair	PK-3

Profil Risiko Bank Papua per Desember 2025 memiliki nilai komposit: *Low/Moderate (Inherent Risk)* dan *Satisfactory (KPMR)* dengan Peringkat Komposit PK-2. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan kondisi yang sehat. Manajemen risiko yang diterapkan efektif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Bank memiliki langkah mitigasi yang baik untuk setiap jenis risiko, dengan perhatian khusus pada risiko kredit, pasar, dan operasional yang menjadi fokus utama industri perbankan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Secara keseluruhan, efektivitas sistem manajemen risiko di Bank Papua telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh bank dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil tinjauan, efektivitas sistem manajemen risiko Bank Papua menunjukkan kinerja yang positif, dengan beberapa indikator utama sebagai berikut:

- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah diterapkan sesuai dengan regulasi OJK serta standar internasional seperti Basel III.
- Identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan secara sistematis menggunakan metode *Value at Risk (VaR)*, *Stress Testing*, dan *Early Warning System (EWS)* untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal.
- Mitigasi risiko dilakukan secara efektif, dengan penetapan batas risiko yang tepat untuk setiap kategori risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, serta risiko lainnya.
- Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan regulator tetap

Bank Papua's Risk Profile as of December 2025 had a composite score of Low/Moderate (Inherent Risk) and Satisfactory (KPMR) with a Composite Rating of PK-2. Overall, this indicates a healthy condition. The implemented risk management is effective in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks. The bank has robust mitigation measures for each type of risk, with particular attention to credit, market, and operational risks, which are the primary focus of the banking industry.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Overall, the effectiveness of the risk management system at Bank Papua has been well-functioning and complies with regulations established by the Financial Services Authority (OJK). The evaluation demonstrated that the implemented policies and procedures are capable of effectively identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks faced by the bank.

Based on the review, the effectiveness of Bank Papua's risk management system demonstrates positive performance, with several key indicators as follows:

- *Risk management policies and procedures have been implemented in accordance with OJK regulations and international standards such as Basel III.*
- *Risk identification and measurement are systematically conducted using the Value at Risk (VaR) method, Stress Testing, and the Early Warning System (EWS) to detect potential risks early.*
- *Risk mitigation is carried out effectively, by establishing appropriate risk limits for each risk category, including credit, liquidity, operational, and other risks.*
- *Compliance with regulatory requirements remains*



terjaga, tanpa adanya pelanggaran signifikan terhadap peraturan perbankan yang berlaku.

- Pemantauan risiko dilakukan secara berkala dan menyeluruh, baik pada tingkat operasional maupun strategis, untuk memastikan bahwa risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima.

Dengan demikian, Bank Papua menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan risiko, yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE PEMANTAU RISIKO ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua berkomitmen untuk memastikan bahwa penerapan Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif, sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kami juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan di Bank Papua.

Berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif, Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Manajemen Risiko Bank Papua telah berfungsi secara efektif dan memadai. Penilaian ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Bank Papua telah mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif, termasuk penerapan batas risiko yang efektif dan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan kondisi pasar dan regulasi yang berlaku. Aspek-aspek tersebut mencakup:

- o Penetapan metode pengukuran risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi potensi risiko dengan akurat dan real-time.
- o Penentuan batas risiko berdasarkan profil risiko bank, yang dikaji dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi makroekonomi dan strategi bisnis.

maintained, with no significant violations of applicable banking regulations.

- *Risk monitoring is conducted regularly and comprehensively, at both the operational and strategic levels, to ensure that risks remain within acceptable limits.*

Thus, Bank Papua demonstrates a strong commitment to risk management, which supports the stability and sustainability of its operations.

STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR RISK MONITORING COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Papua are committed to ensuring that the Risk Management System is implemented effectively, in line with prudential principles and regulations established by the Financial Services Authority (OJK). We also support sustainable business growth. Through the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners conducts regular evaluations of the effectiveness of the risk management system implemented at Bank Papua.

Based on the results of this comprehensive evaluation, the Board of Commissioners assesses that Bank Papua's Risk Management System is functioning effectively and adequately. This assessment is reflected in the following aspects:

1. Adequacy of Risk Management Policies and Procedures

Bank Papua has developed comprehensive risk management policies and procedures, including the implementation of effective risk limits and risk mitigation strategies that align with market conditions and applicable regulations. These aspects include:

- o *Establishment of risk measurement methods and a risk management information system capable of identifying potential risks accurately and in real time.*
- o *Determination of risk limits based on the bank's risk profile, which is reviewed and updated periodically to remain relevant to macroeconomic conditions and business strategy.*



- o Penilaian peringkat risiko untuk memastikan eksposur tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima.
- o Penyusunan rencana darurat (contingency plan) untuk mengatasi skenario terburuk, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank.
- o Implementasi sistem pengendalian internal yang ketat dalam penerapan manajemen risiko untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan atau pelanggaran kebijakan.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Bank Papua telah menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di seluruh aspek operasional bank. Proses ini didukung oleh:

- o Penerapan sistem informasi manajemen risiko yang memungkinkan pemantauan risiko secara real-time dengan data yang akurat.
- o Analisis risiko yang menyeluruh, termasuk pelaksanaan *Stress Testing* dan scenario analysis secara berkala untuk mengantisipasi dampak perubahan kondisi ekonomi dan keuangan terhadap profil risiko.
- o Pemantauan risiko secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko dengan pelaporan kepada Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan.
- o Peningkatan budaya risiko (*risk culture*) melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap manajemen risiko dalam pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan tinjauan menyeluruh terhadap penerapan sistem manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan telah berfungsi secara efektif dan memadai. Dengan komitmen yang kuat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan, Bank Papua bertekad untuk mengembangkan sistem manajemen risiko agar mampu menghadapi tantangan dalam industri perbankan serta memastikan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

- o *Risk rating assessment to ensure exposure remains within acceptable tolerance limits.*
- o *Developing a contingency plan to address worst-case scenarios to maintain the stability and sustainability of the bank's operations.*
- o *Implementing a rigorous internal control system for risk management to prevent and detect potential deviations or policy violations.*

2. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes

Bank Papua has implemented a systematic and sustainable risk management process, encompassing risk identification, measurement, monitoring, and control across all aspects of the bank's operations. This process is supported by:

- o *Implementing a risk management information system that enables real-time risk monitoring with accurate data.*
- o *Comprehensive risk analysis, including periodic stress testing and scenario analysis to anticipate the impact of changing economic and financial conditions on the risk profile.*
- o *Regular risk monitoring by the Risk Management Division, with reporting to the Risk Oversight Committee and the Board of Commissioners, to ensure compliance with established policies.*
- o *Improving risk culture through training and outreach to all work units to enhance understanding and awareness of risk management in business decision-making.*

Based on a comprehensive review of the implementation of the risk management system, the Board of Commissioners and Directors of Bank Papua have confirmed that the implemented risk management system has been functioning effectively and adequately. With a strong commitment to continuous improvement and refinement, Bank Papua is determined to develop its risk management system to address challenges in the banking industry and ensure the company's stability and sustainable growth.



Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Fungsi Kepatuhan adalah salah satu pilar utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* – GCG) dan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal di Bank Papua. Penerapan fungsi kepatuhan di bank ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan SE OJK No. 13 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta kebijakan internal yang berlaku. Bank Papua menjalankan fungsi kepatuhan dengan tujuan utama sebagai berikut:

- Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan internal dan eksternal, termasuk regulasi OJK, Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengelola risiko kepatuhan (*compliance risk*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan usaha dan reputasi bank.
- Mendorong terciptanya budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang melekat di seluruh jenjang organisasi.
- Memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku serta standar perbankan yang sehat.
- Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kepatuhan dalam operasionalnya, Bank Papua telah menerapkan kerangka kepatuhan yang mencakup beberapa aspek utama, antara lain:
- Penyusunan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang mengacu pada ketentuan OJK, Bank Indonesia, serta regulasi lainnya.
- Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi, termasuk melakukan audit kepatuhan secara rutin.
- Penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti Money Laundering (AML)* guna mencegah risiko transaksi ilegal, pencucian uang, serta pendanaan terorisme.
- Pelaporan kepada regulator secara transparan dan akurat, termasuk pelaporan terhadap risiko kepatuhan yang dihadapi bank.
- Koordinasi dengan unit kerja lain untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi benturan kepentingan.

The compliance function serves as a foundational pillar in the implementation of good corporate governance (GCG) and is a crucial component of Bank Papua's internal control system. The execution of the compliance function is guided by the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 46/POJK.03/2017, which pertains to the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks, as well as OJK Circular Letter No. 13 of 2017 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks. The primary objective is to ensure that all business and operational activities of the bank adhere to applicable laws and regulations, prudential principles, and internal policies. Bank Papua's compliance function is driven by the following key objectives:

- *Ensuring adherence to both internal and external regulations, including those set forth by OJK, Bank Indonesia, and relevant laws.*
- *Managing compliance risk to safeguard the bank's business sustainability and reputation.*
- *Fostering a culture of compliance that is ingrained at all levels of the organization.*
- *Ensuring that all policies and procedures implemented by the bank align with applicable regulations and sound banking standards.*
- *In its commitment to uphold integrity and compliance across its operations, Bank Papua has established a comprehensive compliance framework encompassing several essential aspects, including:*
- *Development of compliance policies and procedures that align with the provisions set by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and other relevant regulations.*
- *Regular monitoring and evaluation of regulatory adherence, including routine compliance audits.*
- *Implementation of Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) principles to mitigate risks associated with illegal transactions, money laundering, and terrorism financing.*
- *Transparent and accurate reporting to regulators, including disclosures related to compliance risks encountered by the bank.*
- *Coordination with other departments to ensure that all bank activities comply with relevant regulations and to avoid potential conflicts of interest.*



Dengan penerapan fungsi kepatuhan yang efektif sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017, Bank Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kepatuhan guna mendukung stabilitas dan keberlanjutan usaha, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasional bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

By effectively implementing the compliance function in accordance with POJK No. 46/POJK.03/2017, Bank Papua is dedicated to continuously enhancing its compliance quality to support business stability and sustainability, maintain stakeholder trust, and ensure that all operational activities are conducted in alignment with principles of prudence and good governance.

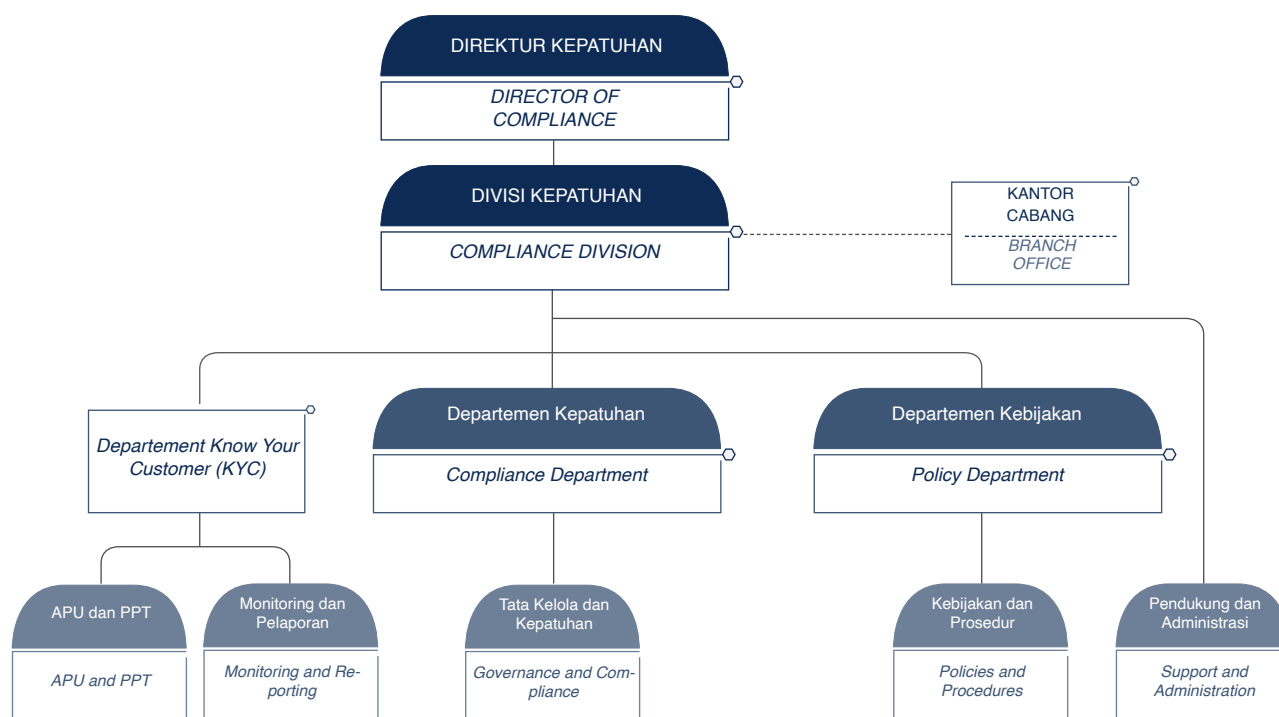
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Keterangan:

— Garis Komando

----- Garis Koordinasi



Divisi Kepatuhan Bank Papua, yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, memainkan peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan tata kelola yang baik. Struktur organisasi ini terdiri dari Departemen Know Your Customer (KYC), Kepatuhan, Kebijakan, serta unit Pendukung dan Administrasi, yang memiliki garis komando dan koordinasi yang jelas hingga ke tingkat kantor cabang. Setiap departemen memiliki fungsi khusus, seperti pengawasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), pemantauan dan pelaporan, tata kelola, serta pengembangan kebijakan dan prosedur. Dengan kerangka kerja ini, Bank Papua menjaga integritasnya, memitigasi risiko, dan memastikan

The Compliance Division of Bank Papua, under the leadership of the Director of Compliance, plays a critical role in ensuring adherence to regulatory standards and the implementation of effective governance practices. This organizational structure comprises the Know Your Customer (KYC) Department, as well as the Compliance, Policy, and Support and Administration units, all of which maintain a clear chain of command and coordination extending to the branch office level. Each department is tasked with specific responsibilities, including oversight of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CFT), monitoring and reporting, governance, and the development of policies and procedures. Through this framework, Bank Papua upholds its integrity, mitigates risks, and ensures that its operations align with prudent principles.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN DIVISI KEPATUHAN

PROFILE OF THE HEAD OF THE COMPLIANCE DIVISION



Sukidi

Pemimpin Divisi Kepatuhan

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jayapura, berusia 56 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan

Gelar Pasca Sarjana Magister Manajemen dengan konsentrasi Sumber Daya Manusia dari Universitas Surapati Jakarta (2011).

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam) dari PT Multi Talenta Consulting (2023).
2. Sertifikasi Kepatuhan 2022.

Riwayat Jabatan

1. **Dasar Hukum Pengangkatan**
Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sejak tanggal 24 Maret 2023, berdasarkan surat Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: 015/KEPEG/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

2. **Pengalaman Kerja**

1. Memulai karir di Bank Papua sejak tanggal 10 Juli 1992.
2. Kepala KCP Assue, Kantor Cabang Keppi (2014 s/d 2015).
3. Kepala Kantor Cabang Agats (2015 s/d 2018).
4. Pemimpin Kantor Cabang Waisai (2018 s/d 2020).
5. Pemimpin Kantor Cabang Merauke (2020 s/d 2021).
6. Pemimpin Departemen Kebijakan Divisi Kepatuhan (2021 s/d 2023).

Compliance Division Bank Papua

Indonesian citizen, domiciled in Jayapura, 56 years old as of December 2025.

Educational Background

Postgraduate Degree in Management with a concentration in Human Resources, Surapati University, Jakarta (2011)

Certifications

1. Level 6 Risk Management Certification, PT Multi Talenta Consulting (2023)
2. Compliance Certification (2022)

Professional Experience

1. **Current Position**

Head of the Compliance Division, Bank Papua since March 24, 2023, appointed under Human Capital Management Division's letter No. 015/KEPEG/III/2023 dated March 13, 2023.

2. **Career Timeline**

1. Began career at Bank Papua on July 10, 1992
2. Head of KCP Assue, Keppi Branch Office (2014 - 2015)
3. Head of the Agats Branch Office (2015 - 2018)
4. Head of the Waisai Branch Office (2018 - 2020)
5. Head of the Merauke Branch Office (2020 - 2021)
6. Head of the Policy Department, Compliance Division (2021 - 2023)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan SK Direksi Nomor: 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mencakup:

1. Tugas Direktur Kepatuhan:

- a. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on the Board of Directors Decree Number 80/DIR-BPD/XII/2024 dated December 31, 2024, regarding the Good Corporate Governance Implementation Guidelines (BPP) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, the duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function include:

1. Duties of the Compliance Director:

- a. Formulate strategies to cultivate the Bank's Compliance Culture.
- b. Propose compliance policies or principles for establishment by the Board of Directors.
- c. Establish compliance systems and procedures to develop the Bank's internal regulations and guidelines.



- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Tanggung Jawab Umum Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank:

- a. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan.
- b. Menjalankan seluruh tanggung jawab sesuai dengan uraian tanggung jawab jabatan.
- c. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan fungsi dasar jabatan yang belum dijabarkan.
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank.
- e. Menjalani koordinasi secara efektif, terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan seluruh pegawai Bank.

3. Wewenang Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank:

- a. Memberikan opini kepatuhan (comply/not comply) terhadap kelonggaran/penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku.
- b. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan.
- c. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan.
- d. Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dan laporan realisasinya.
- e. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Divisi Kepatuhan serta kebijakan Divisi Manajemen Modal Manusia bersama Direktur terkait.

4. Peran dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi

- d. Ensure that all Bank policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
- e. Minimize the Bank's Compliance Risk.
- f. Implement preventive measures to ensure that the policies and/or decisions of the Bank's Board of Directors align with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
- g. Perform other duties related to the Compliance Function.

2. General Responsibilities of the Compliance Director in Implementing the Bank's Compliance Function:

- a. Comply with and implement all relevant laws and regulations.
- b. Fulfill all responsibilities as outlined in the job description.
- c. Undertake additional duties and tasks related to the fundamental functions of the position that are not explicitly described.
- d. Take initiative to enhance individual performance and the Bank's overall business activities to support the achievement of the Bank's business objectives.
- e. Establish effective coordination, particularly with related organizational units and all Bank employees.

3. Authorities of the Compliance Director in Implementing the Bank's Compliance Function:

- a. Provide compliance assessments (compliant/non-compliant) regarding deviations from applicable work implementation guidelines.
- b. Determine appropriate actions regarding compliance violations.
- c. Report any compliance violations to the Financial Services Authority.
- d. Approve the preparation of the action plan for the implementation of Compliance Risk Management and the report on its execution.
- e. Approve the appointment and dismissal of employees in the Compliance Division and the policies of the Human Capital Management Division, in collaboration with the relevant Director.

4. Roles and Responsibilities of the Compliance Director in Implementing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program:

- a. Identify necessary steps to ensure compliance with Financial Services Authority Regulations regarding



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program APU-PPT melalui penyiapan Pedoman APU-PPT.

- b. Memantau dan menjaga cakupan pengawasan aktif agar memadai.
- c. Mengusulkan *action plan* dan laporan pengkinian data sebelum dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan Program APU-PPT.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang akan bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT, yang wajib memiliki kemampuan yang memadai.
- e. Memantau pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan.
- f. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- g. Bersama Direksi lainnya menetapkan Pemimpin Divisi yang melaksanakan kegiatan operasional dan Pemimpin Cabang sebagai penanggung jawab penerapan Program APU-PPT, termasuk penanganan Nasabah berisiko tinggi dan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai di wilayah kerja masing-masing.
- h. Memastikan bahwa penerapan Program APU-PPT telah dilaksanakan secara efektif.
- i. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap memiliki risiko tinggi, termasuk penyelenggara Negara dan/atau transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai, telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- j. Memantau dan merekomendasikan atas laporan keuangan mencurigakan dan laporan lainnya sesuai dengan Undang-undang TPPU untuk disampaikan ke PPATK serta pelaksanaan tugas-tugas unit khusus kepada Pejabat/UUK yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dan tahunan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

the implementation of the AML-CFT Program by preparing the AML-CFT Guidelines.

- b. *Monitor and maintain adequate active supervision coverage.*
- c. *Propose an action plan and data update report prior to submission to the Financial Services Authority regarding the AML-CFT Program.*
- d. *Provide recommendations to the President Director regarding the appointment of the official who will lead the Special Task Force or the official responsible for the implementation of the AML-CFT Program, ensuring they possess adequate capabilities.*
- e. *Monitor the implementation of the Compliance Division's duties.*
- f. *Report Suspicious Financial Transactions (LTKM) and Cash Transactions (LTKT) prepared by the Compliance Division to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).*
- g. *Collaborate with other Directors to appoint Division Heads responsible for operational activities and Branch Managers tasked with implementing the AML-CFT Program, including the management of high-risk customers, suspicious financial transactions, and cash transactions in their respective work areas.*
- h. *Ensure effective implementation of the AML-CFT Program.*
- i. *Ensure that high-risk customers, including state officials and/or suspicious financial transactions and cash transactions, are appropriately managed and reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).*
- j. *Monitor and recommend suspicious financial reports and other reports in accordance with the Money Laundering Law for submission to PPATK, as well as fulfill the duties of special units to the Official/UUK responsible for implementing the AML-CFT Program.*

In connection with the execution of these duties and responsibilities, the Director of Compliance is required to submit a quarterly report on the implementation of duties to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, and provide reports to the Financial Services Authority (OJK) every semester and annually, adhering to specified deadlines.



KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan merupakan komitmen utama Bank Papua dalam menjalankan operasional yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank Papua berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur, dan aktivitas usaha sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga terkait lainnya.

Melalui Divisi Kepatuhan, bank secara proaktif memantau perubahan regulasi, mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran, dan memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan kepatuhan yang optimal. Langkah-langkah ini mencakup penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), serta pengawasan terhadap praktik tata kelola yang baik. Komitmen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan bisnis Bank Papua.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Jumlah pegawai Bank Papua yang telah mengikuti sertifikasi Manajemen Risiko pada tahun 2025 sebagai berikut :

NO	Sertifikasi	Jenjang	Jumlah Peserta	Certification
1	Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko	7	10	Risk Management Certification & Recertification
2	Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko	6	31	Risk Management Certification & Recertification
3	Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko	5	312	Risk Management Certification & Recertification
4	Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko	4	354	Risk Management Certification & Recertification
5	Sertifikasi Kepatuhan	6	3	Compliance Certification
6	Sertifikasi Kepatuhan	5	10	Compliance Certification
7	Sertifikasi Kompetensi Auditor Bank Level Auditor	Dasar	11	Bank Auditor Competency Certification Auditor Level

COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

Bank Papua is firmly committed to maintaining transparent, accountable, and prudent operations in full compliance with applicable laws and regulations. We strive to ensure that all policies, procedures, and business activities align with the regulations established by the government, the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and other relevant institutions.

Through our Compliance Division, we proactively monitor regulatory changes, identify potential risks of violations, and provide strategic recommendations to ensure optimal compliance. Our measures include the implementation of an Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CFT) program and the oversight of good governance practices. This commitment is designed to protect the interests of our customers, shareholders, and all stakeholders while supporting the sustainability of Bank Papua's business operations.

COMPLIANCE FUNCTION COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency development programs conducted by Compliance Function employees in 2025.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSI KEPATUHAN

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2025

COMPLIANCE FUNCTION COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development programs attended by Compliance Function employees during 2025 are as follows.

Nama Pegawai Employee Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Unit Kerja Work Unit	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer
Sukidi	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Workshop "Kebijakan Dan Aspek Hukum Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Instansi Pemerintah, Badan Layanan Publik, Korporasi & Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022	Divisi Kepatuhan	15-16 Jan 2025	Lembaga Informasi Peraturan Publik (Lipp)
		Analisis Kerawanan Bank Umum Dan Strategi Anti Fraud	Divisi Kepatuhan	15-16 Mei 2025	Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (Lpkmi), Lembaga Pusat Pengembangan Kajian Indonesia (Lp2k)
		Ext - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang Kualifikasi 6	Divisi Kepatuhan	09-10 Sep 2025	Fkdkp & Lspp
		Seminar Strategi Mitigasi Tipikor Dan Penguatan Tata Kelola Di Sektor Korporasi	Divisi Kepatuhan	13-14 Okt 2025	Lemiknas
		Ext - Penyusunan Penilaian Indeks Kepatuhan Pegawai Dan Unit Kerja Berbasis Aplikasi	Divisi Kepatuhan	15-16 Okt 2025	Pt Calamus Rotana Cattail
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26-19 Nov 2025	Pt. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Dedy Iskandar	Tata Kelola Dan Kepatuhan	Kepemimpinan Digital Di Perbankan: Memimpin Dalam Era Transformasi Digital	Divisi Kepatuhan	24 Feb 2025	Lembaga Edukasi Dan Akuntabilitas
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Barbalina Leno- ra Tumana	Manager Apu Dan Ppt	Kupva (Identifikasi Banknotes)	Divisi Kepatuhan	13-14 Mar 2025	Pt Bank Central Asia Tbk
		Ext - Penerapan Apu & Ppt, Pppspm Dan Legalitas Nasabah Di Industri Perbankan Berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023	Divisi Kepatuhan	09-10 Jul 2025	Learning Banking Center
		Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkdkp) Dan Ujian (Lspp)
		Iht- Global Apu Ppt Pppspm	Divisi Kepatuhan	24-25 Sep 2025	Yayasan Trade Academy
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Tien Yolen Wanggai	Apu Dan Ppt	Kupva (Identifikasi Banknotes)	Divisi Kepatuhan	13-14 Mar 2025	Pt Bank Central Asia Tbk
		Ext - Penerapan Apu & Ppt, Pppspm Dan Legalitas Nasabah Di Industri Perbankan Berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023	Divisi Kepatuhan	09-10 Jul 2025	Learning Banking Center



Nama Pegawai <i>Employee Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Topik Pelatihan <i>Training Topic</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Tanggal Pelatihan <i>Training Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Felix J.a. Wangania	Manager Tata Kelola Dan Kepatuhan	Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fdkdp) Dan Ujian (Lspp)
		Iht- Global Apu Ppt Pppspm	Divisi Kepatuhan	24-25 Sep 2025	Yayasan Trade Academy
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Ext - Manajemen Kepatuhan Keseimbangan Reputasi Dan Bisnis (Compliance)	Divisi Kepatuhan	30 Apr-01 Mei 2025	Pt. Zein Mitra Indonesia
		Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Ext - Manajemen Kepatuhan Keseimbangan Reputasi Dan Bisnis (Compliance)	Divisi Kepatuhan	30 Apr-01 Mei 2025	Pt. Zein Mitra Indonesia
		Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lspp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEO-JK,03/2025)	Divisi Kepatuhan	27-28 Agu 2025	Risk Managemen Guard (Rmg)
Stevie Kevin Rumaseb	Manager Tata Kelola Dan Kepatuhan	Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Ext - Manajemen Kepatuhan Keseimbangan Reputasi Dan Bisnis (Compliance)	Divisi Kepatuhan	30 Apr-01 Mei 2025	Pt. Zein Mitra Indonesia
		Iht - Sustainable Banking : Implementasi Esg (Enviromental, Social And Governance)	Divisi Kepatuhan	10-13 Jun 2025	Pt Viv Superior Prosperous
		Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
Vidya Tabita	Amgr Tata Kelola Dan Kepatuhan	Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lspp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEO-JK,03/2025)	Divisi Kepatuhan	27-28 Agu 2025	Risk Managemen Guard (Rmg)
		Iht- Global Apu Ppt Pppspm	Divisi Kepatuhan	24-25 Sep 2025	Yayasan Trade Academy
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai <i>Employee Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Topik Pelatihan <i>Training Topic</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Tanggal Pelatihan <i>Training Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Natalia Angeli- ca Deda	Assistant Pendukung Dan Administrasi	Ext - Manajemen Kepatuhan Keseimbangan Reputasi Dan Bisnis (Compliance)	Divisi Kepatuhan	30 Apr-01 Mei 2025	Pt. Zein Mitra Indonesia
		Microsoft Excel For Business	Divisi Kepatuhan	05-10 Mei 2025	Pt. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Iht - Manajemen Kearsipan	Divisi Kepatuhan	Rab, 23-24 Jul 2025	Pt. Manajemen Arsip Profesional
Grace Uli Leilani Siregar	Kebijakan Dan Prosedur	Microsoft Excel For Business	Divisi Kepatuhan	05-10 Mei 2025	Pt. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Audit Internal Berbasis Risiko Dan Implementasi Program Kepatuhan	Divisi Kepatuhan	17-18 Nov 2025	Pt Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26-19 Des Nov 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Margaretha Lusye Rumbek- wan	Pemimpin Departemen Kebijakan	Ext - Strategi Penyusunan Ketentuan Internal Sebagai Panduan Implementasi Kepatuhan Pada Industri Perbankan	Divisi Kepatuhan	14-15 Mei 2025	Pt. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEO-JK,03/2025)	Divisi Kepatuhan	27-28 Agu 2025	Risk Managemen Guard (Rmg)
		Ext - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang Kualifikasi 6	Divisi Kepatuhan	09-10 Sep 2025	Fkdkp & Lsp
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Eks - Kuhp 2023 : Peta Pasal Yang Relevan Terhadap Bank	Divisi Kepatuhan	22-23 Des 2025	Pt. Rintisan Manajemen Gagasan
		Ext - Strategi Penyusunan Ketentuan Internal Sebagai Panduan Implementasi Kepatuhan Pada Industri Perbankan	Divisi Kepatuhan	14-15 Mei 2025	Pt. Eksekutif Persada Citra Jaya (Expect)
Kreshna Mer- lina Rizkisari Siregar	Kebijakan Dan Prosedur	Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEO-JK,03/2025)	Divisi Kepatuhan	27-28 Agu 2025	Risk Managemen Guard (Rmg)
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai <i>Employee Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Topik Pelatihan <i>Training Topic</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Tanggal Pelatihan <i>Training Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Syam Yudha Maulana	Amgr Kebijakan Dan Prosedur	Iht - Sustainable Banking : Implementasi Esg (Enviromental, Social And Governance)	Divisi Kepatuhan	10-13 Jun 2025	Pt Viv Superior Prosperous
		Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Audit Internal Berbasis Risiko Dan Implementasi Program Kepatuhan	Divisi Kepatuhan	17-18 Nov 2025	Pt Gendhis Prima Sentosa Konsultan
Henny Nur Utami Latif	Amgr Monitoring Dan Pelaporan	Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
		Iht - Sustainable Banking : Implementasi Esg (Enviromental, Social And Governance)	Divisi Kepatuhan	10-13 Jun 2025	Pt Viv Superior Prosperous
		Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkdcp) Dan Ujian (Lsp))
		Ext - Kyc Dan Analisis Apuppt : Meningkatkan Kemampuan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terhadap Serangan Siber Dan Proses Analisis Individual Risk <i>Assesment</i>	Divisi Kepatuhan	24-25 Nov 2025	Pt Van Institusi Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Winda Tri Winarti	Amgr Apu Dan Ppt	Ext - Penerapan Apu & Ppt, Pppspm Dan Legalitas Nasabah Di Industri Perbankan Berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023	Divisi Kepatuhan	09-10 Jul 2025	<i>Learning Banking Center</i>
		Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkdcp) Dan Ujian (Lsp))
		Iht- Global Apu Ppt Pppspm	Divisi Kepatuhan	24-25 Sep 2025	Yayasan Trade Academy
Dolfina Wayangkau	Kebijakan Dan Prosedur	Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Audit Internal Berbasis Risiko Dan Implementasi Program Kepatuhan	Divisi Kepatuhan	17-18 Nov 2025	Pt Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai <i>Employee Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Topik Pelatihan <i>Training Topic</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Tanggal Pelatihan <i>Training Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Holly Merry Desnata	Manager Tata Kelola Dan Kepatuhan	Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Iht- Global Apu Ppt Ppspm	Divisi Kepatuhan	24-25 Sep 2025	Yayasan Trade Academy
		Ext - Penyusunan Penilaian Indeks Kepatuhan Pegawai Dan Unit Kerja Berbasis Aplikasi	Divisi Kepatuhan	15-16 Okt 2025	Pt Calamus Rotana Cattail
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Pittri Mayasari Sitohang	Amgr Kebijakan Dan Prosedur	Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Ext - Audit Internal Berbasis Risiko Dan Implementasi Program Kepatuhan	Divisi Kepatuhan	17-18 Nov 2025	Pt Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Asti Adriana	Kebijakan Dan Prosedur	Ext-Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	02 Agu 2025	Maisa Edukasi
		Ext - Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5	Divisi Kepatuhan	16 Agu 2025	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Lsp), Aci Finacial Market Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Trisye Adelince Watem	Pemimpin Departemen Know Your Customer (Kyc)	Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Ppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkdcp) Dan Ujian (Lsp))
		Ext - Kyc Dan Analisis Apuppt : Meningkatkan Kemampuan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terhadap Serangan Siber Dan Proses Analisis Individual Risk <i>Assesment</i>	Divisi Kepatuhan	24 Nov-25 2025	Pt Van Institusi Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai <i>Employee Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Topik Pelatihan <i>Training Topic</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Tanggal Pelatihan <i>Training Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
J Bambang A. Baragain	Manager Apu Dan Ppt	Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkd kp) Dan Ujian (Lspp))
		Seminar Strategi Mitigasi Tipikor Dan Penguatan Tata Kelola Di Sektor Korporasi	Divisi Kepatuhan	13-14 Okt 2025	Lemiknas
		Ext - Kyc Dan Analisis Apuppt : Meningkatkan Kemampuan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terhadap Serangan Siber Dan Proses Analisis Individual Risk <i>Assesment</i>	Divisi Kepatuhan	24-25 Nov 2025	Pt Van Institusi Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Mince Martha Karuway	Manager Monitoring Dan Pelaporan	Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkd kp) Dan Ujian (Lspp))
		Ext - Kyc Dan Analisis Apuppt : Meningkatkan Kemampuan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terhadap Serangan Siber Dan Proses Analisis Individual Risk <i>Assesment</i>	Divisi Kepatuhan	24-25 Nov 2025	Pt Van Institusi Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Ivonne Rosalyn Wamea	Monitoring Dan Pelaporan	Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkd kp) Dan Ujian (Lspp))
		Ext - Kyc Dan Analisis Apuppt : Meningkatkan Kemampuan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terhadap Serangan Siber Dan Proses Analisis Individual Risk <i>Assesment</i>	Divisi Kepatuhan	24-25 Nov 2025	Pt Van Institusi Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)
Yosua Rizky Vidya Pratama	Apu Dan Ppt	Eks - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Apu Ppt & Pppspm Jenjang 5,6,7	Divisi Kepatuhan	05-07 Agu 2025	Pembekalan (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (Fkd kp) Dan Ujian (Lspp))
		Iht- Global Apu Ppt Pppspm	Divisi Kepatuhan	24-25 Sep 2025	Yayasan Trade Academy
		Ext - Kyc Dan Analisis Apuppt : Meningkatkan Kemampuan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terhadap Serangan Siber Dan Proses Analisis Individual Risk <i>Assesment</i>	Divisi Kepatuhan	24-25 Nov 2025	Pt Van Institusi Indonesia
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta <i>Consulting</i> (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)



Nama Pegawai <i>Employee Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Topik Pelatihan <i>Training Topic</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Tanggal Pelatihan <i>Training Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Aryk Erawaty	Pemimpin Departemen Kepatuhan	Ext - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional Dan Syariah (Se Ojk 14/SEO-JK,03/2025)	Divisi Kepatuhan	27-28 Agu 2025	Risk Managemen Guard (Rmg)
		Ext - Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang Kualifikasi 6	Divisi Kepatuhan	09-10 Sep 2025	Fkdkp & Lspp
		Ext - Penyusunan Penilaian Indeks Kepatuhan Pegawai Dan Unit Kerja Berbasis Aplikasi	Divisi Kepatuhan	15-16 Okt 2025	Pt Calamus Rotana Cattail
		Pembekalan Dan Resertifikasi / Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Sampai Dengan Jenjang 7	Divisi Kepatuhan	26 Nov-19 Des 2025	Pt. Multi Talenta Consulting (Pembekalan) Dan Bsmr (Ujian)

PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI KEPATUHAN

DEPARTEMEN KEPATUHAN

1. Kajian Kepatuhan Rutin sesuai permintaan Divisi Terkait
2. Mempedomani penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses Kajian Kredit
3. Melakukan monitoring dan evaluasi *Compliance* terhadap *Policy & Procedure* Perkreditan
4. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Rencana Divisi Tahun lalu dan Tahun berjalan
5. Menghimpun data kualitatif maupun kuantitatif sebagai bahan penyusunan Rencana Laporan GCG Tahunan, *self-Assessment* per semester, laporan rutin untuk direksi, laporan triwulan, semester Direktur Kepatuhan, laporan unit gratifikasi dan pelaporan LHKPN
6. Melakukan kajian terhadap Strategi dan Kebijakan bidang Kepatuhan yang berjalan, berkenaan Peraturan Pemerintah, perkembangan ekonomi, moneter, bisnis perbankan serta teknologi informasi.
7. Menyusun dan merumuskan Rencana kerja Divisi Tahun yang akan datang.
8. Melakukan pembahasan di Departemen untuk penyusunan Rencana Divisi Kepatuhan dan disampaikan rumusan Rencana kerja Departemen kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan untuk disetujui.
9. Menginventarisasi temuan hasil pemeriksaan dalam bidang Kepatuhan.
10. Menerima Rancangan Keputusan yang diajukan oleh setiap Divisi.
11. Melakukan penelitian secara langsung untuk memastikan Kepatuhan Bank dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, sekurang-kurangnya ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan/ Penghapusan Aktiva Produktif.

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION DUTIES

COMPLIANCE DEPARTMENT:

1. Conduct routine compliance reviews as requested by relevant divisions.
2. Adhere to the *Four Eyes Principles* during the credit review process.
3. Monitor and evaluate compliance with credit policies and procedures.
4. Assess the implementation of the Division's plan from the previous and current years.
5. Collect qualitative and quantitative data for the preparation of the Annual GCG Report Plan, semester self-assessments, routine reports to the Board of Directors, quarterly and semester reports for the Compliance Director, gratuity unit reports, and LHKPN reporting.
6. Review the current compliance strategy and policies in relation to government regulations, economic developments, monetary policy, banking operations, and information technology.
7. Prepare and formulate the Division's work plan for the upcoming year.
8. Conduct departmental discussions to develop the Compliance Division Plan and submit the formulated departmental work plan to the Head of the Compliance Division for approval.
9. Inventory audit findings within the compliance area.
10. Accept draft decisions submitted by each division.
11. Conduct direct research to ensure the Bank's compliance with prudent principles, including the Minimum Capital Adequacy Requirement, Maximum Lending Limit, Quality of Earning Assets, and Provision/ Write-Off of Earning Assets.



12. Melakukan penelitian terhadap temuan hasil audit yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
13. Menyampaikan analisis dan rekomendasi kepada Direksi terhadap kepatuhan Bank dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
14. Menindaklanjuti rekomendasi Direksi.
15. Menyampaikan laporan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator lainnya.
16. Merumuskan pengembangan Budaya Kepatuhan, seperti pembahasan secara terus menerus terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Kebijakan Bank oleh setiap Unit Kerja, antara lain dalam suatu kegiatan berupa pelaksanaan Hari Sisdur.
17. Menyampaikan rancangan kepada Direksi untuk mendapat keputusan.
18. Bersama-sama Divisi Sekretaris Perusahaan melaksanakan perlombaan penguasaan Buku Pedoman Perusahaan dalam kegiatan Hari Ulang Tahun Bank.
19. Mengkaji penyebab terjadinya tindak ketidakpatuhan.
20. Menyampaikan surat pembinaan, dan meminta upaya konkrit yang akan dilakukan untuk melaksanakan kepatuhan.
21. Memantau tindak lanjut perbaikan/penyelesaian temuan hasil audit atas tindak ketidakpatuhan.
22. Menyampaikan kajian kepada Direksi untuk memasukkan unsur ketidak-patuhan dan/atau penyimpangan terhadap sistem dan prosedur Buku Pedoman Perusahaan dalam Penilaian Kinerja Pegawai.
23. Memantau penerapan Kepatuhan dari seluruh Unit Kerja.
24. Memastikan bahwa pengawasan melekat sudah dilakukan oleh setiap Unit Kerja.
25. Memonitor, mengkaji dan menindaklanjuti hasil pengawasan melekat pada setiap Unit Kerja.
26. Meneliti temuan dan rekomendasi hasil audit (internal dan ekstern) yang berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap perjanjian dan komitmen Bank.
27. Menyampaikan analisis dan rekomendasi kepada Direksi atas tindak ketidakpatuhan Bank terhadap perjanjian dan komitmen Bank terhadap pihak lain.
28. Menindaklanjuti rekomendasi Direksi.
29. Menyampaikan laporan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
30. Menginventarisasi tindak ketidakpatuhan kecurangan maupun manipulasi
31. Meneliti rekomendasi dari pemeriksa (intern/ekstern).
32. Meneliti ketentuan yang berlaku terkait dengan tindak ketidakpatuhan tersebut.
33. Melakukan kajian penyebab ketidakpatuhan,
12. Investigate audit findings related to compliance with prudent principles.
13. Provide analysis and recommendations to the Board of Directors concerning the Bank's adherence to prudent principles.
14. Follow up on recommendations made by the Board of Directors.
15. Submit required reports to the Financial Services Authority and other regulatory bodies.
16. Develop a compliance culture through ongoing discussions of the Company Manual (BPP) and Bank Policies within each work unit, including activities such as the implementation of Sisdur Day.
17. Present draft decisions to the Board of Directors for final approval.
18. Collaborate with the Corporate Secretary Division to conduct a Company Manual mastery competition during the Bank's anniversary celebrations.
19. Assess the causes of non-compliance.
20. Issue guidance letters and request concrete actions to ensure compliance.
21. Monitor follow-up actions aimed at improving or resolving audit findings related to non-compliance.
22. Provide a review to the Board of Directors to include elements of non-compliance and/or deviations from Company Manual systems and procedures in employee performance assessments.
23. Oversee the implementation of compliance across all work units.
24. Ensure that inherent supervision is conducted by each work unit.
25. Monitor, review, and follow up on the outcomes of inherent supervision in each work unit.
26. Examine audit findings and recommendations (both internal and external) concerning the Bank's compliance with its agreements and commitments.
27. Provide analysis and recommendations to the Board of Directors regarding instances of non-compliance with agreements and commitments to third parties.
28. Follow up on recommendations made by the Board of Directors.
29. Submit the required reports to the Financial Services Authority.
30. Inventory instances of non-compliance, including fraud and manipulation.
31. Review recommendations from auditors (both internal and external).
32. Assess applicable regulations related to non-compliance.
33. Conduct an evaluation of the causes of non-compliance, submit recommendations and conclusions, and propose



menyampaikan rekomendasi/kesimpulan serta menetapkan solusinya.

34. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi.
35. Meneruskan rekomendasi Direksi kepada Unit Kerja terkait.
36. Memantau tindak lanjutnya.
37. Perumusan bersama Pihak Vendor PT. Intelsys Data Madani
38. Memastikan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) sudah berjalan dengan baik dan sudah dilakukan oleh setiap Unit Kerja.
39. Sosialisasi terkait Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) dengan seluruh Unit terkait.
40. Memonitor, mengkaji dan menindaklanjuti hasil pengawasan melekat pada setiap Unit Kerja.

DEPARTEMEN KEBIJAKAN

1. *Overview* Kepatuhan terhadap seluruh Kebijakan dan prosedur yang di prioritaskan.
2. Pemantauan kecukupan ketentuan di unit kerja Divisi dan Cabang
3. Monitoring dan evaluasi Peraturan dan Kebijakan terkini dan dapat diaplikasikan
4. *Review* sesuai ketentuan terbaru (OJK, Ketentuan Internal, BI, KPK dan Peraturan Perundangan lainnya
5. Melaksanakan *Review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Kebijakan Bank yang sudah berjalan di Kantor Pusat

DEPARTEMEN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

1. Penyempurnaan *Business Requirement Definition* (BRD) APU PPT sesuai regulasi yang berlaku apabila terdapat perubahan
2. Migrasi Aplikasi APU PPT versi 2 ke V3
3. Kewajiban penyampaian Pelaporan Wajib dan Tidak Wajib kepada *regulator*/Pihak Ekstern
 - 3.1. Pelaporan Wajib
 - a. LTKT
 - b. LTKM
 - c. Pengkinian Data Nasabah
 - d. Pelaporan SIPESAT
 - e. Pelaporan SIPENDAR
 - f. FIR
 - 3.2 Pelaporan Tidak Wajib
 - a. PEDAL
 - b. SIGAP
4. Monitoring dan Pelaporan APU PPT.

solutions.

34. *Present recommendations to the Board of Directors.*
35. *Forward the Board of Directors' recommendations to relevant work units.*
36. *Monitor follow-up actions.*
37. *Collaborate with Vendor PT. Intelsys Data Madani.*
38. *Ensure the Compliance Information System (ASIK) application is functioning effectively and is implemented by each work unit.*
39. *Disseminate information regarding the implementation of the Compliance Information System (ASIK) application to all relevant units.*
40. *Monitor, review, and follow up on the results of supervision associated with each work unit.*

POLICY DEPARTMENT

1. *Overview of compliance with all prioritized policies and procedures.*
2. *Monitoring the adequacy of regulations within Division and Branch work units.*
3. *Evaluating current and applicable regulations and policies.*
4. *Reviewing compliance with the latest regulations, including those from OJK, Internal Regulations, Bank Indonesia, the Corruption Eradication Commission, and other relevant laws.*
5. *Reviewing the Company Manual (BPP) and existing Bank Policies at the Head Office.*

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DEPARTMENT

1. *Improvement of the AML/CFT Business Requirement Definition (BRD) in accordance with applicable regulations if there are changes.*
2. *Migration of the AML/CFT Application from version 2 to V3.*
3. *Obligation to submit Mandatory and Non-Mandatory Reports to Regulators/External Parties*
 - 3.1. *Mandatory Reporting*
 - a. *LTKT*
 - b. *LTKM*
 - c. *Customer Data Updates*
 - d. *SIPESAT Reporting*
 - e. *SIPENDAR Reporting*
 - f. *FIR*
 - 3.2 *Non-Mandatory Reporting*
 - a. *PEDAL*
 - b. *SIGAP*
4. *AML/CFT Monitoring and Reporting.*



5. *Awareness* Dekom dan Direksi atas penerepan APU PPT yang diimplementasikan secara efektif dan konsisten untuk pencapaian tujuan dalam rapat Direksi maksimal 6 bulan sekali, yang dilengkapi dengan resume rapat dari Divisi Sekretaris Perusahaan, antara lain APU PPT dan Kompetensi SDM.
6. Komite Direksi terhadap *quality action* aplikasi APU PPT yang diajukan Divisi Teknologi Informasi sesuai surat *Regulator* terkait APU PPT yang menjadi kebutuhan terkini dan sesuai kebutuhan Bank.
7. *Review* evaluasi BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) APU PPT minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
8. IHT secara virtual dan tatap muka langsung bagi unit KYC (Know Your Customer) KCU, KC, KCP terkait teknik, metode dan tipologi APU PPT minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
9. Seminar/*Workshop* bagi dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Staf Departemen APU PPT Kantor Pusat minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
5. *Awareness of the Board of Commissioners and the Board of Directors* regarding the effective and consistent implementation of AML/CFT to achieve objectives through Board of Directors meetings, which are held every six months, accompanied by meeting summaries from the Corporate Secretary Division, including AML/CFT and HR Competencies.
6. The Board of Directors' Committee will review the quality action for AML/CFT applications submitted by the Information Technology Division in accordance with the Regulator's letter regarding AML/CFT, which is the latest requirement and meets the Bank's needs.
7. Review the evaluation of the AML/CFT Implementation Guidelines (BPP) at least once a year.
8. Conduct virtual and in-person IHT for the KYC (Know Your Customer) units at KCU, KC, and KCP regarding AML/CFT techniques, methods, and typologies at least twice a year.
9. Conduct seminars/workshops for the Board of Commissioners, Directors, Compliance Division Leaders, and AML/CFT Department staff at Head Office at least twice a year.



Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal

Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program

Bank Papua berkomitmen untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang transparan, terpercaya, dan berintegritas melalui penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 mengenai penerapan Program APU dan PPT, serta POJK Nomor 23/POJK.01/2019 yang mengatur penyesuaian dan penguatan regulasi di sektor jasa keuangan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan bisnis, Bank Papua aktif mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan layanan keuangan untuk aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Melalui implementasi kebijakan yang komprehensif, Bank Papua tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Program APU dan PPT yang diterapkan oleh Bank Papua meliputi berbagai aspek, mulai dari kebijakan pengenalan nasabah, pemantauan transaksi, hingga edukasi pegawai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan usaha yang beretika. Dengan pendekatan ini, Bank Papua berkomitmen untuk menjaga integritasnya sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab.

Bank Papua is dedicated to fostering a transparent, trustworthy, and integrity-driven financial system through the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CFT), and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) programs. This dedication aligns with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12/POJK.01/2017 regarding AML and CFT program implementation, as well as POJK Number 23/POJK.01/2019, which governs the adjustment and enhancement of regulations within the financial services sector.

In fulfilling its social and business responsibilities, Bank Papua actively prevents and detects potential misuse of financial services for illicit activities, including money laundering, terrorism financing, and the proliferation of weapons of mass destruction. By implementing comprehensive policies, Bank Papua not only adheres to relevant regulations but also contributes to the stability and security of the national financial system.

The bank's AML and CFT programs encompass various components, including customer identification policies, transaction monitoring, and employee training. These initiatives are designed to build public trust and foster an ethical business environment. Through this approach, Bank Papua reaffirms its commitment to maintaining its integrity as a responsible financial institution.



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) DI BANK PAPUA

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, transparan, dan berintegritas, Bank Papua telah melaksanakan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.01/2019.

Dalam pelaksanaan program ini, Bank Papua telah memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui beberapa jenis laporan, sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
 - o Setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu menyampaikan laporan LTKT kepada Departemen KYC di Divisi Kepatuhan.
 - o Laporan ini disampaikan secara daring melalui aplikasi APU-PPT, yang selanjutnya dilaporkan ke PPATK menggunakan aplikasi GRIPS.
2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
 - o LTKM disusun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Cabang Pembantu (KCP).
 - o Divisi Kepatuhan menindaklanjuti laporan ini kepada PPATK melalui aplikasi GRIPS, dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan, seperti rekening koran, fotokopi warkat transaksi, informasi profil nasabah, dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Bank Papua juga secara proaktif merespons permintaan dari PPATK terkait laporan LTKM, memastikan bahwa setiap transaksi yang terindikasi mencurigakan dapat dianalisis dan dilaporkan secara tepat waktu. Dengan penerapan sistem pelaporan yang terintegrasi dan akurat, Bank Papua menunjukkan komitmennya untuk mendukung upaya nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Adapun data penyampaian LTKT & LTKM selama periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER-TERRORISM FINANCING (CFT) PROGRAM AT BANK PAPUA

In line with its commitment to fostering a safe, transparent, and integrity-based financial system, Bank Papua has instituted an Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CFT) Program in compliance with Law Number 8 of 2010 regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 23/POJK.01/2019.

As part of this program, Bank Papua has fulfilled its financial transaction reporting obligations to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) through various report types, detailed as follows:

1. *Cash Financial Transaction Report (LTKT)*
 - o *Each Branch Office and Sub-Branch Office submits LTKT reports to the KYC Department within the Compliance Division.*
 - o *Reports are submitted online via the AML-PPT application and subsequently reported to PPATK using the GRIPS application.*
2. *Suspicious Financial Transaction Report (SFT)*
 - o *The SFT is prepared based on analyses conducted by the Main Branch Office (KCU), Branch Offices (KC), and Sub-Branch Offices (KCP).*
 - o *The Compliance Division follows up on this report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) through the GRIPS application, attaching relevant supporting documents, including bank statements, photocopies of transaction slips, customer profile information, and other necessary documentation.*

Bank Papua also proactively addresses requests from PPATK concerning SFT reports, ensuring that any suspicious transactions are analyzed and reported promptly. Through the implementation of an integrated and precise reporting system, Bank Papua reaffirms its commitment to supporting national efforts in the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing. The data for the submission of LTKT and LTKM during the 2025 period is as follows:



No	Keterangan	Semester I 2025	Semester II 2025	+/-	%	Information
1	Pelaporan LTKT	3.130	6.553	3.423	52%	LTKT reporting
2	Pelaporan LTKM	51	13	(38)	(292%)	LTKM reporting

- Pelaporan LTKT untuk periode semester II tahun 2025 mencatat sebanyak 6.553 transaksi, mengalami peningkatan sebesar 3.423 transaksi atau mencapai 52% dibandingkan dengan pelaporan LTKT pada semester I tahun 2025 yang berjumlah 31.30 transaksi.
- Pelaporan LTKM untuk periode semester II tahun 2025 mencapai 13 transaksi atau menurun sebesar (292%), jika dibandingkan dengan pelaporan LTKM pada semester I tahun 2025 yang tercatat sebanyak 51 transaksi.

LTKT reporting for the second semester of 2025 recorded 6,553 transactions, an increase of 3,423 transactions, or 52%, compared to the 31,30 transactions reported in the first semester of 2025.

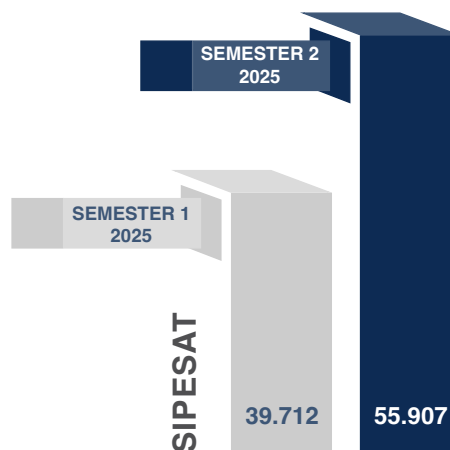
LTKM reporting for the second semester of 2025 reached 13 transactions, a decrease of 292% compared to the 51 transactions reported in the first semester of 2025.

PELAPORAN SIPESAT

Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK (PERKA) No. 02/1.02/PPATK/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), maka setiap Bank wajib menyampaikan laporan SIPESAT ke PPATK secara periodik triwulanan. Kinerja pelaporan data SIPESAT yang dilaporkan ke PPATK dengan status data sukses pada Semester II tahun 2025 sebanyak 55.907 CIF, mengalami kenaikan sebanyak 16.195 atau mencapai 29%, jika dibandingkan pelaporan SIPESAT pada Semester I 2025 sebanyak 39.712.

SIPESAT REPORTING

In accordance with the Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) No. 02/1.02/PPATK/2014 concerning the Integrated Service User Information System (SIPESAT), every bank is required to submit SIPESAT reports to the PPATK on a quarterly basis. The performance of SIPESAT data reporting reported to PPATK with successful data status in Semester II of 2025 was 55,907 CIF, an increase of 16,195 or 29%, compared to SIPESAT reporting in Semester I of 2025 of 39,712.



Penyampaian laporan SIPESAT dilakukan secara Online oleh Departemen KYC unit kerja APU PPT melalui Website GRIPS SIPESAT PPATK oleh petugas yang ditunjuk dan memiliki fasilitas login GRIPS SIPESAT PPATK.

SIPESAT reports are submitted online by the KYC Department of the AML-CFT work unit through the PPATK's GRIPS SIPESAT website by designated officers who have the GRIPS SIPESAT PPATK login facility.



Sosialisasi APU-PPT dan PPPSPM Tahun 2025 dilaksanakan secara langsung maupun virtual melalui Zoom Meeting serta didukung komunikasi berkelanjutan melalui grup WhatsApp (WA). Kegiatan ini telah dilaksanakan di 8 kantor cabang, meliputi KC Yogyakarta, Makassar, Jakarta, Surabaya, Waisai, Aimas, Sorong, dan Teminabuan, dengan seluruh kegiatan dinyatakan terlaksana.

SOSIALISASI APU-PPT & PPPSPM TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Departemen *Know Your Customer* (KYC) di bawah Divisi Kepatuhan Bank Papua telah melaksanakan serangkaian sosialisasi dan edukasi sistematis mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Kegiatan ini berlangsung di berbagai Kantor Cabang Bank Papua dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai tentang pentingnya penerapan program ini dalam operasional perbankan.

Sosialisasi tersebut mencakup penjelasan mendalam mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, langkah-langkah identifikasi risiko transaksi nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi perbankan. Selain itu, pegawai juga diberikan edukasi mengenai mekanisme pelaporan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk penggunaan aplikasi daring yang terintegrasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Melalui program sosialisasi ini, Bank Papua berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh pegawai di setiap lini memiliki kompetensi dan kesadaran yang memadai dalam mendukung implementasi Program APU-PPT dan PPPSPM. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Bank Papua untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulator.

The 2025 AML-CFT and PPPSPM socialization activities were conducted in person and virtually via Zoom meetings, supported by ongoing communication through WhatsApp groups. These activities were held at eight branch offices, including the Yogyakarta, Makassar, Jakarta, Surabaya, Waisai, Aimas, Sorong, and Teminabuan branches, with all activities declared successful.

AML-CFT & PPPSPM SOCIALIZATION ACTIVITIES IN 2025

In 2025, the Know Your Customer (KYC) Department under the Compliance Division of Bank Papua conducted a series of systematic socialization and education programs regarding the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program (AML-CFT) and the Prevention of the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM). This activity took place at various Bank Papua branch offices with the aim of increasing employee understanding and awareness of the importance of implementing this program in banking operations.

The outreach included an in-depth explanation of the obligation to report suspicious financial transactions, steps for identifying customer transaction risks, and the application of the principle of prudence in every banking transaction. Furthermore, employees were educated on reporting mechanisms in accordance with applicable regulations, including the use of an online application integrated with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Through this outreach program, Bank Papua is committed to ensuring that all employees at all levels have adequate competency and awareness to support the implementation of the AML-CFT and PPPSPM programs. This initiative is part of Bank Papua's commitment to creating a financial system that is transparent, accountable, and compliant with regulatory requirements.

No	Kantor Cabang	Realisasi Tanggal dan Pelaksanaan	Keterangan	Description
1	KC. Yogyakarta	05 s/d 07 Mei 2025	terlaksana	accomplished
2	KC. Makassar	14 s/d 16 Mei 2025	terlaksana	accomplished
3	KC. Jakarta	26 s/d 28 Mei 2025	terlaksana	accomplished
4	KC. Surabaya	02 s/d 04 Juni 2025	terlaksana	accomplished
5	KC. Waisai	10 s/d 13 Juni 2025	terlaksana	accomplished
6	KC. Aimas	16 s/d 19 Juni 2025	terlaksana	accomplished
7	KC. Sorong	19 s/d 21 Juni 2025	terlaksana	accomplished
8	KC. Teminabuan	23 s/d 27 Juni 2025	terlaksana	accomplished



PEMENUHAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI DARI PPAK DAN KPK-RI

Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban regulasi yang berlaku dan mendukung implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Bank Papua melalui Divisi Kepatuhan secara proaktif menanggapi setiap permintaan data dan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindakan ini diambil untuk menganalisis transaksi yang relevan. Selain itu, Bank Papua juga berkomitmen mendukung proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dengan menyediakan data dan informasi sesuai permintaan yang diterima.

Dalam situasi tertentu, Bank Papua bertanggung jawab menindaklanjuti permintaan pemblokiran rekening dari KPK-RI. Tindakan ini bertujuan memastikan bahwa aset yang terkait dengan tindak pidana dapat segera diamankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses pemenuhan permintaan ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan kehati-hatian yang tinggi, serta selalu mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lainnya yang relevan.

Komitmen Bank Papua dalam memenuhi permintaan data dari PPAK dan KPK-RI mencerminkan peran aktif Bank dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

FULFILLING DATA AND INFORMATION REQUESTS FROM THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER (PPATK) AND THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK-RI).

In an effort to fulfill applicable regulatory obligations and support the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APU-PPT) Program, Bank Papua, through its Compliance Division, proactively responds to every request for data and information from the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This action is taken to analyze relevant transactions. Furthermore, Bank Papua is committed to supporting the investigation process by the Corruption Eradication Commission (KPK-RI) by providing data and information as requested.

In certain situations, Bank Papua is responsible for following up on requests to block accounts from the KPK-RI. This action aims to ensure that assets related to criminal acts can be promptly secured in accordance with applicable law. The entire process for fulfilling these requests is carried out with the principles of transparency, professionalism, and high prudence, always adhering to regulations established by the Financial Services Authority (OJK) and other relevant regulations.

Bank Papua's commitment to fulfilling data requests from the PPAK and the KPK-RI reflects the Bank's active role in maintaining the integrity of the national financial system and supporting efforts to eradicate money laundering and terrorism financing in Indonesia.



Perkara Hukum

Legal Cases

Selama tahun 2025, Bank Papua menghadapi beberapa perkara penting yang berkaitan dengan masalah hukum perdata. Beberapa kasus telah selesai dan mendapatkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), sementara ada juga yang telah dicabut gugatan dan beberapa masih dalam proses penyelesaian. Adapun rincian perkara tersebut adalah sebagai berikut:

In 2025, Bank Papua encountered several significant civil legal cases. Some cases have been resolved and have received final and binding court decisions, while others have been withdrawn, and some remain in the process of resolution. The details of these cases are as follows:

Tabel Perkara Penting-Table of Important Cases					
No.	Perkara	Jumlah			Case
		Pidana	Perdata	Hubungan Industrial	
1	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht)	0	27	0	Completed (There has been a Court Decision that has permanent legal force/inkracht)
2	Pencabutan Gugatan	0	0	0	Withdrawal of Lawsuit
3	Dalam Proses Penyelesaian	0	6	0	In Process of Completion

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2025, tidak ada masalah hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

CURRENT LEGAL ISSUES FACED BY THE INCUMBENT BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In 2025, the incumbent Board of Commissioners and Directors encountered no legal issues.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Pada tahun 2025, Bank Papua belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak ada informasi mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak.

LEGAL ISSUES FACED BY SUBSIDIARIES

In 2025, Bank Papua did not have any subsidiaries; therefore, there is no information regarding legal issues faced by such entities.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP BANK

Dampak masalah hukum perdata yang dihadapi oleh Bank Papua dalam proses litigasi tidak signifikan dan tidak mempengaruhi kinerja bank. Hal ini disebabkan oleh upaya mitigasi dan penanganan litigasi yang telah dilakukan oleh bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPACT OF LEGAL ISSUES ON THE BANK

The civil legal issues faced by Bank Papua during the litigation process had a negligible impact on the bank's performance. This was attributed to the bank's effective mitigation strategies and adherence to applicable laws and regulations in managing litigation.



Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya

Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners, and Directors by the Financial Services Authority and Other Authorities

Selama tahun 2025, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Bank Papua maupun Dewan Komisaris dan Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.

During 2025, there were no administrative sanctions imposed on Bank Papua or its Board of Commissioners and Board of Directors by the Financial Services Authority (OJK) or any other authorities.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Sebagai lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Papua memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi dan data perusahaan yang transparan serta akurat kepada pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemegang saham, dan regulator terhadap operasional dan kinerja bank.

Kewajiban keterbukaan informasi bagi bank umum, termasuk Bank Papua, diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan akses yang mudah terhadap informasi penting, termasuk laporan keuangan, tata kelola perusahaan, kebijakan manajemen risiko, dan informasi lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi internal yang efektif merupakan elemen kunci dalam memastikan koordinasi yang baik antara seluruh jajaran manajemen dan pegawai di Bank Papua. Dengan sistem komunikasi yang terstruktur, informasi dapat tersampaikan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu, sehingga seluruh pegawai dapat bekerja secara efisien dan selaras dengan visi dan misi perusahaan.

Bank Papua menerapkan berbagai strategi komunikasi internal untuk memastikan bahwa seluruh pegawai mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan dapat diakses dengan mudah. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti email korporat, aplikasi chat, intranet, serta pertemuan tatap muka seperti rapat dan town hall meeting, Bank Papua dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan perbankan yang berlaku.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, Bank Papua mengimplementasikan strategi komunikasi eksternal yang efektif untuk memastikan aksesibilitas informasi yang akurat bagi seluruh pemangku kepentingan,

As a financial institution regulated by the Financial Services Authority (OJK), Bank Papua is committed to providing transparent and accurate access to company data for its stakeholders. This information disclosure is intended to enhance public, shareholder, and regulatory trust in the bank's operations and performance. The obligation for information disclosure for commercial banks, including Bank Papua, is governed by OJK Regulation (POJK) No. 37/POJK.03/2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports, and POJK No. 8/POJK.04/2015 concerning Information Disclosure for Issuers or Public Companies. These regulations mandate that institutions offer accessible information, including financial reports, corporate governance practices, risk management policies, and other relevant data that may influence stakeholder decision-making.

INTERNAL COMMUNICATION

Effective internal communication is essential for ensuring seamless coordination between all levels of management and employees at Bank Papua. A structured communication system allows for clear, accurate, and timely dissemination of information, enabling all employees to work efficiently and in alignment with the company's vision and mission. Bank Papua employs various internal communication strategies to guarantee that all employees receive precise, timely, and easily accessible information. By leveraging digital technologies such as corporate email, chat applications, the intranet, and face-to-face meetings, including town halls, Bank Papua fosters a productive and efficient work environment that adheres to relevant banking regulations and policies.

EXTERNAL COMMUNICATION

As a financial institution dedicated to the principles of transparency and information disclosure, Bank Papua implements a comprehensive external communication strategy to ensure that accurate information is readily accessible to all stakeholders, including customers,



termasuk nasabah, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat luas. Penerapan keterbukaan informasi ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait transparansi dan pelaporan publik.

Untuk mendukung keterbukaan informasi, Bank Papua memanfaatkan berbagai saluran komunikasi eksternal, antara lain:

1. Website Resmi Perusahaan

Bank Papua menyediakan informasi yang transparan melalui situs web resmi

www.bankpapua.co.id. Melalui platform ini, pemangku kepentingan dapat mengakses berbagai informasi penting, seperti:

- Profil perusahaan, visi, misi, dan struktur organisasi.
- Produk dan layanan perbankan.
- Informasi suku bunga, tarif, dan biaya layanan.
- Pengumuman penting dan agenda perusahaan.
- Laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan kepada OJK.
- Pengumuman resmi terkait kebijakan dan inovasi perusahaan.

2. Media Sosial

Bank Papua secara aktif memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan nasabah dan masyarakat umum. Melalui saluran ini, Bank Papua menyampaikan informasi terkini, edukasi keuangan, promosi layanan, serta merespons pertanyaan atau keluhan nasabah dengan cepat.

Kanal media sosial resmi Bank Papua meliputi:

X: @bankpapua1966

Instagram: @bankpapua1966

Facebook: Bank Papua 1966

YouTube: Bank Papua

Media sosial ini juga digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program CSR, inovasi layanan digital, serta tips keamanan dalam transaksi perbankan.

3. Layanan Halo Bank Papua dan Customer Service

Untuk meningkatkan pelayanan dan menjawab pertanyaan nasabah dengan cepat, Bank Papua menyediakan layanan Halo Bank Papua melalui email halobankpapua@bankpapua.co.id. Melalui Halo Bank Papua ini, nasabah dapat mengakses layanan seperti:

- Informasi rekening dan transaksi.
- Panduan layanan perbankan digital.
- Penyampaian keluhan dan penyelesaiannya.
- Permintaan informasi mengenai kebijakan dan prosedur bank.

business partners, regulators, and the broader public. This strategy aligns with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the regulations set forth by the Financial Services Authority (OJK) regarding transparency and public reporting.

To facilitate effective information disclosure, Bank Papua employs various external communication channels, including:

1. Official Company Website

Bank Papua provides transparent information through its official website, www.bankpapua.co.id. Stakeholders can access essential information such as:

- *Company profile, vision, mission, and organizational structure*
- *Banking products and services*
- *Information on interest rates, fees, and service charges*
- *Important announcements and company agendas*
- *Annual reports, sustainability reports, and reports to the OJK*
- *Official announcements regarding company policies and innovations*

2. Social Media

Bank Papua actively utilizes social media platforms to enhance engagement with customers and the general public. Through these channels, the bank shares the latest updates, financial education, service promotions, and responds promptly to customer inquiries and complaints. Bank Papua's official social media channels include:

X: @bankpapua1966

Instagram: @bankpapua1966

Facebook: Bank Papua 1966

YouTube: Bank Papua

These platforms are also used to disseminate information about CSR programs, digital service innovations, and security tips for banking transactions.

3. Halo Bank Papua Service and Customer Service

To improve service and ensure timely responses to customer inquiries, Bank Papua offers the Halo Bank Papua service via email at halobankpapua@bankpapua.co.id. Through Halo Bank Papua, customers can access services such as:

- o *Account and transaction information*
- o *Digital banking service guides*
- o *Complaint submission and resolution*
- o *Requests for information regarding bank policies and procedures*



Selain Halo Bank Papua, Bank Papua juga memiliki layanan *Customer Service* di kantor cabang dan kantor cabang pembantu untuk memberikan bantuan langsung kepada nasabah.

In addition to Halo Bank Papua, the bank has Customer Service representatives at its branch and sub-branch offices to provide direct assistance to customers.

4. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

Sebagai wujud transparansi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, Bank Papua secara berkala menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Laporan ini mencakup:

- Kinerja keuangan dan operasional perusahaan.
- Strategi bisnis dan inovasi perbankan.
- Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan peraturan lainnya.

Laporan-laporan ini dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi Bank Papua dan disampaikan kepada pemegang saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

4. Annual Report and Sustainability Report

To demonstrate transparency to shareholders and other stakeholders, Bank Papua regularly publishes an Annual Report and a Sustainability Report. These reports cover:

- o The company's financial and operational performance*
- o Business strategy and banking innovation*
- o Implementation of social and environmental responsibility*
- o Compliance with OJK regulations and other applicable laws*

These reports are publicly accessible through Bank Papua's official website and are presented to shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).

5. Siaran Pers dan Media Massa

Bank Papua secara aktif melakukan publikasi berita melalui siaran pers dan bekerja sama dengan berbagai media massa nasional dan lokal untuk menyampaikan informasi kepada publik.

5. Press Releases and Mass Media

Bank Papua actively disseminates news through press releases and collaborates with various national and local media outlets to convey information to the public.

6. Transparansi Penyampaian Laporan

Sebagai bank yang beroperasi di bawah pengawasan OJK, Bank Papua secara rutin menyampaikan laporan kepada OJK mengenai:

- Laporan keuangan berkala.
- Kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
- Pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
- Implementasi program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

6. Transparency in Reporting

As a bank operating under the supervision of the Financial Services Authority (OJK), Bank Papua regularly submits reports to the OJK regarding:

- Periodic financial reports.*
- Compliance with banking regulations.*
- Risk management and corporate governance.*
- Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CFT) programs.*

Pelaporan ini mencerminkan komitmen Bank Papua untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjaga kepercayaan para pemegang saham dan nasabah.

This reporting reflects Bank Papua's commitment to ensuring that bank operations comply with applicable regulations and maintain the trust of shareholders and customers.



Divisi Sekretaris Perusahaan

Alamat Kantor:

Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111

Telepon:

+62 967 532011, Ext 507, 508

Email:

divisi.spr@bankpapua.co.id



Kode Etik

Code of Ethics

Bank Papua selalu menjunjung tinggi prinsip integritas dan berkomitmen untuk menerapkan standar tinggi dalam Kode Etik. Kode Etik ini mencerminkan praktik bisnis yang sehat serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk mendukung komitmen tersebut, Bank Papua telah menyusun dan mengimplementasikan Pedoman Kode Etik Karyawan. Pedoman ini mengatur standar perilaku bisnis dan etika yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan di lingkungan kerja.

Kepatuhan terhadap kode etik merupakan aspek krusial dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, berfungsi sebagai fondasi utama dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Bank Papua berupaya menerapkan standar etika terbaik sesuai dengan pedoman perilaku dan etika bisnis, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Implementasi GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga setiap karyawan. Proses ini dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan kode etik yang wajib dipatuhi oleh semua pihak di perusahaan.

Kode Etik Perusahaan telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 53/DIR-BPD/VIII/2020. Revisi ini menggantikan Surat Keputusan Direksi No. 70/DIR-BPD/XII/2004 mengenai Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kode Etik (Code of Conduct) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berlaku efektif sejak 14 Agustus 2020.

Bank Papua consistently upholds the principle of integrity and is dedicated to maintaining high standards within its Code of Ethics. This Code reflects sound business practices and the principles of Good Corporate Governance (GCG). To support this commitment, Bank Papua has developed and implemented an Employee Code of Ethics Guideline, which outlines the standards of business conduct and ethics that must be adhered to by all employees and stakeholders within the work environment.

Compliance with the Code of Ethics is essential to the implementation of Corporate Governance and serves as the foundational basis for all business activities. Bank Papua is committed to upholding the highest ethical standards in line with the Code of Business Conduct and Ethics, which underpins the implementation of Corporate Governance. Achieving GCG requires commitment from all levels of the organization, from top management to every employee. This process begins with the establishment of fundamental policies and a Code of Ethics that must be followed by all parties within the company.

The Company's Code of Ethics has been updated and ratified through Board of Directors Decree No. 53/DIR-BPD/VIII/2020. This revision replaces Board of Directors Decree No. 70/DIR-BPD/XII/2004 concerning the Company Guidelines (BPP) Code of Ethics (Code of Conduct) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, which has been in effect since August 14, 2020.

	VISI <i>Vision</i>	Menjadi Bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing dan mendukung pembangunan ekonomi di tanah Papua
	MISI <i>Mission</i>	- Memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder - Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat - menjalankan bisnis secara profesional - Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tanah Papua
	Budaya Perusahaan <i>Company Culture</i>	"Berpikir, bertindak secara Bisnis" Nilai-nilai dasar Budaya Kerja Bank Papua 1. Melayani 2. Efisien 3. Responsif 4. Kewirausahaan 5. Asas Manfaat 6. Risiko yang diperhitungkan
	Pedoman Perilaku <i>Code of Conduct</i>	- Memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder - Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat - menjalankan bisnis secara profesional - Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tanah Papua



PERNYATAAN KODE ETIK MANAJEMEN BANK PAPUA

Manajemen Bank Papua dengan tegas menetapkan Kode Etik sebagai pedoman dasar bagi seluruh karyawan dalam menjalankan perilaku yang sesuai dengan standar etika tinggi yang berlaku di industri perbankan. Melalui penerapan Kode Etik ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya perkembangan yang positif dan berkelanjutan di masa depan.

Peluncuran Kode Etik pada tahun 2025 menandai tonggak penting bagi setiap karyawan Bank Papua untuk melakukan transformasi dalam sikap dan perilaku mereka. Hal ini menekankan pentingnya integritas yang lebih tinggi serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Penerapan Kode Etik oleh seluruh karyawan Bank Papua bertujuan untuk:

1. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.
3. Menjaga kerahasiaan informasi terkait bisnis Bank Papua serta informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank Papua.

Isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Bank Papua mencakup:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan.
2. Hubungan dengan Pihak Eksternal.
3. Hubungan dengan Pihak Internal.
4. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar.
5. Hubungan antara Bank Papua dan Karyawan.
6. Kebijakan Periklanan dan Promosi.
7. Kerahasiaan Informasi.
8. Ketepatan Pembukuan.
9. Transaksi dengan Nasabah dan Pemasok.
10. Penanganan Benturan Kepentingan.
11. Pemberian Hadiah.
12. Penerimaan Hadiah.
13. Kontribusi dan Aktivitas Politik.

Dengan adanya Kode Etik ini, diharapkan setiap individu di Bank Papua dapat berperilaku profesional dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada reputasi yang baik serta mendukung keberlanjutan perusahaan.

BANK PAPUA MANAGEMENT CODE OF ETHICS STATEMENT

Bank Papua management has established a comprehensive Code of Ethics to serve as a fundamental guideline for all employees in conducting their behavior in alignment with the high ethical standards prevalent in the banking industry. The implementation of this Code of Ethics aims to foster positive and sustainable development for the future.

The launch of the Code of Ethics in 2025 marks a significant milestone for every Bank Papua employee, encouraging a transformation in attitudes and behaviors that emphasize integrity, efficiency, and effectiveness in fulfilling their responsibilities.

The objectives of implementing the Code of Ethics for all Bank Papua employees are to:

1. *Comply with all applicable laws and regulations.*
2. *Avoid activities that may result in or create a potential conflict of interest.*
3. *Maintain the confidentiality of information related to Bank Papua's business and that of its partners.*

The values embodied in the Bank Papua Code of Ethics include:

1. *Compliance with Laws and Policies*
2. *Relationships with External Parties*
3. *Relationships with Internal Parties*
4. *Relationships with the Surrounding Community*
5. *Relationship between Bank Papua and Employees*
6. *Advertising and Promotion Policy*
7. *Confidentiality of Information*
8. *Accurate Accounting*
9. *Transactions with Customers and Suppliers*
10. *Handling Conflicts of Interest*
11. *Giving Gifts*
12. *Accepting Gifts*
13. *Political Contributions and Activities*

Through this Code of Ethics, we aspire for every individual at Bank Papua to demonstrate professionalism and responsibility, thereby enhancing our reputation and supporting the sustainability of the organization.



POKOK-POKOK KODE ETIK BANK PAPUA

Pedoman Kode Etik Bank Papua bertujuan untuk menegakkan standar etika bisnis dalam interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah poin-poin utama yang perlu diperhatikan:

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan

- Seluruh pengurus dan karyawan Bank Papua diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta regulasi perbankan yang berlaku.
- Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa Direksi dan pegawai bank menjalankan peraturan tersebut dengan baik.
- Bank Papua mencatat harta, utang, dan modal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Penerapan Standar Layanan

- Semua karyawan diharapkan menerapkan standar layanan yang tinggi demi kepuasan pelanggan.

3. Kerahasiaan dan Informasi Perusahaan

- Setiap karyawan harus menggunakan data dan informasi bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan pengambilan keputusan, sambil menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Langkah-langkah yang harus diambil meliputi:
 - o Menggunakan sistem keamanan data yang terbaik.
 - o Menyediakan informasi yang relevan dan proporsional kepada pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan kepentingan bank.
 - o Menghindari penyebaran data kepada pihak yang tidak berkepentingan, baik selama masa kerja maupun setelahnya.
 - o Menyerahkan semua data terkait perusahaan saat berhenti bekerja.
 - o Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan konsumen.

4. Larangan Penyalahgunaan Informasi

- Setiap pengurus dan karyawan dilarang menyalahgunakan informasi terkait bank dan mengungkapkan informasi perusahaan yang diperoleh selama masa jabatan, kecuali jika informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan sesuai hukum atau sudah tidak bersifat rahasia.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

- Pegawai harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau

MAIN POINTS OF BANK PAPUA'S CODE OF ETHICS

The Bank Papua Code of Ethics Guidelines are designed to uphold ethical business standards in interactions with various stakeholders. Key points include:

1. Compliance with Regulations

- o *All management and employees of Bank Papua are required to comply with applicable laws and banking regulations.*
- o *The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors and bank employees adhere to these regulations.*
- o *Bank Papua records assets, liabilities, and equity in accordance with applicable accounting principles.*

2. Implementation of Service Standards

- o *All employees are expected to implement high service standards to ensure customer satisfaction.*

3. Confidentiality and Company Information

- o *Employees must utilize bank data and information to enhance company value and decision-making while maintaining confidentiality in accordance with applicable regulations.*
- o *Steps to ensure confidentiality include:*

- ☐ *Utilizing the best data security systems.*
- ☐ *Providing relevant and proportionate information to stakeholders, considering the bank's interests.*
- ☐ *Avoiding the dissemination of data to unauthorized parties, both during and after employment.*
- ☐ *Submitting all company-related data upon termination of employment.*
- ☐ *Maintaining the confidentiality of consumer-related information.*

4. Prohibition of Information Misuse

- o *All managers and employees are prohibited from misusing bank-related information or disclosing company information obtained during their tenure, unless such information is required for legal investigations or is no longer confidential.*

5. Handling Conflicts of Interest

- o *Employees must avoid situations that could lead to a conflict of interest or abuse of office by:*



penyalahgunaan jabatan dengan cara:

- o Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
- o Mengutamakan kepentingan Bank Papua di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.
- o Dilarang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

6. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

- Komisaris, Direksi, dan pegawai dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu kepada pejabat negara atau perwakilan mitra bisnis dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- Pemberian hadiah atau cinderamata kepada pihak lain diperbolehkan jika memenuhi syarat:
 - o Mendukung kepentingan bank.
 - o Tidak bertujuan untuk menyuap.
 - o Sudah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
 - o Jika berupa barang, harus mencantumkan logo/nama bank.
- Pegawai juga dilarang menerima sesuatu dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Donasi dari bank kepada partai politik atau calon legislatif/eksekutif harus sesuai dengan peraturan. Donasi untuk amal dapat diterima jika memenuhi batas kepatutan yang ditetapkan.

7. Penguatan Budaya Perusahaan

- Bank berkomitmen untuk memperkuat budaya perusahaan dengan:
 - o Melakukan evaluasi terhadap nilai dan perilaku utama budaya kerja.
 - o Merancang kriteria dan evaluasi untuk kepatuhan.
 - o Mengusulkan penilaian terhadap penganangan budaya patuh kepada unit terkait.

Dengan mengikuti pedoman ini, Bank Papua berupaya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek operasional serta hubungan dengan pemangku kepentingan.

- *Complying with established regulations, systems, and procedures.*
- *Prioritizing the interests of Bank Papua over personal, family, or other interests.*
- *Not using their position for personal or other interests.*

6. Giving and Receiving Gifts

- o *Commissioners, Directors, and employees are prohibited from offering anything to state officials or representatives of business partners with the intent to influence decision-making.*
- o *Gifts or souvenirs may be given to other parties if they meet the following criteria:*
 - *They support the bank's interests.*
 - *They are not intended as a bribe.*
 - *They are budgeted for in the Bank's Business Plan.*
 - *If in the form of goods, they must include the bank's logo/name.*
- o *Employees are also prohibited from accepting anything from business partners that could influence their decisions. Donations from the bank to political parties or legislative/executive candidates must comply with regulations. Donations to charity are acceptable if they meet established propriety limits.*

7. Strengthening Corporate Culture

- o *Bank Papua is committed to strengthening its corporate culture by:*
 - *Evaluating the core values and behaviors of the work culture.*
 - *Developing criteria and evaluations for compliance.*
 - *Proposing assessments of the implementation of a culture of compliance to relevant units.*

By adhering to these guidelines, Bank Papua strives to maintain integrity and professionalism in all aspects of its operations and in its relationships with stakeholders.



SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKANNYA

SOSIALISASI KEBIJAKAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Kode Etik perusahaan telah berhasil disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, organ pendukung, Direksi, pejabat di bawah Direksi, serta seluruh karyawan. Proses sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif, antara lain:

1. Situs website resmi perusahaan.
2. Penandatanganan kontrak kerja dengan seluruh karyawan.
3. Pelaksanaan *Self Assessment* Kode Etik yang diwajibkan untuk semua karyawan.
4. Pemasangan spanduk, leaflet, dan media informasi lainnya di area kantor Bank.

Pada tahun 2025, Bank Papua terus melanjutkan upaya sosialisasi Kode Etik kepada karyawan dan Direksi melalui beragam program pendidikan. Program ini mencakup workshop, pelatihan di tempat (*In-House Training*), pembinaan, dan pemantauan langsung. Selain itu, kami juga menyediakan akses pembelajaran melalui platform e-Learning di portal internal Bank Papua, serta forum diskusi kelompok.

Untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai Kode Etik, perusahaan telah melaksanakan sosialisasi Standar Etika secara langsung kepada pegawai di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Kegiatan ini didukung oleh pelatihan serta pengiriman informasi melalui email kepada seluruh pegawai. Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, pegawai diharapkan untuk mengajukan pertanyaan kepada atasan langsung atau menghubungi unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan.

Kami percaya bahwa komitmen terhadap Kode Etik akan semakin memperkuat integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek operasional Bank Papua.

IMPLEMENTASI KODE ETIK

Penerapan Kode Etik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat jangka panjang bagi Bank dengan fokus pada beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Profesionalisme: Meningkatkan

CODE OF ETHICS SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

SOCIALIZATION OF THE COMPANY'S CODE OF ETHICS POLICY

We are pleased to announce that the company's Code of Ethics has been effectively communicated to all stakeholders, including the Board of Commissioners, supporting bodies, the Board of Directors, and all employees. This socialization process utilized various effective communication channels, including:

1. *The company's official website.*
2. *Signing of employment contracts with all employees.*
3. *Implementation of a mandatory Code of Ethics Self-Assessment for all employees.*
4. *Display of banners, leaflets, and other informational media within the Bank's office premises.*

In 2025, Bank Papua will continue its efforts to socialize the Code of Ethics to employees and the Board of Directors through various educational programs. These programs will include workshops, in-house training, coaching, and direct monitoring. Additionally, we will provide access to learning through an e-Learning platform on Bank Papua's internal portal and group discussion forums.

To ensure comprehensive understanding of the Code of Ethics, the company has conducted direct socialization of the Ethical Standards for employees at the Head Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices. This initiative is supported by training and information disseminated via email to all employees.

If any information is unclear, employees are encouraged to direct their questions to their immediate supervisor or contact the work unit responsible for implementing Good Corporate Governance (GCG), specifically the Corporate Secretary Division.

We believe that a strong commitment to the Code of Ethics will further enhance integrity and professionalism in every aspect of Bank Papua's operations.

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS

The implementation of this Code of Ethics is anticipated to yield long-term benefits for the Bank, with a focus on the following key aspects:

1. *Enhanced Professionalism: Elevating professionalism*



profesionalisme dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank, yang mendukung terciptanya tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

2. Reputasi Bank: Meningkatkan reputasi Bank di lingkungan usaha, sehingga mendukung keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
3. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Membangun hubungan yang harmonis antara Bank dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan Bank.
4. Lingkungan Kerja yang Positif: Menciptakan lingkungan kerja yang jujur, beretika, dan terbuka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja.

Dalam rangka penerapan Kode Etik, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan *Self Assessment* terhadap penerapan Kode Etik di kalangan seluruh karyawan Bank Papua. Hasil penilaian di tingkat pusat (divisi) dan cabang menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah memiliki pemahaman etika profesi yang sangat baik.

KEBIJAKAN PENERAPAN KODE ETIK

Kode Etik ini berlaku untuk seluruh insan Bank, termasuk Komisaris, Direksi, dan Pegawai, yang wajib memahami dan mengimplementasikannya sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Penerapan Kode Etik merupakan komitmen dan tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Oleh karena itu, penting bagi setiap insan perbankan untuk mengetahui dan mematuhi Kode Etik agar dapat diimplementasikan secara efektif. Penerapan Kode Etik juga merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang, sehingga dapat memproyeksikan citra positif Bank.

Langkah-langkah penerapan Kode Etik meliputi:

1. Pernyataan Komitmen: Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menyatakan komitmen mereka untuk menerapkan Kode Etik di seluruh jajaran organisasi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sosialisasi Kode Etik: Sosialisasi Kode Etik akan dilakukan secara berjenjang, sehingga setiap pejabat berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi ini kepada tim di bawahnya.
3. Pernyataan Kepatuhan: Seluruh insan Bank diwajibkan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan yang

in the management of the Bank's business activities, thereby fostering good governance in alignment with applicable principles.

2. *Bank Reputation: Strengthening the Bank's reputation within the business community, which will support sustainable success.*
3. *Stakeholder Relations: Cultivating harmonious relationships between the Bank and its stakeholders, contributing to the Bank's prosperity and advancement.*
4. *Positive Work Environment: Establishing an honest, ethical, and transparent work environment, ultimately leading to increased productivity.*

To facilitate the implementation of the Code of Ethics, the Compliance Division has conducted a self-assessment regarding its application among all Bank Papua employees. The assessment results at the head office (division) and branch levels indicate that all employees possess a strong understanding of professional ethics.

CODE OF ETHICS IMPLEMENTATION POLICY

This Code of Ethics is applicable to all personnel within the Bank, including Commissioners, Directors, and Employees. Each individual is required to understand and adhere to this Code as a guideline for professional conduct in fulfilling their duties and responsibilities. The implementation of the Code of Ethics is a collective commitment and responsibility of every member of the Bank. Thus, it is imperative that all banking employees comprehend and comply with the Code to ensure its effective application. Furthermore, the implementation of the Code serves as an internal control mechanism aimed at preventing misconduct and fostering a positive image of the Bank.

The steps for implementing the Code of Ethics are as follows:

1. *Statement of Commitment: The Bank's Board of Commissioners and Directors will formally express their commitment to enforcing the Code of Ethics throughout the organization in accordance with applicable regulations.*
2. *Dissemination of the Code of Ethics: The dissemination of the Code will occur in stages, with each official responsible for ensuring that this information is communicated to their respective teams.*
3. *Statement of Compliance: All Bank personnel must sign a Statement of Compliance affirming their understanding*



menegaskan kesadaran terhadap pemahaman dan penerapan Kode Etik.

4. *Coaching* oleh Pemimpin Unit Kerja: Pemimpin unit kerja akan melakukan *coaching* minimal sekali sebulan untuk memastikan pemahaman dan penerapan Kode Etik di lingkungan kerjanya.

Selain itu, Unit Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala akan melakukan Review terhadap perkembangan nilai-nilai inti dan memberikan rekomendasi untuk revisi berdasarkan dinamika yang terjadi dalam dunia perbankan.

KEBIJAKAN PENEGAKAN KODE ETIK

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam Kode Etik adalah tanggung jawab fundamental setiap individu di lingkungan perbankan. Untuk itu, kami menetapkan pedoman sebagai berikut:

1. Setiap karyawan Bank memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh karyawan bank maupun pihak terkait, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat merugikan reputasi bank.
2. Penggunaan hak untuk melapor harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan hanya dalam situasi di mana terdapat keyakinan kuat mengenai terjadinya pelanggaran. Pelaporan tidak boleh digunakan untuk merugikan reputasi individu secara tidak adil.
3. Tindakan yang dilakukan oleh karyawan bank dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik jika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Kode Etik ini.
4. Laporan mengenai dugaan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, dan harus mencakup identitas pelaku serta rincian yang jelas mengenai pelanggaran yang terjadi.
5. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. Namun, laporan harus disampaikan dengan jelas untuk memudahkan proses komunikasi dan penyelidikan.
6. Bank tidak akan mentolerir segala bentuk intimidasi yang berkaitan dengan laporan yang sah, termasuk tindakan balas dendam terhadap pelapor.
7. Pelaporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan kepada atasan langsung.
8. Jika atasan langsung diduga terlibat dalam pelanggaran atau tidak merespons laporan, pelapor dapat mengajukan laporan kepada Unit Kerja Penerima Laporan sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Sumber Daya Manusia untuk pelanggaran Etika Kerja.

and commitment to the Code of Ethics.

4. *Coaching by Work Unit Leaders: Work unit leaders will conduct coaching sessions at least once a month to reinforce understanding and implementation of the Code of Ethics within their teams.*

Additionally, the Compliance Work Unit will periodically assess the development of core values and provide recommendations for revisions in response to changes within the banking industry.

CODE OF ETHICS ENFORCEMENT POLICY

Compliance with the ethical principles outlined in the Code of Ethics is a fundamental responsibility of every individual within the banking environment. Therefore, we have established the following guidelines:

1. *Every bank employee has both the right and obligation to report suspected violations of the Code of Ethics. Such violations may be committed by bank employees or associated parties, whether intentionally or unintentionally, and may compromise the bank's reputation.*
2. *The right to report must be exercised responsibly and only in instances where there is a reasonable belief that a violation has occurred. Reporting should not be utilized to unjustly harm an individual's reputation.*
3. *Actions taken by bank employees will be deemed violations of the Code of Ethics if they contravene any provisions stipulated in this Code.*
4. *Reports of suspected violations may be submitted either verbally or in writing and must include the identity of the individual involved and detailed information regarding the violation.*
5. *The identity of the reporter will be kept confidential; however, the report must be clear to facilitate effective communication and investigation.*
6. *The bank will not tolerate any form of intimidation related to legitimate reports, including retaliation against the reporter.*
7. *Reports concerning suspected violations of the Code of Ethics may be made to the immediate supervisor.*
8. *If the immediate supervisor is suspected of involvement in the violation or fails to respond to the report, the reporter may submit a report to the following designated reporting units:*
 - a. *The Human Resources Unit for violations of the Code of Ethics.*



- b. Satuan Kerja Kepatuhan untuk pelanggaran Etika Usaha.
- c. Laporan juga dapat disampaikan melalui sistem Whistleblowing.
- d. Pastikan laporan mengacu pada buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan seluruh insan perbankan dapat menjaga integritas dan reputasi bank dengan sebaik-baiknya.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik merupakan pernyataan komitmen Bank Papua dalam mematuhi hukum dan standar etika tertinggi dalam setiap aspek kegiatan bisnis dan operasionalnya. Pengelolaan perusahaan tidak hanya diharuskan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai etika yang diakui. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh jajaran Bank Papua, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Karyawan. Kesadaran dan komitmen seluruh insan Bank Papua untuk menerapkan prinsip etika yang baik akan berkontribusi pada peningkatan dan penguatan reputasi perusahaan.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Jenis sanksi yang diberikan kepada insan Bank Papua, yaitu:

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan I.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan II.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan III.
- Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun.
- Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun.
- Penurunan *Grade* Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Penurunan *Grade* 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Pemutusan Hubungan Kerja.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Data jumlah pelanggaran kode etik dan trend pada tahun 2025 sebagai berikut:

- b. The Compliance Unit for violations of the Code of Business Ethics.
- c. Reports may also be submitted through the Whistleblowing system.
- d. Ensure that reports align with the Anti-Fraud Strategy Implementation Guidelines.

By adhering to these guidelines, we aim to uphold the integrity and reputation of the bank to the best of our collective ability.

CODE OF ETHICS STATEMENT APPLICABLE TO ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

The Code of Ethics embodies Bank Papua's commitment to adhering to legal requirements and maintaining the highest ethical standards across all business and operational activities. It is incumbent upon company management to not only comply with relevant regulations but also to uphold recognized ethical norms and values. This Code of Ethics is applicable to all levels of Bank Papua, including the Board of Commissioners, Directors, and all employees. The awareness and commitment of every employee to implementing sound ethical principles will significantly enhance and strengthen the company's reputation.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS

The following sanctions may be imposed on employees of Bank Papua for violations of the Code of Ethics:

- Verbal Warning
- Written Warning
- Written Warning in the Form of a Warning Letter I
- Written Warning in the Form of a Warning Letter II
- Written Warning in the Form of a Warning Letter III
- Temporary Salary Delay for a Maximum of One Year
- Delay in Promotion for a Maximum of One Year
- Demotion by One Level
- Demotion by Two Levels
- Termination of Employment

CODE OF ETHICS VIOLATIONS SUMMARY

The number of Code of Ethics violations in 2025 is outlined below:



No.	Uraian Sanksi	Pelanggaran					Description of Sanctions
		Fraud	SOP	Kode Etik/ Asusila	Indisiplin- er	To- tal	
1	Teguran Lisan		2		160	162	Verbal Warning
2	Teguran Tertulis		2		55	57	Written Warning
3	Surat Peringatan I.			4	40	44	Warning Letter I
4	Surat Peringatan II.		3	1	18	22	Warning Letter II
5	Surat Peringatan III.			1	8	9	Warning Letter III
6	Surat Perintatan Pertama dan Terakhir		15	8	2	25	First and Final Order Letters
7	Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun.						Periodic Salary Delay for a Maximum of 1 Year.
8	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun.						Delay in Promotion for a Maximum of 1 Year.
9	Penurunan Grade Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.	4			32	9	Demotion by One Level Lower than the Previous Rank.
10	Penurunan Grade 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.	4				4	Demotion by Two Levels Lower than the Previous Rank.
11	Pemutusan Hubungan Kerja.	11		1	3	15	Termination of Employment.
Jumlah		19	22	18	288	347	Total

Jumlah pelanggaran kode etik pada tahun 2024 sebagai berikut :

The number of violations of the code of ethics in 2024 is as follows:

No.	Uraian Sanksi	Pelanggaran					Description of Sanctions
		Fraud	SOP	Kode Etik/ Asusila	Indisiplin- er	To- tal	
1	Teguran Lisan	0	4	0	95	99	Verbal Rebuke
2	Teguran Tertulis	0	0	0	33	33	Written Warning
3	Surat Peringatan I.	0	2	1	17	20	Warning Letter I.
4	Surat Peringatan II.	0	9	0	14	23	Warning Letter II.
5	Surat Peringatan III.	0	1	0	9	10	Warning Letter III.
6	Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun.	0	0	0	0	0	Periodic salary deferral for a maximum of 1 year.
7	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun.	0	0	0	0	0	Postponement of promotion of a maximum of 1 year.
8	Penurunan Grade Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.	0	2	0	0	2	Lower Grade Grade Drop Than Previous Rank.
9	Penurunan Grade 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.	0	0	0	0	0	Drop of Grade 2 (Two) Levels Lower Than Previous Ranks.
10	Pemutusan Hubungan Kerja.	2	0	0	3	5	Work termination.
Jumlah		2	18	1	171	192	TOTAL

KECENDERONGAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 80,73% dalam pelanggaran kode etik oleh pegawai Bank Papua dibandingkan dengan tahun 2024. Total pelanggaran yang tercatat pada tahun 2025 adalah 347 kasus.

TRENDS IN CODE OF ETHICS VIOLATIONS

In 2025, there was a significant increase of 80.73% in code of ethics violations by Bank Papua employees compared to 2024. The total number of violations recorded in 2025 was 347 cases.



Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

Bank Papua adalah Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup, sehingga tidak memiliki program kepemilikan saham untuk Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Bank Papua is a privately held Limited Liability Company and, as such, does not offer an Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP).

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

DASAR PEMBENTUKAN

Sebagai wujud komitmen Bank Papua dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), bank ini berupaya untuk selalu mematuhi prinsip kewajaran dan kesetaraan, serta mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan pengaduan terkait pelanggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan kerugian bagi pemangku kepentingan dan bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas untuk mengatur mekanisme standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa berkepanjangan antara pemangku kepentingan dan bank. Dengan langkah ini, diharapkan masalah yang muncul tidak berkembang menjadi isu yang dapat merugikan reputasi bank dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

KEBERADAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Papua telah mengambil langkah strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) untuk mencegah penyimpangan dalam operasional, khususnya dalam hal penipuan (*Fraud*) yang dapat merugikan bank dan para pemangku kepentingan. Dalam upaya ini, Bank Papua telah menetapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai mekanisme yang memungkinkan karyawan dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara efektif.

Kebijakan terkait sistem ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 95/DIR-BPD/

BASIS FOR ESTABLISHMENT

In alignment with Bank Papua's commitment to Good Corporate Governance (GCG) principles, the bank aims to consistently uphold fairness and equality while prioritizing the interests of all stakeholders. Inadequate management of complaints related to violations can lead to significant losses for both stakeholders and the bank. Therefore, it is essential to establish clear guidelines that define a standard mechanism for addressing complaints of violations, thereby preventing prolonged disputes between stakeholders and the bank. This initiative is intended to avert the escalation of emerging issues that could adversely affect the bank's reputation and undermine public trust.

EXISTENCE OF A WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bank Papua has implemented strategic measures to uphold Good Corporate Governance (GCG) principles and prevent operational irregularities, particularly fraud, which could jeopardize the bank and its stakeholders. To facilitate this, Bank Papua has established a Whistleblowing System, allowing employees and the public to report violations effectively. The policy governing this system is outlined in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Furthermore, the system is regulated by Bank Papua's Regulations No. 95/DIR-BPD/XII/2012 and No. 123/



XII/2012 dan No. 123/DKBPD/2012, yang diterbitkan pada 14 Desember 2012. Sistem ini berfungsi sebagai saluran yang aman untuk melaporkan informasi terkait pelanggaran yang terindikasi terjadi di lingkungan Bank Papua, baik yang berkaitan dengan *Fraud* maupun non-*Fraud*.

Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran juga merupakan langkah strategis dalam menjamin perlindungan bagi pemangku kepentingan, serta memastikan penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang berlaku. Melalui sistem ini, Bank Papua berkomitmen untuk mendorong karyawan untuk menyampaikan laporan secara transparan tanpa adanya kekhawatiran terhadap risiko pembalasan.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, setiap pengaduan yang diterima akan ditangani secara profesional oleh tim independen, guna memastikan bahwa setiap isu diselesaikan secara efektif dan mendorong budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pengendalian internal dan manajemen risiko dalam sektor perbankan.

PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Papua berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/ WBS) sebagai bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dan strategi pencegahan *Fraud*. Tanggung jawab atas pelaksanaan WBS terletak pada Direktur Kepatuhan, yang telah menunjuk Pemimpin Departemen Anti *Fraud* sebagai pengelola utama sistem ini.

WBS dirancang untuk memfasilitasi pelaporan mengenai perilaku yang melanggar hukum atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, maupun mitra kerja Bank Papua. Sistem ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank, sekaligus memberikan jaminan kerahasiaan kepada para pelapor.

Standar Prosedur Strategi Anti *Fraud* (SPSAF) diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan WBS. Departemen Anti *Fraud* memiliki tugas untuk menerima, meninjau, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan mengacu pada prinsip 4W (What, Where, When, Who) dan 1H (How). Bank Papua juga bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mengelola WBS secara profesional dan independen,

DKBPD/2012, issued on December 14, 2012.

This system provides a secure channel for reporting information related to suspected violations within Bank Papua, encompassing both fraud-related and non-fraud-related concerns.

The implementation of the Violation Reporting System is a strategic measure to ensure stakeholder protection and guarantee that complaints are addressed in accordance with applicable laws and standards. Through this system, Bank Papua is dedicated to fostering a culture of transparency, encouraging employees to submit reports without fear of retaliation.

Each complaint received will be managed professionally by an independent team, ensuring effective resolution of issues while promoting a clean, transparent, and accountable work environment. This initiative is consistent with the provisions established in the Financial Services Authority (OJK) Regulation regarding internal control and risk management in the banking sector.

MANAGEMENT OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bank Papua is dedicated to implementing a Whistleblowing System (WBS) as a core component of its commitment to enhancing good corporate governance (GCG) and its fraud prevention strategy. The responsibility for the implementation of the WBS lies with the Director of Compliance, who has designated the Head of the Anti-Fraud Department as the primary manager of this system.

The WBS is designed to facilitate the reporting of unlawful or unethical behavior by Bank Papua's management, employees, or partners. This system aims to promote transparency and accountability in the bank's operations while ensuring the confidentiality of whistleblowers.

The Anti-Fraud Strategy Standard Procedure (SPSAF) has been established as a guideline for the implementation of the WBS. The Anti-Fraud Department is tasked with receiving, reviewing, and following up on reports of violations, in accordance with the 4W principles (What, Where, When, Who) and 1H (How). Bank Papua also collaborates with external parties to manage the WBS in



yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memberikan efek pencegahan terhadap tindakan *Fraud*.

Setiap laporan yang diterima harus mencakup rincian kejadian secara akurat dan didokumentasikan dengan baik. Hal ini mencerminkan komitmen Bank Papua untuk menjaga integritas dan keberlanjutan operasional sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Laporan pelanggaran di Bank Papua dapat disampaikan kepada Departemen Anti *Fraud*, yang berperan sebagai pengelola utama Whistleblowing System (WBS). Untuk memastikan pengolahan yang efektif, laporan pelanggaran wajib mencakup data dan informasi minimum sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor:
 - o Nama Lengkap
 - o Nomor Induk Kepegawaian (NIK)
 - o Tempat dan Tanggal Lahir
 - o Unit Kerja
 - o Tanda Tangan Pelapor
2. Uraian Pelanggaran:
 - o Deskripsi mengenai jenis dan bentuk pelanggaran yang dilaporkan.
3. Identitas Terlapor:
 - o Nama dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran.
4. Waktu dan Tempat Kejadian:
 - o Lokasi dan waktu terjadinya pelanggaran tersebut.
5. Dokumen Pendukung:
 - o Bukti-bukti berupa dokumen, catatan, atau informasi lain yang relevan untuk mendukung laporan.

Seluruh laporan yang diterima akan dikelola secara profesional dan transparan oleh petugas yang bertanggung jawab atas WBS. Setiap laporan akan didokumentasikan secara rinci dengan informasi sebagai berikut:

- Nomor Registrasi: Sebagai identifikasi laporan.
- Tanggal Penerimaan: Waktu saat laporan diterima.
- Petugas Penerima: Nama personel yang menerima laporan.
- Deskripsi Singkat: Gambaran umum mengenai isi laporan.

Melalui mekanisme ini, Bank Papua berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran diproses dengan profesionalisme, terorganisir, dan sesuai dengan

a professional and independent manner, with the goal of enhancing stakeholder trust and providing a deterrent effect against fraud.

Each report received must include accurate details of the incident and be properly documented. This underscores Bank Papua's commitment to maintaining operational integrity and sustainability in compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations.

SUBMITTING VIOLATION REPORTS

Violation reports at Bank Papua should be submitted to the Anti-Fraud Department, which serves as the primary administrator of the Whistleblowing System (WBS). To facilitate effective processing, violation reports must include the following essential information:

1. *Reporter's Identity:*
 - *Full Name*
 - *Employee Identification Number (NIK)*
 - *Place and Date of Birth*
 - *Work Unit*
 - *Reporter's Signature*
2. *Description of Violation:*
 - *A detailed account of the type and nature of the reported violation.*
3. *Identity of the Reported Party:*
 - *Names and affiliations of all parties involved in the violation.*
4. *Time and Place of Incident:*
 - *The specific location and time when the violation occurred.*
5. *Supporting Documents:*
 - *Evidence in the form of documents, records, or other pertinent information to substantiate the report.*

All received reports will be managed with professionalism and transparency by the designated officer responsible for the WBS. Each report will be meticulously documented, including the following information:

- *Registration Number: Serves as the report's identification.*
- *Receipt Date: The date on which the report was received.*
- *Receiving Officer: The name of the individual receiving the report.*
- *Brief Description: A concise overview of the report's contents.*

Through this process, Bank Papua is dedicated to ensuring that every violation report is handled professionally, in an



prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

organized fashion, and in alignment with the principles of Good Corporate Governance (GCG).



Aplikasi Whistleblowing System

Email:
wb.bankpapua@gmail.com

Surat:
Departemen Anti Fraud, Lantai 7
Gedung PT. Bank Pembangunan Daerah
Papua, Jl. A. Yani No. 5 - 7

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Bank Papua berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada whistleblower atau pelapor atas setiap laporan pelanggaran yang diterima. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, pekerjaan, dan fasilitas yang diterima oleh pelapor. Bank memastikan bahwa pelapor terlindungi dari ancaman, intimidasi, atau tindakan diskriminatif yang mungkin timbul akibat laporan yang disampaikan.

Hak perlindungan pelapor bertujuan untuk mendorong keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap dampak negatif. Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta informasi yang disampaikan dalam laporan. Perlindungan ini juga berlaku untuk keamanan pribadi dan keluarga pelapor dari ancaman fisik maupun mental.

Selain perlindungan internal, Bank Papua mengacu pada regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan meliputi keamanan fisik, kerahasiaan identitas, serta penyediaan fasilitas hukum bila diperlukan.

Sebagai bentuk apresiasi, Bank memberikan penghargaan kepada pelapor yang laporannya terbukti valid dan berdampak signifikan pada penyelamatan aset perusahaan atau pengurangan risiko pelanggaran. Namun, jika ditemukan laporan yang disampaikan dengan itikad buruk atau tanpa dasar yang jelas, pelapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, Bank Papua memastikan keberlanjutan budaya pelaporan yang transparan dan bertanggung jawab.

WHISTLEBLOWER PROTECTION POLICY

Bank Papua is dedicated to offering comprehensive protection to whistleblowers—individuals who report any violations they encounter. This protection encompasses physical safety, employment security, and access to necessary facilities for the reporting individual. The Bank is committed to safeguarding reporters against threats, intimidation, or discriminatory actions that may arise from their disclosures.

The right to protection for whistleblowers is designed to foster the courage to report alleged violations without fear of negative consequences. The Bank guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and the information provided in the report. This protection extends to the personal safety of both the reporter and their family from physical and psychological threats.

In addition to internal safeguards, Bank Papua complies with legal protection regulations as outlined in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. This legal framework includes provisions for physical security, confidentiality of identity, and access to legal assistance when necessary.

As a gesture of appreciation, the Bank will reward whistleblowers whose reports are substantiated and significantly contribute to the protection of company assets or the reduction of violation risks. Conversely, should a report be determined to have been submitted in bad faith or without a sound basis, the reporter will face sanctions in accordance with applicable regulations.

Through this approach, Bank Papua aims to maintain a transparent and responsible reporting culture.



JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Sistem Whistleblowing Bank Papua dirancang untuk menangani pengaduan atas berbagai pelanggaran yang mencakup dua kategori utama, yaitu *Fraud* dan *non-Fraud*. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

1. Fraud

Tindakan *Fraud* mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti:

- Kecurangan dan penipuan.
- Penggelapan aset.
- Pembocoran informasi rahasia Bank.
- Tindak pidana perbankan.
- Pelanggaran lain yang setara dengan *Fraud* sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Non-Fraud

Non-Fraud mencakup pelanggaran terhadap norma dan etika, termasuk:

- Penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.
- Tindakan yang merusak reputasi atau nama baik Bank.
- Perbuatan asusila, baik di dalam maupun di luar Bank.
- Pelecehan, penggunaan narkoba, dan keterlibatan dalam kegiatan yang dilarang.

Selain itu, lingkup pengaduan yang ditindaklanjuti mencakup:

- Pelanggaran hukum, seperti pemalsuan tanda tangan, korupsi, dan kerusakan barang.
- Pelanggaran etika, seperti benturan kepentingan atau tindakan yang bertentangan dengan pedoman etika Bank.
- Pelanggaran akuntansi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- Pelanggaran kebijakan operasional yang melanggar prosedur Bank.
- Kecurangan lain yang dapat mengakibatkan kerugian.
- Bahaya keselamatan kerja yang mengancam karyawan Bank.

Melalui sistem ini, Bank Papua memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilaporkan ditangani secara profesional, dengan menjaga kerahasiaan pelapor untuk mendorong keberanian dalam melaporkan tindakan yang tidak sesuai.

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

The Bank Papua Whistleblowing System is established to address complaints regarding various violations, categorized into two primary types: *fraud* and *non-fraud*. The types of violations eligible for reporting include:

1. Fraud

Fraudulent activities encompass a range of violations, including:

- *Cheating and deception*
- *Embezzlement of assets*
- *Leakage of confidential bank information*
- *Banking crimes*
- *Other violations equivalent to fraud as defined by laws and regulations*

2. Non-Fraud

Non-fraud violations pertain to breaches of norms and ethics, including:

- *Abuse of authority or position*
- *Actions that harm the bank's reputation or good name*
- *Indecent conduct, both within and outside the bank*
- *Harassment, drug use, and involvement in prohibited activities*

Additionally, the scope of complaints addressed by the system includes:

- *Legal violations, such as forged signatures, corruption, and property damage*
- *Ethical violations, including conflicts of interest or actions contrary to the Bank's ethical guidelines*
- *Accounting violations that do not adhere to applicable accounting principles*
- *Violations of operational policies that contravene Bank procedures*
- *Other fraudulent activities that may lead to financial loss*
- *Occupational safety hazards that pose a threat to Bank employees*

Through this system, Bank Papua is committed to ensuring that all reported violations are managed with professionalism while maintaining the confidentiality of the reporter, thereby fostering a culture of accountability and encouraging the reporting of inappropriate behavior.



PENANGANAN PENGADUAN

Bank Papua telah mengimplementasikan mekanisme sistematis dalam penanganan pengaduan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS). Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan pelanggaran ditangani dengan cara yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam proses ini:

1. Pelaporan Pelanggaran

Petugas Departemen *Anti Fraud* (DAF Officer) bertanggung jawab untuk menerima laporan pelanggaran yang disampaikan melalui aplikasi WBS. Laporan yang diajukan harus mencakup informasi yang relevan, termasuk identitas pelapor, deskripsi pelanggaran, lokasi kejadian, serta dokumen pendukung yang diperlukan.

2. Identifikasi Awal

Setelah laporan diterima, petugas berwenang melakukan identifikasi awal untuk memverifikasi keakuratan informasi dan memastikan bahwa laporan memenuhi kriteria untuk diproses lebih lanjut.

3. Rekomendasi dan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil identifikasi awal, rekomendasi disusun dan diajukan kepada pejabat berwenang. Pejabat terkait kemudian akan memeriksa dan mempertimbangkan rekomendasi tersebut untuk menentukan langkah tindak lanjut yang tepat.

4. Keputusan Tindak Lanjut

Apabila terdapat indikasi pelanggaran, proses akan dilanjutkan ke tahap investigasi, baik internal maupun eksternal. Investigasi ini melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau pihak eksternal untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam penyelidikan.

5. Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh hasil investigasi dan tindak lanjut akan didokumentasikan secara resmi, termasuk laporan hasil identifikasi dan surat pengantar. Hasil tersebut akan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Evaluasi dan Penyelesaian

Jika pelanggaran terbukti, keputusan mengenai sanksi atau tindakan korektif akan diambil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Papua. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik.

COMPLAINT HANDLING AT BANK PAPUA

Bank Papua has established a systematic approach for managing complaints through the *Whistleblowing System* (WBS) application. This process is designed to ensure that reports of violations are addressed effectively, transparently, and responsibly. The following steps outline this process:

1. Violation Reporting

The Anti-Fraud Division Officer (DAF Officer) is tasked with receiving violation reports submitted via the WBS application. Reports must include pertinent information such as the reporter's identity, a comprehensive description of the violation, the incident's location, and any necessary supporting documentation.

2. Initial Identification

Upon receipt of a report, the authorized officer conducts an initial assessment to verify the accuracy of the information and ensure that the report meets the criteria for further processing.

3. Recommendations and Examination

Based on the findings of the initial assessment, recommendations are prepared and submitted to the authorized official. The relevant official will review these recommendations to determine the appropriate follow-up actions.

4. Follow-up Decisions

If there are indications of violations, the process will advance to the investigation stage, which may be conducted either internally or externally. This investigation will involve the Internal Audit Unit (SKAI) or an external party to ensure accuracy and impartiality.

5. Documentation and Reporting

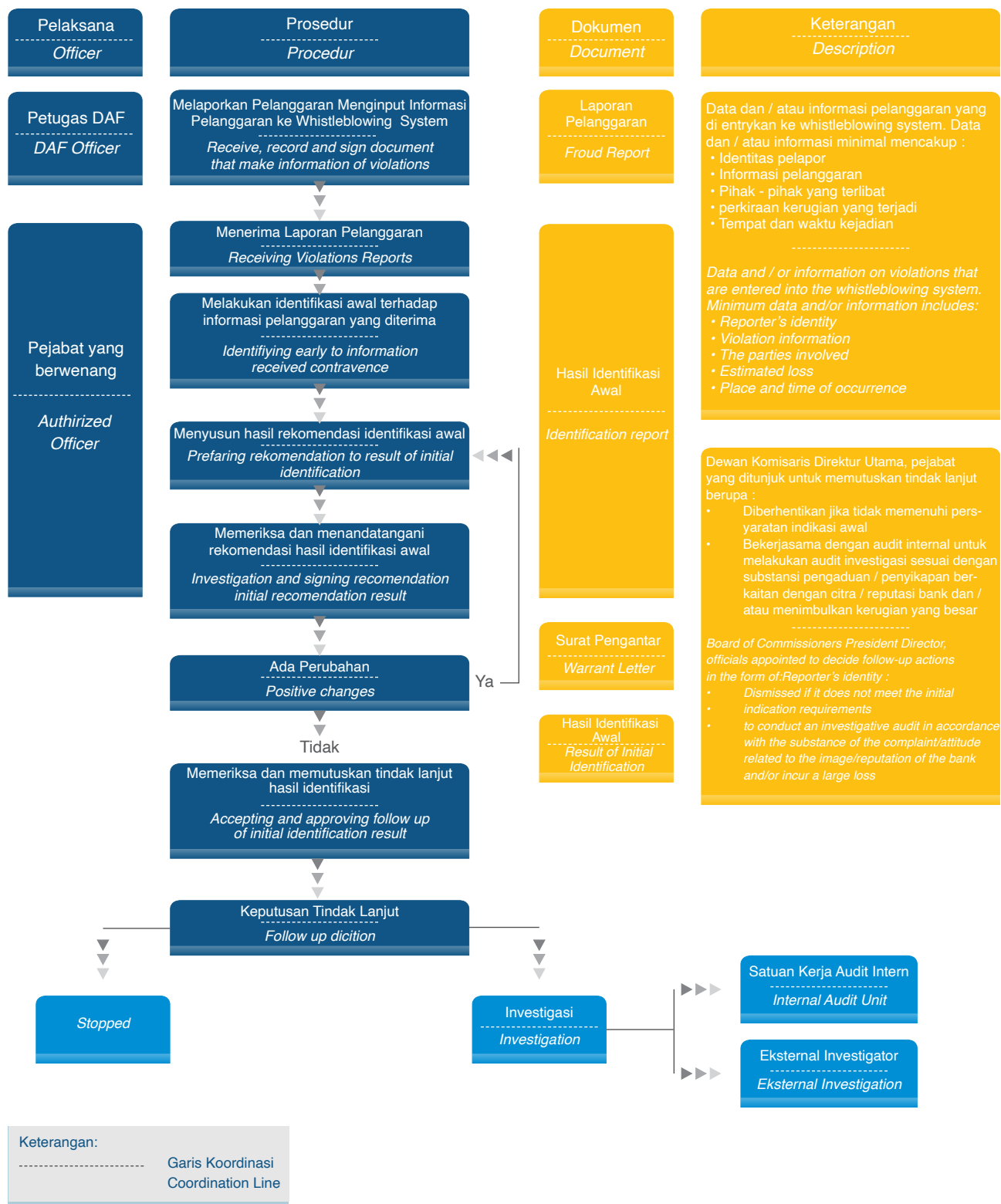
All investigation results and follow-up actions will be formally documented, including an identification report and a cover letter. These results will be communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, or other authorized parties in accordance with applicable regulations.

6. Evaluation and Resolution

If violations are substantiated, decisions regarding sanctions or corrective actions will be made in accordance with Bank Papua's policies. This process aims to enhance compliance and reinforce good corporate governance.



Pelaporan pelanggaran melalui Aplikasi Whistle blowing
Fraud Reporting through Whistleblowing System



Melalui proses yang terstruktur ini, Bank Papua berkomitmen untuk menangani setiap laporan pengaduan secara profesional, melindungi pelapor, serta mendorong budaya transparansi dan integritas dalam seluruh operasional Bank.

Through this structured process, Bank Papua is committed to professionally addressing every complaint report, protecting whistleblowers, and fostering a culture of transparency and integrity throughout its operations.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Bank diwajibkan untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Laporan Pelanggaran kepada seluruh pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua serta para pemangku kepentingan melalui berbagai media perusahaan, antara lain:

- Mencetak, mensosialisasikan, dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini;
- Situs web perusahaan;
- Forum internal pegawai;
- Aplikasi Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

PUBLICATION AND SOCIALIZATION

The Bank is mandated to disseminate the Violation Report Management Policy to all PT Bank Pembangunan Daerah Papua employees and stakeholders through various corporate channels, including:

- *Printing, promoting, and distributing the policy document;*
- *Company website;*
- *Internal employee forums;*
- *Implementation of PT Bank Pembangunan Daerah Papua's Anti-Fraud Strategy;*

JUMLAH LAPORAN MASUK MELALUI SISTEM WHISTLEBLOWING BANK PAPUA

Laporan yang diterima oleh Departemen Anti *Fraud* (DAF) sebagian besar dikirim melalui sistem Whistleblowing dalam bentuk Surat Resmi yang dikirim melalui email ke Departemen Anti *Fraud* (DAF).

NUMBER OF REPORTS RECEIVED THROUGH BANK PAPUA'S WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Anti-Fraud Department (DAF) primarily receives reports via the Whistleblowing system, which are submitted in the form of official letters sent through email.

Berikut adalah data sistem Whistleblowing selama tahun 2021 – 2025:

Below is the data from the Whistleblowing system for the years 2021 to 2025:

Data Whistleblowing System-Whistleblowing System Data			
Tahun	Jumlah Laporan Yang Masuk	Sudah Ditindaklanjuti (STL)	Belum Ditindaklanjuti (BTL)
2025	14	11	3
2024	18	12	6
2023	15	15	-
2022	21	21	-
2021	9	9	0

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Setelah memeriksa pengaduan yang diterima, jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

COMPLAINT FOLLOW-UP

Upon reviewing the complaints received, if violations are identified, appropriate sanctions will be imposed in accordance with applicable regulations.



EFEKTIVITAS DAN PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

1. Pengumpulan Data oleh Departemen Anti Fraud

Departemen *Anti Fraud* bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang mencakup:

- Jumlah laporan yang diterima.
- Jumlah laporan yang ditindaklanjuti.
- Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti beserta alasannya.

2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem

Departemen *Anti Fraud* juga menyusun analisis mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang meliputi:

- Perkembangan jumlah laporan yang diterima dari waktu ke waktu.
- Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.
- Usulan perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Setiap bulan, Departemen *Anti Fraud* menyusun laporan mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Kepatuhan serta Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Utama.

Untuk meningkatkan kesadaran dan mengoptimalkan fungsi yang ada, sosialisasi secara berkala dilaksanakan untuk seluruh pegawai. Metode sosialisasi ini mencakup penggunaan poster, buku saku, sesi berbagi, dan media lain yang mudah diakses.

Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, efektivitas yang terukur adalah kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dalam waktu relatif singkat dan dengan detail yang lebih mendalam. Hal ini sangat mempermudah proses pengawasan internal, terutama mengingat banyaknya aktivitas dan jumlah karyawan yang terlibat. Sistem ini juga berperan penting dalam mencegah atau mengurangi tindakan yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi perusahaan, seperti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

EFFECTIVENESS AND IMPROVEMENT OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Data Collection by the Anti-Fraud Department

The Anti-Fraud Department is tasked with the collection and analysis of data related to the implementation of the Whistleblowing System, which includes:

- The number of reports received.
- The number of reports followed up.
- The number of reports not followed up, along with the reasons for this.

2. Analysis of System Implementation Effectiveness

The Anti-Fraud Department also conducts an analysis of the effectiveness of the Whistleblowing System, which encompasses:

- Trends in the number of reports received over time.
- Trends in the number of reports that meet the criteria for follow-up.
- Recommendations for improvements to the implementation of the Whistleblowing System.

Each month, the Anti-Fraud Department prepares a report on the effectiveness of the Whistleblowing System and submits it to the Director of Compliance and the Board of Commissioners, with a copy provided to the President Director.

To enhance awareness and optimize existing functions, regular outreach programs are conducted for all employees. These outreach initiatives include the use of posters, handbooks, sharing sessions, and other accessible media.

The measurable effectiveness of this Whistleblowing System is defined by its ability to detect fraud in a timely and detailed manner. This significantly streamlines the internal oversight process, particularly given the extensive range of activities and the number of employees involved. Additionally, this system plays a vital role in preventing or mitigating actions that could lead to financial and non-financial losses for the company, including corruption, collusion, and nepotism.



Program Anti Korupsi

Anti-Corruption Program

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (KICKBACKS), FRAUD, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI

PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI

Bank Papua telah mengimplementasikan berbagai kebijakan terkait Pencegahan Korupsi, termasuk Penerapan Strategi Anti-Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (Kode Etik), Pedoman Mengenai Benturan Kepentingan, Budaya Perusahaan, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan praktik korupsi, terutama dalam konteks Benturan Kepentingan, Bank Papua telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Semua pihak, baik karyawan maupun pemimpin, diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.
2. Karyawan diharapkan untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dengan baik.
3. Dilarang bagi seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dianggap sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan mereka dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang diemban.
4. Dilarang menerima atau meminta gratifikasi yang dapat dianggap sebagai suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun, dalam rangka mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai dengan jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Karyawan memiliki kewajiban untuk menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

PROGRAMS AND PROCEDURES ESTABLISHED TO MITIGATE CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY, AND GRATUITY PRACTICES

CORRUPTION PREVENTION

Bank Papua has enacted a comprehensive suite of policies aimed at preventing corruption, which includes an anti-fraud strategy, a Code of Ethics governing ethical work and business conduct, guidelines for managing conflicts of interest, a corporate culture framework, gratuity policies, employee disciplinary regulations, market code of ethics guidelines, and protocols for maintaining data and information confidentiality.

To effectively address issues related to corrupt practices, particularly concerning conflicts of interest, Bank Papua has instituted the following measures:

1. All employees and leaders are required to adhere to the established Code of Ethics.
2. Employees must ensure the confidentiality of company information.
3. All personnel are prohibited from offering or promising gratuities, directly or indirectly, that may be construed as bribes to civil servants or state officials, particularly if such gifts pertain to their roles and conflict with their obligations or duties.
4. It is strictly forbidden to accept or solicit gratuities that may be viewed as bribes, either directly or indirectly, from any individual or entity, with the intention of influencing the policies, decisions, or treatment of Bank officials and employees in relation to their positions, authorities, and responsibilities.
5. Employees are obligated to decline any gratuities that could be perceived as bribes, regardless of whether they are received directly or indirectly.



IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI-FRAUD

Untuk mencegah penyimpangan operasional, khususnya kasus *Fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun institusi, Bank Papua berkomitmen menerapkan Strategi Anti-Fraud sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 yang ditetapkan pada 19 Desember 2019 mengenai penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, yang berfungsi sebagai panduan untuk pengendalian risiko *Fraud* secara menyeluruh.

Strategi Anti-Fraud di Bank Papua menuntut manajemen untuk secara proaktif mengalokasikan sumber daya yang memadai agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah preventif, deteksi dini, responsif, dan pemantauan yang terintegrasi ke dalam seluruh aspek operasional bank.

Sebagai wujud nyata dari komitmen dalam pengendalian *Fraud*, Bank Papua telah membentuk unit kerja khusus, yaitu Departemen Anti-Fraud, yang berada di bawah Divisi Audit Internal. Departemen ini bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Strategi Anti-Fraud melalui pemantauan, investigasi, dan pelaporan secara konsisten.

Pelaksanaan Strategi Anti-Fraud ini didukung oleh Surat Keputusan Direksi No. 47/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi PT BPD Papua. Dalam praktiknya, Bank Papua secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperkuat budaya integritas, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk melindungi aset bank, menjaga kepercayaan nasabah, serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik *Fraud*.

PENCEGAHAN

Pilar pencegahan merupakan komponen integral dari sistem pengendalian *Fraud* yang bertujuan untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*. Ini mencakup program kesadaran anti-Fraud, identifikasi kerawanan, serta penerapan prinsip Know Your Employee (KYE).

DETEKSI

Pilar deteksi berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menemukan potensi *Fraud* dalam kegiatan operasional

IMPLEMENTATION OF ANTI-FRAUD STRATEGY

To mitigate operational irregularities, particularly fraud cases that could adversely affect customers and the institution, Bank Papua is dedicated to executing an Anti-Fraud Strategy as part of its commitment to enhancing corporate governance. This initiative is in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 39/POJK.03/2019, issued on December 19, 2019, which outlines the implementation of the Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks and serves as a framework for comprehensive fraud risk management.

Bank Papua's Anti-Fraud Strategy mandates that management proactively allocate sufficient resources to ensure the effective and sustainable execution of the fraud control system. This approach includes preventive measures, early detection, responsive actions, and ongoing monitoring, all integrated into the bank's operations.

As a tangible demonstration of its commitment to fraud prevention, Bank Papua has established the Anti-Fraud Department within the Internal Audit Division. This department is tasked with ensuring the implementation of the Anti-Fraud Strategy through consistent monitoring, investigation, and reporting. The execution of this strategy is supported by the Board of Directors Decree No. 47/DIR-BPD/VII/2022, dated July 14, 2022, which outlines the Standard Operating Procedures (SOP) for the Organizational Structure of PT BPD Papua.

In practice, Bank Papua continuously enhances the effectiveness of internal controls, fosters a culture of integrity, and ensures compliance with applicable regulations. These efforts are aimed at safeguarding the bank's assets, maintaining customer trust, and fostering a fraud-free work environment.

PREVENTION

The prevention pillar is a crucial element of the fraud control system, focused on implementing strategic measures to mitigate the risk of fraud. This encompasses anti-fraud awareness programs, vulnerability assessments, and the application of the Know Your Employee (KYE) principle.

DETECTION

The detection pillar operates within the fraud control system to identify and recognize potential fraud in the Bank's operational activities. This includes the establishment



Bank. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan dan mekanisme whistleblowing, audit mendadak, serta sistem pemantauan (surveillance system) yang efektif.

INVESTIGASI, PELAPORAN, DAN SANKSI

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan komponen penting dari sistem pengendalian *Fraud* yang bertujuan untuk menggali informasi melalui proses investigasi, mengatur sistem pelaporan, serta menetapkan sanksi atas tindakan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berperan dalam sistem pengendalian *Fraud* dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta memastikan adanya mekanisme tindak lanjut terhadap insiden *Fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan keempat pilar tersebut harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank.
2. Kompleksitas kegiatan usaha.
3. Potensi, jenis, dan risiko *Fraud*.
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Keberhasilan penerapan strategi anti-*Fraud* secara menyeluruh sangat bergantung pada komitmen dan dedikasi Dewan Komisaris serta Direksi dalam menumbuhkan budaya dan kepedulian terhadap anti-*Fraud* di seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satu langkah penting adalah dengan menyusun komitmen tertulis yang dikenal sebagai Deklarasi Anti-*Fraud*, yang akan ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai di lingkungan Bank.

Tindakan pencegahan, deteksi, serta identifikasi terhadap potensi risiko kerawanan berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *Fraud* akan diimplementasikan dalam kebijakan dan mekanisme whistleblowing. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat mendeteksi secara dini terjadinya pelanggaran serta meningkatkan partisipasi pegawai, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaporkan pelanggaran, sehingga dapat berfungsi sebagai peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran di Bank Papua.

of whistleblowing policies and mechanisms, conducting unannounced audits, and maintaining an effective surveillance system.

INVESTIGATION, REPORTING, AND SANCTIONS

The investigation, reporting, and sanctions pillar is a vital aspect of the fraud control system, aimed at gathering information through investigative processes, establishing a reporting framework, and enforcing sanctions for fraudulent activities within the Bank's business operations.

MONITORING, EVALUATION, AND FOLLOW-UP

The monitoring, evaluation, and follow-up pillar contributes to the fraud control system by overseeing and assessing fraud incidents, ensuring an effective follow-up mechanism is in place.

The implementation of these four pillars must take into account several key considerations, including:

1. *The Bank's internal and external environment.*
2. *The complexity of business activities.*
3. *The potential, types, and risks associated with fraud.*
4. *The adequacy of necessary resources.*

The successful implementation of a comprehensive anti-fraud strategy relies significantly on the commitment and dedication of the Board of Commissioners and the Board of Directors to promote an anti-fraud culture and awareness throughout the organization. A critical step in this process is the development of a written commitment, referred to as the Anti-Fraud Declaration, to be signed by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of the Bank.

Prevention, detection, and identification of potential risks serve as an early warning system within operational processes. Findings indicative of fraud will be incorporated into the whistleblowing policy and mechanism, which is expected to facilitate early detection of violations and enhance the engagement of employees, customers, and other stakeholders in reporting discrepancies, thereby functioning as an early warning system for potential violations at Bank Papua.



Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud Incidents and Resolution Strategies

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh						Internal Fraud in 1 year
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
Jumlah <i>Fraud</i>	-	-	10	7	1	1	<i>Number of Frauds</i>
Telah diselesaikan	-	-	3	5	1	1	<i>Has been completed</i>
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	7	2	-	-	<i>In the process of internal settlement at the bank</i>
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	<i>Has been followed up through legal process</i>

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Penyuapan adalah fenomena umum dalam industri perbankan yang dapat berdampak signifikan pada kinerja dan keberlangsungan operasional bank. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bank Papua berkomitmen untuk mencegah penyuapan melalui penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penerapan SNI ISO 37001:2016 di Bank Papua dilakukan melalui serangkaian langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:** Kebijakan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi untuk menunjukkan komitmen manajemen dalam upaya pencegahan penyuapan.
- 2. Penunjukan Unit Kerja:** Bank Papua telah menunjuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai satuan kerja yang berwenang untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap praktik anti penyuapan.
- 3. Pelatihan Kesadaran:** Pelatihan mengenai SNI ISO 37001:2016 diadakan untuk seluruh Person in Charge (PIC) dari unit kerja terkait, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem manajemen anti penyuapan.
- 4. Penyusunan Ketentuan Internal:** Bank Papua telah menetapkan ketentuan internal yang jelas terkait sistem manajemen anti penyuapan untuk mendukung implementasi yang efektif.
- 5. Sosialisasi Anti Suap dan Gratifikasi:** Sosialisasi dilakukan kepada vendor bank mengenai kebijakan anti suap dan gratifikasi untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhubungan dengan Bank Papua memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.
- 6. Penandatanganan Pakta Integritas:** Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai Bank Papua

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

Bribery is a prevalent issue in the banking industry that can significantly affect the performance and sustainability of banking operations. In response to this challenge, Bank Papua is dedicated to preventing bribery through the implementation of SNI ISO 37001:2016 for Anti-Bribery Management Systems (ABMS). The implementation process at Bank Papua involves a series of strategic steps, including:

- 1. Establishment of an Anti-Bribery Management System Policy:** This policy, endorsed by all members of the Board of Directors, underscores management's commitment to preventing bribery.
- 2. Appointment of Work Units:** Bank Papua has established an Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) as the designated unit responsible for overseeing and ensuring adherence to anti-bribery practices.
- 3. Awareness Training:** Training on SNI ISO 37001:2016 is provided to all Persons in Charge (PIC) of relevant work units to enhance their knowledge and understanding of the anti-bribery management system.
- 4. Development of Internal Provisions:** Clear internal guidelines regarding the anti-bribery management system have been established to support effective implementation.
- 5. Anti-Bribery and Gratuity Socialization:** Engagement with the bank's vendors regarding the anti-bribery and gratuity policy has been conducted to ensure understanding and compliance among all parties involved with Bank Papua.
- 6. Signing of the Integrity Pact:** The Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees



menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap praktik anti penyuapan.

- 7. Audit oleh Badan Sertifikasi:** Pelaksanaan audit tahap 1 dan 2 oleh Badan Sertifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan telah diimplementasikan dengan baik.

Sebagai hasil dari langkah-langkah tersebut, Bank Papua berhasil memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Sertifikasi pada tanggal 18 Desember 2023. Di harapkan, sertifikat ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus dan pegawai mengenai risiko penyuapan dalam proses bisnis Bank Papua.
- 2. Peningkatan Kepercayaan:** Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* terhadap layanan yang diberikan oleh Bank Papua.
- 3. Peningkatan Kinerja Bisnis:** Mendorong peningkatan kinerja bisnis Bank Papua secara keseluruhan.

Dengan demikian, Bank Papua berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan integritas dalam setiap aspek operasionalnya.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank Papua menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengendalian gratifikasi yang terstruktur dan efektif. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 69/DIR-BPD/X/2018 mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta Surat Keputusan Direksi No. 83/DIR-BPD/XII/2018 yang menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bank Papua. Seluruh karyawan Bank Papua diwajibkan untuk tidak memberikan atau menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

PROGRAM KERJA PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2025:

- 1. Penandatanganan Pakta Integritas:** Semua pegawai Bank Papua telah menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi.
- 2. Pelaporan Gratifikasi:** Bank menyediakan dua saluran pelaporan sebagai berikut:
Email: divisi.kph@bankpapua.co.id

of Bank Papua have signed the Integrity Pact, affirming their commitment to anti-bribery practices.

- 7. Audit by the Certification Body:** *The Certification Body has conducted phases 1 and 2 of the audit process to confirm the proper implementation of the anti-bribery management system.*

As a result of these strategic actions, Bank Papua successfully obtained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certificate from the Certification Body on December 18, 2023. This certification is anticipated to yield the following benefits:

- 1. Increased Awareness:** *Enhanced awareness among management and employees regarding the risks of bribery within Bank Papua's business processes.*
- 2. Increased Trust:** *Improved confidence among stakeholders and shareholders in the services provided by Bank Papua.*
- 3. Improved Business Performance:** *Enhanced overall business performance for Bank Papua.*

Consequently, Bank Papua is committed to continuously upholding the principles of transparency and integrity in all facets of its operations.

GRATUITY POLICY OF BANK PAPUA

Bank Papua is dedicated to upholding robust corporate governance through the implementation of structured and effective gratuity control measures. This policy is outlined in Board of Directors Decree No. 69/DIR-BPD/X/2018 regarding Gratuity Control Guidelines, as well as Board of Directors Decree No. 83/DIR-BPD/XII/2018, which mandates the establishment of a Gratuity Control Unit within the bank.

All employees of Bank Papua are required to refrain from giving or accepting gifts or gratuities in any form that may result in a conflict of interest.

GRATUITY CONTROL WORK PROGRAM FOR 2025:

- 1. Signing of the Integrity Pact:** *All employees of Bank Papua have signed an Integrity Pact, affirming their commitment to the gratuity control policy.*
- 2. Gratuity Reporting:** *The bank provides two reporting channels:
Email: divisi.kph@bankpapua.co.id*



3. **Penyebaran Banner Gratifikasi:** Banner yang menjelaskan kebijakan gratifikasi telah dipasang di seluruh Kantor Cabang Bank Papua.
4. **Publikasi Anti Gratifikasi:** Informasi terkait pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan telah dipublikasikan melalui *website* resmi Bank Papua.

3. **Distribution of Gratuity Banners:** Informational banners detailing the gratuity policy have been prominently displayed at all Bank Papua branch offices.
4. **Anti-Gratification Publication:** Information regarding gratuity control and anti-bribery measures has been published on Bank Papua's official website.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank Papua secara aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak mengenai pentingnya pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme di lingkungan Bank Papua.

GRATUITY POLICY SOCIALIZATION

Bank Papua actively promotes its gratuity policy to both internal and external stakeholders. This initiative aims to enhance understanding of the importance of gratuity control as part of the bank's commitment to maintaining integrity, transparency, and professionalism.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

Selama tahun 2025, terdapat 656 (enam ratus lima puluh enam) laporan penerimaan gratifikasi yang telah mendapatkan penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

2025 GRATIFICATION REPORTS

In 2025, the Corruption Eradication Commission (KPK) identified 656 reports of gratification receipts as non-reportable.

Tahun Year	Jumlah laporan yang Masuk (Divisi dan Kantor Cabang) Number of Incoming reports (Divisions and Branch Offices)	Sudah Ditindaklanjuti/Sanksi Has been followed up/sanctioned	Belum Ditindaklanjuti/ Dalam Proses Not Followed Up/In Process
2025	656	1	-
2024	119	-	-
2023	118	-	-
2022	102	-	-

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Pada tahun 2025, program pelatihan dan sosialisasi pencegahan korupsi belum dilaksanakan karena bank belum memiliki aturan internal yang mengatur mengenai pencegahan korupsi.

Sesuai dengan rencana kerja Divisi Kepatuhan tahun 2025, Divisi Kepatuhan akan melaksanakan ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sehingga bank memiliki standar ketentuan dan aturan terkait anti penyuapan (gratifikasi dan suap).

ANTI-CORRUPTION TRAINING AND EMPLOYEE AWARENESS

In 2025, the implementation of corruption prevention training and outreach programs was not executed due to the absence of internal regulations governing corruption prevention at the bank. In alignment with the Compliance Division's work plan for 2025, the Compliance Division will implement ISO 37001, which relates to the Anti-Bribery Management System (ABMS). This initiative aims to establish standardized provisions and regulations pertaining to anti-bribery, including measures against gratification and bribery.



Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bank Papua

Management of Bank Papua's State Officials' Wealth Reports (LHKPN)

Sebagai wujud komitmen Bank Papua dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, kami mematuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh pejabat yang termasuk dalam kategori wajib lapor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bank Papua telah mengimplementasikan kebijakan internal yang memastikan seluruh jajaran pejabat, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya yang diwajibkan oleh peraturan, untuk menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Proses pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KPK, yaitu e-LHKPN, yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data yang disampaikan.

As part of Bank Papua's commitment to promoting transparency, accountability, and integrity in good corporate governance, we adhere to the obligation of reporting assets by officials classified as mandatory reporters in accordance with applicable regulations. This initiative aligns with Law Number 28 of 1999 regarding Clean and Corruption-Free State Administration, as well as Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation Number 2 of 2020 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports (LHKPN).

Bank Papua has established an internal policy that mandates all officials, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and other executive officials required by regulations, to submit their LHKPNs promptly and in accordance with established procedures. The reporting process is facilitated through the KPK's electronic system, e-LHKPN, which aims to streamline reporting and enhance the efficiency and accuracy of the submitted data.

TUJUAN PELAPORAN LHKPN DI BANK PAPUA:

1. Meningkatkan Integritas: Mendorong seluruh pejabat Bank Papua untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan mereka.
2. Memitigasi Risiko *Fraud*: Mengidentifikasi dan mencegah potensi konflik kepentingan dalam kegiatan operasional Bank.
3. Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan seluruh pejabat mematuhi peraturan yang mengatur pelaporan harta kekayaan.

Bank Papua juga aktif memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada pejabat yang wajib melaporkan harta

OBJECTIVES OF LHKPN REPORTING AT BANK PAPUA:

1. *Enhancing Integrity: Promoting transparency among all Bank Papua officials in the management of their assets.*
2. *Mitigating Fraud Risk: Identifying and preventing potential conflicts of interest in the Bank's operational activities.*
3. *Regulatory Compliance: Ensuring that all officials adhere to regulations governing asset reporting.*

Bank Papua actively provides support and outreach to officials required to report their assets, facilitating a



kekayaannya, guna memastikan proses pelaporan berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap pelaporan ini dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Bank Papua untuk memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPK.

Melalui pelaksanaan LHKPN yang konsisten dan tepat waktu, Bank Papua menegaskan komitmennya dalam menciptakan budaya kerja yang transparan serta mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

smooth reporting process. Oversight of this reporting is conducted by the Bank Papua Compliance Division to ensure conformity with the provisions established by the Corruption Eradication Commission (KPK).

Through consistent and timely LHKPN submissions, Bank Papua reaffirms its commitment to fostering a transparent work culture and supporting initiatives aimed at eradicating corruption in Indonesia.

REKAP WAJIB LAPOR LHKPN TAHUN 2024						
PT Bank Pembangunan Daerah Papua						
NO.	JABATAN	JUMLAH PEJABAT	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	POSITION
1	DEWAN KOMISARIS	5	4	4	0	BOARD OF COMMISSIONERS
2	ANGGOTA KOMITE	3	3	3	0	COMMITTEE MEMBER
3	DIREKSI	5	5	5	0	BOARD OF DIRECTORS
4	STAF AHLI GCG	-	-	-	-	GCG EXPERT STAFF
5	PEMIMPIN DIVISI	17	17	17	0	DIVISION LEADER
6	PEMIMPIN KANTOR CABANG UTAMA	6	6	6	0	MAIN BRANCH OFFICE LEADER
7	WAKIL PEMIMPIN KANTOR CABANG UTAMA	6	6	6	0	DEPUTY MAIN BRANCH OFFICE LEADER
8	PEMIMPIN KANTOR CABANG	37	36	36	0	BRANCH OFFICE LEADER
9	PENSIUNAN	1	1	1	0	RETIRED
TOTAL		80	78	78	0	
PERSENTASE			100%	100%	0%	

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan atau Politik

Funding for Social and Political Activities

Uraian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan akan disampaikan dalam Laporan Berkelanjutan tahun 2025. Sementara itu, selama tahun 2025, Bank Papua tidak memberikan dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

A description of the company's commitment to social responsibility will be included in the 2025 Sustainability Report. In the interim, Bank Papua will refrain from providing funding for political activities or political parties throughout 2025.



Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Parties and Allocation of Substantial Resources

KEBIJAKAN

Bank Papua menerapkan kebijakan ketat dalam penyediaan dana kepada berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, serta pihak terkait atau yang terafiliasi. Setiap penyediaan dana harus memenuhi syarat yang wajar dan mematuhi ketentuan serta prosedur perkreditan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 93 POJK No. 17 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 14 September 2023, mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah risiko kegagalan usaha Bank akibat konsentrasi penyediaan dana serta meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris dari potensi intervensi pihak terkait.

PROSEDUR

Penyediaan dana kepada pihak terkait, serta penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposures*), harus mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, serta ketentuan internal Bank. Setiap penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Transaksi yang dilakukan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disertai dengan keterbukaan informasi kepada publik, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, serta POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua tidak pernah melanggar atau melebihi batas maksimum pemberian kredit yang telah ditetapkan. Bank juga telah secara berkala menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pemantauan BMPK. Berikut adalah tabel yang menjelaskan penyediaan dana kepada

POLICY

Bank Papua enforces stringent policies regarding the allocation of funds to various stakeholders, including members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, and affiliated parties. Each allocation of funds must adhere to reasonable criteria and comply with applicable credit regulations and procedures. In implementing this policy, the Bank is mandated to uphold prudent principles, including the distribution and diversification of its funding portfolio. This policy is in accordance with Article 93 of OJK Regulation No. 17 of 2023, enacted on September 14, 2023, concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The objective of this regulation is to mitigate the risk of bank failure due to concentrated funding and to strengthen the independence of the Board of Directors and Board of Commissioners from potential interference by related parties.

PROCEDURES

The provision of funds to related parties, as well as the allocation of large exposures, must adhere to the legal lending limit (LLL) outlined in OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018 regarding the Legal Lending Limit and Large Exposures for Commercial Banks, in addition to the Bank's internal regulations. Each provision of funds to related parties requires prior approval from the Board of Commissioners. All transactions must be reported to the Financial Services Authority (OJK) and include public disclosure, in compliance with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, and OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

Throughout 2025, Bank Papua did not violate or exceed the established legal lending limit. The Bank has also consistently submitted reports to the OJK regarding its LLL monitoring. The table below details the provision of funds to



pihak terkait, serta debitur individu dan grup di Bank Papua selama tahun 2025.

related parties, as well as individual and group debtors at Bank Papua during 2025.

No	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal (Rp)	Provision of Funds
1.	Kepada Pihak Terkait	9	468,344	To Related Parties
2.	Kepada Debitur Inti	25	6,625,585	To Core Debtors
	a. Individu			a. Individual
	b. Grup			b. Group
	Jumlah	34		Amount

Rencana Strategis Bank

Bank Strategic Plan

Memasuki tahun 2026, Bank Papua menetapkan arah strategi yang terintegrasi antara pertumbuhan bisnis, penguatan tata kelola, serta transformasi digital guna menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif. Strategi ini selaras dengan *Corporate Plan* 2023–2027, dengan fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

Bank Papua mengedepankan penguatan platform bisnis dan akselerasi pertumbuhan sektor unggulan sebagai pilar utama strategi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kredit produktif, perluasan basis nasabah, serta optimalisasi ekosistem layanan keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Di sisi lain, Bank tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengendalian risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan strategis serta mencapai visi sebagai bank regional yang kuat, terpercaya, dan berdaya saing, Bank Papua menetapkan langkah-langkah strategis tahun 2026 yang terintegrasi antara penguatan bisnis, pengelolaan risiko, transformasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, peningkatan nilai perusahaan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

Entering 2026, Bank Papua has established an integrated strategic direction that encompasses business growth, governance strengthening, and digital transformation to address the increasingly competitive dynamics of the banking industry. This strategy aligns with the 2023–2027 Corporate Plan, which focuses on creating sustainable added value, increasing competitiveness, and making a tangible contribution to economic development in Papua.

Bank Papua prioritizes strengthening its business platform and accelerating the growth of leading sectors as key pillars of its strategy. This is realized through the development of productive credit, expanding its customer base, and optimizing the financial services ecosystem, including the utilization of digital technology and strategic collaboration with various parties. Meanwhile, the Bank maintains a balance between business expansion and risk management through the application of prudential principles and strong governance.

To realize this strategic policy direction and achieve its vision as a strong, trusted, and competitive regional bank, Bank Papua has established integrated strategic steps for 2026 that encompass business strengthening, risk management, digital transformation, and human resource development. This strategy is aimed at ensuring healthy growth, increasing company value, and making a tangible contribution to economic development in Papua.



1. Penguatan Permodalan dan Sinergi Pemerintah Daerah

Bank Papua memprioritaskan penguatan ketahanan kelembagaan melalui optimalisasi permodalan hingga mencapai komitmen Rp4 triliun. Upaya ini dilakukan melalui intensifikasi komunikasi dengan pemegang saham, monitoring realisasi setoran modal secara berkala, serta pelaksanaan *government engagement* dengan pemerintah daerah. Selain itu, Bank secara aktif bersinergi dengan program Pemerintah Daerah melalui pengembangan layanan seperti CMS Kasda, payroll, Samsat Digital Nasional, serta berbagai solusi transaksi non-tunai. Implementasi program CSR berbasis RAKB, inovasi layanan digital pemerintah, serta pengembangan sektor ekonomi lokal seperti kopi, rumput laut, dan kehutanan berkelanjutan turut menjadi bagian dari strategi peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Human Capital Development yang Berkelanjutan

Pengembangan SDM menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Bank Papua menerapkan strategi penyediaan SDM berkualitas melalui rekrutmen berbasis kebutuhan organisasi, implementasi *talent management*, serta program asesmen kompetensi secara berkelanjutan. Selain itu, Bank memperkuat sistem manajemen kinerja, meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta mendorong peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur guna menciptakan SDM yang profesional, adaptif, dan berorientasi kinerja.

3. Pengembangan Produk dan Layanan Berbasis Kebutuhan Nasabah

Bank Papua terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk guna memperkuat loyalitas nasabah dan meningkatkan daya saing. Strategi ini dilakukan melalui pengembangan produk berbasis riset pasar, peningkatan fee based income melalui digitalisasi layanan, serta pembentukan ekosistem bisnis melalui kemitraan dengan institusi pemerintah dan swasta. Optimalisasi jaringan distribusi seperti ATM, EDC, CDM, dan Laku Pandai, serta evaluasi berkala terhadap kinerja produk dan layanan menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas layanan yang prima dan berkelanjutan.

1. Capital Strengthening and Regional Government Synergy

Bank Papua prioritizes strengthening institutional resilience by optimizing capital to reach a commitment of IDR 4 trillion. This effort is carried out through intensified communication with shareholders, regular monitoring of capital contribution realization, and government engagement with regional governments. Furthermore, the Bank actively synergizes with regional government programs through the development of services such as the Kasda CMS (Central Cash Management System), payroll, the National Digital Samsat (Sat Digital), and various cashless transaction solutions. The implementation of a CSR program based on the Regional Budget (RAKB), innovative government digital services, and the development of local economic sectors such as coffee, seaweed, and sustainable forestry are also part of the strategy to increase contributions to Regional Original Income (PAD).

2. Sustainable Human Capital Development

Human resource development is a key foundation in supporting business growth. Bank Papua implements a strategy to provide quality human resources through needs-based recruitment, talent management implementation, and ongoing competency assessment programs. Furthermore, the Bank strengthens its performance management system, improves employee welfare, and encourages competency development through structured education and training to create professional, adaptive, and performance-oriented human resources.

3. Customer-Based Product and Service Development

Bank Papua continues to improve service quality and product innovation to strengthen customer loyalty and enhance competitiveness. This strategy is implemented through market research-based product development, increasing fee-based income through service digitization, and establishing a business ecosystem through partnerships with government and private institutions. Optimizing distribution networks such as ATMs, EDCs, CDMs, and Laku Pandai, as well as regular evaluation of product and service performance, are crucial to ensuring excellent and sustainable service quality.



4. Transformasi Teknologi Informasi dan Penguatan MIS

Dalam menghadapi era digital, Bank Papua memperkuat kapabilitas teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah, korporasi, dan masyarakat. Pengembangan CMS, *payment point*, QRIS, *e-wallet*, serta digitalisasi layanan kredit menjadi fokus utama. Selain itu, Bank mengembangkan sistem *Management Information System* (MIS) berbasis data melalui Datafarm untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan nasabah.

5. Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan

Bank Papua memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* melalui peningkatan pemahaman tata kelola di seluruh lini organisasi. Penguatan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring risiko secara komprehensif, termasuk pengawasan NPL, optimalisasi PRC dan LED, serta implementasi *risk-based approach* berbasis teknologi. Pelaporan risiko seperti Profil Risiko, KPMM, ICAAP, dan *Risk Appetite* disajikan secara komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan penguatan ketahanan Bank.

Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis tersebut mencerminkan komitmen Bank Papua dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengendalian risiko, memperkuat struktur permodalan, serta mendorong transformasi digital yang inklusif. Dengan sinergi antara inovasi, tata kelola yang kuat, dan pengembangan SDM, Bank Papua optimistis dapat meningkatkan kinerja secara berkelanjutan serta memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi di Tanah Papua.

4. Information Technology Transformation and MIS Strengthening

In facing the digital era, Bank Papua is strengthening its information technology capabilities to support the needs of local governments, corporations, and the public. The development of a CMS, payment points, QRIS, e-wallet, and the digitization of credit services are key focuses. Furthermore, the Bank is developing a data-driven Management Information System (MIS) through Datafarm to support more accurate decision-making, improve risk management, and accelerate response to customer needs.

5. Strengthening Governance, Risk Management, and Compliance

Bank Papua ensures that all operational activities are conducted in accordance with Good Corporate Governance principles by enhancing the understanding of governance across the organization. Strengthening risk management is carried out through a comprehensive process of risk identification, measurement, mitigation, and monitoring, including monitoring of Non-Performing Loans (NPLs), optimizing PRC and LED, and implementing a technology-based risk-based approach. Risk reporting, such as the Risk Profile, CAR, ICAAP, and Risk Appetite, is presented comprehensively as a basis for strategic decision-making and strengthening the Bank's resilience.

Overall, these strategic steps reflect Bank Papua's commitment to maintaining a balance between business growth and risk management, strengthening its capital structure, and driving an inclusive digital transformation. With the synergy between innovation and strong governance,

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Share Buybacks and Bond Buybacks

Selama tahun 2025, Perseroan tidak *melaksanakan* pembelian kembali *saham* maupun obligasi.

In 2025, the Company will refrain from conducting any share or bond buybacks.



Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Involving Conflicts of Interest

Sepanjang tahun 2025, tidak terjadi benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank.

Throughout 2025, there were no conflicts of interest involving company management that could potentially lead to losses for the Bank.

Perselisihan Internal

Internal Disputes

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua tidak mengalami perselisihan internal yang signifikan, termasuk intervensi dari pemegang saham terkait kebijakan remunerasi yang telah diterapkan. Meskipun demikian, pengawasan dan evaluasi kinerja Perseroan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

In 2025, Bank Papua did not encounter any substantial internal disputes, including shareholder interventions concerning the remuneration policy. However, the Company's performance monitoring and evaluation proceeded in alignment with the provisions established during the General Meeting of Shareholders (GMS).

Kebijakan Insider Trading

Insider Trading Policy

Insider trading adalah praktik ilegal yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik mengenai suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum perdana (IPO). Informasi tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dijelaskan bahwa "orang dalam di suatu emiten yang memiliki informasi dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: (a) emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, (b) perusahaan lain yang bertransaksi efek dengan emiten tersebut."

Bank Papua tidak memiliki kebijakan terkait insider trading, mengingat perusahaan ini belum menjadi perusahaan publik atau melakukan penawaran saham kepada publik (IPO).

Insider trading refers to the illegal practice of individuals exploiting non-public information about a company that has undergone an initial public offering (IPO) for personal profit. According to Law No. 8 of 1995 regarding Capital Markets (UUPM), "insiders of an issuer who possess information are prohibited from purchasing or selling securities of: (a) the issuer or public company concerned, (b) other companies transacting securities with the issuer." Currently, Bank Papua does not have a formal policy on insider trading, as the organization has not yet transitioned into a public company or conducted an initial public offering (IPO).



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

Sebagai bagian dari industri perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan transparansi dalam semua aspek operasionalnya. Komitmen ini mencakup keterbukaan dalam laporan keuangan dan penyampaian informasi non-keuangan yang relevan, guna memastikan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

OJK, melalui Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, mewajibkan bank umum, termasuk Bank Papua, untuk mempublikasikan laporan keuangan dan non-keuangan secara berkala agar dapat diakses oleh masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bank Papua memastikan bahwa informasi mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan disampaikan secara jelas, akurat, dan tepat waktu melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs resmi (www.bankpapua.co.id), laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta publikasi di media massa.

1. TRANSPARANSI KEUANGAN

Transparansi keuangan di Bank Papua mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan yang dipublikasikan secara berkala dalam berbagai bentuk laporan.

Jenis Laporan Transparansi Keuangan Bank Papua:

- **Laporan Keuangan Publikasi:** Laporan keuangan triwulanan dan tahunan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, serta rasio keuangan utama seperti Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Kredit Bermasalah (NPL), dan *Return on Assets* (ROA).
- **Laporan Tahunan (Annual Report):** Memuat informasi tentang kinerja keuangan, strategi bisnis, serta aspek tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank Papua sepanjang tahun.
- **Laporan Transparansi Perbankan:** Bank Papua mengungkapkan informasi mengenai struktur permodalan, eksposur risiko kredit, suku bunga dasar

As a member of the banking sector regulated by the Financial Services Authority (OJK), Bank Papua is dedicated to upholding transparency across all operational facets. This dedication encompasses the clear presentation of financial reports and the timely disclosure of pertinent non-financial information to promote accountability, foster public trust, and enhance the stability of the financial system.

In accordance with OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 on the Transparency and Publication of Bank Reports, commercial banks, including Bank Papua, are mandated to regularly publish both financial and non-financial reports for the benefit of the public, investors, and other stakeholders.

Bank Papua is committed to ensuring that information regarding its financial and non-financial conditions is conveyed clearly, accurately, and promptly through various communication channels, including its official website (www.bankpapua.co.id), annual reports, sustainability reports, and publications in the mass media.

1. FINANCIAL TRANSPARENCY

Bank Papua is committed to financial transparency, which accurately reflects its financial condition and performance. This information is published periodically across various reports. Types of Financial Transparency Reports from Bank Papua include:

- **Published Financial Reports:** These include quarterly and annual financial reports featuring the balance sheet, income statement, and cash flow statement, as well as key financial ratios such as the Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan Ratio (NPL), and Return on Assets (ROA).
- **Annual Report:** This report provides insights into the financial performance, business strategy, and corporate governance practices implemented by Bank Papua over the year.
- **Banking Transparency Report:** Bank Papua discloses information regarding its capital structure, credit risk exposure, prime lending rate (SBDK), and other



kredit (SBDK), dan informasi keuangan lainnya sesuai ketentuan OJK.

- **Laporan Pengelolaan Risiko Keuangan:** Bank Papua secara berkala melaporkan pengelolaan risiko terkait kredit, pasar, likuiditas, dan operasional untuk memastikan ketahanan bank terhadap kondisi pasar yang dinamis.

Semua laporan keuangan ini dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi Bank Papua (www.bankpapua.co.id) atau melalui publikasi di media massa.

financial details in compliance with OJK regulations.

- *Financial Risk Management Report: This report outlines Bank Papua's approach to managing risks associated with credit, market, liquidity, and operations, ensuring the bank's resilience in dynamic market conditions.*

All financial reports are accessible to the public through the official Bank Papua website (www.bankpapua.co.id) or via publications in the mass media.

2. TRANSPARANSI NON-KEUANGAN

Selain informasi keuangan, Bank Papua juga berkomitmen untuk mengungkapkan berbagai aspek non-keuangan yang relevan dengan tata kelola dan operasional bank.

Jenis Laporan Transparansi Non-Keuangan Bank Papua:

- **Laporan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG):** Laporan ini menguraikan penerapan prinsip tata kelola yang baik di Bank Papua, termasuk kebijakan manajemen risiko, keberadaan komite di bawah direksi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- **Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report):** Bank Papua menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup inisiatif lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kebijakan inklusi keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- **Laporan Kepatuhan dan Manajemen Risiko:** Bank Papua menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilaporkan ke OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bank juga memastikan pemenuhan standar kepatuhan melalui laporan pelaksanaan manajemen risiko.
- **Pelaporan kepada OJK:** Bank Papua wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK yang mencakup laporan pengawasan perbankan, laporan pemenuhan ketentuan modal minimum, serta pelaporan berbagai indikator operasional lainnya.
- **Laporan Pengaduan Konsumen:** Dalam rangka perlindungan nasabah, Bank Papua memiliki sistem pelaporan pengaduan yang terdokumentasi dan dipublikasikan dalam laporan tahunan serta situs resmi bank.
- **Laporan Akses Informasi Publik:** Sebagai bentuk keterbukaan, Bank Papua menyediakan informasi terkait layanan perbankan, kebijakan kredit, dan program inklusi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

2. NON-FINANCIAL TRANSPARENCY

In addition to financial disclosures, Bank Papua is dedicated to providing various non-financial information pertinent to its governance and operations. The types of Non-Financial Transparency Reports published by Bank Papua include:

- **Good Corporate Governance (GCG) Report:** *This report details the implementation of good governance principles at Bank Papua, encompassing risk management policies, the establishment of committees under the board of directors, and compliance with regulatory standards.*
- **Sustainability Report:** *Bank Papua prepares a sustainability report that addresses environmental initiatives, corporate social responsibility (CSR) efforts, and financial inclusion policies aimed at promoting sustainable development.*
- **Compliance and Risk Management Report:** *Bank Papua enforces an Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CFT) Program, which is reported to the Financial Services Authority (OJK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The bank also ensures adherence to compliance standards through a risk management implementation report.*
- **Reporting to the Financial Services Authority (OJK):** *Bank Papua is obligated to submit periodic reports to the OJK, including banking supervision reports, compliance with minimum capital requirements, and reports on various operational indicators.*
- **Consumer Complaint Reporting:** *To safeguard customers, Bank Papua has established a documented complaint reporting system, which is included in its annual report and available on the bank's official website.*
- **Public Information Access Reporting:** *As part of its commitment to transparency, Bank Papua provides publicly accessible information regarding banking services, credit policies, and financial inclusion programs.*



MEDIA PUBLIKASI TRANSPARANSI BANK PAPUA

Untuk memastikan informasi keuangan dan non-keuangan dapat diakses dengan mudah oleh publik, Bank Papua menggunakan berbagai media, di antaranya:

- Situs Resmi: www.bankpapua.co.id – Menyediakan akses ke laporan keuangan, informasi produk, layanan, dan tata kelola bank.
- Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan: Diterbitkan setiap tahun dan dapat diunduh melalui situs atau diperoleh dalam bentuk cetak.
- Media Sosial: Instagram (@bankpapua1966), X (@bankpapua1966), Facebook (bankpapua1966), dan YouTube (Bank Papua Official) untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- Halo Bank Papua: 1500-138 sebagai kanal informasi bagi nasabah.
- Siaran Pers & Media Massa: Untuk menyampaikan informasi strategis mengenai kebijakan, kinerja keuangan, dan inisiatif perbankan Bank Papua.

Transparansi dalam aspek keuangan dan non-keuangan di Bank Papua merupakan wujud komitmen dalam menjalankan tata kelola yang baik dan memenuhi ketentuan OJK. Dengan keterbukaan ini, Bank Papua dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mematuhi regulasi perbankan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

BANK PAPUA'S TRANSPARENCY PUBLICATION MEDIA

To ensure easily accessible financial and non-financial information to the public, Bank Papua utilizes various media, including:

- Official Website: www.bankpapua.co.id – Provides access to financial reports, product information, services, and bank governance.
- Annual Report & Sustainability Report: Published annually and can be downloaded through the website or obtained in print.
- Social Media: Instagram (@bankpapua1966), X (@bankpapua1966), Facebook (bankpapua1966), and YouTube (Bank Papua Official) to disseminate information to the public.
- Halo Bank Papua: 1500-138 as an information channel for customers.
- Press Releases & Mass Media: To convey strategic information regarding Bank Papua's policies, financial performance, and banking initiatives.

Transparency in both financial and non-financial aspects at Bank Papua demonstrates its commitment to good governance and compliance with OJK regulations. With this transparency, Bank Papua can increase stakeholder trust, comply with banking regulations, and support sustainable and responsible business growth.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Implementation of Sustainable Finance, Including Social and Environmental Responsibility

Penjelasan tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, telah dijelaskan pada *Sustainability Report* Bank Papua Tahun 2025.

The implementation of sustainable finance, encompassing social and environmental responsibility, is detailed in Bank Papua's 2025 Sustainability Report.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Public Company Governance Guidelines

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Bank Papua belum berstatus sebagai perusahaan emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau sebagai perusahaan publik. Oleh karena itu, informasi mengenai penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka belum tersedia.

As of December 31, 2025, Bank Papua has not yet been recognized as an issuer of equity securities or as a public company. Consequently, information regarding the implementation of public company governance guidelines is currently unavailable.

Laporan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Implementation Report

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 yang diterbitkan pada 18 November 2014, dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 yang dirilis pada 25 Mei 2015, mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) bagi Konglomerasi Keuangan. Selain itu, terdapat juga POJK No. 45/POJK.03/2020 yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2020, yang mengatur tentang Konglomerasi Keuangan. Ketentuan-ketentuan ini mencakup pembentukan Konglomerasi Keuangan, penunjukan Entitas Utama (EU) dalam konglomerasi tersebut, serta penerapan TKT secara komprehensif dan efektif, termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Hingga tahun 2025, Bank Papua belum menerapkan Tata Kelola Terintegrasi karena statusnya yang bukan sebagai Perusahaan Grup maupun entitas dari perusahaan lain.

The implementation of Integrated Governance is governed by OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014, issued on November 18, 2014, and OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015, issued on May 25, 2015. These regulations pertain to the implementation of Integrated Governance (IGC) for Financial Conglomerates. Additionally, OJK Regulation No. 45/POJK.03/2020, issued on October 16, 2020, provides further regulation for Financial Conglomerates. The aforementioned provisions detail the establishment of a Financial Conglomerate, the appointment of a Main Entity (ME) within the conglomerate, and the comprehensive and effective execution of IGC, including the associated obligations. As of 2025, Bank Papua has not implemented Integrated Governance due to its status as neither a Group Company nor an entity of another company.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency in Governance Practices

Perusahaan menyadari bahwa praktik *Bad Corporate Governance* dapat mengganggu sistem *Good Corporate Governance* yang telah dibangun. Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, selama tahun 2025, Perusahaan berkomitmen untuk tidak melaksanakan tindakan atau kebijakan apapun yang berkaitan dengan praktik *Bad Corporate Governance*, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

The Company acknowledges that inadequate corporate governance practices can undermine the established framework of effective governance. To uphold these principles, the Company is committed to refraining from implementing any actions or policies associated with poor corporate governance practices through 2025, as detailed in the following table:

Kejadian	Keterangan	Incident	Information
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak Ada	<i>There is a report as a company that pollutes the environment</i>	No
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Tidak Ada	<i>Important matters currently being faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently in office are not disclosed in the Annual Report</i>	No
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak Ada	<i>Non-Compliance in fulfilling tax obligations</i>	No
Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Tidak Ada	<i>Discrepancies in the presentation of annual reports and financial reports with applicable regulations and SAK</i>	No
Kasus terkait buruh dan karyawan	Tidak Ada	<i>Cases related to labor and employees</i>	No
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Tidak Ada	<i>There is no disclosure of operating segments in listed companies</i>	No
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy	Tidak Ada	<i>There is a discrepancy between the hardcopy Annual Report and the softcopy Annual Report</i>	No



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Dalam setiap aspek operasionalnya, Bank Papua berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan aktivitas bisnis yang diambil memberikan manfaat signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank meyakini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga kebutuhan strategis yang dapat berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dalam konteks ini, fokus pelaksanaan tanggung jawab sosial kami diarahkan pada upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di sektor perbankan, Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan program keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan dukungan sektor keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa sistem keuangan memegang peranan krusial dalam mencegah praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Papua berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, serta mengacu pada standar internasional ISO 26000. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial, disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang dipublikasikan terpisah dari Laporan Tahunan.

Bank Papua is dedicated to ensuring that every decision and business activity yields significant benefits for all stakeholders across its operations. The Bank views corporate social responsibility not only as an obligation but also as a strategic necessity that can enhance the company's value. Our social responsibility initiatives are primarily focused on supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

As a financial institution within the banking sector, Bank Papua is committed to implementing sustainable finance programs that align with the financial sector's role in promoting sustainable development. We acknowledge the critical importance of the financial system in preventing financing or investment practices that may lead to the over-exploitation of resources. Such practices can contribute to social inequality and adversely affect the environment.

The implementation of corporate social responsibility at Bank Papua is guided by the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017, which pertains to the Implementation of Sustainable Finance for Issuer Financial Services Institutions and Public Companies. Additionally, we adhere to the international standard ISO 26000. In accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021, which outlines the Form and Content of Annual Reports for Issuers or Public Companies, information regarding corporate social responsibility—particularly in relation to sustainable governance, economic performance, environmental performance, and social performance—is provided in a Sustainability Report that is published separately from the Annual Report.



Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

Statement on the Implementation of Good Governance Principles

Tata kelola yang baik di sektor perbankan merupakan elemen krusial yang harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam industri ini. Implementasi tata kelola yang efektif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja bank, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam sektor perbankan.

Untuk mencapai standar tinggi dalam tata kelola, manajemen bank berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan menanamkan budaya serta perilaku bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta perhatian terhadap kesetaraan dan kewajaran yang adil. Kami berupaya memastikan bahwa semua praktik bisnis dijalankan secara berkesinambungan demi kebaikan bersama.

Good governance in the banking sector is a fundamental requirement that must be embraced by all stakeholders within the industry. The effective implementation of governance practices enhances bank performance and reinforces adherence to relevant banking regulations.

To uphold high standards of governance, bank management is dedicated to the ongoing enhancement of a business culture and behavior that align with good governance principles. These principles encompass transparency, accountability, responsibility, independence, and a commitment to equality and fairness. We are committed to ensuring that all business practices are conducted sustainably for the collective benefit of all.



Good Corporate Governance Assessment

Good Corporate Governance Assessment

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria yang digunakan dalam melakukan *Self Assessment* mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Umum. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan GCG di Bank Papua, yang ditinjau dari tiga aspek utama:

1. Governance Structure

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan, sehingga pelaksanaan prinsip GCG dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Struktur tata kelola perusahaan mencakup Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja. Infrastruktur tata kelola perusahaan meliputi kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi.

2. Governance Process

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. Governance Outcome

Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan *stakeholders*. Outcome ini merupakan hasil dari pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan. Aspek yang termasuk dalam outcome mencakup kualitatif dan kuantitatif, antara lain:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan konsumen.
- Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit.
- Kinerja bank, seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

ASSESSMENT CRITERIA

The criteria utilized in the *Self-Assessment* are based on the *Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017*, which pertains to the implementation of good corporate governance (GCG) within Commercial Banks. This assessment aims to identify the strengths and weaknesses of GCG implementation at Bank Papua, evaluated through three primary aspects:

1. Governance Structure

The *Governance Structure* assessment evaluates the adequacy of the corporate governance framework and infrastructure to ensure that the application of GCG principles yields outcomes that align with stakeholder expectations. This structure encompasses the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and operational units. The infrastructure includes relevant policies and procedures, management information systems, and the defined roles and responsibilities within the organizational structure.

2. Governance Process

The *Governance Process* assessment reviews the effectiveness of the GCG implementation process, supported by the adequacy of the corporate governance framework and infrastructure, to achieve outcomes that meet stakeholder expectations.

3. Governance Outcome

The *Governance Outcome* assessment evaluates the quality of results in relation to stakeholder expectations. This outcome is derived from the application of GCG principles, reinforced by the adequacy of the corporate governance framework and infrastructure. Components of the outcome include both qualitative and quantitative factors, such as:

- Adequate reporting transparency.
- Compliance with laws and regulations.
- Consumer protection measures.
- Objectivity in conducting assessments and audits.
- Bank performance indicators, including profitability, efficiency, and capitalization.



- f. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penyelesaian masalah yang dihadapi bank, seperti *Fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

- f. Trends in compliance with applicable regulations and the resolution of issues faced by the bank, such as instances of fraud, violations of the Legal Lending Limit (BMPK), and breaches of reporting obligations to regulators.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses *self assessment* melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris, dan unit kerja terkait, guna menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur mengenai pelaksanaan tata kelola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The *self-assessment* process involves the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners Committees, and relevant work units to produce a comprehensive and structured assessment of governance implementation at all levels of the organization.

SKOR PENILAIAN

ASSESSMENT SCORE

No	Aspek yang Dinilai	SEMESTER I POSISI 30 JUNI 2025			SEMESTER II POSISI 31 DESEMBER 2025			Rated aspect
		Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	1	15%	0,15	1	15%	0,15	Implementation of Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10%	0,10	1	10%	0,10	Implementation of Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6%	0,06	1	6%	0,06	Completeness and Implementation of Committee Duties
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6%	0,06	1	6%	0,06	Managing Conflicts of Interest
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6%	0,12	2	6%	0,12	Implementation of the Bank's Compliance Function
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6%	0,12	2	6%	0,12	Implementation of the Internal Audit Function
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Implementation of the External Audit Function
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Implementation of Risk Management, including the Internal Control System
9	Pemberian Remunerasi	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Provision of Remuneration
10	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2	6%	0,12	2	6%	0,12	Reporting Integrity and Information Technology Systems
12	Rencana Strategis Bank	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Bank's Strategic Plan
13	Aspek Pemegang Saham	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Shareholder Aspects
14	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Implementation of Anti-Fraud Strategies, including Anti-Bribery
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Implementation of Sustainable Finance, including Social and Environmental Responsibility



No	Aspek yang Dinilai	SEMESTER I POSISI 30 JUNI 2025			SEMESTER II POSISI 31 DESEMBER 2025			Rated aspect
		Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	
16	Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5%	0,10	2	5%	0,10	Implementation of Governance within Bank Business Groups (KUB)
NILAI KOMPOSIT			100%	1,6312		100%	1,6312	COMPOSITE VALUE

Sesuai SEOJK No 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum bahwa Bank berkewajiban untuk melakukan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank, maka telah dilakukan penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) dengan berpedoman pada faktor penilaian yang terdiri dari 16 (enam belas) faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilampirkan dalam bentuk hasil *Self Assessment* Semester I (satu) dan Semester II (dua) tahun 2025 dengan Nilai Komposit 2.

Predikat Nilai Komposit 2 mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan Bank dan Rencana Bisnis Bank.

In accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank is required to conduct a self-assessment of its governance implementation. Accordingly, a Good Corporate Governance (GCG) Self-Assessment has been carried out based on evaluation factors comprising 16 (sixteen) GCG factors, with the results presented in the Semester I and Semester II 2025 Self-Assessment reports, resulting in a Composite Rating of 2.

*A Composite Rating of 2 reflects that the Bank's management has generally implemented governance practices in a **sound manner**. This is evidenced by adequate compliance with governance principles. Any weaknesses identified in the implementation of governance principles are generally not significant but still require appropriate management attention, as such weaknesses may affect the effectiveness of the Bank's supervisory function and the Bank's Business Plan.*



2025

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS





**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024
SERTA PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
DECEMBER 31, 2024
AND FOR PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	Yuliana Dofinca Yarbawa, SE., MM
Alamat Kantor	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Jabatan	Direktur Utama
2. Nama	B. Sudar Setoyang
Alamat Kantor	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Jabatan	Direktur Bisnis
3. Nama	B. Pujatin, Msi
Alamat Kantor	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Jabatan	Direktur Keuangan
4. Nama	Iwak Samuel Wiguri, SE., MM
Alamat Kantor	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Jabatan	Direktur Operasional
5. Nama	Betty Juliasnja Partumusa, Bsc. SE., MM
Alamat Kantor	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Jabatan	Direktur Kepatuhan

We, the undersigned:

1. Name	Yuliana Dofinca Yarbawa, SE., MM
Office Address	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Position	President Director
2. Name	B. Sudar Setoyang
Office Address	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Position	Business Director
3. Name	B. Pujatin, Msi
Office Address	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Position	Financial Director
4. Name	Iwak Samuel Wiguri, SE., MM
Office Address	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Position	Operations Director
5. Name	Betty Juliasnja Partumusa, Bsc. SE., MM
Office Address	Jl. Ahmad Yani No.5-7 Jayapura 99111 Papua
Position	Compliance Director

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah dicatat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengandung informasi atau fakta material;

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial report;
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards:
 - a. All information in the PT Bank Pembangunan Daerah Papua financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
 - b. The financial statements of the PT Bank Pembangunan Daerah Papua do not contain any incorrect information or material facts, nor do they contain material information or material facts;

KANTOR PUSAT

Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111
Kode Pos 99111, Telp. (0907) 3430711 (Pusat)
Telp. 0807 1833071 Selular, 70 189

info@bankpapua.co.id
www.bankpapua.com



Pendahuluan
Introduction



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendukung Bisnis
Business Support



3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Pembangunan Daerah Papua

3. We are responsible for the PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Demiikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This this statement is made truthfully.

Jayapura, 20 FEB 2025
PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Direktur Utama
President Director

Yuliana Dofinca Yembawa, SH, MH

Direktur Bisnis
Business Director

Direktur Keuangan
Financial Director

Seder Soemwang

Dr. Piusman, M.B.

Direktur Operasional
Operations Director

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Ivan Samuel Wooman, SH, MH

Reffy Juliantje Paimessa, SH, MH

KANTOR PUSAT

Jl. Achmad Nief No. 5-7 Jayapura 99111
Nomor Reg. PT No. 0460/300711 (Pemerang)
Telp. 0967 - 5333071 Telepon 30108

Alamat Website (Web)
www.bankpapua.co.id



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
With Independent Auditors' Report

Daftar Isi	Halaman / Page	Table of Contents
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4	<i>Statement Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5 - 6	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	7 - 9	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	10 - 151	<i>Notes to the Financial Statements</i>





No. 00006/2.0000/ALU.1/07/0135-4/1/11/2026

Laporan Auditor Independen / Independent Auditors' Report

**Kepada Pemegang Saham
PT Bank Pembangunan Daerah Papua**

**To the Shareholders
PT Bank Pembangunan Daerah Papua**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan (selengkapnya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia).

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut didasarkan telah larut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Papua as at December 31, 2025, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibility under those standards are further described in the "Auditor's responsibilities for the audit of financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Prime Tower, 18th Floor L2 F&G

Jl. R.A. Kartini 88 Koy. 06 TB Samarapura, Jakarta Selatan 12110

Phone: +6221-78960431, 78960432, 78960433 Fax: +6221-78960434

Email: info@hgkfm.com Web: www.hgkfm.com www.hgkfm.co.id

NLUKAP | KEP-00001/2014 | B-30/AR 1/2011





Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. Kerugian kredit ekspektasi ("KKE")-cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2d dan Catatan 10 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp171.440.978.496. Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan ditentukan oleh Bank berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan".

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan mewakili 65,67% dari total aset Bank, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pinjaman yang diberikan yang nilainya signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut, penentuan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Untuk pinjaman yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasi dari pinjaman yang diberikan. Bank menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

1. Expected credit losses ("ECL") - of allowance for impairment losses on loans

As described in Note 2d and Note 10 to the financial statements, as of 31 December, 2025, the allowance for impairment losses for loans of the Bank was Rp171,440,978,496. This allowance for impairment losses for loans determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments".

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans represented 65.67% of total assets of the Bank, and the respective allowance for impairment losses provided against the loans which are significant to the Bank's financial statements. In addition, determining ECL involves subjective management judgment and is subject to a high degree of uncertainty estimation.

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses individual ECL by estimating the expected cashflows obtained from the loans. The Bank uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortized cost.





1. Kerugian kredit ekspektasian ("KKE")- cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Untuk pinjaman yang diberikan dimana Bank menghitung KKE secara kolektif, Bank menggunakan model KKE dengan beberapa asumsi utama, antara lain, probabilitas rata-rata tertimbang dari *probability of default*, *loss given default*, dan *exposure at default*, setelah memperhitungkan faktor perikatan masa depan dan informasi eksternal lainnya termasuk proses identifikasi atas pinjaman yang diberikan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;
- Mengidentifikasi pinjaman yang diberikan dan aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, penilaian faktor ekonomi masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pinjaman. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh bank memiliki kualitas yang lebih rendah dan direstrukturisasi, debitur di industri berisiko tinggi dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

1. Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans (continued)

For loans where the Bank assessed ECL collectively, the Bank used an ECL model that incorporated key assumptions, such as, the weighted average probability of default, loss given default and exposure at default, after considering forward looking factors and other external information including the identification process over loans that had experienced a significant increase in credit risk.

The significant judgments involved in determining the ECL include the following:

- Developing appropriate collective assessment model used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgment is applied in determining that model;
- Identification of loans and their financial assets measured at amortized cost that have experienced a significant increase in credit risk; and
- Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining by sampling of loan agreement. We examined samples of financial assets identified by the bank as having lower credit quality and restructured, debtors in high-risk industries and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.





Bagaimana audit kami merespon hal audit utama (lanjutan)

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini: (lanjutan)

- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan penggunaan faktor diskonto dengan perjanjian pinjaman.
- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif, (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek ekonomi makro Indonesia dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan input data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Bank.
- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas seluruh portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan (i) petik,

How our audit addressed the key audit matter (continued)

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter: (continued)

- When objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation, testing the probability-weight outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the credit agreement.
- We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL model, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of SFAC 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook and (iii) testing the completeness and accuracy of data uses in the estimation, in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Bank.
- We assessed and considered the determination of forward-looking forecast assumptions.
- We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.





Bagaimana audit kami merespon hal audit utama (lanjutan)

- Kami melakukan pengujian tertentu atas KKE, seperti perhitungan kembali KKE secara independen dan memeriksa keandalan data dengan membandingkan kelengkapan dan akurasi data yang digunakan dalam perhitungan KKE dengan data yang tersedia di Bank.

2. Pengoperasian dan pengendalian atas sistem Teknologi Informasi ("TI") pelaporan keuangan.

Bank sangat bergantung pada infrastruktur, sistem, dan pengendalian TI untuk operasi sehari-hari dan proses pelaporan keuangan bisnisnya. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks karena jumlah sistem pelaporan keuangan utama dan perpindahan antar sistem. Mengingat faktor-faktor ini, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian sistem TI pelaporan keuangan Bank sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami memahami lingkungan TI dan pengendalian TI yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kami menilai efektivitas desain, implementasi, dan pengoperasian pengendalian utama atas sistem TI yang relevan.

Kami mengevaluasi dan menilai hal-hal berikut:

- Pengendalian atas manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melakukan operasi perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
- Pengendalian atas keamanan akses pengguna: Pengendalian akses yang dirancang untuk memberlakukan pemisahan tugas, mengatur penggunaan akun generik dan istimewa dan bahwa data hanya diubah melalui mekanisme dan otorisasi; dan
- Pengendalian terkait pengoperasian TI: Pengendalian atas operasi yang mengidentifikasi dan mengelola masalah operasi TI yang muncul.

How our audit addressed the key audit matter (continued)

- We performing certain KCI testing, such as independently recalculating the KCI and checking data reliability by testing the completeness and accuracy of data used in the KCI calculation against the data available in the Bank.

2. Operation and control of financial reporting Information Technology ("IT") Systems.

Bank is heavily reliant on infrastructure, Systems, and IT Control, for daily operations and business financial reporting processes. The Bank's IT environment is considered complex due to the number of major financial reporting systems and movement between systems, considering these factors, we consider the operation and control of the Bank's financial reporting IT systems to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We understand the IT environment and IT controls that support the financial reporting process. We assess the effectiveness of the design, implementation and operation of key controls over relevant IT systems.

We evaluate and rate the following:

- Controls over change management: The processes and controls used to develop, test, and authorize changes to functionality and configuration in the system;
- Controls over the security of user access: Access controls designed to enforce separation of duties, regulate the use of generic and privileged accounts and that data is only changed through authorized mechanisms; and
- IT operations related controls: Controls over operations that identify and manage emerging IT operations problems.





2. Pengoperasian dan pengendalian atas sistem Teknologi Informasi ("TI") pelaporan keuangan. (Lanjutan)

Kami mengevaluasi pengendalian relevan yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, termasuk perhitungan otomatis, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan oleh sistem, dan perpindahan antar sistem yang relevan. Kami memeriksa konfigurasi sistem yang relevan dan menguji keluaran sistem berdasarkan uji petik.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Selubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan dalam pelaksanaannya, memperimbangkannya apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas laba Kita dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

2. Operation and control of financial reporting Information Technology ("IT") Systems. (Continued)

We evaluated relevant IT-dependent controls that support the financial reporting process, including automated calculations, transaction processing, system report generation, and movement between relevant systems. We check the relevant system configurations and test the system output based on sample.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, Our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.





Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material jika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.





Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mendemonstrasikan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Bank untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Bank. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
- Identify and assess the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Bank to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Bank audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.





Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamalan terkait.

Dari hal-hal yang diomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan interim periode kini dan akan karenanya menjadi hal audit utama.

Kami menjelaskan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan mengenai pengungkapan publik tentang hal tersebut atau konteks, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh diomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensinya mungkin dari mengomunikasikan hal tersebut akan mengakibatkan secara wajar mungkin merugikan kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

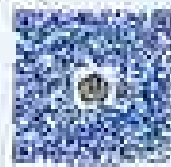
Auditors' Responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation prohibits public disclosure about the matter or when, at extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Drs. Hertanto, M.S.Ak, CPA, CPHA, CA.

Register Akuntan Publik / Register of Public Accountant No. AP 0136

Jakarta, 20 February/ February 20, 2026



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali
 dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
*(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise
 stated)*

	Catatan/ Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Kas	2d,4	2,227,856,938,327	1,463,869,502,450	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2d,2e,5	1,136,671,063,929	3,343,533,751,313	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain				Current accounts with other banks
- Pihak ketiga		85,304,207,016	61,528,653,394	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(36,249)	(80,854)	Less: Allowance for impairment losses
	2d,2e,6	85,304,170,767	61,528,572,540	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain				Placements with Bank Indonesia and other banks
- Pihak ketiga		2,609,305,019,305	654,139,378,387	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(5,592,901,381)	(3,942,742,766)	Less: Allowance for impairment losses
	2d,2f,7	2,603,712,117,924	650,196,635,621	
Efek - efek				Marketable securities
- Pihak ketiga		4,881,313,117,089	4,759,514,743,804	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(105,754,073)	(121,535,374)	Less: allowance for impairment losses
	2d, 2g, 8	4,881,207,363,016	4,759,393,208,430	
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali				Marketable securities purchased under agreements to resell
- Pihak ketiga		737,935,335,000	-	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	Less: Allowance for impairment losses
	2d,2h, 9	737,935,335,000	-	
Pinjaman yang diberikan:				Loans:
- Pihak berelasi		483,951,037,983	450,829,847,142	Related parties
- Pihak ketiga		22,069,257,463,773	21,343,103,638,919	Third parties
Jumlah Pinjaman yang diberikan		22,553,208,501,756	21,793,933,486,061	Total loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(471,440,978,496)	(631,186,973,824)	Less: Allowance for impairment losses
	2c,2d, 2i,10	22,081,767,523,260	21,162,746,512,237	
Aset tetap dan Aset hak guna		770,597,566,584	735,816,921,843	Fixed assets and right of use of assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(510,126,125,333)	(494,403,264,628)	Less: Accumulated depreciation
	2j,2u, 11	260,471,441,251	241,413,657,215	
Aset lain-lain - bersih	2d, 2t, 2k, 12	328,414,532,115	431,871,428,374	Other assets - net
JUMLAH ASET		34,343,340,485,589	32,114,553,268,180	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali
dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
As of December 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise
stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2d,2l,13	422,928,166,356	954,246,226,849	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	2c,2d,2m,14	3,126,420,950,902	2,224,418,766,037	Deposits from customers
- Pihak berelasi		23,044,218,076,407	22,461,669,950,987	Related parties -
- Pihak ketiga				Third parties -
Simpanan dari bank lain	2d,2n,15	1,028,594,106,360	578,177,592,388	Deposits from other banks
- Pihak ketiga				Third parties -
Pinjaman yang diterima	2d,2o,16	1,569,504,383,945	75,984,704,425	Borrowings
- Pihak ketiga				Third parties -
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2d,2h,17	-	875,459,921,151	Securities sold under agreements to repurchase
Liabilitas lain-lain	2s, 2t, 18	502,342,695,446	466,221,986,116	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		29,694,008,379,416	27,636,179,147,953	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Seri A - nilai nominal Rp5.000 per saham				Class A- Rp5,000 per share
Seri B - nilai nominal Rp5.000 per saham				Class B- Rp5,000 per share
Modal dasar				Share capital - authorized
Seri A - 728.000 saham				Class A - 728,000 shares
Seri B - 72.000 saham				Class B - 72,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid
Seri A				Class A
- 2025 : 556.754 saham				2025 : 556,754 shares -
- 2024 : 541.777 saham				2024 : 541,777 shares -
Seri B				Class B
- 2025 : 12.793 saham				2025 : 12,793 shares -
- 2024 : 12.393 saham	21	2,848,205,000,000	2,770,850,000,000	2024 : 12,393 shares -
Tambahan modal disetor	21	32,268,522,106	68,751,022,106	Additional paid-in capital
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek - efek dalam kelompok nilai wajar melalui , penghasilan komprehensif lain setelah pajak		34,198,585,881	(2,543,801,633)	Unrealized gain on for value through other comprehensive income marketable securities net of tax
Saldo laba				Retained earnings
- Telah ditentukan penggunaannya		1,528,859,985,851	1,347,788,076,480	Appropriated reserve -
- Belum ditentukan penggunaannya		205,800,012,335	293,528,823,274	Unappropriated reserve -
JUMLAH EKUITAS		4,649,332,106,173	4,478,374,120,227	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		34,343,340,485,589	32,114,553,268,180	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
		Catatan / Notes	2025	2024
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Pendapatan bunga*)	2p, 23a	2,493,930,163,104	2,306,693,225,109	Interest income*)
Beban bunga*)	2p, 25	(670,404,789,990)	(312,447,937,012)	Interest expense*)
Jumlah pendapatan bunga - bersih		1,823,525,373,114	1,994,245,288,097	Total interest income - net
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan*)	24	36,774,592,027	39,221,931,953	Recovery of assets written off*)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi*)	24	23,771,652,162	3,564,275,989	Unrealized gain from changes in fair value of financial assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss*)
Pendapatan operasional lain lain*)	24	283,493,792,476	140,692,373,017	Other Operating Income*)
Laba selisih kurs*)	24	25,229,800	-	Foreign exchange gain*)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih	2q, 24	184,653,194,355	179,597,678,497	Provision and commission income - net
Jumlah pendapatan operasional lainnya - bersih		528,718,460,820	363,076,259,456	Total other operating income - net
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES
Aset produktif	2d, 27	(120,768,238,469)	(174,727,465,765)	Productive assets
Aset non produktif	2t, 27	(2,718,553,960)	-	Non productive assets
Jumlah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai		(123,486,792,429)	(174,727,465,765)	Total allowance for impairment losses
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Tenaga kerja dan tunjangan Umum dan administrasi	30	(730,749,581,681)	(802,615,617,005)	Salaries and allowances General and administrative
Imbalan manfaat karyawan	2s, 34	(70,070,843,584)	(82,446,328,138)	Post-employment benefits
Penyusutan dan amortisasi	28	(56,436,310,346)	(56,671,159,125)	Depreciation and amortization
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi*)	26	(18,492,611,921)	(1,722,692,714)	Unrealized loss from changes in fair value of financial assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss*)
Beban operasional lain-lain*)	26	(3,707,434,507)	(6,375,331,622)	Other operational expenses*)
Rugi selisih kurs*)	26	(17,634,000)	-	Foreign exchange loss*)
Jumlah beban operasional lainnya		(1,594,499,338,558)	(1,602,373,848,506)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL		634,257,702,947	580,220,233,282	OPERATING INCOME

*) Reklasifikasi Catatan 48

Account Reclassification Notes 48*)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN)
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2025
 (Disajikan dalam Rupiah penuh,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
 For the Year Ended
 December 31, 2025
 (Expressed in full amount of Rupiah,
 unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
		Catatan / Notes	2025	2024
PENDAPATAN (BEBAN)				
BUKAN OPERASIONAL				
Pendapatan bukan operasional	31		4,866,551,783	3,518,121,379
Beban bukan operasional	32		(33,865,657,514)	(672,004,980)
Jumlah pendapatan (beban) bukan operasional			(28,999,105,731)	2,846,116,399
LABA SEBELUM PAJAK			605,258,597,216	583,066,349,681
(BEBAN) MANFAAT PAJAK				
Pajak kini	2r, 20c, 20d		(123,085,113,580)	(142,931,629,940)
(Beban) Manfaat pajak tangguhan	2r, 20b, 20e		(10,606,934,097)	12,545,053,685
Jumlah beban pajak			(133,692,047,677)	(130,386,576,255)
LABA TAHUN BERJALAN			471,566,549,539	452,679,773,426
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2s, 2r		(136,686,650,068)	88,653,004,181
Beban pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2r		30,071,063,015	(19,503,660,920)
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Peningkatan/ (penurunan) nilai wajar atas surat berharga	2r		43,226,338,251	(14,108,027,193)
Manfaat/ (beban) pajak tangguhan atas peningkatan/ (penurunan) nilai wajar surat berharga	2r		(6,483,950,737)	2,894,276,436
Jumlah penghasilan komprehensif lain			(69,873,199,539)	57,935,592,504
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			401,693,350,000	510,615,365,930
LABA PER SAHAM				
Laba operasional	2v, 36		1,121,046	1,053,253
Laba tahun berjalan	2v, 36		833,490	821,733

NON OPERATING INCOMES (EXPENSES)

Non operating incomes

Non operating expense

Total non operating income (expenses)

INCOME BEFORE TAX

TAX (EXPENSE) INCOME

Current income tax

Deferred (Expense) income tax

Total income tax expense

INCOME FOR THE YEAR

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE):

Items that will not be reclassified to profit or loss

Remeasurement of post

employment benefit

Deferred expense tax of

remeasurement of post

employment benefit

Items that will be reclassified to profit or loss

Increasing/ (decreasing) of

fair value on

marketable securities

Deferred income tax of

Increasing/ (decreasing)

fair value on

marketable securities

Total other comprehensive income

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

EARNING PER SHARE

Operating income

Income for the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan / Notes	Modal Disetor / Paid-in Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Keuntungan (Rugi) yang belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan / Unrealized Losses on Available-for-Sale Marketable Securities and Bonds Net of Deferred Tax	Saldo Laba / Retained Earning		Jumlah Ekuitas / Total Equity	Description	
					Dicadangkan /Appropriated	Cadangan Umum dan Wajib/ General and Legal Reserves			
									Tidak dicadangkan/ Unappropriated
Saldo per 31 Desember 2024		2,770,850,000,000	68,751,022,106	(2,543,801,633)	1,347,788,076,480	293,528,823,274	4,478,374,120,227	Balance December 31, 2024	
Setoran Modal Sebelum RUPS 2024		-	(36,482,500,000)	-	-	-	(36,482,500,000)	Paid in capital before GSHM 2024	
Pengesahan Setoran Modal oleh RUPS		77,355,000,000	-	-	-	-	77,355,000,000	Shareholders' approval on paid in capital	
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	36,742,387,514	-	(106,615,587,053)	(69,873,199,539)	Comprehensif Income	
Pembagian Laba Tahun 2023	22	-	-	-	181,071,909,371	(181,071,909,371)	-	Net income 2024 distribution:	
Cadangan Umum	2w, 22	-	-	-	-	(271,607,864,055)	(271,607,864,055)	General reserve	
Dividen	22	-	-	-	-	471,566,549,539	471,566,549,539	Dividend	
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	Current year net income	
Saldo per 31 Desember 2025		2,848,205,000,000	32,268,522,106	34,198,585,881	1,528,859,985,851	205,800,012,335	4,649,332,106,173	Balance December 31, 2025	

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp106.615.587.053

*) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to Rp106.615.587.053

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan / Notes	Modal Disetor / Paid-in Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Keuntungan (Rugi) yang belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tanguhan / Unrealized Losses on Available-for-Sale Marketable Securities and Government Bonds Net of Deferred Tax	Saldo Laba / Retained Earning		Jumlah Ekuitas / Total Equity	Description
					Dicadangkan /Appropriated Cadangan Umum	Tidak dicadangkan/ General and Legal Reserves		
Saldo per 31 Desember 2023		2,705,130,000,000	55,661,022,106	8,669,949,124	1,155,627,750,962	198,722,652,183	4,123,811,374,375	Balance December 31, 2023
Pengesahan Setoran Modal oleh RUPS								Shareholders' approval on paid in capital
Setoran Modal Sebelum RUPS 2024		65,720,000,000	-	-	-	-	65,720,000,000	Paid in capital before GSHM 2024
Laba komprehensif tahun berjalan		-	13,090,000,000	(11,213,750,757)	-	69,149,343,261	57,935,592,504	Comprehensif Income
Pembagian Laba Tahun 2023	22	-	-	-	-	(192,160,325,518)	-	Net income 2023 distribution:
Cadangan Umum	2w, 22	-	-	-	192,160,325,518	(192,160,325,518)	-	General reserve
Dividen	22	-	-	-	-	(234,862,620,077)	(234,862,620,077)	Dividend
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	452,679,773,426	452,679,773,426	Current year net income
Saldo per 31 Desember 2024		2,770,850,000,000	68,751,022,106	(2,543,801,633)	1,347,788,076,480	293,528,823,274	4,478,374,120,227	Balance December 31, 2024

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp69,149,343,261

*) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to Rp69,149,343,261

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2025
 (Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS
 For the Year Ended
 December 31, 2025
 (Expressed in full amount of Rupiah,
 unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi	2,606,109,337,455	2,488,678,003,846	Receipts From Interest, Fees, and Commissions
Pembayaran Bunga, Provisi, dan Komisi	(733,107,259,326)	(318,288,042,119)	Payment of Interest, Fees, and Commissions
Pembayaran Kepada Karyawan	(863,188,015,083)	(847,275,908,086)	Payment of Employee's Benefit
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(697,680,633,132)	(643,490,179,868)	Payment of General and Administrative Expenses
Penerimaan Kredit Hapus Buku	36,774,592,027	-	Recoveries from Loan Written - off
Penerimaan Operasional Lainnya	52,968,473,981	64,507,900,948	Receipts from Operating Income
Pembayaran Bukan Operasional	(29,090,731,562)	2,831,469,712	Payments from Non Operating Income
Pembayaran Perpajakan	(146,413,235,431)	(132,844,218,638)	Payments of Taxation
Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi	226,372,528,929	614,119,025,795	Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:			Decreasing (increasing) in assets:
Penempatan pada Bank Lain	(1,955,165,640,918)	1,755,293,320,240	Placement with Other Bank
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba rugi	92,626,221,620	1,284,731,520,691	Sales of Securities Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	(10,200,003,757)	-	Purchases of Securities Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Kredit yang Diberikan Aset Lain-lain	(813,130,033,995)	(2,259,092,042,343)	Loans
	123,118,513,745	(79,194,795,580)	Other Assets
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi	(2,562,750,943,305)	701,738,003,008	Decreasing (Increasing) in Assets
Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Operasi:			Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:
Simpanan	1,934,966,824,257	(1,084,286,057,889)	Deposits
Liabilitas Segera	(1,407,067,237,160)	(174,892,166,375)	Current Liabilities
Liabilitas Lain-lain	(55,747,976,007)	2,496,919,663	Other Liabilities
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi	472,151,611,090	(1,256,681,304,601)	Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(1,864,226,803,286)	59,175,724,201	Cash Net Provided from Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	Catatan/ Notes	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya		354,168,123,310	355,654,786,807	Proceed from Marketable Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensif Income
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya		(222,952,500,000)	(345,439,000,000)	Purchased for Marketable Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensif Income
Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi		2,080,702,818,895	(1,864,871,120,897)	Proceed from Marketable Securities Measured at Amortized Cost
Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi		(3,266,560,638,156)	1,767,762,377,662	Purchased for Marketable Securities Measured at Amortized Cost
Penerimaan Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali		74,257,287,371	-	Receipts from Securities Purchased under Resale Agreements
Pembayaran Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali		(737,935,335,000)	-	Payments for Securities Purchased under Resale Agreements
Pembelian Aset Tetap dan Aset Hak Guna	11	(74,892,106,532)	(56,294,969,027)	Acquisition of Fixed Assets and Right of Use of Assets
Penjualan Aset Tetap	11	91,625,831	14,646,687	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1,793,120,724,281)	(143,173,278,768)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman yang Diterima		1,572,893,279,916	(7,079,363,380)	Receipt of Borrowing
Penerimaan Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali		901,000,000,000	780,043,436,782	Receipt in Securities Sold Under Agreement to Repurchase
Pembayaran Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali		(4,910,086,179)	(901,000,000,000)	Payment in Securities Sold Under Agreement to Repurchase
Penambahan Modal Disetor		40,872,500,000	78,810,000,000	Additional Paid up Capital
Pembayaran Deviden		(271,607,864,055)	(234,862,620,076)	Payment of Dividend
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		2,238,247,829,682	(284,088,546,674)	Net cash used in Financing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2025
 (Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
 For the Year Ended
 December 31, 2025
 (Expressed in full amount of Rupiah,
 unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ For The Year Ended December 31,		
	Catatan/ Notes	2025	2024	
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		(1,419,099,697,885)	(368,086,101,241)	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal tahun	4	4,868,931,907,157	5,237,018,008,398	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Akhir tahun		3,449,832,209,272	4,868,931,907,157	Cash and Cash Equivalents at The End of the Year
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				Cash and Cash Equivalents at the End of The Year:
Kas	4	2,227,856,938,327	1,463,869,502,450	Cash
Giro Bank Indonesia	5	1,136,671,063,929	3,343,533,751,313	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank Lain	6	85,304,207,016	61,528,653,394	Current Accounts with other banks
Jumlah kas dan setara kas		3,449,832,209,272	4,868,931,907,157	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua") pada awalnya didirikan di Indonesia dengan nama "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat", berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat Nomor: 37/GIB/1966 tanggal 13 April 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar Rp4.000.000 dan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor: 1 Tahun 1970.

Selanjutnya "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" berubah nama menjadi "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" pada tahun 1970, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 7 Tahun 1976 Tanggal 30 Oktober 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, dengan modal dasar menjadi Rp500.000.000.

Kemudian "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" berubah nama menjadi "Bank Pembangunan Daerah Papua" pada tahun 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 2 tahun 2002 Tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan modal dasar Rp150.000.000.000.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank Papua melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Sirkulasi Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., tanggal 12 Agustus 2014 dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor: AHU-28059.40.22-2014 Tanggal 5 September 2014, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Modal Dasar Bank Papua menjadi Rp4.000.000.000.000.

b. Lingkup Usaha

Berdasarkan anggaran dasar, tujuan Bank Papua adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai tujuannya ini, Bank Papua menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Menyalurkan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of Bank Papua

In the beginning PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua") was established as local bank under the name of "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" according to the Decree of Governor of West Irian Province, No. 37/GIB/1966 dated April 13, 1966 concerning Provincial Development Bank with a paid up capital of Rp4,000,000 and Local Regulation of Irian Jaya Province No. 1 year 1970.

Further, the name of "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" changed into "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" according to Province Regulation of Irian Jaya (First Degree) No. 7 year 1976 dated October 30, 1976 concerning Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya with paid up capital in the amount of Rp500,000,000.

Subsequently "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" change its name again into "Bank Pembangunan Daerah Papua" made in 2002 according to Local Province Regulation No.2 year 2002 dated May 21, 2002 concerning Bank Pembangunan Daerah Papua with a paid up capital of Rp150,000,000,000.

In the latest amendment made to Bank Papua Articles of Association as refer to the Deed of Declaration of the General Meeting of Stockholders made in the circulation letter about the changes of article of association of PT Bank Pembangunan Daerah Papua on notarial deed dated August 12, 2014 of Maryatie Simanjuntak, S.H., which already approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No.AHU-05850.40.21-2014 and No. AHU-28059.40.22-2014 dated September 5, 2014 concerning the approval on changes of the article of association, paid capital to become Rp4,000,000,000,000 of the Bank Papua.

b. Scope of Business

Based on the articles of association, the objectives of Bank Papua is to provide banking services. To achieve this objective, Bank Papua provides its services as follows:

- *Accumulating fund from people in the form of current account, time deposit, certificate deposit, saving and / or other form similarly;*
- *Providing loans;*
- *Issues letter of debt;*
- *Purchase, sell, or provide guarantees on its own risk for the interest of its customers;*
- *Transfer of money on its own funds or its customers;*
- *Placement of fund, to borrow fund from or to lend fund to other banks, by issuing a note, thru telecommunication either with wessel or check or other devices;*
- *Receiving payment from receivable of marketable securities and perform yield calculations with or between concerning parties;*



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Lingkup Usaha (lanjutan)

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (garansi);
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan melalui badan lelang, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Papua dan Papua Barat;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank Papua berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, Papua. Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank Papua memiliki 43 (empat puluh tiga) kantor cabang, sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama Jayapura
2. Kantor Cabang Utama Manokwari
3. Kantor Cabang Utama Sorong
4. Kantor Cabang Utama Merauke
5. Kantor Cabang Utama Nabire
6. Kantor Cabang Utama Wamena
7. Kantor Cabang Jakarta
8. Kantor Cabang Biak
9. Kantor Cabang Fak Fak
10. Kantor Cabang Serui
11. Kantor Cabang Timika
12. Kantor Cabang Sentani
13. Kantor Cabang Kaimana
14. Kantor Cabang Teminabuan
15. Kantor Cabang Bintuni
16. Kantor Cabang Sarmi
17. Kantor Cabang Arso
18. Kantor Cabang Waisai
19. Kantor Cabang Mulia
20. Kantor Cabang Enarotali
21. Kantor Cabang Agats
22. Kantor Cabang Aimas
23. Kantor Cabang Keppi

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Scope of Business (continued)

- Provides safe deposit services for valuable goods and marketable security;
- Accepting placement of funds on behalf of other party based on an agreement;
- Conducting placement of fund from customer to another, in form of marketable securities which is not recorded in stock exchange;
- Buying collateral through auction agency, either all or in part in the event the debtor does not fulfill its obligations to Bank Papua, provided that collateral is liquidated immediately purchased;
- Conduct activities of equity participation in banks or other companies in the field of venture, securities companies, insurance companies, clearing (settlement) companies in compliance with the terms defined by the regulator;
- Conduct activities to address the temporary capital due to credit failure, in condition that Bank Papua must be pull back its shares to meet the provisions stipulated by the regulator;
- Act as a founder of pension fund in accordance with provision on valid regulation concerning pension fund;
- Supporting Local Government to develop Bank Perkreditan Rakyat (Citizen Credit Bank) owned by Local Province Government (First Degree) and Local Regency Government (Second Degree) of Papua and West Papua;
- Other activity which is commonly done by bank as long as agree with valid regulations;

c. Office Network

Bank Papua's head office is located at Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, Papua. As of December 31, 2025, Bank Papua has 43 (forty three) branch offices, as follows:

1. Jayapura Main Branch Office
2. Manokwari Main Branch Office
3. Sorong Main Branch Office
4. Merauke Main Branch Office
5. Nabire Main Branch Office
6. Wamena Main Branch Office
7. Jakarta Branch Office
8. Biak Branch Office
9. Fak Fak Branch Office
10. Serui Branch Office
11. Timika Branch Office
12. Sentani Branch Office
13. Kaimana Branch Office
14. Teminabuan Branch Office
15. Bintuni Branch Office
16. Sarmi Branch Office
17. Arso Branch Office
18. Waisai Branch Office
19. Mulia Branch Office
20. Enarotali Branch Office
21. Agats Branch Office
22. Aimas Branch Office
23. Keppi Branch Office



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Jaringan Kantor (lanjutan)

24. Kantor Cabang Karubaga
25. Kantor Cabang Waren
26. Kantor Cabang Oksibil
27. Kantor Cabang Surabaya
28. Kantor Cabang Makassar
29. Kantor Cabang Tanah Merah
30. Kantor Cabang Kasonaweja
31. Kantor Cabang Yogyakarta
32. Kantor Cabang Abepura
33. Kantor Cabang Ilaga
34. Kantor Cabang Waghete
35. Kantor Cabang Wasior
36. Kantor Cabang Dekai
37. Kantor Cabang Ransiki
38. Kantor Cabang Supiori
39. Kantor Cabang Tiom
40. Kantor Cabang Moanemani
41. Kantor Cabang Tambrau
42. Kantor Cabang Maybrat
43. Kantor Cabang Elelim

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris Non Independen
 Komisaris Independen*
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Yorgemes Derek Hegemur, S.H, M.H
 Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
 Dortheis Sesa, S.E.
 H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M.
 Victor Abraham Abaidata, S.H

Direksi

Direktur Utama
 Direktur Bisnis
 Direktur Keuangan
 Direktur Operasional
 Direktur Kepatuhan

Yuliana Dolfince Yembise, S.H., M.H
 Ir. Sadar Sebayang
 Ir. Pujiyanto, M.Si
 Isak Samuel Wopari, S.E., M.M.
 Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2024 dan 2025 didasarkan oleh:

- 1) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 10 Tanggal 20 Maret 2025;
- 2) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 04 Tanggal 8 Agustus 2024;
- 3) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah
- 4) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tentang Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 5) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 dan No.06/SK/RUPSBPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pengangkatan kembali komisaris Utama, Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Office Network (continued)

24. Karubaga Branch Office
25. Waren Branch Office
26. Oksibil Branch Office
27. Surabaya Branch Office
28. Makassar Branch Office
29. Tanah Merah Branch Office
30. Kasonaweja Branch Office
31. Yogyakarta Branch Office
32. Abepura Branch Office
33. Ilaga Branch Office
34. Waghete Branch Office
35. Wasior Branch Office
36. Dekai Branch Office
37. Ransiki Branch Office
38. Supiori Branch Office
39. Tiom Branch Office
40. Moanemani Branch Office
41. Tambrau Branch Office
42. Maybrat Branch Office
43. Elelim Branch Office

d. Organizational and Management Structure

The Board of Commissioners, Board of Directors and the Audit Committee of Bank Papua as of December 31, 2024 and 2025 are as follows:

The Board of Commissioners

President Commissioner
 Non Independent Commissioner
 Independent Commissioner*
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner

The Board of Directors

President Director
 Business Director
 Financial Director
 Operations Director
 Compliance Director

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2025 and 2024 based upon:

- 1) Deed General Meeting Extraordinary Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No.10 dated March 20, 2025;
- 2) Deed General Meeting Extraordinary Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No.04 dated August 8, 2024;
- 3) The GMS-LB Decree No.03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 on the Appointment of the President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 4) The GMS-LB Decree 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 on the Appointment of the Board of Commissioners Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 5) The GMS-LB Decree No. 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 dan No.06/SK/RUPSBPD/XI/2020 regarding the Reappointment of th President Commissioner, the Board of Commissioners Non Independent and the Board of Commissioners Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

- 6) Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/DIR-BPD/X/2024 tentang Struktur Organisasi dan Job Profile PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 7) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 8) Surat Keputusan RUPS Nomor: 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 9) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 04/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 10) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

Komisaris Independen Perseroan, Alm. Dortheis Sesa, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2025. Peristiwa tersebut terjadi sebelum tanggal pelaporan 31 Desember 2025 dan tidak memberikan dampak material terhadap penyajian angka-angka dalam laporan keuangan, namun telah diungkapkan sebagai bagian dari informasi umum mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor: 12.1/DIR-BPD/III/2025 tanggal 03 Maret 2025, tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Surat Dewan Komisaris Nomor: 204.2/DK-BPD/2025 dan Surat Dewan Komisaris Nomor: 204.3/DK-BPD/2025 tentang Perihal Pemberitahuan Berakhir Masa Jabatan sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris dimana Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Ketua
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota

Dortheis Sesa, S.E.
 Yorgemes Derek Hegemur, S.H., M.H
 Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
 H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
 Viktor Abraham Abaidata, S.H
 Pimpinan Divisi Manajemen Modal Manusia

Remuneration and Nomination Committee

Chairman
 Member
 Member
 Member
 Member
 Member

Komite Pemantau Risiko

Ketua
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota

Viktor Abraham Abaidata, S.H
 Yorgemes Derek Hegemur, S.H., M.H
 Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
 H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
 Dortheis Sesa, SE
 Johannes Mandang, S.E.
 Anita Erari
 Daud Sitepu
 Yunus B. Toding Allo

Risk Monitoring Committee

Chairman
 Member
 Member
 Member
 Member
 Member
 Member
 Member

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Structure (continued)

- 6) The Decree of the Board of Directors Number 67/DIR-BPD/X/2024 on the Appointment of Organizational Structure and Job Profile of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 7) The GMS-LB Decree No: 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 on the Appointment and Inaguration of the President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 8) The GMS Decree No: 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 dated March 20, 2025 concerning the temporary extension of the term of office of the Business Director and Operational Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 9) The GMS-LB Decree No. 04/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 on the Appointment and Inaguration of Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 10) The GMS-LB Decree No. 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 concerning the Reappointment of the Compliance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

The Company's Independent Commissioner, the late Dortheis Sesa, S.E., passed away on December 15 2025. The event occurred prior to the reporting date of December 31, 2025 and did not have a material impact on the presentation of the amounts in the financial statements; however, it has been disclosed as part of the general information regarding the composition of the Company's Board of Commissioners.

Based on the Decree of the Board of Directors number: 12.1/DIR-BPD/III/2025 dated March 3, 2025, concerning the Appointment of the Chairman and Members of the Committee of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Letter of the Board of Commissioners Number: 204.2/DK-BPD/2025 and Letter of the Board of Commissioners Number: 204.3/DK-BPD/2025 concerning Notification of the End of the Term of Office as a Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners where the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors has received approval from the Financial Services Authority (OJK).



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Komite Audit

Ketua	H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
Anggota	Dortheis Sesa, S.E.
Anggota	Vicktor Abraham Abaidata, S.H
Anggota	Ludia Kiding

Jumlah pegawai Bank Papua adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	Tetap/ Permanent	Tidak tetap/ Non-Permanent	Total
2025	2,233	293	2,526
2024	2,149	382	2,531

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Bank Papua ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 20 Februari 2026.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank Papua adalah seperti dijabarkan dibawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Kebijakan akuntansi material yang telah diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas), terkecuali untuk yang berikut ini:

1. Instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar;
2. Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur pada nilai wajar;
3. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur pada nilai wajar;
4. Aset keuangan dan liabilitas yang diakui ditunjuk sebagai lindung nilai dalam kualifikasi hubungan lindung nilai wajar disesuaikan untuk perubahan nilai wajar diatribusikan pada risiko lindung nilai;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Structure (continued)

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member

The number of employees of Bank Papua are as follows (unaudited):

	Total
2025	2,526
2024	2,531

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The financial statements of Bank Papua were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on February 20, 2026.

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of Bank Papua are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Statement of Compliance

The Bank's financial statements were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The material accounting policies have been consistently applied by the Bank, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024.

The material accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows) except for the following:

1. Derivative financial instruments are measured at fair value;
2. Financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value;
3. Available-for-sale financial assets are measured at fair value;
4. Recognized financial assets and financial liabilities designated as hedging items in qualifying fair value hedging relationship are adjusted for changes in fair value attributable to the risk being hedged;



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

5. Liabilitas untuk imbalan pasti diakui sebesar nilai kini imbalan pasti dikurang total dari perencanaan, ditambah keuntungan aktuarial yang diakui, dikurangi biaya jasa di masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

Penerapan Kebijakan Akuntansi:

1. Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
2. Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025

- Amandemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang Kekurangan ketertukaran. Amendemen ini mengatur bahwa Ketika suatu mata uang tidak bertukar dengan pengungkapannya;
- Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" tentang penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amendemen ini juga mengubah ketentuan terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

5. The defined benefit liabilities is recognized at the present value of the defined benefit net of the total plan assets, plus recognized actuarial gains, less unrecognized past service cost and unrecognized actuarial losses.

The cash flows statement were prepared by direct method whereby cash flow classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents classification consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other bank and Certificates of Bank Indonesia maturing within three months from the date of acquisition, provided that they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Statements of Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affect:

The application of accounting policies:

1. The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements;
2. The reported amounts of income and expenses during the reporting period.

Currency used for this report in this financial statements is the Indonesia Rupiah (Rp). All figures presented in the financial statements, unless otherwise stated specifically, are full in Rupiah amount.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The following are financial accounting standart, amandements and interpretations of statements of financial accounting standart which become effective starting January 1, 2025.

- Amendment to PSAK No. 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding Non-convertibility. This amendment regulates when a currency is non-convertible and its disclosure;
- Amendments to PSAK No. 109, "Financial Instruments," regarding the derecognition of financial liabilities, and clarify the assessment of cash flow characteristics for ESG-linked financial assets and contractually bound instruments such as tranches. These amendments also change the provisions related to disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and add provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109: "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan";
- PSAK 338: "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" (Revisi 2025).

Standar - standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

- PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan.

PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetap manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan entitas dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Entitas sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen standar-standar di atas, yang telah diterbitkan namun belum berlaku, pada laporan keuangan entitas terutama perbedaan nilai tukar yang saat ini digabungkan dalam laba operasi mungkin perlu dipisahkan, persyaratan khusus mengenai kategori di mana keuntungan atau kerugian derivatif diakui, pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan dan dampak potensial lainnya atas penerapan standar baru ini terhadap laporan keuangan entitas.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, as follows:

- Amendment of SFAS 109: "Financial Instruments" and SFAS 107: "Financial Instruments: Disclosures";
- SFAS 338: "Business Combinations of Entities Under Common Control" (Revised 2025).

The above standards will be effective on January 1, 2026

- SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial statements" which will replace SFAS 201: "Presentation in Financial Statements".

The above standard will be effective on January 1, 2027 and early adoption is permitted.

SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial statements"

SFAS 118 supersedes SFAS 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the Entity financial performance and how these measures compare to those defined in SFAS 118.

Even though SFAS 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

As at 31 December 2025, the Entity is still evaluating the potential impact of the implementation of above standards amendment issued, but not yet effective, on the Entity financial statements in particular foreign exchange differences currently in operating profit might need to be disaggregated, specific requirements on the category in which derivative gains or losses are recognised, significant new disclosures required and following potential impacts of the implementation of these standards on the Entity financial statements.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank Papua.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank Papua jika:

- suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank Papua; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank Papua; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank Papua;
- suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank Papua;
- suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank Papua sebagai *venturer*;
- suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank Papua;
- suatu pihak adalah anggota keluarga dekat individu yang diuraikan dalam huruf (a) atau (d);
- suatu pihak dalam entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam huruf (a) atau (e);
- suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank Papua atau entitas terkait Bank Papua.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Transaction with Related Parties

In the normal course of its business, Bank Papua implemented the changes on SFAS No. 224 "Related Party Disclosure". This revised SFAS requires the disclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised SFAS has a impact to the related disclosure in the financial statements of Bank Papua.

The Bank Papua consider the following as their related parties:

- a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or controlled by, under common control with Bank Papua, (ii) has significant influence over Bank Papua, or (iii) has joint control over Bank Papua;*
- an entity which is a member of the same group as Bank Papua;*
- an entity which is a joint ventures of a third party in which Bank Papua have ventured in;*
- a member of key management personnel of Bank Papua;*
- a close family member of the person described in clause (a) or (d);*
- an entity which is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (a) or (e);*
- an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either Bank Papua or an entity related to Bank Papua.*

This transaction is made on the basis of terms agreed by both parties, where such terms are not the same as other transactions which may be undertaken with unrelated parties.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the notes to financial statements those that relevant and its detail are presented in Note 37 of the financial statements.

d. Financial Assets and Liabilities

(i) Classification

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- *Leverage feature*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Valuation of business models (continued)

- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;
- *Leverage feature*;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. Those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- Other financial liabilities.
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109		Golongan/Class	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>	
	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Kas/ <i>Cash</i>	
		Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>	
		Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ <i>Placements with other banks and Bank Indonesia</i>	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ <i>Securities purchased under agreements to resell</i>	
		Pinjaman yang diberikan/ <i>Loans</i>	
		Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i> Lain-lain/ <i>Others</i>
		Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i>	
		Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>	
		Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>	
		Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	Setoran jaminan/ <i>Security deposit</i>
			Utang bunga/ <i>Interest payable</i>
			Utang nasabah/ <i>Payable to customers</i>
		Lain-lain/ <i>Others</i>	
		Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	
	Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ <i>Loan commitment and financial guarantee contract</i>	Fasilitas kredit yang belum digunakan/ <i>Unused loan facilities (committed)</i>	
		Garansi bank yang diberikan/ <i>Bank Guarantees issued</i>	



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Bank Papua berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Bank pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
- b. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through*)
 - (a) Bank Papua telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank Papua tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

- a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that Bank Papua commit to purchase or sell the assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

The Bank upon initial recognition, may designate certain financial assets and financial liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise.

(iii) Subsequent measurement

- a. Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.
- b. Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when:
 - The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
 - The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and
 - Either (a) Bank Papua has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) Bank Papua has neither transferred nor retained substantially all the risks and substantially all the risks and reward of the asset, but has transferred control of the asset.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

Ketika Bank Papua telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*) dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank Papua yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(iv) Derecognition (lanjutan)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

When Bank Papua has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of Bank Papua continuing involvement on the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the bank and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

Where an existing financial liability is replaced by another instrument from the same lender at a substantially different conditions, or at the condition of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference resulted from such an arrangement are recognized in the statements of comprehensive income respectively.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank Papua mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

(vi) Reclassification of financial assets

Bank Papua reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank Papua memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offsetting to each other and the net amount is presented in the financial statement when, and only when, Bank Papua have a legal right to offset on the recognized amounts and there is an intention either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortization cost of a financial asset or a financial liability is the amount of the financial asset or liability valued at initial recognition less principal repayments, added or deducted by the cumulative amortization using the effective interest rate method calculated by the difference between the initial recognized value with the maturity value, and deducted by impaired value.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction on the measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Bank. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model *risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direviu dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Bank holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

(x) Modifikasi Aset Keuangan

Bank terkadang melakukan renegotiasi atau dalam hal lain modifikasi atas arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam bentuk pinjaman. Saat ini terjadi, Bank menilai apakah syarat-syarat pinjaman yang baru berbeda secara substansial dibanding dengan syarat-syarat pinjaman sebelumnya. Bank melakukan hal ini dengan mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor di bawah ini:

- Jika peminjam berada dalam kesulitan keuangan, apakah modifikasi tersebut mengurangi arus kas kontraktual ke nilai yang diharapkan dapat dibayarkan oleh peminjam;
- Perpanjangan signifikan dari waktu pinjaman dimana peminjam tidak berada dalam kesulitan keuangan;
- Perubahan signifikan dari suku bunga; dan
- Perubahan mata uang pinjaman.

Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Bank menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegotiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Bank juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan dimana renegotiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laba rugi sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

(x) Modification of Financial Assets

Bank sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans. When this happens, Bank assesses whether the new terms are substantially different to the original terms. Bank does this by considering, among others, the following factors:

- If the borrower is in financial difficulty whether the modification merely reduces the contractual cash flows to amounts the borrower is expected to be able to pay;
- Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty;
- Significant change in the interest rate; and
- Change in the loan's currency.

If the terms are substantially different, Bank derecognises the original financial asset and recognises a new asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Bank also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in profit or loss as a gain or loss on derecognition.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(x) Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegotiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Bank menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasian di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

(xi) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
 - instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
 - instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Staging Criteria

Instrumen Keuangan Stage 1, mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Modification of Financial Assets (continued)

If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and Bank recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in statements of profit or loss and other comprehensive income. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.

(xi) Allowance for impairment losses on Financial assets

- *The Bank recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;*
- *The Bank measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;*
 - *debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
 - *other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Staging Criteria

Stage 1 financial instruments include financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- (xi) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Instrumen Keuangan Stage 2, mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

Instrumen Keuangan Stage 3, mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Faktor utama dalam menentukan apakah aset keuangan memerlukan ECL 12 bulan (stage 1) atau ECL *lifetime* (stage 2) disebut dengan kriteria peningkatan signifikan dalam risiko kredit (*Significant Increase on Credit Risk*/"SICR"). Penentuan kriteria SICR memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

PSAK 109 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi *forward looking* dari *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD).

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat Bank menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

- (xi) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Stage 2 Financial Instruments, including financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have any objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

Stage 3 Financial Instruments, including financial instruments that have been shown to be objectively impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

- The Bank recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;
- There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;
- The Bank measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The main factor in determining whether the financial assets need 12-month ECL (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is Significant Increase on Credit Risk ("SICR") criteria. Determinations of SICR criteria needs review whether significant increase in credit risk occurred at each reporting date.

SFAS 109 requires supportable information about past events, current condition and forecasts of future economic conditions. Estimated movement on expected credit losses have to be reflected and directly consistent with changes in observed related data over the period. This ECL calculation needs forward-looking estimation from Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD") and Exposure At Default ("EAD").

For loan commitments and financial guarantee contracts, the date when Bank become a party in an irrevocable commitment is the date of initial recognition for implementation of impairment purposes.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- (xi) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Probability of Default ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (Stage 1) atau sepanjang umur/lifetime (Stage 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Loss Given Default ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. LGD diestimasi berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

Exposure at Default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur kerugian pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan;
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

- (xi) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Probability of Default ("PD")

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

Loss Given Default ("LGD")

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward-looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Group expects to receive. The Group estimates LGD based on the historical recovery rates and taking into account forward-looking economic assumptions if relevant.

Exposure at Default ("EAD")

The expected loss of balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward-looking economic assumptions where relevant.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis;
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- (xi) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugiannya dan kerugian kredit jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

- (xi) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

Restructured Financial Assets

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- (xi) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk -POCI.

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi kriteria yaitu pinjaman yang diberikan dengan nilai signifikan dan masuk dalam stage 3.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

- (xi) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Credit-impaired Financial Assets (continued)

- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;
- It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI.

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Individual impairment calculation

The Bank determines loans that must be evaluated for impairment individually, if they meet the criteria, namely loans with significant value and entered in stage 3.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- (xi) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

e. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

f. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari *Deposit Facility Bank Indonesia*, *Term Deposit*, *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

- (xi) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

e. Current accounts with other banks and Bank Indonesia

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

f. Placements with other banks and Bank Indonesia

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of *Bank Indonesia Deposit Facility*, *Term Deposit*, *call money* and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksa dana, obligasi, obligasi subordinasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan kepada Bank Papua dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Efek - efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Marketable securities and Government bonds

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposits of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds, subordinated bonds and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.

Government Bonds consist of Government Recapitalization Bonds issued to Bank Papua and other banks with respect to the recapitalization program of the Government and other bonds issued by the Government of Indonesia and other countries, that are not related to the recapitalization program, acquired through the primary and secondary markets.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Securities purchase/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Efek - efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas trade finance yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

j. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa

Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Securities purchase/sold under agreements to resell/repurchase (continued)

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days

Loans are classified as amortized cost.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

j. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statements of income upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Semua aset tetap berupa bangunan, disusutkan berdasarkan metode garis lurus, sedangkan untuk aset tetap selain bangunan disusutkan dengan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>
Bangunan	10 - 20
Kendaraan	4 - 8
Perlengkapan	4 - 8

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

All fixed assets as building are depreciated using the straight-line method, whereas fixed assets except building are depreciated using the double decline method over their expected useful lives as follows:

	<u>Tahun / Years</u>	
Buildings	10 - 20	Buildings
Vehicles	4 - 8	Vehicles
Office Equipment	4 - 8	Office Equipment

Land are stated at cost and not depreciated.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Construction in progress

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 - Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 - Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- Leases of low value assets.*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
 - The Bank has the right to operate the asset; and*
 - The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortized over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

k. Agunan yang diambil alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" di dalam sub akun aset tidak produktif.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai outstanding kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

The Bank account for a lease modification as a separate lease if both:

- The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;
- The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

k. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account, in the non productive asset sub account.

Foreclosed collaterals represent assets acquired by Bank, both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to the Bank. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs are charged as an expense in the statements of income when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Any such write-down is recognized in the statements of comprehensive income.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada bank lain.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

m. Simpanan nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank Papua.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

n. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 (sembilan puluh) hari, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities occurred, either to public customers or other Banks.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at cost to be amortized.

Refer to Notes 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

m. Deposits from customers

Current accounts represent customer's cash saved in Bank Papua that may be used as instruments of payments, and which may be withdrawn at any time by cheque or other orders of payments or transfers.

Saving account represent deposits of customer in Bank Papua that may only be withdrawn over the counter and Automated Teller Machine (ATM) or via SMS banking to order overbooking on accounts when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customer's deposits in Bank Papua that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and Bank Papua.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at cost to be amortized using effective interest rate method. Additional costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

Refer to Notes 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

n. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 (ninety) days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at cost to be amortised using effective interest rate method. Additional costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

Refer to Notes 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

p. Pendapatan bunga dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank Papua mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian pinjaman yang diberikan di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pinjaman yang diberikan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pinjaman yang diberikan yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) dan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pada saat pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Borrowed fund

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at its fair value and subsequently measured at cost to be amortized using the effective interest rate method. Cost to be amortized is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Refer to Notes 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

p. Interest income and interest expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in the statements of comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instruments (or, where appropriate, a shorter period) to arrive at the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, Bank Papua estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not to include future credit losses.

This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 (ninety) days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans, and interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan.

If a financial asset or Bank Papua of similar financial assets has diminished its value as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

r. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of comprehensive income.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenues on the transaction date as other operating income.

r. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

s. Imbalan kerja dan dana pensiun

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank Papua. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank Papua dan persyaratan minimum Undang-undang Cipta Kerja No.11/2020, mana yang lebih tinggi.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuarial ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*. Perkiraan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi nilai wajar aset program dan keuntungan aktuarial yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (*vested*), biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas liabilitas, keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Pendirian Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan keputusan No. KEP-057/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Jumlah kontribusi untuk dana pensiun adalah sebesar 7,5% dari penghasilan karyawan dan donasi dari pihak bank sebesar 17,5%. Beban manfaat pensiun meliputi beban jasa kini, beban amortisasi, beban jasa lalu, dan beban amortisasi koreksi perhitungan aktuarial. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus selama taksiran sisa masa kerja rata-rata peserta dana pensiun yang masih aktif bekerja. Penilaian liabilitas aktuarial menggunakan metode *Aggregated Cost Method-Modified*.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Taxation (continued)

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed or objected against, when the results of the appeal and objection are determined.

s. Employee benefits and pension plan

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

Post-employment benefits and other long-term employee benefits such as long service leave and awards are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank Papua's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 11/2020, whichever is higher.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*. The estimated benefit liability at statements of financial position date represents the present value of the defined benefits obligation at statements of financial position date, less the fair value of plan assets, and adjusted for unrecognized actuarial gains, non-vested past service costs, termination costs and curtailment gain or loss.

The post-employment benefits expense recognized during the current year consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs and reduced by employees' contributions and expected return on plan assets.

The Bank run a defined benefit pension program for all its permanent employees. The Establishment of the Employee Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya has been legalized by the Minister of Finance with the decree No. KEP-057/KM.17/2000 dated February, 14, 2000. Each employee should contribute 7.5 % from salary and Bank Papua donates 17.5 % of the salary. The cost of pension plan cover current service cost, amortization cost, past service cost, and amortization expense on actuarial corrections. Amortization is applied using the straight line method during the prediction of average work period of the corresponding pension fund participants which are still in active work. Actuarial liability valuation uses modified *Aggregated Cost Method*.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Imbalan kerja dan dana pensiun (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun/periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

t. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas bank umum Bab IV terkait aset non produktif.

u. Penurunan nilai aset non keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Employee benefits and pension plan (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. Furthermore, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year/period. Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the present value of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the aforementioned 10% threshold are recognized on a straightline method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

Actuarial gains or losses and past service costs from other long-term employee benefits are recognized directly in the statement of comprehensive income of the current period.

t. Allowance for impairment losses on nonearning assets and commitments and contingencies

The bank calculates the allowance for impairment losses referring to Financial Services Authority Regulation No.40/POJK.03/2019 concerning the assessment of the quality of commercial banks Chapter IV regarding non-productive assets.

u. Impairment of non-financial assets

The Bank assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

- significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- significant negative industry or economic trends.

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Penurunan nilai aset non keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

v. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba residual) dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

v. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year available to shareholders of ordinary shares (residual income) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the current year.

w. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements these where require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired *counterparty* is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the *counterparty's* financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2d. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback model* atas *likuiditas volatilitas* untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (lanjutan)

a. Allowances for impairment losses of financial assets (continued)

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics, but the individually impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and forecast on future economic condition. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2d. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

- d. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

- e. Umur ekonomis dari aset tetap

Bank Papua memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

- f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

- g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- 1) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- 2) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- 3) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (lanjutan)

- d. Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

- e. Useful life of premises and equipment

Bank Papua estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

- f. Deferred Tax Asset

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

- g. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- 1) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- 2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- 3) Significant negative industry or economic trends.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

h. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dana penghentian kontrak - Bank sebagai lessee

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

4. KAS

Kas seluruhnya dalam mata uang rupiah, terdiri dari:

	2025	2024
Kas Besar dan Kas Kecil	1,762,348,988,327	1,228,616,202,450
Kas pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	465,507,950,000	235,253,300,000
Jumlah Kas	2,227,856,938,327	1,463,869,502,450

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dimiliki oleh Bank.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (lanjutan)

g. Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

h. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

4. CASH

All of cash are denominated in Rupiah, consists of:

	2025	2024
Cash on Strong Room and Teller Cash In Automated Teller Machine (ATM)	1,762,348,988,327	1,228,616,202,450
	465,507,950,000	235,253,300,000
Total Cash	2,227,856,938,327	1,463,869,502,450

The Cash as of December 31, 2025 and 2024, is owned by the Bank.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	2025	2024	
Rupiah	1,136,671,063,929	3,343,533,751,313	Rupiah
Jumlah Giro pada Bank Indonesia	1,136,671,063,929	3,343,533,751,313	Total Current Accounts With Bank Indonesia

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 47a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 47a

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	2025	2024	
Rupiah	85,304,207,016	61,528,653,394	Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36,249)	(80,854)	Allowance for impairment losses
Neto	85,304,170,767	61,528,572,540	Net

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh giro pada bank lain merupakan transaksi giro dengan pihak ketiga.

As of December 31, 2025 and 2024, all current accounts with other banks ballances represent current account transactions with third parties.

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

c. By Financial Service Authority Rule collectibility

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 47b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 47b.

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025			
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	61,528,653,394	-	-	61,528,653,394
Transfer dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit/ <i>transfer from credit impaired financial assets</i>	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Perubahan lain/ <i>other movements</i>	23,775,553,622	-	-	23,775,553,622
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2025</i>	85,304,207,016	-	-	85,304,207,016



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024			
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	74,986,980,632	-	-	74,986,980,632
Transfer dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit/transfer from credit impaired financial assets	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/Repayment	-	-	-	-
Perubahan lain/other movements	(13,458,327,238)	-	-	(13,458,327,238)
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2024</i>	61,528,653,394	-	-	61,528,653,394

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025			
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	80,854	-	-	80,854
Pengalihan ke/Transfer to:				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/Lifetime ECL not credit impaired	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/Lifetime ECL credit impaired	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	(44,605)	-	-	(44,605)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/Repayment	-	-	-	-
Perubahan lain/other movements	-	-	-	-
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2025</i>	36,249	-	-	36,249



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024			
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	162,652	-	-	162,652
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month ECL	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/Lifetime ECL not credit impaired	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/Lifetime ECL credit impaired	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ Net remeasurement of loss allowance	(81,798)	-	-	(81,798)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	-	-	-	-
Pembayaran kembali/Repayment	-	-	-	-
Perubahan lain/other movements	-	-	-	-
Nilai tercatat 31 Desember/ Balance at December 31, 2024	80,854	-	-	80,854

e. Kisaran tingkat suku bunga per tahun

e. Range of annual interest rates

	Rupiah/Rupiah %	
2025	0.00% - 1.25%	2025
2024	0.00% - 1.25%	2024

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2025 and 2024 there are no current accounts with other banks balances which are used as collateral.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2025	2024	
Promes	2,590,000,000,000	605,000,000,000	Promissory notes
Sertifikat Deposito Bank Lain	19,305,019,305	49,139,378,387	Time deposits
Jumlah	2,609,305,019,305	654,139,378,387	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5,592,901,381)	(3,942,742,766)	Allowance for impairment losses
Neto	2,603,712,117,924	650,196,635,621	Net

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan penempatan dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2025 and 2024, the placement with Bank Indonesia and Other Banks are in Rupiah currency.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
(lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Sertifikat deposito bank lain:		
PT BPD Nusa Tenggara Timur	19,305,019,305	-
PT Bank Victoria Internasional Tbk	-	49,139,378,387
Jumlah	19,305,019,305	49,139,378,387
Promes:		
PT Bank Mega Tbk	500,000,000,000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)	300,000,000,000	-
PT BPD Maluku	275,000,000,000	50,000,000,000
PT BPD Sulawesi Tengah	200,000,000,000	50,000,000,000
PT BPD Sulawesi Tenggara	200,000,000,000	50,000,000,000
PT BPD Kalimantan Tengah	200,000,000,000	50,000,000,000
PT Bank OCBC NISP, Tbk	200,000,000,000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	200,000,000,000	-
PT BPD Kalimantan Selatan	165,000,000,000	-
PT BPD Lampung	100,000,000,000	30,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	100,000,000,000	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100,000,000,000	-
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	50,000,000,000	30,000,000,000
PT Bank Nasional Nobu Tbk	-	100,000,000,000
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	-	50,000,000,000
PT BPD Sulawesi Selatan Barat	-	50,000,000,000
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	-	50,000,000,000
PT BPD Bengkulu	-	35,000,000,000
PT BPD Jambi	-	35,000,000,000
PT BPD Nusa Tenggara Timur	-	25,000,000,000
Jumlah	2,590,000,000,000	605,000,000,000
Jumlah	2,609,305,019,305	654,139,378,387
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,592,901,381)	(3,942,742,766)
Neto	2,603,712,117,924	650,196,635,621

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh penempatan pada bank lain merupakan penempatan pada pihak ketiga.

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 47c.

d. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. By type (continued)

Details of placements with Bank Indonesia and other banks are as follows:

Time deposits:	
PT BPD Nusa Tenggara Timur	
PT Bank Victoria Internasional Tbk	
Total	
Promissory notes:	
PT Bank Mega Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)	
PT BPD Maluku	
PT BPD Sulawesi Tengah	
PT BPD Sulawesi Tenggara	
PT BPD Kalimantan Tengah	
PT Bank OCBC NISP, Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	
PT BPD Kalimantan Selatan	
PT BPD Lampung	
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Nasional Nobu Tbk	
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	
PT BPD Sulawesi Selatan Barat	
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	
PT BPD Bengkulu	
PT BPD Jambi	
PT BPD Nusa Tenggara Timur	
Total	
Total	
Allowance for Impairment Losses	
Net	

b. By relationship

As of December 31, 2025 and 2024, the placements with other banks balances represent placements with third parties.

c. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility placement with other bank and Bank Indonesia in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 47c.

d. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks that pledged as collateral as of December 31, 2025 and 2024.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
(lanjutan)

- e. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai
 Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Nilai tercatat 1 Januari/ *Balance at January 1*
 Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/
Net remeasurement of loss allowance
 Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/
New financial assets originated or purchased
 Perubahan lain/ *Other movements*
Nilai tercatat 31 Desember/
Balance at December 31, 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER
BANKS (continued)

- e. Gross carrying amount and allowance for impairment losses
 Movements in the gross carrying amount are as follows:

2025				
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Not Credit</i> <i>impaired</i>	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Credit impaired</i>	Jumlah/Total	
654,139,378,387	-	-	654,139,378,387	
-	-	-	-	
2,609,305,019,305	-	-	2,609,305,019,305	
(654,139,378,387)	-	-	(654,139,378,387)	
2,609,305,019,305	-	-	2,609,305,019,305	
2024				
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Not Credit</i> <i>impaired</i>	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Credit impaired</i>	Jumlah/Total	
2,409,432,698,627	-	-	2,409,432,698,627	
-	-	-	-	
654,139,378,387	-	-	654,139,378,387	
(2,409,432,698,627)	-	-	(2,409,432,698,627)	
654,139,378,387	-	-	654,139,378,387	



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
(lanjutan)

e. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah
sebagai berikut:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER
BANKS (continued)

e. Gross carrying amount and allowance for impairment losses
(continued)

The movements in the allowance for impairment losses are
as follows:

2025				
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired		Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	3,942,742,766	-	-	3,942,742,766
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	(3,942,742,766)	-	-	(3,942,742,766)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	5,592,901,381	-	-	5,592,901,381
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Perubahan lain/ <i>Other movements</i>	-	-	-	-
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2025</i>	5,592,901,381	-	-	5,592,901,381
2024				
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired		Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	3,744,910,900	-	-	3,744,910,900
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	1,727,303,169	-	-	1,727,303,169
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Perubahan lain/ <i>Other movements</i>	(1,529,471,303)	-	-	(1,529,471,303)
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2024</i>	3,942,742,766	-	-	3,942,742,766

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian
penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment
losses is adequate.

f. Kisaran tingkat suku bunga dan setara bagi hasil per tahun

f. Range of annual interest and equal to profit sharing

	Rupiah/Rupiah %	
2025	3.85% - 8.00%	2025
2024	6.32% - 6.50%	2024



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
(lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER
BANKS (continued)

g. Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

g. Classification of placement period by residual period to maturity date

	2025	2024
Penempatan Rupiah:		
sampai dengan 1 bulan	2,590,000,000,000	654,139,378,387
1 - 3 bulan	-	-
3 - 12 bulan	19,305,019,305	-
Jumlah Penempatan	2,609,305,019,305	654,139,378,387
Penyisihan Kerugian		
Penurunan Nilai	(5,592,901,381)	(3,942,742,766)
Neto	2,603,712,117,924	650,196,635,621

Rupiah Placement:
up to 1 month
1 to 3 months
3 to 12 months
Total Placement

Allowance for
Impairment Losses
Net

8. EFEK-EFEK

8. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2025	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Obligasi Pemerintah	10,000,000,000	10,181,500,000
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	10,000,000,000	10,181,500,000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	693,000,000,000	730,483,810,000
Reksadana	201,333,338,811	206,881,498,979
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	894,333,338,811	937,365,308,979
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Korporasi		
(setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp34.584.966)	338,000,000,000	337,965,415,034
Obligasi Pemerintah		
(setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp4.240.254.920)	440,000,000,000	444,240,254,920
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia		
(setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp93.150.361.844)	3,244,711,000,000	3,151,560,638,156
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	4,022,711,000,000	3,933,766,308,110
Jumlah efek-efek	4,917,044,338,811	4,881,313,117,089
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(105,754,073)
Efek-efek - bersih	4,917,044,338,811	4,881,207,363,016

Fair value through
profit and loss statement
Government Bonds

Total fair value through
profit and loss statement

Fair value through other
comprehensive income
Government Bonds
Mutual Fund

Total fair value through
other comprehensive income

Amortized cost
Corporate Bonds
(net of
amortized discount
or premium
of Rp34,584,966)
Government Bonds
(net of
amortized discount
or premium of
Rp4,240,254,920)
Bank Indonesia Rupiah Securities
(net of
amortized discount
or premium of
Rp93,150,361,844)

Total amortized cost

Total marketable securities
Allowance for impairment losses

Marketable securities - net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Per 31 Desember 2024, Bank Papua memiliki obligasi yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dengan nilai pembelian kembali masing-masing sebesar Rp875.459.921.151 selama 7-14 hari dan Rp95.416.484.369 selama 7 hari (Catatan 17)

	2024	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Obligasi Pemerintah	94,034,000,000	92,839,990,860
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	94,034,000,000	92,839,990,860
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	808,000,000,000	801,483,020,000
Reksadana	220,000,000,000	225,434,800,000
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,028,000,000,000	1,026,917,820,000
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Korporasi (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp63.769.510)	243,000,000,000	242,936,230,490
Obligasi Pemerintah (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp752.286.750)	1,082,000,000,000	1,082,752,286,750
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp95.715.584.296)	2,409,784,000,000	2,314,068,415,704
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	3,734,784,000,000	3,639,756,932,944
Jumlah efek-efek	4,856,818,000,000	4,759,514,743,804
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(121,535,374)
Efek-efek - bersih	4,856,818,000,000	4,759,393,208,430

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat transaksi efek-efek dengan pihak berelasi.

	2025	2024
Pihak ketiga		
Obligasi	1,522,870,979,954	2,220,011,528,100
Sekuritas Rupiah		
Bank Indonesia	3,151,560,638,156	2,314,068,415,704
Reksadana	206,881,498,979	225,434,800,000
Jumlah pihak ketiga	4,881,313,117,089	4,759,514,743,804
Cadangan kerugian penurunan nilai	(105,754,073)	(121,535,374)
Jumlah	4,881,207,363,016	4,759,393,208,430

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. By type (continued)

As of December 31, 2024, Bank Papua has bonds that are sold with a repurchase agreement (repo) with a repurchase value of Rp875,459,921,151 for 7-14 days and Rp95,416,484,369 for 7 days respectively (Note 17).

Fair value through profit and loss statement
Government Bonds
Total fair value through profit and loss statement
Fair value through other comprehensive income
Government Bonds
Mutual Fund
Total fair value through other comprehensive income
Amortized cost
Corporate Bonds (net of amortized discount or premium of Rp63,769,510)
Government Bonds (net of amortized discount or premium of Rp752,286,750)
Bank Indonesia Rupiah Securities (net of amortized discount or premium of Rp95,715,584,296)
Total amortized cost
Total marketable securities
Allowance for impairment losses
Marketable securities - net

b. By relationship

As of December 31, 2025 and 2024, there were no marketable securities transactions with related parties.

Third parties
Bonds
Bank Indonesia Rupiah Securities
Mutual funds
Total third parties
Allowances for impairment losses
Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c. Berdasarkan penerbit

c. By issuer

	2025	2024	
Pemerintah Republik Indonesia	4,543,347,702,055	4,516,578,513,314	Government of the Republic of Indonesia
Korporasi	337,965,415,034	242,936,230,490	Corporates
Jumlah	4,881,313,117,089	4,759,514,743,804	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(105,754,073)	(121,535,374)	Allowances for impairment losses
Jumlah	4,881,207,363,016	4,759,393,208,430	Total

d. Berdasarkan peringkat

d. By rating

	2025			
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai wajar/ Fair value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi				Fair value through profit and loss
FR0109	Fitch	BBB	10,181,500,000	FR0109
Jumlah Nilai wajar melalui laporan laba rugi			10,181,500,000	Total Fair value through profit and loss
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain				Fair value through other comprehensive income
Obligasi Pemerintah				Government Bonds
FR0106	Fitch	BBB	230,641,250,000	FR0106
FR0103	Fitch	BBB	207,953,460,000	FR0103
FR0087	Fitch	BBB	134,617,600,000	FR0087
FR0096	Fitch	BBB	105,467,000,000	FR0096
FR0100	Fitch	BBB	51,804,500,000	FR0100
Reksadana	-	-	206,881,498,979	Mutual Funds
Jumlah Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain			937,365,308,979	Total Fair value through other comprehensive income
Biaya perolehan diamortisasi				Amortized cost
Obligasi				Bonds
Obligasi Pemerintah:				Government Bonds:
FR0075	Fitch	BBB	172,496,171,880	FR0075
FR0064	Fitch	BBB	170,296,887,926	FR0064
FR0065	Fitch	BBB	101,447,195,114	FR0065
Sub jumlah			444,240,254,920	Sub total
Obligasi Korporasi:				Corporate Bonds:
Obligasi Berkelanjutan I				Obligasi Berkelanjutan I
BJB Tahap I				BJB Tahap I
Tahun 2024 Seri A	Pefindo	AA	15,000,000,000	Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III				Obligasi Berkelanjutan III
Bank Sulselbar tahap I				Bank Sulselbar tahap I
Tahun 2021 Seri B	Pefindo	A+	26,966,706,934	Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I				Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I
Bank Mandiri tahap I				Bank Mandiri tahap I
Tahun 2023 Seri A	Pefindo	AAA	100,000,000,000	Tahun 2023 Seri A
Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I				Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I
BNI Tahun 2022				BNI Tahun 2022
Seri B	Pefindo	AAA	10,000,000,000	Seri B



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

2025					
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai wajar/ Fair value			
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)			Amortized cost (continued)		
Obligasi Korporasi:			Corporate Bonds:		
(Lanjutan)			(continued)		
Obligasi Berwawasan Lingkungan			Obligasi Berwawasan Lingkungan		
Berkelanjutan I			Berkelanjutan I		
BRI tahap II			BRI tahap II		
Tahun 2023 Seri C	Pefindo	AAA	Tahun 2023 Seri C		
Obligasi Berwawasan Lingkungan			Obligasi Berwawasan Lingkungan		
Berkelanjutan I			Berkelanjutan I		
BRI tahap III			BRI tahap III		
Tahun 2024 Seri C	Pefindo	AAA	Tahun 2024 Seri C		
Obligasi Berkelanjutan I			Obligasi Berkelanjutan I		
Bank Jatim tahap I			Bank Jatim tahap I		
Tahun 2025 Seri A	Pefindo	AA-	Tahun 2025 Seri A		
Obligasi Berkelanjutan I			Obligasi Berkelanjutan I		
Bank Jatim tahap I			Bank Jatim tahap I		
Tahun 2025 Seri B	Pefindo	AA-	Tahun 2025 Seri B		
Obligasi Berkelanjutan I			Obligasi Berkelanjutan I		
Bank Mandiri tahap I			Bank Mandiri tahap I		
Tahun 2025 Seri C	Pefindo	AAA	Tahun 2025 Seri C		
Obligasi Berwawasan Lingkungan			Obligasi Berwawasan Lingkungan		
Berkelanjutan I			Berkelanjutan I		
BRI tahap I			BRI tahap I		
Tahun 2022 Seri C	Pefindo	AAA	Tahun 2022 Seri C		
Sub Jumlah			Sub Total		
Jumlah obligasi			Total bonds		
Sekuritas Rupiah			Bank Indonesia		
Bank Indonesia	-	-	Rupiah Securities		
Jumlah Sekuritas Rupiah			Total Bank Indonesia		
Bank Indonesia			Rupiah Securities		
Jumlah biaya perolehan diamortisasi		3,933,766,308,110	Total amortized cost		
Jumlah efek-efek		4,881,313,117,089	Total marketable securities		
Cadangan kerugian penurunan nilai		(105,754,073)	Allowance for impairment losses		
Jumlah efek-efek - bersih		4,881,207,363,016	Marketable securities - net		
2024					
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai wajar/ Fair value			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			Fair value through profit and loss		
FR0103	Fitch	BBB	FR0103		
FR0096	Fitch	BBB	FR0096		
Jumlah Nilai wajar melalui laporan laba rugi		92,839,990,860	Total Fair value through profit and loss		



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

2024		
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai wajar/ Fair value
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)		
Nilai Wajar Melalui		
Penghasilan Komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah		
FR0103	Fitch	BBB
FR0059	Fitch	BBB
FR0081	Fitch	BBB
FR0087	Fitch	BBB
FR0096	Fitch	BBB
FR0078	Fitch	BBB
FR0100	Fitch	BBB
Reksadana	-	-
		225,434,800,000

Jumlah Nilai Wajar Melalui
Penghasilan Komprehensif
lain

1,026,917,820,000

Biaya perolehan diamortisasi

Obligasi

Obligasi Pemerintah:

PBS 017

FR0081

FR0075

FR0064

FR0065

Sub jumlah

Fitch

Fitch

Fitch

Fitch

Fitch

BBB

BBB

BBB

BBB

BBB

455,315,786,932

182,758,904,666

172,637,062,406

170,432,649,318

101,607,883,428

1,082,752,286,750

Obligasi Korporasi:

Obligasi Berkelanjutan I

BJB Tahap I

Tahun 2024 Seri A

Obligasi Berkelanjutan III

Bank Sulselbar tahap I

Tahun 2021 Seri B

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

Berkelanjutan I

Bank Mandiri tahap I

Tahun 2023 Seri A

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

(Green Bond) I

BNI Tahun 2022

Seri B

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

Berkelanjutan I

BRI tahap II

Tahun 2023 Seri B

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

Berkelanjutan I

BRI tahap II

Tahun 2023 Seri C

Pefindo

Pefindo

Pefindo

Pefindo

Pefindo

Pefindo

AA-

A+

AAA

AAA

AAA

AAA

15,000,000,000

26,935,922,786

100,000,000,000

10,000,000,000

20,000,000,000

15,000,000,000

Amortized cost (continued)
Fair value through
other comprehensive income

Government Bonds

FR0103

FR0059

FR0081

FR0087

FR0096

FR0078

FR0100

Mutual Funds

Total Fair value through
other comprehensive
income

Amortized cost

Bonds

Government Bonds:

PBS 017

FR0081

FR0075

FR0064

FR0065

Sub total

Corporate Bonds:

Obligasi Berkelanjutan I

BJB Tahap I

Tahun 2024 Seri A

Obligasi Berkelanjutan III

Bank Sulselbar tahap I

Tahun 2021 Seri B

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

Berkelanjutan I

Bank Mandiri tahap I

Tahun 2023 Seri A

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

(Green Bond) I

BNI Tahun 2022

Seri B

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

Berkelanjutan I

BRI tahap II

Tahun 2023 Seri B

Obligasi Berwawasan

Lingkungan

Berkelanjutan I

BRI tahap II

Tahun 2023 Seri C



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

		2024	
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai wajar/ Fair value	
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)			
Obligasi (lanjutan)			
Obligasi Korporasi: (lanjutan)			
Obligasi Berwawasan Lingkungan			
Berkelanjutan I			
BRI tahap III			
Tahun 2024 Seri C	Pefindo	AAA	50,000,307,704
Obligasi Berwawasan Lingkungan			
Berkelanjutan I			
BRI tahap I			
Tahun 2022 Seri C	Pefindo	AAA	6,000,000,000
Sub Jumlah			242,936,230,490
Jumlah obligasi			1,325,688,517,240
Sekuritas Rupiah			
Bank Indonesia	-	-	2,314,068,415,704
Jumlah Sekuritas Rupiah			2,314,068,415,704
Jumlah biaya perolehan diamortisasi			3,639,756,932,944
Jumlah efek-efek			4,759,514,743,804
Cadangan kerugian penurunan nilai			(121,535,374)
Jumlah efek-efek - bersih			4,759,393,208,430

e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas efek-efek sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 47d.

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By rating (continued)

		2024	
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai wajar/ Fair value	
Amortized cost (continued)			
Bonds (continued)			
Corporate Bonds: (continued)			
Obligasi Berwawasan Lingkungan			
Berkelanjutan I			
BRI tahap III			
Tahun 2024 Seri C			
Obligasi Berwawasan Lingkungan			
Berkelanjutan I			
BRI tahap I			
Tahun 2022 Seri C			
Sub Total			
Total bonds			
Bank Indonesia			
Rupiah Securities			
Total Bank Indonesia			
Rupiah Securities			
Total amortized cost			
Total marketable securities			
Allowance for impairment losses			
Marketable securities - net			

e. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 47d.

f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

2025				
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	
Nilai tercatat 1 Januari/ Balance at January 1	4,759,514,743,804	-	-	4,759,514,743,804
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ Net remeasurement of loss allowance	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	3,507,383,388,156	-	-	3,507,383,388,156
Perubahan lain/other movements	(3,385,585,014,871)	-	-	(3,385,585,014,871)
Nilai tercatat 31 Desember/ Balance at December 31, 2025	4,881,313,117,089	-	-	4,881,313,117,089

- 58 -



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

	2024			
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Not Credit impaired</i>	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Credit impaired</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	3,781,931,847,767	-	-	3,781,931,847,767
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>		-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	2,914,688,134,268	-	-	2,914,688,134,268
Perubahan lain/ <i>other movements</i>	(1,937,105,238,231)	-	-	(1,937,105,238,231)
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2024</i>	4,759,514,743,804	-	-	4,759,514,743,804

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025			
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL 12 bulan/12month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Not Creditimpaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Creditimpaired	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	121,535,374	-	-	121,535,374
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	7,949,978	-	-	7,949,978
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	(23,731,279)	-	-	(23,731,279)
Perubahan lain/ <i>other movements</i>		-	-	-
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2025</i>	105,754,073	-	-	105,754,073



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024			
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Creditimpaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Creditimpaired		Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	64,276,520	-	-	64,276,520
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	219,198,010	-	-	219,198,010
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Perubahan lain/ <i>other movements</i>	(161,939,156)	-	-	(161,939,156)
Nilai tercatat 31 Desember/ <i>Balance at December 31, 2024</i>	121,535,374	-	-	121,535,374

g. Tingkat suku bunga per tahun

g. Annual interest rates

	Rupiah/Rupiah %	
Suku bunga kontrak		<i>Contractual rate</i>
2025	5.13% - 8.75%	2025
2024	5.14% - 7.62%	2024

h. Klasifikasi efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

h. Classification of owned securities until maturity dates based on residual age until maturity date are as follows:

	2025	2024	
1 - 3 bulan	99,758,091,551	959,920,988,525	1 to 3 months
3 - 12 bulan	3,166,802,546,605	2,141,912,718,777	3 to 12 months
12 - 60 bulan	393,262,302,960	595,746,879,808	12 to 60 months
di atas 60 bulan	1,221,490,175,973	1,061,934,156,694	over 60 months
Jumlah efek-efek	4,881,313,117,089	4,759,514,743,804	Total marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(105,754,073)	(121,535,374)	Allowance for impairment losses
Jumlah efek-efek - bersih	4,881,207,363,016	4,759,393,208,430	Marketable securities - net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN DIJUAL KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Rincian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp737.935.335.000 dan RpNihil dengan rincian sebagai berikut:

The details of securities purchased under agreements to resell as at 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp737,935,335,000 and RpNil, respectively, are as follows:

2025

Pihak penjual/ Counterparty	Jangka waktu/ Period	Tanggal jual kembali/ Resell/ date	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Nilai jual kembali/ Resell amount	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai tercatat/ Carrying amount
Surat utang negara/ Government Bonds						
Bank KB Indonesia, Tbk	7 hari/days	6-Jan-26	147,350,391,000	147,487,345,002	136,954,002	147,350,391,000
Bank Nationalnobu	8 hari/days	7-Jan-26	196,402,300,000	196,613,105,135	210,805,135	196,402,300,000
Bank CIMB Niaga	8 hari/days	8-Jan-26	394,182,644,000	394,600,477,602	417,833,602	394,182,644,000
			737,935,335,000	738,700,927,739	765,592,739	737,935,335,000

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

Annual fixed interest rates:

	Persentase/ Percentage (%)	Contractual interest rate:
Suku bunga kontrak: 2025	4,20% - 4,83%	2025

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

10. LOANS

a. Berdasarkan jenis dan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga

a. By type and transactions with related parties and third

	2025	2024	
Pihak berelasi			Related parties
Modal kerja	462,327,820,001	428,970,969,211	Working capital
Karyawan	20,662,009,683	21,035,836,124	Employees
Program pemerintah	519,341,229	367,520,975	Government programs
Konsumsi	441,867,070	455,520,832	Consumer
Jumlah pihak berelasi	483,951,037,983	450,829,847,142	Total related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6,247,083,640)	(2,134,783,362)	Allowances for impairment losses
Jumlah pihak berelasi - bersih	477,703,954,343	448,695,063,780	Total related parties - net
Pihak ketiga			Third parties
Konsumsi	12,263,597,151,977	11,526,332,177,568	Consumer
Sindikasi	5,635,244,928,332	6,303,627,124,375	Syndicated
Modal kerja	1,673,338,433,859	1,745,863,539,600	Working capital
Investasi	813,046,081,832	884,646,413,633	Investment
Karyawan	687,747,025,296	662,888,612,347	Employees
Program pemerintah	996,283,842,477	219,745,771,396	Government programs
Jumlah pihak ketiga	22,069,257,463,773	21,343,103,638,919	Total third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(465,193,894,856)	(629,052,190,462)	Allowances for impairment losses
Jumlah pihak ketiga - bersih	21,604,063,568,917	20,714,051,448,457	Total third parties - net
Jumlah kredit yang diberikan	22,081,767,523,260	21,162,746,512,237	Total loans



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- a. Berdasarkan jenis dan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka dan jaminan lainnya yang dapat diterima oleh Bank Papua.

- b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2025	2024
Rumah Tangga	13,763,899,268,068	12,219,553,977,167
Konstruksi	4,480,387,691,147	4,725,245,692,248
Hotel, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,094,088,089,051	1,149,207,145,705
Perdagangan besar dan eceran	900,102,062,435	896,690,879,551
Pertambangan dan penggalian	544,264,938,828	609,533,504,993
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	462,886,530,361	430,293,911,042
Aktivitas keuangan dan asuransi	328,836,604,969	510,753,930,312
Industri Pengolahan	321,257,027,729	367,989,694,833
Pengangkutan dan pergudangan	316,110,579,860	306,259,987,567
Listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	209,806,427,664	278,093,822,307
Pertanian, Perikanan dan kehutanan	63,356,056,340	232,653,626,794
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	27,785,959,131	25,781,852,286
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	20,828,301,713	22,479,283,285
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	3,220,847,839	4,052,385,153
Informasi dan komunikasi	2,917,524,063	1,898,342,833
Jasa pendidikan	2,978,884,194	1,719,528,788
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi	2,609,400,244	2,833,534,968
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2,528,249,565	1,193,489,925
Aktivitas jasa lainnya	2,399,214,291	2,746,883,450
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	2,272,080,973	4,825,767,341
Bukan lapangan usaha	647,336,378	62,218,740
Kesenian, hiburan dan rekreasi	25,426,913	64,026,773
Jumlah	22,553,208,501,756	21,793,933,486,061
Cadangan kerugian penurunan nilai	(471,440,978,496)	(631,186,973,824)
Bersih	22,081,767,523,260	21,162,746,512,237

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. LOANS (continued)

- a. By type and transactions with related parties and third parties (continued)

Loans were generally collateralized by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell, current accounts, saving accounts, time deposits and by other guarantees that were accepted by Bank Papua.

- b. By economic sector

Household
Construction
Hotel, food and beverages
Wholesale and groceries
Mining and excavation
Government administration, defense and social securities
Financial and insurance activities
Manufacturing Industry
Transport and warehousing
Electricity, gas, steam/hot water and cold air
Agriculture, Fishery, and forestry
Leasing and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support
Real estate, rent, and service company
Human health activities and social activities
Information and communication
Education service
Household activities as employers; activities that produce goods and services by households that are used to meet
Professional, scientific and technical activity
Other service activities
Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities
Not in business sector
Arts, entertainment and recreation
Total
Allowances for impairment losses
Net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**10. LOANS (continued)**

c. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual

c. By assessment as collective and individual

	2025	2024	
Pokok			Principal
Individual	833,375,455,951	5,950,774,385,031	Individual
Kolektif	21,719,833,045,805	15,843,159,101,030	Collective
	22,553,208,501,756	21,793,933,486,061	
Cadangan kerugian penurunan nilai			Allowance for impairment losses
Individual	(240,140,650,819)	(261,839,017,641)	Individual
Kolektif	(231,300,327,677)	(369,347,956,183)	Collective
	(471,440,978,496)	(631,186,973,824)	
Bersih	22,081,767,523,260	21,162,746,512,237	Net

d. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

d. By Financial Service Authority Rule collectibility

Kolektibilitas Pinjaman yang diberikan sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 47e.

Collectibility loans in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 47e.

e. Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

e. Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

Rasio kredit bermasalah PT BPD Papua sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 47e.

The non-performing loans ratio of PT BPD Papua in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 47e.

h. Tingkat suku bunga per tahun

h. Annual interest rates

	Rupiah/Rupiah %	
Bunga kontrak		Contractual interest
2025	2,00% - 17.25%	2025
2024	2,00% - 17.45%	2024

Seluruh kredit yang diberikan pada tahun 2025 dan 2024 dalam mata uang Rupiah.

Loans for the years 2025 and 2024 all in Rupiah currency.

i. Kredit yang direstrukturisasi

i. Restructured loans

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2025 dan 2024:

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024	
Penurunan suku bunga Kredit	268,986,644,852	3,512,190,129	Reduction of Interest rates
Perpanjangan waktu			Extension of loan
Kredit yang diberikan	2,521,864,867,050	2,452,789,449,420	maturity dates
Penambahan fasilitas dan			Increase in credit facilities and
Penurunan suku bunga kredit	1,779,758,356	-	reduction in lending interest rates
Lainnya	743,812,497	811,165,482	Others
Jumlah	2,793,375,082,755	2,457,112,805,031	Total

Pinjaman yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 47e.

Restructured loans in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 47e.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**10. LOANS (continued)**

j. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit)

j. Terms (based on agreements covering loan)

	2025	2024	
<u>Nilai Pokok</u>			<u>Principal</u>
sampai dengan 1 tahun	1,302,118,935,844	1,633,005,097,284	up to 1 year
1 - 2 tahun	239,433,166,768	182,566,944,276	1 to 2 years
2 - 5 tahun	3,496,658,933,980	3,083,907,129,984	2 to 5 years
di atas 5 tahun	17,514,997,465,164	16,894,454,314,517	over 5 years
Jumlah kredit yang diberikan	22,553,208,501,756	21,793,933,486,061	Total loan

k. Sisa Umur Jatuh Tempo

k. Remaining Period to Maturity

	2025	2024	
<u>Nilai Pokok</u>			<u>Principal</u>
Sudah Jatuh Tempo	220,821,933,338	211,588,192,937	1 month
1 bulan	184,172,776,409	146,356,148,380	1 month
1 - 6 bulan	467,674,078,307	548,651,909,287	1 to 6 months
6 - 12 bulan	592,755,236,354	672,567,001,220	6 - 12 months
di atas 12 bulan	21,087,784,477,348	20,214,770,234,237	over 12 months
Jumlah kredit yang diberikan	22,553,208,501,756	21,793,933,486,061	Total loan

l. Kredit sindikasi

l. Syndicated loans

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndicated loans represent loans provided to debtors based on syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan Bank Papua dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.635.244.928.332 dan Rp6.303.627.124.375.

Bank Papua's participation in syndicated loans with other banks for the years ended December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp5,635,244,928,332 and Rp6,303,627,124,375 respectively.

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain adalah sebagai berikut:

The Bank's percentage participation in syndicated loans with other banks is as follow:

	2025	2024	
Porsi Partisipasi	3.00% - 64.81%	3.00% - 64.81%	Portion of Participation



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (continued)

m. Cadangan kerugian penurunan nilai

m. Allowance for impairment losses

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Kerugian Kredit atas aset keuangan yang dibelatau berasadari aset keuangan memburuk/ urchased Originated Credit Impaired Financial Assets	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari <i>Balance at January 1</i>	223,320,852,449	34,337,525,564	373,528,595,811	-	631,186,973,824
Pengalihan ke/Transfer to:					
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month ECL	(14,439,030,305)	1,644,092,617	12,794,937,688	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL not credit impaired	8,578,300,323	(15,894,820,460)	7,316,520,137	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL credit impaired	6,644,984,459	4,191,829,109	(10,836,813,568)	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ Net remeasurement of loss allowance	(159,276,783,414)	8,230,376,314	22,449,119,621	-	(128,597,287,479)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	19,786,424,946	1,174,908,924	1,744,976,157	-	22,706,310,027
Pembayaran kembali/Repayment	-	-	-	-	-
Penghapusbukuan/Write-offs	(2,116,095,932)	(1,197,832,599)	(50,541,089,345)	-	(53,855,017,876)
Perubahan lain/ Other movements	-	-	-	-	-
Nilai tercatat 31 Desember/ Balance at December 31 2025	82,498,652,526	32,486,079,469	356,456,246,501	-	471,440,978,496



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**10. LOANS (continued)****m. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)****m. Allowance for impairment losses (continued)**

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12 month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Kerugian Kredit atas aset keuangan yang dibelatau berasadari aset keuangan memburuk/ urchased Originated Credit Impaired Financial Assets	Jumlah/Total
Nilai tercatat 1 Januari <i>Balance at January 1</i>	253,677,477,945	24,145,068,258	338,421,660,300	-	616,244,206,503
Pengalihan ke/Transfer to:					
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month ECL	(29,117,270,349)	3,959,899,106	25,157,371,243	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL not credit impaired	9,068,476,474	(14,752,161,545)	5,683,685,071	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL credit impaired	4,078,480,100	2,535,562,758	(6,614,042,858)	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ Net remeasurement of loss allowance	(48,802,138,964)	21,546,968,539	46,487,082,794	-	19,231,912,369
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	49,396,976,465	812,922,972	501,655,329	-	50,711,554,766
Pembayaran kembali/Repayment	-	-	-	-	-
Penghapusbukuan/Write-offs	(14,981,149,222)	(3,910,734,524)	(36,108,816,068)	-	(55,000,699,814)
Perubahan lain/ Other movements	-	-	-	-	-
Nilai tercatat 31 Desember/ Balance at December 31 2024	223,320,852,449	34,337,525,564	373,528,595,811	-	631,186,973,824

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

n. Kredit yang diberikan yang dihapusbukukan**n. Loans written off**

Kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan oleh Bank Papua dicatat sebagai pinjaman yang diberikan ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. Bank Papua terus melakukan usaha penagihan atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan tersebut. Saldo hapus buku yang dilakukan pada tahun 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp53.855.017.876 dan Rp55.000.699.814.

The loans written off by Bank Papua are recorded as extra-comptable (off statements of financial position) in the administrative account. Bank Papua continues to pursue the collection of loans previously written off. The write-off balances carried out in 2025 and 2024 are Rp53,855,017,876 and Rp55,000,699,814, respectively.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

o. Kredit Program Pemerintah

Kredit Program Pemerintah terdiri dari Kredit Modal Kerja Mikro Papua Sejahtera, KPR Sejahtera, Kredit Modal Kerja KUR Mikro, Kredit Investasi KUR Mikro, Kredit Modal Kerja KUR Kecil, Kredit Investasi KUR Kecil, Kredit Investasi KUR Super Mikro dan Kredit Modal Kerja KUR Super Mikro dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya serta Kredit Modal Kerja Papeda, (Kredit Program Percepatan Akses Keuangan Daerah) dimana Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga dengan plafond maksimal Rp10.000.000/Debitur.

p. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan dan bank lain

Bank Papua memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan dan bank lain, yaitu:

	2025	2024
Bank lain:		
BPR Modern Express	177,557,545,192	123,716,960,065
BPR Arfak Indonesia	12,429,509,185	12,159,323,938
Perusahaan Pembiayaan:		
PT Mega Central Finance	86,038,581,808	135,553,048,916
PT BFI Finance, Tbk	13,775,668,189	135,953,939,843
Radana Bhaskara Finance, Tbk	23,167,968,553	51,143,681,909
Tirta Rindang Unggul Ekutama	16,678,955,457	33,298,160,362
Mandala Multifinance, Tbk	-	1,386,521,604
Jumlah	329,648,228,384	493,211,636,637

q. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

- 1) Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar / melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.
- 3) Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Papua per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 4,66% dan 5,29%.
- 4) Sektor usaha lainnya merupakan kredit konsumtif yang diberikan dalam bentuk Kredit Griya Bhakti, Kredit Purna Bhakti, Kredit Wira Bhakti serta kredit yang tidak dapat diklasifikasikan pada sektor-sektor di atas.
 - Kredit Griya Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan pembangunan dan renovasi rumah.
 - Kredit Abdi Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para karyawan Bank Papua berpenghasilan tetap untuk keperluan biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. LOANS (continued)

o. Government Credit Program

Government Program Loans consist of Prosperous Papua Micro Working Capital Loans, KPR Sejahtera Loans, Micro KUR Working Capital Loans, Micro KUR Investment Loans, Small KUR Working Capital Loans, Small KUR Investment Loans, Super Micro KUR Investment Loans and Super Micro KUR Working Capital Loans where the Government can provide part and/or all of the funds as well as Papeda Working Capital Loans, (Regional Financial Access Acceleration Program Credit) where the Regional Government provides interest subsidies with a maximum ceiling of Rp10,000,000/debtor.

p. Financing facilities with multi-finance companies and other banks

Bank Papua has financing arrangements with several multi-finance companies and other banks, there are:

	2025	2024
Other banks:		
BPR Modern Express	177,557,545,192	123,716,960,065
BPR Arfak Indonesia	12,429,509,185	12,159,323,938
Multi-finance companies		
PT Mega Central Finance	86,038,581,808	135,553,048,916
PT BFI Finance, Tbk	13,775,668,189	135,953,939,843
Radana Bhaskara Finance, Tbk	23,167,968,553	51,143,681,909
Tirta Rindang Unggul Ekutama	16,678,955,457	33,298,160,362
Mandala Multifinance, Tbk	-	1,386,521,604
Total	329,648,228,384	493,211,636,637

q. Other significant information related to loans

- 1) As of December 31, 2025 and 2024, there is neither any breach nor violation of Legal Lending Limit (LLL) to related parties and third parties as required by Regulation of Financial Services Authority.
- 2) For the years ended December 31, 2025 and 2024, there were no loans granted which breach / exceed the maximum Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia.
- 3) The micro, small and medium scale loans to total loans ratio for Bank Papua as of December 31, 2025 and 2024 were 4,66% and 5,29%, respectively.
- 4) Other business sector are consumer loans granted in form of Griya Bhakti Loan, Purna Bhakti Loan, Wira Bhakti Loan, and loan not classified in the above sector.
 - The Griya Bhakti Loan is a Loan facility granted to government employees who have fixed income for the purpose of house development or renovation.
 - The Abdi Bhakti loan is a loan facility granted to Bank Papua Employees who fixed income for consumer usage such as school fees, purchasing of house appliances, etc.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

q. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

- Kredit Wira Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan konsumtif seperti biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Adapun rincian kredit yang diberikan sektor lain-lain adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Wira Bhakti	11,709,490,200,795	10,183,385,043,962
Abdi Bhakti	692,483,784,546	673,116,386,326
Pra Purna Bhakti	421,978,685,549	284,224,584,748
Griya Bhakti	97,989,297,846	130,941,229,376
Purna Bhakti	34,506,903,373	32,397,646,404
Kendaraan	3,991,785,715	5,104,358,594
Multiguna	175,977,992	135,145,806
Lain-lain	803,101,641,536	908,546,698,621
Jumlah	13,763,718,277,352	12,217,851,093,837

- Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan.
- Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.
- Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.
- Kredit program pemerintah terdiri dari, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi KUR Mikro, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi KUR Kecil, serta Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi KUR Super Mikro . Saldo pinjaman yang diberikan dari program yang disalurkan dengan sistem *chanelling* dapat dirinci sebagai berikut:

	2025	2024
KMK KUR Kecil	105,611,304,264	118,842,683,979
KMK KUR Mikro	80,529,839,688	75,524,330,226
KI KUR Kecil	15,349,345,191	14,191,676,230
KMK KUR Super Mikro	2,023,999,648	2,384,678,928
KI KUR Mikro	1,919,883,246	1,905,802,294
KI KUR Super Mikro	13,921,371	-
Total	205,448,293,408	212,849,171,657

- Kredit yang dijamin pemerintah adalah pinjaman yang diberikan yang dijamin oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun Kota pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar Rp84.666.962 dan nihil.
- Pinjaman yang diberikan kepada karyawan bank merupakan pinjaman yang diberikan untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya yang dibebani bunga pada tahun 2025 dan 2024 berkisar 3,50% - 13,25% per tahun dengan jangka waktu kredit sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang bersangkutan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. LOANS (continued)

q. Other significant information related to loans (continued)

- The Wira Bhakti loan is a loan facility granted to fixed income Government Employees for consumer usage such as school fee, purchasing of home appliance, etc.

The details of Other Sector loans are as follows :

	2025	2024
Wira Bhakti	11,709,490,200,795	10,183,385,043,962
Abdi Bhakti	692,483,784,546	673,116,386,326
Pra Purna Bhakti	421,978,685,549	284,224,584,748
Griya Bhakti	97,989,297,846	130,941,229,376
Purna Bhakti	34,506,903,373	32,397,646,404
Vehicles	3,991,785,715	5,104,358,594
Multiguna	175,977,992	135,145,806
Other	803,101,641,536	908,546,698,621
Total	13,763,718,277,352	12,217,851,093,837

- Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell, and other collateral banks commonly accept.
- Working capital or investment loans are granted to the debtors for the purpose of working capital and procurement of capital goods.
- Consumer credit consist of home loan, vehicle loan, and other personal loans.
- Credit of government programs consist of Working Capital Loans and Micro KUR Investment Loans, Working Capital Loans and Small KUR Investment Loans, and Working Capital Loans and Super Micro KUR Investment Loans. Details of the channeling loans are as follows:

	2025	2024
KMK KUR Kecil	105,611,304,264	118,842,683,979
KMK KUR Mikro	80,529,839,688	75,524,330,226
KI KUR Kecil	15,349,345,191	14,191,676,230
KMK KUR Super Mikro	2,023,999,648	2,384,678,928
KI KUR Mikro	1,919,883,246	1,905,802,294
KI KUR Super Mikro	13,921,371	-
Total	205,448,293,408	212,849,171,657

- Credit which guaranted by Government is the credit that guaranted by the Province Government, District and city Government as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp84,666,962 and nihil.
- Credit to employees are for housing, vehicle, and other with interest rates at 2025 and 2024 ranging from 3,50% - 13,25% annually to fifteen years. Such loans will be repaid through salary cutting monthly for each employee receiving the loans.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

q. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

- 11) Syarat, kondisi dan perlakuan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi sama dengan yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 12) Kebijakan pemberian pinjaman yang diberikan ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses analisa pinjaman yang diberikan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, kecukupan agunan pinjaman yang diberikan, asas-asas perpinjaman yang diberikan yang sehat, ketentuan BMPK serta pemantauan dan evaluasi.
- 13) Persetujuan pemberian pinjaman yang diberikan dilakukan melalui suatu komite (komite pinjaman yang diberikan) yang melibatkan analis pinjaman yang diberikan, pemimpin departemen pemasaran kredit dana dan jasa, wakil pemimpin untuk KCU, pemimpin cabang dan/atau divisi (untuk pinjaman yang diberikan yang melebihi wewenang cabang). Pengajuan persetujuan pinjaman yang diberikan dilakukan setelah data dari nasabah sudah diperoleh secara lengkap.
- 14) Bank telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Papua dengan BPD Sumsel Babel sesuai dengan akta notaris Titiek Irawati S.S.H No.171 tanggal 24 Nopember 2012. Perjanjian Jual Beli Piutang No.053/P/DIR/2012, No.016/SE-BPD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No.054/P/DIR/2012, No.017/SE-BPD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012. Jumlah komitmen pembelian piutang ini sebesar Rp500.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah realisasi pembelian piutang sebesar Rp49.782.271.868 yang terdiri dari 595 debitur. Selama tahun 2025 telah terdapat pelunasan dari debitur, yang terdiri dari pelunasan dipercepat dan pelunasan dikarenakan jatuh tempo pinjaman. Jumlah yang tercatat pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.970.689 yang terdiri dari 2 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank Papua dan Bank Papua memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

Setelah pengalihan kredit tersebut, BPD Sumsel Babel akan bertindak sebagai pengelola pembayaran dari debitur dan mengadministrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Titiek Irawati S.S.H No.171 tanggal 24 November 2012 tentang hal pengelolaan piutang antara Bank Papua dan BPD Sumsel Babel. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Sumsel Babel mendapat imbalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Sumsel Babel dan diterima oleh Bank Papua.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. LOANS (continued)

q. Other significant information related to loans (continued)

- 11) Terms, conditions, and treatment of loans granted to related parties are similar to those granted to the third party.
- 12) Credit granted policies stated through an analysis process conforming to prudent policy, adequacy of collaterals, credit soundness, legal lending limit, monitoring and evaluation.
- 13) The approval of credit is conducted by credit committee involving credit analyst, fund and services credit marketing department leaders, vice general manager (for branches), branch and/or division leaders (for loans granted that exceed the authority of the branch). The application is submitted when complete data from debtor has been completely received.
- 14) Bank Papua purchased loans from PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) based on the agreement between the Bank Papua and BPD Sumsel Babel which was notarized under Notarial Deed No.171 dated November 24, 2012 of Titiek Irawati S.S.H.. Sales agreement No.053/P/DIR/2012, No.016/SE-BPD/XI/2012 dated November 28, 2012 and Cassie agreement No.054/P/DIR/2012, No.017/SE-BPD/XI/2012 dated November 28, 2012. The total commitment of the loans purchased amounted to Rp500,000,000,000. Up to December 31, 2013, the total realization of the loans of purchased amounted to Rp49,782,271,868 which consist of 595 debtors. During the year 2025 there were repayment of debtors, which consists of the advance payment and loan repayment due to the maturity. The total outstanding amount in the statements of financial position as of December 31, 2025 amounted to Rp22,970,689 which consist of 2 debtors.

The loans purchased transaction is a without recourse transaction. All right, ownership and interest of the loans are transferred to the Bank Papua and the Bank Papua obtains all benefits and risks on the loan.

After the purchase of loans, BPD Lampung act as an agent, or the party which manages the payment from debtors and administrative the debtor's loans document based on deed No.171 dated November 24, 2012 of Titiek Irawati S.S.H. As an agent, Sumsel Babel will receive a fee at 30% (thirty percent) of every debtor interest obligation paid by BPD Sumsel Babel and received by the Bank Papua.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- q. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Dalam hal terjadi tunggakan dari debitur, BPD Sumsel Babel secara aktif berkewajiban untuk melakukan penagihan kepada debitur untuk kepentingan Bank Papua sesuai prosedur yang berlaku. Setelah pembelian kredit tersebut, BPD Sumsel Babel akan bertindak selaku pihak yang melakukan penagihan kepada debitur, memelihara dan mengadministrasikan tagihan secara tertib untuk kepentingan Bank Papua dan melakukan penyeteroran atas pembayaran yang diterima dari debitur baik berupa angsuran, bunga dan atau liabilitas lainnya yang menjadi hak Bank Papua termasuk dalam pembayaran dipercepat.

Kredit tersebut merupakan kredit yang disalurkan BPD Sumsel Babel kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-provinsi Sumsel Babel, dengan kriteria, (a) memiliki kolektibilitas 1 (satu) / lancar, (b) jangka waktu disesuaikan dengan jangka waktu kredit setiap debitur maksimal 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal pengalihan, (c) suku bunga adalah sebesar suku bunga yang diatur dalam perjanjian kredit antara debitur dengan BPD Sumsel Babel.

- 15) Bank telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Papua dengan BPD Sulteng sesuai dengan akta notaris Rayan Riadi SH., M.Kn No.3 tanggal 6 Nopember 2024 terkait Perjanjian Sub-Partisipan.

Pinjaman transaksi khusus sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp950.000.000.000 yang merupakan plafond pinjaman. Khusus fasilitas kredit modal kerja pinjaman transaksi khusus sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp200.000.000.000.

Tingkat bunga dalam perjanjian yaitu 13,00% pertahun dan diperhitungkan *collection fee* untuk agen sebesar 0,50% pertahun sehingga bunga yang diberikan kepada bank Papua sebesar 12,50% pertahun. Jangka waktu perjanjian kredit terhitung sejak penandatanganan akad kredit sampai bulan Mei 2028. Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah realisasi pembelian piutang sebesar Rp126.664.704.081 yang terdiri dari 1 debitur.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. LOANS (continued)

- q. Other significant information related to loans (continued)

In the terms the debtors default, BPD Sumsel Babel is obliged to conduct the collection procedures from the debtors for the Bank Papua's interest in accordance with the applicable procedures. After the purchase of loan. BPD Sumsel Babel will act as a party who collect from debtors, maintain and adminstrate the loan for the Bank's interest and transfer the payment received from the debtors such as principal, interest and other liabilities payment, including advance payment from debtors.

These loans are consumptive loan which are provided by BPD Sumsel Babel to government employees (PNS), member of House of Representatives of Province and municipalities / regencies in the province of Sumsel Babel with criteria, (a) collectibility 1(one) / current, (b) period of loans adjusted for each debtor to maximum 180 (one hundred eighty) month since purchase date, (c) period of loans adjusted by remaining official duty between the debtor and BPD Sumsel Babel.

- 15) *The bank has made a credit purchase from PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng) as outlined in the cooperation agreement between Bank Papua and BPD Sulteng, in accordance with the notarial deed by Rayan Riadi SH., M.Kn No.3 dated November 6, 2024, related to the Sub-Participation Agreement.*

The special transaction loan is up to a principal amount not exceeding Rp950,000,000,000, which is the loan plafond. The specific working capital credit facility for the special transaction loan is up to a principal amount not exceeding Rp200,000,000,000.

The interest rate in the agreement is 13.00% per annum, with a collection fee for the agent of 0.50% per annum, resulting in an interest rate of 12.50% per annum to be provided to Bank Papua. The term of the credit agreement is effective from the signing of the credit deed until May 2028. As of December 31, 2025, the total realization of the receivable purchase is Rp126,664,704,081, consisting of 1 debtor.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

Rincian harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut :

11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS

Details of acquisition cost, accumulated depreciation, and book values of fixed assets is as follows:

	2025				
	Saldo Awal 1 Januari 2025 / Beginning Balance January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi dan penyesuaian / Reclassification and adjustment	Saldo Akhir 31 Desember 2025/ Ending Balance December 31, 2025
Biaya perolehan (Cost)					
Tanah (<i>Land</i>)	38,785,676,780	-	-	(856,000,000)	37,929,676,780
Bangunan Kantor (<i>Buildings</i>)	312,073,339,467	2,931,514,736	3,324,832,506	1,652,195,870	313,332,217,567
Perumahan Dinas (Houses)	25,514,796,658	488,976,900	512,072,722	-	25,491,700,836
Kendaraan Bermotor (<i>Vehicles</i>)	9,815,389,289	603,373,800	2,466,896,002	-	7,951,867,087
Inventaris Kantor (<i>Office Equipment</i>)	256,140,816,842	19,177,002,532	12,658,169,700	3,013,246,800	265,672,896,474
Inventaris Rumah Dinas (<i>House Equipment</i>)	10,797,864,411	785,831,837	1,044,170,014	-	10,539,526,234
Inventaris Lainnya (<i>Others</i>)	18,377,164,786	1,318,172,399	451,973,800	-	19,243,363,385
Aset Hak Guna (<i>Right of use of assets</i>)	50,786,072,074	32,210,690,785	20,292,826,382	-	62,703,936,477
Inventaris Dalam Penyelesaian (<i>Equipment In Progress</i>)	4,293,098,682	5,124,915,702	-	(6,592,907,443)	2,825,106,941
Bangunan Dalam Penyelesaian (<i>Building In Progress</i>)	9,232,702,854	17,605,734,412	-	(1,931,162,463)	24,907,274,803
Total biaya perolehan (Total cost)	735,816,921,843	80,246,213,103	40,750,941,126	(4,714,627,236)	770,597,566,584
Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)					
Bangunan Kantor (<i>Buildings</i>)	201,342,707,068	12,810,138,965	3,324,832,506	399,331,696	211,227,345,223
Perumahan Dinas (Houses)	14,411,468,734	1,126,656,212	512,072,722	-	15,026,052,224
Kendaraan Bermotor (<i>Vehicles</i>)	8,784,123,653	580,013,798	2,466,896,002	-	6,897,241,449
Inventaris Kantor (<i>Office Equipment</i>)	219,361,933,773	17,936,136,589	12,658,169,700	-	224,639,900,662
Inventaris Rumah Dinas (<i>House Equipment</i>)	8,746,303,039	1,107,511,927	1,044,170,014	-	8,809,644,952
Inventaris Lainnya (<i>Others</i>)	15,192,958,302	1,439,877,810	451,973,800	-	16,180,862,312
Aset Hak Guna (<i>Right of use of assets</i>)	26,563,770,059	20,833,987,196	20,292,826,382	240,147,638	27,345,078,511
Total akumulasi penyusutan (Total accumulated depreciation)	494,403,264,628	55,834,322,497	40,750,941,126	639,479,334	510,126,125,333
Nilai buku (Book value)	241,413,657,215				260,471,441,251



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS(continued)

	2024				
	Saldo Awal 1 Januari 2024 / Beginning Balance January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi dan penyesuaian / Reclassification and adjustment	Saldo Akhir 31 Desember 2024/ Ending Balance December 31, 2024
Biaya perolehan (Cost)					
Tanah (Land)	38,712,207,480	150,000,000	76,530,700	-	38,785,676,780
Bangunan Kantor (Buildings)	309,900,304,967	1,693,034,500	-	480,000,000	312,073,339,467
Perumahan Dinas (Houses)	23,963,314,658	752,482,000	-	799,000,000	25,514,796,658
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	9,381,465,289	433,924,000	-	-	9,815,389,289
Inventaris Kantor (Office Equipment)	238,913,421,316	21,722,258,498	-	(4,494,862,972)	256,140,816,842
Inventaris Rumah Dinas (House Equipment)	9,939,025,961	890,986,550	-	(32,148,100)	10,797,864,411
Inventaris Lainnya (Others)	17,304,559,246	1,142,960,440	-	(70,354,900)	18,377,164,786
Aset Hak Guna (Right of use of assets)	41,731,810,617	25,172,381,017	16,118,119,560	-	50,786,072,074
Inventaris Dalam Penyelesaian (Equipment In Progress)	2,745,517,963	1,885,212,719	-	(337,632,000)	4,293,098,682
Bangunan Dalam Penyelesaian (Building In Progress)	8,777,730,018	2,528,259,800	-	(2,073,286,964)	9,232,702,854
Total biaya perolehan (Total cost)	701,369,357,515	56,371,499,524	16,194,650,260	(5,729,284,936)	735,816,921,843
Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)					
Bangunan Kantor (Buildings)	188,430,598,930	12,912,108,138	-	-	201,342,707,068
Perumahan Dinas (Houses)	13,300,515,804	1,110,952,930	-	-	14,411,468,734
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	8,240,092,759	544,030,894	-	-	8,784,123,653
Inventaris Kantor (Office Equipment)	207,133,366,546	16,630,093,283	-	(4,401,526,056)	219,361,933,773
Inventaris Rumah Dinas (House Equipment)	7,672,977,501	1,100,348,638	-	(27,023,100)	8,746,303,039
Inventaris Lainnya (Others)	13,332,384,325	1,898,998,381	-	(38,424,404)	15,192,958,302
Aset Hak Guna (Right of use of assets)	21,637,115,325	21,436,506,188	16,118,119,589	(391,731,865)	26,563,770,059
Total akumulasi penyusutan (Total accumulated depreciation)	459,747,051,190	55,633,038,452	16,118,119,589	(4,858,705,425)	494,403,264,628
Nilai buku (book value)	241,622,306,325				241,413,657,215

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai

Details of gain on sale of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2025	2024	
Harga Jual	95,225,831	14,646,687	Proceeds
Nilai Buku	-	-	Book Value
Keuntungan	95,225,831	14,646,687	Gain



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Penjualan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp95.225.831 dan Rp14.646.687 merupakan aset tetap yang dihapuskan diperkirakan terjadi pada tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021.

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp55.834.322.497 dan Rp55.633.038.452 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tetap Bank Papua pada tanggal - tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada perusahaan-perusahaan asuransi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal - tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	December 31, 2025
Bangunan	85.00%	24,907,274,803	2026	Building
Inventaris	80.00%	2,825,106,941	2026	Equipment
Total		27,732,381,744		Total
31 Desember 2024	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	December 31, 2024
Bangunan	46.00%	9,232,702,854	2025	Building
Inventaris	61.00%	4,293,098,682	2025	Equipment
Total		13,525,801,536		Total

Pada tanggal 31 Desember 2025, bangunan dalam penyelesaian terdiri atas pembangunan gedung Kantor Cabang Bintuni, perencanaan rumah dinas Direktur Kepatuhan dan Komisaris, pekerjaan pembangunan rumah dinas Kantor Cabang Merauke, pekerjaan renovasi gedung Kantor Cabang Utama Manokwari, serta renovasi banking hall Kantor Cabang Sentani. Sementara itu, inventaris dalam penyelesaian terdiri atas pengadaan dan implementasi backup server HCI, pengadaan rumah ATM, dan pengadaan genset rumah dinas.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS(continued)

The Sale as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp95,225,831 and Rp14,646,687 are fixed assets that were write-off estimated to occur in 2024, 2023, 2022, and 2021.

The balances of depreciation amounting to Rp55,834,322,497 and Rp55,633,038,452 of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

As of December 31, 2025 and 2024, fixed assets of the Bank Papua were insured against risk of fire and theft.

As of December 31, 2025 and 2024 there were no fixed assets pledged as collateral.

The details of constructions in progress as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

As of December 31, 2025, construction in progress consists of the construction of the Bintuni Branch Office building, planning of official residences for the Compliance Director and Commissioners, construction of the Merauke Branch official residence, renovation works of the Manokwari Main Branch Office building, and renovation of the banking hall of the Sentani Branch Office. Meanwhile, inventories in progress consist of the procurement and implementation of an HCI backup server, procurement of ATM booths, and procurement of generators for official residences.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, bangunan dalam penyelesaian terdiri dari pembangunan gedung KC Bintuni, perencanaan rumah dinas Direktur Kepatuhan dan Komisaris, renovasi ruang KC Jakarta, Renovasi Ruang Divisi Manajemen Modal Manusia, serta Inventaris dalam penyelesaian terdiri dari pengadaan Jasa Aplikasi Human Capital Management System, Pengadaan Aplikasi Monitoring Pengelolaan Nasabah, Pengadaan Lisensi Windows Server dan Pekerjaan ganti dan pengadaan ac central Lantai 5.

Aset hak guna per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS(continued)

As of December 31, 2024, construction in progress consists of the construction of the Bintuni KC building, planning for the official residence of the Director of Compliance and Commissioners, renovation of the Jakarta KC room, renovation of the Human Capital Management Division room, as well as inventory in progress consisting of procurement of Human Capital Management System Application Services, Procurement of Customer Management Monitoring Applications, Procurement of Windows Server Licenses and work on replacing and procuring 5th Floor central air conditioning.

Right of use of assets as of Desember 31, 2025 and 2024 as follows:

2025					
	Saldo Awal 1 Januari 2025 / Beginning Balance January 1, 2025	Penambahan / Additions	Pengurangan / Disposals	Reklasifikasi dan penyesuaian / Reclassification and adjustment	Saldo Akhir 31 Desember 2025/ Ending Balance December 31, 2025
Biaya perolehan (Cost)					
Bangunan Kantor	25,893,858,379	13,329,899,532	10,895,671,868	-	28,328,086,043
Rumah Dinas	1,841,970,628	387,215,391	1,345,500,266	-	883,685,753
Kendaraan Bermotor	10,509,342,660	5,102,616,956	6,798,438,757	-	8,813,520,859
Ruang ATM	2,548,409,570	1,047,599,762	1,253,215,491	-	2,342,793,841
Mesin ATM	9,992,490,837	12,343,359,144	-	-	22,335,849,981
Jumlah/ Total	50,786,072,074	32,210,690,785	20,292,826,382	-	62,703,936,477
Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)					
Bangunan Kantor	14,770,187,867	8,596,083,057	10,895,671,868	79,383,559	12,549,982,615
Rumah Dinas	1,208,393,523	617,152,323	1,345,500,266	-	480,045,580
Kendaraan Bermotor	7,245,448,261	3,718,220,102	6,798,438,757	160,764,079	4,325,993,685
Ruang ATM	1,430,284,226	1,024,511,167	1,253,215,491	-	1,201,579,902
Mesin ATM	1,909,456,182	6,878,020,547	-	-	8,787,476,729
Jumlah/ Total	26,563,770,059	20,833,987,196	20,292,826,382	240,147,638	27,345,078,511
Nilai buku (book value)	24,222,302,015				35,358,857,966



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)**11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS(continued)**

2024					
	Saldo Awal 1 Januari 2024 / Beginning Balance January 1, 2024	Penambahan / Additions	Pengurangan / Disposals	Reklasifikasi dan penyesuaian / Reclassification and adjustment	Saldo Akhir 31 Desember 2024/ Ending Balance December 31, 2024
Biaya perolehan (Cost)					
Bangunan Kantor	26,920,737,124	8,510,384,722	9,537,263,467	-	25,893,858,379
Rumah Dinas	718,342,763	1,431,999,958	308,372,093	-	1,841,970,628
Kendaraan Bermotor	10,601,986,514	4,824,589,939	4,917,233,793	-	10,509,342,660
Ruang ATM	2,294,223,107	1,609,436,670	1,355,250,207	-	2,548,409,570
Mesin ATM	1,196,521,109	8,795,969,728	-	-	9,992,490,837
Jumlah/ Total	41,731,810,617	25,172,381,017	16,118,119,560	-	50,786,072,074
Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)					
Bangunan Kantor	13,698,616,945	11,000,566,255	9,537,263,468	(391,731,865)	14,770,187,867
Rumah Dinas	336,885,034	1,179,880,583	308,372,094	-	1,208,393,523
Kendaraan Bermotor	5,882,077,032	6,280,605,049	4,917,233,820	-	7,245,448,261
Ruang ATM	1,519,788,689	1,265,745,744	1,355,250,207	-	1,430,284,226
Mesin ATM	199,747,625	1,709,708,557	-	-	1,909,456,182
Jumlah/ Total	21,637,115,325	21,436,506,188	16,118,119,589	(391,731,865)	26,563,770,059
Nilai buku (book value)	20,094,695,292				24,222,302,015

Bank menyewa beberapa aset termasuk rumah dinas, gedung kantor, ruang ATM dan kendaraan. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

The Bank had rent a number of assets which include official houses, offices, ATM space, and vehicle. The average of lease term is 5 (five) years.

12. ASET LAIN-LAIN**12. OTHER ASSETS**

	2025	2024	
Uang muka lainnya	93,908,022,599	204,220,572,629	Other prepayment
Aset pajak tangguhan (lihat Catatan 20.e)	93,723,621,872	80,743,443,691	Deferred tax asset (see Notes 20.e)
Piutang bunga Pinjaman	58,730,809,836	55,818,492,729	Interest receivables
Biaya dibayar dimuka	31,659,490,908	36,356,420,945	Prepaid expenses
Bunga atas penempatan dan Surat berharga	27,283,108,211	30,823,857,409	Placement and marketable securities accrued interest
Pajak Penghasilan Lebih bayar (lihat catatan 20)	11,981,844,677	-	Overpayment of income tax (see Notes 20)
Persediaan kantor	2,479,493,020	3,145,849,733	Office supplies
Uang jaminan	2,032,000,000	2,060,500,000	Security deposit
Persediaan lainnya	1,743,653,809	2,326,729,558	Other inventory
Aset tidak produktif	1,242,778,379	-	Assets - non productive
Lainnya	3,629,708,804	16,375,561,680	Others
Jumlah	328,414,532,115	431,871,428,374	Jumlah

Aset tidak produktifAssets - non productive

Rincian atas aset tidak produktif adalah sebagai berikut:

Details of assets - non productive are as follows:

	2025	2024	
Agunan yang diambil alih	100,649,734,500	107,125,205,187	Foreclosed assets
Properti terbengkalai	1,424,542,623	169,210,927	Abandoned property
Total	102,074,277,123	107,294,416,114	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset tidak produktif (lanjutan)

	2025	2024
Cadangan kerugian penurunan nilai:		
Aset yang diambil alih	(100,649,734,500)	(107,125,205,187)
Properti terbengkalai	(181,764,244)	(169,210,927)
Total penyisihan	(100,831,498,744)	(107,294,416,114)
Bersih	1,242,778,379	-

Saldo Agunan yang Diambil Alih (AYDA) atau kompensasi atas pinjaman yang diberikan berupa tanah. Per 31 Desember 2025, Bank Papua telah membentuk penyisihan penghapusan atas AYDA pada Kantor Cabang Utama Jayapura dan Kantor Cabang Jakarta, serta atas properti terbengkalai pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Pembantu Youtefa dan Kantor Cabang Merauke. Pembentukan penyisihan tersebut mengacu pada POJK No.40/POJK.03/2019, yaitu sebesar 100% untuk AYDA yang telah diambil alih lebih dari 5 (lima) tahun. Sementara itu, untuk properti terbengkalai, sebagian aset telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali properti pada KCP Youtefa yang masa pengakuan masih kurang dari 1 (satu) tahun.

Saldo aset tidak produktif per 31 Desember 2025 sebesar Rp102.074.277.123, yang terdiri dari Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp100.649.734.500 dan properti terbengkalai sebesar Rp1.424.542.623. Saldo AYDA tersebut meliputi Rp90.441.324.500 pada Kantor Cabang Utama Jayapura dan Rp10.208.410.000 pada Kantor Cabang Jakarta. Sementara itu, saldo properti terbengkalai terdiri dari Kantor Pusat sebesar Rp89.887.050, KCP Youtefa sebesar Rp1.255.331.696, dan Kantor Cabang Merauke sebesar Rp79.323.877.

Berdasarkan risalah Komite Kredit tanggal 18 Desember 2015 dan 13 Oktober 2017, diputuskan pengambil alihan agunan atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), dari PT Trah Maju Tama dan PT Njonja Meneer. Kesepakatan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tersebut sudah disahkan dengan Akta Notaris tentang Akta Kesepakatan Penyerahan Secara Sukarela. Posisi liabilitas PT Trah Maju Tama dan PT Njonja Meneer per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp90.441.324.500 dan Rp10.208.410.000.

Saldo agunan PT Trah Maju sebesar Rp15.500.700.000 dengan rincian sebagai berikut:

- SHM No.07866 SU No.00350/2013, dan SHM No.4850 SU No.7547/1995 atas nama Sukron Hadiwijaya, total luas masing-masing 426 m², 847 m², dan 1.054 m², terletak di Kel. Caturtunggal Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, Kel. Sinduharjo Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, dan Kel. Condongcatur Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta dengan nilai agunan Rp12.007.400.0000.
- SHGB sebanyak 6 sertifikat terdiri dari No.11, 12, 13, 14, 15, 16 atas nama PT Purni Mekar Perkasa Jaya, luas masing-masing 24 M2 untuk 5 sertifikat dan 26 M2 untuk 1 sertifikat. Terletak di Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur dengan nilai agunan Rp1.245.600.000. Jatuh tempo tanggal 29 April 2043 untuk semua sertifikat.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

12. OTHER ASSETS (continued)

Assets - non productive (continued)

	2025	2024
Allowance for impairment losses:		
Foreclosed assets	(100,649,734,500)	(107,125,205,187)
Abandoned property	(181,764,244)	(169,210,927)
Total allowance	(100,831,498,744)	(107,294,416,114)
Net	1,242,778,379	-

The balance of foreclosed collateral (Foreclosed Assets/AYDA) or loan settlement compensation is in the form of land. As of December 31, 2025, Bank Papua has recognized an allowance for impairment on AYDA at the Jayapura Main Branch and Jakarta Branch, as well as on abandoned properties at the Head Office, Youtefa Sub-branch office and Merauke Branch. The allowance was established in accordance with POJK No.40/POJK.03/2019, amounting to 100% for AYDA that has been foreclosed for more than 5 (five) years. Meanwhile, for abandoned properties, some assets have exceeded the 5 (five) year holding period. Except for the property at Youtefa Sub-Branch Office (KCP Youtefa), whose recognition period is still less than one (1) year.

The balance of non-earning assets as of December 31, 2025 amounted to Rp102,074,277,123, consisting of Foreclosed Assets (AYDA) of Rp100,649,734,500 and abandoned properties of Rp1,424,542,623. The AYDA balance comprises Rp90,441,324,500 at the Jayapura Main Branch and Rp10,208,410,000 at the Jakarta Branch. Meanwhile, the balance of abandoned properties consists of Rp89,887,050 at the Head Office, Rp1,255,331,696 at the Youtefa Sub-Branch (KCP Youtefa), and Rp79,323,877 at the Merauke Branch.

On December 18, 2015 and October 13, 2017, credit committee decided to take over the collateral of PT Trah Maju Tama and PT Njonja Meneer as foreclosed asset. The agreement of foreclosed asset has been ratified by Notarial Deed on Agreement of Voluntary Commitment. The liability of PT Trah Maju Tama and Njonja Meneer ended December 31, 2025 in amount Rp90,441,324,000 and Rp10,208,410,000.

Collateral position PT Trah Maju amounted to Rp15,500,700,000 are as follows:

- SHM No.07866 SU No.00350/2013, and SHM No.4850 SU No.7547/1995 on behalf Sukron Hadiwijaya, the total area each of 426 m², 847 m², and 1.054 m², located on Kel. Caturtunggal Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, Kel. Sinduharjo Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, and Kel. Condongcatur Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta with collateral amounted Rp12,007,400,0000.
- Lands Right to Use certificate (SHGB) with 6 certificates consist of No.11, 12, 13, 14, 15, 16 on behalf PT Purni Mekar Perkasa Jaya, the total area each 24 M2 for 5 certificates and 26 M2 for 1 certificate. Located on Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, East Java with collateral amounted Rp1,245,600,000. Maturity date on April 29, 2043 for all certificates.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Saldo agunan PT Trah Maju sebesar Rp17.697.957.000 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

- c. SHM No.212 atas nama Kasmini dengan luas 5.100 M2. Terletak di Kel. Kumitir Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan nilai agunan sebesar Rp2.177.700.000.

Saldo agunan PT Nyonya Meneer sebesar Rp6.954.695.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHM No.504 dan 513 atas nama Charles Saerang, total luas masing-masing 205 m2 dan 579 m2, terletak di Kompleks bukit sari Jl bukit indah no.16 di Kel. Jagli Kec.Tembalang Kota Semarang dengan nilai agunan sebesar Rp3.414.840.000.
- b. SHM No.842 atas nama Charles Saerang, total luas 807m2, terletak di Jl Bukit Wisnu di Kel. Jagli Kec.Tembalang Kota Semarang dengan nilai agunan sebesar Rp3.539.855.000.

Nilai atas agunan di atas diperoleh dari hasil penilaian appraisal independen pada tahun 2023 dan 2025 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus, Ambur dan rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Hari Utomo dan Rekan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset - aset yang disebutkan di atas telah memadai.

Uang muka lainnya

Rekening uang muka lainnya terdiri dari ATM Bersama dan Hak ATM Prima merupakan uang muka yang signifikan masing-masing sebesar Rp16.537.435.341 dan Rp49.919.882.764 yang akan terselesaikan di hari berikutnya.

Terdapat saldo aset dalam penyelesaian atas pengembangan software Jojonomic untuk operasional kepegawaian sebesar Rp2.706.000.643, yang dicatat dalam akun Uang Muka Lainnya. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlanjutan dan manfaat ekonomis aset tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, manajemen tidak memiliki keyakinan memadai bahwa software tersebut akan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, manajemen membentuk cadangan penurunan nilai (impairment) atas aset dalam penyelesaian tersebut.

	2025	2024	
Uang Muka lainnya			Other Prepayment
Aset tak berwujud			Intangible Asset
dalam penyelesaian	2,706,000,643	-	on progress
Cadangan penurunan nilai	(2,706,000,643)	-	Allowance for impairment losses
Total	-	-	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

12. OTHER ASSETS (continued)

Collateral position PT Trah Maju amounted to Rp17,697,957,000 are as follows: (continued)

- c. Land ownership certificate (SHM) No.212 on behalf Kasmini with total area 5,100 M2. Located on Kel. Kumitir Kec Jatirejo Kab. Mojokerto, East Java Province with collateral amounted Rp2,177,700,000.

Collateral position PT Nyonya Meneer amounted to Rp6,954,695,000 are as follows:

- a. Land ownership certificate (SHM) No.504 and 513 on behalf Charles Saerang, the total area each 205 m2 and 579 m2, located on Kompleks bukit sari Jl Bukit Indah No.16 in Kel. Jagli Kec. Temalang Semarang City with collateral amounted Rp3,414,840,000.
- b. Land ownership certificate (SHM) No.842 on behalf Charles Saerang, the total area of 807m2, located on Jl Bukit Wisnu in Kel. Jagli Kec. Tembalang Semarang City with collateral amounted Rp3.539.855.000.

The value of the collateral was obtained from the results of the independent appraisal assessment in 2023 and 2025 by the Public Appraisal Service Office Damianus, Ambur and colleagues and Public Appraisal Service Office Hari Utomo and colleagues.

Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

Other prepayment

Other down payment accounts consist of ATM Bersama and Hak ATM Prima which are significant of Rp16,537,435,341 dan Rp49,919,882,764, respectively, which will be resolved in the next day.

There is an outstanding balance of assets under development related to the development of Jojonomic software for personnel operations amounting to Rp2,706,000,643, which is recorded under Other Advances. Management has performed an evaluation of the sustainability and economic benefits of such asset. Based on the results of the evaluation, management does not have sufficient assurance that the software will be implemented and generate future economic benefits. Accordingly, management has recognized an impairment allowance for the assets under development.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka terdiri dari biaya pelimpahan pertanggungan asuransi KPR FLPP pada PT Bank Papua sebesar Rp27.299.847.906. Berdasarkan Nota No. 591/UMK.Kko/2022 perihal proses amortisasi biaya pertanggungan Asuransi KPRS FLPP sampai dengan selesainya proses kredit untuk tahap 1, sedangkan untuk tahap 2 mengacu pada Nota No. 1282/UMK.Kko/2023 tanggal 21 Desember 2023.

13. LIABILITAS SEGERA

Akun ini merupakan kewajiban Bank Papua yang harus segera dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Rekening titipan	329,058,270,367	674,796,998,109
Pengembangan aplikasi	56,819,657,332	8,789,951
Liabilitas kepada Kantor		
Bendahara dan Kas Negara	24,641,983,198	69,818,187,787
Kewajiban BI Fast	3,238,898,336	207,941,487,770
Utang Bunga	5,794,854,647	929,177,585
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah	3,374,502,476	751,585,647
Total liabilitas segera	422,928,166,356	954,246,226,849

Liabilitas kepada kantor Bendahara dan Kas Negara

Terdapat utang pajak bank sebesar Rp10.035.371.955 terdiri dari PPh 21, PPN lainnya dan PPh Lainnya (catatan 20b).

Rekening Titipan

Rekening titipan terdiri atas titipan kliring sebesar Rp17.477.036.034, titipan ATM Bersama sebesar Rp96.118.182.952, kewajiban ATM Prima sebesar Rp44.748.385.797, titipan transfer keluar sebesar Rp15.814.385.797, serta titipan lainnya sebesar Rp74.048.560.554, yang penyelesaiannya dilakukan pada tahun buku berikutnya.

Titipan Dana Block Grand

Titipan dana *Block Grand* merupakan rekening titipan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan program RESPEK di wilayah distrik, kelurahan dan kampung-kampung di Propinsi Papua dan Papua Barat.

Pengelolaan dana *Block Grand* di seluruh wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat dilaksanakan oleh Bank Papua. Adapun seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungan Bank Papua.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

12. OTHER ASSETS (continued)

Prepaid expenses

Prepaid expenses consist of the transferred insurance coverage cost for KPR FLPP at PT Bank Papua amounting to Rp27,299,847,906. Based on Memorandum No. 591/UMK.Kko/2022 regarding the amortization process of KPRS FLPP insurance coverage costs until the completion of the credit process for Phase 1, while Phase 2 refers to Memorandum No. 1282/UMK.Kko/2023 dated December 21, 2023.

13. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY

This account consists of obligation due immediately of Bank Papua, is as follows:

	2025	2024
Rekening titipan	329,058,270,367	674,796,998,109
Pengembangan aplikasi	56,819,657,332	8,789,951
Liabilities to the State Treasury		
and Cash Office	24,641,983,198	69,818,187,787
Liabilities BI Fast	3,238,898,336	207,941,487,770
Interest payable	5,794,854,647	929,177,585
Matured security deposits not yet collected by customers	3,374,502,476	751,585,647
Total Obligation Due Immediately	422,928,166,356	954,246,226,849

Liabilities to the State Treasury and Cash Office

There is a bank tax debt of Rp10,035,371,955 consisting of PPh 21, PPh 29, Other VAT and Other PPh (note 20b).

Deposit Account

The suspense accounts consist of clearing deposits amounting to Rp17,477,036,034, ATM Bersama deposits amounting to Rp96,118,182,952, ATM Prima liabilities amounting to Rp44,748,385,797, outward transfer deposits amounting to Rp15,814,385,797, and other deposits amounting to Rp74,048,560,554, which will be settled in the subsequent financial year.

Deposit Funds of Block Grand

Deposit funds of *Block Grand* are account not yet settled from the special autonomy fund. The funds are used for programs in the region RESPEK districts and villages in the provinces of Papua and West Papua.

Fund management *Block Grand* on the whole territory of Papua and West Papua Provinces held by Bank Papua. As for all the costs incurred to be dependents by Bank Papua.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

13. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Per 31 Desember 2025 dan 2024 rincian dana *Block Grant* berdasarkan tahun penyaluran dan cabang adalah sebagai berikut:

13. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY (continued)

As of Desember 31, 2025 and 2024 details of *Block Grant* funds by year and branch distribution are as follows:

Cabang/Branch	Tahun Penyaluran/Distribution Years				Jumlah per 31 Desember 2025/ Total as of December 31, 2025
	2025 - 2017	2016	2012	2009	
KC Kapi	-	362,431,600	-	-	362,431,600
KCU Manokwari	-	-	-	100,000,000	100,000,000
KC Aimas	-	-	100,000,000	-	100,000,000
Jumlah/Total	-	362,431,600	100,000,000	100,000,000	562,431,600

Pengembangan aplikasi

Perantara SIPD merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan dan penyediaan aplikasi perantara SIPD dengan Pemerintah Daerah.

Application development

SIPD intermediary represents costs incurred by the Bank in relation to its collaboration with third parties for the development and provision of an intermediary SIPD application with the Regional Government.

14. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	2025	2024	
Tabungan	8,993,207,665,817	9,433,161,764,379	Saving accounts
Giro	8,937,779,331,463	10,579,500,911,675	Current accounts
Deposito berjangka	8,239,652,030,029	4,673,426,040,970	Time accounts
Jumlah	26,170,639,027,309	24,686,088,717,024	Total

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated October 13, 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated October 13, 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp2,000,000,000 per depositor per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank Papua adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of December 31, 2025 and 2024, Bank Papua was a participant of that guarantee program.

b. Berdasarkan Hubungan

b. By relationship

	2025	2024	
Pihak berelasi			Related parties
Tabungan	54,327,233,551	21,696,588,672	Saving accounts
Giro	2,966,599,753,944	2,030,118,219,302	Current accounts
Deposito berjangka	105,493,963,407	172,603,958,063	Time accounts
Jumlah pihak berelasi	3,126,420,950,902	2,224,418,766,037	Total related parties



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

14. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)**14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)****b. Berdasarkan Hubungan (lanjutan)****b. By relationship (lanjutan)**

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Tabungan	8,938,880,432,266	9,411,465,175,707	Saving accounts
Giro	5,971,179,577,519	8,549,382,692,373	Current accounts
Deposito berjangka	8,134,158,066,622	4,500,822,082,907	Time accounts
Jumlah pihak ketiga	23,044,218,076,407	22,461,669,950,987	Total third parties
Jumlah	26,170,639,027,309	24,686,088,717,024	Total

c. Berdasarkan jenis**c. By type**

	2025	2024	
Giro			Current accounts
Swasta	3,700,071,832,630	4,664,641,182,230	Privates
Pemerintah Kabupaten / Kota	2,445,819,266,977	2,871,822,546,468	Local Regency Government
Pemerintah Provinsi	2,477,458,460,027	2,556,604,845,880	Local Government
Pemerintah Lainnya	239,053,592,826	373,464,727,085	Other Government
Pemerintah Pusat	70,589,534,528	100,404,790,302	Central Government
Lainnya	4,786,644,475	12,562,819,710	Others
Jumlah giro	8,937,779,331,463	10,579,500,911,675	Total current accounts
Tabungan			Saving accounts
Simanja	4,318,818,943,327	4,318,464,459,187	Simanja
Simpeda	2,973,005,090,170	3,200,047,242,268	Simpeda
Tabungan KPE	772,453,568,001	811,520,509,165	Tabungan KPE
Tabunganku	662,597,467,809	674,640,544,300	Tabunganku
Tabungan Dana Desa	112,978,839,370	268,990,268,589	Tabungan Dana Desa
Tabungan SIMPEL	90,105,414,223	85,968,554,898	Tabungan SIMPEL
Pemberdayaan Masyarakat	59,729,628,967	70,083,223,315	Pemberdayaan Masyarakat
Tabungan BSM	3,401,916,041	3,305,296,675	Tabungan BSM
Tabungan gaji Jakarta	116,797,909	141,665,982	Tabungan gaji Jakarta
Jumlah tabungan	8,993,207,665,817	9,433,161,764,379	Total saving accounts
Deposito berjangka			Time deposit
1 (satu) bulan	1,182,614,947,334	783,436,564,836	1 (one) month
3 (tiga) bulan	5,592,286,463,377	327,719,521,099	3 (three) month
6 (enam) bulan	217,852,729,742	2,209,306,066,848	6 (six) month
12 (dua belas) bulan	1,182,475,774,611	1,284,699,502,084	12 (twelve) month
24 (dua puluh empat) bulan	64,422,114,965	68,264,386,103	24 (twenty four) month
Jumlah deposito berjangka	8,239,652,030,029	4,673,426,040,970	Total time deposit
Jumlah	26,170,639,027,309	24,686,088,717,024	Total

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan**d. Deposits blocked and pledged as collateral**

	2025	2024	
Giro	108,025,189,138	107,815,689,138	Current accounts
Tabungan	21,687,893,867	18,647,980,000	Saving accounts
Deposito berjangka	53,475,478,663	77,029,033,634	Time accounts
Jumlah	183,188,561,668	203,492,702,772	Total

e. Tingkat suku bunga per tahun**e. Annual interest rates**

2025	2024
0.00% - 7.90%	0.00% - 7.90%



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN**15. DEPOSITS FROM OTHER BANKS****a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang****a. By Type and Currency**

	2025	2024	
Pinjaman ICM Bank Umum	1,000,000,000,000	550,000,000,000	ICM Commercial Bank
Giro	17,128,083,352	15,985,562,695	Current accounts
Tabungan	2,381,023,008	2,297,931,560	Saving accounts
Deposito berjangka	9,085,000,000	9,894,098,133	Time accounts
Jumlah	1,028,594,106,360	578,177,592,388	Total

b. Berdasarkan Hubungan**b. By relationship**

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Pinjaman ICM Bank Umum			ICM Commercial Bank
PT BPD Istimewa Yogyakarta	550,000,000,000	50,000,000,000	PT BPD Istimewa Yogyakarta
PT BPD Jawa Timur	200,000,000,000	-	PT BPD Jawa Timur
PT BPD Jawa Tengah	200,000,000,000	-	PT BPD Jawa Tengah
PT BPD Sulawesi Tenggara	50,000,000,000	200,000,000,000	PT BPD Sulawesi Tenggara
PT BPD Bali	-	100,000,000,000	PT BPD Bali
PT BPD Kalimantan Selatan	-	100,000,000,000	PT BPD Kalimantan Selatan
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	100,000,000,000	PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Giro	17,128,083,352	15,985,562,695	Current accounts
Tabungan	2,381,023,008	2,297,931,560	Saving accounts
Deposito berjangka	9,085,000,000	9,894,098,133	Time accounts
Jumlah	1,028,594,106,360	578,177,592,388	Total

c. Berdasarkan jenis**c. By type**

	2025	2024	
Pinjaman ICM Bank Umum	1,000,000,000,000	550,000,000,000	ICM Commercial Bank
Giro			Current accounts
Bank Swasta Lainnya	16,921,351,579	15,764,596,123	Other Private banks
Bank pemerintah	150,999,211	143,724,108	Government banks
Bank BPD	55,732,562	77,242,464	BPD banks
Jumlah Giro	17,128,083,352	15,985,562,695	Total current accounts
Tabungan			Saving accounts
Tabungan bank lainnya	2,381,023,008	2,297,931,560	Saving of other banks
Jumlah tabungan	2,381,023,008	2,297,931,560	Total saving accounts
Deposito berjangka			Time deposit
1 (satu) bulan	-	5,809,098,133	1 (one) month
3 (tiga) bulan	-	4,085,000,000	3 (three) month
6 (enam) bulan	-	-	6 (six) month
12 (dua belas) bulan	-	-	12 (twelve) month
24 (dua puluh empat) bulan	9,085,000,000	-	24 (twenty four) month
Jumlah deposito berjangka	9,085,000,000	9,894,098,133	Total time deposit
Jumlah	1,028,594,106,360	578,177,592,388	Total

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan**d. Deposits blocked and pledged as collateral**

	2025	2024	
Giro	-	-	Current accounts
Tabungan	-	-	Saving accounts
Jumlah	-	-	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

e. Tingkat suku bunga per tahun

2025	2024
0.00% - 6.43%	0.00% - 6.52%

16. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman diterima terdiri dari:

	2025	2024
PT Sarana Multigriya Financial	1,500,000,000,000	-
Program Dana FLPP	69,504,383,945	75,984,704,425
Total pinjaman yang diterima	1,569,504,383,945	75,984,704,425

PT.Sarana Multigriya Financial

Dana tersebut merupakan dana yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial, dimana liabilitas atas pembayaran kembali diatur berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. 008/PP/SMF-BPD.PAPUA/I/2025 atau 07/PKS-BPD/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan No. 156/PP/SMF-BPD.PAPUA/VII/2025 atau 86/PKS-BPD/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, dengan total nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000.000.

Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman No. 008/PP/SMF-BPD.PAPUA/I/2025 atau 07/PKS-BPD/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 mengalami perubahan (addendum) melalui Perjanjian No. 050/ADD/SMF-BPD.PAPUA/II/2025 atau 21/PKS-BPD/II/2025 tanggal 27 Februari 2025. Pinjaman yang diterima diakui sebagai fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan, dengan tingkat bunga tetap (fixed interest) sebesar 6,99%.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. 156/PP/SMF-BPD.PAPUA/VII/2025 atau 86/PKS-BPD/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, pinjaman yang diterima diakui sebagai fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan, dengan tingkat bunga tetap (fixed interest) sebesar 6,80%.

Program Dana FLPP

Berdasarkan perjanjian kerjasama operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT BPD Papua No.HK.02.03.-Sg.DL/57/2017 atau No.60/PKS-BPD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017. perjanjian tersebut mengalami perubahan dengan Addendum No.45/PKS/Sg/2018 atau No.63/PKS-BPD/VIII/2018 terkait penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengalami ekspansi dengan perjanjian No.71/PKS/Sg/2019 atau No.90/PKS-BPD/XII/2019 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

15. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

e. Annual interest rates

2025	2024
0.00% - 6.43%	0.00% - 6.52%

16. BORROWINGS

Borrowing consist of:

	2025	2024
PT Sarana Multigriya Financial	1,500,000,000,000	-
FLPP Fund Program	69,504,383,945	75,984,704,425
Total borrowing	1,569,504,383,945	75,984,704,425

PT.Sarana Multigriya Financial

The funds represent borrowings received from PT Sarana Multigriya Finansial, for which the repayment obligation is governed by the Loan Facility Agreements No. 008/PP/SMF-BPD.PAPUA/I/2025 or 07/PKS-BPD/I/2025 dated January 15, 2025 and No. 156/PP/SMF-BPD.PAPUA/VII/2025 or 86/PKS-BPD/VII/2025 dated July 9, 2025, with a total loan facility amounting to Rp1,500,000,000,000.

The Loan Facility Agreement No. 008/PP/SMF-BPD.PAPUA/I/2025 or 07/PKS-BPD/I/2025 dated 15 January 2025 was amended through Addendum No. 050/ADD/SMF-BPD.PAPUA/II/2025 or 21/PKS-BPD/II/2025 dated 27 February 2025. The loan received is recognized as a loan facility amounting to Rp1,000,000,000,000 with a tenor of 15 (fifteen) months from the date of loan disbursement, bearing a fixed interest rate of 6.99%.

Furthermore, based on the Loan Facility Agreement No. 156/PP/SMF-BPD.PAPUA/VII/2025 or 86/PKS-BPD/VII/2025 dated 9 July 2025, the loan received is recognized as a loan facility amounting to Rp500,000,000,000 with a tenor of 12 (twelve) months from the date of financing disbursement, bearing a fixed interest rate of 6.80%.

FLPP Fund Program

Based on an operational cooperation agreement between the Central Management of Housing Fund Financing of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia with PT BPD Papua No.HK.02.03.-Sg.DL / 57/2017 or No.60 / PKS-BPD / XII / 2017 dated 21 December 2017. The agreement was amended with Addendum No.45 / PKS / Sg / 2018 or No63 / PKS-BPD / VIII / 2018 related to the distribution of funds for housing finance liquidity facilities through housing loans for low-income communities and experienced expansion with agreements No.71 / PKS / Sg / 2019 or No.90 / PKS-BPD / XII / 2019 concerning channeling housing finance liquidity facilities through loans / financing of sharia prosperous housing / prosperous housing for low-income people.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Tahun 2020 mengalami ekspansi dengan perjanjian No.122/FLPP/PP/SMF-BPAPUA/IX/2020 atau No.62/PKS-BPD/IX/2020 tentang penyaluran KPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan telah mengalami ekspansi setiap tahun. dengan perjanjian terakhir No.046/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 atau No.025/PKS-BPD/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang penyaluran dana fasilitas likuidasi pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sisa dana FLPP per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.569.504.383.425.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

16. BORROWINGS (continued)

In 2020, it has expanded with agreement No.122/FLPP/PP/SMF-BPAPUA/IX/2020 or No.62/PKS-BPD/IX/2020 concerning the distribution of Prosperous Mortgages for low-income people and has expanded every year. with the last agreement No.046/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 or No.025/PKS-BPD/XII/2024 dated December 23, 2024 concerning the distribution of funds for the liquidation facility financing of Prosperous Home Ownership for Low-Income Communities. The remaining FLPP funds as of December 31, 2025 amounted to Rp1,569,504,383,425.

17. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek-efek yang jual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing - masing sebesar RpNihil dan Rp875.459.921.151 adalah sebagai berikut:

17. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE

The details of securities sold under agreements to repurchase as of December 31, 2025 and 2024 amounted to RpNihil and Rp875,459,921,151, respectively, are as follows:

2024

Pihak penjual/ Counterparty	Jenis Sekuritas/ Type of Securities	Tanggal Dimulai/ Start Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Amount	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expenses	Nilai Bersih/ Net Value
PT Bank Nationalnobu Tbk	OBN	24-Dec-24	2-Jan-25	199,618,180,000	199,936,071,952	35,321,328	199,900,750,624
Bank Indonesia	OBN	30-Dec-24	6-Jan-25	290,358,630,000	290,711,496,391	252,047,422	290,459,448,969
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	OBN	24-Dec-24	6-Jan-25	191,028,355,000	191,507,517,790	205,355,482	191,302,162,308
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	OBN	30-Dec-24	13-Jan-25	193,728,140,000	194,214,074,751	416,515,501	193,797,559,250
Total				874,733,305,000	876,369,160,884	909,239,733	875,459,921,151

18. LIABILITAS LAIN-LAIN

Rincian akun liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

18. OTHER LIABILITIES

Detail of other liabilities is as follows:

	2025	2024	
Liabilitas manfaat karyawan (lihat Catatan 34)	345,997,358,308	197,003,606,122	Post-employment benefit (see Notes 34)
Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris (lihat Catatan 30)	91,178,327,478	165,853,144,414	Bonuses and tantiems for Board of Directors and Commissioners (see Notes 30)
Liabilitas Sewa	20,234,371,359	13,461,214,489	Lease liabilities
Bunga dana pihak ketiga	19,053,634,110	6,427,009,468	Interest of third party funds
Setoran jaminan	12,354,813,144	56,233,207,889	Security Deposit
Rekening titipan	11,087,998,687	23,168,392,551	Temporary account
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 19)	1,105,600,641	2,180,611,684	Allowance for possible on commitments and contingencies (see Notes 19)
Biaya yang masih harus dibayar	415,034,275	1,190,178,932	Accrued expenses
Lainnya	915,557,444	704,620,567	Others
Jumlah liabilitas lain-lain	502,342,695,446	466,221,986,116	Total other liabilities

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI**19. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

a. Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Papua yang dicatat pada *extra-comptable* adalah sebagai berikut:

a. Commitments and contingent transactions in the normal course of Bank Papua's activities that have recorded on *extra-comptable* are as follows:

	2025	2024	
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	1,134,503,664,296	1,633,143,500,529	Unused loan facilities
Bank garansi yang diterbitkan	93,645,579,396	263,000,949,916	Bank guarantees issued
Saldo Akhir Tahun	1,228,149,243,692	1,896,144,450,445	Ending balance

Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows:

	2025			
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	Jumlah/Total	
Bank Garansi yang diterbitkan				
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	263,000,949,916	-	-	263,000,949,916
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL not credit impaired</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL credit impaired</i>	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	(169,355,370,520)	-	-	(169,355,370,520)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	93,645,579,396	-	-	93,645,579,396



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan) **19. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

	2024			Jumlah/Total
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL 12 bulan/12month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	
Bank Garansi yang diterbitkan				
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	296,919,361,552	-	-	296,919,361,552
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month ECL	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL not credit impaired	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL credit impaired	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ Net remeasurement of loss allowance	(33,918,411,636)	-	-	(33,918,411,636)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	263,000,949,916	-	-	263,000,949,916

b. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi: b. *Movements of estimated losses on commitments and contingencies:*

	2025			Jumlah/Total
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL 12 bulan/12month ECL	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL Not Credit impaired	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ Lifetime ECL Credit impaired	
Bank Garansi yang diterbitkan				
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	533,740,077	-	-	533,740,077
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month ECL	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL not credit impaired	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL credit impaired	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ Net remeasurement of loss allowance	(401,520,403)	-	-	(401,520,403)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Saldo akhir/ <i>Ending Balance</i>	132,219,674	-	-	132,219,674



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan) **19. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

	2024			
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> bulan/12month <i>ECL</i>	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Credit impaired</i>		Jumlah/Total
Bank Garansi yang diterbitkan				
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	1,135,775,857	-	-	1,135,775,857
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL not credit impaired</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL credit impaired</i>	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	(602,035,780)	-	-	(602,035,780)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Saldo akhir/ <i>Ending Balance</i>	533,740,077	-	-	533,740,077
	2025			
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> bulan/12month <i>ECL</i>	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Credit impaired</i>		Jumlah/Total
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan				
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	1,646,473,487	-	398,120	1,646,871,607
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL not credit impaired</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL credit impaired</i>	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	(673,490,640)	-	-	(673,490,640)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Saldo akhir/ <i>Ending Balance</i>	972,982,847	-	398,120	973,380,967



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan) **19. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

2024				
	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Not Credit</i> <i>impaired</i>	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL</i> <i>Credit impaired</i>		Jumlah/Total
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan				
Nilai tercatat 1 Januari/ <i>Balance at January 1</i>	3,563,589,302	-	398,120	3,563,987,422
Pengalihan ke/ <i>Transfer to:</i>				
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL not credit impaired</i>	-	-	-	-
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – mengalami penurunan nilai/ <i>Lifetime ECL credit impaired</i>	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian/ <i>Net remeasurement of loss allowance</i>	(1,917,115,815)	-	-	(1,917,115,815)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	-	-	-	-
Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>	-	-	-	-
Saldo akhir/ <i>Ending Balance</i>	1,646,473,487	-	398,120	1,646,871,607

Kolektibilitas atas transaksi komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank yang mempunyai risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digolongkan lancar. Manajemen bank berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontijensi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak terealisasinya transaksi komitmen dan kontijensi.

Collectibility of commitment and contingencies bearing credit risk as of December 31, 2025 and 2024 are classified as current. Management states that such estimates are adequate to cover the possible loss arising from such unrealized commitments and contingencies.

20. PERPAJAKAN

20. TAXES

a. Uang Muka Pajak

a. *Taxes Payable*

	2025	2024	
Pajak Penghasilan Lebih bayar	11,981,844,677	-	<i>Overpayment of income tax</i>
Jumlah	11,981,844,677	-	<i>Total</i>

b. Utang Pajak

b. *Taxes Payable*

	2025	2024	
PPh Lainnya	10,011,081,490	1,911,149,898	<i>Other income tax</i>
PPN Lainnya	18,991,599	151,287,342	<i>Other VAT</i>
PPh Pasal 21	5,298,866	156,913,740	<i>Income tax article 21</i>
PPh Pasal 29	-	14,991,840,617	<i>Income tax article 29</i>
Jumlah	10,035,371,955	17,211,191,597	<i>Total</i>



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)**20. TAXES (continued)****c. Beban Pajak Penghasilan - Bersih****c. Current Income Tax Expenses - Net**

	2025	2024	
Pajak kini	(123,085,113,580)	(142,931,629,940)	Current income tax
(Beban) Manfaat Pajak tangguhan	(10,606,934,097)	12,545,053,685	Deferred (Expenses) income tax
Jumlah	<u>(133,692,047,677)</u>	<u>(130,386,576,255)</u>	Total

d. Perhitungan Pajak Kini**d. Calculation of Current Corporate Income Tax**

	2025	2024	
Laba sebelum Pajak	605,258,597,217	583,066,349,681	Income before income tax
Beda Temporer			Temporary differences
Tantien	(46,484,232,622)	13,282,841,389	Bonuses
Cadangan penurunan nilai pinjaman diberikan	(27,998,843,118)	27,998,843,118	Impairment allowance loans
Cadangan penurunan nilai selain pinjaman diberikan	1,910,752,838	(2,264,143,398)	Impairment allowance other loans
Cadangan penurunan nilai aset non produktif	2,718,553,960	-	Impairment allowance Non productive assets
Amortisasi aset hak guna	2,387,943,513	7,541,013,374	Right of asset amortization
Penyisihan beban imbalan kerja	12,307,102,118	21,437,584,076	Provision for employee benefits
Jumlah	<u>(55,158,723,311)</u>	<u>67,996,138,559</u>	Total
Beda Tetap			Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>9,377,915,414</u>	<u>(1,373,260,718)</u>	Non - deductible expenses
Jumlah beda tetap	<u>9,377,915,414</u>	<u>(1,373,260,718)</u>	Total
Laba kena pajak	<u>559,477,789,319</u>	<u>649,689,227,522</u>	Taxable income
Laba kena pajak pembulatan	559,477,789,000	649,689,227,000	Taxable income rounded
Beban pajak penghasilan badan	123,085,113,580	142,931,629,940	Corporate income tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	<u>(135,066,958,257)</u>	<u>(127,939,789,323)</u>	less prepaid tax
(Lebih) Kurang bayar pajak penghasilan badan	<u>(11,981,844,677)</u>	<u>14,991,840,617</u>	Income tax liability

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of computation of commercial income with prevailing tax rates is as follows:

	2025	2024	
Pajak penghasilan	133,156,891,388	128,274,596,930	Income tax
Beda Temporer			Temporary differences
Penyisihan beban imbalan kerja	(12,134,919,129)	14,959,150,483	Provision for employee benefits
Jumlah Beda temporer	<u>(12,134,919,129)</u>	<u>14,959,150,483</u>	Total
Beda Tetap			Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>2,063,141,321</u>	<u>(302,117,473)</u>	Non - deductible expenses
Jumlah beda tetap	<u>2,063,141,321</u>	<u>(302,117,473)</u>	Total
Beban Pajak Kini	<u>123,085,113,580</u>	<u>142,931,629,940</u>	Current income tax



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

e. Pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. TAXES (continued)

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 year 2020 which has become Law (UU) No. 2 year 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 year 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2020 and 2021 and onwards.

On 29 October 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

e. Deferred tax

Details of deferred tax asset and liabilities as of December 31, 2025 and 2024, are as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025

	Saldo awal	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dibebankan ke Ekuitas/ Charges to Equity	Saldo Akhir
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Unrealized (gain)/loss on financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	448,906,170	-	(6,483,950,737)	(6,035,044,567)
Cadangan penurunan pinjaman diberikan / <i>impairment allowance loans</i>	6,159,745,486	(6,159,745,486)	-	-
Cadangan penurunan piutang lain-lain / <i>impairment allowance other receivable</i>	-	846,904,578	-	846,904,578
Cadangan penurunan nilai aset non produktif / <i>impairment allowance Non productive assets</i>	-	598,081,871	-	598,081,871
Cadangan penurunan nilai selain pinjaman diberikan/ <i>impairment allowance other than loans</i>	414,424,408	1,082,519,908	-	1,496,944,316
Amortisasi aset hak guna/ <i>Right of use asset amortization</i>	1,659,022,942	525,347,573	-	2,184,370,515
Tantiem/Bonuses	28,720,551,338	(10,207,605,007)	-	18,512,946,331
Imbalan manfaat karyawan/ <i>Post-employment benefit</i>	43,340,793,347	2,707,562,466	30,071,063,015	76,119,418,828
Jumlah/ Total	80,743,443,691	(10,606,934,097)	23,587,112,278	93,723,621,872



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)**20. TAXES (continued)****e. Pajak tangguhan****e. Deferred tax**

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax asset and liabilities as of December 31, 2025 and 2024, are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Saldo awal	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dibebankan ke Ekuitas/ Charges to Equity	Saldo Akhir
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Unrealized (gain)loss on financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	(2,445,370,266)	-	2,894,276,436	448,906,170
Cadangan penurunan pinjaman diberikan / <i>impairment allowance loans</i>	-	6,159,745,486	-	6,159,745,486
Cadangan penurunan selain pinjaman diberikan/ <i>impairment allowance other than loans</i>	838,057,016	(423,632,608)	-	414,424,408
Amortisasi aset hak guna/ <i>Right of use asset amortization</i>	(115,438,231)	1,774,461,173	-	1,659,022,942
Tantiem/ <i>Bonuses</i>	28,402,340,201	318,211,137	-	28,720,551,338
Imbalan manfaat karyawan/ <i>Post-employment benefit</i>	58,128,185,770	4,716,268,497	(19,503,660,920)	43,340,793,347
Jumlah/ Total	84,807,774,490	12,545,053,685	(16,609,384,484)	80,743,443,691



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025			
<i>Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder</i>	<i>Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid</i>	<i>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</i>	<i>Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)</i>
Saham seri A/ Class A shares			
a. Provinsi Papua:			
<i>Province of Papua:</i>			
Pemerintah Daerah Provinsi Papua	139,721	24.53	698,605,000,000
Pemerintah Daerah Kota Jayapura	17,547	3.08	87,735,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi	15,300	2.69	76,500,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen	10,578	1.86	52,890,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura	10,496	1.84	52,480,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom	6,274	1.10	31,370,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen	6,110	1.07	30,550,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori	5,309	0.93	26,545,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor	5,461	0.96	27,305,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya	5,200	0.91	26,000,000,000
Sub Jumlah/ Total	221,996	38.97	1,109,980,000,000
b. Provinsi Papua Selatan:			
<i>Province of South Papua:</i>			
Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke	21,702	3.81	108,510,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat	8,800	1.54	44,000,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi	8,076	1.42	40,380,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digul	6,822	1.20	34,110,000,000
Sub Jumlah/ Total	45,400	7.97	227,000,000,000
c. Provinsi Papua Tengah:			
<i>Province of Central Papua:</i>			
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	17,346	3.05	86,730,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire	7,356	1.29	36,780,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai	5,538	0.97	27,690,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai	4,256	0.75	21,280,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak	4,000	0.70	20,000,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya	3,147	0.55	15,735,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai	2,350	0.41	11,750,000,000
Sub Jumlah/ Total	43,993	7.72	219,965,000,000



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

21. SHARE CAPITAL (continued)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: (lanjutan)

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

2025			
Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)
d. Provinsi Papua Pegunungan: <i>Province of Mountain Papua:</i>			
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Puncak Jaya	12,350	2.17	61,750,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang	12,444	2.18	62,220,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya	8,763	1.54	43,815,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara	7,631	1.34	38,155,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga	3,333	0.59	16,665,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo	2,591	0.45	12,955,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Lanni Jaya	2,500	0.44	12,500,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo	1,419	0.25	7,095,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Tengah	1,036	0.18	5,180,000,000
Sub Jumlah/ Total	52,067	9.14	260,335,000,000
e. Provinsi Papua Barat: <i>Province of West Papua:</i>			
Pemerintah Provinsi Papua Barat	86,128	15.12	430,640,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	15,168	2.66	75,840,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak	12,150	2.13	60,750,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari	11,142	1.96	55,710,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana	6,548	1.15	32,740,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama	6,220	1.09	31,100,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Pongungan Arfak	4,905	0.86	24,525,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan	4,148	0.73	20,740,000,000
Sub Jumlah/ Total	146,409	25.70	732,045,000,000



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: (lanjutan)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. SHARE CAPITAL (continued)

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

2025			
<i>Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder</i>	<i>Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid</i>	<i>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</i>	<i>Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)</i>
f. Provinsi Papua Barat Daya: <i>Province of Southwest Papua:</i>			
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Raja Ampat	13,638	2.39	68,190,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Sorong Selatan	12,004	2.11	60,020,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Sorong	7,955	1.40	39,775,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Maybrat	5,015	0.88	25,075,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Tambrauw	4,602	0.81	23,010,000,000
Pemerintah Daerah			
Kota Sorong	3,769	0.66	18,845,000,000
Sub Jumlah/ Total	46,983	8.25	234,915,000,000
Jumlah Saham seri A/ Total Class A shares	556,848	97.75	2,784,240,000,000
Saham seri B/ Class B shares			
g. Koperasi Serba Usaha			
Bank Papua Berdikari	12,793	2.25	63,965,000,000
Total Class B shares	12,793	2.25	63,965,000,000
Jumlah Modal/ Capital	569,641	100	2,848,205,000,000
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid up Capital	6,454	-	32,268,522,106

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2.880.473.522.106.

Tambahan modal disetor sebesar Rp77.355.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Maryatie Simanuntak, SH mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya, tambahan modal disetor sebesar Rp32.268.522.106 merupakan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten di Papua selama tahun 2025 yang akan disahkan sebagai modal saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2026.

Total paid up by shareholders as of December 31, 2025 amounted to Rp2,880,473,522,106

Additional paid-in capital amounting to Rp77,355,000,000 has been legalized as share capital based on Notarial Deed No. 09 dated 20 March 2025 concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders. Furthermore, additional paid-in capital amounting to Rp32,268,522,106 represents capital contributions from Regencies in Papua during 2025, which will be legalized as share capital through the General Meeting of Shareholders in 2026.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

21. SHARE CAPITAL (continued)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: (lanjutan)

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

2024			
<i>Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder</i>	<i>Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid</i>	<i>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</i>	<i>Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)</i>
Saham seri A/ Class A shares			
a. Provinsi Papua:			
<i>Province of Papua:</i>			
Pemerintah Daerah Provinsi Papua	131,721	23.12	658,605,000,000
Pemerintah Daerah Kota Jayapura	17,180	3.02	85,900,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi	14,500	2.55	72,500,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen	10,136	1.78	50,680,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura	10,276	1.80	51,380,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom	6,274	1.10	31,370,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen	6,110	1.07	30,550,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori	5,309	0.93	26,545,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor	5,347	0.94	26,735,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya	5,200	0.91	26,000,000,000
Sub Jumlah/ Total	212,053	37.23	1,060,265,000,000
b. Provinsi Papua Selatan:			
<i>Province of South Papua:</i>			
Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke	21,257	3.73	106,285,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat	8,800	1.54	44,000,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi	7,907	1.39	39,535,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digul	6,822	1.20	34,110,000,000
Sub Jumlah/ Total	44,786	7.86	223,930,000,000
c. Provinsi Papua Tengah:			
<i>Province of Central Papua:</i>			
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	16,346	2.87	81,730,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire	7,356	1.29	36,780,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai	5,422	0.95	27,110,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai	4,167	0.73	20,835,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak	3,800	0.67	19,000,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya	2,547	0.45	12,735,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai	2,350	0.41	11,750,000,000
Sub Jumlah/ Total	41,988	7.37	209,940,000,000

- 94 -



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

21. SHARE CAPITAL (continued)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: (lanjutan)

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

2024			
<i>Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder</i>	<i>Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid</i>	<i>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</i>	<i>Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)</i>
d. Provinsi Papua Pegunungan: <i>Province of Mountain Papua:</i>			
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Puncak Jaya	12,350	2.17	61,750,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten			
Pegunungan Bintang	12,444	2.18	62,220,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Jayawijaya	8,763	1.54	43,815,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Tolikara	7,631	1.34	38,155,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Nduga	3,333	0.59	16,665,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Yahukimo	2,591	0.45	12,955,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Lanni Jaya	2,500	0.44	12,500,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Yalimo	1,419	0.25	7,095,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten			
Memberamo Tengah	1,036	0.18	5,180,000,000
Sub Jumlah/ Total	52,067	9.14	260,335,000,000
e. Provinsi Papua Barat: <i>Province of West Papua:</i>			
Pemerintah Provinsi			
Papua Barat	86,128	15.12	430,640,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Teluk Bintuni	14,534	2.55	72,670,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Fak-Fak	11,685	2.05	58,425,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Manokwari	10,904	1.91	54,520,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Kaimana	6,411	1.13	32,055,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten			
Teluk Wondama	6,220	1.09	31,100,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten			
Pengunungan Arfak	4,800	0.84	24,000,000,000
Pemerintah Daerah Kabupaten			
Manokwari Selatan	4,148	0.73	20,740,000,000
Sub Jumlah/ Total	144,830	25.42	724,150,000,000



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: (lanjutan)

2024			
<i>Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder</i>	<i>Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid</i>	<i>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</i>	<i>Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)</i>
f. Provinsi Papua Barat Daya: <i>Province of Southwest Papua:</i>			
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Raja Ampat	13,638	2.39	68,190,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Sorong Selatan	11,753	2.06	58,765,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Sorong	7,755	1.36	38,775,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Maybrat	4,615	0.81	23,075,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Tambrauw	4,602	0.81	23,010,000,000
Pemerintah Daerah			
Kota Sorong	3,690	0.65	18,450,000,000
Sub Jumlah/ Total	46,053	8.08	230,265,000,000
Jumlah Saham seri A/ Total Class A shares	541,777	95.11	2,708,885,000,000
Saham seri B/ Class B shares			
g. Koperasi Serba Usaha			
Bank Papua Berdikari	12,393	2.18	61,965,000,000
Total Class B shares	12,393	2.18	61,965,000,000
Jumlahl Modal/ Capital	554,170	97	2,770,850,000,000
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid up Capital	13,750	-	68,751,022,106

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp2.839.601.022.106.

Tambahan modal disetor sebesar Rp65.720.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan akta notaris Lience, SH., M.Kn, no. 02 tanggal 4 Maret 2024, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Tambahan modal disetor sebesar Rp68.751.022.106 merupakan setoran modal dari kabupaten di Papua selama tahun 2024 yang akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2025.

22. PEMBAGIAN LABA BERSIH

Penggunaan laba tahun buku 2024 ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Maryatie Simanuntak, S.H., mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggunaan laba tahun buku 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Lience, S.H., M.Kn., mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. SHARE CAPITAL (continued)

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

2024			
<i>Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder</i>	<i>Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / Total Issued and Fully paid</i>	<i>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</i>	<i>Jumlah Kepemilikan / Total Ownership (%)</i>
f. Provinsi Papua Barat Daya: <i>Province of Southwest Papua:</i>			
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Raja Ampat	13,638	2.39	68,190,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Sorong Selatan	11,753	2.06	58,765,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Sorong	7,755	1.36	38,775,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Maybrat	4,615	0.81	23,075,000,000
Pemerintah Daerah			
Kabupaten Tambrauw	4,602	0.81	23,010,000,000
Pemerintah Daerah			
Kota Sorong	3,690	0.65	18,450,000,000
Sub Jumlah/ Total	46,053	8.08	230,265,000,000
Jumlah Saham seri A/ Total Class A shares	541,777	95.11	2,708,885,000,000
Saham seri B/ Class B shares			
g. Koperasi Serba Usaha			
Bank Papua Berdikari	12,393	2.18	61,965,000,000
Total Class B shares	12,393	2.18	61,965,000,000
Jumlahl Modal/ Capital	554,170	97	2,770,850,000,000
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid up Capital	13,750	-	68,751,022,106

Total paid up by shareholders as of December 31, 2024 amounted to Rp2,839,601,022,106.

Additional paid-in capital of Rp65,720,000,000 thereon ratified into the capital stock by virtue of notary deed Lience, SH., M.Kn, no. 02 dated March 4, 2024, regarding General Shareholder's Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Additional paid-in capital of Rp68,751,022,106 is a capital contribution of new districts in Papua during 2024 which will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2025.

22. DISTRIBUTION OF NET INCOME

he appropriation of profit for the 2024 financial year was determined based on Notarial Deed No. 09 dated March 20, 2025 prepared by Maryatie Simanuntak, S.H., concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

The appropriation of profit for the 2023 financial year was determined based on Notarial Deed No. 04 dated March 4, 2024 prepared by Lience, S.H., M.Kn., concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PEMBAGIAN LABA BERSIH (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, penggunaan laba tahun 2024 dan 2023 ditetapkan sebagai berikut:

22. DISTRIBUTION OF NET INCOME (continued)

Based on the above General Shareholder's Meeting, the distributions of income for the financial years 2023 and 2022, were as follows:

	2024	2023	
Dividen	60.00%	55.00%	Dividends
Cadangan umum	40.00%	45.00%	General reserve
Jumlah laba yang dibagikan	100%	100%	Total earning distribution
Tantiem (dari laba bersih)	5.00%	5.00%	Dividends (from net profit)

23. PENDAPATAN BUNGA**23. INTEREST INCOMES**

	2025	2024	
Pendapatan bunga kredit			Loan interest income
Bunga kredit konsumsi	1,307,492,638,646	1,076,626,348,144	Consumer loans interest
Bunga kredit sindikasi	398,534,874,649	458,603,204,097	Syndicated loans interest
Bunga kredit modal kerja	151,439,773,019	153,205,044,644	Working capital loans interest
Bunga kredit program pemerintah	79,500,561,562	69,059,068,019	Government program credit interest
Bunga kredit karyawan	32,230,758,192	33,095,720,027	Employee loans interest
Bunga kredit investasi	50,283,724,329	57,740,888,184	Investment loans interest
Jumlah pendapatan bunga kredit	2,019,482,330,397	1,848,330,273,115	Total loan interest income
Pendapatan bunga penempatan			Placement interest income
Bunga efek-efek	371,565,279,689	345,222,531,339	Investment interest
Bunga penempatan bank Indonesia	19,832,876,664	20,341,980,006	Deposits interest
Bunga penempatan bank lain	83,049,676,354	92,798,440,649	Placement interest other bank
Jumlah Pendapatan bunga penempatan	474,447,832,707	458,362,951,994	Total Placement interest income
Jumlah	2,493,930,163,104	2,306,693,225,109	Total

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**24. OTHER OPERATIONAL INCOMES**

	2025	2024	
Pendapatan hapus buku	36,774,592,027	39,221,931,953	Written off income
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	23,771,652,162	3,564,275,989	Unrealized gain from changes in fair value of financial assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Pendapatan operasional lain-lain			Other operational income
Pengembalian biaya cadangan:			Allowance recovery:
Pinjaman	219,072,069,522	99,707,328,140	Loans
Kelonggaran Tarik	1,160,550,862	2,871,936,472	Unused Facility
Penempatan	3,942,742,766	3,744,910,900	Placement
Bank Garansi	451,483,705	659,527,344	Bank guarantee
Surat berharga	121,535,374	64,276,520	Marketable securities
Giro Bank Lain	80,854	162,652	Current accounts with other banks
Lain-lain	58,745,329,393	33,644,230,989	Others
	283,493,792,476	140,692,373,017	
Laba selisih kurs	25,229,800	-	Foreign exchange gain
Saldo dipindahkan	344,065,266,465	183,478,580,959	Carrying forward



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA (lanjutan)**24. OTHER OPERATIONAL INCOMES (continued)**

	2025	2024	
Saldo pindahan	344,065,266,465	183,478,580,959	Brought forward
Pendapatan provisi dan komisi			Provision and commissions income
Provisi lainnya	114,367,163,218	116,563,149,848	Other provision
Hasil komisi	71,440,866,413	64,989,643,395	Commissions
Jumlah	185,808,029,631	181,552,793,243	Total
Beban provisi dan komisi			Provision and commissions expenses
Komisi/Provisi pinjaman	(42,120,855)	(663,192,362)	Loan provision /commissions
Komisi/Provisi lainnya	(1,112,714,421)	(1,291,922,384)	Other provision /commissions
Jumlah	(1,154,835,276)	(1,955,114,746)	Total
Jumlah pendapatan provisi dan komisi - bersih	184,653,194,355	179,597,678,497	Total provision and commissions income - net
Jumlah pendapatan operasional Lainnya	528,718,460,820	363,076,259,456	Total other operational income
Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan provisi dan komisi selain dari aktivitas pinjaman yang diberikan.			
Provision and commission income generated from activities other than loans.			

25. BEBAN BUNGA**25. INTEREST EXPENSES**

	2025	2024	
Bunga pada pihak ketiga bukan bank	563,362,676,930	202,711,132,192	Interest to third parties non bank
Jasa giro pemerintah	83,539,011,058	90,959,430,705	Government current deposit service
Bunga pada bank lain	18,349,491,956	12,805,190,714	Interest of other bank
Jasa giro swasta	5,128,158,119	5,783,347,387	Private current account deposit service
Jasa giro lainnya	25,451,927	188,836,014	Other current account deposit service
Jumlah	670,404,789,990	312,447,937,012	Total

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA**26. OTHER OPERATING EXPENSES**

	2025	2024	
Beban Operasional lainnya			other operating expenses
Kerugian dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan	18,492,611,921	1,722,692,714	Unrealized loss from changes in fair value of financial assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Rugi selisih kurs	17,634,000	-	Foreign exchange loss
Beban Operasional lain-lain	3,707,434,507	6,375,331,622	Other operational expenses
Jumlah	22,217,680,428	8,098,024,336	Total

27. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN**27. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES**

	2025	2024	
Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif:			Provision / (recovery) for possible losses for productive assets:
Pinjaman yang diberikan	113,181,092,070	169,650,795,275	Loans
Penempatan Dana Antar Bank	5,592,901,381	3,942,742,766	Placements
Kelonggaran Tarik	487,060,222	954,820,657	Unused Facility
Surat-surat berharga	105,754,073	121,535,374	Marketable securities
Garansi Bank	49,963,001	57,490,839	Bank garansi
Giro Bank Lain	36,249	80,854	Other bank current accounts
Jumlah	120,768,238,469	174,727,465,765	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

27. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (Lanjutan)

27. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES (Continued)

	2025	2024	
Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif:			Provision / (recovery) for possible losses for non productive assets:
Agunan yang diambil alih	12,553,317	-	Foreclosed assets
Penurunan nilai atas aset tak berwujud	2,706,000,643	-	Impairment of Intangible asset
Jumlah	2,718,553,960	-	Total
Jumlah beban bunga dan operasional	123,486,792,429	174,727,465,765	Total interest and operating expenses

28. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

28. DEPRECIATION AND AMORTISATION EXPENSE

	2025	2024	
Beban penyusutan (catatan No.11)	55,834,322,497	55,633,038,452	Depreciation expenses (note No. 11)
Beban amortisasi	601,987,849	1,038,120,673	Amortization expenses
Jumlah	56,436,310,346	56,671,159,125	Total

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2025	2024	
Beban umum kantor	170,474,473,982	149,251,968,294	General expenses
Beban riset dan pengembangan	103,932,695,001	102,694,698,915	Research and development expenses
Beban Outsourcing	93,848,593,061	74,939,635,848	Outsourcing expenses
Beban premi asuransi	75,843,326,591	74,829,304,479	Insurance premium expenses
Beban barang dan jasa	60,578,823,620	65,805,705,640	Goods service expenses
Beban pendidikan dan pelatihan	51,468,854,860	45,327,784,706	Education and training expenses
Beban sewa	36,289,156,099	38,946,165,957	Rent expenses
Beban pemeliharaan	28,704,525,823	26,096,990,511	Maintenance expenses
Beban promosi	32,187,783,587	22,188,102,188	Promotion expenses
Beban iuran-iuran	15,687,707,659	16,960,008,636	Contribution expenses
Beban pajak-pajak	11,346,277,174	4,904,429,315	Taxes expenses
Beban lainnya	10,504,424,566	9,919,153,724	Others expenses
Beban pembinaan karyawan	9,799,632,026	8,209,962,748	Employees training expenses
Beban penghimpunan dana	5,712,662,082	3,603,475,222	Fund raising expenses
Beban perbaikan	4,180,616,831	4,273,302,383	Repair expenses
Beban risiko operasional	3,671,045,268	3,792,412,736	Operational risk expenses
Beban retribusi	794,324,289	799,618,600	Retribution expenses
Jumlah	715,024,922,519	652,542,719,902	Total

30. BEBAN TENAGA KERJA

30. PERSONEL EXPENSES

	2025	2024	
Gaji tetap dan Upah	387,931,452,092	422,247,092,180	Salary and wages
Upah kerja lainnya	217,647,770,670	210,780,923,303	Other allowance
Bonus dan insentif	84,149,756,049	130,633,988,671	Bonus and incentives
Iuran tenaga kerja	41,020,602,870	38,953,612,851	Daily worker wages
Jumlah	730,749,581,681	802,615,617,005	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. BEBAN TENAGA KERJA (Lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja pegawai dan Bank, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Bank Papua dan Komite Audit.

31. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL

	2025	2024
Penerimaan bunga excomp	4,504,052,235	3,110,241,975
Pendapatan bukan operasional lainnya	101,225,831	142,861,687
Penerimaan sewa	261,273,717	265,017,717
Jumlah	4,866,551,783	3,518,121,379

32. BEBAN BUKAN OPERASIONAL

	2025	2024
Kerugian lainnya	33,865,657,514	672,004,980
Jumlah	33,865,657,514	672,004,980

Biaya atas pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk periode April 2023 sampai dengan November 2024 sebesar Rp33.865.657.514.

33. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTINJENSI

	2025	2024
Komitmen		
Liabilitas komitmen:		
Komitmen kredit yang belum ditarik	1,134,503,664,296	2,229,122,774,253
Liabilitas komitmen - neto	1,134,503,664,296	2,229,122,774,253
Tagihan kontinjensi :		
Pendapatan bunga dalam	538,455,408,040	545,595,841,122
Liabilitas kontinjensi :		
Garansi yang diterbitkan:		
Uang muka	(35,141,706,620)	(115,557,969,823)
Pelaksanaan	(19,300,775,907)	(49,263,352,286)
Pemeliharaan	(7,203,028,209)	(11,046,008,700)
Tender	(350,517,020)	(106,271,240)
Lainnya	(31,649,551,640)	(120,945,759,504)
	(93,645,579,396)	(296,919,361,552)
Liabilitas kontinjensi bersih	444,809,828,643	248,676,479,570
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi - neto	1,579,313,492,939	2,477,799,253,823

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERSONEL EXPENSES (Continued)

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees and the Bank's performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

Salaries and wages include salaries and other compensation benefits for the Board of Directors, and Commissioners of Bank Papua, and Audit Committee.

31. NON OPERATING INCOMES

Excomp interest income
 Other non operating income
 Rent income

Total

32. NON OPERATING EXPENSES

Others losses

Total

Expenses arising from non-compliance with the Statutory Reserve Requirement (GWM) for the period from April 2023 to November 2024 amounted of Rp33,865,657,514

33. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENT AND CONTINGENCIES

Commitment:
 Commitment liabilities
 Unused loan facility granted

Liabilities - net

Contingencies recibables:

Contingencies liabilities:

Quarantee granded:

Advanced payment

Performance

Retention

Tender

Others

Net contingencies liability

Total commitment and contingencies liability - net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

34. IMBALAN PASCA KERJA

Program pensiun manfaat pasti

Bank Papua memiliki program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Papua yang pesertanya meliputi semua karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Tujuan perhitungan ini adalah untuk menentukan kewajiban imbalan pasca kerja bagi PT Bank Papua periode 01 Januari - 31 Desember 2025 dan 01 Januari - 31 Desember 2024 sesuai ketentuan PSAK-24 revisi 2018.

Imbalan Pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Papua yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Papua No. 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-564/NB.1/2015 tanggal 12 Nopember 2015.

Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaris terdaftar, Kantor Konsultan Aktuarial Steven dan Mourits dan Kantor Konsultan Aktuarial Yusi dan Rekan, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Jumlah pegawai Bank Papua yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 1.781 orang dan 1.864 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berdasarkan laporan aktuarial Kantor Konsultan Aktuarial Steven dan Mourits masing-masing pada tanggal 20 Februari 2026 dan 13 Januari 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai wajar aset dana pensiun	(1,419,808,177,853)	(1,191,659,490,285)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	1,234,508,531,816	1,117,131,256,958
Selisih pendanaan	(185,299,646,037)	(74,528,233,327)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-
Laba aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya dibayar dimuka (Liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan	(185,299,646,037)	(74,528,233,327)

Rekonsiliasi atas perubahan beban dibayar di muka (cadangan) kewajiban imbalan pasca kerja selama tahun 2025 dan 2024 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Beban dibayar dimuka (cadangan) awal tahun	74,528,233,327	154,863,217,953
Pembayaran Imbalan	-	-
Beban tahun berjalan	45,354,872,494	52,839,237,828
Pendapatan Komprehensif lain	112,045,309,619	(89,862,485,596)
Kontribusi Pemberi Kerja	(46,628,769,403)	(43,311,736,858)
(Beban dibayar dimuka) cadangan akhir tahun	185,299,646,037	74,528,233,327

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. POST-EMPLOYMENT BENEFIT

Defined benefit pension plan

Bank Papua has a defined benefit pension plan through the Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Papua, with participants covering all employees who are aged 18 years or married. The purpose of these evaluations are determining the employment benefits for PT Bank Pembangunan Daerah Papua for period January 01 to December 31, 2023 and January 01 to December 31, 2024, in respect to PSAK - 24 revision 2018.

Employee Benefits are calculated based on the Regulation of Dana Pensiun Bank Papua as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Papua No. 69 / DIR-BPD / X / 2014 dated October 22, 2014 and has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-564 / NB.1 / 2015 dated November 12, 2015.

The actuarial calculations of pension benefits for the years ended December 31, 2025 and 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm Steven and Mourits Actuarial Consultant Firm and Yusi and Rekan Consultan Firm, using the "Projected Unit Credit" method.

The total number of qualified employees of Bank Papua who are entitled to the benefits are 1,781 employee and 1,864 employees as of December 31, 2025 and 2024, respectively (unaudited).

Reconciliation of the financing status of the pension program as of 31 December 2025 and 2024 respectively based on the actuarial reports of the Steven and Mourits Actuarial Consultant Firm on February 20, 2026 and January 13, 2025 respectively is presented as follows:

Fair value of pension plan assets
Present value of funded defined benefit obligation
Funding difference
Unrecognized actuarial past service cost
Unrecognized actuarial gain
Prepaid expenses (Liability) which is recognized in the statements of financial position

A reconciliation of the movements of prepaid (provision for) pension benefit cost during year 2025 and 2024 that is recognized in pension fund financial position are follows :

Prepaid (provision for) pension benefit cost at beginning of year
Payment
Current year expenses
Other Comprehensive income
Employer's contributions
(Prepaid provision) for pension benefit cost at end of year



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

34. POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognized in the statements of comprehensive income, are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	41,132,603,631	43,387,856,562	Current service cost
Biaya bunga	83,830,996,240	82,070,913,845	Interest cost
Hasil yang diharapkan dari aset	(79,608,727,377)	(72,619,532,579)	Result are expected from asset
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	45,354,872,494	52,839,237,828	Expense (income) recognized in the Profit / Loss statement

Pendapatan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

Other comprehensive are as follows:

	2025	2024	
(Keuntungan) kerugian aktuarial	(141,577,008,291)	89,601,533,884	Actuarial (gains) losses
Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti	29,531,698,672	260,951,712	The return on plan asset, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (assets)
Jumlah OCI periode kini	(112,045,309,619)	89,862,485,596	Total in the current year OCI

Rekonsiliasi pendapatan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

Reconciliation of other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
Awal periode	(157,201,013,723)	(247,063,499,319)	Beginning of period
OCI periode kini	(112,045,309,619)	89,862,485,596	The current year OCI
Jumlah OCI pada akhir periode	(269,246,323,342)	(157,201,013,723)	Total OCI at the end of period

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2025	2024	
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% tingkat kematian	10% tingkat kematian	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	6% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 45 tahun	6% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 45 tahun	Resignation rate
Tingkat pensiun dini	1% dari tingkat kelangsungan hidup	1% dari tingkat kelangsungan hidup	Early Retirement Rate
Tingkat bunga			Interest rate
- Tingkat Diskonto pada tanggal evaluasi	6.09% per tahun/per annum	7.01% per tahun/per annum	Discount rate at valuation date
- Kenaikan gaji masa depan Metode	4% per annum Projected Unit Credit	4% per annum Projected Unit Credit	Future salary increase - Method

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2021 dan kompensasi lainnya.

The liability for other long-term employee benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 11/2021 and other compensations.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

34. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dilakukan oleh konsultan aktuarial terdaftar yaitu Kantor Konsultan Aktuarial Steven dan Mourits dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 20 Februari 2026 dan 13 Januari 2025.

Jumlah pegawai Bank Papua yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 2.213 orang dan 2.162 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

Perubahan liabilitas yang diakui Bank Papua pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai kini liabilitas	298,402,789,905	280,527,736,423
Nilai wajar aset	(137,705,077,634)	(158,052,363,628)
Status pendanaan	160,697,712,271	122,475,372,795
Liabilitas transisi yang belum diakui	-	-
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-
Laba / Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya dibayar dimuka (Liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan	160,697,712,271	122,475,372,795

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank Papua pada laporan laba rugi komprehensif:

	2025	2024
Biaya jasa kini	25,872,493,335	23,517,876,962
Biaya Jasa Lalu atas perubahan imbalan	(18,282,973,179)	-
Biaya bunga	18,471,691,169	17,494,525,256
Laba / Rugi Aktuarial	8,870,236,639	(510,290,920)
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(10,215,476,874)	(10,895,020,988)
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	24,715,971,090	29,607,090,310

Pendapatan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	2025	2024
(Keuntungan) kerugian aktuarial	22,423,392,882	(6,041,869,237)
Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti	2,217,947,567	7,251,350,652
Jumlah OCI periode kini	24,641,340,449	1,209,481,415

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

The actuarial assessment of other long-term employee benefits for the years ending December 31, 2024 and 2023 respectively was carried out by registered actuarial consultants, namely the Steven and Mourits Actuarial Consultant Firm and the Yusi and Rekan Actuarial Consultant Firm using the "Projected Unit Credit" method. " as stated in the respective reports on February 20, 2026 and January 13, 2025.

The total number of qualified employees of Bank Papua who are entitled to the benefits are 2,213 employees and 2,162 employees as of December 31, 2025 and 2024, respectively (unaudited).

The movements of the employee benefits liability recognized by in the statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	298,402,789,905	280,527,736,423	Liability present value
Nilai wajar aset	(137,705,077,634)	(158,052,363,628)	Assets fair value
Status of funding	160,697,712,271	122,475,372,795	Status of funding
Liabilitas transisi yang belum diakui	-	-	Unrecognized transition liability
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	Unrecognized past service expenses
Laba / Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-	Profit / loss of unrecognized actuarial
Biaya dibayar dimuka (Liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan	160,697,712,271	122,475,372,795	Prepaid expenses (Liability) which is recognized in the statements of financial position

Employee benefit expense recognized by Bank Papua in the statements of income:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	25,872,493,335	23,517,876,962	Current service cost
Biaya Jasa Lalu atas perubahan imbalan	(18,282,973,179)	-	Past service cost due to changes in benefits
Biaya bunga	18,471,691,169	17,494,525,256	Interest cost
Laba / Rugi Aktuarial	8,870,236,639	(510,290,920)	Actuarial profit / loss
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(10,215,476,874)	(10,895,020,988)	Remeasurement of Other Long Term Employee Benefits
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	24,715,971,090	29,607,090,310	Expense (income) recognized in the Profit / Loss statement

Other comprehensive are as follows:

	2025	2024	
(Keuntungan) kerugian aktuarial	22,423,392,882	(6,041,869,237)	Actuarial (gains) losses
Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti	2,217,947,567	7,251,350,652	The return on plan asset, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (assets)
Jumlah OCI periode kini	24,641,340,449	1,209,481,415	Total in the current year OCI



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

34. POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Rekonsiliasi (biaya dibayar dimuka) cadangan adalah sebagai berikut:

Reconciliation (prepaid expenses) reserves are as follows:

	2025	2024	
Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal	122,475,372,795	109,355,808,274	Beginning balance Prepaid expenses (reserves)
Pembayaran Imbalan	(11,134,972,063)	(17,697,007,204)	Payment of benefit
Beban (Pendapatan)	24,715,971,090	29,607,090,310	Expenses (income)
Pendapatan komprehensif lainnya	24,641,340,449	1,209,481,415	Other Comprehensive Income
Kontribusi pemberi kerja	-	-	Employer's contributions
(Beban dibayar dimuka) cadangan akhir tahun	160,697,712,271	122,475,372,795	(Prepaid provision) for pension benefit cost at end of year

Rekonsiliasi pendapatan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

Reconciliation of other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
Awal periode	46,838,665,959	45,629,184,544	Beginning of period
OCI periode kini	24,641,340,449	1,209,481,415	The current year OCI
Jumlah OCI pada akhir periode	71,480,006,408	46,838,665,959	Total OCI at the end of period

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi beban dan liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

The key assumptions used in the calculation of the above estimated expense and liability are as follows:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto pada tanggal valuasi	4.48% - 7.06% p.a	6.37% - 7.10% p.a	Annual discount rate
Kenaikan gaji masa depan	4% p.a	4% p.a	Future salary increase
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% tingkat kematian	10% tingkat kematian	Disability rate

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi beban dan liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The key assumptions used in the calculation of the above estimated expense and liability are as follows: (continued)

	2025	2024	
Asumsi lainnya: (lanjutan)			Other assumptions: (continued)
Tingkat pengunduran diri	6% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 45 tahun	6% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 45 tahun	Resignation rate
Tingkat pensiun dini	1% dari tingkat kelangsungan hidup	1% dari tingkat kelangsungan hidup	Early retirement rate
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Method



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

35. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal pelaporan ini.

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASET AND LIABILITAS

The following table summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2025 and 2024, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this reporting date.

	2025		
	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas	2,227,856,938,327	2,227,856,938,327	Cash
Nilai Wajar Melalui laporan laba rugi			Fair value through other profit and loss statement
Obligasi Pemerintah	10,000,000,000	10,181,500,000	Government Bonds
	10,000,000,000	10,181,500,000	
Penghasilan Komprehensif lain			other comprehensive income
Obligasi Pemerintah	693,000,000,000	730,483,810,000	Government Bonds
Reksadana	201,333,338,811	206,881,498,979	Mutual Fund
	894,333,338,811	937,365,308,979	
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Obligasi Korporasi	338,000,000,000	337,859,660,961	Corporate Bonds
Obligasi Pemerintah	440,000,000,000	444,240,254,920	Government Bonds
Sekuritas Rupiah			Bank Indonesia
Bank Indonesia	3,244,711,000,000	3,151,560,638,156	Rupiah Securities
Pinjaman yang diberikan	22,081,767,523,260	22,081,767,523,260	Loans
Giro pada			Current accounts with
Bank Indonesia	1,136,671,063,929	1,136,671,063,929	Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	85,304,170,767	85,304,170,767	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank			Placement with other banks and
lain dan Bank Indonesia	2,603,712,117,924	2,603,712,117,924	Bank Indonesia
Aset lain-lain *)	327,447,453,323	327,447,453,323	Other assets *)
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	30,257,613,329,203	30,168,562,883,240	Total amortized cost
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Liabilitas segera	422,928,166,356	422,928,166,356	Obligation due immediately
Simpanan nasabah	26,170,639,027,309	26,170,639,027,309	Deposits from customers
Simpanan bank lain	1,028,594,106,360	1,028,594,106,360	Deposits from other banks
Pinjaman diterima	1,569,504,383,945	1,569,504,383,945	Borrowings
Liabilitas lain-lain **)	502,342,695,445	502,342,695,445	Other liabilities**)
Jumlah liabilitas keuangan	29,694,008,379,415	29,694,008,379,415	Total financial liabilities



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

35. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASET AND LIABILITAS (continued)

		2024			
		Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas		1,463,869,502,450	1,463,869,502,450	Cash	
Nilai Wajar Melalui laporan laba rugi				Fair value through other profit and loss statement	
Obligasi Pemerintah		94,034,000,000	92,839,990,860	Government Bonds	
		94,034,000,000	92,839,990,860		
Penghasilan Komprehensif lain				other comprehensive income	
Obligasi Pemerintah		808,000,000,000	801,483,020,000	Government Bonds	
Reksadana		220,000,000,000	225,434,800,000	Mutual Fund	
		1,028,000,000,000	1,026,917,820,000		
Biaya perolehan diamortisasi				Amortized cost	
Obligasi Korporasi		243,000,000,000	242,936,230,490	Corporate Bonds	
Obligasi Pemerintah		1,082,000,000,000	1,082,752,286,750	Government Bonds	
Reverse Repo		2,409,784,000,000	2,314,068,415,704	Reverse Repo	
Pinjaman yang diberikan		21,162,746,512,237	21,162,746,512,237	Loans	
Giro pada				Current accounts with	
Bank Indonesia		3,343,533,751,313	3,343,533,751,313	Bank Indonesia	
Giro pada Bank Lain		61,528,572,540	61,528,572,540	Current accounts with other banks	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia		650,196,635,621	650,196,635,621	Placement with other banks and Bank Indonesia	
Aset lain-lain *)		431,191,521,733	431,191,521,733	Other assets *)	
Jumlah biaya perolehan diamortisasi		29,383,980,993,444	29,288,953,926,388	Total amortized cost	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Liabilitas segera		954,246,226,849	954,246,226,849	Obligation due immediately	
Simpanan nasabah		24,686,088,717,024	24,686,088,717,024	Deposits from customers	
Simpanan bank lain		578,177,592,388	578,177,592,388	Deposits from other banks	
Pinjaman diterima		75,984,704,425	75,984,704,425	Borrowings	
Liabilitas lain-lain **)		466,221,986,115	466,221,986,115	Other liabilities**)	
Jumlah liabilitas keuangan		26,760,719,226,801	26,760,719,226,801	Total financial liabilities	

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang lain-lain dan piutang bunga.

*) Other assets consist of other receivables and interest receivable.

**) Liabilitas lain-lain terdiri dari beban yang masih harus dibayar, setoran jaminan, utang bunga, dan utang lainnya.

**) Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, interest payable, and other payables.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar aset dan liabilitas tertentu selain surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diterima, dan obligasi subordinasi mendekati nilai tercatat karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Fair values of certain assets and liabilities other than held-to-maturity marketable securities, borrowing, and subordinated bond approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate.

Nilai wajar dari surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The fair value of held-to-maturity marketable securities is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2025 and 2024.

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dan obligasi subordinasi dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

The fair value of borrowing and subordinated bond is calculated using discounted cash flows using market rate.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

35. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITAS (continued)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Dikutip dari harga pasar di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);
- Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

The table below shows the financial instrument recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
- Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);
- Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The table below shows the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy:

		2025			
		Nilai Wajar / Fair Value			
		Tingkat 1 / Level 1	Tingkat 2 / Level 2	Tingkat 3 / Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit and loss statement
Obligasi Pemerintah	10,181,500,000	10,000,000,000	-	-	Government Bonds
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Obligasi Pemerintah	730,483,810,000	693,000,000,000	-	-	Government Bonds
Reksadana	206,881,498,979	201,333,338,811	-	-	Mutual funds
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Obligasi Pemerintah	444,240,254,920	440,000,000,000	-	-	Government Bonds
Obligasi Korporasi	337,859,660,961	338,000,000,000	-	-	Corporate Bonds
Sekuritas Rupiah					Bank Indonesia
Bank Indonesia	3,151,560,638,156	3,244,711,000,000	-	-	Rupiah Securities
Reverse Repo	737,935,335,000	737,935,335,000	-	-	Reverse Repo
	4,671,595,889,037	4,760,646,335,000	-	-	
			-	-	
Jumlah	5,619,142,698,016	5,664,979,673,811	-	-	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

35. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASET AND LIABILITAS (continued)

	2024	Nilai Wajar / Fair Value			
		Tingkat 1 / Level 1	Tingkat 2 / Level 2	Tingkat 3 / Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit and loss statement
Obligasi Pemerintah	92,839,990,860	94,034,000,000	-	-	Government Bonds
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Obligasi Pemerintah	801,483,020,000	808,000,000,000	-	-	Government Bonds
Reksadana	225,434,800,000	220,000,000,000	-	-	Mutual funds
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Obligasi Pemerintah	1,082,752,286,750	1,082,000,000,000	-	-	Government Bonds
Obligasi Korporasi	242,936,230,490	243,000,000,000	-	-	Corporate Bonds
Sekuritas Rupiah					Bank Indonesia
Bank Indonesia	2,314,068,415,704	2,409,784,000,000	-	-	Rupiah Securities
	3,639,756,932,944	3,734,784,000,000	-	-	
Jumlah	4,759,514,743,804	4,856,818,000,000	-	-	Total

36. LABA PER SAHAM

36. EARNING PER SHARE

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan jumlah saham biasa akhir tahun yang biasa beredar pada tahun yang bersangkutan.

Net earning per share is computed by dividing the net earning to the shareholders with total ordinary shares at end of year generally that outstanding during the related year.

	2025	2024	
Laba Operasional	634,257,702,947	580,220,233,282	Operating Income
Laba Tahun Berjalan	471,566,549,539	452,679,773,426	Income for The Year
Jumlah rata-rata tertimbang lembar saham ditempatkan dan setor penuh:			Weighted average total of issued and fully-paid share units:
	2025	2024	
Rata-rata tertimbang lembar saham	565,773	550,884	Weighted average
Laba Operasional per saham	1,121,046	1,053,253	Operating income
Laba bersih per saham	833,490	821,733	Net income per share

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

37. RELATED PARTY TRANSACTION

	2025	2024	
Kredit			Loan
Pemegang saham	462,932,945,726	429,338,490,186	Share holders
Persentase dari total kredit	2.05%	1.97%	Percentage to total loans
Karyawan kunci	21,649,087,982	21,491,356,956	Key employees
Persentase dari total kredit	0.10%	0.10%	Percentage to total loans
Piutang Bunga			Interest receivable
Pemegang saham	210,245,960	126,870,368	Shareholders
Persentase dari total piutang bunga	0.36%	0.23%	Percentage to total interest receivables
Karyawan kunci	6,551,296	4,408,932	Key employees
Persentase dari total piutang bunga	0.01%	0.01%	Percentage to total interest receivables
Simpanan			Savings
Pemegang saham	885,154,784,586	2,199,072,177,365	Shareholders
Persentase dari total simpanan	3.25%	8.70%	Percentage to total loans
Karyawan kunci	29,809,284,785	25,346,588,672	Key employees
Persentase dari total Simpanan	0.11%	0.10%	Percentage to total savings



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**38. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)**

	2025	2024	
Pendapatan bunga			Interest income
Pendapatan bunga pemegang saham	30,769,088,921	39,068,028,351	Interest income shareholders
Persentase dari total pendapatan bunga	1.23%	1.69%	Percentage to total interest income
Karyawan kunci	1,133,368,891	1,162,538,844	Key employees
Persentase dari total pendapatan bunga	0.05%	0.05%	Percentage to total interest income
Beban bunga			Interest expense
Beban bunga pemegang saham	19,294,124,037	24,394,927,092	Interest expense shareholders
Persentase dari total beban bunga	2.88%	7.81%	Percentage to total interest expense
Beban bunga karyawan kunci	564,486,019	503,608,745	Interest expense key employees
Persentase dari total beban bunga	0.08%	0.16%	Percentage to total interest expense

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Detailed of relation nature and type of transaction with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
1.	Pemerintah Propinsi Papua	Pemegang Saham	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Beban Bunga d. Pinjaman Kredit
2.	Karyawan kunci	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi	a. Pinjaman Kredit b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan c. Pendapatan bunga, dan d. Beban bunga

No.	Related Parties	Types of Relation	Related Party Transactions
1.	The Government of Papua	Shareholder	a. Demand Deposit b. Time Deposit c. Interest Expense d. Loan
2.	Key Employees	Directors, Commissioners, Heads of Branch, Heads of Divisions.	a. Loan b. Fund placements in form of savings c. Interest Income, and d. Interest Expense

39. ANALISIS KUALITAS KREDIT**39. CREDIT QUALITY ANALYSIS****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian****Measurement of Expected Credit Losses****Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan****Significant Increase in Credit Risk**

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD)* atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default (PD)* atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

- *Probability of default (PD)* for the remaining age at the reporting date; with
- *Probability of default (PD)* for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

39. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *Probability of default* (PD);
- indikator kualitatif;
- tertunggak lebih dari 30 hari.

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD term structure atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

39. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Bank use these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit:

- quantitative test based on movement in *Probability of default* (PD);
- qualitative indicators;
- a backstop of 30 days past due.

Credit Risk Grades

The bank allocated each exposure to *credit risk grades* based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. *Credit risk grades* are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as *credit risk rating* decreases, for example, the difference between *credit risk rating grades* 1 and 2 is smaller than the difference between *credit risk rating grades* 2 and 3.

Each exposure is allocated to *credit risk grades* at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different *credit risk grades*. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

Determination of the *Probability of Default* Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about *credit risk exposures*, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as *credit risk assessment*. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the *probability of default* (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

39. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Bank menggunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analisis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif secara komprehensif dan tepat waktu.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara review berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar (Default)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* / gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank;
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

39. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Determination of Significant Increase in Credit Risk

Bank uses several criteria for determining that credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in termination of recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:

- PD remainder life at reporting date based on modified provision; with
- Residual PD throughout the estimated age based on data at initial recognition and initial contractual provisions.

Definition of Failed Payment (Default)

The Bank considers financial assets as default when:

- The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (*recourse*) from the Bank; or
- The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Bank.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

39. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default* / gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjaminan (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analisis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

39. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- Qualitative such as violations of the terms of the agreement (*covenants*);
- Quantitative such as arrears status; and
- Based on data developed internally and obtained from external sources.

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimated published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimation is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

39. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industry; dan
- lokasi geografis debitur.

40. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan modal yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing bank.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas bank, hubungan antara bank dengan nasabah maupun dalam internal bank.

Penerapan Manajemen Risiko berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. POJK No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. POJK No. 38/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan SEOJK No. 43/ SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

39. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- type of instrument;
- credit risk rating;
- type of collateral;
- date of initial recognition;
- remaining due date;
- industry; and
- debtor's geographical location.

40. RISK MANAGEMENT

To anticipate domestic and global economic challenges and also increase risk exposures faced by Bank, an effective and integrated risk and capital management system is needed, which is able to support the achievement and growth of sustainable performance while enhancing the competitiveness of the bank.

Risk is the potential loss due to certain events. Risk in the banking context is a potential event, either an expected or an unexpected that has a negative impact on bank income and capital of the bank.

Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.

The implementation of Risk Management is based on national and international regulations, including Financial Services Authority Regulations (POJK), Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK), Bank Indonesia Regulations (PBI), Bank Indonesia Circular Letters (SEBI), and Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Some of the agreements related to Bank Risk Management are as follows:

1. POJK No. 18 / POJK.03 / 2016, March 16th of 2016 and SEOJK No. 34 / SEOJK.03 / 2016 September 1st of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks
2. POJK No. 38 / POJK.03 / 2017 July 12th of 2017 and SEOJK No. 43 / SEOJK.03 / 2017 July 17th of 2017 concerning Prudential Principles and Reports within the framework of the Application of Risk Management for Banks that Control Subsidiaries.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

3. POJK No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 04/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, baik untuk Bank secara individu, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu: (i) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; (ii) Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; (iii) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan (iv) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko di Bank secara umum terangkum dalam kerangka (*framework*) manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, Bank menyusun *Risk Governance* sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang fokus pada struktur, proses dan pendekatan pengelolaan risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di Bank yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Bank juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu Bank, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan Bank. Bank terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan Bank agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian (*assessment*) yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Some of the agreements related to Bank Risk Management are as follows: (continued)

3. POJK No. 17 / POJK.03 / 2014 September 18th of 2014 and SEOJK No. 14 / SEOJK.03 / 2015 May 25th of 2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
4. POJK No. 04/POJK.03/2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 Concerning Bank Health Level Assessment.

The Risk Management implementation is based on the need to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Units to optimize the revenue from the Business Unit as a whole.

In order to implement effective Risk Management, both for Bank individually, the application of risk management is done through 4 (four) pillars of risk management: (i) Active control from board of directors and board of Commissioners; (ii) The adequacy of policies and risk management procedures and, ie. risk limit determination; (iii) The adequacy of identification, measurement, monitoring, and risk control and Risk Management Information Systems, and (iv) Internal control systems.

Implementation of risk management in Bank is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

Periodic evaluation is applied to Risk Management Policies and Procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Risk Governance is formed to enforce the effectiveness of Risk Management Implementation, and as a part of Corporate Governance system, which focuses on structure, process and approach to risk management in achieving the business goals.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for Bank's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. Bank has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of Bank by implementing risk culture enhancement to build a strong risk culture that is part of the Bank's company culture. Bank constantly strives to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko stratejik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidakpatuhan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Mengelola Pedoman Perusahaan untuk manajemen risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan;
- Melakukan analisis aspek risiko hukum dan uji kepatuhan terhadap produk atau aktivitas *existing* dan baru;
- Melakukan kaji ulang berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforcement* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang ada;
- Melakukan pengelolaan komplain/keluhan nasabah dengan optimalisasi fungsi sarana *Online Request Management (ORM)*, selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Mengelola jumlah pemberitaan negatif yang ada di media, baik media cetak maupun media elektronik dan menindaklanjuti pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan perencanaan strategis melalui serangkaian proses untuk penyelarasan strategi perusahaan dengan strategi unit;
- Melakukan pemantauan pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis;
- Melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan pemantauan terhadap jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan (*track record* kepatuhan Bank)

Bank selaku Entitas telah melakukan koordinasi untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dengan melakukan pemantauan dan pengukuran risiko yang dituangkan dalam bentuk penilaian Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM), KPM Terintegrasi, penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB), serta penilaian Profil Risiko.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Bank also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as noncompliance with the terms of the engagements validity of contracts or binding of imperfect collaterals; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of the Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows:

- Manage Operational Guidance Manual for legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk;
- Analysis of the legal aspects and compliance testfor existing and new product or activities;
- Conduct periodic reviews of the standard format of the agreement, especially the credit agreement, to ensure compliance with statutory regulations;
- Conduct periodic reviews of contracts and agreements between Bank and other parties, among others by reassessing the effectiveness of the enforcement process to check the validity of rights in existing contracts and agreements;
- Manage customer complaints by optimizing the function of Online Request Management (ORM) facilities, then resolve the issue;
- Managing the amounts of negative news on media, whether printed or electronic media, and follow up the proclamation in accordance with the prevailing policies;
- The strategic planning done through a series of strategic planning process to align the corporate strategy and strategy unit;
- Planning the completion of a business that has been determined, is done by comparing the target to the realization of the business;
- Compliance certification to all policies and procedures in accordance with applicable regulations;
- Monitoring of types, significance and frequency of violations of regulations (Bank compliance track record)

As the Bank coordinates regarding the implementation of risk management policies as defined by Indonesia Financial Services Authority, among others by implementing risk monitoring and measurement in the form of Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, Bank's soundness rating assessment.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Penilaian profil risiko Bank menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian Profil Risiko bank telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren Bank posisi 31 Desember 2025 adalah low to moderate dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko Bank adalah 2 (*low to moderate*) (tidak diaudit).

- Profil Risiko
Hasil penilaian Profil Risiko Bank periode 31 Desember 2025 masih stabil di Peringkat 2 (Low to Moderate).
- Rentabilitas
Terjadi penurunan/perbaikan tren risiko pada parameter Rentabilitas yang dipicu oleh pencapaian rasio profitabilitas yang diatas target.
- Permodalan
Penurunan/perbaikan tren risiko pada parameter permodalan diakibatkan peningkatan komponen modal Bank yang terdiri dari peningkatan Modal Inti, Penanganan Aset Produktif Bermasalah dan Penanganan Aset Kualitas Rendah.
- Tata Kelola
Tata kelola Bank posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 relatif stabil.

Pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan operasional Bank sebagaimana diuraikan sesuai dengan definisi dari Regulator.

a. Risiko Kredit

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi dan untuk mencegah kredit tersebut menjadi kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mengelola kemungkinan kerugian yang timbul akibat debitur gagal bayar atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individu maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

The risk profile assessment of Bank reflects the inherent risk of the Bank's business, including the risk control system for each type of risk. The risk profile of Bank has been performed based on attachment of SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 about the Bank's soundness rating assessment.

Based on the results of a recent self-assessment report, inherent risk rank of Bank as of December 31, 2024 is low to moderate and the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the risk profile composite rank of Bank is 2 (low to moderate) (unaudited).

- Risk Profile
The results of the Bank's Risk Profile assessment for the period December 31, 2025 are still stable at Rating 2 (Low to Moderate).
- Rentability
There was a decrease/improvement of the risk trend in the Profitability parameter which was triggered by achieving a profitability ratio that was above the target.
- Capital
The decrease/improvement of the risk trend in the capital parameter was due to an increase in the Bank's capital component consisting of an increase in Core Capital, Handling of Troubled Earning Assets and Handling of Low Quality Assets.
- Governance
Bank's governance for the position of 31 December 2025 is relatively stable compared to the position in 31 December 2024.

The management of Bank's credit, liquidity, market and operational risks, consistent with Regulator's definition.

a. Credit Risk

The Bank's loan management is aimed to support the loan expansion and to manage the quality of each loan from the time the loan was granted until the loan is fully repaid by the debtors and to prevent the loan becoming a Non-Performing Loan (NPL). Effective loan management is intended to minimize the risk of losses and optimize the use of capital allocated for credit risk.

The purpose of Bank's credit risk management other than to comply with Bank Indonesia and Financial Services Authority regulations is to manage the possible losses resulting from the debtors' failure to pay loans or credit facility and other financial contracts at the minimum level, both on the individual and loan portfolio level.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan serta manajemen risiko kredit, yang diputuskan melalui forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Prosedur Perkreditan (KPP), Komite Risiko dan Kapital sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC) yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior serta Rapat Direksi (Radisi) dan disetujui oleh Dewan Komisaris, juga secara tertulis dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan dan Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit.

Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian penyelamatan/restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, sehingga kualitas kredit dapat terjaga dengan tetap memperhatikan target bisnis yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, Bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan dan kebijakan manajemen risiko kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat individu dan tingkat portofolio. Pada tingkat individu pinjaman untuk kredit produktif, setiap usulan pemberian kredit dilakukan melalui proses analisis kredit oleh Unit Bisnis dan direview oleh unit risiko kredit. Mekanisme persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit. Komite Kredit merupakan lembaga pemutus kredit yang Beranggotakan pemutus dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Bisnis, dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Untuk mempercepat proses ekspansi bisnis segmen Kecil, fungsi pemasaran dan proses analisa kredit dilakukan oleh Relationship Manager yang berada di bawah unit bisnis yaitu dengan melakukan analisa bisnis dan analisa Risiko serta memberikan mitigasi Risiko yang diperlukan terhadap calon debitur yang diusulkan.

Adapun untuk segmen Menengah dan Korporasi dilakukan oleh Senior Relationship Manager dan Relationship Manager yang berada di unit bisnis dengan tugas memproses usulan dari calon debitur, sementara analisis dan review risiko calon debitur di segmen Korporasi dan Menengah dilakukan oleh fungsi *Credit Risk Manager* yang berada di bawah Unit Risiko.

Penerapan *four eyes principles* dalam proses perkreditan di Bank diimplementasikan dalam proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui Komite Kredit, yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit yang diusulkan sesuai dengan limit yang ditetapkan. Anggota Komite Kredit terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. Dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit Risk (continued)

Bank already has loan policies, credit and credit risk management procedures that was decided in the Credit Policy Committee (KKP) and Credit Procedures Committee (KPP), Risks and Capital Committee sub division of Risk Management (KRK- RMC) consisting of Board of Directors and several members of senior management, and also Board of Directors meetings, also as written in the Credit Company Guidelines (PP) and Credit Risk Management Company Guidelines.

These Credit Company Guidelines (PP) provide complete and detailed guidance on loan management activities from loan proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, controls, restructuring and the settlements of non- performing loans, so that credit quality can be maintained by taking into account the business targets set.

To support a prudent loan granting process, Bank conducts periodic reviews and enhances its loan and credit risk management policies in line with current business developments.

Credit risk management is implemented both at the individual and portfolio level. At the individual level, for productive loans, each loan proposal is made through a process of analysis by the Business Unit and being reviewed by the credit risk unit. The credit approval process mechanism is through a credit committee meeting. The credit committee constitutes the decision maker for credit approval, which consists of representatives from Business Units and representatives from the Credit Risk Unit, so that the loan granting process becomes more comprehensive and prudent.

To accelerate the process of business expansion in a small segment, the marketing and credit function is performed by the Relationship Manager under the business unit by conducting business analysis and risk analysis as well as providing risk mitigation against the proposed debtor candidates.

As for the Middle and Corporate segment these are performed by Senior Relationship Managers and Relationship Managers who are in the business unit and have the task of processing the proposals from perspective debtors, while the analysis and risk review of prospective debtors in the Corporate and Middle segment are performed by Credit Risk Manager who is under the Risk Unit.

The application of four eyes principles in the lending process at Bank is implemented in the credit approval process through credit committees, that is a forum of credit decision makers who have the authority to decide the credit in accordance with the specified limit. The members of the credit committee consist of business unit officers and business risk unit officers. Thus the process of granting credit becomes more comprehensive and prudent.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Unit bisnis dan unit risiko bisnis berperan sebagai *first line of defense (risk owner)* yang bertugas mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.

Proses analisis dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan internal rating system (untuk kredit produktif) dan scoring system (untuk kredit konsumtif dan kredit produktif segmen ritel), sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Hasil proses analisis dan penilaian tingkat risiko kredit kemudian diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Divisi Pengelolaan Aset Khusus, baik untuk segmen Korporasi dan segmen Komersial dan Usaha Kecil untuk segmen menengah dan kecil, agar penyelamatan/ penyelesaian kredit dapat dilakukan secara lebih baik dan memungkinkan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Untuk menjaga agar portofolio Bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka telah ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK Bank telah menetapkan limit BMPK yang disebut *house limit* dengan batas yang lebih *prudent* dibandingkan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Untuk mengatur komposisi portofolio pinjaman Bank, setiap tahun sekali ditetapkan batas maksimum pinjaman (*Loan Exposure Limit*) yang bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pinjaman berdasarkan sektor industri untuk mengoptimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan risiko di masing-masing sektor industri serta mengurangi risiko konsentrasi. Dalam penentuan konsentrasi tiap sektor industri yang optimal, Bank mengembangkan metode *Credit Portfolio Optimisation (CPO)* dengan memperhitungkan korelasi *risk-return* dari tiap sektor industri. Selanjutnya Bank memonitor status kelonggaran ekspansi pinjaman (*space available*) secara periodik berdasar *Loan Exposure Limit (LEL)*.

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Khusus untuk pengukuran risiko kredit, Bank menggunakan metode standar. Selanjutnya, Bank juga mempersiapkan dan mengembangkan metodologi rating internal.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada Bank, Bank secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan Bank menghadapi kondisi tersebut.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit Risk (continued)

Business units and business risk units act as first line of defense (risk owner) in charge of managing and controlling credit risk in daily operations of the unit.

Loan analysis and approval process is conducted through several assessment processes of the applicant's credit risks, i.e. through internal rating system (for productive loans) and scoring system (for consumer and retail loans), followed by the related risk mitigation strategy. The results of the credit analysis and risk assessment process will be forwarded to the Credit Committee for approval.

Non-performing loans are managed by the Special Asset Management Division, both for the Corporate segment and the Commercial and Small Business segments for the medium and small segments, so that credit rescue/settlement can be carried out better and enable Business Units to be able to focus on managing current debtors and expanding credit.

To prevent the Bank portfolio from being concentrated to certain debtors and economic sectors, credit restrictions have been set according to the risk appetite, while to anticipate exceeding the Legal Lending Limit, Bank has set limits on the Maximum Limit of Credit License called House Limit with a more prudent limit than the limit of Maximum Credit Granting in accordance with the provisions of the regulator.

To manage the composition of Bank portfolio, the loan exposure limit is determined annually to diversify loan portfolio among different industry sectors in order to optimize return regarding risk in each sector and to reduce concentration risk. In the determination of optimal concentration in industry sectors, the Bank has developed a method of Credit Portfolio Optimisation by calculating the correlation of risk return from each industry sectors. Furthermore, the Bank monitors the status of the space available based on Loan Exposure Limit (LEL) periodically.

The development of credit risk management is conducted in stages, and in line with the framework set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. Specifically for measuring credit risk, Bank utilizes the standardized approach methodology. Furthermore, Bank also prepares and develops internal ratings-based methodology.

As part of the measurement of credit risk and to anticipate the occurrence of macro-factors changes affecting the Bank, Bank periodically performs stress testing of credit risk to assess changes in loan portfolio and its impact to the Bank and the Bank's ability to face such condition.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Berikut ini adalah rasio atas *non-performing loan* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Rasio NPL - Bruto	3.36%	2.36%
Rasio NPL - Net	1.76%	0.63%

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset (nilai bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Giro pada		
Bank Indonesia	1,136,671,063,929	3,343,533,751,313
Giro pada bank lain	85,304,170,767	61,528,572,540
Penempatan pada BI dan bank lain	2,603,712,117,924	650,196,635,621
Efek-efek		
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	10,181,500,000	92,839,990,860
- Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain	937,365,308,979	1,026,917,820,000
- Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Korporasi	337,859,660,961	242,936,230,490
Obligasi Pemerintah	444,240,254,920	1,082,752,286,750
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	3,151,560,638,156	2,314,068,415,704
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	737,935,335,000	-
Pinjaman yang diberikan		
Konsumsi	12,176,347,090,495	10,637,510,321,736
Modal kerja	2,135,666,253,860	2,174,834,508,811
Investasi	813,046,081,832	884,646,413,633
Sindikasi	5,635,244,928,332	6,303,627,124,375
Pemilikan rumah	103,617,178,984	889,277,376,664
Direksi dan karyawan	692,483,784,547	683,924,448,471
Program Pemerintah	996,803,183,706	220,113,292,371
Jumlah	31,998,038,552,392	30,608,707,189,339

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Fasilitas kredit yang belum digunakan	1,134,503,664,296	1,633,143,500,529
Garansi yang diberikan	93,645,579,396	263,000,949,916
Jumlah	1,228,149,243,692	1,896,144,450,445

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit Risk (continued)

Below is the ratio of non-performing loans as of December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024
NPL Ratio - Gross	3.36%	2.36%
NPL Ratio - Nett	1.76%	0.63%

(i) The maximum exposure to credit risk without taking into account collateral and other credit support.

Credit risk exposure to assets (net value less allowance for impairment losses) on the statements of financial position as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024
Current accounts with Bank Indonesia	1,136,671,063,929	3,343,533,751,313
Current accounts with other bank	85,304,170,767	61,528,572,540
Placement with Bank Indonesia and other bank	2,603,712,117,924	650,196,635,621
Marketable Securities		
Fair value through - profit and loss statement	10,181,500,000	92,839,990,860
Fair value through other - other comprehensive income	937,365,308,979	1,026,917,820,000
Amortized cost - Corporate Bonds	337,859,660,961	242,936,230,490
Government Bonds	444,240,254,920	1,082,752,286,750
Bank Indonesia Rupiah Securities	3,151,560,638,156	2,314,068,415,704
Securities purchased under agreement to resell	737,935,335,000	-
Loan		
Consumer	12,176,347,090,495	10,637,510,321,736
Working capital	2,135,666,253,860	2,174,834,508,811
Investment	813,046,081,832	884,646,413,633
Syndicated	5,635,244,928,332	6,303,627,124,375
Home loan	103,617,178,984	889,277,376,664
Directors and employees	692,483,784,547	683,924,448,471
Government programs	996,803,183,706	220,113,292,371
Total	31,998,038,552,392	30,608,707,189,339

Credit risk exposures related to administrative accounts items as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024
Unused loan facilities	1,134,503,664,296	1,633,143,500,529
Guarantees issued	93,645,579,396	263,000,949,916
Total	1,228,149,243,692	1,896,144,450,445



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya. (lanjutan)

Saldo tersebut menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar 69,01% dan 69,14% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses kredit, pengembangan produk penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis Teknologi.
- Bank Papua telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank Papua telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran.
- Bank Papua telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.
- Bank Papua telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, personal loans dan fasilitas antar bank.

- (ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

Bank menentukan struktur kredit termasuk penentuan *covenant* yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik dan hak tanggungan, garansi/ penjaminan pihak ketiga (termasuk penjaminan kredit oleh perusahaan asuransi) serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

- (i) The maximum exposure to credit risk without taking into account collateral and other credit support. (continued)

The amount above represents credit risk exposures at maximum of Bank Papua as of December 31, 2025 and 2024, without taking into account any collateral held or other credit enhancements. The exposures set out above are based on net carrying amounts of the assets as reported in the statements of financial position.

As of 31 December 2025 and 2024, the total maximum credit risk exposure in statement of financial position from loans is 69.01% and 69.14%, respectively.

Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:

- The process of improving credit management in a sustainable manner by improving credit processes, product development credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.
- Bank Papua has a documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transactions must adhere to the requirements of the Bank's policy.
- Bank Papua has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.
- Bank Papua has done stress test on credit risk to assess the ability of Bank to stay in the non-normal condition and as an instrument for decision making for the Bank.
- Bank Papua has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.
- All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, personal loans and interbank loans.

- (ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation.

Bank sets loan structure for every debtor through appropriate covenants that aligns with debtor needs and condition. This is to ensure the debtor uses the loan according to its original purpose so that the Bank and the debtor's interests are fulfilled. Collateral types held by the Bank are cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets. Estimates of fair value of collaterals held by the Bank is based on the value of collaterals assessed internally or externally by the independent appraisers.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan).

(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation. (continued)

Ketentuan *coverage* atau kecukupan agunan untuk tiap segmen ditentukan sebagai berikut:

The collateral coverage criteria for each segment is divided as follows:

Segmen/ Segment	Jenis Agunan/ Collateral	Jumlah Coverage Minimal/ Minimum Coverage Amount
Korporasi/Wholesale	Aset tetap/Fixed Asset Kas/Cash Bank garansi /Standby Letter of credit Tanah dan Bangunan/ Land and Building Piutang/Receivable Kendaraan/Vehicle Agunan lain yang diterima oleh bank/ Other collaterals held by the bank	100% dari limit kredit/ from credit limit
Menengah/Middle	Aset tetap/Fixed Asset Kas/Cash Bank garansi /Standby Letter of credit Tanah dan Bangunan/ Land and Building Piutang/Receivable Kendaraan/Vehicle Agunan lain yang diterima oleh bank/ Other collaterals held by the bank	125% dari limit kredit/ from credit limit
Kecil/Retail	Aset tetap/Fixed Asset Kas/Cash Bank garansi /Standby Letter of credit	110% dari limit kredit/ from credit limit

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada umumnya menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

The carrying amounts of financial assets other than bank loans and securities purchased under agreements to resell is generally equal to the maximum exposure of credit risk.

Tabel di bawah ini menunjukkan eksposur maksimum neto atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025

The table below shows the net maximum exposure to credit risk on securities purchased under agreements to resell on December 31, 2025

31 Desember/ December 2025			
	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	Agunan/ Collateral	Eksposur Neto/ Net Exposure
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Marketable securities purchased under agreements to resell	737,935,335,000	-	737,935,335,000



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

- (iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Bank menentukan struktur kredit termasuk penentuan covenant yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik dan hak tanggungan, garansi/penjaminan pihak ketiga (termasuk penjaminan kredit oleh perusahaan asuransi) serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

Saat ini Bank sedang mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut internal rating dan internal scoring yang ada agar sejalan dengan *Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach)*, yaitu dengan mengembangkan *Basel II Risk Parameter model Probability of Default (PD)*, *Loss Given Default (LGD)* dan *Exposure At Default (EAD)* untuk segmen *Wholesale*, *Retail* dan *Consumer*. Hal ini juga dalam rangka mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan *Expected Credit Loss* yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN berdasarkan IFRS 9 (PSAK 71).

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada umumnya menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Papua pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit Risk (continued)

- (iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

Bank determines the structure of credit including the determination of the right covenant according to the needs and conditions of the debtor, so that the credit given is truly effective and profitable for both the debtor and the Bank. Types of collateral owned by the Bank are cash, deposits, collateral tied to mortgages and mortgage rights, third party guarantees / guarantees (including credit guarantees by insurance companies) and guarantees in the form of other assets. The estimated fair value of the collateral used by the Bank is based on the collateral value assessed by internal and external appraisers

The Bank is currently developing and further complementing internal rating and internal scoring to align with the *Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach)*, namely by developing the *Basel II Risk Parameters Probability of Default (PD) model*, *Loss Given Default (PD) LGD* and *AI Default (EAD) Exposure* for *Wholesale*, *Retail* and *Consumer* segments. This is also in order to prepare the components of the model for the calculation of *Expected Credit Loss* needed for the application of CKPN calculations based on IFRS 9 (PSAK 71)

The carrying value of bank financial assets other than loans and securities purchased with agreements to resell generally reflect the maximum exposure to credit risk.

The following amount provide the details of the Bank Papua credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2025 and 2024:

2025

	Pemerintah / Government	Bank / Bank	Perusahaan / Company	Perseorangan/ Individuals	
Giro pada Bank Indonesia	1,136,671,063,929	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	85,304,170,767	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2,603,712,117,924	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek - efek	4,326,284,703,076	-	337,965,415,034	-	Marketable securities
Reksadana	206,881,498,979	-	-	-	mutual funds
Reverse repo	737,935,335,000	-	-	-	Reverse repo
Kredit yang diberikan	462,327,820,001	189,987,054,377	7,414,353,684,251	14,486,539,943,127	Loans
Jumlah	6,870,100,420,985	2,879,003,343,068	7,752,319,099,285	14,486,539,943,127	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

2024

	Pemerintah / Government	Bank / Bank	Perusahaan / Company	Perseorangan/ Individuals	
Giro pada Bank Indonesia	3,343,533,751,313	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	61,528,572,540	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	650,196,635,621	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek - efek	4,198,303,722,454	-	242,936,230,490	-	Marketable securities
Reksadana	225,434,800,000	-	-	-	mutual funds
Kredit yang diberikan	428,970,969,211	135,876,284,003	8,275,042,745,701	12,954,043,487,146	Loans
	8,196,243,242,978	847,601,492,164	8,517,978,976,191	12,954,043,487,146	

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2025 and 2024, are as follows:

2025

	Pemerintah / Government	Bank / Bank	Perusahaan / Company	Perseorangan / Individuals	
Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan bagi atau dijamin oleh, dijamin dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak lainnya.	-	-	1,110,915,960,859	23,587,703,436	Unused loan facility that prepared by or guaranteed by marketable security issued by other parties
Garansi yang diterbitkan	-	-	93,645,579,396	-	Guarantee issued
Jumlah	-	-	1,204,561,540,255	23,587,703,436	Total

2024

	Pemerintah / Government	Bank / Bank	Perusahaan / Company	Perseorangan / Individuals	
Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan bagi atau dijamin oleh, dijamin dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak lainnya.	-	-	1,604,044,442,641	29,099,057,888	Unused loan facility that prepared by or guaranteed by marketable security issued by other parties
Garansi yang diterbitkan	-	-	263,000,949,916	-	Guarantee issued
Jumlah	-	-	1,867,045,392,557	29,099,057,888	Total



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**40. RISK MANAGEMENT (continued)****a. Risiko Kredit (lanjutan)****a. Credit Risk (continued)****(iv) Giro pada bank lain****(iv) Current accounts with other banks**

Per 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

As of December 31, 2025 and 2024, these financial assets is impaired either individually or collectively in accordance with Bank Indonesia.

	2025			
	Tidak mengalami penurunan nilai / Not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired	Jumlah / Total	
Rupiah	85,238,228,429	65,978,587	85,304,207,016	Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(36,249)	(36,249)	Allowance for impairment losses
Neto	85,238,228,429	66,014,836	85,304,170,767	Net
	2024			
	Tidak mengalami penurunan nilai / Not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired	Jumlah / Total	
Rupiah	61,462,674,807	65,978,587	61,528,653,394	Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(80,854)	(80,854)	Allowance for impairment losses
Neto	61,462,674,807	66,059,441	61,528,572,540	Net

(v) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain**(v) Placement with other bank and Bank Indonesia**

Per 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

As of December 31, 2025 and 2024, these financial assets are not impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulations.

	2025			
	Tidak mengalami penurunan nilai / Not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired	Jumlah / Total	
Rupiah	-	2,609,305,019,305	2,609,305,019,305	Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(5,592,901,381)	(5,592,901,381)	Allowance for impairment losses
Neto	-	2,603,712,117,924	2,603,712,117,924	Net
	2024			
	Tidak mengalami penurunan nilai / Not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired	Jumlah / Total	
Rupiah	-	654,139,378,387	654,139,378,387	Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3,942,742,766)	(3,942,742,766)	Allowance for impairment losses
Neto	-	650,196,635,621	650,196,635,621	Net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(vi) Efek - efek

(vi) Marketable securities

Per 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

As of December 31, 2025 and 2024, these financial assets are impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulations.

	2025			
	Tidak mengalami penurunan nilai / Not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired	Jumlah / Total	
Reksadana	206,881,498,979	-	206,881,498,979	Mutual Funds
Obligasi	1,480,935,057,168	41,935,922,786	1,522,870,979,954	Bonds
Sekuritas Rupiah				Bank Indonesia
Bank Indonesia	3,151,560,638,156	-	3,151,560,638,156	Rupiah Securities
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	737,935,335,000	-	737,935,335,000	Marketable securities purchased under agreements to resell
Jumlah	5,577,312,529,303	41,935,922,786	5,619,248,452,089	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(105,754,073)	(105,754,073)	Allowance for impairment losses
Neto	5,577,312,529,303	41,830,168,713	5,619,142,698,016	Net
	2024			
	Tidak mengalami penurunan nilai / Not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired	Total / Total	
Reksadana	225,434,800,000	-	225,434,800,000	Mutual Funds
Obligasi	2,178,075,605,314	41,935,922,786	2,220,011,528,100	Bonds
Sekuritas Rupiah				Bank Indonesia
Bank Indonesia	2,314,068,415,704	-	2,314,068,415,704	Rupiah Securities
Jumlah	4,717,578,821,018	41,935,922,786	4,759,514,743,804	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(121,535,374)	(121,535,374)	Allowance for impairment losses
Neto	4,717,578,821,018	41,814,387,412	4,759,393,208,430	Net

(vii) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

(vii) Estimated losses on commitments and contingencies

Per 31 Desember 2025 dan 2024, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai. (lihat Catatan 19)

As of December 31, 2025 and 2024, statements of financial position is not impaired. (see Notes 19)

(viii) Kredit yang diberikan

(viii) Loans

Per 31 Desember 2025, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109). Ikhtisar kredit yang diberikan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

As of December 31, 2025, these financial assets are impaired either individually or collectively in accordance with SFAS No.109. Summary of loans granted on December 31, 2025 and 2024 are as follows:



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(viii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

(viii) Loans (continued)

	2025			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah / Total
Rumah Tangga/Household	13,427,273,027,357	114,037,026,533	222,589,214,178	13,763,899,268,068
Konstruksi/Construction	4,244,501,532,051	99,798,620,262	136,087,538,834	4,480,387,691,147
Hotel, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ Hotel, food and beverages	1,001,063,923,430	818,577,597	92,205,588,024	1,094,088,089,051
Perdagangan besar dan eceran/ Wholesale and groceries	736,154,686,740	21,760,634,334	142,186,741,361	900,102,062,435
Pertambangan dan penggalian/ Mining and excavation	544,264,938,828	-	-	544,264,938,828
Aktivitas keuangan dan asuransi Financial and insurance activities	317,218,719,199	-	11,617,885,770	328,836,604,969
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib/Government administration, defense and social securities	462,886,530,361	-	-	462,886,530,361
Industri Pengolahan/Manufacturing Industry	312,597,085,192	3,773,215,165	4,886,727,372	321,257,027,729
Pengangkutan dan pergudangan Transport and warehousing	299,702,342,987	138,335,721	16,269,901,152	316,110,579,860
Listrik, gas dan air/Electricity, gas and water	209,806,427,664	-	-	209,806,427,664
Pertanian, Perikanan dan kehutanan Agriculture, fishery and forestry	54,781,667,287	1,520,266,419	7,054,122,634	63,356,056,340
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya/ Leasing and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support	16,868,453,839	-	10,917,505,292	27,785,959,131
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan/Real estate, rent, and service company	11,170,049,980	472,603,625	9,185,648,108	20,828,301,713
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities	1,027,006,930	-	1,245,074,043	2,272,080,973
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	1,897,157,654	491,423,186	832,266,999	3,220,847,839
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi Household activities as employers; activities that produce goods and services by households	1,953,130,568	-	656,269,676	2,609,400,244
Aktivitas jasa lainnya Other service activities	921,396,057	-	1,477,818,234	2,399,214,291
Saldo dipindahkan/ Carrying amount	21,644,088,076,124	242,810,702,842	657,212,301,677	22,544,111,080,643



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(viii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

(viii) Loans (continued)

2025				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah / Total
Saldo pindahan/ <i>Carrying forward</i>	21,644,088,076,124	242,810,702,842	657,212,301,677	22,544,111,080,643
Informasi dan komunikasi <i>Information and communication</i>	1,572,315,212	-	1,345,208,851	2,917,524,063
Jasa pendidikan <i>Education service</i>	2,978,884,194	-	-	2,978,884,194
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis <i>Professional, scientific and technical activity</i>	2,528,249,565	-	-	2,528,249,565
Kesenian, hiburan dan rekreasi/ <i>Arts, entertainment and recreation</i>	25,426,913	-	-	25,426,913
Bukan lapangan usaha <i>Not in business sector</i>	647,336,378	-	-	647,336,378
Jumlah / Total	21,651,840,288,386	242,810,702,842	658,557,510,528	22,553,208,501,756
Penyisihan kerugian penurunan nilai / <i>Allowance for impairment losses</i>	(82,498,652,526)	(32,486,079,469)	(356,456,246,501)	(471,440,978,496)
Bersih / Net	21,569,341,635,860	210,324,623,373	302,101,264,027	22,081,767,523,260

2024				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah / Total
Rumah Tangga/ <i>Household</i>	11,926,942,952,480	94,262,194,309	198,348,830,378	12,219,553,977,167
Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,523,632,818,275	98,868,098,583	102,744,775,390	4,725,245,692,248
Hotel, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ <i>Hotel, food and beverages</i>	1,108,338,689,013	2,027,140,029	38,841,316,663	1,149,207,145,705
Perdagangan besar dan eceran/ <i>Wholesale and groceries</i>	773,203,622,699	32,304,753,947	91,182,502,905	896,690,879,551
Pertambangan dan penggalian/ <i>Mining and excavation</i>	609,533,504,993	-	-	609,533,504,993
Aktivitas keuangan dan asuransi <i>Financial and insurance activities</i>	499,318,740,305	-	11,435,190,007	510,753,930,312
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib/ <i>Government</i> <i>administration, defense and</i> <i>social securities</i>	430,293,911,042	-	-	430,293,911,042
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	361,616,224,996	172,388,838	6,201,080,999	367,989,694,833
Pengangkutan dan pergudangan <i>Transport and warehousing</i>	291,511,642,908	10,592,410,524	4,155,934,135	306,259,987,567
Listrik, gas dan air/ <i>Electricity, gas and water</i>	278,093,822,307	-	-	278,093,822,307
Pertanian, Perikanan dan kehutanan <i>Agriculture, fishery and forestry</i>	221,268,603,036	3,701,669,227	7,683,354,531	232,653,626,794
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya/ <i>Leasing and leasing activities</i> <i>without option rights, employment,</i> <i>travel agents and other</i> <i>business support</i>	14,498,940,449	42,177,581	11,240,734,256	25,781,852,286
Saldo dipindahkan/ <i>Carrying amount</i>	21,038,253,472,503	241,970,833,038	471,833,719,264	21,752,058,024,805



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(viii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

(viii) Loans (continued)

	2024			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah / Total
Saldo Pindahan/Carrying forward	21,038,253,472,503	241,970,833,038	471,833,719,264	21,752,058,024,805
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan/Real estate, rent, and service company	8,921,414,136	4,764,784,648	8,793,084,501	22,479,283,285
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities	3,388,760,348	15,277,775	1,421,729,218	4,825,767,341
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial Human health activities and social activities	2,859,295,811	355,496,368	837,592,974	4,052,385,153
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi Household activities as employers; activities that produce goods and services by households	1,511,776,897	8,171,864	1,313,586,207	2,833,534,968
Aktivitas jasa lainnya Other service activities	1,271,903,311	26,123,612	1,448,856,527	2,746,883,450
Informasi dan komunikasi Information and communication	409,944,856	210,824,690	1,277,573,287	1,898,342,833
Jasa pendidikan Education service	1,719,528,788	-	-	1,719,528,788
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis Professional, scientific and technical activity	1,193,489,925	-	-	1,193,489,925
Kesenian, hiburan dan rekreasi/ Arts, entertainment and recreation	64,026,773	-	-	64,026,773
Bukan lapangan usaha Not in business sector	62,218,740	-	-	62,218,740
Jumlah / Total	21,059,655,832,088	247,351,511,995	486,926,141,978	21,793,933,486,061
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Allowance for impairment losses	(223,320,852,449)	(34,337,525,564)	(373,528,595,811)	(631,186,973,824)
Bersih / Net	20,836,334,979,639	213,013,986,431	113,397,546,167	21,162,746,512,237



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(viii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

(viii) Loans (continued)

(ix) Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) :

(ix) The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses) that are neither past due nor impaired:

	2025				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither pas due nor impaired	Tingkat tinggi / High grade	Tingkat standar/ Standard grade	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Pas-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai / Impaired
Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss statement					Jumlah / Total
Obligasi pemerintah / Government bonds	10,181,500,000	-	-	-	10,181,500,000
Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost					
Obligasi Korporasi / Corporate bonds	296,029,492,248	-	-	-	337,965,415,034
Obligasi pemerintah / Government bonds	444,240,254,920	-	-	-	444,240,254,920
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia / Bank Indonesia Rupiah Securities	3,151,560,638,156	-	-	-	3,151,560,638,156
Giro pada BI / Current account with Bank Indonesia	1,136,671,063,929	-	-	-	1,136,671,063,929
Giro pada bank lain / Current account with other banks	-	85,238,228,429	-	-	85,304,207,016
Penempatan pada BI dan bank lain / Placement with Bank Indonesia and other banks	-	-	-	2,609,305,019,305	2,609,305,019,305
Pinjaman yang diberikan / Loan					
Konsumer / Consumer	-	12,189,159,612,583	-	74,879,406,464	12,264,039,019,047
Modal kerja / Working capital	362,812,721,044	1,468,663,529,184	-	304,190,003,633	2,135,666,253,861
Investasi / Investment	-	615,416,728,075	-	197,629,353,757	813,046,081,832
Karyawan / Employee	-	702,614,091,287	-	5,794,943,691	708,409,034,978
Sindikasi / Syndicated	1,168,938,866,120	4,464,579,669,990	-	1,726,392,222	5,635,244,928,332
Program Pemerintah / Government Program	-	823,745,223,806	-	173,057,959,900	996,803,183,706
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income					
Obligasi pemerintah / Government bonds	730,483,810,000	-	-	-	730,483,810,000
Reksadana/ Mutual fund	-	206,881,498,979	-	-	206,881,498,979
Jumlah / Total	7,300,918,346,417	20,556,298,582,333	-	3,408,584,980,345	31,265,801,909,095
Cadangan kerugian penurunan nilai / Allowance for impairment losses	-	(111,107,348,111)	-	(366,032,322,088)	(477,139,670,199)
Netto / Net	7,300,918,346,417	20,445,191,234,222	-	3,042,552,658,257	30,788,662,238,896

- 129 -



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(viii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

Tingkat tinggi

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- b) Pinjaman yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit; debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio laporan posisi keuangan yang konservatif.
- c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam investment grade dengan rating minimal idBBB- (Pefindo) atau BBB- (Fitch).

Tingkat standar

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- b) Pinjaman yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau BB+ sampai dengan B (Fitch).

(ix) Nilai wajar agunan

Bank Papua memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, bangunan, kendaraan, hak tagih dan properti lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank Papua didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit Risk (continued)

(viii) Loans (continued)

High grade

- a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the Sovereign, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.
- b) Loans, interests receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative statements of financial position ratios.
- c) Securities and government bonds are securities issued by government, investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB- (Pefindo) or BBB- (Fitch).

Standard grade

- a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the
- b) Loans, interests receivables and third party receivables are borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over; smaller corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.
- c) Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or BB+ to B (Fitch).

(ix) Fair value of collateral

Bank Papua hold collateral against loans in the form of cash deposits, building, vehicle, receivables and others property. Estimates of fair value of collateral held by the Bank are based on the value of collateral assessed internally or externally by the independent appraisers.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, liabilitas kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan sumber potensi likuiditas bagi Bank Papua. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank Papua. Bank Papua mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara akses pasar yang mencukupi. Likuiditas Bank Papua saat ini diukur melalui posisi *primary reserve* dan *secondary reserve*. Bank Papua memelihara *primary reserve* dan *secondary reserve* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik penarikan dana tidak terduga maupun ekspansi aset. Bank Papua memelihara *primary reserve* dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan Kas di cabang-cabang.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan aktivitas bisnis yang dilaksanakan unit kerja operasional dan memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Untuk mengetahui kemampuan, Bank Papua melakukan serangkaian skenario likuiditas yang mencakup kondisi normal dan tidak normal termasuk kondisi ekstrim/krisis. Selain melalui dana pihak ketiga, Bank Papua dapat memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber-sumber dana alternatif seperti : sekuritisasi aset, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali ataupun melalui penjualan surat berharga seperti Surat Utang Negara (*Government bond*).

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

ASET / ASSETS

Giro pada BI / *Current account with*

Bank Indonesia

1,136,671,063,929 1,136,671,063,929

Giro pada Bank lain / *Current account with other banks*

85,304,170,767 85,304,170,767

Penempatan pada BI dan Bank lain /

Placement with Bank Indonesia and Other banks

2,603,712,117,924 - 2,603,712,117,924

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as Risk as a result of the Bank's inability to meet the maturing obligations of cash flow fund sources and / or of high quality liquid assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

The amounts of third party funds, asset liquidity, liabilities to counterparties and loan commitments to debtors are potential liquidity sources for the Bank. The incapability to raise funds with tolerable cost will impact the Bank Papua's profitability. The Bank manages its liquidity risk to fulfill each agreed financial liability on a timely basis and to maintain an adequate and optimum liquidity position at any time.

The policy on liquidity risk management covers, among others, the maintenance of optimum liquidity reserve, determination of funding strategy and maintaining an adequate access to the market. The Bank Papua current liquidity is measured through its primary and secondary reserves. The Bank maintains its primary and secondary reserves to fulfill its liquidity needs in order to satisfy unexpected withdrawals or expansion of assets. Bank Papua maintains its primary reserve through the minimum reserve requirements imposed by Bank Indonesia and cash in its branches.

The policy on liquidity risk management is prepared in accordance with the business activities carried out by operational units and considers the needs to expand the business. The Bank Papua conducts liquidity scenarios which include normal, abnormal and extreme conditions. Bank Papua is able to fulfill liquidity needs through alternative sources of financing other than through third party funds, which include asset securitization, securities under repurchase agreements or sale of securities, including Government bonds.

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2025 and 2024:

		2025			
Nilai tercatat / Carrying value	Lainnya / Others	1 Bulan/ 1 Month	1 - 6 Bulan / 1 - 6 Months	6 - 12 Bulan/ 6 - 12 Months	> 12 Bulan / > 12 Months



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity Risk (continued)

		2025				
	Nilai tercatat / Carrying value	Lainnya / Others	1 Bulan/ 1 Month	1 - 6 Bulan / 1 - 6 Months	6 - 12 Bulan/ 6 - 12 Months	> 12 Bulan / > 12 Months
Surat-surat berharga - bruto / Marketable securities - gross						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit or loss	10,181,500,000	-	-	-	-	10,181,500,000
Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	3,933,766,308,110	-	99,758,091,551	875,256,662,419	2,291,545,884,186	667,205,669,954
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	937,365,308,979	-	-	-	-	937,365,308,979
Reverse Repo - bruto/ Reverse Repo - gross	737,935,335,000	-	737,935,335,000	-	-	-
Pinjaman yang diberikan - bruto / Loans - gross	22,332,386,568,418	-	184,172,776,409	467,674,078,307	592,755,236,354	21,087,784,477,348
Bunga yang masih akan diterima / Interest receivable	86,013,918,047	-	86,013,918,047	-	-	-
Jumlah / Total	31,863,336,293,199	1,221,975,234,696	3,711,592,238,931	1,342,930,740,726	2,884,301,120,540	22,702,536,956,281
LIABILITAS / LIABILITIES						
Liabilitas segera / Obligation due immediately*)	422,928,166,356	-	422,928,166,356	-	-	-
Simpanan nasabah/ Deposit from Customers	26,170,639,027,309	17,930,986,997,280	1,182,614,947,334	5,810,139,193,119	1,182,475,774,611	64,422,114,965
Simpanan dari Bank Lain Deposit from other customers	1,019,509,106,360	19,509,106,360	1,000,000,000,000	-	-	-
Pinjaman yang diterima / Borrowings	1,569,504,383,945	-	-	-	-	1,569,504,383,945
Bunga yang masih harus dibayar / Accrued interest	19,468,668,385	-	19,468,668,385	-	-	-
Jumlah / Total	29,202,049,352,355	17,950,496,103,640	2,625,011,782,075	5,810,139,193,119	1,182,475,774,611	1,633,926,498,910
Perbedaan jatuh tempo / Maturity difference	2,661,286,940,845	(16,728,520,868,944)	1,086,580,456,857	(4,467,208,452,393)	1,701,825,345,929	21,068,610,457,371
		2024				
	Nilai tercatat / Carrying value	Lainnya / Others	1 Bulan / 1 Month	1 - 6 Bulan / 1 - 6 Months	6 - 12 Bulan / 6 - 12 Months	> 12 Bulan / > 12 Months
ASET / ASSETS						
Giro pada BI / Current account with Bank Indonesia	3,343,533,751,313	3,343,533,751,313	-	-	-	-
Giro pada Bank lain / Current account with other banks	61,528,572,540	61,528,572,540	-	-	-	-
Penempatan pada BI dan Bank lain / Placement with Bank Indonesia and Other banks	650,196,635,621	-	650,196,635,621	-	-	-
Surat-surat berharga - bruto / Marketable securities - gross						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit or loss	92,839,990,860	-	-	-	-	92,839,990,860
Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	4,666,073,316,944	-	959,920,988,525	2,141,912,718,777	-	1,564,239,609,642
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	1,026,917,820,000	-	-	-	-	1,026,917,820,000



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

2024						
Nilai tercatat / Carrying value	Lainnya / Others	1 Bulan / 1 Month	1 - 6 Bulan / 1 - 6 Months	6 - 12 Bulan / 6 - 12 Months	> 12 Bulan / > 12 Months	
ASET / ASSETS						
Kredit yang diberikan - bruto / Loans - gross	-	146,356,148,380	548,651,909,287	672,567,001,220	20,214,770,234,237	
Bunga yang masih akan diterima / Interest receivable	-	86,642,350,138	-	-	-	
Jumlah / Total	3,405,062,323,853	1,843,116,122,664	2,690,564,628,064	672,567,001,220	22,898,767,654,739	
LIABILITAS / LIABILITIES						
immediately *)	-	954,246,226,849	-	-	-	
Simpanan nasabah/ Deposit from Customers	20,012,662,676,054	783,481,564,836	2,536,980,587,947	1,284,699,502,084	68,264,386,103	
Simpanan dari Bank Lain Deposit from other customers	18,283,494,255	555,809,098,133	4,085,000,000	-	-	
Pinjaman yang diterima / Borrowing	-	-	-	-	75,984,704,425	
Bunga yang masih harus dibayar / Accrued interest	-	7,617,188,400	-	-	-	
Jumlah / Total	20,030,946,170,309	2,301,154,078,218	2,541,065,587,947	1,284,699,502,084	144,249,090,528	
Perbedaan jatuh tempo / Maturity difference	(16,625,883,846,456)	(458,037,955,554)	149,499,040,117	(612,132,500,864)	22,754,518,564,211	

*) Terdiri dari titipan nasabah, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah

*) Consists of deposit customers, time deposits and interest on time deposits which have not been taken by the customers.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

The table below shows the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows (principal and interest):

2025						
Jumlah / Total	On demand	1 Bulan / 1 Month	1 - 6 Bulan / 1 - 6 Month	6 - 12 Bulan / 6 - 12 Month	> 12 Bulan / > 12 Month	
Liabilitas segera / Current liabilities *)						
Simpanan nasabah / Deposits from customers	17,930,986,997,280	1,182,614,947,334	5,810,139,193,119	1,182,475,774,611	64,422,114,965	
Simpanan dari Bank Lain Deposit from other customers	19,509,106,360	1,000,000,000,000	-	-	-	
Pinjaman yang diterima / Borrowing	-	-	-	-	1,569,504,383,945	
Bunga yang masih harus dibayar / Accrued interest	-	-	-	-	-	
Jumlah / Total	18,373,424,269,996	2,182,614,947,334	5,810,139,193,119	1,182,475,774,611	1,633,926,498,910	

*) Terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah

*) Consists of customer deposit's, undistributed profit sharing, time deposits and interest on time deposits which have not collected by customers

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Bank Papua. Secara umum Bank Papua terekspose pada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

c. Market Risk

Market risk is defined as the risk due to variable market factors and movements in the Bank Papua's portfolio. In general, the Bank Papua is exposed to interest rate and foreign currency risks.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

Bank Papua juga melakukan *stress-testing* untuk mengevaluasi kemampuan Bank Papua agar dapat mengikuti berbagai macam perubahan kondisi eksternal.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.

1. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas masa depan dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
ASET		
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	3.85% - 8.00%	6.32% - 6.50%
Efek-efek	5.13% - 8.75%	5.14% - 7.62%
Obligasi pemerintah		
Tingkat bunga tetap	5.143%-7.630%	5.125%-8.375%
Reverse Repo	-	4.20% - 4.83%
Kredit yang diberikan	2,00% - 17.25%	2,00% - 17.45%
LIABILITAS		
Simpanan nasabah	0.00% - 7.90%	0.00% - 7.90%
Simpanan dari bank lain	0.00% - 6.43%	0.00% - 6.52%
Pinjaman diterima	4,60% - 6,99%	5.80% - 6.10%

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank Papua terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) tidak diaudit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025			Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non interest	Jumlah / Total
	< 3 bulan / < 3 month	3 - 12 Bulan / 3 - 12 Month	> 12 Bulan / > 12 Month			
Aset keuangan / Financial Assets						
Kas / Cash	2,227,856,938,327	-	-	-	-	2,227,856,938,327
Giro pada BI / Current accounts with Bank Indonesia	-	-	-	1,136,671,063,929	-	1,136,671,063,929
Giro pada bank lain / Current accounts with other banks	-	-	-	85,304,207,016	-	85,304,207,016
Penempatan pada BI dan Bank lain / Placement with Bank Indonesia and other banks	-	-	-	2,609,305,019,305	-	2,609,305,019,305
Obligasi korporasi/Corporate bonds	-	-	-	337,965,415,034	-	337,965,415,034
Obligasi pemerintah / Government bonds	-	-	-	1,184,905,564,920	-	1,184,905,564,920
Reksadana / Mutual fund	-	-	2,227,856,938,327	-	-	2,227,856,938,327

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Market Risk (continued)

Bank Papua also conducts *stress-testing* to evaluate the ability of the Bank Papua to keep up with various kinds of external condition changes.

Included in the market risk is the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and changes in currency exchange rates.

1. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows of the fair values of financial instruments.

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for period ended December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024
ASSETS		
Placements with Bank Indonesia and Other banks	3.85% - 8.00%	6.32% - 6.50%
Marketable securities	5.13% - 8.75%	5.14% - 7.62%
Government bonds		
Fixed interest rate	5.143%-7.630%	5.125%-8.375%
Reverse Repo	-	4.20% - 4.83%
Loans	2,00% - 17.25%	2,00% - 17.45%
LIABILITIES		
Customer saving	0.00% - 7.90%	0.00% - 7.90%
Other customer saving	0.00% - 6.43%	0.00% - 6.52%
Borrowings	4,60% - 6,99%	5.80% - 6.10%

The tables below summarize the Bank Papua's exposure to interest rate risk (*gross*) (unaudited) as of December 31, 2025 and 2024:



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

c. Market Risk (continued)

1. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

1. Interest rate risk (continued)

2025						
	< 3 bulan / < 3 month	3 - 12 Bulan / 3 - 12 Month	> 12 Bulan / > 12 Month	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non interest	Jumlah / Total
Kredit yang diberikan / <i>Loans</i>	872,668,788,054	592,755,236,354	21,087,784,477,348	-	-	22,553,208,501,756
Bunga yang masih harus diterima / Accrued interest receivable	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset keuangan / Total financial assets	3,100,525,728,406	592,755,236,354	23,315,641,415,675	5,354,151,270,204	-	32,363,073,648,614
Dikurangi / Less:						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for impairment losses	(162,777,125,956)	(14,000,190,250)	(294,663,662,290)	(5,698,691,703)	-	(477,139,670,199)
Bersih / Net	2,937,748,602,450	578,755,046,104	23,020,977,753,385	5,348,452,578,501	-	31,885,933,978,415
Liabilitas keuangan / Financial liabilities						
Simpanan nasabah / Deposit from Customers	6,992,754,140,453	1,182,475,774,611	64,422,114,965	17,930,986,997,280	-	26,170,639,027,309
Simpanan dari Bank Lain Deposit from other customers	1,000,000,000,000	-	-	19,509,106,360	-	1,019,509,106,360
Pinjaman yang diterima / <i>Borrowings</i>	-	-	-	1,569,504,383,945	-	1,569,504,383,945
Bunga yang masih harus dibayar / Accrued interest	-	-	-	-	-	-
Jumlah liabilitas keuangan / Total financial liabilities	7,992,754,140,453	1,182,475,774,611	64,422,114,965	19,520,000,487,585	-	28,759,652,517,614
Gap repricing suku bunga - kotor / Gross interest repricing gap	(5,055,005,538,003)	(603,720,728,507)	22,956,555,638,420	(14,171,547,909,084)	-	3,126,281,460,801
2024						
	< 3 bulan / < 3 month	3 - 12 Bulan / 3 - 12 Month	> 12 Bulan / > 12 Month	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non interest	Jumlah / Total
Aset keuangan / Financial Assets						
Kas / <i>Cash</i>	1,463,869,502,450	-	-	-	-	1,463,869,502,450
Giro pada BI / <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>	-	-	-	3,343,533,751,313	-	3,343,533,751,313
Giro pada bank lain / <i>Current accounts with other banks</i>	-	-	-	61,528,653,394	-	61,528,653,394
Penempatan pada BI dan Bank lain / <i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>	-	-	-	654,139,378,387	-	654,139,378,387
Obligasi korporasi / <i>Corporate bonds</i>	-	-	-	242,936,230,490	-	242,936,230,490
Obligasi pemerintah / <i>Government bonds</i>	-	-	-	1,977,075,297,610	-	1,977,075,297,610
Reksadana / <i>Mutual fund</i>	-	-	1,463,869,502,450	-	-	1,463,869,502,450
Kredit yang diberikan / <i>Loans</i>	906,596,250,603	672,567,001,213	20,214,770,234,245	-	-	21,793,933,486,061
Bunga yang masih harus diterima / Accrued interest receivable	86,642,350,138	-	-	-	-	86,642,350,138
Jumlah Aset keuangan / Total financial assets	2,457,108,103,191	672,567,001,213	21,678,639,736,695	6,279,213,311,194	-	31,087,528,152,293
Dikurangi / Less:						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for impairment losses	(208,808,337,392)	(20,003,821,680)	(402,374,814,751)	(4,064,358,995)	-	(635,251,332,818)
Bersih / Net	2,248,299,765,799	652,563,179,533	21,276,264,921,944	6,275,148,952,199	-	30,452,276,819,475



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Resiko Pasar (lanjutan)

1. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

	2024					
	< 3 bulan / < 3 month	3 - 12 Bulan / 3 - 12 Month	> 12 Bulan / > 12 Month	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga /	Jumlah / Total
Liabilitas keuangan / Financial liabilities						
Simpanan nasabah/ Deposit from Customers	3,320,462,152,783	1,284,699,502,084	68,264,386,103	20,012,662,676,054	-	24,686,088,717,024
Simpanan dari Bank Lain Deposit from other customers	559,894,098,133	-	-	18,283,494,255	-	578,177,592,388
Pinjaman yang diterima / Borrowings	-	-	-	75,984,704,425	-	75,984,704,425
Bunga yang masih harus dibayar / Accrued interest	7,617,188,400	-	-	-	-	7,617,188,400
Jumlah liabilitas keuangan / Total financial liabilities	3,887,973,439,316	1,284,699,502,084	68,264,386,103	20,106,930,874,734	-	25,347,868,202,237
Gap repricing suku bunga - kotor / Gross interest repricing gap	(1,639,673,673,517)	(632,136,322,551)	21,208,000,535,841	(13,831,781,922,535)	-	5,104,408,617,238

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2025. Jumlah sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva penghasilan.

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif Bank Papua terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2025:

31 Desember/December 31, 2025	
Perubahan basis poin / Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif / Impact to statements of comprehensive
+ 100 bps	182,352,537
- 100 bps	(182,352,537)

2. Risiko nilai tukar

Bank Papua tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank Papua tidak menghadapi risiko valuta asing.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Market Risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

	2024					
	< 3 bulan / < 3 month	3 - 12 Bulan / 3 - 12 Month	> 12 Bulan / > 12 Month	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga /	Jumlah / Total
Liabilitas keuangan / Financial liabilities						
Simpanan nasabah/ Deposit from Customers	3,320,462,152,783	1,284,699,502,084	68,264,386,103	20,012,662,676,054	-	24,686,088,717,024
Simpanan dari Bank Lain Deposit from other customers	559,894,098,133	-	-	18,283,494,255	-	578,177,592,388
Pinjaman yang diterima / Borrowings	-	-	-	75,984,704,425	-	75,984,704,425
Bunga yang masih harus dibayar / Accrued interest	7,617,188,400	-	-	-	-	7,617,188,400
Jumlah liabilitas keuangan / Total financial liabilities	3,887,973,439,316	1,284,699,502,084	68,264,386,103	20,106,930,874,734	-	25,347,868,202,237
Gap repricing suku bunga - kotor / Gross interest repricing gap	(1,639,673,673,517)	(632,136,322,551)	21,208,000,535,841	(13,831,781,922,535)	-	5,104,408,617,238

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank Papua as of December 31, 2025. The total sensitivity of statement of comprehensive income is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank Papua's statement of income and statement of comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2025:

2. Foreign exchange risk

Bank Papua do not have balances and transactions in foreign currencies. Thus, Bank Papua do not have foreign exchange risk.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

41. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang berasal dari proses internal, sumber daya manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal yang tidak memadai atau gagal.

Para identifikator risiko Bank Papua melibatkan pengelompokan kejadian risiko operasional, risiko mengidentifikasi risiko operasional yang material di cabang konvensional dan melaporkannya ke *Chief Risk Officer* setiap bulan dalam bentuk *checklist*.

Bank menerapkan Basic Indicator Approach, yang didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID), untuk menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Audit Internal Bank Papua bertanggung jawab untuk memantau risiko operasional dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. RMD memastikan bahwa identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian proses telah efektif dalam setiap aktivitas fungsional, produk atau jasa baru.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank Papua. RMD bertugas untuk memastikan bahwa Bank Papua telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), Bank Papua juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, dan prosedur yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritis pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha Bank Papua.

42. RISIKO HUKUM

Bank Papua melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan RMD dan Divisi Sekretariat Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

41. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

The risk identification of Bank Papua involves classifying operational risk events, identifying material operational risk at conventional branches and reporting them to the Chief Risk Officer on a monthly basis in the form of a checklist.

The Bank applies the Basic Indicator Approach, based on Circular Letter of Financial Services Authority Number 24 / SEOJK.03 / 2016 dated July 14, 2016 concerning Risk Weighted Asset Calculation (ATMR) for Operational Risk calculated by Basic Indicator Approach (PID), to calculate the need minimum capital (CAR) for operational risk. This function is performed by the Division of Risk Management.

The Bank Papua's Internal Audit Division is responsible for monitoring operational risk by conducting an appraisal on the implementation of risk management policies and procedures. The RMD ensures that the risk identification, measurement, monitoring and control processes are effective in each of the functional activities, new products or services.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by unit within Bank Papua. RMD ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each unit in conducting its daily transactions and activities in accurately, efficiently and timely manner.

In relation to business continuity in the event of a disaster condition, Bank Papua also has a Business Continuity Management (BCM) policy, a mechanism that combines strategies, policies and procedures developed to ensure the operational continuity of business functions. critical at a certain level of service in the event of a disruption or disaster. This policy covers all business units of Bank Papua.

42. LEGAL RISK

Bank Papua identifies legal risk based on Factor's causing risk's include legal litigation, absence of support in law or regulation and weaknesses agreement. At the same time, each division together with the RMD and Corporate Secretary Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted by the Management Risk Division and Corporate Secretary Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

42. RISIKO HUKUM (lanjutan)

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh RMD untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank Papua. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan revidi secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan mitra Bank Papua.

43. RISIKO REPUTASI

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup aspek keterbukaan, keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank Papua, perilaku karyawan Bank Papua dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank Papua.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko reputasi. Risiko reputasi Bank Papua dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, di bangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan *trend* perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Bank Papua. Dalam hal ini, Bank Papua melakukan analisis kesenjangan antara kinerja Bank Papua dengan harapan pemangku kepentingan/pemegang saham pada umumnya dan nasabah khususnya, dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi Sekretariat Bank.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

44. RISIKO STRATEJIK

Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa. Kemudian, setiap divisi dan kantor cabang mencatat dan menatausahakan setiap kejadian terkait risiko stratejik dalam suatu *database* yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Pengukuran risiko stratejik dilakukan berdasarkan kinerja Bank Papua, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu, dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

42. LEGAL RISK (continued)

Legal risk monitoring is conducted by the RMD to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with Bank Papua's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, the Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and conducts a regular review of agreements with counterparty.

43. REPUTATIONAL RISK

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including transparency aspects, customer complaints against Bank Papua, employee attitude when providing services to customers and Bank Papua's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the evaluation of the factors causing reputational risk. Bank of Papua's reputational risk is managed by the Risk Management Division, together with the Division of Corporate Secretariat and reported to Financial Services Authority.

In order to monitor the risk of reputation, a reputation built monitoring system is designed to routinely check transactions, regulatory, and technological trends, developments and changes that potentially affect the business of Bank Papua. In this case, Bank Papua perform a gap analysis between the performance of Bank Papua with stakeholders' expectations in general and customers in particular, and taking notes of the things that could potentially pose a reputation risk as well as by optimizing the function of Corporate Secretary of Bank.

In control reputational risk, the unit serves as corporate secretary is responsible for the implementation of policies relating to the handling and resolution of negative news or information to avoid counter-productive as well as for the functioning of the Public Service Obligation (PSO) in order to implement corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility).

44. STRATEGIC RISK

Strategic Risk identification is based on the risk factors that cause the functional activities, such as activities of lending, treasury and investment, as well as the operations and services. Then, each division and branch offices record and administer all strategic risk-related events in a database that can be used to project potential losses over a period of specific and functional activity.

Strategic risk measurement is based on the performance of Bank Papua, by comparing the results achieved (expected result) with the actual results, evaluate the functional performance of individuals, and examine the progress that has been achieved with the set targets.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

44. RISIKO STRATEGIK (lanjutan)

Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasaranannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, divisi dan kantor cabang meriviu strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank Papua, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

45. RISIKO KEPATUHAN

Dalam identifikasi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja. Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk diriviu.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank Papua untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk meriviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank Papua.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara teratur seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

46. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank Papua mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

44. STRATEGIC RISK (continued)

Strategic risk monitoring conducted by the Division of Risk Management at regular intervals by identifying functional strategies being executed along with its targets. Furthermore, the Board of Commissioners and Directors, divisions and branches reviewing basic strategy and focus on change management of the Bank Papua's, corporate lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

45. COMPLIANCE RISK

In compliance risk identification, the Compliance Unit made a list of rules and laws that apply to the entire unit. In addition, the Compliance Unit analyzes the events that led to the emergence of compliance risk and inform the matter to the Division of Risk Management and Risk Management Committee for review.

Compliance risk measurement performed to measure the potential losses caused by non-compliance and the inability of the Bank to comply with the regulations. The magnitude of compliance risks are estimated based on the Bank's ability to meet all the regulations of Bank Papua at the past and future. These activities include reviewing all penalties, litigation and complaints ever received by Bank Papua.

In monitoring compliance risk, Division of Risk Management, and Compliance Division tasked to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management on a regular basis to monitor compliance with all kinds of activities that could potentially pose a risk compliance.

46. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank Papua's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policies and processes from the previous period.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank has complied with all capital requirements.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN
PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

46. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED
CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Capital Adequacy Ratio

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets (RWA)*). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of common capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No.34/POJK.03/2016 concerning changes OJK Regulation No.11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The capital adequacy ratio as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Tanpa memperhitungkan risiko pasar	19,611,909,242,883	19,961,606,910,329	Without considering - market risk
- Dengan memperhitungkan risiko pasar dan kredit	16,001,331,122,883	16,534,928,033,871	Considering market - and credit risk
- Dengan memperhitungkan risiko operasional	19,842,279,122,883	3,590,663,876,458	Considering - operational risk
Modal			Capital
- Modal inti utama	4,303,975,212,268	4,366,941,505,837	Common capital -
- Modal pelengkap	199,632,420,796	207,227,127,011	Supplementary capital -
Jumlah modal	4,503,607,633,064	4,574,168,632,848	Total capital
Rasio kecukupan modal			Capital adequacy ratio
- Tanpa memperhitungkan risiko pasar	22.96%	22.91%	Without considering - market risk
- Dengan memperhitungkan risiko pasar dan kredit	28.15%	27.66%	Considering market - and credit risk
- Dengan memperhitungkan risiko operasional	22.70%	127.39%	Considering - operational risk
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang tanpa memperhitungkan risiko pasar	21.95%	21.88%	Ratio of core capital to risk weighted assets without market risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank Papua	22.73%	22.73%	Minimum capital adequacy ratio required by Bank Papua
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	9.00%	9.00%	Minimum capital adequacy ratio required by Financial Services Authority



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025, yang masing-masing sebesar:

	2025	2024
Giro Wajib Minimum:		
- GWM Primer	3.90%	6.40%
Harian *)	0.00%	0.00%
Rata - rata *)	3.90%	6.40%
- PLM **)	4.00%	5.00%

*) Berdasarkan PADG Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025, Bank mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah pada 31 Desember 2025 sebesar 5,10% karena Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank pada 31 Desember 2025 yang seharusnya sebesar 9,00% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 9,00% menjadi sebesar 3,90% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 3,90%.

**) Berdasarkan PADG Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025, kebijakan pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan sebesar 4,00%.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Giro RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank dibawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional bank and Minimum Statutory Reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.

As of 31 December 2024 and 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve complied with Bank Indonesia (BI) Regulation PBI No. 24/4/PBI/2022 dated 1 March 2022 and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) No. 8 years 2022 dated Maret 27, 2025, which are as follows:

	2025	2024	Statutory Reserves:
			Primary Minimum Statutory Reserve -
			Daily
			Average
			PLM **) -

*) Based on PADG No. 8/2025 dated 27 March 2025, Bank gets incentives in the form of relaxation of the Statutory Reserves in Rupiah on 31 December 2025 amounting to 5.10% because Bank provides funds for certain and inclusive economic activities. The Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled by the Bank on 31 December 2025 which should be 9.00% with daily provisions of 0.00% and an average of 9.00% become 3.90% with daily provisions of 0.00% and an average of 3.90%.

**) Based on PADG No. 23/2025 dated 20 October 2025, the policy regarding fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer (MLPB) is set at 4.00%.

Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Sukuk of Bank Indonesia (SukBI), and/or Government Securities (SBN). RIM Current Account is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's RIM is below the minimum of RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's RIM is above the maximum of RIM targeted by Bank Indonesia (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below Bank Indonesia requirement of 14%



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar:

	2025	2024
Giro Wajib Minimum:		
- GWM Primer *)	6.60%	7,38%
- Harian	0.00%	0.00%
- Rata - rata	9.00%	7,38%
- PLM	4.00%	5.00%

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank Papua telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 5.

b. Giro pada Bank Lain

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

c. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan sebagai lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 7.

d. Efek-efek

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

	2025		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian/ Allowance for	Bersih/ Net
Lancar	4,881,313,117,089	(105,754,073)	4,881,207,363,016
Kurang lancar	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	4,881,313,117,089	(105,754,073)	4,881,207,363,016

Current
Substandard
Loss
Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

The ratio of the Minimum Statutory Reserve requirement for its Rupiah accounts as of 31 December 2025 and 2024, are as follows:

	2025	2024
Statutory Reserves:		
Primary Minimum Statutory Reserve	6.60%	7,38%
Daily	0.00%	0.00%
Average	9.00%	7,38%
PLM	4.00%	5.00%

As of December 31, 2025 and 2024, Bank Papua has complied with Bank Indonesia regulations concerning the Statutory Reserves Ratio for Commercial Bank.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 5.

b. Current accounts with Other Banks

By Financial Service Authority Rule collectibility

All current accounts with other banks as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 6.

c. Placements with other banks and Bank Indonesia

By Financial Service Authority Rule collectibility

All placements with other banks and Bank Indonesia as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

The further disclosures on placement with other banks and Bank Indonesia are presented in Note 7.

d. Marketable securities

By Financial Service Authority Rule collectibility



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

d. Efek-efek (lanjutan)

d. Marketable securities (continued)

	2024			
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian/ Allowance for	Bersih/ Net	
Lancar	4,759,514,743,804	(121,535,374)	4,759,393,208,430	Current
Kurang lancar	-	-	-	Substandard
Macet	-	-	-	Loss
Jumlah	4,759,514,743,804	(121,535,374)	4,759,393,208,430	Total

Pengungkapan lebih lanjut pada efek-efek diungkapkan pada Catatan 8.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 8.

e. Pinjaman yang diberikan

e. Loan

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025			
	Pokok / Principal	Penyisihan / Allowance	Bersih / Net	
Lancar	20,747,026,255,448	(70,485,505,159)	20,676,540,750,289	Current
Dalam perhatian khusus	1,048,904,186,641	(40,621,842,952)	1,008,282,343,689	Special mention
Kurang lancar	150,728,105,429	(19,142,037,985)	131,586,067,444	Substandard
Diragukan	55,207,014,479	(16,345,137,129)	38,861,877,350	Doubtful
Macet	551,342,939,759	(324,846,455,271)	226,496,484,488	Loss
Jumlah	22,553,208,501,756	(471,440,978,496)	22,081,767,523,260	Total

	2024			
	Pokok / Principal	Penyisihan / Allowance	Bersih / Net	
Lancar	20,644,211,388,047	(200,620,500,285)	20,443,590,887,762	Current
Dalam perhatian khusus	636,213,494,204	(54,681,926,775)	581,531,567,429	Special mention
Kurang lancar	42,384,810,238	(11,742,680,776)	30,642,129,462	Substandard
Diragukan	62,516,124,240	(29,374,360,572)	33,141,763,668	Doubtful
Macet	408,607,669,332	(334,767,505,416)	73,840,163,916	Loss
Jumlah	21,793,933,486,061	(631,186,973,824)	21,162,746,512,237	Total

	2025					
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/Total
Konsumsi / Consumer	11,966,252,865,341	222,906,747,242	8,959,136,103	11,353,577,651	54,566,692,710	12,264,039,019,047
Modal kerja / Working Capital	1,703,086,004,536	128,390,245,692	24,003,920,625	22,666,997,264	257,519,085,744	2,135,666,253,861
Investasi / Investment	543,842,557,501	71,574,170,574	101,139,567,272	2,538,475,345	93,951,311,140	813,046,081,832
Sindikasi / Syndicated	5,162,502,941,770	471,015,594,340	-	-	1,726,392,222	5,635,244,928,332
Karyawan / Employees	694,431,015,016	8,183,076,271	497,203,372	1,336,938,170	3,960,802,149	708,409,034,978
Program Pemerintah / Government Program	676,910,871,284	146,834,352,522	16,128,278,057	17,311,026,049	139,618,655,794	996,803,183,706
Jumlah/Total	20,747,026,255,448	1,048,904,186,641	150,728,105,429	55,207,014,479	551,342,939,759	22,553,208,501,756
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Allowance for impairment losses	(70,485,505,159)	(40,621,842,952)	(19,142,037,985)	(16,345,137,129)	(324,846,455,271)	(471,440,978,496)
Neto	20,676,540,750,289	1,008,282,343,689	131,586,067,444	38,861,877,350	226,496,484,488	22,081,767,523,259

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

e. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

e. Loan (continued)

	2024					
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/Total
Konsumsi / <i>Consumer</i>	11,078,443,274,034	233,376,376,453	22,451,806,524	22,262,671,989	170,164,399,647	11,526,696,528,646
Modal kerja / <i>Working Capital</i>	1,886,993,225,352	103,446,359,680	12,560,277,626	4,266,134,379	167,690,645,895	2,174,956,642,933
Investasi / <i>Investment</i>	597,897,251,013	185,012,327,337	5,409,887,617	32,139,189,359	64,187,758,307	884,846,413,633
Sindikasi / <i>Syndicated</i>	6,205,278,369,695	96,622,362,458	-	1,726,392,222	-	6,303,627,124,375
Karyawan / <i>Employees</i>	683,020,145,705	4,074,814,979	174,696,286	335,813,103	3,547,095,117	691,152,565,190
Program pemerintah / Government program	192,579,122,248	13,681,253,297	1,788,142,185	1,785,923,188	3,017,770,366	212,852,211,284
Jumlah / <i>Total</i>	20,644,211,388,047	636,213,494,204	42,384,810,238	62,516,124,240	408,607,669,332	21,793,933,486,061
Penyisihan kerugian penurunan nilai / <i>Allowance for impairment losses</i>	(200,620,500,285)	(54,681,926,775)	(11,742,680,776)	(29,374,360,572)	(334,767,505,416)	(631,186,973,824)
Neto	20,443,590,887,762	581,531,567,429	30,642,129,462	33,141,763,668	73,840,163,916	21,162,746,512,237

Pengungkapan lebih lanjut pada pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 10.

The further disclosures on loans are presented in Note 10.

Berdasarkan sektor ekonomi

By sector economic types

	2025						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah Tangga	13,154,440,795,361	363,973,474,829	24,631,048,249	26,736,028,172	194,117,921,457	13,763,899,268,068	Household
Konstruksi	4,221,007,718,511	143,901,175,355	26,049,720	293,523,826	115,159,223,735	4,480,387,691,147	Construction
Hotel, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	622,703,121,709	337,946,968,443	122,092,114,453	517,532,320	10,828,352,126	1,094,088,089,051	Hotel, food and beverages
Perdagangan besar dan eceran	673,989,762,757	93,329,961,860	3,909,940,110	27,008,316,963	101,864,080,745	900,102,062,435	Wholesale and groceries
Pertambangan dan penggalian	544,259,980,749	4,958,079	-	-	-	544,264,938,828	Mining and excavation
Aktivitas keuangan dan asuransi	317,218,719,199	-	-	-	11,617,885,770	328,836,604,969	Financial and sinsurance
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	363,371,431,404	35,921,125,012	-	-	63,593,973,945	462,886,530,361	Government administration, defense and social securities
Industri Pengolahan	310,413,937,383	5,602,057,676	12,053,504	162,777,733	5,066,201,433	321,257,027,729	activities and groceries
Pengangkutan dan pergudangan	240,835,219,695	59,005,459,013	-	-	16,269,901,152	316,110,579,860	Transport and warehousing
Listrik, gas, uap/air panas dan Udara dingin	209,806,427,664	-	-	-	-	209,806,427,664	Electricity, gas, steam/hot water and cold air
Pertanian, perburuan dan kehutanan	53,881,174,719	2,420,758,987	56,899,393	179,857,250	6,817,365,991	63,356,056,340	Agriculture, hunting and forestry
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	13,799,172,433	3,069,281,406	-	-	10,917,505,292	27,785,959,131	Leasing and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support
Saldo dipindahkan	20,725,727,461,584	1,045,175,220,660	150,728,105,429	54,898,036,264	536,252,411,646	22,512,781,235,583	Carrying amount



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

e. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

e. Loan (continued)

Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

By sector economic types (continued)

2025							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Saldo pindahan	20,725,727,461,584	1,045,175,220,660	150,728,105,429	54,898,036,264	536,252,411,646	22,512,781,235,583	Carrying forward
Real estate, usaha							Real estate,
persewaan,							rent, and
dan jasa perusahaan	8,899,560,163	2,085,873,025	-	188,397,537	9,654,470,988	20,828,301,713	service company
Pengelolaan air,							Water management, waste
Pengelolaan air limbah							water management,
pengelolaan dan daur							waste management
ulang sampah, dan							and recycling, and
aktivitas remediasi	1,027,006,930	-	-	-	1,245,074,043	2,272,080,973	remediation activities
Aktivitas kesehatan							Human health
manusia dan aktivitas							activities and
sosial	1,438,884,447	949,696,393	-	-	832,266,999	3,220,847,839	social activities
Aktivitas rumah tangga							Household activities
sebagai pemberi kerja	1,669,599,705	283,530,863	-	-	656,269,676	2,609,400,244	as employers
Aktivitas jasa lainnya	524,873,218	396,522,839	-	-	1,477,818,234	2,399,214,291	social service lies
Informasi dan							Information and
komunikasi	1,565,649,114	6,666,098	-	120,580,678	1,224,628,173	2,917,524,063	communication
Jasa pendidikan	2,978,884,194	-	-	-	-	2,978,884,194	Education service
Aktivitas profesional,							Professional, scientific
ilmiah dan teknis	2,528,249,565	-	-	-	-	2,528,249,565	and technical activity
Kesenian, hiburan							Arts, entertainment
dan rekreasi	18,750,150	6,676,763	-	-	-	25,426,913	and recreation
Bukan lapangan usaha	647,336,378	-	-	-	-	647,336,378	Not in business sector
Jumlah	20,747,026,255,448	1,048,904,186,641	150,728,105,429	55,207,014,479	551,342,939,759	22,553,208,501,756	Total
Penyisihan kerugian							Allowance for
penurunan nilai	(70,485,505,159)	(40,621,842,952)	(19,142,037,985)	(16,345,137,129)	(324,846,455,271)	(471,440,978,496)	impairment losses
Bersih	20,676,540,750,289	1,008,282,343,689	131,586,067,444	38,861,877,350	226,496,484,488	22,081,767,523,260	Net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

e. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

e. Loan (continued)

	2024						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah Tangga	11,763,166,303,064	237,451,191,435	22,626,502,809	22,598,485,092	173,711,494,767	12,219,553,977,167	Household
Konstruksi	4,487,410,073,672	133,308,371,475	1,782,317,559	2,242,138,856	100,502,790,686	4,725,245,692,248	Construction
Hotel, Penyediaan							Hotel,
akomodasi dan penyediaan							food
makan minum	975,501,733,835	134,651,568,652	7,175,200,867	29,460,092,922	2,418,549,429	1,149,207,145,705	and beverages
Perdagangan besar							Wholesale and
dan eceran	696,581,660,506	104,926,904,863	7,738,713,691	5,759,002,134	81,684,598,357	896,690,879,551	groceries
Pertambangan							Mining and
dan penggalian	609,533,504,993	-	-	-	-	609,533,504,993	excavation
Aktivitas keuangan							Financial and
dan asuransi	499,318,740,305	-	-	-	11,435,190,007	510,753,930,312	sinsurance
Administrasi pemerintahan,							Government administration,
pertahanan dan jaminan							defense and
sosial wajib	430,293,911,042	-	-	-	-	430,293,911,042	social securities
Industri Pengolahan	360,663,409,457	1,125,204,377	-	3,499,617	6,197,581,382	367,989,694,833	activities and groceries
Pengangkutan							Transport and
dan pergudangan	291,270,768,963	10,833,284,469	5,602,271	-	4,150,331,864	306,259,987,567	warehousing
Listrik, gas, uap/air panas							Electricity, gas, steam/hot water
dan Udara dingin	278,093,822,307	-	-	-	-	278,093,822,307	and cold air
Pertanian, perburuan							Agriculture, hunting
dan kehutanan	216,854,003,427	8,116,268,836	2,644,372,176	2,015,670,369	3,023,311,986	232,653,626,794	and forestry
Aktivitas penyewaan							Leasing and leasing
dan sewa guna usaha							activities without
tanpa hak opsi,							option rights,
ketenagakerjaan, agen							employment, travel
perjalanan dan penunjang							agents and other
usaha lainnya	14,124,843,281	416,274,749	-	-	11,240,734,256	25,781,852,286	business support
Real estate, usaha							Real estate,
persewaan,							rent, and
dan jasa perusahaan	8,921,414,136	4,764,784,648	349,112,192	275,107,183	8,168,865,126	22,479,283,285	service company
Pengelolaan air,							Water management, waste
Pengelolaan air limbah							water management,
pengelolaan dan daur							waste management
ulang sampah, dan							and recycling, and
aktivitas remediasi	3,388,760,348	15,277,775	62,988,673	-	1,358,740,545	4,825,767,341	remediation activities
Aktivitas kesehatan							Human health
manusia dan aktivitas							activities and
sosial	2,859,295,811	355,496,368	-	3,184,999	834,407,975	4,052,385,153	social activities
Aktivitas rumah tangga							Household activities
sebagai pemberi kerja	1,511,776,897	8,171,864	-	158,943,066	1,154,643,141	2,833,534,968	as employers
Aktivitas jasa lainnya	1,271,903,311	26,123,612	-	-	1,448,856,527	2,746,883,450	social service ties
Informasi dan							Information and
komunikasi	409,944,856	210,824,690	-	-	1,277,573,287	1,898,342,833	communication
Jasa pendidikan	1,715,782,393	3,746,395	-	-	-	1,719,528,788	Education service
Aktivitas profesional,							Professional, scientific
ilmiah dan teknis	1,193,489,925	-	-	-	-	1,193,489,925	and technical activity
Kesenian, hiburan							Arts, entertainment
dan rekreasi	64,026,773	-	-	-	-	64,026,773	and recreation
Bukan lapangan usaha	62,218,740	-	-	-	-	62,218,740	Not in business sector
Jumlah	20,644,211,388,042	636,213,494,208	42,384,810,238	62,516,124,238	408,607,669,335	21,793,933,486,061	Total
Penyisihan kerugian							Allowance for
penurunan nilai	(200,620,500,285)	(54,681,926,775)	(11,742,680,776)	(29,374,360,572)	(334,767,505,416)	(631,186,973,824)	impairment losses
Bersih	20,443,590,887,757	581,531,567,433	30,642,129,462	33,141,763,666	73,840,163,919	21,162,746,512,237	Net



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

47. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

e. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

e. Loan (continued)

Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

	2025	2024
Rumah Tangga	245,484,997,878	218,936,482,668
Hotel, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	133,437,998,899	39,053,843,218
Perdagangan besar dan eceran	132,782,337,818	95,182,314,182
Konstruksi	115,478,797,281	104,527,247,101
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	63,593,973,945	-
Pengangkutan dan pergudangan	16,269,901,152	4,155,934,135
Aktivitas keuangan dan asuransi	11,617,885,770	11,435,190,007
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	10,917,505,292	11,240,734,256
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	9,842,868,525	8,793,084,501
Pertanian, Perikanan dan kehutanan	7,054,122,634	7,683,354,531
Industri Pengolahan	5,241,032,670	6,201,080,999
Aktivitas jasa lainnya	1,477,818,234	1,448,856,527
Informasi dan komunikasi	1,345,208,851	1,277,573,287
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	1,245,074,043	1,421,729,218
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	832,266,999	837,592,974
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi	656,269,676	1,313,586,207
Jumlah	757,278,059,667	513,508,603,811
Cadangan kerugian penurunan nilai	(360,333,630,385)	(375,884,546,764)
Bersih	396,944,429,282	137,624,057,047

Household
Hotel, food and beverages
Wholesale and groceries
Construction
Government administration, defense and social securities
Transport and warehousing
Financial and insurance activities
Leasing and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support
Real estate, rent, and service company
Agriculture, Fishery, and forestry
Manufacturing Industry
Other service activities
Information and communication
Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities
Human health activities and social activities
Household activities as employers; activities that produce goods and services by households that are used to meet
Total
Allowances for impairment losses
Net

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL - bruto) Bank Papua, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, terhadap jumlah pinjaman pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang diberikan sebesar 3,36% dan 2,36%.

The ratio of gross non-performing loans (gross NPL ratio) of Bank Papua to total loans, based on Bank Indonesia Regulations (PBI) as of December 31, 2025 and 2024 were 3,36% and 2.36% respectively.

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Restructured loans by collectibility are as follows

	2025	2024
Lancar	1,947,014,115,761	2,100,180,618,151
Dalam perhatian khusus	541,762,215,075	259,968,395,232
Kurang lancar	135,273,981,622	19,450,608,745
Diragukan	24,046,363,629	16,865,330,997
Macet	145,278,406,668	60,647,851,906
Jumlah	2,793,375,082,755	2,457,112,805,031

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Total

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp304.598.751.919 dan Rp96.963.791.648.

Restructured loans and those categorized as non-performing loan amounted to Rp304,598,751,919 and Rp96,963,791,648 as of December 31, 2025 and 2024 respectively.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

48. REKLASIFIKASI AKUN**48. ACCOUNT RECLASSIFICATION**

	2024			
	Sebelum reklasifikasi/ <i>before reclassification</i>	reklasifikasi/ <i>reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>after reclassification</i>	
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Pendapatan bunga	2,313,095,103,576	(6,401,878,467)	2,306,693,225,109	Interest income
Beban bunga	(318,823,268,634)	6,375,331,622	(312,447,937,012)	Interest expense
Jumlah pendapatan bunga - bersih	1,994,271,834,942	(26,546,845)	1,994,245,288,097	Total interest income - net
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukan	-	39,221,931,953	39,221,931,953	Recovery of assets written off
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	3,564,275,989	3,564,275,989	Unrealized gain from changes in fair value of financial assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Pendapatan operasional lain lain	175,354,009,778	(34,661,636,761)	140,692,373,017	Other Operating Income
Jumlah	175,354,009,778	8,124,571,181	183,478,580,959	Total
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	(1,722,692,714)	(1,722,692,714)	Unrealized loss from changes in fair value of financial assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Beban operasional lain-lain	-	(6,375,331,622)	(6,375,331,622)	Other operational expenses
Jumlah	-	(8,098,024,336)	(8,098,024,336)	Total

49. KONTINJENSI**49. CONTINGENCIES**

Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

- a. Gugatan perkara perdata Nomor 104/Pdt.Bth/2022/PN Semarang, banding nomor 75/Pdt.U/2022/PN.Smg PT Bank Papua Cab. Jakarta sebagai pembantah dan Tim Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer, Muhamad Arifudin, SH, MH Dkk (Kurator) sebagai terbantah.
- Inti permasalahan gugatan :
 Perdata khusus : Perlawanan eksekusi Putusan No. 4/Pdt.Sus Gugatan lainlain/2020/PN Semarang
 Progres Penanganan Perkara:
 Telah selesai (Inkracht). Putusan bantahan Bank Papua ditolak, pada tanggal 2 April 2024

In carrying out its business, The Company is not apart from any legal suits or claims concerned the compliance to contracts, agreements, government's law, and assets ownership. Up to statement of financial position completion date, there is several on-going lawsuits in the court, there are:

- a. Civil case lawsuit No. 104/Pdt.Bth/2022/PN Semarang, appeal number 75/Pdt.U/2022/PN.Smg PT Bank Papua Cab. Jakarta as the objector and the Curator Team of PT Perindustrian Njonja Meneer, Muhamad Arifudin, SH, MH et al. (Curator) as the objector.
- Core Material of Lawsuit:
 Special Civil Code: Resistance to the execution of Decision No. 4/Pdt. Sus Other Claims/2020/PN Semarang
 Progress of Case Completion:
 Has been finalized (Inkracht). The objection ruling from Bank Papua was rejected, on April 2, 2024



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

49. KONTINJENSI (lanjutan)

pada tahun 2024, terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya (Tim Kurator Njonja Meneer) dan Bank Papua mengembalikan sisa hasil penjualan sebesar Rp13.348.456.000 sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang kepailitan dan PKPU, yang menyatakan "kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator".

Sesuai dengan *Accounting Position Paper* manajemen, berdasarkan PSAK 237 paragraf 13b yaitu liabilitas kontinjensi ini tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontinjensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini:

1. kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; atau
2. kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan ini (karena tidak besar kemungkinannya (*not probable*) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik atau karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat).

Hal ini juga diperkuat dengan adanya evaluasi dari Divisi Hukum No.06/187/HUK.Lgl/2024 tanggal 30 Desember 2024. Sehingga provisi atas tuntutan hukum tidak diakui karena tidak memenuhi kriteria "*highly probable*".

- b. Gugatan Perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Jap di Pengadilan Negeri Jayapura a.n. Asanat Tresia Sabuin sebagai Penggugat dan Bank Papua sebagai Tergugat.

Inti Materi Gugatan:

Perdata: Perbuatan melawan hukum

Progres Penanganan Perkara:

Telah selesai (Inkracht). Sidang putusan kasasi tanggal 18 April 2024 hakim memutuskan menolak permohonan dari Pemohon kasasi Asnat T. Sabuin dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Pada putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 31 Juli 2025, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Asnat T. Sabuin.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

49. CONTINGENCIES (continued)

In 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Decision No. 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, which decided to accept and grant the plaintiff's lawsuit in its entirety (the Curator Team of Njonja Meneer), and Bank Papua is ordered to return the remaining proceeds from the sale amounting to Rp13,348,456,000 in accordance with the provisions of Article 60 of the Bankruptcy and PKPU Law, which states, "A creditor holding the rights as referred to in Article 55 paragraph (1) who exercises its rights must provide accountability to the curator regarding the proceeds from the sale of the collateral and hand over the remaining sale proceeds after deducting the debt, interest, and costs to the curator."

In accordance with the management Accounting Position Paper, based on PSAK 237 paragraph 13b, this contingent liability is not recognized as a liability because the contingent liability is one of the following:

1. potential liabilities because it is uncertain whether the entity has current obligations that will cause an outflow of resources containing economic benefits; or
2. present liabilities that do not meet the recognition criteria in this statement (because it is unlikely that the settlement of such obligations results in an outflow of resources containing economic benefits or because a reliable adequate estimate of the amount of the liability cannot be made).

This is also strengthened by the evaluation of the Legal Division No.06/187/HUK. Lgl/2024 dated December 30, 2024. So that the provision for lawsuits is not recognized because it does not meet the criteria of "*highly probable*".

- b. Civil Case Lawsuit Number 132/Pdt.G/2022/PN.Jap at the Jayapura District Court a.n. Asanat Tresia Sabuin as Plaintiff and Bank Papua as Defendant.

Core Material of the Lawsuit:

Civil: Acts against the law

Case Handling Progress:

Has been finalized (Inkracht). In the cassation ruling on April 18, 2024, the judge decided to reject the petition from the Cassation Applicant Asnat T. Sabuin and ordered the Applicant to pay the court fees.

In the Judicial Review (PK) decision dated July 31, 2025, the Supreme Court granted the petition for judicial review filed by the Applicant for Judicial Review, Asnat T. Sabuin.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

49. KONTINJENSI (lanjutan)

- c. Gugatan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Fakfak tanggal 3 November 2022 pada Pengadilan Negeri Fakfak antara Bustam (CV Bangkit Bersama) selaku Penggugat dan Bank Papua Cabang Fakfak selaku Tergugat. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Namun demikian, selanjutnya terdapat perkara baru dengan Nomor 2/Pdt.Bth/2025/PN Fakfak tanggal 27 Februari 2025 pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan Bank Papua sebagai Penggugat dan CV Bangkit Bersama sebagai

Progres Penanganan Perkara:
 Putusan dengan kesepakatan perdamaian tanggal 19 Juni 2025

- d. Gugatan Perkara perdata Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Mnd tanggal 26 September 2023 di Pengadilan Negeri Manado a.n. Rithasia sebagai Penggugat dan Bank Papua cabang Sorong sebagai Tergugat.

Inti Materi Gugatan:
 Perdata: Perbuatan melawan hukum
 Progres Penanganan Perkara:
 Putusan Kasasi Menolak Permohonan Kasasi Rithasia dan Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

- e. Gugatan Perkara Perdata No. 150/Pdt.G/2018/PN.Jap tanggal 19 September 2018 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Hendriko Manurung sebagai Penggugat, PT Bank Papua sebagai Tergugat I, PT Bank Papua KCU Jayapura sebagai Tergugat II, PT Bank Papua KC Sentani sebagai Tergugat ...
 Inti Materi Gugatan:
 Bahwa isi gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 Progres Penanganan Perkara:
 - Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 Maret 2019.
 - Bahwa atas putusan diatas Penggugat mengajukan upaya banding dan pada tanggal 20 September 2019 dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengeluarkan putusannya.
 - Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi.
 - Bahwa progres penanganan perkara ini per 31 Desember 2021 adalah menunggu putusan dari Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
 - Per 31 Desember 2023 masih menunggu putusan kasasi dan Bank Papua menang pada tingkat pertama.

- f. Gugatan Perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2018/PN.Jap tanggal 04 September 2018 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Hendriko Manurung sebagai Penggugat dan Direktur Utama Bank Papua sebagai Tergugat.

Inti Materi Gugatan:
 Bahwa isi gugatan ini adalah Wanprestasi. Penggugat menuduh Tergugat telah ingkar janji terhadap Kesepakatan Damai Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2017.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

49. CONTINGENCIES (continued)

- c. *Civil lawsuit Case No. 2/Pdt.Eks/2022/PN Fakfak dated 3 November 2022 was filed at the District Court of Fakfak by Bustam (CV Bangkit Bersama) as Plaintiff against Bank Papua, Fakfak Branch as Defendant, which has obtained final and binding legal force (inkracht van gewijsde).*

Subsequently, a new case No. 2/Pdt.Bth/2025/PN Fakfak dated 27 February 2025 was filed at the District Court of Fakfak with Bank Papua as Plaintiff and CV Bangkit Bersama as Defendant.

*Case Handling Progress:
 A judgment incorporating a settlement agreement dated June 19, 2025*

- d. *Civil Case Lawsuit Number 612/Pdt.G/2023/PN.Mnd dated September 26 2023 at the Manado District Court a.n. Rithasia as Plaintiff and Bank Papua Sorong branch as Defendant.*

*Core Material of the Lawsuit:
 Civil: Acts against the law
 Case Handling Progress:
 Still in the cassation process, on October 30, 2024, the contract submission.*

- e. *Civil Lawsuit No. 150/Pdt.G/2018/PN.Jap on September 19, 2018 at the Jayapura District Court on behalf of Hendriko Manurung as Plaintiff, PT Bank Papua as Defendant I, PT Bank Papua KCU Jayapura as Defendant II, PT Bank Papua KC Sentani as Defendant III.*

*Core Material of Lawsuit:
 That the content of the lawsuit is Illegal Acts.
 Progress of Case Completion:
 - That this case will be decided by the First District Court on March 12, 2019.
 - That upon the decision, the Plaintiff submitted an appeal and on September 20 2019 and the Jayapura High Court issued its decision.
 - That upon the decision, the Plaintiff filed an cassation.
 - That the progress of this case as of December 31, 2021 is waiting for a decision of the cassation from of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
 - As of December 31, 2023, the cassation decision is still waiting and Bank Papua has won at the first instance.*

- f. *Civil Lawsuit No. 144/Pdt.G/2018/PN.Jap on September 4, 2018 at the Jayapura District Court on behalf of Hendriko Manurung as Plaintiff and President Director of Bank Papua as Defendant.*

*Core Material of Lawsuit:
 That the contents of this lawsuit are Default. The Plaintiff accused the Defendant of breaking promise of the Peace Treaty Number 95/PKS-BPD/XII/2013 dated December 31, 2017.*



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

49. KONTINJENSI (lanjutan)

Progres Penanganan Perkara:

- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 Maret 2019.
 - Bahwa atas putusan diatas Penggugat mengajukan upaya banding dan pada tanggal 20 September 2019 dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengeluarkan putusannya.
 - Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi.
 - Bahwa progres penanganan perkara ini per 31 Desember 2021 adalah menunggu putusan dari Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
 - Per 31 Desember 2023 masih menunggu putusan kasasi dan Bank Papua menang pada tingkat pertama.
- g. Gugatan Perkara perdata Nomor 274/Pdt.G/2024/PN Jap Tanggal 02 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jayapura Kristiuan Griapon ,SE sebagai Penggugat dan Bank Papua KCP Genyem sebagai Tergugat.
- Progres Penanganan Perkara:**
- Sidang Tanggal 17 September 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Saksi dari Penggugat.
- h. Gugatan Perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Son Tanggal 17 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Sorong a.n. Stefina Disma Arlinda (Dir. PT Jaya Molek Perkasa) sebagai Penggugat dan Bank Papua cabang Teminabuan sebagai Tergugat.
- Progres Penanganan Perkara:**
- Proses Banding oleh Pembanding (Tgl 16 September 2025 Penyerahan Memori Banding) kepada PT. Papua Barat dan Pihak Terbanding (PT Bank Papua Kc.Teminabuan).

50. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal pelaporan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
As of December 31, 2025
and for the year then ended
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

49. CONTINGENCIES (continued)

Progress of Case Completion:

- That this case will be decided by the First District Court on March 12, 2019.
 - That upon the decision, the Plaintiff submitted an appeal and on September 20 2019 and the Jayapura High Court issued its decision.
 - That upon the decision, the Plaintiff filed an cassation.
 - That the progress of this case as of December 31, 2021 is waiting for a decision of the cassation from of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
 - As of December 31, 2023, the cassation decision is still waiting and Bank Papua has won at the first instance.
- g. Civil Lawsuit Case Number 274/Pdt.G/2024/PN Jap dated 02 December 2024 at the Jayapura District Court, Kristiuan Griapon, S.E. as Plaintiff and Bank Papua KCP Genyem as Defendant.
- Case Handling Progress:**
- Hearing on 17 September 2025 with the agenda of examination of witness from the Plaintiff.
- h. Civil Lawsuit Case Number 6/Pdt.G/2025/PN Son dated 17 January 2025 at the Sorong District Court in the name of Stefina Disma Arlinda (Dir. PT Jaya Molek Perkasa) as Plaintiff and Bank Papua Teminabuan Branch as Defendant.
- Case Handling Progress:**
- Appeal process by the Appellant (dated 16 September 2025 submission of Memorandum of Appeal) to PT. Papua Barat and the Respondent (PT Bank Papua Kc. Teminabuan).

50. SUBSEQUENT EVENT

There is no subsequent event that has to be disclosed in the financial statements.



Indeks OJK

OJK Index

Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Halaman <i>Page</i>	Regulasi <i>Regulations</i>
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓	POJK 29
KILAS KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHTS			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	13-14	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	14	
	3. Laba Operasional.	14	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	14	
	5. Laba bersih.	14	
	6. Laba (rugi).	14	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	14	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	N/A	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	14	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	N/A	
	11. Laba (rugi) per saham.	14	SEOJK 9
	12. Jumlah aset.	12	SEOJK 16
	13. Jumlah liabilitas.	12	
	14. Jumlah ekuitas.	13	
	15. Dana pihak ketiga.	12, 16	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	12	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	15	
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	15	SEOJK 16
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan.	15	
	20. Rasio lancar.	15	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	15	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	15	
	23. Rasio KPMM.	15	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	15	
	25. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL).	15	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	15	
	27. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR).	15	
	28. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	15	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	15	



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	15	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	15	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	15	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a. Jumlah saham yang beredar. b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan. c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan. d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	17	SEOJK 16
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan Efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi. b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham. c. Bonus, jumlah Efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham. d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi. e. Jumlah Efek konversi yang dilaksanakan (jika ada). f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	17	SEOJK 16
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	17	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	17	SEOJK 16



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	36-37	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	37	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	38	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	38-39	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	39-40	
	f. Struktur organisasi.	31	
	g. Aktivitas utama.	30	
	h. Teknologi informasi.	32-33	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	33-36	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	34-35	SEOJK 9
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	33-38	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	30-31	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	30-31	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	43	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	43	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	43	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	32	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	40	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	41	
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	48-51	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	51-52	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	52-53	



Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Halaman <i>Page</i>	Regulasi <i>Regulations</i>
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	56	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	55	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	58-59	SEOJK 16 POJK 29
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	62	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
	Memuat informasi antara lain:		
	1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi:		SEOJK 9 SEOJK 16
	a. Alamat		
	b. Nomor telepon		
	c. Alamat surat elektronik		
	d. Alamat situs web		
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi:	64-72, 149	
	a. Alamat		
	b. Nomor telepon		
	c. Alamat surat elektronik		
	d. Alamat situs web		
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	74-76	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	77	
	2. Misi Perusahaan	77	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	81-82	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	83-86	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	83-86	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	86-91	



Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Halaman <i>Page</i>	Regulasi <i>Regulations</i>
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	114-124	
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi.		
	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut.		SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	126-134	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	136-138	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	141	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	142	
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	142	
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	141	SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		
	a. Kepemilikan institusi lokal.	142	SEOJK 16
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	148	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	148	SEOJK 9 SEOJK 16



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan: Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi: - Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (sister company), Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder. - Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank. - Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	149	SEOJK 9
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan Efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	150	SEOJK 16
Informasi pencatatan Efek lainnya	Informasi pencatatan Efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	150	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: - Nama dan alamat. - Periode penugasan. - Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. - Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. - Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	151	SEOJK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	152	SEOJK 16



Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Halaman <i>Page</i>	Regulasi <i>Regulations</i>
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		SEOJK 9
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.	153-156	
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>).	673-675	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	237-259	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		SEOJK 9
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	238-259	SEOJK 16
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	238-259	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	238-259	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	d. Profitabilitas.	238-259	
	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	260-270	SEOJK 9
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	271-277	SEOJK 16
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/ pembiayaan) dan total aset.	304-315	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	14, 16, 238-291	
	5. Ekuitas.	277-278	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	279-299	
	7. Arus kas.	300-307	
	8. Suku bunga dasar kredit.		SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		311	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	308-311	SEOJK 16
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	312-315	
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>).	Penjelasan atas:		
	1. Rincian struktur modal	318-319	SEOJK 16
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>).	320	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	320	



Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Halaman <i>Page</i>	Regulasi <i>Regulations</i>
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.		
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.	321	SEOJK 16
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		
	1. Jenis investasi barang modal.	322-323	
	2. Tujuan investasi barang modal.	322-323	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	322-323	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	325-332	SEOJK 16
	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	334	
	2. Laba (rugi).	334	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	335	
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	4. Pemasaran.	335	
	5. Pengembangan SDM.	336	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	334-336	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	336	
	2. Laba (rugi).	336	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	337	
	4. Kebijakan dividen.	337	
	5. Pemasaran.	337	
	6. Pengembangan SDM.	338	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	336-338	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	232-234	SEOJK 9 SEOJK 16



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	339-340	SEOJK 16
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	340	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	340	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	340	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		
	1. Total perolehan dana.		
	2. Rencana penggunaan dana.		
	3. Rincian penggunaan dana.		
	4. Saldo dana.		
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).		
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.	333	SEOJK 16
	b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.		
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	341-351	SEOJK 16
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle).		
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms length principle).		



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut. i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	351-352	SEOJK 16
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	351-352	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	355	SEOJK 16
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	355	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	355	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	321	SEOJK 9



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:		
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.	386-417	SEOJK 16
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	418-420, 423-429	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi.	422-423	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	433-436	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:		
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).	436-439	SEOJK 16
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:		
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	439-442	SEOJK 16
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:		
	a. Bank yang bersangkutan.	484-485	SEOJK 13 POJK 17
	b. Bank lain.		
	c. Lembaga keuangan bukan bank.		
	d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.		



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	448-451	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris.	452-453	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	457-463	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	464-467	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	470-475	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.	56, 475	SEOJK 16
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:		
	a. Prosedur penilaian kinerja.	476-481	SEOJK 16
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	476-481	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.		
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.		



Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Halaman <i>Page</i>	Regulasi <i>Regulations</i>
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat: a. Nama. b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah. d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	-	SEOJK 16
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite. 2. Usia. 3. Kewarganegaraan. 4. Riwayat pendidikan. 5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite. b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada). c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. 6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit. 7. Uraian tugas dan tanggung jawab. 8. Pernyataan independensi komite audit. 9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada). 10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut. 11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.	491-493 491-493 489-490 495 497 495-497 498	SEOJK 16 POJK 17 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	502-503	SEOJK 16 POJK 17
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	502-503	
	7. Pernyataan independensi komite.	506	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	508	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	499-501	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>).	498-499	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	506-508	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	509	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang remunerasi.		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	512-514	SEOJK 16 POJK 17
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	512-514	
	7. Pernyataan independensi komite.	516	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	519-520	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	510-511	



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite.	510	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	517-519	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	520	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	524	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.	524	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.	524	
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	524-525		
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	527	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	534	
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	534	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	534-536	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	528-529	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	530-533	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal.	533	
9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	537-541		
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	584-585	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.	585	
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
Catatan: apabila diungkapkan.			



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	586-589	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Bank Nagari	587	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	593-594	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	595	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	608-617	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	619-620	SEOJK 16
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	620-621	
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	627	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	643	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup:		SEOJK 13
	a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.		
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).	b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.		
	Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		
		644	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	650-651	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	652	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	655	
Penerapan Tata Kelola Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi	499-503, 506-508, 580-583	POJK 45
	a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab.		
	b. Jumlah rapat yang dilakukan.		
	c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.		



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	579-580	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	577-578	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	578-579	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	578	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (clawback).	578-579	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	580	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	580-581	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. Dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	581	



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	581-582	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi <i>material risk takers</i> .	581	
	12. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	484-485	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	582	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/ atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	582	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	582-583	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	583	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	583	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	583	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	583	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: 1. Jumlah saham dan/atau opsi. 2. Jangka waktu pelaksanaan. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	657	SEOJK 16



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Uraian singkat mengenai pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	142, 484-485	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		
	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	659	
	2. Perlindungan bagi pelapor.	660	
	3. Penanganan pengaduan.	662	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	658	
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik.	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:		
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.	664	SEOJK 16
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	666-671	SEOJK 16
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	671	POJK 17
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan		678	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (<i>individu atau grup</i>) per posisi laporan	674-675	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		679-681	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		678, 682	SEOJK 13
Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	669	SEOJK 13
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	677	SEOJK 13



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/ atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	673	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		682	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	682	SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.	SR 22-27	
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan lingkungan hidup.	SR 38	
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	SR 44-45	
	d) Penjelasan Direksi.	SR 52-57	
	e) Tata kelola keberlanjutan.	SR 61-66	
	f) Kinerja keberlanjutan.	SR 81-142	
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	SR 143	
	h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada.	SR 144	
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.	SR 145	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√	
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/ atau	√	
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.	√	



Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulations
	4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	√	
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	√	
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√	
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.	√	
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	√	

KETERANGAN

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

SEOJK 13 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

POJK 17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

DESCRIPTION

SEOJK 16: Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

SEOJK 9: Financial Services Authority Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

SEOJK 13: Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

POJK 45: Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks.

POJK 17: Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.





Laporan Tahunan **2025**
Annual Report

**Memperkuat Pertumbuhan Inklusif melalui
Inovasi Berkelanjutan**

Enhancing Inclusive Growth through Sustainable Innovation

Alamat :

Jl. Ahmad Yani 5 - 7 Jayapura 99111,
Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara,
Kota Jayapura, Provinsi Papua